

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 6 TAHUN 2021

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 342 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional;

- c. bahwa dengan adanya krisis ekonomi akibat Pandemi Covid-19 dan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, sehingga akan mempengaruhi arah kebijakan pembangunan dan capaian target indikator kinerja daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah



Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau

Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Pembangunan Jangka Atas Rencana



Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

dan

BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Perubahan RPJMD melalui penyusunan RKPD setiap tahunnya.
- (2) Perangkat Daerah melaksanakan Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Sebelum RPJMD periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan RKPD berpedoman pada RPJPD, Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah terpilih berikutnya.



3. Ketentuan dalam Lampiran RPJMD diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 27 Agustus 2021

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 27 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



RAHMAT SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON PROVINSI  
JAWA BARAT (6/126/2021)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON  
NOMOR 6 TAHUN 2021  
TENTANG  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN  
CIREBON TAHUN 2019-2024**

I. UMUM

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu dalam Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diatur tentang perubahan RPJMD yang dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
- c. terjadi perubahan yang mendasar.

Berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019- 2024, maka diketahui hal-hal sebagai berikut:

- 1. krisis ekonomi akibat Pandemi Covid-19 yang terjadi dan berdampak sangat luas dan mendalam secara global, nasional, dan regional dimana Indonesia telah menetapkan sebagai bencana nasional terjadinya kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional;
- 2. terdapat perubahan kebijakan nasional disebabkan karena terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran, diantaranya:
  - a. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, maupun Pembiayaan Daerah;
  - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah; dan
  - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.



3. Selain perubahan kebijakan peraturan perundang-undangan, terbit pula beberapa peraturan yang menguatkan perlunya dilakukan perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, sebagai berikut:
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - b. Terdapat perubahan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sehingga ada beberapa Perangkat Daerah yang baru terbentuk belum sepenuhnya terakomodir dalam dokumen RPJMD.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 perlu diubah dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya dijadikan pedoman dalam menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Pelaksanaan Perubahan RPJMD dijabarkan lebih lanjut dalam RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Angka 1

Pasal 4

Cukup Jelas.

Angka 2

Pasal 9

Cukup Jelas.

Angka 3

Cukup jelas

### Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 57



# **PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 6 TAHUN 2021**

## **TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN CIREBON NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024**



Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan  
Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon  
Tahun Anggaran 2021



## DAFTAR ISI

|                    |     |
|--------------------|-----|
| DAFTAR ISI.....    | i   |
| DAFTAR GAMBAR..... | iii |
| DAFTAR TABEL.....  | vi  |

### BAB I – PENDAHULUAN

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| 1.1. Latar Belakang.....         | I-1  |
| 1.2. Dasar Hukum Penyusunan..... | I-9  |
| 1.3. Hubungan Antardokumen.....  | I-14 |
| 1.4. Maksud dan Tujuan.....      | I-17 |
| 1.5. Sistematika Penulisan.....  | I-18 |

### BAB II – GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

|  |        |
|--|--------|
| 2.1. Aspek Geografi dan Demografi.....   | II-1   |
| 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....  | II-37  |
| 2.3. Aspek Pelayanan Umum.....   | II-65  |
| 2.4. Aspek Daya Saing Daerah.....  | II-137 |
| 2.5. Evaluasi Capaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2019-<br>2020.....  | II-159 |
| 2.6. Standar Pelayanan Minimal.....  | II-161 |
| 2.7. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).....  | II-177 |
| 2.8. <i>Coporate Social Responsibility (CSR)</i> .....   | II-178 |
| 2.9. Kerjasama Daerah.....   | II-180 |
| 2.10. <i>Sustainable Development Goal's/SDG's</i> (Tujuan<br>Pembangunan Berkelanjutan/TPB) Kabupaten Cirebon..... | II-187 |

### BAB III – GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

|   |        |
|---|--------|
| 3.1. Kinerja Keuangan Masa<br>Lalu.....             | III-2  |
| 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu ..... | III-23 |
| 3.3. Kerangka Pendanaan.....                        | III-34 |
| 3.4. Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya.....      | III-54 |

### BAB IV – PERMASALAHN DAN ISU STRATEGIS

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| 4.1. Permasalahan pembangunan ..... | IV-1  |
| 4.2. Isu Strategis .....            | IV-13 |





|  |  |       |
|--|--|-------|
| <b>4.3.</b>  | Isu Strategis RPJMD Kabupaten Cirebon.....                 | IV-59 |
| <b>BAB V – VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN</b>                                    |  |       |
| 5.1.   | Visi .....   | V-3   |
| 5.2.   | Misi .....   | V-5   |
| 5.3.   | Tujuan dan Sasaran.....                                    | V-6   |
| 5.4.   | Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019-<br>2024.....      | V-27  |
| <b>BAB VI – KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>                      |  |       |
| 6.1  | Strategi Pembangunan Daerah.....                           | VI-2  |
| 6.2  | Arah Kebijakan Pembangunan Daerah.....                     | VI-6  |
| 6.3  | Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Spasial..... | VI-12 |
| 6.4  | Arah Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....    | VI-17 |
| 6.5  | Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024.....          | VI-20 |
| 6.6  | Program Pembangunan Daerah.....                            | VI-29 |
| <b>BAB VII – KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN<br/>PROGRAM PERANGKAT DAERAH</b> |  |       |
| 7.1  | Kerangka Pendanaan Pembangunan.....                        | VII-1 |
| 7.2  | Program Perangkat daerah.....                              | VII-6 |
| <b>BAB VIII – KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>                    |  |       |
| <b>BAB IX - PENUTUP</b>  |  |       |
| 9.1  | Pedoman Transisi.....                                      | IX-1  |
| 9.2  | Kaidah Pelaksanaan.....                                    | IX-3  |



## DAFTAR GAMBAR

|             |  |       |
|-------------|--|-------|
| Gambar 1.1  | Diagram Alir Penyusunan Perubahan RPJMD .....  | I-8   |
| Gambar 2.1  | Peta Administrasi Kabupaten Cirebon.....   | II-2  |
| Gambar 2.2  | Peta Morfologi.....  | II-7  |
| Gambar 2.3  | Peta Kemiringan Lahan.....   | II-9  |
| Gambar 2.4  | Peta Ketinggian lahan.....   | II-12 |
| Gambar 2.5  | Peta Geologi Kabupaten Cirebon.....  | II-13 |
| Gambar 2.6  | Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Cirebon...   | II-19 |
| Gambar 2.7  | Peta Curah Hujan Kabupaten Cirebon.....  | II-20 |
| Gambar 2.8  | Peta Rawan Bencana Kabupaten Cirebon.....  | II-27 |
| Gambar 2.9  | Kerangka Pemikiran Hubungan Kondisi Geografis dan Potensi pengembangan Wilayah....                     | II-30 |
| Gambar 2.10 | Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon tahun 2016-2020.....                                    | II-33 |
| Gambar 2.11 | Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon Tahun 2020.....           | II-37 |
| Gambar 2.12 | Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah).....                  | II-41 |
| Gambar 2.13 | Laju Pertumbuhan ekonomi (LPE) Nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Cirebon tahun 2016-2020.....         | II-46 |
| Gambar 2.14 | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten?Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 (Persen).....             | II-46 |
| Gambar 2.15 | Laju PDRB Per Kapita Kabupaten Cirebon tahun 2016-2020.....  | II-48 |
| Gambar 2.16 | Perkembangan Inflasi Kabupaten Cirebon dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019.....                    | II-49 |
| Gambar 2.17 | Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016-2020.....      | II-50 |
| Gambar 2.18 | Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016-2020..... | II-52 |
| Gambar 2.19 | Capaian IPM Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2016-2020.....                  | II-55 |
| Gambar 2.20 | Harapan Lama Sekolah Kabupaten Cirebon dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020.....                    | II-57 |



|             |  |        |
|-------------|--|--------|
| Gambar 2.21 | Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Cirebon dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020.....  | II-58  |
| Gambar 2.22 | Angka Harapan Hidup Kabupaten Cirebon dan Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020  | II-59  |
| Gambar 2.23 | Usia Harapan Hidup (UHH) Penduduk Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2019.....   | II-60  |
| Gambar 2.24 | Tingkat Partisipasi Angkat Kerja Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020.....  | II-61  |
| Gambar 2.25 | Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2016-2020.....                          | II-63  |
| Gambar 2.26 | Skor PPH Ketersediaan dan PPH Konsumsi Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020.....  | II-89  |
| Gambar 2.27 | Jumlah Kelompok Binaan LPM dan PKK Kabupaten Cirebon 2016-2018.....  | II-95  |
| Gambar 2.28 | Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Cirebon Tahun 2017-2020.....  | II-98  |
| Gambar 2.29 | Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan tahun 2016-2018.....                      | II-102 |
| Gambar 2.30 | Jumlah Investor, Nilai Investasi dan Nilai Realisasi PMDN Kabupaten Cirebon tahun 2016-2020.....                                   | II-105 |
| Gambar 2.31 | Jumlah pengunjung Perpustakaan dan Koleksi Buku yang Tersedia di Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020.....                            | II-112 |
| Gambar 2.32 | Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku di Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020.....                             | II-114 |
| Gambar 2.33 | Persentase Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Kabupaten Cirebon Tahun 2020  | II-118 |
| Gambar 2.34 | Jumlah pelanggan Listrik di Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020.....   | II-130 |
| Gambar 2.35 | Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Cirebon 2016-2020..... | II-139 |
| Gambar 2.36 | Pengeluaran per Kapita Kabupaten Cirebon dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah).....                                | II-140 |
| Gambar 2.37 | Pengeluaran per Kapita Penduduk menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2019.....   | II-141 |
| Gambar 3.1  | Rata-rata Proporsi Komponen Pendapatan Daerah tahun 2016-2020.....   | III-7  |
| Gambar 3.2  | Rata-rata Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016-2020.....  | III-8  |





|            |   |        |
|------------|---|--------|
| Gambar 3.3 | Rata-rata Proporsi Komponen Dana Perimbangan  | III-9  |
| Gambar 3.4 | Rata-rata Proporsi Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2016-2020                            | III-10 |
| Gambar 3.5 | Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019..... | III-35 |
| Gambar 4.1 | Capaian IPM Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional tahun 2016-2020.....                        | IV-4   |
| Gambar 4.2 | Persentase Pendudukn Miskin di Kabupaten Cirebon, provinsi Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2016-2020.....    | IV-5   |
| Gambar 4.3 | Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2016-2020.....   | IV-5   |
| Gambar 4.4 | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Nasional, Jawa Barat, dan Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020.....             | IV-8   |
| Gambar 4.5 | Misi dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024.....   | IV-29  |
| Gambar 4.6 | <i>Sustainable Development Goals (SDG's)</i>  | IV-53  |
| Gambar 6.1 | Tinjauan RJPD Kabupaten Cirebon 2005-2025....   | VI-10  |
| Gambar 6.2 | Peta Arah Kebijakan Kewilayahan WP Ciayumajakuning.....   | VI-28  |



## DAFTAR TABEL

|            |  |       |
|------------|--|-------|
| Tabel 2.1  | Jumlah Desa dan Kelurahan Menurut Kelompok Kecamatan Kabupaten Cirebon Tahun 2019.....   | II-3  |
| Tabel 2.2  | Luas Wilayah Kabupaten Cirebon dirinci Menurut Kecamatan tahun 2020.....   | II-3  |
| Tabel 2.3  | Luas Morfologi Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Cirebon.....   | II-6  |
| Tabel 2.4  | Kemiringan lereng wilayah Kabupaten Cirebon.....   | II-8  |
| Tabel 2.5  | Luas Ketinggian Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Cirebon (Ha).....   | II-10 |
| Tabel 2.6  | Jenis Geologi di Kabupaten Cirebon (Ha).....   | II-14 |
| Tabel 2.7  | Luas Curah Hujan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2018 (Ha).....   | II-21 |
| Tabel 2.8  | Luas dan Tingkat Kerawanan Bencana di Kabupaten Cirebon (Ha).....  | II-23 |
| Tabel 2.9  | Jenis Potensi Rawan Bencana Alam Berdasarkan Jenis Bencana Alam dan Kecamatan di Kabupaten Cirebon...  | II-24 |
| Tabel 2.10 | Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Kabupaten Cirebon.....   | II-25 |
| Tabel 2.11 | Cakupan Pelayanan Pos Jaga Pemadam Kebakaran di Kabupaten Cirebon.....   | II-26 |
| Tabel 2.12 | Resiko Tingkat Kebakaran di Kabupaten Cirebon.....   | II-27 |
| Tabel 2.13 | Rencana Penggunaan Lahan Kawasan Lindung di Kabupaten Cirebon.....   | II-28 |
| Tabel 2.14 | Rencana Penggunaan Lahan Kawasan Budidaya di Kabupaten Cirebon.....  | II-29 |
| Tabel 2.15 | Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020.....   | II-32 |
| Tabel 2.16 | Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon, 2020..... | II-33 |
| Tabel 2.17 | Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Cirebon 2020.....  | II-35 |
| Tabel 2.18 | Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cirebon Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Cirebon (Milyar Rupiah), 2016-2020.....                          | II-39 |
| Tabel 2.19 | Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Cirebon (Milyar Rupiah), 2016-2020 .....                                      | II-40 |



|            |   |       |
|------------|---|-------|
| Tabel 2.20 | Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Cirebon (Persen) Tahun 2016-2020.....   | II-42 |
| Tabel 2.21 | Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Cirebon (%), 2016-2020.....                           | II-45 |
| Tabel 2.22 | PDRB Per Kapita Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020   | II-47 |
| Tabel 2.23 | Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020.....   | II-51 |
| Tabel 2.24 | Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Cirebon, 2016-2020.....  | II-53 |
| Tabel 2.25 | Persentase Penduduk Miskin Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020.....   | II-53 |
| Tabel 2.26 | Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat Tahun 2016- 2020.....  | II-56 |
| Tabel 2.27 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2019 (Persen)..   | II-62 |
| Tabel 2.28 | Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020.....   | II-63 |
| Tabel 2.29 | Capaian Bidang Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020.....  | II-66 |
| Tabel 2.30 | Sarana Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2020.....  | II-70 |
| Tabel 2.31 | Kinerja Urusan Bidang Pendidikan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020.....   | II-71 |
| Tabel 2.32 | Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Cirebon (Unit), Tahun 2018-2020.....  | II-71 |
| Tabel 2.33 | Persentase Penduduk Yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Tempat Berobat dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon, 2020..... | II-71 |
| Tabel 2.34 | Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (Balita) yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Cirebon Tahun 2019.....                                     | II-72 |
| Tabel 2.35 | Capaian Bidang Kesehatan Tahun 2016-2020.....   | II-72 |
| Tabel 2.36 | Kinerja Urusan Bidang Kesehatan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020.....  | II-77 |
| Tabel 2.37 | Panjang Jalan Kabupaten (km) di Kabupaten Cirebon Berdasarkan Kondisi Tahun 2016-2020.....  | II-78 |
| Tabel 2.38 | Indikator Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2020.....  | II-78 |
| Tabel 2.39 | Kinerja Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020 .....   | II-78 |





|            |   |        |
|------------|---|--------|
| Tabel 2.40 | Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Tahun 2016-2018.....  | II-80  |
| Tabel 2.41 | Jumlah Pelanggan Air Bersih PDAM di Kabupaten Cirebon tahun 2016.....   | II-81  |
| Tabel 2.42 | Kinerja Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020.....                          | II-82  |
| Tabel 2.43 | Capaian Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2016-2018.....  | II-83  |
| Tabel 2.44 | Kinerja Urusan Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020..... | II-83  |
| Tabel 2.45 | Capaian Bidang Sosial Tahun 2016-2018.....  | II-84  |
| Tabel 2.46 | Kinerja Urusan Bidang Sosial Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020..  | II-85  |
| Tabel 2.47 | Capaian Bidang Tenaga Kerja Tahun 2016-2018.....  | II-86  |
| Tabel 2.48 | Kinerja Urusan Bidang Tenaga Kerja Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020.....   | II-87  |
| Tabel 2.49 | Kinerja Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020.....             | II-88  |
| Tabel 2.50 | Capaian Indikator Urusan Pangan Tahun 2016-2020....   | II-89  |
| Tabel 2.51 | Kinerja Urusan Bidang Pangan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020.....   | II-91  |
| Tabel 2.52 | Kinerja Urusan Bidang Pertanahan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020.....   | II-91  |
| Tabel 2.53 | Kinerja Urusan Bidang Lingkungan Hidup Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020..  | II-92  |
| Tabel 2.54 | Capaian Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2020.....   | II-93  |
| Tabel 2.55 | Kinerja Urusan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020 .....                       | II-94  |
| Tabel 2.56 | Indikator Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2018.....   | II-96  |
| Tabel 2.57 | Kinerja Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020.....                         | II-97  |
| Tabel 2.58 | Kinerja Urusan Bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020.....             | II-98  |
| Tabel 2.59 | Jumlah Kendaraan Angkutan Pedesaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2018....   | II-99  |
| Tabel 2.60 | Fasilitas Perlengkapan Jalan Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020.....   | II-100 |



|            |  |        |
|------------|--|--------|
| Tabel 2.61 | Kinerja Urusan Bidang Perhubungan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020.....                         | II-101 |
| Tabel 2.62 | Cakupan Layanan Telekomunikasi Tahun 2016-2018...  | II-102 |
| Tabel 2.63 | Kinerja Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020.....          | II-103 |
| Tabel 2.64 | Kondisi Perkoperasian Kabupaten Cirebon 2016-2020..  | II-104 |
| Tabel 2.65 | Kinerja Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020..... | II-104 |
| Tabel 2.66 | Indikator Iklim Investasi Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2018.....   | II-106 |
| Tabel 2.67 | Kinerja Urusan Bidang Penanaman Modal Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020.....                     | II-108 |
| Tabel 2.68 | Kinerja Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020.....             | II-109 |
| Tabel 2.69 | Kinerja Urusan Bidang Kebudayaan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020.....                          | II-110 |
| Tabel 2.70 | Jumlah Publikasi yang Diterbitkan BPS Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2018.....   | II-110 |
| Tabel 2.71 | Kinerja Urusan Bidang Statistik dan Persandian Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020..               | II-111 |
| Tabel 2.72 | Capaian Kinerja Bidang Perpustakaan Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020.....   | II-112 |
| Tabel 2.73 | Kinerja Urusan Bidang Perpustakaan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020.....                        | II-113 |
| Tabel 2.74 | Kinerja Urusan Bidang Kearsipan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020.....                           | II-114 |
| Tabel 2.75 | Jumlah Nelayan Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Jenis Nelayan.....  | II-115 |
| Tabel 2.76 | Realisasi Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020.....                               | II-116 |
| Tabel 2.77 | Kinerja Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020..                 | II-117 |
| Tabel 2.78 | Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing dan Domestik di Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020.....                              | II-119 |
| Tabel 2.79 | Jumlah Restoran/Rumah Makan Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon, 2016-2019.....                                   | II-119 |
| Tabel 2.80 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Pariwisata Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020.....          | II-124 |
| Tabel 2.81 | Produksi Tanaman Pangan Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon, 2020.....  | II-125 |



|             |  |        |
|-------------|--|--------|
| Tabel 2.82  | Hasil Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman Kabupaten Cirebon Tahun 2020 (Ton/Tahun).....                               | II-126 |
| Tabel 2.83  | Produksi Buah-Buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Buah di Kabupaten Cirebon (Kw), 2020.....   | II-127 |
| Tabel 2.84  | Produksi Daging, Telur dan Susu Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Cirebon, 2019 dan 2020.....  | II-128 |
| Tabel 2.85  | Realisasi Kinerja Urusan Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020.....  | II-129 |
| Tabel 2.86  | Kinerja Urusan Bidang Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020.....                           | II-129 |
| Tabel 2.87  | Realisasi Kinerja Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020.....                      | II-131 |
| Tabel 2.88  | Realisasi Kinerja Urusan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020.....  | II-132 |
| Tabel 2.89  | Kinerja Urusan Bidang Perindustrian dan Perdagangan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020.....                                 | II-132 |
| Tabel 2.90  | Realisasi Kinerja Urusan Perencanaan Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020.....  | II-133 |
| Tabel 2.91  | Realisasi Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020.....   | II-134 |
| Tabel 2.92  | Realisasi Kinerja Urusan Pengawasan Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2018.....   | II-135 |
| Tabel 2.93  | Kinerja Urusan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020.....                                 | II-136 |
| Tabel 2.94  | PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Cirebon 2016 - 2019.....   | II-138 |
| Tabel 2.95  | PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Cirebon, 2016 - 2019.....   | II-139 |
| Tabel 2.96  | Analisis Location Quotient (LQ) Kabupaten Cirebon.....   | II-142 |
| Tabel 2.97  | Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020.... | II-144 |
| Tabel 2.98  | Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2019-2022.....  | II-160 |
| Tabel 2.99  | Pencapaian Indikator SPM Urusan Pendidikan Tahun 2017-2018.....  | II-165 |
| Tabel 2.100 | Pencapaian Indikator SPM Urusan Kesehatan Tahun 2018.....  | II-169 |





|             |  |        |
|-------------|--|--------|
| Tabel 2.101 | Pencapaian Indikator SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018.....  | II-171 |
| Tabel 2.102 | Pencapaian Indikator SPM Urusan Perumahan Rakyat...  | II-173 |
| Tabel 2.103 | Pencapaian Indikator SPM Urusan Ketertiban Umum (Kantor Satpol PP) Tahun 2018.....   | II.174 |
| Tabel 2.104 | Pencapaian Indikator SPM Urusan Ketertiban Umum (Pemadam Kebakaran) Tahun 2018.....  | II-175 |
| Tabel 2.105 | Pencapaian Indikator SPM Urusan Sosial Tahun 2020...   | II-176 |
| Tabel 2.106 | Uraian Kondisi Modal, Kredit, Tabungan, Deposito, Aset, dan Laba PD. BPRD di Kabupaten Cirebon tahun 2016-2017.....                  | II-177 |
| Tabel 2.107 | Kinerja PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2018.....   | II-178 |
| Tabel 3.1   | Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020 (dalam Milyar Rupiah)                     | III-4  |
| Tabel 3.2   | Perkembangan Belanja Daerah Tahun 2016-2020 (dalam milyar Rupiah).....   | III-11 |
| Tabel 3.3   | Realisasi Belanja Tahun 2020 (dalam milyar Rupiah)....   | III-13 |
| Tabel 3.4   | Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020 (dalam milyar Rupiah).....                    | III-15 |
| Tabel 3.5   | Perkembangan Pembiayaan Daerah Tahun 2016-2020...  | III-17 |
| Tabel 3.6   | Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2019-2020 (dalam milyar Rupiah).....   | III-18 |
| Tabel 3.7   | Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Cirebon.....   | III-19 |
| Tabel 3.8   | Analisis Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Aktivitas Kabupaten Cirebon dari Tahun 2016-2020 (dalam milyar Rupiah)..... | III-21 |
| Tabel 3.9   | Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020 (dalam milyar Rupiah).....                          | III-29 |
| Tabel 3.10  | Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020 (dalam milyar Rupiah).....                  | III-30 |
| Tabel 3.11  | Defisit Riil Anggaran Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020 (dalam Milyar Rupiah).....   | III-32 |
| Tabel 3.12  | Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Cirebon.....   | III-34 |
| Tabel 3.13  | Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020 (dalam Milyar).....                                      | III-34 |

|            |  |        |
|------------|--|--------|
| Tabel 3.14 | Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 Berdasarkan Akun PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 (dalam milyar Rupiah)..... | III-45 |
| Tabel 3.15 | Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama (dalam milyar Rupiah).....   | III-50 |
| Tabel 3.16 | Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan daerah Kabupaten Cirebon.....  | III-52 |
| Tabel 3.17 | Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Cirebon (dalam milyar)   | III-53 |
| Tabel 4.1  | Penetapan Target Indikator Makro Kabupaten Cirebon Untuk Mendukung Pencapaian target Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2023.....  | IV-37  |
| Tabel 4.2  | Identifikasi RPJMD Daerah Lain.....  | IV-39  |
| Tabel 4.3  | Hubungan Antara Isu, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Kawasan.....   | IV-50  |
| Tabel 4.4  | Isu Strategis dan Rekomendasi Berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung.....  | IV-54  |
| Tabel 4.6  | Keterkaitan Prioritas Pembangunan daerah dengan Isu Strategis Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024  | IV-70  |
| Tabel 5.1  | Proyeksi Indikator Mikro Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.....  | V-6    |
| Tabel 5.2  | Integrasi Tujuan RPJMD dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Kabupaten Cirebon 2019-2024...  | V-9    |
| Tabel 5.3  | Proyeksi Indikator Makro Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023.....  | V-11   |
| Tabel 5.4  | Penyelarasan Target Indikator Makro Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional.....   | V-12   |
| Tabel 5.5  | Keterkaitan Kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025 dan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Kabupaten Cirebon.....   | V-13   |
| Tabel 5.6  | Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.....   | V-22   |
| Tabel 5.7  | Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.....  | V-28   |
| Tabel 6.1  | Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Kabupaten Cirebon.....   | VI-4   |
| Tabel 6.2  | Hubungan Permasalahan dan Strategi.....  | VI-5   |
| Tabel 6.3  | Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Kabupaten Cirebon.....   | VI-7   |
| Tabel 6.4  | Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Cirebon tahun 2020-2024.....  | VI-11  |



|            |  |         |
|------------|--|---------|
| Tabel 6.5  | Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024.....   | VI-17   |
| Tabel 6.6  | Hubungan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Strategi.....   | VI-23   |
| Tabel 6.7  | Persandingan Prioritas Nasional dan Prioritas Jawa Barat dengan Prioritas Kabupaten Cirebon.....   | VI-24   |
| Tabel 6.8  | Arah Kebijakan Kewilayahan Provinsi Jawa Barat.....  | VI-27   |
| Tabel 6.9  | Kolaborasi Pendanaan Proyek Strategis Tahun 2018-2023.....   | VI-29   |
| Tabel 6.10 | Program/Kegiatan Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2024.....   | VI-30   |
| Tabel 6.11 | Keterkaitan Antara Isu Strategis dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.....   | VI-34   |
| Tabel 6.12 | Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 (dalam juta Rupiah).....   | VI-45   |
| Tabel 7.1  | Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 dan 2020.....   | VII-4   |
| Tabel 7.2  | Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 Berdasarkan Akun PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 (dalam milyar Rupiah)..... | VII-5   |
| Tabel 7.3  | Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2020 (dalam juta Rupiah).....   | VII-9   |
| Tabel 8.1  | Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.....  | VIII-1  |
| Tabel 8.2  | Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024.....  | VIII-3  |
| Tabel 8.3  | Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan tingkat Sasaran (dampak/Impact) Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon 2019-2024.....                         | VIII-7  |
| Tabel 8.4  | Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat program (Outcome) pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024.....                         | VIII-17 |





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan merupakan proses transformasi menuju tatanan kehidupan yang lebih baik dengan melibatkan atau memanfaatkan seluruh sumber daya daerah. Pembangunan daerah diselenggarakan melalui implementasi berbagai kebijakan menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sebagai tujuan yang multi dimensi, kesejahteraan diwujudkan dalam aspek ekonomi yang bersejajaran dengan aspek sosial, budaya, kemanusiaan, dan lingkungan hidup secara keberlanjutan. Untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang lebih baik secara efektif dan efisien maka pembangunan direncanakan dengan memerhatikan berbagai kaidah, baik dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan.

Dalam jangka menengah, Kabupaten Cirebon merumuskan kebijakan pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024. RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 disusun sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lebih lanjut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Kabupaten Cirebon wajib untuk menyusun RPJMD berdasarkan visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih dan menetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik.

Pada tanggal 27 Juni 2018 Kabupaten Cirebon melaksanakan pemilihan kepala daerah untuk periode 2019-2024. Berdasarkan Kepmendagri No. 131.32-7754 dan No. 131.32-7755 Tahun 2018 tanggal 28 September 2018 Bapak Dr. H. Sunjaya Purwadisastra, MM, M.Si dan



Bapak Drs. H. Imron Rosyadi disahkan pengangkatannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Masa Jabatan 2019-2024. Selanjutnya berdasarkan Kepmendagri No.131.32-3712 Tahun 2019 Bapak H. Sunjaya Purwadisastra, MM, M.Si disahkan pemberhentiannya sebagai Bupati Cirebon sesuai petikan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg tanggal 22 Mei 2019.

Berikutnya, berdasarkan Surat Keputusan Kemendagri Nomor 131.32-691 Tahun 2019, Menteri Dalam Negeri menunjuk Wakil Bupati terpilih untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Cirebon pada tanggal 17 Mei 2019 sebagai Pelaksana Tugas Bupati Cirebon. Selanjutnya, Gubernur Jawa Barat secara resmi melantik Bapak Drs. H. Imron Rosyadi sebagai Bupati Cirebon sisa masa jabatan 2019-2024. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan **kedua kepala daerah** tersebut dilakukan di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, pada tanggal 1 Oktober 2019.

RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak kepala dan wakil kepala daerah dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan keuangan daerah, serta program pembangunan daerah dan program perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 merupakan tahap keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025. Adapun arah kebijakan tahap ke empat RPJPD Kabupaten Cirebon yaitu: (1) mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, (2) meningkatkan lingkungan hidup yang lestari, (3) meningkatkan perekonomian yang kuat, dan (4) mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel.



Atas dasar itu, telah dirumuskan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon yang selanjutnya dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Melalui visi “TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON YANG BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN”, yang diterjemahkan dalam berbagai instrumen kebijakan dalam RPJMD, diharapkan pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Selanjutnya, pada Tahun 2020 telah dilakukan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Cirebon. Berdasarkan rekomendasi evaluasi tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon mengambil kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD. Sebagaimana kita ketahui, syarat untuk dilakukannya perubahan RPJMD diatur dalam Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa RPJPD, RPJMD dan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi ditemukan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Lebih lanjut, Pasal 342 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan perubahan apabila :

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
3. Terjadi perubahan yang mendasar. Yang dimaksud dengan Perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.





Perubahan mendasar yang memengaruhi substansi RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 adalah adanya perubahan kebijakan nasional. Kebijakan nasional dimaksud berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, di antaranya:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, maupun Pembiayaan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD); dan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selain peraturan perundang-undangan di atas, terbit pula beberapa peraturan yang menguatkan perlunya dilakukan perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.



Selanjutnya, hal lain yang mendasari perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 adalah terjadinya kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Pada tanggal 30 Januari 2020, *World Health Organization* (WHO) menetapkan COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit *Novel Coronavirus* pada manusia ini dengan sebutan *Corona Virus Disease* (COVID-19), dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.

Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, kasus positif di Indonesia maupun Kabupaten Cirebon, termasuk Provinsi Jawa Barat, memperlihatkan peningkatan dan persebaran yang semakin meluas. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor, termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah tahun 2020, sehingga dibutuhkan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran. Kebijakan ini diperuntukkan bagi penanganan kesehatan dan penanganan dampak ekonomi melalui penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) yang sangat berpengaruh terhadap target capaian kinerja pemerintah daerah.

Seperti juga dilakukan oleh daerah-daerah lain, pergeseran anggaran telah dilakukan beberapa kali untuk memenuhi kebutuhan penanganan COVID-19. Oleh sebab itu, dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2021, rehabilitasi dan rekonstruksi dampak COVID-19 merupakan tambahan prioritas pembangunan Kabupaten Cirebon.

Memerhatikan perkembangan kondisi nasional dan Provinsi Jawa Barat akibat pandemi COVID-19 yang berdampak buruk terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan telah merambat ke aspek kehidupan lainnya, maka perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja makro, tujuan dan sasaran Indikator Kinerja Utama pemerintah daerah (IKU pemda), serta IKU dan hasil (outcome) perangkat daerah. Selain itu,



perlu ditetapkan/diambil juga kebijakan-kebijakan pembangunan jangka menengah terkait penanganan pandemi COVID-19 dan upaya untuk pemulihannya, sebagai kelanjutan dari upaya yang telah dilakukan sejak triwulan pertama Tahun 2020 ini.

Substansi RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang mengalami perubahan meliputi gambaran umum wilayah yang disesuaikan dengan kondisi terkini sampai dengan tahun berjalan; kondisi keuangan dan kerangka pendanaan; permasalahan daerah dan isu strategis terutama terkait dengan pandemi COVID-19; target indikator tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; program dan kegiatan menjadi program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 beserta indikator kinerjanya (pada rencana strategis perangkat daerah); dan IKU Pemerintah Daerah dan target kinerjanya, IKU Perangkat Daerah dan target kinerjanya, dan indikator kinerja program.

Dengan uraian tersebut diatas serta memenuhi Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 342 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka perlu dilakukan perubahan terhadap RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2014. Hal tersebut dilakukan karena adanya penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau perubahan kebijakan nasional.

Selanjutnya, dalam proses penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu mutatis mutandis dengan penyusunan RPJMD. Adapun tahapan penyusunan meliputi: persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan musrenbang, penyusunan rancangan akhir, dan penetapan.

Perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan sebagai berikut:



1. **Pendekatan Teknokratis** menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
2. **Pendekatan Partisipatif** dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3. **Pendekatan Politis** dilaksanakan dengan menterjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD;
4. **Pendekatan Atas-Bawah dan Bawah-Atas** merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

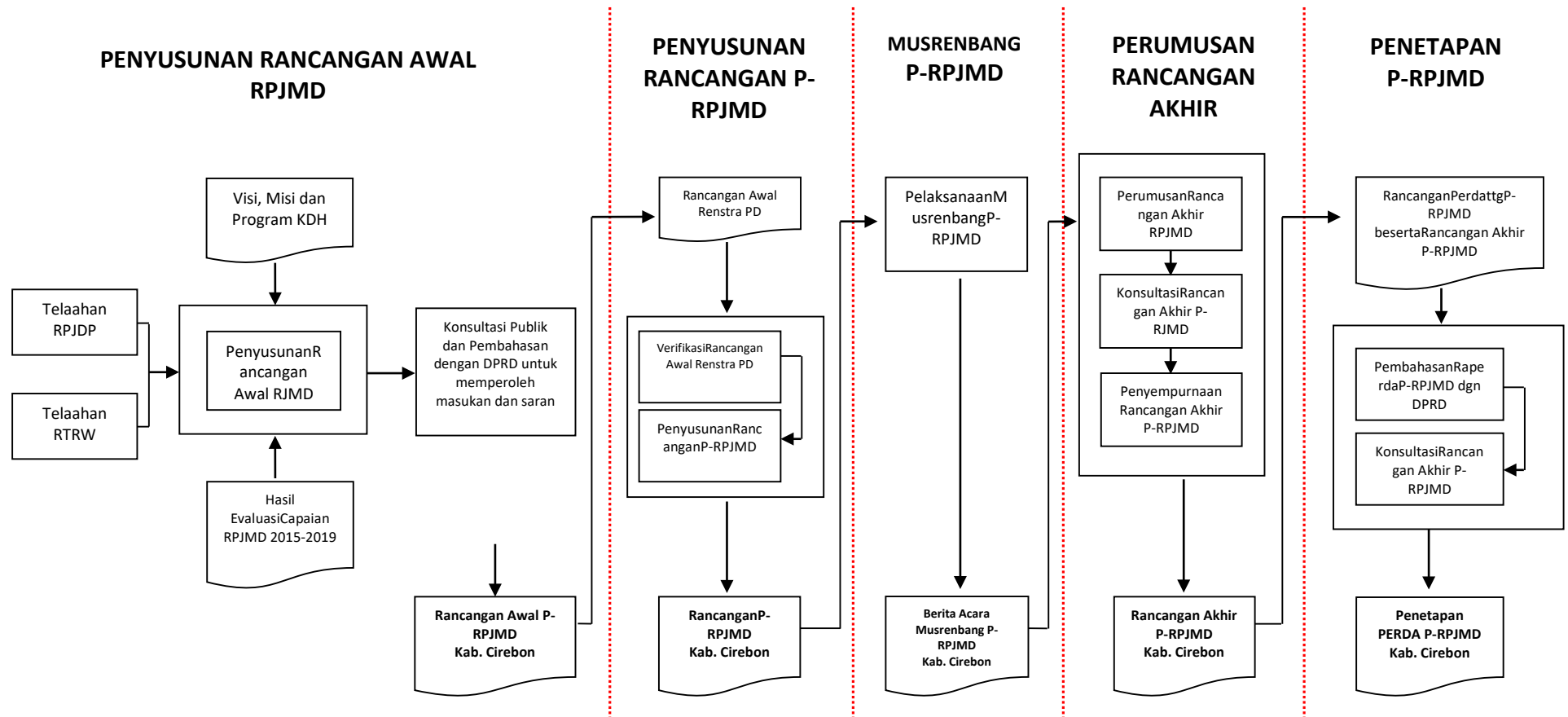
Selain pendekatan berdasarkan proses penyusunan, dalam penyusunan perubahan RPJMD ini juga secara substansial menggunakan beberapa pendekatanyaitu:

1. **Tematik-Holistik:** dalam mencapai sasaran prioritas nasional dirancang koordinasi berbagai kementerian atau lembaga yang terkait;
2. **Integratif:** Kegiatan pembangunan direncanakan secara terintegrasi;
3. **Spasial:** Kegiatan pembangunan yang direncanakan harus menunjukkan lokasi.

Dalam melaksanakan pembangunan Tahun 2019-2024, sistem inovasi daerah merupakan salah satu pendekatan pembangunan yang dilakukan oleh Kabupaten Cirebon. Sebagai suatu pendekatan pembangunan, sistem inovasi yang dimaksud disini pada dasarnya adalah suatu kesatuan dari sehimpunan pelaku pembangunan, kelembagaan, kebijakan, hubungan interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusi inovasi, termasuk teknologi, dan praktek baik/terbaik, serta proses pembelajarannya.



**Gambar 1.1.**  
**Diagram Alir Penyusunan Perubahan RPJMD**



Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diolah

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 berdasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat termasuk Kabupaten Cirebon (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1968, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);





19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);



25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023



(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);

34. Keputusan Gubernur Jawa Barat No.443/Kep.189-Huham/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Jawa Barat;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pembentukan dan Penataan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 17 Seri D.10);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Seri D.7);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Seri E.5); dan
39. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7 Seri E).

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

#### **1.3.1. Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJMN**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden yang penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk Tahun 2015-2019 adalah: TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONGROYONG.

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Adapun prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan





berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Selain nawa cita sebagaimana telah disajikan di atas, RPJMN 2015-2019 juga mengamanatkan antara lain akses air minum 100%, kawasan permukiman kumuh perkotaan 0 Ha dan akses sanitasi layak 100% (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan). Sebagai upaya mempercepat terwujudnya visi dan misi pembangunan nasional, maka pemerintah daerah dan kementerian/lembaga diharapkan mensinergikan segala potensi dan sumberdaya untuk mendukung target pembangunan tersebut.

Dalam mewujudkan agenda prioritas nasional (nawa cita), maka perlu memerhatikan strategi pembangunan nasional yang antar lain meliputi 3 (tiga) dimensi pembangunan. Tiga dimensi pembangunan

meliputi: dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan dan dimensi pemerataan dan kewilayahan. Ketiga dimensi tersebut menjadi bagian yang diprioritaskan dalam penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023.

Aspek pembangunan manusia menjadi prioritas sebab Provinsi Jawa Barat merupakan daerah dengan penduduk terbanyak di Indonesia. Untuk itu perlu adanya perhatian lebih pada penyiapan SDM yang andal dan produksi serta mampu ikut serta dalam pembangunan. Diharapkan SDM Jawa Barat dapat mengelola sumber daya yang ada, terlebih dalam pengelolaan sektor unggulan. Dengan demikian, diharapkan pembangunan dapat mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru, sehingga pembangunan tidak hanya terpusat pada daerah-daerah tertentu, tapi lebih merata keseluruh wilayah Jawa Barat.

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 memerhatikan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 serta memerhatikan juga RPJMN Tahun 2020-2024 sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, penetapan target RPJMD Kabupaten Cirebon pada tujuan dan sasaran dengan indikator yang sama dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2023 telah diselaraskan. Hal yang sama juga dilakukan pada strategi, arah kebijakan dan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Cirebon dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat dan nasional dengan memerhatikan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah.

Pada RPJMN Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 yang ditetapkan melalui peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021, pembangunan Kabupaten Cirebon diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dengan target yang jelas disertai arah kebijakan dan pembangunan wilayah berdasarkan prioritas sesuai koridor pertumbuhan dan pemerataan.

### **1.3.2. Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon dengan RPJPD, RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD**

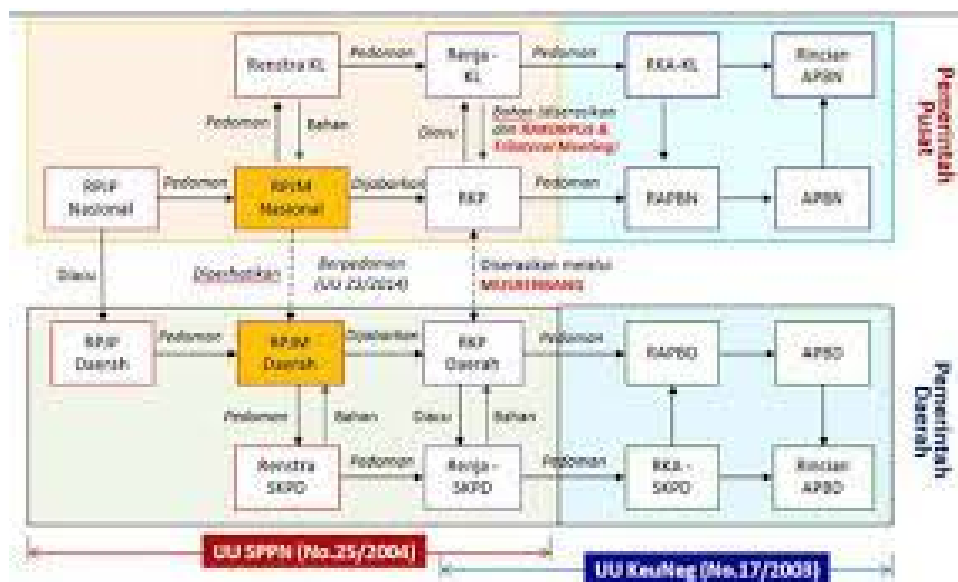
Dokumen RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 20 tahun merupakan pedoman bagi penyusunan RPJMD sesuai periode berkenaan. Penyusunan Perubahan Rancangan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap IV RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025. Selanjutnya RPJMD menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra PD merupakan rencana kerja 5 (lima) tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan perangkat daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana termuat dalam RPJMD serta penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten. Selanjutnya, RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan daerah. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja PD. Penjabaran rencana tahunan perangkat daerah termuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

### **1.3.3. Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon dengan RTRW Kabupaten Cirebon**

Amanat pengintegrasian antara dokumen rencana tata ruang daerah dan dokumen rencana pembangunan daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU No. 25 Tahun 2004). Hal ini kemudian dijabarkan secara lebih khusus di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang

mengamanatkan konsistensi pemanfaatan ruang dapat dicapai melalui pengintegrasian ke dalam dokumen perencanaan pembangunan.

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 memerhatikan RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Cirebon dengan kebijakan pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, serta arahan pemanfaatan ruang.

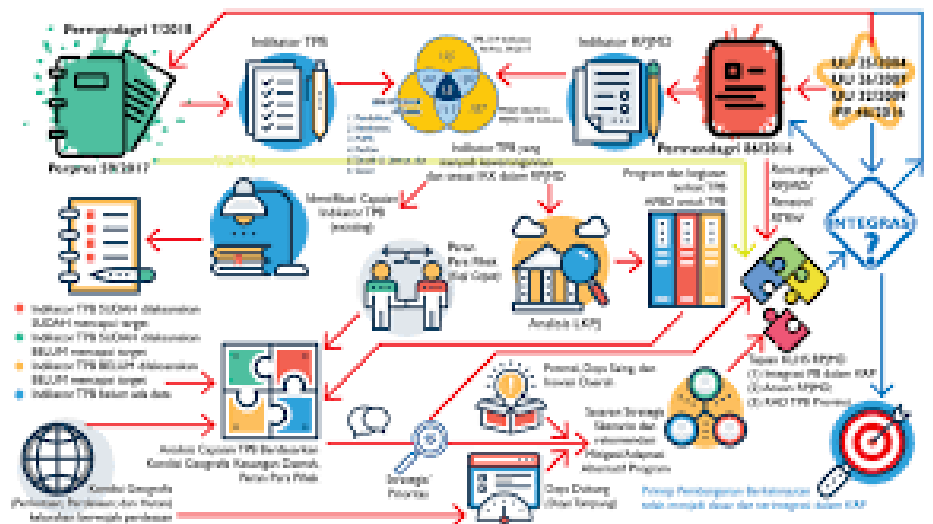


#### 1.3.4. Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Cirebon

Penyusunan RPJMD mencakup Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS dengan memerhatikan potensi dampak pembangunan melalui



Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon ini telah diintegrasikan dengan KLHS Perubahan RPJMD guna memastikan permasalahan dan isu strategis lingkungan dan tujuan pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, pengintegrasian ini juga berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis atas kewajiban Pemerintah Daerah membuat KLHS agar prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar bagi pembangunan wilayah, kebijakan, dan program.



Maksud dari penyusunan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ini adalah memberikan gambaran tentang kondisi daerah saat ini

dan memberikan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Cirebon 5 (lima) tahun kedepan yang holistik-tematik, integratif dan berbasis keruangan.

Tujuan dalam penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Cirebon ini adalah untuk mendapatkan hal-hal berikut:

1. Menelaah kinerja pembangunan pemerintah Kabupaten Cirebon periode 2016-2019, termasuk realisasi kinerja tahun 2020 sebagai periode pertama RPJMD;
2. Menelaah kinerja keuangan masa lalu dan menganalisis kerangka pendanaan daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan;
3. Merumuskan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan capaian kinerja pembangunan daerah beberapa tahun terakhir;
4. Merumuskan isu-isu strategis pembangunan 5 (lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan permasalahan yang timbul pada tahun pertama pelaksanaan RPJMD dengan memerhatikan pula isu terkait kajian lingkungan hidup strategis (dan tujuan pembangunan berkelanjutan);
5. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Cirebon 5 (lima) tahun kedepan;
6. Merumuskan program pembangunan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan dan rencana program perangkat daerah untuk seluruh perangkat daerah;
7. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Perangkat Daerah serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan target untuk Tahun 2020 sebagai tahun awal periode RPJMD, sampai dengan Tahun 2024 sebagai tahun akhir periode RPJMD.

Adapun, dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon, perumusan dilakukan dengan memerhatikan berbagai aspek sebagaimana telah disebutkan di awal guna menajamkan prioritas pembangunan dan target kinerja untuk tahun anggaran 2022-2024.

## **1.5. Sistematika Penulisan**



Sistematika penulisan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 terdiri dari 9 (sembilan) bab. Secara garis besar, tiap-tiap bab menguraikan hal-hal sebagai berikut:

## **BAB I        PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika penulisannya.

## **BAB II        GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH**

Bab ini menyajikan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum baik urusan wajib dan urusan pilihan, serta daya saing daerah.

## **BAB III        GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Bab ini terdiri dari uraian tentang kinerja keuangan di masa lalu yang terdiri dari kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terdiri dari proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan. Kerangka pendanaan terdiri dari analisis pengeluaran periodic wajib dan mengikat serta prioritas utama, proyeksi data masa lalu, dan penghitungan kerangka pendanaan.

## **BAB IV        PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH**

Bab ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan isu-isu strategis yang akan menjadi focus perhatian Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang ada.

**BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasarnya.

**BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Bab ini memuat dan menjelaskan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Bab ini juga menyajikan program pembangunan daerah yang dirumuskan dari masing-masing strategi untuk selanjutnya dijabarkan oleh program prioritas atau program operasional pada perangkat daerah.

**BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target, Perangkat Daerah pelaksana berdasarkan bidang urusan

**BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Bab ini berisikan penetapan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan



## **BAB IX      PENUTUP**

Bab penutup menguraikan kesimpulan dari substansi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon (RPJMD) Tahun 2019-2024 dengan kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi periode perencanaan Pembangunan.



## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

#### **2.1. Aspek Geografi dan Demografi**

##### **2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah**

###### **1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Kabupaten Cirebon merupakan bagian dari wilayah Propinsi Jawa Barat yang terletak dibagian timur dan merupakan batas, sekaligus sebagai pintu gerbang Propinsi Jawa Barat. Luas wilayah seluas 1.070,28 Km<sup>2</sup> (107.028 Ha) dan posisinya sangat strategis karena terlewati oleh jalur lintas Jakarta – Jawa. Kabupaten Cirebon berada pada pesisir pantai utara Pulau Jawa dengan panjang garis pantai  $\pm$  77,97 Km.

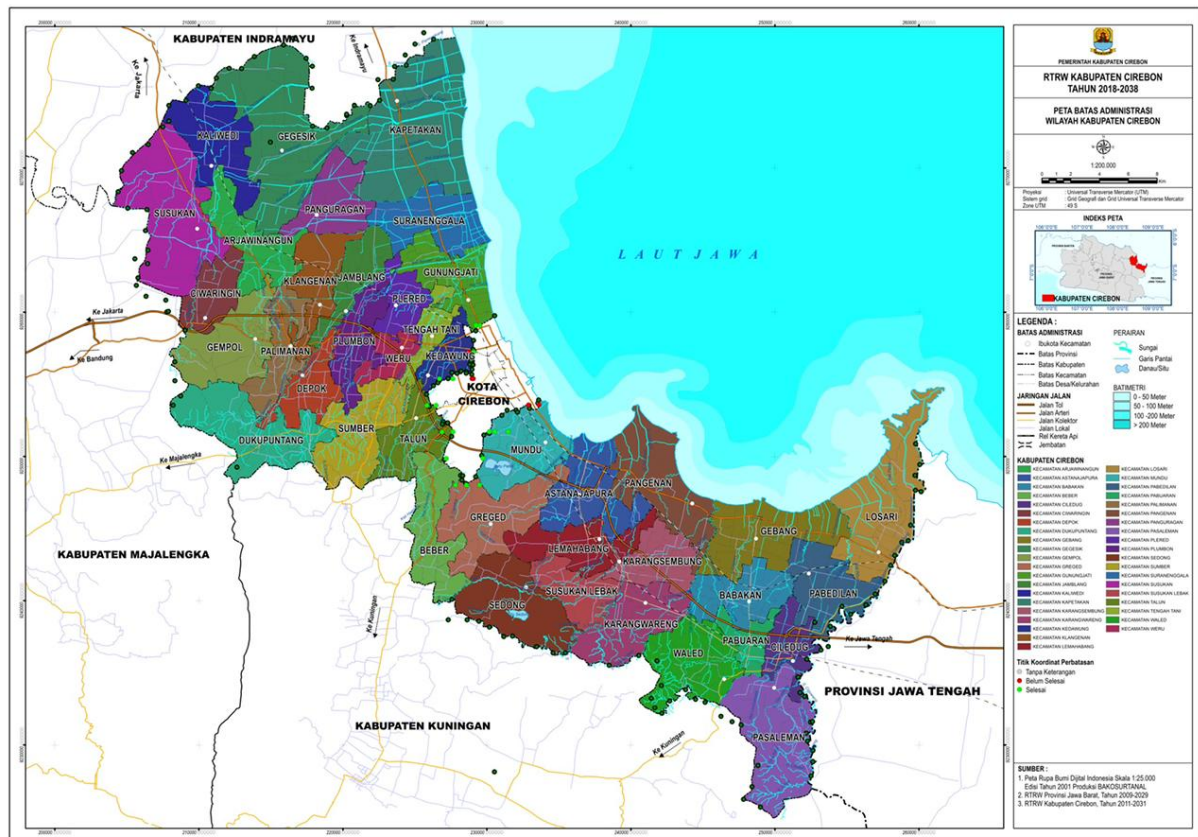
Tahun 2020, wilayah administrasi Kabupaten Cirebon terdiri dari 40 Kecamatan dengan 424 Desa/Kelurahan. Luas wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Kapetakan (67,04 km<sup>2</sup>) diikuti Kecamatan Gegesik (63,83 km<sup>2</sup>), sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Weru (9,11 km<sup>2</sup>).

Letak daratan Kabupaten Cirebon memanjang dari Barat Laut ke Tenggara. Dilihat dari permukaan tanah/daratannya dapat dibedakan menjadi dua bagian, pertama daerah dataran rendah umumnya terletak di sepanjang pantai utara Pulau Jawa, yaitu Kecamatan Gegesik, Kaliwedi, Kapetakan, Arjawinangun, Panguragan, Klangeran, Gunungjati, Tengah Tani, Weru, Astanajapura, Pangenan, Karangsembung, Waled, Ciledug, Losari, Babakan, Gebang, Palimanan, Plumbon, Depok dan Kecamatan Pabedilan. Sedangkan sebagian lagi termasuk pada daerah dataran tinggi.

Wilayah Kabupaten Cirebon bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon dan Laut Jawa; bagian selatan dengan Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka; bagian barat dengan Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Indramayu; bagian timur dengan Provinsi Jawa Tengah utara.

**Gambar 2.1**

**Peta Batas Administrasi Kabupaten Cirebon**



Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038

Kabupaten Cirebon terdiri atas 40 kecamatan, yang dibagi lagi atas 412 desa dan 12 kelurahan. Pusat pemerintahan Kabupaten Cirebon di Kecamatan Sumber, yang berada di sebelah selatan Kota Cirebon. Tiga kecamatan yang baru terbentuk pada tahun 2007 adalah Kecamatan Jamblang (Pemekaran Kecamatan Klangenengan sebelah Timur), Kecamatan Suranenggala (Pemekaran Kecamatan Kapetakan sebelah Selatan), dan Kecamatan Greged (Pemekaran Kecamatan Beber sebelah Timur).

**Tabel 2.1 (DIGANTI TABEL NAMA KECAMATAN JUMLAH DESA) Perda RTRW  
No.7 Tahun 2018****Jumlah Desa dan Kelurahan Menurut Kelompok Kecamatan  
Kabupaten Cirebon Tahun 2019**

| No.          | Kecamatan  | Jumlah Desa | Jumlah Kelurahan |
|--------------|--|-------------|------------------|
| 1-5          | Arjawinangun, Ciwaringin, Gempol, Kapetakan, & Lemah Abang | 49          | -                |
| 6-10         | Palimanan, Plumbon, Susukan Lebak, Astanajapura, & Depok   | 12          | -                |
| 11-15        | Greged, Karangsembung, Losari, Pangenan, & Sedong          | 47          | -                |
| 16-20        | Talun, Babakan, Dukupuntang, Gunung Jati, & Karangwareng   | 60          | -                |
| 21-25        | Mundu, Panguragan, Sumber, Tengah Tani, & Beber            | 41          | 12               |
| 26-30        | Gebang, Jamblang, Kedawung, Pabedilan, & Pasaleman         | 49          | -                |
| 31-35        | Suranenggala, Waled, Ciledug, Gegesik, & Kaliwedi          | 56          | -                |
| 36-40        | Klangenan, Pabuaran, Plered, Susukan, & Weru               | 47          | -                |
| <b>Total</b> |  | <b>412</b>  | <b>12</b>        |

Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038

**Tabel 2.2****Luas Wilayah Kabupaten Cirebon dirinci Menurut Kecamatan  
Tahun 2020**

| No  | Kecamatan     | Luas Wilayah |      |
|-----|---------------|--------------|------|
|     |               | km           | %    |
| 1.  | Waled         | 30,790       | 2,88 |
| 2.  | Pasaleman     | 41,310       | 3,86 |
| 3.  | Ciledug       | 14,630       | 1,37 |
| 4.  | Pabuaran      | 9,570        | 0,89 |
| 5.  | Losari        | 45,320       | 4,23 |
| 6.  | Pabedilan     | 25,810       | 2,41 |
| 7.  | Babakan       | 22,180       | 2,07 |
| 8.  | Gebang        | 35,360       | 3,30 |
| 9.  | Karangsembung | 18,820       | 1,76 |
| 10. | Karangwareng  | 27,190       | 2,54 |
| 11. | Lemahabang    | 22,650       | 2,12 |
| 12. | Susukan Lebak | 18,050       | 1,69 |
| 13. | Sedong        | 34,430       | 3,22 |
| 14. | Astanajapura  | 28,910       | 2,70 |
| 15. | Pangenan      | 35,730       | 3,34 |
| 16. | Mundu         | 27,400       | 2,56 |

| No  | Kecamatan                | Luas Wilayah     |               |
|-----|--------------------------|------------------|---------------|
|     |                          | km               | %             |
| 17. | Beber                    | 25,750           | 2,41          |
| 18. | Greged                   | 32,220           | 3,01          |
| 19. | Talun                    | 19,310           | 1,80          |
| 20. | Sumber                   | 29,540           | 2,76          |
| 21. | Dukupuntang              | 37,440           | 3,50          |
| 22. | Palimanan                | 19,120           | 1,79          |
| 23. | Plumbon                  | 19,030           | 1,78          |
| 24. | Depok                    | 16,380           | 1,53          |
| 25. | Weru                     | 9,150            | 0,85          |
| 26. | Plered                   | 13,230           | 1,24          |
| 27. | Tengah Tani              | 9,730            | 0,91          |
| 28. | Kedawung                 | 11,250           | 1,05          |
| 29. | Gunungjati               | 22,450           | 2,10          |
| 30. | Kapetakan                | 66,890           | 6,25          |
| 31. | Suranenggala             | 25,880           | 2,42          |
| 32. | Klangenan                | 20,420           | 1,91          |
| 33. | Jamblang                 | 16,590           | 1,55          |
| 34. | Arjawinangun             | 24,290           | 2,27          |
| 35. | Panguragan               | 22,000           | 2,06          |
| 36. | Ciwaringin               | 16,100           | 1,50          |
| 37. | Gempol                   | 30,720           | 2,87          |
| 38. | Susukan                  | 52,040           | 4,86          |
| 39. | Gegesik                  | 63,830           | 5,96          |
| 40. | Kaliwedi                 | 28,770           | 2,69          |
|     | <b>Kabupaten Cirebon</b> | <b>1.070,280</b> | <b>100.00</b> |

Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038

## 2. Letak dan Kondisi Geografis

### a. Posisi Astronomis

Kabupaten Cirebon terletak diantara 06° 30' 58" Lintang Selatan sampai dengan 07° 00'24" Lintang Selatan dan diantara 108° 19'30" Bujur Timur sampai dengan 108° 50'03" Bujur Timur. Jarak terjauh arah Barat – Timur 54 Km dan Utara Selatan 39 km, dengan batas administrasi sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu dan Laut Jawa

Sebelah Selatan : Kabupaten Kuningan

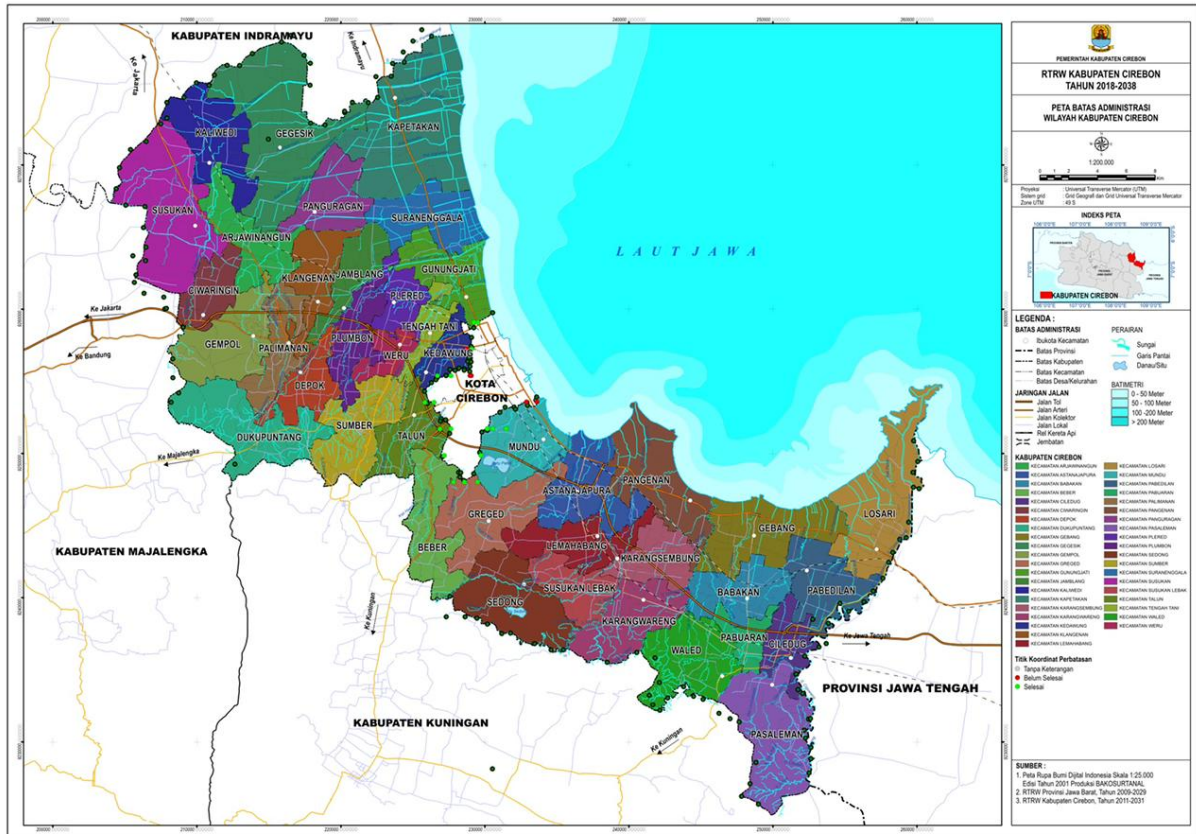
Sebelah Barat : Kabupaten Majalengka

Sebelah Timur : Kota Cirebon dan Kabupaten Brebes

(Provinsi Jawa Tengah).

**Gambar 2.2**

**Peta Batas Administrasi Kabupaten Cirebon**



Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038

**b. Posisi Geostrategis**

Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Cirebon memiliki posisi strategis (*geo-strategic*) dengan mencermati hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kabupaten Cirebon berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah sehingga menjadi pintu gerbang masuk ke Provinsi Jawa Barat. Hal ini merupakan potensi pengembangan Kabupaten Cirebon untuk menarik investor ke wilayah ini.
- 2) Wilayah Kabupaten Cirebon berada di pantai Utara Jawa yang dilalui oleh jalan arteri primer dan jalan kolektor primer sebagai penghubung antara Jakarta dengan kota-kota besar di wilayah Jawa dan kota-kota di sekitar Cirebon.



- 3) Wilayah Kabupaten Cirebon menjadi lintasan ruas jalan bebas hambatan (Jalan Tol) yakni ruas jalan tol Cikampek-Palimanan (Cikapa), ruas jalan tol Palimanan-Kanci (Palikanci), ruas jalan tol Kanci-Pejagan.
- 4) Wilayah Kabupaten Cirebon dilalui juga oleh Jalur Kereta Api yakni jalur kereta api Cirebon-Jakarta, jalur kereta api Cirebon-Bandung, jalur kereta api lintas Utara Jawa (Cirebon-Semarang-Surabaya), dan jalur kereta api lintas Selatan Jawa (Cirebon-Yogyakarta-Surabaya).
- 5) Keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon Electric Power (CEP) di Kecamatan Astanajapura yang merupakan salah satu pemasok listrik jalur transmisi Sumatera-Jawa-Bali.

### c. Kondisi Morfologi Kawasan

Kondisi morfologi Kabupaten Cirebon dilihat dari luas morfologinya terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori yaitu bukit/perbukitan, datar dan gunung/pegunungan dan bukit.

**Tabel 2.3**

#### **Luas Morfologi Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Cirebon**

| No. | Kecamatan     | Jenis Morfologi      |         |                                    | Jumlah  |
|-----|---------------|----------------------|---------|------------------------------------|---------|
|     |               | Bukit/<br>Perbukitan | Datar   | Gunung/<br>Pegunungan<br>dan Bukit |         |
| (1) | (2)           | (3)                  | (4)     | (5)                                | (6)     |
| 1.  | Waled         | 153,95               | 2924,98 | 0,00                               | 3078,93 |
| 2.  | Pasaleman     | 660,98               | 3304,86 | 165,24                             | 4131,08 |
| 3.  | Ciledug       | 0,00                 | 1462,86 | 0,00                               | 1462,86 |
| 4.  | Pabuaran      | 0,00                 | 957,23  | 0,00                               | 957,23  |
| 5.  | Losari        | 0,00                 | 4531,68 | 0,00                               | 4531,68 |
| 6.  | Pabedilan     | 0,00                 | 2581,48 | 0,00                               | 2581,48 |
| 7.  | Babakan       | 0,00                 | 2218,13 | 0,00                               | 2218,13 |
| 8.  | Gebang        | 0,00                 | 3535,98 | 0,00                               | 3535,98 |
| 9.  | Karangsembung | 4,81                 | 1877,00 | 0,00                               | 1881,81 |
| 10. | Karangwareng  | 407,88               | 2284,11 | 27,19                              | 2719,18 |



| No. | Kecamatan     | Jenis Morfologi      |                  |                                    | Jumlah            |
|-----|---------------|----------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|
|     |               | Bukit/<br>Perbukitan | Datar            | Gunung/<br>Pegunungan<br>dan Bukit |                   |
| (1) | (2)           | (3)                  | (4)              | (5)                                | (6)               |
| 11. | Lemahabang    | 370,91               | 1894,00          | 0,00                               | 2264,91           |
| 12. | Susukan Lebak | 505,35               | 1155,08          | 144,39                             | 1804,82           |
| 13. | Sedong        | 0,00                 | 3442,50          | 0,00                               | 3442,50           |
| 14. | Astanajapura  | 0,00                 | 2891,40          | 0,00                               | 2891,40           |
| 15. | Pangenan      | 0,00                 | 3572,97          | 0,00                               | 3572,97           |
| 16. | Mundu         | 274,02               | 2383,90          | 82,20                              | 2740,12           |
| 17. | Beber         | 2523,67              | 51,50            | 0,00                               | 2575,17           |
| 18. | Greged        | 483,28               | 2706,37          | 32,22                              | 3221,87           |
| 19. | Talun         | 0,00                 | 1930,88          | 0,00                               | 1930,88           |
| 20. | Sumber        | 0,00                 | 2953,79          | 0,00                               | 2953,79           |
| 21. | Dukupuntang   | 599,00               | 3144,80          | 0,00                               | 3743,80           |
| 22. | Palimanan     | 0,00                 | 1911,87          | 0,00                               | 1911,87           |
| 23. | Plumbon       | 190,33               | 1655,91          | 57,10                              | 1903,34           |
| 24. | Depok         | 0,00                 | 1638,28          | 0,00                               | 1638,28           |
| 25. | Weru          | 0,00                 | 911,00           | 0,00                               | 911,00            |
| 26. | Plered        | 0,00                 | 1323,93          | 0,00                               | 1323,93           |
| 27. | Tengah Tani   | 0,00                 | 976,18           | 0,00                               | 976,18            |
| 28. | Kedawung      | 0,00                 | 1125,40          | 0,00                               | 1125,40           |
| 29. | Gunungjati    | 0,00                 | 2244,90          | 0,00                               | 2244,90           |
| 30. | Kapetakan     | 0,00                 | 6703,67          | 0,00                               | 6703,67           |
| 31. | Suranenggala  | 0,00                 | 2573,29          | 0,00                               | 2573,29           |
| 32. | Klangenan     | 0,00                 | 2042,44          | 0,00                               | 2042,44           |
| 33. | Jamblang      | 0,00                 | 1658,88          | 0,00                               | 1658,88           |
| 34. | Arjawinangun  | 0,00                 | 2429,04          | 0,00                               | 2429,04           |
| 35. | Panguragan    | 0,00                 | 2199,91          | 0,00                               | 2199,91           |
| 36. | Ciwaringin    | 0,00                 | 1610,22          | 0,00                               | 1610,22           |
| 37. | Gempol        | 0,00                 | 2580,77          | 491,57                             | 3072,34           |
| 38. | Susukan       | 0,00                 | 5204,48          | 0,00                               | 5204,48           |
| 39. | Gegesik       | 0,00                 | 6382,72          | 0,00                               | 6382,72           |
| 40. | Kaliwedi      | 0,00                 | 2877,21          | 0,00                               | 2877,21           |
|     |               | <b>6.174,18</b>      | <b>99.855,60</b> | <b>999,91</b>                      | <b>107.028,69</b> |

Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038

**Gambar 2.3**  
**Peta Morfologi**



Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038

### 2.1.2 Topografi

Secara topografis, wilayah Kabupaten Cirebon memiliki ketinggian antara 0-300 meter di atas permukaan laut (mdpl). Wilayah kecamatan yang terletak sepanjang jalur Pantura memiliki ketinggian antara 0 – 10 mdpl yang meliputi Kecamatan Kapetakan, Suranenggala, Gunungjati, Mundu, Astanajapura, Pangenan, Gebang, Losari, dan Pabedilan. Sementara, wilayah kecamatan lainnya berada pada ketinggian antara 11 – 300 mdpl. Adapun pembagian wilayah berdasarkan ketinggiannya dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Wilayah berketinggian antara 0-25 m dpl seluas 70.980,96 Ha atau 65,31% dari luas Kabupaten Cirebon.
2. Wilayah berketinggian antara 25-50 m dpl seluas 11.398,48 Ha atau 10,65% dari luas Kabupaten Cirebon.
3. Wilayah berketinggian antara 50-100 m dpl seluas 11.023,88 Ha atau 10,30% dari luas Kabupaten Cirebon.

4. Wilayah berketinggian antara 100-200 m dpl seluas 6.646,43 Ha atau 6,21% dari luas Kabupaten Cirebon.
5. Wilayah berketinggian antara 200-300 m dpl seluas 4.623,60 Ha atau 4,32% dari luas Kabupaten Cirebon.
6. Wilayah dengan ketinggian 300 m dpl seluas 2.354,61 Ha atau 2,20% dari luas Kabupaten Cirebon.

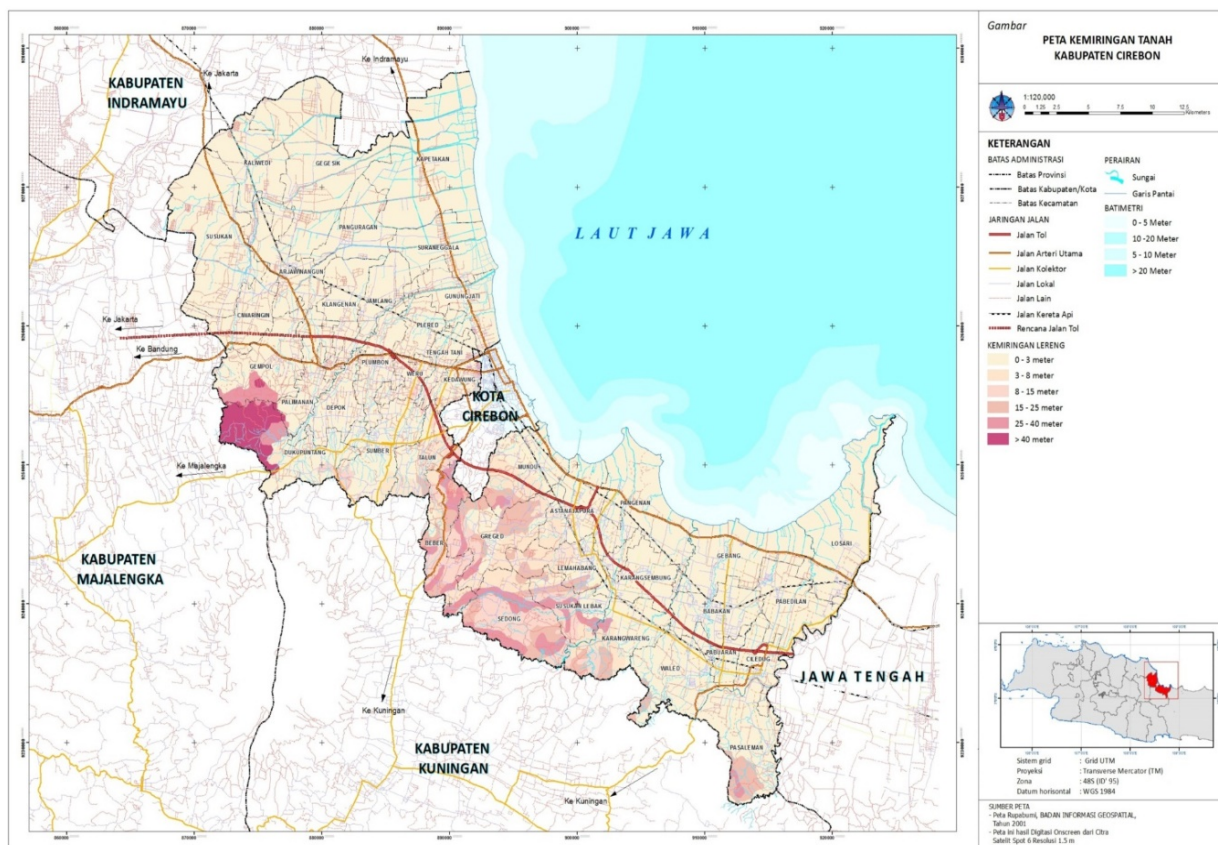
Berdasarkan kontur wilayahnya, Kabupaten Cirebon memiliki kemiringan antara 0-40 %. Kemiringan wilayah dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

**Tabel 2.4**  
**Kemiringan lereng wilayah Kabupaten Cirebon**

| No     | Kemiringan Lereng | Luas (Ha) | Persentase (%) |
|--------|-------------------|-----------|----------------|
| 1.     | 0 – 8 %           | 95.180,00 | 88,93          |
| 2.     | >8 – 15 %         | 2.814,84  | 2,62           |
| 3.     | >15 – 25 %        | 5.565,46  | 5,2            |
| 4.     | >25 – 40 %        | 2.001,42  | 1,87           |
| 5.     | >40 %             | 1.466,28  | 1,37           |
| Jumlah |                   | 107.028   | 100            |

Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038

**Gambar 2.4**  
**Peta Kemiringan Lahan**



Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038

Selanjutnya, untuk Topografi atau ketinggian di Kabupaten Cirebon dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) kelompok ketinggian, wilayah kecamatan yang terletak di sepanjang jalur pantura memiliki ketinggian antara 0-10 mdpl yaitu: Kecamatan Gunungjati, Suranenggala, Kapetakan, Mundu, Gebang, Pangenan, Losari, Astanajapura dan Pabedilan. Sedangkan wilayah kecamatan yang terletak di bagian selatan memiliki ketinggian antara 11-130 mdpl.

Kondisi topografi sangat mempengaruhi kondisi drainase dan permukaan air. Akumulasi bahan organik biasanya terjadi jika keadaan drainase tanah jelek. sehingga tanah yang kekurangan oksigen pada kondisi ini akan mengawetkan bahan organik. terutama jika air tergenang.



Pada daerah yang kemiringannya besar sering terjadi erosi tanah secara terus menerus sehingga subsoil akan muncul kepermukaan tanah. Akibatnya tanah-tanah pada kemiringan yang besar akan memiliki solum yang tipis. kandungan bahan organik yang rendah bila dibandingkan dengan tanah-tanah bergelombang dan datar, 5 (lima) kelompok ketinggian yaitu sebagai berikut:

1. Wilayah dengan ketinggian 0-25 m dpl. tersebar dengan luas kurang lebih 87.183,10 Ha;
2. Wilayah dengan ketinggian 25-100 m dpl. tersebar dengan luas kurang lebih 6.595,30 Ha;
3. Wilayah dengan ketinggian 100-200 m dpl. tersebar dengan luas kurang lebih 8.198,10 Ha;
4. Wilayah dengan ketinggian 200-300 m dpl. tersebar dengan luas kurang lebih 3.188,41 Ha;
5. Wilayah dengan ketinggian >300 m dpl. tersebar dengan luas kurang lebih 1.863,79Ha.

Topografi atau ketinggian wilayah yang disusun menurut luas wilayah Kecamatan di Kabupaten Cirebon yang dikelompokkan menjadi 5 (lima) kelompok ketinggian dapat disajikan pada Tabel 2.4 dibawah ini.

**Tabel 2.5**  
**Luas Ketinggian Berdasarkan Kecamatan**  
**di Kabupaten Cirebon (Ha)**

| No. | Kecamatan     | Ketinggian (Mdpl) |          |           |           |       | Jumlah  |
|-----|---------------|-------------------|----------|-----------|-----------|-------|---------|
|     |               | 0-25              | > 25-100 | > 100-200 | > 200-300 | > 300 |         |
| 1.  | Waled         | 2614,40           | 464,53   | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 3078,93 |
| 2.  | Pasaleman     | 2856,76           | 1074,16  | 200,16    | 0,00      | 0,00  | 4131,08 |
| 3.  | Ciledug       | 1462,86           | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 1462,86 |
| 4.  | Pabuaran      | 957,23            | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 957,23  |
| 5.  | Losari        | 4531,68           | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 4531,68 |
| 6.  | Pabedilan     | 2581,48           | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 2581,48 |
| 7.  | Babakan       | 2218,13           | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 2218,13 |
| 8.  | Gebang        | 3535,98           | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 3535,98 |
| 9.  | Karangsembung | 1881,81           | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 1881,81 |
| 10. | Karangwareng  | 2071,89           | 1,32     | 645,96    | 0,00      | 0,00  | 2719,18 |
| 11. | Lemahabang    | 1162,50           | 390,13   | 706,14    | 6,14      | 0,00  | 2264,91 |



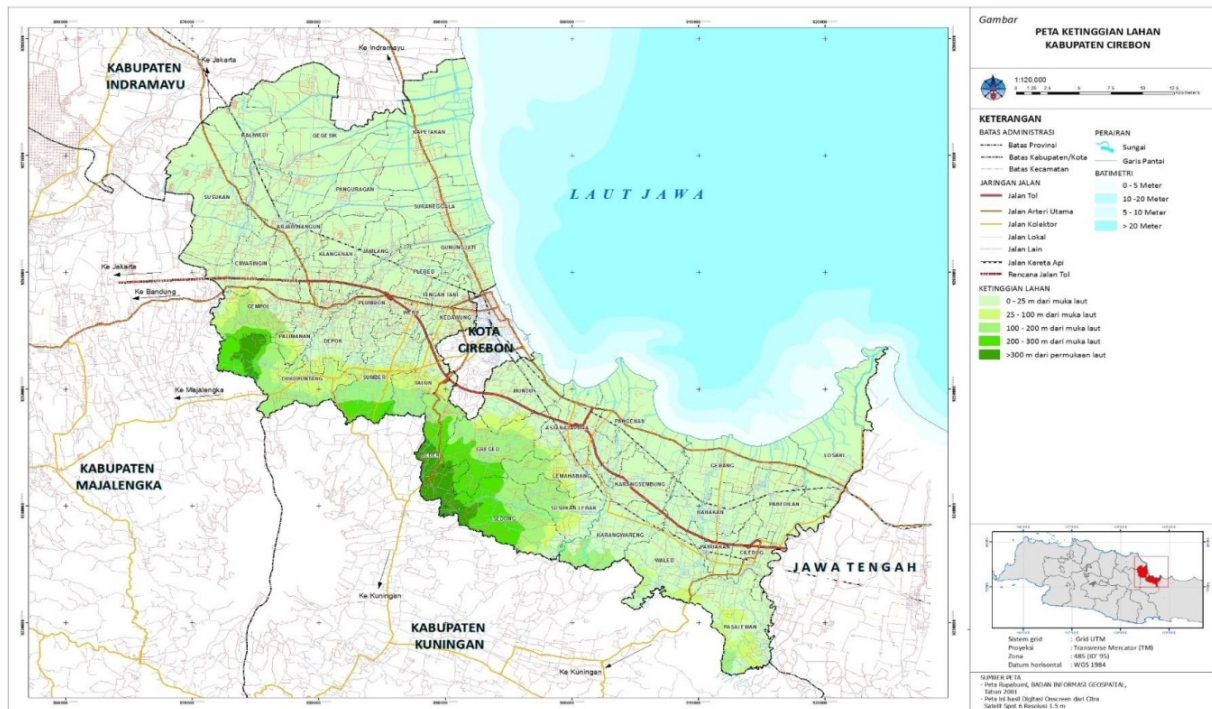
| No. | Kecamatan     | Ketinggian (Mdpl) |                |                |                |                | Jumlah            |
|-----|---------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
|     |               | 0-25              | > 25-100       | > 100-200      | > 200-300      | > 300          |                   |
| 12. | Susukan Lebak | 626,83            | 396,05         | 781,95         | 0,00           | 0,00           | 1804,82           |
| 13. | Sedong        | 3442,50           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 3442,50           |
| 14. | Astanajapura  | 2655,13           | 133,66         | 102,60         | 0,00           | 0,00           | 2891,40           |
| 15. | Pangenan      | 3572,97           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 3572,97           |
| 16. | Mundu         | 2442,31           | 272,35         | 25,47          | 0,00           | 0,00           | 2740,12           |
| 17. | Beber         | 0,00              | 37,06          | 582,14         | 691,39         | 1264,58        | 2575,17           |
| 18. | Greged        | 351,31            | 339,80         | 1459,50        | 1024,76        | 46,50          | 3221,87           |
| 19. | Talun         | 658,65            | 655,86         | 561,71         | 54,65          | 0,00           | 1930,88           |
| 20. | Sumber        | 1023,02           | 579,47         | 770,01         | 581,30         | 0,00           | 2953,79           |
| 21. | Dukupuntang   | 12,81             | 1300,97        | 1254,21        | 635,54         | 540,26         | 3743,80           |
| 22. | Palimanan     | 1506,23           | 247,73         | 154,53         | 3,38           | 0,00           | 1911,87           |
| 23. | Plumbon       | 1903,34           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1903,34           |
| 24. | Depok         | 1308,67           | 329,61         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1638,28           |
| 25. | Weru          | 911,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 911,00            |
| 26. | Plered        | 1322,93           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1322,93           |
| 27. | Tengah Tani   | 976,18            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 976,18            |
| 28. | Kedawung      | 1125,40           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1125,40           |
| 29. | Gunungjati    | 2244,90           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 2244,90           |
| 30. | Kapetakan     | 6703,67           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 6703,67           |
| 31. | Suranenggala  | 2573,29           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 2573,29           |
| 32. | Klangenan     | 2042,44           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 2042,44           |
| 33. | Jamblang      | 1658,88           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1658,88           |
| 34. | Arjawinangun  | 2429,04           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 2429,04           |
| 35. | Panguragan    | 2199,91           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 2199,91           |
| 36. | Ciwaringin    | 1565,05           | 37,05          | 8,12           | 0,00           | 0,00           | 1610,22           |
| 37. | Gempol        | 1587,51           | 335,54         | 945,58         | 191,26         | 12,45          | 3072,34           |
| 38. | Susukan       | 5204,48           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 5204,48           |
| 39. | Gegesik       | 6382,72           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 6382,72           |
| 40. | Kaliwedi      | 2877,21           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 2877,21           |
|     | <b>Jumlah</b> | <b>87183,10</b>   | <b>6595,30</b> | <b>8198,10</b> | <b>3188,41</b> | <b>1863,79</b> | <b>107.028,69</b> |

Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038

Topografi mempengaruhi perkembangan pembentukan profil tanah yaitu jumlah curah hujan terabsorpsi dan penyimpanan dalam tanah. tingkat perpindahan tanah bagian atas oleh erosi dan juga gerakan bahan-bahan dalam suspense atau larutan dari suatu tempat ketempat lain. Faktor topografi yang di nilai adalah tingkat kecuraman lereng karena terdapatnya perbedaan penting dalam syarat- syarat pengelolaan tanah untuk tanaman tertentu pada tingkat kecuraman yang berbeda. Apabila dilihat berdasarkan data yang ada, sebagian besar wilayah di Kabupaten Cirebon berada pada ketinggian 0-25 mdpl. Beberapa kecamatan memiliki wilayah dengan ketinggian 300 mdpl di sebagian wilayahnya, Kecamatan tersebut antara lain: Kecamatan Sedong, Kecamatan Greged, Kecamatan

Gempol dan Kecamatan Dukuhpuntang. Sedangkan Kecamatan Beber, sebagian besar wilayahnya berada pada ketinggian > 300 mdpl.

**Gambar 2.5**  
**Peta Ketinggian Lahan**



Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038

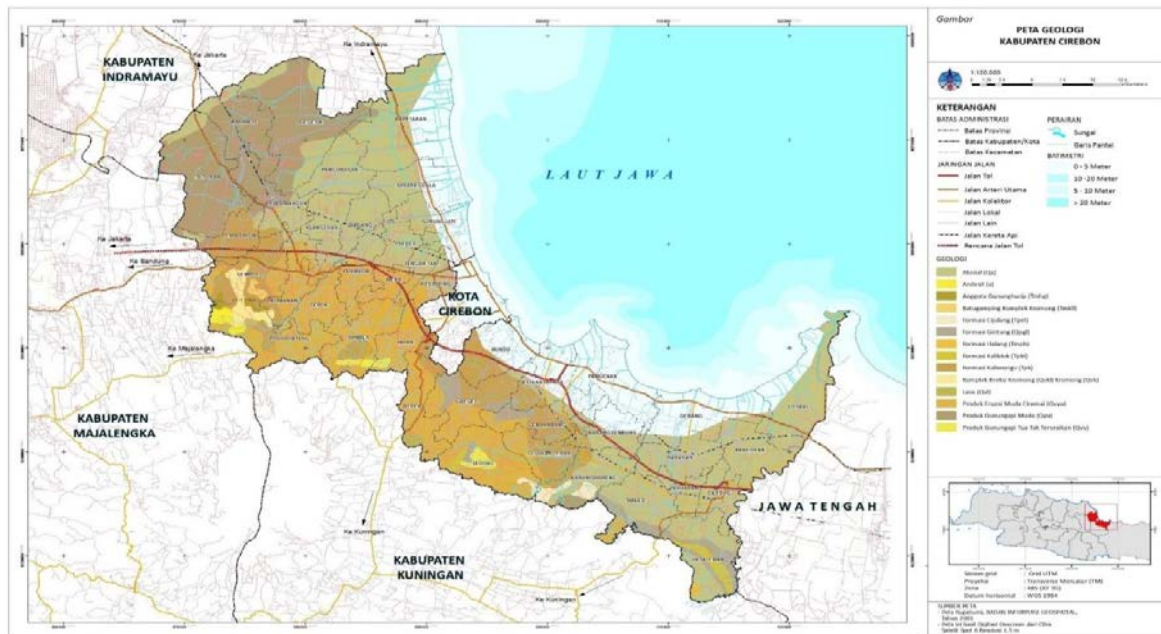
### 2.1.3 Geologi

Kabupaten Cirebon memiliki struktur dan jenis tanah beragam. Berdasarkan hasil identifikasi, struktur geologis tanah adalah hasil gunung api muda yang tak terurai (Qyu) seluas 14.101 Ha, breksi kompleks Kromong (Qvk) seluas 848,75 Ha, batu gamping kompleks Kromong (MI) seluas 155,51 Ha. formasi Kaliwungu (Pk) seluas 10.719,26 Ha. formasi Cijulang (Tpel) seluas 569,91 Ha. Formasi Kalibiuk (Tpb) seluas 663,31 Ha. dan hasil gunung api tua yang tak terurai (Qvu) seluas 608,94 Ha. Kondisi struktur geologis tersebut dipengaruhi oleh keberadaan Gunung Ciremai.

Kondisi struktur geologis di Kabupaten Cirebon sangat dipengaruhi oleh keberadaan Gunung Ciremai, sehingga struktur geologis yang dihasilkan antara lain adalah struktur geologis gunung api muda tak terurai, dimana produk gunung api tersebut meliputi produk erupsi muda ciremai,

produk gunung api muda, serta produk gunung api tua tak terurai. Sedangkan dominasi struktur geologis yang ada adalah formasi alluvial (Qa). Untuk lebih jelasnya mengenai struktur geologis di Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada gambar berikut ini:

### Gambar 2.6



## Peta Geologi Kabupaten Cirebon

Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038



**Tabel 2.6**  
**Jenis Geologi di Kabupaten Cirebon (Ha)**

| No. | Kecamatan     | Jenis Geologi |             |                             |                                      |                         |                        |                       |                        |                         |                               |            |                                   |                              |  | Jumlah   |
|-----|---------------|---------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|------------------------------|--|----------|
|     |               | Aluvial (Qa)  | Andesit (A) | Anggota Gunung Hurip (Tmhg) | Batu Gamping Komplek Kromong (Tmkll) | Formasi Cijulang (Tpel) | Formasi Gintung (Qpgl) | Formasi Halang (Tmph) | Formasi Kalibiu (Tpbl) | Formasi Kaliuwung (Tpk) | Komplek Breksi Kromong (Qvkl) | Lava (Qvl) | Produk Erupsi Muda Gunung Ciremai | Produk Gunung Api Muda (Qyu) | Produk Gunung Api Tua Tak Teruraikan (Qvu) |          |
| 1.  | Arjawinangun  | 995,33        | 0           | 0                           | 0                                    | 0                       | 0                      | 0                     | 0                      | 124,52                  | 0                             | 0          | 0                                 | 1.309,19                     | 0  | 2.429,04 |
| 2.  | Astanajapura  | 2.374,85      | 0           | 0                           | 0                                    | 0                       | 83,67                  | 0                     | 0                      | 432,57                  | 0                             | 0          | 0                                 | 0                            | 0  | 2.891,09 |
| 3.  | Babakan       | 2.218,13      | 0           | 0                           | 0                                    | 0                       | 0                      | 0                     | 0                      | 0                       | 0                             | 0          | 0                                 | 0                            | 0  | 2.218,13 |
| 4.  | Beber         | 14,52         | 0           | 0                           | 0                                    | 0                       | 0,31                   | 0                     | 0                      | 259,76                  | 0                             | 186,84     | 2.090,71                          | 0                            | 0  | 2.552,14 |
| 5.  | Ciledug       | 1.460,93      | 0           | 0                           | 0                                    | 0                       | 0                      | 0                     | 0                      | 0                       | 0                             | 0          | 0                                 | 0                            | 0  | 1.460,93 |
| 6.  | Ciwaringin    | 199,01        | 0           | 0                           | 0                                    | 0                       | 0                      | 0                     | 0                      | 1.383,60                | 0                             | 0          | 0                                 | 338,92                       | 0  | 1.921,53 |
| 7.  | Depok         | 24,34         | 0           | 0                           | 0                                    | 0                       | 0                      | 0                     | 0                      | 23,58                   | 0                             | 0          | 1.590,36                          | 0                            | 0  | 1.638,28 |
| 8.  | Dukuhpuntang  | 0,02          | 357,21      | 158,93                      | 0                                    | 0                       | 0                      | 0                     | 0                      | 435,32                  | 448,05                        | 0          | 2.182,66                          | 0                            | 0  | 3.582,19 |
| 9.  | Gebang        | 3.544,22      | 0           | 0                           | 0                                    | 0                       | 0                      | 0                     | 0                      | 0                       | 0                             | 0          | 0                                 | 0                            | 0  | 3.544,22 |
| 10. | Gegesik       | 1.544,41      | 0           | 0                           | 0                                    | 0                       | 0                      | 0                     | 0                      | 0                       | 0                             | 0          | 0                                 | 4.865,49                     | 0  | 6.409,90 |
| 11. | Gempol        | 92,19         | 0           | 67,55                       | 154,62                               | 0                       | 0                      | 0                     | 0                      | 1.723,50                | 347,4                         | 0          | 711,73                            | 0                            | 0  | 3.096,99 |
| 12. | Greged        | 223,03        | 0           | 0                           | 0                                    | 0                       | 637,03                 | 0                     | 0                      | 1.094,98                | 0                             | 0          | 1.266,28                          | 0                            | 0  | 3.221,32 |
| 13. | Gunungjati    | 2.245,55      | 0           | 0                           | 0                                    | 0                       | 0                      | 0                     | 0                      | 0                       | 0                             | 0          | 0                                 | 0                            | 0  | 2.245,55 |
| 14. | Jamblang      | 1.571,79      | 0           | 0                           | 0                                    | 0                       | 0                      | 0                     | 0                      | 0                       | 0                             | 0          | 87,09                             | 0                            | 0  | 1.658,88 |
| 15. | Kaliwedi      | 377,22        | 0           | 0                           | 0                                    | 0                       | 0                      | 0                     | 0                      | 0                       | 0                             | 0          | 0                                 | 2.493,90                     | 0  | 2.871,12 |
| 16. | Kapetakan     | 6.534,26      | 0           | 0                           | 0                                    | 0                       | 0                      | 0                     | 0                      | 0                       | 0                             | 0          | 0                                 | 126,1                        | 0  | 6.660,36 |
| 17. | Karangsembung | 1.628,30      | 0           | 0                           | 0                                    | 0                       | 0                      | 0                     | 0                      | 253,51                  | 0                             | 0          | 0                                 | 0                            | 0  | 1.881,81 |
| 18. | Karangwaren   | 1.549,58      | 0           | 0                           | 0                                    | 454,18                  | 28                     | 0                     | 0                      | 407,7                   | 0                             | 0          | 32,47                             | 261,63                       | 0  | 2.733,56 |
| 19. | Kedawung      | 830,39        | 0           | 0                           | 0                                    | 0                       | 0                      | 0                     | 0                      | 0                       | 0                             | 0          | 286,99                            | 0                            | 0  | 1.117,38 |
| 20. | Klangenan     | 1.814,57      | 0           | 0                           | 0                                    | 0                       | 0                      | 0                     | 0                      | 0                       | 0                             | 0          | 227,87                            | 0                            | 0  | 2.042,44 |
| 21. | Lemahabang    | 484,81        | 0           | 0                           | 0                                    | 0                       | 299,97                 | 0                     | 0                      | 1.051,66                | 0                             | 0          | 428,48                            | 0                            | 0  | 2.264,92 |
| 22. | Losari        | 4.582,04      | 0           | 0                           | 0                                    | 0                       | 0                      | 0                     | 0                      | 0                       | 0                             | 0          | 0                                 | 0                            | 0  | 4.582,04 |
| 23. | Mundu         | 1.613,83      | 0           | 0                           | 0                                    | 0                       | 0                      | 0                     | 0                      | 1.125,61                | 0                             | 0          | 0                                 | 0                            | 0  | 2.739,44 |





| No. | Kecamatan                | Jenis Geologi    |               |                             |                                      |                         |                        |                       |                        |                         |                               |               |                                   |                              |  | Jumlah            |
|-----|--------------------------|------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|--|-------------------|
|     |                          | Aluvial (Qa)     | Andesit (A)   | Anggota Gunung Hurip (Tmhg) | Batu Gamping Komplek Kromong (Tmkll) | Formasi Cijulang (Tpel) | Formasi Gintung (Qpgl) | Formasi Halang (Tmph) | Formasi Kalibiu (Tpbl) | Formasi Kaliuwung (Tpk) | Komplek Breksi Kromong (Qvkl) | Lava (Qvl)    | Produk Erupsi Muda Gunung Ciremai | Produk Gunung Api Muda (Qyu) | Produk Gunung Api Tua Tak Teruraikan (Qvu) |                   |
| 24. | Pabedilan                | 2.533,41         | 0             | 0                           | 0                                    | 0                       | 0                      | 0                     | 0                      | 0                       | 0                             | 0             | 0                                 | 0                            | 0  | 2.533,41          |
| 25. | Pabuaran                 | 957,23           | 0             | 0                           | 0                                    | 0                       | 0                      | 0                     | 0                      | 0                       | 0                             | 0             | 0                                 | 0                            | 0  | 957,23            |
| 26. | Palimanan                | 327,17           | 0             | 2,11                        | 0,2                                  | 0                       | 0                      | 0                     | 0                      | 268,3                   | 45,92                         | 0             | 1.268,17                          | 0                            | 0  | 1.911,87          |
| 27. | Pangenan                 | 3.576,07         | 0             | 0                           | 0                                    | 0                       | 0                      | 0                     | 0                      | 0                       | 0                             | 0             | 0                                 | 0                            | 0  | 3.576,07          |
| 28. | Panguragan               | 2.177,04         | 0             | 0                           | 0                                    | 0                       | 0                      | 0                     | 0                      | 0                       | 0                             | 0             | 0                                 | 22,86                        | 0  | 2.199,90          |
| 29. | Pasaleman                | 1.980,42         | 0             | 0                           | 0                                    | 0                       | 882,09                 | 96,49                 | 525,45                 | 0                       | 0                             | 0             | 0                                 | 0                            | 0  | 3.484,45          |
| 30. | Plered                   | 1.295,62         | 0             | 0                           | 0                                    | 0                       | 0                      | 0                     | 0                      | 0                       | 0                             | 0             | 27,3                              | 0                            | 0  | 1.322,92          |
| 31. | Plumbon                  | 734,78           | 0             | 0                           | 0                                    | 0                       | 0                      | 0                     | 0                      | 0                       | 0                             | 0             | 1.168,56                          | 0                            | 0  | 1.903,34          |
| 32. | Sedong                   | 0                | 0             | 0                           | 0                                    | 115,73                  | 107,54                 | 0                     | 137,86                 | 0                       | 0                             | 0             | 2.756,99                          | 0                            | 325,2                                      | 3.443,32          |
| 33. | Sumber                   | 0                | 0             | 0                           | 0                                    | 0                       | 0                      | 0                     | 0                      | 508,54                  | 0                             | 0             | 2.284,83                          | 0                            | 181,23                                     | 2.974,60          |
| 34. | Suranenggala             | 2.574,75         | 0             | 0                           | 0                                    | 0                       | 0                      | 0                     | 0                      | 0                       | 0                             | 0             | 0                                 | 0                            | 0  | 2.574,75          |
| 35. | Susukan                  | 486,05           | 0             | 0                           | 0                                    | 0                       | 0                      | 0                     | 0                      | 118,85                  | 0                             | 0             | 0                                 | 4.682,89                     | 0  | 5.287,79          |
| 36. | Susukan Lebak            | 0                | 0             | 0                           | 0                                    | 0                       | 0                      | 0                     | 0                      | 1.170,59                | 0                             | 0             | 634,23                            | 0                            | 0  | 1.804,82          |
| 37. | Tahun                    | 0                | 0             | 0                           | 0                                    | 0                       | 0                      | 0                     | 0                      | 323,05                  | 0                             | 0             | 1.502,82                          | 0                            | 102,4                                      | 1.928,27          |
| 38. | Tengah Tani              | 738,37           | 0             | 0                           | 0                                    | 0                       | 0                      | 0                     | 0                      | 0                       | 0                             | 0             | 237,81                            | 0                            | 0  | 976,18            |
| 39. | Waled                    | 2.093,48         | 0             | 0                           | 0                                    | 0                       | 548,2                  | 0                     | 0                      | 0                       | 0                             | 0             | 319,96                            | 0                            | 0  | 2.961,64          |
| 40. | Weru                     | 47,6             | 0             | 0                           | 0                                    | 0                       | 0                      | 0                     | 0                      | 0                       | 0                             | 0             | 863,4                             | 0                            | 0  | 911,00            |
|     | <b>Kabupaten Cirebon</b> | <b>54.449,98</b> | <b>357,21</b> | <b>228,59</b>               | <b>154,82</b>                        | <b>569,91</b>           | <b>2.586,81</b>        | <b>96,49</b>          | <b>663,31</b>          | <b>10.581,12</b>        | <b>841,37</b>                 | <b>186,84</b> | <b>19.968,71</b>                  | <b>12.791,79</b>             | <b>608,83</b>                              | <b>107.028,69</b> |

Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038

#### 2.1.4 Hidrologi

Kondisi hidrologis wilayah Kabupaten Cirebon meliputi air permukaan dan air tanah. Air permukaan meliputi sungai, situ dan mata air. Sementara, air tanah meliputi air tanah dalam dan air tanah dangkal.

##### 1. Sungai

Kabupaten Cirebon berada di cakupan Wilayah Sungai (WS) Cimanuk-Cisanggarung dengan empat Daerah Aliran Sungai (DAS) meliputi DAS Ciwaringin, DAS Kalibunder, DAS Cisanggarung, dan DAS Bangkaderes. Pengelolaan DAS terbagi dalam kewenangan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.

Pembagian wewenang Daerah Irigasi (DI) tersebut sebagai berikut:

- a. DI yang menjadi kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten meliputi Sungai Condong, Sungai Kalijaga, Sungai Kanci, Sungai Ciberes dan Sungai Cimanis.
- b. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Pusat meliputi:
  - 1) DI Rentang seluas  $\pm 20.620$  Ha
  - 2) DI Ciwaringin seluas  $\pm 1.103$  Ha
  - 3) DI Seuseupan seluas  $\pm 3.897$  Ha
  - 4) DI Cikeusik seluas  $\pm 6.924$  Ha
- c. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Provinsi meliputi:
  - 1) DI Walahar seluas  $\pm 1.286$  Ha
  - 2) DI Jamblang seluas  $\pm 2.141$  Ha
  - 3) DI Cipager seluas  $\pm 855$  Ha
  - 4) DI Setupatok seluas  $\pm 1.365$  Ha
  - 5) DI Paniis Lebak seluas  $\pm 318$  Ha
  - 6) DI Cibacang seluas  $\pm 259$  Ha
  - 7) DI Cipurut seluas  $\pm 134$  Ha
  - 8) DI Jawa seluas  $\pm 111$  Ha
  - 9) DI Mungkal Gajah seluas  $\pm 27$  Ha

- 10) DI Katiga seluas  $\pm 662$  Ha
  - 11) DI Ambit seluas  $\pm 1.543$  Ha
  - 12) DI Cirongkob  $\pm 64$  Ha
- d. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Kabupaten Cirebon meliputi:
- 1) DI Jatisawit seluas  $\pm 690$  Ha;
  - 2) DI Soka seluas  $\pm 282$  Ha;
  - 3) DI Rajadana seluas  $\pm 170$  Ha;
  - 4) DI Ciparigi seluas  $\pm 467$  Ha;
  - 5) DI Keputon seluas  $\pm 446$  Ha;
  - 6) DI W. Sedong seluas  $\pm 168$  Ha;
  - 7) DI Ciwado seluas  $\pm 833$  Ha;
  - 8) DI Agung seluas  $\pm 711$  Ha;
  - 9) DI Kecepat seluas  $\pm 477$  Ha;
  - 10) DI Panongan seluas  $\pm 952$  Ha;
  - 11) DI Cangkuang seluas  $\pm 806$  Ha.

## 2. Tampung Air Berupa Waduk/Situ

Kabupaten Cirebon memiliki 2 buah Waduk/Situ yaitu:

- a. Situ Patok berada berada di Kecamatan Mundu;
- b. Situ Sedong berada berada di Kecamatan Sedong;

## 3. Tampung Air Berupa Embung

Kabupaten Cirebon memiliki 19 (Sembilan belas) Embung yang terdiri dari:

- a. Embung Sarwadadi berada berada di Kecamatan Talun;
- b. Embung Rajadana berada berada di Kecamatan Sumber;
- c. Embung Danamulya berada berada di Kecamatan Plumbon;
- d. Embung Geyongan berada di Kecamatan Arjawinangun;



- e. Embung Slendra berada di Kecamatan Gegesik;
- f. Embung Wanakaya berada di Kecamatan Gunungjati;
- g. Embung Gumulung berada di Kecamatan Greged;
- h. Embung Suranenggala berada di Kecamatan Suranenggala;
- i. Embung Kalideres berada di Kecamatan Kaliwedi;
- j. Embung Jagapura Kulon berada di Kecamatan Gegesik;
- k. Embung Gegesik Kidul berada di Kecamatan Gegesik;
- l. Embung Panguragan Lor berada di Kecamatan Panguragan;
- m. Embung Wanayasa berada di Kecamatan Beber;
- n. Embung Winduhaji berada di Kecamatan Sedong;
- o. Embung Galagamba berada di Kecamatan Ciwaringin;
- p. Embung Guwa Kidul berada di Kecamatan Kaliwedi;
- q. Embung Sumurkondang berada di Kecamatan Karangwareng;
- r. Embung Ciuyah berada di Kecamatan Waled; dan
- s. Embung Cupang berada di Kecamatan Gempol.

#### 4. Mata Air

Kabupaten Cirebon memiliki 196 (seratus sembilan puluh enam) titik mata air yang tersebar di 15 (lima belas) kecamatan.





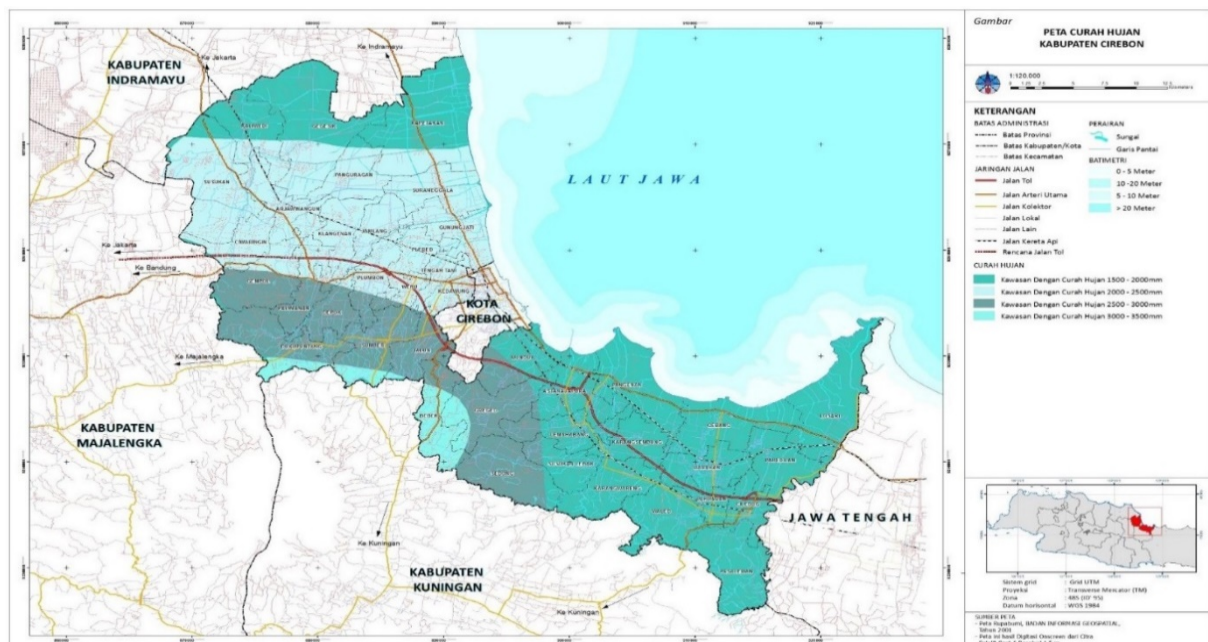
- b. Perhitungan Ketersediaan Lahan;
- c. Perhitungan Kebutuhan Lahan;
- d. Penentuan Status Daya Dukung Lahan;
- e. Daya Dukung Lingkungan Berbasis Neraca Air.

### 2.1.6 Klimatologi

Berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Ferguson, keadaan iklim di Kabupaten Cirebon termasuk tipe C dan D. Karakteristik daerah dengan kategori ini beriklim tropis, dengan suhu minimum 24° C dan suhu rata-rata 28° C. Kabupaten Cirebon memiliki jumlah curah hujan antara 0 - 3.317 mm dengan rata-rata jumlah curah hujan sebanyak 1.265,15 mm. Curah hujan tertinggi terdapat di Kecamatan Dukupuntang (3.317 mm) dan Kecamatan Palimanan (3.204 mm), sedangkan curah hujan terendah terdapat di Kecamatan Suranenggala (136 mm).

**Gambar 2.8**

**Peta Curah Hujan Kabupaten Cirebon**



Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038

**Tabel 2.7**  
**Luas Curah Hujan Berdasarkan Kecamatan di**  
**Kabupaten Cirebon**

| No. | Kecamatan                | Curah Hujan (mm) |                  |                  |                 | Jumlah            |
|-----|--------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
|     |                          | 1500 – 2000      | > 2000 – 2500    | > 2500 – 3000    | > 3000- 3500    |                   |
| 1.  | Waled                    | 3.078,93         | -                | -                | -               | 3.078,93          |
| 2.  | Pasaleman                | 4.131,08         | -                | -                | -               | 4.131,08          |
| 3.  | Ciledug                  | 1.462,86         | -                | -                | -               | 1.462,86          |
| 4.  | Pabuaran                 | 957,23           | -                | -                | -               | 957,23            |
| 5.  | Losari                   | 4.531,68         | -                | -                | -               | 4.531,68          |
| 6.  | Pabedilan                | 2.581,48         | -                | -                | -               | 2.581,48          |
| 7.  | Babakan                  | 2.218,13         | -                | -                | -               | 2.218,13          |
| 8.  | Gebang                   | 3.535,98         | -                | -                | -               | 3.535,98          |
| 9.  | Karangsembung            | 1.881,81         | -                | -                | -               | 1.881,81          |
| 10. | Karangwareng             | 2.719,18         | -                | -                | -               | 2.719,18          |
| 11. | Lemahabang               | 1.660,75         | -                | 604,16           | -               | 2.264,91          |
| 12. | Susukan Lebak            | 1.472,77         | -                | 332,05           | -               | 1.804,82          |
| 13. | Sedong                   | 13,35            | 3.429,15         | -                | -               | 3.442,50          |
| 14. | Astanajapura             | 2.802,69         | -                | 88,71            | -               | 2.891,40          |
| 15. | Pangenan                 | 3.572,97         | -                | -                | -               | 3.572,97          |
| 16. | Mundu                    | 1.728,34         | -                | 1.011,78         | -               | 2.740,12          |
| 17. | Beber                    | 32,62            | -                | 709,94           | 1.832,62        | 2.575,17          |
| 18. | Greged                   | 272,92           | -                | 2.305,68         | 643,27          | 3.221,87          |
| 19. | Talun                    | 25,80            | 33,26            | 1.800,14         | 71,67           | 1.930,88          |
| 20. | Sumber                   | 38,21            | 8,24             | 2.402,36         | 504,97          | 2.953,79          |
| 21. | Dukupuntang              | 64,86            | -                | 3.086,34         | 592,60          | 3.743,80          |
| 22. | Palimanan                | -                | 835,93           | 1.075,94         | -               | 1.911,87          |
| 23. | Plumbon                  | -                | 1.417,73         | 485,61           | -               | 1.903,34          |
| 24. | Depok                    | -                | 1.627,06         | 11,22            | -               | 1.638,28          |
| 25. | Weru                     | -                | 705,53           | 205,47           | -               | 911,00            |
| 26. | Plered                   | -                | 1.322,93         | -                | -               | 1.322,93          |
| 27. | Tengah Tani              | -                | 958,13           | 18,05            | -               | 976,18            |
| 28. | Kedawung                 | 11,12            | 1.110,51         | 3,77             | -               | 1.125,40          |
| 29. | Gunungjati               | 8,71             | 2.236,19         | -                | -               | 2.244,90          |
| 30. | Kapetakan                | 5.076,04         | 1.627,63         | -                | -               | 6.703,67          |
| 31. | Suranenggala             | 31,40            | 2.541,89         | -                | -               | 2.573,29          |
| 32. | Klangenan                | -                | 1.965,43         | 77,01            | -               | 2.042,44          |
| 33. | Jamblang                 | -                | 1.658,88         | -                | -               | 1.658,88          |
| 34. | Arjawinangun             | -                | 2.429,04         | -                | -               | 2.429,04          |
| 35. | Panguragan               | 161,79           | 2.038,12         | -                | -               | 2.199,91          |
| 36. | Ciwaringin               | 44,06            | 1.555,43         | 10,73            | -               | 1.610,22          |
| 37. | Gempol                   | 49,33            | 954,36           | 2.068,65         | -               | 3.072,34          |
| 38. | Susukan                  | 607,87           | 4.596,61         | -                | -               | 5.204,48          |
| 39. | Gegesik                  | 4.452,83         | 1.929,89         | -                | -               | 6.382,72          |
| 40. | Kaliwedi                 | 1.928,07         | 949,14           | -                | -               | 2.877,21          |
|     | <b>Kabupaten Cirebon</b> | <b>51.154,86</b> | <b>35.931,10</b> | <b>16.297,60</b> | <b>3.645,13</b> | <b>107.028,69</b> |

Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038

### **2.1.7 Wilayah Rawan Bencana**

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Ketangguhan sebuah masyarakat dalam menghadapi bencana, harus dimulai dengan kesadaran mendasar dalam masyarakat itu bahwa bencana, baik itu yang disebabkan alam atau karena rekayasa tangan manusia, akan memiliki dampak buruk bagi kehidupan masyarakat itu sendiri, dampaknya antara lain hilangnya nyawa, hancurnya harta benda, mengganggu aktivitas perekonomian, masa depan anak-anak, dan segala aktivitas sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat. Demikian pula bencana-bencana selain gempa, seperti longsor, banjir, dan lain-lain, dengan ciri khasnya masing-masing akan membawa dampak yang parah kepada masyarakat.

Ketangguhan bencana dalam masyarakat akan semakin kokoh manakala masyarakat dan negara memiliki kesadaran yang kuat tentang pentingnya mitigasi bencana, dalam pengertian yang sangat luas. Dengan mitigasi bencana yang dirancang, disosialisasikan, dan dirumuskan secara partisipatif, akan bisa dijadikan sebagai modal untuk mengantisipasi dampak bahaya dan bencana yang akan terjadi, masyarakat telah siap bila sewaktu-waktu ada bahaya dan bencana, yang itu akan mengurangi dampak dan risiko terhadap bencana dan adanya ancaman bencana.

Potensi bencana di Kabupaten Cirebon dapat dikelompokkan berdasarkan bencana alam dan bencana non alam (kebakaran). Berdasarkan pengolahan data digital spasial, dapat diketahui bahwa luas potensi rawan bencana mencapai 68.203,33 Ha, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 2.8**

**Luas dan Tingkat Kerawanan Bencana di Kabupaten Cirebon (Ha)**

| No. | Kecamatan                | Tingkat Kerawanan Bencana |                  |                 |                  | Jumlah           |
|-----|--------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
|     |                          | Kurang Rawan              | Rawan            | Sangat Rawan    | Tidak Rawan      |                  |
| 1.  | Arjawinangun             | 0                         | 115,24           | 0               | 1.695,55         | 1.810,79         |
| 2.  | Astanajapura             | 505,41                    | 1.639,35         | 65,91           | 0                | 2.210,67         |
| 3.  | Babakan                  | 120,16                    | 1.578,83         | 0               | 0                | 1.698,99         |
| 4.  | Beber                    | 0                         | 1.105,39         | 0               | 0                | 1.105,39         |
| 5.  | Ciledug                  | 0                         | 1.097,66         | 0               | 0                | 1.097,66         |
| 6.  | Ciwaringin               | 0                         | 0                | 0               | 1.388,99         | 1.388,99         |
| 7.  | Depok                    | 0                         | 1.027,11         | 0               | 402,51           | 1.429,62         |
| 8.  | Dukuhpuntang             | 0                         | 448,38           | 0               | 1.614,64         | 2.063,02         |
| 9.  | Gebang                   | 0                         | 1.097,66         | 1.607,74        | 0                | 2.705,40         |
| 10. | Gegesik                  | 0                         | 0                | 0               | 5.498,50         | 5.498,50         |
| 11. | Gempol                   | 0                         | 0                | 0               | 1.386,41         | 1.386,41         |
| 12. | Greged                   | 785,86                    | 656,15           | 0               | 0                | 1.442,01         |
| 13. | Gunungjati               | 0                         | 602,12           | 0               | 0                | 602,12           |
| 14. | Jamblang                 | 126,84                    | 1.247,82         | 0               | 0                | 1.374,66         |
| 15. | Kaliwedi                 | 0                         | 0                | 0               | 2.597,23         | 2.597,23         |
| 16. | Kapetakan                | 0                         | 187,87           | 0               | 3.710,01         | 3.897,88         |
| 17. | Karangsembung            | 11,85                     | 1.612,62         | 0               | 0                | 1.624,47         |
| 18. | Karangwareng             | 340,15                    | 1.217,88         | 0               | 0                | 1.558,03         |
| 19. | Kedawung                 | 0                         | 134,16           | 0               | 0                | 134,16           |
| 20. | Klangenan                | 232,25                    | 1.301,99         | 0               | 65,45            | 1.599,69         |
| 21. | Lemahabang               | 682,56                    | 598,19           | 8,73            | 0                | 1.289,48         |
| 22. | Losari                   | 0                         | 1270,7           | 548,82          | 0                | 1.819,52         |
| 23. | Mundu                    | 928,75                    | 1221,1           | 0               | 0                | 2.149,85         |
| 24. | Pabedilan                | 0                         | 1.770,38         | 368,15          | 0                | 2.138,53         |
| 25. | Pabuaran                 | 156,42                    | 618,84           | 0               | 0                | 775,26           |
| 26. | Palimanan                | 11,83                     | 409,55           | 0               | 1.011,41         | 1.432,79         |
| 27. | Pangenan                 | 219,83                    | 544,83           | 1.560,84        | 0                | 2.325,50         |
| 28. | Panguragan               | 0                         | 1.032,35         | 0               | 1.004,21         | 2.036,56         |
| 29. | Pasaleman                | 28,47                     | 1.067,86         | 0               | 904,19           | 2.000,52         |
| 30. | Plered                   | 0                         | 116,19           | 0               | 0                | 116,19           |
| 31. | Plumbon                  | 0                         | 523,42           | 0               | 0                | 523,42           |
| 32. | Sedong                   | 1.276,84                  | 0                | 0               | 0                | 1.276,84         |
| 33. | Sumber                   | 0                         | 1.982,45         | 0               | 0                | 1.982,45         |
| 34. | Suranenggala             | 0                         | 1.366,82         | 0               | 379,38           | 1.746,20         |
| 35. | Susukan                  | 0                         | 666,52           | 0               | 3.374,50         | 4.041,02         |
| 36. | Susukan Lebak            | 1.320,58                  | 39,15            | 0               | 0                | 1.359,73         |
| 37. | Talun                    | 273,04                    | 1.204,54         | 0               | 0                | 1.477,58         |
| 38. | Tengah Tani              | 0                         | 107,03           | 0               | 0                | 107,03           |
| 39. | Waled                    | 710,42                    | 1.431,05         | 0               | 0                | 2.141,47         |
| 40. | Weru                     | 0                         | 237,7            | 0               | 0                | 237,70           |
|     | <b>Kabupaten Cirebon</b> | <b>7.731,26</b>           | <b>31.278,90</b> | <b>4.160,19</b> | <b>25.032,98</b> | <b>68.203,33</b> |

Sumber: BPBD Kabupaten Cirebon, Tahun 2018



## 1. Bencana Alam

Potensi rawan bencana alam yang terdapat di Kabupaten Cirebon, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.9**  
**Jenis Potensi Rawan Bencana Alam Berdasarkan Jenis**  
**Bencana Alam dan Kecamatan di Kabupaten Cirebon**

| No. | Kecamatan     | Rawan Bencana |        |         |                      |
|-----|---------------|---------------|--------|---------|----------------------|
|     |               | Kekeringan    | Banjir | Longsor | Angin Puting Beliung |
| 1.  | Waled         | √             | -      | √       | -                    |
| 2.  | Pasaleman     | -             | √      | -       | -                    |
| 3.  | Ciledug       | √             | √      | -       | -                    |
| 4.  | Pabuaran      | -             | -      | -       | √                    |
| 5.  | Losari        | √             | √      | -       | √                    |
| 6.  | Pabedilan     | √             | √      | -       | -                    |
| 7.  | Babakan       | -             | √      | -       | -                    |
| 8.  | Gebang        | √             | √      | -       | -                    |
| 9.  | Karangsembung | √             | -      | -       | √                    |
| 10. | Karangwareng  | -             | -      | -       | -                    |
| 11. | Lemahabang    | √             | √      | -       | -                    |
| 12. | Susukan Lebak | √             | -      | -       | -                    |
| 13. | Sedong        | √             | -      | √       | -                    |
| 14. | Astanajapura  | √             | √      | -       | √                    |
| 15. | Pangenan      | √             | √      | -       | -                    |
| 16. | Mundu         | √             | √      | -       | -                    |
| 17. | Beber         | √             | -      | √       | -                    |
| 18. | Greged        | -             | -      | √       | -                    |
| 19. | Talun         | -             | -      | -       | -                    |
| 20. | Sumber        | √             | -      | √       | -                    |
| 21. | Dukupuntang   | -             | -      | √       | -                    |
| 22. | Palimanan     | √             | -      | -       | √                    |
| 23. | Plumbon       | √             | √      | -       | -                    |
| 24. | Depok         | √             | -      | -       | -                    |
| 25. | Weru          | √             | -      | -       | -                    |
| 26. | Plered        | √             | √      | -       | -                    |
| 27. | Tengah Tani   | √             | √      | -       | -                    |
| 28. | Kedawung      | √             | -      | -       | -                    |
| 29. | Gunungjati    | -             | √      | -       | -                    |
| 30. | Kapetakan     | √             | √      | -       | -                    |
| 31. | Suranenggala  | √             | √      | -       | -                    |
| 32. | Klangenan     | √             | -      | -       | -                    |
| 33. | Jamblang      | -             | -      | -       | √                    |
| 34. | Arjawinangun  | √             | √      | -       | -                    |
| 35. | Pangurangan   | √             | √      | -       | -                    |
| 36. | Ciwaringin    | √             | -      | -       | -                    |



| No. | Kecamatan | Rawan Bencana |        |         |                      |
|-----|-----------|---------------|--------|---------|----------------------|
|     |           | Kekeringan    | Banjir | Longsor | Angin Puting Beliung |
| 37. | Gempol    | -             | -      | -       | -                    |
| 38. | Susukan   | √             | √      | -       | -                    |
| 39. | Gegesik   | √             | √      | -       | √                    |
| 40. | Kaliwedi  | √             | √      | -       | -                    |

Sumber: BPBD Kabupaten Cirebon, Tahun 2018

Upaya penanganan bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) termasuk OPD terkait sesuai tupoksinya yang dibantu oleh: TNI, Polri, Basarnas, Orari dan PMI. Upaya perbaikan infrastruktur dalam rangka meminimalisir resiko yang diakibatkan bencana, dilakukan oleh:

- BPBD dan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon melakukan sosialisasi di daerah rawan bencana; (bahas tentang mitigasi bencana)
- BBWS Cimanuk dan Cisanggarung melakukan normalisasi sepanjang aliran sungai Cisanggarung, normalisasi sodetan, peninggian tanggul dan perbaikan pentil-pentil saluran air sepanjang Sungai Cisanggarung.

## 2. Bencana Kebakaran

Selain bencana alam, potensi lainnya adalah bencana kebakaran. Berdasarkan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kabupaten Cirebon, dapat diketahui kondisi sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran seperti ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 2.10**

**Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Kabupaten Cirebon**

| No. | Pos Jaga     | Anggota (Orang) | Mobil Pemadam (Unit) | Tandon Air (Unit) | Cakupan Wilayah Pelayanan |
|-----|--------------|-----------------|----------------------|-------------------|---------------------------|
| 1.  | Arjawinangun | 18              | 1                    | 1                 | 6                         |
| 2.  | Palimanan    | 19              | 1                    | 1                 | 6                         |
| 3.  | Weru         | 29              | 3                    | 1                 | 4                         |
| 4.  | Gunung Jati  | 19              | 1                    | 1                 | 3                         |
| 5.  | Lemah Abang  | 25              | 2                    | 1                 | 9                         |
| 6.  | Ciledug      | 27              | 2                    | 1                 | 5                         |
| 7.  | Losari       | 19              | 1                    | 1                 | 4                         |

| No.           | Pos Jaga      | Anggota (Orang) | Mobil Pemadam (Unit) | Tandon Air (Unit) | Cakupan Wilayah Pelayanan |
|---------------|---------------|-----------------|----------------------|-------------------|---------------------------|
| 8.            | Sumber        | 19              | 1                    | -                 | 3                         |
| 9.            | Bidang DAMKAR | 6               | -                    | -                 |                           |
| <b>Jumlah</b> |               | <b>181</b>      | <b>12</b>            | <b>7</b>          | <b>40</b>                 |

Sumber: Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kabupaten Cirebon (Data Kondisi Terkini Th 2020/2021)

**Tabel 2.11**

**Cakupan Pelayanan Pos Jaga Pemadam Kebakaran di Kabupaten Cirebon**

| No. | Pos Jaga     | Tandon Air (liter) | Sumber Air | Cakupan Pelayanan  |
|-----|--------------|--------------------|------------|--|
| 1.  | Arjawinangun | 6.000              | Irigasi    | Arjawinangun, Ciwaringin, Panguragan, Gegesik, Susukan dan Kaliwedi                                |
| 2.  | Palimanan    | 90.000             | Sumur Bor  | Palimanan, Gempol, Klagenan, Jamblang, Depok dan Dukupuntang                                       |
| 3.  | Weru         | 9.000              | Sumur Bor  | Plumbon, Plered, Weru, Tengah Tani, Kedawung, Talun dan Sumber                                     |
| 4.  | Gunung Jati  | 6.000              | PDAM       | Kapetakan, Suranenggala dan Gunung Jati  |
| 5.  | Lemah Abang  | 6.000              | Sumur Bor  | Beber, Greeged, Mundu, Astanajapura, Pangenan, Lemahabang, Sedong, Susukan Lebak dan Karangsambung |
| 6.  | Ciledug      | 8.000              | Sumur Bor  | Karangwareng, Waled, Pabuaran, Ciledug dan Pasaleman   |
| 7.  | Losari       | 6.000              | Sumur Bor  | Losari, Pabedilan, Babakan dan Gebang  |

Sumber: Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kabupaten Cirebon

Untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran perlu dihindari hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran seperti tidak meninggalkan kompor yang menyala, tidak menggunakan sumber listrik dengan beban

yang berat, tidak meletakkan bahan yang mudah terbakar di dekat api, memeriksa kabel listrik yang terkelupas dan mengganti dengan yang baru, memeriksa secara rutin pipa gas, dan menyediakan media pemadam kebakaran seperti pasir, tandon air, dan alat pemadam kebakaran sesuai dengan tipe kebakaran.

Tingkatan resiko bencana kebakaran terbagi menjadi 3 (tiga) tingkat resiko, yaitu: resiko rendah, resiko sedang dan resiko tinggi. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.12**

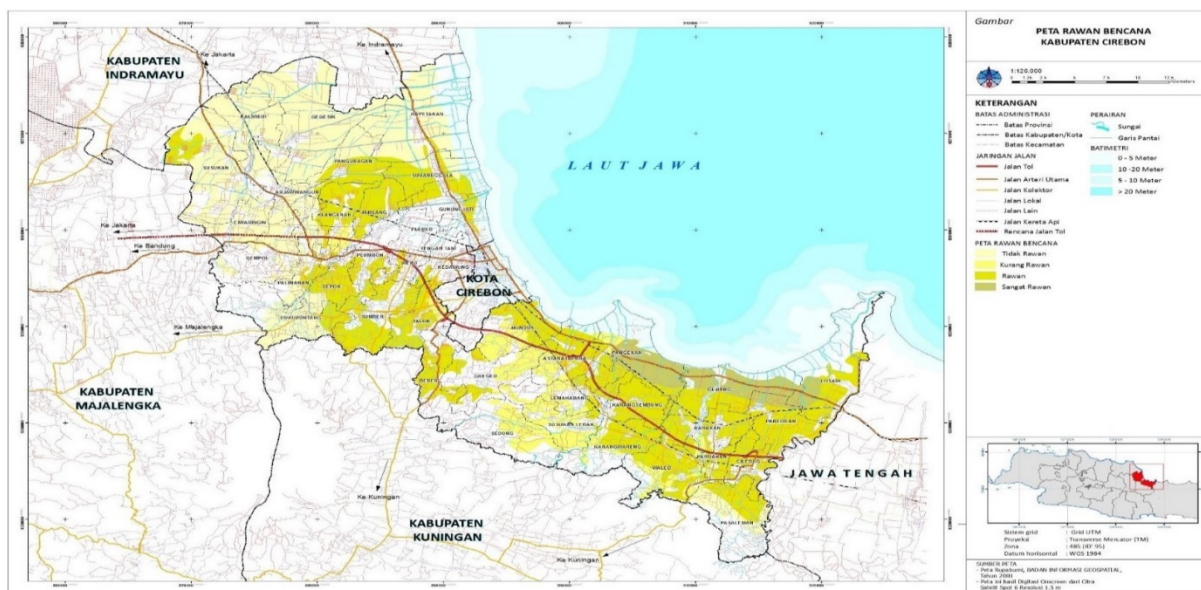
**Resiko Tingkat Kebakaran di Kabupaten Cirebon**

| No. | Tingkat Resiko | Kecamatan   |
|-----|----------------|---|
| 1.  | Rendah         | Kaliwedi, Kapetakan, Panguragan, Suranenggala, Jamblang, Ciwaringin, Gempol, Tengah Tani, Susukan Lebak, Karangsembung, Karangwareng, Pabuaran, Ciledug, Pasaleman dan Losari |
| 2.  | Sedang         | Gegesik, Susukan, Klangeran, Palimanan, Dukupuntang, Talun, Plered, Kedawung, Pangenan, Beber, Sedong, Waled, Pabedilan   |
| 3.  | Tinggi         | Arjawinangun, Plumbon, Depok, Weru, Sumber, Mundu, Greged, Astanajapura, Lemahabang, Gebang dan Babakan   |

Sumber: Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kabupaten Cirebon

**Gambar 2.9**

**Peta Rawan Bencana Kabupaten Cirebon**



Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038

### 2.1.8 Penggunaan lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Cirebon dikelompokkan menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

#### 1. Kawasan Lindung

Berdasarkan RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038, penggunaan lahan untuk kawasan lindung sebagai berikut:

**Tabel 2.13**

**Rencana Penggunaan Lahan Kawasan Lindung  
di Kabupaten Cirebon)**

| No | Fungsi   | Luas (Ha) |
|----|--|-----------|
| 1. | Kawasan Hutan Lindung  | 24        |
|    | a. Kawasan Hutan Lindung   | 24        |
| 2. | Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya | 69        |
|    | a. Kawasan Resapan Air   | 69        |
| 3. | Kawasan Perlindungan Setempat                                    | 6.638     |
|    | a. Kawasan Sempadan Pantai                                       | 383       |
|    | b. Kawasan Sempadan Sungai                                       | 4.967     |
|    | c. Kawasan Sekitar Waduk, Situ dan Embung                        | 347       |
|    | d. Kawasan Sekitar Mata Air                                      | 30        |
|    | e. Kawasan Ruang Terbuka Hijau                                   | 911       |
| 4. | Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya            | 628,5     |
|    | a. Kawasan Suaka Margasatwa                                      | 13        |
|    | b. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan                     | 393       |
|    | c. Kawasan Hutan Bakau   | 204       |
|    | d. Kawasan Hutan Konservasi                                      | 0,5       |
|    | e. Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Pelestarian Alam (KPA)           | 18        |
| 5. | Kawasan Rawan Bencana Alam                                       | 5.084     |

| No | Fungsi                              | Luas (Ha)     |
|----|-------------------------------------|---------------|
|    | a. Kawasan Rawan Tanah Longsor      | 4.538         |
|    | b. Kawasan Gelombang Pasang         | 368           |
|    | c. Kawasan Rawan Banjir             | 82            |
|    | d. Kawasan Rawan Letusan Gunung Api | 95            |
|    | <b>Total Kawasan Lindung</b>        | <b>12.438</b> |

Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038

## 2. Kawasan Budidaya

Berdasarkan RTRW Kabupaten Cirebon, penggunaan lahan untuk kawasan budidaya sebagai berikut:

**Tabel 2.14**

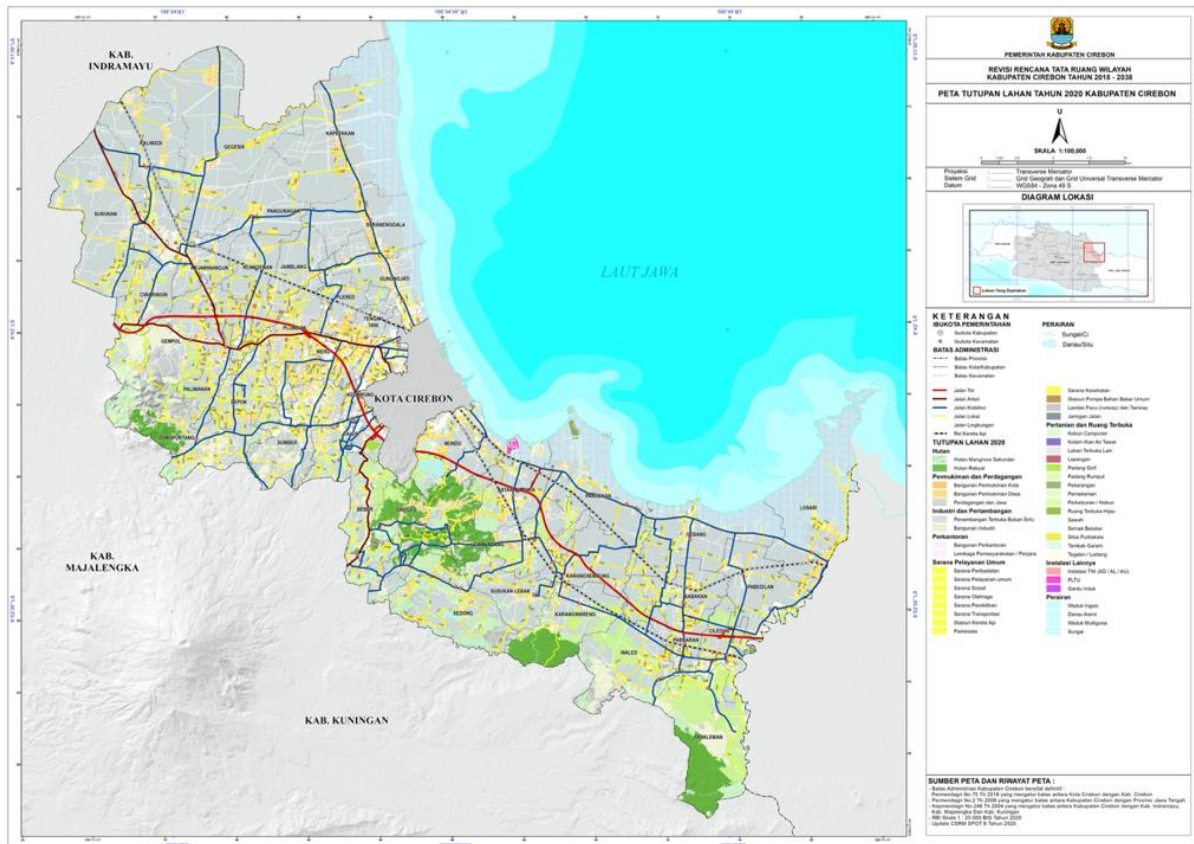
**Rencana penggunaan Lahan Kawasan Budidaya  
di Kabupaten Cirebon**

| No  | Komponen Pola Ruang                     | Luas (Ha) |
|-----|---|-----------|
| 1.  | Hutan Produksi                          | 5.538     |
|     | a. Hutan produksi Tetap (HP)            | 2.072     |
|     | b. Hutan Produksi Terbatas (HPT)        | 3.466     |
| 2.  | Hutan Rakyat (tersebar di 16 kecamatan) | 1.647     |
| 3.  | Pertanian Tanaman Pangan                | 40.000    |
| 4.  | Pertanian Hortikultura                  | 2.000     |
| 5.  | Perkebunan                              | 3.000     |
| 6.  | Perikanan                               | 7.114     |
| 7.  | Peternakan                              | 1.684     |
| 8.  | Petambangan                             | 1.005     |
| 9.  | Industri                                | 10.000    |
| 10. | Pariwisata                              | 123       |
| 11. | Permukiman                              | 21.194    |

Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038



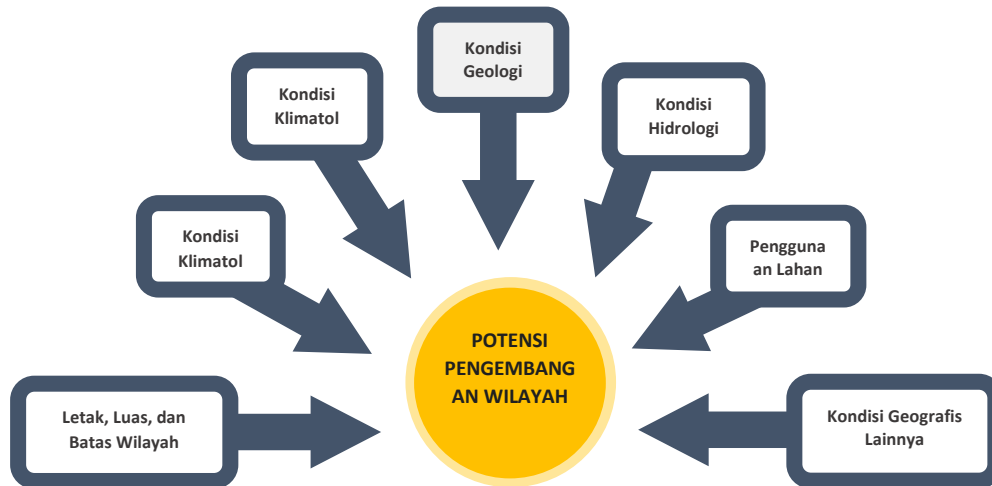
**Gambar 2.10**  
**Peta Tutupan Lahan Kabupaten Cirebon**



Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038

Secara umum, kerangka pemikiran hubungan antara kondisi geografi dengan potensi pengembangan kawasan budidaya di Kabupaten Cirebon bisa dijelaskan dalam gambar berikut:

**Gambar 2.11**  
**Kerangka Pemikiran Hubungan Kondisi Geografis dan Potensi**  
**Pengembangan Wilayah**



Sumber: Diproses dari lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

## 2.1.9 Demografis

### 1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang menempatkan isu perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagai titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan dimaknai sebagai pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.

Kesadaran pembangunan berwawasan kependudukan dilandasi oleh permasalahan kependudukan (demografi) yang mendasar di Indonesia. Permasalahan kependudukan antara lain jumlah penduduk yang besar dan laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi. Masalah kependudukan ini berdampak kepada bidang sosial, ekonomi, politik dan pertahanan serta



keamanan. Masalah kependudukan juga dilihat dari segi kuantitas dan kualitas. Dari segi kuantitas, jumlah penduduk yang besar berarti permasalahan dalam kemampuan menyediakan sandang, pangan, dan papan. Sedangkan dari segi kualitas melihat dari kemampuan daya saing.

Perkembangan penduduk, mulai dari proses kelahiran, kematian, dan pindah (migrasi), merupakan salah satu dari karakteristik demografi. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Cirebon mencapai 2.296.999 jiwa atau terjadi kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 2.189.785 jiwa. Kecamatan Sumber merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi hingga mencapai 95.738 jiwa, di mana hal ini dapat dimaklumi mengingat Kecamatan Sumber merupakan ibukota dari Kabupaten Cirebon dengan pusat-pusat pemerintahan dan perekonomian yang tentunya berada di kecamatan ini. Secara lebih detil, perkembangan dan jumlah penduduk di Kabupaten Cirebon tahun 2016-2020 akan dijabarkan pada tabel dan gambar di bawah ini,

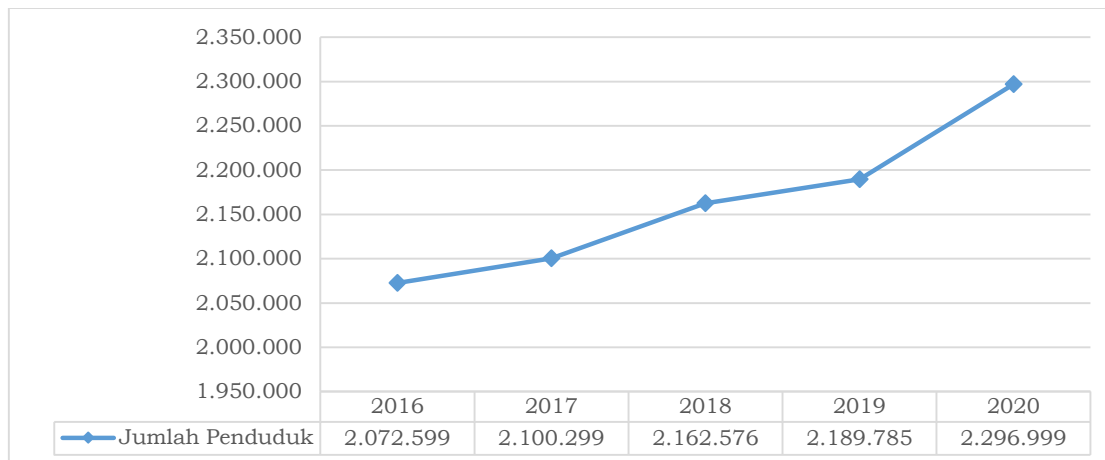
**Tabel 2.15**

**Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2016–2020**

| KODE WIL | KECAMATAN     | JUMLAH PENDUDUK TAHUN |           |           |           |           | % PERTUMBUHAN<br>2019 - 2020 |
|----------|---------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|
|          |               | 2016                  | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      |                              |
| 32.09.01 | WALED         | 50.837                | 52.551    | 54.014    | 54.407    | 57.280    | 5,28                         |
| 32.09.02 | CILEDUG       | 43.971                | 44.198    | 44.555    | 44.501    | 46.235    | 3,90                         |
| 32.09.03 | LOSARI        | 57.340                | 57.250    | 59.673    | 60.160    | 63.359    | 5,32                         |
| 32.09.04 | PABEDILAN     | 49.711                | 51.685    | 55.978    | 56.397    | 59.589    | 5,66                         |
| 32.09.05 | BABAKAN       | 64.540                | 64.589    | 68.993    | 69.636    | 72.791    | 4,53                         |
| 32.09.06 | KARANGSEMBUNG | 34.694                | 35.375    | 36.397    | 36.625    | 37.558    | 2,55                         |
| 32.09.07 | LEMAHABANG    | 50.822                | 51.616    | 53.214    | 54.116    | 56.786    | 4,93                         |
| 32.09.08 | SUSUKANLEBAK  | 38.478                | 39.176    | 40.203    | 40.359    | 41.557    | 2,97                         |
| 32.09.09 | SEDONG        | 37.970                | 39.118    | 40.660    | 40.824    | 43.980    | 7,73                         |
| 32.09.10 | ASTANAJAPURA  | 71.609                | 73.589    | 73.478    | 74.785    | 81.219    | 8,60                         |
| 32.09.11 | PANGENAN      | 42.261                | 42.664    | 44.597    | 44.459    | 48.212    | 8,44                         |
| 32.09.12 | MUNDU         | 68.629                | 70.523    | 71.732    | 71.761    | 76.856    | 7,10                         |
| 32.09.13 | BEBER         | 39.556                | 40.414    | 40.516    | 41.279    | 44.577    | 7,99                         |
| 32.09.14 | TALUN         | 62.895                | 64.574    | 65.198    | 65.854    | 69.707    | 5,85                         |
| 32.09.15 | SUMBER        | 86.981                | 88.701    | 89.192    | 90.891    | 95.738    | 5,33                         |
| 32.09.16 | DUKUPUNTANG   | 60.255                | 61.629    | 62.656    | 62.951    | 66.316    | 5,35                         |
| 32.09.17 | PALIMANAN     | 59.871                | 59.783    | 60.899    | 61.600    | 63.275    | 2,72                         |
| 32.09.18 | PLUMBON       | 73.849                | 75.229    | 78.259    | 80.062    | 82.105    | 2,55                         |
| 32.09.19 | WERU          | 65.229                | 66.597    | 66.909    | 68.546    | 71.125    | 3,76                         |
| 32.09.20 | KEDAWUNG      | 56.172                | 57.060    | 57.980    | 58.687    | 60.982    | 3,91                         |
| 32.09.21 | GUNUNG JATI   | 76.239                | 76.353    | 78.319    | 79.307    | 82.458    | 3,97                         |
| 32.09.22 | KAPETAKAN     | 51.338                | 52.412    | 56.036    | 57.574    | 61.958    | 7,61                         |
| 32.09.23 | KLANGENAN     | 48.356                | 49.620    | 51.417    | 52.676    | 54.311    | 3,10                         |
| 32.09.24 | ARJAWINAGUN   | 65.508                | 65.703    | 67.780    | 68.891    | 71.695    | 4,07                         |
| 32.09.25 | PANGURAGAN    | 40.171                | 41.091    | 42.570    | 42.626    | 44.901    | 5,34                         |
| 32.09.26 | CIWARINGIN    | 35.391                | 35.152    | 36.821    | 37.328    | 39.054    | 4,62                         |
| 32.09.27 | SUSUKAN       | 60.855                | 60.715    | 64.382    | 65.682    | 70.067    | 6,68                         |
| 32.09.28 | GEGESIK       | 66.792                | 66.101    | 68.979    | 69.260    | 70.948    | 2,44                         |
| 32.09.29 | KALIWEDI      | 38.467                | 38.192    | 39.851    | 40.491    | 41.793    | 3,22                         |
| 32.09.30 | GEBANG        | 61.942                | 60.899    | 65.027    | 65.233    | 68.581    | 5,13                         |
| 32.09.31 | DEPOK         | 60.185                | 61.078    | 62.272    | 63.474    | 66.128    | 4,18                         |
| 32.09.32 | PASALEMAN     | 25.920                | 26.214    | 26.793    | 26.886    | 27.621    | 2,73                         |
| 32.09.33 | PABUARAN      | 34.777                | 34.775    | 35.445    | 35.558    | 37.086    | 4,30                         |
| 32.09.34 | KARANG WARENG | 27.018                | 27.563    | 28.159    | 28.151    | 29.248    | 3,90                         |
| 32.09.35 | TENGAH TANI   | 40.620                | 41.529    | 41.884    | 42.590    | 44.612    | 4,75                         |
| 32.09.36 | PLERED        | 49.875                | 51.197    | 52.132    | 53.176    | 55.343    | 4,08                         |
| 32.09.37 | GEMPOL        | 43.190                | 43.638    | 44.831    | 45.757    | 47.485    | 3,78                         |
| 32.09.38 | GREGED        | 51.955                | 53.234    | 53.269    | 53.975    | 58.301    | 8,01                         |
| 32.09.39 | SURANENGGALA  | 41.152                | 41.257    | 43.471    | 44.607    | 46.904    | 5,15                         |
| 32.09.40 | JAMBLANG      | 37.178                | 37.255    | 38.035    | 38.643    | 39.258    | 1,59                         |
|          | J U M L A H   | 2.072.599             | 2.100.299 | 2.162.576 | 2.189.785 | 2.296.999 | 4,90                         |

Sumber: 1. Database Siak Disdukcapil Kabupaten Cirebon Tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 dan 2020;  
2. Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Cirebon Tahun 2020

### Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020



Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2020 dan 2021, BPS yang dikelola dalam SIPD

Uraian Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.16**

#### Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon, 2020

| No. | Kecamatan     | Penduduk (jiwa) | Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2010-2020 | Persentase Penduduk | Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup> | Rasio Jenis Kelamin Penduduk |
|-----|---------------|-----------------|---|---------------------|--|------------------------------|
| 1.  | Waled         | 57.013          | 0,62  | 2,47                | 1.819                                  | 103                          |
| 2.  | Pasaleman     | 27.621          | 0,61  | 1,17                | 642                                    | 100                          |
| 3.  | Ciledug       | 46.235          | 0,78  | 2,01                | 3.117                                  | 103                          |
| 4.  | Pabuaran      | 37.086          | 0,87  | 1,62                | 3.841                                  | 103                          |
| 5.  | Losari        | 63.359          | 1,42  | 2,75                | 1.376                                  | 103                          |
| 6.  | Pabedilan     | 59.589          | 1,23  | 2,56                | 2.254                                  | 101                          |
| 7.  | Babakan       | 72.791          | 1,35  | 3,14                | 3.214                                  | 100                          |
| 8.  | Gebang        | 68.581          | 1,64  | 2,99                | 1.919                                  | 102                          |
| 9.  | Karangsembung | 37.558          | 0,58  | 1,61                | 1.939                                  | 101                          |
| 10. | Karangwareng  | 29.248          | 0,72  | 1,26                | 1.050                                  | 104                          |
| 11. | Lemahabang    | 56.786          | 0,91  | 2,45                | 2.453                                  | 103                          |
| 12. | Susukan Lebak | 41.557          | 1,06  | 1,81                | 2.280                                  | 104                          |
| 13. | Sedong        | 43.980          | 0,70  | 1,86                | 1.229                                  | 104                          |
| 14. | Astanajapura  | 81.219          | 0,53  | 3,52                | 2.763                                  | 105                          |
| 15. | Pangenan      | 48.212          | 0,86  | 2,06                | 1.312                                  | 104                          |
| 16. | Mundu         | 76.856          | 0,99  | 3,58                | 2.964                                  | 105                          |
| 17. | Beber         | 44.577          | 1,91  | 1,95                | 1.717                                  | 107                          |
| 18. | Greged        | 58.301          | 1,06  | 2,50                | 1.763                                  | 106                          |





| No.                 | Kecamatan    | Penduduk (jiwa)  | Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2010-2020 | Persentase Penduduk | Kepadatan Penduduk per km2 | Rasio Jenis Kelamin Penduduk |
|---------------------|--------------|------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| 19.                 | Talun        | 69.707           | 1,29  | 3,15                | 3.701                      | 104                          |
| 20.                 | Sumber       | 95.738           | 1,78  | 4,26                | 3.274                      | 104                          |
| 21.                 | Dikupuntang  | 66.316           | 0,74  | 2,86                | 1.736                      | 102                          |
| 22.                 | Palimanan    | 63.275           | 1,08  | 2,73                | 3.239                      | 101                          |
| 23.                 | Plumbon      | 82.105           | 1,15  | 3,63                | 4.326                      | 105                          |
| 24.                 | Depok        | 66.128           | 1,49  | 2,92                | 4.044                      | 103                          |
| 25.                 | Weru         | 71.125           | 0,85  | 3,08                | 7.677                      | 107                          |
| 26.                 | Plered       | 55.343           | 0,76  | 2,43                | 4.165                      | 104                          |
| 27.                 | Tengahtani   | 44.612           | 1,18  | 2,00                | 4.655                      | 104                          |
| 28.                 | Kedawung     | 60.982           | -0,21   | 2,68                | 5.416                      | 102                          |
| 29.                 | Gunungjati   | 82.458           | 0,56  | 3,63                | 3.672                      | 101                          |
| 30.                 | Kapetakan    | 61.958           | 1,67  | 2,68                | 910                        | 103                          |
| 31.                 | Suranenggala | 46.904           | 1,07  | 2,03                | 1.791                      | 101                          |
| 32.                 | Klangenan    | 54.311           | 0,37  | 2,33                | 2.593                      | 102                          |
| 33.                 | Jamblang     | 39.258           | 0,82  | 1,68                | 2.305                      | 102                          |
| 34.                 | Arjawinangun | 71.695           | 1,19  | 3,11                | 2.912                      | 103                          |
| 35.                 | Panguragan   | 44.901           | 0,13  | 1,90                | 1.964                      | 102                          |
| 36.                 | Ciwaringin   | 39.054           | 0,07  | 1,69                | 2.384                      | 100                          |
| 37.                 | Gempol       | 47.485           | 0,66  | 2,04                | 1.505                      | 105                          |
| 38.                 | Susukan      | 70.067           | 0,93  | 3,01                | 1.314                      | 101                          |
| 39.                 | Gegesik      | 70.948           | -0,03   | 3,05                | 1.087                      | 102                          |
| 40.                 | Kaliwedi     | 41.793           | 1,28  | 1,80                | 1.422                      | 101                          |
| <b>Kab. Cirebon</b> |              | <b>2.296.999</b> | <b>0,94</b>                                   | <b>100,00</b>       | <b>2.122</b>               | <b>103</b>                   |

Sumber: Database Siak Disdukcapil Kabupaten Cirebon

## 2. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Kabupaten Cirebon tahun 2020 berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat sesuai tabel berikut:

**Tabel 2.17**  
**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin**  
**Kabupaten Cirebon 2020**

| KODE<br>WIL. | KECAMATAN     | LAKI-LAKI  | PEREMPUAN  | JUMLAH    | RASIO JENIS |
|--------------|---------------|------------|------------|-----------|-------------|
|              |               | n ( Jiwa ) | n ( Jiwa ) | ( Jiwa )  | KELAMIN     |
| 32.09.01     | WALED         | 28.992     | 28.288     | 57.280    | 102,49      |
| 32.09.02     | CILEDUG       | 23.368     | 22.867     | 46.235    | 102,19      |
| 32.09.03     | LOSARI        | 32.016     | 31.343     | 63.359    | 102,15      |
| 32.09.04     | PABEDILAN     | 29.987     | 29.602     | 59.589    | 101,30      |
| 32.09.05     | BABAKAN       | 36.387     | 36.404     | 72.791    | 99,95       |
| 32.09.06     | KARANGSEMBUNG | 18.903     | 18.655     | 37.558    | 101,33      |
| 32.09.07     | LEMAHABANG    | 28.829     | 27.957     | 56.786    | 103,12      |
| 32.09.08     | SUSUKANLEBAK  | 21.210     | 20.347     | 41.557    | 104,24      |
| 32.09.09     | SEDONG        | 22.395     | 21.585     | 43.980    | 103,75      |
| 32.09.10     | ASTANAJAPURA  | 41.557     | 39.662     | 81.219    | 104,78      |
| 32.09.11     | PANGENAN      | 24.549     | 23.663     | 48.212    | 103,74      |
| 32.09.12     | MUNDU         | 39.177     | 37.679     | 76.856    | 103,98      |
| 32.09.13     | BEBER         | 23.032     | 21.545     | 44.577    | 106,90      |
| 32.09.14     | TALUN         | 35.497     | 34.210     | 69.707    | 103,76      |
| 32.09.15     | SUMBER        | 48.765     | 46.973     | 95.738    | 103,81      |
| 32.09.16     | DUKUPUNTANG   | 33.496     | 32.820     | 66.316    | 102,06      |
| 32.09.17     | PALIMANAN     | 31.897     | 31.378     | 63.275    | 101,65      |
| 32.09.18     | PLUMBON       | 41.908     | 40.197     | 82.105    | 104,26      |
| 32.09.19     | WERU          | 36.584     | 34.541     | 71.125    | 105,91      |
| 32.09.20     | KEDAWUNG      | 30.743     | 30.239     | 60.982    | 101,67      |
| 32.09.21     | GUNUNG JATI   | 41.359     | 41.099     | 82.458    | 100,63      |
| 32.09.22     | KAPETAKAN     | 31.430     | 30.528     | 61.958    | 102,95      |
| 32.09.23     | KLANGENAN     | 27.391     | 26.920     | 54.311    | 101,75      |
| 32.09.24     | ARJAWINANGUN  | 36.314     | 35.381     | 71.695    | 102,64      |
| 32.09.25     | PANGURAGAN    | 22.618     | 22.283     | 44.901    | 101,50      |
| 32.09.26     | CIWARINGIN    | 19.528     | 19.526     | 39.054    | 100,01      |
| 32.09.27     | SUSUKAN       | 35.083     | 34.984     | 70.067    | 100,28      |
| 32.09.28     | GEGESIK       | 35.781     | 35.167     | 70.948    | 101,75      |
| 32.09.29     | KALIWEDI      | 20.927     | 20.866     | 41.793    | 100,29      |
| 32.09.30     | GEBANG        | 34.522     | 34.059     | 68.581    | 101,36      |
| 32.09.31     | DEPOK         | 33.572     | 32.556     | 66.128    | 103,12      |
| 32.09.32     | PASALEMAN     | 13.811     | 13.810     | 27.621    | 100,01      |
| 32.09.33     | PABUARAN      | 18.781     | 18.305     | 37.086    | 102,60      |
| 32.09.34     | KARANGWARENG  | 14.889     | 14.359     | 29.248    | 103,69      |
| 32.09.35     | TENGAH TANI   | 22.709     | 21.903     | 44.612    | 103,68      |
| 32.09.36     | PLERED        | 28.198     | 27.145     | 55.343    | 103,88      |
| 32.09.37     | GEMPOL        | 24.226     | 23.259     | 47.485    | 104,16      |
| 32.09.38     | GREGED        | 30.025     | 28.276     | 58.301    | 106,19      |
| 32.09.39     | SURANENGGA    | 23.497     | 23.407     | 46.904    | 100,38      |
| 32.09.40     | JAMBLANG      | 19.807     | 19.451     | 39.258    | 101,83      |
|              | J U M L A H   | 1.163.760  | 1.133.239  | 2.296.999 | 102,69      |

Sumber: Database Siak Disdukcapil Kabupaten Cirebon

Berdasarkan data tabel di atas, dapat dilihat dari rasio jenis kelamin (sex ratio), bahwa hampir semua kecamatan, penduduk berjenis kelamin

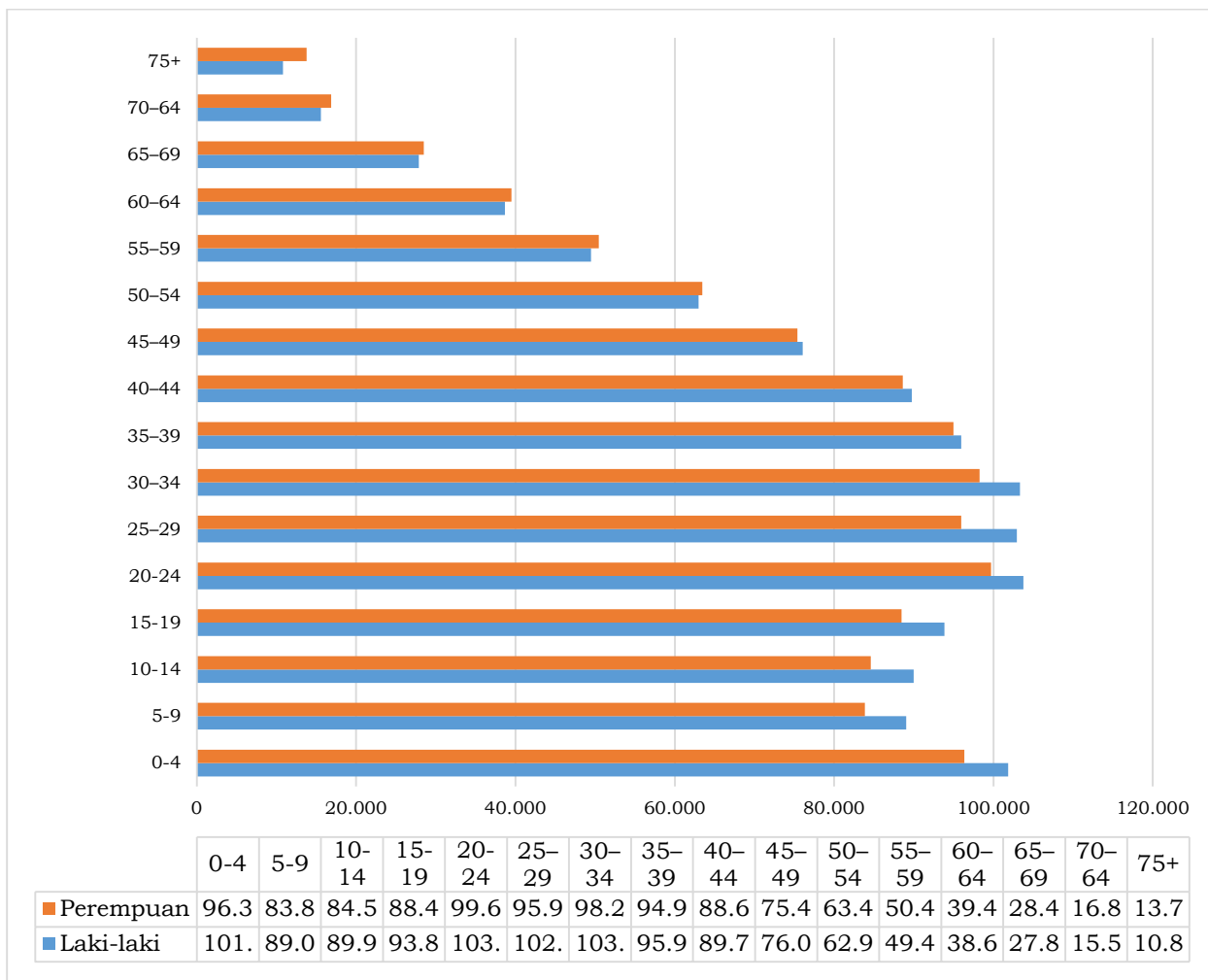
laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon tahun 2020 adalah 102,69. Artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 102-103 penduduk laki-laki. Rasio Jenis Kelamin di tiap Kecamatan rata rata diatas 100. Hal ini berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari pada perempuan. Jika diamati masing-masing Kecamatan maka Kecamatan Beber mempunyai rasio jenis kelamin tertinggi dibandingkan dengan kecamatan lain yaitu 106,90. Artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 106-107 penduduk laki laki. Rasio jenis tertinggi kedua yaitu kecamatan Gregeed yaitu 106,19. Artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 106-107 penduduk laki laki. Sedangkan Rasio Jenis Kelamin terendah adalah Kecamatan Babakan yaitu sebesar 99,95. Artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99-100 penduduk laki-laki.

### **3. Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur**

Kabupaten Cirebon dilihat dari persebaran penduduk berdasarkan kelompok umur, sebagian besar berada pada usia remaja (20-24 tahun) mencapai 203.455 jiwa pada tahun 2020. Usia remaja ini mengindikasikan tingkat ketergantungan yang cukup tinggi mengingat masih perlunya biaya pendidikan dan belum produktif dalam bekerja.

**Gambar 2.12**

**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon Tahun 2020**



Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2021 yang dikelola dalam SIPD

Data di atas memperlihatkan bahwa penduduk umur anak-anak sampai dengan remaja cukup tinggi yang mengindikasikan besarnya potensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan pembangunan pada masa mendatang sehingga perlu adanya program yang terarah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang.

## **2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

### **2.2.1. Pertumbuhan PDRB**

PDRB merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat dari sisi makro ekonomi. PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul akibat adanya berbagai kegiatan ekonomi atau proses produksi yang tercipta di suatu daerah atau wilayah dalam suatu periode tertentu tanpa memerhatikan apakah faktor produksi dimiliki daerah tersebut atau tidak.

Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa nilai PDRB atas dasar harga berlaku selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 nilai PDRB ADHB hanya mencapai 38.840,78 milyar rupiah, namun pada tahun 2020 nilainya naik menjadi 49.561,30 milyar rupiah.

Secara lengkap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cirebon Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut ini:



**Tabel 2.18**

**Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cirebon Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Cirebon (Milyar Rupiah), 2016-2020**

| Kategori | Uraian   | 2016             | 2017             | 2018             | 2019*            | 2020**           |
|----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A        | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 6.339,47         | 6.612,59         | 7.211,82         | 7.591,12         | 7.877,15         |
| B        | Pertambangan dan Penggalian                                    | 527,99           | 517,41           | 532,94           | 520,61           | 526,24           |
| C        | Industri Pengolahan  | 8.321,35         | 8.903,18         | 9.538,76         | 10.046,95        | 10.209,09        |
| D        | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 69,69            | 86,44            | 93,72            | 101,55           | 95,23            |
| E        | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 30,19            | 35,87            | 40,89            | 46,93            | 55,23            |
| F        | Konstruksi   | 4.498,75         | 4.817,14         | 5.264,54         | 5.632,73         | 5.413,44         |
| G        | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 6.146,25         | 6.608,84         | 7.067,68         | 7.580,80         | 7.201,11         |
| H        | Transportasi dan Pergudangan                                   | 3.131,58         | 3.432,64         | 3.751,42         | 4.173,60         | 4.122,75         |
| I        | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 1.330,94         | 1.484,46         | 1.556,48         | 1.711,14         | 1.567,79         |
| J        | Informasi dan Komunikasi                                       | 893,20           | 988,96           | 1.063,95         | 1.122,90         | 1.467,51         |
| K        | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 1.383,02         | 1.527,54         | 1.686,42         | 1.871,67         | 1.922,66         |
| L        | Real Estate  | 838,15           | 930,50           | 1.022,42         | 1.130,75         | 1.184,60         |
| M,N      | Jasa Perusahaan  | 295,55           | 329,47           | 362,65           | 444,92           | 415,16           |
| O        | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 1.229,69         | 1.298,86         | 1.396,80         | 1.502,24         | 1.639,21         |
| P        | Jasa Pendidikan  | 1.806,01         | 2.092,99         | 2.416,19         | 2.841,71         | 3.062,26         |
| Q        | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 733,83           | 814,49           | 896,51           | 998,60           | 1.020,92         |
| R,S,T,U  | Jasa lainnya   | 1.265,12         | 1.437,92         | 1.596,09         | 1.817,59         | 1.780,95         |
|          | <b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>                          | <b>38.840,78</b> | <b>41.919,30</b> | <b>45.449,28</b> | <b>49.135,81</b> | <b>49.561,30</b> |

Sumber: BPS Kabupaten Cirebon 2021



Berbeda dengan kondisi PDRB ADHB yang terus mengalami peningkatan, untuk PDRB ADHK selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan nilai PDRB ADHK menjadi 33.304,50 milyar rupiah atau turun sebesar 363,60 milyar rupiah dibanding dengan kondisi pada tahun 2019 yang mencapai 33.668,10 milyar rupiah.

Secara lengkap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cirebon Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut ini:

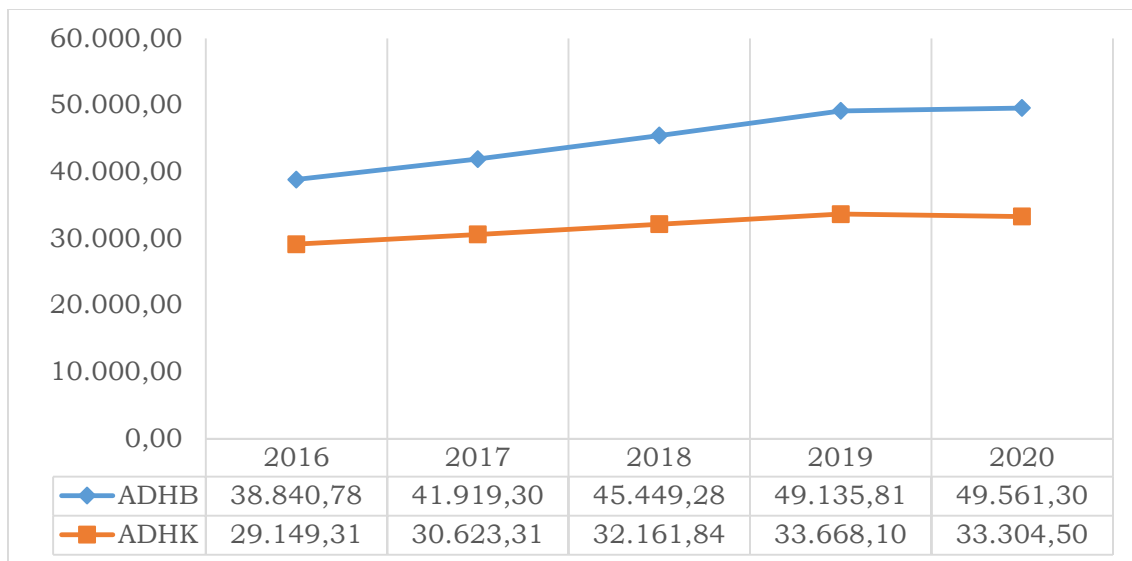


**Tabel 2.19**

**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Cirebon (Milyar Rupiah), 2016-2020**

| Kategori | Uraian   | 2016             | 2017             | 2018             | 2019*            | 2020**           |
|----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A        | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 4.360,55         | 4.426,99         | 4.531,85         | 4.484,22         | 4.563,11         |
| B        | Pertambangan dan Penggalian                                    | 419,37           | 420,75           | 431,18           | 416,88           | 417,12           |
| C        | Industri Pengolahan  | 6.020,19         | 6.325,53         | 6.662,38         | 6.850,49         | 6.821,64         |
| D        | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 47,42            | 51,71            | 53,00            | 56,63            | 54,01            |
| E        | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 23,58            | 25,40            | 26,57            | 28,36            | 33,19            |
| F        | Konstruksi   | 3.527,20         | 3.679,25         | 3.936,18         | 4.046,87         | 3.869,18         |
| G        | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 4.647,96         | 4.853,02         | 5.011,42         | 5.242,93         | 4.874,19         |
| H        | Transportasi dan Pergudangan                                   | 2.172,36         | 2.310,40         | 2.446,49         | 2.681,86         | 2.582,51         |
| I        | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 1.049,02         | 1.129,85         | 1.160,83         | 1.224,37         | 1.108,02         |
| J        | Informasi dan Komunikasi                                       | 866,99           | 950,05           | 1.035,69         | 1.103,91         | 1.440,25         |
| K        | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 1.061,76         | 1.113,88         | 1.191,87         | 1.286,48         | 1.303,60         |
| L        | Real Estate  | 649,87           | 713,12           | 775,73           | 847,61           | 858,27           |
| M,N      | Jasa Perusahaan  | 247,83           | 271,12           | 294,35           | 321,66           | 288,51           |
| O        | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 849,61           | 853,01           | 870,71           | 903,40           | 901,31           |
| P        | Jasa Pendidikan  | 1.488,64         | 1.630,47         | 1.757,89         | 1.984,68         | 2.052,56         |
| Q        | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 615,28           | 663,09           | 711,63           | 794,03           | 786,74           |
| R,S,T,U  | Jasa lainnya   | 1.101,68         | 1.205,67         | 1.264,07         | 1.393,72         | 1.350,29         |
|          | <b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>                          | <b>29.149,31</b> | <b>30.623,31</b> | <b>32.161,84</b> | <b>33.668,10</b> | <b>33.304,50</b> |

**Gambar 2.13**  
**Produk Domestik Regional Bruto**  
**Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)**



Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2020, BPS yang dikelola dalam SIPD

Nilai tambah produksi yang dihasilkan di Kabupaten Cirebon terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir, terlebih pada tahun 2019 yang meningkat cukup signifikan. Nilai PDRB ADHB Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 mencapai 49.561,30 milyar rupiah, jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, sektor industri pengolahan masih menjadi andalan. Penyumbang perekonomian terbesar kedua adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sektor yang paling sedikit berkontribusi dalam pembentukan perekonomian Kabupaten Cirebon adalah sektor sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang juga sebesar 0,11 persen.

**Tabel 2.20**

**Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Cirebon (persen), Tahun 2016-2020**

| Lapangan Usaha                        |   | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| A                                     | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                             | 16,32         | 15,77         | 15,85         | 15,45         | 15,90         |
| B                                     | Pertambangan dan Penggalian                                     | 1,36          | 1,23          | 1,17          | 1,06          | 1,06          |
| C                                     | Industri Pengolahan   | 21,42         | 21,24         | 20,96         | 20,45         | 20,60         |
| D                                     | Pengadaan Listrik dan Gas                                       | 0,18          | 0,21          | 0,21          | 0,21          | 0,19          |
| E                                     | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang        | 0,08          | 0,09          | 0,09          | 0,10          | 0,11          |
| F                                     | Konstruksi  | 11,58         | 11,49         | 11,57         | 11,46         | 10,92         |
| G                                     | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor   | 15,82         | 15,77         | 15,53         | 15,43         | 14,53         |
| H                                     | Transportasi dan Pergudangan                                    | 8,06          | 8,19          | 8,24          | 8,49          | 8,32          |
| I                                     | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                            | 3,43          | 3,54          | 3,42          | 3,48          | 3,16          |
| J                                     | Informasi dan Komunikasi  | 2,30          | 2,36          | 2,34          | 2,28          | 2,96          |
| K                                     | Jasa Keuangan dan Asuransi                                      | 3,56          | 3,64          | 3,71          | 3,81          | 3,88          |
| L                                     | Real Estate   | 2,16          | 2,22          | 2,25          | 2,30          | 2,39          |
| M,N                                   | Jasa Perusahaan   | 0,76          | 0,79          | 0,80          | 0,91          | 0,84          |
| O                                     | Adiministrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 3,17          | 3,10          | 3,07          | 3,06          | 3,31          |
| P                                     | Jasa Pendidikan   | 4,65          | 4,99          | 5,31          | 5,78          | 6,18          |
| Q                                     | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                              | 1,89          | 1,94          | 1,97          | 2,03          | 2,06          |
| R,S,T,U                               | Jasa Lainnya  | 3,26          | 3,43          | 3,51          | 3,70          | 3,59          |
| <b>Produk Domestik Regional Bruto</b> |   | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka, 2020 dan 2021 yang dikelola dalam SIPD

PDRB Kabupaten Cirebon bila dilihat dari kategori laju pertumbuhan ekonomi (LPE) terbagi menjadi 4 (empat) kelompok pertumbuhan yaitu:

1. Kategori LPE sangat tinggi yaitu LPE yang berada di atas LPE Umum PDRB Kabupaten Cirebon yang sebesar -1,08% tetapi LPE tersebut berada pada angka di atas 10%. Sektor dimaksud yaitu sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 30,47% dan sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yaitu sebesar 17,03%.

2. Kategori LPE tinggi yaitu LPE yang berada di atas LPE Umum PDRB Kabupaten Cirebon yang sebesar -1,08% tetapi LPE tersebut dibawah angka 10 %.

Sektor yang berada pada kelompok LPE tinggi ini adalah:

- a) Jasa Pendidikan;
  - b) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;
  - c) Jasa Keuangan dan Asuransi;
  - d) Real Estate;
  - e) Pertambangan dan Penggalian;
  - f) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib;
  - g) Industri Pengolahan; dan
  - h) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.
3. Kategori LPE sedang yaitu LPE yang berada di bawah LPE Umum PDRB Kabupaten Cirebon yang sebesar -1,08% tetapi tetap tumbuh dengan persentase LPE Positif. Akan tetapi sektor dimaksud sudah tidak ada dikarenakan rata-rata tiap sektor juga mengalami penurunan.
4. Kategori LPE rendah yaitu LPE yang berada di bawah LPE Umum PDRB Kabupaten Cirebon yang sebesar -1,08% tetapi tetap tumbuh dengan persentase LPE negatif. Kategori LPE rendah ini yaitu sebagai berikut:
- a) Jasa lainnya;
  - b) Transportasi dan Pergudangan;
  - c) Pengadaan Listrik dan Gas;
  - d) Konstruksi;
  - e) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
  - f) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; dan
  - g) Jasa Perusahaan.



**Tabel 2.21**

**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto  
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten  
Cirebon (%), 2016-2020**

| Kategori                              | Uraian   | 2016        | 2017        | 2018        | 2019*       | 2020**       |
|---------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| A                                     | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 6,03        | 1,52        | 2,37        | -1,05       | 1,76         |
| B                                     | Pertambangan dan Penggalian                                    | -2,45       | 0,33        | 2,48        | -3,32       | 0,06         |
| C                                     | Industri Pengolahan  | 5,81        | 5,07        | 5,33        | 2,82        | -0,42        |
| D                                     | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 6,53        | 9,03        | 2,50        | 6,84        | -4,62        |
| E                                     | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 5,28        | 7,71        | 4,60        | 6,75        | 17,03        |
| F                                     | Konstruksi   | 4,92        | 4,31        | 6,98        | 2,81        | -4,39        |
| G                                     | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 3,59        | 4,41        | 3,26        | 4,62        | -7,03        |
| H                                     | Transportasi dan Pergudangan                                   | 7,39        | 6,35        | 5,89        | 9,62        | -3,70        |
| I                                     | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 3,94        | 7,70        | 2,74        | 5,47        | -9,50        |
| J                                     | Informasi dan Komunikasi                                       | 10,58       | 9,58        | 9,01        | 6,59        | 30,47        |
| K                                     | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 9,77        | 4,91        | 7,00        | 7,94        | 1,33         |
| L                                     | Real Estate  | 4,52        | 9,73        | 8,78        | 9,27        | 1,26         |
| M,N                                   | Jasa Perusahaan  | 8,97        | 9,40        | 8,57        | 9,28        | -10,31       |
| O                                     | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 2,14        | 0,40        | 2,07        | 3,75        | -0,23        |
| P                                     | Jasa Pendidikan  | 6,29        | 9,53        | 7,81        | 12,90       | 3,42         |
| Q                                     | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 8,78        | 7,77        | 7,32        | 11,58       | -0,92        |
| R,S,T,U                               | Jasa lainnya   | 8,17        | 9,44        | 4,84        | 10,26       | -3,12        |
| <b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b> |  | <b>5,63</b> | <b>5,06</b> | <b>5,02</b> | <b>4,68</b> | <b>-1,08</b> |

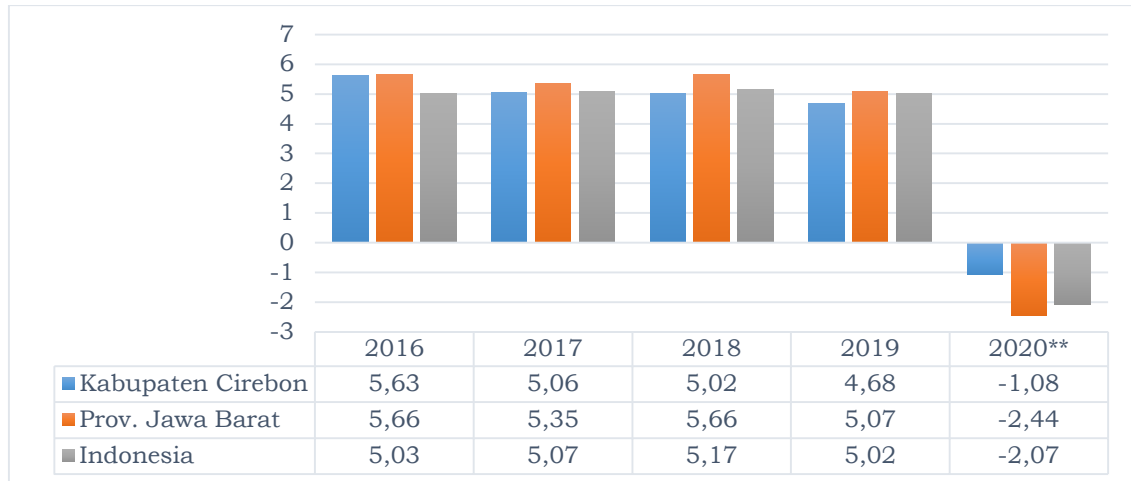
Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka, 2020 dan 2021 yang dikelola dalam SIPD

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon menurun signifikan dari tahun 2016 sampai 2019 hingga mencapai angka 4,68 persen pada tahun 2019, bahkan pada tahun 2020 sampai minus diangka -1,08 persen. Angka pertumbuhan ekonomi ini berdampak cukup signifikan bagi gejolak perekonomian Kabupaten Cirebon sehingga perlu melakukan penanganan khusus terhadap fenomena pertumbuhan ekonomi menurun ini. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat dan Indonesia, maka LPE Kabupaten Cirebon pada kurun waktu

tahun 2017-2019 selalu berada dibawah LPE Provinsi Jawa Barat dan Indonesia. Hal tersebut sebagaimana gambar di bawah ini:

**Gambar 2.14**

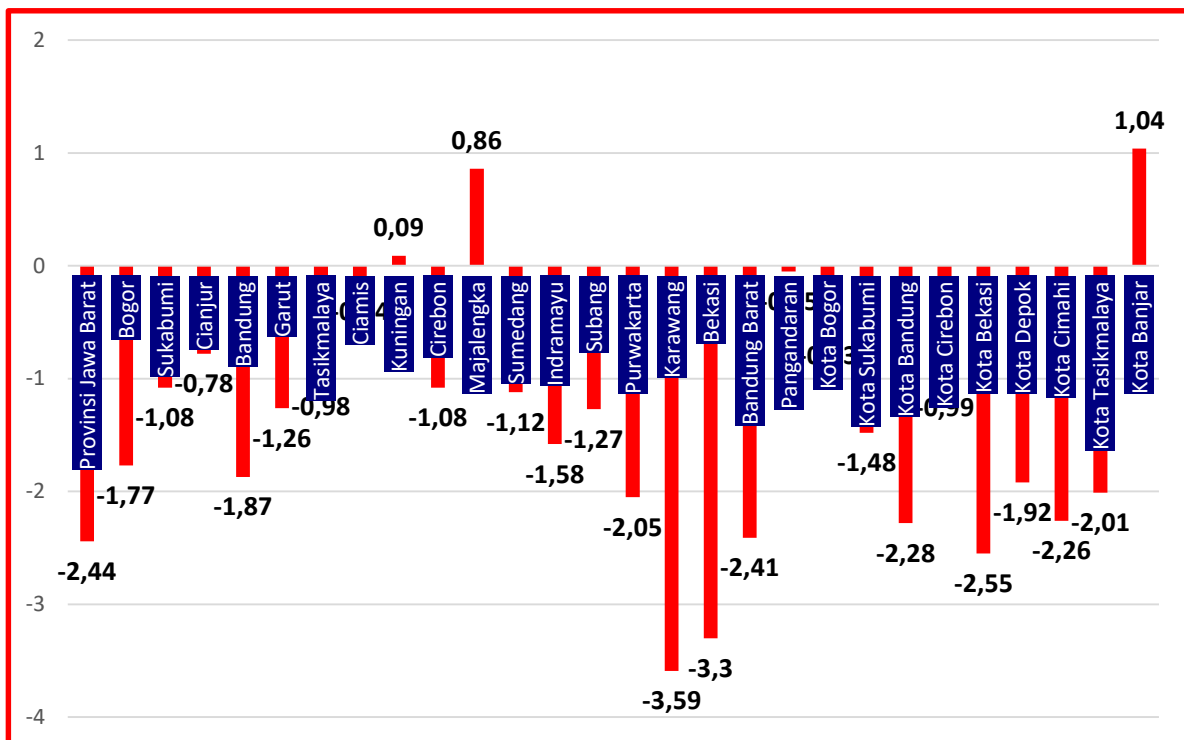
**Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020**



Sumber: 1. PDRB Kabupaten Cirebon Menurut Lapangan Usaha, 2016-2019  
2. Kabupaten Cirebon Dalam Angka, 2020 dan 2021 yang dikelola dalam SIPD

**Gambar 2.15**

**Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 (Persen)**



Sumber: Indikator Strategis Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

Hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi. Hanya 3 kabupaten/kota yang bertahan pada pertumbuhan ekonomi positif di tengah Pandemi COVID-19 yakni Kabupaten Kuningan, Majalengka dan Kota Banjar. Sedangkan Kabupaten Cirebon memiliki pertumbuhan ekonomi negative sebesar -1,08 persen jauh lebih baik dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat yang mencapai -2,44 persen.

### 2.2.2. PDRB Perkapita

Pendapatan perkapita merupakan indikator yang dipakai untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk disuatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. Oleh karena pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar serta pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk yang menjadi komponen penghitungan pendapatan regional belum dapat dihitung maka yang disajikan adalah PDRB per Kapita.

PDRB Per Kapita atas dasar harga berlaku menggambarkan besarnya nilai tambah domestik bruto perpenduduk secara nominal, sedangkan PDRB per Kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui nilai tambah nyata secara pertumbuhan nyata per Kapita. Angka ini diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Adapun PDRB per Kapita Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.22**

**PDRB Per Kapita Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020**

| PDRB per kapita: | Satuan | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       |
|------------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ADHB             | Rp     | 18.124.494 | 19.410.878 | 20.907.550 | 22.406.740 | 22.429.650 |
| ADHK             | Rp     | 13.602.112 | 14.180.233 | 14.778.810 | 15.353.210 | 15.072.410 |

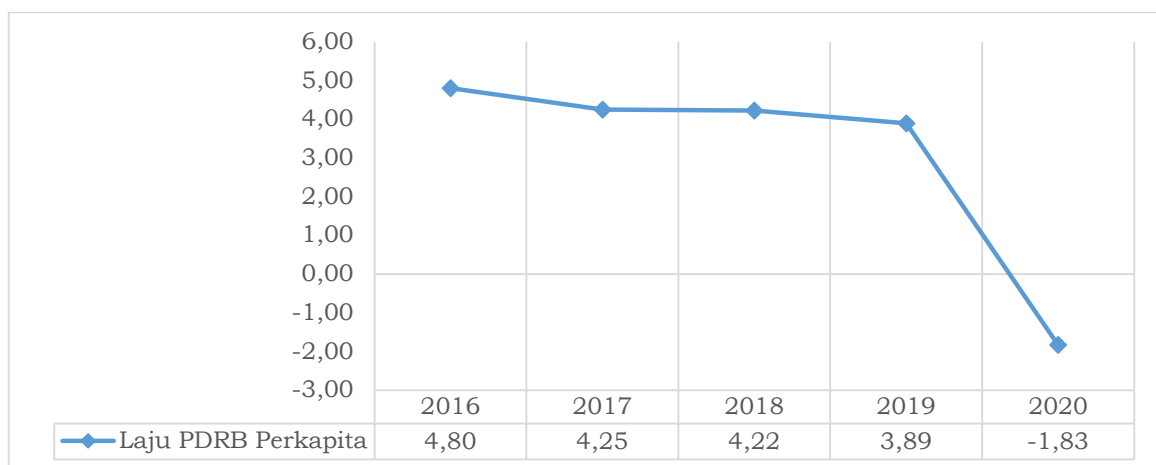
Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cirebon Menurut Pengeluaran 2016-2020 yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa PDRB per Kapita Kabupaten Cirebon rata-rata mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Pada tahun 2016 PDRB Perkapita ADHB hanya mencapai Rp. 18.124.494 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020 menjadi Rp. 22.429.650. Begitu pula dengan PDRB Perkapita ADHK yang tiap tahun nya juga selalu mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2020 angkanya mencapai Rp. 15.072.410, naik dibanding tahun 2016 yang hanya mencapai Rp. 13.602.112.

Meski demikian, Laju PDRB Perkapita di Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2016-2020 terus mengalami penurunan, dimana pada tahun 2016 laju pertumbuhannya mencapai 4,80 persen dan pada tahun 2020 turun hingga mencapai -1,83 persen. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:

**Gambar 2.16**

**Laju PDRB Per Kapita Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020**



Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cirebon Menurut Pengeluaran 2015-2020

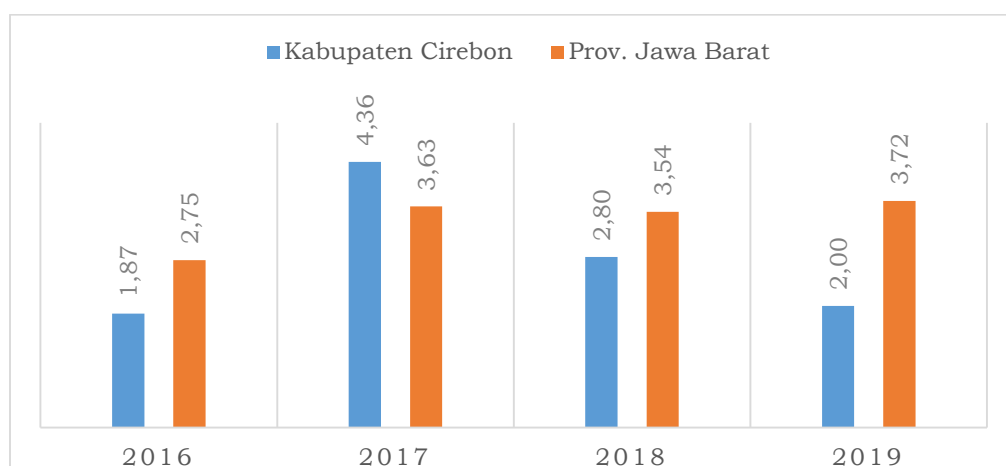
### 2.2.3. Laju Inflasi

Inflasi merupakan proses menurunnya nilai mata uang disertai dengan peningkatan harga barang secara umum dan terus-menerus (continue). Dalam aplikasinya, inflasi dapat menjadi indikator langsung untuk melihat tingkat perubahan atau proses kenaikan/penurunan harga yang berlangsung secara terus-menerus dan saling memengaruhi. Laju inflasi yang cukup fluktuatif dan tergolong tinggi dalam kegiatan perekonomian di Kabupaten Cirebon.

Laju inflasi di Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun, dimana Laju Inflasi pada tahun 2016 mencapai 1,87% dan mengalami kenaikan pada tahun 2017 menjadi 4,36%. Selanjutnya pada tahun berikutnya Laju Inflasi terus mengalami penurunan hingga menjadi 2,00% di tahun 2019. Angka laju inflasi Kabupaten Cirebon pada tahun 2019 berada dibawah laju inflasi Provinsi Jawa Barat yang berada pada angka 3,72%. Perbandingan laju inflasi Kabupaten Cirebon dengan Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada gambar berikut ini:

**Gambar 2.17**

**Perkembangan Inflasi Kabupaten Cirebon dan Provinsi Jawa Barat  
Tahun 2016-2019**



Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2020 yang dikelola dalam SIPD

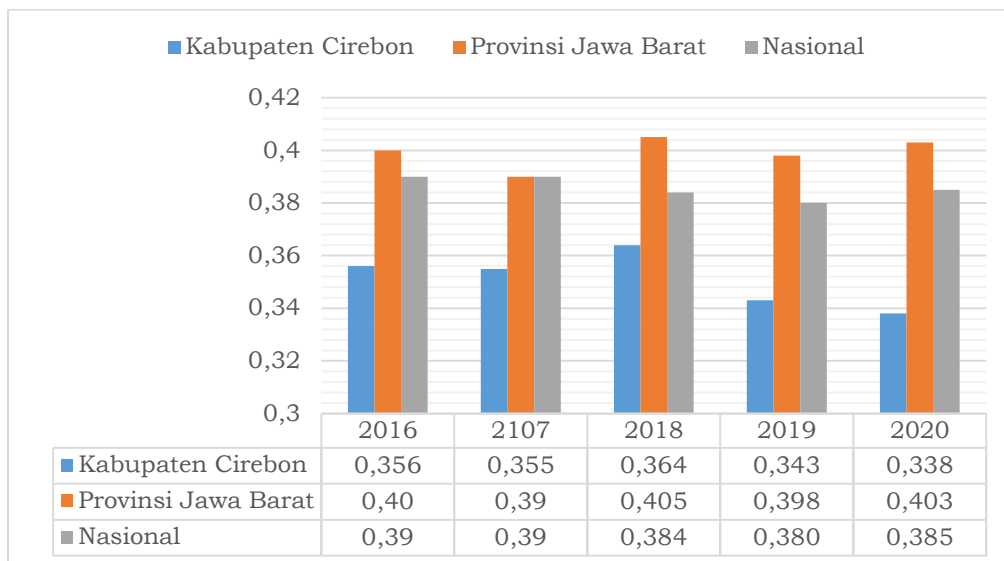
## 2.2.4. Indeks Gini

Distribusi pendapatan sebagai salah satu aspek keadilan dalam pembangunan dalam bagian ini dijelaskan dengan menggunakan Indeks Gini. Berdasarkan data pada gambar di bawah terlihat bahwa jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2018, maka indeks gini Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,026 poin atau dari yang semula 0,364 menjadi 0,338.

Selanjutnya indeks gini Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 yang hanya mencapai 0,338 bila dibandingkan dengan Indeks Gini Provinsi Jawa Barat dan Nasional, maka indeks gini Kabupaten Cirebon berada dibawah indeks gini Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

**Gambar 2.18**

**Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016-2020**



Sumber: BPS, 2020 yang dikelola dalam SIPD



### 2.2.5. Kemiskinan

Angka kemiskinan suatu wilayah akan menjadi salah satu indikator penting dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat, baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Tingkat kemiskinan merupakan persentase penduduk yang memiliki pengeluaran, baik makanan maupun non makanan, di bawah garis kemiskinan.

Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Pada tahun 2019 Persentase penduduk miskin di Kabupaten Cirebon masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka Provinsi yang hanya mencapai 6,82 persen dan Indonesia yang juga hanya mencapai 9,22 persen. Angka 9,94 persen menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon masih cukup tinggi. Ditambah dengan adanya peningkatan persentase penduduk miskin pada tahun 2020 hingga mencapai 11,24 persen akibat Pandemi COVID-19, hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Cirebon sehingga peningkatan persentase penduduk miskin tersebut dapat ditekan di tahun berikutnya.

**Tabel 2.23**

**Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020**

| Tahun | Garis Kemiskinan<br>(rupiah/kapita/bulan) | Penduduk Miskin |            |
|-------|---|-----------------|------------|
|       |   | Total (Ribuan)  | Persentase |
| 2016  | 333.758                                   | 288,49          | 13,49      |
| 2017  | 346.240                                   | 279,55          | 12,97      |
| 2018  | 370.747                                   | 232,37          | 10,70      |
| 2019  | 381.372                                   | 217,64          | 9,94       |
| 2020  | 393.452                                   | 247,94          | 11,24      |

Catatan: \* Referensi waktu adalah Maret 2020

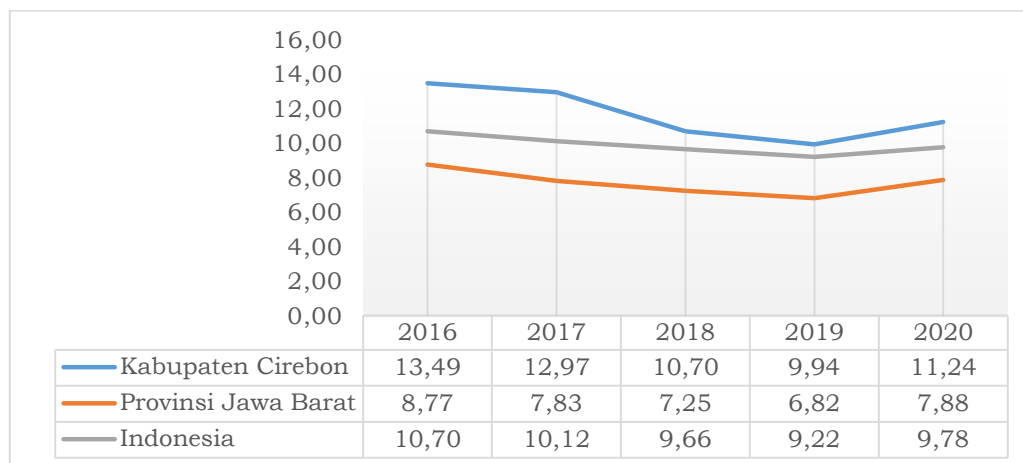
Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2020 dan 2021, BPS yang dikelola dalam SIPD

Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cirebon sebanyak 247,94 ribu jiwa atau 11,24 persen dari total penduduk Kabupaten Cirebon. Angka ini meningkat dibanding dengan tahun 2019 dimana jumlah penduduk miskin hanya 217,64 ribu jiwa atau hanya 9,94 persen. Pandemi COVID-19 pun menjadi alasan logis atas kenaikan angka kemiskinan dimana semakin meningkatnya pengangguran dan penurunan omset dan keuntungan pada pekerjaan non formal memberi dampak negatif bagi perekonomian daerah.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 selalu lebih tinggi apabila dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Hal tersebut sesuai dengan gambar berikut ini:

**Gambar 2.19**

**Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016-2020**



Sumber: 1. Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2020 dan 2021, BPS  
2. BPS RI, diolah yang dikelola dalam SIPD

Untuk indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami penurunan, dimana pada tahun 2016 indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Cirebon mencapai 2,21 dan pada tahun 2020 angkanya turun menjadi 1,30. Begitu juga dengan indeks keparahan kemiskinan, dimana pada tahun 2016 angkanya mencapai 0,50

sedangkan pada tahun 2020 turun menjadi 0,24. Hal tersebut sebagaimana tabel dibawah ini:

**Tabel 2.24**

**Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Cirebon, 2016–2020**

| Tahun | Indeks Kedalaman Kemiskinan | Indeks Keparahan Kemiskinan |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| 2016  | 2,21                        | 0,50                        |
| 2017  | 2,13                        | 0,50                        |
| 2018  | 2,04                        | 0,55                        |
| 2019  | 1,39                        | 0,26                        |
| 2020  | 1,30                        | 0,24                        |

Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2021, BPS yang dikelola dalam SIPD

Lebih lanjut, data tahun 2020 menunjukkan bahwa seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan persentase penduduk miskin dari tahun sebelumnya. Data persentase penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dari Tahun 2016-2020 dapat dilihat di tabel berikut ini.

**Tabel 2.25**

**Persentase Penduduk Miskin Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020**

| No. | Kabupaten/Kota        | Persentase Penduduk Miskin |       |       |       |       |
|-----|-----------------------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
|     |                       | 2016                       | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| 1.  | Kabupaten Bogor       | 8,83                       | 8,57  | 7,14  | 6,91  | 7,69  |
| 2.  | Kabupaten Sukabumi    | 8,13                       | 8,04  | 6,76  | 6,22  | 7,09  |
| 3.  | Kabupaten Cianjur     | 11,62                      | 11,41 | 9,81  | 9,15  | 10,36 |
| 4.  | Kabupaten. Bandung    | 7,61                       | 7,36  | 6,65  | 5,94  | 6,91  |
| 5.  | Kabupaten Garut       | 11,64                      | 11,27 | 9,27  | 8,98  | 9,98  |
| 6.  | Kabupaten Tasikmalaya | 11,24                      | 10,84 | 9,85  | 9,12  | 10,34 |
| 7.  | Kabupaten Ciamis      | 8,42                       | 8,2   | 7,22  | 6,65  | 7,62  |
| 8.  | Kabupaten Kuningan    | 13,59                      | 13,27 | 12,22 | 11,41 | 12,82 |
| 9.  | Kabupaten Cirebon     | 13,49                      | 12,97 | 10,7  | 9,94  | 11,24 |
| 10. | Kabupaten Majalengka  | 12,85                      | 12,6  | 10,79 | 10,06 | 11,43 |
| 11. | Kabupaten Sumedang    | 10,57                      | 10,53 | 9,76  | 9,05  | 10,26 |
| 12. | Kabupaten Indramayu   | 13,95                      | 13,67 | 11,89 | 11,11 | 12,70 |
| 13. | Kabupaten Subang      | 11,05                      | 10,77 | 8,67  | 8,12  | 9,31  |
| 14. | Kabupaten Purwakarta  | 8,98                       | 9,06  | 7,99  | 7,48  | 8,27  |
| 15. | Kabupaten Karawang    | 10,07                      | 10,25 | 8,06  | 7,39  | 8,26  |

| No. | Kabupaten/Kota             | Persentase Penduduk Miskin |             |             |             |             |
|-----|----------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                            | 2016                       | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        |
| 16. | Kabupaten Bekasi           | 4,92                       | 4,73        | 4,37        | 4,01        | 4,82        |
| 17. | Kabupaten Bandung Barat    | 11,71                      | 11,49       | 10,06       | 9,38        | 10,49       |
| 18. | Kabupaten Pangandaran      | 10,23                      | 10          | 8,12        | 7,71        | 8,99        |
| 19. | Kota Bogor                 | 7,29                       | 7,11        | 5,93        | 5,77        | 6,68        |
| 20. | Kota Sukabumi              | 8,59                       | 8,48        | 7,12        | 6,67        | 7,70        |
| 21. | Kota Bandung               | 4,32                       | 4,17        | 3,57        | 3,38        | 3,99        |
| 22. | Kota Cirebon               | 9,73                       | 9,66        | 8,88        | 8,41        | 9,52        |
| 23. | Kota Bekasi                | 5,06                       | 4,79        | 4,11        | 3,81        | 4,38        |
| 24. | Kota Depok                 | 2,34                       | 2,34        | 2,14        | 2,07        | 2,45        |
| 25. | Kota Cimahi                | 5,92                       | 5,76        | 4,94        | 4,39        | 5,11        |
| 26. | Kota Tasikmalaya           | 15,6                       | 14,8        | 12,71       | 11,60       | 12,97       |
| 27. | Kota Banjar                | 7,01                       | 7,06        | 5,7         | 5,50        | 6,09        |
|     | <b>Provinsi Jawa Barat</b> | <b>8,77</b>                | <b>7,83</b> | <b>7,25</b> | <b>6,82</b> | <b>7,88</b> |

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 dan 2021 yang dikelola dalam SIPD

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menurunkan kemiskinan adalah dengan cara berkoordinasi dan melakukan penanganan langsung. Adapun koordinasi dilakukan melalui pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Jawa Barat. Sedangkan penanganan langsung dilakukan pada kegiatan aspek kesejahteraan masyarakat yang mencakup upaya dalam bidang ekonomi non pertanian, ekonomi pertanian, pendidikan, kesehatan, dan program keluarga berencana, serta prasarana pendukungnya.

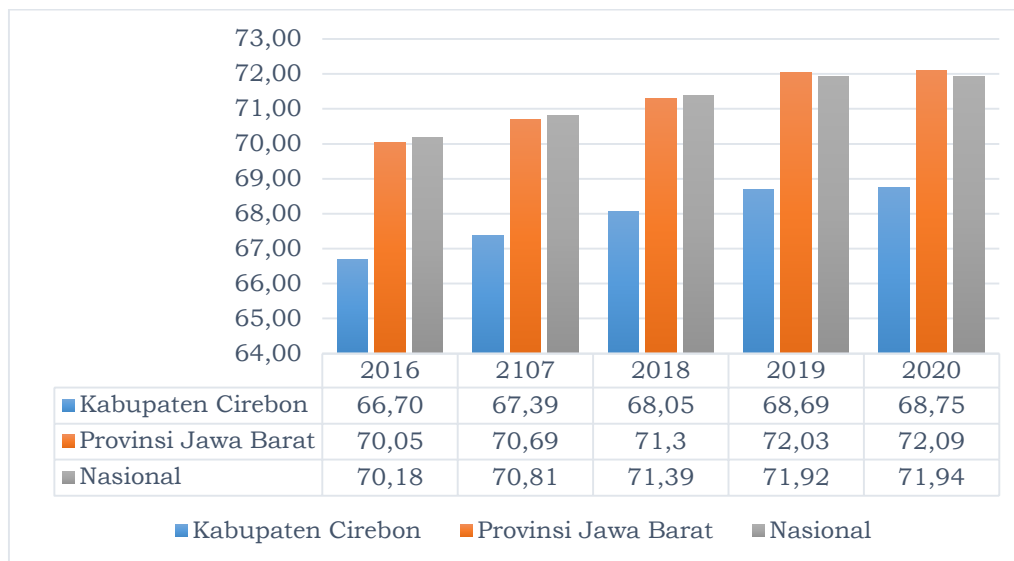
### 2.2.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat) maupun horizontal (kehidupan lebih baik di segala bidang). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan metode penghitungan terbaru, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup angka harapan hidup (kesehatan), harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (pendidikan)

serta pengeluaran per kapita yang disesuaikan (standar hidup layak/ekonomi).

**Gambar 2.20**

**Capaian IPM Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016–2020**



Sumber: 1. BPS RI, 2020, diolah

2. Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2021, BPS yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan gambar diatas, diketahui bahwa IPM Kabupaten Cirebon mengalami kenaikan dari tahun ke tahun hingga mencapai 68,05 pada tahun 2018 dan terus meningkat menjadi 68,75 pada tahun 2020. Meskipun terus mengalami peningkatan, namun angka IPM pada tahun 2020 masih lebih rendah dibandingkan dengan angka nasional yang mencapai 71,94 dan IPM Provinsi Jawa Barat yang mencapai 72,09.

Posisi Jawa Barat mengalami perubahan dari kondisi tahun sebelumnya, Pada Tahun 2020, IPM Provinsi Jawa Barat telah mencapai 72,09. Angka ini meningkat dibandingkan dengan IPM Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2019 yang sebesar 72,03.

Data IPM selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan. Terdapat 10 daerah yang memiliki IPM diatas nilai provinsi, yaitu: Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung,



Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, dan Kota Tasikmalaya.

**Tabel 2.26**

**Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat Tahun 2016- 2020**

| No.        | Kab/Kota                | IPM   |       |       |       |       |
|------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|            |                         | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| NASIONAL   |                         | 70,18 | 70,81 | 71,39 | 71,92 | 71,94 |
| JAWA BARAT |                         | 70,05 | 70,69 | 71,30 | 72,03 | 72,09 |
| 1.         | Kabupaten Bogor         | 68,32 | 69,13 | 70,65 | 70,65 | 70,40 |
| 2.         | Kabupaten Sukabumi      | 65,13 | 65,49 | 66,87 | 66,87 | 66,88 |
| 3.         | Kabupaten Cianjur       | 62,92 | 63,70 | 65,38 | 65,38 | 65,36 |
| 4.         | Kabupaten Bandung       | 70,69 | 71,02 | 72,41 | 72,41 | 72,39 |
| 5.         | Kabupaten Garut         | 63,64 | 64,52 | 66,22 | 66,22 | 66,12 |
| 6.         | Kabupaten Tasikmalaya   | 63,57 | 64,14 | 65,64 | 65,64 | 65,67 |
| 7.         | Kabupaten Ciamis        | 68,45 | 68,87 | 70,39 | 70,39 | 70,49 |
| 8.         | Kabupaten Kuningan      | 67,51 | 67,78 | 69,12 | 69,12 | 69,38 |
| 9.         | Kabupaten Cirebon       | 66,70 | 67,39 | 68,69 | 68,69 | 68,75 |
| 10.        | Kabupaten Majalengka    | 65,25 | 65,92 | 67,52 | 67,52 | 67,59 |
| 11.        | Kabupaten Sumedang      | 69,45 | 70,07 | 71,46 | 71,46 | 71,64 |
| 12.        | Kabupaten Indramayu     | 64,78 | 65,58 | 66,97 | 66,97 | 67,29 |
| 13.        | Kabupaten Subang        | 67,14 | 67,73 | 68,69 | 68,69 | 68,95 |
| 14.        | Kabupaten Purwakarta    | 68,56 | 69,28 | 70,67 | 70,67 | 70,82 |
| 15.        | Kabupaten Karawang      | 68,19 | 69,17 | 70,86 | 70,86 | 70,66 |
| 16.        | Kabupaten Bekasi        | 71,83 | 72,63 | 73,99 | 73,99 | 74,07 |
| 17.        | Kabupaten Bandung Barat | 65,81 | 66,63 | 68,27 | 68,27 | 68,08 |
| 18.        | Kabupaten Pangandaran   | 65,79 | 66,6  | 68,21 | 68,21 | 68,06 |
| 19.        | Kota Bogor              | 74,50 | 75,16 | 76,23 | 76,23 | 76,11 |
| 20.        | Kota Sukabumi           | 72,33 | 73,03 | 74,31 | 74,31 | 74,21 |
| 21.        | Kota Bandung            | 80,13 | 80,31 | 81,62 | 81,62 | 81,51 |
| 22.        | Kota Cirebon            | 73,70 | 74,00 | 74,92 | 74,92 | 74,89 |
| 23.        | Kota Bekasi             | 79,95 | 80,3  | 81,59 | 81,59 | 81,50 |
| 24.        | Kota Depok              | 79,60 | 79,83 | 80,82 | 80,82 | 80,97 |
| 25.        | Kota Cimahi             | 76,69 | 76,95 | 78,11 | 78,11 | 77,83 |
| 26.        | Kota Tasikmalaya        | 70,58 | 71,51 | 72,84 | 72,84 | 73,04 |



| No. | Kab/Kota    | IPM   |       |       |       |       |
|-----|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |             | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| 27. | Kota Banjar | 70,09 | 70,79 | 71,75 | 71,75 | 71,70 |

Sumber: 1. BPS RI, 2020, diolah

2. Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2021, BPS yang dikelola dalam SIPD

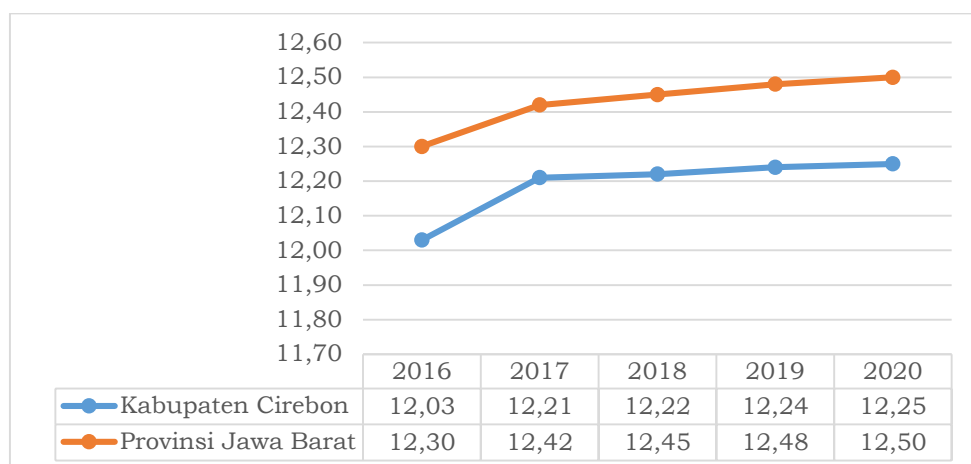
### 2.2.7. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Penghitungan IPM salah satunya dipengaruhi oleh 2 indikator pendidikan, yakni Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Nilai HLS yang semakin tinggi, menggambarkan semakin tinggi pendidikan yang ditempuh. HLS merepresentasikan harapan individu dalam mengenyam pendidikan ketika mencapai usia sekolah yakni 7 tahun.

Nilai HLS Kabupaten Cirebon tahun 2020 mencapai 12,25 tahun yang berarti bahwa seseorang yang berumur 7 tahun ke atas memiliki harapan bersekolah selama 12-13 tahun atau sampai dengan tamat SMA dan memasuki perguruan tinggi (semester I). Cukup tingginya harapan lama sekolah ini mengindikasikan semakin meningkatnya berbagai fasilitas pendidikan di Kabupaten Cirebon.

**Gambar 2.21**

#### Harapan Lama Sekolah Kabupaten Cirebon dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020



Sumber:

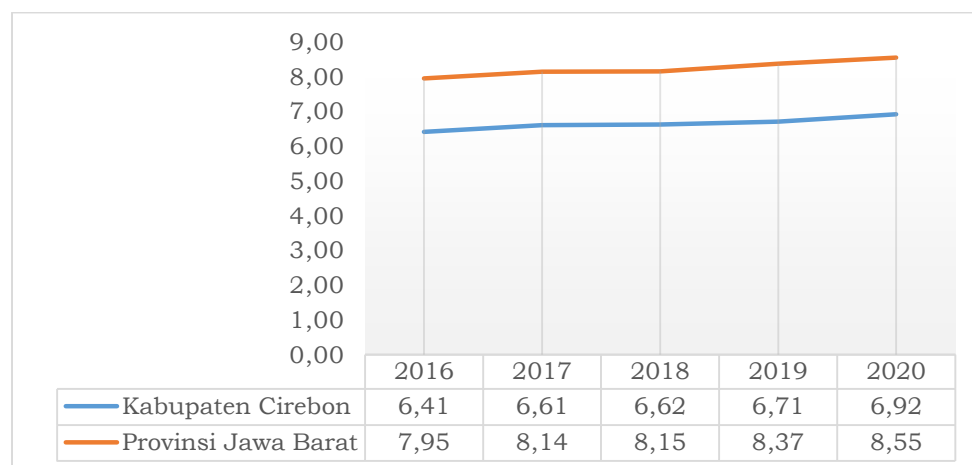
1. Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2020 dan 2021, BPS yang dikelola dalam SIPD;
2. Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
3. BPS Provinsi Jabar 2021 yang dikelola dalam SIPD

Meskipun selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun nilai HLS Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 apabila dibandingkan dengan nilai HLS Provinsi Jawa Barat, maka HLS Kabupaten Cirebon selalu dibawah HLS Provinsi Jawa Barat.

Sejalan dengan HLS, nilai RLS Kabupaten Cirebon juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga mencapai 6,92 tahun pada tahun 2020 yang berarti bahwa penduduk Kabupaten Cirebon rata-rata mengenyam pendidikan sekolah selama 6,92 tahun atau Kelas 1 SMP semester kedua. Meskipun demikian, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Cirebon masih berada di bawah rata-rata lama sekolah Provinsi Jawa Barat yang mencapai 8,55 tahun pada tahun 2020.

**Gambar 2.22**

**Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Cirebon dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020**



Sumber:

1. Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2020 dan 2021, BPS yang dikelola dalam SIPD;
2. Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023  
BPS Provinsi Jabar 2021

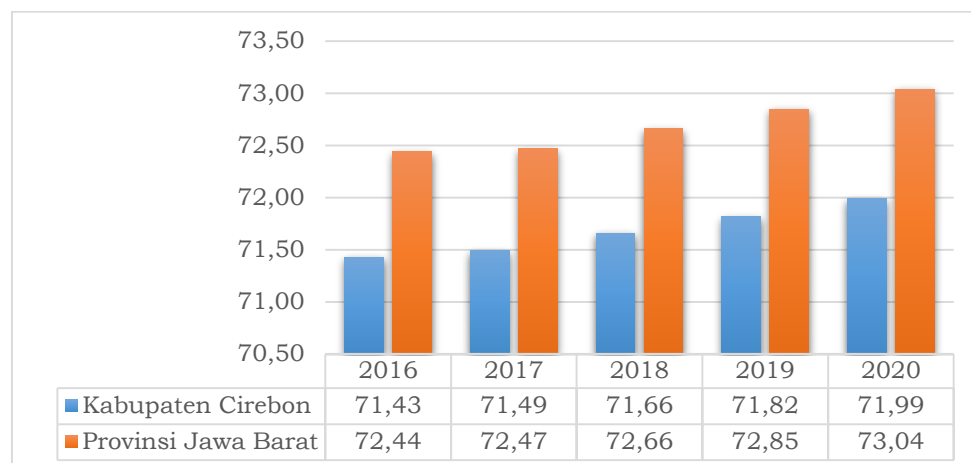
### 2.2.8. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator penyusun IPM dalam bidang kesehatan di mana angka tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH Kabupaten Cirebon semakin lama semakin meningkat yang mengindikasikan keberhasilan program dan kegiatan di bidang kesehatan.

AHH Kabupaten Cirebon cenderung naik setiap tahun di mana pada tahun 2020 mencapai 71,99 tahun yang berarti bahwa setiap bayi baru lahir memiliki harapan hidup hingga usia 71-72 tahun. Meskipun angka ini cukup tinggi, namun AHH Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 masih lebih rendah dibandingkan AHH Provinsi Jawa Barat, yakni 73,04 tahun.

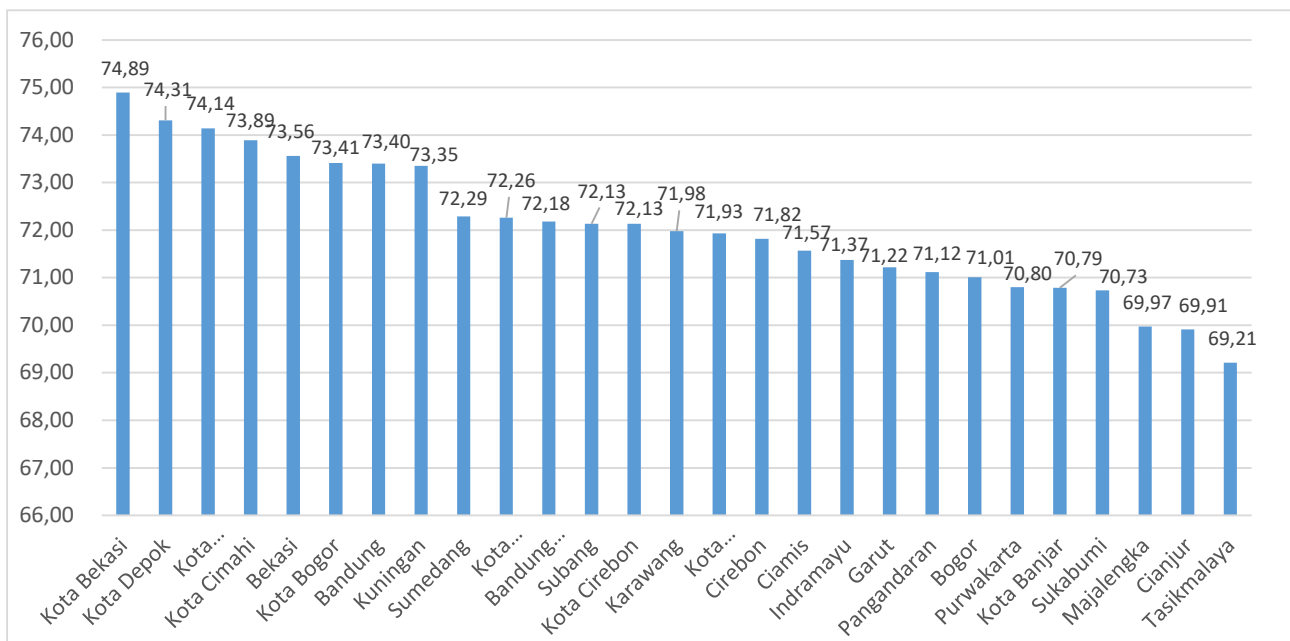
**Gambar 2.23**

**Angka Harapan Hidup Kabupaten Cirebon dan Provinsi Jawa Barat  
Tahun 2016-2020**



Sumber:

1. Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2020 dan 2021, BPS yang dikelola dalam SIPD;
2. Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023
3. BPS Provinsi Jabar 2021.

**Gambar 2.24****Usia Harapan Hidup (UHH) Penduduk Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2019**

Sumber: Indikator Strategis Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2019

Usia harapan hidup merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Usia harapan hidup Kabupaten Cirebon pada tahun 2019 berada di angka 71,82. Angka ini masih berada di bawah UHH Provinsi Jawa Barat yang mencapai 72,85 tahun. 3 Kabupaten/Kota dengan UHH tertinggi di Jawa Barat adalah Kota Bekasi, Kota Depok dan Kota Bandung.

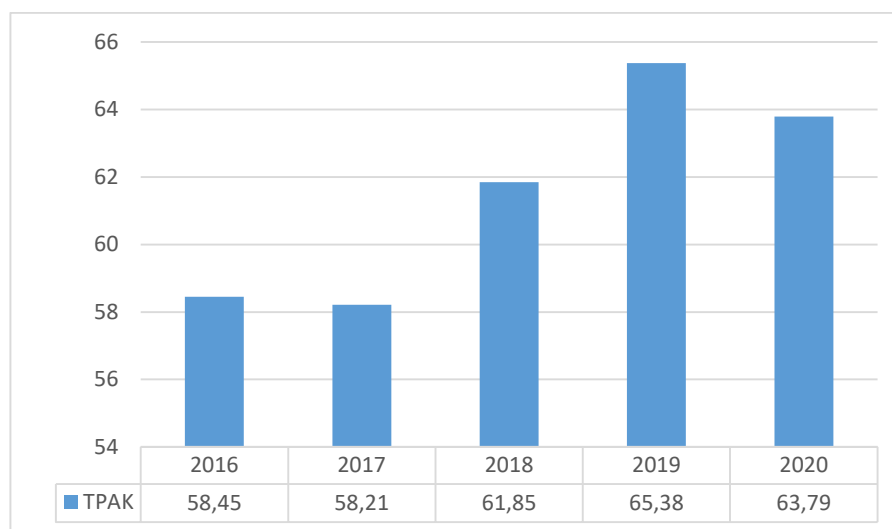
### **2.2.9. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting yang

digunakan untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja, indikator ini merupakan rasio antara jumlah Angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas). Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

**Gambar 2.25**

**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Cirebon  
Tahun 2016-2020**



Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2020 dan 2021, BPS yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan gambar diatas, diketahui bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Cirebon pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 TPAK sebesar 58,45% dan tahun 2019 naik menjadi 65,38%. Akan tetapi pada tahun 2020 TPAK Kabupaten Cirebon sedikit mengalami penurunan hingga menjadi 63,79%. Penurunan TPAK ini terjadi dikarenakan beberapa kondisi dan salah satunya disebabkan dengan adanya pandemi covid-19.

**Tabel 2.27****Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2019 (Persen)**

| No. | Kabupaten/Kota   | TPAK  | No. | Kabupaten/Kota | TPAK  |
|-----|------------------|-------|-----|----------------|-------|
| 1.  | Pangandaran      | 75,18 | 15. | Kota Depok     | 65,03 |
| 2.  | Majalengka       | 67,97 | 16. | Bekasi         | 64,03 |
| 3.  | Indramayu        | 67,89 | 17. | Sumedang       | 63,98 |
| 4.  | Subang           | 67,88 | 18. | Purwakarta     | 63,93 |
| 5.  | Kota Banjar      | 67,69 | 19. | Kota Bogor     | 63,73 |
| 6.  | Ciamis           | 67,56 | 20. | Karawang       | 63,62 |
| 7.  | Tasikmalaya      | 66,66 | 21. | Kota Cimahi    | 63,39 |
| 8.  | Cianjur          | 66,14 | 22. | Kota Cirebon   | 62,84 |
| 9.  | Kota Bandung     | 65,98 | 23. | Garut          | 62,70 |
| 10. | Kota Bekasi      | 65,70 | 24. | Sukabumi       | 62,68 |
| 11. | Bogor            | 65,42 | 25. | Kota Sukabumi  | 62,56 |
| 12. | Bandung          | 65,38 | 26. | Bandung Barat  | 62,09 |
| 13. | Cirebon          | 65,38 | 27. | Kuningan       | 61,31 |
| 14. | Kota Tasikmalaya | 65,38 |     |                |       |

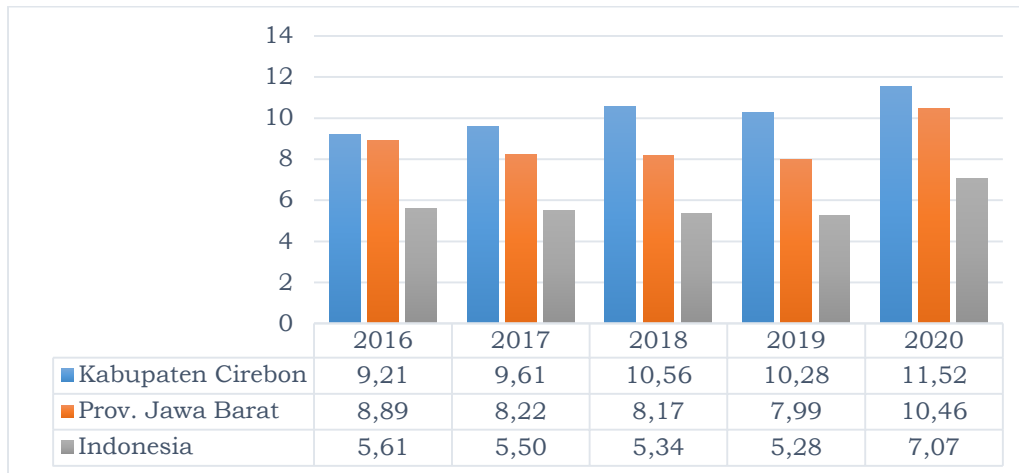
Sumber: Indikator Strategis Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja





saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

**Gambar 2.26****Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016–2020**

Sumber: 1. BPS Jawa Barat Tahun 2021, diolah  
2. BPS RI Tahun 2021

Berdasarkan gambar diatas, diketahui bahwa TPT di Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2016 angkanya mencapai 9,21 persen. Selanjutnya meskipun sempat mengalami peningkatan di tahun 2017 dan 2018, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan hingga menjadi 10,28 persen. Selanjutnya TPT Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 mengalami peningkatan kembali menjadi 11,52 persen. Hal ini disebabkan dengan adanya pandemi covid-19 yang setahun belakangan ini telah menimpa wilayah Indonesia dan salah satunya termasuk di Kabupaten Cirebon.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2016-2019 apabila dibandingkan dengan TPT Provinsi Jawa Barat, selalu berada diatas TPT Provinsi Jawa Barat. Dimana pada tahun 2019 TPT Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 7,99 persen dan TPT Indonesia sebesar 5,28, sedangkan Kabupaten Cirebon pada tahun yang sama angkanya mencapai 10,28 persen.

Tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota di Jawa Barat pada Tahun 2019 menunjukkan angka yang bervariasi antara 4,37 persen sampai dengan 10,28 persen. Daerah dengan TPT lebih rendah dari provinsi meliputi 10 kabupaten/kota. Tiga daerah dengan TPT terendah yaitu

Kabupaten Majalengka sebesar 4,37 persen, Kabupaten.

Pangandaran sebesar 4,48 Persen, dan Kabupaten Ciamis sebesar 5,10 persen. Sementara daerah dengan TPT lebih tinggi dari provinsi sebanyak 16, yang terdiri dari: (1) Kabupaten Cirebon, (2) Kabupaten Cianjur, (3) Kabupaten Purwakarta, (4) Kabupaten Kuningan, (5) Kabupaten Karawang, (6) Kota Bogor, (7) Kabupaten Bogor, (8) Kota Cirebon, (9) Kabupaten Bekasi, (10) Kabupaten Subang, (11) Kota Sukabumi, (12) Kabupaten Indramayu, (13) Kota Bekasi, (14) Kabupaten Bandung Barat, (15) Kota Bandung, dan (16) Kota Cimahi. Sementara Kota Sukabumi memiliki capaian yang sama dengan Provinsi pada angka 7,99 Persen.

**Tabel 2.28**

**Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020**

| No. | Kabupaten/Kota          | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) |       |       |       |       |
|-----|-------------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|     |                         | 2016                             | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| 1.  | Kabupaten Bogor         | n/a                              | 9,55  | 9,83  | 9,11  | 14,29 |
| 2.  | Kabupaten Sukabumi      | n/a                              | 7,66  | 7,84  | 8,05  | 9,60  |
| 3.  | Kabupaten Cianjur       | n/a                              | 10,1  | 10,23 | 9,81  | 11,05 |
| 4.  | Kabupaten Bandung       | n/a                              | 3,92  | 5,07  | 5,51  | 8,58  |
| 5.  | Kabupaten Garut         | n/a                              | 7,86  | 7,12  | 7,35  | 8,95  |
| 6.  | Kabupaten Tasikmalaya   | n/a                              | 6,61  | 6,92  | 6,31  | 7,12  |
| 7.  | Kabupaten Ciamis        | n/a                              | 5,17  | 4,64  | 5,16  | 5,66  |
| 8.  | Kabupaten Kuningan      | n/a                              | 7,94  | 9,10  | 9,68  | 11,22 |
| 9.  | Kabupaten Cirebon       | n/a                              | 9,61  | 10,64 | 10,35 | 11,52 |
| 10. | Kabupaten Majalengka    | n/a                              | 5,02  | 5,00  | 4,37  | 5,84  |
| 11. | Kabupaten Sumedang      | n/a                              | 7,15  | 7,54  | 7,70  | 9,89  |
| 12. | Kabupaten Indramayu     | n/a                              | 8,64  | 8,46  | 8,35  | 9,21  |
| 13. | Kabupaten Subang        | n/a                              | 8,74  | 8,71  | 8,68  | 9,48  |
| 14. | Kabupaten Purwakarta    | n/a                              | 9,11  | 9,94  | 9,73  | 11,07 |
| 15. | Kabupaten Karawang      | n/a                              | 9,55  | 9,12  | 9,68  | 11,52 |
| 16. | Kabupaten Bekasi        | n/a                              | 10,97 | 9,74  | 9,00  | 11,54 |
| 17. | Kabupaten Bandung Barat | n/a                              | 9,33  | 8,55  | 8,24  | 12,25 |
| 18. | Kabupaten Pangandaran   | n/a                              | 3,34  | 3,59  | 4,52  | 5,08  |
| 19. | Kota Bogor              | n/a                              | 9,57  | 9,74  | 9,16  | 12,68 |
| 20. | Kota Sukabumi           | n/a                              | 8     | 8,57  | 8,49  | 12,17 |
| 21. | Kota Bandung            | n/a                              | 8,44  | 8,05  | 8,18  | 11,19 |
| 22. | Kota Cirebon            | n/a                              | 9,29  | 9,07  | 9,04  | 10,97 |
| 23. | Kota Bekasi             | n/a                              | 9,32  | 9,14  | 8,30  | 10,68 |
| 24. | Kota Depok              | n/a                              | 7     | 6,66  | 6,12  | 9,87  |

| No. | Kabupaten/Kota             | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) |             |             |             |              |
|-----|----------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|     |                            | 2016                             | 2017        | 2018        | 2019        | 2020         |
| 25. | Kota Cimahi                | n/a                              | 8,43        | 8,00        | 8,09        | 13,30        |
| 26. | Kota Tasikmalaya           | n/a                              | 6,89        | 6,89        | 6,78        | 7,99         |
| 27. | Kota Banjar                | n/a                              | 5,97        | 5,95        | 6,16        | 6,73         |
|     | <b>Provinsi Jawa Barat</b> | <b>8,89</b>                      | <b>8,22</b> | <b>8,23</b> | <b>8,04</b> | <b>10,46</b> |

Sumber: BPS Jawa Barat Tahun 2021

## 2.3. Aspek Pelayanan Umum

Dalam kerangka mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Cirebon menyelenggarakan berbagai pelayanan umum yang meliputi layanan urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Untuk mengukur capaian tingkat pelayanan tersebut, Pemerintah Kabupaten Cirebon menetapkan indikator-indikator sesuai dengan bidang pelayanan yang diselenggarakan.

### 2.3.1. Layanan Urusan Wajib

#### 1. Pendidikan

Bidang pendidikan berperan strategis bagi penguatan kapasitas sumber daya manusia yang mampu melakukan transformasi perubahan peradaban kearah yang lebih baik. Selain itu, dengan berbekal sumber daya manusia berkualitas akan mampu mengelola dengan baik sumber daya yang terbatas. Dengan demikian, kualitas sumber daya manusia masa depan ditentukan oleh keberhasilan bidang pendidikan.

Selanjutnya untuk melihat kinerja pada bidang pendidikan di Kabupaten Cirebon, berikut disajikan capaian Bidang Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020 berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dan sumber lainnya.

**Tabel 2.29**

**Capaian Bidang Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020**

| NO. | INDIKATOR DAERAH                               | SATUAN     | TAHUN  |        |        |        |        |
|-----|--|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |  |            | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| 1.1 | <b>Pendidikan</b>                              |            |        |        |        |        |        |
|     | <b>Pendidikan Anak Usia Dini</b>               |            |        |        |        |        |        |
|     | - APK PAUD                                     | %          | 49,09  | 49,39  | 49,39  | 65,80  | 42,03  |
|     | <b>Angka Partisipasi Kasar SD/SMP/SMA</b>      |            |        |        |        |        |        |
|     | - APK SD/MI                                    | %          | 120,79 | 120,90 | 120,90 | 116,52 | 104,64 |
|     | - APK SMP/MTs                                  | %          | 115,97 | 114,41 | 114,41 | 122,27 | 88,04  |
|     | - APK SMA/K                                    | %          | 96,64  | 100,65 | 112,45 | 95,86  | 82,30  |
|     | <b>Angka Partisipasi Murni SD/SMP/SMA</b>      |            |        |        |        |        |        |
|     | - APM SD/MI                                    | %          | 106,5  | 106,52 | 106,52 | 103,32 | 95,84  |
|     | - APM SMP/MTs                                  | %          | 94,85  | 95,54  | 95,54  | 97,88  | 79,71  |
|     | - APM SMA/K                                    | %          | 85,40  | 75,92  | 86,40  | 66,95  | 59,30  |
|     | <b>Angka Putus Sekolah</b>                     |            |        |        |        |        |        |
|     | - Angka Putus Sekolah SD Sederajat             | %          | 0,10   | 0,01   | 0,01   | 0,07   | 0,023  |
|     | - Angka Putus Sekolah SMP Sederajat            | %          | 0,35   | 0,29   | 0,29   | 0,20   | 0,20   |
|     | - Angka Putus Sekolah SMA Sederajat            | %          | 0,29   | 0,56   | 0,38   | 0,35   | 0,09   |
|     | - Angka Putus Sekolah SMK Sederajat            | %          | 0,06   | 0,02   | 0,27   | 0,17   | 0,19   |
|     | <b>Angka Kelulusan</b>                         |            |        |        |        |        |        |
|     | - Angka Lulusan SD/MI sederajat                | %          | 96,5   | 95,8   | 95,8   | 97,47  | 98,96  |
|     | - Angka Lulusan SMP sederajat                  | %          | 83,23  | 82,06  | 82,06  | 81,04  | 95,53  |
|     | - Angka Lulusan SMA sederajat                  | %          | 83,61  | 74,42  | 83,70  | 68,22  | 64,05  |
|     | - Angka Lulusan SMK sederajat                  | %          | 66,46  | 77,38  | 79,62  | 68,18  | 72,18  |
|     | <b>Angka Melanjutkan</b>                       |            |        |        |        |        |        |
|     | - Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs      | %          | 110,41 | 109,35 | 109,35 | 110,66 | 82,99  |
|     | - Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA | %          | 107,8  | 108,99 | 108,99 | 118,20 | 117,07 |
|     | <b>Fasilitas Pendidikan</b>                    |            |        |        |        |        |        |
|     | - Ruang Kelas Baik SD/MI                       | %          | 65,87  | 65,87  | 65,82  | 64,60  | 59,27  |
|     | - Ruang Kelas Baik SMP/MTs                     | %          | 79,47  | 79,47  | 79,38  | 80,36  | 75,54  |
|     | - Ruang Kelas Baik SMA/MA                      | %          | 74,31  | 79,24  | 86,29  | 83,36  | 82,23  |
|     | - Ruang Kelas Baik SMK                         | %          | 92,67  | 92,15  | 90,32  | 89,35  | 79,85  |
|     | <b>Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan</b>     |            |        |        |        |        |        |
|     | - SD   | Siswa/guru | 20     | 20     | 21     | 20     | 21     |
|     | - SMP  | Siswa/guru | 17     | 17     | 18     | 15     | 15     |
|     | - SMA  | Siswa/guru | 16     | 15     | 15     | 14     | 14     |

| NO. | INDIKATOR DAERAH                                      | SATUAN         | TAHUN |       |       |       |       |
|-----|---|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |   |                | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|     |   | guru           |       |       |       |       |       |
|     | - SMK   | Siswa/<br>guru | 17    | 14    | 14    | 15    | 15    |
|     | <b>Rasio Murid/kelas rata-rata</b>                    |                |       |       |       |       |       |
|     | - SD  | Siswa          | 30    | 27    | 27    | 26    | 27    |
|     | - SMP   | Siswa          | 31    | 29    | 29    | 31    | 22    |
|     | - SMA   | Siswa          | 35    | 37    | 33    | 32    | 32    |
|     | - SMK   | Siswa          | 34    | 33    | 32    | 32    | 31    |
|     | <b>Angka Melek Huruf penduduk usia 15 - 24 tahun</b>  | %              | 94,77 | 98,92 | 98,97 | 99,73 | 99,73 |
|     | <b>Angka Guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D-IV</b> |                |       |       |       |       |       |
|     | - SD  | %              | 89,66 | 94,05 | 94,05 | 96,86 | 97,06 |
|     | - SMP   | %              | 95,05 | 96,46 | 96,46 | 97,73 | 97,63 |
|     | - SMA   | %              | 99,07 | 98,78 | 98,89 | 98,80 | 98,93 |
|     | - SMK   | %              | 96,57 | 97,00 | 97,25 | 97,13 | 97,10 |

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Tahun 2021 yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa:

- APK PAUD tahun 2016-2019 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2016 sebesar 49,09% menjadi 65,80% di tahun 2019, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 42,03%;
- Angka APK SD/MI mengalami kenaikan dari 120,79% menjadi 120,90% di tahun 2018, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi 104,64%;
- Angka APK SMP/MTs mengalami kenaikan dari 115,97% di tahun 2016 menjadi 122,27% di tahun 2019, namun mengalami penurunan yang sangat signifikan di tahun 2020 menjadi 88,04%;
- Angka APK SMA/K mengalami fluktuasi, yang semula 96,64% di tahun 2016 dan kemudian meningkat menjadi 112,45% di tahun 2018, namun pada tahun 2020 turun kembali menjadi 82,30%;
- Angka APM SD/MI pada tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi dan cenderung turun, dimana pada tahun 2016 mencapai 106,5% namun pada tahun 2020 turun menjadi 95,84%;
- Angka APM SMP/MTs pada tahun 2016-2019 terus mengalami



- peningkatan dari 94,85% ditahun 2016 menjadi 97,88% pada tahun 2019, namun mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 79,71%;
- g. Angka APM SMA/K pada tahun 2016 sebesar 85,40%, namun pada tahun 2020 turun menjadi 59,30%;
  - h. Angka putus sekolah SD pada tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi dengan posisi terakhir sebesar 0,023% di tahun 2019;
  - i. Angka Putus Sekolah SMP Sederajat pada tahun 2016-2020 terus mengalami penurunan hingga menjadi 0,20 pada tahun 2020;
  - j. Angka Putus Sekolah SMA Sederajat dari yang semula 0,29% pada tahun 2016, naik menjadi 0,56% di tahun 2017, namun pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami penurunan menjadi 0,09 di tahun 2020;
  - k. Angka Putus Sekolah SMK Sederajat pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi hingga diposisi tahun terakhir mencapai 0,19%;
  - l. Angka kelulusan untuk SD/MI pada tahun 2016-2019 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat di tahun terakhir menjadi 98,96% (2019);
  - m. Angka kelulusan untuk SMP dan SMA dari tahun 2016-2019 mengalami penurunan. Angka lulusan SMP sederajat turun dari 83,23% menjadi 81,04%, namun pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 95,53%;
  - n. Angka lulusan SMA sederajat pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun dengan posisi terakhir yaitu 64,05% di tahun 2020. Sedangkan Angka lulusan SMK pada periode yang sama juga mengalami fluktuasi, namun cenderung meningkat dengan posisi terakhir yaitu mencapai 72,18%;
  - o. Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs pada tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun hingga menjadi 82,99% di tahun 2020. Untuk Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA juga pada tahun yang sama mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat hingga mencapai 117,07% di tahun 2020;



- p. Fasilitas ruang kelas Baik SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan MA pada tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi dan menurun di tahun terakhir (2019 ke 2020);
- q. Rasio guru murid sekolah pendidikan dasar SD pada tahun 2020 mencapai 21 siswa/guru. Meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 20 siswa/guru di tahun 2019. Untuk Rasio guru murid sekolah pada jenjang SMA selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan dari 16 siswa/guru (2016) menjadi hanya 14 siswa/guru (2020). Sedangkan untuk jenjang SMP dan SMK pada tahun yang sama mengalami fluktuasi dan cenderung menurun.
- r. Rasio murid/kelas rata-rata untuk jenjang SD, SMP dan SMA selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun. Namun untuk jenjang SMK pada periode yang sama angkanya terus mengalami penurunan, dimana pada tahun 2020 hanya mencapai 31 siswa atau mengalami penurunan sebesar 3 siswa di banding dengan kondisi pada tahun 2016 yang mencapai 34 siswa;
- s. Angka Melek Huruf penduduk usia 15 - 24 tahun pada tahun 2020 mencapai 99,73%, mengalami kenaikan sebesar 4,96% dibanding tahun 2016 yang hanya mencapai 94,77%;
- t. Angka guru yang memiliki kualifikasi S1/D4 untuk jenjang SD pada tahun 2016 hanya mencapai 89,66% dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2020 menjadi 97,06%. Untuk jenjang SMP dan SMK pada tahun yang sama mengalami fluktuasi, dengan posisi terakhir yaitu sebesar 97,63% (SMP) dan 97,10% (SMK). Sedangkan Angka Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV untuk jenjang SMA pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami penurunan hingga menjadi 98,93% di tahun 2020 atau turun sebesar 0,14% dibanding dengan tahun 2016 yang mencapai 99,07%.

Selain itu, sebagai modal dasar pelaksanaan pendidikan yang berkualitas, tentu saja harus diimbangi dengan sarana dan prasarana pendidikan yang bermutu dan berkualitas, minimal sesuai standar nasional. Berikut sarana penunjang utama pendidikan, yakni guru dan sekolah beserta rasionya terhadap total murid di Kabupaten Cirebon.

**Tabel 2.30****Sarana Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2020**

| Jenjang Pendidikan              | Jumlah Sekolah |        | Jumlah Murid |        | Jumlah Guru |        |
|---------------------------------|----------------|--------|--------------|--------|-------------|--------|
|                                 | Negeri         | Swasta | Negeri       | Swasta | Negeri      | Swasta |
| Sekolah Dasar (SD)              | 885            | 48     | 193.312      | 8.260  | 8.955       | 510    |
| Sekolah Menengah Pertama (SMP)  | 80             | 118    | 57.008       | 23.757 | 3.066       | 1.436  |
| Sekolah Menengah Atas (SMA)     | 21             | 26     | 17.466       | 4.408  | 886         | 310    |
| Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) | 8              | 101    | 9.990        | 43.430 | 490         | 2.105  |

Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2020, BPS yang dikelola dalam SIPD

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Pendidikan dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

**Tabel 2.31****Kinerja Urusan Bidang Pendidikan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020**

| NO | IKK   | CAPAIAN KINERJA |         |
|----|---|-----------------|---------|
|    |   | 2019            | 2020    |
| 1. | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD  | 40,85%          | 79,28%  |
| 2. | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar   | 116,52%         | 113,42% |
| 3. | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pertama   | 112,27%         | 151,26% |
| 4. | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan | 2,00%           | 0,51%   |

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Tahun 2021 yang dikelola dalam SIPD

**2. Kesehatan**

Peningkatan kesehatan masyarakat menjadi salah satu tujuan pokok pemerintah daerah dalam kerangka peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat jasmani dan rohani. Kabupaten Cirebon memiliki dua rumah sakit umum daerah, yakni Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun dan Rumah Sakit Umum Daerah Waled. Setiap kecamatan di Kabupaten Cirebon juga telah memiliki puskesmas induk yang merupakan fasilitas kesehatan utama yang berada di pusat kecamatan. Selain itu, unit pembantu pengembangan kesehatan berupa Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) juga telah tersedia di setiap kecamatan. Adapun Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Cirebon (Unit) Tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.32****Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Cirebon (Unit), Tahun 2018-2020**

| Fasilitas Kesehatan  | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------|------|------|------|
| Rumah Sakit          | 12   | 12   | 12   |
| Rumah Sakit Bersalin | 0    | 0    | 0    |
| Poliklinik           | 83   | 58   | 78   |

| Fasilitas Kesehatan | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------|------|------|------|
| Puskesmas           | 67   | 55   | 58   |
| Puskesmas Pembantu  | 107  | 74   | 81   |
| Apotek              | 126  | 133  | 153  |

Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2021, BPS yang dikelola dalam SIPD

Dari fasilitas kesehatan yang tersedia di atas, dalam satu bulan di tahun 2020 telah melakukan pelayanan kesehatan baik itu dalam perawatan jalan maupun inap sebagaimana tercermin pada data presentase berikut.

**Tabel 2.33**

**Persentase Penduduk Yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Tempat Berobat dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon, 2020**

| Tempat Berobat                | Laki -laki | Perempuan | Jumlah |
|-------------------------------|------------|-----------|--------|
| Rumah Sakit                   | 17,51      | 10,64     | 13,91  |
| Prektek Dokter/Bidan          | 37,96      | 33,78     | 35,67  |
| Klinik/Praktek Dokter Bersama | 5,50       | 5,39      | 5,44   |
| Puskesmas/Pustu               | 46,46      | 52,77     | 49,93  |
| Lainnya                       | 3,68       | 2,69      | 3,15   |

Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2021, BPS yang dikelola dalam SIPD

**Tabel 2.34**

**Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (Balita) yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Cirebon Tahun 2019**

| Jenis Kelamin | BCG   | DPT   | Polio | Campak | HB    |
|---------------|-------|-------|-------|--------|-------|
| Laki-laki     | 92,80 | 87,13 | 95,47 | 63,24  | 92,29 |
| Perempuan     | 87,58 | 86,39 | 89,81 | 61,83  | 89,67 |

Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2020, BPS yang dikelola dalam SIPD

Lebih lanjut untuk Capaian Kinerja Bidang Kesehatan Tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.35**

**Capaian Bidang Kesehatan Tahun 2016-2020**

| NO. | INDIKATOR  | SATUAN                   | TAHUN |      |      |      |      |
|-----|--|--------------------------|-------|------|------|------|------|
|     |  |                          | 2016  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1.  | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup | Per 1000 kelahiran hidup | 4,28  | 3,99 | 2,97 | 2,62 | 2,82 |



| NO. | INDIKATOR   | SATUAN                      | TAHUN  |        |        |       |        |
|-----|---|-----------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
|     |   |                             | 2016   | 2017   | 2018   | 2019  | 2020   |
| 2.  | Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup  | Per 1000 kelahiran hidup    | 1,94   | 0,75   | 3,18   | 2,8   | 2,9    |
| 3.  | Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup  | Per 100.000 kelahiran hidup | 90     | 18     | 73,26  | 70,23 | 84,16  |
| 4.  | Rasio posyandu per satuan balita  | Per 1000 balita             | 15,77  | 15,86  | 13,50  | 15,3  | 14,4   |
| 5.  | Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk                                   | Per 1000 penduduk           | 0,080  | 0,079  | 0,09   | 0,084 | 0,097  |
| 6.  | Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk   | Per 1000 penduduk           | 0,005  | 0,005  | 0,005  | 0,004 | 0,01   |
| 7.  | Rasio dokter per satuan penduduk  | Per 1000 penduduk           | 0,224  | 0,259  | 0,261  | 0,151 | 0,151  |
| 8.  | Rasio tenaga medis per satuan penduduk  | Per 1000 penduduk           | 0,224  | 0,259  | 0,261  | 0,151 | 0,151  |
| 9.  | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani   | %                           | 119,71 | 121,04 | 139,8  | 135,0 | 158,6  |
| 10. | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | %                           | 92,17  | 93,61  | 101    | 95,5  | 98,6   |
| 11. | Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)                               | %                           | 87,26  | 72,17  | 83,49  | 87,03 | 87,03  |
| 12. | Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan  | %                           | 100    | 100    | 100    | 100   | 100    |
| 13. | Presentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak                                    | %                           | 98,09  | 93,40  | 97,12  | 97,12 | 88,27  |
| 14. | Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk   | Per 100.000 penduduk        | 2,70   | 2,22   | 3,6    | 3,6   | 0,36   |
| 15. | Cakupan balita pneumonia yang ditangani   | %                           | 61,59  | 67,47  | 108,7  | 90    | 92     |
| 16. | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA                              | %                           | 14,22  | 15,35  | 100    | 106   | 65     |
| 17. | Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)                             | Per 100.000 penduduk        | 2,24   | 2,95   | 1,6    | 4,75  | 4,74   |
| 18. | Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS                   | %                           | 14,22  | 15,35  | 100    | 106   | 65     |
| 19. | Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS                  | %                           | 75,68  | 49,76  | 82     | 84    | 83     |
| 20. | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD                                  | %                           | 93,50  | 75,18  | 91,60  | 90,16 | 86,82  |
| 21. | Penderita diare yang ditangani  | %                           | 159,80 | 138,86 | 75,46  | 66,7  | 52,1   |
| 22. | Angka kejadian Malaria  | Per 100.000 penduduk        | 0,50   | 0,40   | 0,01   | 0,23  | 0,99   |
| 23. | Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi  | %                           | 0,01   | 0,01   | 0,01   | 0,42  | 0,43   |
| 24. | Cakupan kunjungan bayi  | %                           | 100,37 | 103,03 | 102,04 | 100   | 101,91 |
| 25. | Cakupan puskesmas   | %                           | 142,5  | 142,5  | 150    | 150   | 150    |
| 26. | Cakupan pembantu puskesmas  | %                           | 16,75  | 16,75  | 16,75  | 16,75 | 16,75  |
| 27. | Cakupan kunjungan ibu hamil K4  | %                           | 92,22  | 94,92  | 100,41 | 96,8  | 98,2   |
| 28. | Cakupan pelayanan nifas   | %                           | 91,48  | 93,79  | 47,04  | 95,5  | 99     |





| NO. | INDIKATOR   | SATUAN | TAHUN |        |       |       |        |
|-----|---|--------|-------|--------|-------|-------|--------|
|     |   |        | 2016  | 2017   | 2018  | 2019  | 2020   |
| 29. | Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani                                       | %      | 86,33 | 106,28 | 40,17 | 112,7 | 100,89 |
| 30. | Cakupan pelayanan anak balita   | %      | 93,89 | 97,20  | 49,25 | 100,8 | 87,19  |
| 31. | Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat                                   | %      | 92,04 | 74,18  | 95,99 | 93,75 | 80,35  |
| 32. | Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidermiologi < 24 jam | %      | 100   | 100    | 100   | 100   | 100    |

Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2021 yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa:

- 1) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup mengalami penurunan, dimana pada tahun 2016 mencapai 4,28 dan pada tahun 2020 turun menjadi 2,82;
- 2) Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat, pada tahun 2016 hanya mencapai 1,94, namun pada tahun 2020 naik menjadi 2,9;
- 3) Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi, pada tahun 2016 mencapai 90 dan tahun 2020 mencapai 84,16;
- 4) Rasio Posyandu per satuan balita dari 2016-2020 mengalami penurunan dari 15,77 menjadi 14,4 per 1000 balita;
- 5) Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk mengalami kenaikan dari 0,080 menjadi 0,097 per 1000 penduduk;
- 6) Rasio rumah sakit per satuan penduduk pada tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi, pada tahun 2016 mencapai 0,005 dan pada tahun 2020 mencapai 0,01 per 1000 penduduk;
- 7) Rasio dokter per satuan penduduk mengalami fluktuasi dari 0,224 pada tahun 2016 menjadi 0,151 per 1000 penduduk di tahun 2020;
- 8) Rasio tenaga medis per satuan penduduk mengalami fluktuasi dari 0,224 pada tahun 2015 menjadi 0,151 per 1000 penduduk di tahun 2020;
- 9) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani mengalami kenaikan

- selama kurun waktu tahun 2016-2020 dari 119,71% menjadi 158,6%;
- 10) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan mengalami fluktuasi dari 92,17% pada tahun 2016 menjadi 98,6% di tahun 2020;
  - 11) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi, dari 87,26 di tahun 2016 menjadi 87,03 pada tahun 2020;
  - 12) Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan stabil dalam angka 100%;
  - 13) Presentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2016 sebesar 98,09% dan pada tahun 2020 turun menjadi 88,27%;
  - 14) Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk mengalami fluktuasi dan cenderung turun, dimana pada tahun 2016 mencapai 2,70, namun pada tahun 2020 turun menjadi 0,36%;
  - 15) Cakupan balita pneumonia yang ditangani mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat, dimana pada tahun 2016 mencapai 61,59% dan pada tahun 2020 naik menjadi 92%;
  - 16) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA mengalami fluktuasi, pada tahun 2016 mencapai 14,22% dan pada tahun 2020 menjadi 65%;
  - 17) Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) mengalami kenaikan 2,24 menjadi 4,74 per 100.000 penduduk;
  - 18) Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS mengalami fluktuasi, pada tahun 2016 mencapai 14,22% dan pada tahun 2020 menjadi 65%;
  - 19) Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS mengalami fluktuasi dari 75,68% menjadi 83%;
  - 20) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD mengalami penurunan dari 93,50% menjadi 86,82%;
  - 21) Penderita diare yang ditangani mengalami penurunan dari 159,80%

- menjadi 52,1%;
- 22) Angka kejadian Malaria naik, dari 0,50 menjadi 0,99 per 100.000 penduduk;
  - 23) Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi naik, dari 0,01% menjadi 0,43%;
  - 24) Cakupan kunjungan bayi dari tahun 2016-2020 mengalami kenaikan, dari 100,37% menjadi 101,91%;
  - 25) Cakupan puskesmas mengalami kenaikan 142,5% menjadi 150%;
  - 26) Cakupan puskesmas pembantu pada tahun 2016-2020 masih sama yaitu 16,75%;
  - 27) Cakupan kunjungan ibu hamil K4 mengalami fluktuasi, dari 92,22% pada tahun 2016 menjadi 98,2% di tahun 2020;
  - 28) Cakupan pelayanan nifas mengalami kenaikan 91,48% menjadi 99%;
  - 29) Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat, dari 86,33% menjadi 100,89%;
  - 30) Cakupan pelayanan anak balita mengalami fluktuasi, dari 93,89% menjadi 87,19%;
  - 31) Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat mengalami fluktuasi, dari 92,04% menjadi 80,35%;
  - 32) Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidermiologi < 24 jam stabil diangka 100%.

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang kesehatan dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020. Berikut ini adalah kinerja urusan bidang kesejatan tahun 2019-2020,

**Tabel 2.36**

**Kinerja Urusan Bidang Kesehatan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD  
Tahun 2019 s.d. 2020**

| NO. | IKK   | CAPAIAN KINERJA |         |
|-----|---|-----------------|---------|
|     |   | 2019            | 2020    |
| 1.  | Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk  | 0,05%           | 0,11%   |
| 2.  | Persentase RS rujukan yang terakreditasi  | 100,00%         | 91,67%  |
| 3.  | Rasio Tenaga Kesehatan terhadap jumlah penduduk   | 0.1507          | 0.1507  |
| 4.  | Presentase Ibu hamil mendapatkan kesehatan ibu hamil  | 96,67%          | 98,24%  |
| 5.  | Presentase Ibu bersalin yang mendapat pelayanan persalinan  | 95,99%          | 98,65%  |
| 6.  | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan  | 104,90%         | 98,03%  |
| 7.  | Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar  | 100,88%         | 87,19%  |
| 8.  | Presentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar           | 87,27%          | 71,43%  |
| 9.  | Presentase usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar                         | 52,60%          | 14,60%  |
| 10. | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar         | 9,66%           | 72,42%  |
| 11. | Presentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan kesehatan sesuai standar                 | 17,65%          | 27,08%  |
| 12. | Presentase Penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                         | 159,70%         | 78,94%  |
| 13. | Presentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar                      | 100,00%         | 43,48%  |
| 14. | Presentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar                               | 53,63%          | 32,17%  |
| 15. | Presentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | 61,99%          | 62,31%  |
| 16. | Presentase Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)                                      | 87,03%          | 69,58%  |
| 17. | Presentase Balita Gizi Buruk / Stunting yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan                        | 100,00%         | 100,00% |
| 18. | Presentase penemuan dan penanganan penderita DBD  | 90,16%          | 86,82%  |
| 19. | Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup  | 70,2            | 84,2    |

Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2021 yang dikelola dalam SIPD

### 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### a. Jaringan Jalan

Keberadaan sarana penghubung di Kabupaten Cirebon relatif cukup baik dilihat dari kondisi jalan kabupaten, jalan provinsi maupun jalan negara.

Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2016 sampai 2020 terus mengalami peningkatan, dari 471,72 km pada tahun 2016 menjadi 694,22 km di tahun 2020. Sedangkan untuk kondisi sedang pada tahun yang sama angkanya mengalami fluktuasi dan cenderung menurun, dimana pada tahun 2020 panjang jalan dalam kondisi sedang hanya mencapai 339,19 km.

Adapun Panjang Jalan Kabupaten (km) di Kabupaten Cirebon Berdasarkan Kondisi Tahun 2016-2020 disajikan lengkap pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.37**

**Panjang Jalan Kabupaten (km) di Kabupaten Cirebon Berdasarkan Kondisi Tahun 2016-2020**

| Uraian               | Satuan | Tahun  |         |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
|                      |        | 2016   | 2017    | 2018   | 2019   | 2020   |
| Kondisi Baik         | Km     | 471,72 | 496,127 | 568,51 | 679,68 | 694,22 |
| Kondisi Sedang       | Km     | 474,15 | 482,811 | 441,12 | 337,62 | 339,19 |
| Kondisi Rusak Ringan | Km     | 197,15 | 163,6   | 152,37 | 121,73 | 137,51 |
| Kondisi Rusak Berat  | Km     | 97,28  | 97,766  | 78,30  | 101,28 | 69,40  |

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Cirebon, Tahun 2021 yang dikelola dalam SIPD

Lebih lanjut mengenai Indikator Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2018 disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.38**

**Indikator Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2020**

| NO. | INDIKATOR DAERAH                                 | SATUAN | TAHUN |       |       |       |       |
|-----|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |  |        | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| 1   | 2  | 3      | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     |
| 1.  | Proporsi panjang jaringan jalan kondisi baik     | Persen | 26,21 | 40,00 | 45,84 | 54,80 | 55,97 |
| 2.  | Persentase jalan drainase/saluran pembuangan air | Persen | 1,31  | 2,20  | 3,03  | 3,55  | 3,77  |
| 3.  | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik  | Persen | 62,88 | 62,2  | 62,22 | 71,08 | 72,54 |
| 4.  | Rasio jaringan irigasi                           | Persen | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 17,44 | 17,44 |

|    |  |        |      |      |      |      |      |
|----|--|--------|------|------|------|------|------|
| 5. | Persentase jalan yang memiliki trotoar (minimal 1,5 m) | Persen | 0,05 | 0,43 | 0,66 | 0,85 | 0,87 |
|----|--|--------|------|------|------|------|------|

Sumber: Dinas PUPR, Tahun 2020 yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa:

- 1) Proporsi panjang jaringan jalan kondisi baik mengalami kenaikan pada tahun 2016-2020 dari 26,21% menjadi 55,97%;
- 2) Persentase jalan drainase/saluran pembuangan air dari 2016-2020 mengalami kenaikan juga, dari 1,31% menjadi 3,77%;
- 3) Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik mengalami kenaikan dari 62,88% menjadi 72,54%;
- 4) Persentase jalan yang memiliki trotoar (minimal 1,5 m) masih sangat rendah yaitu hanya sebesar 0,87% di tahun 2020.

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

**Tabel 2.39**

**Kinerja Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020**

| NO | IKK  | CAPAIAN KINERJA |         |
|----|--|-----------------|---------|
|    |  | 2019            | 2020    |
| 1. | Tingkat Kemantapan jalan Kabupaten/Kota  | 82,02%          | 83,32%  |
| 2. | Persentase Panjang Jalan Kabupaten yang di rehabilitasi / direkonstruksi   | 29,21%          | 4,93%   |
| 3. | Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota                                   | 100,00%         | 4,72%   |
| 4. | Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS Kewenangan Kab/Kota | 100,00%         | 100,00% |
| 5. | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan   | 67,87%          | 65,07%  |



| NO | IKK   | CAPAIAN KINERJA |         |
|----|---|-----------------|---------|
|    |   | 2019            | 2020    |
|    | bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota    |                 |         |
| 6. | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik   | 78,24%          | 74,86%  |
| 7. | Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi              | 20,00%          | 20,00%  |
| 8. | Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi          | 100,00%         | 100,00% |
| 9. | Rasio Luas irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani / ditangani oleh jaringan irigasi | 9,96%           | 72,15%  |

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Cirebon, Tahun 2020

#### 4. Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Perumahan dan kawasan permukiman merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

##### a. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni dari tahun 2016-2018 terus mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2016 mencapai 75% dan tahun 2018 naik menjadi 96,5%. Adapun data Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Tahun 2016-2018 disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.40**  
**Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni**  
**Tahun 2016-2018**

| No. | Indikator                             | Satuan | Tahun |       |      |
|-----|---------------------------------------|--------|-------|-------|------|
|     |                                       |        | 2016  | 2017  | 2018 |
| 1.  | Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni | %      | 94    | 96,16 | 96,5 |

Sumber: DKPP Kab. Cirebon, 2018 yang dikelola dalam SIPD

##### b. Air Bersih

Penyediaan air minum merupakan kebutuhan dasar dan hak sosial ekonomi masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ia menjadi salah satu penentu dalam peningkatan

kesehatan, kesejahteraan dan produktifitas masyarakat di bidang ekonomi. Meningkatkan ketersediaan air bersih dimasa mendatang merupakan hal terpenting bagi kehidupan semua manusia. Air sebagai salah satu hajat dasar manusia, ketersediaan air bersih adalah hal utama menjamin kelayakan keberlangsungan hidup.

**Tabel 2.41**

**Jumlah Pelanggan Air Bersih PDAM  
di Kabupaten Cirebon Tahun 2016**

| No. | Uraian  | 2016    |
|-----|---|---------|
| 1.  | Total Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan air bersih       | 33.125  |
| 2.  | Jumlah Rumah Tangga   | 677.089 |
| 3.  | Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Air Bersih (11/12) | 4.89    |

Sumber: Buku Cirebon dalam Angka Tahun 2016-2017,  
PDAM Kab.Cirebon yang dikelola dalam SIPD

Untuk pengguna PDAM yang saat ini paling banyak adalah jenis pelanggan rumah tangga yang prosentasenya mencapai 96,421% atau sebanyak 33.215 rumah tangga. Disusul oleh jenis pelanggan sosial yang mencapai 1,475% atau sebanyak 508 pelanggan. Adapun pelanggan yang paling sedikit adalah dari jenis industri dengan prosentase sebesar 0,009% atau sebanyak 3 (tiga) pelanggan.

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

**Tabel 2.42****Kinerja Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020**

| NO. | IKK  | CAPAIAN KINERJA |        |
|-----|--|-----------------|--------|
|     |  | 2019            | 2020   |
| 1.  | Rumah Tangga Bersanitasi   | 78,24%          | 74,86% |
| 2.  | Rumah tangga pengguna air bersih   | 67,87%          | 65,07% |
| 3.  | Kawasan Kumuh  | 6,91%           | 0,93%  |
| 4.  | Ruang Terbuka Hijau persatuan Luas Wilayah   | 52,66%          | 53,62% |
| 5.  | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota                        | 100%            | 0%     |
| 6.  | Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kabupaten | 100,00%         | 0%     |
| 7.  | Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani                           | 94,09%          | 5,91%  |
| 8.  | Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak layak huni)   | 2,04%           | 1,87%  |
| 9.  | Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU ( Prasarana, sarana dan utilitas umum)                  | 11,13%          | 7,35%  |
| 10. | Rumah layak huni   | 97,96%          | 97,94% |

*Sumber: DPKPP Kabupaten Cirebon, 2020***5. Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Pada urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, capaian Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/Cirebon dari tahun 2016-2018 stabil sebesar 100% per tahun. Begitupula Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah wilayah manajemen kebakaran (WMK) sebesar 100% selama 3 tahun. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) pada tahun 2016 sebesar 35% dan turun menjadi 10,7% pada tahun 2018. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) dari tahun 2016 sampai 2017 naik dari 28,50% menjadi 74,87%. Prosentase Penegakan Perda dari tahun 2016 sampai 2018 naik dari 83,89% menjadi 86,43%.

Capaian Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2016-2018 disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.43****Capaian Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta  
Perlindungan Masyarakat Tahun 2016-2018**

| NO. | INDIKATOR   | SAT | TAHUN |       |       |
|-----|---|-----|-------|-------|-------|
|     |   |     | 2016  | 2017  | 2018  |
| 1   | 2   | 3   | 4     | 5     | 6     |
| 1.5 | <b>Ketentraman, Ketertiban Umum, dan perlindungan Masyarakat</b>                      |     |       |       |       |
| 1.  | Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/ Cirebon                                | %   | 100   | 100   | 100   |
| 2.  | Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah wilayah manajemen kebakaran ( WMK ) | %   | 100   | 100   | 100   |
| 3.  | Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)                                      | %   | 35    | 30    | 10,7  |
| 4.  | Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)             | %   | 28,50 | 74,87 | n/a   |
| 5.  | Prosentase Penegakan Perda  | %   | 83,89 | 79,24 | 86,43 |

Sumber: Satpol PP dan BPBD Kab. Cirebon, Tahun 2019 yang dikelola dalam SIPD

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

**Tabel 2.44****Kinerja Urusan Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan  
Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun  
2019 s.d. 2020**

| NO. | IKK  | CAPAIAN KINERJA |           |
|-----|--|-----------------|-----------|
|     |  | 2019            | 2020      |
| 1.  | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan        | 68,44%          | 100%      |
| 2.  | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan                 | 10,79%          | 10,79%    |
| 3.  | Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 300             | 2.296.999 |

| NO. | IKK  | CAPAIAN KINERJA |        |
|-----|--|-----------------|--------|
|     |  | 2019            | 2020   |
| 4.  | Jumlah Warga yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana | 207.045         | 84.147 |
| 5.  | Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana      | 194.492         | 84.147 |
| 6.  | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi bencana                             | 100%            | 86,36% |
| 7.  | Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran                                 | 97,08%          | 98%    |
| 8.  | Persentase personil Satpol PP berkualitas PPNS                                     | 8,22%           | 8,22%  |

Sumber: Satpol PP dan BPBD Kabupaten Cirebon, Tahun 2020

## 6. Sosial

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.

Prosentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial selama kurun waktu tahun 2016-2018 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2016 mencapai 48,96% dan naik menjadi 67,06% di tahun 2017, namun turun kembali pada tahun 2018 menjadi 28%. Adapun Capaian Bidang Sosial Tahun 2016-2018 secara lengkap disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.45**  
**Capaian Bidang Sosial Tahun 2016-2018**

| NO.        | INDIKATOR   | SATUAN | TAHUN |       |      |
|------------|---|--------|-------|-------|------|
|            |   |        | 2016  | 2017  | 2018 |
| 1          | 2   | 3      | 4     | 5     | 6    |
| <b>1.6</b> | <b>Sosial</b>   |        |       |       |      |
| 1.         | Prosentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial                                      | %      | 48,96 | 67,06 | 28   |
| 2.         | Prosentase PPKS yang tertangani   | %      | 48,96 | 67,06 | 139  |
| 3.         | Prosentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar | %      | 28,02 | 18,59 | 80   |
| 4.         | Prosentase Panti Sosial yang  | %      | 8,61  | 2,53  | 80   |

| NO. | INDIKATOR  | SATUAN | TAHUN |      |      |
|-----|--|--------|-------|------|------|
|     |  |        | 2016  | 2017 | 2018 |
| 1   | 2  | 3      | 4     | 5    | 6    |
|     | menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenisnya |        |       |      |      |
| 5.  | Prosentase Panti Sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial                               | %      | 100   | 229  | 80   |
| 6.  | Prosentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat                                 | %      | 100   | 100  | 100  |
| 7.  | Prosentase korban bencana yang di evakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat                     | %      | 100   | 100  | 100  |

Sumber: Dinsos Kab. Cirebon, Tahun 2018 yang dikelola dalam SIPD

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Sosial dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

**Tabel 2.46**

**Kinerja Urusan Bidang Sosial Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020**

| NO. | IKK   | CAPAIAN KINERJA |        |
|-----|---|-----------------|--------|
|     |   | 2019            | 2020   |
| 1.  | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (Indikator SPM)            | 8,79%           | 5,27%  |
| 2.  | Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten  | 9,52%           | 11,51% |
| 3.  | Rasio rumah singgah / shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng | 0,02%           | 0,008% |
| 4.  | Persentase penyandang disabilitas , anak terlantar , usia lanjut terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga  | 100,00%         | 100%   |

| NO. | IKK   | CAPAIAN KINERJA |        |
|-----|---|-----------------|--------|
|     |   | 2019            | 2020   |
| 5.  | Rasio pekerja sosial / TKS / Relawan sosial yang disediakan   | 2,50%           | 1,66%  |
| 6.  | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (Indikator SPM)            | 8,79%           | 5,27%  |
| 7.  | Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten  | 9,52%           | 11,51% |
| 8.  | Rasio rumah singgah / shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng | 0,02%           | 0,008% |
| 9.  | Persentase penyandang disabilitas , anak terlantar , usia lanjut terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga  | 100,00%         | 100%   |
| 10. | Rasio pekerja sosial / TKS / Relawan sosial yang disediakan   | 2,50%           | 1,66%  |

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Tahun 2020.

## 7. Tenaga Kerja

Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Capaian Bidang Tenaga Kerja Tahun 2016-2018 disajikan secara lengkap sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 2.47**  
**Capaian Bidang Tenaga Kerja Tahun 2016-2018**

| NO.        | INDIKATOR  | SATUAN | TAHUN |       |      |
|------------|--|--------|-------|-------|------|
|            |  |        | 2016  | 2017  | 2018 |
| 1          | 2  | 3      | 4     | 5     | 6    |
| <b>1.7</b> | <b>Ketenagakerjaan</b>   |        |       |       |      |
| 1.         | Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja pertahun                              | -      | -     | -     | -    |
| 2.         | Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis kompetensi    | %      | 61,4  | 55,65 | 82   |
| 3.         | Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis kewirausahaan | %      | 80    | 81,63 | 78   |
| 4.         | Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan                  | %      | 45,84 | 49,08 | -    |
| 5.         | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial                          | %      | 73,58 | 40,63 | -    |



| NO. | INDIKATOR  | SATUAN | TAHUN |       |      |
|-----|--|--------|-------|-------|------|
|     |  |        | 2016  | 2017  | 2018 |
| 1   | 2  | 3      | 4     | 5     | 6    |
| 6.  | Kepesertaan Jamsostek                                      | %      | 53,51 | 65,05 | 55   |
| 7.  | Besaran Pemeriksaan Perusahaan                             | %      | 46,70 | -     | -    |
| 8.  | Besaran Pengujian peralatan di Perusahaan                  | %      | 53,17 | -     | -    |
| 9.  | Besaran Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan | orang  | 100   | 320   | -    |
| 10. | Prosentase transmigran swakarsa                            | %      | 0     | 0     | 0    |
| 11. | Keselamatan dan Perlindungan                               | -      | -     | -     | -    |

Sumber: Disnakertrans Kab.Cirebon, Tahun 2018 yang dikelola dalam SIPD

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Tenaga Kerja dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

**Tabel 2.48**

**Kinerja Urusan Bidang Tenaga Kerja Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020**

| NO. | IKK  | CAPAIAN KINERJA |         |
|-----|--|-----------------|---------|
|     |  | 2019            | 2020    |
| 1.  | Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja   | 26,32%          | 100,00% |
| 2.  | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi   | 0,00%           | 81,08%  |
| 3.  | Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja   | 37.859.607,84   | 5,282%  |
| 4.  | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP / PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan) | 6,70%           | 100%    |
| 5.  | Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan Luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja   | 47,96%          | 31,44%  |
| 6.  | Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama oleh Mediator Hubungan Industrial                                 | 52,78%          | 47,22%  |
| 7.  | Persentase instruktur bersertifikat kompetensi   | 62,50%          | 88,88%  |
| 8.  | Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki perizinan   | 95,61%          | 100%    |

Sumber: LPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2020

## 8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan merupakan strategi untuk meningkatkan peran perempuan dalam mengembangkan potensi diri agar mampu mandiri dan berkarya. Kesadaran mengenai peran perempuan diwujudkan dalam program-program pengarusutamaan gender untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Guna mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, sedangkan untuk pembangunan di bidang anak dapat diukur melalui Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Lebih lanjut indikator pada bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disajikan pada tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

**Tabel 2.49**

**Kinerja Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020**

| NO. | IKK  | CAPAIAN KINERJA |        |
|-----|--|-----------------|--------|
|     |  | 2019            | 2020   |
| 1.  | Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja Langsung APBD  | 0,27%           | 0%     |
| 2.  | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten   | 0,01%           | 0,006% |
| 3.  | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (Tindak pidana perdagangan orang/manusia) per 100.000 Penduduk Perempuan | 3,51            | 0,66%  |
| 4.  | Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani   | 100%            | 100%   |
| 5.  | Partisipasi angkatan kerja perempuan   | 47,89%          | 46,77% |

Sumber: LPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2020

## **9. Pangan**

Ketahanan pangan merupakan kondisi di mana suatu wilayah mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya secara mandiri dan mampu

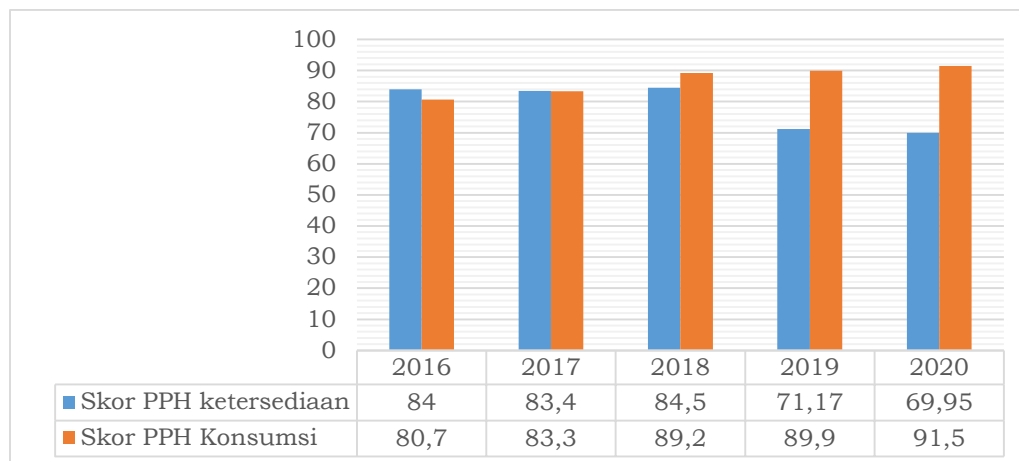
meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan menyeluruh. Kabupaten Cirebon telah mampu mengeluarkan Produk Domestik Regional Bruto demi mencukupi kebutuhan pangan di daerahnya. Beberapa sektor untuk memenuhi kebutuhan pangan meliputi produk tanaman pangan berupa padi dan palawija, tanaman hortikultura musiman dan tahunan berupa sayur dan buah-buahan, peternakan berupa unggas, sapi, kambing, babi dll, serta sektor perikanan dimana sebagian wilayah di Kabupaten Cirebon merupakan daerah pesisir pantai.

#### a. Skor PPH Ketersediaan dan PPH Konsumsi

Skor PPH ketersediaan selama kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun di tahun 2020 menjadi 69,95% dari yang semula 84% di tahun 2016. Untuk Skor PPH Konsumsi pada tahun 2016-2020 nilainya terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 sebesar 80,7% dan pada tahun 2020 naik menjadi 91,5%. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:

**Gambar 2.27**

#### **Skor PPH Ketersediaan dan PPH Konsumsi Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020**



Sumber: Dishanpang Kab.Cirebon, Tahun 2020 yang dikelola dalam SIPD.

Lebih lanjut Capaian Indikator Urusan Pangan Tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.50**

#### **Capaian Indikator Urusan Pangan Tahun 2016-2020**

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | TAHUN |
|-----|-----------|--------|-------|
|-----|-----------|--------|-------|

|            |   |           | 2016 | 2017 | 2018 | 2019   | 2020  |
|------------|---|-----------|------|------|------|--------|-------|
| <b>1.9</b> | <b>Ketahanan Pangan</b>                       |           |      |      |      |        |       |
| 1.         | Skor PPH ketersediaan                         | %         | 84   | 83,4 | 84,5 | 71,17  | 69,95 |
| 2.         | Jumlah Desa Rawan Pangan yang diintervensi    | Desa      | 5    | 5    | 6    | 7      | n.a   |
| 3.         | Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CCPD)      | %         | 24   | 42   | 86   | 90,719 | 182   |
| 4.         | Stabilitas Harga Pangan Tingkat Konsumen (CV) | koefisien | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 4      | 2,80  |
| 5.         | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Ketahanan Pangan | buah      | 1    | 2    | -    | 1      | -     |
| 6.         | Skor PPH Konsumsi                             | %         | 80,7 | 83,3 | 89,2 | 89,9   | 91,50 |
| 7.         | Tingkat Keamanan Pangan                       | %         | 83   | 92   | 92   | 67     | 88    |

Sumber: Dishanpang Kab.Cirebon, Tahun 2018 yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa:

- 1) Jumlah Desa Rawan Pangan yang diintervensi mengalami kenaikan dari 2016 sebanyak 5 Desa kemudian 2019 sebanyak 7 desa;
- 2) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CCPD) dari 2016-2020 mengalami kenaikan 24% menjadi 182%;
- 3) Stabilitas Harga Pangan Tingkat Konsumen (CV) 2016-2020 mengalami penurunan dari 9,75 menjadi 2,80;
- 4) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Ketahanan Pangan juga mengalami mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2016 1 buah, naik pada tahun 2017 menjadi 2 buah, namun pada tahun 2019 turun kembali menjadi 1 buah; dan
- 5) Tingkat Keamanan Pangan dari tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat, dimana pada tahun 2016 sebesar 83 persen dan tahun 2020 naik menjadi 88 persen.

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Pangan dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

**Tabel 2.51****Kinerja Urusan Bidang Pangan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020**

| NO. | IKK   | CAPAIAN KINERJA    |                    |
|-----|---|--------------------|--------------------|
|     |   | 2019               | 2020               |
| 1.  | Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)          | 171,30%            | 152,07%            |
| 2.  | Tersedianya infrastruktur pergundangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan | 1 unit Gudang CPPD | 1 unit Gudang CPPD |

Sumber: LPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2020

**10. Pertanahan**

Capaian indikator pada bidang pertanahan di Kabupaten Cirebon disajikan pada tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Pertanahan dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

**Tabel 2.52****Kinerja Urusan Bidang Pertanahan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020**

| NO. | IKK  | CAPAIAN KINERJA |      |
|-----|--|-----------------|------|
|     |  | 2019            | 2020 |
| 1.  | Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan | 2,33%           | 0%   |
| 2.  | Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum  | 100,00%         | 100% |
| 3.  | Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal  | 2,33%           | 0%   |
| 4.  | Tersedianya tanah obyek landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee             | 100,00%         | 0%   |

| NO. | IKK  | CAPAIAN KINERJA |        |
|-----|--|-----------------|--------|
|     |  | 2019            | 2020   |
| 5.  | Luas lahan bersertifikat (aset Pemkab)                           | 29,96%          | 29,96% |
| 6.  | Tersedianya tanah untuk masyarakat                               | 100%            | 100%   |
| 7.  | Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi | 40,00%          | 100%   |

Sumber: LPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2020

## 11. Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan isu strategis dan hal penting dalam pembangunan. Pada hakekatnya pembangunan mengandung implikasi perubahan yang direncanakan. Perubahan yang terjadi diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan penduduk tetapi tidak mengganggu aspek lingkungan hidup. Implikasi lainnya yaitu adanya eksploitasi sumber daya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan/atau pertumbuhan ekonomi wilayah yang acapkali bersinggungan dengan aspek lingkungan hidup. Oleh karenanya, harus dapat dipastikan pembangunan daerah berada dalam bingkai atau koridor pembangunan berkelanjutan.

Adapun Indikator yang dapat merepresentasikan capaian pada bidang lingkungan hidup di Kabupaten Cirebon adalah diantaranya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Terlaksananya Pengelolaan sampah dan Ketaatan penanggung jawab usaha / kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Capaian beberapa indikator tersebut disajikan pada tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Lingkungan Hidup dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

**Tabel 2.53**

**Kinerja Urusan Bidang Lingkungan Hidup Dalam Rangka EKPPD  
Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020**

| NO. | IKK   | CAPAIAN KINERJA |        |
|-----|---|-----------------|--------|
|     |   | 2019            | 2020   |
| 1.  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)   | 51,78           | 53,38  |
| 2.  | Terlaksananya Pengelolaan sampah  | 6,09%           | 23,26% |
| 3.  | Ketaatan penanggung jawab usaha / kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah | 100,00%         | 59,06% |

Sumber: LPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2020

## 12. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan merupakan salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh kabupaten/kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar, termasuk pula bagi Kabupaten Cirebon. Kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai penduduk dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk menjadi salah satu tantangan pembangunan di bidang kependudukan di Kabupaten Cirebon.

Berikut disajikan data Capaian Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2016-2020.

**Tabel 2.54**

### Capaian Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2020

| NO.         | INDIKATOR   | SATUAN   | TAHUN     |           |           |         |           |
|-------------|---|----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
|             |   |          | 2016      | 2017      | 2018      | 2019    | 2020      |
| 1           | 2   | 3        | 4         | 5         | 6         | 7       | 8         |
| <b>1.12</b> | <b>Kependudukan dan Catatan Sipil</b>             |          |           |           |           |         |           |
| 1.          | Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk        | %        | 1,29      | 1,22      | 0,93      | 97,64   | 98,87     |
| 2.          | Rasio bayi berakta kelahiran                      | %        | 0,36      | 0,36      | 0,19      | 23,92   | 23,8      |
| 3.          | Jumlah pasangan berakta nikah                     | pasangan | 1.038.345 | 1.023.159 | 1.040.827 | -       | 1.054.030 |
| 4.          | Ketersediaan database kependudukan skala provinsi | Buah     | Tdk ada   | Tdk ada   | Tdk ada   | Tdk ada | Tdk ada   |
| 5.          | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK               | -        | Sudah     | Sudah     | Sudah     | sudah   | sudah     |
| 6.          | Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)     | %        | 88,5      | 81        | 93        | 97,64   | 99,87     |
| 7.          | Cakupan penerbitan akta kelahiran                 | %        | 36,2      | 78,98     | 80,51     | 85,36   | 83,86     |

Sumber: Disdukcapil Kab.Cirebon, Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa:



- 1) Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk tahun 2016-2018 mengalami penurunan dari 1,29% menjadi 0,93%;
- 2) Rasio bayi berakta kelahiran mengalami penurunan dari 0,36% menjadi 0,19% pada tahun 2018, namun pada tahun berikutnya mengalami kenaikan hingga menjadi 23,8% di tahun 2020;
- 3) Jumlah pasangan berakta nikah mengalami penurunan, dari semula 1.038.345 pasangan pada tahun 2016 menjadi 1.023.159 pasangan di tahun 2017, namun pada tahun berikutnya terus mengalami kenaikan hingga menjadi 1.054.030 pasangan di tahun 2020;
- 4) Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) mengalami kenaikan dari 88,5% menjadi 99,87%;
- 5) Cakupan penerbitan akta kelahiran mengalami kenaikan 36,2% menjadi 83,86%.

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

**Tabel 2.55**

**Kinerja Urusan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020**

| NO. | IKK   | CAPAIAN KINERJA |        |
|-----|---|-----------------|--------|
|     |   | 2019            | 2020   |
| 1.  | Persentase penduduk usia 0-18 tahun yang mempunyai Akte Kelahiran               | 96,57%          | 88,07% |
| 2.  | Persentase Penduduk berumur dari 17 tahun ke atas yang mempunyai KTP Elektronik | 97,60%          | 99,87% |

Sumber: LPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2020

### **13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat.

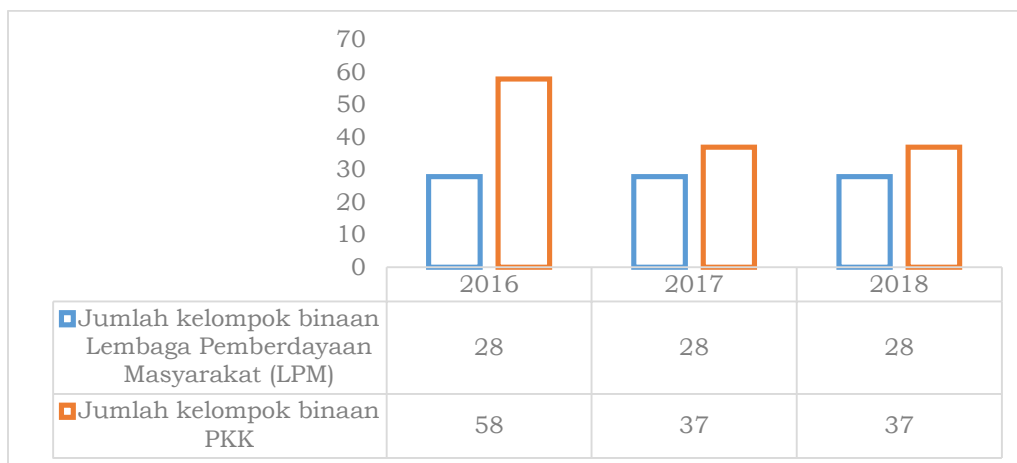
Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan sehingga bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat. Ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa mengarahkan haluan pembangunan dunia menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), stakeholders dalam bidang pembangunan berlomba-lomba menyasar satu atau beberapa dari tujuh belas tujuan pembangunan yang ada sebagai capaian. Banalitas proyeksi program ini tak terlepas berimbas pada program-program pemberdayaan masyarakat.

**a. Jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan PKK**

Pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Cirebon diwujudkan dalam terbentuknya kelompok binaan. Perkembangan kelompok binaan di Kabupaten Cirebon dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:

**Gambar 2.28**

**Jumlah Kelompok Binaan LPM dan PKK  
Kabupaten Cirebon 2016-2018**



Sumber: DPMD Kabupaten Cirebon, Tahun 2018 yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan gambar diatas, diketahui bahwa Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) pada tahun 2016-2018 stabil di angka 28%. Sedangkan Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK mengalami penurunan, dimana pada tahun 2016 angkanya

sebesar 58%, namun pada tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan kembali menjadi 37%.

Selanjutnya, selain Jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan PKK, berikut disajikan juga Indikator Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2018:

**Tabel 2.56**  
**Indikator Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Tahun 2016-2018**

| NO.         | INDIKATOR DAERAH   | SATUAN | TAHUN |       |      |
|-------------|--|--------|-------|-------|------|
|             |  |        | 2016  | 2017  | 2018 |
| 1           | 2  | 3      | 4     | 5     | 6    |
| <b>1.13</b> | <b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>                                |        |       |       |      |
| 1.          | Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik       | %      | 16,26 | 61,89 | 40   |
| 2.          | Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) | %      | 28    | 28    | 28   |
| 3.          | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK                                   | %      | 58    | 37    | 37   |
| 4.          | Persentase LSM aktif   | %      | 100   | 100   | 100  |
| 5.          | Persentase LPM Berprestasi   | %      | 28    | 28    | 20   |
| 6.          | Persentase PKK Aktif   | %      | 100   | 100   | 100  |
| 7.          | Persentase Posyandu Aktif  | %      | 100   | 100   | 100  |
| 8.          | Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat            | %      | 100   | 100   | 65   |
| 9.          | Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat                     | %      | 100   | 100   | 55   |

Sumber: DPMD Kabupaten Cirebon, Tahun 2018 yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa:

- 1) Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik mengalami fluktuasi, tahun 2016 hanya mencapai 16,26% dan naik menjadi 61,89% ditahun 2017, lalu kemudian turun kembali menjadi 40% di tahun 2018;
- 2) Persentase LSM aktif stabil diangka 100%;
- 3) Persentase LPM Berprestasi menurun dari angka 28% menjadi 20%;
- 4) Persentase PKK Aktif stabil diangka 100%;
- 5) Persentase Posyandu Aktif stabil diangka 100%;

- 6) Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat, dan Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat menurun dari 100% menjadi 65% dan 55%.

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

**Tabel 2.57**

**Kinerja Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020**

| NO. | IKK  | CAPAIAN KINERJA |         |
|-----|--|-----------------|---------|
|     |  | 2019            | 2020    |
| 1.  | Persentase Pengentasan Desa Tertinggal     | 72,09%          | 83,33 % |
| 2.  | Persentase Peningkatan status Desa Mandiri | 100 %           | 250 %   |
| 3.  | PKK aktif                                  | 100,00%         | 100     |
| 4.  | Posyandu                                   | 100,00%         | 100     |

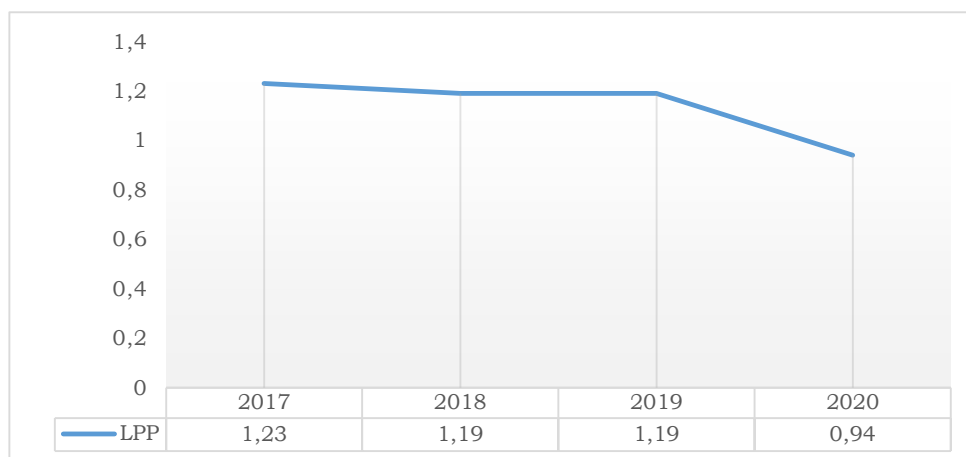
Sumber: LPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2020

#### **14. Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana**

Laju Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Cirebon pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami penurunan, dimana pada tahun 2017 LPP di Kabupaten Cirebon mencapai 1,23 persen dan pada tahun 2018 serta 2019 turun menjadi 1,19 persen. Selanjutnya pada tahun 2020 LPP di Kabupaten Cirebon mengalami penurunan kembali hingga menjadi 0,94 persen. Hal tersebut sebagaimana gambar dibawah ini:

**Gambar 2.29**

**Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Cirebon Tahun 2017-2020**



Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2021 yang dikelola dalam SIPD

Selain Laju pertumbuhan penduduk tersebut diatas, indikator lainnya pada bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Cirebon disajikan pada tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

**Tabel 2.58**

**Kinerja Urusan Bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020**

| NO. | IKK  | CAPAIAN KINERJA |            |
|-----|--|-----------------|------------|
|     |  | 2019            | 2020       |
| 1.  | TFR (Angka Kelahiran Total)  | 2.4 poin        | 2.4 poin   |
| 2.  | Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility / Rate / ASFR 15-19 Tahun) | 26.24 poin      | 59.14 poin |
| 3.  | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate / MCPR)      | 74,99%          | 75,90%     |
| 4.  | Persentase Kebutuhan ber - KB yang tidak terpenuhi (Unmet need)                            | 25,01%          | 13,30%     |

Sumber : DPPKBP3A Kabupaten Cirebon Tahun 2020.

## 15. Perhubungan

Urusan perhubungan merupakan salah satu aspek pendukung demi percepatan pembangunan dan penguatan ekonomi. Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Cirebon harus mampu melaksanakan hal-hal terkait perhubungan seperti Lalu Lintas Angkutan Jalan, Pelayaran, Penerbangan dan Perkeretaapian. Bukan hanya di kota besar, akan tetapi transportasi yang memadai harus tersedia sampai ke pelosok desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Cirebon. Berikut adalah tabel jumlah kendaraan Angkutan Pedesaan di Kabupaten Cirebon.

**Tabel 2.59****Jumlah Kendaraan Angkutan Pedesaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2018**

| No. | Kecamatan     | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----|---------------|------|------|------|
| 1.  | Waled         | 21   | 21   | 21   |
| 2.  | Pasaleman     | 21   | 21   | 21   |
| 3.  | Ciledug       | 91   | 91   | 91   |
| 4.  | Pabuaran      | 29   | 29   | 29   |
| 5.  | Losari        | 73   | 73   | 73   |
| 6.  | Pabedilan     | 0    | 0    | 0    |
| 7.  | Babakan       | 23   | 23   | 23   |
| 8.  | Gebang        | 46   | 46   | 46   |
| 9.  | Karangsembung | 46   | 46   | 46   |
| 10. | Karangwareng  | 8    | 8    | 8    |
| 11. | Lemahabang    | 74   | 74   | 74   |
| 12. | Susukan Lebak | 75   | 75   | 75   |
| 13. | Sedong        | 39   | 39   | 39   |
| 14. | Astanajapura  | 31   | 31   | 31   |
| 15. | Pangenan      | 14   | 14   | 14   |
| 16. | Mundu         | 0    | 0    | 0    |
| 17. | Beber         | 5    | 5    | 5    |
| 18. | Greged        | 22   | 22   | 22   |
| 19. | Talun         | 10   | 10   | 10   |
| 20. | Sumber        | 245  | 245  | 245  |
| 21. | Dikupuntang   | 119  | 119  | 119  |
| 22. | Palimanan     | 118  | 118  | 118  |
| 23. | Plumbon       | 217  | 217  | 217  |
| 24. | Depok         | 181  | 181  | 181  |
| 25. | Weru          | 307  | 307  | 307  |

| No. | Kecamatan    | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----|--------------|------|------|------|
| 26. | Plered       | 286  | 286  | 286  |
| 27. | Tengahtani   | 20   | 20   | 20   |
| 28. | Kedawung     | 20   | 20   | 20   |
| 29. | Gunungjati   | 61   | 61   | 61   |
| 30. | Kapetakan    | 0    | 0    | 0    |
| 31. | Suranenggala | 36   | 36   | 36   |
| 32. | Klangenan    | 178  | 178  | 178  |
| 33. | Jamblang     | 233  | 233  | 233  |
| 34. | Arjawinangun | 353  | 353  | 353  |
| 35. | Panguragan   | 59   | 59   | 59   |
| 36. | Ciwaringin   | 60   | 60   | 60   |
| 37. | Gempol       | 5    | 5    | 5    |
| 38. | Susukan      | 39   | 39   | 39   |
| 39. | Gegesik      | 114  | 114  | 114  |
| 40. | Kaliwedi     | 67   | 67   | 67   |

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, 2018

Adapun fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Cirebon pada tahun 2016 sampai dengan 2018 dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.60**  
**Fasilitas Perlengkapan Jalan Kabupaten Cirebon**  
**Tahun 2016-2018**

| Sarana<br>Prasarana/Fasilitas | Tahun |       |       |       |      |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|
|                               | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020 |
| Jumlah Terminal Type          | 3     | 3     | 3     | 0     | 0    |
| Jumlah Sub Terminal           | 3     | 3     | 3     | 3     | 3    |
| Jumlah Rambu Lalin            | 273   | 390   | 171   | 55    | 150  |
| Jumlah Traffic Light          | -     | -     | -     | -     | -    |
| Jumlah Warning Light          | 2     | 6     | 6     | 0     | 0    |
| Jumlah Lampu PJU              | 1.117 | 1.698 | 1.934 | 1.770 | 4    |
| Panjang Pagar Pengaman        | 97    | 140   | 170   | 220   | 173  |
| Shelter (Buah)                | 4     | 2     | 4     | 4     | 4    |
| Jumlah Trayek Layanan         | 48    | 48    | 48    | 48    | 48   |

Sumber: Dishub Kab.Cirebon, Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa:

- 1) Cakupan fasilitas perlengkapan jalan untuk sub terminal mengalami penurunan dari 2016-2018 dari 5 sub terminal menjadi 3 sub terminal;
- 2) Jumlah rambu lalu lintas juga mengalami penurunan dari 273 buah pada tahun 2016 menjadi 171 buah di tahun 2018;



- 3) Jumlah warning light mengalami kenaikan dari 2 menjadi 6 warning light;
- 4) Jumlah lampu PJU jumlahnya naik dari 1.117 buah menjadi 1.934 buah;
- 5) Pagar pengaman jalan jumlahnya naik dari 97 buah menjadi 170 buah;
- 6) Shelter meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2017, namun pada tahun 2018 naik kembali menjadi 4 buah;
- 7) Jumlah trayek layanan jumlahnya tetap sebanyak 48 trayek.

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Perhubungan dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

**Tabel 2.61**

**Kinerja Urusan Bidang Perhubungan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020**

| NO. | IKK                           | CAPAIAN KINERJA |       |
|-----|-------------------------------|-----------------|-------|
|     |                               | 2019            | 2020  |
| 1.  | Rasio konektivitas Kabupaten  | 0,63%           | 0,63% |
| 2.  | Kinerja lalu lintas Kabupaten | 0,76            | 0,75  |

*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, 2020.*

## **16. Komunikasi dan Informatika**

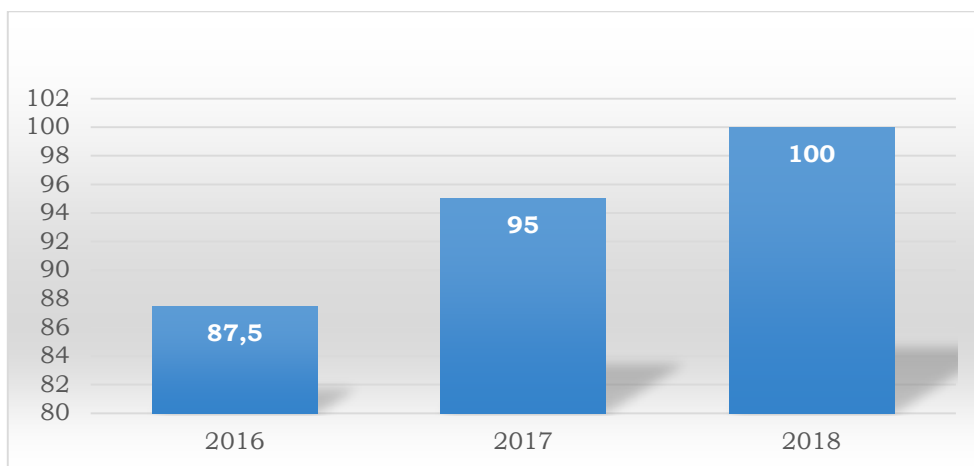
Pada era teknologi informasi sekarang ini, komunikasi dan informatika menjadi hal yang umum dalam keseharian masyarakat. Meskipun begitu, perihal ini belum menjadi domain utama masyarakat Cirebon dalam mengembangkan berbagai bidang kehidupannya sehari-hari.

### **a. Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan**

Untuk cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan, persentasenya naik dari tahun 2016 yang sebesar 87,5% menjadi 100% pada tahun 2018. Sedangkan untuk cakupan layanan telekomunikasi persentasenya stabil dari tahun 2015-2018 yaitu sebesar 100%. Hal tersebut sesuai dengan gambar dan tabel berikut ini:

**Gambar 2.30**

**Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Tahun 2016-2018**



Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 yang dikelola dalam SIPD.

**Tabel 2.62**

**Cakupan Layanan Telekomunikasi Tahun 2016-2018**

| Indikator                      | Satuan | Tahun |      |      |
|--------------------------------|--------|-------|------|------|
|                                |        | 2016  | 2017 | 2018 |
| Cakupan Layanan Telekomunikasi | %      | 100   | 100  | 100  |

Sumber: Diskominfo Kab.Cirebon, Tahun 2018 yang dikelola dalam SIPD



Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Komunikasi dan Informatika dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

**Tabel 2.63****Kinerja Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020**

| NO. | IKK   | CAPAIAN KINERJA |      |
|-----|---|-----------------|------|
|     |   | 2019            | 2020 |
| 1.  | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan   | 100%            | 100% |
| 2.  | Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi   | 25%             | 100% |
| 3.  | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten | 3,19%           | 100% |
| 4.  | Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah terkait Implementasi e-government   | 1               | 2    |
| 5.  | Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan Dinas Kominfo   | 100%            | 100% |

Sumber: Diskominfo Kab.Cirebon, Tahun 2020.

**17. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah****a. Koperasi**

Kabupaten Cirebon memiliki koperasi usaha yang bergerak dalam banyak bidang usaha seperti peternakan, perikanan, perkebunan/pertanian, angkutan darat dan lain-lain. Total jumlah koperasi di Kabupaten Cirebon mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, namun banyak diantara koperasi-koperasi tersebut yang tidak aktif. Menurut data yang tersedia Jumlah Koperasi Aktif di Kabupaten Cirebon pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 jumlah Koperasi Aktif hanya 721 koperasi dan pada tahun 2020 jumlahnya naik menjadi 784 koperasi.

Selain Koperasi, Kabupaten Cirebon juga memiliki Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam banyak bidang usaha baik industri, jasa dan perdagangan yang tersebar di 40 Kecamatan. Saat ini mulai diupayakan adanya sentra-sentra usaha berdasarkan komoditas yang menjadi ciri khas wilayah tersebut. Ada beberapa sentra usaha seperti pindang, kerupuk, emping melinjo, rotan, batik, gerabah, kulit, batu alam, sandal, meubel, konveksi dan usaha lainnya. Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta sarana dan prasarana.

Adapun Kondisi Perkoperasian dan UMKMd Kabupaten Cirebon pada tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.64**  
**Kondisi Perkoperasian dan UMKM**  
**Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020**

| No.         | Indikator Daerah                 | Satuan             | Tahun  |        |        |        |        |
|-------------|----------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             |                                  |                    | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| <b>1.17</b> | <b>Koperasi dan UMKM</b>         |                    |        |        |        |        |        |
| 1.          | Prosentase Koperasi Aktif        | unit               | 721    | 749    | 754    | 756    | 784    |
| 2.          | Persentase UKM non BPR/LKM Aktif | Persen             | 3/3    | 3/5    | 3/6    | 3/8    | 3/9    |
|             | Jumlah LKM Aktif                 | Unit               | 3      | 5      | 6      | 8      | 9      |
|             | Jumlah non BPR                   | Unit               | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      |
| 3           | Persentase BPR/LKM Aktif         | Persen             | 19/3   | 19/5   | 19/6   | 19/8   | 19/9   |
| 4           | Usaha Mikro dan Kecil            | Unit (mikro)       | 20.348 | 20.348 | 31.054 | 31.054 | 31.054 |
|             |                                  | Unit (mikro-kecil) | 25.118 | 25.118 | 35.824 | 35.824 | 35.824 |
|             |                                  | Persen             | 95,12  | 95,12  | 96,53  | 96,53  | 96,53  |

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Cirebon, Tahun 2020

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

**Tabel 2.65**  
**Kinerja Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020**

| NO. | IKK  | CAPAIAN KINERJA |         |
|-----|--|-----------------|---------|
|     |  | 2019            | 2020    |
| 1.  | Meningkatnya Koperasi yang berkualitas   | 18,04%          | 46,90%  |
| 2.  | Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha  | 100,00%         | 100,00% |
| 3.  | Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha | 0,73%           | 0,33%   |
| 4.  | Koperasi aktif   | 28,63%          | 36,98%  |

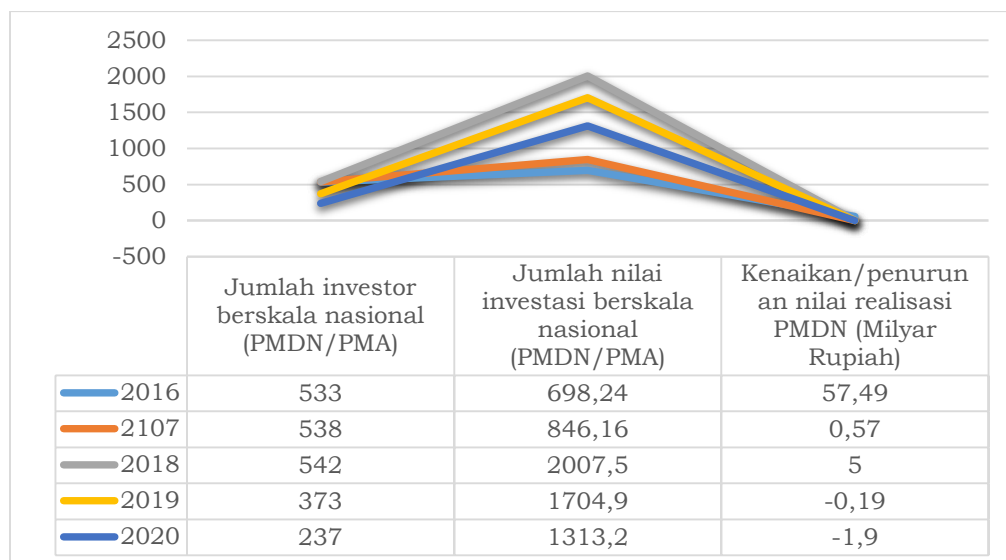
Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Cirebon, Tahun 2020

## 18. Penanaman Modal

Penanaman modal oleh investor dapat berdampak positif bagi peningkatan perekonomian daerah secara langsung. Selain itu, pembukaan lapangan usaha oleh investor yang diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja secara langsung akan menurunkan tingkat pengangguran. Iklim investasi di Kabupaten Cirebon cukup fluktuatif baik pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).

**Gambar 2.31**

**Jumlah Investor, Nilai Investasi dan Nilai Realisasi PMDN Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020**



Sumber: DPMPSTSP Kab.Cirebon, Tahun 2021 yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan gambar diatas, diketahui bahwa Jumlah investor yang menanamkan investasinya di Kabupaten Cirebon pada tahun 2016 sebanyak 533 investor dan meningkat menjadi 542 investor tahun 2018. Namun pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami penurunan hingga menjadi 237 investor di tahun 2020.

Nilai total investasi di Kabupaten Cirebon pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2016 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional sebesar Rp. 698,24 Milyar dan mengalami kenaikan hingga tahun 2018 menjadi Rp. 2.007,5 Milyar. Namun pada tahun berikutnya terus mengalami penurunan hingga menjadi Rp. 1.313,20 Milyar di tahun 2020.

Selanjutnya, disajikan juga Indikator Iklim Investasi Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2018 sebagai berikut:

**Tabel 2.66**  
**Indikator Iklim Investasi Kabupaten Cirebon**  
**Tahun 2016-2018**

| No. | Indikator Iklim Investasi   | Tahun    |          |           |
|-----|---|----------|----------|-----------|
|     |   | 2016     | 2017     | 2018      |
| 1.  | Perda Perizinan   | 9        | 9        | 9         |
| 2.  | Penerbitan Perizinan  | 9.151    | 8.789    | 5.870     |
| 3.  | Indeks Kepuasan Masyarakat (Perizinan)                                      | 81,71    | 81,24    | 81,3      |
| 4.  | Jumlah perizinan yang dikenakan retribusi                                   | 4        | 4        | 3         |
| 5.  | Retribusi perizinan (jutaan)  | 7.460,17 | 7.216,67 | 6.537,60  |
| 6.  | Nilai Investasi (Jutaan)  | 698.246  | 846.160  | 2.007.508 |
| 7.  | Realisasi Investasi per sektor (Jutaan)                                     |          |          |           |
|     | Pertanian   | 238.055  | 5.338    | 6.210     |
|     | Pertambangan  | 0        | 0        | 0         |
|     | Industri Pengolahan   | 187.752  | 251.435  | 1.612.808 |
|     | Pengadaan Listrik dan Gas   | 66.386   | 400      | 400       |
|     | Pengadaan Air   | 1.400    | 300      | -         |
|     | Bangunan/Konstruksi   | 29.193   | 8.672    | 19.590    |
|     | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor | 30.395   | 490.679  | 26.117    |
|     | Transportasi dan Pergudangan  | 49.384   | 8.155    | 38.190    |
|     | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum  | 2.700    | 2.670    | 7.550     |
|     | Informasi dan Komunikasi  | 6.346    | 14.131   | 7.658     |
|     | Jasa Keuangan   | 300      | 350      | 100       |
|     | Real Estate   | 60.225   | 34.400   | 50.201    |
|     | Jasa Perusahaan   | 0        | 8.700    | 25.600    |
|     | Jasa Pendidikan   | 9.100    | 11.539   | 12.199    |
|     | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial  | 11.270   | 6.506    | 156.525   |
|     | Jasa Lainnya  | 5.740    | 2.882    | 44.359    |

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2018

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa:

- 1) Untuk tingkat pelayanan perizinan di DPM-PTSP dapat diukur dari nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang tahun 2016 menjadi 81,71 dan tahun 2017 menjadi 81,24 yang berarti bahwa pelayanan perizinan di Kabupaten Cirebon sudah cukup baik dinilai oleh para investor;



- 2) Nilai investasi tahun 2016 didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor dengan prosentase investasinya yang mencapai 57,98% dari total investasi keseluruhan. Setelah itu, sektor industri pengolahan 29,71% dan diikuti oleh sektor real estate sebesar 4,06%;
- 3) Pada tahun 2017, pendapatan asli daerah dari retribusi perizinan sebesar Rp.7.216.670.595,-. Jumlahnya berkurang dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebesar Rp. 7.460.171.318,-. Jenis-jenis retribusi perizinan yang diperoleh dari izin mendirikan bangunan (IMB), izin undang-undang gangguan (HO), izin trayek, izin usaha perikanan;
- 4) Sektor yang nilai investasinya meningkat di tahun 2017 adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor dengan peningkatan 4.502,84%. Adapun sektor yang mengalami penurunan investasi adalah sektor pertanian, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, konstruksi, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Real Estate, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan jasa lainnya.

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Penanaman Modal dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

**Tabel 2.67****Kinerja Urusan Bidang Penanaman Modal Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020**

| NO. | IKK   | CAPAIAN KINERJA |          |
|-----|---|-----------------|----------|
|     |   | 2019            | 2020     |
| 1.  | Persentase peningkatan investasi di Kabupaten | -15,07%         | -22,972% |

Sumber: DPMPTSP Kab.Cirebon, Tahun 2020

**19. Kepemudaan dan Olahraga**

Kepemudaan dan olahraga merupakan bagian dari urusan pembangunan yang mengedepankan kreativitas generasi penerus bangsa. Namun dalam pembinaannya masih memerlukan peningkatan mutu dan kualitas.

Sementara, untuk fasilitas prasarana olahraga semakin bertambah. Pada tahun 2016, tambahan sarana prasarana yang dibangun sebanyak 6 sarana olahraga dan yang terpelihara 5 unit. Fasilitas ini digunakan untuk mendorong budaya masyarakat berolahraga. Gedung olahraga tersebut digunakan untuk pembinaan berbagai cabang olahraga terutama cabang olahraga unggulan. Beberapa cabang olahraga unggulan diantaranya adalah pencak silat, atletik, gulat, tenis meja, tenis lapang, bulutangkis, bola basket, sepak bola, bola voli, sepak takraw, karate, taekwondo, dan renang. Adapun jenis olahraga tradisional yang terdapat di Kabupaten Cirebon dan sedang dikembangkan adalah egrang, hadang, terompah panjang, dan dagongan. Prestasi olahraga POPDA ke-13, PORPEMDA ke-9 dan PORSENITAS ke-1 dan jumlah cabor yang masuk dalam program pembibitan olahraga prestasi 18 cabor.

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Kepemudaan dan Olahraga dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan

mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

**Tabel 2.68**

**Kinerja Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020**

| NO. | IKK   | CAPAIAN KINERJA |        |
|-----|---|-----------------|--------|
|     |   | 2019            | 2020   |
| 1.  | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri                                   | 0,30%           | 0,01%  |
| 2.  | Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | 2,33%           | 4,124% |
| 3.  | Peningkatan prestasi olahraga   | 8%              | 0%     |
| 4.  | Persentase jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi disatuan pendidikan             | 54%             | 31%    |

*Sumber : Disbudparpora Kabupaten Cirebon, Tahun 2020*

## **20. Kebudayaan**

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Bidang Kebudayaan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Kabupaten Cirebon memiliki kekayaan budaya yang harus terus digali dan dilestarikan. Untuk itu, pengarusutamaan kebudayaan dalam berbagai aspek pembangunan dinilai penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Salah satu indikator yang menggambarkan pemajuan kebudayaan adalah persentase seni dan budaya yang dilestarikan.

Selanjutnya berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa indikator pada bidang kebudayaan di Kabupaten Cirebon yaitu Terlestarikannya Cagar Budaya dan Penyelenggaraan Festival seni dan Budaya, dimana tingkat capaiannya disajikan pada tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Kebudayaan dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

**Tabel 2.69****Kinerja Urusan Bidang Kebudayaan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020**

| NO. | IKK                                      | CAPAIAN KINERJA |      |
|-----|--|-----------------|------|
|     |  | 2019            | 2020 |
| 1.  | Terlestarikannya Cagar Budaya            | 12,83%          | 100% |
| 2.  | Penyelenggaraan Festival seni dan Budaya | 10              | 11   |

Sumber : Disbudparpora Kabupaten Cirebon, tahun 2020

**21. Statistik dan Persandian**

Di Kabupaten Cirebon terdapat instansi vertikal yang khusus menangani penyediaan data dan informasi pembangunan, yakni Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon. Setiap tahun, Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon mempublikasikan buku Kabupaten Cirebon Dalam Angka dan PDRB Kabupaten Cirebon sebagai bagian tak terpisahkan dalam upaya perwujudan pembangunan daerah.

**Tabel 2.70****Jumlah Publikasi yang Diterbitkan BPS Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2018**

| Publikasi                                  | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|------|------|------|
| Buku Kabupaten Cirebon dalam Angka         | 1    | 1    | 1    |
| Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) | 1    | 1    | 1    |

Sumber: Statistik Kabupaten Cirebon Tahun 2019, BPS

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Statistik dan Persandian dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

**Tabel 2.71****Kinerja Urusan Bidang Statistik dan Persandian Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020**

| NO. | IKK  | CAPAIAN KINERJA |      |
|-----|--|-----------------|------|
|     |  | 2019            | 2020 |
| 1.  | Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan Data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | 100%            | 100% |
| 2.  | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah                           | 9,09%           | 100% |
| 3.  | Tingkat keamanan informasi pemerintah  | 100%            | 5%   |

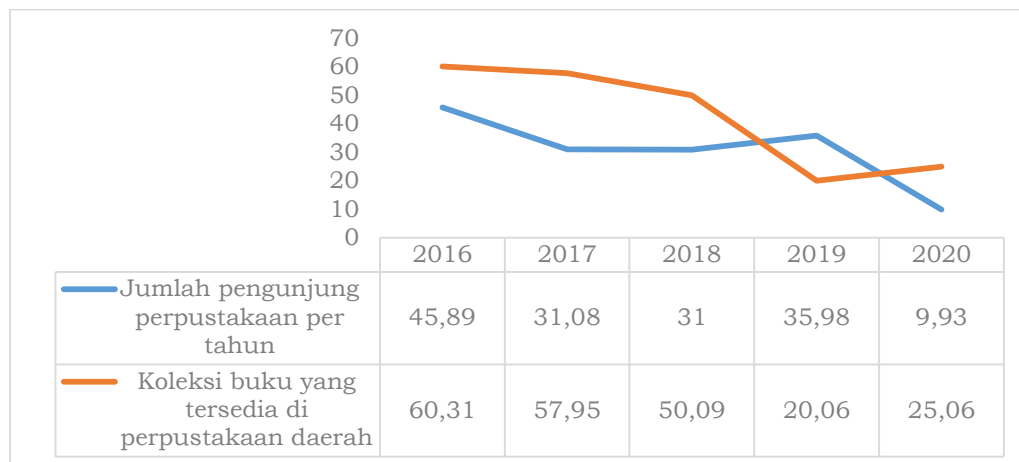
*Sumber: Statistik Kabupaten Cirebon Tahun 2019, BPS.*

**22. Perpustakaan**

Sebagai bagian dari peningkatan kualitas data dan informasi pembangunan, Pemerintah Kabupaten Cirebon memiliki perangkat daerah khusus yang menangani urusan perpustakaan, yakni Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Perpustakaan daerah merupakan salah satu program kegiatan dari perangkat daerah yang berfungsi sebagai penyebarluasan data dan informasi sekaligus sosialisasi untuk lebih mengetahui berbagai capaian pembangunan di Kabupaten Cirebon. Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan. Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kabupaten Cirebon memiliki perpustakaan daerah dengan ketersediaan buku dan jumlah pengunjung seperti dalam gambar berikut:

**Gambar 2.32**

**Jumlah Pengunjung Perpustakaan dan Koleksi Buku yang Tersedia di Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020**



Sumber: Disarsipus Kab.Cirebon, Tahun 2021 yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan gambar diatas, diketahui bahwa Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun periode tahun 2016-2020 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2016 jumlahnya mencapai 45,89% dan tahun 2020 turun menjadi 9,93%. Untuk koleksi buku juga demikian, dimana pada tahun 2016 jumlahnya mencapai 60,31% dan tahun 2019 turun menjadi 20,06%. Akan tetapi pada tahun 2020 terjadi kenaikan kembali menjadi 25,06%.

Lebih lengkap nya berikut disajikan Capaian Kinerja Bidang Perpustakaan Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2018.

**Tabel 2.72**

**Capaian Kinerja Bidang Perpustakaan Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020**

| No.         | Indikator Daerah   | Satuan            | Realisasi Kinerja |       |       |       |       |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
|             |  |                   | 2016              | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| 1           | 2  | 3                 | 4                 | 5     | 6     | 7     | 8     |
| <b>1.23</b> | <b>Perpustakaan</b>  |                   |                   |       |       |       |       |
| 1.          | Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun                                       | %                 | 45,89             | 31,08 | 31,00 | 35,98 | 9,93  |
| 2.          | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (dari target pengadaan buku) | %                 | 60,31             | 57,95 | 50,09 | 20,06 | 25,06 |
| 3.          | Rasio perpustakaan per satuan  | Per 1000 penduduk | 0,036             | 0,039 | 0,041 | 0,898 | 0,90  |

| No. | Indikator Daerah   | Satuan     | Realisasi Kinerja |        |        |        |        |
|-----|--|------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
|     |  |            | 2016              | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| 1   | 2  | 3          | 4                 | 5      | 6      | 7      | 8      |
|     | penduduk   |            |                   |        |        |        |        |
| 4.  | Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan tahun                         | pengunjung | 27.566            | 27.572 | 24.092 | 37,239 | 7,492  |
| 5.  | Jumlah koleksi judul buku perpustakaan                                 | buku       | 27.631            | 28.299 | 28.603 | 31,115 | 31,380 |
| 6.  | Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat | orang      | 3                 | 3      | 3      | 11     | 10     |

Sumber: Disarsipus Kab.Cirebon, Tahun 2020

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Perpustakaan dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

**Tabel 2.73**

**Kinerja Urusan Bidang Perpustakaan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020**

| NO. | IKK   | CAPAIAN KINERJA |               |
|-----|---|-----------------|---------------|
|     |   | 2019            | 2020          |
| 1.  | Nilai Budaya Baca   | 57 (Cukup)      | 50-75 (Cukup) |
| 2.  | Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang di kelola dan dilestarikan | 100%            | 100%          |
| 3.  | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah   | 54,00%          | 1,393         |

Sumber: Disarsipus Kabupaten Cirebon Tahun 2020

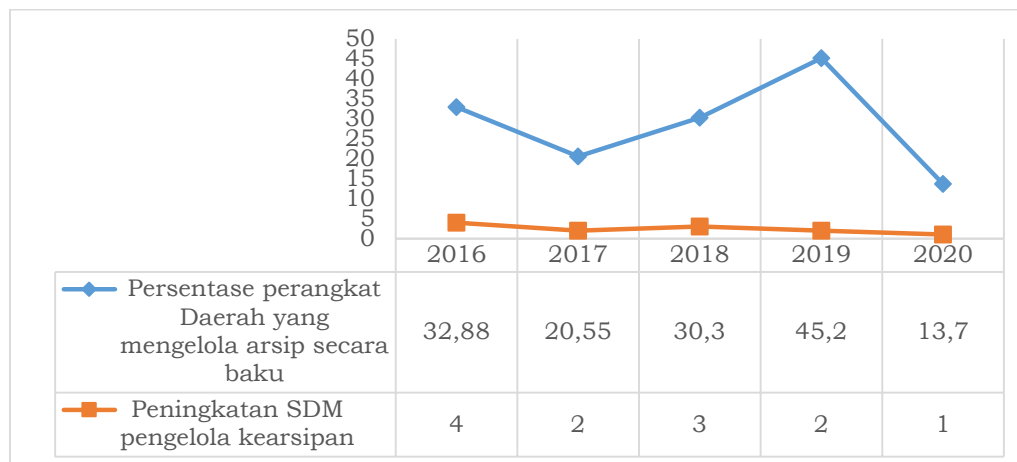
## 23. Kearsipan

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, urusan kearsipan memiliki posisi penting guna menyusun setiap database pembangunan, baik berupa dokumen, bukti fisik, hingga dalam bentuk softcopy untuk menjadi bahan rujukan berbagai implementasi pembangunan.



**Gambar 2.33**

**Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku di Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020**



Sumber: Disarsipus Kab.Cirebon, Tahun 2021 yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan gambar diatas, diketahui bahwa persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku mengalami fluktuasi, yang semula sebanyak 32,88% di tahun 2016 menjadi 13,70% pada tahun 2020. Begitu pula dengan Jumlah peningkatan SDM pengelolaan kearsipan, dimana pada tahun 2016 sebanyak 4 kegiatan dan pada tahun 2020 hanya sebanyak 1 kegiatan.

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Kearsipan dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

**Tabel 2.74**

**Kinerja Urusan Bidang Kearsipan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020**

| NO. | IKK   | CAPAIAN KINERJA |         |
|-----|---|-----------------|---------|
|     |   | 2019            | 2020    |
| 1.  | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan | 38,34%          | 41,125% |

| NO. | IKK   | CAPAIAN KINERJA |      |
|-----|---|-----------------|------|
|     |   | 2019            | 2020 |
|     | 59 UU 43/2009)  |                 |      |
| 2.  | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | 36,31%          | 50%  |

Sumber: LPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2020

### 2.3.2. Layanan Urusan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Berikut analisis singkat data dan informasi pada setiap urusan pemerintahan pilihan Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.

#### 1. Kelautan dan Perikanan

Perikanan merupakan salah satu komoditas unggulan dari Kabupaten Cirebon. Bahkan beberapa kecamatan yang memiliki daerah perairan menjadikan sektor perikanan sebagai sumber mata pencaharian utama.

Adapun jumlah penduduk dengan mata pencaharian sebagai nelayan adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.75**  
**Jumlah Nelayan Perikanan Tangkap**  
**Menurut Kecamatan dan Jenis Nelayan**

| No. | Kecamatan     | Nelayan Penuh | Nelayan Sambilan Utama | Jumlah |
|-----|---------------|---------------|------------------------|--------|
| 1.  | Waled         | 0             | 0                      | 0      |
| 2.  | Pasaleman     | 0             | 0                      | 0      |
| 3.  | Ciledug       | 0             | 0                      | 0      |
| 4.  | Pabuaran      | 0             | 0                      | 0      |
| 5.  | Losari        | 1.200         | 0                      | 1.200  |
| 6.  | Pabedilan     | 0             | 0                      | 0      |
| 7.  | Babakan       | 0             | 0                      | 0      |
| 8.  | Gebang        | 6.025         | 800                    | 6.825  |
| 9.  | Karangsembung | 0             | 0                      | 0      |
| 10. | Karangwareng  | 0             | 0                      | 0      |
| 11. | Lemahabang    | 0             | 0                      | 0      |
| 12. | Susukan Lebak | 0             | 0                      | 0      |



| No.                 | Kecamatan    | Nelayan Penuh | Nelayan Sambilan Utama | Jumlah        |
|---------------------|--------------|---------------|------------------------|---------------|
| 13.                 | Sedong       | 0             | 0                      | 0             |
| 14.                 | Astanajapura | 0             | 54                     | 54            |
| 15.                 | Pangenan     | 1.253         | 0                      | 1.253         |
| 16.                 | Mundu        | 851           | 1.670                  | 2.521         |
| 17.                 | Beber        | 0             | 0                      | 0             |
| 18.                 | Greged       | 0             | 0                      | 0             |
| 19.                 | Talun        | 0             | 0                      | 0             |
| 20.                 | Sumber       | 0             | 0                      | 0             |
| 21.                 | Dukupuntang  | 0             | 0                      | 0             |
| 22.                 | Palimanan    | 0             | 0                      | 0             |
| 23.                 | Plumbon      | 0             | 0                      | 0             |
| 24.                 | Depok        | 0             | 0                      | 0             |
| 25.                 | Weru         | 0             | 0                      | 0             |
| 26.                 | Plered       | 0             | 0                      | 0             |
| 27.                 | Tengahtani   | 0             | 0                      | 0             |
| 28.                 | Kedawung     | 0             | 0                      | 0             |
| 29.                 | Gunungjati   | 3.700         | 0                      | 3.700         |
| 30.                 | Kapetakan    | 1.178         | 0                      | 1.178         |
| 31.                 | Suranenggala | 1.113         | 121                    | 1.234         |
| 32.                 | Klangenan    | 0             | 0                      | 0             |
| 33.                 | Jamblang     | 0             | 0                      | 0             |
| 34.                 | Arjawinangun | 0             | 0                      | 0             |
| 35.                 | Panguragan   | 0             | 0                      | 0             |
| 36.                 | Ciwaringin   | 0             | 0                      | 0             |
| 37.                 | Gempol       | 0             | 0                      | 0             |
| 38.                 | Susukan      | 0             | 0                      | 0             |
| 39.                 | Gegesik      | 0             | 0                      | 0             |
| 40.                 | Kaliwedi     | 0             | 0                      | 0             |
| <b>Kab. Cirebon</b> |              | <b>15.320</b> | <b>2.645</b>           | <b>17.965</b> |

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon Tahun 2020

Selanjutnya, berikut disajikan Realisasi Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020.

**Tabel 2.76**

**Realisasi Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2021**

| No. | Indikator Daerah                           | Satuan    | Realisasi Kinerja |           |           |           |           |
|-----|--|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     |  |           | 2016              | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      |
| 1.  | Tercapainya hasil perikanan tangkap (Ton)  | Ton       | 29.214,10         | 31.212,67 | 33.645,65 | 36.056,91 | 34.134,34 |
| 2.  | Tercapainya hasil perikanan budidaya (Ton) | Ton       | 42.622,99         | 45.050,32 | 45.607,19 | 48.410,22 | 41.157,93 |
| 3.  | Terpenuhiya kebutuhan benih ikan           | Juta Ekor | 113,12            | 121,91    | 101,42    | 112,61    | 290,29    |

| No. | Indikator Daerah  | Satuan    | Realisasi Kinerja |        |           |           |           |
|-----|---|-----------|-------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
|     |   |           | 2016              | 2017   | 2018      | 2019      | 2020      |
|     | air tawar berkualitas (Juta Ekor)                                     |           |                   |        |           |           |           |
| 4.  | Hasil garam rakyat (Ton)  | Ton       | 1.160             | 63.363 | 404.512   | 136.179   | 2.671     |
| 5.  | Hasil Olahan dan pemasaran perikanan (Ton)                            | Ton       | 6.862,00          | 5.353  | 10.447,00 | 10.790,84 | 12.564,59 |
| 6.  | Peningkatan konsumsi ikan masyarakat per kapita per tahun (Kg/kapita) | Kg/Kapita | 26,55             | 27     | 25,75     | 26,89     | 27,88     |

Sumber: Dislakan Kab.Cirebon, Tahun 2020.

Berdasarkan tabel diatas, diketahui beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Hasil produksi perikanan tangkap (ton) besarnya fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 produksinya mencapai 29.214,10 ton dan pada tahun 2020 produksinya mencapai 34.134,34 ton;
- 2) Hasil budidaya perikanan juga produksinya fluktuatif pada tahun 2016 mencapai 42.622,99 ton dan pada tahun 2020 produksinya mencapai 41.157,93 ton

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Kelautan dan Perikanan dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

**Tabel 2.77**

**Kinerja Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020**

| NO. | IKK  | CAPAIAN KINERJA |               |
|-----|--|-----------------|---------------|
|     |  | 2019            | 2020          |
| 1.  | Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) Kabupaten | 84.467,13 ton   | 75.292,27 ton |
| 2.  | Persentase tempat pelelangan ikan yang operasional               | 35%             | 35%           |

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon 2020

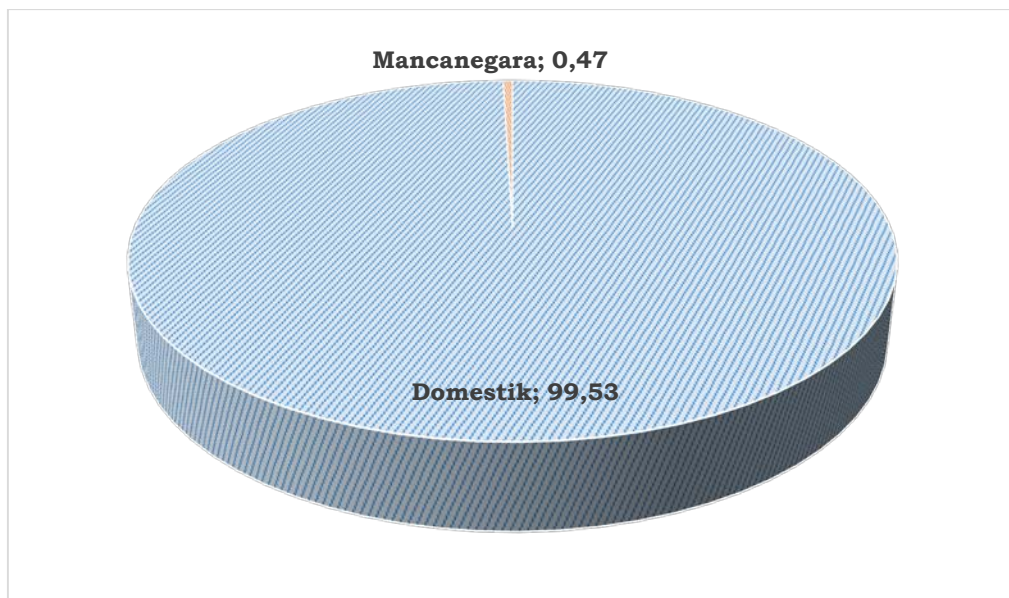
## 2. Pariwisata

Potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Cirebon terbentuk dari kondisi geografis (seperti obyek laut/bahari), sejarah (meliputi obyek wisata peninggalan-peninggalan sejarah) dan budaya yang dimiliki (meliputi keunikan masyarakat Kabupaten Cirebon dengan segala kebudayaannya).

Berkaitan dengan pengembangan pariwisata di Kabupaten Cirebon, Jumlah persentase wisatawan Domestik jauh lebih besar dari wisatawan Mancanegara seperti dalam gambar berikut.

**Gambar 2.34**

**Persentase Wisatawan Mancanegara dan Domestik  
di Kabupaten Cirebon Tahun 2020**



Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2021 yang dikelola dalam SIPD

Jumlah Wisatawan Asing yang berkunjung ke Kabupaten Cirebon pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi dan menurun tajam di tahun 2020, dimana pada tahun 2016 jumlahnya mencapai 3.759 wisatawan dan mengalami kenaikan di tahun 2018 menjadi 63.414 wisatawan, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 2.357 wisatawan.

Sama halnya dengan Jumlah Wisatawan Asing, kondisi Jumlah Wisatawan Domestik juga mengalami hal serupa, dimana pada tahun 2020 jumlahnya turun menjadi 511.497 wisatawan atau turun dibanding kondisi

pada tahun 2019 yang mencapai 1.481.048 wisatawan.

Penurunan Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 disebabkan oleh pandemi covid 19 yang sedang melanda dunia dan indonesia pada awal tahun 2020 yang mengakibatkan terbitnya beberapa kebijakan seperti PSBB dan penutupan beberapa obyek wisata di Kabupaten Cirebon.

**Tabel 2.78**

**Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing dan Domestik  
di Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020**

| Jenis Wisatawan           | Tahun   |         |           |           |         |
|---------------------------|---------|---------|-----------|-----------|---------|
|                           | 2016    | 2017    | 2018      | 2019      | 2020    |
| Jumlah Wisatawan Asing    | 3.759   | 11.910  | 63.414    | 5.193     | 2.357   |
| Jumlah Wisatawan Domestik | 635.377 | 701.681 | 1.379.655 | 1.481.048 | 511.497 |
| <b>Jumlah</b>             | 639.136 | 713.591 | 1.443.069 | 1.486.241 | 513.854 |

Sumber: Kab. Cirebon dalam Angka, 2021

Fluktuasinya Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing dan Domestik tidak berimbas kepada Jumlah Restoran/Rumah Makan Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon, dimana pada tahun 2016-2019 jumlahnya masih sama yaitu 39 buah.

**Tabel 2.79**

**Jumlah Restoran/Rumah Makan Menurut Kecamatan  
di Kabupaten Cirebon, 2016-2019**

| No. | Kecamatan     | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----|---------------|------|------|------|------|
| 1.  | Waled         | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 2.  | Pasaleman     | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 3.  | Ciledug       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 4.  | Pabuaran      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 5.  | Losari        | 7    | 7    | 7    | 7    |
| 6.  | Pabedilan     | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 7.  | Babakan       | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 8.  | Gebang        | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 9.  | Karangsembung | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 10. | Karangwareng  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 11. | Lemahabang    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 12. | Susukan Lebak | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 13. | Sedong        | 0    | 0    | 0    | 0    |

| No.                 | Kecamatan    | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      |
|---------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 14.                 | Astanajapura | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 15.                 | Pangenan     | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16.                 | Mundu        | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 17.                 | Beber        | 9         | 9         | 9         | 9         |
| 18.                 | Greged       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 19.                 | Talun        | 1         | 1         | 1         | 1         |
| 20.                 | Sumber       | 5         | 5         | 5         | 5         |
| 21.                 | Dukupuntang  | 9         | 9         | 9         | 9         |
| 22.                 | Palimanan    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 23.                 | Plumbon      | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 24.                 | Depok        | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 25.                 | Weru         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 26.                 | Plered       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 27.                 | Tengahtani   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 28.                 | Kedawung     | 5         | 5         | 5         | 5         |
| 29.                 | Gunungjati   | 1         | 1         | 1         | 1         |
| 30.                 | Kapetakan    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 31.                 | Suranenggala | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 32.                 | Klangenan    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 33.                 | Jamblang     | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 34.                 | Arjawinangun | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 35.                 | Panguragan   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 36.                 | Ciwaringin   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 37.                 | Gempol       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 38.                 | Susukan      | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 39.                 | Gegesik      | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 40.                 | Kaliwedi     | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Kab. Cirebon</b> |              | <b>39</b> | <b>39</b> | <b>39</b> | <b>39</b> |

Sumber: Kab. Cirebon dalam Angka, BPS, 2020 yang dikelola dalam SIPD

Kabupaten Cirebon terdapat 16 usaha akomodasi yaitu 3 hotel berbintang dan 13 hotel non bintang dengan 433 kamar dan 646 tempat tidur. Dari seluruh usaha akomodasi tersebut, 170 kamar atau 39,26 persen tersedia di hotel berbintang, sedangkan sekitar 263 kamar terdapat pada hotel non bintang/melati.

Adapun tempat-tempat objek wisata unggulan yang ada di Kabupaten Cirebon berupa wisata religi dan cagar budaya, wisata alam, wisata kuliner, wisata belanja batik, dan wisata kearifan lokal.

#### a. Wisata Ziarah



Kabupaten Cirebon ditetapkan sebagai destinasi wisata pilgrimage (ziarah) dan cagar budaya sesuai dengan kesepakatan bersama antara gubernur dengan Bupati/Walikota Nomor 912/05/BAPP tentang Prioritas Pembangunan Ekonomi WKPP di Jawa Barat. Lokasi wisata ziarah yang berada di Kabupaten Cirebon adalah:

1) Wisata Ziarah Makam Sunan Gunung Jati.

Obyek wisata ini berada di Desa Astana Kecamatan Gunung Jati. Makam Sunan Gunung Jati tidak hanya menjadi obyek wisata, tetapi obyek ini juga sudah ditetapkan menjadi cagar budaya yang harus dilindungi. Obyek wisata ini tidak hanya menjadi aset Kabupaten Cirebon tetapi juga aset Propinsi Jawa Barat. Pengunjung obyek wisata ini berasal dari lokal, regional Jawa dan seluruh Indonesia.

2) Wisata Ziarah Kramat Talun.

Obyek wisata ini merupakan tempat peristirahatan sesepuh Cirebon, Mbah Kuwu Cirebon Girang. Obyek wisata ini berada di Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun. Obyek wisata ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya yang dilindungi. Pengunjung obyek wisata ini berasal dari lokal, dan regional Jawa.

3) Wisata Ziarah Makam Syech Magelung Sakti.

Obyek wisata ziarah ini berada di Desa Karangkendal Kecamatan Kapetakan. Pengunjung obyek wisata ini berasal dari lokal dan regional Jawa Barat.

4) Wisata ziarah makam Nyi Mas Gandasari.

Obyek wisata ziarah ini berada di Desa Panguragan Kecamatan Panguragan. Pengunjung obyek wisata ini berasal dari lokal dan regional Jawa Barat.

b. Wisata Alam

Kabupaten Cirebon memiliki sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi obyek pariwisata alam. Lokasi wisata alam adalah:

1) Wisata alam Gronggong dan Ciperna.

Gronggong memiliki ketinggian sekitar 50 meter dpl dengan suasana alam yang menarik. Pada ketinggian ini, pengunjung dapat menikmati pemandangan suasana kota Cirebon dan pesisir Cirebon. Obyek wisata ini berada di jalur Cirebon-Kuningan. Secara administratif berada di Desa Patapan Kecamatan Beber. Fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung obyek wisata ini adalah hotel, losmen, restoran, rumah makan, pusat kesegaran jasmani, padang golf, dan areal lesehan alam terbuka.

2) Wisata alam Setu Patok.

Obyek wisata ini berada di Desa Setu Patok Kecamatan Mundu. Wisata alam ini berpotensi untuk dikembangkan sebagai areal pemancingan, pemandian, dan outbond.

3) Wisata alam Plangon.

Obyek wisata ini berada di Kelurahan Babakan Kecamatan Sumber. Obyek wisata ini memiliki sumber daya alam satwa monyet dan petilasan Pangeran Kejaksan dan Pangeran Panjunan. Lokasi ini telah ditetapkan sebagai cagar alam yang dilindungi.

4) Wisata Alam Belawa.

Obyek wisata ini berada di Desa Belawa Kecamatan Sedong. Obyek wisata ini memiliki sumber daya alam satwa unik berupa labi-labi. Lokasi ini telah ditetapkan sebagai cagar alam yang dilindungi.

5) Wisata Banyu Panas.

Obyek wisata ini berada di Desa Palimanan Barat, Kecamatan Gempol berupa wisata pemandian air panas yang kaya akan kandungan belerang. Obyek wisata Banyu Panas ini merupakan daya tarik yang berkembang seiring pengembangan sarana prasarana wisata di lokasi dan promosi wisata yang memadai.

c. Wisata Kuliner



Kabupaten Cirebon memiliki wisata kuliner berbagai macam makanan khas. Jenis wisata kuliner di Kabupaten Cirebon adalah:

1) Wisata kuliner ikan bakar.

Obyek wisata ini berada di kaki Gunung Ciremai, tepatnya di Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang.

2) Wisata kuliner nasi Jamblang/Sega Jamblang.

Obyek wisata ini berada tersebar di Kecamatan Jamblang, Plered, Kedawung, dan Sumber.

3) Wisata kuliner Empal Gentong.

Obyek wisata ini berada tersebar di 40 kecamatan.

d. Wisata Belanja Batik

Kabupaten Cirebon mempunyai wisata belanja batik. Lokasinya berada di Desa Trusmi Wetan, Trusmi Kulon, Panembahan, dan Kalitengah Kecamatan Plered.

e. Wisata Kearifan Lokal

Kabupaten Cirebon memiliki wisata kearifan lokal berupa perayaan tradisional atau pesta rakyat. Wisata jenis ini dilaksanakan berkaitan dengan tradisi dan adat istiadat masyarakat. Obyek wisata kearifan lokal yang ada di Kabupaten Cirebon adalah:

1) Wisata Kearifan Lokal Nadran.

Obyek wisata ini dilaksanakan di wilayah pesisir Cirebon.

2) Wisata Kearifan Lokal Mauludan.

Obyek wisata ini berkaitan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Obyek wisata ini berada di Kecamatan Gegesik, Kecamatan Gunungjati, dan Kecamatan Plered.

3) Wisata Kearifan Lokal Mapag Sri.

Obyek wisata ini berkaitan dengan tradisi masyarakat untuk menyambut datangnya panen raya.

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Pariwisata dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

**Tabel 2.80**

**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Pariwisata Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020**

| NO. | IKK  | CAPAIAN KINERJA |          |
|-----|--|-----------------|----------|
|     |  | 2019            | 2020     |
| 1.  | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan | -28,98%         | -54,612% |
| 2.  | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang  | 7,19%           | -65,937% |
| 3.  | Tingkat Hunian akomodasi   | 30,59%          | 19,652%  |
| 4.  | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun 2019              | 3,16%           | 3,16%    |
| 5.  | Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD                          | 4,29%           | 3,02%    |

*Sumber: Disbudparpora Kabupaten Cirebon Tahun 2020*

### **3. Pertanian, Peternakan dan Kehutanan**

Sektor pertanian berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Paling tidak ada lima yang berperan penting yaitu: berperan secara langsung dalam menyediakan kebutuhan pangan masyarakat, berperan dalam pembentukan pendapatan Produk Domestik Bruto (PDB), menyerap tenaga kerja dipedesaan, berperan dalam penghasilan devisa dan atau penghematan devisa, dan berperan dalam pengendalian inflasi. Dengan demikian sektor pertanian secara tidak langsung berperan dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan sektor ekonomi lainnya, tidak kalah penting sebagai pendukung penyediaan kebutuhan masyarakat yaitu sub sektor peternakan dan kehutanan yang juga andil terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cirebon tahun 2020 memiliki total luas lahan pertanian basah dan pertanian kering mencapai 68.677 Ha, Kabupaten Cirebon memiliki tugas untuk mendukung program swasembada beras yang dicanangkan oleh gubernur. Pada tahun 2020 total produksi Padi di Kabupaten Cirebon mencapai 709.105 Ton. Adapun hasil produksi tanaman pangan lain termasuk Padi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.81**  
**Produksi Tanaman Pangan Menurut Kecamatan**  
**di Kabupaten Cirebon, 2020**

| Kecamatan     | Produksi (Ton) |              |                |         |              |              |           |          |
|---------------|----------------|--------------|----------------|---------|--------------|--------------|-----------|----------|
|               | Padi           | Jagung Manis | Jagung Pipilan | Kedelai | Kacang Hijau | Kacang Tanah | Ubi Jalar | Ubi Kayu |
| Waled         | 15.908         | 1.528        | 0              | 1       | 4            | 0            | 0         | 115      |
| Pasaleman     | 1.137          | 640          | 76             | 28      | 11           | 12           | 0         | 86       |
| Ciledug       | 7.068          | 5.250        | 0              | 0       | 0            | 0            | 0         | 0        |
| Pabuaran      | 5.896          | 3.143        | 0              | 0       | 0            | 0            | 0         | 0        |
| Losari        | 11.942         | 870          | 0              | 0       | 0            | 3            | 0         | 0        |
| Pabedilan     | 13.170         | 11.884       | 0              | 0       | 0            | 0            | 0         | 0        |
| Babakan       | 13.225         | 19.620       | 63             | 0       | 0            | 0            | 0         | 0        |
| Gebang        | 12.756         | 21.543       | 0              | 0       | 0            | 0            | 0         | 0        |
| Karangsembung | 10.489         | 447          | 0              | 0       | 0            | 0            | 0         | 0        |
| Karangwareng  | 13.184         | 695          | 0              | 0       | 0            | 0            | 0         | 0        |
| Lemahabang    | 7.073          | 365          | 153            | 0       | 0            | 13           | 45        | 0        |
| Susukan Lebak | 16.516         | 157          | 63             | 0       | 3            | 4            | 224       | 0        |
| Sedong        | 21.389         | 0            | 25             | 0       | 0            | 8            | 258       | 128      |
| Astanajapura  | 10.503         | 0            | 0              | 0       | 0            | 24           | 0         | 0        |
| Pangenan      | 9.300          | 2.153        | 0              | 0       | 0            | 0            | 0         | 0        |
| Mundu         | 13.691         | 0            | 0              | 0       | 0            | 0            | 0         | 0        |
| Beber         | 13.055         | 0            | 20             | 0       | 0            | 7            | 6.323     | 273      |
| Greged        | 12.695         | 0            | 0              | 0       | 0            | 30           | 183       | 0        |
| Talun         | 9.734          | 0            | 38             | 0       | 5            | 6            | 245       | 170      |
| Sumber        | 12.974         | 10           | 0              | 0       | 0            | 0            | 25        | 42       |
| Dikupuntang   | 26.436         | 0            | 768            | 0       | 0            | 0            | 0         | 0        |
| Palimanan     | 19.078         | 0            | 0              | 0       | 275          | 0            | 0         | 0        |
| Plumbon       | 12.141         | 0            | 13             | 0       | 5            | 0            | 24        | 0        |
| Depok         | 11.387         | 0            | 6              | 0       | 0            | 0            | 0         | 0        |
| Weru          | 3.428          | 0            | 83             | 0       | 10           | 0            | 0         | 0        |
| Plered        | 10.063         | 0            | 17             | 0       | 0            | 0            | 0         | 0        |
| Tengahtani    | 6.984          | 0            | 45             | 0       | 0            | 0            | 0         | 0        |
| Kedawung      | 1.737          | 0            | 0              | 0       | 0            | 0            | 0         | 0        |
| Gunungjati    | 11.584         | 0            | 0              | 0       | 0            | 0            | 0         | 0        |
| Kapetakan     | 48.128         | 0            | 0              | 0       | 0            | 0            | 0         | 0        |

| Kecamatan      | Produksi (Ton) |               |                |           |              |              |              |              |
|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                | Padi           | Jagung Manis  | Jagung Pipilan | Kedelai   | Kacang Hijau | Kacang Tanah | Ubi Jalar    | Ubi Kayu     |
| Suranenggala   | 21.800         | 0             | 0              | 0         | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Klangenan      | 23.940         | 0             | 0              | 0         | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Jamblang       | 18.920         | 0             | 0              | 0         | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Arjawinangun   | 22.393         | 0             | 0              | 0         | 18           | 0            | 0            | 0            |
| Panguragan     | 26.925         | 0             | 0              | 0         | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Ciwaringin     | 18.387         | 0             | 0              | 0         | 637          | 0            | 0            | 0            |
| Gempol         | 15.376         | 0             | 6              | 54        | 514          | 0            | 0            | 0            |
| Susukan        | 59.257         | 0             | 19             | 0         | 604          | 0            | 0            | 0            |
| Gegesik        | 83.776         | 0             | 13             | 0         | 0            | 0            | 6.323        | 115          |
| Kaliwedi       | 35.660         | 0             | 0              | 0         | 0            | 0            | 183          | 86           |
| <b>Cirebon</b> | <b>709.105</b> | <b>68.305</b> | <b>1.408</b>   | <b>83</b> | <b>2.086</b> | <b>107</b>   | <b>7.412</b> | <b>1.026</b> |

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, 2020 yang dikelola dalam SIPD

Selain padi, tanah di Kabupaten Cirebon dapat juga ditanami berbagai macam tanaman sayuran dan buah-buahan antara lain: bawang merah, cabai rawit, petai, tomat, bawang daun, melon, semangka, alpukat, salak, rambutan dan berbagai macam sayur dan buah-buahan lain. Diantara berbagai tanaman sayuran tersebut, Bawang merah merupakan tanaman sayuran yang memiliki hasil panen terbesar di Kabupaten Cirebon di mana pada tahun 2020 produksi mencapai 34.636 Ton. Adapun Hasil produksi buah dan sayur di Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut::

**Tabel 2.82**

**Hasil Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman Kabupaten Cirebon Tahun 2020 (Ton/Tahun)**

| Kecamatan     | Bawang Merah | Cabai Besar | Terung | Ketimun | Kacang Panjang | Kangkung | Jamur (Kw) |
|---------------|--------------|-------------|--------|---------|----------------|----------|------------|
| (1)           | (2)          | (3)         | (4)    | (5)     | (6)            | (7)      | (8)        |
| Waled         | 4.270        | 2.900       | 562    | 9       | 27             | 39       | 0          |
| Pasaleman     | 0            | 276         | 0      | 0       | 9              | 0        | 0          |
| Ciledug       | 1.169        | 121         | 16     | 42      | 42             | 0        | 0          |
| Pabuaran      | 947          | 0           | 0      | 0       | 0              | 0        | 0          |
| Losari        | 5.786        | 1.624       | 203    | 0       | 0              | 50       | 0          |
| Pabedilan     | 12.190       | 110         | 99     | 52      | 0              | 0        | 0          |
| Babakan       | 3.838        | 0           | 40     | 0       | 0              | 0        | 0          |
| Gebang        | 4.436        | 0           | 26     | 0       | 0              | 0        | 0          |
| Karangsembung | 0            | 0           | 0      | 51      | 42             | 10       | 0          |
| Karangwareng  | 11           | 0           | 24     | 20      | 51             | 0        | 0          |
| Lemahabang    | 493          | 45          | 0      | 0       | 26             | 7        | 0          |
| Susukan Lebak | 18           | 8           | 0      | 0       | 0              | 0        | 0          |
| Sedong        | 0            | 0           | 0      | 0       | 0              | 0        | 0          |



| Kecamatan      | Bawang Merah  | Cabai Besar  | Terung       | Ketimun    | Kacang Panjang | Kangkung   | Jamur (Kw) |
|----------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------------|------------|------------|
| (1)            | (2)           | (3)          | (4)          | (5)        | (6)            | (7)        | (8)        |
| Astanajapura   | 0             | 0            | 0            | 0          | 0              | 0          | 0          |
| Pangenan       | 1.420         | 98           | 0            | 0          | 0              | 0          | 0          |
| Mundu          | 40            | 0            | 0            | 0          | 0              | 0          | 0          |
| Beber          | 0             | 0            | 0            | 0          | 0              | 0          | 0          |
| Greged         | 0             | 8            | 0            | 0          | 0              | 0          | 0          |
| Talun          | 0             | 0            | 0            | 0          | 0              | 0          | 0          |
| Sumber         | 0             | 0            | 0            | 12         | 0              | 0          | 0          |
| Dikupuntang    | 0             | 0            | 0            | 12         | 0              | 0          | 0          |
| Palimanan      | 0             | 14           | 0            | 0          | 0              | 0          | 0          |
| Plumbon        | 18            | 0            | 0            | 0          | 0              | 0          | 0          |
| Depok          | 0             | 0            | 0            | 24         | 0              | 0          | 0          |
| Weru           | 0             | 0            | 0            | 0          | 0              | 0          | 0          |
| Plered         | 0             | 0            | 0            | 50         | 0              | 0          | 0          |
| Tengahtani     | 0             | 0            | 0            | 23         | 0              | 0          | 0          |
| Kedawung       | 0             | 0            | 0            | 0          | 0              | 0          | 0          |
| Gunungjati     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0              | 0          | 0          |
| Kapetakan      | 0             | 0            | 0            | 0          | 0              | 0          | 0          |
| Suranenggala   | 0             | 0            | 0            | 0          | 0              | 0          | 0          |
| Klangenan      | 0             | 33           | 12           | 0          | 30             | 0          | 0          |
| Jamblang       | 0             | 0            | 0            | 0          | 0              | 0          | 0          |
| Arjawinangun   | 0             | 143          | 0            | 0          | 0              | 0          | 0          |
| Panguragan     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0              | 0          | 0          |
| Ciwaringin     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0              | 0          | 0          |
| Gempol         | 0             | 150          | 0            | 0          | 0              | 0          | 0          |
| Susukan        | 0             | 530          | 0            | 0          | 0              | 0          | 0          |
| Gegesik        | 0             | 99           | 57           | 56         | 0              | 0          | 0          |
| Kaliwedi       | 0             | 0            | 32           | 43         | 4              | 0          | 0          |
| <b>Cirebon</b> | <b>34.636</b> | <b>6.159</b> | <b>1.071</b> | <b>394</b> | <b>271</b>     | <b>106</b> | <b>0</b>   |

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, 2020 yang dikelola dalam SIPD

**Tabel 2.83**

**Produksi Buah-Buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Buah di Kabupaten Cirebon (Kw), 2020**

| No. | Kecamatan | Total Produksi (Kw) |
|-----|-----------|---------------------|
| 1.  | Jengkol   | 0                   |
| 2.  | Petai     | 7.235               |
| 3.  | Melinjo   | 11.599              |
| 4.  | Sukun     | 2.763               |
| 5.  | Sirsak    | 1.128               |
| 6.  | Sawo      | 2.975               |
| 7.  | Salak     | 543                 |
| 8.  | Rambutan  | 3.255               |
| 9.  | Pisang    | 130.529             |
| 10. | Pepaya    | 79.129              |



| No. | Kecamatan   | Total Produksi (Kw) |
|-----|-------------|---------------------|
| 11. | Nangka      | 15.137              |
| 12. | Mangga      | 536.248             |
| 13. | Jeruk Besar | 0                   |
| 14. | Jeruk Siam  | 324                 |
| 15. | Jambu Air   | 7.533               |
| 16. | Jambu Biji  | 29.062              |
| 17. | Durian      | 2.421               |
| 18. | Duku        | 0                   |
| 19. | Belimbing   | 1.494               |
| 20. | Alpukat     | 1.625               |
| 21. | Melon       | 0                   |
| 22. | Semangka    | 18.766              |

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, 2020  
yang dikelola dalam SIPD

Adapun jenis ternak yang telah dikembangkan di wilayah Kabupaten Cirebon, antara lain meliputi ternak sapi, kerbau, kambing, Kambing, Domba, ayam buras, ayam pedaging, ayam petelur dan itik. Dari beberapa jenis ternak di Kabupaten Cirebon tersebut telah menghasilkan Daging, telur dan susu sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

**Tabel 2.84**

**Produksi Daging, Telur dan Susu Menurut Jenis Ternak  
di Kabupaten Cirebon, 2019 dan 2020**

| Jenis Ternak                         | Daging (Ton) |           | Telur (Ton) |          | Susu (Liter) |           |
|--------------------------------------|--------------|-----------|-------------|----------|--------------|-----------|
|                                      | 2019         | 2020      | 2019        | 2020     | 2019         | 2020      |
| Sapi Potong/ <i>Beef Cattle</i>      | 3.715        | 4.371     | -           | -        | -            | -         |
| Sapi Perah/ <i>Dairy Cattle</i>      | -            | -         | -           | -        | 412.118,6    | 398.535,5 |
| Kerbau/ <i>Buffalo</i>               | 10,39        | 6,8       | -           | -        | -            | -         |
| Kuda/ <i>Horse</i>                   | -            | -         | -           | -        | -            | -         |
| Kambing/ <i>Goat</i>                 | 40,30        | 78,31     | -           | -        | -            | -         |
| Domba/ <i>Sheep</i>                  | 3.717,16     | 1.661,71  | -           | -        | -            | -         |
| Ayam Buras/ <i>Native Chicken</i>    | 1.387,62     | 1.388,82  | 2.898,09    | 2.900,61 | -            | -         |
| Kelinci/ <i>Rabbit</i>               | 4,36         | 3,85      | -           | -        | -            | -         |
| Ayam Ras Petelur/ <i>Laying hens</i> | 57,84        | 62,91     | 710,25      | 772,56   | -            | -         |
| Ayam Ras Pedaging/ <i>Broilers</i>   | 20.907,69    | 24.436,75 | -           | -        | -            | -         |

|                          |        |        |          |  |   |   |
|--------------------------|--------|--------|----------|--|---|---|
| Itik/Itik<br>Manila/Duck | 589,96 | 596,62 | 4.957,89 |  | - | - |
|--------------------------|--------|--------|----------|--|---|---|

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, 2020

Selain itu berdasarkan data yang tersedia diketahui bahwa kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB mengalami kenaikan dari 2016-2020 sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2.85**

**Realisasi Kinerja Urusan Pertanian, Peternakan dan Kehutanan  
Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020**

| No.         | Indikator Daerah  | Satuan | Tahun  |       |       |       |       |
|-------------|---|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
|             |   |        | 2016   | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| <b>2.1.</b> | <b>Pertanian</b>  |        |        |       |       |       |       |
| 1.          | Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB                | -      | 696,63 | 11,68 | 11,42 | 10,72 | 10,87 |
| 2.          | Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB                | %      | 5,40   | 47,79 | 48,04 | 46,32 | 47,40 |
| 3.          | Kontribusi sektor perkebunan (tanaman beras) terhadap PDRB          | %      | 11,62  | 12,72 | 12,27 | 12,25 | 11,67 |
| 4.          | Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB                   | %      | 100    | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 5.          | Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar | Kg/ha  | 65,79  | 54,38 | 63,80 | 64,03 | 64,19 |
| 6.          | Cakupan bina kelompok tani  | %      | 16,37  | 38,08 | 16,32 | 23,93 | 42,36 |

Sumber: Distan Kab.Cirebon, Tahun 2020

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Pertanian, Peternakan dan Kehutanan dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

**Tabel 2.86**

**Kinerja Urusan Bidang Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Dalam  
Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020**

| NO | IKK                                       | CAPAIAN KINERJA |       |
|----|---|-----------------|-------|
|    |   | 2019            | 2020  |
| 1. | Produktivitas Pertanian per hektar        | 64,03           | 64,19 |
| 2. | Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB | 15,45           | 15,90 |

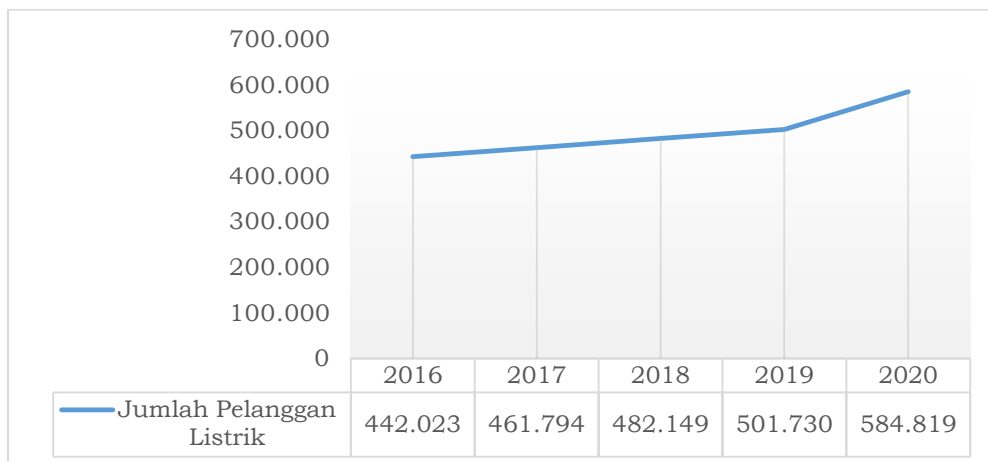
| NO | IKK  | CAPAIAN KINERJA |         |
|----|--|-----------------|---------|
|    |  | 2019            | 2020    |
|    | Tahun 2019   |                 |         |
| 3. | Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (hewan ke manusia) | -58,17%         | -3,261% |

Sumber: LPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2020

#### 4. Energi dan Sumber Daya Mineral

Jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Cirebon pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 jumlah nya mencapai 442.023 pelanggan, dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020 menjadi 584.819 pelanggan. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:

**Gambar 2.35**  
**Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Cirebon**  
**Tahun 2016-2020**



Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2020 dan 2021 yang dikelola dalam SIPD

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020. Berikut ini adalah kinerja urusan energi dan SDM dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019-2020,

**Tabel 2.87****Kinerja Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020**

| NO. | IKK   | CAPAIAN KINERJA |       |
|-----|---|-----------------|-------|
|     |   | 2019            | 2020  |
| 1.  | Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota | 100,00%         | 0,00% |

Sumber: LPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2020

**5. Perindustrian dan Perdagangan**

Pada urusan industri, kontribusi sektor industri terhadap PDRB dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi dan cenderung menurun, dimana pada tahun 2016 mencapai 21,42% dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2019 menjadi 20,45%. Selanjutnya pada tahun 2020 sedikit mengalami kenaikan menjadi 20,60%. Pertumbuhan industri juga sama mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2016 mencapai 3,19% dan posisi terakhir hanya 1,15% pada tahun 2020. Sedangkan Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri mengalami kenaikan dari tahun 2016 yang sebesar 92,95% menjadi 110,21% pada tahun 2018.

Untuk urusan perdagangan, cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal dari tahun 2016-2018 mengalami kenaikan dari 4,7% menjadi 6,1%, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 5,88%. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB mengalami penurunan dari 2016-2020 yaitu dari 16,3% di tahun 2016 menjadi 14,5% di tahun 2020. Ekspor bersih pedagang mengalami kenaikan dari 2016-2020 dari Rp. 11.476.669 Juta menjadi Rp. 16.503.417 Juta.

**Tabel 2.88****Realisasi Kinerja Urusan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020**

| No. | Indikator Daerah | Satuan | Realisasi Kinerja |      |      |      |      |
|-----|------------------|--------|-------------------|------|------|------|------|
|     |                  |        | 2016              | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 2.3 | Perindustrian    |        |                   |      |      |      |      |

| No.        | Indikator Daerah   | Satuan    | Realisasi Kinerja |           |            |            |            |
|------------|--|-----------|-------------------|-----------|------------|------------|------------|
|            |  |           | 2016              | 2017      | 2018       | 2019       | 2020       |
| 1.         | Kontribusi sektor industri terhadap PDRB                       | %         | 21.42             | 21.24     | 20.96      | 20.45      | 20.60      |
| 2.         | Pertumbuhan Industri   | %         | 3.19              | 1.67      | 1.68       | 2.19       | 1.15       |
| 3.         | Kontribusi Industri Rumah Tangga Terhadap PDRB Sektor Industri | %         | 92,95             | 101,61    | 110,21     | 114,85     | 117,46     |
| <b>2.4</b> | <b>Perdagangan</b>   |           |                   |           |            |            |            |
| 1.         | Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal                  | %         | 4,7               | 1,7       | 6,1        | 5,47       | 5.88       |
| 2.         | Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB                    | %         | 16,3              | 15,8      | 15,8       | 15,4       | 14,5       |
| 3.         | Ekspor bersih pedagang   | Rp (Juta) | 11.476.669        | 12,970386 | 14.472.046 | 15.930.746 | 16.503.417 |

Sumber: Disperdagin Kab.Cirebon, Tahun 2020

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

**Tabel 2.89**

**Kinerja Urusan Bidang Perindustrian dan Perdagangan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020**

| NO. | IKK  | CAPAIAN KINERJA |        |
|-----|--|-----------------|--------|
|     |  | 2019            | 2020   |
| 1.  | Pertambahan jumlah industri besar di Kabupaten   | 5,92%           | 1,151% |
| 2.  | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP  | 5%              | 7,5%   |
| 3.  | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh Instansi terkait                     | 100,00%         | 78,57% |
| 4.  | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh Instansi terkait                | 100,00%         | 0%     |
| 5.  | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten | 100,00%         | 100%   |
| 6.  | Kontribusi sektor Perdagangan terhadap   | 15,43%          | 14,53% |

| NO. | IKK  | CAPAIAN KINERJA |         |
|-----|--|-----------------|---------|
|     |  | 2019            | 2020    |
|     | PDRB Tahun 2019  |                 |         |
| 7.  | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) | 80,62%          | 100%    |
| 8.  | Persentase Kinerja realisasi pupuk   | 0,06%           | 45,175% |
| 9.  | Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku                                | 72,77%          | 52,82%  |

Sumber: Disperdagin Kabupaten Cirebon Tahun 2020

### 2.3.3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

#### 1. Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Untuk urusan perencanaan, seluruh indikator menunjukkan tingkat capaian yang 100%. Hal ini tercermin dari indikator capaian yang tiap tahun selama periode 2016-2020 mencapai 100% dari target, seperti indikator Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA, Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA, Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA, Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA, Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD, Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD; dan Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW.

**Tabel 2.90**

#### **Realisasi Kinerja Urusan Perencanaan Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020**

| No.        | Indikator Daerah  | Satuan | Realisasi Kinerja |      |      |      |      |
|------------|---|--------|-------------------|------|------|------|------|
|            |   |        | 2016              | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| <b>3.1</b> | <b>Perencanaan</b>  |        |                   |      |      |      |      |
| 1.         | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA; | buah   | 1                 | 1    | 1    | 1    | 1    |

| No. | Indikator Daerah  | Satuan  | Realisasi Kinerja |      |      |      |      |
|-----|---|---------|-------------------|------|------|------|------|
|     |   |         | 2016              | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 2.  | Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA; | buah    | 1                 | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 3.  | Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA;        | buah    | 1                 | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 4.  | Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA;                      | buah    | 1                 | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 5.  | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD;                                | program | 212               | 212  | 212  | -    | -    |
| 6.  | Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD; dan                             | program | 212               | 212  | 212  | -    | -    |
| 7.  | Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW.                                       | %       | 100               | 100  | 100  | 100  | 100  |

Sumber: Bappelitbangda Kab.Cirebon, Tahun 2021 yang dikelola dalam SIPD

## 2. Keuangan

Dalam hal urusan Keuangan, Kabupaten Cirebon dari tahun 2016-2020 mendapatkan predikat WTP lima kali berturut-turut. Selain itu persentase SILPA terhadap APBD dari tahun 2016-2018 tergolong cukup kecil karena berada di bawah 10%. Persentase belanja untuk urusan pendidikan juga masih cukup besar di atas 30% dari tahun 2016-2018. Kemudian, prosentase belanja kesehatan juga masih diatas 10% dari tahun 2016-2018. Untuk perbandingan belanja langsung dengan belanja tidak langsung proporsinya masih baik artinya belanja untuk publik masih lebih besar daripada belanja pegawai. Bagi hasil kabupaten/kota dan desa juga mengalami kenaikan dari tahun 2016 yang sebesar 0,49% menjadi 0,55% tahun 2018. Untuk penetapan APBD, dari tahun 2016-2018 selalu ditetapkan secara tepat waktu.

**Tabel 2.91**

**Realisasi Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Cirebon  
Tahun 2016-2020**

| No.        | Indikator Daerah                    | Satuan | Realisasi Kinerja |       |       |       |       |
|------------|-------------------------------------|--------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
|            |                                     |        | 2016              | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| <b>3.2</b> | <b>Keuangan</b>                     |        |                   |       |       |       |       |
| 1.         | Opini BPK terhadap laporan keuangan | Opini  | WTP               | WTP   | WTP   | WTP   | WTP   |
| 2.         | Persentase SILPA terhadap APBD      | %      | 10,26%            | 7,53% | 7,61% | 7.19% | 9.69% |



| No. | Indikator Daerah   | Satuan | Realisasi Kinerja |             |             |             |             |
|-----|--|--------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  |        | 2016              | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        |
| 3.  | Persentase belanja pendidikan (20%)                                | %      | 36%               | 35%         | 32%         | 32%         | 34%         |
| 4.  | Persentase belanja kesehatan (10%)                                 | %      | 11%               | 17%         | 19%         | 20%         | 23%         |
| 5.  | Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung | %      | 72%               | 82%         | 72%         | 83%         | 61%         |
| 6.  | Bagi hasil kabupaten/kota dan desa                                 | %      | 0,49%             | 0,51%       | 0,55%       | 0,51%       | 0,73%       |
| 7.  | Penetapan APBD   | Waktu  | Tepat Waktu       | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu |

Sumber: BKAD Kab.Cirebon, Tahun 2020

### 3. Pengawasan

Hakekat pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, kegagalan dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam urusan pengawasan Inspektorat, prosentase tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat cenderung mengalami fluktuasi bahkan cenderung menurun, dari 65% pada tahun 2016 menjadi 60% pada tahun 2018. Untuk prosentase penanganan kasus di Lingkungan Pemda (ASN) sebagai dasar pengambilan keputusan pimpinan juga demikian, dari 50% pada tahun 2016 menjadi 37% pada tahun 2018. Untuk penyelesaian temuan BPK mengalami penurunan dari tahun 2016 yang sebesar 100% menjadi 86% pada tahun 2018.

**Tabel 2.92**

**Realisasi Kinerja Urusan Pengawasan Kabupaten Cirebon  
Tahun 2016-2018**

| No.        | Indikator Daerah  | Satuan | Realisasi Kinerja |      |      |
|------------|---|--------|-------------------|------|------|
|            |   |        | 2016              | 2017 | 2018 |
| <b>3.3</b> | <b>Pengawasan</b>   |        |                   |      |      |
| 1.         | Prosentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. Cirebon | %      | 65                | 73   | 60   |
| 2.         | Prosentase Penanganan Kasus di Lingkungan                           | %      | 50                | 100  | 37   |

| No. | Indikator Daerah   | Satuan | Realisasi Kinerja |      |      |
|-----|--|--------|-------------------|------|------|
|     |  |        | 2016              | 2017 | 2018 |
|     | Pemda (ASN) sebagai dasar pengambilan keputusan pimpinan |        |                   |      |      |
| 3.  | Prosentase Penyelesaian Temuan BPK                       | %      | 100               | 87   | 86   |

Sumber: Disarsipus Kab.Cirebon, Tahun 2018

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

**Tabel 2.93**

**Kinerja Urusan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020**

| NO. | IKK  | CAPAIAN KINERJA |         |
|-----|--|-----------------|---------|
|     |  | 2019            | 2020    |
| 1.  | Sistem Informasi Manajemen Pemda   | 170 buah        | -       |
| 2.  | Penjabaran Program RPJMD dalam RKPD  | 87,50%          | -       |
| 3.  | Rasio Belanja Pegawai di luar Guru dan tenaga kesehatan  | 19,96%          | 4,892%  |
| 4.  | Rasio PAD  | 0,000013        | 0,126%  |
| 5.  | Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditure)  | 43,03%          | 81,043% |
| 6.  | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)   | Level 1,667     | Level 2 |
| 7.  | Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)   | Level 2         | Level 3 |
| 8.  | Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang di tanda tangani pada kuartal pertama           | 0%              | 0%      |
| 9.  | Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif  | 15,86%          | 7,077%  |
| 10. | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan   | 30,87%          | 17,871% |
| 11. | Persentase Pegawai Fungsional terhadap seluruh jumlah pegawai Pemerintah Daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | 19,47%          | 8,971%  |
| 12. | Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)                          | 19,47%          | 8,97%   |
| 13. | Budget Execution : Deviasi realisasi belanja   | 92,29%          | 8,971%  |

| NO. | IKK  | CAPAIAN KINERJA |        |
|-----|--|-----------------|--------|
|     |  | 2019            | 2020   |
|     | terhadap belanja total dalam APBD  |                 |        |
| 14. | Assets Management  | Ada             | Ada    |
| 15. | Cash management : Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya   | 8,15%           | 7,175% |
| 16. | Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units) | 99,85%          | 100%   |
| 17. | Akses Publik terhadap informasi keuangan Daerah (Public Acces to Fiscal Information)   | 100,00%         | 100%   |

Sumber: LPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2020

## 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia.

### 1. PDRB ADHB Menurut Pengeluaran

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan System of National Accounts (SNA) yang baru, SNA 2008. Ke dua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDB/PDRB tersebut.

Secara total, PDRB Pengeluaran Kabupaten Cirebon atas dasar harga Berlaku (ADHB) di tahun 2019 meningkat sebesar 8,19 %, yakni dari 45.462 miliar Rupiah menjadi 49.186 miliar Rupiah. Jika dinilai atas dasar harga Konstan 2010 (adik 2010) , maka peningkatan ini jauh lebih rendah, yakni dari 32.160 miliar Rupiah menjadi 33.724 miliar Rupiah, atau meningkat

sebesar 4,86 %.

Pada periode tahun 2016 - 2019 PDRB Kabupaten Cirebon atas dasar harga Berlaku meningkat cukup signifikan, yakni sebesar 38.840 miliar Rupiah (2016); 41.919 miliar Rupiah (2017); 45.461 miliar Rupiah (2018) dan 49.186 miliar Rupiah (2019). Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Cirebon pada periode 2016-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini berikut ini:

**Tabel 2.94**

**PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran  
Kabupaten Cirebon 2016 - 2019**

(Trilyun Rupiah)

| Komponen Pengeluaran                   | 2016         | 2017         | 2018*        | 2019**       |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Konsumsi Rumah Tangga                  | 34,91        | 37,38        | 40,68        | 44,17        |
| Konsumsi LNPRT                         | 0,70         | 0,75         | 0,90         | 0,97         |
| Konsumsi Pemerintah                    | 3,46         | 3,31         | 3,50         | 3,71         |
| Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto | 13,52        | 14,06        | 15,17        | 16,26        |
| Perubahan Inventori                    | 1,50         | 1,58         | 1,69         | 1,72         |
| Net (Ekspor-Impor)                     | -15,25       | -15,16       | -16,48       | -17,65       |
| <b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>  | <b>38,84</b> | <b>41,92</b> | <b>45,46</b> | <b>49,19</b> |

\*Angka Sementara

\*\*Angka Sangat Sementara

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cirebon Menurut Pengeluaran 2015-2019

## 2. PDRB ADHK Menurut Pengeluaran

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang dievaluasi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDB atas dasar harga

Konstan 2010 Kabupaten Cirebon pada periode 2016 – 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.95**

**PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran  
Kabupaten Cirebon, 2016 - 2019**

(Trilyun Rupiah)

| Komponen Pengeluaran                   | 2016         | 2017         | 2018*        | 2019**       |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Konsumsi Rumah tangga                  | 25,41        | 26,30        | 27,48        | 28,81        |
| Konsumsi LNPRT                         | 0,55         | 0,57         | 0,65         | 0,68         |
| Konsumsi Pemerintah                    | 2,34         | 2,18         | 2,24         | 2,36         |
| Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto | 9,96         | 10,20        | 10,68        | 11,21        |
| Perubahan Inventori                    | 1,06         | 1,07         | 1,08         | 1,08         |
| Net (Ekspor-Import)                    | -10,17       | -9,69        | -9,97        | -10,41       |
| <b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>  | <b>29,15</b> | <b>30,62</b> | <b>32,16</b> | <b>33,72</b> |

\*Angka Sementara

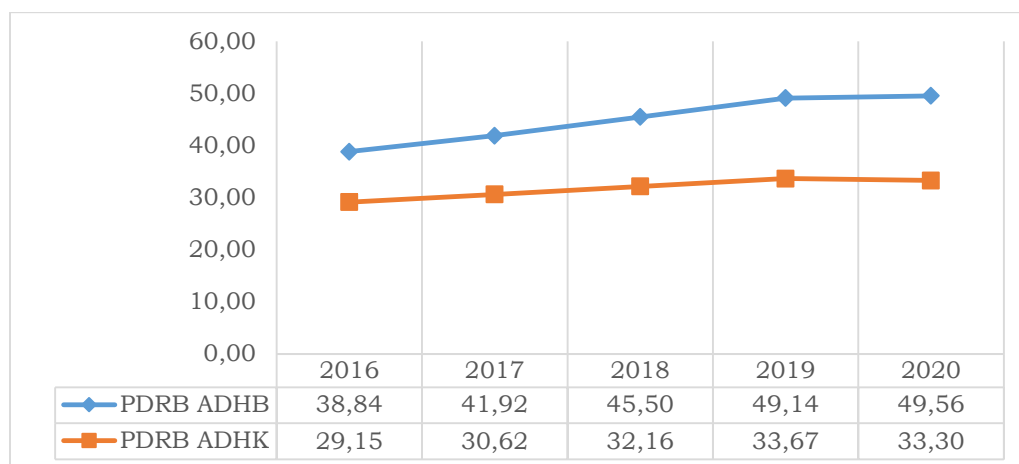
\*\*Angka Sangat Sementara

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cirebon Menurut Pengeluaran 2015-2019

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai PDRB atas dasar harga Konstan di Kabupaten Cirebon meningkat, yakni sebesar 29.149 miliar Rupiah (2016); 30.623 miliar Rupiah (2017); 32.160 miliar Rupiah (2018) dan 33.723 miliar Rupiah (2019).

**Gambar 2.36**

**Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Cirebon 2016 – 2020**



Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cirebon Menurut Pengeluaran 2016-2021

Dari gambar di atas, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga Konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDRB atas dasar harga Konstan, pengaruh dari harga tersebut telah diabaikan. Sama halnya PDRB atas dasar harga Berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga Konstan juga menunjukkan peningkatan.

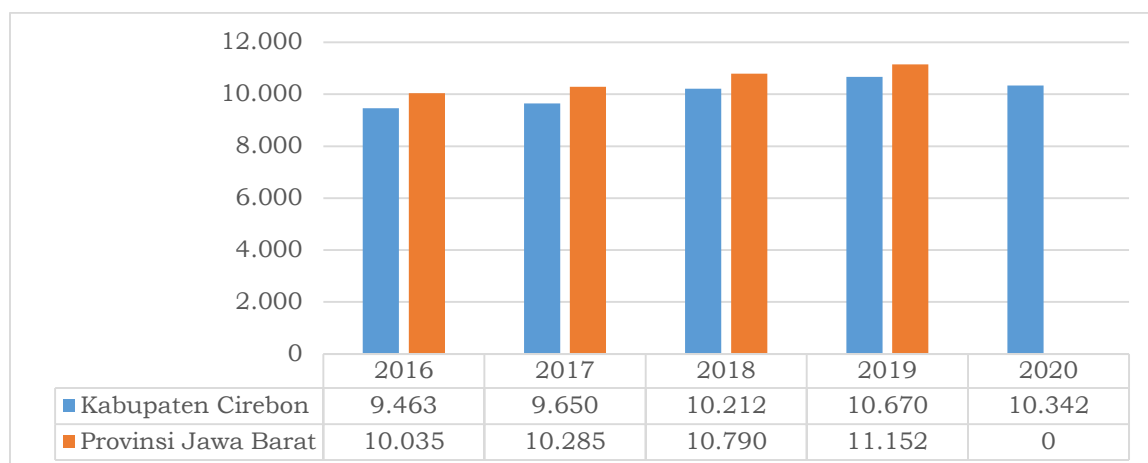
### 3. Pengeluaran per Kapita

Pengeluaran per kapita penduduk merupakan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran per kapita Kabupaten Cirebon Tahun 2019 mencapai 10.670, namun pada tahun 2020 angkanya turun menjadi 10.342.

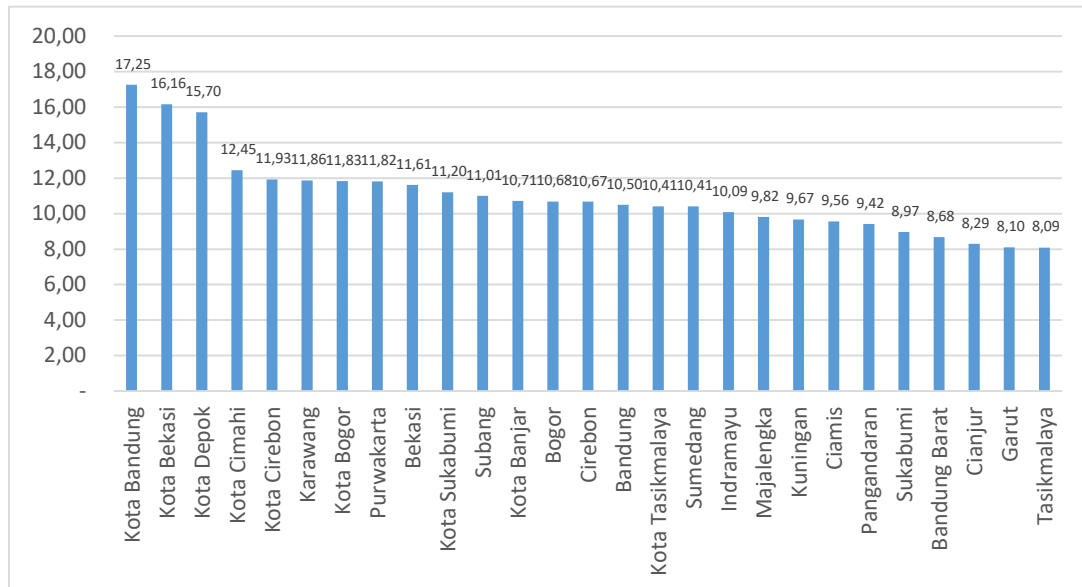
Angka pengeluaran per kapita Kabupaten Cirebon pada tahun 2019 masih berada di bawah pengeluaran per kapita Provinsi Jawa Barat yang mencapai 11.152 Juta Rupiah pada tahun yang sama.

**Gambar 2.37**

**Pengeluaran per Kapita Kabupaten Cirebon dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)**



Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2020 dan 2021, BPS yang dikelola dalam SIPD

**Gambar 2.38****Pengeluaran Per Kapita Penduduk menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2019**

Sumber: Indikator Strategis Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 yang dikelola dalam SIPD

#### 4. Sektor Basis dan Non Basis

Daya saing merupakan kemampuan suatu daerah dibanding daerah lain dalam menetapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Analisis Location Quotient (LQ) merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di suatu daerah atau sektor-sektor apa saja yang merupakan sektor basis atau leading sektor.

Pada dasarnya teknik ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di daerah yang diselidiki dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang menjadi acuan. Satuan yang digunakan sebagai ukuran untuk menghasilkan koefisien LQ tersebut nantinya dapat berupa jumlah produksi atau satuan lain yang dapat digunakan sebagai kriteria. sektor basis. Pada analisis LQ ini yang dianalisis adalah pada jumlah produksi per sektor di Kabupaten Cirebon dibandingkan dengan



Jawa Barat, sehingga terlihat keunggulan komparatif masing-masing sektor di tingkat Jawa Barat.

**Tabel 2.96**

**Analisis Location Quotient (LQ) Kabupaten Cirebon**

| Kategori | Uraian   | 2016 | 2017 | Rata-Rata | Ket       |
|----------|--|------|------|-----------|-----------|
| A        | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 1,95 | 1,94 | 1,95      | BASIS     |
| B        | Pertambangan dan Penggalian                                    | 0,68 | 0,69 | 0,69      | NON BASIS |
| C        | Industri Pengolahan  | 0,48 | 0,48 | 0,48      | NON BASIS |
| D        | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 0,34 | 0,42 | 0,38      | NON BASIS |
| E        | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 1,02 | 1,03 | 1,03      | BASIS     |
| F        | Konstruksi   | 1,49 | 1,45 | 1,47      | BASIS     |
| G        | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 1,02 | 1,02 | 1,02      | BASIS     |
| H        | Transportasi dan Pergudangan                                   | 1,55 | 1,58 | 1,57      | BASIS     |
| I        | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 1,41 | 1,40 | 1,41      | BASIS     |
| J        | Informasi dan Komunikasi                                       | 0,79 | 0,78 | 0,79      | NON BASIS |
| K        | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 1,41 | 1,43 | 1,42      | BASIS     |
| L        | Real Estate  | 1,93 | 1,94 | 1,94      | BASIS     |
| M,N      | Jasa Perusahaan  | 2,03 | 2,06 | 2,05      | BASIS     |
| O        | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 1,44 | 1,45 | 1,45      | BASIS     |
| P        | Jasa Pendidikan  | 1,87 | 1,89 | 1,88      | BASIS     |
| Q        | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 2,77 | 2,76 | 2,77      | BASIS     |
| R,S,T,U  | Jasa lainnya   | 1,84 | 1,84 | 1,84      | BASIS     |

Sumber: Bappeda dan BPS Kabupaten Cirebon Jawa Barat, Tahun 2016 – 2017

Berdasarkan hasil perhitungan *Location Quotient* (LQ), dapat diketahui konsentrasi suatu kegiatan pada suatu wilayah dengan kriteria sebagai berikut:

**2. Sektor Basis**

- Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.
- Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang.
- Konstruksi.
- Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.
- Transportasi dan Pergudangan.
- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.



- g. Jasa Keuangan dan Asuransi.
  - h. Real Estate.
  - i. Jasa Perusahaan.
  - j. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial.
  - k. Jasa Pendidikan.
  - l. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan
  - m. Jasa Lainnya.
3. Sektor Non Basis
- a. Pertambangan dan Penggalian.
  - b. Industri Pengolahan.
  - c. Pengadaan Listrik dan Gas.
  - d. Informasi dan Komunikasi.



**Tabel 2.97**

**Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020**

| No.       | Indikator Kinerja Daerah                    | Satuan    | Capaian Kinerja |            |            |            |            |
|-----------|---|-----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
|           |   |           | 2016            | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       |
| 1         | 2   | 3         | 4               | 5          | 6          | 7          | 8          |
| <b>1)</b> | <b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>       |           |                 |            |            |            |            |
| 1.1       | <b>Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b> |           |                 |            |            |            |            |
| 1.1.1     | PDRB ADHB                                   | Milyar Rp | 38.840,78       | 41.919,30  | 45.449,28  | 49.135,81  | 49.561,30  |
| 1.1.2     | PDRB ADHK                                   | Milyar Rp | 29.149,31       | 30.623,31  | 32.161,84  | 33.668,10  | 33.304,50  |
| 1.1.3     | Laju Pertumbuhan Ekonomi                    | Persen    | 5,63            | 5,06       | 5,02       | 4,68       | -1,08      |
| 1.1.4     | PDRB per kapita:                            |           |                 |            |            |            |            |
|           | - ADHB                                      | Juta Rp   | 18.124.494      | 19.410.878 | 20.907.550 | 22.406.740 | 22.429.650 |
|           | - ADHK                                      | Juta Rp   | 13.602.112      | 14.180.233 | 14.778.810 | 15.353.210 | 15.072.410 |
| 1.1.5     | Laju PDRB Per Kapita                        | Persen    | 4,80            | 4,25       | 4,22       | 3,89       | -1,83      |
| 1.1.6     | Laju Inflasi                                | Persen    | 1,87            | 4,36       | 2,80       | 2,00       | 1,68       |
| 1.1.7     | Indeks Gini                                 | Poin      | 0,356           | 0,355      | 0,364      | 0,343      | 0,338      |
| 1.1.8     | Persentase penduduk miskin                  | Persen    | 13,49           | 12,97      | 10,70      | 9,94       | 11,24      |
| 1.1.9     | Jumlah Penduduk Miskin                      | Ribu Jiwa | 288,49          | 279,55     | 232,37     | 217,64     | 247,94     |
| 1.1.10    | Garis Kemiskinan                            | Rp        | 333.758         | 346.240    | 370.747    | 381.372    | 393.452    |
| 1.1.11    | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)            | Nilai     | 66,70           | 67,39      | 68,05      | 68,69      | 68,75      |
| 1.2       | <b>Kesejahteraan Sosial</b>                 |           |                 |            |            |            |            |
| 1.2.1     | <b>Pendidikan</b>                           |           |                 |            |            |            |            |
| 1.2.1.1   | Harapan Lama Sekolah                        | Tahun     | 12,03           | 12,21      | 12,22      | 12,24      | 12,25      |
| 1.2.1.2   | Angka Rata-Rata lama sekolah                | Tahun     | 6,41            | 6,61       | 6,62       | 6,71       | 6,92       |
| 1.2.2     | <b>Kesehatan</b>                            |           |                 |            |            |            |            |
| 1.2.2.1   | Angka Usia Harapan Hidup                    | Tahun     | 71,43           | 71,49      | 71,66      | 71,82      | 71,99      |
| 1.2.3     | <b>Ketenagakerjaan</b>                      |           |                 |            |            |            |            |
| 1.2.3.1   | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)   | Persen    | 58,45           | 58,21      | 61,85      | 65,38      | 63,79      |
| 1.2.3.2   | Tingkat Pengangguran Terbuka                | Persen    | 9,21            | 9,61       | 10,56      | 10,28      | 11,52      |



| No.            | Indikator Kinerja Daerah                     | Satuan | Capaian Kinerja |        |        |        |        |
|----------------|--|--------|-----------------|--------|--------|--------|--------|
|                |  |        | 2016            | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| 1              | 2  | 3      | 4               | 5      | 6      | 7      | 8      |
| <b>2)</b>      | <b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>                  |        |                 |        |        |        |        |
| <b>2.1</b>     | <b>Fokus Layanan Urusan Wajib</b>            |        |                 |        |        |        |        |
| <b>2.1.1</b>   | <b>Pendidikan</b>                            |        |                 |        |        |        |        |
| <b>2.1.1.1</b> | <b>Pendidikan Anak Usia Dini</b>             |        |                 |        |        |        |        |
| 2.1.1.1.2      | APK PAUD                                     | Persen | 49,09           | 49,39  | 49,39  | 65,80  | 42,03  |
| <b>2.1.1.2</b> | <b>Angka Partisipasi Kasar SD/SMP/SMA</b>    |        |                 |        |        |        |        |
| 2.1.1.2.1      | APK SD/MI                                    | Persen | 120,79          | 120,90 | 104,53 | 116,52 | 104,64 |
| 2.1.1.2.2      | APK SMP/MTs                                  | Persen | 115,97          | 114,41 | 88,04  | 122,27 | 88,04  |
| 2.1.1.2.3      | APK SMA/K                                    | Persen | 96,64           | 100,65 | 84,34  | 95,86  | 82,30  |
| <b>2.1.1.3</b> | <b>Angka Partisipasi Murni SD/SMP/SMA</b>    |        |                 |        |        |        |        |
| 2.1.1.3.1      | APM SD/MI                                    | Persen | 106,5           | 106,52 | 96,11  | 103,32 | 95,84  |
| 2.1.1.3.2      | APM SMP/MTs                                  | Persen | 94,85           | 95,54  | 79,80  | 97,88  | 79,71  |
| 2.1.1.3.3      | APM SMA/K                                    | Persen | 85,40           | 75,92  | 58,93  | 66,95  | 59,30  |
| <b>2.1.1.4</b> | <b>Angka Putus Sekolah</b>                   |        |                 |        |        |        |        |
| 2.1.1.4.1      | Angka Putus Sekolah SD Sederajat             | Persen | 0,10            | 0,01   | 0,01   | 0,07   | 0,023  |
| 2.1.1.4.2      | Angka Putus Sekolah SMP Sederajat            | Persen | 0,35            | 0,29   | 0,29   | 0,20   | 0,20   |
| 2.1.1.4.3      | Angka Putus Sekolah SMA Sederajat            | Persen | 0,29            | 0,56   | 0,38   | 0,35   | 0,09   |
| 2.1.1.4.4      | Angka Putus Sekolah SMK Sederajat            | Persen | 0,06            | 0,02   | 0,27   | 0,17   | 0,19   |
| <b>2.1.1.5</b> | <b>Angka Kelulusan</b>                       |        |                 |        |        |        |        |
| 2.1.1.5.1      | Angka Lulusan SD/MI sederajat                | Persen | 96,5            | 95,8   | 95,8   | 97,47  | 98,96  |
| 2.1.1.5.2      | Angka Lulusan SMP sederajat                  | Persen | 83,23           | 82,06  | 82,06  | 81,04  | 95,53  |
| 2.1.1.5.3      | Angka Lulusan SMA sederajat                  | Persen | 83,61           | 74,42  | 83,70  | 68,22  | 64,05  |
| 2.1.1.5.4      | Angka Lulusan SMK sederajat                  | Persen | 66,46           | 77,38  | 79,62  | 68,18  | 72,18  |
| <b>2.1.1.6</b> | <b>Angka Melanjutkan</b>                     |        |                 |        |        |        |        |
| 2.1.1.6.1      | Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs      | Persen | 110,41          | 109,35 | 109,35 | 110,66 | 82,99  |
| 2.1.1.6.2      | Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA | Persen | 107,8           | 108,99 | 108,99 | 118,20 | 117,07 |
| <b>2.1.1.7</b> | <b>Fasilitas Pendidikan</b>                  |        |                 |        |        |        |        |



| No.             | Indikator Kinerja Daerah                              | Satuan                   | Capaian Kinerja |       |       |       |       |
|-----------------|---|--------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|                 |   |                          | 2016            | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| 1               | 2   | 3                        | 4               | 5     | 6     | 7     | 8     |
| 2.1.1.7.1       | Ruang Kelas Baik SD/MI                                | Persen                   | 65,87           | 65,87 | 65,82 | 64,60 | 59,27 |
| 2.1.1.7.2       | Ruang Kelas Baik SMP/MTs                              | Persen                   | 79,47           | 79,47 | 79,38 | 80,36 | 75,54 |
| 2.1.1.7.3       | Ruang Kelas Baik SMA/MA                               | Persen                   | 74,31           | 79,24 | 86,29 | 83,36 | 82,23 |
| 2.1.1.7.4       | Ruang Kelas Baik SMK                                  | Persen                   | 92,67           | 92,15 | 90,32 | 89,35 | 79,85 |
| <b>2.1.1.8</b>  | <b>Rasio Guru / Murid Sekolah Pendidikan Dasar</b>    |                          |                 |       |       |       |       |
| 2.1.1.8.1       | SD  | Siswa/guru               | 20              | 20    | 21    | 20    | 21    |
| 2.1.1.8.2       | SMP   | Siswa/guru               | 17              | 17    | 18    | 15    | 15    |
| 2.1.1.8.3       | SMA   | Siswa/guru               | 16              | 15    | 15    | 14    | 14    |
| 2.1.1.8.4       | SMK   | Siswa/guru               | 17              | 14    | 14    | 15    | 15    |
| <b>2.1.1.9</b>  | <b>Rasio Murid/kelas rata-rata sekolah dasar</b>      |                          |                 |       |       |       |       |
| 2.1.1.9.1       | SD  | Siswa                    | 30              | 27    | 27    | 26    | 27    |
| 2.1.1.9.2       | SMP   | Siswa                    | 31              | 29    | 29    | 31    | 22    |
| 2.1.1.9.3       | SMA   | Siswa                    | 35              | 37    | 33    | 32    | 32    |
| 2.1.1.9.4       | SMK   | Siswa                    | 34              | 33    | 32    | 32    | 31    |
| <b>2.1.1.10</b> | <b>Angka Melek Huruf penduduk usia 15 - 24 tahun</b>  | Persen                   | 94,77           | 98,92 | 98,97 | 99,73 | 99,73 |
| <b>2.1.1.10</b> | <b>Angka Guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D-IV</b> |                          |                 |       |       |       |       |
| 2.1.1.10.1      | PAUD  | Persen                   | 89,66           | 94,05 | 94,05 | 96,86 | 97,06 |
| 2.1.1.10.2      | SD  | Persen                   | 95,05           | 96,46 | 96,46 | 97,73 | 97,63 |
| 2.1.1.10.3      | SMP   | Persen                   | 99,07           | 98,78 | 98,89 | 98,80 | 98,93 |
| 2.1.1.10.4      | SMA   | Persen                   | 96,57           | 97,00 | 97,25 | 97,13 | 97,10 |
| 2.1.1.10.5      | SMK   | Persen                   | 89,66           | 94,05 | 94,05 | 96,86 | 97,06 |
| <b>2.1.2</b>    | <b>Kesehatan</b>                                      |                          |                 |       |       |       |       |
| 2.1.2.1         | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup    | Per 1000 kelahiran hidup | 4,28            | 3,99  | 2,97  | 2,62  | 2,82  |
| 2.1.2.2         | Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran              | Per 1000                 | 1,94            | 0,75  | 3,18  | 2,8   | 2,9   |



| No.      | Indikator Kinerja Daerah  | Satuan                      | Capaian Kinerja |        |       |       |       |
|----------|---|-----------------------------|-----------------|--------|-------|-------|-------|
|          |   |                             | 2016            | 2017   | 2018  | 2019  | 2020  |
| 1        | 2   | 3                           | 4               | 5      | 6     | 7     | 8     |
|          | hidup   | kelahiran hidup             |                 |        |       |       |       |
| 2.1.2.3  | Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup  | Per 100.000 kelahiran hidup | 90              | 18     | 73,26 | 70,23 | 84,16 |
| 2.1.2.4  | Rasio posyandu per satuan balita  | Per 1000 balita             | 15,77           | 15,86  | 13,50 | 15,3  | 14,4  |
| 2.1.2.5  | Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk                                   | Per 1000 penduduk           | 0,080           | 0,079  | 0,09  | 0,084 | 0,097 |
| 2.1.2.6  | Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk   | Per 1000 penduduk           | 0,005           | 0,005  | 0,005 | 0,004 | 0,01  |
| 2.1.2.7  | Rasio dokter per satuan penduduk  | Per 1000 penduduk           | 0,224           | 0,259  | 0,261 | 0,151 | 0,151 |
| 2.1.2.8  | Rasio tenaga medis per satuan penduduk  | Per 1000 penduduk           | 0,224           | 0,259  | 0,261 | 0,151 | 0,151 |
| 2.1.2.9  | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani   | Persen                      | 119,71          | 121,04 | 139,8 | 135,0 | 158,6 |
| 2.1.2.10 | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | Persen                      | 92,17           | 93,61  | 101   | 95,5  | 98,6  |
| 2.1.2.11 | Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)                               | Persen                      | 87,26           | 72,17  | 83,49 | 87,03 | 87,03 |
| 2.1.2.12 | Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan  | Persen                      | 100             | 100    | 100   | 100   | 100   |
| 2.1.2.13 | Presentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak                                    | Persen                      | 98,09           | 93,40  | 97,12 | 97,12 | 88,27 |
| 2.1.2.14 | Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk   | Per 100.000 penduduk        | 2,70            | 2,22   | 3,6   | 3,6   | 0,36  |
| 2.1.2.15 | Cakupan balita pneumonia yang ditangani   | Persen                      | 61,59           | 67,47  | 108,7 | 90    | 92    |
| 2.1.2.16 | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA                              | Persen                      | 14,22           | 15,35  | 100   | 106   | 65    |



| No.          | Indikator Kinerja Daerah   | Satuan               | Capaian Kinerja |         |        |        |        |
|--------------|--|----------------------|-----------------|---------|--------|--------|--------|
|              |  |                      | 2016            | 2017    | 2018   | 2019   | 2020   |
| 1            | 2  | 3                    | 4               | 5       | 6      | 7      | 8      |
| 2.1.2.17     | Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)                            | Per 100.000 penduduk | 2,24            | 2,95    | 1,6    | 4,75   | 4,74   |
| 2.1.2.18     | Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS                  | Persen               | 14,22           | 15,35   | 100    | 106    | 65     |
| 2.1.2.19     | Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS                 | Persen               | 75,68           | 49,76   | 82     | 84     | 83     |
| 2.1.2.20     | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD                                 | Persen               | 93,50           | 75,18   | 91,60  | 90,16  | 86,82  |
| 2.1.2.21     | Penderita diare yang ditangani   | Persen               | 159,80          | 138,86  | 75,46  | 66,7   | 52,1   |
| 2.1.2.22     | Angka kejadian Malaria   | Per 100.000 penduduk | 0,50            | 0,40    | 0,01   | 0,23   | 0,99   |
| 2.1.2.23     | Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi                                       | Persen               | 0,01            | 0,01    | 0,01   | 0,42   | 0,43   |
| 2.1.2.24     | Cakupan kunjungan bayi   | Persen               | 100,37          | 103,03  | 102,04 | 100    | 101,91 |
| 2.1.2.25     | Cakupan puskesmas  | Persen               | 142,5           | 142,5   | 150    | 150    | 150    |
| 2.1.2.26     | Cakupan pembantu puskesmas   | Persen               | 16,75           | 16,75   | 16,75  | 16,75  | 16,75  |
| 2.1.2.27     | Cakupan kunjungan ibu hamil K4   | Persen               | 92,22           | 94,92   | 100,41 | 96,8   | 98,2   |
| 2.1.2.28     | Cakupan pelayanan nifas  | Persen               | 91,48           | 93,79   | 47,04  | 95,5   | 99     |
| 2.1.2.29     | Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani                                      | Persen               | 86,33           | 106,28  | 40,17  | 112,7  | 100,89 |
| 2.1.2.30     | Cakupan pelayanan anak balita  | Persen               | 93,89           | 97,20   | 49,25  | 100,8  | 87,19  |
| 2.1.2.31     | Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat                                  | Persen               | 92,04           | 74,18   | 95,99  | 93,75  | 80,35  |
| 2.1.2.32     | Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam | Persen               | 100             | 100     | 100    | 100    | 100    |
| <b>2.1.3</b> | <b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>   |                      |                 |         |        |        |        |
| 2.1.3.1      | Panjang Jalan Kabupaten  |                      |                 |         |        |        |        |
| 2.1.3.1.1    | Kondisi Baik   | Km                   | 471,72          | 496,127 | 568,51 | 679,68 | 694,22 |





| No.          | Indikator Kinerja Daerah  | Satuan | Capaian Kinerja |         |        |        |        |
|--------------|---|--------|-----------------|---------|--------|--------|--------|
|              |   |        | 2016            | 2017    | 2018   | 2019   | 2020   |
| 1            | 2   | 3      | 4               | 5       | 6      | 7      | 8      |
| 2.1.3.1.2    | Kondisi Sedang  | Km     | 474,15          | 482,811 | 441,12 | 337,62 | 339,19 |
| 2.1.3.1.3    | Kondisi Rusak Ringan  | Km     | 197,15          | 163,6   | 152,37 | 121,73 | 137,51 |
| 2.1.3.1.4    | Kondisi Rusak Berat   | Km     | 97,28           | 97,766  | 78,30  | 101,28 | 69,40  |
| 2.1.3.2      | Proporsi panjang jaringan jalan kondisi baik  | Persen | 26,21           | 40,00   | 45,84  | 54,80  | 55,97  |
| 2.1.3.1      | Persentase jalan drainase/saluran pembuangan air                                      | Persen | 1,31            | 2,20    | 3,03   | 3,55   | 3,77   |
| 2.1.3.2      | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik                                       | Persen | 62,88           | 62,2    | 62,22  | 71,08  | 72,54  |
| 2.1.3.3      | Rasio jaringan irigasi  | Persen | 16,84           | 16,84   | 16,84  | 17,44  | 17,44  |
| 2.1.3.4      | Persentase jalan yang memiliki trotoar (minimal 1,5 m)                                | Persen | 0,05            | 0,43    | 0,66   | 0,85   | 0,87   |
| <b>2.1.4</b> | <b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>   |        |                 |         |        |        |        |
| 2.1.4.1      | Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni   | Persen | 94              | 96,16   | 96,5   | 97,96  | 98,13  |
| 2.1.4.2      | Total Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan air bersih                                 | -      | 33.125          | n.a     | n.a    | n.a    | n.a    |
| 2.1.4.3      | Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Air Bersih                                   | Persen | 4.89            | n.a     | n.a    | 67,87% | 65,07% |
| <b>2.1.5</b> | <b>Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat</b>                 |        |                 |         |        |        |        |
| 2.1.5.1      | Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/Cirebon                                 | Persen | 100             | 100     | 69,20  | 86,75  | 74,55  |
| 2.1.5.2      | Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah wilayah manajemen kebakaran ( WMK ) | Persen | 100             | 100     | 97,06  | 97,08  | 98     |
| 2.1.5.3      | Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)                                      | Persen | 35              | 50%     | 100%   | n.a    | n.a    |
| 2.1.5.4      | Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)             | Persen | 28,50           | 70%     | 99,3%  | n.a    | n.a    |
| 2.1.5.5      | Prosentase Penegakan Perda  | Persen | 83,89           | 79,24   | 86,43  | n.a    | n.a    |
| <b>2.1.6</b> | <b>Sosial</b>   |        |                 |         |        |        |        |
| 2.1.6.1      | Prosentase PPKS yang memperoleh bantuan   | Persen | 48,96           | 67,06   | 28     | 0,16   | 92,14  |



| No.          | Indikator Kinerja Daerah  | Satuan | Capaian Kinerja |                                |                                |   |   |
|--------------|---|--------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|---|---|
|              |   |        | 2016            | 2017                           | 2018                           | 2019                                      | 2020                                      |
| 1            | 2   | 3      | 4               | 5                              | 6                              | 7   | 8   |
|              | sosial  |        |                 |                                |                                |   |   |
| 2.1.6.2      | Prosentase PPKS yang tertangani   | Persen | 48,96           | 67,06                          | 139                            | 28,7                                      | 55,4                                      |
| 2.1.6.3      | Prosentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar   | Persen | 28,02           | 18,59                          | 80                             | 0,76                                      | 96,26                                     |
| 2.1.6.4      | Prosentase Panti Sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenisnya | Persen | 8,61            | 2,53                           | 80                             | 0   | 0   |
| 2.1.6.5      | Prosentase Panti Sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial  | Persen | 100             | 229                            | 80                             | 100                                       | 0   |
| 2.1.6.6      | Prosentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat  | Persen | 100             | 100                            | 100                            | 100                                       | 100                                       |
| 2.1.6.7      | Prosentase korban bencana yang di evakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat  | Persen | 100             | 100                            | 100                            | 100                                       | 100                                       |
| <b>2.2.</b>  | <b>Fokus Layanan Urusan Wajib</b>   |        |                 |                                |                                |   |   |
| <b>2.2.1</b> | <b>Tenaga Kerja</b>   |        |                 |                                |                                |   |   |
| 2.2.1.1      | Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja pertahun   | -      | n.a             | n.a                            | n.a                            | n.a                                       | n.a                                       |
| 2.2.1.2      | Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis kompetensi   | Persen | 61,4            | 55,65                          | 70,79                          | 61,41                                     | 66,66                                     |
| 2.2.1.3      | Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis kewirausahaan  | Persen | 80              | 81,63                          | 78,78                          | 76,66                                     | 12,73                                     |
| 2.2.1.4      | Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan   | Persen | 45,84           | 49,08                          | 56,27                          | 47,96                                     | 31,43                                     |
| 2.2.1.5      | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial   | Persen | 73,58           | 40,63                          | 77,77                          | 52,78                                     | 47,23                                     |
| 2.2.1.6      | Kepesertaan Jamsostek   | Persen | 53,51           | 65,05                          | 55                             | 113,50                                    | 128,40                                    |
| 2.2.1.7      | Besaran Pemeriksaan Perusahaan  | Persen | 46,70           | UPT Pengawasan Ketenagakerjaan | UPT Pengawasan Ketenagakerjaan | UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Prov Jabar | UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Prov Jabar |



| No.          | Indikator Kinerja Daerah   | Satuan    | Capaian Kinerja |   |   |   |   |
|--------------|--|-----------|-----------------|---|---|---|---|
|              |  |           | 2016            | 2017                                      | 2018                                      | 2019                                      | 2020                                      |
| 1            | 2  | 3         | 4               | 5   | 6   | 7   | 8   |
|              |  |           |                 | Prov Jabar                                | Prov Jabar                                |   |   |
| 2.2.1.8      | Besaran Pengujian peralatan di Perusahaan  | Persen    | 53,17           | UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Prov Jabar | UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Prov Jabar | UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Prov Jabar | UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Prov Jabar |
| 2.2.1.9      | Besaran Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan   | orang     | 100             | 320                                       | 180                                       | 160                                       | 0 (Refocusing)                            |
| 2.2.1.10     | Prosentase transmigran swakarsa  | Persen    | 0               | 0   | 0   | n.a                                       | n.a                                       |
| 2.2.1.11     | Keselamatan dan Perlindungan   | -         | n.a             | n.a                                       | n.a                                       | n.a                                       | n.a                                       |
|              |  |           |                 |   |   |   |   |
| <b>2.2.2</b> | <b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>  |           |                 |   |   |   |   |
| 2.2.2.1      | Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja Langsung APBD  | Persen    | 24              | 22  | 21  | 0,27                                      | 0   |
| 2.2.2.2      | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instasi terkait Kabupaten  | Persen    | 13,16           | 100                                       | 100                                       | 0,01                                      | 0,006                                     |
| 2.2.2.3      | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (Tindak pidana perdagangan orang/manusia) per 100.000 Penduduk Perempuan | Persen    | 0,075           | 0,014                                     | 0,035                                     | 3,51                                      | 0,66                                      |
| 2.2.2.4      | Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani   | Persen    | 100             | 100                                       | 100                                       | 100                                       | 100                                       |
| 2.2.2.5      | Partisipasi angkatan kerja perempuan   | Persen    | 39,33           | 40,39                                     | 41,97                                     | 47,89                                     | 46,77                                     |
| <b>2.2.3</b> | <b>Pangan</b>  |           |                 |   |   |   |   |
| 2.2.3.1      | Skor PPH ketersediaan  | Persen    | 84              | 83,4                                      | 84,5                                      | 71,17                                     | 69,95*)                                   |
| 2.2.3.2      | Jumlah Desa Rawan Pangan yang diintervensi   | Desa      | 5               | 5   | 6   | 7   | n.a                                       |
| 2.2.3.3      | Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CCPD)   | Persen    | 24              | 42  | 86  | 90,719                                    | 182                                       |
| 2.2.3.4      | Stabilitas Harga Pangan Tingkat Konsumen (CV)  | koefisien | 9,75            | 9,75                                      | 9,75                                      | 4   | 2,80                                      |
| 2.2.3.5      | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Ketahanan Pangan  | buah      | 1               | 2   | -   | 1   | -   |



| No.          | Indikator Kinerja Daerah   | Satuan | Capaian Kinerja |      |      |        |       |
|--------------|--|--------|-----------------|------|------|--------|-------|
|              |  |        | 2016            | 2017 | 2018 | 2019   | 2020  |
| 1            | 2  | 3      | 4               | 5    | 6    | 7      | 8     |
| 2.2.3.6      | Skor PPH Konsumsi  | Persen | 80,7            | 83,3 | 89,2 | 89,9   | 91,50 |
| 2.2.3.7      | Tingkat Keamanan Pangan  | Persen | 83              | 92   | 92   | 67     | 88    |
| <b>2.2.4</b> | <b>Pertanahan</b>  |        |                 |      |      |        |       |
| 2.2.4.1      | Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan | Persen | n.a             | n.a  | n.a  | 2,33   | 0     |
| 2.2.4.2      | Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum  | Persen | n.a             | n.a  | n.a  | 100    | 100   |
| 2.2.4.3      | Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal  | Persen | n.a             | n.a  | n.a  | 2,33   | 0     |
| 2.2.4.4      | Tersedianya tanah obyek landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee             | Persen | n.a             | n.a  | n.a  | 100,00 | 0     |
| 2.2.4.5      | Luas lahan bersertifikat (aset Pemkab)   | Persen | n.a             | n.a  | n.a  | 29,96  | 0     |
| 2.2.4.6      | Tersedianya tanah untuk masyarakat   | Persen | n.a             | n.a  | n.a  | 100    | 100   |
| 2.2.4.7      | Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi   | Persen | n.a             | n.a  | n.a  | 40,00  | 100   |
| <b>2.2.5</b> | <b>Lingkungan Hidup</b>  |        |                 |      |      |        |       |
| 2.2.5.1      | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)  | Persen | n.a             | n.a  | n.a  | 51,78  | 53,38 |
| 2.2.5.2      | Terlaksananya Pengelolaan sampah   | Persen | n.a             | n.a  | n.a  | 6,09   | 23,26 |
| 2.2.5.3      | Ketaatan penanggung jawab usaha / kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah            | Persen | n.a             | n.a  | n.a  | 100,00 | 59,06 |
| <b>2.2.6</b> | <b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>  |        |                 |      |      |        |       |
| 2.2.6.1      | Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk   | Persen | 1,29            | 1,22 | 0,93 | 97,64  | 98,87 |
| 2.2.6.2      | Rasio bayi berakta kelahiran   | Persen | 0,36            | 0,36 | 0,19 | 23,92  | 23,8  |



| No.          | Indikator Kinerja Daerah  | Satuan   | Capaian Kinerja |           |           |         |           |
|--------------|---|----------|-----------------|-----------|-----------|---------|-----------|
|              |   |          | 2016            | 2017      | 2018      | 2019    | 2020      |
| 1            | 2   | 3        | 4               | 5         | 6         | 7       | 8         |
| 2.2.6.3      | Jumlah pasangan berakta nikah   | pasangan | 1.038.345       | 1.023.159 | 1.040.827 | n.a     | 1.054.030 |
| 2.2.6.4      | Ketersediaan database kependudukan skala provinsi                                     | Buah     | Tdk ada         | Tdk ada   | Tdk ada   | Tdk ada | Tdk ada   |
| 2.2.6.5      | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK   | -        | Sudah           | Sudah     | Sudah     | Sudah   | Sudah     |
| 2.2.6.6      | Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)   | Persen   | 88,5            | 81        | 93        | 97,64   | 99,87     |
| 2.2.6.7      | Cakupan penerbitan akta kelahiran   | Persen   | 36,2            | 78,98 %   | 80,51 %   | 85,36 % | 83,86 %   |
| <b>2.2.7</b> | <b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>   |          |                 |           |           |         |           |
| 2.2.7.1      | Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik                      | Persen   | 16,26           | 61,89     | 40        | n.a     | n.a       |
| 2.2.7.2      | Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)                | Persen   | 28              | 28        | 28        | n.a     | n.a       |
| 2.2.7.3      | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK  | Persen   | 58              | 37        | 37        | n.a     | n.a       |
| 2.2.7.4      | Persentase LSM aktif  | Persen   | 100             | 100       | 100       | n.a     | n.a       |
| 2.2.7.5      | Persentase LPM Berprestasi  | Persen   | 28              | 28        | 20        | n.a     | n.a       |
| 2.2.7.6      | Persentase PKK Aktif  | Persen   | 100             | 100       | 100       | n.a     | n.a       |
| 2.2.7.7      | Persentase Posyandu Aktif   | Persen   | 100             | 100       | 100       | n.a     | n.a       |
| 2.2.7.8      | Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat                           | Persen   | 100             | 100       | 65        | n.a     | n.a       |
| 2.2.7.9      | Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat                                    | Persen   | 100             | 100       | 55        | n.a     | n.a       |
| <b>2.2.8</b> | <b>Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana</b>                                   |          |                 |           |           |         |           |
| 2.2.8.1      | Laju Pertumbuhan Penduduk   | Persen   | 0,79            | 0,77      | 1,19      | 1,19    | 0,94      |
| 2.2.8.2      | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate / MCPR) | Persen   | 73,53           | 73,70     | 74,73     | 74,99   | 75,90     |
| 2.2.8.3      | Persentase Kebutuhan ber - KB yang tidak terpenuhi (Unmet need)                       | Persen   | 15,50           | 13,81     | 14,74     | 25,01   | 13,30     |
| <b>2.2.9</b> | <b>Perhubungan</b>  |          |                 |           |           |         |           |
| 2.2.9.1      | Jumlah Terminal Type  | Unit     | 3               | 3         | 3         | 0       | 0         |



| No.           | Indikator Kinerja Daerah   | Satuan             | Capaian Kinerja |        |         |         |         |
|---------------|--|--------------------|-----------------|--------|---------|---------|---------|
|               |  |                    | 2016            | 2017   | 2018    | 2019    | 2020    |
| 1             | 2  | 3                  | 4               | 5      | 6       | 7       | 8       |
| 2.2.9.2       | Jumlah Sub Terminal  | Unit               | 3               | 3      | 3       | 3       | 3       |
| 2.2.9.3       | Jumlah Rambu Lalin   | Unit               | 273             | 390    | 171     | 55      | 150     |
| 2.2.9.4       | Jumlah Traffic Light   | Unit               | -               | -      | -       | -       | -       |
| 2.2.9.5       | Jumlah Warning Light   | Unit               | 2               | 6      | 6       | 0       | 0       |
| 2.2.9.6       | Jumlah Lampu PJU   | Unit               | 1.117           | 1.698  | 1.934   | 1770    | 4       |
| 2.2.9.7       | Panjang Pagar Pengaman   | Unit               | 97              | 140    | 170     | 220     | 173     |
| 2.2.9.8       | Shelter (Buah)   | Buah               | 4               | 2      | 4       | 4       | 4       |
| 2.2.9.9       | Jumlah Trayek Layanan  | Unit               | 48              | 48     | 48      | 48      | 48      |
| <b>2.2.10</b> | <b>Komunikasi dan Informatika</b>                                  |                    |                 |        |         |         |         |
| 2.2.10.1      | Cakupan Pengembangan dan Pmberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat | Persen             | 87,5            | 95     | 100     | n.a     | n.a     |
| 2.2.10.2      | Cakupan Layanan Telekomunikasi                                     | Persen             | 100             | 100    | 100     | n.a     | n.a     |
| <b>2.2.11</b> | <b>Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</b>                           |                    |                 |        |         |         |         |
| 2.2.11.1      | Jumlah Koperasi Aktif  | unit               | 721             | 749    | 754     | 756     | 784     |
| 2.2.11.2      | Persentase UKM non BPR/LKM Aktif                                   | Persen             | 3/3             | 3/5    | 3/6     | 3/8     | 3/9     |
| 2.2.11.2.1    | Jumlah LKM Aktif   | Unit               | 3               | 5      | 6       | 8       | 9       |
| 2.2.11.2.2    | Jumlah non BPR   | Unit               | 3               | 3      | 3       | 3       | 3       |
| 2.2.11.3      | Persentase BPR/LKM Aktif   | Persen             | 19/3            | 19/5   | 19/6    | 19/8    | 19/9    |
| 2.2.11.4      | Usaha Mikro dan Kecil  | Unit (mikro)       | 20.348          | 20.348 | 31.054  | 31.054  | 31.054  |
|               |  | Unit (mikro-kecil) | 25.118          | 25.118 | 35.824  | 35.824  | 35.824  |
|               |  | Persen             | 95,12           | 95,12  | 96,53   | 96,53   | 96,53   |
| <b>2.2.12</b> | <b>Penanaman Modal</b>   |                    |                 |        |         |         |         |
| 2.2.12.1      | Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)                       |                    | 533             | 538    | 542     | 373     | 237     |
| 2.2.12.2      | Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)                |                    | 698,24          | 846,16 | 2.007,5 | 1.704,9 | 1.313,2 |



| No.           | Indikator Kinerja Daerah   | Satuan            | Capaian Kinerja |        |        |        |        |
|---------------|--|-------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|
|               |  |                   | 2016            | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| 1             | 2  | 3                 | 4               | 5      | 6      | 7      | 8      |
| 2.2.12.3      | Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN                                | Milyar Rupiah     | 57,49           | 0,57   | 5      | -0,19  | -1,9   |
| <b>2.2.13</b> | <b>Kepemudaan dan Olahraga</b>   |                   |                 |        |        |        |        |
| <b>2.2.14</b> | <b>Statistik &amp; Persandian</b>                                      |                   |                 |        |        |        |        |
| 2.2.14.1      | Buku Kabupaten Cirebon dalam Angka                                     | Buah              | 1               | 1      | 1      | n.a    | n.a    |
| 2.2.14.2      | Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)                             | Buah              | 1               | 1      | 1      | n.a    | n.a    |
| <b>2.2.15</b> | <b>Perpustakaan</b>  |                   |                 |        |        |        |        |
| 2.2.15.1      | Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun                               | Persen            | 45,89           | 31,08  | 31,00  | 35,98  | 9,93   |
| 2.2.15.2      | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah                      | Persen            | 60,31           | 57,95  | 50,09  | 20,061 | 25,061 |
| 2.2.15.3      | Rasio perpustakaan per satuan penduduk                                 | Per 1000 penduduk | 0,036           | 0,039  | 0,041  | 0,898  | 0,90   |
| 2.2.15.4      | Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan tahun                         | pengunjung        | 27.566          | 27.572 | 24.092 | 37,239 | 7,492  |
| 2.2.15.5      | Jumlah koleksi judul buku perpustakaan                                 | buku              | 27.631          | 28.299 | 28.603 | 31,115 | 31,380 |
| 2.2.15.6      | Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat | orang             | 3               | 3      | 3      | 11     | 10     |
| <b>2.2.16</b> | <b>Kearsipan</b>   |                   |                 |        |        |        |        |
| 2.2.16.1      | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku           | Persen            | 32,88           | 20,55  | 30,3   | 45,20  | 13,70  |
| 2.2.16.2      | Peningkatan SDM pengelola kearsipan                                    | Kegiatan          | 4               | 2      | 3      | 2      | 1      |
| <b>3)</b>     | <b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>   |                   |                 |        |        |        |        |
| <b>3.1</b>    | <b>Kemampuan Ekonomi</b>   |                   |                 |        |        |        |        |
| 3.1.1         | PDRB ADHB Menurut Pengeluaran  | Trilyun rupiah    | 38,84           | 41,92  | 45,50  | 49,14  | 49,56  |
| 3.1.2         | PDRB ADHK Menurut Pengeluaran  | Trilyun rupiah    | 29,15           | 30,62  | 32,16  | 33,67  | 33.30  |
| 3.1.3         | Pengeluaran Per Kapita   | Juta rupiah       | 9.463           | 9.650  | 10.212 | 10.670 | 10.342 |
|               |  |                   |                 |        |        |        |        |





| No.        | Indikator Kinerja Daerah  | Satuan    | Capaian Kinerja |           |           |           |           |
|------------|---|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|            |   |           | 2016            | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      |
| 1          | 2   | 3         | 4               | 5         | 6         | 7         | 8         |
| <b>3.2</b> | <b>Kelautan dan Perikanan</b>   |           |                 |           |           |           |           |
| 3.2.1      | Tercapainya hasil perikanan tangkap (Ton)                             | Ton       | 29.214,10       | 31.212,67 | 33.645,65 | 36.056,91 | 34.134,34 |
| 3.2.2      | Tercapainya hasil perikanan budidaya (Ton)                            | Ton       | 42.622,99       | 45.050,32 | 45.607,19 | 48.410,22 | 41.157,93 |
| 3.2.3      | Terpenuhinya kebutuhan benih ikan air tawar berkualitas (Juta Ekor)   | Juta Ekor | 113,12          | 121,91    | 101,42    | 112,61    | 290,29    |
| 3.2.4      | Hasil garam rakyat (Ton)  | Ton       | 1.160           | 63.363    | 404.512   | 136.179   | 2.671     |
| 3.2.5      | Hasil Olahan dan pemasaran perikanan (Ton)                            | Ton       | 6.862,00        | 5.353     | 10.447,00 | 10.790,84 | 12.564,59 |
| 3.2.6      | Peningkatan konsumsi ikan masyarakat per kapita per tahun (Kg/kapita) | Kg/Kapita | 26,55           | 27        | 25,75     | 26,89     | 27,88     |
| <b>3.3</b> | <b>Pariwisata</b>   |           |                 |           |           |           |           |
| 3.3.1      | Jumlah Wisatawan Asing  | Orang     | 3.759           | 11.910    | 63.414    | 5.193     | 2.357     |
| 3.3.2      | Jumlah Wisatawan Domestik   | Orang     | 635.377         | 701.681   | 1.379.655 | 1.481.048 | 511.497   |
| <b>3.4</b> | <b>Pertanian</b>  |           |                 |           |           |           |           |
| 3.4.1      | Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB                  | Persen    | 696,63          | 11,68     | 11,42     | 10,72     | 10,87     |
| 3.4.2      | Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB                  | Persen    | 5,40            | 47,79     | 48,04     | 46,32     | 47,40     |
| 3.4.3      | Kontribusi sektor perkebunan (tanaman beras) terhadap PDRB            | Persen    | 11,62           | 12,72     | 12,27     | 12,25     | 11,67     |
| 3.4.4      | Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB                     | Persen    | 100             | 100       | 100       | 100       | 100       |
| 3.4.5      | Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar   | Kg/ha     | 65,79           | 54,38     | 63,80     | 64,03     | 64,19     |
| 3.4.6      | Cakupan bina kelompok tani  | Persen    | 16,37           | 38,08     | 16,32     | 23,93     | 42,36     |
| <b>3.5</b> | <b>Energi dan Sumberdaya Mineral</b>                                  |           |                 |           |           |           |           |
| 3.5.1      | Jumlah Pelanggan Listrik  | Pelanggan | 442.023         | 461.794   | 482.149   | 501.730   | 584.819   |
| <b>3.6</b> | <b>Perindustrian</b>  |           |                 |           |           |           |           |
| 3.6.1      | Kontribusi sektor industri terhadap PDRB                              | Persen    | 21.42           | 21.24     | 20.96     | 20.45     | 20.60     |
| 3.6.2      | Pertumbuhan Industri  | Persen    | 3.19            | 1.67      | 1.68      | 2.19      | 1.15      |



| No.          | Indikator Kinerja Daerah  | Satuan    | Capaian Kinerja |           |            |            |            |
|--------------|---|-----------|-----------------|-----------|------------|------------|------------|
|              |   |           | 2016            | 2017      | 2018       | 2019       | 2020       |
| 1            | 2   | 3         | 4               | 5         | 6          | 7          | 8          |
| 3.6.3        | Kontribusi Industri Rumah Tangga Terhadap PDRB Sektor Industri                    | Persen    | 92,95           | 101,61    | 110,21     | 114,85     | 117,46     |
| <b>3.7</b>   | <b>Perdagangan</b>  |           |                 |           |            |            |            |
| 3.7.1        | Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal                                     | Persen    | 4,7             | 1,7       | 6,1        | 5,47       | 5.88       |
| 3.7.2        | Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB                                       | Persen    | 16,3            | 15,8      | 15,8       | 15,4       | 14,5       |
| 3.7.3        | Ekspor bersih pedagang  | Rp (Juta) | 11.476.669      | 12,970386 | 14.472.046 | 15.930.746 | 16.503.417 |
| <b>3.8</b>   | <b>Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan</b>                                       |           |                 |           |            |            |            |
| <b>3.8.1</b> | <b>Perencanaan</b>  |           |                 |           |            |            |            |
| 3.8.1.1      | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA;         | buah      | 1               | 1         | 1          | 1          | 1          |
| 3.8.1.2      | Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA; | buah      | 1               | 1         | 1          | 1          | 1          |
| 3.8.1.3      | Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA;        | buah      | 1               | 1         | 1          | 1          | 1          |
| 3.8.1.4      | Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA;                      | buah      | 1               | 1         | 1          | 1          | 1          |
| 3.8.1.5      | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD;                                | program   | 212             | 212       | 212        | -          | -          |
| 3.8.1.6      | Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD; dan                             | program   | 212             | 212       | 212        | -          | -          |
| 3.8.1.7      | Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW.                                       | Persen    | 100             | 100       | 100        | 100        | 100        |
| <b>3.8.2</b> | <b>Keuangan</b>   |           |                 |           |            |            |            |
| 3.8.2.1      | Opini BPK terhadap laporan keuangan   | Opini     | WTP             | WTP       | WTP        | WTP        | WTP        |
| 3.8.2.2      | Persentase SILPA  | Persen    | 10,26%          | 7,53%     | 7,61%      | 7.19%      | 9.69%      |
| 3.8.2.3      | Persentase SILPA terhadap APBD  | Persen    | 10,26%          | 7,53%     | 7,61%      | 7.19%      | 9.69%      |
| 3.8.2.4      | Persentase program/kegiatan yang tidak  | Persen    | 0,50%           | 0,50%     | 0,50%      | n.a        | n.a        |



| No.          | Indikator Kinerja Daerah   | Satuan | Capaian Kinerja |             |             |             |             |
|--------------|--|--------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|              |  |        | 2016            | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        |
| 1            | 2  | 3      | 4               | 5           | 6           | 7           | 8           |
|              | terlaksana   |        |                 |             |             |             |             |
| 3.8.2.5      | Persentase belanja pendidikan (20%)  | Persen | 36%             | 35%         | 32%         | 32%         | 34%         |
| 3.8.2.6      | Persentase belanja kesehatan (10%)   | Persen | 11%             | 17%         | 19%         | 20%         | 23%         |
| 3.8.2.7      | Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung                                 | Persen | 72%             | 82%         | 72%         | 83%         | 61%         |
| 3.8.2.8      | Bagi hasil kabupaten/kota dan desa   | Persen | 0,49%           | 0,51%       | 0,55%       | 0,51%       | 0,73%       |
| 3.8.2.9      | Penetapan APBD   | Persen | Tepat Waktu     | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu |
|              |  |        |                 |             |             |             |             |
| <b>3.8.3</b> | <b>Pengawasan</b>  |        |                 |             |             |             |             |
| 3.8.3.1      | Prosentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. Cirebon                                | Persen | 65              | 73          | 60          | n.a         | n.a         |
| 3.8.3.2      | Prosentase Penanganan Kasus di Lingkungan Pemda (ASN) sebagai dasar pengambilan keputusan pimpinan | Persen | 50              | 100         | 37          | n.a         | n.a         |
| 3.8.3.3      | Prosentase Penyelesaian Temuan BPK   | Persen | 100             | 87          | 86          | n.a         | n.a         |

## **2.5. Evaluasi Capaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2019-2020**

Proses perencanaan harus dilakukan secara berkelanjutan dan tertata dengan baik. Proses ini berlangsung pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Hasil pembangunan yang disajikan dalam bentuk evaluasi pelaksanaan RPJMD merupakan informasi penting agar dapat menjadi pedoman pada proses perencanaan periode selanjutnya.

Pencapaian indikator kinerja tujuan dan sasaran mencerminkan capaian Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yaitu,

**“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Cirebon yang Agamis, Maju, Adil, Sinergi, dan Sejahtera”**

Melalui 5 (lima) Misi, 7 (tujuh) Tujuan, dan 16 (enam belas) Sasaran Pembangunan Daerah terdistribusi ke dalam 24 indikator Sasaran yang mengisi seluruh Misi. Tingkat capaian indikator pembangunan Kabupaten Cirebon adalah perbandingan antara realisasi terhadap target yang telah direncanakan pada dokumen RPJMD. Berdasarkan data kinerja, capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Cirebon akan dijabarkan pada tabel di bawah ini,



**Tabel 2.98**  
**Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten**  
**Cirebon Tahun 2019-2024**

| No.   | Tujuan/Sasaran                                   |  | Indikator Tujuan/Sasaran                              | Satuan  | Target |       | Realisasi |       | Capaian Kinerja tahun 2020 | Predikat      |
|---|--|--|---|---------|--------|-------|-----------|-------|----------------------------|---------------|
|   |  |  |   |         | 2019   | 2020  | 2019      | 2020  |                            |               |
| Misi 1: Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat                             |  |  |   |         |        |       |           |       |                            |               |
| 01.00   | Meningkatkan ketahanan budaya masyarakat Cirebon |  | Persentase penambahan budaya daerah yang dilestarikan | Persen  | 54     | 56    | 81        | 82    | 146,43                     | Sangat Tinggi |
|   | 01.00  | Meningkatnya jatidiri dan nilai-nilai luhur masyarakat Cirebon | Jumlah kelompok/komunitas kebudayaan yang aktif       | Jumlah  | 175    | 180   | 255       | 232   | 128,89                     | Sangat Tinggi |
| Misi 2: Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi |  |  |   |         |        |       |           |       |                            |               |
| 02.00   | Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas  |  | Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM)                   | Poin    | 69,61  | 69,23 | 68,69     | 68,75 | 99,31                      | Sangat Tinggi |
|   | 02.00  | Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat                     | Rata-rata Lama Sekolah(RLS)                           | Tahun   | 6,68   | 6,78  | 6,71      | 6,92  | 102,06                     | Sangat Tinggi |
|   |  |  | Harapan Lama Sekolah (HLS)                            | Tahun   | 12,37  | 12,52 | 12,24     | 12,25 | 97,84                      | Sangat Tinggi |
|   | 03.00  | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                      | Usia Harapan Hidup (UHH)                              | Poin    | 71,74  | 71,82 | 71,82     | 71,99 | 100,24                     | Sangat Tinggi |
| 03.00   | Mewujudkan Kesejahteraan Sosial                  |  | Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan         | Persen  | 10,2   | 9,7   | 9,94      | 11,24 | 84,12                      | Tinggi        |
|   |  |  | Tingkat pengangguran terbuka                          | Persen  | 9,81   | 9,11  | 10,35     | 11,52 | 73,55                      | Sedang        |
|   |  |  | PDRB Per Kapita                                       | Juta Rp | 22,16  | 22,82 | 22,4      | 22,42 | 98,25                      | Sangat Tinggi |



|       |   |   |        |       |       |       |       |        |               |
|-------|---|---|--------|-------|-------|-------|-------|--------|---------------|
| 04.00 | Menurunnya jumlah kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani di Kabupaten Cirebon | Persen | n/a   | n/a   | 67,06 | n.a.  | n/a    | n/a           |
| 05.00 | Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja                                | Rasio Kesempatan Kerja  | %      | 61,25 | 60,65 | 89,65 | 88,48 | 145,89 | Sangat Tinggi |

**Misi 3: Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika**

|       |  |  |        |     |     |     |     |     |     |
|-------|--|--|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 04.00 | Meningkatkan keshalehan sosial dalam kehidupan beragama                        | Indeks Kerukunan Umat Beragama                             | Poin   | 75  | 78  | 75  | n.a | n/a | n/a |
| 06.00 | Meningkatnya penyelesaian pergesekan (friksi) antar dan internal umat beragama | Prosentase Penyelesaian Friksi/Gesekan antar Umat Beragama | Persen | n/a | n/a | n/a | 78  | n/a | n/a |

**Misi 4: Meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah**

|       |   |  |                           |           |           |       |       |        |               |
|-------|---|--|---------------------------|-----------|-----------|-------|-------|--------|---------------|
| 05.00 | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan | Laju Pertumbuhan Ekonomi                                   | Prosen                    | 5,15-5,45 | 5,15-5,51 | 4,86  | -1,08 | -19,60 | Sangat Rendah |
|       |   | Indeks Gini  | Poin                      | 0,345     | 0,340     | 0,344 | 0,338 | 100,59 | Sangat Tinggi |
|       |   | Pengeluaran Perkapita Disesuaikan                          | Ribu Rupiah/Kapita /Tahun | n/a       | n/a       | ##### | ##### | n/a    | n/a           |
|       | 07.00   | Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | Prosen                    | 0,64-2,8  | 0,64-3,10 | -1,05 | 1,76  | 56,77  | Rendah        |
|       |   | Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan                | Prosen                    | 5,28-5,40 | 5,28-5,52 | 2,82  | -0,42 | -7,61  | Sangat Rendah |



|       |  |   |   |        |           |           |       |       |         |               |
|-------|--|---|---|--------|-----------|-----------|-------|-------|---------|---------------|
|       |  |   | Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | Prosen | 4,17-4,50 | 4,17-4,83 | 4,62  | -7,03 | -145,55 | Sangat Rendah |
|       |  |   | Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                          | Prosen | 5,10-5,73 | 5,10-6,36 | 5,47  | -9,5  | -149,37 | Sangat Rendah |
|       | 08.00  | Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat                        | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi   | Prosen | 88        | #####     | 89,2  | 90,00 | 101,24  | Sangat Tinggi |
|       |  |   | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan   | Poin   | 84,2      | 84,6      | 84,2  | 84,6  | 100,00  | Sangat Tinggi |
|       | 09.00  | Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah           | Indeks pembangunan infrastruktur wilayah yang mantap (baik)                           | Poin   | 77,99     | 78,73     | 77,99 | 79,89 | 101,47  | Sangat Tinggi |
|       | 10.00  | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup                          | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (IKLH)   | Poin   | 52,51     | 52,29     | 52,51 | 52,29 | 100,00  | Sangat Tinggi |
| 06.00 | Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan smart serta penguatan otonomi Desa |   | Indeks Reformasi Birokrasi  | Indeks | 50,58     | 55,00     | 50,58 | 55,00 | 100,00  | Sangat Tinggi |
|       | 11.00  | Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik | Indeks kepuasan masyarakat (IKM)  | Poin   | 3,25      | 3,55      | 3,25  | 3,27  | 92,11   | Sangat Tinggi |
|       |  |   | Indeks kemandirian fiskal daerah  | Prosen | 15,71     | 16,24     | 15,71 | 16,24 | 100,00  | Sangat Tinggi |
|       | 12.00  | Meningkatnya akuntabilitas                                      | Nilai SAKIP   | Poin   | 68        | 70        | 68    | 70    | 100,00  | Sangat Tinggi |





|       |  |  |   |      |      |      |      |      |        |               |
|-------|--|--|---|------|------|------|------|------|--------|---------------|
|       |  | penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih            | Opini BPK terhadap LKPD                               | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  | 100,00 | Sangat Tinggi |
|       |  |  | Indeks Monitoring Center for Prevention (MCP)         | Poin | 60   | 65   | 60   | 65   | 100,00 | Sangat Tinggi |
| 13.00 |  | Meningkatnya maturitas pemerintahan berbasis elektronik    | Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) | Poin | 2,63 | 2,78 | 2,63 | 2,78 | 100,00 | Sangat Tinggi |
| 14.00 |  | Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa | Jumlah desa mandiri                                   | Desa | 5    | 9    | 2    | 5    | 55,56  | Rendah        |

**Misi 5: Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional**

|       |       |   |                                    |        |       |       |       |       |        |               |
|-------|-------|---|------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|---------------|
| 07.00 |       | Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat | Indeks Ketertiban dan Ketenteraman | Persen | 45,17 | 53,05 | n.a   | 53,05 | 100,00 | Sangat Tinggi |
|       | 15.00 | Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban                      | Jumlah pelanggaran Perda           | Kasus  | n/a   | 650   | n.a   | 403   | 62,00  | Rendah        |
|       | 16.00 | Menurunnya resiko bencana                                     | Indek resiko bencana               | Poin   | 165,4 | 160,1 | 165,4 | n.a   | n/a    | n/a           |

Sumber: diolah oleh Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, 2021

## 2.6. Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara. Dengan Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.

Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak. SPM

ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri atas:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. Kebutuhan Dasar Warga Negara dalam SPM adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Dengan mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.

Evaluasi Pencapaian SPM Tahun 2017-2018 ini terdiri dari pencapaian SPM Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman, Urusan Ketenteraman dan Ketertiban dan Urusan Sosial.

### A. SPM Bidang Urusan Pendidikan

Penerapan SPM Bidang Pendidikan dasar dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

Untuk mewujudkan target tersebut diatas perlu adanya pengukuran kinerja pelayanan yang biasa disebut Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pengukuran kinerja adalah proses di mana organisasi menetapkan parameter hasil yang harus dicapai dalam penerapan SPM Pendidikan Dasar. Proses pengukuran kinerja seringkali membutuhkan penggunaan bukti statistik untuk menentukan tingkat kemajuan suatu organisasi dalam meraih tujuannya. Tujuan mendasar di balik dilakukannya pengukuran kinerja ini adalah untuk meletakkan SPM sebagai fondasi dalam menentukan kebijakan sehingga penerapan SPM dapat secara penuh dikawal untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat.

Kegunaan pengukuran kinerja SPM setidaknya bisa dijadikan alat evaluasi, pengendalian, alat informasi sejauhmana tingkat keberhasilan serta sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dimasa-masa mendatang. Berikut dapat dilihat tingkat pelayanan atau nilai SPM pada jenjang pendidikan SD, SMP Negeri dan SMP Swasta.

**Tabel 2.99**

#### **Pencapaian Indikator SPM Urusan Pendidikan**

| No. | Indikator SPM  | 2017 |      | 2018 |      | 2019 |      | 2020 |      |
|-----|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |  | SD   | SMP  | SD   | SMP  | SD   | SMP  | SD   | SMP  |
| 1.  | Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD dan 6 km untuk SMP dari kelompok permukiman | 100% | 114% | 100% | 114% | 100% | 117% | 100% | 117% |



| No. | Indikator SPM  | 2017 |      | 2018 |      | 2019 |      | 2020 |      |
|-----|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |  | SD   | SMP  | SD   | SMP  | SD   | SMP  | SD   | SMP  |
|     | permanen di daerah terpencil.  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2.  | Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis. | 84%  | 88%  | 52%  | 87%  | 67   | 56%  | 72%  | 89%  |
| 3.  | Disetiap SMP/MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.  | -    | 89%  | -    | 90%  | -    | 47%  | -    | 47%  |
| 4.  | Di setiap SD dan SMP tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.  | 100% | 96%  | 100% | 119% | 102% | 95%  | 98%  | 97%  |
| 5.  | Di setiap SD tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan.   | 76%  | -    | 86%  | -    | 81%  | -    | 82%  | -    |
| 6.  | Di setiap SMP tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran.   | -    | 100% | -    | 100% | -    | 100% | -    | 100% |
| 7.  | Di setiap SD tersedia 2  | 100% | -    | 100% | -    | 100% | -    | 100% | -    |



| No. | Indikator SPM   | 2017 |      | 2018 |      | 2019 |      | 2020 |      |
|-----|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |   | SD   | SMP  | SD   | SMP  | SD   | SMP  | SD   | SMP  |
|     | (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 8.  | Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV   | 70%  | 70%  | 70%  | 91%  | -    | 76%  | -    | 75%  |
| 9.  | Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. | -    | 69%  | -    | -    | -    | 56%  | -    | 50   |
| 10. | Di setiap kabupaten Cirebon semua kepala SD berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.   | 100% | -    | 100% | -    | 100% | -    | 100% | -    |
| 11. | Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik  | -    | 100% | -    | 100% | -    | 99%  | -    | 100% |
| 12. | Di setiap Kabupaten semua pengawas sekolah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 13. | Pemerintah Kabupaten memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 86%  | 100% | 100% |
| 14. | Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.   | 96%  | 100% | 105% | 100% | 92%  | 89%  | 87%  | 92%  |

| No. | Indikator SPM  | 2017 |      | 2018 |     | 2019 |      | 2020 |      |
|-----|--|------|------|------|-----|------|------|------|------|
|     |  | SD   | SMP  | SD   | SMP | SD   | SMP  | SD   | SMP  |
| 15. | Setiap SD menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.                             | 77%  | -    | 66%  | -   | 100% | -    | 97%  | -    |
| 16. | Setiap SMP menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.   | -    | 20%  | -    | 55% | -    | 100% | -    | 79%  |
| 17. | Setiap SD menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA.                   | 98%  | -    | 114% | -   | 84%  | -    | 80%  | -    |
| 18. | Setiap SD memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi.   | 70%  | -    | 79%  | 77% | 62%  | 56%  | 72%  | 65%  |
| 19. | Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan. | 77%  | 67%  | 69%  | 61% | 86%  | 48%  | 81%  | 45%  |
| 20. | Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun.   | 100% | -    | 105% | 64% | 103% | 124% | 100% | 130% |
| 21. | Setiap Satuan Pendidikan menerapkan Kurikulum  | 100% | 100% | 100% | 93% | 100% | 100% | 58%  | 100% |



| No. | Indikator SPM   | 2017 |      | 2018 |      | 2019 |      | 2020 |      |
|-----|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |   | SD   | SMP  | SD   | SMP  | SD   | SMP  | SD   | SMP  |
|     | sesuai ketentuan yang berlaku.  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 22. | Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya.  | 100% | 100% | 100% | 96%  | 100% | 43%  | 99%  | 35%  |
| 23. | Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik.   | 100% | 100% | 98%  | 98%  | 98%  | 96%  | 99%  | 97%  |
| 24. | Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester.   | 99%  | 100% | 112% | 73%  | 106% | 86%  | 98%  | 88%  |
| 25. | Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik.  | 41%  | 95%  | 43%  | 94%  | 35%  | 93%  | 99%  | 94%  |
| 26. | Kepala Sekolah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon pada setiap akhir semester. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 27. | Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).   | 100% | 100% | 99%  | 98%  | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sumber: Dinas Pendidikan Kab.Cirebon, Tahun 2018

## B. SPM Bidang Urusan Kesehatan



Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak di peroleh setiap warga negara secara minimal. Tabel dibawah adalah jenis layanan dan pencapaian SPM Urusan Kesehatan, berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yaitu:

**Tabel 2.100****Pencapaian Indikator SPM Urusan Kesehatan Tahun 2017 – 2020**

| No. | Jenis Layanan Dasar                            | Mutu Layanan Dasar                                       | Penerima Layanan Dasar                        | Pernyataan Standar   | Pencapaian Th 2017 | Pencapaian Th 2018 | Pencapaian Th 2019 | Pencapaian Th 2020 |
|-----|--|--|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1.  | Pelayanan kesehatan ibu hamil                  | Sesuai standar pelayanan antenatal.                      | Ibu hamil.                                    | Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.                                   | 94,9 %             | 100,4 %            | 96,7%              | 98,24              |
| 2.  | Pelayanan kesehatan ibu bersalin               | Sesuai standar pelayanan persalinan.                     | Ibu bersalin.                                 | Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.                               | 93,6 %             | 101,1 %            | 96%                | 98,65 %            |
| 3.  | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir            | Sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir.      | Bayi baru lahir.                              | Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.                             | 102,88%            | 98,93 %            | 104,9 %            | 98,03 %            |
| 4.  | Pelayanan kesehatan balita                     | Sesuai standar pelayanan kesehatan balita.               | Balita.                                       | Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.                                      | 97,2 %             | 102,3 %            | 100,9 %            | 87,19 %            |
| 5.  | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar. | Anak pada usia pendidikan dasar.              | Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.              | 87,45%             | 88,44 %            | 87,27 %            | 71,43 %            |
| 6.  | Pelayanan kesehatan pada usia produktif        | Sesuai standar skrining kesehatan usia produktif.        | Warga Negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun. | Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. | 1,6%               | 4,82%              | 52,60 %            | 14,60 %            |
| 7.  | Pelayanan kesehatan pada usia                  | Sesuai standar skrining kesehatan usia                   | Warga Negara Indonesia                        | Setiap warga negara Indonesia usia   | 11,69%             | 41,67 %            | 9,67%              | 72,42 %            |

| No. | Jenis Layanan Dasar                                    | Mutu Layanan Dasar   | Penerima Layanan Dasar  | Pernyataan Standar  | Pencapaian Th 2017 | Pencapaian Th 2018 | Pencapaian Th 2019 | Pencapaian Th 2020 |
|-----|--|--|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     | lanjut   | lanjut.  | usia 60 tahun ke atas.  | 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.   |                    |                    |                    |                    |
| 8.  | Pelayanan kesehatan penderita hipertensi               | Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi.       | Penderita hipertensi .  | Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.   | 33,4 %             | 21,29 %            | 17,65 %            | 27,08 %            |
| 9.  | Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus         | Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus. | Penderita Diabetes Melitus.   | Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.   | 33,1               | 16,11 %            | 159,7 %            | 78,94 %            |
| 10. | Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat   | Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa.                       | Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat.  | Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.  | 100 %              | 100%               | 100%               | 43,48 %            |
| 11. | Pelayanan kesehatan orang dengan TB                    | Sesuai standar pelayanan kesehatan TB.                         | Orang dengan TB.  | Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar.   | 100 %              | 100%               | 54,43 %            | 32,17 %            |
| 12. | Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV | Sesuai standar mendapatkan pemeriksaan HIV.                    | Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan). | Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar. | 39,7 %             | 59,43 %            | 61,99 %            | 62,31 %            |

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Cirebon, Tahun 2018

### C. SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

melaksanakan 4 Sub Bidang SPM dan 4 Pelayanan Dasar SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sasaran indikator yang dilaksanakan sampai dengan tahun 2019 yang meliputi:

**Tabel 2.101**

**Pencapaian Indikator SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018**

| No | Sub. Bidang                 | Jenis Pelayanan Dasar                                | Sasaran   | Indikator   | Satuan | Realisasi |         |      |      |
|----|-----------------------------|--|---|---|--------|-----------|---------|------|------|
|    |                             |  |   |   |        | 2017      | 2018    | 2019 | 2020 |
| 1. | Sub. Bidang Sumber Daya Air | Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat       | Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat | Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya                          | %      | 96%       | 122,44% |      |      |
| 2. | Sub Bidang Jalan            | Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat | Meningkatnya kualitas layanan jalan Kab/Kota  | persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang.  | %      | 131,76%   | 81,40%  |      |      |
|    |                             |  | Tersedianya konektivitas wilayah Kab/ Kota  | persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/ kota  | %      | 99,85%    | 100%    |      |      |
| 3. | Sub Bidang Jasa Kontruksi   | Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi        | Meningkatnya ketersediaan informasi jasa konstruksi                                 | persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) | %      | -         | 100%    |      |      |
| 4. | Sub Bidang Penataan Ruang   | Informasi Penataan Ruang                             | Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang                                  | persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta  | %      | 0%        | 4%      |      |      |

| No | Sub. Bidang | Jenis Pelayanan Dasar | Sasaran | Indikator | Satuan | Realisasi |      |      |      |
|----|-------------|-----------------------|---------|-----------|--------|-----------|------|------|------|
|    |             |                       |         |           |        | 2017      | 2018 | 2019 | 2020 |
|    |             |                       |         | digital   |        |           |      |      |      |

Sumber: Dinas PUPR Kab.Cirebon, Tahun 2018

#### D. SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Untuk Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dengan jenis pelayanan dasar:

1. Rumah layak huni dan terjangkau;
2. Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU).

Dari 5 Jenis pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tersebut dijabarkan dalam 15 (lima belas) indikator SPM daerah kabupaten/kota dan 2 (dua) indikator SPM Perumahan Rakyat yang akan dicapai sampai dengan tahun 2019, dari indikator SPM Pekerjaan Umum tersebut, hanya 5 (lima) Indikator SPM yang menjadi tugas dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, sebagai berikut:

1. Penyediaan air minum dengan indikator persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman;
2. Penyediaan sanitasi dengan indikator persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai;
3. Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan indikator persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan.

Dan dari 2 (dua) jenis pelayanan dasar SPM Perumahan Rakyat dengan indikator SPM Perumahan Rakyat yang menjadi tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai berikut:

1. Rumah layak huni dan terjangkau, dengan indikator:
  - a. Cakupan ketersediaan rumah layak huni;

- b. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau.
2. Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU), dengan indikator: lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU).

**Tabel 2.102**  
**Pencapaian Indikator SPM Urusan Perumahan Rakyat**  
**Tahun 2018**

| No. | Sub Bidang       | Jenis Pelayanan Dasar            | Sasaran  | Indikator   | Satuan     | Realisasi 2017 | Realisasi 2018 | Realisasi 2019 | Realisasi 2020 |
|-----|------------------|----------------------------------|--|---|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.  | Cipta Karya      | Penyediaan air minum             | Meningkatnya kualitas layanan air minum permukiman perkotaan                               | persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman    | % Penduduk | 74,81          | 74,84          | 67,87          | 65,07          |
|     |                  | Penyediaan sanitasi              | Meningkatnya kualitas sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) permukiman perkotaan | persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai | % Penduduk | 83,37          | 82,39          | 78,24          | 74,86          |
|     |                  | Penataan Bangunan dan Lingkungan | Meningkatnya tertib pembangunan bangunan gedung  | persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan | imb        | -              | -              | 0              | 2113           |
| 2.  | Perumahan Rakyat | Rumah layak huni dan terjangkau  | Meningkatnya cakupan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau                          | Cakupan ketersediaan rumah layak huni                             | %          | 96,16          | 96,50          | 97,02          | 63,86          |
|     |                  |                                  |  | Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau                  | %          | -              | -              | 97,02          | 63,86          |
|     |                  | Lingkungan                       | Meningkatnya   | Cakupan   | %          | -              | -              | 74,81          | 74,84          |

| No. | Sub Bidang | Jenis Pelayanan Dasar  | Sasaran   | Indikator   | Satuan | Realisasi 2017 | Realisasi 2018 | Realisasi 2019 | Realisasi 2020 |
|-----|------------|--|---|---|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     |            | Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) | lingkungan yang sehat serta didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) | Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU |        |                |                |                |                |

Sumber: Dinas Kimrum, Kab.Cirebon, Tahun 2018

#### D. SPM Bidang Urusan Ketenteraman Ketertiban

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa pelayanan dasar urusan ketenteraman dan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat kabupaten/kota terdiri dari:

1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Pelayanan informasi rawan bencana;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

##### D.1. Kantor Satpol PP

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 50 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Wajib Bidang Tertentu Pada Pemerintah Kabupaten Cirebon, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon wajib melaksanakan pelayanan dasar, sebagai mana tabel berikut:

**Tabel 2.103**

**Pencapaian Indikator SPM Urusan Ketertiban Umum  
(Kantor Satpol PP) Tahun 2017-2020**

| No. | Jenis Pelayanan Dasar                               | Indikator SPM  | Realisasi 2017 | Realisasi 2018 | Realisasi 2019 | Realisasi 2020 |
|-----|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1   | 2   | 3  | 4              | 5              |                |                |
| 1.  | Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat | Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) di Kabupaten | 70%            | 99.30%         |                |                |
|     |   | Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten                          | 50%            | 100%           |                |                |

Sumber: Kantor Satpol PP Kab.Cirebon, Tahun 2018

## D.2. Dinas Pemadam Kebakaran

Dalam melaksanakan pelayanan dasar Penanggulangan Bahaya Kebakaran di dasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung pasal 5 ayat (4) Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan tingkat risiko kebakaran meliputi bangunan gedung tingkat risiko kebakaran tinggi, tingkat risiko kebakaran sedang, dan tingkat risiko kebakaran rendah. Hal ini bertujuan untuk upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Cirebon Nomor 3 tahun 1997 Pasal 2 menyebutkan bahwa setiap orang wajib melaksanakan usaha pencegahan bahaya kebaran dan pasal 37 ayat (2) menyebutkan bahawa setiap orang yang berada di daerah kebakaran wajib ikut serta secara aktif melaksanakan pemadaman kebakaran, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum.

Untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran perlu dihindari hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran seperti tidak meninggalkan kompor yang menyala, tidak menggunakan sumber listrik dengan beban yang berat, tidak meletakkan bahan yang mudah terbakar di dekat api, memeriksa kabel listrik yang terkelupas dan mengganti dengan yang baru, memeriksa secara rutin pipa gas, dan menyediakan media pemadam kebakaran seperti pasir, tandon air, dan alat pemadam kebakaran sesuai dengan tipe kebakaran.



**Tabel 2.104**  
**Pencapaian Indikator SPM Urusan Ketertiban Umum**  
**(Pemadam Kebakaran) Tahun 2017-2020**

| No. | Jenis Pelayanan                 | Indikator SPM  | Realisasi 2017 | Realisasi 2018 | Realisasi 2019    | Realisasi 2020    |
|-----|---------------------------------|--|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 1   | 2                               | 3  |                | 4              |                   |                   |
| 1.  | Penanggulangan Bahaya Kebakaran | Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten (pos jaga).             | 100%           | 69,2%          | 86,20%            | 74,55%            |
|     |                                 | Tingkat waktu tanggap (response time rate).                              | 100%           | 97,06 %        | 97,08%            | 98%               |
|     |                                 | Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi. | 100%           | 23,8%          | Tidak menjadi SPM | Tidak menjadi SPM |
|     |                                 | Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000–5000 liter yang laik pakai.  | 100%           | 88,9%          | Tidak menjadi SPM | Tidak menjadi SPM |

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran, Kab.Cirebon, Tahun 2018

#### **E. SPM Bidang Urusan Sosial**

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota pada Lampiran II khususnya untuk Kabupaten/Kota tercantum Pembiayaan Pemenuhan Pelayanan Sumber Daya Manusia, Sarana Dan Prasarana SPM Bidang Sosial. Adapun indikator dari Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial Di Daerah Kabupaten/ Kota adalah sebagai berikut:

1. Prosentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti;
2. Prosentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti;
3. Prosentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti;

4. Prosentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti;
5. Prosentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/ Kota.

**Tabel 2.105****Pencapaian Indikator SPM Urusan Sosial Tahun 2017-2020**

| No. | Jenis Pelayanan Dasar dan Sub Kegiatan  | Indikator SPM   | Realisasi 2020 |
|-----|---|---|----------------|
| 1   | 2   | 3   |                |
| 1.  | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti      | Prosentase Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti      | 9,82%          |
| 2.  | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti                        | Prosentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti                               | 21,46%         |
| 3.  | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti                 | Prosentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti                        | 2,56%          |
| 4.  | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di luar panti              | Prosentase Gelandangan dan Pengemis Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti           | 54,54%         |
| 5.  | Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana | Prosentase Korban Bencana Alam dan Sosial di daerah Kabupaten Cirebon yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | 100%           |

Sumber: Dinas Sosial, Kab.Cirebon, Tahun 2021

**2.7. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)**

Pemerintah Kabupaten Cirebon memiliki 2 (dua) BUMD yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Cirebon.

**1. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Cirebon**

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Cirebon adalah Bank milik Pemerintah Kabupaten Cirebon yang masuk kategori BUMD merupakan penyempurnaan dari Bank Karya Produksi Desa (BKPD). Berdasarkan Keputusan Mendagri dan Otda Nomor 44 Tahun 2000, PD BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah yang

modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam prakteknya BPR mempunyai tugas mengembangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan daerah melalui kegiatannya sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di Kabupaten Cirebon sendiri terdapat 19 PD BPR yang terdiri dari 7 PD BPR milik Pemkab Cirebon dan milik Pemprov Jabar sebanyak 12 PD BPR.

**Tabel 2.106****Uraian Kondisi Modal, Kredit, Tabungan, Deposito, Aset dan Laba PD.  
BPRD di Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2017**

| No. | Uraian                          | 2016      | 2017      |
|-----|---------------------------------|-----------|-----------|
| 1.  | Modal disetor (Rp Juta)         | 42.769,67 | 43.769,67 |
| 2.  | Perkembangan kredit (Rp Milyar) | 373,39    | 412,79    |
| 3.  | Tabungan (Rp Milyar)            | 276,38    | 292,34    |
| 4.  | Deposito (Rp Milyar)            | 155,96    | 162,66    |
| 5.  | Aset (Rp Milyar)                | 571,58    | 712,73    |
| 6.  | Laba (Rp Milyar)                | 12,45     | 16,20     |

Sumber: Laporan Pembinaan PD.BPR Kab. Cirebon Tahun 2013-2017,  
Bag. Perekonomian Setda Kab. Cirebon

**2. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Cirebon**

PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon terdiri dari 8 (delapan) cabang yaitu Cabang Arjawinangun, Gegesik, Suranenggala, Sumber, Beber, Palimanan, Kapetakan dan Losari dengan 37.813 jumlah pelanggan pada tahun 2018. Sumber air PDAM berasal dari mata air, air permukaan/sungai, sumur dalam dan kerjasama dengan PDAM lain.

**Tabel 2.107****Kinerja PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2018**

| No. | Uraian                 | 2016       | 2017       | 2018       |
|-----|------------------------|------------|------------|------------|
| 1.  | Kapasitas              | 15.357.816 | 15.712.760 | 15.864.741 |
| 2.  | Produksi (m3)          | 10.331.014 | 9.112.506  | 14.422.699 |
| 3.  | Distribusi (m3)        | 8.552.083  | 9.593.357  | 9.488.705  |
| 4.  | Penjualan (m3)         | 6.374.916  | 6.705.217  | 7.054.407  |
| 5.  | Kehilangan (m3)        | 2.117.167  | 2.888.140  | 2.588.480  |
| 6.  | Sambungan Langgan (SL) | 34.448     | 35.921     | 37.813     |
| 7.  | Pelayanan (Jiwa)       | 282.226    | 295.352    | 301.175    |
| 8.  | Investasi (Rp Ribu)    | 25.500.674 | 7.576.806  | 3.755.628  |
| 9.  | Pendapatan (Rp Ribu)   | 49.863.812 | 52.939.871 | 55.545.963 |
| 10. | Beban Langsung         | 24.301.604 | 27.768.395 | 28.384.917 |

| No. | Uraian                | 2016       | 2017       | 2018       |
|-----|-----------------------|------------|------------|------------|
|     | (Rp Ribu)             |            |            |            |
| 11. | Beban Usaha (Rp Ribu) | 24.915.131 | 25.668.208 | 28.384.917 |
| 12. | Laba Kotor (Rp Ribu)  | 25.582.207 | 25.171.475 | 26.115.158 |

Sumber: PDAM Tirta Jati, Tahun 2016-2018

Kapasitas air terpasang dari tahun 2016-2018 mengalami kenaikan dari 15.357.816 m<sup>3</sup> menjadi 15.864.741 m<sup>3</sup>. Kenaikan ini salah satunya disebabkan berhasilnya penyelesaian konflik sumber air di Cikalahang. Adapun untuk distribusi air dari tahun 2014-2018 mengalami kenaikan dari 8.369.278 m<sup>3</sup> menjadi 9.488.705 m<sup>3</sup>. Distribusi ini sebenarnya lebih rendah dari kapasitas produk karena ada beberapa masalah seperti adanya air laut pasang ke sungai karena bendung karet bermasalah, sehingga sistem pengolahan air di WTP pun sering tidak beroperasi.

## 2.8. **Corporate Social Responsibility (CSR)**

Pendanaan pembangunan yang diperoleh dari sumber lainnya merupakan upaya pemerintah dalam menggalang kepedulian yang merupakan tanggung jawab social perusahaan atau yang lebih dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Tanggung jawab sosial perusahaan/CSR merupakan salah satu bagian dari strategi perusahaan dalam jangka panjang. Tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan produk dan tenaga kerja, yang tidak hanya terbatas pada konsep pemberian bantuan dana kepada lingkungan sosial.

CSR merupakan perkembangan proses untuk mengevaluasi stakeholders dan tuntutan lingkungan serta implementasi program-program untuk menangani isu-isu sosial. Tanggung jawab sosial berkaitan dengan kode-kode etik, sumbangan perusahaan program-program *community*

*relations* dan tindakan mematuhi hukum. *Corporate Social Responsibility*/Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) merupakan suatu komitmen perusahaan untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama dengan para pihak yang terkait, utamanya masyarakat disekelilingnya dan lingkungan sosial dimana perusahaan tersebut berada, yang dilakukan terpadu dengan kegiatan usahanya secara berkelanjutan.

Perlunya tanggung jawab sosial perusahaan bagi perusahaan dan masyarakat yang saling menguntungkan antara lain terciptanya lingkungan sosial yang lebih baik, lingkungan sosial akan mendukung keberhasilan bisnis untuk waktu yang panjang, semakin baik lingkungan sosial dengan sendirinya akan ikut memperbaiki iklim bisnis yang ada. Misalnya dengan semakin menurunnya tingkat pengangguran sedangkan keuntungan jangka panjang, dengan tanggung jawab dan keterlibatan sosial tercipta suatu citra positif di mata masyarakat, karena terciptanya iklim sosial politik yang kondusif bagi keberlangsungan bisnis perusahaan tersebut.

Kegiatan CSR dalam membantu pembangunan daerah dikoordinasikan agar terarah dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat yang diwujudkan perusahaan melalui berbagai bentuk kegiatan mulai dari kegiatan yang bersifat insidental seperti seperti pemberian bantuan untuk korban bencana, sumbangan, serta bentuk filantropi lainnya. Bentuk CSR yang paling baik sebenarnya yang berkelanjutan, yang bertujuan membantu masyarakat serta mendukung program pemerintah demi mensejahterahkan lingkungan sekitar. Berikut data pelaksanaan CSR di Kabupaten Cirebon:

Jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Cirebon menurut data dari kurang lebih 195 Perusahaan (Data DPMPSTP dan Disdagin Kabupaten Cirebon) dengan jumlah mitra yang menyelenggarakan TJSL dan PKBL sebanyak 59 diantaranya sebanyak 33 Mitra Perusahaan, 8 Mitra Perbankan, 12 Mitra BUMN, 2 Mitra BUMB dan 4 Mitra Akademisi, Hotel dan Rumah Sakit.

Jumlah Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan/ BUMN/ BUMD Kabupaten Cirebon Tahun 2018 dan Tahun 2019 :

1. Jumlah Perusahaan/BUMN/BUMD yang masuk dalam keanggotaan Forum CSR di Kabupaten Cirebon sebanyak 60 perusahaan dari total 195 perusahaan (PT.)
2. Jumlah Perusahaan/BUMN/BUMD yang telah menyampaikan laporan CSR Tahun 2018 kepada Bappelitbangda adalah sebanyak 15 perusahaan dengan tidak mencantumkan jumlah dana yang telah dikeluarkan untuk kegiatan CSR di Kabupaten Cirebon.
3. Jumlah Perusahaan/BUMN/BUMD yang telah menyampaikan laporan CSR Tahun 2019 kepada Bappelitbangda adalah sebanyak 25 perusahaan dengan jumlah total dana untuk kegiatan CSR di Kabupaten Cirebon sebesar Rp. 5.042.662.600,- (lima miliar empat puluh dua juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah), sebagaimana tertuang dalam lampiran nota kesepakatan bersama nomor 407/NK.19/Bappelitbangda/2019 antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Forum CSR Kabupaten Cirebon.

## **2.9. Kerjasama Daerah**

### **A. Kerjasama Antar Daerah**

- 1) Perjanjian Kerjasama RSUD Arjawinangun dengan RSUD Pantura M.A. Sentot Nomor 445/MoU.56/RSUDAWN/2018 untuk Pelayanan Rujukan Pemeriksaan MRI, CT-Scan;
- 2) Perjanjian Kerjasama RSUD Arjawinangun dengan RSUD 45 Kuningan Nomor 445/MoU.60/RSUDAWN/2018 untuk Pelayanan Rujukan Pemeriksaan MRI, CT-Scan;
- 3) Perjanjian Kerjasama RSUD Arjawinangun dengan RSUD Gunung Jati Kota Cirebon Nomor 445/MoU.38/RSUDAWN/2018 untuk Pelaksanaan sistem Rujukan Pasien;
- 4) Perjanjian Kerjasama RSUD Waled dengan RSUD 45 Kuningan Nomor 445/034/RSU/2018 untuk pemenuhan SDM spesialisik Dokter Spesialis Paru;

- 5) Perjanjian Kerjasama RSUD Waled dengan RSUD Gunungjati Kota Cirebon Nomor 445/028/RSU/2018 untuk pemenuhan SDM spesialisistik dan sub spesialisistik;
- 6) Peraturan Bersama Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Majalengka dengan Nomor 521.1/PB.5-PSDA/2009 tentang Tata Pengaturan Air dan Jadwal Pengeringan di Daerah Irigasi Rentang yaitu dalam rangka memanfaatkan air irigasi secara efektif dan efisien berdasarkan pertimbangan atas ketersediaan debit air di saluran induk;
- 7) Kesepakatan bersama tata giliran air antara masyarakat pemakai air wilayah UPT PSDA Tamben Jatibarang Kabupaten Indramayu dan UPT PSDA Kumpulkwista Kabupaten Cirebon dalam bentuk Berita Acara Kesepakatan Giliran Air pada tanggal 25 Juni 2012 yaitu dalam rangka pertimbangan pemerataan pemberian air kebutuhan irigasi;
- 8) Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Pemerintah Kabupaten Kuningan Tentang Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Air Nomor 04 Tahun 2007 dengan jangka waktu 25 tahun bagi Tersedianya sumber air bersih untuk didistribusikan di Kabupaten Cirebon melalui PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon;
- 9) Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Cirebon dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon Nomor 974/Perj.KB.5A-/DKP/2012 dalam rangka Terkelolanya penanganan sampah di wilayah perbatasan Kabupaten dan Kota Cirebon;
- 10) Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon Nomor: No. 471.2/MoU-05.a/VI/2016, Nomor 8 a Tahun 2016, Hasil dari Kerjasama ini adalah terpenuhinya bahan baku rotan sesuai dengan kualitas serta kuantitas yang dibutuhkan;
- 11) Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Propinsi Sulawesi Barat dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon Nomor: No. 21.a Tahun 2017, Hasil dari Kerjasama ini adalah meningkatnya ketersedianya bahan baku rotan guna memenuhi kebutuhan Industri Rotan di Kabupaten



Cirebon;

- 12) Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Sintang Propinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon Nomor: 530/23.a/Disperdagin/2018, Hasil dari Kerjasama ini adalah meningkatnya ketersedianya bahan baku rotan guna memenuhi kebutuhan Industri Rotan di Kabupaten Cirebon;
- 13) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kuningan dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon, Nomor: 519/1048/UML dan 510.3/1404/Bid.ML tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera, Tera Ulang Dan Pengawasan Metrologi Legal;
- 14) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Indramayu dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon, Nomor: 510.3/1095.a-Perdag dan 510.3/1495.1/Bid.ML tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera, Tera Ulang;
- 15) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon, Nomor: 510.3/487/Perdagangan dan 510.3/1495/Bid.ML tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal;
- 16) Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigran dengan jangka waktu selama 5 tahun sesuai lokasi penempatan Transimigran dalam rangka pemerataan peyebaran penduduk, Kesempatan untuk bekerja berusaha bidang Pertanian / Nelayan dan menjamin lokasi penempatan bagi transmigran asal Kabupaten Cirebon berupa Lahan Pekarangan dan Lahan Usaha;
- 17) Keputusan Bersama Gubernur Jawa Barat, gubernur Jawa Tengah, Bupati Kuningan, Bupati Cirebon, Walikota Cirebon, Bupati Ciamis, Bupati Cilacap, Walikota Banjar, Bupati Brebes dan Bupati Majalengka Tentang Pembentukan Badan Kerjasama Antar Daerah Perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah, Kuningan, Cirebon, Ciamis, Cilacap, Majalengka, Brebes dan Banjar Nomor 7 A Tahun 2012 dalam rangka Meningkatnya

pelayanan publik bagi masyarakat di perbatasan wilayah kota dan kabupaten yang tergabung dalam badan kerjasama antar daerah.

## **B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga**

1. Perjanjian Kerjasama PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon Nomor 028/AGR-IPP/Crb/IV/2017 yaitu disepakatinya kerja sama yang dilakukan antara Dinas Kesehatan dan PT. Indocement melalui Puskesmas Winong, Gempol dan Ciwaringin untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada para pekerja PT. Indocement dan masyarakat di enam desa binaan yang ada di sekitar perusahaan;
2. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan PT. BPJS Kesehatan Cabang Cirebon, Nomor:445/16/RSUDAWN/2017 Tahun 2017, tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan;
3. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan PT. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cirebon, Nomor:445/MoU.51/RSUDAWN/2018, tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan;
4. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, Nomor:445/MoU.26/RSUDAWN/2017, tentang Pelayanan Kesehatan dan Obat bagi Peserta Asuransi Kesehatan;
5. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Unit Transfusi Darah PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN CIREBON, Nomor: 031/UTD-PMI/III/2016, tentang Bank Darah Rumah Sakit;
6. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan RS. Sumber Waras Nomor 445/MoU.22/RSUDAWN/2017, Tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Pemeriksaan MRI ; RS. Sumber Waras Waras Nomor 445/MoU.23/RSUDAWN/2017, Tentang Pelayanan Penanggulangan HIV/AIDS; RS. Sumber Waras Waras Nomor 445/MoU.24/RSUDAWN/2017, Tentang Pelayanan Rujukan Pasien Tuberculosis (TB); RS. Sumber Waras Waras Nomor



- 445/MoU.33/RSUDAWN/2017, Tentang Pelayanan Kesehatan;
7. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan LABORATORIUM PRAMITA, Nomor 445/3249/RSUDAWN/2016, tentang Pemeriksaan Laboratorium;
  8. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Gereja Kristen Khatolik Arjawinangun Nomor 445/MoU.35/RSUDAWN/2017, tentang Pelayanan Kerohanian dan Pemulasaraan Jenazah Non Muslim;
  9. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Vihara Arjawinangun Nomor 445/MoU.40/RSUDAWN/2017, tentang Pelayanan Kerohanian dan Pemulasaraan Jenazah Umat Budha;
  10. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Gereja Bethel Protestan Arjawinangun Nomor 445/MoU.34/RSUDAWN/2017, tentang Pelayanan Kerohanian dan Pemulasaraan Jenazah Umat Kristen Protestan;
  11. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Universitas YARSI Jakarta Fakultas Kedokteran Nomor: 445/3666.1/RSUD-AWN/2017 tentang Pendidikan Fak. Kedokteran berlaku 2009-2019;
  12. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan PT. BNK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN CAB. SUMBER, Nomor: 0373/SBR-OPS/2016, tentang Penyediaan sarana kantor Kas PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten cabang Sumber dilokasi RSUD Arjawinangun Kab. Cirebon;
  13. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Klinik Pratama Akbar Nomor 445/1032/RSUD-AWN/2017 tentang Pengelolaan Sampah Medis;
  14. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Klinik Rahmat Nomor 445/1031/RSUD-AWN/2017 tentang Pengelolaan Sampah Medis;
  15. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan PT KAI DAOP 3 Cirebon Nomor 445/MoU.67/RSUDAWN/2018 tentang Pelayanan Kesehatan bagi peserta program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan;

16. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan BPJS Kesehatan Cabang Cirebon Perjanjian Kerjasama Nomor 445/1741/RSU/2017;
17. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan RS Universitas Muhammadiyah Cirebon Perjanjian Kerjasama Nomor 012/KS/RSU-UMC/IX/2018;
18. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon Perjanjian Kerjasama Nomor 445/3657/RSU/2016 dan Nomor 420/1428 /RSUWLD/2016;
19. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan STIKes Mahardika Perjanjian Kerjasama Nomor 445/196//RSUDWLD/2018;
20. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan AKBID Muhammadiyah Perjanjian Kerjasama Nomor 445/191/RSU/2018;
21. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II Perjanjian Kerjasama Nomor 445/2079.a-RSUD;
22. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan STIKes An Nasher Perjanjian Kerjasama Nomor 445/1564 /RSUWLD/2018;
23. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan STIKes Brebes Perjanjian Kerjasama Nomor 445/1793 /RSUWLD/2017;
24. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan STIKes Indramayu Perjanjian Kerjasama Nomor 445/843.b /RSUWLD/2014;
25. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Politeknik Kesehatan Bhakti Pertiwi Husda Cirebon Perjanjian Kerjasama Nomor 445/845.b/RSUWLD/2014;
26. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Politeknik Kesehatan Tasikmalaya Perjanjian Kerjasama Nomor 445/290/RSUWLD/2018;
27. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Akper YPIB Majalengka Perjanjian Kerjasama Nomor 445/189/RSUWLD/2018;
28. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Politeknik Harapan Bersama Perjanjian Kerjasama Nomor 445/1669//RSUDWLD/V/2016;
29. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Politeknik Kesehatan



- Kemenkes Bandung Perjanjian Kerjasama Nomor 445/475.-a/RSUWLD/2016;
30. Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Nomor: B / 300 / KB. 05 / Satpol PP / 2018 Tanggal 23 April 2018;
  31. Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Polres Cirebon dengan Nomor: B / 2124 / V / 2018 Tanggal 23 April 2018;
  32. Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Polres Cirebon Kota dengan Nomor: B / 667 / V / 2018 Tanggal 23 April 2018;
  33. Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Komando Distrik Militer 0620 Kabupaten Cirebon dengan No.: B/398/V/2018 Tanggal 23 April 2018;
  34. Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Detasemen Polisi Militer III/3 Cirebon dengan Nomor: B / 243 / V / 2018 Tanggal 23 April 2018;
  35. Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Pangkalan TNI AL Cirebon dengan Nomor: B / 259 / V / 2018 Tanggal 23 April 2018;
  36. Perjanjian Kerjasama MoU antara Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon No. 500/830/Diskomino-Bid.SP dan No. B-170A/BPS3209/.92800/.5 /2018 Tentang Penyusunan dan Pengumpulan Data Survei Ekonomi Daerah Tahun Anggaran 2018 Tanggal 8 Juni 2018;
  37. Perjanjian Kerjasama MoU antara Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon No. 500/334/Diskomino-Bid.SP dan No. 043A/BPS3209/.92810/.3/2018 Tentang Penyusunan dan Pengumpulan Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kecamatan Tahun 2017 Tanggal 5 Maret 2018;
  38. Perjanjian Kerjasama antara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon dengan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Bandung Nomor: 893.3/3780.1/BKPSDM, Nomor: 893.2/1509/PPSDM;
  39. Perjanjian Kerjasama antara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon dengan Pusat Pendidikan

- dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri Regional Bandung Nomor: 893.3/17461.1/BKPSDM, Nomor: 893.2/993/PUSDIKLSTREG;
40. Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama antara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaen Cirebon dengan Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: 886/6264-BKPSDM/2018, Nomor: 11948/UN40.R4/KS/2018;
  41. Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama antara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaen Cirebon dengan Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: 893/1143/BKPSDM/2018, Nomor: 3838/UN40.R4/HK/2018;
  42. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dengan PT. Pandega Atha Pratama tentang "Program Training Internal Audit with Audit Live BKPSDM" Nomor 800/4380.1/2018-BKPSDM, Nomor: P-001/TRN-PAP/IX/18-00;
  43. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten APJ Cirebon tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik Nomor:  $\frac{01 \text{ Tahun } 2009}{002.Pj/040/APJ.CRB/2009}$  Bidang kerjasama meliputi Mekanisme Kompensasi Rekening Listrik dan PPJ, Penertiban Penerangan Jalan Umum (PJU) Belum Resmi, Meterisasi PJU.

## **2.10. *Sustainable Development Goal's/SDG's* (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB) Kabupaten Cirebon**

Indonesia telah mengadopsi kesepakatan internasional tentang agenda *Sustainable Development Goal's* (SDG's)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang diterbitkan pada 4 Juli 2017. Hal ini menunjukkan konsistensi pemerintah untuk melembagakan agenda TPB ke dalam program pembangunan nasional. Perpres tersebut menekankan keterlibatan

seluruh pemangku kepentingan, melalui empat platform partisipasi, yaitu pemerintah termasuk Pemerintah Daerah dan parlemen, filantropi dan bisnis, ormas, akademisi dan pakar dalam rangka menyukseskan pelaksanaan agenda TPB.

Berdasarkan dokumen KLHS Kabupaten Cirebon memiliki kepentingan untuk turut berpartisipasi dalam pencapaian SDG's, mengingat berdasarkan permasalahan di atas, masih terdapat tujuan pembangunan yang masih harus dituntaskan oleh Pemerintah Kabupaten. Berdasarkan dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2023, maka Kabupaten Cirebon hanya melaksanakan 7 tujuan dengan 174 indikator TPB yang menjadi wewenang kabupaten. Dari 174 indikator yang ditetapkan dalam TPB Kabupaten Cirebon, hanya 61 (35,06%) indikator yang memiliki data sedangkan sebanyak 113 (64,94%) indikator belum tersedia data.

Dengan diperhatikannya isu-isu penting terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) 2016-2030, dalam penyusunan RPJMD, diharapkan dapat menanggulangi berbagai masalah, termasuk menghapuskan kemiskinan dan kelaparan, memajukan kesehatan dan pendidikan, membangun kota-kota secara berkelanjutan, memerangi perubahan iklim serta melindungi samudera dan hutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan.

Untuk merumuskan isu-isu strategis yang berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) tentunya perlu dibuat gambaran umum kondisi daerah, kemudian selanjutnya akan dilakukan pelingkupan permasalahan. Dari hasil pelingkupan permasalahan tersebut kemudian dilakukan perumusan isu strategis. Kerangka kerja pelingkupan permasalahan dan isu strategis ini baik dalam penyusunan dokumen KLHS dan RPJMD sudah diselaraskan dan diintegrasikan sebagai dasar penyusunan arah kebijakan pembangunan kedepan.





## **BAB III**

### **GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Pengelolaan Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuan keuangan daerah merupakan daya dukung manajemen pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Secara mendasar, analisis pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Awal tahun 2020 seluruh negara mulai dihantam pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 tersebut tidak hanya memunculkan masalah dibidang kesehatan saja, namun juga memberikan tekanan pada struktur ekonomi secara masif ke seluruh negara. Di Indonesia COVID-19 dampak COVID-19 merusak struktur ekonomi nasional. Hal ini memaksa pemerintah mengoreksi berbagai target ekonomi ditahun 2020. Beberapa skenario berat diputuskan dimana target pertumbuhan ekonomi diturunkan menjadi 2,3 persen. Padahal pada asumsi dasar ekonomi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, pertumbuhan ekonomi sebelumnya ditarget 5,3 persen. Berbagai kondisi yang ada memberikan pukulan keras terhadap perekonomian nasional hingga hingga keuangan daerah (APBD) maupun perekonomian masyarakat Kabupaten Cirebon pada umumnya.

Untuk mengatasi pandemic Covid-19 tersebut, berbagai pengeluaran pemerintah pusat dan daerah mulai dikencangkan untuk penanganan COVID-19. Disisi lain target-target penerimaan baik pusat maupun daerah banyak dikoreksi akibat lesunya perekonomian global hingga lokal. Penyaluran dana transfer dari pusat ke Kabupaten Cirebon banyak yang dipotong, ditambah lesunya perekonomian daerah yang membuat potensi penerimaan (PAD) diperkirakan menurun. Hal tersebut diprediksi masih akan berlangsung dalam beberapa tahun kedepan.



Untuk itu agar tercipta pembiayaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon yang realistis dan efektif. Untuk itu perlu dilakukan re-kalkulasi kondisi keuangan daerah sebagai dasar mengukur kemampuan pembiayaan pembangunan daerah hingga tahun 2024.

Peraturan yang mendasari pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, adil, patut, dan bermanfaat. Kerangka pengelolaan keuangan Pemerintah secara garis besar terdiri dari penyusunan anggaran daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban, yang kesemuanya mengacu pada tujuan tersebut di atas. Untuk memahami kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu dicermati kondisi kinerja keuangannya, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Berdasarkan hal tersebut dapat diproyeksikan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagai kerangka pendanaan di masa yang akan datang.

### **3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu**

Pengelolaan keuangan daerah telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 *juncto* Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, kinerja keuangan pemerintah daerah sangat terkait dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah.

Analisis kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan dalam periode RPJMD yang lalu yaitu periode tahun 2014 - 2018. Berdasarkan analisis kinerja masa lalu maka akan diketahui rata-rata pertumbuhan yang dapat dijadikan sebagai analisis proyeksi keuangan ke depan. Kinerja keuangan masa lalu terdiri atas kinerja pelaksanaan APBD dan neraca keuangan daerah. Kinerja pelaksanaan APBD terdiri atas target dan realisasi pendapatan, target dan realisasi belanja, serta penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Sedangkan neraca keuangan daerah berupa perkembangan dan analisis neraca keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD.

### **3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya disusun bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia agar tepat sasaran sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan pelaksanaan dan pertanggung jawaban pengelolaan anggaran. Untuk mengetahui kinerja pelaksanaan APBD, di bawah ini diuraikan mengenai perkembangan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2020.



**Tabel 3.1.**

**Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah  
Kabupaten Cirebon Tahun 2016–2020  
(dalam Milyar rupiah)**

| NO.   | URAIAN  | REALISASI |          |          |          |          | Rata-Rata             |
|-------|---|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|
|       |   | 2016      | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | Pertumbuh/<br>Thn (%) |
| 1     | PENDAPATAN DAERAH   | 3,362.41  | 3,591.54 | 3,683.07 | 4,014.47 | 3,248.37 | -0.18                 |
| 1.1   | Pendapatan Asli Daerah  | 529.05    | 779.34   | 584.81   | 639.84   | 616.62   | 7.03                  |
| 1.1.1 | Hasil Pajak Daerah  | 158.18    | 186.14   | 207.90   | 213.57   | 223.61   | 9.20                  |
| 1.1.2 | Hasil retribusi Daerah  | 38.82     | 40.17    | 42.63    | 42.84    | 31.12    | -4.31                 |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                               | 6.39      | 7.22     | 7.90     | 12.99    | 9.31     | 14.65                 |
| 1.1.4 | Lain-Lain Pendapatan asli Daerah yang Sah                                       | 325.66    | 545.81   | 326.39   | 370.44   | 352.57   | 9.02                  |
| 1.2   | Dana Perimbangan  | 2,158.78  | 2,074.52 | 2,070.43 | 2,213.79 | 2,021.91 | -1.46                 |
| 1.2.1 | Daba Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak                                    | 99.45     | 97.88    | 87.16    | 74.86    | 108.04   | 4.42                  |
| 1.2.2 | Dana Alokasi Umum (DAU)   | 1,521.88  | 1,495.14 | 1,500.54 | 1,591.29 | 1,417.09 | -1.57                 |
| 1.2.3 | Dana Alokasi Khusus   | 537.44    | 481.49   | 482.73   | 547.64   | 496.78   | -1.50                 |
| 1.3   | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah  | 674.59    | 737.69   | 1,027.83 | 1,160.84 | 609.83   | 3.54                  |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah  | 16.59     | -        | 214.04   | 221.90   | 163.72   | -5.64                 |
| 1.3.2 | Dana Darurat  | -         | -        | -        | -        | -        | 0.00                  |
| 1.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 2) | 237.55    | 255.60   | 282.19   | 294.59   | 283.13   | 4.63                  |
| 1.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus   | 282.55    | 368.00   | 405.99   | 461.12   | 52.14    | -8.64                 |
| 1.3.5 | Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya                    | 137.90    | 114.09   | 125.61   | 183.24   | 110.84   | -0.20                 |
| 2     | BELANJA   | 3,441.04  | 3,598.08 | 3,681.47 | 4,004.89 | 3,694.22 | 1.98                  |
| 2.1   | Belanja Tidak Langsung  | 2,023.94  | 1,977.08 | 2,099.76 | 2,183.12 | 2,294.45 | 3.24                  |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai   | 1,522.45  | 1,384.97 | 1,476.63 | 1,519.58 | 1,524.48 | 0.20                  |
| 2.1.2 | Belanja Bunga   | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00                  |
| 2.1.3 | Belanja Subsidi   | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00                  |
| 2.1.4 | Belanja Hibah   | 17.18     | 31.47    | 57.52    | 31.22    | 45.48    | 41.48                 |
| 2.1.5 | Belanja Bansos  | 3.62      | 0.96     | 1.70     | 0.07     | 0.92     | -29.00                |



| NO.   | URAIAN                   | REALISASI |          |          |          |          | Rata-Rata             |
|-------|--------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|
|       |                          | 2016      | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | Pertumbuh/<br>Thn (%) |
| 2.1.6 | Belanja Bantuan Keuangan | 446.44    | 541.70   | 542.19   | 631.39   | 642.71   | 9.92                  |
| 2.1.7 | Belanja Tidak Terduga    | 17.07     | 0.00     | 2.61     | 0.00     | 53.99    | 33.36                 |
| 2.1.8 | Belanja Bagi Hasil       | 17.18     | 17.98    | 19.11    | 0.86     | 26.87    | 11.83                 |
| 2.2   | Belanja Langsung         | 1,417.10  | 1,621.00 | 1,581.71 | 1,821.77 | 1,399.77 | 0.99                  |
| 2.2.1 | Belanja Pegawai          | 165.38    | 241.88   | 240.90   | 257.26   | 255.02   | 12.94                 |
| 2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa  | 641.19    | 769.55   | 829.89   | 976.68   | 847.80   | 8.09                  |
| 2.2.3 | Belanja Modal            | 610.53    | 609.57   | 510.92   | 587.83   | 296.95   | -12.69                |
|       |                          |           |          |          |          |          |                       |
| 3     | PEMBIAYAAN               |           |          |          |          |          |                       |
| 3.1   | Penerimaan Pembiayaan    | 388.90    | 332.50   | 323.85   | 321.62   | 288.83   | -7.00                 |
| 3.2   | Pengeluaran Pembiayaan   | 39.38     | 21.00    | 25.40    | 21.50    | 39.38    | 10.52                 |

Sumber : LRA Kabupaten Cirebon, 2021

### 3.1.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ada sedikit perubahan struktur pendapatan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari:

- (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- (2) Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa); dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan);
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Pendapatan Lainnya.

Angka rata-rata pertumbuhan setiap objek pendapatan daerah pada realisasi tahun berjalan ditentukan oleh ketepatan asumsi indikator makro ekonomi, kebijakan di bidang keuangan, serta kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Angka rata-rata pertumbuhan setiap objek pendapatan daerah inilah yang dijadikan dasar dalam menentukan tingkat pertumbuhan daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap sumber dan objek dari pendapatan daerah 5 (lima) tahun terakhir.

Berdasarkan table 3.1 diatas diperoleh gambaran bahwa selama kurun waktu tahun 2016-2020, realisasi pendapatan daerah mengalami fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan -0,18 persen. Adapun Pendapatan Asli Daerah memiliki rata-rata pertumbuhan paling tinggi yaitu sebesar 7,03 persen. Pendapatan Asli Daerah yang mengalami pertumbuhan berasal dari Pajak Daerah sebesar 9,2 persen, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 14,65 persen dan Lain-Lain PAD yang sah sebesar 9,02 persen. Sedangkan hasil retribusi daerah mengalami pertumbuhan sebesar -4,31 persen.

Pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan mengalami pertumbuhan -1,46%. Pendapatan Dana Perimbangan yang mengalami pertumbuhan positif berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak sebesar 4,42 persen. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami pertumbuhan negatif masing-masing sebesar -1,57 persen dan 1,56 persen.

Lain-Lain Pendapatan yang Sah mengalami pertumbuhan sebesar 3,54 persen. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah hanya yang berasal Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,63 persen. Sedangkan pendapatan hibah, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi dan daerah lainnya mengalami pertumbuhan negatif masing-masing sebesar -5,64 persen, -8,64 persen dan -0,20 persen

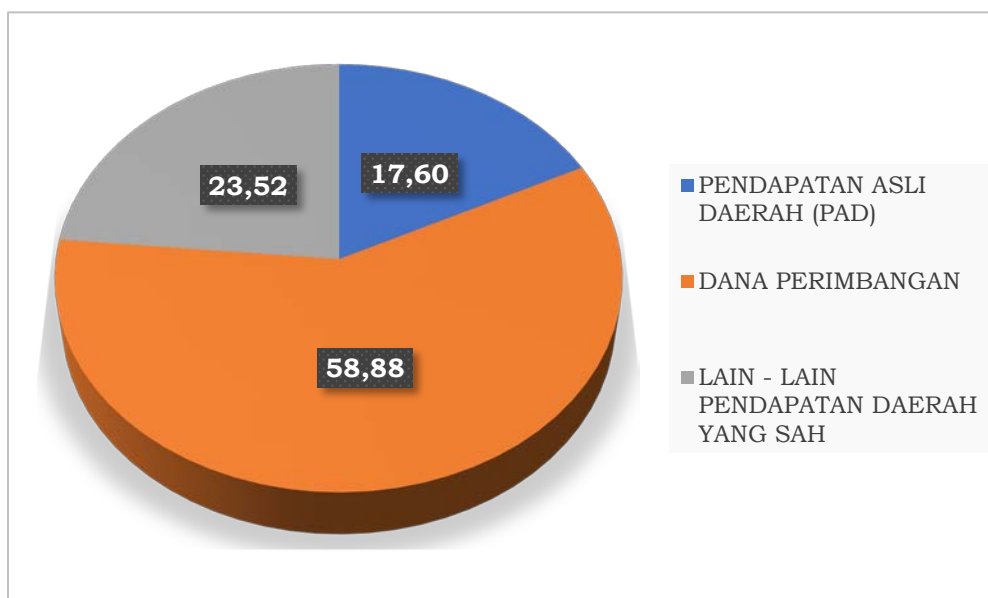


Pertumbuhan yang fluktuasi diasumsikan bahwa pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap realisasi pendapatan daerah di Kabupaten Cirebon.

Berikut ini disajikan grafik rata-rata proporsi realisasi pendapatan daerah tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

**Gambar 3.1**

**Rata-Rata Proporsi Komponen Pendapatan Daerah  
Tahun 2016–2020**



Sumber: LRA Kabupaten Cirebon Tahun 2016–2020, diolah

Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata proporsi komponen Pendapatan Daerah tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terbesar berasal dari Dana Perimbangan yaitu sebesar 58,88 persen, posisi kedua yaitu berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 23,52 persen dan posisi ketiga berasal dari Pendapatan Pajak Asli Daerah (PAD) yaitu sebesar 17,60 persen.

Rincian dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 disajikan sebagai berikut.

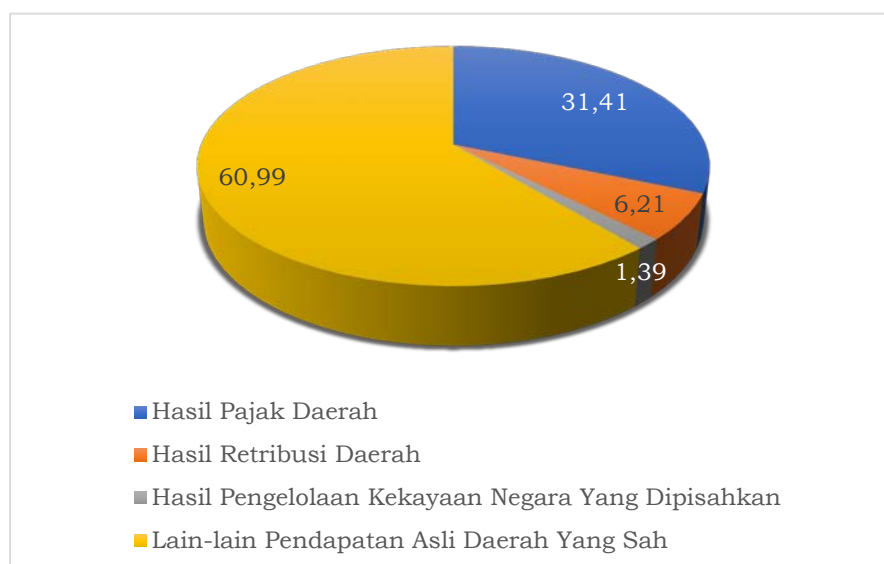
### **1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kemampuan asli kemampuan daerah dalam pembiayaan pembangunan. Pendapatan asli

daerah ini diperoleh dari penerimaan hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah.

Rata-rata proporsi komponen Pendapatan Asli Daerah tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terbesar berasal dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yaitu sebesar 60,99 persen. Sisanya terdiri dari Hasil Pajak Daerah sebesar 31,41 persen, Hasil Retribusi Daerah sebesar 6,21 persen dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yaitu sebesar 1,39 persen. Hal tersebut sesuai dengan gambar dibawah ini.

**Gambar 3.2**  
**Rata-Rata Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah**  
**Tahun 2016–2020**



Sumber: LRA Kabupaten Cirebon Tahun 2016–2020, diolah

## 2. Dana Perimbangan

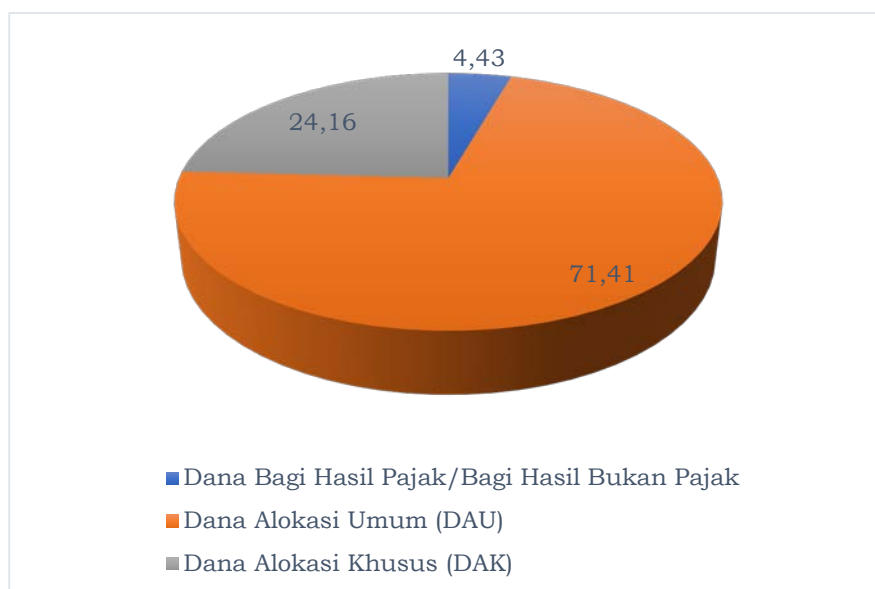
Dalam penjelasan UU Nomor 33 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

Dana perimbangan menjadi salah satu komponen yang cukup penting bagi APBD Kabupaten Cirebon. Keberadaan dana perimbangan menjadi tumpuan pembangunan Kabupaten Cirebon.

Komposisi Dana Perimbangan Kabupaten Cirebon selama kurun waktu Tahun 2016 sampai dengan 2020 berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 71,41 persen dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 24,16 persen, sedangkan sisanya sebesar 4,43 persen merupakan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak.

**Gambar 3.3**

**Rata-Rata Proporsi Komponen Dana Perimbangan  
Tahun 2016–2020**



Sumber: LRA Kabupaten Cirebon Tahun 2016–2020, diolah

### **3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

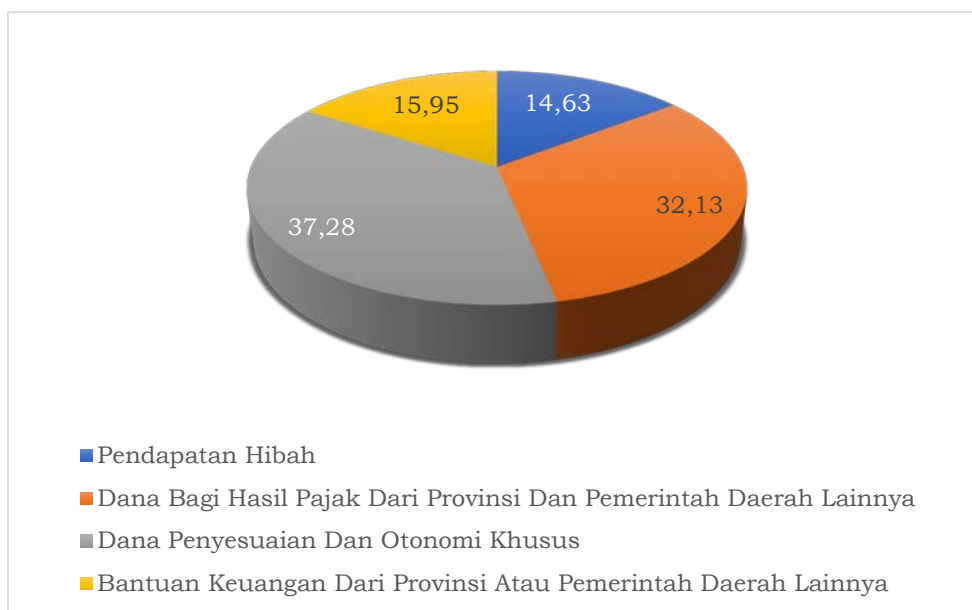
Sumber penerimaan lainnya berasal dari lain-lain pendapatan yang sah yang terdiri atas penerimaan dari Provinsi Jawa Barat dan penerimaan dari Pusat berupa dana penyesuaian.

Penyumbang terbesar dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berasal dari Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus sebesar 37,28 persen dan Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar 32,13 persen, sisanya sebesar 15,95 persen berupa



Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya dan 14,63 persen berupa Pendapatan Hibah.

**Gambar 3.4**  
**Rata-Rata Proporsi Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2016–2020**



Sumber: LRA Kabupaten Cirebon Tahun 2016–2020, diolah

#### **3.1.1.2. Belanja Daerah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dirubah terakhir dengan Permendagri 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri dari:

1. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Bunga, (c) Belanja Subsidi, (d) Belanja Hibah, (e) Belanja Bantuan Sosial, (f) Belanja Bagi Hasil, (g) Belanja Bantuan Keuangan, dan (h) Belanja Tidak Terduga.
2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Barang dan Jasa, dan (c) Belanja Modal.

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan peningkatan pelayanan publik pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Untuk belanja daerah, realisasi belanja daerah tahun 2015 Rp 3.379.747.897.580,00 dan pada tahun 2020 belanja daerah menjadi Rp 3.694.214.500.257,00, dengan rata-rata pertumbuhan selama 6 (enam) tahun yaitu 5,34%. Proporsi besarnya belanja daerah terhadap total APBD dalam periode tahun 2015-2020 berada pada kisaran 84,64-107,23%. Secara lengkap capaian realisasi belanja daerah disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.2.**  
**Perkembangan Belanja Daerah Tahun 2016-2020**  
**(dalam milyar rupiah)**

| No.              | Tahun | Belanja  | r (%)       | APBD     | r (%)       | Proporsi Terhadap APBD (%) |
|------------------|-------|----------|-------------|----------|-------------|----------------------------|
| 1.               | 2016  | 3,419.43 | 1.17        | 3,745.48 | 10.71       | 91.29                      |
| 2.               | 2017  | 3,850.73 | 12.61       | 3,877.53 | 3.53        | 99.31                      |
| 3.               | 2018  | 3,306.92 | -14.12      | 3,906.88 | 0.76        | 84.64                      |
| 4.               | 2019  | 4,025.76 | 21.74       | 4,362.14 | 11.65       | 92.29                      |
| 5.               | 2020  | 3,694.21 | -8.24       | 4,146.60 | -4.94       | 89.09                      |
| <b>RATA-RATA</b> |       |          | <b>2.63</b> |          | <b>4.34</b> | <b>91.33</b>               |

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), 2021

Realisasi Belanja untuk Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2016 sebesar 91,29%, pada tahun 2017 mengalami peningkatan kembali hingga menjadi 99,31%. Selanjutnya di tahun 2018 realisasi belanja mengalami penurunan menjadi 84,64%. Selanjutnya pada tahun 2019 realisasi belanja langsung mengalami peningkatan pada posisi 92,29%. Dan pada Tahun 2020 realisasi belanja terhadap APBD sebesar 89,09%.

Pada tahun 2019 realisasi belanja tidak langsung Kabupaten Cirebon hanya mencapai 93,78% atau mengalami penurunan bila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2018 yang mencapai 95,80%.

Untuk realisasi belanja langsung pada tahun 2019 mencapai 90,55% atau mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2018 yang hanya mencapai 87,33%.

Pada tahun 2020, realisasi belanja daerah Kabupaten Cirebon mencapai Rp 3.694,22 Milyar. Besaran belanja daerah meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan 1,98% per tahun dari tahun 2016 hingga 2020. Walaupun besaran belanja mengalami peningkatan, proporsi masing-masing belanja relatif tidak banyak mengalami perubahan. Rata-rata proporsi Belanja Tidak Langsung masih lebih besar, yaitu sebesar 57,83% sementara proporsi Belanja Langsung hanya 42,17%.

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Proporsi belanja tidak langsung merupakan belanja terbesar dari belanja daerah dan meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan 3,24% per tahun dari tahun 2016 hingga 2020. Proporsi pengeluaran belanja pegawai merupakan belanja terbesar jumlahnya dari belanja tidak langsung yaitu sebesar 77,28%. Proporsinya terhadap total belanja daerah mencapai 44,69%. Belanja pegawai ini merupakan penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya bagi pegawai negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Belanja pegawai pada belanja tidak langsung mengalami pertumbuhan negatif karena sejak 5 tahun terakhir Pemda Kabupaten Cirebon melakukan moratorium penerimaan pegawai. Namun, pada tahun 2018 Pemda Kab. Cirebon mendapatkan kuota penerimaan PNS sekitar 454 orang dan pada tahun 2019 seterusnya dialokasikan penambahan pegawai disesuaikan dengan jumlah pegawai yang pensiun, sehingga perkiraan pertumbuhan belanja pegawai akan mengikuti perkiraan kenaikan gaji pegawai.

Belanja tidak langsung terbesar berikutnya adalah belanja bantuan keuangan, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Besaran belanja pegawai, belanja hibah, belanja bansos, belanja bagi hasil, belanja



bantuan keuangan, dan dari tahun ke tahun secara rerata mengalami fluktuasi (negatif dan positif). Pertumbuhan terbesar pada belanja hibah.

Besaran belanja langsung yang terkait langsung dengan program dan kegiatan dengan masyarakat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan 3,54% per tahun. Proporsi belanja pegawai barang dan jasa merupakan yang terbesar yaitu sebesar 21,03% terhadap belanja daerah atau 49,86% terhadap belanja langsung. Proporsi belanja modal untuk pengadaan aset tetap berwujud merupakan yang terbesar kedua sebesar 15,35% dari total belanja daerah atau sebesar 36,39% dari belanja langsung. Proporsi belanja pegawai merupakan yang terbesar ketiga sebesar 5,8% terhadap belanja daerah atau 13,75% terhadap belanja langsung. Besaran belanja pegawai, barang dan jasa, dan belanja modal dari tahun ke tahun secara rerata mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan 5 tahun terakhir (2016 – 2020) masing-masing sebesar 13,59% per tahun, 9,54% per tahun, dan 14,63% per tahun.

Selanjutnya untuk Belanja tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp. 4.146.596.054.014,06** dan terealisasi senilai **Rp. 3.694.214.500.257,00** atau mencapai **89,09%** dari anggaran yang telah ditetapkan.

Realisasi Belanja Tahun 2020 yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.3.**

**Realisasi Belanja Tahun 2020  
(dalam milyar rupiah)**

| NO. | URAIAN                | ANGGARAN 2020<br>(Rp) | REALISASI 2020  |              |
|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
|     |                       |                       | (Rp)            | (%)          |
| 1.  | Belanja Operasi       | 2.936,27              | 2.673,70        | 91,06        |
| 2.  | Belanja Modal         | 357,51                | 296,95          | 83,06        |
| 3.  | Belanja Tidak Terduga | 181,21                | 53,99           | 29,79        |
| 4.  | Belanja Transfer      | 671,60                | 669,57          | 99,70        |
|     | <b>JUMLAH</b>         | <b>4.146,60</b>       | <b>3.694,21</b> | <b>89,09</b> |

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), 2021



Selanjutnya, Sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Pengeluaran daerah yang bersifat wajib dan mengikat serta menjadi prioritas utama biasanya berupa belanja dan pengeluaran yang bersifat periodik. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah, seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, atau belanja sejenis lainnya.

Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah, yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya. Tabel di bawah merupakan data perkembangan realisasai pengeluaran yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Cirebon sejak tahun 2015 sd 2020 serta pertumbuhan per tahunnya.

**Tabel 3.4.**  
**Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020**  
*(dalam milyar rupiah)*

| No.                | Uraian   | 2016            | 2017            | 2018            | 2019            | 2020            | Rata-Rata       |
|--------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |  | (Rp)            | (Rp)            | (Rp)            | (Rp)            | (Rp)            | Pertumbuhan (%) |
| <b>A.</b>          | <b>Belanja Tidak Langsung</b>  | <b>1,473.59</b> | <b>1,484.56</b> | <b>1,815.98</b> | <b>2,171.36</b> | <b>2,194.05</b> | <b>10.92</b>    |
| 1.                 | Belanja gaji dan tunjangan   | 997.84          | 909.59          | 1,235.34        | 1,255.75        | 1,209.11        | 6.23            |
| 2.                 | Belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/Wakil KDH | 4.38            | 5.99            | 9.39            | 9.51            | 9.59            | 23.89           |
| 3.                 | Belanja Bunga  | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 4.                 | Belanja Subsidi  | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 5.                 | Belanja pemungutan pajak daerah  | 6.74            | 8.29            | 8.85            | 9.61            | 9.99            | 10.60           |
| 6.                 | Belanja Insentif Pemungutan Retribusi  | 1.01            | 1.00            | 1.11            | 1.15            | 0.77            | (4.79)          |
| 7.                 | Belanja Bagi Hasil   | 17.18           | 17.98           | 19.11           | 20.43           | 26.87           | 12.34           |
| 8.                 | Belanja Bantuan Keuangan   | 446.44          | 541.70          | 542.19          | 631.35          | 642.71          | 9.92            |
| 9.                 | Belanja Tambahan Penghasilan PNS   | 129.52          | 125.19          | 221.95          | 243.57          | 295.01          | 26.20           |
|                    |  | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | -               |
| <b>B.</b>          | <b>Pengeluaran Pembiayaan</b>  | <b>39.38</b>    | <b>21.00</b>    | <b>12.37</b>    | <b>21.50</b>    | <b>21.50</b>    | <b>(3.50)</b>   |
| 1.                 | Pembentukan Dana Cadangan  | <b>20.00</b>    | <b>20.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | -               |
| 2.                 | Pembayaran Pokok Utang   | <b>1.80</b>     | <b>0.00</b>     | <b>7.60</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>(100.00)</b> |
| 3.                 | Penyertaan modal   | <b>17.59</b>    | <b>1.00</b>     | <b>4.77</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>(100.00)</b> |
| <b>TOTAL (A+B)</b> |  | <b>1,512.97</b> | <b>1,505.56</b> | <b>1,828.35</b> | <b>2,192.86</b> | <b>2,215.55</b> | <b>10.48</b>    |

Sumber: Data LRA Pemda Tahun 2015 – 2020

Berdasarkan perhitungan di tabel 3.5 di atas, dapat diketahui bahwa besarnya rata-rata pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama per tahun sebesar 10,48%. Besarnya rata-rata pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pada kelompok belanja tidak langsung per tahun 10,92%. Jika dilihat data keuangan per tahun anggaran, meskipun ada pertumbuhan setiap tahunnya tetapi pada jenis belanja gaji dan tunjangan menunjukkan fluktuasi yang cukup besar tiap tahunnya. Pertumbuhan belanja tidak langsung dipengaruhi oleh kecenderungan peningkatan pertumbuhan belanja gaji dan tunjangan (6,23%), belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/Wakil KDH (23,89%), belanja pemungutan pajak daerah (10,60%), belanja insentif pemungutan retribusi (-4,79%), belanja bantuan keuangan (9,92%), dan belanja bagi hasil (12,34%). Serta belanja tambahan penghasilan PNS (26,20%) Artinya, besarnya rata-rata pertumbuhan belanja tidak langsung disebabkan karena adanya rata-rata pertumbuhan yang tidak merata tiap komponen dari belanja tidak langsung.

Sementara itu rata-rata pertumbuhan pengeluaran pembiayaan mengalami pertumbuhan sebesar (-3,50%) per tahun. penurunan pengeluaran pembiayaan ini disebabkan karena realisasi penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah pada tahun 2018 hanya kepada BUMD, yaitu pada Bank Jabar Banten (BJB) sebesar Rp. 4.772.881.700,- dibandingkan penyertaan modal pada tahun 2014 sebesar Rp.12.307.614.000,- baik kepada PD. BPR maupun PD. Air Bersih Kabupaten Cirebon. Untuk jenis pengeluaran pembiayaan yang lain pada periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi.

### 3.1.1.3. Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan Kabupaten Cirebon terdiri dari:

1. Penerimaan pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah;
2. Pengeluaran pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah, dan pembayaran pokok utang; dan
3. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan.

Perkembangan pembiayaan Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.5.**  
**Perkembangan Pembiayaan Daerah Tahun 2016-2020**  
*(dalam milyar rupiah)*

| No.              | Tahun | Pembiayaan | r (%)       | APBD     | r (%)       | Proporsi Terhadap APBD (%) |
|------------------|-------|------------|-------------|----------|-------------|----------------------------|
| 1                | 2016  | 344.00     | 60.92       | 3,790.47 | 12.04       | 9.08                       |
| 2                | 2017  | 265.70     | -22.76      | 3,877.53 | 2.30        | 6.85                       |
| 3                | 2018  | 303.45     | 14.21       | 3,906.88 | 0.76        | 7.77                       |
| 4                | 2019  | 300.12     | -1.10       | 4,014.47 | 2.75        | 7.48                       |
| 5                | 2020  | 288.83     | -3.76       | 3,770.70 | -6.07       | 7.66                       |
| <b>RATA-RATA</b> |       | 300.42     | <b>9.50</b> | 3,872.01 | <b>2.35</b> | <b>7.77</b>                |

Sumber: Bagian Keuangan BKAD 2020

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa pembiayaan daerah di Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi, dimana mengalami kenaikan dan penurunan. Adapun proporsi pembiayaan daerah terhadap APBD selama kurun waktu tahun 2016-2020 yaitu 7,77%.

**Tabel 3.6.****Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019–2020  
(dalam milyar rupiah)**

| NO.      | URAIAN   | 2019          | 2020          |
|----------|--|---------------|---------------|
| <b>A</b> | <b>PEMBIAYAAN DAERAH (netto)</b>               |               |               |
| <b>1</b> | <b>Penerimaan Pembiayaan</b>                   | <b>321,62</b> | <b>288,83</b> |
| 1.1      | Penggunaan SiLPA                               | 300,12        | 288,83        |
| 1.2      | Pencairan Dana Cadangan                        | -             | -             |
| 1.3      | Penerimaan Pinjaman Daerah                     | 21,5          | -             |
| <b>2</b> | <b>Pengeluaran Pembiayaan</b>                  | <b>21,5</b>   | <b>-</b>      |
| 1.1      | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | -             | -             |
| 1.2      | Pembayaran Pokok Utang kepada Pihak Ketiga     | 21,5          | -             |

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Penerimaan Pembiayaan tahun 2020 dianggarkan senilai Rp 288.834.438.356,06 dan terealisasi senilai Rp 288.834.438.356,06 atau 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp 32.786.005.145,67 atau 10,19% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai Rp321.620.443.501,73.

Selanjutnya untuk Pengeluaran Pembiayaan tahun 2020 dianggarkan senilai Rp1.000.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp0,00 atau 00,00% dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp21.500.000.000,00 atau 100,00% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai Rp21.500.000.000,00.

### 3.1.2. Neraca Daerah

Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

**Tabel 3.7.**  
**Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Cirebon**

| NO.   | Uraian                            | Rata-Rata<br>Pertumbuhan<br>(%) |
|-------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1     | ASET                              | 7.75                            |
| 1.1   | ASET LANCAR                       | 4.94                            |
| 1.1.1 | Kas                               | 6.21                            |
| 1.1.2 | Piutang                           | 1.45                            |
| 1.1.3 | Bagian Lancar Penjualan Angsuran  | 0.00                            |
| 1.1.4 | Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi | 81.47                           |
| 1.1.5 | Persediaan                        | 14.77                           |
| 1.1.6 | Biaya Dibayar Dimuka              | 12.95                           |
| 1.2   | INVESTASI JANGKA PANJANG          | 11.17                           |
| 1.2.1 | Investasi Non Permanen            | -5.57                           |
| 1.2.2 | Investasi Permanen                | 12.41                           |
| 1.3   | ASET TETAP                        | 7.80                            |
| 1.3.1 | Tanah                             | 4.01                            |
| 1.3.2 | Peralatan dan Mesin               | 9.22                            |
| 1.3.3 | Gedung dan Bangunan               | 2.71                            |
| 1.3.4 | Jalan, Jaringan, dan Instalasi    | 12.90                           |
| 1.3.5 | Aset Tetap Lainnya                | 1.25                            |
| 1.3.6 | Konstruksi dalam Pengerjaan       | 35.99                           |
| 1.3.7 | Akumulasi Penyusutan              | 8.94                            |
| 1.4   | DANA CADANGAN                     | 0.00                            |
| 1.5   | ASET LAINNYA                      | 78.57                           |
| 2     | KEWAJIBAN                         | 9.19                            |
| 2.1   | Kewajiban Jangka Pendek           | 9.19                            |
| 2.2   | Kewajiban Jangka Panjang          | 0.00                            |
| 3     | EKUITAS                           | 7.77                            |
| 3.1   | KEWAJIBAN DAN EKUITAS             | 7.75                            |



Neraca Daerah sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 3.7 di atas, memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas kepada manajemen pemerintahan daerah mengenai likuiditas keuangan dan informasi mengenai fleksibilitas keuangan. Pemberian informasi tersebut merupakan upaya dan tindakan pemerintah daerah untuk menjalankan good government governance dan bentuk pertanggungjawaban atas posisi kekayaan daerah.

Sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa analisis terhadap kinerja Neraca Daerah yang diperlukan dalam merumuskan perencanaan keuangan daerah adalah analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Rasio likuiditas dilakukan untuk menganalisis kemampuan kas Pemerintah Daerah dalam memenuhi operasional pemerintahan dan hutang jangka pendeknya. Analisis solvabilitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan aset dan ekuitas daerah dalam memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah di masa mendatang. Terakhir, analisis rasio aktivitas dilakukan untuk mengetahui seberapa cepat piutang daerah dan persediaan dapat dikonversi menjadi kas atau pelayanan. Tabel berikut akan menyajikan hasil analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas Pemerintah Kabupaten Cirebon selama 5 tahun terakhir.

### **1. Rasio Likuiditas**

Rasio likuiditas dianalisis menggunakan analisis rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Rasio lancar dihitung dengan membandingkan antara aset lancar dengan kewajiban lancar. Sedangkan, rasio cepat dihitung dengan membandingkan antara aset lancar dikurangi persediaan dengan kewajiban lancar. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa baik rasio lancar maupun rasio cepat Pemerintah Kabupaten Cirebon cenderung menurun meski masih positif. Rasio ini menunjukkan hubungan antara kas dan aset lancar lainnya dalam hal ini dari entitas pemerintah daerah dengan kewajiban lancarnya untuk melihat

kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Berdasarkan Tabel 3.8 meskipun terlihat mengalami trend penurunan kecuali tahun 2019 yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, namun rasio lancar menunjukkan Pemerintah Kabupaten Cirebon masih sangat sehat karena aset lancar masih lebih besar daripada kewajiban jangka pendek yang harus dipenuhi.

Rasio Cepat dihitung dengan membandingkan antara aset lancar yang sudah dikurangi tingkat persediaan dengan kewajiban lancar. Secara umum rasio cepat menunjukkan Pemerintah Kabupaten Cirebon masih sangat sehat karena aktiva lancar yang sudah dikurangi persediaan masih lebih besar daripada kewajiban jangka pendek yang harus dipenuhi. Menurunnya kedua rasio likuiditas menunjukkan adanya tekanan keuangan (*financial distress*) yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon walaupun tidak akan mengganggu likuiditas keuangan daerah.

Berdasarkan data yang dijelaskan di atas, maka dilakukan perhitungan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini,

**Analisis Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Aktivitas  
Kabupaten Cirebon dari Tahun 2016-2020  
(dalam milyar rupiah)**

| No.       | Uraian                    | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     |
|-----------|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|           |                           | Rp       | Rp       | Rp       | Rp       | Rp       |
| <b>A.</b> | <b>Rasio Likuiditas</b>   |          |          |          |          |          |
|           | Aset Lancar               | 443.66   | 466.57   | 501.90   | 495.70   | 536.58   |
|           | Kas dan Piutang           | 402.31   | 417.86   | 437.42   | 444.09   | 470.06   |
|           | Persediaan                | 41.36    | 48.71    | 64.48    | 51.61    | 66.51    |
|           | Kewajiban Jangka Pendek   | 55.04    | 57.96    | 75.16    | 57.12    | 71.85    |
| 1         | Rasio Lancar              | 8.06     | 8.05     | 6.68     | 8.68     | 7.47     |
| 2         | Rasio Quick               | 7.31     | 7.21     | 5.82     | 7.77     | 6.54     |
| <b>B.</b> | <b>Rasio Solvabilitas</b> |          |          |          |          |          |
|           | Total Aset                | 3,474.85 | 3,761.92 | 4,049.01 | 4,574.49 | 4,671.70 |
|           | Total Hutang              | 55.04    | 57.96    | 75.16    | 57.12    | 71.85    |
|           | Total Ekuitas             | 3,419.80 | 3,703.96 | 3,973.86 | 4,517.37 | 4,599.85 |

| No. | Uraian                                       | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|-----|--|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |  | Rp    | Rp    | Rp    | Rp    | Rp    |
| 1   | DAR (Rasio Total Hutang terhadap Total Aset) | 0.016 | 0.015 | 0.019 | 0.012 | 0.015 |
| 2   | DER (Rasio Total Hutang terhadap Ekuitas)    | 0.016 | 0.016 | 0.019 | 0.013 | 0.016 |

Sumber: Diolah dari Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon

## 2. Rasio Solvabilitas

Analisis rasio solvabilitas dilakukan dengan menghitung analisis rasio total hutang terhadap total asset atau *Debt to Assets Ratio* (DAR) dan Rasio hutang terhadap ekuitas atau *Debt to Equity Ratio* (DER). DAR bertujuan untuk melihat dan menganalisis kemampuan aset dalam memenuhi kewajiban entitas di masa mendatang. Tabel 3.9 menunjukkan bahwa hasil analisis DAR jauh di bawah 1%, bahkan di bawah 1 per 1.000. Angka rasio yang relatif kecil menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Cirebon memiliki kemampuan untuk membayar hutang yang menjadi kewajiban pemerintah daerah karena hutang yang dimiliki masih jauh lebih kecil dari nilai asset yang dimiliki. Sedangkan, DER bertujuan untuk melihat dan menganalisis komposisi sumber pendanaan entitas dan kemampuan ekuitas dalam memenuhi kewajiban entitas di masa mendatang. Hasil analisis DER jauh di bawah 1%, bahkan di bawah 1 per 1.000. Angka rasio yang relatif kecil menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Cirebon memiliki kemampuan untuk membayar hutang yang menjadi kewajiban pemerintah daerah karena hutang yang dimiliki masih jauh lebih kecil dari nilai modal yang dimiliki.

Tabel 3.8 menunjukkan bahwa hasil analisis DAR dan DER menunjukkan nilai jauh di bawah 1%, bahkan di bawah 1 per 1000, yang menggambarkan bahwa aset sangat mampu untuk memenuhi dan menutup kewajiban di masa mendatang, serta komposisi sumber pendanaan entitas hampir seluruhnya dari ekuitas.

Secara keseluruhan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon, dilihat dari kinerja Neraca Daerah, sangat sehat.

### **3.1.3. Kinerja Pendanaan Non APBD**

#### **1. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)**

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha. Mulai banyak pemerintah daerah yang menyadari pentingnya kontribusi dari pihak swasta dalam mendorong pencapaian dari Target Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs).

Berdasarkan fakta, pihak swasta dapat membawa keahlian, ilmu, teknologi, efisiensi dan permodalan yang sangat dibutuhkan sektor publik sehingga apabila dikombinasikan dengan sumber daya publik yang tepat maka hal ini dapat berkontribusi lebih untuk pembangunan berkelanjutan. Namun melibatkan pihak swasta membutuhkan lingkungan yang stabil serta didukung dengan peraturan dan kerangka regulasi yang kuat, persiapan kelembagaan yang jelas, dan faktor lainnya yang penting untuk “menciptakan pangsa pasar”. Persoalan lain adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak mampu sepenuhnya membiayai pembangunan infrastruktur yang diinginkan atau diharapkan. Artinya, masih banyak bidang-bidang lainnya, seperti kesehatan, pendidikan, kebudayaan, sosial, dan agama yang juga membutuhkan penyerapan anggaran dari APBD. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan. Pada kondisi inilah kemudian skema pembiayaan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dapat menjadi solusi. Prinsip dari skema ini tidak lain dan tidak bukan adalah gotong royong. Melalui skema pembiayaan KPBU ini, pemerintah, BUMN/BUMD, serta swasta bahu-membahu dalam membiayai untuk mengakselerasikan pembangunan.

### 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara umum merupakan kebijakan pengelolaan APBD yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diharapkan memanfaatkan dan mengoptimalkan setiap potensi pendapatan daerah yang digunakan untuk mendanai belanja daerah dengan efektif dan efisien guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Cirebon.

Kebijakan pengelolaan APBD Provinsi Jawa Barat periode RPJMD lalu diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Kebijakan Pendapatan

##### a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seringkali timbul permasalahan dengan masyarakat khususnya para pengusaha. Kebijakan ekstensifikasi pajak dan retribusi atau penetapan tarif yang terlalu tinggi seringkali dikeluhkan dan akan menghambat pertumbuhan sektor riil. Di samping itu, retribusi daerah dan penetapan tarif seharusnya tidak membebani masyarakat secara berlebihan dan sesuai dengan kualitas layanan publik yang diberikan. Untuk itu perlu dikembangkan terobosan baru untuk meningkatkan PAD, yaitu dengan:

- a. **Perbaikan Manajemen.** Setiap potensi pendapatan daerah diharapkan dapat direalisasikan melalui perbaikan manajemen. Manajemen yang profesional dapat dicapai dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan perbaikan serta penyederhaan sistem dan prosedur (biaya dan waktu).
- b. **Peningkatan Investasi.** Peningkatan investasi daerah dapat didorong dengan membangun iklim usaha dan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dengan:
  - 1) Menjaga stabilitas ekonomi daerah;
  - 2) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur ekonomi;

- 3) Menyederhanakan prosedur perijinan;
- 4) Mempertegas peraturan/kebijakan agar tidak tumpang tindih;
- 5) Meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha;
- 6) Menyehatkan iklim ketenagakerjaan dan meningkatkan kualitas tenaga kerja;
- 7) Meningkatkan keamanan dan ketertiban;
- 8) Meniadakan tumpang tindih pemungutan dan menyederhanakan prosedurnya.

**c. Optimalisasi Aset Daerah.** Penggunaan aset daerah ditingkatkan untuk menambah PAD dengan perbaikan administrasi aset, peningkatan perputaran (*turn over*), dan bekerjasama dengan swasta. Perbaikan manajemen BUMD dan rencana pembentukan badan usaha baru diperlukan dalam rangka optimalisasi aset daerah.

#### **b. Peningkatan Dana Perimbangan**

Sumber penerimaan daerah yang berasal dari dana alokasi umum (DAU) perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena bergantung pada kebijakan keuangan pemerintah pusat. Sumber dana yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Bagi hasil pajak Pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan bagi hasil pajak sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Peningkatan aktivitas ekonomi daerah akan berkorelasi positif dengan pendapatan yang berasal dari bagi hasil.

## **2. Kebijakan Belanja**

Arah kebijakan pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

### **1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran**

Sumber-sumber penerimaan daerah yang tersedia dan terbatas harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan



pelayanan pada masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belanja daerah harus tepat sasaran dan diupayakan untuk dapat mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dengan meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia aparatur daerah.

## 2. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang infrastruktur, peningkatan daya beli, kesehatan, dan pendidikan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi Kabupaten Cirebon.

## 3. Tolok Ukur dan Target Kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan harus disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja utama (key performance indicators) yang meliputi masukan, keluaran, hasil, dan dampak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

## 4. Optimalisasi Belanja Langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Belanja langsung difokuskan pada belanja modal daripada belanja pegawai.

## 5. Transparan dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja daerah ditatausahakan, dipublikasikan, dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Publikasi dilaksanakan agar masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja daerah. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya menyangkut aspek administrasi keuangan, tetapi juga proses, keluaran, dan hasilnya.



### 3. Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan daerah memiliki peran strategis dalam sistem penganggaran daerah. Prinsip pengelolaan keuangan daerah adalah mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanja, sehingga defisit anggaran diupayakan untuk diminimalkan. Jika diperlukan pembiayaan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan pada prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah. Sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit anggaran dapat digali dari pinjaman daerah, tetapi jumlah defisit diupayakan tidak melampaui 4,5% dari pendapatan daerah. Selain itu, besaran pinjaman daerah tidak melebihi kemampuan daerah dalam mengembalikan pinjaman. Hal ini tercermin dari besaran rasio kemampuan membayar kembali pinjaman atau *Debt Services Coverage Ratio* (DSCR) minimal sebesar 2,5 *coverage*.

#### 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis belanja pemenuhan kebutuhan aparatur bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan anggaran untuk operasional aparatur dan kebijakan apa yang perlu dilakukan untuk melakukan efisiensi dan efektifitas kerja aparatur. Berikut adalah data realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Cirebon selama 6 tahun terakhir.

Tabel 3.10 di bawah ini menunjukkan realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur relatif mengalami fluktuasi selama 6 tahun terakhir. Pada tahun 2015 sebesar Rp 1.681.845,631.309,00 dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi Rp. 1.733.222.387.334,00 atau meningkat sebesar 2,25% per tahun. Namun demikian, pada tahun 2017, realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur menurun dibandingkan tahun 2016 sebesar -9,06% menjadi sebesar Rp 1.576.150.087.728,00. Dan kembali mengalami peningkatan sebesar 7,11% pada tahun 2018 menjadi Rp. 1.688.199.457.261,00.



Meski demikian Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Cirebon pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami peningkatan hingga menjadi Rp. 1.779.497.848.207,00 di tahun 2020. Adapun Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Cirebon Tahun 2015-2020 disajikan secara lengkap sebagaimana tabel dibawah ini:



**Tabel 3.8.**  
**Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Cirebon**  
**Tahun 2016-2020 (dalam milyar rupiah)**

| No.       | Uraian   | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     |
|-----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|
|           |  | Rp       | Rp       | Rp       | Rp       | Rp       |
| <b>A.</b> | <b>Belanja Tidak Langsung</b>  | 1,522.45 | 1,384.97 | 1,476.63 | 1,839.20 | 1,835.98 |
| 1.        | Belanja Gaji Dan Tunjangan   | 997.84   | 909.59   | 1,235.34 | 1,255.75 | 1,209.11 |
| 2.        | Belanja Tambahan Penghasilan   | 129.52   | 125.19   | 221.95   | 243.57   | 295.01   |
| 3.        | Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/Wakil KDH | 4.38     | 5.99     | 9.39     | 9.51     | 9.59     |
| 4.        | Belanja Pemungutan Pajak Daerah  | 6.74     | 8.29     | 8.85     | 9.61     | 9.99     |
| 5.        | Tambahan Penghasilan Guru PNS  | 382.98   | 334.91   | 0.00     | 319.62   | 311.51   |
| 6.        | Belanja Insentif Pemungutan Retribusi  | 1.01     | 1.00     | 1.11     | 1.15     | 0.77     |
| <b>B.</b> | <b>Belanja Langsung</b>  | 295.93   | 347.11   | 364.47   | 378.45   | 339.06   |
| 1.        | Belanja Honorarium PNS   | 21.07    | 27.32    | 11.90    | 15.02    | 10.60    |
| 2.        | Belanja Honorarium Non PNS   | 53.66    | 54.78    | 72.65    | 82.65    | 73.51    |
| 3.        | Belanja Uang Lembur  | 4.17     | 3.85     | 4.53     | 5.34     | 4.42     |
| 4.        | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS  | 0.85     | 0.51     | 0.45     | 0.46     | 0.00     |
| 5.        | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis PNS                 | 4.23     | 4.06     | 4.58     | 5.15     | 2.71     |
| 6.        | Belanja Premi Asuransi Kesehatan   | 0.85     | 1.08     | 1.00     | 0.36     | 1.49     |
| 7.        | Belanja Makanan dan Minuman Pegawai  | 2.57     | 3.70     | 1.41     | 1.88     | 3.29     |
| 8.        | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya   | 2.22     | 3.04     | 1.65     | 2.47     | 0.58     |
| 9.        | Belanja Pakaian Khusus dan Hari - Hari Tertentu                              | 2.53     | 3.13     | 2.94     | 3.48     | 4.66     |
| 10.       | Belanja Perjalanan Dinas   | 31.13    | 36.37    | 48.56    | 56.10    | 39.23    |
| 11.       | Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubeler, Peralatan, Perlengkapan)       | 87.49    | 53.34    | 63.00    | 51.30    | 32.08    |
| 12.       | Belanja Pegawai BLUD   | 85.16    | 95.71    | 94.34    | 108.51   | 104.33   |
| 13.       | Belanja Pegawai Dana BOS   | 0.00     | 60.23    | 57.46    | 45.76    | 62.15    |
| TOTAL     |  | 1,818.38 | 1,732.08 | 1,841.10 | 2,217.65 | 2,175.05 |

Sumber: Data LRA Pemda Tahun 2016 - 2020

Tabel berikut menyajikan proporsi realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran daerah untuk menentukan seberapa efisien alokasi anggaran belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama ini dan bagaimana kebijakan di masa mendatang terkait dengan belanja aparatur ini.

**Tabel 3.9.**

**Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020**  
*(dalam milyar rupiah)*

| No. | Tahun | Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp) | Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (Rp) | Prosentase (%)   |
|-----|-------|---|---|------------------|
|     |       | A   | b   | (a) / (b) x 100% |
| 1.  | 2016  | 1.733,22  | 3.458,813   | 50,11            |
| 2.  | 2017  | 1.576,15  | 3.619,095   | 43,55            |
| 3.  | 2018  | 1.688,20  | 3.706,863   | 45,54            |
| 4.  | 2019  | 1.776,84  | 4.383,643   | 40,53            |
| 5.  | 2020  | 1.779,50  | 3.694,215   | 48,17            |

Sumber: Data LRA Pemda Tahun 2016 - 2020

Proporsi belanja pemenuhan aparatur terhadap total pengeluaran dari tahun ke tahun memperlihatkan tren menurun, meski secara besaran nominal belanja untuk aparatur tersebut masih cenderung meningkat. Pada tahun 2016 dan 2017 realisasi sebesar 50,11% dan 43,55%. Akan tetapi pada tahun 2018 mengalami sedikit kenaikan menjadi sebesar 45,54%.

Selanjutnya meskipun porsi belanja pemenuhan aparatur pada tahun 2019 mengalami penurunan, namun pada tahun 2020 mengalami kenaikan kembali menjadi 48,17%. Meski demikian secara keseluruhan proporsi belanja selama empat tahun terakhir bisa ditekan dibawah 50% terhadap total pengeluaran. Hal ini menunjukkan bahwa ada upaya kebijakan dan pelaksanaan anggaran yang lebih memprioritaskan keberhasilan program prioritas pembangunan daerah.

### 3.2.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan Daerah Kabupaten Cirebon berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan kembali investasi pemerintah daerah. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan daerah Kabupaten Cirebon adalah pembentukan dana cadangan, penyertaan modal dan pembayaran pokok hutang.

Analisis realisasi pembiayaan, baik penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, beserta proyeksinya masuk dalam kategori penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Pada sub bab pembiayaan daerah ini akan dibahas analisis Penutup Defisit Anggaran, analisis SiLPA, dan analisis Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran. Tabel 3.9 berikut menunjukkan analisis perhitungan surplus (defisit) riil dan pengaruhnya terhadap kebijakan pembiayaan daerah.

Tabel di bawah menunjukkan bahwa selama 4 (empat) tahun terakhir terjadi defisit riil pada realisasi anggaran pada tahun 2016 dan 2017, sedangkan pada tahun 2018 diproyeksikan masih terjadi defisit riil realisasi anggaran. Meskipun terjadi defisit riil pada tahun 2016 - 2018, saldo penggunaan SiLPA pada penerimaan pembiayaan relatif cukup besar sehingga masih menghasilkan realisasi SiLPA yang dapat digunakan untuk menutup defisit riil pada tahun selanjutnya. Pada tahun 2018 terjadi defisit riil realisasi anggaran tetapi terdapat saldo penggunaan SiLPA relatif cukup besar karena defisit riil yang relatif kecil pada 2 tahun sebelumnya dan pencairan dana cadangan pada tahun 2017.



**Tabel 3.10.**

**Defisit Riil Anggaran Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020**  
*(dalam milyar rupiah)*

| No.        | Uraian  | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            |   | (Rp)          | (Rp)          | (Rp)          | (Rp)          | (Rp)          |
| 1.         | Realisasi Pendapatan Daerah                                       | 3.161,71      | 3.362,41      | 3.591,54      | 3.683,13      | 4.014,47      |
|            | Dikurangi Realisasi:  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.         | Belanja Daerah  | 2.987,08      | 3.419,43      | 3.598,09      | 3.681,47      | 4.025,76      |
| 3.         | Pengeluaran Pembiayaan Daerah                                     | 2,93          | 39,38         | 21,00         | 25,40         | 21,50         |
| <b>A.</b>  | <b>Surplus (Defisit) Riil</b>                                     | <b>171,70</b> | <b>-96,40</b> | <b>-27,55</b> | <b>-23,73</b> | <b>-32,79</b> |
|            | Defisit ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.         | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya | 217,20        | 388,90        | 292,50        | 304,95        | 300,12        |
| 5.         | Pencairan Dana Cadangan   | 0,00          | 0,00          | 40,00         | 28,49         | 0,00          |
| 6.         | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 7.         | Penerimaan Pinjaman Daerah  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 8.         | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>B.</b>  | <b>Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>               | <b>217,20</b> | <b>388,90</b> | <b>332,50</b> | <b>333,44</b> | <b>300,12</b> |
| <b>A-B</b> | <b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>             | <b>388,90</b> | <b>292,50</b> | <b>304,95</b> | <b>309,71</b> | <b>267,33</b> |

Sumber: Data LRA Pemda Tahun 2016 - 2020 (proyeksi)

Pada tahun 2016 tidak terjadi defisit riil tetapi surplus sebesar Rp. 171,70 Milyar dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya sebesar Rp. 217, 20 Milyar sehingga SiLPA yang terbentuk sebesar Rp. 388,90.

Pada Tahun 2017 terjadi defisit riil sebesar (Rp 96.400.089.800) ditutup dengan SiLPA sebesar Rp 388.899.824.821 sehingga SiLPA yang terbentuk menjadi sebesar Rp 292.499.735.022.

Pada tahun 2018 defisit riil yang terjadi mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun 2017 yang menjadi sebesar (Rp 27.551.847.986) ditutup dengan SiLPA sebesar Rp 292.499.735.022 dan pencairan dana cadangan sebesar Rp 40.000.000.000 sehingga SiLPA menjadi Rp 304.947.887.036, meningkat dibandingkan tahun 2017.

Pada tahun 2019 terjadi defisit riil realisasi sebesar Rp 23.732.742.828,77 yang ditutup dengan SiLPA sebesar Rp 304.947.887.036 dan pencairan dana cadangan sebesar Rp 56.169.293 sehingga hal ini berakibat pada terbentuknya SiLPA pada di tahun 2019 sebesar Rp. 301.071.313.499,82.

Pada tahun 2020 defisit riil sebesar (Rp 32.786.005.145,67) ditutup dengan SiLPA sebesar Rp 300.120.443.501,73 dan Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp. 21.500.000.000,00 sehingga SiLPA yang terbentuk menjadi sebesar Rp 288.834.438.356,06. Dan Pada Tahun 2020 terjadi surplus sebesar Rp 76.489.556.344,01) ditambah SiLPA sebesar Rp 288.834.438.356,06 dan ehingga SiLPA yang terbentuk menjadi sebesar Rp 365.324.004.700,07

Jika dilihat dari komponen dalam SiLPA sebagian besar pembentuk SiLPA adalah hasil sisa belanja tidak langsung dan belanja langsung yang kurang realisasinya.

Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa komponen SiLPA mempunyai proporsi yang cukup signifikan untuk menutup defisit riil anggaran dimaksud sementara sumber penerimaan pembiayaan lainnya belum signifikan untuk menutup defisit riil realisasi.



**Tabel 3.11.**

**Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Cirebon**

| No. | Uraian  | Proporsi dari total defisit riil |         |         |         |         |
|-----|---|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|     |   | 2016                             | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
| 1   | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya | 126.50%                          | 226.50% | 170.36% | 177.61% | 174.79% |
| 2   | Pencairan Dana Cadangan   | 0.00%                            | 0.00%   | 23.30%  | 16.59%  | 0.00%   |

Sumber: Data LRA Pemda Tahun 2016 - 2020

Analisis yang dapat dilakukan untuk mendapat gambaran realisas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun berkenaan dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini,

**Tabel 3.12.**

**Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Cirebon Tahun 2016 – 2020 (dalam milyar)**

| NO.        | URAIAN   | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
|------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>6</b>   | <b>Pembiayaan</b>                              | <b>349.52</b> | <b>311.50</b> | <b>298.45</b> | <b>300.12</b> | <b>288.83</b> |
| <b>6.1</b> | <b>Penerimaan Pembiayaan</b>                   | <b>388.90</b> | <b>332.50</b> | <b>323.85</b> | <b>321.62</b> | <b>288.83</b> |
| 6.1.1      | Penggunaan SiLPA                               | 388.90        | 292.50        | 304.00        | 300.12        | 288.83        |
| 6.1.2      | Pencairan Dana Cadangan                        | 0.00          | 40.00         | 0.06          | 0.00          | 0.00          |
| 6.1.3      | Penerimaan Pinjaman Daerah                     | 0.00          | 0.00          | 19.80         | 21.50         | 0.00          |
| <b>6.2</b> | <b>Pengeluaran Pembiayaan</b>                  | <b>39.38</b>  | <b>21.00</b>  | <b>25.40</b>  | <b>21.50</b>  | <b>0.00</b>   |
| 6.2.1      | Pembentukan Dana Cadangan                      | 20.00         | 20.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 6.2.2      | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 17.59         | 1.00          | 4.77          | 0.00          | 0.00          |
| 6.2.3      | Pembayaran Pokok Pinjaman                      | 1.80          | 0.00          | 20.63         | 21.50         | 0.00          |

Sumber: Data LRA Pemda Tahun 2016 – 2020

### 3.3. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. Kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum



terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

Pada akhir tahun 2019, beberapa peraturan baru yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diterbitkan pemerintah pusat, termasuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kesemuanya ini merupakan hal baru di dalam pengelolaan keuangan daerah yang harus diterapkan dan diberlakukan mulai Tahun anggaran 2021.

Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dalam penyusunan APBD Tahun 2021 sudah mempedomani dan melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, sehingga berbeda dengan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020. Hal ini diperkuat dengan Surat Edaran Nomor 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang salah satu butir SE tersebut berisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

**Gambar 3.5**

**Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019**



Sumber: Diolah oleh Bappeda Kabupaten Cirebon, 2021

Selain adanya peraturan baru yang terbit di akhir tahun 2019, terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) wabah Pandemi Covid-19 yang berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan, hal ini berdampak pada banyak aspek, antara lain aspek sosial dan ekonomi. Sektor usaha masyarakat kecil dan menengah, bahkan industri dalam skala besar juga terkena imbasnya akibat dampak pandemi COVID-19 ini.

Perkembangan penyebaran COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi dan memutus penyebaran pandemi ini, kebijakan Adaptasi kebiasaan baru (AKB), social distancing dan anjuran work from home yang diambil pemerintah, mengakibatkan beberapa sektor perekonomian, pelayanan publik, dan sektor lainnya mengurangi atau menghentikan aktivitasnya sementara sampai waktu yang belum ditentukan. Kebijakan tersebut mengakibatkan berkurangnya aktivitas masyarakat yang berimplikasi terhadap lesunya sendi-sendi perekonomian baik dalam skala makro maupun mikro.

Kondisi yang sama juga berlaku pada sektor penerimaan daerah Kabupaten Cirebon. Diterapkannya kebijakan pemerintah yang meminta agar masyarakat berdiam diri di rumah selama pandemi COVID-19 ini berdampak terhadap penerimaan pendapatan daerah, khususnya dari retribusi maupun potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penurunan pendapatan dialami karena penurunan aktivitas ekonomi masyarakat merambat pada dampak sosial di kehidupan masyarakat, dengan meningkatnya jumlah pengangguran dan berkurangnya tingkat daya beli yang pada akhirnya berdampak pada penurunan beberapa jenis penerimaan pendapatan daerah.

Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon pada Tahun Anggaran 2021 diasumsikan akan mengalami penurunan bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Hal tersebut berpengaruh terhadap proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 yang diasumsikan juga mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan target Tahun Anggaran 2020.

Dengan pendapatan daerah yang menurun, maka Belanja Daerah yang sebelumnya fokus untuk melaksanakan dan menuntaskan program/kegiatan yang sudah diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Cirebon, pada tahun mendatang selain tetap menuntaskan program/kegiatan strategis, juga harus mendanai kegiatan-kegiatan dalam rangka pemulihan ekonomi dan kesehatan pasca pandemi COVID-19.

### **3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja**

Dalam menentukan proyeksi pendapatan perlu dipertimbangkan kinerja pendapatan periode yang lalu serta berdasarkan asumsi-asumsi yang kita buat. Asumsi-asumsi yang mendasari proyeksi Pendapatan Daerah dalam APBD tersebut diantaranya adalah:

1. Pendapatan asli daerah mengalami kenaikan setiap tahun antara lain disebabkan:
  - a. Bertambahnya objek dan wajib pajak dan retribusi;



- b. Adanya peningkatan tarif untuk beberapa jenis pajak dan retribusi;
  - c. Adanya perubahan nilai jual objek pajak (NJOP) pada objek PBB-P2 dan BPHTB.
  - d. Adanya peningkatan penerimaan lain-lain PAD yang sah, seperti bagi hasil deviden, jasa giro, dan lain-lain.
2. Sepanjang tidak ada perubahan kebijakan mendasar dari pemerintah pusat, terjadi kecenderungan kenaikan dana perimbangan setiap tahun, dengan uraian sebagai berikut:
  - a. Adanya kenaikan penerimaan dana bagi hasil pajak/bukan pajak seiring peningkatan penerimaan negara;
  - b. Adanya kenaikan DAU, terutama adanya kebijakan penambahan penerimaan pegawai baru dan kenaikan gaji pegawai;
  - c. Adanya kenaikan DAK baik fisik maupun non fisik untuk membantu percepatan pembangunan daerah.
3. Sepanjang tidak ada perubahan kebijakan mendasar dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami kenaikan setiap tahun, diantaranya:
  - a. Adanya kenaikan bantuan hibah untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seiring dengan meningkatnya jumlah siswa dan kenaikan harga satuan pendidikan dana BOS;
  - b. Adanya kenaikan penerimaan dana bagi hasil pajak provinsi seiring peningkatan penerimaan provinsi;
  - c. Adanya kenaikan bantuan keuangan untuk membantu percepatan pembangunan kabupaten.

Selain asumsi-asumsi yang mendasari penentuan proyeksi pendapatan tersebut, tentunya perlu dibuat kebijakan terkait pengelolaan pendapatan kedepan. Kebijakan Pendapatan daerah memberikan gambaran tentang arah dan upaya dalam pencapaian target pendapatan daerah. Optimalisasi penerimaan menjadi upaya prioritas dalam arah kebijakan keuangan daerah mendatang. Selain pendanaan yang

bersumber dari APBD baik yang bersumber dari PAD, dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pendanaan non APBD seperti dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSLP)/Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan potensi yang dapat digali untuk menunjang pendanaan pembangunan di Kabupaten Cirebon. Berikut arah kebijakan pendapatan daerah, baik Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer maupun lain-lain Pendapatan sebagai berikut:

- a. Optimalisasi dampak Metropolitan Cirebon Raya (MCR) untuk pengembangan kawasan industri eksklusif maupun industri inklusif berbasis sumber daya lokal baik pertanian, industri kecil, budaya, maupun pariwisata;
- b. Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah terutama bagi sumber pendapatan pajak dan retribusi yang potensial;
- c. Optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan Perangkat Daerah penghasil;
- d. Optimalisasi penggunaan teknologi dan sistem informasi untuk pengelolaan pendapatan daerah;
- e. Optimalisasi Badan Penanaman Modal Daerah untuk koordinasi dan pengendalian penanaman modal asing maupun nasional di Kabupaten Cirebon;
- f. Peningkatan koordinasi dan sinergitas di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah Penghasil, Pemerintah Kecamatan, dan Desa/Kelurahan;
- g. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyertaan modal pada BUMD dan Perusahaan Daerah (Perusda) untuk peningkatan penerimaan bagi hasil (deviden);
- h. Meningkatkan pendayagunaan aset dan keuangan daerah;
- i. Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber daerah dari bagi hasil baik dari pajak maupun bukan pajak lainnya;

- j. Meningkatkan akurasi data dan sumber daya yang dijadikan instrumen dasar perhitungan Dana Perimbangan;
- k. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.

Berdasarkan arah kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut di atas, untuk dapat merealisasikan proyeksi penerimaan pendapatan daerah diperlukan strategi pencapaiannya, antara lain:

- a. Penataan kelembagaan, kebijakan, dan regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
- b. Optimalisasi pemungutan atas pajak dan retribusi serta pengembangan sistem penagihan dan komplain atas wajib pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
- c. Meningkatkan literasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah
- d. Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan publik secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
- e. Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak, seperti pengembangan gerai/outlet, dan kerjasama dengan pihak perbankan;
- f. Meningkatkan penyertaan modal untuk BUMD dan Perusahaan Daerah guna peningkatan penerimaan bagi hasil (deviden);
- g. Revitalisasi Perusahaan Daerah (PD) melalui berbagai upaya, antara lain: pengelolaan PD secara profesional, peningkatan sarana/prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas agar PD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari publik/perbankan;
- h. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- i. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah,



terutama dengan perbankan sehingga mempermudah pelayanan pembayaran pajak daerah melalui layanan perbankan secara langsung;

- j. Mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan perangkat daerah penghasil.
- k. Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak penghasilan dan Pajak lainnya yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Cirebon, serta bukan pajak lainnya
1. Meningkatkan akurasi data-data dan sumber daya yang dijadikan instrumen dasar perhitungan Dana Transfer;
  - 1) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengupayakan peningkatan Dana Perimbangan (DAU, DAK, dan dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak);
  - 2) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengupayakan peningkatan besaran bagi hasil pajak provinsi dan dana bantuan keuangan.

Selanjutnya, asumsi-asumsi yang mendasari proyeksi Belanja Daerah dalam APBD tersebut diantaranya adalah:

1. Belanja pegawai selalu meningkat setiap tahun sebagai akibat dari kenaikan gaji dan penambahan jumlah pegawai (penerimaan PNS tahun 2018);
2. Belanja subsidi untuk pembayaran insentif bagi petani pemilik lahan yang dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang terintegrasi dengan kartu PEPEK;
3. Belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dialokasikan untuk membantu penyelenggaraan pembangunan daerah;
4. Kebutuhan belanja publik yang semakin meningkat untuk mendanai program-program daerah sebagai upaya pencapaian visi misi Pemerintah Kabupaten Cirebon;

5. Penyesuaian terhadap kenaikan harga (inflasi) dengan kebutuhan belanja.

Penentuan proyeksi belanja tahun 2020 dilakukan dengan mengalikan realisasi belanja tidak langsung tahun 2018 atau APBD 2019 sebagai tahun dasar dengan pertumbuhan yang ditetapkan. Baru kemudian, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 untuk menentukan proyeksi belanja dilakukan dengan mengalikan proyeksi terakhir dengan pertumbuhan yang ditetapkan.

Beberapa pos pengeluaran belanja, seperti Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, belanja subsidi dan Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Daerah, memiliki kebijakan dan arah penentuan yang khusus sehingga tidak mengikuti asumsi angka pertumbuhan yang telah ditentukan. Misalnya, untuk proyeksi belanja pegawai berdasarkan asumsi angka pertumbuhan akan tumbuh sebesar 1,92% per tahun tetapi mengingat pada tahun 2020-2024 Kab. Cirebon berencana akan merekrut ASN baru serta pertimbangan pertumbuhan Dana Alokasi Umum yang hanya sebesar 1,67%, maka diproyeksikan akan tumbuh sebesar 7,9%. Proyeksi Belanja Hibah ditetapkan sebesar Rp 3.200.000.000,- pada tahun 2019 dan kemudian menjadi sebesar Rp 32.210.000.000,- pada tahun 2020 dengan peningkatan selanjutnya sebesar angka pertumbuhan 2%. Hal ini disebabkan alokasi Belanja Hibah pada tahun 2020 banyak ditujukan untuk mensukseskan program janji bupati terpilih. Selain itu juga, alokasi Belanja Bagi Hasil untuk Pemerintah Desa diperkirakan akan mengalami kenaikan seiring dengan adanya kebijakan peningkatan pajak dan retribusi daerah di masa mendatang.

Sedangkan kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang efektif, efisien, proporsional, fokus, transparan dan akuntabel, terutama untuk belanja daerah yang prioritas seperti:

1. Pemenuhan alokasi anggaran untuk urusan dan bidang tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;



2. Pemenuhan alokasi anggaran untuk pelayanan dan operasional perangkat daerah;
3. Penganggaran belanja kegiatan yang proporsional, rasional, efektif dan efisien berbasis program prioritas (Maney Follow Programs, Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial) dalam rangka memenuhi janji politik dan program prioritas kepala daerah;
4. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan bidang sosial;
5. Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);
6. Sinkronisasi prioritas pembangunan dalam RPJMN tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
7. Penggunaan dana fungsi Pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan;
8. Pemenuhan alokasi belanja untuk kegiatan prioritas yang menjadi aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui musrenbang dan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD pada saat pelaksanaan reses;
9. Pemenuhan belanja untuk program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pemenuhan target kinerja dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
10. Alokasi belanja untuk mendukung program dan kegiatan prioritas pemerintah pusat dan provinsi Jawa Barat;
11. Mengkoordinasikan dan mensinergikan perencanaan dan penganggaran desa (RPJMDesa dan APBDesa) untuk mendukung visi dan misi kabupaten Cirebon terutama kebijakan Alokasi Dana Desa



(ADD) dan Dana Desa (DD) dari APBN tanpa mengabaikan kedudukan dan kewenangan desa.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, Pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 memberikan pengaruh yang besar terhadap kondisi saat ini. Dalam hal penganggaran tahun 2021 hingga tahun 2023, baik pendapat daerah maupun belanja daerah diproyeksikan mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain melakukan upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi, upaya penyesuaian juga akan dilakukan melalui penyelenggaraan urusan pemerintah wajib dan pilihan, sinkronisasi prioritas pembangunan RPJMN tahun 2020-2024, pencapaian TPB, pencapaian SPM, dan tentu saja ditambah dengan upaya prioritasasi bidang Pendidikan, Kesehatan, Jaring Pengaman Sosial, dan pemulihan ekonomi akibat terdampak Covid-19.

Adapun proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, yang menggunakan struktur APBD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ditunjukkan pada tabel di bawah ini:



**Tabel 3.13.**

**Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019–2024  
Berdasarkan Akun PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019  
(dalam Milyar rupiah)**

| No.       | Uraian  | Pertum-<br>buan<br>(%) | Baseline        | Proyeksi        |                 |                 |                 |
|-----------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   |                        | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            |
| <b>1</b>  | <b>PENDAPATAN</b>                                 | 1.06%                  | 3,770.69        | 3711.19         | 3742.91         | 3899.93         | 3930.28         |
| <b>11</b> | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                     | 9.88%                  | 616.57          | 671.65          | 703.37          | 860.39          | 890.74          |
| 111       | Pajak daerah                                      | 5.90%                  | 223.61          | 259.95          | 259.15          | 268.92          | 279.38          |
| 112       | Retribusi daerah                                  | 9.91%                  | 31.12           | 37.51           | 42.00           | 43.48           | 45.05           |
| 113       | Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan | 0.87%                  | 9.31            | 9.63            | 9.63            | 9.63            | 9.63            |
| 114       | Lain-lain PAD yang sah                            | 12.91%                 | 352.53          | 364.56          | 392.59          | 538.35          | 556.68          |
| <b>12</b> | <b>Pendapatan Transfer</b>                        | 0.48%                  | <b>2,809.56</b> | <b>2,863.15</b> | <b>2,863.15</b> | <b>2,863.15</b> | <b>2,863.15</b> |
| 121       | Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan        | -0.13%                 | 2,021.91        | 2,011.06        | 2,011.06        | 2,011.06        | 2,011.06        |
| 1211      | Dana Bagi Hasil Pajak                             | -4.21%                 | 69.56           | 57.84           | 57.84           | 57.84           | 57.84           |
| 1212      | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam                  | -11.44%                | 38.48           | 20.87           | 20.87           | 20.87           | 20.87           |
| 1213      | Dana Alokasi Umum                                 | -0.19%                 | 1,417.09        | 1,406.29        | 1,406.29        | 1,406.29        | 1,406.29        |
| 1214      | Dana Alokasi Khusus                               | 1.47%                  | 496.78          | 526.06          | 526.06          | 526.06          | 526.06          |
| 122       | Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya                 | -0.45%                 | <b>504.52</b>   | <b>495.45</b>   | <b>495.45</b>   | <b>495.45</b>   | <b>495.45</b>   |
| 1221      | Dana Otonomi Daerah                               | 0.00%                  | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 1222      | Dana Penyesuaian                                  | 0.00%                  | 504.52          | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 1223      | Dana Insentif Daerah                              | 0.00%                  | 0.00            | 40.88           | 40.88           | 40.88           | 40.88           |
| 1224      | Dana Desa   | 0.00%                  | 0.00            | 454.57          | 454.57          | 454.57          | 454.57          |
| 123       | Transfer Pemerintah Provinsi                      | 6.49%                  | 283.13          | 356.64          | 356.64          | 356.64          | 356.64          |
| 1231      | Pendapatan Bagi Hasil Pajak                       | 6.49%                  | 283.13          | 356.64          | 356.64          | 356.64          | 356.64          |



| No.       | Uraian                               | Pertum-<br>buan<br>(%) | Baseline        | Proyeksi        |                 |                 |                 |
|-----------|--------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                      |                        | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            |
| 1232      | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya        | 0.00%                  | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| <b>13</b> | <b>Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</b> | -12.20%                | <b>344.56</b>   | <b>176.39</b>   | <b>176.39</b>   | <b>176.39</b>   | <b>176.39</b>   |
| 131       | Pendapatan Hibah                     | 0.00%                  | 233.72          | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 132       | Pendapatan Dana Darurat              | 0.00%                  | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 133       | Bantuan Keuangan Dari Provinsi       | 14.78%                 | 110.84          | 176.39          | 176.39          | 176.39          | 176.39          |
| 134       | Pendapatan Lainnya                   | 0.00%                  | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
|           |                                      |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>2</b>  | <b>BELANJA</b>                       | 2.10%                  | <b>3,694.22</b> | <b>3,856.22</b> | <b>3,824.51</b> | <b>3,921.57</b> | <b>4,011.33</b> |
| <b>21</b> | <b>BELANJA OPERASI</b>               | 2.29%                  | <b>2,673.70</b> | <b>2,832.60</b> | <b>2,823.85</b> | <b>2,867.82</b> | <b>2,924.80</b> |
| 211       | Belanja Pegawai                      | 2.66%                  | <b>1,779.50</b> | <b>1,835.44</b> | <b>1,881.33</b> | <b>1,928.36</b> | <b>1,976.57</b> |
| 212       | Belanja Barang dan jasa              | 1.50%                  | <b>847.80</b>   | <b>954.47</b>   | <b>902.19</b>   | <b>897.30</b>   | <b>892.17</b>   |
| 213       | Belanja Bunga                        | 0.00%                  | 0               | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 214       | Belanja Subsidi                      | 0.00%                  | 0               | 0.00            | 3.60            | 3.60            | 3.60            |
| 215       | Belanja Hibah                        | 6.28%                  | 45.48           | 29.34           | 34.50           | 36.22           | 50.00           |
| 216       | Belanja Bansos                       | 319.46%                | 0.92            | 13.35           | 2.23            | 2.34            | 2.46            |
| <b>22</b> | <b>BELANJA MODAL</b>                 | 3.14%                  | <b>296.95</b>   | <b>331.21</b>   | <b>289.49</b>   | <b>321.73</b>   | <b>329.77</b>   |
| <b>23</b> | <b>BELANJA TAK TERDUGA</b>           | -5.75%                 | <b>53.99</b>    | <b>28.08</b>    | <b>29.48</b>    | <b>30.96</b>    | <b>35.60</b>    |
| <b>24</b> | <b>BELANJA TRANSFER</b>              | 1.88%                  | <b>669.58</b>   | <b>664.33</b>   | <b>681.68</b>   | <b>701.06</b>   | <b>721.16</b>   |
| 241       | Belanja Bagi Hasil                   | 8.90%                  | 26.87           | 29.72           | <b>31.21</b>    | <b>34.33</b>    | <b>37.76</b>    |
| 242       | Belanja Bantuan Keuangan             | 1.56%                  | 642.71          | 634.61          | <b>650.48</b>   | <b>666.74</b>   | <b>683.41</b>   |
|           | <b>SURPLUS/DEFISIT</b>               |                        | 76.47           | -145.03         | -81.60          | -21.64          | -81.05          |
| <b>3</b>  | <b>PEMBIAYAAN</b>                    | -18.56%                | <b>288.83</b>   | <b>359.50</b>   | <b>212.27</b>   | <b>128.67</b>   | <b>105.02</b>   |
| 31        | Penerimaan Pembiayaan                | -16.47%                | 288.83          | 365.30          | 220.27          | 138.67          | 117.02          |
| 32        | Pengeluaran Pembiayaan               | 20.73%                 | 0               | 5.80            | 8.00            | 10.00           | 12.00           |

(proyeksi)

berdasarkan

PP

12/2019)

### 3.3.1.1. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh.

Analisa proyeksi penerimaan pembiayaan daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Hasil analisis digunakan untuk menghitung kapasitas penerimaan daerah dengan proyeksi 5 tahun ke depan (2020 – 2024). Data dan informasi yang dapat mempengaruhi besarnya sisa lebih riil perhitungan anggaran di masa datang, antara lain:

1. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
2. Kebijakan penyelesaian kewajiban daerah; dan
3. Kebijakan efisiensi belanja daerah dan peningkatan pendapatan.

Proyeksi realisasi pengeluaran pembiayaan ditentukan sesuai dengan kebutuhan pengalokasian setiap tahunnya. Oleh karena itu, akan dilakukan penyesuaian angka pertumbuhan yang akan digunakan untuk menghitung proyeksi keuangan di masa mendatang. Sementara itu, untuk alokasi pengeluaran pembiayaan terutama terkait dengan alokasi penyertaan modal dan pembentukan dana cadangan. Untuk Pembayaran Pokok Utang diperkirakan sudah tidak ada lagi sehingga ditetapkan sebesar Rp 0,-. Dengan demikian proyeksi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dapat disajikan sebagaimana tabel 3.13.



Sedangkan, rumusan umum kebijakan pembiayaan daerah Cirebon diarahkan untuk:

1. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun lalu;
2. Membentuk dana cadangan yang akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya strategis;
3. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian.

Rumusan umum kebijakan pembiayaan daerah dituangkan dalam kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Kebijakan penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA).

Besarnya SiLPA yang akan diperhitungkan dalam pembiayaan APBD adalah hasil perhitungan SiLPA pada pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran sebelumnya setelah diaudit BPK dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. SiLPA yang dicantumkan dalam RAPBD adalah bersifat prediksi atas pelaksanaan kegiatan tahun berjalan.

2. Pencairan Dana Cadangan

Dana Cadangan dicairkan sejumlah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.

Sedangkan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

1. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.

Investasi yang akan dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon adalah investasi jangka panjang yang bersifat permanen, yaitu bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Penyertaan modal berupa uang dan/atau barang daerah dialokasikan pada BUMD.



## 2. Pembentukan Dana Cadangan.

Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Dengan asumsi-asumsi yang mendasari proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dalam APBD di atas, yang merujuk pada pengelompokan jenis dan objek pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, didapatkan Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 - 2024 sebagaimana Tabel 3.14 di bawah ini. Kemudian dari proyeksi tersebut dikonversi dalam pengelompokan jenis pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020, didapatkan proyeksi APBD Kab. Cirebon Tahun 2020-2024 sebagaimana dalam tabel berikut ini,



**Tabel 3.14.**

**Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama  
(dalam milyar rupiah)**

| No.  | Uraian  | Tingkat        | Data Tahun      | Proyeksi        |                 |                 |                 |
|--|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |   | Pertumbuhan    | Dasar (2020)    | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            |
|  |   | (%)            | (Rp)            | (Rp)            | (Rp)            | (Rp)            | (Rp)            |
| <b>A.</b>  | <b>Belanja</b>  | <b>16,53 %</b> | <b>1,899.04</b> | <b>1,901.87</b> | <b>1,923.46</b> | <b>1,947.33</b> | <b>1,972.02</b> |
| 1.   | Belanja Gaji Dan Tunjangan  | 2,5%           | 1,209.11        | 1,212.14        | 1,215.17        | 1,218.21        | 1,221.25        |
| 2.   | Belanja Penerimaan Anggota dan Impinan DPRD Serta Operasional KDH/Wakil KDH | 21,43%         | 9.59            | 10.53           | 11.26           | 12.05           | 12.89           |
| 3.   | Belanja Pemungutan Pajak Daerah   | 20,42%         | 9.99            | 13.00           | 12.96           | 13.45           | 13.97           |
| 4.   | Belanja Insentif Pemungutan Retribusi                                       | 5,49%          | 0.77            | 1.88            | 2.39            | 2.56            | 2.74            |
| 5.   | Belanja Bagi Hasil  | 9%             | 26.87           | 29.72           | 31.21           | 34.33           | 37.76           |
| 6.   | Bantuan Keuangan  | 2%             | 642.71          | 634.61          | 650.48          | 666.74          | 683.41          |
| <b>B.</b>  | <b>Pengeluaran Pembiayaan</b>   | <b>20.73%</b>  | <b>0.00</b>     | <b>5.80</b>     | <b>8.00</b>     | <b>10.00</b>    | <b>12.00</b>    |
| 1.   | Pembentukan Dana Cadangan   | -              | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 2.   | Pembayaran Pokok Utang  | 0%             | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 3.   | Penyertaan Modal  | 20.73%         | 0.00            | 5.80            | 8.00            | 10.00           | 12.00           |
| <b>TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB DAN MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA</b> |   | <b>17,93%</b>  | <b>1,899.04</b> | <b>1,907.67</b> | <b>1,931.46</b> | <b>1,957.33</b> | <b>1,984.02</b> |

Sumber: Data LRA Pemda Tahun 2016 – 2020 dan *forecasting*

### 3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang harus memperhatikan, antara lain:

1. Penerimaan retribusi diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi dan pajak tersebut dipungut;
2. Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah;
3. Penerimaan dari lain-lain pendapatan asli daerah yang bersumber dari dana kapitasi dan pengelolaan BLUD Rumah sakit dialokasikan kembali untuk belanja BLUD;
4. Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah;
5. Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan di mana dana tersebut dialokasikan;
6. Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

Perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah adalah dengan menghitung proyeksi pendapatan daerah ditambah dengan pencairan Dana Cadangan (jika ada) dan Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran seperti pada tabel 3.14 di



atas, sehingga menghasilkan angka proyeksi total penerimaan riil kas daerah. Proyeksi total penerimaan riil kas daerah dikurangi dengan proyeksi total belanja dan pengeluaran yang wajib dan mengikat serta prioritas utama sehingga akan menghasilkan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah selama 5 tahun mendatang.

Perhitungan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk pembangunan daerah Kabupaten Cirebon tahun 2020 s.d tahun 2024 disajikan pada tabel 3.15 berikut.

**Tabel 3.15.**

**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah  
untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon**

| Uraian  | Realisasi<br>2020 | APBD<br>2021    | Proyeksi        |                 |                 |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |                   |                 | 2022            | 2023            | 2024            |
|   | (Rp)              | (Rp)            | (Rp)            | (Rp)            | (Rp)            |
| Pendapatan  | 3,770.69          | 3,711.19        | 3,742.91        | 3,899.93        | 3,930.28        |
| Sisa Lebih (Riil)<br>Perhitungan Anggaran               | 288.83            | 359.50          | 212.27          | 128.67          | 105.02          |
| Total Penerimaan  | 4,059.52          | 4,070.69        | 3,955.17        | 4,028.60        | 4,035.31        |
| <i>Dikurangi:</i>                                       |                   |                 |                 |                 |                 |
| Pengeluaran pembiayaan                                  | 0                 | 5.80            | 8.00            | 10.00           | 12.00           |
| Belanja Tidak Langsung                                  | 2,495.48          | 2,542.46        | 2,599.74        | 2,667.98        | 2,750.19        |
| <b>Kapasitas Riil<br/>Kemampuan Keuangan<br/>Daerah</b> | <b>1,564.04</b>   | <b>1,522.43</b> | <b>1,347.44</b> | <b>1,350.61</b> | <b>1,273.11</b> |

Sumber: Data LRA Pemda Tahun 2016 - 2020

Berdasarkan perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tersebut di atas, maka dialokasikan untuk mendanai program pembangunan daerah yang dilaksanakan melalui program operasional pada program perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing dalam rangka memenuhi pelayanan perangkat daerah, memenuhi janji politik dan program unggulan kepala daerah serta pelaksanaan program prioritas perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Alokasi dana yang tersedia dan didistribusikan kepada program pembangunan daerah dan program perangkat daerah masih bersifat



indikatif dan dikelompokkan kedalam prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Prioritas I, merupakan kelompok program untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat,
2. Prioritas II, merupakan kelompok program pembangunan daerah dan program perangkat daerah dalam rangka untuk memenuhi visi misi kepala daerah;
3. Prioritas III, merupakan kelompok program pembangunan daerah dan program perangkat daerah dalam rangka untuk memenuhi program prioritas perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya. Realisasi dan rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah ditunjukkan pada tabel di bawah ini,

**Tabel 3.16.**

**Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah  
Kabupaten Cirebon  
(dalam milyar)**

| No.       | Uraian                                   | Realisasi       | Proyeksi        |                 |                 |                 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            |
| <b>A.</b> | <b>Kapasitas riil kemampuan keuangan</b> | <b>1,564.04</b> | <b>1,522.43</b> | <b>1,347.44</b> | <b>1,350.61</b> | <b>1,273.11</b> |
| 1.        | Prioritas I                              | 1024.75         | 672.43          | 569.53          | 537.87          | 599.37          |
| 2.        | Prioritas II                             | 43.69           | 349.48          | 379.87          | 436.88          | 352.92          |
| 3.        | Prioritas III                            | 495.60          | 500.52          | 398.04          | 375.86          | 320.82          |

Sumber: Data LRA Pemda Tahun 2016 - 2020



### 3.4. Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya

Sumber pembiayaan pembangunan selain bersumber dari APBD Kabupaten Cirebon, tentunya pemerintah daerah juga perlu mengoptimalkan sumber pembiayaan pembangunan dari sumber pendanaan lain, seperti halnya pendanaan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan pembiayaan yang bersumber dari *Corporate social responsibility* atau biasa disebut Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL). Pada Tahun 2019, dari total 195 perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Cirebon, jumlah perusahaan yang sudah menyelenggarakan program TJSL dan PKBL sebanyak 59 perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Perbankan                                 | : 8 Instansi  |
| 2. BUMN                                      | : 12 Instansi |
| 3. BUMD                                      | : 2 Instansi  |
| 4. Rumah Sakit, Hotel dan Lembaga Pendidikan | : 4 Instansi  |
| 5. Perusahaan Lainnya                        | : 33          |

Pada periode RPJMD akan diupayakan lebih banyak lagi perusahaan yang bisa berkontribusi.



## **BAB IV**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

Sebagai salah satu dari rangkaian kebijakan publik, perencanaan pembangunan dirumuskan berdasarkan analisis permasalahan. Semakin baik memahami permasalahan memberi peluang kepada daerah untuk meningkatkan kualitas kebijakan pembangunannya. Saat bersamaan, dinamika lingkungan eksternal yang berpengaruh bagi masa depan Kabupaten Cirebon juga harus dianalisis untuk melengkapi perspektif perencanaan. Berbagai peluang dan ancaman pembangunan dalam jangka menengah harus dikenali dengan baik. Dengan demikian, kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dirumuskan dalam RPJMD dimaksudkan untuk memberikan solusi atas berbagai masalah daerah danantisipasi atas isu strategis yang akan terjadi di masa dating dalam jangka menengah.

#### **4.1. Permasalahan Pembangunan**

Dalam melaksanakan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Cirebon tidak lepas dari berbagai permasalahan. Permasalahan adalah senjang harapan antara kondisi daerah saat ini dengan kondisi ideal atau target rencana di berbagai bidang. Memahami permasalahan pokok pembangunan dengan baik termasuk uraian permasalahan sektor-sektor yang terkait di dalamnya adalah separoh dari perencanaan itu sendiri. Analisis permasalahan dimaksudkan agar ditemukan solusi kebijakan berdasarkan antara lain ditemukenalinya berbagai akar permasalahan pembangunan. Memahami akar masalah menjadi panduan penting dalam analisis kebijakan.

Selanjutnya, berdasarkan gambaran umum pembangunan Kabupaten Cirebon selama beberapa tahun terakhir yang disajikan di bab 2 dokumen ini serta hasil analisis permasalahan sektoral atau bidang



urusan, dirumuskan 6 (enam) permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Cirebon sebagai berikut:

1. Lunturnya sebagian kearifan lokal masyarakat yang selaras dengan tantangan pembangunan;
2. Rendahnya daya saing SDM;
3. Kehidupan beragama belum sepenuhnya menghadirkan keshalehan sosial;
4. Kemandirian ekonomi daerah belum terwujud;
5. Tata pemerintahan belum menghasilkan layanan dan kebijakan publik yang berorientasi pada masyarakat; dan
6. Keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat belum optimal.

Berdasarkan uraian masalah pokok tersebut di atas, selanjutnya dijabarkan kedalam permasalahan dan akar masalah yang telah dirangkum berdasarkan kondisi di Kabupaten Cirebon, diantaranya sebagai berikut:

#### **1. Lunturnya sebagian kearifan lokal masyarakat yang selaras dengan tantangan pembangunan**

Cirebon tumbuh dan berkembang menjadi kabupaten penuh dengan warisan budaya dan sejarah yang menjadi bagian kebudayaan Cirebon, sebagai bagian penting dari kehidupan bangsa Indonesia dan tercatat sebagai situs sejarah nasional. Dalam konteks lebih spesifik Kebudayaan yang melekat pada masyarakat Cirebon merupakan perpaduan berbagai budaya yang datang dan membentuk ciri khas tersendiri. Dalam kaitan dengan khasanah seni dan budaya dapat dilihat dari beberapa pertunjukan khas masyarakat Cirebon antara lain Tarling, Tari Topeng Cirebon, Wayang Kulit Cirebon, Sintren, Kesenian Gembyung, Sandiwara Cirebonan dan sebagainya; mencerminkan kearifan dan nilai-lain luhur yang dimiliki oleh masyarakat asli Cirebon.

Tentu saja, banyaknya potensi budaya yang ada di Cirebon, bukan hanya akan mendatangkan wisatawan, melainkan bisa terbukanya lapangan pekerjaan di bidang pariwisata.



Dalam membangun, mengelola, hingga melestarikan budaya wisata di Cirebon, pihak pemerintah membutuhkan banyak orang untuk berpartisipasi dalam pembangunan maupun pelestarian. Kemudian tumbuh tempat wisata budaya dan sejarah yang juga dukungan masyarakat setempat. Inilah sisi kebudayaan Cirebon sebagai warisan sejarah.

Potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Cirebon terbentuk dari kondisi geografis (seperti obyek laut/bahari), sejarah (meliputi obyek wisata peninggalan-peninggalan sejarah) dan budaya yang dimiliki (meliputi keunikan masyarakat Kabupaten Cirebon dengan segala kebudayaannya).

Masalah lunturnya budaya masyarakat yang selaras dengan tantangan pembangunan dan pengembangannya bagi pariwisata, di sebabkan oleh permasalahan belum optimalnya pengembangan budaya dengan akar masalah yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta belum sinergis dan nyata dalam melestarikan dan memanfaatkan budaya asli Cirebon.

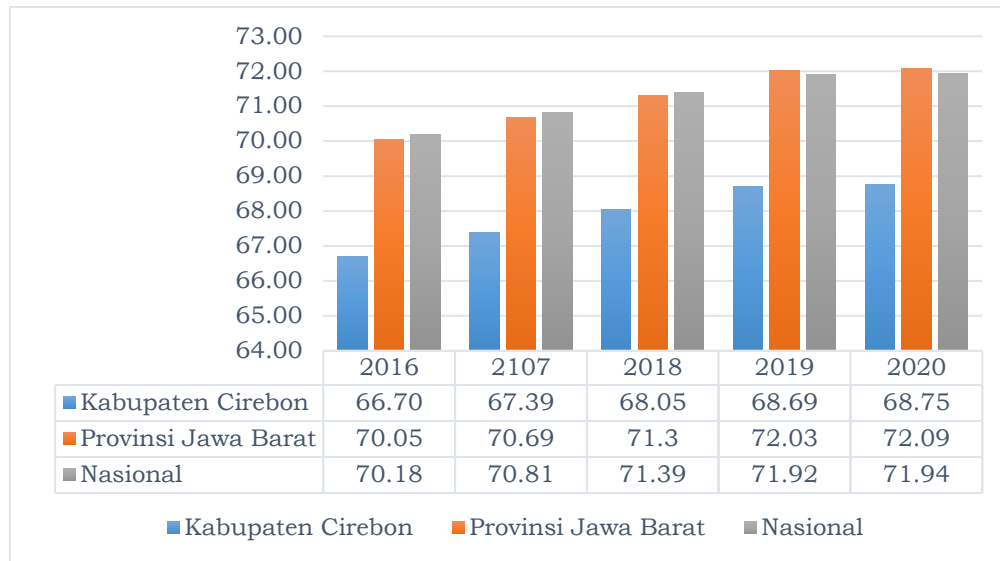
## **2. Rendahnya daya saing SDM**

Salah satu isu penting dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Cirebon dan daerah lain pada umumnya adalah menyangkut daya saing SDM. Kabupaten Cirebon memiliki keunggulan komparatif dengan melimpahnya kekayaan alam yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah. Namun demikian, jika melihat daya saing Kabupaten Cirebon dari sisi SDM, maka masih menyisakan banyak tantangan.

Salah satu indikator yang menggambarkan daya saing SDM di Kabupaten Cirebon yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan data capaian IPM Kabupaten Cirebon, diketahui bahwa IPM Kabupaten Cirebon mengalami kenaikan dari tahun ke tahun hingga mencapai 68,05 pada tahun 2018 dan terus meningkat menjadi 68,75 pada tahun 2020. Meskipun terus mengalami peningkatan, namun angka IPM

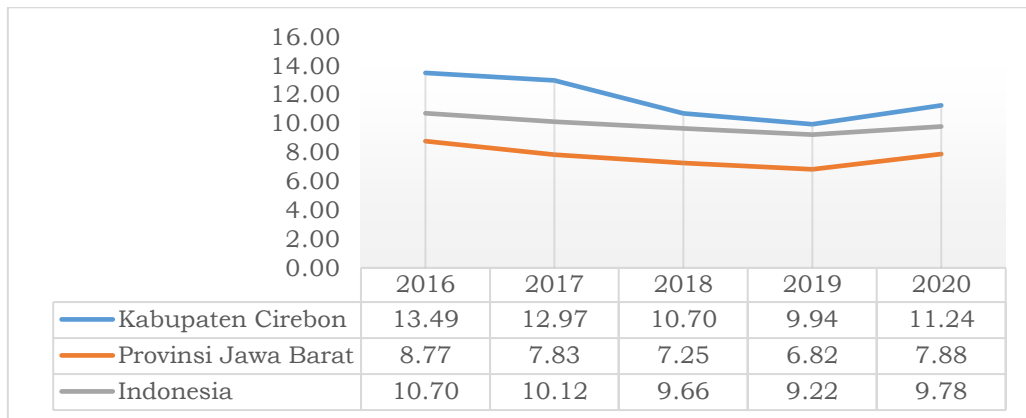
pada tahun 2020 masih lebih rendah dibandingkan dengan angka nasional yang mencapai 71,94 dan IPM Provinsi Jawa Barat yang mencapai 72,09.

**Gambar 4.1**  
**Capaian IPM Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional**  
**Tahun 2016–2020**



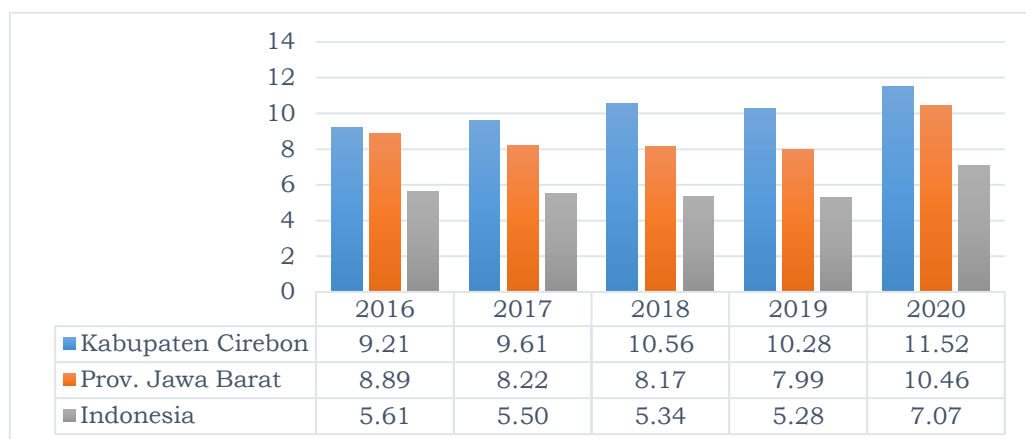
Sumber: BPS, 2021, diolah

Indikator lainnya yaitu persentase penduduk miskin di Kabupaten Cirebon, dimana pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cirebon sebanyak 247,94 ribu jiwa atau 11,24 persen dari total penduduk Kabupaten Cirebon. Angka ini meningkat dibanding dengan tahun 2019 dimana jumlah penduduk miskin hanya 217,64 ribu jiwa atau hanya 9,94 persen. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 selalu lebih tinggi apabila dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Hal tersebut tentu harus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Cirebon guna meningkatkan daya saing SDM di Kabupaten Cirebon.

**Gambar 4.2****Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016-2020**

Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2020, BPS; diolah

Selain IPM dan tingkat kemiskinan, indikator lainnya yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dimana TPT di Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2016 angkanya mencapai 9,21 persen. Selanjutnya meskipun sempat mengalami peningkatan di tahun 2017 dan 2018, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan hingga menjadi 10,28 persen. Selanjutnya TPT Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 mengalami peningkatan kembali menjadi 11,52 persen. Hal ini disebabkan dengan adanya pandemi covid-19 yang setahun belakangan ini telah menimpa wilayah Indonesia dan salah satunya termasuk di Kabupaten Cirebon.

**Gambar 4.3****Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016-2020**Sumber: 1. BPS Jawa Barat Tahun 2021, diolah  
2. BPS RI Tahun 2021

Lebih lanjut dan berdasarkan hasil rangkuman pada gambaran umum kondisi daerah, maka dapat dirangkum beberapa permasalahan yang mengakibatkan rendahnya daya saing SDM, diantaranya:

- a. Layanan pendidikan belum berkualitas dan terakses hingga ke pelosok, dengan akar masalah yaitu:
  - 1) Masih kurangnya sarana dan prasarana pendidikan;
  - 2) Kualitas tenaga pendidik dan pendidikan belum sepenuhnya terqualifikasi baik;
  - 3) Sistem pelaporan dan manajemen pendidikan masih rendah.
- b. Kualitas layanan kesehatan belum merata, khususnya bagi masyarakat tidak mampu, dengan akar masalah yaitu:
  - 1) Minimnya ketersediaan tenaga medis dan distribusi yang tidak merata; dan
  - 2) Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyakit.
- c. Penanganan kemiskinan dan masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada umumnya belum optimal, dengan akar masalah:
  - 1) Belum optimalnya penanganan, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi sosial
  - 2) Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan belum optimal.
- d. Belum efektifnya optimalisasi penyerapan tenaga kerja lokal, dengan akar masalah yaitu:
  - 1) Belum optimalnya pengembangan kewirausahaan dan kompetensi/keterampilan angkatan kerja sesuai kebutuhan pasar;
  - 2) Masih lemahnya kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan industrial.

### **3. Kehidupan beragama belum sepenuhnya menghadirkan keshalehan sosial**

Pembangunan bidang agama merupakan upaya untuk mewujudkan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama. Selain itu, pembangunan bidang agama juga mencakup dimensi peningkatan kerukunan hidup umat beragama yang mendukung peningkatan saling percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat. Dimensi kerukunan ini sangat penting dalam rangka membangun masyarakat yang memiliki kesadaran mengenai realitas multikulturalisme dan memahami makna kemajemukan sosial sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis.

Namun demikian, di Kabupaten Cirebon masih terdapat permasalahan yang dapat memicu kehidupan beragama belum sepenuhnya menghadirkan keshalehan sosial, diantaranya:

- a. Penyelenggaraan pelayanan dalam rangka ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat belum optimal, dengan beberapa akar masalah yaitu:
  - 1) Belum optimalnya penataan toleransi kehidupan beragama masyarakat;
  - 2) Kegiatan dan personil linmas masih terbatas; dan
  - 3) Upaya penegakan Perda belum optimal.

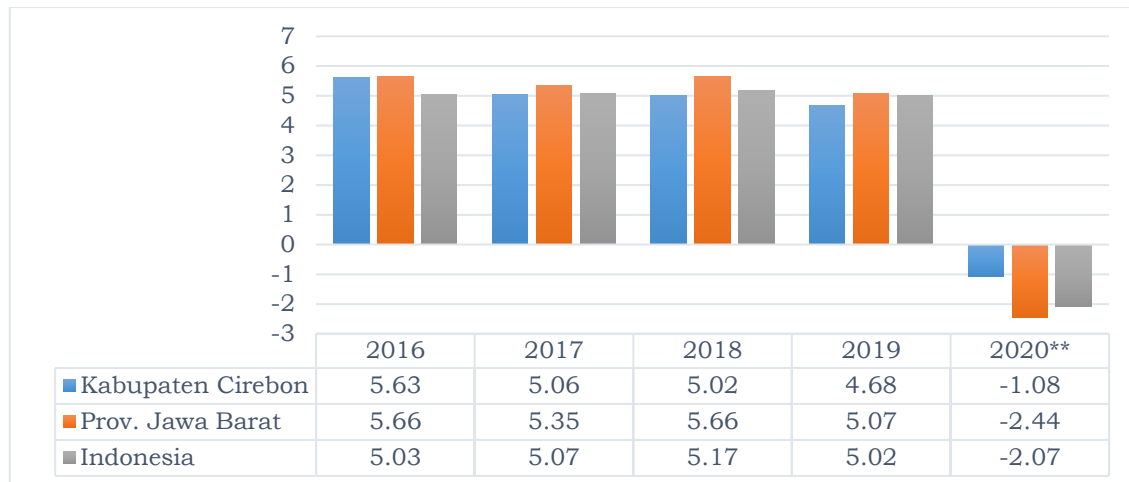
### **4. Kemandirian ekonomi daerah belum terwujud**

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon menurun dari tahun 2016 sampai 2019 hingga mencapai angka 4,68 persen pada tahun 2019, dimana pada tahun 2020 sampai minus diangka -1,08 persen. Angka pertumbuhan ekonomi ini berdampak cukup signifikan bagi gejolak perekonomian Kabupaten Cirebon sehingga perlu melakukan penanganan khusus terhadap fenomena pertumbuhan ekonomi menurun ini. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat dan Indonesia, maka LPE Kabupaten Cirebon pada

kurun waktu tahun 2017-2019 selalu berada di bawah LPE Provinsi Jawa Barat dan Indonesia. Hal tersebut sebagaimana gambar di bawah ini:

**Gambar 4.4**

**Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020**



Sumber: 1. PDRB Kabupaten Cirebon Menurut Lapangan Usaha, 2015-2019  
2. Kabupaten Cirebon Dalam Angka, 2020 dan 2021

Selain kondisi tersebut di atas dan sesuai analisis permasalahan lebih teknis di perangkat daerah, berikut adalah akar permasalahan di beberapa permasalahan terkait, antara lain:

- a. Belum optimalnya peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditi pertanian, dengan akar masalah antara lain:
  - 1) Belum optimalnya hilirisasi dan pemasaran produk-produk unggulan daerah;
  - 2) Belum optimalnya peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditi unggulan daerah;
  - 3) Masih rendahnya pengembangan kemitraan pengelolaan dan penanganan pemasaran hasil komoditi pertanian;
  - 4) Produksi ikan mengalami penurunan; dan
  - 5) Kurangnya pemahaman terhadap teknologi perikanan.
- b. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi belum dikembangkan secara optimal dalam menghasilkan produk unggulan yang berdaya saing, dengan akar masalah antara lain:





- 1) Belum efektifnya pemanfaatan potensi unggulan daerah Kabupaten Cirebon;
  - 2) Belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal;
  - 3) Pengembangan destinasi unggulan daerah belum terarah, termasuk dukungan akses dan infrastruktur multi pihak dalam pengembangan destinasi wisata; dan
  - 4) Kerjasama dan promosi wisata masih kurang.
- c. Belum optimalnya pengelolaan dan peningkatan produktivitas tanaman pangan utama, dengan akar masalah:
- 1) Menurunnya produktivitas tanaman per satuan luas, tantangan dan kebutuhan akan alih fungsi lahan;
  - 2) Distribusi pangan ke masyarakat belum merata; dan
  - 3) Ketergantungan masyarakat pada jenis pangan beras dan kurangnya diversifikasi pangan terutama pangan non beras.
- d. Belum optimalnya penyediaan dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, dengan akar masalah yaitu:
- 1) Masih banyak pelaksanaan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
  - 2) Belum optimalnya peningkatan kemantapan jalan;
  - 3) Masih tingginya kawasan kumuh dengan rumah tidak layak huni (RTLH);
  - 4) Cakupan pelayanan air yang belum optimal.
- e. Belum optimalnya upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, dengan akar masalah yaitu:
- 1) Tingginya potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
  - 2) Pengelolaan kawasan hutan belum optimal.

## **5. Tata kelola pemerintahan belum menghasilkan layanan dan kebijakan publik yang berorientasi pada masyarakat**

Penataan birokrasi terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon guna mewujudkan *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Namun, beberapa upaya masih harus dipacu efektivitas dan efisiensinya dalam mewujudkan *good governance*.

*Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik dapat diketahui dengan melihat beberapa ciri dan karakteristiknya. Di tataran praktis, upaya perbaikan tatakelola pemerintahan yang baik selama ini diarahkan pada:

- a. Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosial ekonomi;
- b. Komunikasi, adanya jaringan multisistem (pemerintah, swasta, dan masyarakat) yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas;
- c. Proses penguatan diri sendiri (*self enforcing process*), ada upaya untuk mendirikan pemerintah (*self governing*) dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi;
- d. Keseimbangan kekuatan (*balance of force*), dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika, kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan kerja sama; dan
- e. Independensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi.

Tantangan ke depan birokrasi Kabupaten Cirebon adalah bagaimana perubahan-perubahan lingkungan eksternal, tuntutan masyarakat dan

*stakeholder* pembangunan, termasuk aspirasi generasi milenial dapat dipenuhi dalam berbagai layanan. Kebutuhan atas pemanfaatan TIK di masyarakat harus diadaptasi sepadan dalam layanan publik dan dalam administrasi pemerintahan guna meningkatkan kinerja birokrasi, akuntabilitas, dan perbaikan kebijakan pembangunan di berbagai bidang termasuk kebijakan pengembangan wilayah.

Beberapa permasalahan yang membutuhkan penanganan serius, di antaranya:

- a. Belum optimalnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah, dengan akar masalah antara lain:
  - 1) Pengelolaan penyelenggaraan dan manajemen pemerintahan dalam mendukung pelayanan publik belum maksimal; dan
  - 2) Belum optimalnya tingkat pelayanan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- b. Belum optimalnya sistem akuntabilitas kinerja keuangan daerah, dengan akar masalah yaitu:
  - 1) Pelayanan prima yang sesuai dengan SPM belum sepenuhnya dilaksanakan oleh seluruh aparatur pemerintahan;
  - 2) Keselarasan/konsistensi antara perencanaan program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan tupoksi perangkat daerah belum berjalan dengan baik;
  - 3) Belum optimalnya sistem pengendalian intern pemerintah di Kabupaten Cirebon;
  - 4) Belum optimalnya kinerja, peran, kapasitas, dan kapabilitas APIP/P2UPD.
- c. Tata kelola pemerintahan belum memanfaatkan TIK secara optimal guna mendukung pelayanan publik, dengan akar masalah antara lain:
  - 1) Belum optimalnya sistem pelayanan dan administrasi pemerintahan; dan

- 2) Minimnya inovasi dalam pemanfaatan teknologi informasi dan Komunikasi untuk manajemen pemerintahan.
- d. Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa belum optimal, dengan akar masalah yaitu:
- 1) Pembangunan desa belum diselenggarakan secara efektif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa
  - 2) Pengembangan kawasan perdesaan belum optimal; dan
  - 3) Pengembangan BUMDes belum optimal untuk mendukung prioritas daerah.
- e. Lemahnya koordinasi dan pelaksanaan pembangunan kewilayahan di tingkat kecamatan, dengan akar masalah yaitu:
- 1) Rendahnya kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan maupun desa; dan
  - 2) Lemahnya koordinasi antar-sektor (perangkat daerah) dalam pengembangan kawasan perdesaan.
- f. Kurangnya pengembangan peran dan kreativitas dalam pembangunan dan olahraga, dengan akar masalah yaitu:
- 1) Rendahnya partisipasi pemuda dalam lapangan dan kesempatan kerja; dan
  - 2) Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga.

## **6. Keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat belum terwujud**

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib, dan teratur.

Namun demikian, di Kabupaten Cirebon masih terdapat permasalahan yang dapat memicu Keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat belum optimal, yaitu Belum Optimalnya upaya untuk

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat, dengan beberapa akar masalah diantaranya:

- a. Koordinasi penanganan gangguan ketentraman masih rendah;
- b. Kurangnya pemahaman SDM dan jabatan fungsional Satpol PP terhadap tugas dan fungsi;
- c. Belum optimalnya penanganan bencana.
- d. Masih rendahnya kualitas SDM dalam pengelolaan bencana.

## **4.2. Isu Strategis**

Berangkat dari permasalahan yang ada, maka penting dirumuskan isu-isu strategis yang akan menjadi fokus perhatian penanganannya oleh Pemerintah Daerah. Isu strategis merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Akan tetapi, perumusan isu strategis tidak dapat dilepas isu-isu strategis nasional, provinsi maupun daerah lain yang berbatasan dengan Kabupetan Cirebon.

### **4.2.1. Telaahan Isu Strategis Internasional dan Nasional**

#### **4.2.1.1. Kelesuan Perekonomian Global**

Dalam beberapa tahun terakhir, IMF memperkirakan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi global. Sesuai laporan Bank Indonesia (2020), ketidakpastian terhadap prospek perdagangan dunia meningkat dan mengakibatkan keyakinan pelaku ekonomi menurun di banyak negara; yang mengakibatkan volume perdagangan dunia pada 2019 berkontraksi sebesar 0,2%, terendah sejak krisis finansial global. Perkembangan yang kurang menguntungkan tersebut selanjutnya mengakibatkan pertumbuhan ekonomi global melambat secara merata, baik di negara maju maupun negara berkembang. Pada 2019, ekonomi global hanya tumbuh 2,9%, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan 2018 sebesar 3,6%, terendah sejak krisis finansial global.

Tren penurunan ekonomi global antara lain diakibatkan oleh dampak negatif dari kebijakan tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat dan Tiongkok juga menyangkut sikap kebijakan dan keketatan perdagangan dunia. Namun demikian, berdasarkan pada kenaikan pertumbuhan ekonomi kawasan Eropa dan beberapa negara berkembang, pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2021 diproyeksikan akan mengalami peningkatan sebesar 0,1% dari proyeksi tahun 2019 menjadi 3,6%. Namun, proyeksi tahun 2021 tersebut mengalami koreksi (lagi) sehubungan dengan beberapa sentimen negatif di awal tahun 2020 antara lain keputusan sejumlah bank sentral dunia yang tetap mempertahankan kebijakan akomodatif, merebaknya wabah virus corona, serta pemangkasan prospek ekonomi dunia oleh IMF. IMF memangkas proyeksi ekonomi global menjadi 2,9%, 3,3% dan 3,4% untuk tahun 2019, 2020 dan 2021.

Pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang pada tahun 2021 diproyeksikan naik sebesar 0,4% sedangkan pada negara-negara di kawasan Eropa akan mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1%. Pada tahun 2019 tersebut, Indonesia menempati posisi kedua tertinggi dalam aspek pertumbuhan ekonomi, terpaut oleh China di posisi pertama dengan pertumbuhan yang mencapai 6,1 persen. India, Korea Selatan dan Amerika Serikat menyusul di bawah Indonesia pada posisi ketiga sampai kelima dengan mencatatkan pertumbuhan 4,7 persen, 2,2 persen dan 2,1 persen.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi global pada 2021 dan tahun-tahun berikutnya, semua negara harus dapat meningkatkan potensi pertumbuhan *output* dan memperkuat penyangga fiskal dan keuangan di lingkungan yang memiliki beban utang tinggi dan kondisi keuangan yang ketat. Prioritas kebijakan utama bagi setiap negara guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi global adalah menyelesaikan secara cepat dan kooperatif mengenai kesepakatan perdagangan serta mengatasi ketidakpastian kebijakan yang dihasilkan.

Memerhatikan perkembangan beberapa tahun terakhir ini, beberapa hal yang harus menjadi perhatian bagi seluruh negara di dunia, khususnya

Indonesia, adalah terkait dengan adanya risiko perang dagang, normalisasi kebijakan moneter negara maju, perlambatan ekonomi China, resiko geopolitik, melambatnya harga komoditas serta rendahnya produktivitas global akibat pandemi virus corona (Covid-19). Di tingkat global, data terakhir menunjukkan bahwa Covid-19 telah mewabah hingga hampir seluruh negara, menginfeksi 171.687.641 penduduk dengan kematian berjumlah 3.691.780.

IMF menjelaskan beberapa ancaman yang memengaruhi perekonomian dunia tahun ini. *Pertama*, meningkatnya tensi geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran. *Kedua*, perang tarif antara AS dan Tiongkok. Kemudian bencana alam, seperti badai tropis, banjir, dan kebakaran hutan juga berimbas pada pertumbuhan ekonomi. Sesuai dengan Laporan Perekonomian Indonesia 2019, Bank Indonesia (2020), terlihat pergeseran dalam perekonomian global berlanjut dan memengaruhi dinamika ekonomi dunia 2019. Hal ini dikarenakan beberapa hal, pertama, kebijakan anti-globalisasi yang mendahulukan kepentingan ekonomi dalam negeri (*inward looking policy*) meluas di banyak negara. Kedua, volatilitas arus modal dunia meningkat sehingga memicu tetap tingginya ketidakpastian pasar keuangan dunia. Ketiga, peran digital makin luas di berbagai kegiatan ekonomi pada sektor riil dan sektor keuangan. Keempat, perilaku dan hubungan antar agen ekonomi terus berubah sejalan dengan revolusi digital dalam kegiatan ekonomi yang meningkat pesat. Lalu yang terakhir respons kebijakan yang ditempuh tidak hanya bertumpu pada satu kebijakan, namun perlu terintegrasi dalam satu bauran kebijakan.

Berkaitan dengan dampak Pandemi Covid-19, pada pertengahan tahun 2020, didapat perkembangan terjadinya resesi di Singapura dan Korea Selatan pada kuartal II 2020. Diperkirakan negara-negara dengan kekuatan ekonomi besar lainnya akan menyusul. Ekonomi Singapura di kuartal II-2020 mengalami kontraksi (minus) 41,2 persen dibandingkan kuartal I-2020. Sementara dibandingkan kuartal II-2019, ekonomi Singapura pada kuartal II-2020 minus 12,6 persen. Para analis

mengatakan kinerja ekonomi Singapura di kuartal II-2020 merupakan angka kuartalan terparah yang pernah ada sejak Singapura merdeka 55 tahun lalu.

Adapun ekonom Korea Selatan jatuh ke dalam resesi disebabkan adanya penurunan paling dalam selama dua dekade dari sisi ekspor. Ekspor, yang menyumbang hampir 40% dari ekonomi Korsel adalah hambatan terbesar dari penyusutan ekonomi ini. Ekspor tercatat turun 16,6% dan menjadi yang terburuk sejak 1963. Anjloknya ekspor disebabkan pembatasan sosial untuk mencegah penyebaran virus. Hal itu membuat kinerja pabrik lumpuh. Diperkirakan, ekonomi Korsel menyusut -3,3%. Itu adalah kontraksi paling tajam sejak kuartal pertama 1998. Produk domestik bruto (PDB) Korsel turun 2,9% secara year-on-year. Penurunan terbesar sejak kuartal keempat 1998. Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan, OECD, memprediksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 pada tingkat minus 4,2%. Kontraksi ini tak lepas dari pandemi Covid-19 yang menghantam perekonomian global.

Sampai menjelang pertengahan tahun 2021, dampak Pandemi Covid-19 masih meluluh-lantakkan ekonomi global dan belum menunjukkan tanda-tanda akan segera pulih. Organisasi Buruh Internasional, di Geneva, melaporkan bahwa Covid-19 telah menciptakan krisis global terparah bagi pasar tenaga kerja selama bertahun-tahun ke depan. Hal ini menimbulkan dan memperburuk efek "jaringan parut" jangka panjang pada pekerja dan perusahaan.

Adapun, untuk prospek perekonomian di tahun 2021, para ahli dan lembaga internasional memperkirakan pertumbuhan ekonomi global berada di rentang 4-5%. Perbaikan ekonomi dunia ini dipicu peningkatan mobilitas yang terjadi di berbagai negara. Selain itu, dampak stimulus kebijakan yang berlanjut juga ikut berkontribusi. Terutama stimulus yang ada di Amerika Serikat (AS) dan China.

Selanjutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pandemi Covid-19 masih menjadi salah satu faktor yang menghambat pemulihan perekonomian global pada tahun 2021 mendatang. Meski



demikian, perekonomian diprediksi bisa pulih dan kembali tumbuh positif. Salah satu instrumen yang penting bagi sebuah negara untuk menangani pandemi yang menyebabkan krisis baik di bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi merupakan instrumen fiskal.

#### **4.2.1.2. Kondisi Perekonomian Nasional**

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2019 gagal melebihi pertumbuhan ekonomi di 2018 yaitu berada di angka 5,02. Angka pertumbuhan tersebut disumbang paling besar dari perekonomian Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 59 persen PDB Indonesia. Daerah yang menjadi penopang di Pulau Jawa antara lain, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Wilayah lain selanjutnya ditempati oleh Sumatera dengan pertumbuhan 4,57 persen (menyumbang 21,32 persen PDB), Kalimantan dengan pertumbuhan 4,99 persen (8,05 persen PDB), Sulawesi 6,65 persen (6,33 persen), serta Bali dan Nusa Tenggara 5,07 persen (3,06 persen). Sebagai tambahan, Papua adalah satu-satunya provinsi yang mengalami kontraksi ekonomi sebesar 15,72 persen (1,18 persen PDB).

Sejauh ini, kebijakan moneter Indonesia masih akomodatif dan konsisten dengan perkiraan inflasi yang terkendali, stabilitas eksternal yang terjaga, serta upaya untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik. Lembaga pemeringkat Fitch Ratings mempertahankan *sovereign credit rating* Indonesia pada posisi layak investasi (*investment grade*) level BBB, dengan prospek stabil. Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan tetap baik dengan dukungan berlanjutnya pembangunan infrastruktur dan agenda reformasi periode kedua pemerintahan Jokowi, yang salah satunya adalah Omnibus Law. Omnibus Law diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi asing langsung dalam jangka menengah. Tantangan ekonomi Indonesia ke depan diantaranya adalah tingginya ketergantungan sumber pembiayaan eksternal dan penerimaan pemerintah yang rendah.



Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi dalam RPJMN 2020-2024 meningkat setiap tahunnya. Dari sisi pengeluaran, investasi dan konsumsi menjadi motor penggerak ekonomi selama lima tahun mendatang. Sementara dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi berasal dari sektor jasa. Adapun distribusi terhadap PDB terbesar terdapat pada industri pengolahan.

Dalam RPJMN ini disebutkan untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7-6% per tahun, dibutuhkan investasi sebesar Rp 35.212,4-Rp 35.455,6 triliun sepanjang 2020-2024. Dari total kebutuhan tersebut, pemerintah dan BUMN akan menyumbangkan masing-masing sebesar 8,4-10,1% dan 8,5-8,8%. Sementara sisanya akan dipenuhi oleh masyarakat dan swasta. Ke depan, upaya penanggulangan Covid-19 perlu terus dicermati karena dapat memengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi, volume perdagangan, dan harga komoditas dunia, serta pergerakan aliran modal ke negara berkembang, termasuk Indonesia.

Tahun 2020 menjadi tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sebagai bagian tahapan pembangunan dalam mewujudkan visi jangka panjang Indonesia untuk menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur. Pada tahap pertama menuju visi jangka panjang Indonesia, prioritas pembangunan akan diarahkan untuk memperkuat pondasi daya saing sebagai pijakan bagi pelaksanaan pembangunan pada tahap selanjutnya yaitu periode transisi dalam memperkuat daya saing, sebelum menuju fase negara maju pada periode tahun 2036-2045. Oleh karena itu, dukungan kebijakan fiskal perlu dirancang secara tepat agar upaya peningkatan daya saing dapat berjalan efektif.

Di awal periode RPJMN 2020-2024, pemerintah terus melanjutkan pembangunan infrastruktur yang semakin merata, mengalokasikan sumber daya ekonomi dengan lebih efisien dan efektif, serta mendorong birokrasi yang efektif, melayani, dan bebas korupsi. Berbagai kebijakan di bidang pendidikan dan kesehatan akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar siap berkompetisi dan beradaptasi

dengan kemajuan industri dan teknologi. Di sisi lain, pemerintah akan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang semakin merata, mengalokasikan sumber daya ekonomi dengan lebih efisien dan efektif, serta mendorong birokrasi yang efektif, melayani, dan bebas korupsi.

Lebih lanjut, berdasarkan RKP Tahun 2021, diprediksi perekonomian Indonesia pada Tahun 2021 masih akan dihadapkan pada berbagai tantangan dan risiko, baik dari global maupun domestik. Tantangan ekonomi global yang utama adalah kondisi ketidakpastian di tingkat global yang harus dihadapi, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi dunia yang masih relatif rendah, sebesar 3,3 dan 3,4 persen pada Tahun 2020 dan 2021. Masih relatif lambatnya pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan menyebabkan stagnannya pertumbuhan volume perdagangan dunia dan harga komoditas internasional pada tahun 2020;
2. Meningkatnya tensi geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran;
3. Ketidakpastian perang dagang yang dapat mendorong investasi yang lebih rendah, gangguan pada supply chain, dan lambatnya pertumbuhan produktivitas pada tingkat global. Eskalasi perang dagang, terutama antara China dan AS, dikhawatirkan dapat memperburuk perlambatan pertumbuhan ekonomi China;
4. Meningkatnya sentimen negatif di pasar keuangan global. Selain isu perang dagang, beberapa faktor lain seperti volatilitas ekonomi di beberapa negara berkembang, kebijakan fiskal di Italia, tidak tercapainya kesepakatan Brexit, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi China, dapat memicu meningkatnya sentimen negatif investor pada masa mendatang;
5. Harga komoditas ekspor utama yang stagnan. Harga minyak kelapa sawit akan dipengaruhi pasokan yang masih berlebih di pasar dunia.

Ketidak-pastian di atas semakin meningkat dengan adanya Pandemi Covid-19. Banyak ahli memperkirakan Indonesia akan mengalami resesi ekonomi jika penanganan dan antisipasi dampak Pandemi Covid-19 tidak

tepat. Menteri Keuangan Sri Mulyani telah dua kali membeberkan proyeksi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dalam kuartal berjalan dan beberapa kuartal ke depan, dan proyeksinya suram. Untuk kuartal II, yang tengah berjalan sampai akhir Juni 2020, pemerintah Indonesia memproyeksi ekonomi akan menyusut sampai minus 3,8%. Lebih lanjut menurut Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, produk domestik bruto (PDB) RI pada kuartal III-2020 minus 3,49 persen (year on year/yoy). Dengan demikian Indonesia resmi masuk ke jurang resesi, setelah pada kuartal II-2020 ekonomi RI juga terkonstraksi alias negatif.

Selanjutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2020 menjadi di kisaran minus 2,2 persen hingga minus 1,7 persen. Angka tersebut jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya di mana pertumbuhan ekonomi di perkirakan minus 1,7 persen dan masih bisa tumbuh positif di kisaran 0,6 persen.

Untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi di 2021, World Bank pada rilis tanggal 17 Desember 2020 memperkirakan ekonomi Indonesia bakal tumbuh positif 4,4 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan perkiraan sebelumnya yakni 4,7 persen.

Lebih jauh, dampak makro dari Pandemi Covid-19 adalah konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat yang merupakan penopang 60 persen terhadap ekonomi jatuh cukup dalam. Data dari BPS yang mencatat konsumsi rumah tangga turun dari 5,02 persen pada kuartal I 2019 ke 2,84 persen pada kuartal I tahun ini. Selanjutnya, Pandemi Covid-19 mengakibatkan ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha. Berikutnya, dengan kondisi seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi mengakibatkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti. Turunnya perekonomian berimplikasi pada penerimaan pajak yang hingga semester I 2020 hanya mencapai Rp513,65 triliun atau 44,02 persen dari target berdasarkan Perpres 72 Tahun 2020

Rp1.198,8 triliun. Angka tersebut terkontraksi 12,01 persen dibanding periode sama tahun lalu (yoy) yaitu Rp604,3 triliun.

Upaya pemulihan ekonomi akan diarahkan untuk menggerakkan kembali industri, investasi pariwisata, dan ekspor. Adapun strategi pemulihan ekonomi tahun 2021 akan mencakup:

1. Penguatan Sektor Kesehatan

Penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Germas, kapasitas health security terutama surveilans, jejaring dan kapasitas laboratorium, dan sistem informasi, serta pemenuhan sumber daya Kesehatan seperti fasilitas, farmasi, alat kesehatan, serta SDM kesehatan. Langkah ini diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada pelaku ekonomi untuk kembali melakukan aktivitas konsumsi/produksi dengan normal.

2. Perluasan Program Perlindungan Sosial

Perluasan program bantuan sosial, termasuk perluasan basis data yang mencakup pekerja sektor informal. Langkah ini dilakukan utamanya untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok yang rentan, pascapandemi Covid-19.

3. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur diarahkan dalam bentuk infrastruktur padat karya yang mendukung Kawasan industri dan pariwisata.

4. Pembangunan SDM

Strategi pembangunan SDM sangat erat kaitannya dengan upaya perluasan perlindungan sosial, penguatan sektor kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Pembangunan SDM perlu diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, antara lain melalui penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta pendidikan menengah dan tinggi umum. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kembali tingkat produktivitas tenaga kerja yang turun di masa COVID-19. Sementara itu, penguatan pembelajaran dalam

kondisi darurat, termasuk melalui media daring, akan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran.

#### 5. Akselerasi Investasi

Menarik investasi sebesar-besarnya untuk menggerakkan ekonomi melalui: percepatan integrasi Online Single Submission (OSS), relaksasi aturan upah minimum sementara untuk menyerap tenaga kerja, melakukan aftercare service untuk mempertahankan investasi yang ada agar tidak berpindah ke negara lain, serta perluasan positive-list investasi.

#### 6. Pemulihan Industri dan Perdagangan

Optimalisasi competitive advantage sektor-sektor industri unggulan; optimalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dan BUMN yang menggunakan produk industri dalam negeri; akselerasi pengembangan produk substitusi impor khususnya makanan, minuman dan farmasi; peningkatan fasilitasi ekspor; fasilitasi impor bahan baku; peningkatan standar produk; optimalisasi Preferential Trade Agreement (PTA) Free Trade Agreement (FTA) Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) untuk perluasan ekspor; dan peningkatan efisiensi logistik.

#### 7. Pembangunan Pariwisata

Peningkatan frekuensi dan jalur penerbangan; peningkatan pemasaran wisata ke originasi yang sudah pulih; peningkatan event olah raga, seni budaya dan MICE; penyediaan insentif untuk paket wisata khusus di destinasi prioritas; peningkatan infrastruktur, dan standar layanan; dan pengaturan cuti dan libur bersama untuk wisatawan domestik.

#### 8. Pendalaman Sektor Keuangan

Memperdalam sektor keuangan domestik dengan memperkuat struktur, ketahanan, dan stabilitas sektor keuangan.

## **4.2.2. Telaahan Kebijakan Nasional**

### **4.2.2.1. Pandemi COVID-19**

Sejak awal tahun 2020, terjadi bencana yang melanda dunia yaitu penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China menyebar ke hampir seluruh negara dan pada awal Maret 2020 terjadi kasus pertama di Indonesia. Sejak kasus pertama tersebut, virus ini telah dengan cepat menyebar keseluruh provinsi di Indonesia. Sampai dengan tanggal awal Juni 2021, tercatat sebanyak 1.831.773 terkonfirmasi positif COVID-19 dan dari data tersebut terdapat 50.968 meninggal dunia.

Dalam rangka menanggulangi wabah ini, Pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
3. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);



5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
13. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang



Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Untuk mencegah penyebaran COVID-19, maka dilakukan langkah-langkah antara lain membatasi interaksi antarmanusia. Pembatasan sosial (social distancing) dilakukan dalam bentuk pelarangan perjalanan (travel ban), penutupan sekolah, kantor, dan tempat ibadah. Berbagai langkah ini menyebabkan aktivitas ekonomi menurun drastis. Aktivitas ekonomi terganggu dari dua sisi sekaligus, baik dari sisi permintaan (demand) maupun dari sisi penawaran (supply). Tingkat konsumsi tertekan, tingkat produksi terkendala, rantai pasokan global terganggu. Semua ini berujung pada penurunan output global yang sangat besar. Ketika kondisi ini berlanjut, maka rambatan dampaknya juga berpotensi mengakibatkan gangguan stabilitas sistem keuangan. Kondisi ini dialami hampir seluruh negara yang terdampak COVID-19, tidak terkecuali Indonesia.

#### **4.2.2.2. Penelaahan RPJMN Tahun 2015-2019**

Penelaahan kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN merupakan salah satu identifikasi faktor-faktor eksternal yang bertujuan untuk mendapatkan butir-butir kebijakan pemerintah terpenting, yang berhubungan, dan berpengaruh langsung terhadap perencanaan pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan. Hasil telaahan pada dasarnya dimaksudkan sebagai sumber utama bagi identifikasi isu-isu strategis. Kebijakan yang diidentifikasi dapat berupa peluang atau, sebaliknya, ancaman bagi daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden yang penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian

pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk Tahun 2015-2019 adalah: TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONGROYONG.

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Adapun prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;



4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Selain nawa cita sebagaimana telah disajikan di atas, RPJMN 2015-2019 juga mengamanatkan antara lain akses air minum 100%, kawasan permukiman kumuh perkotaan 0 Ha dan akses sanitasi layak 100% (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan). Sebagai upaya mempercepat terwujudnya visi dan misi pembangunan nasional, maka pemerintah daerah dan kementerian/lembaga diharapkan mensinergikan segala potensi dan sumberdaya untuk mendukung target pembangunan tersebut.

Dalam mewujudkan agenda prioritas nasional (nawa cita), maka perlu memerhatikan strategi pembangunan nasional yang antar lain meliputi 3 (tiga) dimensi pembangunan. Tiga dimensi pembangunan meliputi: dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan dan dimensi pemerataan dan kewilayahan. Ketiga dimensi tersebut menjadi bagian yang diprioritaskan dalam penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023.

Aspek pembangunan manusia menjadi prioritas sebab Provinsi Jawa Barat merupakan daerah dengan penduduk terbanyak di Indonesia. Untuk itu perlu adanya perhatian lebih pada penyiapan SDM yang andal dan produksi serta mampu ikut serta dalam pembangunan. Diharapkan SDM Jawa Barat dapat mengelola sumber daya yang ada, terlebih dalam pengelolaan sektor unggulan. Dengan demikian, diharapkan

pembangunan dapat mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru, sehingga pembangunan tidak hanya terpusat pada daerah-daerah tertentu, tapi lebih merata keseluruh wilayah Jawa Barat.

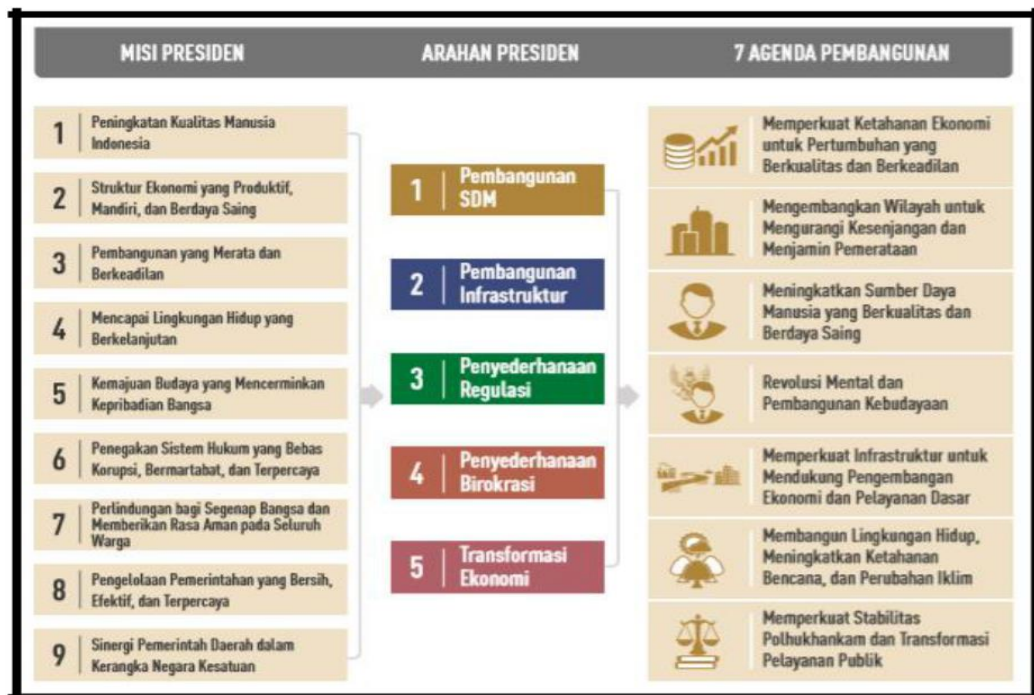
#### **4.2.2.3. Penelaahan RPJMN Tahun 2020-2024**

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 menjadi pedoman bagi perencanaan nasional maupun perencanaan daerah. Perencanaan pusat dan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Barat perlu mempedomani RPJMN Tahun 2020-2024 sebab terdapat 4 (empat) tahun yang beririsan antara kedua dokumen tersebut yakni Tahun 2020 sampai dengan 2023, sebagai kelanjutan dari RPJMN periode sebelumnya.

Pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Visi tersebut diterjemahkan kedalam 9 (sembilan) misi dan 7 (tujuh) agenda pembangunan sesuai kerangka pikir pada gambar di bawah. Agenda pembangunan ini sekaligus menjadi prioritas nasional (PN) bagi pembangunan tahunan nasional. Keterkaitan misi, arahan Presiden dan 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional Tahun 2020-2024 disajikan pada gambar di bawah.

**Gambar 4.5**

**Misi dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024**



Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

#### 4.2.2.4. Telaahan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara. Dengan Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.

Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri atas:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; dan
6. Sosial.

Dengan muatan standar (a) Jenis Pelayanan Dasar; (b) Mutu Pelayanan Dasar; dan (c) Penerima Pelayanan Dasar.

Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. Kebutuhan Dasar Warga Negara dalam SPM adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Dengan mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.

Jenis Pelayanan Dasar untuk daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Pendidikan anak usia dini;
2. Pendidikan dasar;
3. Pendidikan kesetaraan;
4. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
5. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
6. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;



7. Pelayanan kesehatan balita;
8. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
9. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
10. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
11. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
12. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
13. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
14. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
15. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*);
16. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
17. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
18. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;
19. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota;
20. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
21. Pelayanan informasi rawan bencana;
22. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
23. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
24. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
25. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
26. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
27. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
28. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
29. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.



Pencapaian target pelaksanaan SPM sesuai dengan standar pelayanan sampai dengan tahun 2018 sebagian besar belum mencapai angka 100%.

1. Pendidikan anak usia dini; capaian tahun 2018 adalah 66,40 (belum tercapai);
2. Pendidikan dasar; capaian tahun 2018 sd 117,05 smp 115,08;
3. Pendidikan kesetaraan; tahun 2018 sd 107,22 smp 97,46 sma 86,40 (belum tercapai);
4. Pelayanan kesehatan ibu hamil; tahun 2017:94,92; 2018:47,14 (belum tercapai);
5. Pelayanan kesehatan ibu bersalin; tahun 2017:93,61; 2018:47,90 (belum tercapai);
6. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; 2017:103,03; 2018:52,40 (belum tercapai);
7. Pelayanan kesehatan balita; 2017:97,20; 2018:49,25 (belum tercapai);
8. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; 2017:74,18 (belum tercapai);
9. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
10. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
11. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
12. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
13. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
14. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; 2017:15,35; 2018:6,84 (belum tercapai);
15. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus); 2018:0,01;
16. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; 2018:68,64% (belum tercapai);
17. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;





18. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;
19. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota;
20. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
21. Pelayanan informasi rawan bencana;
22. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
23. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
24. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
25. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
26. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
27. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
28. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
29. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Dari 29 kriteria hanya 11 kriteria dan semua belum tercapai secara standar pelayanan minimal.

#### **4.2.3. Telaahan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

Telaahan terhadap Visi dan Misi Gubernur terpilih Jawa Barat merupakan sebuah tantangan untuk diselaraskan dengan Visi dan Misi Bupati Kabupaten Cirebon terpilih yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman. Visi Bupati ini akan diselaraskan dengan Visi Gubernur Jabar yang akan menjadikan “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”. Pernyataan Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut:

**Jawa Barat Juara Lahir Batin:** Pembangunan Provinsi Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Jawa Barat berdaya saing dan mandiri.

**Inovasi:** Pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.

**Kolaborasi:** Perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, antar wilayah, dan antar pelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu:

1. **Membentuk Manusia Pancasila yang Bertaqwa** melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah sebagai Pusat Peradaban.

Konsep Jawa Barat Juara secara “batin” sepenuhnya diemban oleh misi pertama ini. Secara umum misi pertama memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat Provinsi Jawa Barat sebagai manusia dengan nilai-nilai Pancasila dan meningkatkan peran rumah ibadah sebagai pusat pembangunan peradaban di Provinsi Jawa Barat. Melalui misi ini peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban diperkuat untuk melahirkan manusia Jawa Barat yang berakhlak baik dan berjiwa besar. Selain Masjid, pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat yang bertakwa juga dilakukan dengan pengembangan pesantren sebagai ujung tombak membangun lingkungan masyarakat yang damai, tenteram, dan bahagia.

2. **Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif** melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.

Misi ini diarahkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas untuk seluruh masyarakat Provinsi Jawa Barat, agar

rakyat Provinsi Jawa Barat dapat menikmati pendidikan dan kesehatan, perempuan Provinsi Jawa Barat mampu mengekspresikan potensi kebajikannya dengan optimal, dan para pemuda menyadari panggilan jiwanya serta dapat berperan vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemenuhan kesejahteraan sosial dapat mendukung lahirnya masyarakat yang bahagia. Kebahagiaan diperoleh dari terjaminnya kehidupan yang layak dan bermartabat bagi masyarakat. Kesejahteraan sosial juga mendorong lahirnya masyarakat yang berkualitas dan produktif. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial memerlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya.

3. **Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan** melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.

Misi 3 dalam penjabaran Visi Provinsi Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi memiliki inti utama yang berpusat pada pembangunan infrastruktur untuk pemerataan pembangunan. Infrastruktur adalah investasi pembangunan yang akan mendorong lahirnya pusat pertumbuhan baru, meningkatkan efisiensi distribusi logistik yang mampu menjaga stabilitas harga, serta mempercepat perpindahan manusia dan barang antar kota dan kabupaten serta antar provinsi. Berbagai aktivitas pembangunan dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup agar daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak terlampaui dan kelestarian ekosistem tetap terjaga.

4. **Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Kerakyatan yang Sejahtera dan Adil** melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi serta Pelaku Pembangunan.

Misi 4 membawa amanah yang besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Provinsi Jawa Barat. Ekonomi Kerakyatan

yang adil dan sejahtera yang dicita-citakan akan dapat diwujudkan dengan meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi Provinsi Jawa Barat. Penggunaan teknologi untuk optimalisasi proses dan menghubungkan antar pelaku ekonomi secara cepat dapat mengatasi ketimpangan antar kawasan perdesaan dan perkotaan, juga dapat mengurangi angka pengangguran melalui terbukanya peluang kerja baru.

**5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.**

Dalam tata kelola pemerintahan, *good governance* atau tata kelola yang baik harus diimplementasikan di berbagai skala, mulai dari perusahaan hingga pemerintahan dengan 8 (delapan) pilarnya yaitu konsensus, partisipasi, ketaatan pada hukum, efektivitas dan efisiensi, setara dan inklusif, responsif, transparan, dan akuntabel.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat merepresentasikan *good governance* melalui penerapan Provinsi Cerdas (*smart province*) untuk menjamin kinerja birokrasi yang kompetitif, transparan, efektif, efisien, dan handal.

Dengan dilakukannya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, dampak pandemi COVID-19, serta kajian permasalahan dan isu strategis di Provinsi Jawa Barat, maka prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2023 dirumuskan sebagai berikut:

1. Reformasi Sistem Kesehatan Daerah;
2. Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi;
3. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan;
4. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;
5. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan;
6. Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana;
7. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah;

8. Gerakan Membangun Desa;
9. Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara;
10. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
11. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata.

Selanjutnya, sebagaimana dijelaskan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, **arah kebijakan** pembangunan seluruh kabupaten dan kota di bawah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat mendukung pencapaian 5 (lima) **indikator kinerja makro Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari:**

1. Indeks Pembangunan Manusia beserta indikator komponen pembentuknya meliputi:
  - a. Rata-Rata Lama Sekolah;
  - b. Angka Harapan Lama Sekolah;
  - c. Angka Harapan Hidup; dan
  - d. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan.
2. Persentase Penduduk Miskin;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka; dan
4. Laju Pertumbuhan Ekonomi.

Target dukungan terhadap 5 (lima) indikator makro dari Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat periode Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.1****Penetapan Target Indikator Makro Kabupaten Cirebon Untuk Mendukung Pencapaian Target Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023**

| No. | Indikator                          | Kondisi Awal |        | Realisasi Tahun 2019 | Proyeksi |        |        |        | Kondisi Akhir |
|-----|------------------------------------|--------------|--------|----------------------|----------|--------|--------|--------|---------------|
|     |                                    | 2017         | 2018   |                      | 2020     | 2021   | 2022   | 2023   |               |
| 1.  | Indeks Pembangunan Manusia         | 67,39        | 68,05  | 68,69                | 68,00    | 68,86  | 68,97  | 69,08  | 69,08         |
| a.  | Rata-Rata Lama Sekolah             | 6,61         | 6,62   | 6,71                 | 6,78     | 6,88   | 7,01   | 7,13   | 7,13          |
| b.  | Angka Harapan Lama Sekolah         | 12,21        | 12,22  | 12,24                | 12,25    | 12,27  | 12,29  | 12,32  | 12,32         |
| c.  | Angka Harapan Hidup                | 71,49        | 71,66  | 71,82                | 72,00    | 72,11  | 72,24  | 72,36  | 72,36         |
| d.  | Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan | 9.650        | 10.212 | 10.670               | 10.168   | 10.346 | 10.436 | 10.484 | 10.484        |
| 2.  | Persentase Penduduk Miskin         | 12,97        | 10,70  | 9,94                 | 11,59    | 10,73  | 9,88   | 9,14   | 9,14          |
| 3.  | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | 9,61         | 10,56  | 10,28                | 12,25    | 11,10  | 9,86   | 8,39   | 8,39          |
| 4.  | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)     | 5,05         | 5,02   | 4,86                 | -2,10    | 4,38   | 4,61   | 4,84   | 4,84          |

Sumber: Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

**4.2.4. Telaahan RPJMD Kabupaten/Kota Sekitar**

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon juga memperhatikan dokumen RPJMD daerah lainnya agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar, atau dalam satu wilayah kepulauan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan atau dengan daerah lain yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

**Tabel 4.2**  
**Identifikasi RPJMD Daerah Lain**

| No. | Daerah Lain                                   | Kebijakan Terkait  | Keterangan  |
|-----|---|--|---|
| 1.  | Kota Cirebon<br><br>Tahun:<br>2018-2023       | Visi: “SEHATI Kita Wujudkan Cirebon Sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya dan Sejarah”<br><br>Misi:<br>1.Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang Berdaya Saing, Berbudaya dan Unggul Dalam Segala Bidang;<br>2.Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif;<br>3.Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Umum yang Berwawasan Lingkungan. Mengoptimalkan potensi pengelolaan SDA berkelanjutan yang berwawasan lingkungan<br>4.Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif.  | Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019<br>Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon 2018-2023                   |
| 2.  | Kabupaten Kuningan<br><br>Tahun:<br>2018-2023 | Visi: “Kuningan MAJU (Ma’mur, Agamis, Pinunjul) Berbasis Desa Tahun 2023”<br><br>Misi:<br>1.Membangun tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, efektif, demokratis dan terpercaya dengan jiwa kepemimpinan Nu Sajati;<br>2.Mewujudkan masyarakat Kuningan nu Sajati dalam kehidupan beragama dan bernegara dalam bingkai kebangsaan dan kebhinekaan;<br>3.Mewujudkan manajemen layanan pendidikan, kesehatan yang merata, adil, berkualitas dan berkelanjutan dalam menciptakan sumberdaya manusia Nu Sajati;<br>4.Mewujudkan pembangunan kawasan perdesaan berbasis pertanian, wisata, budaya dan potensi lokal untuk mempercepat pertumbuhan serta pemerataan ekonomi rakyat; dan<br>5.Mewujudkan pemerataan infrastruktur untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja dalam lingkungan yang lestari. | Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2019<br>Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 |
| 3.  | Kabupaten Brebes<br><br>Tahun:<br>2017-2022   | Visi: “Menuju Brebes Unggul, Sejahtera Dan Berkeadilan”<br><br>Misi:<br>1.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, sehat dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan kesehatan;   | Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten                               |



| No. | Daerah Lain                                     | Kebijakan Terkait  | Keterangan   |
|-----|---|--|--|
|     |   | <p>2. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan;</p> <p>3. Meningkatkan pengembangan pertanian, ekonomi kerakyatan dengan memperkuat inovasi daerah dan investasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis kearifan lokal;</p> <p>4. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, efektif dan efisien, serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah;</p> <p>5. Memantapkan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi desa yang maju dan mandiri; dan</p> <p>6. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, serta pemenuhan hak anak, dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta mewujudkan perlindungan sosial.</p>  | Brebes Tahun 2017-2022   |
| 4.  | Kabupaten Majalengka<br><br>Tahun:<br>2018-2023 | <p>Visi: “Mewujudkan Tatanan Masyarakat Majalengka yang RELIGIUS, ADIL, HARMONIS dan SEJAHTERA”</p> <p>Misi:</p> <p>1. Memantapkan kualitas kehidupan beragama yang didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan, serta memberdayakan tokoh-tokoh agama;</p> <p>2. Meneguhkan Nilai-nilai Kebangsaan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan, rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat;</p> <p>3. Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya;</p> <p>4. Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis, dan melayani;</p> <p>5. Membangun desa menuju pada kemandirian dengan berbasis potensi lokal untuk mewujudkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan</p> | Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 |





| No. | Daerah Lain                                    | Kebijakan Terkait   | Keterangan   |
|-----|--|---|--|
| 5.  | Kabupaten Indramayu<br><br>Tahun:<br>2016-2021 | <p>Visi: 'Terwujudnya Masyarakat Indramayu Yang Religius, Maju, Mandiri, dan Sejahtera Serta Terciptanya Keunggulan Daerah'</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Ajaran Agama, Ilmu Pengetahuan, Teknologi (IPTEK) Dan Budaya Lokal;</li> <li>2.Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Melalui Penguatan Lembaga Ekonomi Kerakyatan Serta Kesperasian Industri Dan Pertanian;</li> <li>3.Mengembangkan Infra Struktur Wilayah Dan Pengelolaan Lingkungan Secara Selaras, Lestari Dan Optimal;</li> <li>4.Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Mewujudkan Keunggulan Daerah Yang Berbasis Kearifan Lokal;</li> <li>5.Mengembangkan Reformasi Birokrasi, Dengan Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Profesional Dan Mengayomi Rakyat;</li> <li>6.Menguatkan Peran Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat; dan</li> <li>7.Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.</li> </ol> | Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 – 2021 |

Sumber: RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023; RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2019-2023; RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022; RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023; dan RPJMD Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021.

#### 4.2.5. Telaahan Kebijakan Kabupaten Cirebon

##### 4.2.5.1. RPJPD Kabupaten Cirebon

Dalam RPJPD Kabupaten Cirebon disebutkan bahwa misi RPJMD Keempat Tahun 2019-2024, yaitu:

**Misi pertama: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Bidang Agama.** Pembangunan di bidang agama diprioritaskan pada pengimplementasian ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari yang ditandai dengan penurunan penyakit masyarakat dan kriminalitas sebesar 2% dan melek membaca Al Qur an sebesar 95%, peningkatan kualitas pendidikan agama, dan optimalisasi peran lembaga sosial keagamaan, peningkatan toleransi antar umat beragama, kemandirian dalam penyelenggaraan keagamaan.

**Bidang Pendidikan.** Pembangunan di bidang pendidikan diprioritaskan pada peningkatan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf melalui pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat terutama bagi keluarga kurang mampu, tuntas program wajib belajar dua belas tahun disertai dengan peningkatan kualitas siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, peningkatan akses pelayanan pendidikan menengah dan bantuan bea siswa dari keluarga yang kurang mampu, perintisan program wajib belajar lima belas tahun, pengembangan pelayanan pendidikan luar sekolah dan pendidikan informal berbasis potensi daerah dan pengembangan sekolah kejuruan berbasis kompetensi berskala nasional dan internasional, peningkatan kerja sama dengan perguruan tinggi, dan pendidikan ketrampilan dan penguasaan multimedia bagi masyarakat.

**Bidang Perpustakaan.** Pembangunan di bidang perpustakaan diprioritaskan pada peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pembangunan taman bacaan di setiap desa.

**Bidang Kesehatan.** Pembangunan di bidang kesehatan diprioritaskan melalui upaya pencegahan, pemberantasan, dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, peningkatan jumlah, mutu dan jenis tenaga kesehatan, pemberdayaan profesi kesehatan (institusi), dan terwujudnya sistem insentif dan disinsentif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan.

**Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.** Pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diprioritaskan pada peningkatan kemandirian dan daya saing perempuan dalam memperoleh kesempatan berusaha, peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan. Sedangkan peningkatan perlindungan terhadap anak dilakukan melalui optimalisasi peran keluarga dan lembaga perlindungan anak.

**Bidang Sosial.** Pembangunan di bidang sosial diprioritaskan pada penurunan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

melalui peningkatan pemberdayaan PMKS; dan peningkatan kuantitas dan kualitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga dan kelompok masyarakat melalui program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, serta peningkatan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

**Bidang Kepemudaan dan Olahraga.** Pembangunan di bidang kepemudaan dan olahraga diprioritaskan pada peningkatan prestasi olah raga menjadi 9 cabang olah raga melalui pemanfaatan kawasan olahraga masyarakat dan olahraga prestasi dengan penambahan pembangunan GOR; dan peningkatan peran serta kepemudaan dalam pembangunan sebanyak 40% melalui program peningkatan peran serta kepemudaan, penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, pencapaian kemandirian pemuda dan olahraga, mempertahankan keunggulan olah raga Kabupaten Cirebon di tingkat Provinsi Jawa Barat dan nasional, mewujudkan olah raga sebagai bagian dari budaya masyarakat.

**Bidang Kebudayaan.** Pembangunan bidang kebudayaan diprioritaskan pada penguatan pelestarian ragam budaya tradisional dan kearifan lokal masyarakat Cirebon melalui aktualisasi dan pengembangan nilai budaya dan kearifan lokal, pengelolaan kekayaan dan pengelolaan keragaman budaya.

**Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.** Pembangunan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera diprioritaskan pada penurunan dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk, pengembangan model operasional Bina Keluarga Balita (BKB), posyandu, dan Pendidikan Anak Dini Usia (PADU), pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi (KR) mandiri, kemandirian keluarga, peningkatan kualitas hidup keluarga, dan peningkatan kualitas data kependudukan.

**Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri.** Pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri tetap diprioritaskan pada peningkatan wawasan, kesadaran dan tindakan masyarakat dalam tatanan kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara melalui kemitraan

pengembangan wawasan kebangsaan; pendidikan politik masyarakat; peningkatan pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, dan membangun konsensus antar pemangku kepentingan dalam penerapan demokrasi.

### **Misi kedua: Meningkatkan Lingkungan Hidup yang Lestari**

**Bidang Lingkungan Hidup.** Pembangunan di bidang lingkungan hidup diprioritaskan pada peningkatan kualitas lingkungan melalui peningkatan pelaksanaan program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup berbasis teknologi ramah lingkungan; partisipasi dan kemitraan masyarakat dalam perlindungan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam, konsistensi dalam penegakan hukum, efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam, konservasi dan pemulihan kualitas lingkungan, sistem mitigasi dan penanggulangan bencana alam yang handal, memantapkan daya dukung lingkungan, mendorong perilaku dan budaya ramah lingkungan di masyarakat, dan tertatanya kawasan rawan bencana.

**Bidang Penataan Ruang.** Pembangunan di bidang penataan ruang diprioritaskan pada peningkatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai RTRW, rencana kawasan strategis dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) melalui peran serta masyarakat, pemantapan sistem pengendalian dan koordinasi dalam pengaturan pembinaan, pelaksanaan serta pengawasan penataan ruang. terpeliharanya alokasi ruang kawasan lindung dan lahan sawah, optimalisasi kawasan budidaya untuk tumbuh dan berkembang tanpa mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan infrastruktur data dan informasi spasial telah dapat digunakan dengan mantap dalam mendukung pelaksanaan penataan ruang.

**Bidang Pertanahan.** Pembangunan di bidang pertanahan diprioritaskan pada peningkatan tertib administrasi inventaris asset tanah pemerintah daerah melalui pelaksanaan program penataan penguasaan, kepemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan menggunakan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

**Bidang Energi dan Sumber daya Mineral.** Pembangunan di bidang energi dan sumber daya mineral diprioritaskan pada pengurangan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan melalui peningkatan pelaksanaan program pengawasan dan penertiban kegiatan penambangan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan, dan penyediaan sumber energi listrik bagi masyarakat miskin melalui pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan, diversifikasi alternatif sumber energi non migas.

**Bidang Kelautan dan Perikanan.** Pembangunan bidang kelautan dan perikanan diprioritaskan pada pelestarian sumber daya kelautan melalui pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dengan sasaran bertambahnya luas area tanaman mangrove di wilayah pesisir menjadi 450 ha bertambahnya jumlah terumbu karang buatan yang ditenggelamkan di laut menjadi 250 unit, peningkatan kesejahteraan nelayan, pengembangan perikanan komersial dan rekreasi, pengembangan usaha pengolahan hasil, pengembangan sistem informasi kelautan dan perikanan, pengembangan budaya kelautan, dan pengembangan eko-konservasi kelautan.

**Bidang Perumahan dan Permukiman.** Pembangunan di bidang perumahan dan permukiman diprioritaskan pada peningkatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu, pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat, lingkungan sehat permukiman, pengembangan perumahan dan pemberdayaan komunitas perumahan.

**Bidang Kehutanan.** Pembangunan di bidang kehutanan diprioritaskan pada pengamanan dan pencegahan perusakan kawasan hutan melalui rehabilitasi hutan dan lahan, dan rehabilitasi hutan dan lahan.

### **Misi ketiga: Meningkatkan Perekonomian yang Kuat**

**Bidang Ketenagakerjaan.** Pembangunan di bidang ketenagakerjaan diprioritaskan pada peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja, pemantapan sistem jejaring kerja dan sistem informasi ketenagakerjaan,

peningkatan peran lembaga ketenagakerjaan, sinergisitas sistem pendidikan dan ketenagakerjaan, peningkatan kesejahteraan pekerja, peningkatan tenaga kerja berbasis potensi lokal dan kewirausahaan, pengembangan kurikulum yang berbasis dunia kerja, dan penumbuhkembangan pelaksanaan hubungan industrial.

**Bidang Ketrasmigrasian.** Pembangunan di bidang ketrasmigrasian diprioritaskan pada peningkatan jumlah lokasi tujuan transmigrasi, jumlah transmigran yang memperoleh peluang berusaha dan tempat tinggal, dan pembinaan transmigran melalui program pengembangan wilayah transmigrasi dengan peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi.

**Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.** Pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa diprioritaskan pada peningkatan peran serta masyarakat, kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah desa melalui program pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat dan aparatur desa, dan pemberdayaan lembaga ekonomi pedesaan, peningkatan pelaksanaan program desa membangun, dan peningkatan kesejahteraan aparatur desa.

**Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM).** Pembangunan di bidang KUMKM diprioritaskan pada peningkatan penguatan jaringan kelembagaan dan usaha, kapasitas SDM, sistem pembiayaan dan peluang pasar KUMKM melalui upaya penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif, pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah, pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah, perluasan pasar bagi usaha mikro, kecil dan menengah.

**Bidang Pertanian.** Pembangunan di bidang pertanian diprioritaskan pada peningkatan produksi dan nilai tambah atau produktivitas hasil pertanian, dan pengembangan pola agribisnis berbasis potensi lokal, perluasan



pangsa pasar hasil pertanian, penguatan sistem pertanian, dan terpeliharanya lahan sawah.

**Bidang Ketahanan Pangan.** Pembangunan di bidang ketahanan pangan diprioritaskan pada peningkatan kesejahteraan petani, diversifikasi pangan, penguatan kelembagaan petani, ketersediaan dan pengaturan pola distribusi hasil produksi.

**Bidang Pariwisata.** Pembangunan bidang pariwisata diprioritaskan pada peningkatan keunggulan daya tarik wisata di Kabupaten Cirebon melalui pengembangan produk wisata yang unik, tradisional dan mencerminkan jati diri masyarakat Kabupaten Cirebon, peningkatan industri pariwisata melalui pengelolaan pariwisata yang lebih profesional, dan menciptakan masyarakat sadar wisata.

**Bidang Perdagangan.** Pembangunan di bidang perdagangan diprioritaskan pada revitalisasi pasar tradisional, pengembangan kemampuan inovasi dan kualitas produksi, peningkatan kemampuan sumber daya perdagangan, mendorong perdagangan berbasis potensi lokal yang berorientasi ekspor, perluasan jaringan perdagangan luar negeri, penataan distribusi barang, pemberdayaan produk dalam negeri dan pengembangan pasar dalam negeri, dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen melalui pendirian layanan pengaduan konsumen.

**Bidang Industri.** Pembangunan di bidang industri diprioritaskan pada peningkatan kemampuan sumber daya industri, pengembangan industri kecil yang tangguh, peningkatan penggunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sistem produksi, penciptaan kesempatan kerja dalam jumlah besar, dan penerapan sistem insentif dan disinsentif.

**Bidang Penanaman Modal.** Pembangunan di bidang penanaman modal diprioritaskan pada peningkatan penciptaan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing melalui peningkatan pelayanan penanaman modal dengan berbasis sistem teknologi informasi-komunikasi, dan memanfaatkan data base peluang investasi di tingkat lokal dan regional,



**Bidang Pekerjaan Umum.** Pembangunan di bidang pekerjaan umum diprioritaskan pada peningkatan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, peningkatan pencegahan dan pengendalian banjir dan kekeringan, percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah tertinggal, peningkatan kemantapan infrastruktur yang telah ada, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur di wilayah strategis.

**Bidang Perhubungan.** Pembangunan di bidang perhubungan diprioritaskan pada peningkatan kelancaran distribusi barang dan jasa melalui peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan fasilitas perhubungan, pelayanan angkutan ke seluruh daerah pedesaan, pengendalian dan pengamanan lalu lintas, dan penataan angkutan umum.

**Misi keempat: Mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel**

**Bidang Perencanaan Pembangunan.** Pembangunan di bidang perencanaan pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas perencanaan pembangunan melalui pemantapan fungsi kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur perencana, dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

**Bidang Komunikasi dan Informatika.** Pembangunan bidang komunikasi dan informatika diprioritaskan pada pemanfaatan sistem informasi komunikasi daerah untuk menginformasikan segala bentuk informasi yang berkaitan dengan hasil-hasil pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan di kabupaten Cirebon, menampung keluhan dan pengaduan masyarakat, dan pengembangan infrastruktur informasi dan komunikasi sampai seluruh desa dan kelurahan.

**Bidang Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.** Pembangunan dalam bidang ini diprioritaskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas dan kuantitas belanja pembangunan, peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil



kepala daerah, kapasitas lembaga legislatif, kinerja pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif, dan kinerja PNS

**Bidang Statistik.** Pembangunan di bidang statistik diprioritaskan pada pelaksanaan sistem data dan informasi yang cepat, tepat dan akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan.

**Bidang Kearsipan.** Pembangunan bidang kearsipan diprioritaskan pada peningkatan mutu penyelenggaraan kearsipan daerah dan kinerja pengelolaan kearsipan menuju tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui pemanfaatan sistem informasi administrasi kearsipan di setiap instansi pemerintah daerah

**Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.** Pembangunan bidang kependudukan dan catatan sipil diprioritaskan pada peningkatan pelayanan administrasi kependudukan (cepat, tepat, murah dan transparan) dan kualitas data kependudukan melalui pelaksanaan program sistem informasi administrasi kependudukan sampai tingkat desa.

#### **4.2.5.2. RTRW Kabupaten Cirebon**

Berdasarkan RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 disebutkan bahwa Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, harmonis, dan terpadu sebagai sentra pertanian, industri dan pariwisata yang mendukung PKN Cirebon.

Kebijakan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, harmonis, dan terpadu, meliputi:

1. Pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
2. Peningkatan keterkaitan dan keterpaduan pengembangan kawasan yang berbatasan dengan kabupaten/kota tetangga.

Strategi untuk pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, meliputi:

1. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya;
2. Mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
3. Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan beserta prasarana untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya; dan
4. Mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kerugian akibat bencana.

Strategi untuk peningkatan keterkaitan dan keterpaduan pengembangan kawasan yang berbatasan dengan kabupaten/kota tetangga, meliputi:

1. Menjaga keterkaitan dan keterpaduan dalam mengembangkan kawasan perbatasan dengan kabupaten/ kota tetangga;
2. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang berbatasan dengan kabupaten/kota tetangga; dan
3. Meningkatkan koordinasi dalam mengembangkan kawasan yang berbatasan dengan kabupaten/kota tetangga.

**Tabel 4.3**  
**Hubungan antara Isu, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Kawasan**

| Isu              | Kebijakan   | Strategi  |
|------------------|---|---|
| Sentra Pertanian | a. Perwujudan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan; | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mempertahankan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan;</li><li>2. Mengendalikan alih fungsi peruntukan lahan pertanian pangan berkelanjutan;</li><li>3. Meningkatkan aksesibilitas, meningkatkan ketahanan pangan, penyediaan alat teknologi pra pasca panen, dan</li></ol> |



| Isu               | Kebijakan   | Strategi  |
|-------------------|---|---|
|                   |   | pengembangan pasca pertanian  |
|                   | b. Pengembangan jaringan sumber daya air untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian pangan berkelanjutan;                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan dan memelihara bendungan, waduk, dan situ untuk menjamin ketersediaan air baku bagi kegiatan pertanian;</li> <li>2. Mengembangkan dan memelihara jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi untuk menjamin penyaluran air bagi lahan pertanian.</li> </ol> |
|                   | c. Pengembangan kawasan pesisir dan laut sesuai potensi serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan sentra budidaya perikanan air payau, dan sentra budidaya garam;</li> <li>2. Mengembangkan sarana dan prasarana untuk menunjang pengembangan kegiatan budidaya di kawasan pesisir dan laut.</li> </ol>   |
| Sentra Industri   | 1. Peningkatan fungsi kawasan industri untuk meningkatkan daya saing kawasan dengan memerhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan industri;</li> <li>2. Meningkatkan penataan lokasi kegiatan industri di dalam kawasan industri.</li> </ol>  |
|                   | 2. Pengembangan kawasan untuk kegiatan industri yang berdaya saing dan ramah lingkungan   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan kawasan industri terpadu sebagai pusat kegiatan industri;</li> <li>2. Mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri.</li> </ol>  |
| Sentra Pariwisata | 1. Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata;  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merehabilitasi kawasan peruntukan pariwisata yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya;</li> <li>2. Mengembangkan wisata religi dan wisata bahari; dan</li> <li>3. Mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pariwisata.</li> </ol>            |
|                   | 2. Pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pariwisata;   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan pusat jasa dan promosi pariwisata di kawasan perkotaan;</li> <li>2. Memantapkan akses prasarana dan sarana untuk</li> </ol>   |

| Isu                   | Kebijakan   | Strategi  |
|-----------------------|---|---|
|                       |   | meningkatkan keterkaitan antara kawasan perkotaan dan kawasan-kawasan pariwisata  |
|                       | 3. Pengembangan keterpaduan antar pusat pariwisata.   | Meningkatkan keterkaitan dengan PKN di Provinsi Jawa Barat sebagai pusat pariwisata dalam kesatuan tujuan pariwisata  |
| Pendukung PKN Cirebon | Peningkatan fungsi dan pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala nasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup | 1. Mengembangkan kawasan perekonomian sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala nasional; dan<br>2. Mengembangkan dan memantapkan prasarana dan sarana untuk meningkatkan keterkaitan antar pusat perdagangan dan jasa yang berskala nasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. |

Sumber: Diolah oleh Bappelitbangda, 2021

#### 4.2.5.3. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD

KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kajian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan telah memperhatikan potensi dampak pembangunan terhadap lingkungan, serta memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

KLHS menghasilkan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, dan adaptasi. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil pengkajian pencapaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan dan kondisi lingkungan daerah yang meliputi 6 (enam) muatan KLHS, kondisi keuangan dan kelembagaan daerah.

KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 untuk selanjutnya menjadi dasar dalam mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024.

Data dan informasi, hasil analisis, serta rekomendasi kebijakan yang tertuang pada KLHS dipastikan terintergrasi di dalam muatan kebijakan, rencana, dan program pada Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Seperti kita ketahui bahwa di Indonesia telah mengadopsi kesepakatan internasional tentang agenda *Sustainable Development Goal's (SDG's)*/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang diterbitkan pada 4 Juli 2017. Hal ini menunjukkan konsistensi pemerintah untuk melembagakan agenda TPB ke dalam program pembangunan nasional. Perpres tersebut menekankan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, melalui empat platform partisipasi, yaitu pemerintah termasuk Pemerintah Daerah dan parlemen, filantropi dan bisnis, ormas, akademisi dan pakar dalam rangka menyukseskan pelaksanaan agenda TPB.

**Gambar 4.6**

***Sustainable Development Goals (SDG's)***



Sumber: Diolah dari dokumen SDG's, 2020

Berdasarkan dokumen KLHS, Kabupaten Cirebon memiliki kepentingan dan komitmen yang kuat untuk turut berpartisipasi dalam



pencapaian SDG's, mengingat berdasarkan permasalahan di atas, masih terdapat tujuan pembangunan yang memang masih harus dituntaskan oleh Pemerintah Kabupaten. Berdasarkan dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2023, maka Kabupaten Cirebon hanya melaksanakan 7 tujuan dengan 174 indikator TPB yang menjadi wewenang kabupaten. Dari 174 indikator yang ditetapkan dalam TPB Kabupaten Cirebon, hanya 61 (35,06%) indikator yang memiliki data sedangkan sebanyak 113 (64,94%) indikator tidak tersedia data. 7 (tujuh) tujuan tersebut akan dijabarkan di dalam dua tabel berikut ini,

**Tabel 4.4**

**Isu Strategis dan Rekomendasi Berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung**

Alternatif Skenario dan Rekomendasi Berdasarkan TPB Prioritas

| Tujuan Pembangunan Berkelanjutan  | Isu Strategis              | Alternatif Rekomendasi  | Rekomendasi   |
|---|----------------------------|---|---|
|   |                            |   | RTH dan Jalan baru)   |
| <b>Tujuan 2. Tanpa Kelaparan</b>  |                            |   |   |
| <p>Target 2.3. Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian</p> <p>2.4. Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.</p> | Kekeringan lahan pertanian | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inventarisasi data implementasi mengatasi kekeringan di wilayah kekeringan baik yang berhasil maupun yang belum berhasil.</li> <li>2. Menentukan skala prioritas penanganan dengan penentuan teknologi tepat guna.</li> <li>3. Perlunya alokasi dana penanggulangan kekeringan.</li> <li>4. Mengoptimalkan sumber air (air permukaan dan air tanah) ke lokasi kekeringan secara lebih detail.</li> <li>5. Penentuan skala prioritas, sehingga implementasinya dapat terpadu dan berkelanjutan.</li> </ol> | <p><b>Jangka Panjang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reboisasi di wilayah sekitar sumber mata air</li> <li>▪ Reboisasi kawasan sabuk hijau sekitar waduk</li> <li>▪ Rehabilitasi lahan dan konservasi tanah lahan kritis</li> <li>▪ Pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM)</li> <li>▪ Pembangunan demplot sumur resapan di wilayah rawan kekeringan</li> <li>▪ Pembangunan/pengembangan sistem IPA mini</li> <li>▪ Untuk menjaga ketersediaan air, diperlukan bangunan-bangunan penunjang yang dapat menampung air hujan seperti embung dan akuifer, seperti Embung, ABSAH ( Akuifer Buatan dan Simpanan Air Hujan ), Akuifer Buatan</li> </ul> <p><b>Jangka Menengah:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan ketersediaan sumber air : Pembangunan sumur gali, sumur pantek, sumur air tanah dalam, penampungan air hujan (PAH), Terminal air di wilayah desa rawan kekeringan, embung.</li> <li>▪ Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana air bersih</li> <li>▪ Melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka mencari potensi sumber-sumber air</li> </ul> <p><b>Jangka Pendek:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memenuhi dengan segera kebutuhan air bersih bagi masyarakat untuk keperluan rumah tangga dengan dropping air bersih</li> <li>▪ Memberi bantuan pangan/sembako untuk masyarakat miskin yang usahataniannya puso</li> <li>▪ Membantu menanggulangi penyakit menular akibat kekeringan</li> <li>▪ Membantu peningkatan gizi balita di wilayah</li> </ul> |



| Tujuan Pembangunan Berkelanjutan  | Isu Strategis                      | Alternatif Rekomendasi  | Rekomendasi   |
|---|------------------------------------|---|---|
|   |                                    |   | kekeringan  |
| <p>Target 2.3. Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian</p> <p>2.4. Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.</p> | Adanya alih fungsi lahan dan hutan | <p>1. Strategi Peraturan Kebijakan <i>Regulation</i>. Melalui pendekatan ini pengambil kebijakan perlu menetapkan sejumlah aturan dalam pemanfaatan lahan yang ada. Berdasarkan berbagai pertimbangan teknis, ekonomis, dan sosial, pengambil kebijakan bisa melakukan pewilayahan (zoning) terhadap lahan yang ada serta kemungkinan bagi proses alih fungsi. Selain itu, perlu mekanisme perizinan yang jelas dan transparan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada dalam proses alih fungsi lahan. Dalam tatanan praktisnya, pola ini telah diterapkan pemerintah melalui penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan pembentukan Tim Sembilan di tingkat kabupaten dalam proses alih fungsi lahan. Sayangnya, pelaksanaan di lapang belum sepenuhnya konsisten menerapkan aturan yang ada.</p> <p><i>Acquisition and Management</i>. Melalui pendekatan ini pihak terkait perlu menyempurnakan sistem dan aturan jual beli lahan serta penyempurnaan pola penguasaan lahan (land tenure system) yang ada guna mendukung upaya ke arah mempertahankan keberadaan lahan pertanian.</p> <p><i>Incentive and Charges</i>. Pemberian subsidi kepada para petani yang</p> | <p><b>Jangka Panjang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kejelasan dari isi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yaitu seperti halnya Undang-Undang dan peraturan daerah yang terkait dengan pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Kedua Pengesahan keputusan dalam bentuk peraturan daerah maupun rancangan tata wilayah atau RTRW.</li> <li>Penetapan kawasan LP2B yang abadi dimana tanah ini tidak boleh dikonversi.</li> <li>Manfaat dan perubahan yang diinginkan. Manfaatnya kawasan agropolitan tetap terjaga dan komoditas unggulan tetap terjaga. Serta visi isi pada Kota Batu pun terlaksana.</li> <li>Sumberdaya yang dilibatkan dalam proses pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan.</li> <li>Ketersediaan sumber daya manusia, dana dan sarana akan mempermudah melaksanakan suatu kebijakan tersebut. Seperti halnya dengan SKPD yang terkait dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian.</li> <li>Ketepatan alokasi sumberdaya yang ada didalamnya termasuk sumberdaya manusia serta sumberdaya anggaran. Seperti halnya pemberian tugas pokok dan fungsi jabatan yang tepat pada anggotanya dan dengan pengalokasian dana yang tepat guna dan tepat sasaran.</li> <li>Keterpaduan hierarki dalam dan diantara lembaga pelaksana. Dalam hal ini diperlukan kolaborasi serta koordinasi antar instansi baik koordinasi bersifat vertikal maupun horizontal yang terlibat dalam program implementasi suatu kebijakan tersebut.</li> </ul> <p><b>Jangka Menengah:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan ketersediaan sumber air :</li> </ul> |

| Tujuan Pembangunan Berkelanjutan | Isu Strategis                               | Alternatif Rekomendasi   | Rekomendasi   |
|----------------------------------|---|--|---|
|                                  |   | <p>dapat meningkatkan kualitas lahan yang mereka miliki, serta penerapan pajak yang menarik bagi yang mempertahankan keberadaan lahan pertanian, merupakan bentuk pendekatan lain yang disarankan dalam upaya pencegahan alih fungsi lahan pertanian. Selain itu, pengembangan prasarana yang ada lebih diarahkan untuk mendukung pengembangan kegiatan budidaya pertanian berikut usaha ikutannya.</p> <p>2. Strategi Partisipasi Masyarakat</p> <p>Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang patut dijadikan pertimbangan adalah yang bertumpu pada masyarakat (community-based management plan). Artinya, masyarakat adalah tumpuan dalam bentuk partisipasi dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian.</p> | <p>Pembangunan sumur gali, sumur pantek, sumur air tanah dalam, penampungan air hujan (PAH), Terminal air di wilayah desa rawan kekeringan, embung.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana air bersih</li> <li>▪ Melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka mencari potensi sumber-sumber air</li> </ul> <p><b>Jangka Pendek:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyusun regulasi tentang alih fungsi lahan kaitannya dengan arah program ketahanan pangan masa depan. Perwilayahan (<i>zoning</i>) terhadap lahan produktif yang harus dipertahankan didasari atas peraturan yang mengikat dan ada sanksinya jika dilanggar. Regulasi itu juga memuat mekanisme perizinan yang jelas dan transparan terkait proses alih fungsi lahan, termasuk alasan, kriteria yang jelas dan sanksi yang tegas tentang pelanggaran alih fungsi lahan dan sanksi tegas jika melanggarnya.</li> <li>▪ Penyusunan kebijakan insentif dan <i>charge</i> serta kompensasi diterapkan. Kebijakan pemberian insentif diberikan kepada warga masyarakat yang tetap mempertahankan lahan produktifnya melalui keringanan membayar pajak bumi dan bangunan (PBB), kemudahan memperoleh bantuan permodalan, bantuan sarana produksi pertanian, bantuan penyuluhan, manajemen pasca-panen, bantuan pemasaran yang kesemuanya dilakukan dengan menjaga kestabilan harga komoditas pertanian.</li> <li>▪ Meningkatkan partisipasi masyarakat akan pentingnya ketahanan pangan dan meningkatkan kontrol masyarakat dalam menjaga alih fungsi lahan.</li> </ul> |
|                                  | Minimnya kegiatan reboisasi lahan dan hutan | <p>1. Penumbuhan minat masyarakat dalam pelaksanaan reboisasi melalui pengembangan dan penguatan Partisipasi Masyarakat, Kemitraan dan Pemberdayaan</p>  | <p><b>Jangka Panjang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reboisasi di wilayah sekitar sumber mata air</li> <li>▪ Reboisasi kawasan sabuk hijau sekitar waduk</li> <li>▪ Rehabilitasi lahan dan konservasi tanah lahan kritis</li> </ul>   |

| Tujuan Pembangunan Berkelanjutan | Isu Strategis  | Alternatif Rekomendasi  | Rekomendasi  |
|----------------------------------|--|---|--|
|                                  |  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM)</li> <li>▪ Pembangunan demplot sumur resapan di wilayah rawan kekeringan</li> <li>▪ Pembangunan/pengembangan sistem IPAL mini</li> <li>▪ Untuk menjaga ketersediaan air, diperlukan bangunan-bangunan penunjang yang dapat menampung air hujan seperti embung dan akuifer, seperti Embung, ABSAH ( Akuifer Buatan dan Simpanan Air Hujan ), Akuifer Buatan</li> </ul> <p><b>Jangka Menengah:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan ketersediaan sumber air : Pembangunan sumur gali, sumur pantek, sumur air tanah dalam, penampungan air hujan (PAH), terminal air di wilayah desa rawan kekeringan, embung.</li> <li>▪ Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana air bersih</li> <li>▪ Melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka mencari potensi sumber-sumber air</li> </ul> <p><b>Jangka Pendek:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memenuhi dengan segera kebutuhan air bersih bagi masyarakat untuk keperluan rumah tangga dengan droping air bersih</li> <li>▪ Memberi bantuan pangan/sembako untuk masyarakat miskin yang usahatannya puso</li> <li>▪ Membantu menanggulangi penyakit menular akibat kekeringan</li> <li>▪ Membantu peningkatan gizi balita di wilayah kekeringan</li> </ul> |
|                                  | Penurunan kualitas dan kuantitas hasil laut, pertanian | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian bantuan benih dan pupuk</li> <li>2. Penyiapan bantuan modal melalui Kredit Program</li> <li>3. Pengelolaan Irigasi</li> <li>4. Perlindungan terhadap gagal</li> </ol> | <p><b>Jangka Panjang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menjamin ketersediaan sekolah, puskesmas, listrik, pasar di daerah-daerah (pantai, perkebunan, pedesaan) sehingga usia produktif tertarik membangun desanya</li> </ul>  |

| Tujuan Pembangunan Berkelanjutan | Isu Strategis | Alternatif Rekomendasi   | Rekomendasi   |
|----------------------------------|---------------|--|---|
|                                  |               | <p>panen/masa paceklik untuk Petani dan nelayan</p> <p>5. Pembangunan infrastruktur untuk memperlancar jalur pemasaran</p> <p>6. Penguatan ketaatan terhadap Perbup tentang Rencana Tata Tanam.</p> <p>7. Sinergitas antara stakeholder untuk penanganan irigasi sesuai dengan kewenangan.</p> <p>8. Pengadaan sarana dan prasarana penampungan air untuk pertanian, penanganan kekeringan dan bencana banjir.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Diversifikasi pangan lokal untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga pedesaan dan sekaligus menghasilkan pangan lokal yang berdaya saing.</li> <li>▪ Insentif terhadap penelitian yang memberi dampak bagi pertanian dan perikanan Kabupaten Cirebon</li> </ul> <p><b>Jangka Menengah:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan ketersediaan sumber air : Pembangunan sumur gali, sumur pantek, sumur air tanah dalam, penampungan air hujan (PAH), terminal air di wilayah desa rawan kekeringan, embung.</li> <li>▪ Mendorong pemerintah untuk menetapkan harga minimum untuk hasil produksi pertanian dan perikanan untuk menjamin kestabilan harga jual komoditas pertanian.</li> <li>▪ Mempromosikan komoditas hasil produksi pertanian dan perikanan hasil produksi petani dan nelayan lokal</li> <li>▪ Memfasilitasi ketersediaan pasar untuk menampung hasil produksi petani dan nelayan lokal</li> </ul> <p><b>Jangka Pendek:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelatihan-pelatihan dan sosialisasi penyuluh pertanian yang efektif untuk petani (petani disini termasuk peternak, nelayan, perkebun) melibatkan kampus dan swasta yang terlibat dlm industri ini.</li> <li>▪ Memberikan subsidi pupuk, alat pertanian, kapal, bibit, obat hewan peliharaan dan memberikan pengawasan terhadap mekanisme pemberian subsidi-subsidi tersebut.</li> <li>▪ Insentif untuk swasta atau industri-industri yang mau terlibat misalnya industri input (pupuk, benih) sehingga tercipta harga pupuk yang lebih masuk akal.</li> <li>▪ Insentif untuk industri lanjutan (industri pengolahan makanan) untuk menjaga keutuhan mata rantai industri pertanian</li> <li>▪ Membangun dan memperbaiki jaringan irigasi, jalan</li> </ul> |

| Tujuan Pembangunan Berkelanjutan  | Isu Strategis  | Alternatif Rekomendasi   | Rekomendasi  |
|---|--|--|--|
|   |  |  | <p>dan jembatan serta angkutan murah untuk distribusi produksi pertanian dan perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menumbuhkembangkan keberdayaan dan kemandirian petani, kelompok tani, kelompok usaha / asosiasi dan usaha formal</li> </ul>  |
| <p>Target 2.3. Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian</p> <p>2.4. Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Berkurangnya lahan pertanian yang produktif</li> <li>Serangan hama dan penyakit pada lahan pertanian</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Rehabilitasi lahan pertanian (Intensifikasi lahan pertanian)</li> <li>Penggunaan varietas bibit unggul yang tidak membutuhkan banyak air.</li> <li>Peningkatan sarana dan prasarana pertanian</li> <li>Penguatan kelembagaan kelompok tani</li> <li>Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM petani dan penyuluh</li> <li>Pengadaan anggaran untuk peningkatan kualitas SDM penyuluh pertanian</li> </ol> | <p><b>Jangka Panjang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kejelasan dari isi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu seperti halnya Undang-Undang dan peraturan daerah yang terkait dengan pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Kedua pengesahan keputusan dalam bentuk peraturan daerah maupun rancangan tata wilayah atau RTRW.</li> <li>Penetapan kawasan LP2B yang abadi dimana tanah ini tidak boleh dikonversi.</li> <li>Insentif terhadap penelitian yang memberi dampak bagi pertanian dan perikanan Kabupaten Cirebon</li> </ul> <p><b>Jangka Menengah:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan ketersediaan sumber air : Pembangunan sumur gali, sumur pantek, sumur air tanah dalam, penampungan air hujan (PAH), terminal air di wilayah desa rawan kekeringan, embung.</li> <li>Peningkatan kualitas sumber daya manusia petani dan penguatan kelembagaan petani</li> <li>Peningkatan sarana dan prasarana teknologi pertanian</li> </ul> <p><b>Jangka Pendek:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelatihan-pelatihan dan sosialisasi penyuluh pertanian yang efektif untuk petani terkait pengendalian hama penyakit tanaman</li> <li>Membangun dan memperbaiki jaringan irigasi, jalan dan jembatan serta angkutan murah untuk distribusi produksi pertanian dan perikanan</li> </ul> |

| Tujuan Pembangunan Berkelanjutan   | Isu Strategis  | Alternatif Rekomendasi   | Rekomendasi   |
|--|--|--|---|
| <b>Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak</b>   |  |  |   |
| <p>6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.</p> <p>6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Minimnya MCK/ Jamban layak pakai</li> <li>Minimnya pasokan air bersih</li> <li>Minimnya sistem drainase ramah lingkungan /permukiman</li> <li>Pemukiman kumuh</li> <li>Pencemaran akibat limbah domestik (septiktank yang dekat dengan pengambilan air tanah)</li> </ul>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Program Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan lima pilarnya</li> <li>Pendekatan pemasaran sosial yang memobilisasi sejumlah besar penduduk dan meningkatkan permintaan fasilitas sanitasi yang lebih baik</li> <li>Sistem data perlu diperkuat agar perencanaan dilakukan secara tepat dan capaian target terukur.</li> <li>Keterlibatan baik pemerintah daerah maupun sektor swasta sangat penting untuk meningkatkan sistem perkotaan dan pinggiran kota</li> <li>Penyediaan permukiman layak huni.</li> <li>Sinergitas antara stakeholders untuk penyediaan permukiman layak huni.</li> </ol> | <p><b>Jangka Panjang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tercipta sistem berkesinambungan dan keberlanjutan persediaan air bersih</li> </ul> <p><b>Jangka Menengah:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SKPD dan lembaga-lembaga tingkat kabupaten memiliki perencanaan dan sasaran yang tepat untuk membuat sistem perdesaan lebih berkesinambungan.</li> </ul> <p><b>Jangka Pendek:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengkajian teknologi inovatif dalam penyediaan sanitasi dan air bersih pengkajian ulang terhadap berbagai tugas, proses dan akuntabilitas kelembagaan, khususnya kepala PDAM.</li> <li>Penyuluhan agar tercipta kesadaran dan perilaku kebersihan</li> <li>Pengelolaan limbah padat di perkotaan dilakukan sedikit demi sedikit dan diatur dengan baik</li> </ul> |
| <p>6.3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahankimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.</p> <p>6.6. Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Limbah Industri Batu Alam, batik dan industri Lainnya</li> <li>Pembuangan limbah industri dan rumah tangga langsung ke laut</li> <li>Berkurangnya keragaman biota laut (udang, ikan dll)</li> <li>Adanya perilaku masyarakat membuang sampah sembarangan</li> <li>Kurangnya tempat pembuangan sampah sementara</li> <li>Kurangnya kesadaran masyarakat pada pengelolaan sampah</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengaturan Tata Ruang</li> <li>Perlindungan Sumber Air</li> <li>Kelompok Sadar Lingkungan Dan</li> <li>Lembaga Swadaya Masyarakat</li> <li>Produksi Bersih</li> <li>Teknologi Pengolahan Limbah</li> <li>Pajak dan Bank Lingkungan</li> <li>Industri Lingkungan</li> <li>Aspek Legal : Pembinaan dan Penegakan Hukum</li> </ol>   | <p><b>Jangka Panjang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tercipta sistem berkesinambungan dan keberlanjutan persediaan air bersih</li> </ul> <p><b>Jangka Menengah:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Integrasi konsep lingkungan hidup ke dalam RTRW</li> <li>Pengaturan tata ruang berbasis keseimbangan ekosistem</li> <li>Pembinaan dan penegakan Hukum</li> </ul> <p><b>Jangka Pendek:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penumbuhan dan pembangunan sentra industri dilengkapi sarana IPAL</li> <li>Pembangunan TPA ramah lingkungan dengan teknologi sanitary landfill</li> </ul>   |

| Tujuan Pembangunan Berkelanjutan  | Isu Strategis   | Alternatif Rekomendasi   | Rekomendasi  |
|---|---|--|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Minimnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah</li> <li>Minimnya pengawasan limbah rumah sakit dan industri</li> <li>Kurangnya penegakan hukum terhadap limbah industri dan rumah sakit</li> <li>Badan air seperti sungai mengalami pencemaran karena aktivitas warga</li> <li>Pencemaran udara akibat kegiatan industri dan peternakan</li> <li>Pengelolaan sampah yang belum maksimal berpotensi menimbulkan resiko bahaya</li> </ul>                                  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi tentang produksi bersih bagi IKM industri, melalui pengurangan pemakaian bahan-bahan pencemar lingkungan, penggunaan ulang bahan-bahan yang bisa dimanfaatkan</li> <li>Sosialisasi hukum lingkungan</li> <li>Penumbuhan kelompok masyarakat peduli lingkungan</li> <li>Menetapkan daya tampung beban pencemaran</li> <li>Melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber-sumber pencemar</li> <li>Menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;</li> <li>Memantau kualitas air pada sumber air;</li> <li>Menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah;</li> <li>Memantau fasilitas lain yang menyebabkan perubahan mutu air.</li> <li>Sosialisasi dan pelatihan pemanfaatan limbah di lingkungan sekitar</li> </ul> |
| <p>6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.</p> <p>6.5. Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Perilaku masyarakat membuang sampah</li> <li>Belum memadai sistem drainase</li> <li>Timbul banjir</li> <li>Adanya pembangunan yang tidak sesuai peruntukan wilayah</li> <li>Adanya kawasan mengalami banjir rob</li> <li>Kurangnya pemeliharaan DAS</li> <li>Lemahnya infrastruktur pengelolaan SDA</li> <li>Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup seperti pemeliharaan dan pelestarian sumber daya alam dan</li> </ul> | <p>Arahan penanganan drainase dapat dibagi menjadi 3 wilayah penanganan sebagai berikut (Kementerian PU, 2011) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Wilayah Hulu<br/>Limpasan air hujan dialirkan untuk kemudian diresapkan (pola retensi).</li> <li>Wilayah Tengah<br/>Limpasan air hujan dialirkan ke kolam tampungan untuk ditampung sementara atau diresapkan bila memungkinkan (gabungan pola retensi dan detensi).</li> <li>Wilayah Hilir<br/>Air limpasan dialirkan melalui saluran drainase ke waduk atau</li> </ol> | <p><b>Jangka Panjang:</b></p> <p>Terbangun sistem drainase berwawasan lingkungan dimaksudkan sebagai upaya mengelola kelebihan air dengan cara meresapkan sebanyak-banyaknya air ke dalam tanah secara alamiah atau mengalirkan air ke sungai dengan tanpa melampaui kapasitas sungai sebelumnya (Kementerian PU, 2011).</p> <p><b>Jangka Menengah:</b></p> <p>Menata sistem drainase perkotaan yakni sistem prasarana drainase dalam wilayah kota yang intinya berfungsi selain untuk mengendalikan dan mengalirkan limpasan air hujan yang berlebihan dengan aman, juga untuk mengendalikan dan mengalirkan kelebihan air lainnya yang mempunyai dampak mengganggu dan/atau mencemari lingkungan perkotaan, yaitu air buangan atau air limbah lainnya. (Hardjosuprpto, 1999)</p>                           |

| Tujuan Pembangunan Berkelanjutan | Isu Strategis  | Alternatif Rekomendasi  | Rekomendasi  |
|----------------------------------|--|---|--|
|                                  | lingkungan hidup <ul style="list-style-type: none"> <li>Konflik kepentingan pemanfaatan SDA dengan kegiatan usaha</li> </ul> | kolam untuk penampungan sementara (pola detensi) sebelum dialirkan atau dipompa ke badan air (sungai atau laut) | <b>Jangka Pendek:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembuatan pecontohan ecodrainage :               <ol style="list-style-type: none"> <li>Lubang Resapan Biopori</li> <li>Sumur Resapan</li> <li>Kolam Konservasi (detensi atau retensi)</li> <li>Parit Infiltrasi</li> <li>Rorak</li> <li>Side River Polder</li> <li>Penampung Air</li> <li>Hujan (PAH)</li> </ol> </li> <li>Melakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang perlindungan kawasan DAS</li> <li>Sosialisasi tentang produksi bersih bagi IKM industri</li> <li>Sosialisasi hukum lingkungan</li> <li>Penumbuhan kelompok masyarakat peduli lingkungan</li> <li>Menetapkan daya tampung beban pencemaran</li> <li>Melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber-sumber pencemar</li> <li>Menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;</li> <li>Memantau kualitas air pada sumber air;</li> <li>Menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah;</li> <li>Memantau fasilitas lain yang menyebabkan perubahan mutu air.</li> </ul> |

| Tujuan Pembangunan Berkelanjutan | Isu Strategis | Alternatif Rekomendasi | Rekomendasi |
|----------------------------------|---------------|------------------------|-------------|
| Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan       |               |                        |             |



|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <p>1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.</p> | <p>Tingkat pertumbuhan penduduk meningkat</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengendalikan pertumbuhan populasi</li> <li>2. Penduduk dan urbanisasi di Kabupaten Cirebon</li> <li>3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang</li> <li>4. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</li> <li>5. Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan</li> </ol> | <p><b>Jangka Panjang:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengendalikan pertumbuhan populasi penduduk</li> <li>2. Penumbuhan potensi perekonomian di perdesaan untuk menekan tingkat urbanisasi</li> <li>3. Pemerataan penguasaan lahan dan kepemilikan rumah dan lahan</li> </ol> <p><b>Jangka Menengah:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan program keluarga berencana</li> <li>2. Penguatan pelayanan pemasangan alat kontrasepsi</li> <li>3. Penguatan peran serta masyarakat dalam program KB</li> <li>4. Penumbuhan ekonomi melalui program produk unggulan desa (one product one village)</li> <li>5. Terfasilitasinya penyelesaian konflik / sengketa di bidang pertanahan termasuk aset pemerintah daerah</li> </ol> <p><b>Jangka Pendek:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin</li> <li>b. Pelayanan konseling KB</li> <li>c. Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu</li> <li>d. Pengadaan sarana mobilitas petugas KB keliling</li> <li>e. Promosi Pelayanan pemasangan kontrasepsi</li> <li>f. Pengadaan alat kontrasepsi</li> <li>g. Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB</li> <li>h. Percontohan pengembangan produk unggulan desa (one product one village)</li> <li>i. Pengadaan data-data monitoring desa yang akurat/ yang baru dan data tanah timbul (pengadaan tanah utk TPA,</li> </ol> |
|---|---|--|--|

Sumber: Rancangan KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024

Perumusan alternatif skenario dengan upaya tambahan merupakan alternatif skenario yang diperlukan bagi indikator-indikator TPB yang belum mencapai target RPJMN 2019 serta indikator-indikator yang belum tersedia data, baik untuk indikator-indikator yang sudah dilaksanakan maupun belum dilaksanakan. Dari total 197 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten Cirebon, terdapat 122 indikator yang memerlukan upaya tambahan, dengan rincian : 62 indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target, 14 indikator belum dilaksanakan, dan 46 indikator belum tersedia data.

Penilaian terhadap capaian indikator TPB di Kabupaten Cirebon menghasilkan 122 isu strategis yang terdiri dari indikator-indikator yang belum dilaksanakan, belum mencapai target dan data yang tidak tersedia. Dari total 122 indikator tersebut, 89 di antaranya merupakan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sedangkan 108 adalah urusan pemerintah wajib bukan pelayanan dasar. Secara visual sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.5  
Alternatif Rekomendasi TPB Dengan Upaya  
Tambahan

| Tujuan Pembangunan Berkelanjutan        | Isu Strategis | Alternatif Rekomendasi | Kategori Jenis Usulan | Rekomendasi |
|---|---------------|------------------------|-----------------------|-------------|
| Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera |               |                        |                       |             |

|  |   |  |                              |  |
|--|---|--|------------------------------|--|
| <p>3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.</p> <p>3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.</p> | <p>Pelayanan kesehatan yang belum optimal</p> | <p>Penerapan konsep Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Kesehatan, yang memuat antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Pengembangan sistem pengelolaan dan penyelenggaraan layanan kesehatan.</li> <li>2.) Peningkatan infrastruktur, sarana, alkes, petugas, pelayanan, obat-obatan, dan bahan habis pakai RSUD dan Puskesmas.</li> <li>3.) Peningkatan layanan vaksinasi Covid-19 dan wabah lainnya</li> <li>4.) Peningkatan layanan Jamkesmas dan perluasan layanan Jamkesda (layanan kesehatan gratis bagi keluarga/warga miskin, korban wabah, dankorban bencana melalui Kartu Sehat).</li> <li>5.) Peningkatan cakupan layanan lansia, layanan persalinan/kesehatan ibu dan anak (layanan Jampersal), serta pencegahan penyakit menular dan tidak menular, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, perbaikan gizi masyarakat, perbaikan perilaku dan lingkungan sehat kepada masyarakat.</li> <li>6.) Pencegahan dan pemberantasan HIV/AIDS melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terhadap pencegahan Infeksi HIV/AIDS dan perluasan Layanan Konseling dan Tes Sukarela (Voluntary Counseling and Testing atau VCT).</li> </ol> | <p>Wajib Pelayanan Dasar</p> | <p><b>Jangka Panjang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan cakupan pembiayaan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)</li> </ul> <p><b>Jangka Menengah:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan</li> <li>▪ Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan</li> </ul> <p><b>Jangka Pendek:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak</li> <li>▪ Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan</li> <li>▪ Program Pembinaan Upaya Kesehatan</li> <li>▪ Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan</li> <li>▪ Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan</li> <li>▪ Pembinaan Kesehatan Bayi, Anak dan Remaja</li> <li>▪ Pengendalian Penyakit Menular</li> <li>▪ Pengendalian Penyakit Tidak Menular</li> </ul> |
|--|---|--|------------------------------|--|

| Tujuan Pembangunan Berkelanjutan  | Isu Strategis   | Alternatif Rekomendasi   | Kategori Jenis Usulan        | Rekomendasi  |
|---|---|--|------------------------------|--|
| <b>Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas</b>   |   |  |                              |  |
| <p>4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan SD- SMP tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.</p> <p>4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.</p> <p>4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.</p> <p>4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.</p> <p>4.b Pada tahun 2020, secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi,</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan</li> <li>▪ Aksesibilitas sekolah</li> <li>▪ Kapasitas mutu pendidikan</li> <li>▪ Efisiensi biaya pendidikan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orangtua dan Aparatur Institusi Pendidikan</li> <li>▪ Peningkatan Akses PAUD, Dikdas, Dikmen, Dikmas, dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus</li> <li>▪ Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter</li> <li>▪ Peningkatan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan</li> </ul> | <p>Wajib Pelayanan Dasar</p> | <p><b>Jangka Panjang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penguatan Pelaku Pendidikan pada Semua Jenjang Pendidikan</li> <li>▪ Peningkatan profesionalisme dan distribusi guru dan tenaga kependidikan</li> </ul> <p><b>Jangka Menengah:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat</li> <li>▪ Peningkatan Manajemen Guru, Pendidikan Keguruan, dan Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)</li> </ul> <p><b>Jangka Pendek:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan partisipasi orang tua dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan</li> <li>▪ Peningkatan kualitas sikap guru dan tenaga pendidikan dalam kepribadian, spiritual, dan sosial</li> <li>▪ Peningkatan perilaku positif siswa</li> <li>▪ Pemanfaatan Anggaran Pendidikan Efektif dan Efisien</li> <li>▪ Peningkatan Kualitas Pembelajaran</li> </ul> |

| Tujuan Pembangunan Berkelanjutan   | Isu Strategis   | Alternatif Rekomendasi  | Kategori Jenis Usulan     | Rekomendasi   |
|--|---|---|---------------------------|---|
| termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya.  |   |   |                           |   |
| <b>Tujuan 5. Kesenjangan Gender</b>  |   |   |                           |   |
| <p>5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.</p> <p>5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.</p> | Kurangnya pembinaan, pelatihan dan pemberdayaan perempuan secara merata                 | Menyelenggarakan serangkaian pelatihan kepemimpinan perempuan dan pelatihan gender dan pembangunan untuk memperkuat partisipasi penuh perempuan dalam perencanaan, perumusan dan pengambilan keputusan kebijakan dan program pembangunan  | Wajib Non Pelayanan Dasar | <p><b>Jangka Panjang:</b></p> <p>Mengembangkan standar, termasuk standar pelayanan minimal. Mengintegrasikan perspektif keadilan gender dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang menjamin akses dan manfaat pelayanan publik yang adil bagi perempuan dan laki-laki, kelompok marjinal dan rentan lainnya, seperti penyandang disabilitas dan lanjut usia</p> <p><b>Jangka Menengah:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Facilitasi penyusunan peraturan di tingkat perusahaan yang adil gender dan menghapuskan praktik-praktik diskriminasi terhadap pekerja perempuan (diskriminasi upah, diskriminasi penjenjangan dan karier pekerja, pembiaran terhadap kekerasan terhadap pekerja perempuan yang menjadi korban kekerasan dari pekerja/pemberi kerja)</li> <li>Menyelenggarakan serangkaian upaya peningkatan kapasitas dan pemberdayaan perempuan, termasuk dan tidak terbatas pelatihan tentang gender dan pembangunan, pelatihan bagi politisi perempuan/calon politisi perempuan dan pendidikan pemilih.</li> </ul> |
|  | Belum adanya kesempatan yang ekuivalen untuk perempuan mendapatkan pekerjaan yang layak | Meningkatnya perlindungan pekerja perempuan dan penghapusan ekerja anak<br><br>Sektor swasta diharapkan menciptakan peraturan di tingkat perusahaan yang adil gender dan menghapuskan praktik-praktik diskriminasi terhadap pekerja perempuan (diskriminasi upah, diskriminasi penjenjangan dan karier pekerja, pembiaran terhadap kekerasan terhadap pekerja perempuan yang menjadi korban kekerasan dari pekerja/pemberi kerja) | Wajib Non Pelayanan Dasar |   |
|  | Belum adanya perda untuk kesetaraan gender  | Memastikan semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dan mendapat kesempatan yang sama memimpin pada semua level pengambilan keputusan, baik di bidang politik, ekonomi dan publik.  | Wajib Non Pelayanan Dasar |   |

| Tujuan Pembangunan Berkelanjutan  | Isu Strategis  | Alternatif Rekomendasi  | Kategori Jenis Usulan     | Rekomendasi   |
|---|--|---|---------------------------|---|
|   |  |   |                           | <b>Jangka Pendek:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyelenggarakan program-program perlindungan bagi perempuan terutama terkait dengan kesehatan reproduksi perempuan.</li> <li>Menyelenggarakan serangkaian pelatihan kepemimpinan perempuan dan pelatihan gender dan pembangunan untuk memperkuat partisipasi penuh perempuan dalam perencanaan, perumusan dan pengambilan keputusan kebijakan dan program pembangunan</li> </ul>                              |
| <b>Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi</b>  |  |   |                           |   |
| 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya regulasi pengelolaan wilayah pariwisata</li> <li>Investasi belum optimal</li> </ul> | <p>Core strategy atau strategi utama pengembangan wisata yang terdiri dari costumer strategy dengan menjelaskan brand image strategy yaitu dengan menjelaskan obyek dan produk unggulan dengan tema-tema tertentu yang kompetitif.</p> <p>Dalam pengembangan Core Strategy ada beberapa komponen yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Strategi Pengembangan Perwilayahan Pariwisata;</li> <li>Strategi Pengembangan Transportasi dan Infrastruktur;</li> <li>Strategi Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang Pariwisata</li> </ul> | Wajib Non Pelayanan Dasar | <b>Jangka Panjang:</b><br>Terbangun PU, 2011).<br><b>Jangka Menengah:</b><br>Meningkatkan upaya promosi untuk memperluas segmen pasar, terutama bagi wisatawan.<br><b>Jangka Pendek:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan perencanaan kegiatan wisata secara terpadu</li> <li>Kerja sama untuk mengadakan penelitian mengenai berbagai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan</li> </ul> |
| 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.<br>8.6 Pada tahun 2020, secara substansial | Tingkat pertumbuhan penduduk meningkat   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kemampuan berwirausaha untuk meningkatkan produktivitas;</li> <li>Menyiapkan tenaga kerja agar siap memasuki dunia kerja di luar daerah atau berkompetisi merebut peluang kerja luar negeri;</li> <li>Menjalin kerja sama dengan pihak lain untuk meningkatkan keterampilan dan</li> </ul>  | Wajib Non Pelayanan Dasar | <b>Jangka Panjang:</b><br>Peningkatan iklim kerja yang kondusif melalui hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan<br><b>Jangka Menengah:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kerja sama dengan lembaga pendidikan dan swasta untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja;</li> <li>Peningkatan koordinasi antar pemangku</li> </ul>   |

| Tujuan Pembangunan Berkelanjutan  | Isu Strategis  | Alternatif Rekomendasi   | Kategori Jenis Usulan     | Rekomendasi   |
|---|--|--|---------------------------|---|
| <p>mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.</p> <p>8.B Pada tahun 2020, mengembangkan dan mengoperasionalkan strategi global untuk ketenagakerjaan pemuda dan menerapkan the Global Jobs Pact of the <i>International Labour Organization</i>.</p>   |  | <p>kesempatan kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan keterampilan sesuai standar kompetensi</li> </ul>  |                           | <p>kepentingan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan suasana ketenagakerjaan yang kondusif melalui pembinaan hubungan industrial;</li> </ul> <p><b>Jangka Pendek:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan sarana prasarana pelatihan sesuai perkembangan teknologi</li> <li>Pelatihan keterampilan sesuai keahlian dan kompetensi yang dibutuhkan DU/DI</li> </ul>  |
| <p>8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.</p> <p>8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.</p> | <p>Belum berdayanya koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) dan para pengrajin kerajinan Cirebon</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UKM</li> <li>Peningkatan akses sumber daya produktif</li> <li>Penguatan kelembagaan koperasi</li> <li>Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif</li> </ul> | Wajib Non Pelayanan Dasar | <p><b>Jangka Panjang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UKM</li> <li>Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk Koperasi dan UKM</li> </ul> <p><b>Jangka Menengah:</b></p> <p>Perluasan akses pasar produk KUKM potensial ekspor melalui partisipasi pameran luar negeri, pameran domestik berskala internasional, dan <i>business matching</i></p> <p><b>Jangka Pendek:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitasi promosi dan perluasan akses pasar</li> <li>Revitalisasi pasar tradisional melalui koperasi</li> <li>Penataan sarana pedagang kaki lima (PKL)</li> <li>Promosi melalui pameran dalam negeri</li> </ul> |
|   | <p>Pengawasan kandungan bahan kimia berbahaya pada bahan makanan olahan masih lemah</p>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengendalian produk pangan tercemar bahan tambahan kimia</li> <li>Pengawasan terhadap peredaran bahan berbahaya</li> <li>Pengawasan peredaran produk pangan olahan impor bersama-sama Badan POM</li> </ul>                    | Wajib Non Pelayanan Dasar | <p><b>Jangka Panjang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengaturan ketentuan mengenai sanksi yang lebih jelas dan menimbulkan efek jera sesuai dengan pelanggaran dalam upaya meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi segala kewajiban</li> <li>Pengawasan peredaran produk pangan olahan</li> </ul>  |

| Tujuan Pembangunan Berkelanjutan   | Isu Strategis   | Alternatif Rekomendasi   | Kategori Jenis Usulan     | Rekomendasi   |
|--|---|--|---------------------------|---|
|  |   |  |                           | <p>impor bersama-sama Badan POM</p> <p><b>Jangka Menengah:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengawasan distribusi bahan berbahaya, dengan melibatkan instansi terkait meliputi koordinasi dan mekanisme pengawasan bahan berbahaya yang jelas dan pembentukan Tim Pemeriksa</li> <li>▪ Pengawasan peredaran produk pangan olahan impor bersama-sama Badan POM</li> </ul> <p><b>Jangka Pendek:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sosialisasi tentang bahayanya penggunaan bahan berbahaya untuk pangan kepada para pelaku usaha terutama industri pangan atau pedagang makanan/ minuman dan masyarakat luas dalam bentuk <i>workshop</i>, seminar, <i>website</i>, <i>leaflet</i>, brosur dan lain-lain.</li> <li>▪ Pemetaan kebutuhan bahan berbahaya</li> <li>▪ Pengaturan sistem distribusi bahan berbahaya yang terstruktur, sehingga mudah dalam pengawasan</li> <li>▪ Pengawasan peredaran produk pangan olahan impor bersama-sama Badan POM</li> </ul> |
| 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. | Kesenjangan kesejahteraan antara tenaga kependidikan honorer dengan tenaga kependidikan ASN | Secara bertahap mengurangi kesenjangan kesejahteraan antara tenaga kependidikan honorer dengan tenaga kependidikan ASN | Wajib Non Pelayanan Dasar | <p><b>Jangka Panjang:</b></p> <p>Prioritas tenaga kependidikan honorer dalam perekrutan menjadi ASN</p> <p><b>Jangka Menengah:</b></p> <p>Peningkatan kapasitas tenaga kependidikan honorer sebagai persisipan perekrutan menjadi ASN</p> <p><b>Jangka Pendek:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengikutsertakan tenaga kependidikan honorer menjadi panitia dalam</li> </ul>   |



| Tujuan Pembangunan Berkelanjutan | Isu Strategis | Alternatif Rekomendasi | Kategori Jenis Usulan | Rekomendasi   |
|----------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|---|
|                                  |               |                        |                       | kegiatan-kegiatan tertentu <ul style="list-style-type: none"> <li>Menjadikan guru non-PNS sebagai penanggung jawab siswa dalam kegiatan diluar sekolah</li> </ul> |

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024

### Skenario Tanpa Upaya Tambahan

Aternatif skenario tanpa upaya tambahan adalah bentuk-bentuk skenario pilihan yang dapat dilaksanakan oleh Kabupaten Cirebon untuk dapat mempertahankan atau meningkatkan capaian indikator yang telah mencapai target nasional. Berdasarkan data capaian TPB sebagaimana dikemukakan dalam Bab IV dikemukakan bahwa sebanyak 75 indikator (38,07%) telah mencapai target nasional. Beberapa alternaif skenario Kabupaten Cirebon tanpa upaya tambahan :

Skenario 1. *Mempertahankan program dan kegiatan untuk pelaksanaan seluruh TPB yang sudah mencapai target nasional (Business as Usual)*

Skenario pertama untuk TPB yang telah mencapai target nasional adalah dengan mempertahankan alokasi APBD untuk pelaksanaan TPB. Asumsi yang digunakan untuk skenario ini adalah tersedianya anggaran yang cukup bagi Kabupaten Cirebon untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan indikator TPB, termasuk indikator-indikator yang telah mencapai target nasional. Pertimbangan penerapan skenario ini adalah, belum semua indikator yang telah mencapai target nasional di Kabupaten Cirebon cukup kuat untuk dibiarkan tanpa intervensi lanjutan. Sehingga masih dibutuhkan penganggaran lanjutan. Dikhawatirkan apabila tidak dianggarkan pada APBD capaian yang

selisihnya masih cukup kecil tersebut dengan target masih akan mengalami penurunan pencapaian.

Skenario 2. *Mempertahankan program dan kegiatan untuk indikator TPB yang sudah mencapai target nasional, berdasarkan skala prioritas*

Skenario kedua untuk TPB yang sudah mencapai target nasional adalah dengan tetap melaksanakan program dan kegiatan yang sudah mencapai target nasional. Kegiatan-kegiatan untuk pelaksanaan indikator yang telah mencapai target nasional akan tetap dialokasikan, namun tidak secara keseluruhan. Namun demikian, tidak seluruh indikator yang telah mencapai target nasional akan dialokasikan. Harus ditentukan skala prioritas untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Asumsi ini dipilih dengan catatan karena adanya keterbatasan anggaran oleh Kabupaten Cirebon untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan TPB yang sudah mencapai target nasional. Sehingga hanya beberapa kegiatan yang dianggap prioritas yang masih harus dialokasikan ke dalam program dan kegiatan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon

Selanjutnya, berdasarkan KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, dirumuskan isu strategis pembangunan berkelanjutan sebagai berikut:

1. Kehidupan Sehat dan Sejahtera
2. Tanpa Kemiskinan
3. Kesetaraan Gender
4. Tanpa Kelaparan
5. Pendidikan Berkualitas
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak

Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dokumen perubahan RPJMD karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Cirebon. Penyajian analisis isu-isu strategis diharapkan dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan Kabupaten Cirebon. Penyajian isu-isu strategis RPJMD Kabupaten Cirebon meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

Isu strategis prioritas ditentukan berdasarkan peringkat gap capaian indikator TPB, daya dukung dan daya tampung (DDDT), serta urusan wajib pelayanan dasar. Indikator TPB diperingkatkan berdasarkan besarnya gap capaian Kabupaten Cirebon dengan target RPJMN tahun 2019. Gap yang paling besar mendapatkan peringkat tertinggi. Setelah peringkat gap teridentifikasi, dari 29 indikator tersebut diidentifikasi lagi yang termasuk kedalam indikator DDDT.

Terdapat 6 indikator yang termasuk dalam DDDT. Indikator yang memiliki kaitan dengan DDDT diberi skor 21 poin, sehingga apabila indikator tersebut memiliki nilai gap besar dan termasuk kedalam DDDT akan berada pada peringkat teratas sementara. Dari hasil pemeringkatan besar gap capaian TPB dan DDDT, indikator yang berada pada peringkat pertama maksimal memiliki skor 50 poin.

Tahap terakhir adalah pemeringkatan indikator sementara terhadap kategori jenis urusan wajib pelayanan dasar yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dari total 29 indikator yang telah mendapat peringkat sementara dari nilai gap capaian dan DDDT, terdapat 20 indikator yang termasuk urusan wajib pelayanan dasar. Indikator yang termasuk dalam urusan wajib pelayanan dasar menjadi prioritas dalam pemeringkatan sementara yang telah dilakukan.

Hasil akhir dari pemeringkatan gap capaian, DDDT dan urusan wajib pelayanan dasar ini kemudian diidentifikasi peringkat akhirnya. Dalam hal ini, indikator 6.1.1.(b) mengenai “Kapasitas prasarana air baku untuk

melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau”, menjadi indikator peringkat pertama dari total 29 indikator yang dapat teridentifikasi nilai persentase capaiannya. Indikator 6.1.1.(b) termasuk dalam isu strategis pencapaian akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau di Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan rekomendasi KLHS sebagaimana diuraikan di atas, maka dilakukan integrasi ke dalam Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Hasil analisis dan rekomendasi KLHS terhadap Perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 pada umumnya telah diakomodir dan diintegrasikan ke dokumen Rancangan Akhir Perubahan RPJMD. Adapun beberapa catatan terkait proses pengintegrasi/adaptasi dari hasil analisis dan rekomendasi KLHS ke dokumen Rancangan Akhir Perubahan RPJMD, sebagai berikut:

1. Dasar hukum dan penjelasan pentingnya KLHS ditelaah pada saat penyusunan RPJMD telah dimuat dalam Bab I Rancangan Akhir Perubahan RPJMD;
2. Analisis daya dukung dan daya tampung di dokumen KLHS sebagian besar telah diadaptasi masuk ke Bab II Rancangan Akhir Perubahan RPJMD;
3. Permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah telah diintegrasikan dengan isu terkait TPB;
4. Penjabaran visi dan misi ke dalam tujuan dan sasaran, serta strategi dan arah kebijakan telah memperhatikan prinsip pelaksanaan TPB dan dimuat dalam Bab V dan Bab VI Rancangan Akhir Perubahan RPJMD. Hal ini sejalan dengan hasil analisis KLHS yang diuraikan di atas;
5. Program pembangunan daerah dan program perangkat daerah mulai Tahun 2019 sampai dengan 2023 telah diupayakan merespon seluruh TPB. Sedangkan untuk kegiatan yang mendukungnya terdapat di Perubahan Renstra Perangkat Daerah terkait. Kegiatan tidak dimuat dalam dokumen RPJMD;
6. Indikator Kinerja Utama (IKU);

7. Indikator Kinerja Kunci (IKK) telah mengadaptasi indikator TPB pada Bab VIII Rancangan Akhir Perubahan RPJMD; dan
8. Beberapa indikator KLHS yang direkomendasikan tidak diintegrasikan ke RPJMD sebab akan direspon/diadaptasi ke dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah terkait.

### **4.3. Isu Strategis RPJMD Kabupaten Cirebon**

Berdasarkan hasil analisis gambaran umum, capaian kinerja pembangunan Kabupaten Cirebon dan isu strategis yang ada di RPJPD serta memerhatikan beberapa sumber antara lain, (1) Kondisi empiris yang ada di daerah dan tercermin di dalam permasalahan-permasalahan pembangunan daerah; (2) Dinamika perkembangan isu internasional, nasional, dan regional yang memberikan dampak kepada pembangunan di Kabupaten Cirebon; (3) Kebijakan pembangunan dan isu strategis Kabupaten-kabupaten sekitar; (4) Kebijakan pembangunan Kabupaten Cirebon yang diambil dari dokumen RTRW Kabupaten Cirebon; dan (5) KLHS RPJMD, **maka ditetapkanlah 9 (sembilan) isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Cirebon sebagaimana berikut:**

1. Reformasi birokrasi dan Pelayanan Publik;
2. Pengangguran dan Kemiskinan;
3. Kualitas Sumber Daya Manusia dan nilai-nilai kehidupan masyarakat;
4. Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi;
5. Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan;
6. Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat;
7. Penyediaan dan Kemantapan Infrastruktur Wilayah;
8. Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya; dan
9. Komitmen Penyelenggaraan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.

Dua isu terakhir merupakan isu baru dari perubahan RPJMD ini dimana isu Pandemi Covid-19 menjadi isu utama yang paling memengaruhi kebijakan dan prioritas pembangunan di sisa periode RPJMD.

### **1. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik**

Berbicara tentang reformasi birokrasi, memang bukan sekedar soal kecukupan jumlah saja, melainkan yang terpenting soal kualitas dari birokrasi itu sendiri, serta pelayanan yang diberikan kepada publik. Hingga saat ini, kita masih menemukan masih kurangnya sosialisasi dan kualitas serta jangkauan layanan informasi bagi publik atas hasil pembangunan daerah yang dilaksanakan yang berdampak pada tidak meratanya pembangunan, masih rendahnya profesionalisme aparatur dan masih terdapatnya sarana prasarana pemerintah yang kurang memadai dalam mendukung kinerja birokrasi, kualitas pelayanan publik, pelayanan data perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penataan peraturan perundang-undangan, dan kolaborasi pembangunan dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota.

Reformasi birokrasi mencakup pembenahan struktural, prosedural, kultural dan etika birokrasi. Terdapat tiga elemen utama yang melekat pada reformasi birokrasi yaitu, *pertama* reformasi keuangan daerah yang berfokus pada mekanisme penganggaran yang tepat sasaran dan langsung menyentuh kepentingan masyarakat luas, hal ini menuntun pada penyempurnaan proses kerja pemerintahan dalam hal penetapan tenggat waktu, indikator serta target yang tepat. *Kedua*, reformasi sumber daya aparatur daerah, yakni berkaitan dengan kualitas implementasi dari sebuah program kerja dan memusatkan perhatian kepada kesiapan sumberdaya manusia. *Ketiga*, reformasi pelayanan publik yakni kondisi pelayanan yang baik sebagai hasil dari reformasi keuangan dan sumberdaya aparatur.

Dalam pembenahan struktur dan alokasi sumber daya aparatur perlu dilakukan telaahan dan evaluasi terhadap keberadaan struktur organisasi, beban kerja di masing-masing struktur dan kinerja aparaturnya sehingga dari evaluasi ini diharapkan diperoleh hasil penempatan SDM

(pemetaan) sesuai dengan keahlian dan kompetensi dan beban kerja pada struktur jabatan yang dilaksanakan.

Secara umum, isu terkait reformasi birokrasi dan pelayanan publik ini bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan yang ada dan terkait dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, di antaranya: menciptakan pelayanan publik yang bersih dan bebas dari korupsi; menata kelembagaan dan menempatkan birokrasi sesuai dengan kapasitas dalam rangka mewujudkan profesionalisme; meningkatkan kualitas pelayanan publik; membangun iklim birokrasi yang terintegrasi dengan kebudayaan lokal; menerapkan *e-government* untuk mendukung pelayanan publik yang cepat, transparan dan terintegrasi; meningkatkan sistem pengendalian, evaluasi dan pengawasan pembangunan; dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia birokrasi.

## **2. Pengangguran dan Kemiskinan**

Meski angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon terus mengalami penurunan secara signifikan lima tahun belakangan, bahkan sudah mampu menembus angka 9,94% di Tahun 2019, namun bukan berarti persoalan kemiskinan sudah tidak krusial lagi.

Kemiskinan dan ketenagakerjaan menjadi permasalahan yang serius dan harus segera di atasi di Kabupaten Cirebon, mengingat masih terdapat cukup banyak jumlah penduduk miskin serta pengangguran, dimana persoalannya ada pada terbatasnya akses masyarakat terhadap lapangan kerja dan upah yang layak.

Namun persoalan seriusnya juga terletak pada terbatasnya lapangan pekerjaan di sektor formal, sedangkan di sisi lain, rendahnya kemampuan kewirausahaan dan keterampilan sesuai kebutuhan pasar. Sehingga penyelesaian masalah kemiskinan dan pengangguran ini memang tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan komprehensif dan membutuhkan daya dukung yang besar.

Terkait dengan isu kemiskinan dan pengangguran ini, setidaknya ada beberapa substansi yang akan menjadi fokus perhatian isu ini,

diantaranya: meningkatkan keterampilan dan kemampuan wirausaha berbasis lokal, baik desa maupun komunitas; membangun Balai Latihan Kerja dan balai latihan kerja komunitas; membuka akses modal, sarana prasarana dan pasar bagi pelaku usaha kecil dan menengah; meningkatkan infrastruktur perdesaan; melindungi dan memfasilitasi ekonomi sektor primer (khususnya pertanian); meningkatkan jaminan pendidikan dan kesehatan untuk warga miskin; dan membuat kebijakan yang inklusif guna menjamin terpenuhinya hak-hak kelompok rentan dan marginal.

### **3. Kualitas Sumber Daya Manusia dan nilai-nilai kehidupan masyarakat**

Isu Sumber Daya Manusia (SDM) dan Nilai-nilai Kehidupan Masyarakat merupakan isu yang bersifat lintas sektor/bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, lingkungan, ketakwaan, hingga budaya. Ada banyak tugas berat Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk menyelesaikan tantangan yang ada di bidang ini, mengingat isu ini terkait erat dengan *human ware* yang dalam hal ini adalah manusianya serta *soft ware* yang berarti nilai-nilainya, sehingga prosesnya pun dimulai dari membekali dengan pengetahuan, hingga menata sikap dan perilaku.

Modal dasarnya adalah budaya dan agama yang tumbuh kuat di masyarakat selama ini, sehingga dapat dijadikan pegangan dalam berperilaku di lingkungan sosial, maupun dalam kaitannya dengan ibadah rutin masyarakat. Artinya, pendekatan yang dipilih dalam membangun diskursus pada isu ini harus dengan pendekatan spasial dan sektoral. **Pertama**, pendekatan spasial mengarah pada pemberdayaan komunitas dan berbasis wilayah, dengan menggerakkan seluruh sumber daya yang ada di lokal, baik SDM, modal sosial, keuangan, infrastruktur pendukung serta sumber daya alam yang dimiliki. **Kedua**, pendekatan sektoral mengarah pada model pendekatan berbasis isu sektor, seperti kebudayaan, kesehatan, keagamaan, pendidikan dan lain-lain sesuai dengan konteks yang sedang dihadapi.



Pada isu ini, ada upaya melakukan internalisasi nilai-nilai kebaikan ke dalam masyarakat sehingga tercipta relasi yang harmonis, toleransi dan saling menghormati, kebiasaan menjaga kebersihan lingkungan, menciptakan lingkungan yang kondusif, aman dan tentram, serta menciptakan SDM yang berkualitas.

#### **4. Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi**

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon dapat diukur dari perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Dari perubahan PDRB tersebut, terjadi peningkatan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar 8,19% dari 45.461.939,3 juta rupiah tahun 2018 menjadi 49.186.356,9 juta rupiah pada angka tahun 2019. Selain itu, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) yang juga merupakan barometer pertumbuhan ekonomi secara riil pada Tahun 2018 mencapai 32.160.192,4 juta rupiah atau meningkat sebesar 4,86% dari Tahun 2019 sebesar 33.723.897,2 juta rupiah.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon menurun signifikan dari tahun 2016 sampai 2019 hingga mencapai angka 4,86 persen pada tahun 2019. Angka pertumbuhan ekonomi ini berdampak cukup signifikan bagi gejolak perekonomian Kabupaten Cirebon sehingga perlu melakukan penanganan khusus terhadap fenomena pertumbuhan ekonomi menurun ini. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat dan Indonesia, maka LPE Kabupaten Cirebon pada kurun waktu tahun 2017-2019 selalu berada di bawah LPE Provinsi Jawa Barat dan Indonesia.

#### **5. Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan;**

Kabupaten Cirebon memiliki 412 desa, dimana setiap desa memiliki kekayaan sumber daya yang dapat dimanfaatkan dalam rangka penguatan pembangunan desa. Desa saat ini memiliki kesempatan untuk merencanakan pembangunan berdasarkan potensi dan permasalahan yang ada di desa, berbekal kewenangan yang dimiliki sebagai mandat yang diberikan oleh UU Desa, didukung dengan keuangan yang memadai dalam rangka menyelenggarakan pembangunan di desa.

Akan tetapi, meski sudah memiliki berbagai peluang tersebut, faktanya tidak banyak desa yang mengalami percepatan dalam proses membangun, dan alasannya pun beragam, mulai dari pengetahuan yang terbatas, komitmen politik yang rendah hingga enggan bergeser dari kebiasaan lama dalam proses perencanaan penganggaran desa.

Sebagaimana diketahui, bahwa di Kabupaten Cirebon, desa memiliki kekayaan yang luar biasa untuk dapat menopang kehidupan masyarakat, produk yang dihasilkan pun beragam, mulai dari dukungan sektor pertanian, perkebunan, nelayan hingga di sektor budaya dan pariwisata. Banyak desa yang sudah melaju pesat pembangunannya, namun tidak sedikit juga yang tidak banyak melakukan perubahan.

Oleh karenanya, mendorong desa untuk mengembangkan potensinya penting menjadi prioritas dalam pembangunan daerah, dimana sesuai dengan perannya, Kabupaten memiliki tugas melakukan pembinaan dan pengawasan. Selain itu, ke depan, Pemerintah Kabupaten memiliki komitmen juga untuk melakukan penataan dan pengembangan kawasan perdesaan sehingga terjadi sinergi pembangunan berbasis kawasan.

Pendekatan yang dapat diambil dalam pembangunan desa dan kawasan perdesaan ini melalui Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL). PEL mensyaratkan adanya proses yang demokratis dan inklusif dalam pengelolaan sumber daya lokal termasuk dengan memperkuat kemitraan antar aktor strategis, guna mencapai tujuan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Melalui pendekatan PEL, diharapkan dapat berkontribusi pada penyelesaian persoalan kemiskinan dan pengangguran yang sampai saat ini masih menjadi beban berat Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Selain daripada itu perlu didorong agar pemerintahan desa mau ikut bertanggung jawab dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pembangunan sectoral sehingga beban Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam menyelesaikan masalah-masalah pembangunan dapat dibagi dan didistribusikan ke seluruh desa sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya.

## **6. Keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat**

Rasa aman dan nyaman masyarakat serta ketentraman sangat ditentukan oleh seberapa besar kemampuan negara/pemerintah menegakkan peraturan-peraturan daerah termasuk peraturan kepala daerah sebagai upaya untuk mengatur dan melindungi rakyatnya. Rasa aman yang dapat diciptakan akan menimbulkan rasa tentram dalam lingkungan kemasyarakatan. Saat rasa aman, nyaman dan tentram itu tidak dapat diciptakan maka akan menurunkan indeks rasa aman dan kenyamanan masyarakat yang pada akhirnya akan mempengaruhi indeks kebahagiaan masyarakatnya.

Kabupaten Cirebon masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup besar terkait menciptakan rasa aman dan nyaman warga masyarakat sekabupaten Cirebon. Pelanggaran pemanfaatan trotoar dan sempadan jalan sebagai area berdagang oleh pedagang kaki lima serasa masalah yang telah mengakar dan berakar seolah tanpa solusi.

Kabupaten Cirebon memiliki citra positif sebagai kota wali, akan tetapi kawasan atau daerah rawan penyakit masyarakat berkembang sangat pesat terutama di sepanjang daerah pantura Jawa. Kenyataan ini cukup memberikan keresahan terhadap masyarakat yang bermukim di Kabupaten Cirebon, karena gangguan lingkungan terkait prostitusi, minuman keras dan narkoba masih kerap terjadi di Kabupaten Cirebon.

Maka dari itu untuk mengembalikan citra positif sebagai daerah kota Wali perlu diperkuat dengan penegakan Perda dan perkara, mengoptimalkan cakupan pengawasan terhadap daerah rawan penyakit masyarakat terutama daerah prostitusi, minuman keras dan narkoba.

Perlindungan masyarakat melalui penggalakan siskamling dan swadaya masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan merupakan upaya nyata dalam peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan.

Dari ilustrasi faktor-faktor yang mempengaruhi indeks rasa aman dan nyaman daerah di atas, memberikan gambaran dan tantangan kepada

Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam membangun rasa aman, nyaman dan tentram masyarakat. Karena secara hakikat aturan main (hukum) yang dibuat oleh manusia secara prinsip adalah untuk mengatur, memberikan kepastian dan melindungi segenap bangsa Indonesia dari kepastian penegakan hukum sendiri.

## **7. Penyediaan dan Kemantapan Infrastruktur Wilayah**

Salah satu indikator mengukur kemajuan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah ketersediaan infrastruktur yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan aktifitas ekonomi. Secara kewilayahan, infrastruktur wilayah memiliki peran strategis dalam peningkatan struktur perwilayahan, mendukung distribusi barang, jasa dan mobilitas orang. Untuk mendukung peran tersebut, infrastruktur memerlukan pengembangan sistem jaringan prasarana jalan dan jembatan yang diarahkan pada lima Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Cirebon yaitu PKL Sumber, PKL Ciledug, PKL Lemahabang, PKL Palimanan dan PKL Arjawinangun.

Infrastruktur wilayah meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air, irigasi, listrik, telepon dan sarana lain seperti sarana pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Kebutuhan infrastruktur wilayah tersebut terkait dengan fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, dimana dengan kondisi infrastruktur wilayah yang baik dan mantap maka dapat menjadi faktor penarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Cirebon.

Dalam pemenuhan kebutuhan penyediaan dan kemantapan infrastruktur wilayah ini, Pemerintah Kabupaten akan bersinergi dengan Desa yang memiliki kewenangan dan keuangan yang salah satu tugasnya juga melaksanakan pembangunan. Infrastruktur yang memang menjadi wilayah kewenangan desa, akan dipenuhi oleh desa sesuai dengan prosedur perencanaan dan penganggaran desa. Sedangkan yang berada di wilayah kewenangan kabupaten, maka akan dibangun oleh Pemerintah Kabupaten.

- a. Kemantapan jembatan dan jalan meliputi jalan kabupaten dan poros desa terutama jalan-jalan penghubung ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar meliputi perumahan, sanitasi, dan listrik;
- c. Keterpaduan pembangunan bidang keciptakaryaan meliputi sanitasi, penataan kawasan kumuh, penataan dan pengembangan bangunan dan lingkungan permukiman;
- d. Mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal dan/atau di perbatasan;
- e. Penataan fasilitas sosial dan fasilitas umum meliputi jalan pemukiman, taman, tempat ibadah, dan ruang terbuka hijau;
- f. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni dan terjangkau;
- g. Sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi meliputi saluran pembuangan air limbah domestic, sampah dan pengolahannya terutama sarana TPS dan TPA sekaligus pengembangan manajemen pengelolaan sampah berbasis masyarakat, dan jamban;
- h. Pemeliharaan irigasi teknis dan setengah teknis dengan manajemen sumber daya air berbasis data hidrologis dan timbangan keragaan pengairan;
- i. Prasarana telekomunikasi dan informasi

Selebihnya, yang terpenting dalam penyediaan dan pembangunan infrastruktur ini adalah aspek pemerataan. Daerah pinggiran yang selama ini seringkali termarginalkan, ke depan justru harus menjadi prioritas, sehingga desa-desa pinggiran dapat melakukan percepatan pembangunan.

## **8. Penangan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya**

Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, kasus positif di Indonesia maupun Provinsi Jawa Barat, termasuk Kabupaten Cirebon, memperlihatkan peningkatan dan persebaran yang semakin meluas. Hal

ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor, termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah tahun 2020, sehingga dibutuhkan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran. Kebijakan ini diperuntukkan bagi penanganan kesehatan dan penanganan dampak ekonomi melalui penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) yang sangat berpengaruh terhadap target capaian kinerja pemerintah daerah.

Seperti juga dilakukan oleh daerah-daerah lain, pergeseran anggaran telah dilakukan beberapa kali untuk memenuhi kebutuhan penanganan COVID-19. Oleh sebab itu, dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2021, rehabilitasi dan rekonstruksi dampak COVID-19 merupakan tambahan prioritas pembangunan Kabupaten Cirebon.

Memerhatikan perkembangan kondisi nasional dan Provinsi Jawa Barat akibat pandemi COVID-19 yang berdampak buruk terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan telah merambat ke aspek kehidupan lainnya, maka perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja makro, tujuan dan sasaran Indikator Kinerja Utama pemerintah daerah (IKU pemda), serta IKU dan hasil (outcome) perangkat daerah. Selain itu, perlu ditetapkan/diambil juga kebijakan-kebijakan pembangunan jangka menengah terkait penanganan pandemi COVID-19 dan upaya untuk pemulihannya, sebagai kelanjutan dari upaya yang telah dilakukan sejak triwulan pertama Tahun 2020 ini.

## **9. Komitmen Penyelenggaraan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan**

Beberapa persoalan lingkungan yang berasal dari kegiatan pembangunan di Kabupaten Cirebon seperti alih fungsi lahan dan hutan, kelangkaan air baku, penggunaan pupuk yang berlebihan, tidak adanya tindakan reklamasi bekas tambang, pembuangan limbah industri/RT langsung ke laut, limbah industri batu alam, batik, dan sejenisnya masih belum mendapatkan solusi dan penanganan yang tepat. Dengan kata lain, resiko tercemarnya lingkungan hidup selalu bertambah dari hari ke hari.

Ancaman pencemaran lingkungan ini harus diselesaikan secepatnya agar tidak berimbas pada dampak lain seperti banjir, longsor, kehilangan ekosistem, dan musibah kebakaran lahan. Beberapa wilayah di Kabupaten Cirebon Bagian Timur (banjir) dan daerah perbukitan Bagian Selatan perlu mendapat perhatian serius. Pengelolaan lingkungan hidup yang tidak optimal juga berdampak pada degradasi habitat bagi aneka ragam hayati, terutama yang hidup di sungai dan laut di wilayah Kabupaten Cirebon. Meskipun usaha-usaha konservatif telah dilaksanakan termasuk di antaranya kampanye penanganan sampah, akan tetapi usaha-usaha yang lebih solutif mesti dipikirkan sebagai usaha untuk membangun kolaborasi atas isu lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Selain itu, penjagaan lingkungan yang bersifat kolaboratif-konstruktif dari elemen masyarakat juga harus dicanangkan. Terutama, untuk menjembatani kebutuhan antar sektor, seperti para pengolah batu alam dan para petani yang saling berbagi kebutuhan sumber air. Semangat penjagaan terhadap lingkungan ini, juga perlu dilakukan agar potensi konflik atas dasar kesejahteraan, terutama di tengah masa Pandemi ini bisa dihindari. Implementasi perencanaan yang baik dalam mengatasi isu ini juga akan menunjukkan dukungan nyata pemerintah Kabupaten terhadap keinginan dan kebutuhan masyarakat dari semua golongan terhadap lingkungan hidup.

Isu strategis yang diuraikan di atas, diterjemahkan ke dalam 10 +1 prioritas pembangunan daerah Kabupaten Cirebon akan dijelaskan melalui tabel di bawah ini,

**Tabel 4.5**  
**Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Isu Strategis**  
**Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024**

| NO | ISU STRATEGIS                             | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH  |
|----|---|---|
| 1  | Reformasi birokrasi dan Pelayanan Publik; | <b>PD 8.</b> Reformasi birokrasi melalui optimalisasi pelayanan publik yang prima |

| NO | ISU STRATEGIS   | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH  |
|----|---|---|
| 2  | Pengangguran dan Kemiskinan;  | <b>PD 5.</b> Penanganan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat miskin dan perlindungan jaminan sosial   |
|    |   | <b>PD 6.</b> Perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan daya saing tenaga kerja dan penguatan jiwa kewirausahaan                                  |
| 3  | Kualitas Sumber Daya Manusia dan nilai-nilai kehidupan masyarakat;            | <b>PD 1.</b> Peningkatan akses, kualitas pendidikan, dan partisipasi masyarakat untuk keberlanjutan pendidikan dasar                                  |
| 4  | Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi;   | <b>PD 4.</b> Pengembangan ekonomi kerakyatan sektor pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata yang berbasis inovasi                            |
| 5  | Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan;                                       | <b>PD 3.</b> Penyediaan infrastruktur wilayah untuk peningkatan layanan dasar, kelancaran kegiatan ekonomi, daerah perbatasan dan rawan bencana       |
|    |   | <b>PD 4.</b> Pengembangan ekonomi kerakyatan sektor pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata yang berbasis inovasi                            |
| 6  | Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat;                              | <b>PD 9.</b> Peningkatan kondusivitas kehidupan bermasyarakat dalam interaksi sosial dan kehidupan beragama   |
| 7  | Penyediaan dan Kemantapan Infrastruktur Wilayah;                              | <b>PD 3.</b> Penyediaan infrastruktur wilayah untuk peningkatan layanan dasar, kelancaran kegiatan ekonomi, daerah perbatasan dan rawan bencana       |
| 8  | Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya; dan                                | <b>PD 2.</b> Perluasan jaminan kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan baik bersifat preventif maupun kuratif berbasis masyarakat      |
| 9  | Komitmen Penyelenggaraan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan. | <b>PD 7.</b> Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang guna mendukung sinergitas wilayah dan keberlanjutan pembangunan |

Sumber: Diolah oleh Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, 2021

**Tabel 4.6.**  
**Keterkaitan Isu Strategis dengan Arah Kebijakan Pembangunan**  
**Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024**



| <b>NO</b> | <b>ISU STRATEGIS</b>                      | <b>ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>   |
|-----------|---|--|
| 1         | Reformasi birokrasi dan Pelayanan Publik; | Penguatan dan pembaharuan kebijakan pelayanan publik   |
|           |   | Peningkatan pelayanan publik yang integratif   |
|           |   | Peningkatan layanan pendaftaran, perekaman, dan penerbitan E-KTP   |
|           |   | Peningkatan kualitas sumber daya layanan administrasi secara terpadu   |
|           |   | Penguatan kebijakan penerapan SAKIP  |
|           |   | Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang terintegrasi (e-performance based budgeting)   |
|           |   | Perluasan pembangunan zona integritas pada sektor-sektor strategis   |
|           |   | Peningkatan kinerja, peran, kapasitas, dan kapabilitas APIP/P2UPD  |
|           |   | Peningkatan dukungan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis elektronik  |
|           |   | Peningkatan kualitas jaringan dan pengelolaan data yang handal dan aman  |
| 2         | Pengangguran dan Kemiskinan;              | Peningkatan kualitas ketersediaan jaminan sosial dalam berbagai bidang   |
|           |   | Peningkatan penerahan sumber daya yang dapat mengembangkan potensi ekonomi rakyat  |
|           |   | Pembukaan lapangan kerja yang disertai pendidikan dan pelatihan  |
|           |   | Peningkatan kualitas sumber daya layanan untuk PSKS  |
|           |   | Peningkatan dan perluasan akses pelayanan dasar bagi kelompok rentan   |
|           |   | Peningkatan kapasitas sumber daya layanan dan pengelola Balai Latihan Kerja  |
|           |   | Peningkatan kompetensi SDM yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja   |
|           |   | Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja yang terkena dampak pandemi Covid-19   |
|           |   | Peningkatan program pemulihan ekonomi untuk dunia usaha dan UMKM baik melalui bantuan permodalan, insentif pelaku usaha hingga bantuan sosial bagi pengusaha kecil terdampak |

| NO | ISU STRATEGIS  | ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH   |
|----|--|---|
| 3  | Kualitas Sumber Daya Manusia dan nilai-nilai kehidupan masyarakat; | Peningkatan efektivitas kerjasama dalam perlindungan, pengembangan dan pembinaan kebudayaan asli Cirebon                                    |
|    |  | Percepatan pembentukan rintisan desa/kampung budaya dan dukungan akses infrastruktur dan sarana pendukung lainnya                           |
|    |  | Perluasan jaminan akses dan infrastruktur pendidikan hingga ke pelosok  |
|    |  | Peningkatan ketersediaan dan kualitas SDM bidang pendidikan, termasuk kemampuan mengajar secara online                                      |
|    |  | Peningkatan kualitas penyelenggaraan dan manajemen pendidikan berbasis online   |
| 4  | Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi;                                | Integrasi proses hulu-hilir industri pengolahan khususnya sektor pertanian  |
|    |  | Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian secara berkelanjutan   |
|    |  | Peningkatan fasilitas cakupan layanan penyediaan sarana dan prasarana pertanian berbasis kemandirian  |
|    |  | Peningkatan Cakupan Binaan Kelompok kelautan dan perikanan dalam rangka diversifikasi produk-produk perikanan menuju agroindustri perikanan |
|    |  | Peningkatan daya dukung lingkungan dalam upaya Peningkatan Produksi Perikanan   |
|    |  | Peningkatan ilmu dan teknologi perikanan  |
|    |  | Peningkatan skala ekonomi dan kemitraan strategis dengan sektor swasta untuk pengembangan ekonomi lokal menuju peningkatan ekspor           |
|    |  | Meningkatkan kemitraan strategis dengan sektor swasta (public private partnership) untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal               |
|    |  | Percepatan pembentukan rintisan desa/kampung budaya dan dukungan akses infrastruktur dan sarana pendukung lainnya                           |
|    |  | Peningkatan sinergitas pembangunan kepariwisataan khususnya koordinasi, kerjasama dan promosi (paket dan event)                             |

| NO | ISU STRATEGIS                                    | ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH   |
|----|--|---|
|    |  | wisata berbasis budaya (unggulan) asli Cirebon  |
|    |  | Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan masyarakat                                 |
|    |  | Peningkatan distribusi dan stabilitas harga pangan yang terjangkau  |
|    |  | Peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui Pola Pangan Harapan (PPH)                             |
| 5  | Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan;          | Pembinaan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah        |
|    |  | Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pelaku kawasan perdesaan dan peningkatan infrastruktur kawasan perdesaan    |
|    |  | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa  |
| 6  | Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat; | Peningkatan koordinasi dan penanganan gangguan ketentraman  |
|    |  | Peningkatan kapasitas SDM dan jabatan fungsional Satuan Polisi Pamong Praja                                       |
|    |  | Peningkatan kualitas pelayanan, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana                                     |
|    |  | Peningkatan kapasitas pengelolaan resiko dan penataan penanggulangan bencana                                      |
| 7  | Penyediaan dan Kemantapan Infrastruktur Wilayah; | Peningkatan pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah  |
|    |  | Peningkatan kualitas proyek infrastruktur serta perencanaan dan pemrograman jalan dan jembatan yang tepat sasaran |
|    |  | Peningkatan kualitas layanan pengembangan air bersih, limbah domestik dan perumahan layak huni                    |
|    |  | Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)  |
|    |  | Pengembangan dan pengelolaan sistem pengairan dan irifasi yang berkualitas  |
| 8  | Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya; dan   | Pelayanan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat tidak mampu (Berintegrasikan dengan Kartu PEPEK)                      |

| NO | ISU STRATEGIS   | ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH  |
|----|---|--|
|    |   | Peningkatan kesadaran Masyarakat akan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); peningkatan fungsi UKBM (Posyandu, Posbindu) |
|    |   | Peningkatan cakupan SPM bidang kesehatan melalui berbagi sumber biaya  |
|    |   | Peningkatan kualitas dan kelas layanan puskesmas/RSUD  |
| 9  | Komitmen Penyelenggaraan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan. | Peningkatan kualitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan  |
|    |   | Peningkatan produksi, pemulihan dan pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan   |

## **BAB V**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terutama klausul yang berkenaan dengan RPJPD dan RPJMD, semua Provinsi serta kabupaten/kota wajib menyusun RPJPD untuk periode waktu 2005-2025. RPJPD harus disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional sesuai karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya, RPJPD dijabarkan lebih lanjut dalam RPJMD yang merupakan penjabaran visi dan misi dari kepala daerah terpilih.

RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, selain merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati, untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mengacu pada visi dan misi yang ada dalam RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025. Adapun visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Cirebon adalah:

**“Terbangunnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang beriman dan produktif menuju masyarakat Kabupaten Cirebon yang sejahtera”**

Pernyataan Visi Pembangunan Kabupaten Cirebon, diatas memiliki makna:

1. Beriman adalah kondisi kehidupan masyarakat yang mengamalkan ajaran agamanya dalam perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Produktif adalah kondisi masyarakat Kabupaten Cirebon yang mandiri, berdaya guna dan berdaya saing tinggi;
3. Sejahtera adalah kondisi terpenuhi kebutuhan dalam berbagai aspek kehidupan yang memberikan perasaan adil, aman dan makmur.

Indikasi terwujudnya pencapaian Visi Pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025, ditandai dengan:

1. Sumber Daya Manusia yang beriman ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah orang yang beribadah dan jumlah tempat peribadatan, menguatnya kerukunan umat beragama dan antar umat beragama dan menurunnya penyakit masyarakat di Kabupaten Cirebon;
2. Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon yang produktif ditunjukkan dengan berkurangnya pengangguran dan meningkatnya kualitas SDM;
3. Masyarakat Kabupaten Cirebon yang sejahtera ditunjukkan dengan meningkatnya harmonisasi hubungan manusia dengan Allah manusia dan lingkungannya.

Upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang akan dicapai melalui empat misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 sebagai berikut:

1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas adalah mengembangkan potensi SDM yang telah dimiliki melalui pendidikan dan pelatihan yang ditujukan untuk menciptakan SDM yang beriman, mandiri, berdaya guna dan berdaya saing tinggi;
2. Terwujudnya Lingkungan Hidup yang lestari adalah mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan, serta menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang yang serasi antara kawasan lindung dan budi daya dan antara kawasan perkotaan dan perdesaan;
3. Terwujudnya perekonomian yang kuat adalah mengembangkan potensi usaha melalui pembinaan, pendidikan, pelatihan dan pemberian bantuan bagi usaha mikro, kecil dan menengah;
4. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel adalah meningkatkan kinerja aparatur pemerintah untuk memenuhi fungsi pelayanan bagi masyarakat Kabupaten Cirebon yang efektif.

## 5.1. Visi

Kurun waktu tahun 2019-2024 merupakan pembangunan tahap keempat dalam RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025. Maka pada tahap ini upaya untuk mencapai keunggulan masyarakat Kabupaten Cirebon dalam segala bidang terus ditingkatkan. Dalam tahap ini akan dilaksanakan upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing antara lain ditandai oleh semakin tingginya solidaritas dan kepedulian sosial masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat, semakin tingginya pendapatan dan kemandirian masyarakat, mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta makin membaiknya kinerja pengelolaan SDM yang handal.

Oleh karena, itu visi dan misi RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 pun mengacu pada hal tersebut. Adapun visi Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagai cerminan visi dari Bupati dan Wakil Bupati Cirebon terpilih periode 2019-2024 adalah:

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON YANG BERBUDAYA,  
SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN”**

Dalam Visi Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 tersebut, ada 5 (lima) kata kunci, yakni Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman, yang diuraikan sebagai berikut:

**Pertama, Berbudaya.** Mengandung pengertian mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. Berbudaya kerap juga diartikan sebagai beradab. Berbudaya dalam konteks ini lebih pada penghargaan atas nilai-nilai yang mengandung keluhuran dan kebaikan yang menjadi tradisi lokal, baik dalam bentuk pengetahuan, sikap, tutur hingga simbol-simbol atas nilai tersebut.

**Kedua, Sejahtera.** Dimaksudkan sebagai suatu kondisi dimana masyarakat merasa aman karena terpenuhinya kebutuhan dasar, baik aman secara ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial.



**Ketiga, Agamis.** Dimaksudkan bahwa agama menjadi landasan nilai dasar masyarakat dalam berperilaku, baik secara individual maupun sosial. Nilai agama yang mengajarkan kebaikan diharapkan mampu menjadi ruh dalam sikap individu, sehingga tercipta suasana yang aman, harmonis dan produktif.

**Keempat, Maju.** Mempunyai makna menjadikan Kabupaten Cirebon sebagai daerah yang maju dan meningkat dari kondisi masa lalu. Maju juga berarti pembangunan daerah harus dapat menciptakan peningkatan daya saing yang tinggi baik di tataran regional maupun nasional bahkan internasional, didukung dengan sikap disiplin dan etos kerja serta daya kreasi dan inovasi yang tinggi dari masyarakat dan aparatur pemerintahan sehingga akan berdampak pada tingkat kemakmuran dan pemerataan ekonomi bagi masyarakatnya. Hal ini dicirikan dengan pertumbuhan ekonomi dari beberapa sektor unggulan yang tinggi, kuantitas infrastruktur daerah guna mendorong peningkatan perekonomian dan akses pelayanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Cirebon agar selaras dengan persaingan pasar produksi yang semakin kompetitif dan siap berperan dalam menghadapi perubahan sistem global. Maju juga dimaksudkan sebagai kondisi tercapainya pelayanan publik yang baik dengan dukungan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan yang menyangkut hajat orang banyak.

**Kelima, Aman.** Dimaksudkan sebagai kondisi di mana tata kehidupan masyarakat yang tertib dan tenteram, sehingga diharapkan masyarakat dapat melaksanakan kehidupan dengan tenang dan damai, yang menjamin terselenggaranya pembangunan.



## 5.2. Misi

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan maka visi tersebut dijabarkan dalam beberapa misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya perwujudan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi, sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat;
2. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi;
3. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika;
4. Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah; dan
5. Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional.

Selanjutnya, untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka menengah dan jangka panjang digunakan indikator makro pembangunan yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Indeks Gini. Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (Impact) dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional dan nasional sehingga diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta pelaku pembangunan lainnya.

Pada proses penentuan proyeksi laju pertumbuhan ekonomi Cirebon dalam perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 melibatkan stakeholder terkait antara lain para pakar ekonomi dari akademisi, pelaku usaha yang tergabung dalam KADIN Kabupaten Cirebon dan asosiasi pelaku usaha lainnya dengan mempertimbangkan teori ekonomi dan data historis capaian ekonomi Kabupaten Cirebon berdasarkan data BPS. Dalam proyeksi laju pertumbuhan ekonomi 5 (lima) tahun kedepan mempertimbangkan kondisi perekonomian global dan nasional serta beberapa asumsi yang bersifat mendorong pertumbuhan ekonomi. Adapun Indikator makro Kabupaten Cirebon akan dijabarkan dalam tabel berikut ini,

**Tabel 5.1.**

**Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024**

| No. | Indikator                  | Satuan      | Kondisi Awal | Realisasi | Proyeksi |       |       |       | Kondisi Akhir |
|-----|----------------------------|-------------|--------------|-----------|----------|-------|-------|-------|---------------|
|     |                            |             | 2019         | 2020      | 2021     | 2022  | 2023  | 2024  |               |
| 1.  | Indeks Pembangunan Manusia | Poin        | 68,69        | 68,75     | 69,33    | 69,92 | 70,53 | 71,15 | 71,15         |
| 2.  | Angka Kemiskinan           | Persen      | 9,94         | 11,24     | 11,14    | 11,04 | 10,94 | 10,84 | 10,84         |
| 3.  | Angka Pengangguran         | Persen      | 10,28        | 11,52     | 11,12    | 10,70 | 10,30 | 9,90  | 9,90          |
| 4.  | Pertumbuhan Ekonomi        | Persen      | 4,68         | -1,08     | 4,38     | 4,61  | 4,84  | 5,08  | 5,08          |
| 5.  | Pendapatan Perkapita       | Juta Rupiah | 22,41        | 22,43     | 23,25    | 24,95 | 26,78 | 28,74 | 28,74         |
| 6.  | Ketimpangan Pendapatan     | Poin        | 0,344        | 0,338     | 0,336    | 0,334 | 0,332 | 0,330 | 0,330         |

Sumber: Diolah oleh Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, 2020

### 5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dimaksudkan sebagai suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sedangkan sasaran dimaksudkan sebagai rumusan kondisi yang akan



dicapai dimasa depan yang dirumuskan secara jelas, menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah dan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* dan *impact* program-program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Cirebon, selain memperhatikan Visi dan Misi Kepala daerah terpilih juga didukung dan berkolerasi dengan isu-isu strategis di Kabupaten Cirebon. Kelima misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Cirebon dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) tujuan dan 16 (Enam Belas) sasaran. Setiap tujuan dan sasaran dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang menggambarkan secara langsung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan dengan tingkatan kinerja paling tinggi yaitu dampak/*impact*.

**Misi Pertama**, mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat.

Tujuan 1: Meningkatkan ketahanan budaya masyarakat Cirebon

Sasaran:

1. Meningkatnya jatidiri dan nilai-nilai luhur masyarakat Cirebon.

**Misi Kedua**, meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.

Tujuan 2: Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas

Sasaran:

1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat;
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Tujuan 3: Mewujudkan Kesejahteraan Sosial

Sasaran:



1. Menurunnya jumlah kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial;
2. Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja.

**Misi Ketiga,** meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika.

Tujuan 4: Meningkatkan keshalehan sosial dalam kehidupan beragama

Sasaran:

1. Meningkatnya penyelesaian pergesekan (friksi) antar dan internal umat beragama.

**Misi Keempat,** meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.

Tujuan 5: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sasaran:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan;
2. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat;
3. Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah;
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Tujuan 6: Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan smart serta penguatan otonomi Desa

Sasaran:

1. Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik;
2. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih;
3. Meningkatnya maturitas pemerintahan berbasis elektronik;
4. Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.

**Misi Kelima,** memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional.

Tujuan 7: Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat




Sasaran:
















1. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban;
2. Menurunnya resiko bencana.

7 (tujuh) tujuan pembangunan Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 ini selaras dengan 16 (enam belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan global atau yang dikenal dengan sebutan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Hal ini mengindikasikan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan daerah, telah diintegrasikan dengan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui perumusan dokumen perencanaan untuk mengentaskan persoalan sosial, ekonomi dan lingkungan. Selain hal tersebut, pembangunan Kabupaten Cirebon juga menunjukkan eksistensi dalam upaya mewujudkan keadilan prosedural dan keadilan substansial. Dalam melihat kesinambungan antara tujuan RPJMD Kabupaten Cirebon dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dapat dilihat lebih jelas pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.2.**

**Integrasi Tujuan RPJMD dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024**

| No. | Tujuan  | TUJUAN SGD's   |
|-----|---|--|
| 1.  | Meningkatkan ketahanan budaya masyarakat Cirebon        |    |
| 2.  | Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas         |  |
| 4.  | Meningkatkan keshalehan sosial dalam kehidupan beragama |  |

| No. | Tujuan  | TUJUAN SGDs  |
|-----|---|--|
| 3.  | Mewujudkan Kesejahteraan Sosial   |   |
| 5.  | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan |             |
| 6.  | Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan smart serta penguatan otonomi Desa                |   |
| 7.  | Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat  |   |

Sumber: Hasil analisis Bappelitbangda, 2020

Selanjutnya, dalam rangka penyelarasan tujuan dan sasaran Kabupaten Cirebon dengan Provinsi Jawa Barat, maka disajikan data Proyeksi Indikator Makro Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, sebagai berikut:



**Tabel 5.3.**

**Proyeksi Indikator Makro Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

| NO. | Indikator                             | Satuan      | Kondisi Awal |       | 2019        |           | Target RPJMD |             |             |             | 2020                   |           | Target Perubahan RPJMD |       |       | Kondisi Akhir |
|-----|---------------------------------------|-------------|--------------|-------|-------------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-----------|------------------------|-------|-------|---------------|
|     |                                       |             | 2017         | 2018  | Target      | Realisasi | 2020         | 2021        | 2022        | 2023        | Target Perubahan RPJMD | Realisasi | 2021                   | 2022  | 2023  |               |
| 1.  | Indeks Pembangunan Manusia (Poin)     | Poin        | 70,70        | 71,30 | 71,42-71,91 | 72,03     | 71,91-72,52  | 72,52-73,13 | 73,13-73,74 | 73,74-74,35 | 71,82                  | 72,09     | 72,19                  | 72,57 | 73,05 | 73,05         |
| 2.  | Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen)    | Persen      | 1,39         | 1,36  | 1,50        | 1,30      | 1,48         | 1,45        | 1,43        | 1,41        | 1,26                   | 1,26      | 1,21                   | 1,16  | 1,12  | 1,12          |
| 3.  | Persentase Penduduk Miskin (Persen)   | Persen      | 7,83         | 7,25  | 6,66-6,90   | 6,82      | 6,07-6,31    | 5,48-5,72   | 4,89-5,13   | 4,30-4,54   | 8,48                   | 8,43      | 7,77                   | 7,67  | 7,54  | 7,54          |
| 4.  | Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) | Persen      | 8,22         | 8,17  | 8,00-7,90   | 7,99      | 7,90-7,70    | 7,70-7,50   | 7,50-7,30   | 7,30-7,10   | 10,58                  | 10,46     | 10,45                  | 10,16 | 9,69  | 9,69          |
| 5.  | Laju Pertumbuhan Ekonomi (Persen)     | Persen      | 5,33         | 5,66  | 5,40-5,80   | 5,07      | 5,50-5,90    | 5,60-6,00   | 5,70-6,10   | 5,80-6,20   | (-2,63)                | -2,44     | 3,15                   | 3,92  | 4,35  | 4,35          |
| 6.  | Indeks Gini (Poin)                    | Poin        | 0,393        | 0,405 | 0,38-0,39   | 0,398     | 0,37-0,38    | 0,37-0,38   | 0,36-0,37   | 0,36-0,37   | 0,404                  | 0,403     | 0,402                  | 0,400 | 0,396 | 0,396         |
| 7.  | Pendapatan Per Kapita                 | Juta Rupiah | 37,20        | 40,30 | -           | 43,35     | -            | -           | -           | -           | 41,50                  | 41,80     | 44,02                  | 46,48 | 49,29 | 49,29         |

Sumber: Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Untuk menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di tingkat pusat dan daerah, serta menjamin terwujudnya RPJMD yang harmonis dan tersinkronisasi dengan RPJMN 2020-2024 maka dibutuhkan penyelarasan target indikator antara Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional sebagaimana pada tabel di bawah ini,



**Tabel 5.4.**

**Penyelarasan Target Indikator Makro Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional**

Sumber: Diolah oleh Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, 2021

| No | Indikator Pembangunan | RPJMN Tahun 2020-2024<br>(Penetapan Target Untuk Jawa Barat) |             |             |             |             | No | Indikator Pembangunan | RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2023<br>(Penetapan Target Untuk Kabupaten Cirebon) |       |       |       |      | No | Indikator Pembangunan | RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 |       |       |       |       |
|----|-----------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----|-----------------------|--|-------|-------|-------|------|----|-----------------------|---|-------|-------|-------|-------|
|    |                       | Target   |             |             |             |             |    |                       | Target   |       |       |       |      |    |                       | Target                                  |       |       |       |       |
|    |                       | 2020   | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |    |                       | 2020   | 2021  | 2022  | 2023  | 2024 |    |                       | 2020                                    | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1. | IPM                   | 72,5   | 73,3        | 74          | 74,8        | 74,60-84,23 | 1. | IPM                   | 68,77  | 69,62 | 70,58 | 71,64 |      | 1. | IPM                   | 68,75                                   | 69,33 | 69,92 | 70,53 | 71,15 |
| 2. | Angka Kemiskinan      | 6,31   | 6,07        | 5,70        | 5,24        | 4,75        | 2. | Angka Kemiskinan      | 11,57  | 10,71 | 9,85  | 9,1   |      | 2. | Angka Kemiskinan      | 11,2                                    | 11,1  | 11    | 10,9  | 10,8  |
| 3. | TPT                   | 7,70   | 7,50        | 7,40        | 7,00        | 6,70        | 3. | TPT                   | 11,79  | 10,09 | 8,35  | 6,47  |      | 3. | TPT                   | 11,52                                   | 11,12 | 10,7  | 10,3  | 9,9   |
| 4. | LPE                   | -2,07  | 5,50        | 5,70        | 5,90        | 6,00        | 4. | LPE                   | -2,10  | 4,38  | 4,61  | 4,84  |      | 4. | LPE                   | -1,08                                   | 4,38  | 4,61  | 4,84  | 5,08  |
| 5. | Pendapatan Perkapita  | 56,90  | 58,61-59,75 | 60,37-62,74 | 62,18-65,88 | 64,05-69,17 | 5. | Pendapatan Perkapita  | 41,80  | 44,02 | 46,48 | 49,29 |      | 5. | Pendapatan Perkapita  | 22,43                                   | 23,25 | 24,95 | 26,78 | 28,74 |
| 6. | Rasio Gini            | 0,38   | 0,38        | 0,37        | 0,37        | 0,36        | 6. | Rasio Gini            | 0,40   | 0,39  | 0,39  | 0,38  |      | 6. | Rasio Gini            | 0,34                                    | 0,34  | 0,33  | 0,33  | 0,33  |

Dalam upaya merepresentasikan implementasi dan sinkronisasi rumusan pembangunan pada RPJPD Kabupaten Cirebon tahun 2005-2025, maka perlu dilihat keterkaitan dan keselarasan antara rumusan kebijakan RPJPD dan Perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon dengan penjabaran di dalam tabel sebagai berikut,





**Tabel 5.5.**

**Keterkaitan Kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025 dan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024  
Kabupaten Cirebon**

| RPJPD Kabupaten Cirebon  |   |   | RPJMD Murni  |  |   |   | Perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon  |      |  |   |
|--|---|---|--|--|---|---|--|------|--|---|
| Visi   | Misi  | Sasaran   | Visi   | Misi   | Tujuan  | Sasaran   | Visi   | Misi | Tujuan   | Sasaran   |
| Terbangunnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang beriman dan produktif menuju masyarakat Kabupaten Cirebon yang sejahtera |   |   | Terwujudnya Kabupaten Cirebon Yang Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju Dan Aman |  |   |   | Terwujudnya Kabupaten Cirebon Yang Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju Dan Aman |      |  |   |
|  | Misi 1:<br>Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas | Meningkatnya kualitas kerukunan hidup antar dan inter umat beragama |  | Misi 1:<br>Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat | Melestarikan dan menumbuhkan kebanggaan budaya masyarakat | Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya masyarakat |  |      | Meningkatkan ketahanan budaya masyarakat Cirebon | Meningkatnya jati diri dan nilai-nilai luhur masyarakat Cirebon |
|  |   |   |  |  |   | Berkembangnya sektor wisata berbasis kebudayaan             |  |      |  |   |



| RPJPD Kabupaten Cirebon |      |         | RPJMD Murni |  |   |  | Perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon |      |   |   |
|-------------------------|------|---------|-------------|--|---|--|-----------------------------------|------|---|---|
| Visi                    | Misi | Sasaran | Visi        | Misi   | Tujuan  | Sasaran                                    | Visi                              | Misi | Tujuan  | Sasaran   |
|                         |      |         |             | Misi 2:<br>Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi | Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dan sejahtera | Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat |                                   |      | Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas | Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat                            |
|                         |      |         |             |  |   |  |                                   |      |   | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                             |
|                         |      |         |             |  |   | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat  |                                   |      | Mewujudkan Kesejahteraan Sosial                 | Menurunnya jumlah kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial |



| RPJPD Kabupaten Cirebon |      |                                       | RPJMD Murni |   |   |   | Perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon |      |   |  |
|-------------------------|------|---------------------------------------|-------------|---|---|---|-----------------------------------|------|---|--|
| Visi                    | Misi | Sasaran                               | Visi        | Misi  | Tujuan  | Sasaran   | Visi                              | Misi | Tujuan  | Sasaran  |
|                         |      |                                       |             |   |   | Menurunnya angka kemiskinan   |                                   |      |   |  |
|                         |      |                                       |             |   |   | Menurunnya angka pengangguran                                       |                                   |      |   | Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja   |
|                         |      |                                       |             |   |   | Meningkatnya Prestasi olahraga dan peranan pemuda dalam pembangunan |                                   |      |   |  |
|                         |      | Menurunnya jumlah penyakit masyarakat |             | Misi 3: Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika | Meningkatkan keshalehan sosial dan kerukunan antar dan internal umat beragama | Menurunnya kegiatan asusila di masyarakat                           |                                   |      | Meningkatkan keshalehan sosial dalam kehidupan beragama | Meningkatnya penyelesaian pergesekan (friksi) antar dan internal umat beragama |



| RPJPD Kabupaten Cirebon |      |                                | RPJMD Murni |   |  |   | Perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon |  |   |  |
|-------------------------|------|--------------------------------|-------------|---|--|---|-----------------------------------|--|---|--|
| Visi                    | Misi | Sasaran                        | Visi        | Misi  | Tujuan   | Sasaran   | Visi                              | Misi   | Tujuan  | Sasaran                                |
|                         |      |                                |             |   |  | Menurunnya pergesekan (friksi) antar dan internal umat beragama |                                   |  |   |  |
|                         |      | Meningkatnya indeks kesehatan  |             | Misi 4: Meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah | Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dan pengembangan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan                |                                   | Misi 4: Meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup |
|                         |      | Meningkatnya indeks pendidikan |             |   |  | Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat                        |                                   |  |   |  |



| RPJPD Kabupaten Cirebon |   |  | RPJMD Murni |      |   |  | Perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon |                            |        |  |
|-------------------------|---|--|-------------|------|---|--|-----------------------------------|----------------------------|--------|--|
| Visi                    | Misi  | Sasaran  | Visi        | Misi | Tujuan  | Sasaran  | Visi                              | Misi                       | Tujuan | Sasaran  |
|                         |   | Meningkatnya daya beli masyarakat  |             |      |   | Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah                        |                                   | aparatur pemerintah daerah |        |  |
|                         |   | Menurunnya jumlah pengangguran   |             |      |   | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup                                       |                                   |                            |        |  |
|                         | Misi 2: Terwujudnya Lingkungan Hidup yang lestari | Rendahnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan  |             |      | Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan smart serta penguatan otonomi Desa | Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik              |                                   |                            |        | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan |
|                         |   | Berkurangnya daerah rawan banjir dan kekeringan  |             |      |   | Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih |                                   |                            |        |  |
|                         |   | Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai |             |      |   | meningkatkan maturitas pemerintahan berbasis elektronik                      |                                   |                            |        |  |



| RPJPD Kabupaten Cirebon |  |  | RPJMD Murni |      |        |  | Perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon |      |  |  |
|-------------------------|--|--|-------------|------|--------|--|-----------------------------------|------|--|--|
| Visi                    | Misi                                       | Sasaran  | Visi        | Misi | Tujuan | Sasaran                                    | Visi                              | Misi | Tujuan   | Sasaran  |
|                         |  | tambah, daya saing, serta modal pembangunan daerah   |             |      |        |  |                                   |      |  |  |
|                         |  | Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan |             |      |        | Meningkatnya kemajuan dan Kemandirian Desa |                                   |      |  | Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah                        |
|                         | Misi 3: Terwujudnya perekonomian yang kuat | Meningkatnya optimasi ketersediaan ruang untuk aktivitas ekonomi   |             |      |        |  |                                   |      |  | Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat                                     |
|                         |  | Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan investasi di daerah   |             |      |        |  |                                   |      |  | Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih |
|                         |  |  |             |      |        |  |                                   |      | Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan smart serta penguatan otonomi Desa |  |



| RPJPD Kabupaten Cirebon |      |  | RPJMD Murni |      |        |         | Perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon |      |        |   |
|-------------------------|------|--|-------------|------|--------|---------|-----------------------------------|------|--------|---|
| Visi                    | Misi | Sasaran  | Visi        | Misi | Tujuan | Sasaran | Visi                              | Misi | Tujuan | Sasaran   |
|                         |      | Tersedianya penunjang perkembangan ekonomi   |             |      |        |         |                                   |      |        | Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik |
|                         |      | Meningkatnya infrastruktur transportasi, sumber daya air dan irigasi, telekomunikasi yang efisien dan modern, dan sarana-prasarana dasar permukiman yang berkualitas |             |      |        |         |                                   |      |        | Meningkatnya maturitas pemerintahan berbasis elektronik         |
|                         |      | Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat Kabupaten Cirebon   |             |      |        |         |                                   |      |        | Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa      |



| RPJPD Kabupaten Cirebon |  |   | RPJMD Murni |  |  |                                   | Perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon |  |  |   |
|-------------------------|--|---|-------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|---|
| Visi                    | Misi   | Sasaran   | Visi        | Misi   | Tujuan   | Sasaran                           | Visi                              | Misi   | Tujuan   | Sasaran                                 |
|                         | Misi 4:<br>Terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel | Tidak adanya keluhan masyarakat terhadap pemerintah berkaitan dengan korupsi, kolusi dan nepotisme                        |             | Misi 5:<br>Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional | Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat | Meningkatnya a ketertiban umum    |                                   | Misi 5:<br>Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional | Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat | Meningkatnya ketentraman dan ketertiban |
|                         |  | Seluruh kebijakan, program dan kegiatan pemerintah dapat selalu diketahui oleh masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan |             |  |  | Pengurangan indeks resiko bencana |                                   |  |  | Menurunnya resiko bencana               |
|                         |  |   |             |  |  |                                   |                                   |  |  |   |
|                         |  |   |             |  |  |                                   |                                   |  |  |   |
|                         |  | Berkurangnya angka demo masyarakat terhadap pemerintah  |             |  |  |                                   |                                   |  |  |   |
|                         |  |   |             |  |  |                                   |                                   |  |  |   |
|                         |  |   |             |  |  |                                   |                                   |  |  |   |
|                         |  |   |             |  |  |                                   |                                   |  |  |   |

Sumber: Hasil proyeksi, diolah oleh Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, 2021





Bercermin dari perkembangan ekonomi Provinsi Jawa Barat, maka Pemerintah Kabupaten Cirebon melakukan penyesuaian Tujuan dan Sasaran serta target-target tujuan dan sasaran pembangunan mulai Tahun 2021 sampai dengan 2024. Penyajian Tujuan dan Sasaran serta target-target tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini,



**Tabel 5.6.**

**Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  
Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024**

**VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON YANG BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN**

| No.   | Tujuan/Sasaran                                   |  | Indikator Tujuan/Sasaran                              | Satuan   | Kondisi Awal | Realisasi 2020 | Target |       |       |       | Kondisi Akhir |
|---|--|--|---|----------|--------------|----------------|--------|-------|-------|-------|---------------|
|   |  |  |   |          |              |                | 2021   | 2022  | 2023  | 2024  |               |
| Misi 1: Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat                             |  |  |   |          |              |                |        |       |       |       |               |
| 1.  | Meningkatkan ketahanan budaya masyarakat Cirebon |  | Persentase penambahan budaya daerah yang dilestarikan | Persen   | 81,00        | 82,00          | 83,00  | 84,00 | 85,00 | 86,00 | 86,00         |
|   | 1.   | Meningkatnya jatidiri dan nilai-nilai luhur masyarakat Cirebon | Jumlah kelompok/komunitas kebudayaan yang aktif       | Kelompok | 255          | 232            | 257    | 258   | 259   | 260   | 260           |
| Misi 2: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi |  |  |   |          |              |                |        |       |       |       |               |
| 2.  | Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas  |  | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)                      | Poin     | 68,69        | 68,75          | 69,93  | 69,92 | 70,53 | 71,15 | 71,15         |
|   | 2.   | Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat                     | Rata-rata Lama Sekolah(RLS)                           | Tahun    | 6,71         | 6,92           | 7,05   | 7,18  | 7,31  | 7,44  | 7,44          |
|   |  |  | Harapan Lama Sekolah (HLS)                            | Tahun    | 12,24        | 12,25          | 12,34  | 12,44 | 12,53 | 12,63 | 12,63         |
|   | 3.   | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                      | Umur Harapan Hidup (UHH)                              | Tahun    | 71,82        | 71,99          | 72,11  | 72,24 | 72,36 | 72,48 | 72,48         |
| 3.  | Mewujudkan Kesejahteraan Sosial                  |  | Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan         | Persen   | 9,94         | 11,24          | 11,14  | 11,04 | 10,94 | 10,84 | 10,84         |



| No.  | Tujuan/Sasaran   | Indikator Tujuan/Sasaran  | Satuan  | Kondisi Awal | Realisasi 2020 | Target |       |       |       | Kondisi Akhir |
|--|--|---|---------|--------------|----------------|--------|-------|-------|-------|---------------|
|  |  |   |         |              |                | 2021   | 2022  | 2023  | 2024  |               |
|  |  | Tingkat pengangguran terbuka  | Prosen  | 10,28        | 11,52          | 11,12  | 10,70 | 10,30 | 9,90  | 9,90          |
|  |  | PDRB Per Kapita   | Juta Rp | 22,41        | 22,43          | 23,25  | 24,95 | 26,78 | 28,74 | 28,74         |
| 4.   | Menurunnya jumlah kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial          | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani di Kabupaten Cirebon | Persen  | 67,06        | n.a.           | 70,17  | 70,94 | 71,72 | 72,50 | 72,50         |
| 5.   | Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja   | Rasio Kesempatan Kerja  | Persen  | 58,66        | 56,44          | 57,22  | 58,03 | 58,83 | 59,64 | 59,64         |
| <b>Misi 3: Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budipekerti, santun, dan beretika</b>  |  |   |         |              |                |        |       |       |       |               |
| 4.   | Meningkatkan keshalehan sosial dalam kehidupan beragama                        | Indeks Kerukunan Umat Beragama  | Poin    | 75,00        | 78,00          | 81,00  | 84,00 | 87,00 | 90,00 | 90,00         |
| 6.   | Meningkatnya penyelesaian pergesekan (friksi) antar dan internal umat beragama | Prosentase Penyelesaian Friksi/Gesekan antar Umat Beragama                                    | Persen  |              | 78             | 80     | 81    | 82    | 83    | 83            |
| <b>Misi 4: Meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah</b> |  |   |         |              |                |        |       |       |       |               |
| 5.   | Meningkatkan pertumbuhan   | Laju Pertumbuhan Ekonomi  | Prosen  | 4,68         | -1,08          | 4,38   | 4,61  | 4,84  | 5,08  | 5,08          |



| No. | Tujuan/Sasaran   | Indikator Tujuan/Sasaran  | Satuan                    | Kondisi Awal | Realisasi 2020 | Target |        |        |        | Kondisi Akhir |
|-----|--|---|---------------------------|--------------|----------------|--------|--------|--------|--------|---------------|
|     |  |   |                           |              |                | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |               |
|     | ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan | Indeks Gini   | Poin                      | 0,344        | 0,338          | 0,336  | 0,334  | 0,332  | 0,330  | 0,330         |
|     |  | Pengeluaran Perkapita Disesuaikan   | Ribu Rupiah/Kapita /Tahun | 10.670       | 10.342         | 10.606 | 10.891 | 11.198 | 11.529 | 11.529        |
|     | 7. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan                                      | Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                            | Prosen                    | -1,05        | 1,76           | 1,86   | 2,08   | 2,31   | 2,54   | 2,54          |
|     |  | Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan   | Prosen                    | 2,82         | -0,42          | 3,08   | 3,74   | 4,41   | 5,07   | 5,07          |
|     |  | Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | Prosen                    | 4,62         | -7,03          | 5      | 5,25   | 5,5    | 5,75   | 5,75          |
|     |  | Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                          | Prosen                    | 5,47         | -9,50          | 4,33   | 4,63   | 4,93   | 5,23   | 5,23          |
|     | 8. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat  | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi   | Poin                      | 91,50        | 93             | 93,10  | 93,20  | 93,30  | 93,40  | 93,40         |
|     |  | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan   | Poin                      | 71,17        | 71,44          | 71,71  | 71,98  | 72,25  | 72,52  | 72,52         |



| No. | Tujuan/Sasaran   |  | Indikator Tujuan/Sasaran                                    | Satuan | Kondisi Awal | Realisasi 2020 | Target |       |       |       | Kondisi Akhir |
|-----|--|--|---|--------|--------------|----------------|--------|-------|-------|-------|---------------|
|     |  |  |   |        |              |                | 2021   | 2022  | 2023  | 2024  |               |
|     | 9.   | Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah                        | Indeks pembangunan infrastruktur wilayah yang mantap (baik) | Poin   | 77,99        | 79,89          | 79,46  | 80,20 | 80,93 | 81,67 | 81,67         |
|     | 4.   | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup                                       | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (IKLH)               | Poin   | 52,51        | 52,29          | 52,67  | 52,76 | 52,84 | 52,92 | 52,92         |
| 6.  | Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan smart serta penguatan otonomi Desa |  | Indeks Reformasi Birokrasi                                  | Indeks | 50,58        | 55,00          | 60,00  | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 75,00         |
|     | 1.   | Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik              | Indeks kepuasan masyarakat (IKM)                            | Poin   | 3,25         | 3,27           | 3,65   | 3,85  | 3,95  | 4,00  | 4,00          |
|     |  |  | Indeks kemandirian fiskal daerah                            | Prosen | 15,71        | 16,24          | 16,79  | 17,36 | 17,95 | 18,56 | 18,56         |
|     | 2.   | Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih | Nilai SAKIP   | Poin   | 68,00        | 70,00          | 73,00  | 76,00 | 79,00 | 80,00 | 80,00         |
|     |  |  | Opini BPK terhadap LKPD                                     | WTP    | WTP          | WTP            | WTP    | WTP   | WTP   | WTP   | WTP           |
|     |  |  | Indeks <i>Monitoring Center for Prevention</i> (MCP)        | Poin   | 60,00        | 65,00          | 70,00  | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 85,00         |
|     | 3.   | Meningkatnya maturitas pemerintahan berbasis elektronik                      | Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)       | Poin   | 2,63         | 2,78           | 2,93   | 3,08  | 3,23  | 3,38  | 3,38          |



| No.  | Tujuan/Sasaran  |  | Indikator Tujuan/Sasaran           | Satuan | Kondisi Awal | Realisasi 2020 | Target |        |        |        | Kondisi Akhir |
|--|---|--|------------------------------------|--------|--------------|----------------|--------|--------|--------|--------|---------------|
|  |   |  |                                    |        |              |                | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |               |
|  | 4.  | Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa | Jumlah desa mandiri                | Desa   | 2            | 5              | 28     | 49     | 70     | 91     | 91            |
| <b>Misi 5: Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional</b> |   |  |                                    |        |              |                |        |        |        |        |               |
| 7.   | Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat |  | Indeks Ketertiban dan Ketenteraman | Persen | n.a          | 53,05          | 56,09  | 64,12  | 70,59  | 77,50  | 77,50         |
|  | 1.  | Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban                   | Jumlah pelanggaran Perda           | Kasus  | n.a          | 403            | 398    | 393    | 338    | 383    | 403           |
|  | 2.  | Menurunnya resiko bencana                                  | Indek resiko bencana               | Poin   | 165,44       | n.a            | 154,72 | 149,36 | 144,00 | 138,64 | 138,64        |

Sumber: Hasil proyeksi, diolah oleh Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, 2021



#### **5.4. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024**

Prioritas pembangunan daerah merupakan janji-janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilaksanakan dan dicapai selama masa jabatan periode pembangunan tahun 2019-2024. Prioritas pembangunan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian visi dan misi. Oleh karena itu, perlu adanya integrasi yang selaras dalam perumusan setiap kebijakan pembangunan tahun 2019-2024 dengan prioritas pembangunan sebagaimana terlihat pada tabel berikut.



**Tabel 5.7.**

**Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dengan Prioritas Pembangunan  
Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024**

| Visi/Misi   | Tujuan   | Sasaran   | Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon (PK)  |
|---|--|---|---|
| VISI:<br>TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON YANG BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN   |  |   |   |
| Misi 1: Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat   |  |   |   |
|   | Meningkatkan ketahanan budaya masyarakat Cirebon         | Meningkatnya jatidiri dan nilai-nilai luhur masyarakat Cirebon              | PK 9. Peningkatan Kondusifitas Kehidupan Bermasyarakat Dalam Interaksi Sosial dan Kehidupan Beragama                                      |
| Misi 2: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi   |  |   |   |
|   | Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas          | Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat                                  | PK 1. Peningkatan Akses, Kualitas Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat untuk Keberlanjutan Pendidikan Dasar                              |
|   |  | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                                   | PK 2. Perluasan Jaminan Kesehatan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Baik Bersifat Preventif Maupun Kuratif Berbasis Masyarakat |
|   | Mewujudkan Kesejahteraan Sosial                          | Menurunnya jumlah kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial       | PK 5. Penanganan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat miskin dan perlindungan jaminan sosial  |
|   |  | Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja                                      | PK 6. Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Penguatan Jiwa Kewirausahaan                             |
| Misi 3: Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budipekerti, santun, dan beretika  |  |   |   |
|   | Meningkatkan keshalehan sosial dalam kehidupan beragama  | Meningkatnya penyelesaian gesekan (friksi) antar dan internal umat beragama | PK 9. Peningkatan Kondusifitas Kehidupan Bermasyarakat Dalam Interaksi Sosial dan Kehidupan Beragama                                      |
| Misi 4: Meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah |  |   |   |
|   | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan                            |   |





| Visi/Misi   | Tujuan   | Sasaran  | Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon (PK)   |
|---|--|--|--|
|   | yang berkeadilan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan   | Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat                                   | PK 4. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan Dan Pariwisata yang Berbasis Inovasi                             |
|   |  | Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah                      | PK 3. Penyediaan Infrastruktur Wilayah Untuk Peningkatan Layanan Dasar, Kelancaran Kegiatan Ekonomi, Daerah Perbatasan Dan Rawan Bencana       |
|   |  | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup                                     | PK 7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Guna Mendukung Sinergitas Wilayah dan Keberlanjutan Pembangunan |
|   | Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan smart serta penguatan otonomi Desa | Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik            | PK 8. Reformasi Birokrasi Melalui Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Prima   |
|   |  | Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih |  |
|   |  | Meningkatnya maturitas pemerintahan berbasis elektronik                    |  |
|   |  | Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa                 |  |
| Misi 5: Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional |  |  |  |
|   | Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat                                       | Meningkatnya ketentraman dan ketertiban                                    | PK 9. Peningkatan Kondusifitas Kehidupan Bermasyarakat Dalam Interaksi Sosial dan Kehidupan Beragama   |
|   |  | Menurunnya resiko bencana  | PK 3. Penyediaan Infrastruktur Wilayah Untuk Peningkatan Layanan Dasar, Kelancaran Kegiatan Ekonomi, Daerah Perbatasan Dan Rawan Bencana       |

Sumber : Hasil Analisa Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, 2021

## **BAB VI**

### **STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah dikemukakan dalam Bab IV, dikaitkan dengan target-target yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diuraikan dalam Bab V, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun 2019-2024. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah perlu dirumuskan agar visi dan misi yang sudah diuraikan dalam tujuan dan sasaran dapat dicapai. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Cirebon dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah serta memedomani Prioritas Nasional. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Kabupaten Cirebon merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara terpadu dan integral untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna).

Dalam konteks Rancangan RPJMD Kabupaten Cirebon, strategi dirumuskan untuk menunjukkan komitmen politik yang kuat dari Pemerintahan Kabupaten Cirebon untuk menciptakan *output* dan *outcome* bagi para pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah. Strategi harus dilengkapi dengan indikator kinerja utama, indikator

keberhasilan atau kegagalan suatu strategi, untuk mengukur keberhasilannya. Selain itu juga untuk menciptakan budaya berpikir strategis untuk menjamin transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi.

Berdasarkan penjelasan di atas dan dengan berpedoman pada keterkaitan antara visi dan misi dengan rumusan tujuan, dan sasaran sebagaimana telah diuraikan pada Bab-bab sebelumnya, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan dalam dokumen perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024 yang merupakan penjabaran dari setiap sasaran sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

### **6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dengan Pendekatan Holistik-Tematik dan Integratif**

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah Kabupaten Cirebon yang telah ditetapkan. Rumusan strategi yang disusun akan menunjukkan kemantaban pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitas akan terwujud jika perencanaan dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan daerah. Rumusan strategi merupakan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Strategi pembangunan daerah disusun melalui kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya.

Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam perumusan strategi pembangunan Kabupaten Cirebon adalah:

1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang;
2. Strategi didasarkan pada capaian kinerja pembangunan dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap segment masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah; dan
4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk yang cerita atau skenario strategi.

Salah satu metode untuk menentukan strategi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah penggunaan analisis SWOT. Metode ini digunakan karena lebih sederhana dan banyak dipahami oleh *stakeholders* pembangunan di Kabupaten Cirebon. Analisis SWOT (*Strength, Weaknesses, Opportunities, dan Threats*) dilakukan terlebih dahulu agar penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang inheren. Input utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya.



Berdasarkan analisis di atas, rumusan perubahan strategi Kabupaten Cirebon untuk periode pembangunan 2019-2024 berjumlah 17 (*tujuh belas*) strategi. Secara rinci Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Cirebon disajikan pada Tabel 6.1.

**Tabel 6.1.**

**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Cirebon**

| <b>VISI : Terwujudnya Kabupaten Cirebon Yang Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman</b>                                |  |  |
|---|--|--|
| <b>Tujuan</b>   | <b>Sasaran</b>   | <b>Strategi</b>  |
| <b>MISI 1</b>   |  |  |
| Tujuan 1: Meningkatkan ketahanan budaya masyarakat Cirebon  | Sasaran 1.1: Meningkatnya jatidiri dan nilai-nilai luhur masyarakat Cirebon                    | 1. Optimalisasi pemajuan kebudayaan  |
| <b>MISI 2</b>   |  |  |
| Tujuan 2: Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas   | 1. Sasaran 2.1: Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat                                     | 1. Peningkatan aksesibilitas dan pemerataan kualitas layanan pendidikan berbasis TIK hingga ke pelosok       |
|   | 2. Sasaran 2.2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                                      | 2. Peningkatan mutu layanan dan akses kesehatan yang lebih terjangkau  |
| Tujuan 3: Mewujudkan Kesejahteraan Sosial   | 1. Sasaran 3.1: Menurunnya jumlah kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial          | 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan jangkauan pelaksanaan rehabilitasi sosial              |
|   | 2. Sasaran 3.2: Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja   | 2. Peningkatan daya saing dan kesempatan kerja bagi masyarakat   |
| <b>MISI 3</b>   |  |  |
| Tujuan 4: Meningkatkan keshalehan sosial dalam kehidupan beragama   | 1. Sasaran 4.1: Meningkatnya penyelesaian pergesekan (friksi) antar dan internal umat beragama | 1. Optimalisasi penegakan regulasi ketertiban umum dan Penanganan Konflik Sosial                             |
| <b>MISI 4</b>   |  |  |
| Tujuan 5: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan | 1. Sasaran 5.1: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan                               | 1. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditi unggulan di sektor pertanian                          |
|   |  | 2. Peningkatan daya saing produk-produk unggulan pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbasis smart economy |
|   | 2. Sasaran 5.2: Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat                                       | 3. Peningkatan kualitas dan produktivitas pangan lokal   |
|   | 3. Sasaran 5.3: Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah                          | 4. Peningkatan pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah                                    |
|   | 4. Sasaran 5.4: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup   | 5. Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan                                 |



| <b>VISI : Terwujudnya Kabupaten Cirebon Yang Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman</b>                    |  |   |
|---|--|---|
| Tujuan 6:<br>Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan smart serta penguatan otonomi Desa | 1. Sasaran 6.1: Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik            | 1. Peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik  |
|   | 2. Sasaran 6.2: Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih | 2. Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah serta penguatan pengawasan          |
|   | 3. Sasaran 6.3: Meningkatnya maturitas pemerintahan berbasis elektronik                    | 3. Penguatan tatakelola pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan berorientasi pada pencapaian smart governance |
|   | 4. Sasaran 6.4: Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa                 | 4. Peningkatan kualitas pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa                                   |
| <b>MISI 5:</b>  |  |   |
| Tujuan 7: Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat  | 1. Sasaran 7.1: Meningkatnya ketentraman dan ketertiban                                    | 1. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman                |
|   | 2. Sasaran 7.2: Menurunnya resiko bencana  | 1. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan koordinasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat                        |

Sumber: Diolah Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, 2021

Strategi nantinya akan diterjemahkan kedalam arah kebijakan pada dasarnya juga adalah upaya-upaya untuk memecahkan berbagai permasalahan dan mengantisipasi isu strategis. Keterhubungannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 6.2.**  
**Hubungan Permasalahan dan Strategi**

| <b>Masalah Pokok Daerah</b>                  | <b>Strategi</b>   |
|--|---|
| Lunturnya sebagian kearifan lokal masyarakat | Optimalisasi pemajuan kebudayaan  |
| Masih rendahnya daya saing SDM               | Peningkatan aksesibilitas dan pemerataan kualitas layanan pendidikan berbasis TIK hingga ke pelosok |
|  | Peningkatan mutu layanan dan akses kesehatan yang lebih terjangkau                                  |
|  | Percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan jangkauan pelaksanaan rehabilitasi sosial        |

| Masalah Pokok Daerah  | Strategi  |
|---|---|
| Kehidupan beragama belum sepenuhnya menghadirkan keshalehan sosial                                  | Optimalisasi penegakan regulasi ketertiban umum dan penanganan konflik sosial   |
| Kemandirian ekonomi daerah belum terwujud   | peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditi unggulan di sektor pertanian  |
|   | Peningkatan daya saing produk-produk unggulan pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbasis <i>smart economy</i>                              |
|   | Peningkatan kualitas dan produktivitas pangan lokal   |
|   | Peningkatan pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah  |
|   | Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan   |
| Tata pemerintahan belum menghasilkan layanan dan kebijakan publik yang berorientasi pada masyarakat | Peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik,  |
|   | Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah serta penguatan pengawasan   |
|   | Penguatan tatakelola pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan berorientasi pada pencapaian smart governance.                               |
|   | Peningkatan kualitas pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa  |
| keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat belum sepenuhnya terwujud                           | Peningkatan kualitas pelaksanaan dan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat |
|   | Peningkatan kualitas pelaksanaan dan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat |

Sumber: Hasil analisis Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, 2021

Strategi-strategi tersebut disusun untuk mencapai sasaran strategis pembangunan daerah. Setiap strategi harus mampu diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan yang dituju dan mendukung pencapaian misi yang telah ditetapkan. Strategi merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.

## 6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan merupakan usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang konkret untuk memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tema tahapan pembangunan

selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap untuk penyusunan dokumen RPJMD.

Penyusunan arah kebijakan mempertimbangkan urgensi suatu permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan untuk menentukan tahapan dan prioritas untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan berfungsi untuk menyelaraskan strategi-strategi pembangunan daerah dan dokumen perencanaan lainnya sehingga didapatkan langkah-langkah pencapaian tujuan sasaran yang saling bersinergi untuk mencapai tujuan dan sasaran untuk lima tahun ke depan.

Selanjutnya Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Cirebon disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 6.3.**

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Cirebon**

| Tujuan/<br>Sasaran  | Strategi   | Arah Kebijakan   |
|---|--|--|
| Tujuan 1: Meningkatkan ketahanan budaya masyarakat Cirebon                |  |  |
| Sasaran 1: Meningkatnya jatidiri dan nilai-nilai luhur masyarakat Cirebon |  |  |
|   | 1. Optimalisasi pemajuan kebudayaan  | Peningkatan efektivitas kerjasama dalam perlindungan, pengembangan dan pembinaan kebudayaan asli Cirebon                   |
|   |  | Percepatan pembentukan rintisan desa/kampung budaya dan dukungan akses infrastruktur dan sarana pendukung lainnya          |
| Tujuan 2: Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas                 |  |  |
| Sasaran 2: Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat                     |  |  |
|   | 2. Peningkatan aksesibilitas dan pemerataan kualitas layanan pendidikan berbasis TIK hingga ke pelosok | Perluasan jaminan akses dan infrastruktur pendidikan hingga ke pelosok   |
|   |  | Peningkatan ketersediaan dan kualitas SDM bidang pendidikan, termasuk kemampuan mengajar secara online                     |
|   |  | Peningkatan kualitas penyelenggaraan dan manajemen pendidikan berbasis online  |
| Sasaran 3: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                      |  |  |
|   | 3. Peningkatan mutu layanan dan akses kesehatan yang lebih terjangkau                                  | Pelayanan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat tidak mampu (Berintegrasikan dengan Kartu PEPEK)                               |
|   |  | Peningkatan kesadaran Masyarakat akan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); peningkatan fungsi UKBM (Posyandu, Posbindu) |
|   |  | Peningkatan cakupan SPM bidang kesehatan melalui berbagi sumber biaya  |
|   |  | Peningkatan kualitas dan kelas layanan   |





| Tujuan/<br>Sasaran  | Strategi  | Arah Kebijakan   |
|---|---|--|
|   |   | puskesmas/RSUD   |
| Tujuan 3: Mewujudkan Kesejahteraan Sosial   |   |  |
| Sasaran 4: Menurunnya jumlah kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial  |   |  |
|   | 4. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan jangkauan pelaksanaan rehabilitasi sosial | Peningkatan kualitas ketersediaan jaminan sosial dalam berbagai bidang   |
|   |   | Peningkatan kualitas sumber daya layanan untuk PSKS  |
|   |   | Peningkatan dan perluasan akses pelayanan dasar bagi kelompok rentan   |
| Sasaran 5: Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja   |   |  |
|   | 5. Peningkatan daya saing dan kesempatan kerja bagi masyarakat                                  | Peningkatan kapasitas sumber daya layanan dan pengelola Balai Latihan Kerja  |
|   |   | Peningkatan kompetensi SDM yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja   |
|   |   | Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja yang terkena dampak pandemi Covid-19   |
|   |   | Peningkatan program pemulihan ekonomi untuk dunia usaha dan UMKM baik melalui bantuan permodalan, insentif pelaku usaha hingga bantuan sosial bagi pengusaha kecil terdampak |
| Tujuan 4: Meningkatkan keshalehan sosial dalam kehidupan beragama   |   |  |
| Sasaran 6: Meningkatnya penyelesaian pergesekan (friksi) antar dan internal umat beragama                                   |   |  |
|   | 6. Optimalisasi penegakan regulasi ketertiban umum dan Penanganan Konflik Sosial                | Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat   |
|   |   | Peningkatan fungsi aparat keamanan dan perlindungan masyarakat   |
|   |   | Peningkatan penegakkan perda   |
| Tujuan 5: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan |   |  |
| Sasaran 7: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan   |   |  |
|   | 7. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditi unggulan di sektor pertanian             | Integrasi proses hulu-hilir industri pengolahan khususnya sektor pertanian   |
|   |   | Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian secara berkelanjutan  |
|   |   | Peningkatan fasilitas cakupan layanan penyediaan sarana dan prasarana pertanian berbasis kemandirian   |
|   |   | Peningkatan Cakupan Binaan Kelompok kelautan dan perikanan dalam rangka diversifikasi produk-produk perikanan menuju agroindustri perikanan                                  |
|   |   | Peningkatan daya dukung lingkungan dalam upaya Peningkatan Produksi Perikanan  |
|   | Peningkatan ilmu dan teknologi perikanan  |  |
|   | 8. Peningkatan daya saing produk-produk unggulan pada pusat-                                    | Peningkatan skala ekonomi dan kemitraan strategis dengan sektor swasta untuk pengembangan ekonomi lokal menuiui  |



| Tujuan/<br>Sasaran  | Strategi   | Arah Kebijakan   |
|---|--|--|
|   | pusat pertumbuhan ekonomi berbasis smart economy                                     | <p>peningkatan ekspor</p> <p>Meningkatkan kemitraan strategis dengan sektor swasta (public private partnership) untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal</p> <p>Percepatan pembentukan rintisan desa/kampung budaya dan dukungan akses infrastruktur dan sarana pendukung lainnya</p> <p>Peningkatan sinergitas pembangunan kepariwisataan khususnya koordinasi, kerjasama dan promosi (paket dan event) wisata berbasis budaya (unggulan) asli Cirebon</p>      |
| Sasaran 8: Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat   |  |  |
|   | 9. Peningkatan kualitas dan produktivitas pangan lokal                               | <p>Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan masyarakat</p> <p>Peningkatan distribusi dan stabilitas harga pangan yang terjangkau</p> <p>Peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui Pola Pangan Harapan (PPH)</p>  |
| Sasaran 9: Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah  |  |  |
|   | 10. Peningkatan pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah           | <p>Peningkatan pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah</p> <p>Peningkatan kualitas proyek infrastruktur serta perencanaan dan pemrograman jalan dan jembatan yang tepat sasaran</p> <p>Peningkatan kualitas layanan pengembangan air bersih, limbah domestik dan perumahan layak huni</p> <p>Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)</p> <p>Pengembangan dan pengelolaan sistem pengairan dan irigasi yang berkualitas</p> |
| Sasaran 10: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup  |  |  |
|   | 11. Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan        | <p>Peningkatan kualitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan</p> <p>Peningkatan produksi, pemulihan dan pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan</p>   |
| <b>Tujuan 6: Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan smart serta penguatan otonomi Desa</b> |  |  |
| Sasaran 11: Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik   |  |  |
|   | 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik              | <p>Penguatan dan pembaharuan kebijakan pelayanan publik</p> <p>Peningkatan pelayanan publik yang integratif</p> <p>Peningkatan layanan pendaftaran, perekaman, dan penerbitan E-KTP</p> <p>Peningkatan kualitas sumber daya layanan administrasi secara terpadu</p>  |
| Sasaran 12: Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih                              |  |  |
|   | 13. Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah serta | <p>Penguatan kebijakan penerapan SAKIP</p> <p>Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang terintegrasi (e-performance based budgeting)</p>   |

| Tujuan/<br>Sasaran  | Strategi   | Arah Kebijakan   |
|---|--|--|
|   | penguatan pengawasan   | Perluasan pembangunan zona integritas pada sektor-sektor strategis   |
|   |  | Peningkatan kinerja, peran, kapasitas, dan kapabilitas APIP/P2UPD  |
| Sasaran 13: Meningkatnya maturitas pemerintahan berbasis elektronik           |  |  |
|   | 14. Penguatan tatakelola pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan berorientasi pada pencapaian smart governance | Peningkatan dukungan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis elektronik                        |
|   |  | Peningkatan kualitas jaringan dan pengelolaan data yang handal dan aman  |
| Sasaran 14: Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa        |  |  |
|   | 15. Peningkatan kualitas pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa                                   | Pembinaan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah     |
|   |  | Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pelaku kawasan perdesaan dan peningkatan infrastruktur kawasan perdesaan |
|   |  | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa   |
| <b>Tujuan 7: Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat</b> |  |  |
| Sasaran 15 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban                          |  |  |
|   | 16. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman                | Peningkatan koordinasi dan penanganan gangguan ketentraman   |
|   |  | Peningkatan kapasitas SDM dan jabatan fungsional Satuan Polisi Pamong Praja                                    |
| Sasaran 16: Menurunnya resiko bencana   |  |  |
|   | 17. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan koordinasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat                        | Peningkatan kualitas pelayanan, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana                                  |
|   |  | Peningkatan kapasitas pengelolaan resiko dan penataan penanggulangan bencana                                   |

Sumber: Hasil analisis Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, 2021

Berdasarkan Strategi Kabupaten Cirebon yang telah dirumuskan di atas, dapat dirumuskan tema/fokus tahunan pembangunan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagai landasan penyusunan RKPD tahunan selama periode berkenaan yang berlandaskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025.

**Gambar 6.1**  
**Tinjauan RPJPD Kabupaten Cirebon 2005-2025**



Sumber: RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2005-2025

Penetapan tema atau fokus RPJMD Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari tema atau fokus pembangunan tahap keempat pada RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025, yaitu Mewujudkan Tercapainya Masyarakat Yang Sejahtera. Untuk mewujudkan tema pembangunan tahap keempat pada RPJPD Kabupaten Cirebon, maka tema atau fokus pembangunan 5 (lima) tahunan (2019-2024) disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 6.4.**

**Tema atau Fokus Pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024**

| Arah Kebijakan  |   |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
| Tahun 2020  | Tahun 2021  | Tahun 2022  | Tahun 2023   | Tahun 2024   |
| Memacu Pemerataan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Untuk meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon | Mempercepat pemulihan ekonomi dan sistem kesehatan masyarakat serta kehidupan sosial masyarakat | Penguatan Pemulihan Ekonomi Secara Inklusif Didukung Reformasi Struktural Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing, Investasi Dan Lapangan Kerja | Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi unggulan yang didukung oleh Pembangunan SDM unggul serta layanan dan kebijakan publik yang berorientasi kepada masyarakat | Mengoptimalkan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan Dan pemerataan kesejahteraan Masyarakat untuk Mewujudkan daya saing dan Kemandirian daerah |

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, 2021

### **6.3. Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Spasial**

Pendekatan spasial mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2038, khususnya dalam menyelaraskan kebijakan ruang antar wilayah, antar sektor dan dimensi waktu pembangunan RPJMD Tahun 2019-2024. Fungsi RTRW Kabupaten adalah:

1. Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. Acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah di Kabupaten Cirebon;
3. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah Kabupaten Kabupaten Cirebon;
4. Acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta;
5. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten;
6. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
7. Acuan dalam administrasi pertanahan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan tahun 2019-2024 yang telah dirumuskan dengan pendekatan holistik-tematik dan integratif selain memperhatikan pelaksanaan urusan sesuai kewenangan kabupaten harus mengadopsi kebijakan penataan ruang yang terkait pengembangan wilayah, pengembangan struktur, dan pola ruang. Kebijakan penataan ruang merupakan arahan dalam mencapai tujuan Penataan ruang wilayah kabupaten Cirebon yaitu untuk mewujudkan



ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, harmonis, dan terpadu sebagai sentra pertanian, industri dan pariwisata yang mendukung PKN Cirebon.

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon adalah:

1. Kebijakan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, harmonis, dan terpadu, meliputi:
  - a. Pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
  - b. Peningkatan keterkaitan dan keterpaduan pengembangan kawasan yang berbatasan dengan kabupaten/kota tetangga.

Strategi untuk pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya;
- b. Mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
- c. Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan beserta prasarana untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya; dan
- d. Mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kerugian akibat bencana.

Strategi untuk peningkatan keterkaitan dan keterpaduan pengembangan kawasan yang berbatasan dengan kabupaten/kota tetangga meliputi:

- a. Menjaga keterkaitan dan keterpaduan dalam mengembangkan kawasan perbatasan dengan kabupaten/ kota tetangga;
- b. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang berbatasan dengan kabupaten/kota tetangga; dan



- c. Meningkatkan koordinasi dalam mengembangkan kawasan yang berbatasan dengan kabupaten/kota tetangga
2. Kebijakan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten sebagai sentra pertanian, meliputi:
  - a. Perwujudan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan;
  - b. Pengembangan jaringan sumber daya air untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
  - c. Pengembangan kawasan pesisir dan laut sesuai potensi serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Strategi untuk perwujudan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. Mempertahankan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- b. Mengendalikan alih fungsi peruntukan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- c. Meningkatkan aksesibilitas, meningkatkan ketahanan pangan, penyediaan alat teknologi pra pasca panen, dan pengembangan pasca pertanian.

Strategi untuk pengembangan jaringan sumber daya air untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. Mengembangkan dan memelihara bendungan, waduk, dan situ untuk menjamin ketersediaan air baku bagi kegiatan pertanian; dan
- b. Mengembangkan dan memelihara jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi untuk menjamin penyaluran air bagi lahan pertanian.

Strategi untuk pengembangan kawasan pesisir dan laut sesuai potensi serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup meliputi:

- a. Mengembangkan sentra budidaya perikanan air payau, dan sentra budidaya garam; dan
- b. Mengembangkan sarana dan prasarana untuk menunjang pengembangan kegiatan budidaya di kawasan pesisir dan laut.





3. Kebijakan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten sebagai sentra industri, meliputi:

- a. Peningkatan fungsi kawasan industri untuk meningkatkan daya saing kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
- b. Pengembangan kawasan untuk kegiatan industri yang berdaya saing dan ramah lingkungan.

Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan industri untuk meningkatkan daya saing kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri; dan
- b. Meningkatkan penataan lokasi kegiatan industri di dalam kawasan industri.

Strategi untuk pengembangan kawasan untuk kegiatan industri yang berdaya saing dan ramah lingkungan meliputi:

- a. Mengembangkan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan industri; dan
- b. Mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri.

4. Kebijakan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten sebagai sentra pariwisata, meliputi:

- a. Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata;
- b. Pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pariwisata; dan
- c. Pengembangan keterpaduan antar pusat pariwisata.

Strategi untuk pengembangan kawasan peruntukan pariwisata meliputi:

- a. Merehabilitasi kawasan peruntukan pariwisata yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya;





- b. Mengembangkan wisata religi dan wisata bahari; dan
- c. Mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pariwisata.

Strategi untuk pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pariwisata, meliputi:

- a. Mengembangkan pusat jasa dan promosi pariwisata di kawasan perkotaan;
- b. Memantapkan akses prasarana dan sarana untuk meningkatkan keterkaitan antara kawasan perkotaan dan kawasan-kawasan pariwisata.

Strategi untuk pengembangan keterpaduan antar pusat pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dengan meningkatkan keterkaitan dengan PKN di Provinsi Jawa Barat sebagai pusat pariwisata dalam kesatuan tujuan pariwisata

- 5. Kebijakan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten sebagai pendukung PKN Cirebon, adalah peningkatan fungsi dan pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala nasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Strategi untuk peningkatan fungsi dan pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala nasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:

- a. Mengembangkan kawasan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala nasional; dan
- b. Mengembangkan dan memantapkan prasarana dan sarana untuk meningkatkan keterkaitan antar pusat perdagangan dan jasa yang berskala nasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

#### **6.4. Arah Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal**

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan kebijakan terkait dengan standar pelayanan minimal, bahwa sesuai ketentuan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, standar pelayanan minimal hanya diterapkan pada urusan pemerintahan konkuren yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. Sosial yang dalam pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Adapun Standar pelayanan minimal yang baru mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdapat 6 (enam) SPM Kabupaten, dengan rincian dan penerapannya dalam Tabel 6.3 sebagai berikut.

**Tabel 6.5.**

**Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam RPJMD Kabupaten  
Cirebon Tahun 2020-2024**

| No.                   | Jenis Pelayanan Dasar   | Program Perangkat Daerah<br>Terkait Pelaksanaan Jenis<br>Pelayanan Dasar | Indikator Kinerja Program  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung-<br>jawab |
|-----------------------|---|--|--|---|
| <b>SPM Pendidikan</b> |   |  |  |   |
| 1.                    | Pendidikan Anak Usia Dini (usia 5-6 tahun) berupa perlengkapan dasar peserta didik PAUD yang miskin               | Program Pendidikan Anak Usia Dini  | 1. Meningkatnya Capaian Prosentase APK PAUD  | Dinas Pendidikan                            |
|                       |   |  | 2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah PAUD                                      | Dinas Pendidikan                            |
|                       |   |  | 3. Meningkatnya prosentase capaian angka siswa yang melanjutkan sekolah SMP dan SMU    | Dinas Pendidikan                            |
|                       |   |  | 4. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah SD dan SMP                                | Dinas Pendidikan                            |
|                       |   | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan                | 1. Meningkatnya Prosentase guru TK, SD, SMP, memiliki kualifikasi S1/D4                | Dinas Pendidikan                            |
|                       |   |  | 2. Meningkatnya Prosentase guru yang memiliki sertifikasi                              | Dinas Pendidikan                            |
| 2.                    | Pendidikan Kesetaraan (Usia 7-18 tahun) berupa perlengkapan dasar peserta didik pendidikan kesetaraan yang miskin | Program Pendidikan Non Formal  | Meningkatnya angka kelulusan Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP, Paket C Setara SMA | Dinas Pendidikan                            |
| <b>SPM Kesehatan</b>  |   |  |  |   |
| 1.                    | Pelayanan kesehatan ibu hamil;  | Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan                           | Prosentase penanganan ibu hamil resiko tinggi  | Dinas Kesehatan                             |
| 2.                    | Pelayanan kesehatan ibu bersalin;   | Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan                           | Prosentase penanganan ibu hamil resiko tinggi  | Dinas Kesehatan                             |
| 3.                    | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;  | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita                      | Prosentase neo komplikasi yang ditangani   | Dinas Kesehatan                             |
| 4.                    | Pelayanan kesehatan balita;   | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita                      | Prosentase neo komplikasi yang ditangani   | Dinas Kesehatan                             |
| 5.                    | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;   | Program Upaya Kesehatan Masyarakat                                       | Indeks keluarga sehat (IKS)  | Dinas Kesehatan                             |
| 6.                    | Pelayanan kesehatan pada usia produktif;  | Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)                        | Persentase penderita hipertensi dan DM yang dilayani sesuai standar                    | Dinas Kesehatan                             |
| 7.                    | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;   | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut                      | Prosentase pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar                              | Dinas Kesehatan                             |
| 8.                    | Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;   | Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)                        | Persentase penderita hipertensi yang dilayani sesuai standar                           | Dinas Kesehatan                             |



| No.  | Jenis Pelayanan Dasar  | Program Perangkat Daerah<br>Terkait Pelaksanaan Jenis<br>Pelayanan Dasar                                    | Indikator Kinerja Program |   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung-<br>jawab |
|--|--|---|---------------------------|---|---|
| 9.   | Pelayanan kesehatan penderita DM;  | Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)   |                           | Persentase penderita DM yang dilayani sesuai standar                | Dinas Kesehatan                             |
| 10.  | Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;  | Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)   |                           | Persentase penderita hipertensi dan DM yang dilayani sesuai standar | Dinas Kesehatan                             |
| 11.  | Pelayanan kesehatan orang dengan TB;   | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular  | 1.                        | Penanggulangan KLB penyakit dan keracunan makanan 1 x 24 jam        | Dinas Kesehatan                             |
|  |  |   | 2.                        | Prosentase imunisasi dasar lengkap                                  |   |
| 12.  | Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV),   | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular  | 1.                        | Penanggulangan KLB penyakit dan keracunan makanan 1 x 24 jam        | Dinas Kesehatan                             |
|  |  |   | 2.                        | Prosentase imunisasi dasar lengkap                                  |   |
| SPM Bidang Sosial  |  |   |                           |   |   |
| 1.   | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti   | Program Pembinaan Anak Terlantar  |                           |   | Dinas Sosial                                |
| 2.   | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti   | Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) |                           |   | Dinas Sosial                                |
| 3.   | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti  | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial   |                           |   | Dinas Sosial                                |
| 4.   | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti   | Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma  |                           |   | Dinas Sosial                                |
| 5.   | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten  | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial   |                           |   | Dinas Sosial                                |
| SPM Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat |  |   |                           |   |   |
| 1.   | Pelayanan yang terkena Dampak Gangguan Trantibum akibat penegakan Hukum terhadap Penegakan Perda dan Perkada   | Program Pemeliharaan Ketentraman Ketertiban Umum Linmas dan pencegahan Tindak Kriminal                      |                           |   | Satpol Pamong Praja                         |
| 2.   | Pelayanan Informasi Rawan Bencana (paling sedikit memuat):<br>a. Penyusunan Kajian Risiko bencana<br>b. Komunikasi Informasi & Edukasi Rawan Bencana | Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam  |                           |   | Badan Penanggulangan Bencana Daerah         |
| 3.   | Pelayanan Pencegahan dan Kesiagsiagaan terhadap Bencana  | Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam  |                           |   | Badan Penanggulangan Bencana Daerah         |
| 4.   | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana   | Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam  |                           |   | Badan Penanggulangan Bencana Daerah         |
| 5.   | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran   | Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya   |                           |   | Dinas Pemadam Kebakaran                     |



| No.                                | Jenis Pelayanan Dasar   | Program Perangkat Daerah<br>Terkait Pelaksanaan Jenis<br>Pelayanan Dasar | Indikator Kinerja Program |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung-<br>jawab       |
|------------------------------------|---|--|---------------------------|--|---|
|                                    |   | Kebakaran  |                           |  |   |
| <b>SPM Bidang Pekerjaan Umum</b>   |   |  |                           |  |   |
| 1.                                 | Pemenuhan kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari   | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah        |                           | Prosentase penduduk yangh mendapatkan akses air minum yang aman                | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 2.                                 | Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik yang dapat diberikan melalui dua cara yang terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)   | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah        |                           |  |   |
| <b>SPM Bidang Perumahan Rakyat</b> |   |  |                           |  |   |
| 1.                                 | Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:<br>1) Pada saat masa pasca bencana;<br>2) Surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota; dan/atau<br>3) Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten   | Program Pengembangan Perumahan   |                           | Peningkatan ketersediaan dan kualitas perumahan dan permukiman bagi masyarakat | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 2.                                 | Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung:<br>1) Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha; dan/atau<br>2) Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukitan fungsi permukiman dan "tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya | Program Pengembangan Perumahan   |                           | Peningkatan ketersediaan dan kualitas perumahan dan permukiman bagi masyarakat | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan |

Sumber: Analisis Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, 2021

## 6.5 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan dasar bagi penentuan prioritas pembangunan daerah. prioritas pembangunan daerah menjadi pelaksana dari arah kebijakan yang telah ditetapkan, sesuai dengan rencana waktu pelaksanaan. Prioritas pembangunan daerah disajikan selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2020 sampai dengan



Tahun 2024, disajikan berdasarkan sasaran pembangunan jangka menengah. Dengan sifat Prioritas pembangunan daerah yang bersifat strategis, maka pelaksanaan dan penganggarannya diutamakan.

Penentuan Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Cirebon juga merupakan bentuk pelaksanaan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2019-2024.

Adapun Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon merupakan janji-janji kampanye yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan periode RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, dengan tahun awal perencanaan pada tahun 2020. Janji-janji kampanye ini bagian dari pendukung program untuk mencapai Visi-Misi, meliputi:

1. Membangun Wahana Budaya Sebagai Pusat Kesenian Dan Kebudayaan Masyarakat Kabupaten Cirebon, Meliputi:
  - a. Pembangunan Gedung Seni Budaya;
  - b. Revitalisasi Sanggar Seni Budaya;
  - c. Cirebon Tematik Festival;
  - d. Cagar Budaya Lestari.
2. Menjamin Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat Dalam Sistem Yang Terintegrasi (Kartu Pepek), Meliputi:
  - a. Kartu PEPEK Sejahtera;
  - b. BUMDES Berdaya.
3. Mendirikan Pusat Kegiatan Keagamaan Kabupaten Cirebon, Meliputi:
  - a. Pembangunan Islamic Center;
  - b. Imam Masjid, Mushola Dan Ponpes Bermartabat;
  - c. Integrasi Nilai – Nilai Agama Dalam Pendidikan Formal;
  - d. Cirebon Mengaji.
4. Membangun Pusat Masyarakat Ekonomi Digital Kabupaten Cirebon.
  - a. Desa Cerdas;
  - b. Infrastruktur Berbasis Keruangan.



5. Mendirikan Pusat-Pusat Bantuan Hukum Di Wilayah Kecamatan

- a. Cirebon Sadar Hukum;
- b. Siskamling Siaga.

Dengan demikian, prioritas pembangunan daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 meliputi:

1. Peningkatan akses, kualitas pendidikan dan partisipasi masyarakat untuk keberlanjutan pendidikan dasar;
2. Perluasan jaminan kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan baik bersifat preventif maupun kuratif berbasis masyarakat;
3. Penyediaan infrastruktur wilayah untuk peningkatan layanan dasar, kelancaran kegiatan ekonomi, daerah perbatasan dan rawan bencana;
4. Pengembangan ekonomi kerakyatan sektor pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata yang berbasis inovasi;
5. Penanganan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat miskin dan perlindungan jaminan sosial;
6. Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Penguatan Jiwa Kewirausahaan;
7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang guna mendukung sinergitas wilayah dan keberlanjutan pembangunan;
8. Reformasi Birokrasi Melalui Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Prima; dan
9. Peningkatan Kondusifitas Kehidupan Bermasyarakat Dalam Interaksi Sosial Dan Kehidupan Beragama.

Selain itu, terdapat 1 (satu) prioritas tambahan yaitu Penanganan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Dampak Pandemi Covid-19 di Kabupaten Cirebon, dengan fokus kebijakan pembangunan antara lain:

1. Reformasi Sistem Kesehatan Daerah dan Penanggulangan Bencana (Pandemi Covid-19);
2. Pengembangan Layanan Pendidikan Berbasis Daring (IT);
3. Peningkatan Pelayanan Publik dan Birokrasi Berbasis Elektronik (IT);
4. Rehabilitasi Sosial-Ekonomi Di Masa dan Pasca Pandemi Covid-19;
5. Penguatan Ekonomi Kerakyatan Yang Lebih Tahan Krisis; dan
6. Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah.

Selanjutnya, setiap prioritas pembangunan daerah Kabupaten Cirebon tersebut dijabarkan ke dalam strategi sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 6.6.**

**Hubungan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Strategi**

| No. | Prioritas Pembangunan Daerah  | Strategi  |
|-----|---|---|
| 1.  | Peningkatan Akses, Kualitas Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat untuk Keberlanjutan Pendidikan Dasar                              | Peningkatan aksesibilitas dan pemerataan kualitas layanan pendidikan berbasis TIK hingga ke pelosok       |
| 2.  | Perluasan Jaminan Kesehatan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Baik Bersifat Preventif maupun Kuratif Berbasis Masyarakat | Peningkatan mutu layanan dan akses kesehatan yang lebih terjangkau  |
| 3.  | Penyediaan Infrastruktur Wilayah Untuk Peningkatan Layanan Dasar, Kelancaran Kegiatan Ekonomi, Daerah Perbatasan Dan Rawan Bencana  | Peningkatan pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah                                    |
| 4.  | Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan Dan Pariwisata yang Berbasis Inovasi                        | Optimalisasi pemajuan kebudayaan  |
|     |   | Peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditi unggulan di sektor pertanian                          |
|     |   | Peningkatan daya saing produk-produk unggulan pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbasis smart economy |
|     |   | Peningkatan kualitas dan produktivitas pangan lokal   |
| 5.  | Penanganan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat miskin dan perlindungan jaminan sosial  | Percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan jangkauan pelaksanaan rehabilitasi sosial              |
| 6.  | Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Penguatan Jiwa Kewirausahaan                             | Peningkatan daya saing dan kesempatan kerja bagi masyarakat   |
| 7.  | Peningkatan Kualitas  | Peningkatan perlindungan dan pengelolaan  |





| No. | Prioritas Pembangunan Daerah  | Strategi  |
|-----|---|---|
|     | Lingkungan Hidup dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Guna Mendukung Sinergitas Wilayah dan Keberlanjutan Pembangunan | lingkungan hidup dan persampahan  |
| 8.  | Reformasi Birokrasi Melalui Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Prima  | Peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik   |
|     |   | Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah serta penguatan pengawasan                 |
|     |   | Penguatan tatakelola pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan berorientasi pada pencapaian <i>smart governance</i> |
|     |   | Peningkatan kualitas pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa  |
| 9.  | Peningkatan Kondusifitas Kehidupan Bermasyarakat Dalam Interaksi Sosial dan Kehidupan Beragama                      | Optimalisasi penegakan regulasi ketertiban umum dan Penanganan Konflik Sosial   |
|     |   | Peningkatan kualitas pelaksanaan dan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman                       |
|     |   | Peningkatan kualitas pelaksanaan dan koordinasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat                               |

Sumber: Hasil analisis Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, 2021

Prioritas pembangunan Kabupaten Cirebon selain untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, juga diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat. Prioritas pembangunan nasional atau sering disebut dengan prioritas nasional (PN) merupakan agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan jangka menengah nasional menjadi prioritas nasional tahunan yang menjadi benang merah antara pembangunan jangka menengah dan tahunan. Dari hasil persandingan prioritas nasional (PN), prioritas Provinsi Jawa Barat (PP) dan prioritas Kabupaten Cirebon (PD), maka terlihat seluruh prioritas pembangunan Cirebon yang termuat dalam RPJMD Tahun 2019-2024 memiliki kaitan dan saling mendukung dengan PN yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan PP yang termuat dalam perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.



**Tabel 6.7.**

**Persandingan Prioritas Nasional dan  
Prioritas Provinsi Jawa Barat dengan Prioritas Kabupaten Cirebon**

| <b>Agenda<br/>Pembangunan/Prioritas<br/>Nasional (PN)</b> |   | <b>Prioritas Pembangunan<br/>Provinsi Jawa Barat (PP)</b> |  | <b>Prioritas Pembangunan<br/>Kabupaten Cirebon (PK)</b> |   |
|---|---|---|--|---|---|
| PN1   | Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan | PP2   | Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi                    | PK4   | Pengembangan ekonomi kerakyatan sektor pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata yang berbasis inovasi                        |
|   |   | PP11  | Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata                              |   |   |
|   |   | PP3   | Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan                                  |   |   |
|   |   | PP10  | Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | PK3   | Penyediaan infrastruktur wilayah untuk peningkatan layanan dasar, kelancaran kegiatan ekonomi, daerah perbatasan dan rawan bencana  |
| PN2   | Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan      | PP4   | Reformasi Sistem Perlindungan Sosial   | PK5   | Penanganan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat miskin dan perlindungan jaminan sosial  |
|   |   | PP8   | Gerakan membangun desa   |   |   |
| PN3   | Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing             | PP5   | Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan                              | PK1   | Peningkatan akses, kualitas pendidikan dan partisipasi masyarakat untuk keberlanjutan pendidikan dasar                              |
|   |   | PP1   | Reformasi Sistem Kesehatan Daerah  | PK2   | Perluasan jaminan kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan baik bersifat preventif maupun kuratif berbasis masyarakat |
| PN4   | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan                                      | PP7   | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah                                     | PK8   | Reformasi Birokrasi Melalui Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Prima  |
|   |   | PP9   | Pendidikan agama dan tempat ibadah juara   | PK9   | Peningkatan Kondusifitas Kehidupan Bermasyarakat Dalam Interaksi Sosial Dan Kehidupan Beragama                                      |
| PN5   | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan               | PP10  | Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | PK3   | Penyediaan infrastruktur wilayah untuk peningkatan layanan dasar, kelancaran kegiatan   |



| Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional (PN) |  | Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat (PP) |  | Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon (PK) |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  | Pelayanan Dasar  |  |  |  | ekonomi, daerah perbatasan dan rawan bencana   |
| PN6  | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim | PP10   | Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | PK7  | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Guna Mendukung Sinergitas Wilayah Dan Keberlanjutan Pembangunan |
| PN7  | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik           | PP7  | Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah                                     | PK8  | Reformasi Birokrasi Melalui Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Prima   |

Sumber: Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Prioritas penting lainnya yaitu untuk mendukung kebijakan dan arahan pengembangan di setiap Wilayah Pengembangan (WP) yang tercantum dalam perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Adapun Arah Kebijakan Kewilayahan Provinsi Jawa Barat dengan wilayah pengembangan (WP) Ciayumajakuning/ yang mencakup salah satunya Kabupaten Cirebon disajikan pada tabel berikut ini:



**Tabel 6.8.**

**Arah Kebijakan Kewilayahan Provinsi Jawa Barat**

| No | WP/Tema WP  | Kab/Kota  | Kebijakan WP   | Arah Pengembangan  |
|----|---|---|--|--|
| 1. | Ciayumajakuning<br>Tema:<br>Mendorong pengembangan wilayah gerbang timur Jawa Barat | 1. Kabupaten Cirebon;<br>2. Kota Cirebon;<br>3. Kabupaten Indramayu;<br>4. Kabupaten Majalengka;<br>5. Kabupaten Kuningan; dan<br>6. sebagian wilayah di Kabupaten Sumedang | Sektor Unggulan: tanaman pangan dan hortikultura, agroforestri, agribisnis, agroindustri, perikanan, pertambangan dan pariwisata<br><br>Fokus Pengembangan:<br>a. Kota Cirebon, diarahkan sebagai kawasan perkotaan inti dari PKN dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan wilayah pengaruhnya, serta menjadi simpul utama pelayanan jasa dan perdagangan, di Daerah bagian timur, serta untuk kegiatan wisata budaya dan religi;<br>b. Kabupaten Cirebon, diarahkan sebagai bagian dari PKN dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi, dan mengarahkan kegiatan utama pada sektor bisnis kelautan, tanaman pangan dan hortikultura, pariwisata dan kegiatan pertambangan mineral; industri kreatif, pengembangan kota kreatif berbasis <i>folklore</i> (batik Trusmi);<br>c. Kabupaten Indramayu, diarahkan menjadi PKW dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi, serta diarahkan untuk kegiatan utama tanaman pangan dan hortikultura, bisnis perikanan dan kelautan, industri yang tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada lahan pangan, pertambangan | 1. Melengkapi fasilitas pendukung PKN, PKW dan PKL<br>PKN:<br>Cirebon<br>PKW:<br>- Indramayu<br>- Kadipaten<br><br>PKL:<br>- Kab.Cirebon: Sumber, Arjawinangun, Lemahabang, Ciledug, Palimanan<br><br>- Kab.Indramayu: Jatibarang, Losarang, Gantar-Terisi, Tukdana, Karangampel, Haurgeulis<br><br>- Kab.Majalengka: Majalengka, Kertajati, Talaga, Rajagaluh<br><br>- Kab.Kuningan: Kuningan, Cilimus, Luragung, Ciawigebang, Mandirancan<br><br>- Kab.Sumedang: Sumedang, Conggeang-Tomo, Wado<br><br>2. Mengembangkan infrastruktur strategis<br>3. Pola ruang PKN dalam |



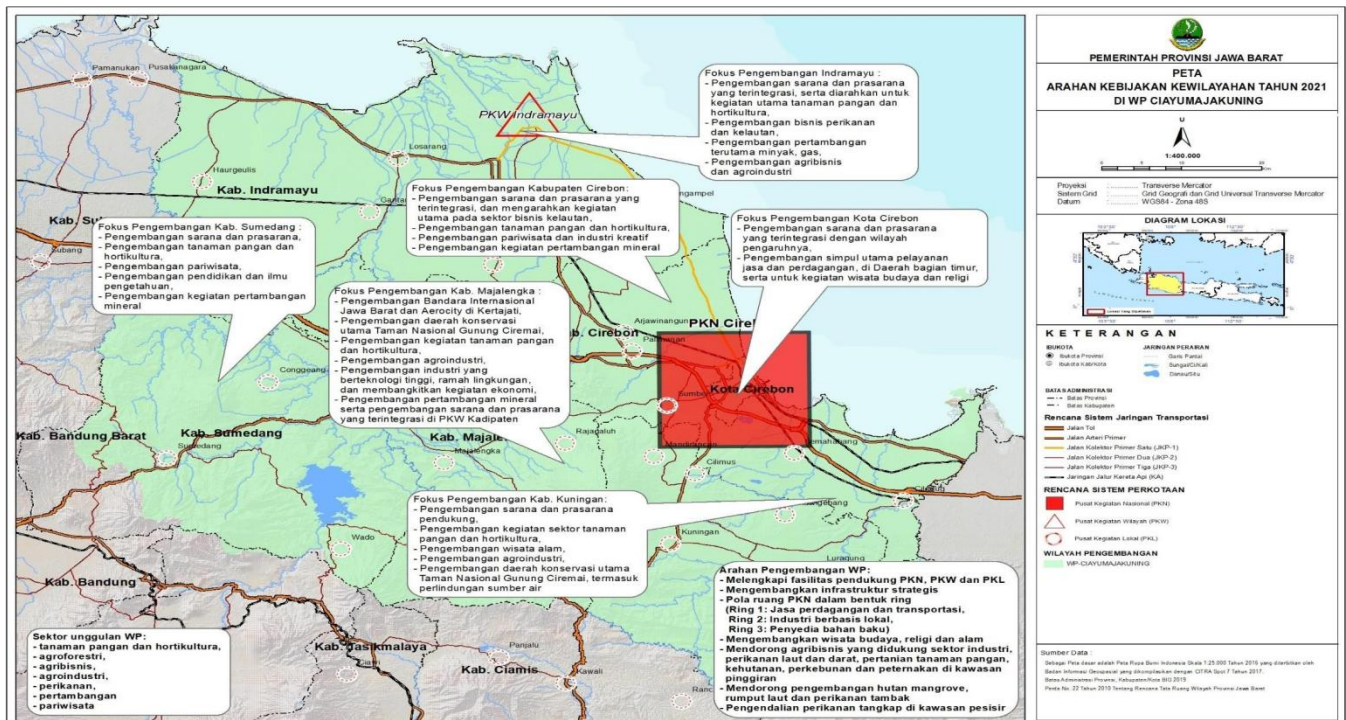
| No | WP/Tema WP | Kab/Kota | Kebijakan WP  | Arah Pengembangan   |
|----|------------|----------|---|---|
|    |            |          | <p>terutama minyak, gas, agribisnis dan agroindustri;</p> <p>d. Kabupaten Majalengka, diarahkan menjadi lokasi Bandara Internasional Jawa Barat dan <i>Aerocity</i> di Kertajati, daerah konservasi utama Taman Nasional Gunung Ciremai, serta untuk kegiatan tanaman pangan dan hortikultura, agroindustri, dan industri yang berteknologi tinggi, ramah lingkungan, dan membangkitkan kegiatan ekonomi, pertambangan mineral serta pengembangan sarana dan prasarana yang terintegrasi di PKW Kadipaten;</p> <p>e. Kabupaten Kuningan, diarahkan sebagai PKL, dengan sarana dan prasarana pendukung, serta diarahkan untuk menampung kegiatan sektor tanaman pangan dan hortikultura, wisata alam, agroindustri, dan daerah konservasi utama Taman Nasional Gunung Ciremai, termasuk perlindungan sumber air; dan</p> <p>f. Kabupaten Sumedang, diarahkan sebagai PKL, dengan sarana dan prasarana, untuk kegiatan utama tanaman pangan dan hortikultura, agroindustri, pariwisata, pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta kegiatan pertambangan mineral,</p> | <p>bentuk ring (Ring 1: Jasa perdagangan dan transportasi, Ring 2: Industri berbasis lokal, Ring 3: Penyedia bahan baku)</p> <p>4. Mengembangkan wisata budaya, religi dan alam</p> <p>5. Mendorong agribisnis yang didukung sektor industri, perikanan laut dan darat, pertanian tanaman pangan, kehutanan, perkebunan dan peternakan di kawasan pinggiran</p> <p>6. Mendorong pengembangan hutan mangrove, rumput laut dan perikanan tambak</p> <p>7. Pengendalian perikanan tangkap di kawasan pesisir</p> <p>8. Pengembangan kerja sama wilayah</p> <p>9. Peningkatan kesiapsiagaan bencana</p> |

Sumber: Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023



Gambar 6.2

### Peta Arah Kebijakan Kewilayahan WP Ciayumajakuning



Sumber: Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2013

## 6.6. Program Pembangunan Daerah

Program Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 merupakan pelaksanaan dari sasaran pembangunan jangka menengah yang sekaligus mencerminkan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. Program pembangunan daerah disajikan berdasarkan sasaran untuk masing-masing misi RPJMD.

Dalam perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 juga tidak terlepas dari rencana dan pelaksanaan proyek strategis nasional dan proyek strategis Provinsi Jawa Barat Jawa Barat yang akan dilaksanakan di Kabupaten Cirebon, antara lain tercantum dalam tabel di bawah.



**Tabel 6.9.**

**Kolaborasi Pendanaan Proyek Strategis Tahun 2018-2023**

| No. | Kegiatan  | Sumber Anggaran |      |      |        | Target             |
|-----|---|-----------------|------|------|--------|--------------------|
|     |   | APBN            | APBD | KPBU | Swasta |                    |
| 1.1 | Penyediaan Air Minum                                  |                 |      |      |        |                    |
| 1   | SPAM Regional Cirebon Raya (Jatigede)/                | √               | √    | √    |        | 2023               |
| 1.2 | Bendungan dan Jaringan Irigasi                        |                 |      |      |        |                    |
|     | Bendungan Kuningan                                    | √               | √    |      |        | 2021               |
| II  | Infrastruktur Daerah                                  |                 |      |      |        |                    |
| 2.1 | Jalan Lingkar Cirebon (22,3 km)                       | √               | √    |      |        | 2023               |
| 2.2 | Reaktivasi jalur kereta api Cirebon-Kadipaten         | √               | √    |      |        | 2022               |
| 2.3 | Pengembangan Pelabuhan Cirebon                        |                 |      | √    | √      | Jangka pendek 2020 |
| 2.4 | Pembangunan Alun-alun                                 |                 | √    |      |        | 2020-2022          |
|     | Pengadaan peralatan Command Center                    |                 | √    |      |        | 2019               |
|     | Pembangunan/Revitalisasi pasar kue weru               |                 | √    |      |        | 2019               |
| 2.5 | Pembangunan Creative centre                           |                 | √    |      |        | 2020-2022          |
| 2.6 | Pembangunan pusat budaya                              |                 | √    |      |        | 2020-2022          |
| 2.7 | Pembangunan TPPAS Regional Cirebon Raya               | √               | √    | √    |        | 2022               |
|     | PPI Gebangmekar                                       | √               | √    |      | √      | 2022               |
| 2.8 | Pengembangan destinasi wisata makam Sunan Gunung Jati |                 | √    |      |        | 2020               |
| 2.9 | Pengembangan destinasi Gebang Mekar                   |                 | √    |      |        | 2020               |

Sumber: Diolah oleh Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, 2021

Selain itu, berdasarkan hasil koordinasi serta masukan dari perangkat daerah di Kabupaten Cirebon, terdapat beberapa program/kegiatan strategis Tahun 2022 dan 2024 pada masing-masing perangkat daerah tersebut, antara lain sebagai berikut:

**Tabel 6.10.**

**Program/Kegiatan Strategis  
Perangkat Daerah Tahun 2022-2024**

| No | Perangkat Daerah | Program/Kegiatan Strategis  |
|----|------------------|---|
| 1. | Dinas Pendidikan | a. Pembangunan Infrastruktur SD, SMP berdasarkan Basis Data (database) yang telah terintegrasi dan terkoordinasi lintas sektoral (Disdik, DPKPP, PUPR); Memvalidasi kesahihan data/kondisi riil<br>b. Peningkatan kompetensi SDM (ABK)<br>1) Guru |



| No | Perangkat Daerah  | Program/Kegiatan Strategis   |
|----|---|--|
|    |   | 2) Non Pendidik<br>c. Merger SD<br>d. Pengaturan Rombel SMP  |
| 2. | Dinas Kesehatan   | a. BLUD 60 FKTP (mem-BLUD-kan puskesmas)<br>b. Penambahan/mendorong pembangunan Rumah Sakit Type-C   |
| 3. | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | a. Peningkatan ketahanan keluarga Keluarga Ber kualitas<br>b. Perlindungan Ibu & Anak (peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga)   |
| 4. | Dinas Pemuda dan Olahraga   | a. Mendorong lahirnya Pemuda Pelopor, Inovator<br>b. Mengembangkan Kalender Olah Raga (untuk mendorong partisipasi masyarakat dan prestasi di bidang olah raga)  |
| 5. | Dinas Perhubungan   | a. Relokasi dan revitalisasi Gedung PKB (Penguji Kendaraan Bermotor) untuk terminal wisata (batik trusmi)<br>b. Pengembangan E-Parkir<br>c. Pengembangan Kantong Parkir (menyiapkan lahan parkir di luar bahu jalan di PKL-PKL yang sudah kredit, termasuk memanfaatkan lahan-lahan pemda yang belum termanfaatkan)<br>d. Pengadaan sarana-prasarana Keselamatan Lalu Lintas   |
| 6. | Dinas Pertanian   | a. Penyediaan Bibit Unggul Bersertifikat<br>b. Asuransi Petani LP2B (Insentif)<br>c. Jalan Usaha Tani (Inventarisasi)<br>d. Irigasi Tersier (melalui bantuan keuangan desa, perbatasan indramayu (20k ha), dll)<br>e. Revitalisasi Mangga Gedong Gincu (salah satu komoditi unggulan yang akan diintervensi kementerian – upland nya; peningkatan produktivitas dan nilai tambah)<br>f. Pengembangan demplot (memberikan contoh konkrit petani dg penerapan teknologi dan inovasi beberapa komoditi sektor pertanian)  |
| 7. | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan  | a. Pembangunan balai benih ikan dan penguatan jejaring unit pembenihan rakyat (UPR)<br>b. Optimalisasi TPI   |
| 8. | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian   | a. Optimalisasi dan revitalisasi Pasar (tradisional) dengan target ber-SNI dan terintegrasi dengan Perda E-Retribusi, E-Money<br>b. Pembangunan Shelter PKL<br>c. Pembangunan Kawasan Industri Peruntukan Khusus (Lingkungan Industri Kecil disesuaikan dengan RPIK)<br>d. Penguatan usaha berorientasi ekspor (perluasan dengan pemasaran virtual atau market digital) dan temu bisnis untuk mendorong perdagangan antar daerah<br>e. Penguatan produksi komoditi substitusi impor<br>f. Perbaikan tata niaga daerah (pengendalian kebutuhan pokok masyarakat/barang strategis dan toko modern) |
| 9. | Dinas Kebudayaan  | a. Pengembangan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan  |





| No  | Perangkat Daerah                                       | Program/Kegiatan Strategis  |
|-----|--|---|
|     | Dan Pariwisata   | <p>dan Pariwisata</p> <p>b. Pengembangan Batu Lawang (Destinasi) Final (ada satu situl geologi-karst, ecowisata, dan situs sunan bonang. MoU dengan Perhutani: bangun akses jalan)</p> <p>c. Pengembangan Kalender Wisata (Even), termasuk wisata budaya (penguatan promosi wisata bulanan yang menjadi agenda rutin dg kesepakatan mengikat para pelaku wisata)</p> <p>d. Pengembangan Kawasan Batik Trusmi (pengembangan terminal wisata, akses jalan perlu penataan Kawasan, termasuk hub)</p> <p>e. Wisata Kuliner Gebang (Finishing RIPARDA Kab.Cirebon)</p> <p>f. Pengembangan Heritage tourism (memanfaatkan pabrik-pabrik tebu yang berhenti operasi)</p> |
| 10. | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah               | <p>a. Pengembangan Market Place</p> <p>b. BDS (Business Development Centre)</p> <p>c. Gallery UMKM</p> <p>d. Pembentukan, revitalisasi, dan pembinaan KSU (koperasi serba usaha)</p> <p>e. Revitalisasi Koperasi (menjadikan koperasi sebagai soko guru ekonomi Kabupaten Cirebon)</p>  |
| 11. | Dinas Sosial   | <p>a. Perbaikan data DTKS</p> <p>b. Penguatan SLRT, Puskesmas)</p> <p>Penguatan SLRT (penguatan system layanannya, semacam pelayanan publik orang miskin)</p>   |
| 12. | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | <p>a. Regulasi Kemudahan Berusaha (SOP)</p> <p>b. MPP (Mall Pelayanan Publik); integrasi dan sentralisasi seluruh pelayanan public</p> <p>c. Optimalisasi Gugus Tugas Percepatan Investasi Daerah</p>   |
| 13. | Dinas Ketenagakerjaan                                  | <p>a. Optimalisasi BLK – Wirausaha; Pelatihan calon tenaga kerja berbasis kompetensi</p> <p>b. Pemetaan dan sinkronisasi kebutuhan tenaga kerja baik dengan dunia usaha, dunia industry, maupun terhadap potensi ekonomi local dan daerah</p> <p>c. LOA (Letter of Agreement) dengan perusahaan (magang) Pengangguran &amp; Kemiskinan; upaya penampungan tenaga magang</p> <p>d. PMI (Pekerja Migran Indonesia); Penguatan dan pengembangan Desa Migran mulai dari pra-penempatan hingga Purna-kontrak</p> <p>e. Penguatan implementasi Perda penanaman modal yang memuat kebijakan rekrutmen tenaga kerja local bagi investor di daerah</p>                     |
| 14. | Dinas Lingkungan Hidup                                 | <p>a. Sampah (membangunan TPA baru dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat)</p> <p>b. Limbah Batu Alam (Relokasi industri batu alam, kita sudah ada tanah kurleb 4ha; berawal dari permasalahan limbah batu alam.. lalu dilakukan relokasi pelaku usaha yang berada di sepadan jalan; bagi pelaku yang sudah memiliki asset. Bikin IPAL sendiri)</p>   |



| No  | Perangkat Daerah                                   | Program/Kegiatan Strategis   |
|-----|--|--|
| 15. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang            | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jalan Lingkar Gebang (kaitan utk akses kawasan wisata terpadu, akses menuju RS Wong Tjilik)</li> <li>b. Pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Gebang</li> <li>c. Pelebaran jalan untuk meningkatkan Daya Tampung Daya Dukung Kawasan Industri Timur (daya Tarik investasi)</li> <li>d. Penanganan Banjir (di daerah rawan banjir di timur, barat, utara: normalisasi sungai, bangun embung, perbaikan drainase, pembangunan sodetan)</li> <li>e. Pembangunan Jalan/Jembatan antar Kecamatan (di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, industri, perdagangan, wisata)</li> <li>f. Jalan Lingkar Sendang-Pejambon-Watu Belah (mengurangi beban jalan existing)</li> <li>g. Jalan lingkar selatan-Babakan-Talun</li> </ul> |
| 16. | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan Rutilahu (agar ada irisan dengan DTKS untuk penanganan kemiskinan)</li> <li>b. Penataan Kawasan Kumuh (Stunting) (khususnya untuk mendukung perbaikan ketersediaan sanitasi dan air bersih)</li> </ul>   |
| 17. | Dinas Arsip & Perpustakaan                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Digitalisasi Arsip</li> <li>b. Pengumpulan Artepak Kebudayaan</li> <li>c. Peningkatan Literasi Generasi Milenial</li> </ul>  |
| 18. | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil            | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan One Day Service (Satu Hari Selesai) (desentralisasi dan penguatan layanan dukcapil di kecamatan ADM (anjungan dukcapil mandiri)</li> <li>b. Penguatan Kapasitas Bandwith Untuk KTP</li> </ul>   |
| 19. | Dinas Komunikasi dan Informatika                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan Smart City (Kota Cerdas)— percepatan implementasi SPBE (internal dan eksternal)</li> <li>b. Pengembangan Smart Village (Desa Cerdas)</li> <li>c. Pengembangan Digital Signature (Tanda Tangan Digital) dalam administrasi pemerintahan</li> <li>d. Agen Digital Marketing (supporting BDS)</li> </ul>   |
| 20. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa             | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan Desa Mandiri (ToT aparatur kecamatan untuk mengembangkan kapasitas pemerintahan desa agar lebih mandiri)</li> <li>b. Bumdes Maju (pengembangan bidang usaha dan tata Kelola BUMDes)</li> </ul>  |

Sumber: Diolah oleh Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, 2021

Selanjutnya, untuk melihat keterkaitan antara program prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon melalui arah kebijakan dalam menjawab isu-isu strategis Pembangunan Daerah akan disampaikan sebagaimana yang terlihat di tabel berikut ini,



**Tabel 6.11.**

**Matriks Keterkaitan Antara Isu Strategis dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024**

| ISU STRATEGIS  | SASARAN  | STRATEGI   | ARAH KEBIJAKAN  | PROGRAM PRIORITAS                                |
|--|--|--|---|--|
| (1)  | (2)  | (3)  | (4)   | (5)  |
| <b>3. Kualitas Sumber Daya Manusia dan nilai-nilai kehidupan masyarakat;</b> | Sasaran 1:<br>Meningkatnya jatidiri dan nilai-nilai luhur masyarakat Cirebon | 1. Optimalisasi pemajuan kebudayaan  | Peningkatan efektivitas kerjasama dalam perlindungan, pengembangan dan pembinaan kebudayaan asli Cirebon          | Program Pengembangan Kebudayaan                  |
|  |  |  | Percepatan pembentukan rintisan desa/kampung budaya dan dukungan akses infrastruktur dan sarana pendukung lainnya | Program Pengembangan Kesenian Tradisional        |
|  |  |  |   | Program Pembinaan Sejarah                        |
|  |  |  |   | Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya |
|  |  |  |   | Program Pengelolaan Permuseuman                  |
|  | Sasaran 2:<br>Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat                     | 2. Peningkatan aksesibilitas dan pemerataan kualitas layanan pendidikan berbasis TIK hingga ke pelosok | Perluasan jaminan akses dan infrastruktur pendidikan hingga ke pelosok  | Program Pengelolaan Pendidikan                   |



| ISU STRATEGIS  | SASARAN   | STRATEGI  | ARAH KEBIJAKAN   | PROGRAM PRIORITAS   |
|--|---|---|--|---|
| (1)  | (2)   | (3)   | (4)  | (5)   |
|  |   |   | Peningkatan ketersediaan dan kualitas SDM bidang pendidikan, termasuk kemampuan mengajar secara online                     |   |
|  |   |   | Peningkatan kualitas penyelenggaraan dan manajemen pendidikan berbasis online  |   |
|  |   |   |  |   |
| <b>8. Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya; dan</b> | Sasaran 3:<br>Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | 3. Peningkatan mutu layanan dan akses kesehatan yang lebih terjangkau | Pelayanan Jaminan Kesehatan bagia masyarakat tidak mampu (Berintegrasikan dengan Kartu PEPEK)                              | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
|  |   |   | Peningkatan kesadaran Masyarakat akan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); peningkatan fungsi UKBM (Posyandu, Posbindu) |   |
|  |   |   | Peningkatan cakupan SPM bidang kesehatan melalui berbagi sumber biaya  |   |
|  |   |   | Peningkatan kualitas dan kelas layanan puskesmas/RSUD  |   |
|  |   |   |  |   |



| ISU STRATEGIS                          | SASARAN  | STRATEGI  | ARAH KEBIJAKAN   | PROGRAM PRIORITAS                                      |
|--|--|---|--|--|
| (1)                                    | (2)  | (3)   | (4)  | (5)  |
| <b>2. Pengangguran dan Kemiskinan;</b> | Sasaran 4: Menurunnya jumlah kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial | 4. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan jangkauan pelaksanaan rehabilitasi sosial | Peningkatan kualitas ketersediaan jaminan sosial dalam berbagai bidang             | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial                |
|  |  |   | Peningkatan pengerahan sumber daya yang dapat mengembangkan potensi ekonomi rakyat | Program Rehabilitasi Sosial                            |
|  |  |   | Pembukaan lapangan kerja yang disertai pendidikan dan pelatihan                    |  |
|  |  |   | Peningkatan kualitas sumber daya layanan untuk PSKS                                |  |
|  |  |   | Peningkatan dan perluasan akses pelayanan dasar bagi kelompok rentan               |  |
|  |  |   |  |  |
|  | Sasaran 5: Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja                                | 5. Peningkatan daya saing dan kesempatan kerja bagi masyarakat                                  | Peningkatan kapasitas sumber daya layanan dan pengelola Balai Latihan Kerja        | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja |
|  |  |   | Peningkatan kompetensi SDM yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja         | Program Penempatan Tenaga Kerja                        |
|  |  |   | Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja yang terkena dampak pandemi Covid-19         | Program Hubungan Industrial                            |



| ISU STRATEGIS  | SASARAN   | STRATEGI  | ARAH KEBIJAKAN   | PROGRAM PRIORITAS  |
|--|---|---|--|--|
| (1)  | (2)   | (3)   | (4)  | (5)  |
|  |   |   | Peningkatan program pemulihan ekonomi untuk dunia usaha dan UMKM baik melalui bantuan permodalan, insentif pelaku usaha hingga bantuan sosial bagi pengusaha kecil terdampak |  |
|  |   |   |  |  |
| <b>6. Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat;</b> | Sasaran 6: Meningkatnya penyelesaian pergesekan (friksi) antar dan internal umat beragama | 6. Optimalisasi penegakan regulasi ketertiban umum dan Penanganan Konflik Sosial    | Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat   | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial |
|  |   |   | Peningkatan fungsi aparat keamanan dan perlindungan masyarakat   |  |
|  |   |   | Peningkatan penegakkan perda   |  |
|  |   |   |  |  |
| <b>4. Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi;</b>              | Sasaran 7: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan                               | 7. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditi unggulan di sektor pertanian | Integrasi proses hulu-hilir industri pengolahan khususnya sektor pertanian   | Program Penyuluhan Pertanian   |



| ISU STRATEGIS | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN  | PROGRAM PRIORITAS                                       |
|---------------|---------|----------|---|---|
| (1)           | (2)     | (3)      | (4)   | (5)   |
|               |         |          | Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian secara berkelanjutan   | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian |
|               |         |          | Peningkatan fasilitas cakupan layanan penyediaan sarana dan prasarana pertanian berbasis kemandirian  | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian    |
|               |         |          | Peningkatan Cakupan Binaan Kelompok kelautan dan perikanan dalam rangka diversifikasi produk-produk perikanan menuju agroindustri perikanan | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                   |
|               |         |          | Peningkatan daya dukung lingkungan dalam upaya Peningkatan Produksi Perikanan   | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                  |
|               |         |          | Peningkatan ilmu dan teknologi perikanan  | Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan    |
|               |         |          |   | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan        |



| ISU STRATEGIS | SASARAN | STRATEGI   | ARAH KEBIJAKAN   | PROGRAM PRIORITAS   |
|---------------|---------|--|--|---|
| (1)           | (2)     | (3)  | (4)  | (5)   |
|               |         | 8. Peningkatan daya saing produk-produk unggulan pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbasis smart economy | Peningkatan skala ekonomi dan kemitraan strategis dengan sektor swasta untuk pengembangan ekonomi lokal menuju peningkatan ekspor                              | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan                   |
|               |         |  | Meningkatkan kemitraan strategis dengan sektor swasta (public private partnership) untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal                                  | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri                        |
|               |         |  | Percepatan pembentukan rintisan desa/kampung budaya dan dukungan akses infrastruktur dan sarana pendukung lainnya  | Program Pengembangan Ekspor   |
|               |         |  | Peningkatan sinergitas pembangunan kepariwisataan khususnya koordinasi, kerjasama dan promosi (paket dan event) wisata berbasis budaya (unggulan) asli Cirebon | Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri                |
|               |         |  |  | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting |





| ISU STRATEGIS | SASARAN  | STRATEGI   | ARAH KEBIJAKAN  | PROGRAM PRIORITAS  |
|---------------|--|--|---|--|
| (1)           | (2)  | (3)  | (4)   | (5)  |
|               |  |  |   | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)                           |
|               |  |  |   | Program Pengembangan Umkm  |
|               |  |  |   | Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian   |
|               |  |  |   | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam   |
|               |  |  |   | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata  |
|               |  |  |   | Program Pemasaran Pariwisata   |
|               |  |  |   | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual |
|               |  |  |   | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif                                    |
|               | Sasaran 8:<br>Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat | 9. Peningkatan kualitas dan produktivitas pangan lokal | Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan masyarakat | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan                    |



| ISU STRATEGIS  | SASARAN  | STRATEGI   | ARAH KEBIJAKAN  | PROGRAM PRIORITAS   |
|--|--|--|---|---|
| (1)  | (2)  | (3)  | (4)   | (5)   |
|  |  |  | Peningkatan distribusi dan stabilitas harga pangan yang terjangkau  | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat |
|  |  |  | Peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui Pola Pangan Harapan (PPH)                             | Program Penanganan Kerawanan Pangan                               |
|  |  |  |   |   |
| <b>7. Penyediaan dan Kemantapan Infrastruktur Wilayah;</b> | Sasaran 9: Meningkatkan penyediaan layanan infrastruktur wilayah | 10. Peningkatan pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah | Peningkatan pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah  | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang                            |
|  |  |  | Peningkatan kualitas proyek infrastruktur serta perencanaan dan pemrograman jalan dan jembatan yang tepat sasaran | Program Penyelenggaraan Jalan                                     |
|  |  |  | Peningkatan kualitas layanan pengembangan air bersih, limbah domestik dan perumahan layak huni                    | Program Pengembangan Perumahan                                    |
|  |  |  | Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)  | Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh                    |
|  |  |  | Pengembangan dan pengelolaan sistem pengairan dan irigasi yang berkualitas  | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)                         |



| ISU STRATEGIS   | SASARAN  | STRATEGI  | ARAH KEBIJAKAN   | PROGRAM PRIORITAS   |
|---|--|---|--|---|
| (1)   | (2)  | (3)   | (4)  | (5)   |
|   |  |   |  | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)       |
|   |  |   |  |   |
| <b>9. Komitmen Penyelenggaraan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.</b> | Sasaran 10:<br>Meningkatnya kualitas lingkungan hidup                          | 11. Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan | Peningkatan kualitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan            | Program Pengelolaan Persampahan                                     |
|   |  |   | Peningkatan produksi, pemulihan dan pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup |
|   |  |   |  |   |
| <b>1. Reformasi birokrasi dan Pelayanan Publik;</b>                                     | Sasaran 11:<br>Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik | 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik       | Penguatan dan pembaharuan kebijakan pelayanan publik                             | Program Pencatatan Sipil  |
|   |  |   | Peningkatan pelayanan publik yang integratif                                     | Program Pendaftaran Penduduk  |
|   |  |   | Peningkatan layanan pendaftaran, perekaman, dan penerbitan E-KTP                 | Program Pengelolaan Arsip   |



| ISU STRATEGIS | SASARAN   | STRATEGI   | ARAH KEBIJAKAN   | PROGRAM PRIORITAS   |
|---------------|---|--|--|---|
| (1)           | (2)   | (3)  | (4)  | (5)   |
|               |   |  | Peningkatan kualitas sumber daya layanan administrasi secara terpadu   |   |
|               | Sasaran 12:<br>Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih | 13. Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah serta penguatan pengawasan          | Penguatan kebijakan penerapan SAKIP  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
|               |   |  | Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang terintegrasi (e-performance based budgeting) | Program Pengelolaan Keuangan Daerah                         |
|               |   |  | Perluasan pembangunan zona integritas pada sektor-sektor strategis   | Program Penyelenggaraan Pengawasan                          |
|               |   |  | Peningkatan kinerja, peran, kapasitas, dan kapabilitas APIP/P2UPD  |   |
|               | Sasaran 13:<br>Meningkatnya maturitas pemerintahan berbasis elektronik                    | 14. Penguatan tatakelola pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan berorientasi pada pencapaian smart governance | Peningkatan dukungan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis elektronik                              | Program Aplikasi Informatika                                |



| ISU STRATEGIS  | SASARAN   | STRATEGI  | ARAH KEBIJAKAN   | PROGRAM PRIORITAS                                    |
|--|---|---|--|--|
| (1)  | (2)   | (3)   | (4)  | (5)  |
|  |   |   | Peningkatan kualitas jaringan dan pengelolaan data yang handal dan aman  |  |
|  |   |   |  |  |
| <b>5. Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan;</b>          | Sasaran 14:<br>Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa | 15. Peningkatan kualitas pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa  | Pembinaan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah     | Program Administrasi Pemerintahan Desa               |
|  |   |   | Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pelaku kawasan perdesaan dan peningkatan infrastruktur kawasan perdesaan |  |
|  |   |   | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa   |  |
|  |   |   |  |  |
| <b>6. Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat;</b> | Sasaran 15:<br>Meningkatnya ketentraman dan ketertiban                    | 16. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat | Peningkatan koordinasi dan penanganan gangguan ketentraman   | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum |
|  | Sasaran 16:<br>Menurunnya resiko bencana                                  |   | Peningkatan kapasitas SDM dan jabatan fungsional Satuan Polisi Pamong Praja                                    | Program Penanggulangan Bencana                       |



| ISU STRATEGIS | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN  | PROGRAM PRIORITAS   |
|---------------|---------|----------|---|---|
| (1)           | (2)     | (3)      | (4)   | (5)   |
|               |         |          | Peningkatan kualitas pelayanan, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran |
|               |         |          | Peningkatan kapasitas pengelolaan resiko dan penataan penanggulangan bencana  |   |

Sumber: Hasil analisis Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, 2021

sebagai langkah konkret dalam mencapai tujuan pembangunan, maka sasaran, strategi dan arah kebijakan wajib dijabarkan ke dalam program-program yang langsung ditujukan untuk mencapai sasaran RPJMD sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai dengan skenario penetapan target indikator dan target pagu indikatif yang realistis. Program-program tersebut dinamakan program prioritas yang langsung ditujukan untuk mencapai sasaran RPJMD atau sasaran kepala daerah. Secara rinci, penjelasan tersebut dijabarkan pada Tabel di bawah ini,



**Tabel 6.12.**

**Program Prioritas Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024  
(dalam juta rupiah)**

| Kode  | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah               | Indikator Kinerja Program (outcome)                                 | Kondisi Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |    |      |               |      |                |      |                |      |                |               |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket                      |
|---|--|---|--------------|--|----|------|---------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|---------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|
|   |  |   |              | 2020   |    | 2021 |               | 2022 |                | 2023 |                | 2024 |                | Kondisi Akhir |                |                                   |                          |
|   |  |   |              | K  | Rp | K    | Rp            | K    | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K             | Rp             |                                   |                          |
| 1   | 2  | 3   | 4            | 5  | 6  | 7    | 8             | 9    | 10             | 11   | 12             | 13   | 14             | 15            | 16             | 17                                | 18                       |
|   | MISI : 1   |   |              |  |    |      |               |      |                |      |                |      |                |               |                |                                   |                          |
| Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan Melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat |  |   |              |  |    |      |               |      |                |      |                |      |                |               |                |                                   |                          |
|   | Tujuan : 1   |   |              |  |    |      |               |      |                |      |                |      |                |               |                |                                   |                          |
| 1.1.  | Meningkatkan ketahanan budaya masyarakat Cirebon               | Persentase penambahan budaya daerah yang dilestarikan               | 81 Persen    | 82   |    | 83   |               | 84   |                | 85   |                | 86   |                | 86            |                |                                   |                          |
|   | Sasaran 1  |   |              |  |    |      |               |      |                |      |                |      |                |               |                |                                   |                          |
| 1.1.1.  | Meningkatnya jatidiri dan nilai-nilai luhur masyarakat Cirebon | Jumlah kelompok / komunitas kebudayaan yang aktif                   | 255 Kelompok | 232  |    | 257  |               | 258  |                | 259  |                | 260  |                | 260           |                |                                   |                          |
| 2.22.02.  | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                | terlestarikannya cagar budaya                                       | 0            | 0  | 0  | 1    | 735,000 ,000  | 1    | 4,706,965,000  | 1    | 5,101,662 ,000 | 1    | 5,644,828,000  | 1             | 16,188,455,000 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA   | Program Prioritas Daerah |
| 2.22.03.  | PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL                      | Prosentase pertumbuhan jumlah sanggar kesenian tradisional          | 0            | 0  | 0  | 0.85 | 75,000,000    | 0.85 | 480,000 ,000   | 0.85 | 495,000,000    | 0.85 | 510,000 ,000   | 0.85          | 1,560,000,000  | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA   |                          |
| 2.22.04.  | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH                                      | Prosentase masyarakat (peserta seminar) yang memahami sejarah lokal | 0            | 0  | 0  | 0    | 0             | 100  | 125,000 ,000   | 100  | 125,000,000    | 100  | 125,000 ,000   | 100           | 375,000 ,000   | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA   |                          |
| 2.22.05.  | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA               | Penambahan penetapan cagar budaya                                   | 0            | 0  | 0  | 0    | 0             | 1    | 575,000 ,000   | 1    | 575,000,000    | 1    | 575,000 ,000   | 3             | 1,725,000,000  | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA   |                          |
| 2.22.06.  | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN                                | Bertambahnya koleksi museum   | 0            | 0  | 0  | 1    | 5,055,000,000 | 4    | 39,755,000,000 | 4    | 9,760,000 ,000 | 4    | 9,760,000 ,000 | 13            | 64,330,000,000 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA   |                          |



| Kode  | Misi/Tujuan/Sasaran<br>/ Program<br>Pembangunan<br>Daerah | Indikator Kinerja<br>Program (outcome)   | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |               |                   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab | Ket                      |
|---|---|--|-----------------|--|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|---------------|-------------------|--|--------------------------|
|   |   |  |                 | 2020   |                 | 2021  |                 | 2022  |                 | 2023  |                 | 2024  |                 | Kondisi Akhir |                   |  |                          |
|   |   |  |                 | K  | Rp              | K     | Rp              | K     | Rp              | K     | Rp              | K     | Rp              | K             | Rp                |  |                          |
| 1   | 2   | 3  | 4               | 5  | 6               | 7     | 8               | 9     | 10              | 11    | 12              | 13    | 14              | 15            | 16                | 17   | 18                       |
|   | MISI : 2  |  |                 |  |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |               |                   |  |                          |
| Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi |   |  |                 |  |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |               |                   |  |                          |
|   | Tujuan: 2   |  |                 |  |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |               |                   |  |                          |
| 2.1.  | Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas           | Indeks pembangunan manusia   | 68,69 Poin      | 68,75  |                 | 69,33 |                 | 69,92 |                 | 70,53 |                 | 71,15 |                 | 71,15         |                   |  |                          |
|   | Sasaran 2   |  |                 |  |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |               |                   |  |                          |
| 2.1.1.  | Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat                | Rata-rata Lama Sekolah (RLS)   | 6,71 Tahun      | 6,92   |                 | 7,05  |                 | 7,18  |                 | 7,31  |                 | 7,44  |                 | 7,44          |                   |  |                          |
|   |   | Harapan Lama Sekolah (HLS)   | 12,24 Tahun     | 12,25  |                 | 12,34 |                 | 12,44 |                 | 12,53 |                 | 12,63 |                 | 12,63         |                   |  |                          |
| 1.01.02.  | PROGRAM partisipasi PENGELOLAAN PENDIDIKAN                | Angka kasar PAUD/TK  | 67              | 68   | 2,549,175,000   | 68.41 | 23,869,752,500  | 68.82 | 27,539,227,750  | 69.23 | 30,231,650,525  | 69.65 | 33,193,315,577  | 69.65         | 117,383,121,352   | DINAS PENDIDIKAN                           | Program Prioritas Daerah |
|   |   | Angka partisipasi kasar SD   | 109             | 100  | 280,646,154,243 | 100   | 230,943,656,800 | 100   | 300,409,627,000 | 100   | 326,555,709,000 | 100   | 360,211,280,000 | 100           | 1.498.766.427.043 |  |                          |
|   |   | Peningkatan Persentase Masyarakat Melek Aksara   | 96              | 96   | 4,131,537,500   | 96.58 | 4,083,191,250   | 96.58 | 271,590,625     | 0     | 0               | 0     | 0               | 96.58         | 9,144,843,540     |  |                          |
|   |   | Angka Melek Huruf Al Qur'an jenjang SD   | 76              | 76   | 797,039,200     | 76.46 | 911,743,000     | 0     | 0               | 0     | 0               | 0     | 0               | 76.46         | 1,708,782,200     |  |                          |
|   |   | Angka Melek Huruf Al Qur'an SMP  | 56              | 60   | 967,125,000     | 63.3  | 1,086,337,500   | 0     | 0               | 0     | 0               | 0     | 0               | 63.3          | 2,053,462,500     |  |                          |
|   |   | Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Kondisi Ruang Kelas Baik PAUD/TK                   | 60              | 60   | 1,306,552,000   | 60.72 | 5,127,977,200   | 61.09 | 8,283,774,920   | 61.45 | 8,984,652,712   | 61.82 | 11,175,974,332  | 61.82         | 34,878,931,164    |  |                          |
|   |   | Peningkatan Capaian Angka Lulusan Kesetaraan Paket A setara SD                                 | 0               | 80   | 621,400,000     | 85    | 683,540,000     | 90    | 751,894,000     | 95    | 827,083,400     | 98    | 909,791,740     | 98            | 3,793,709,140     |  |                          |
|   |   | Angka partisipasi kasar SMP  | 101             | 100  | 83,576,038,150  | 100   | 88,447,404,500  | 100   | 143,716,421,670 | 100   | 157,155,048,604 | 100   | 165,267,934,775 | 100           | 638,162,847,699   |  |                          |
|   |   | Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Persentasi fasilitas yang dimiliki sekolah PAUD/TK | 0               | 50   | 1,934,000,000   | 55    | 14,740,546,000  | 60    | 22,646,340,000  | 65    | 23,903,604,000  | 70    | 26,063,771,400  | 70            | 89,288,261,400    |  |                          |





| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (outcome)   | Kondisi Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |       |                |       |                 |      |                 |        |                 |               |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|------|--|---|--------------|--|----------------|-------|----------------|-------|-----------------|------|-----------------|--------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|-----|
|      |  |   |              | 2020   |                | 2021  |                | 2022  |                 | 2023 |                 | 2024   |                 | Kondisi Akhir |                 |                                   |     |
|      |  |   |              | K  | Rp             | K     | Rp             | K     | Rp              | K    | Rp              | K      | Rp              | K             | Rp              |                                   |     |
| 1    | 2  | 3   | 4            | 5  | 6              | 7     | 8              | 9     | 10              | 11   | 12              | 13     | 14              | 15            | 16              | 17                                | 18  |
|      |  | Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat  | 100          | 100  | 10,000,000     | 100   | 10,000,000     | 100   | 5,000,000       | 100  | 5,000,000       | 100    | 5,000,000       | 100           | 35,000,000      |                                   |     |
|      |  | Peningkatan Capaian Angka Kelulusan Warga Belajar Paket B setara SMP                      | 68.09        | 70   | 5,000,000      | 70.04 | 5,000,000      | 70.08 | 5,000,000       | 71   | 5,000,000       | 71.7   | 5,000,000       | 71.7          | 25,000,000      |                                   |     |
|      |  | Standar Pelayanan Minimal   | 100          | 100  | 3,336,799,300  | 100   | 3,550,822,800  | 100   | 2,214,600,000   | 100  | 2,459,600,000   | 100    | 2,709,100,000   | 100           | 14,270,922,100  |                                   |     |
|      |  | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat   | 98           | 98   | 5,000,000      | 98.89 | 5,000,000      | 99.48 | 5,000,000       | 100  | 5,000,000       | 100    | 5,000,000       | 100           | 25,000,000      |                                   |     |
|      |  | Peningakatan Angka Lulusan pada jenjang Kesetaraan Paket C Setara SMA                     | 79.68        | 80   | 374,000,000    | 80.5  | 12,158,600,000 | 81    | 15,965,760,000  | 81   | 17,402,946,000  | 81.9   | 18,983,982,900  | 81.9          | 64,885,288,900  |                                   |     |
|      |  | Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah  | 100          | 100  | 5,395,198,000  | 100   | 5,823,318,700  | 0     | 0               | 0    | 0               | 0      | 0               | 100           | 11,218,516,700  |                                   |     |
|      |  | Tersedianya jumlah Lembaga Pendidikan Kecakapan Hidup (LKP)                               | 68           | 70   | 432,500,000    | 72    | 488,875,000    | 75    | 998,181,250     | 78   | 1,121,591,000   | 80     | 1,305,457,330   | 80            | 4,346,604,580   |                                   |     |
|      |  | Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/Mts  | 100          | 100  | 1,789,360,450  | 100   | 1,963,492,920  | 100   | 2,547,510,120   | 100  | 3,232,063,748   | 100    | 4,045,027,108   | 100           | 13,577,454,346  |                                   |     |
|      |  | Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah  | 0            | 100  | 660,161,600    | 100   | 748,102,750    | 100   | 7,332,896,250   | 100  | 8,048,319,000   | 100    | 8,822,722,795   | 100           | 25,612,202,395  |                                   |     |
|      |  | Angka Kelulusan (AL) SD/MI  | 100          | 100  | 3,723,148,000  | 100   | 5,518,062,800  | 100   | 8,210,326,800   | 100  | 9,469,464,000   | 100    | 44,216,082,950  | 100           | 71,137,084,550  |                                   |     |
|      |  | Meningkatnya Angka Lulusan SMP  | 99.95        | 100  | 2,090,901,500  | 99.98 | 19,769,183,650 | 99.99 | 26,299,472,765  | 100  | 28,711,213,137  | 100.01 | 36,249,309,626  | 100.01        | 113,120,080,678 |                                   |     |
|      |  | Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Kondisi Ruang Kelas Baik SD                   | 70           | 70   | 54,422,249,500 | 70.84 | 76,707,641,100 | 71.27 | 80,842,609,000  | 72   | 90,558,106,000  | 72.13  | 100,011,399,500 | 72.13         | 402,542,005,100 |                                   |     |
|      |  | Ketersediaan sarana dan prasarana sekolah : Kondisi Keadaan Ruang Kelas Baik SMP          | 80           | 81   | 17,591,215,600 | 81    | 21,181,083,200 | 81.5  | 25,911,436,500  | 82   | 28,748,024,700  | 82.5   | 31,367,773,700  | 82.5          | 124,799,533,700 |                                   |     |
|      |  | Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Persentasi fasilitas yang dimiliki sekolah SD | 0            | 60   | 59,322,297,400 | 65    | 77,734,867,700 | 70    | 104,101,031,325 | 75   | 104,508,012,119 | 80     | 114,603,809,237 | 80            | 460,270,017,781 |                                   |     |



| Kode     | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah                            | Indikator Kinerja Program (outcome)  | Kondisi Awal   | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                 |       |                 |       |                   |       |                   |       |                   |               |                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket                      |
|----------|---|--|----------------|--|-----------------|-------|-----------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|          |   |  |                | 2020   |                 | 2021  |                 | 2022  |                   | 2023  |                   | 2024  |                   | Kondisi Akhir |                   |                                   |                          |
|          |   |  |                | K  | Rp              | K     | Rp              | K     | Rp                | K     | Rp                | K     | Rp                | K             | Rp                |                                   |                          |
| 1        | 2   | 3  | 4              | 5  | 6               | 7     | 8               | 9     | 10                | 11    | 12                | 13    | 14                | 15            | 16                | 17                                | 18                       |
|          |   | Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Persentasi fasilitas yang dimiliki sekolah SMP | 0              | 60   | 48,218,993,900  | 65    | 105,391,031,190 | 70    | 112,428,089,814   | 75    | 122,436,418,865   | 80    | 133,586,954,142   | 80            | 522,061,487,911   |                                   |                          |
|          | Sasaran 3   |  |                |  |                 |       |                 |       |                   |       |                   |       |                   |               |                   |                                   |                          |
| 2.1.2.   | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                                   | Umur Harapan Hidup (UHH)   | 71,82 Poin     | 71,99  |                 | 72,11 |                 | 72,24 |                   | 72,36 |                   | 72,48 |                   | 72,48         |                   |                                   |                          |
| 1.02.02. | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Angka kematian ibu (AKI)   | 0              | 85   | 155,329,273,341 | 83.5  | 379,954,066,030 | 28    | 2.061.494.584.784 | 81    | 1.960.432.385.478 | 79    | 1.978.604.054.972 | 79            | 6.535.814.364.605 | DINAS KESEHATAN                   | Program Prioritas Daerah |
|          |   | Angka kematian Bayi (AKB)  | 0              | 4  | 2,207,756,000   | 3.78  | 2,577,914,200   | 53.7  | 2,762,890,000     | 4     | 2,991,972,000     | 3.69  | 3,228,962,000     | 3.69          | 13,769,494,200    |                                   |                          |
|          |   | Tercapainya Universal Health Coverage (UHC)  | 0              | 97   | 245,576,750,100 | 97.5  | 322,177,392,840 | 89    | 324,183,357,800   | 99    | 330,692,113,600   | 99    | 336,581,779,500   | 99            | 1.559.211.393.840 |                                   |                          |
|          |   | Meningkatnya Status Gizi Balita  | 0              | 85   | 2,163,050,000   | 85    | 3,461,387,200   | 0     | 0                 | 0     | 0                 | 0     | 0                 | 85            | 5,624,437,200     |                                   |                          |
|          |   | Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit  | 0              | 87   | 6,565,101,000   | 90.5  | 108,950,352,500 | 592.5 | 75,827,677,085    | 95    | 78,080,725,083    | 95.5  | 81,276,669,344    | 95.5          | 350,700,525,012   |                                   |                          |
|          |   | Meningkatnya jumlah Desa Open Defecation Free (ODF)  | 0              | 44   | 1,625,859,000   | 49.76 | 1,940,529,000   | 0     | 0                 | 0     | 0                 | 0     | 0                 | 49.76         | 3,566,388,000     |                                   |                          |
|          | Tujuan: 3   |  |                |  |                 |       |                 |       |                   |       |                   |       |                   |               |                   |                                   |                          |
| 3.1.     | Mewujudkan Kesejahteraan Sosial   | Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan  | 9,94 Prosen    | 11,24  |                 | 11,14 |                 | 11,04 |                   | 10,94 |                   | 10,84 |                   | 10,84         |                   |                                   |                          |
|          |   | Tingkat pengangguran terbuka   | 10,28 Prosen   | 11,52  |                 | 11,12 |                 | 10,70 |                   | 10,30 |                   | 9,90  |                   | 9,90          |                   |                                   |                          |
|          |   | PDRB Per Kapita  | 22,41 Juta Rp. | 22,43  |                 | 23,25 |                 | 24,95 |                   | 26,78 |                   | 28,74 |                   | 28,74         |                   |                                   |                          |
|          | Sasaran 4   |  |                |  |                 |       |                 |       |                   |       |                   |       |                   |               |                   |                                   |                          |



| Kode     | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah                      | Indikator Kinerja Program (outcome)   | Kondisi Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |       |               |       |                |       |                |       |                |               |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket                      |
|----------|---|---|--------------|--|---------------|-------|---------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|---------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|
|          |   |   |              | 2020   |               | 2021  |               | 2022  |                | 2023  |                | 2024  |                | Kondisi Akhir |                |                                   |                          |
|          |   |   |              | K  | Rp            | K     | Rp            | K     | Rp             | K     | Rp             | K     | Rp             | K             | Rp             |                                   |                          |
| 1        | 2   | 3   | 4            | 5  | 6             | 7     | 8             | 9     | 10             | 11    | 12             | 13    | 14             | 15            | 16             | 17                                | 18                       |
| 2.1.3.   | Menurunnya jumlah kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani di Kabupaten Cirebon   | 67,06 Persen | n.a  |               | 70,17 |               | 70,94 |                | 71,72 |                | 72,50 |                | 72,50         |                |                                   |                          |
| 1.06.05. | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                               | Cakupan Keluarga Miskin yang Menerima Program Perlindungan dan Jaminan Sosial   | 1,200        | 1,220  | 1,238,219,400 | 4,531 | 4,544,317,220 | 1,230 | 2,895,000,000  | 1,230 | 3,150,000,000  | 1,230 | 3,475,000,000  | 9,441         | 15,302,536,620 | DINAS SOSIAL                      | Program Prioritas Daerah |
| 1.06.04. | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL   | Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Terehabilitasi   | 242,317      | 1,100  | 1,602,417,000 | 1,160 | 3,006,000,000 | 1,320 | 3,130,300,000  | 1,320 | 2,930,800,000  | 1,320 | 3,104,250,000  | 6,220         | 13,773,767,000 | DINAS SOSIAL                      | Program Prioritas Daerah |
|          |   | Cakupan Pemerlu pelayanan Kesejahteraan Sosial yang memperoleh bantuan permakanan   | 0            | 210  | 1,017,000,000 | 210   | 1,700,000,000 | 210   | 1,730,000,000  | 210   | 1,780,000,000  | 210   | 1,820,000,000  | 1,050         | 8,047,000,000  |                                   |                          |
|          | Sasaran 5   |   |              |  |               |       |               |       |                |       |                |       |                |               |                |                                   |                          |
| 2.1.4.   | Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja                                | Rasio Kesempatan Kerja  | 58,66 Persen | 56,44  |               | 57,22 |               | 58,03 |                | 58,83 |                | 59,64 |                | 59,64         |                |                                   |                          |
| 2.07.03. | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                | Prosentase Tenaga Kerja bersertifikat Kompetensi  | 0.91         | 0  | 0             | 0.31  | 6,393,523,300 | 4.02  | 11,050,000,000 | 4.67  | 12,300,000,000 | 4.97  | 12,900,000,000 | 4.97          | 42,643,523,300 | DINAS KETENAGAKERJ AAN            | Program Prioritas Daerah |
| 2.07.04. | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                                       | Prosentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) propinsi | 50           | 0  | 0             | 55    | 948,388,150   | 60    | 1,134,150,000  | 65    | 1,170,000,000  | 70    | 1,375,000,000  | 70            | 4,627,538,150  | DINAS KETENAGAKERJ AAN            | Program Prioritas Daerah |
| 2.07.05. | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL   | Prosentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Yang Layak  | 1.87         | 0  | 0             | 2.06  | 675,000,000   | 2.18  | 610,000,000    | 2.49  | 710,000,000    | 2.8   | 790,000,000    | 9.53          | 2,785,000,000  | DINAS KETENAGAKERJ AAN            | Program Prioritas Daerah |
|          |   | Jumlah Kasus Antara Pekerja dan Perusahaan yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama  | 0            | 20   | 100,000,000   | 20    | 100,000,000   | 0     | 0              | 0     | 0              | 0     | 0              | 40            | 100,000,000    |                                   |                          |



| Kode     | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah  | Indikator Kinerja Program (outcome)   | Kondisi Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |              |       |                |       |                  |       |                |       |                |               |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|----------|---|---|--------------|--|--------------|-------|----------------|-------|------------------|-------|----------------|-------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|-----|
|          |   |   |              | 2020   |              | 2021  |                | 2022  |                  | 2023  |                | 2024  |                | Kondisi Akhir |                 |                                   |     |
|          |   |   |              | K  | Rp           | K     | Rp             | K     | Rp               | K     | Rp             | K     | Rp             | K             | Rp              |                                   |     |
| 1        | 2   | 3   | 4            | 5  | 6            | 7     | 8              | 9     | 10               | 11    | 12             | 13    | 14             | 15            | 16              | 17                                | 18  |
|          | MISI : 3  |   |              |  |              |       |                |       |                  |       |                |       |                |               |                 |                                   |     |
| 3,       | Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika   |   |              |  |              |       |                |       |                  |       |                |       |                |               |                 |                                   |     |
|          | Tujuan : 4  |   |              |  |              |       |                |       |                  |       |                |       |                |               |                 |                                   |     |
| 3.1.     | Meningkatkan keshalehan sosial dalam kehidupan beragama   | Indeks Kerukunan Umat Beragama  | 75 Poin      | 78   |              | 81    |                | 84    |                  | 87    |                | 90    |                | 90            |                 |                                   |     |
|          | Sasaran 6   |   |              |  |              |       |                |       |                  |       |                |       |                |               |                 |                                   |     |
| 3.1.1.   | Meningkatnya penyelesaian pergesekan (friksi) antar dan internal umat beragama  | Prosentase Penyelesaian Friksi/Gesekan antar Umat Beragama                                | Persen       | 78   |              | 80    |                | 81    |                  | 82    |                | 83    |                | 83            |                 |                                   |     |
| 8.01.06. | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL  | Prosentase Peningkatan keamanan dan kenyamanan Lingkungan yang dilakukan                  | 10           | 8  | 296,983 ,900 | 10    | 3,401,3 61,325 | 2     | 1 3,755,0 00,000 | 14    | 4,050,000 ,000 | 16    | 4,685,0 00,000 | 1 6           | 16,188, 345,225 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |     |
|          |   | Prosentase meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dalam kerangka kesatuan berbangsa | 20           | 18   | 337,788 ,200 | 16    | 1,153,2 53,170 | 5     | 1 1,855,0 00,000 | 13    | 1,955,000 ,000 | 10    | 2,030,0 00,000 | 1 0           | 7,331,0 41,370  |                                   |     |
|          | MISI : 4  |   |              |  |              |       |                |       |                  |       |                |       |                |               |                 |                                   |     |
| 4,       | Meningkatnya produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah |   |              |  |              |       |                |       |                  |       |                |       |                |               |                 |                                   |     |
|          | Tujuan : 5  |   |              |  |              |       |                |       |                  |       |                |       |                |               |                 |                                   |     |
| 4.1.     | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan   | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)  | 4,86 Prosen  | -1,08  |              | 4,38  |                | 4,61  |                  | 4,84  |                | 5,08  |                | 5,08          |                 |                                   |     |
|          |   | Indeks Gini   | 0,344 Poin   | 0,338  |              | 0,336 |                | 0,334 |                  | 0,332 |                | 0,330 |                | 0,330         |                 |                                   |     |



| Kode     | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah        | Indikator Kinerja Program (outcome)   | Kondisi Awal                     | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |          |                 |        |     |                 |      |                  |      |                   |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket                      |                          |
|----------|---|---|----------------------------------|--|----------------|----------|-----------------|--------|-----|-----------------|------|------------------|------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|          |   |   |                                  | 2020   |                | 2021     |                 | 2022   |     | 2023            |      | 2024             |      | Kondisi Akhir     |                 |                                   |                          |                          |
|          |   |   |                                  | K  | Rp             | K        | Rp              | K      | Rp  | K               | Rp   | K                | Rp   | K                 | Rp              |                                   |                          |                          |
| 1        | 2   | 3   | 4                                | 5  | 6              | 7        | 8               | 9      | 10  | 11              | 12   | 13               | 14   | 15                | 16              | 17                                | 18                       |                          |
|          |   | Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan  | 10.670 Ribu Rupiah/Kap ita/Tahun | 10.342   |                | 10.606   |                 | 10.891 |     | 11.198          |      | 11.529           |      | 11.529            |                 |                                   |                          |                          |
|          | Sasaran 7   |   |                                  |  |                |          |                 |        |     |                 |      |                  |      |                   |                 |                                   |                          |                          |
| 4.1.1.   | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan        | Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                            | -1,05 Prosen                     | 1,76   |                | 1,86     |                 | 2,08   |     | 2,31            |      | 2,54             |      | 2,54              |                 |                                   |                          |                          |
|          |   | Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan   | 2,28 Prosen                      | -0,42  |                | 3,08     |                 | 3,74   |     | 4,41            |      | 5,07             |      | 5,07              |                 |                                   |                          |                          |
|          |   | Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 4,62 Prosen                      | -7,03  |                | 5        |                 | 5,25   |     | 5,5             |      | 5,75             |      | 5,75              |                 |                                   |                          |                          |
|          |   | Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                          | 5,47 Prosen                      | -9,50  |                | 4,33     |                 | 4,63   |     | 4,93            |      | 5,23             |      | 5,23              |                 |                                   |                          |                          |
| 3.27.07. | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                            | Prosentase Kelompok Petani Yang Naik Kelas  | 10                               | 10   | 733,000 ,000   | 10       | 1,181,3 00,000  | 0      | 1   | 4,193,8 20,000  | 10   | 4,353,820 ,000   | 10   | 4,208,8 20,000    | 10              | 14,670, 760,000                   | DINAS PERTANIAN          | Program Prioritas Daerah |
|          |   | Prosentase Penyuluh Yang Lulus Pelatihan Berbasis Kompetensi                          | 20                               | 20   | 5,698,2 15,192 | 20       | 6,487,7 02,240  | 0      | 0   | 0               | 0    | 0                | 0    | 40                | 12,185, 917,432 |                                   |                          |                          |
|          |   | Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar                   | 63.25                            | 63.3   | 5,000,0 00     | 63.35    | 5,000,0 00      | 0      | 0   | 0               | 0    | 0                | 0    | 63. 35            | 10,000, 000     |                                   |                          |                          |
| 3.27.03. | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Jumlah Produksi Komoditas Tanaman Pangan (Beras)                                      | 340,309                          | 343,107  | 434,000 ,000   | 347,4 93 | 3,174,6 22,680  | 0      | 0   | 0               | 0    | 0                | 0    | 347 ,493          | 3,608,6 22,680  | DINAS PERTANIAN                   | Program Prioritas Daerah |                          |
|          |   | Jumlah Produksi Sektor Peternakan (Sapi Potong, Ayam Ras, Unggas Lokal dan Domba)     | 29,106                           | 29,996   | 634,200 ,000   | 30,50 8  | 19,205, 000,000 | 0      | 0   | 0               | 0    | 0                | 0    | 30, 508           | 19,839, 200,000 |                                   |                          |                          |
|          |   | Jumlah Produksi Komoditas Hortikultura (Bawang Merah, Cabai Besar dan Mangga)         | 97,300                           | 98,080   | 2,662,0 00,000 | 98,47 2  | 6,198,0 00,000  | 0      | 0   | 0               | 0    | 0                | 0    | 196 ,552          | 8,860,0 00,000  |                                   |                          |                          |
|          |   | Rasio Ketersediaan Prasarana Produksi Pertanian                                       | 0                                | 0  | 0              | 0.35     | 6,163,7 61,520  | 2      | 0.4 | 91,490, 764,000 | 0.46 | 103,885,7 64,000 | 0.49 | 104,720 ,764,00 0 | 0.49            | 306,261 ,053,52 0                 |                          |                          |



| Kode     | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah     | Indikator Kinerja Program (outcome)   | Kondisi Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |         |                |        |                |        |                |        |                |               |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    | Ket                      |
|----------|--|---|--------------|--|---------------|---------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------|
|          |  |   |              | 2020   |               | 2021    |                | 2022   |                | 2023   |                | 2024   |                | Kondisi Akhir |                 |                                      |                          |
|          |  |   |              | K  | Rp            | K       | Rp             | K      | Rp             | K      | Rp             | K      | Rp             | K             | Rp              |                                      |                          |
| 1        | 2  | 3   | 4            | 5  | 6             | 7       | 8              | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15            | 16              | 17                                   | 18                       |
| 3.27.02. | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Jumlah Produksi Komoditas Tanaman Pangan (Beras)                                  | 340,309      | 343,107  | 288,447,000   | 347,493 | 944,100,000    | 0      | 0              | 0      | 0              | 0      | 0              | 347,493       | 1,232,547,000   | DINAS PERTANIAN                      | Program Prioritas Daerah |
|          |  | Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar               | 63.25        | 63.3   | 15,000,000    | 63.35   | 15,000,000     | 0      | 0              | 0      | 0              | 0      | 0              | 63.35         | 30,000,000      |                                      |                          |
|          |  | Jumlah Produksi Sektor Peternakan (Sapi Potong, Ayam Ras, Unggas Lokal dan Domba) | 29,106       | 29,996   | 1,411,800,000 | 30,508  | 640,041,700    | 0      | 0              | 0      | 0              | 0      | 0              | 30,508        | 2,051,841,700   |                                      |                          |
|          |  | Jumlah Produksi Komoditas Perkebunan (Gula dan Kelapa)                            | 21,826       | 21,873   | 652,000,000   | 21,919  | 1,623,421,000  | 0      | 0              | 0      | 0              | 0      | 0              | 43,792        | 2,275,421,000   |                                      |                          |
|          |  | Jumlah Produksi Komoditas Hortikultura (Bawang Merah, Cabai Besar dan Mangga)     | 97,300       | 98,080   | 2,652,000,000 | 98,472  | 90,000,000     | 0      | 0              | 0      | 0              | 0      | 0              | 196,552       | 2,742,000,000   |                                      |                          |
|          |  | Rasio Ketersediaan Sarana Produksi Pertanian                                      | 0            | 0  | 0             | 0.51    | 1,774,836,200  | 0.54   | 40,488,094,255 | 0.56   | 59,186,070,980 | 0.58   | 34,605,924,530 | 0.58          | 136,054,925,965 |                                      |                          |
| 3.25.03. | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap   | 27,523       | 28,421   | 4,430,000,000 | 28,852  | 10,810,000,000 | 31,680 | 15,647,500,000 | 33,264 | 16,166,500,000 | 34,214 | 16,708,150,000 | 34,214        | 63,762,150,000  | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |                          |
| 3.25.04. | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA               | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya  | 32,120       | 37,180   | 2,275,000,000 | 39,040  | 9,505,500,000  | 40,990 | 6,926,150,000  | 43,040 | 6,997,565,000  | 45,190 | 7,058,371,500  | 45,190        | 32,762,586,500  | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |                          |
|          |  | Jumlah Produksi Pembenihan Ikan   | 113          | 435  | 525,000,000   | 437     | 11,640,000,000 | 440    | 9,800,000,000  | 445    | 10,175,000,000 | 451    | 10,277,500,000 | 451           | 42,417,500,000  | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |                          |
| 3.25.05. | PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Tingkat kepatuhan pelaku usaha perikanan  | 0            | 0  | 0             | 0.00    | 0              | 0.89   | 150,000,000    | 1.42   | 185,000,000    | 1.96   | 215,000,000    | 1.96          | 550,000,000     | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |                          |
| 3.25.06. | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN     | Jumlah Produksi Pengolahan hasil Perikanan  | 6,200        | 6,205  | 2,251,000,000 | 6,209   | 8,268,000,000  | 10,000 | 6,261,400,000  | 10,500 | 6,782,540,000  | 11,000 | 6,812,794,000  | 11,000        | 30,375,734,000  | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |                          |
|          |  | Jumlah Konsumsi Ikan  | 26           | 27.2   | 100,000,000   | 28.4    | 720,000,000    | 29.6   | 600,000,000    | 30.8   | 665,000,000    | 32     | 731,500,000    | 32            | 2,816,500,000   | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |                          |



| Kode     | Misi/Tujuan/Sasaran<br>/ Program<br>Pembangunan<br>Daerah  | Indikator Kinerja<br>Program (outcome)  | Kondisi<br>Awal    | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                         | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab   | Ket                            |
|----------|--|---|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--|--------------------------------|
|          |  |   |                    | 2020   |                    | 2021               |                    | 2022               |                    | 2023               |                    | 2024               |                    | Kondisi Akhir      |                         |  |                                |
|          |  |   |                    | K  | Rp                 | K                  | Rp                 | K                  | Rp                 | K                  | Rp                 | K                  | Rp                 | K                  | Rp                      |  |                                |
| 1        | 2  | 3   | 4                  | 5  | 6                  | 7                  | 8                  | 9                  | 10                 | 11                 | 12                 | 13                 | 14                 | 15                 | 16                      | 17   | 18                             |
| 3.30.03. | PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>SARANA DISTRIBUSI<br>PERDAGANGAN | Cakupan bina<br>pengelola pasar   | 100                | 100  | 441,245<br>,300    | 100                | 485,369<br>,830    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 100                | 926,615<br>,130         | DINAS<br>PERDAGANGAN<br>DAN<br>PERINDUSTRIAN | Program<br>Prioritas<br>Daerah |
|          |  | Cakupan bina<br>kelompok<br>pedagang/usaha<br>informal  | 5.38               | 5.47   | 38,350,<br>390,000 | 5.56               | 54,216,<br>288,000 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 5.56               | 92,566,<br>678,000      |  |                                |
|          |  | Penerimaan Retribusi<br>Pasar   | 2,329,281,8<br>75  | 1.962,9<br>53.00<br>0                          | 869,924<br>,300    | 1,962,9<br>55,000  | 956,916<br>,730    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 1,962,9<br>55,000  | 1,826,8<br>41,030       |  |                                |
|          |  | Jumlah sarana<br>distribusi<br>perdagangan yang<br>sesuai SNI ( Pasar<br>Pemda )  | 0                  | 0  | 0                  | 1                  | 54,355,<br>722,684 | 1                  | 60,600,<br>000,000 | 1                  | 66,850,00<br>0,000 | 1                  | 73,250,<br>000,000 | 1                  | 255,055<br>,722,68<br>4 |  |                                |
| 3.31.02. | PROGRAM<br>PERENCANAAN DAN<br>PEMBANGUNAN<br>INDUSTRI      | Pertumbuhan cluster<br>industri   | 1                  | 1  | 1,076,1<br>12,400  | 1                  | 1,183,7<br>23,640  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 2                  | 2,259,8<br>36,040       | DINAS<br>PERDAGANGAN<br>DAN<br>PERINDUSTRIAN | Program<br>Prioritas<br>Daerah |
|          |  | Jumlah produk IKM<br>yang bersertifikasi  | 100                | 100  | 1,024,9<br>99,600  | 100                | 36,121,<br>999,560 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 100                | 37,146,<br>999,160      |  |                                |
|          |  | Jumlah komoditas<br>industri yang terbina   | 9                  | 10   | 5,000,0<br>00      | 10                 | 5,000,0<br>00      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 10                 | 10,000,<br>000          |  |                                |
|          |  | Jenis fasilitasi yang<br>disediakan bagi IKM  | 3                  | 3  | 305,000<br>,000    | 3                  | 314,447<br>,950    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 6                  | 619,447<br>,950         |  |                                |
|          |  | Jumlah IKM yang<br>melaksanakan<br>program 3 R (Reduce,<br>Resue dan Recycle)   | 0                  | 0  | 799,999<br>,200    | 0                  | 500,000<br>,000    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 1,299,9<br>99,200       |  |                                |
|          |  | Persentase<br>Pencapaian Sasasaran<br>Pembangunan<br>Industri termasuk<br>turunan<br>pembangunan<br>industri dalam RPIK | 0                  | 0  | 0                  | 10                 | 4,440,0<br>00,000  | 10                 | 4,440,0<br>00,000  | 10                 | 4,988,000<br>,000  | 20                 | 5,535,0<br>00,000  | 20                 | 14,963,<br>000,000      |  |                                |
| 3.30.05. | PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>EKSPOR                          | Nilai Ekspor ke luar<br>Negri   | 382,200,73<br>0.36 | 0  | 0                  | 389,839<br>,221.03 | 743,114<br>,000    | 402,025<br>,824.69 | 1,950,0<br>00,000  | 409,664,3<br>15.36 | 1,965,000<br>,000  | 417,857<br>,601.67 | 1,980,0<br>00,000  | 417,857<br>,601.67 | 6,638,1<br>14,000       | DINAS<br>PERDAGANGAN<br>DAN<br>PERINDUSTRIAN | Program<br>Prioritas<br>Daerah |



| Kode     | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah                         | Indikator Kinerja Program (outcome)   | Kondisi Awal       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   |                                |                   |                                |                   |                            |                   |                                |                   |                                |                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab        | Ket                      |
|----------|--|---|--------------------|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--|--------------------------|
|          |  |   |                    | 2020   |                   | 2021                           |                   | 2022                           |                   | 2023                       |                   | 2024                           |                   | Kondisi Akhir                  |                   |  |                          |
|          |  |   |                    | K  | Rp                | K                              | Rp                | K                              | Rp                | K                          | Rp                | K                              | Rp                | K                              | Rp                |  |                          |
| 1        | 2  | 3   | 4                  | 5  | 6                 | 7                              | 8                 | 9                              | 10                | 11                         | 12                | 13                             | 14                | 15                             | 16                | 17                                       | 18                       |
|          |  | Nilai Ekspor  | 382,200,73<br>0.36 | 388,315<br>,942                                | 1,872,2<br>80,000 | 394.917<br>.313,0<br>6         | 2,259,5<br>08,000 | 0                              | 0                 | 0                          | 0                 | 0                              | 0                 | 394,917<br>,313.06             | 4,131,7<br>88,000 |  |                          |
| 3.30.07. | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                     | Meningkatnya peluang pasar UKM  | 0                  | 100  | 50,000,<br>000    | 100                            | 50,000,<br>000    | 0                              | 0                 | 0                          | 0                 | 0                              | 0                 | 200                            | 100,000<br>,000   | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN      | Program Prioritas Daerah |
|          |  | Nilai perdagangan dalam negeri  | 0                  | 0  | 0                 | 18.249.<br>585.660<br>.00<br>0 | 350,000<br>,000   | 19.249.<br>585.660<br>.00<br>0 | 400,000<br>,000   | 20.789.55<br>2.510.00<br>0 | 450,000,0<br>00   | 22.452.<br>716.710<br>.00<br>0 | 500,000<br>,000   | 22.452.<br>716.710<br>.00<br>0 | 1,350,0<br>00,000 |  |                          |
| 3.30.04. | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING      | Pencapaian Stabilitas harga 9 komoditas kebutuhan pokok masyarakat (daging sapi, beras, gula pasir, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, kedelai, tepung terigu, dan bawang merah) | 6                  | 6  | 1,109,8<br>25,000 | 6                              | 1,220,8<br>07,500 | 0                              | 0                 | 0                          | 0                 | 0                              | 0                 | 6                              | 2,330,6<br>32,500 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN      | Program Prioritas Daerah |
|          |  | Koefisien varian antar waktu kebutuhan pokok dan barang penting   | 0                  | 0  | 0                 | 8.5                            | 799,613<br>,890   | 8.5                            | 1,110,0<br>00,000 | 8.5                        | 1,260,000<br>,000 | 8.5                            | 1,360,0<br>00,000 | 8.5                            | 4,529,6<br>13,890 |  |                          |
| 2.17.07. | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 1. Mewujudkan Pemberdayaan bagi Usaha Mikro 2. Meningkatkan kemitraan dengan Pelaku Usaha serta serta dengan sumber-sumber pembiayaan   | 0                  | 0  | 0                 | 1.29                           | 113,726<br>,700   | 1.6<br>1                       | 0                 | 0                          | 0                 | 0                              | 0                 | 1.61                           | 113,726<br>,700   | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | Program Prioritas Daerah |
|          |  | 1. Terciptanya Potensi Kelembagaan Usaha Mikro 2. Terciptanya Kualitas dalam Pengembangan Pelaku Usaha Mikro  | 0                  | 0  | 0                 | 100                            | 66,507,<br>300    | 0                              | 0                 | 0                          | 0                 | 0                              | 0                 | 100                            | 66,507,<br>300    |  |                          |
|          |  | 1. Terciptanya Data yang valid dari Pemangku Kepentingan 2. Tercapainya Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan   | 0                  | 0  | 0                 | 100                            | 53,528,<br>350    | 0                              | 0                 | 0                          | 0                 | 0                              | 0                 | 100                            | 53,528,<br>350    |  |                          |





| Kode     | Misi/Tujuan/Sasaran<br>/ Program<br>Pembangunan<br>Daerah | Indikator Kinerja<br>Program (outcome)  | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |       |                |       |               |               |               |               |               |               |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab | Ket                      |  |
|----------|---|---|-----------------|--|-------------|-------|----------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--------------------------|--|
|          |   |   |                 | 2020   |             | 2021  |                | 2022  |               | 2023          |               | 2024          |               | Kondisi Akhir |               |  |                          |  |
|          |   |   |                 | K  | Rp          | K     | Rp             | K     | Rp            | K             | Rp            | K             | Rp            | K             | Rp            |  |                          |  |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5  | 6           | 7     | 8              | 9     | 10            | 11            | 12            | 13            | 14            | 15            | 16            | 17   | 18                       |  |
|          |   | Terciptanya Sistem aplikasi Data Pelaku Usaha Mikro   | 0               | 0  | 0           | 100   | 715,294,800    | 0     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 100           | 715,294,800   |  |                          |  |
|          |   | Prosentase Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha   | 0.97            | 0  | 0           | 2.48  | 950,269,700    | 5     | 3.2           | 4,750,000,000 | 4             | 4,860,000,000 | 5             | 5,370,000,000 | 14.73         | 15,930,269,700                             |                          |  |
| 2.17.08. | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM                                 | 1.Terciptanya Kualitas Produk bagi Usaha Mikro yang Berdaya Saing 2. Tercapainya Promosi Produk Pelaku Usaha Mikro              | 0               | 2  | 5,000,000   | 2     | 650,069,350    | 0     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 4             | 655,069,350   | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH   | Program Prioritas Daerah |  |
|          |   | Persentase usaha mikro yang berkembang nilai omsetnya   | 0.34            | 0  | 0           | 0.5   | 12,000,000,000 | 5     | 0.            | 6,000,000,000 | 1.5           | 6,000,000,000 | 1.5           | 6,000,000,000 | 4             | 30,000,000,000                             |                          |  |
| 2.17.05. | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN              | Terciptanya Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi   | 0               | 0  | 0           | 25    | 190,955,575    | 0     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 25            | 190,955,575   | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH   | Program Prioritas Daerah |  |
|          |   | Prosentase pengurus, pengawas, manajer dan pengelola koperasi yang bersertifikat kompetensi                                     | 0               | 20   | 5,000,000   | 0     | 0              | 0     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 20            | 5,000,000     |  |                          |  |
|          |   | Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan Perkoperasian  | 0               | 0  | 0           | 34.48 | 190,955,575    | 44.72 | 1,229,483,900 | 49.69         | 2,000,000,000 | 50            | 2,000,000,000 | 50            | 5,420,439,475 |  |                          |  |
| 2.17.02. | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM                | Terciptanya Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi   | 0               | 25   | 655,000,000 | 25    | 655,000,000    | 0     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 25,000,000    | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH   | Program Prioritas Daerah |  |
|          |   | Prosentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota | 0               | 0  | 0           | 25    | 655,000,000    | 28    | 655,000,000   | 31            | 655,000,000   | 31            | 655,000,000   | 31            | 1,965,000,000 |  |                          |  |



| Kode     | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah   | Indikator Kinerja Program (outcome)  | Kondisi Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |            |        |               |        |               |        |               |        |                |               |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    | Ket                      |
|----------|--|--|--------------|--|------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|----------------|---------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------|
|          |  |  |              | 2020   |            | 2021   |               | 2022   |               | 2023   |               | 2024   |                | Kondisi Akhir |                |                                      |                          |
|          |  |  |              | K  | Rp         | K      | Rp            | K      | Rp            | K      | Rp            | K      | Rp             | K             | Rp             |                                      |                          |
| 1        | 2  | 3  | 4            | 5  | 6          | 7      | 8             | 9      | 10            | 11     | 12            | 13     | 14             | 15            | 16             | 17                                   | 18                       |
| 3.26.02. | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA  | Jumlah obyek daya tarik wisata dengan pertumbuhan kunjungan diatas 10%                     | 0            | 0  | 0          | 3      | 255,000,000   | 3      | 6,470,000,000 | 6      | 6,515,000,000 | 9      | 6,560,000,000  | 9             | 19,800,000,000 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA      | Program Prioritas Daerah |
| 3.26.03. | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA   | Market Share Kunjungan Pariwisata Kabupaten Cirebon Terhadap Kunjungan Provinsi Jawa Barat | 0            | 0  | 0          | 1.98   | 1,600,000,000 | 1.98   | 3,500,000,000 | 2.08   | 3,530,000,000 | 2.29   | 3,550,000,000  | 2.29          | 12,180,000,000 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA      |                          |
| 3.26.04. | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | Jumlah HKI ekonomi kreatif   | 0            | 0  | 0          | 0      | 0             | 1      | 250,000,000   | 1      | 150,000,000   | 1      | 10,150,000,000 | 3             | 10,550,000,000 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA      |                          |
| 3.26.05. | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                    | Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang terstandarisasi/bersertifikat        | 0            | 0  | 0          | 19.44  | 350,000,000   | 19.44  | 1,625,000,000 | 30.56  | 1,650,000,000 | 41.67  | 1,675,000,000  | 41.67         | 5,300,000,000  | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA      |                          |
|          | Sasaran 8  |  |              |  |            |        |               |        |               |        |               |        |                |               |                |                                      |                          |
| 4.1.2.   | Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat   | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi  | 91,50 Poin   | 93   |            | 93,10  |               | 93,20  |               | 93,30  |               | 93,40  |                | 93,40         |                |                                      |                          |
|          |  | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan  | 71,17 Poin   | 71,44  |            | 71,71  |               | 71,98  |               | 72,25  |               | 72,52  |                | 72,52         |                |                                      |                          |
| 2.09.02. | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN                    | Persentase LPM yang dimandirikan   | 0            | 0  | 0          | 4.08   | 2,611,094,600 | 4.08   | 8,250,000,000 | 4.08   | 2,500,000,000 | 4.08   | 2,900,000,000  | 16.32         | 16,261,094,600 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |                          |
|          |  | Persentase ketersediaan pangan utama terhadap jumlah penduduk                              | 171.3        | 152.07   | 86,610,000 | 154.9  | 2,606,094,600 | 0      | 0             | 0      | 0             | 0      | 0              | 154.9         | 2,692,704,600  |                                      |                          |
| 2.09.03. | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT                                  | Persentase ketersediaan pangan terhadap jumlah kebutuhan pangan                            | 0            | 0  | 0          | 152.04 | 5,000,000     | 152.04 | 4,250,000,000 | 155.94 | 2,050,000,000 | 159.84 | 2,350,000,000  | 159.84        | 8,655,000,000  | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |                          |
|          |  | Persentase kelompok pangan yang  | 0            | 0  | 0          | 78.57  | 20,000,000    | 78.57  | 1,160,000,000 | 78.57  | 1,268,414,446 | 85.71  | 1,700,000,000  | 85.71         | 4,148,414,446  |                                      |                          |



| Kode     | Misi/Tujuan/Sasaran<br>/ Program<br>Pembangunan<br>Daerah | Indikator Kinerja<br>Program (outcome)   | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |               |                   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab         | Ket                      |
|----------|---|--|-----------------|--|---------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|---------------|-------------------|--|--------------------------|
|          |   |  |                 | 2020   |               | 2021  |                 | 2022  |                 | 2023  |                 | 2024  |                 | Kondisi Akhir |                   |  |                          |
|          |   |  |                 | K  | Rp            | K     | Rp              | K     | Rp              | K     | Rp              | K     | Rp              | K             | Rp                |  |                          |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5  | 6             | 7     | 8               | 9     | 10              | 11    | 12              | 13    | 14              | 15            | 16                | 17   | 18                       |
|          |   | terkendali harganya  |                 |  |               |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |               |                   |  |                          |
|          |   | Tingkat Keanekaragaman Konsumsi Pangan   | 0               | 0  | 0             | 80    | 30,000,000      | 80    | 3,985,000,000   | 80    | 4,175,000,000   | 80    | 4,825,000,000   | 80            | 13,015,000,000    |  |                          |
|          |   | Persentase ketersediaan pangan utama terhadap jumlah penduduk                        | 154.7           | 154.8  | 1,252,28,400  | 154.9 | 568,632,900     | 0     | 0               | 0     | 0               | 0     | 0               | 154.9         | 1,820,861,300     |  |                          |
|          |   | Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar                                       | 92.86           | 73.33  | 642,401,899   | 80    | 929,287,900     | 0     | 0               | 0     | 0               | 0     | 0               | 80            | 1,571,689,799     |  |                          |
| 2.09.04. | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                       | Berkurangnya daerah rawan pangan   | 41              | 0  | 0             | 8     | 10,000,000      | 8     | 581,600,000     | 13    | 800,000,000     | 20    | 1,216,408,390   | 49            | 2,608,008,390     | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN               |                          |
|          |   | Persentase ketersediaan pangan utama terhadap jumlah penduduk                        | 154.7           | 154.8  | 232,747,200   | 154.9 | 220,169,620     | 0     | 0               | 0     | 0               | 0     | 0               | 154.9         | 452,916,820       |  |                          |
|          | Sasaran 9   |  |                 |  |               |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |               |                   |  |                          |
| 4.1.3.   | Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah     | Indeks pembangunan infrastruktur wilayah yang mantap (baik)                          | 77,99 Poin      | 79,89  |               | 79,46 |                 | 80,20 |                 | 80,93 |                 | 81,67 |                 | 81,67         |                   |  |                          |
| 1.03.12. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                    | Persentase pemenuhan dokumen rencana rinci tata ruang dan ketaatan pemanfaatan ruang | 23.26           | 23   | 5,000,000,000 | 66.28 | 1,719,177,408   | 72.09 | 6,250,000,000   | 77.91 | 6,250,000,000   | 82.56 | 6,250,000,000   | 82.56         | 25,469,177,408    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG            |                          |
|          |   | Persentase ketaatan pemanfaatan ruang  | 0               | 100  | 15,000,000    | 0     | 0               | 0     | 0               | 0     | 0               | 0     | 0               | 0             | 15,000,000        |  |                          |
|          |   | Persentase pemenuhan dokumen rencana rinci tata ruang dan ketaatan pemanfaatan ruang | 23.26           | 23   | 5,000,000,000 | 66.28 | 1,719,177,408   | 72.09 | 6,250,000,000   | 77.91 | 6,250,000,000   | 82.56 | 6,250,000,000   | 82.56         | 25,469,177,408    |  |                          |
| 1.03.10. | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                             | Persentase jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi Baik                               | 47              | 56   | 25,000,000    | 57    | 103,467,851,773 | 58    | 612,107,199,750 | 59    | 704,328,599,750 | 60    | 735,403,599,750 | 60            | 2.155.332.251.023 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG            | Program Prioritas Daerah |
| 1.04.02. | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                            | Persentase Lingkungan Permukiman yang tertata  | 96.5            | 90   | 310,000,000   | 92.42 | 95,981,500      | 0     | 0               | 0     | 0               | 0     | 0               | 92.42         | 405,981,500       | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | Program Prioritas Daerah |



| Kode     | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah              | Indikator Kinerja Program (outcome)  | Kondisi Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |               |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                  | Ket                      |
|----------|---|--|--------------|--|---------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|---------------|-----------------|--|--------------------------|
|          |   |  |              | 2020   |               | 2021  |                 | 2022  |                 | 2023  |                 | 2024  |                 | Kondisi Akhir |                 |  |                          |
|          |   |  |              | K  | Rp            | K     | Rp              | K     | Rp              | K     | Rp              | K     | Rp              | K             | Rp              |  |                          |
| 1        | 2   | 3  | 4            | 5  | 6             | 7     | 8               | 9     | 10              | 11    | 12              | 13    | 14              | 15            | 16              | 17   | 18                       |
|          |   | Prosentase Perencanaan Pembangunan Perumahan yng sesuai dengan NSPK  | 100          | 100  | 305,000 ,000  | 100   | 400,637 ,200    | 0     | 0               | 0     | 0               | 0     | 0               | 100           | 705,637 ,200    |  |                          |
|          |   | Persentase Lingkungan Permukiman yang tertata.   | 0            | 0  | 0             | 92.42 | 200,000 ,000    | 94.94 | 2,400,000,000   | 98    | 2,410,000 ,000  | 100   | 2,420,000,000   | 100           | 7,430,000,000   |  |                          |
| 1.04.04. | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH                | Cakupan ketersediaan rumah layak huni  | 0            | 97   | 5,000,000     | 97.78 | 34,099,084,000  | 0     | 0               | 0     | 0               | 0     | 0               | 97.78         | 34,104,084,000  | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | Program Prioritas Daerah |
|          |   | Prosentase Lingkungan Permukiman Kumuh   | 0            | 3  | 3,330,858,500 | 2.24  | 24,725,858,500  | 0.00  | 0               | 0     | 0               | 0     | 0               | 2.24          | 28,056,717,000  |  |                          |
|          |   | Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni.   | 0            | 0  | 5,000,000     | 97.78 | 62,730,858,500  | 99.39 | 39,108,444,000  | 100   | 197,018,288,000 | 100   | 39,969,117,000  | 100           | 338,831,707,500 |  |                          |
| 1.03.02. | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                     | Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan Persentase Berkurangnya luasan genangan akibat banjir   | 0            | 0  | 0             | 36.99 | 169,544,975,334 | 38.06 | 226,530,490,000 | 39.42 | 224,751,490,000 | 40.78 | 225,099,990,000 | 40.78         | 845,931,945,334 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG            | Program Prioritas Daerah |
| 2.15.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Meningkatnya Prosentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas serta tatakelola sektor perhubungan yang sesuai dengan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria) | 20           | 35   | 3,119,857,320 | 45    | 5,800,000,000   | 55    | 450,000,000     | 65    | 450,000,000     | 75    | 450,000,000     | 75            | 10,269,857,320  | DINAS PERHUBUNGAN                                  | Program Prioritas Daerah |
|          |   | Rasio sarana dan Prasarana Pengujian yang layak  | 30           | 50   | 2,650,000,000 | 55    | 1,710,000,000   | 0     | 0               | 0     | 0               | 0     | 0               | 55            | 4,360,000,000   |  |                          |
|          |   | Prosentase jumlah pelanggaran lalu lintas  | 90           | 86   | 2,305,000,000 | 85    | 4,005,000,000   | 0     | 0               | 0     | 0               | 0     | 0               | 85            | 6,310,000,000   |  |                          |
|          |   | Rasio Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan ( Halte dan Terminal) yang layak fungsi  | 46.15        | 56.41  | 500,000,000   | 66.67 | 25,040,000,000  | 0     | 0               | 0     | 0               | 0     | 0               | 66.67         | 25,540,000,000  |  |                          |



| Kode     | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah  | Indikator Kinerja Program (outcome)   | Kondisi Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |        |                |        |                 |        |                 |        |                 |               |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket                      |
|----------|---|---|--------------|--|----------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------|
|          |   |   |              | 2020   |                | 2021   |                | 2022   |                 | 2023   |                 | 2024   |                 | Kondisi Akhir |                 |                                   |                          |
|          |   |   |              | K  | Rp             | K      | Rp             | K      | Rp              | K      | Rp              | K      | Rp              | K             | Rp              |                                   |                          |
| 1        | 2   | 3   | 4            | 5  | 6              | 7      | 8              | 9      | 10              | 11     | 12              | 13     | 14              | 15            | 16              | 17                                | 18                       |
|          |   | Persentase ketersediaan sarana dan Prasarana Pengamanan Lalu Lintas yang berfungsi dengan baik  | 25.34        | 21.1   | 31,981,299,696 | 41.59  | 38,050,000,000 | 0      | 0               | 0      | 0               | 0      | 0               | 41.59         | 70,031,299,696  |                                   |                          |
|          |   | Persentase kepemilikan KIR/Wajib angkutan Umum Uji  | 65.68        | 65.98  | 530,000,000    | 65.98  | 1,010,000,000  | 66.6   | 63,510,000,000  | 67.22  | 59,060,000,000  | 67.84  | 59,650,000,000  | 67.84         | 183,760,000,000 |                                   |                          |
|          |   | Meningkatnya Prosentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas serta tatakelola sektor perhubungan yang sesuai dengan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria). | 0            | 0  | 0              | 0      | 0              | 45.5   | 171,748,273,000 | 47.5   | 121,660,000,000 | 50     | 122,060,000,000 | 50            | 415,468,273,000 |                                   |                          |
|          | Sasaran 10  |   |              |  |                |        |                |        |                 |        |                 |        |                 |               |                 |                                   |                          |
| 4.1.4.   | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup  | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (IKLH)   | 52,51 Poin   | 52,29  |                | 52,67  |                | 52,76  |                 | 52,84  |                 | 52,92  |                 | 52,92         |                 |                                   |                          |
| 2.11.11. | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN   | Prosentase Cakupan Pelayanan pengelolaan sampah   | 6.1          | 7.5  | 65,963,744,500 | 15     | 36,021,603,279 | 30     | 98,650,000,000  | 60     | 180,100,000,000 | 70     | 120,750,000,000 | 70            | 501,485,347,779 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            | Program Prioritas Daerah |
|          |   | Prosentase Timbulan Sampah yang Terkurangi  | 1.27         | 3  | 5,170,041,500  | 7.5    | 5,144,221,000  | 10     | 7,500,000,000   | 15     | 8,700,000,000   | 20     | 10,000,000,000  | 20            | 36,514,262,500  |                                   |                          |
| 2.11.03. | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                               | Persentase hasil pemantauan kualitas air yang memenuhi baku mutu  | 33.3         | 42.9   | 2,910,000,000  | 52.4   | 45,208,011,280 | 61.9   | 50,550,000,000  | 71.4   | 50,550,000,000  | 81     | 50,550,000,000  | 81            | 199,768,011,280 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            | Program Prioritas Daerah |
|          |   | Luasan Tutupan Lahan (M2)   | 60.17        | 121.56   | 190,000,000    | 136.56 | 200,000,000    | 151.56 | 300,000,000     | 166.56 | 400,000,000     | 181.56 | 500,000,000     | 757.8         | 1,590,000,000   |                                   |                          |
|          | Tujuan : 6  |   |              |  |                |        |                |        |                 |        |                 |        |                 |               |                 |                                   |                          |
| 4.2.     | Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan smart serta penguatan otonomi Desa | Indeks Reformasi Birokrasi  | 50,58 Indeks | 55   |                | 60     |                | 65     |                 | 70     |                 | 75     |                 | 75            |                 |                                   |                          |



| Kode     | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah                | Indikator Kinerja Program (outcome)  | Kondisi Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |       |               |       |               |       |               |       |               |               |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab       | Ket                      |
|----------|---|--|--------------|--|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|---------------|---------------|---|--------------------------|
|          |   |  |              | 2020   |               | 2021  |               | 2022  |               | 2023  |               | 2024  |               | Kondisi Akhir |               |   |                          |
|          |   |  |              | K  | Rp            | K     | Rp            | K     | Rp            | K     | Rp            | K     | Rp            | K             | Rp            |   |                          |
| 1        | 2   | 3  | 4            | 5  | 6             | 7     | 8             | 9     | 10            | 11    | 12            | 13    | 14            | 15            | 16            | 17                                      | 18                       |
|          | Sasaran 11  |  |              |  |               |       |               |       |               |       |               |       |               |               |               |   |                          |
| 4.2.1.   | Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik | Indeks kepuasan masyarakat (IKM)   | 3.25 Poin    | 3.27   |               | 3.65  |               | 3.85  |               | 3.95  |               | 4     |               | 4             |               |   |                          |
|          |   | Indeks kemandirian fiskal daerah   | 15,71 Prosen | 16,24  |               | 16,79 |               | 17,36 |               | 17,95 |               | 18,56 |               | 18,56         |               |   |                          |
| 2.12.03. | PROGRAM PENCATATAN SIPIL  | Prosentase Penduduk yang sudah memiliki Dokumen Akta Kelahiran yang telah terkonversi ke dalam Database SIAK   | 35           | 35   | 97,699,900    | 39,75 | 165,000,000   | 42,7  | 586,000,000   | 45.64 | 672,000,000   | 48.58 | 773,000,000   | 48.58         | 2,293,699,900 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Program Prioritas Daerah |
|          |   | Rata-rata Prosentase realisasi Akta-akta pencatatan sipil yang diterbitkan ( Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian dan akte pengakuan, pengesahan dan pengangkatan anak) | 74           | 76   | 585,142,880   | 78    | 645,000,000   | 80    | 835,000,000   | 82    | 915,000,000   | 85    | 1,016,000,000 | 85            | 3,996,142,880 |   |                          |
| 2.12.02. | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                    | Cakupan Jumlah Keluarga yang sudah memiliki Dokumen Kependudukan lengkap (Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak / KIA  | 28.9         | 28.9   | 300,000,000   | 32,74 | 350,000,000   | 37,5  | 385,000,000   | 44.18 | 423,500,000   | 51.81 | 465,850,000   | 51.81         | 1,924,350,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Program Prioritas Daerah |
|          |   | Cakupan Jumlah Keluarga yang sudah memiliki Dokumen Kependudukan lengkap (Persentase kepemilikan Kartu Keluarga / KK )   | 100          | 100  | 275,000,000   | 100   | 300,000,000   | 100   | 330,000,000   | 100   | 363,000,000   | 100   | 399,300,000   | 100           | 1,667,300,000 |   |                          |
|          |   | Prosentase jumlah penduduk di Kabupaten Cirebon yang melaksanakan perekaman KTP El   | 85           | 90   | 1,373,873,400 | 92    | 1,395,000,000 | 95    | 2,056,000,000 | 96    | 2,391,500,000 | 97    | 2,655,850,000 | 97            | 9,872,223,400 |   |                          |
| 2.24.02. | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                                       | Prosentase peningkatan SKPD yang menerapkan sistem administrasi kearsipan secara baku  | 39.4         | 51.5   | 965,000,000   | 63,6  | 1,130,000,000 | 0     | 0             | 0     | 0             | 0     | 0             | 63.6          | 2,095,000,000 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN        | Program Prioritas Daerah |



| Kode     | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah                           | Indikator Kinerja Program (outcome)  | Kondisi Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                 |      |                     |      |                |                     |                |                     |                |                     |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket                      |
|----------|--|--|--------------|--|-----------------|------|---------------------|------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------|
|          |  |  |              | 2020   |                 | 2021 |                     | 2022 |                | 2023                |                | 2024                |                | Kondisi Akhir       |                 |                                   |                          |
|          |  |  |              | K  | Rp              | K    | Rp                  | K    | Rp             | K                   | Rp             | K                   | Rp             | K                   | Rp              |                                   |                          |
| 1        | 2  | 3  | 4            | 5  | 6               | 7    | 8                   | 9    | 10             | 11                  | 12             | 13                  | 14             | 15                  | 16              | 17                                | 18                       |
|          |  | Prosentase peningkatan khasanah arsip daerah   | 42.5         | 47.9   | 605,000 ,000    | 60.3 | 595,000 ,000        | 0    | 0              | 0                   | 0              | 0                   | 0              | 60.3                | 1,200,0 00,000  |                                   |                          |
|          |  | Meningkatnya durasi dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat  | 15           | 10   | 505,000 ,000    | 8    | 565,000 ,000        | 0    | 0              | 0                   | 0              | 0                   | 0              | 8                   | 1,070,0 00,000  |                                   |                          |
|          |  | Prosentase SKPD yang Tata kelola arsipnya sesuai NSPK  | 0            | 0  | 0               | 9.09 | 257,500 ,000        | 39.4 | 1,700,0 00,000 | 69.7                | 1,920,000 ,000 | 100                 | 2,090,0 00,000 | 100                 | 5,967.5 00,000  |                                   |                          |
|          | Sasaran 12   |  |              |  |                 |      |                     |      |                |                     |                |                     |                |                     |                 |                                   |                          |
| 4.2.2.   | Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih | Nilai SAKIP  | 68 Poin      | 70   |                 | 73   |                     | 76   |                | 79                  |                | 80                  |                | 80                  |                 |                                   |                          |
|          |  | Opini BPK terhadap LKPD  | WTP          | WTP  |                 | WTP  |                     | WTP  |                | WTP                 |                | WTP                 |                | WTP                 |                 |                                   |                          |
|          |  | Indeks Monitoring Center for Prevention (MCP)  | 60 Poin      | 65   |                 | 70   |                     | 75   |                | 80                  |                | 85                  |                | 85                  |                 |                                   |                          |
| 4.01.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                | Prosentase Peningkatan Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)  | 65           | 68   | 5,000,0 00      | 70   | 200,000 ,000        | 2    | 7              | 250,000 ,000        | 75             | 280,000,0 00        | 75             | 340,000 ,000        | 7 5             | 1,075,0 00,000                    | SEKRETARIAT DAERAH       |
| 5.02.02. | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  | Peningkatan Pengembangan Wilayah untuk mengurangi dampak resiko bencana, kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Pembangunan | 0            | 0  | 0               | 100  | 1.430.0 00.000, 000 | 00   | 1              | 1.573.0 00.000, 000 | 100            | 1.730.300 .000.00 0 | 100            | 1.903.3 30.000. 000 | 1 00            | 6.636.6 30.000. 000               | PPKD                     |
| 6.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN   | Persentase Peningkatan Pengawasan Internal   | 100          | 100  | 9,198,3 85,900  | 100  | 14,490, 848,170     | 00   | 1              | 16,269, 146,490     | 100            | 17,696,98 4,707     | 100            | 19,298, 519,655     | 100             | 76,953, 884,922                   | INSPEKTORAT              |
|          | Sasaran 13   |  |              |  |                 |      |                     |      |                |                     |                |                     |                |                     |                 |                                   |                          |
| 4.2.3.   | Meningkatnya maturitas pemerintahan berbasis elektronik                    | Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)  | 2,63 Poin    | 2,78   |                 | 2,93 |                     | 3,08 |                | 3,23                |                | 3,38                |                | 3,38                |                 |                                   |                          |
| 2.16.03. | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA   | Indeks aspek teknologi informasi dan komunikasi  | 2.67         | 2.97   | 14,210, 000,000 | 3    | 150,000 ,000        | 0    | 0              | 0                   | 0              | 0                   | 0              | 3                   | 14,360, 000,000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  | Program Prioritas Daerah |



| Kode     | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah  | Indikator Kinerja Program (outcome)   | Kondisi Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |       |                |       |                |       |                |       |                |               |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab      | Ket                      |
|----------|---|---|--------------|--|---------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|---------------|-----------------|--|--------------------------|
|          |   |   |              | 2020   |               | 2021  |                | 2022  |                | 2023  |                | 2024  |                | Kondisi Akhir |                 |  |                          |
|          |   |   |              | K  | Rp            | K     | Rp             | K     | Rp             | K     | Rp             | K     | Rp             | K             | Rp              |  |                          |
| 1        | 2   | 3   | 4            | 5  | 6             | 7     | 8              | 9     | 10             | 11    | 12             | 13    | 14             | 15            | 16              | 17                                     | 18                       |
|          |   | Cakupan pengelolaan aplikasi informatika  | 0            | 0  | 0             | 85.5  | 21,151,000,000 | 8     | 28,630,800,000 | 91    | 28,810,800,000 | 94    | 28,940,800,000 | 94            | 107,553,400,000 |  |                          |
|          | Sasaran 14  |   |              |  |               |       |                |       |                |       |                |       |                |               |                 |  |                          |
| 4.2.4.   | Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa  | Jumlah desa mandiri   | 2 Desa       | 5  |               | 28    |                | 49    |                | 70    |                | 91    |                | 91            |                 |  |                          |
| 2.13.04. | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA  | Meningkatnya Jumlah Desa dengan penilaian baik (perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan)                   | 40           | 40   | 2,300,000,000 | 40    | 10,230,000,000 | 0     | 0              | 0     | 0              | 0     | 0              | 40            | 12,530,000,000  | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | Program Prioritas Daerah |
|          |   | Meningkatnya jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam proses pembangunan dari perencanaan sampai implementasi | 6            | 6  | 268,250,000   | 6     | 280,075,000    | 0     | 0              | 0     | 0              | 0     | 0              | 6             | 548,325,000     |  |                          |
|          |   | Meningkatnya jumlah desa yang ketahanan ekonominya baik   | 2            | 3  | 946,222,829   | 3     | 1,040,845,112  | 0     | 0              | 0     | 0              | 0     | 0              | 6             | 1,987,067,941   |  |                          |
|          |   | Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu  | 6.06         | 0  | 0             | 12.13 | 7,650,000,000  | 24.2  | 13,648,012,123 | 30.33 | 14,521,813,336 | 36.43 | 14,388,494,669 | 36.43         | 50,208,320,128  |  |                          |
|          | MISI : 5  |   |              |  |               |       |                |       |                |       |                |       |                |               |                 |  |                          |
| 5,       | Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional |   |              |  |               |       |                |       |                |       |                |       |                |               |                 |  |                          |
|          | Tujuan : 7  |   |              |  |               |       |                |       |                |       |                |       |                |               |                 |  |                          |
| 5.1.     | Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat  | Indeks ketertiban dan ketentraman lingkungan  | Prosen       | 53.05  |               | 56.09 |                | 64.12 |                | 70.59 |                | 77.50 |                | 77.50         |                 |  |                          |
|          | Sasaran 15  |   |              |  |               |       |                |       |                |       |                |       |                |               |                 |  |                          |
| 5.1.1.   | Meningkatnya ketentraman dan ketertiban   | Jumlah pelanggaran Perda  | Kasus        | 403  |               | 398   |                | 393   |                | 338   |                | 383   |                | 383           |                 |  |                          |





| Kode     | Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah  | Indikator Kinerja Program (outcome)   | Kondisi Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |        |                |        |                |       |                |        |                |               |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab        | Ket |
|----------|---|---|--------------|--|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-------|----------------|--------|----------------|---------------|----------------|--|-----|
|          |   |   |              | 2020   |                | 2021   |                | 2022   |                | 2023  |                | 2024   |                | Kondisi Akhir |                |  |     |
|          |   |   |              | K  | Rp             | K      | Rp             | K      | Rp             | K     | Rp             | K      | Rp             | K             | Rp             |  |     |
| 1        | 2   | 3   | 4            | 5  | 6              | 7      | 8              | 9      | 10             | 11    | 12             | 13     | 14             | 15            | 16             | 17                                       | 18  |
| 1.05.02. | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                      | Prosentase peningkatan pemberantasan Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal           | 0            | 100  | 500,000,000    | 0      | 0              | 100    | 500,000,000    | 0     | 0              | 100    | 500,000,000    | 100           | 1,500,000,000  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA               |     |
|          |   | Porsentase pelayanan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang dilaksanakan      | 0            | 100  | 10,077,293,400 | 100    | 12,352,302,919 | 100    | 14,502,963,301 | 100   | 15,866,607,966 | 100    | 18,879,989,914 | 100           | 71,679,157,500 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA               |     |
|          |   | Prosentase pemenuhan tenaga satuan perlindungan masyarakat                        | 98           | 98   | 803,958,700    | 98.48  | 973,197,705    | 98.53  | 531,617,691    | 99    | 611,360,344    | 98.63  | 703,064,396    | 98.63         | 3,623,198,836  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA               |     |
|          |   | Prosentase peningkatan penertiban jumlah lokasi rawan Penyakit Masyarakat (Pekat) | 0            | 15   | 2,114,287,600  | 30     | 2,430,680,740  | 45     | 2,794,532,852  | 60    | 3,212,962,779  | 75     | 3,694,157,195  | 75            | 14,246,621,166 |  |     |
|          |   | Prosentase Perda dan Perkada yang ditegakkan                                      | 0            | 11   | 1,344,060,300  | 11.51  | 1,854,323,237  | 12.23  | 1,966,371,344  | 13    | 2,145,757,700  | 13.67  | 2,352,052,011  | 13.67         | 9,662,564,592  |  |     |
|          | Sasaran 16  |   |              |  |                |        |                |        |                |       |                |        |                |               |                |  |     |
| 5.1.2.   | Menurunnya resiko bencana   | Indek resiko bencana  | 165,44 Poin  | n.a  |                | 154,72 |                | 149,36 |                | 144   |                | 138,64 |                | 138,64        |                |  |     |
| 1.05.03. | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA  | Meningkatnya Pencapaian SPM Penanggulangan Bencana                                | 70.08        | 75.21  | 5,350,000,000  | 80.34  | 9,819,896,600  | 85.47  | 7,316,000,000  | 90.59 | 8,318,000,000  | 95.72  | 8,536,000,000  | 95.72         | 39,339,896,600 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH      |     |
| 1.05.04. | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Penurunan Jumlah Kebakaran  | 0            | 0  | 0              | 100    | 10,477,038,050 | 100    | 11,514,304,500 | 100   | 16,269,793,000 | 100    | 51,071,058,100 | 100           | 89,332,193,650 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |     |

Sumber: Hasil analisis Bappelitbangsa Kabupaten Cirebon, 2021

## **BAB VII**

### **KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Pada dasarnya, pendanaan pembangunan berasal dari berbagai sumber, baik dari dana publik yang dikelola pemerintah, dana masyarakat, dana swasta, dan sumber-sumber pendanaan lainnya. Dana tersebut secara simultan dikelola dan dialokasikan dalam berbagai kerangka pendanaan baik secara bersama maupun sendiri oleh masing-masing pihak guna memenuhi berbagai kebutuhan atau untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Adapun, kerangka pendanaan pembangunan yang diintegrasikan dalam perencanaan sebagaimana dituangkan dalam RPJMD adalah pendanaan yang berasal dari APBD sebagai satu kesatuan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu yang dialokasikan untuk mendanai berbagai kebijakan pembangunan, baik prioritas daerah maupun prioritas bidang urusan pemerintah atau perangkat daerah.

#### **7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program perangkat daerah guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten, maka dialokasikan anggaran untuk belanja daerah sebagaimana telah dihitung dan dianalisis pada Bab III RPJMD ini. Kerangka pendanaan pembangunan daerah mulai tahun 2021 telah menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, sehingga berbeda dengan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020. Hal ini diperkuat dengan Surat Edaran Nomor 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang salah satu butir SE tersebut berisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selain adanya peraturan baru yang terbit di akhir tahun 2019, terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) wabah Pandemi Covid-19 yang berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan, hal ini berdampak pada banyak aspek, antara lain aspek sosial dan ekonomi. Sektor usaha masyarakat kecil dan menengah, bahkan industri dalam skala besar juga terkena imbasnya akibat dampak pandemi COVID-19 ini.

Perkembangan penyebaran COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi dan memutus penyebaran pandemi ini, kebijakan Adaptasi kebiasaan baru (AKB), social distancing dan anjuran work from home yang diambil pemerintah, mengakibatkan beberapa sektor perekonomian, pelayanan publik, dan sektor lainnya mengurangi atau menghentikan aktivitasnya sementara sampai waktu yang belum ditentukan. Kebijakan tersebut mengakibatkan berkurangnya aktivitas masyarakat yang berimplikasi terhadap lesunya sendi-sendi perekonomian baik dalam skala makro maupun mikro.

Kondisi yang sama juga berlaku pada sektor penerimaan daerah Kabupaten Cirebon. Diterapkannya kebijakan pemerintah yang meminta agar masyarakat berdiam diri di rumah selama pandemi COVID-19 ini berdampak terhadap penerimaan pendapatan daerah, khususnya dari retribusi maupun potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penurunan pendapatan dialami karena penurunan aktivitas ekonomi masyarakat merambat pada dampak sosial di kehidupan masyarakat, dengan meningkatnya jumlah pengangguran dan berkurangnya tingkat daya beli yang pada akhirnya berdampak pada penurunan beberapa jenis penerimaan pendapatan daerah.

Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon pada Tahun Anggaran 2021 diasumsikan akan mengalami penurunan bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Hal tersebut berpengaruh terhadap proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 yang diasumsikan juga mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan target Tahun Anggaran 2020.

Dengan pendapatan daerah yang menurun, maka Belanja Daerah yang sebelumnya fokus untuk melaksanakan dan menuntaskan program/kegiatan yang sudah diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Cirebon, pada tahun mendatang selain tetap menuntaskan program/kegiatan strategis, juga harus mendanai kegiatan-kegiatan dalam rangka pemulihan ekonomi dan kesehatan pasca pandemi COVID-19.

Selanjutnya, kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah, sebagai berikut:

- a. **Prioritas I**, dialokasikan untuk membiayai belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat.
- b. **Prioritas II**, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Alokasi pemenuhan pelayanan dasar dihitung pada prioritas II dengan pertimbangan bahwa prioritas Bupati dan Wakil Bupati juga termasuk hal tersebut.
- c. **Prioritas III**, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya. Alokasi anggaran prioritas III diperuntukkan untuk mendanai program-program perangkat daerah yang tidak termasuk dalam kategori Prioritas I dan Prioritas II. Program-program tersebut dilaksanakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten namun tidak menjadi prioritas Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2019-2024.

Sebagaimana analisis pada Bab III, perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 menyajikan kerangka pendanaan perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kerangka

pendanaan pembangunan daerah pada periode tahun 2019-2020 sebagaimana yang terlihat pada tabel di bawah ini,

**Tabel 7.1**

**Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon  
Tahun 2019 dan 2020**

| No.       | Uraian   | Realisasi |          |
|-----------|--|-----------|----------|
|           |  | 2019      | 2020     |
| <b>A.</b> | <b>Belanja Tidak Langsung</b>  | 1,839.20  | 1,835.98 |
| 1.        | Belanja Gaji Dan Tunjangan   | 1,255.75  | 1,209.11 |
| 2.        | Belanja Tambahan Penghasilan   | 243.57    | 295.01   |
| 3.        | Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/Wakil KDH | 9.51      | 9.59     |
| 4.        | Belanja Pemungutan Pajak Daerah  | 9.61      | 9.99     |
| 5.        | Tambahan Penghasilan Guru PNS  | 319.62    | 311.51   |
| 6.        | Belanja Insentif Pemungutan Retribusi  | 1.15      | 0.77     |
| <b>B.</b> | <b>Belanja Langsung</b>  | 378.45    | 339.06   |
| 1.        | Belanja Honorarium PNS   | 15.02     | 10.60    |
| 2.        | Belanja Honorarium Non PNS   | 82.65     | 73.51    |
| 3.        | Belanja Uang Lembur  | 5.34      | 4.42     |
| 4.        | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS  | 0.46      | 0.00     |
| 5.        | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis PNS                 | 5.15      | 2.71     |
| 6.        | Belanja Premi Asuransi Kesehatan   | 0.36      | 1.49     |
| 7.        | Belanja Makanan dan Minuman Pegawai  | 1.88      | 3.29     |
| 8.        | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya   | 2.47      | 0.58     |
| 9.        | Belanja Pakaian Khusus dan Hari - Hari Tertentu                              | 3.48      | 4.66     |
| 10.       | Belanja Perjalanan Dinas   | 56.10     | 39.23    |
| 11.       | Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubeler, Peralatan, Perlengkapan)       | 51.30     | 32.08    |
| 12.       | Belanja Pegawai BLUD   | 108.51    | 104.33   |
| 13.       | Belanja Pegawai Dana BOS   | 45.76     | 62.15    |

Sumber: BKAD Kabupaten Cirebon, 2020

Dan selanjutnya akan disajikan data Realisasi dan Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020–2024 Berdasarkan Akun PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dalam tabel berikut ini,



**Tabel 7.2**

**Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019–2024 Berdasarkan Akun PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019  
(dalam Milyar rupiah)**

| No.  | Uraian  | Baseline | Proyeksi |          |          |          |  |
|------|---|----------|----------|----------|----------|----------|--|
|      |   | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |  |
| 1    | PENDAPATAN  | 3,770.69 | 3,711.19 | 3,742.91 | 3,899.93 | 3,930.28 |  |
| 11   | Pendapatan Asli Daerah                            | 616.57   | 671.65   | 703.37   | 860.39   | 890.74   |  |
| 111  | Pajak daerah                                      | 223.61   | 259.95   | 259.15   | 268.92   | 279.38   |  |
| 112  | Retribusi daerah                                  | 31.12    | 37.51    | 42.00    | 43.48    | 45.05    |  |
| 113  | Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan | 9.31     | 9.63     | 9.63     | 9.63     | 9.63     |  |
| 114  | Lain-lain PAD yang sah                            | 352.53   | 364.56   | 392.59   | 538.35   | 556.68   |  |
| 12   | Pendapatan Transfer                               | 2,809.56 | 2,863.15 | 2,863.15 | 2,863.15 | 2,863.15 |  |
| 121  | Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan        | 2,021.91 | 2,011.06 | 2,011.06 | 2,011.06 | 2,011.06 |  |
| 1211 | Dana Bagi Hasil Pajak                             | 69.56    | 57.84    | 57.84    | 57.84    | 57.84    |  |
| 1212 | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam                  | 38.48    | 20.87    | 20.87    | 20.87    | 20.87    |  |
| 1213 | Dana Alokasi Umum                                 | 1,417.09 | 1,406.29 | 1,406.29 | 1,406.29 | 1,406.29 |  |
| 1214 | Dana Alokasi Khusus                               | 496.78   | 526.06   | 526.06   | 526.06   | 526.06   |  |
| 122  | Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya                 | 504.52   | 495.45   | 495.45   | 495.45   | 495.45   |  |
| 1221 | Dana Otonomi Daerah                               | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |  |
| 1222 | Dana Penyesuaian                                  | 504.52   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |  |
| 1223 | Dana Insentif Daerah                              | 0.00     | 40.88    | 40.88    | 40.88    | 40.88    |  |
| 1224 | Dana Desa   | 0.00     | 454.57   | 454.57   | 454.57   | 454.57   |  |
| 123  | Transfer Pemerintah Provinsi                      | 283.13   | 356.64   | 356.64   | 356.64   | 356.64   |  |
| 1231 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak                       | 283.13   | 356.64   | 356.64   | 356.64   | 356.64   |  |
| 1232 | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya                     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |  |
| 13   | Lain-Lain Pendapatan Yang Sah                     | 344.56   | 176.39   | 176.39   | 176.39   | 176.39   |  |
| 131  | Pendapatan Hibah                                  | 233.72   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |  |
| 132  | Pendapatan Dana Darurat                           | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |  |
| 133  | Bantuan Keuangan Dari Provinsi                    | 110.84   | 176.39   | 176.39   | 176.39   | 176.39   |  |
| 134  | Pendapatan Lainnya                                | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |  |
| 2    | BELANJA   | 3,694.22 | 3,856.22 | 3,824.51 | 3,921.57 | 4,011.33 |  |
| 21   | BELANJA OPERASI                                   | 2,673.70 | 2,832.60 | 2,823.85 | 2,867.82 | 2,924.80 |  |
| 211  | Belanja Pegawai                                   | 1,779.50 | 1,835.44 | 1,881.33 | 1,928.36 | 1,976.57 |  |
| 212  | Belanja Barang dan jasa                           | 847.80   | 954.47   | 902.19   | 897.30   | 892.17   |  |
| 213  | Belanja Bunga                                     | 0        | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |  |
| 214  | Belanja Subsidi                                   | 0        | 0.00     | 3.60     | 3.60     | 3.60     |  |
| 215  | Belanja Hibah                                     | 45.48    | 29.34    | 34.50    | 36.22    | 50.00    |  |
| 216  | Belanja Bansos                                    | 0.92     | 13.35    | 2.23     | 2.34     | 2.46     |  |
| 22   | BELANJA MODAL                                     | 296.95   | 331.21   | 289.49   | 321.73   | 329.77   |  |
| 23   | BELANJA TAK TERDUGA                               | 53.99    | 28.08    | 29.48    | 30.96    | 35.60    |  |



| No.       | Uraian                   | Baseline      | Proyeksi      |               |               |               |
|-----------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |                          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
| <b>24</b> | <b>BELANJA TRANSFER</b>  | <b>669.58</b> | <b>664.33</b> | <b>681.68</b> | <b>701.06</b> | <b>721.16</b> |
| 241       | Belanja Bagi Hasil       | 26.87         | 29.72         | <b>31.21</b>  | <b>34.33</b>  | <b>37.76</b>  |
| 242       | Belanja Bantuan Keuangan | 642.71        | 634.61        | <b>650.48</b> | <b>666.74</b> | <b>683.41</b> |
|           | <b>SURPLUS/DEFISIT</b>   | 76.47         | -145.03       | -81.60        | -21.64        | -81.05        |
| <b>3</b>  | <b>PEMBIAYAAN</b>        | <b>288.83</b> | <b>359.50</b> | <b>212.27</b> | <b>128.67</b> | <b>105.02</b> |
| 31        | Penerimaan Pembiayaan    | 288.83        | 365.30        | 220.27        | 138.67        | 117.02        |
| 32        | Pengeluaran Pembiayaan   | 0             | 5.80          | 8.00          | 10.00         | 12.00         |

(proyeksi berdasarkan PP 12/2019)

## 7.2. Program Perangkat Daerah

Program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Perencanaan program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Penjabaran visi, misi, dan prioritas pembangunan Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
2. Berbasis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah, termasuk percepatan penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya;
3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar;
4. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs);
5. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, serta kualitas lingkungan hidup;
6. Penerapan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten.

Program perangkat daerah merupakan pelaksanaan dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, serta unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawasan urusan pemerintahan daerah dan unsur pemerintahan umum. Program- program tersebut disajikan berdasarkan urusan

pemerintahan daerah yang terbagi menjadi 3 (tiga) tabel yaitu program perangkat daerah tahun 2019, program perangkat daerah tahun 2020, dan program perangkat daerah tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Hal ini dilakukan karena adanya perbedaan nomenklatur program diantara periode tahun tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Program tahun 2019 disusun dan ditetapkan dalam Perda APBD Tahun 2019 pada tahun 2018, sebelum RPJMD ditetapkan pada Maret 2019. Program-program tahun 2019 selanjutnya dijabarkan kedalam berbagai kegiatan pada masing-masing Renstra Perangkat Daerah;
2. Program tahun 2020 merupakan program berdasarkan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, dengan nomenklatur yang hampir seluruhnya berbeda dengan program tahun 2019. Hal ini dilakukan sesuai hasil evaluasi Rancangan Awal RPJMD oleh Kementerian Dalam Negeri. Perbedaan nomenklatur dan jumlah program tahun 2020 dengan tahun sebelumnya diikuti dengan penyesuaian indikator kinerja program. Selanjutnya, program-program tahun 2020 dijabarkan kedalam kegiatan pada masing-masing Renstra Perangkat Daerah;
3. Program tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 disusun berdasarkan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Penerapan peraturan ini menyebabkan perencanaan pembangunan daerah yang semula hanya program dan kegiatan, maka setelah penerapan aturan menjadi program, kegiatan, dan sub kegiatan. Perbedaan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur ini menyebabkan penyesuaian indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan, dengan mengutamakan penggunaan indikator kinerja pada tahun sebelumnya. Penyesuaian klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerjanya dimuat pada Renstra Perangkat Daerah.





Lebih rinci mengenai Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 7.3**

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024**

*(dalam Juta rupiah)*

| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan    | Indikator Kinerja Program (outcome)   | Kondisi Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|---|---|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|
|          |   |   |              | 2020   |                   | 2021              |                   | 2022              |                   | 2023              |                   | 2024              |                   | Kondisi Akhir      |                   |                                   |
|          |   |   |              | K  | Rp                | K                 | Rp                | K                 | Rp                | K                 | Rp                | K                 | Rp                | K                  | Rp                |                                   |
| 1        | 2   | 3   | 4            | 5  | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10                | 11                | 12                | 13                | 14                | 15                 | 16                | 17                                |
| 1.       | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |   |              | 1,821,165,361,349                              |                   | 2,393,269,613,594 |                   | 5,101,090,311,000 |                   | 5,353,599,836,306 |                   | 5,420,730,828,821 |                   | 20,089,855,951,070 |                   |                                   |
| 1.01.    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |   |              | 1,969,673,088,628                              |                   | 2,185,788,594,198 |                   | 2,477,284,874,999 |                   | 2,559,181,862,025 |                   | 2,910,386,120,399 |                   | 12,102,314,540,249 |                   |                                   |
| 1.01.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA   | Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efeltipitas dalam penyusunan laporan perencanaan                 | 78           | 78   | 1,096,352,000     | 78                | 1,279,554,800     | 78.4              | 1,494,488,020     | 78.45             | 1,741,911,224     | 78.5              | 2,038,647,906     | 78.5               | 7,650,953,950     | DINAS PENDIDIKAN                  |
|          |   | Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektipitas dalam penyusunan laporan pengelolaan keuangan daerah | 100          | 100  | 561,100,000       | 100               | 612,000,000       | 100               | 734,400,000       | 100               | 881,280,000       | 100               | 1,057,536,000     | 100                | 3,846,316,000     | DINAS PENDIDIKAN                  |
|          |   | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik  | 78           | 78   | 2,921,346,600     | 78                | 5,420,569,300     | 78.4              | 6,003,038,286     | 78.45             | 5,129,691,025     | 78.5              | 7,358,807,280     | 78.5               | 26,833,452,491    | DINAS PENDIDIKAN                  |
|          |   | Peningkatan Mutu SDM dalam pelayanan terhadap masyarakat  | 78           | 78   | 1.377.467.512.700 | 78                | 1.463.382.420.400 | 78.4              | 1.562.021.374.400 | 78.45             | 1.567.727.920.400 | 78.5              | 1.783.503.234.900 | 78.5               | 7.754.102.462.800 | DINAS PENDIDIKAN                  |
|          |   | Peningkatan Kedisplinan dan Mutu Pelayanan Aparatur terhadap masvarakat                               | 78           | 78   | 1,610,510,000     | 78                | 1,771,561,000     | 78.4              | 1,948,717,100     | 78.45             | 2,143,588,810     | 78.5              | 2,357,947,691     | 78.5               | 9,832,324,601     | DINAS PENDIDIKAN                  |

| Kode     | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembangunan | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)                                 | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |               |                   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|----------|---|--|-----------------|--|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|---------------|-------------------|--|
|          |   |  |                 | 2020   |                 | 2021  |                 | 2022  |                 | 2023  |                 | 2024  |                 | Kondisi Akhir |                   |  |
|          |   |  |                 | K  | Rp              | K     | Rp              | K     | Rp              | K     | Rp              | K     | Rp              | K             | Rp                |  |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5  | 6               | 7     | 8               | 9     | 10              | 11    | 12              | 13    | 14              | 15            | 16                | 17   |
|          |   | Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan Administrasi Perkantoran        | 78              | 78   | 4,160,129,000   | 78    | 3,326,718,300   | 78.4  | 3,901,461,600   | 78.45 | 4,532,712,260   | 78.5  | 6,175,551,183   | 78.5          | 22,096,572,343    | DINAS PENDIDIKAN                           |
|          |   | Peningkatan layanan mutu pendidikan pada jenjang SD                          | 80              | 80   | 245,000,000     | 80    | 234,000,000     | 80.6  | 280,800,000     | 80.99 | 336,960,000     | 81.48 | 404,352,000     | 81.48         | 1,501,112,000     | DINAS PENDIDIKAN                           |
|          |   | Peningkatan layanan mutu pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama    | 76              | 77   | 5,000,000       | 77    | 5,000,000       | 77.93 | 5,000,000       | 78.39 | 5,000,000       | 78.86 | 5,000,000       | 78.86         | 25,000,000        | DINAS PENDIDIKAN                           |
| 1.01.02. |   | Angka partisipasi kasar PAUD/TK  | 67              | 68   | 2,549,175,000   | 68.41 | 23,869,752,500  | 68.82 | 27,539,227,750  | 69.23 | 30,231,650,525  | 69.65 | 33,193,315,577  | 69.65         | 117,383,121,352   | DINAS PENDIDIKAN                           |
|          |   | Angka partisipasi kasar SD   | 109             | 100  | 280,646,154,243 | 100   | 230,943,656,800 | 100   | 300,409,627,000 | 100   | 326,555,709,000 | 100   | 360,211,280,000 | 100           | 1.498.766.427.043 | DINAS PENDIDIKAN                           |
|          |   | Peningkatan Persentase Masyarakat Melek Aksara                               | 96              | 96   | 4,131,537,500   | 96.58 | 4,083,191,250   | 96.58 | 271,590,625     | 0     | 0               | 0     | 0               | 96.58         | 9,144,843,540     | DINAS PENDIDIKAN                           |
|          |   | Angka Melek Huruf Al Qur'an jenjang SD                                       | 76              | 76   | 797,039,200     | 76.46 | 911,743,000     | 0     | 0               | 0     | 0               | 0     | 0               | 76.46         | 1,708,782,200     | DINAS PENDIDIKAN                           |
|          |   | Angka Melek Huruf Al Qur'an SMP  | 56              | 60   | 967,125,000     | 63.3  | 1,086,337,500   | 0     | 0               | 0     | 0               | 0     | 0               | 63.3          | 2,053,462,500     | DINAS PENDIDIKAN                           |
|          |   | Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Kondisi Ruang Kelas Baik PAUD/TK | 60              | 60   | 1,306,552,000   | 60.72 | 5,127,977,200   | 61.09 | 8,283,774,920   | 61.45 | 8,984,652,712   | 61.82 | 11,175,974,332  | 61.82         | 34,878,931,164    | DINAS PENDIDIKAN                           |
|          |   | Peningkatan Capaian Angka Lulusan Kesetaraan Paket A setara SD               | 0               | 80   | 621,400,000     | 85    | 683,540,000     | 90    | 751,894,000     | 95    | 827,083,400     | 98    | 909,791,740     | 98            | 3,793,709,140     | DINAS PENDIDIKAN                           |
|          |   | Angka partisipasi kasar SMP  | 101             | 100  | 83,576,038,150  | 100   | 88,447,404,500  | 100   | 143,716,421,670 | 100   | 157,155,048,604 | 100   | 165,267,934,775 | 100           | 638,162,847,699   | DINAS PENDIDIKAN                           |

| Kod<br>e | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |       |                |       |                |      |                |      |                |               |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|----------|--|--|-----------------|--|---------------|-------|----------------|-------|----------------|------|----------------|------|----------------|---------------|----------------|--|
|          |  |  |                 | 2020   |               | 2021  |                | 2022  |                | 2023 |                | 2024 |                | Kondisi Akhir |                |  |
|          |  |  |                 | K  | Rp            | K     | Rp             | K     | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K             | Rp             |  |
| 1        | 2  | 3  | 4               | 5  | 6             | 7     | 8              | 9     | 10             | 11   | 12             | 13   | 14             | 15            | 16             | 17   |
|          |  | Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Persentasi fasilitas yang dimiliki sekolah PAUD/TK | 0               | 50   | 1,934,000,000 | 55    | 14,740,546,000 | 60    | 22,646,340,000 | 65   | 23,903,604,000 | 70   | 26,063,771,400 | 70            | 89,288,261,400 | DINAS PENDIDIKAN                           |
|          |  | Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat   | 100             | 100  | 10,000,000    | 100   | 10,000,000     | 100   | 5,000,000      | 100  | 5,000,000      | 100  | 5,000,000      | 100           | 35,000,000     | DINAS PENDIDIKAN                           |
|          |  | Peningkatan Capaian Angka Kelulusan Warga Belajar Paket B setara SMP                           | 68.09           | 70   | 5,000,000     | 70.04 | 5,000,000      | 70.08 | 5,000,000      | 71   | 5,000,000      | 71.7 | 5,000,000      | 71.7          | 25,000,000     | DINAS PENDIDIKAN                           |
|          |  | Standar Pelayanan Minimal  | 100             | 100  | 3,336,799,300 | 100   | 3,550,822,800  | 100   | 2,214,600,000  | 100  | 2,459,600,000  | 100  | 2,709,100,000  | 100           | 14,270,922,100 | DINAS PENDIDIKAN                           |
|          |  | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat  | 98              | 98   | 5,000,000     | 98.89 | 5,000,000      | 99.48 | 5,000,000      | 100  | 5,000,000      | 100  | 5,000,000      | 100           | 25,000,000     | DINAS PENDIDIKAN                           |
|          |  | Peningkatan Angka Lulusan pada jenjang Kesetaraan Paket C Setara SMA                           | 79.68           | 80   | 374,000,000   | 80.5  | 12,158,600,000 | 81    | 15,965,760,000 | 81   | 17,402,946,000 | 81.9 | 18,983,982,900 | 81.9          | 64,885,288,900 | DINAS PENDIDIKAN                           |
|          |  | Penerapan Manajamen Berbasis Sekolah   | 100             | 100  | 5,395,198,000 | 100   | 5,823,318,700  | 0     | 0              | 0    | 0              | 0    | 0              | 100           | 11,218,516,700 | DINAS PENDIDIKAN                           |
|          |  | Tersedianya jumlah Lembaga Pendidikan Kecakapan Hidup (LKP)                                    | 68              | 70   | 432,500,000   | 72    | 488,875,000    | 75    | 998,181,250    | 78   | 1,121,591,000  | 80   | 1,305,457,330  | 80            | 4,346,604,580  | DINAS PENDIDIKAN                           |
|          |  | Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/Mts   | 100             | 100  | 1,789,360,450 | 100   | 1,963,492,920  | 100   | 2,547,510,120  | 100  | 3,232,063,748  | 100  | 4,045,027,108  | 100           | 13,577,454,346 | DINAS PENDIDIKAN                           |
|          |  | Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah   | 0               | 100  | 660,161,600   | 100   | 748,102,750    | 100   | 7,332,896,250  | 100  | 8,048,319,000  | 100  | 8,822,722,795  | 100           | 25,612,202,395 | DINAS PENDIDIKAN                           |
|          |  | Angka Kelulusan (AL) SD/MI   | 100             | 100  | 3,723,148,000 | 100   | 5,518,062,800  | 100   | 8,210,326,800  | 100  | 9,469,464,000  | 100  | 44,216,082,950 | 100           | 71,137,084,550 | DINAS PENDIDIKAN                           |

| Kod<br>e     | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |       |                 |       |                 |      |                 |        |                 |               |                 | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|--------------|--|---|-----------------|--|----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|------|-----------------|--------|-----------------|---------------|-----------------|--|
|              |  |   |                 | 2020   |                | 2021  |                 | 2022  |                 | 2023 |                 | 2024   |                 | Kondisi Akhir |                 |  |
|              |  |   |                 | K  | Rp             | K     | Rp              | K     | Rp              | K    | Rp              | K      | Rp              | K             | Rp              |  |
| 1            | 2  | 3   | 4               | 5  | 6              | 7     | 8               | 9     | 10              | 11   | 12              | 13     | 14              | 15            | 16              | 17   |
|              |  | Meningkatnya<br>Angka Lulusan<br>SMP  | 99.95           | 100  | 2,090,901,500  | 99.98 | 19,769,183,650  | 99.99 | 26,299,472,765  | 100  | 28,711,213,137  | 100.01 | 36,249,309,626  | 100.01        | 113,120,080,678 | DINAS<br>PENDIDIKAN                        |
|              |  | Ketersediaan<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Sekolah :<br>Kondisi Ruang<br>Kelas Baik SD                          | 70              | 70   | 54,422,249,500 | 70.84 | 76,707,641,100  | 71.27 | 80,842,609,000  | 72   | 90,558,106,000  | 72.13  | 100,011,399,500 | 72.13         | 402,542,005,100 | DINAS<br>PENDIDIKAN                        |
|              |  | Ketersediaan<br>sarana dan<br>prasarana<br>sekolah : Kondisi<br>Keadaan Ruang<br>Kelas Baik SMP                 | 80              | 81   | 17,591,215,600 | 81    | 21,181,083,200  | 81.5  | 25,911,436,500  | 82   | 28,748,024,700  | 82.5   | 31,367,773,700  | 82.5          | 124,799,533,700 | DINAS<br>PENDIDIKAN                        |
|              |  | Ketersediaan<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Sekolah :<br>Persentasi<br>fasilitas yang<br>dimiliki sekolah<br>SD  | 0               | 60   | 59,322,297,400 | 65    | 77,734,867,700  | 70    | 104,101,031,325 | 75   | 104,508,012,119 | 80     | 114,603,809,237 | 80            | 460,270,017,781 | DINAS<br>PENDIDIKAN                        |
|              |  | Ketersediaan<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Sekolah :<br>Persentasi<br>fasilitas yang<br>dimiliki sekolah<br>SMP | 0               | 60   | 48,218,993,900 | 65    | 105,391,031,190 | 70    | 112,428,089,814 | 75   | 122,436,418,865 | 80     | 133,586,954,142 | 80            | 522,061,487,911 | DINAS<br>PENDIDIKAN                        |
| 1.01.<br>03. | PROGRAM<br>PENGEMBAN<br>GAN<br>KURIKULUM   | Angka<br>partisipasi kasar  | 67              | 68   | 163,600,000    | 68.41 | 179,960,000     | 68.82 | 197,956,000     | 69   | 217,751,600     | 69.65  | 239,526,760     | 69.65         | 998,794,360     | DINAS<br>PENDIDIKAN                        |
|              |  | Peningkatan<br>Capaian Angka<br>Lulusan<br>Kesetaraan<br>Paket A setara<br>SD                                   | 0               | 80   | 140,000,000    | 85    | 168,000,000     | 90    | 201,600,000     | 95   | 241,920,000     | 98     | 290,304,000     | 98            | 1,041,824,000   | DINAS<br>PENDIDIKAN                        |
|              |  | Peningkatan<br>Capaian Angka<br>Kelulusan Warga<br>Belajar Paket B<br>setara SMP                                | 68.09           | 70   | 5,000,000      | 70.04 | 5,000,000       | 70.08 | 5,000,000       | 71   | 5,000,000       | 71.7   | 5,000,000       | 71.7          | 25,000,000      | DINAS<br>PENDIDIKAN                        |
|              |  | Peningkatan<br>Angka Lulusan<br>pada jenjang<br>Kesetaraan<br>Paket C Setara<br>SMA                             | 79.68           | 80   | 5,000,000      | 80.5  | 5,000,000       | 81    | 5,000,000       | 81   | 5,000,000       | 81.9   | 5,000,000       | 81.9          | 25,000,000      | DINAS<br>PENDIDIKAN                        |

| Kode     | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembangunan | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                 |                   |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|----------|--|--|-----------------|--|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|
|          |  |  |                 | 2020   |                 | 2021              |                 | 2022              |                   | 2023              |                   | 2024              |                   | Kondisi Akhir      |                   |  |
|          |  |  |                 | K  | Rp              | K                 | Rp              | K                 | Rp                | K                 | Rp                | K                 | Rp                | K                  | Rp                |  |
| 1        | 2  | 3  | 4               | 5  | 6               | 7                 | 8               | 9                 | 10                | 11                | 12                | 13                | 14                | 15                 | 16                | 17   |
|          |  | Angka Kelulusan (AL) SD/MI   | 100             | 100  | 135,706,100     | 100               | 162,847,320     | 100               | 3,825,416,784     | 100               | 4,227,500,141     | 100               | 5,213,700,169     | 100                | 13,565,170,514    | DINAS PENDIDIKAN                           |
|          |  | Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Persentasi fasilitas yang dimiliki sekolah SD    | 0               | 60   | 3,000,000,000   | 65                | 3,300,000,000   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 65                 | 6,300,000,000     | DINAS PENDIDIKAN                           |
| 1.01.04. | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                                       | Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik pada jenjang SD | 96              | 97   | 1,530,985,885   | 97.6              | 1,726,732,518   | 98.2              | 1,995,242,395     | 99                | 2,314,928,755     | 99.3              | 2,673,648,068     | 99.3               | 10,241,537,621    | DINAS PENDIDIKAN                           |
|          |  | Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah   | 100             | 100  | 2,720,000,000   | 100               | 3,260,000,000   | 100.0             | 3,908,000,000     | 100               | 4,685,600,000     | 100               | 5,618,720,000     | 100                | 20,192,320,000    | DINAS PENDIDIKAN                           |
| 1.02.    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN   |  |                 | 424,850,377,941                                |                 | 1,008,410,383,570 |                 | 3,263,112,349,869 |                   | 3,204,547,880,861 |                   | 3,267,358,936,996 |                   | 11,168,279,929,237 |                   |  |
| 1.02.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA                   | Indeks Kepuasan Masyarakat   | 0               | 3  | 8,618,301,000   | 3.32              | 8,445,231,500   | 3.39              | 545,110,414,300   | 3                 | 570,668,565,400   | 3.53              | 597,951,057,980   | 3.53               | 1.730.793.570.180 | DINAS KESEHATAN                            |
|          |  | Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur  | 0               | 78   | 5,000,000       | 78.45             | 177,156,370,000 | 78.5              | 248,046,443,600   | 79                | 255,487,837,000   | 78.6              | 263,152,472,000   | 78.6               | 943,848,122,600   | DINAS KESEHATAN                            |
| 1.02.02. | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT    | Angka kematian ibu (AKI)   | 0               | 85   | 155,329,273,341 | 83.5              | 379,954,066,030 | 82                | 2,061,494,584.784 | 81                | 1,960,432,385.478 | 79                | 1,978,604,054.972 | 79                 | 6,535,814,364.605 | DINAS KESEHATAN                            |
|          |  | Angka kematian Bayi (AKB)  | 0               | 4  | 2,207,756,000   | 3.78              | 2,577,914,200   | 3.75              | 2,762,890,000     | 4                 | 2,991,972,000     | 3.69              | 3,228,962,000     | 3.69               | 13,769,494,200    | DINAS KESEHATAN                            |
|          |  | Tercapainya Universal Health Coverage (UHC)  | 0               | 97   | 245,576,750,100 | 97.5              | 322,177,392,840 | 98                | 324,183,357,800   | 99                | 330,692,113,600   | 99                | 336,581,779,500   | 99                 | 1,559,211,393,840 | DINAS KESEHATAN                            |

| Kod<br>e | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |                 |                 |                   |                |                   |                |                   |                |                   |                 | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|----------|--|--|-----------------|--|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|--|
|          |  |  |                 | 2020   |                | 2021            |                 | 2022              |                | 2023              |                | 2024              |                | Kondisi Akhir     |                 |  |
|          |  |  |                 | K  | Rp             | K               | Rp              | K                 | Rp             | K                 | Rp             | K                 | Rp             | K                 | Rp              |  |
| 1        | 2  | 3  | 4               | 5  | 6              | 7               | 8               | 9                 | 10             | 11                | 12             | 13                | 14             | 15                | 16              | 17   |
|          |  | Meningkatnya Status Gizi Balita  | 0               | 85   | 2,163,050,000  | 85              | 3,461,387,200   | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 85                | 5,624,437,200   | DINAS KESEHATAN                            |
|          |  | Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit  | 0               | 87   | 6,565,101,000  | 90.5            | 108,950,352,500 | 92.5              | 75,827,677,085 | 95                | 78,080,725,083 | 95.5              | 81,276,669,344 | 95.5              | 350,700,525,012 | DINAS KESEHATAN                            |
|          |  | Meningkatnya jumlah Desa Open Defecation Free (ODF)  | 0               | 44   | 1,625,859,000  | 49.76           | 1,940,529,000   | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 49.76             | 3,566,388,000   | DINAS KESEHATAN                            |
| 1.02.03. | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                        | Rasio Tenaga Kesehatan terhadap jumlah penduduk.   | 0               | 0  | 357,500,000    | 1               | 824,499,800     | 1                 | 2,433,699,800  | 1                 | 2,662,899,800  | 1                 | 2,797,099,700  | 1                 | 9,075,699,100   | DINAS KESEHATAN                            |
| 1.02.04. | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                        | Persentase TPM/TPP yang memenuhi syarat kesehatan  | 0               | 67   | 398,072,500    | 68              | 703,433,500     | 67                | 893,506,500    | 70                | 1,043,188,500  | 70                | 1,136,838,500  | 70                | 4,175,039,500   | DINAS KESEHATAN                            |
| 1.02.05. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                   | Persentase Rumah tangga ber PHBS   | 62.08           | 67   | 2,003,715,000  | 69              | 2,219,207,000   | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 69                | 4,222,922,000   | DINAS KESEHATAN                            |
|          |  | Persentase kunjungan sehat ke fasilitas kesehatan (Lebih dari 20% dari kunjungan baru Puskesmas) | 0               | 0  | 0              | 0               | 0               | 20                | 2,344,776,000  | 20                | 2,473,194,000  | 20                | 2,615,003,000  | 20                | 7,432,973,000   | DINAS KESEHATAN                            |
| 1.03.    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                       |  |                 | 774,468,245,880                                |                | 574,267,336,469 |                 | 1,612,617,195,020 |                | 1,710,711,034,647 |                | 1,752,104,083,237 |                | 6,424,167,895,253 |                 |  |
| 1.03.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA                       | Terpenuhinya Kebutuhan dasar operasional Dinas   | 100             | 100  | 35,654,743,700 | 100             | 17,727,447,154  | 100               | 80,160,505,270 | 100               | 77,215,944,897 | 100               | 83,722,493,487 | 100               | 294,481,134,508 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG        |

| Kod<br>e     | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n          | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                 |       |                     |       |                     |       |                     |       |                     |               |                           | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab   |
|--------------|---|---|-----------------|--|-----------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|---------------|---------------------------|--|
|              |   |   |                 | 2020   |                 | 2021  |                     | 2022  |                     | 2023  |                     | 2024  |                     | Kondisi Akhir |                           |  |
|              |   |   |                 | K  | Rp              | K     | Rp                  | K     | Rp                  | K     | Rp                  | K     | Rp                  | K             | Rp                        |  |
| 1            | 2   | 3   | 4               | 5  | 6               | 7     | 8                   | 9     | 10                  | 11    | 12                  | 13    | 14                  | 15            | 16                        | 17   |
| 1.03.<br>02. | PROGRAM<br>PENGELOLA<br>AN SUMBER<br>DAYA AIR<br>(SDA)                                      | Prosentase<br>jaringan irigasi<br>dalam kondisi<br>baik dan<br>Persentase<br>Berkurangnya<br>luasan genangan<br>akibat banjir | 0               | 0  | 0               | 36.99 | 169,544,97<br>5,334 | 38.06 | 226,530,49<br>0,000 | 39.42 | 224,751,49<br>0,000 | 40.78 | 225,099,99<br>0,000 | 40.78         | 845,931,94<br>5,334       | DINAS<br>PEKERJAAN<br>UMUM DAN<br>TATA RUANG |
| 1.03.<br>03. | PROGRAM<br>PENGELOLA<br>AN DAN<br>PENGEMBAN<br>GAN SISTEM<br>PENYEDIAAN<br>AIR MINUM        | Persentase<br>penduduk<br>berakses air<br>minum   | 0               | 0  | 0               | 70.59 | 7,961,778,8<br>10   | 71.66 | 33,314,000,<br>000  | 72.34 | 42,205,000<br>,000  | 73    | 52,605,000<br>,000  | 73            | 136,085,77<br>8,810       | DINAS<br>PEKERJAAN<br>UMUM DAN<br>TATA RUANG |
| 1.03.<br>04. | PROGRAM<br>PENGEMBAN<br>GAN SISTEM<br>DAN<br>PENGELOLA<br>AN<br>PERSAMPAH<br>AN<br>REGIONAL | Prosentase<br>bangunan<br>Penampung<br>Sampah Yang<br>Terbangun   | 0               | 0  | 0               | 96    | 11,097,226,<br>400  | 98    | 58,000,000,<br>000  | 99.52 | 38,000,000<br>,000  | 100   | 2,000,000,<br>000   | 100           | 109,097,22<br>6,400       | DINAS<br>PEKERJAAN<br>UMUM DAN<br>TATA RUANG |
| 1.03.<br>05. | PROGRAM<br>PENGELOLA<br>AN DAN<br>PENGEMBAN<br>GAN SISTEM<br>AIR LIMBAH                     | prosentase<br>cakupan akses<br>air limbah<br>domestik   | 0               | 0  | 0               | 78    | 571,389,51<br>0     | 81    | 67,050,000,<br>000  | 81.04 | 88,950,000<br>,000  | 81.06 | 117,650,00<br>0,000 | 81.06         | 274,221,38<br>9,510       | DINAS<br>PEKERJAAN<br>UMUM DAN<br>TATA RUANG |
| 1.03.<br>06. | PROGRAM<br>PENGELOLA<br>AN DAN<br>PENGEMBAN<br>GAN SISTEM<br>DRAINASE                       | Persentase jalan<br>yang memiliki<br>trotoar dan<br>drainase/salura<br>n pembuangan<br>air                                    | 4.21            | 4  | 5,000,000       | 4.33  | 27,147,930,<br>994  | 4.57  | 20,200,000,<br>000  | 4.57  | 20,200,000<br>,000  | 4.82  | 20,200,000<br>,000  | 4.82          | 87,752,930,<br>994        | DINAS<br>PEKERJAAN<br>UMUM DAN<br>TATA RUANG |
| 1.03.<br>08. | PROGRAM<br>PENATAAN<br>BANGUNAN<br>GEDUNG   | Rasio bangunan<br>berIMB per<br>satuan<br>bangunan  | 0               | 0  | 0               | 2     | 9,241,625,8<br>70   | 2     | 505,980,00<br>0,000 | 2     | 506,310,00<br>0,000 | 2     | 506,673,00<br>0,000 | 2             | 1.528.204.6<br>25.87<br>0 | DINAS<br>PEKERJAAN<br>UMUM DAN<br>TATA RUANG |
| 1.03.<br>09. | PROGRAM<br>PENATAAN<br>BANGUNAN<br>DAN<br>LINGKUNGA<br>NNYA                                 | persentase<br>pemenuhan<br>dokumen<br>Rencana Tata<br>Bangunan dan<br>Lingkungan  | 0               | 20   | 474,530,68<br>0 | 20    | 399,113,61<br>2     | 20    | 500,000,00<br>0     | 20    | 500,000,00<br>0     | 20    | 500,000,00<br>0     | 100           | 2,373,644,2<br>92         | DINAS<br>PEKERJAAN<br>UMUM DAN<br>TATA RUANG |
| 1.03.<br>10. | PROGRAM<br>PENYELENG<br>GARAAN<br>JALAN   | Persentase<br>jaringan jalan<br>Kabupaten<br>dalam kondisi<br>Baik  | 47              | 56   | 25,000,000      | 57    | 103,467,85<br>1,773 | 58    | 612,107,19<br>9,750 | 59    | 704,328,59<br>9,750 | 60    | 735,403,59<br>9,750 | 60            | 2.155.332.2<br>51.02<br>3 | DINAS<br>PEKERJAAN<br>UMUM DAN<br>TATA RUANG |



| Kod e        | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n   | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                     |                 |                     |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                     | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab                              |
|--------------|--|---|-----------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------|---|
|              |  |   |                 | 2020   |                     | 2021            |                     | 2022            |                   | 2023            |                   | 2024            |                   | Kondisi Akhir   |                     |   |
|              |  |   |                 | K  | Rp                  | K               | Rp                  | K               | Rp                | K               | Rp                | K               | Rp                | K               | Rp                  |   |
| 1            | 2  | 3   | 4               | 5  | 6                   | 7               | 8                   | 9               | 10                | 11              | 12                | 13              | 14                | 15              | 16                  | 17  |
| 1.03.<br>11. | PROGRAM<br>PENGEMBAN<br>GAN JASA<br>KONSTRUKSI                                       | persentase<br>meningkatnya<br>tertib<br>penyelenggaraan<br>jasa kontruksi                                 | 0               | 20   | 0                   | 40              | 426,306,10<br>4     | 60              | 2,525,000,0<br>00 | 80              | 2,000,000,<br>000 | 100             | 2,000,000,<br>000 | 100             | 6,951,306,1<br>04   | DINAS<br>PEKERJAAN<br>UMUM DAN<br>TATA RUANG                            |
| 1.03.<br>12. | PROGRAM<br>PENYELENG<br>GARAAN<br>PENATAAN<br>RUANG                                  | Persentase<br>pemenuhan<br>dokumen<br>rencana rinci<br>tata ruang dan<br>ketaatan<br>pemanfaatan<br>ruang | 23.26           | 23   | 5,000,000,0<br>00   | 66.28           | 1,719,177,4<br>08   | 72.09           | 6,250,000,0<br>00 | 77.91           | 6,250,000,<br>000 | 82.56           | 6,250,000,<br>000 | 82.56           | 25,469,177,<br>408  | DINAS<br>PEKERJAAN<br>UMUM DAN<br>TATA RUANG                            |
|              |  | Persentase<br>ketaatan<br>pemanfaatan<br>ruang  | 0               | 100  | 15,000,000          | 0               | 0                   | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0               | 15,000,000          | DINAS<br>PEKERJAAN<br>UMUM DAN<br>TATA RUANG                            |
| 1.03.<br>03. | PROGRAM<br>PENGELOLA<br>AN DAN<br>PENGEMBAN<br>GAN SISTEM<br>PENYEDIAAN<br>AIR MINUM | Cakupan jumlah<br>sambungan<br>Rumah Air<br>Minum   | 74.84           | 70   | 34,651,332,<br>100  | 70.59           | 18,580,486,<br>000  | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 70.59           | 53,231,818,<br>100  | DINAS<br>PERUMAHAN<br>, KAWASAN<br>PERMUKIMA<br>N DAN<br>PERTANAHA<br>N |
| 1.03.<br>05. | PROGRAM<br>PENGELOLA<br>AN DAN<br>PENGEMBAN<br>GAN SISTEM<br>AIR LIMBAH              | Cakupan jumlah<br>sambungan<br>Rumah Air<br>Limbah  | 82.38           | 76   | 45,523,351,<br>700  | 75.8            | 38,542,318,<br>500  | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 75.8            | 84,065,670,<br>200  | DINAS<br>PERUMAHAN<br>, KAWASAN<br>PERMUKIMA<br>N DAN<br>PERTANAHA<br>N |
| 1.03.<br>08. | PROGRAM<br>PENATAAN<br>BANGUNAN<br>GEDUNG  | Prosentase<br>Bangunan dan<br>Gedung Yang<br>Memiliki<br>Sertifikat Laik<br>Fungsi                        | 0               | 10   | 651,779,86<br>9,200 | 10              | 158,595,00<br>1,000 | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 20              | 810,374,87<br>0,200 | DINAS<br>PERUMAHAN<br>, KAWASAN<br>PERMUKIMA<br>N DAN<br>PERTANAHA<br>N |
|              |  | Rasio bangunan<br>berIMB per<br>satuan<br>Bangunan  | 0               | 100  | 1,334,418,5<br>00   | 100             | 9,244,708,0<br>00   | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 100             | 10,579,126,<br>500  | DINAS<br>PERUMAHAN<br>, KAWASAN<br>PERMUKIMA<br>N DAN<br>PERTANAHA<br>N |
| 1.04.        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG<br>PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                       |   |                 | 66,910,389,700                                 |                     | 258,611,019,700 |                     | 158,668,644,000 |                   | 319,019,688,000 |                   | 152,640,117,000 |                   | 955,849,858,400 |                     |   |



| Kod<br>e     | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   |      |                   |      |                   |      |                   |      |                   |               |                    | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab                              |
|--------------|--|--|-----------------|--|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|---------------|--------------------|---|
|              |  |  |                 | 2020   |                   | 2021 |                   | 2022 |                   | 2023 |                   | 2024 |                   | Kondisi Akhir |                    |   |
|              |  |  |                 | K  | Rp                | K    | Rp                | K    | Rp                | K    | Rp                | K    | Rp                | K             | Rp                 |   |
| 1            | 2  | 3  | 4               | 5  | 6                 | 7    | 8                 | 9    | 10                | 11   | 12                | 13   | 14                | 15            | 16                 | 17  |
| 1.04.<br>01. | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTA<br>HAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN<br>/KOTA | Persentase<br>Pemenuhan<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Aparatur yang<br>sesuai standar  | 100             | 100  | 849,719,00<br>0   | 100  | 1,885,167,2<br>00 | 0    | 0                 | 0    | 0                 | 0    | 0                 | 100           | 2,734,886,2<br>00  | DINAS<br>PERUMAHAN<br>, KAWASAN<br>PERMUKIMA<br>N DAN<br>PERTANAHA<br>N |
|              |  | Persentase<br>Pemenuhan<br>Disiplin<br>Aparatur  | 100             | 100  | 9,140,084,0<br>00 | 100  | 4,550,665,0<br>00 | 0    | 0                 | 0    | 0                 | 0    | 0                 | 100           | 13,690,749,<br>000 | DINAS<br>PERUMAHAN<br>, KAWASAN<br>PERMUKIMA<br>N DAN<br>PERTANAHA<br>N |
|              |  | Cakupan<br>Pembinaan<br>Aparatur   | 100             | 100  | 5,000,000         | 100  | 200,000,00<br>0   | 0    | 0                 | 0    | 0                 | 0    | 0                 | 100           | 205,000,00<br>0    | DINAS<br>PERUMAHAN<br>, KAWASAN<br>PERMUKIMA<br>N DAN<br>PERTANAHA<br>N |
|              |  | Persentase<br>Pemenuhan<br>Capaian Kinerja   | 100             | 100  | 177,200,00<br>0   | 100  | 209,975,00<br>0   | 0    | 0                 | 0    | 0                 | 0    | 0                 | 100           | 387,175,00<br>0    | DINAS<br>PERUMAHAN<br>, KAWASAN<br>PERMUKIMA<br>N DAN<br>PERTANAHA<br>N |
|              |  | Persentase<br>Pemenuhan<br>Pelayanan<br>Administrasi                                   | 100             | 100  | 1,275,074,2<br>00 | 100  | 1,151,504,2<br>00 | 0    | 0                 | 0    | 0                 | 0    | 0                 | 100           | 2,426,578,4<br>00  | DINAS<br>PERUMAHAN<br>, KAWASAN<br>PERMUKIMA<br>N DAN<br>PERTANAHA<br>N |
|              |  | Penjabaran<br>Konsistensi<br>Program Renja<br>ke dalam RKA                             | 100             | 100  | 215,200,00<br>0   | 100  | 204,972,00<br>0   | 0    | 0                 | 0    | 0                 | 0    | 0                 | 100           | 420,172,00<br>0    | DINAS<br>PERUMAHAN<br>, KAWASAN<br>PERMUKIMA<br>N DAN<br>PERTANAHA<br>N |
|              |  | Persentase<br>Pemenuhan<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Aparatur yang<br>sesuai standar. | 0               | 0  | 0                 | 0    | 0                 | 100  | 2,261,000,0<br>00 | 100  | 2,499,400,<br>000 | 100  | 2,189,000,<br>000 | 100           | 6,949,400,0<br>00  | DINAS<br>PERUMAHAN<br>, KAWASAN<br>PERMUKIMA<br>N DAN<br>PERTANAHA<br>N |

| Kode     | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembangunan | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)                        | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |       |                |       |                |      |                |      |                |               |                 | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab          |
|----------|--|---|-----------------|--|----------------|-------|----------------|-------|----------------|------|----------------|------|----------------|---------------|-----------------|---|
|          |  |   |                 | 2020   |                | 2021  |                | 2022  |                | 2023 |                | 2024 |                | Kondisi Akhir |                 |   |
|          |  |   |                 | K  | Rp             | K     | Rp             | K     | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K             | Rp              |   |
| 1        | 2  | 3   | 4               | 5  | 6              | 7     | 8              | 9     | 10             | 11   | 12             | 13   | 14             | 15            | 16              | 17  |
|          |  | Persentase Pemenuhan Capaian Kinerja.                               | 0               | 0  | 0              | 100   | 99,972,000     | 100   | 10,243,000,000 | 100  | 10,687,000,000 | 100  | 11,157,000,000 | 100           | 32,186,972,000  | DINAS PERUMAHAN , KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1.04.02. | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN   | Persentase Lingkungan Permukiman yang tertata                       | 96.5            | 90   | 310,000,000    | 92.42 | 95,981,500     | 0     | 0              | 0    | 0              | 0    | 0              | 92.42         | 405,981,500     | DINAS PERUMAHAN , KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
|          |  | Prosentase Perencanaan Pembangunan Perumahan yng sesuai dengan NSPK | 100             | 100  | 305,000,000    | 100   | 400,637,200    | 0     | 0              | 0    | 0              | 0    | 0              | 100           | 705,637,200     | DINAS PERUMAHAN , KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
|          |  | Persentase Lingkungan Permukiman yang tertata.                      | 0               | 0  | 0              | 92.42 | 200,000,000    | 94.94 | 2,400,000,000  | 98   | 2,410,000,000  | 100  | 2,420,000,000  | 100           | 7,430,000,000   | DINAS PERUMAHAN , KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1.04.03. | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN   | Prosentase Lingkungan Permukiman Kumuh                              | 3.7             | 3  | 11,262,254,000 | 2.24  | 12,619,437,200 | 0.00  | 0              | 0    | 0              | 0    | 0              | 0.24          | 23,881,691,200  | DINAS PERUMAHAN , KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
|          |  | Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan             | 73.34           | 79   | 5,000,000      | 84    | 152,600,000    | 0     | 0              | 0    | 0              | 0    | 0              | 84            | 157,600,000     | DINAS PERUMAHAN , KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
|          |  | Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan.            | 0               | 0  | 0              | 84    | 63,221,200,000 | 89.33 | 63,471,200,000 | 95   | 60,200,000,000 | 100  | 60,200,000,000 | 100           | 247,092,400,000 | DINAS PERUMAHAN , KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |



| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                               | Indikator Kinerja Program (outcome)                            | Kondisi Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |       |                |       |                |      |                 |      |                |               |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                   |
|----------|--|--|--------------|--|----------------|-------|----------------|-------|----------------|------|-----------------|------|----------------|---------------|-----------------|---|
|          |  |  |              | 2020   |                | 2021  |                | 2022  |                | 2023 |                 | 2024 |                | Kondisi Akhir |                 |   |
|          |  |  |              | K  | Rp             | K     | Rp             | K     | Rp             | K    | Rp              | K    | Rp             | K             | Rp              |   |
| 1        | 2  | 3  | 4            | 5  | 6              | 7     | 8              | 9     | 10             | 11   | 12              | 13   | 14             | 15            | 16              | 17  |
| 1.04.04. | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH   | Cakupan ketersediaan rumah layak huni                          | 0            | 97   | 5,000,000      | 97.78 | 34,099,084,000 | 0     | 0              | 0    | 0               | 0    | 0              | 97.78         | 34,104,084,000  | DINAS PERUMAHAN , KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
|          |  | Prosentase Lingkungan Permukiman Kumuh                         | 0            | 3  | 3,330,858,500  | 2.24  | 24,725,858,500 | 0.00  | 0              | 0    | 0               | 0    | 0              | 2.24          | 28,056,717,000  | DINAS PERUMAHAN , KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
|          |  | Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni.                         | 0            | 0  | 5,000,000      | 97.78 | 62,730,858,500 | 99.39 | 39,108,444,000 | 100  | 197,018,288,000 | 100  | 39,969,117,000 | 100           | 338,831,707,500 | DINAS PERUMAHAN , KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1.04.05. | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)                              | Rasio Pemukiman Layak Huni                                     | 43.34        | 52   | 40,000,000,000 | 61.47 | 14,742,557,200 | 0.0   | 0              | 0    | 0               | 0    | 0              | 61.47         | 54,742,557,200  | DINAS PERUMAHAN , KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
|          |  | Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yg didukung dengan PSU  | 43.34        | 52   | 0              | 61.47 | 100,000,000    | 72.8  | 100,000,000    | 85   | 100,000,000     | 100  | 100,000,000    | 100           | 400,000,000     | DINAS PERUMAHAN , KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
|          |  | Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yg didukung dengan PSU. | 0            | 0  | 25,000,000     | 61.47 | 37,220,550,200 | 72.8  | 39,835,000,000 | 85   | 44,855,000,000  | 100  | 35,355,000,000 | 100           | 157,290,550,200 | DINAS PERUMAHAN , KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1.04.06. | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG | Jumlah Pengembang Yang Tersertifikasi                          | 0            | 0  | 0              | 0     | 0              | 72.8  | 50,000,000     | 85   | 50,000,000      | 100  | 50,000,000     | 100           | 150,000,000     | DINAS PERUMAHAN , KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |

| Kod<br>e     | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n                    | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)                                      | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |                |                |             |            |             |            |             |            |                |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab                              |
|--------------|---|---|-----------------|--|---------------|----------------|----------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------------|----------------|---|
|              |   |   |                 | 2020   |               | 2021           |                | 2022        |            | 2023        |            | 2024        |            | Kondisi Akhir  |                |   |
|              |   |   |                 | K  | Rp            | K              | Rp             | K           | Rp         | K           | Rp         | K           | Rp         | K              | Rp             |   |
| 1            | 2   | 3   | 4               | 5  | 6             | 7              | 8              | 9           | 10         | 11          | 12         | 13          | 14         | 15             | 16             | 17  |
|              | PERUMAHAN<br>DAN<br>KAWASAN<br>PERMUKIMA<br>N   |   |                 |  |               |                |                |             |            |             |            |             |            |                |                |   |
| 2.10.        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG<br>PERTANAHAN  |   |                 | 16,025,000,000                                 |               | 23,569,787,264 |                | 330,000,000 |            | 340,000,000 |            | 350,000,000 |            | 40,614,787,264 |                |   |
| 2.10.<br>04. | PROGRAM<br>PENYELESAI<br>AN<br>SENGKETA<br>TANAH<br>GARAPAN   | prosentase<br>penyelesaian<br>konflik<br>pertanahan di<br>Kabupaten<br>Cirebon    | 100             | 100  | 50,000,000    | 100            | 49,998,000     | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          | 100            | 99,998,000     | DINAS<br>PERUMAHAN<br>, KAWASAN<br>PERMUKIMA<br>N DAN<br>PERTANAHA<br>N |
|              |   | Jumlah fasilitasi<br>sengketa tanah<br>garapan yg<br>ditangani                    | 0               | 0  | 0             | 5              | 49,998,000     | 5           | 25,000,000 | 5           | 25,000,000 | 5           | 25,000,000 | 20             | 124,998,000    | DINAS<br>PERUMAHAN<br>, KAWASAN<br>PERMUKIMA<br>N DAN<br>PERTANAHA<br>N |
| 2.10.<br>05. | PROGRAM<br>PENYELESAI<br>AN GANTI<br>KERUGIAN<br>DAN<br>SANTUNAN<br>TANAH<br>UNTUK<br>PEMBANGUN<br>AN | Prosentase<br>kepemilikan<br>tanah<br>pemerintah<br>daerah tertata<br>dengan baik | 0               | 44   | 7,985,000,000 | 50.35          | 11,705,539,000 | 0.00        | 0          | 0           | 0          | 0.00        | 0          | 50.35          | 19,690,539,000 | DINAS<br>PERUMAHAN<br>, KAWASAN<br>PERMUKIMA<br>N DAN<br>PERTANAHA<br>N |
| 2.10.<br>09. | PROGRAM<br>PENGELOLA<br>AN IZIN<br>MEMBUKA<br>TANAH   | Persentase<br>penetapan tanah<br>untuk<br>pembangunan<br>fasiitas umum            | 0               | 0  | 0             | 100            | 100,000,000    | 100         | 75,000,000 | 100         | 75,000,000 | 100         | 75,000,000 | 400            | 325,000,000    | DINAS<br>PERUMAHAN<br>, KAWASAN<br>PERMUKIMA<br>N DAN<br>PERTANAHA<br>N |
| 2.10.<br>10. | PROGRAM<br>PENATAGUN<br>AAN TANAH   | Penyelesaian izin<br>lokasi   | 37.89           | 100  | 7,985,000,000 | 100            | 150,000,000    | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          | 100            | 8,135,000,000  | DINAS<br>PERUMAHAN<br>, KAWASAN<br>PERMUKIMA<br>N DAN<br>PERTANAHA<br>N |

| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)  | Kondisi Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |      |                |      |                |      |                |      |                |               |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                   |
|----------|--|--|--------------|--|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|---------------|----------------|---|
|          |  |  |              | 2020   |                | 2021 |                | 2022 |                | 2023 |                | 2024 |                | Kondisi Akhir |                |   |
|          |  |  |              | K  | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K             | Rp             |   |
| 1        | 2  | 3  | 4            | 5  | 6              | 7    | 8              | 9    | 10             | 11   | 12             | 13   | 14             | 15            | 16             | 17  |
|          |  | Jumlah Data Base Pertanahan  | 0            | 7  | 5,000,000      | 7    | 5,000,000      | 0    | 0              | 0    | 0              | 0    | 0              | 14            | 10,000,000     | DINAS PERUMAHAN , KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
|          |  | Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal  | 0            | 0  | 0              | 100  | 11,509,252,264 | 100  | 230,000,000    | 100  | 240,000,000    | 100  | 250,000,000    | 100           | 12,229,252,264 | DINAS PERUMAHAN , KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1.05.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | Prosentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Sesuai dengan Standar Pelayanan                 | 100          | 100  | 830,851,400    | 100  | 1,449,311,165  | 100  | 1,553,266,421  | 100  | 1,661,798,587  | 100  | 1,781,021,474  | 100           | 7,276,249,047  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                          |
|          |  | Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang sesuai standar kebutuhan pelayanan prima             | 50           | 55   | 275,713,500    | 60   | 834,455,498    | 65   | 1,694,799,800  | 70   | 1,728,434,600  | 75   | 1,767,773,000  | 75            | 6,301,176,398  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                          |
|          |  | Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur   | 88           | 90   | 10,262,403,000 | 91   | 10,920,000,000 | 92   | 11,578,160,988 | 93   | 12,134,077,086 | 94   | 12,725,984,795 | 94            | 57,620,625,869 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                          |
|          |  | Prosentase Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif | 100          | 100  | 32,048,300     | 100  | 36,913,045     | 100  | 42,450,002     | 100  | 48,817,502     | 100  | 56,140,127     | 100           | 216,368,976    | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                          |
|          |  | Prosentase Peningkatan sistem perencanaan sektoral   | 100          | 100  | 29,999,800     | 100  | 34,499,770     | 100  | 124,674,736    | 100  | 130,625,946    | 100  | 137,469,838    | 100           | 457,270,090    | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                          |
| 1.05.02. | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN                         | Prosentase peningkatan pemberantasan Peredaran   | 0            | 100  | 500,000,000    | 0    | 0              | 100  | 500,000,000    | 0    | 0              | 100  | 500,000,000    | 100           | 1,500,000,000  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                          |

| Kod<br>e     | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                    |       |                    |       |                    |      |                    |       |                    |               |                    | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab               |
|--------------|--|---|-----------------|--|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|------|--------------------|-------|--------------------|---------------|--------------------|--|
|              |  |   |                 | 2020   |                    | 2021  |                    | 2022  |                    | 2023 |                    | 2024  |                    | Kondisi Akhir |                    |  |
|              |  |   |                 | K  | Rp                 | K     | Rp                 | K     | Rp                 | K    | Rp                 | K     | Rp                 | K             | Rp                 |  |
| 1            | 2  | 3   | 4               | 5  | 6                  | 7     | 8                  | 9     | 10                 | 11   | 12                 | 13    | 14                 | 15            | 16                 | 17   |
|              | KETERTIBAN<br>UMUM   | Barang Kena<br>Cukai Ilegal   |                 |  |                    |       |                    |       |                    |      |                    |       |                    |               |                    |  |
|              |  | Porsentase<br>pelayanan<br>ketertiban dan<br>ketentraman<br>masyarakat yang<br>dilaksanakan         | 0               | 100  | 10,077,293,<br>400 | 100   | 12,352,302,<br>919 | 100   | 14,502,963,<br>301 | 100  | 15,866,607<br>,966 | 100   | 18,879,989<br>,914 | 100           | 71,679,157,<br>500 | SATUAN<br>POLISI<br>PAMONG<br>PRAJA                      |
|              |  | Prosentase<br>pemenuhan<br>tenaga satuan<br>perlindungan<br>masyarakat                              | 98              | 98   | 803,958,70<br>0    | 98.48 | 973,197,70<br>5    | 98.53 | 531,617,69<br>1    | 99   | 611,360,34<br>4    | 98.63 | 703,064,39<br>6    | 98.63         | 3,623,198,8<br>36  | SATUAN<br>POLISI<br>PAMONG<br>PRAJA                      |
|              |  | Prosentase<br>peningkatan<br>penertiban<br>jumlah lokasi<br>rawan Penyakit<br>Masyarakat<br>(Pekat) | 0               | 15   | 2,114,287,6<br>00  | 30    | 2,430,680,7<br>40  | 45    | 2,794,532,8<br>52  | 60   | 3,212,962,<br>779  | 75    | 3,694,157,<br>195  | 75            | 14,246,621,<br>166 | SATUAN<br>POLISI<br>PAMONG<br>PRAJA                      |
|              |  | Prosentase Perda<br>dan Perkada<br>yang ditegakkan  | 0               | 11   | 1,344,060,3<br>00  | 11.51 | 1,854,323,2<br>37  | 12.23 | 1,966,371,3<br>44  | 13   | 2,145,757,<br>700  | 13.67 | 2,352,052,<br>011  | 13.67         | 9,662,564,5<br>92  | SATUAN<br>POLISI<br>PAMONG<br>PRAJA                      |
| 1.05.<br>01. | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTA<br>HAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN<br>/KOTA | Meningkatnya<br>Pelayanan<br>Administrasi<br>Perkantoran<br>sesuai Standar<br>Pelayanan Prima       | 100             | 0  | 0                  | 100   | 12,656,845,<br>275 | 100   | 12,575,729,<br>875 | 100  | 13,153,509<br>,449 | 100   | 13,874,053<br>,671 | 100           | 52,260,138,<br>270 | DINAS<br>PEMADAM<br>KEBAKARAN<br>DAN<br>PENYELAMA<br>TAN |
|              |  | Meningkatnya<br>Pelayanan<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Aparatur                                    | 100             | 0  | 0                  | 100   | 478,156,70<br>0    | 100   | 2,045,000,0<br>00  | 100  | 9,234,788,<br>000  | 100   | 6,275,603,<br>700  | 100           | 18,033,548,<br>400 | DINAS<br>PEMADAM<br>KEBAKARAN<br>DAN<br>PENYELAMA<br>TAN |
|              |  | meningkatkan<br>kedisiplinan<br>dalam<br>berpakaian<br>pegawai dinas<br>pemadam<br>kebakaran        | 189             | 0  | 0                  | 218   | 250,000,00<br>0    | 218   | 276,000,00<br>0    | 239  | 300,000,00<br>0    | 281   | 312,000,00<br>0    | 281           | 1,138,000,0<br>00  | DINAS<br>PEMADAM<br>KEBAKARAN<br>DAN<br>PENYELAMA<br>TAN |

| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                              | Indikator Kinerja Program (outcome)  | Kondisi Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab        |
|----------|---|--|--------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|--|
|          |   |  |              | 2020   |               | 2021           |                | 2022           |                | 2023           |                | 2024           |                | Kondisi Akhir   |                |  |
|          |   |  |              | K  | Rp            | K              | Rp             | K              | Rp             | K              | Rp             | K              | Rp             | K               | Rp             |  |
| 1        | 2   | 3  | 4            | 5  | 6             | 7              | 8              | 9              | 10             | 11             | 12             | 13             | 14             | 15              | 16             | 17                                       |
|          |   | peningkatan sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif                            | 5            | 0  | 0             | 5              | 13,000,000     | 5              | 13,000,000     | 5              | 13,000,000     | 5              | 13,000,000     | 20              | 52,000,000     | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 1.05.04. | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Penurunan Jumlah Kebakaran = Jumlah kebakaran yang tertangani/jumlah total kebakaran X 100%                            | 0            | 0  | 0             | 100            | 10,477,038,050 | 100            | 11,514,304,500 | 100            | 16,269,793,000 | 100            | 51,071,058,100 | 100             | 89,332,193,650 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 1.06.    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL   |  |              | 17,154,887,400                                 |               | 25,560,532,260 |                | 29,187,279,000 |                | 24,979,020,000 |                | 26,261,808,000 |                | 123,143,526,660 |                |  |
| 1.06.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                               | Prosentase peningkatan Laporan Keuangan yang dipenuhi dari yang seharusnya   | 100          | 100  | 6,252,514,000 | 100            | 7,378,814,000  | 100            | 7,510,150,000  | 100            | 7,654,920,000  | 100            | 7,759,030,000  | 500             | 36,555,428,000 | DINAS SOSIAL                             |
|          |   | Prosentase peningkatan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang telah dipenuhi dari yang seharusnya | 100          | 100  | 167,493,000   | 100            | 183,700,000    | 100            | 211,400,000    | 100            | 231,200,000    | 100            | 253,700,000    | 500             | 1,047,493,000  | DINAS SOSIAL                             |
|          |   | Prosentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah  | 100          | 100  | 130,200,000   | 100            | 143,220,000    | 100            | 157,500,000    | 100            | 173,200,000    | 100            | 190,520,000    | 500             | 794,640,000    | DINAS SOSIAL                             |
|          |   | Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi umum   | 100          | 100  | 776,930,000   | 100            | 656,500,000    | 100            | 938,129,000    | 100            | 1,000,620,000  | 100            | 1,082,900,000  | 500             | 4,455,079,000  | DINAS SOSIAL                             |



| Kod<br>e | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |       |               |       |               |       |               |       |               |               |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|----------|--|---|-----------------|--|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|---------------|----------------|--|
|          |  |   |                 | 2020   |               | 2021  |               | 2022  |               | 2023  |               | 2024  |               | Kondisi Akhir |                |  |
|          |  |   |                 | K  | Rp            | K     | Rp            | K     | Rp            | K     | Rp            | K     | Rp            | K             | Rp             |  |
| 1        | 2  | 3   | 4               | 5  | 6             | 7     | 8             | 9     | 10            | 11    | 12            | 13    | 14            | 15            | 16             | 17   |
|          |  | perangkat daerah  |                 |  |               |       |               |       |               |       |               |       |               |               |                |  |
|          |  | Prosentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah perkantoran                             | 100             | 100  | 573,119,000   | 100   | 564,730,000   | 100   | 624,300,000   | 100   | 667,280,000   | 100   | 682,508,000   | 500           | 3,111,937,000  | DINAS SOSIAL                               |
|          |  | Prosentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah                                | 0               | 100  | 33,700,000    | 100   | 37,100,000    | 100   | 40,700,000    | 100   | 44,800,000    | 100   | 49,300,000    | 500           | 205,600,000    | DINAS SOSIAL                               |
|          |  | Prosentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah  | 0               | 100  | 140,000,000   | 100   | 648,500,000   | 100   | 7,213,000,000 | 100   | 2,434,300,000 | 100   | 2,665,500,000 | 500           | 13,101,300,000 | DINAS SOSIAL                               |
| 1.06.02. | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL  | Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani                         | 244,832         | 1,200  | 750,000,000   | 1,200 | 750,000,000   | 0     | 0             | 0     | 0             | 0     | 0             | 2,400         | 1,500,000,000  | DINAS SOSIAL                               |
|          |  | Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang memiliki Pengetahuan dan Keterampilan | 7,968           | 1,528  | 3,430,000,000 | 1,492 | 4,689,000,000 | 1,492 | 2,609,400,000 | 1,492 | 2,699,800,000 | 1,492 | 2,870,800,000 | 7,496         | 16,299,000,000 | DINAS SOSIAL                               |
| 1.06.03. | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN                     | Cakupan pelayanan dan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan                  | 25              | 25   | 37,695,000    | 25    | 39,770,000    | 25    | 56,400,000    | 25    | 62,100,000    | 25    | 68,300,000    | 125           | 264,265,000    | DINAS SOSIAL                               |
| 1.06.04. | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL  | Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Terehabilitasi                     | 242,317         | 1,100  | 1,602,417,000 | 1,160 | 3,006,000,000 | 1,320 | 3,130,300,000 | 1,320 | 2,930,800,000 | 1,320 | 3,104,250,000 | 6,220         | 13,773,767,000 | DINAS SOSIAL                               |

| Kod<br>e | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |                 |               |                   |               |                 |               |                 |               |                   |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|----------|--|---|-----------------|--|---------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------|--|
|          |  |   |                 | 2020   |               | 2021            |               | 2022              |               | 2023            |               | 2024            |               | Kondisi Akhir     |                |  |
|          |  |   |                 | K  | Rp            | K               | Rp            | K                 | Rp            | K               | Rp            | K               | Rp            | K                 | Rp             |  |
| 1        | 2  | 3   | 4               | 5  | 6             | 7               | 8             | 9                 | 10            | 11              | 12            | 13              | 14            | 15                | 16             | 17   |
|          |  | Cakupan Pemerlu pelayanan Kesejahteraan Sosial yang memperoleh bantuan permakanaan  | 0               | 210  | 1,017,000,000 | 210             | 1,700,000,000 | 210               | 1,730,000,000 | 210             | 1,780,000,000 | 210             | 1,820,000,000 | 1,050             | 8,047,000,000  | DINAS SOSIAL                               |
| 1.06.05. | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL  | Cakupan Keluarga Miskin yang Menerima Program Perlindungan dan Jaminan Sosial   | 1,200           | 1,220  | 1,238,219,400 | 4,531           | 4,544,317,220 | 1,230             | 2,895,000,000 | 1,230           | 3,150,000,000 | 1,230           | 3,475,000,000 | 9,441             | 15,302,536,620 | DINAS SOSIAL                               |
| 1.06.06. | PROGRAM PENANGANAN BENCANA   | Cakupan korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah | 242,317         | 3,420  | 505,000,000   | 4,000           | 1,025,000,000 | 4,000             | 1,100,000,000 | 4,000           | 1,140,000,000 | 4,000           | 1,180,000,000 | 19,420            | 4,950,000,000  | DINAS SOSIAL                               |
|          |  | Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang memiliki Pengetahuan dan Keterampilan  | 7,968           | 1,528  | 400,000,000   | 150             | 345,445,000   | 150               | 400,000,000   | 150             | 420,000,000   | 150             | 450,000,000   | 2,128             | 2,015,445,000  | DINAS SOSIAL                               |
| 1.06.07. | PROGRAM PENGELOLAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN  | Cakupan Pengelolaan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan   | 1               | 1  | 95,600,000    | 1               | 503,436,040   | 1                 | 451,000,000   | 1               | 460,000,000   | 1               | 470,000,000   | 5                 | 1,980,036,040  | DINAS SOSIAL                               |
|          |  | Cakupan pengamanan taman makam pahlawan   | 0               | 0  | 5,000,000     | 100             | 95,000,000    | 100               | 120,000,000   | 100             | 130,000,000   | 100             | 140,000,000   | 100               | 490,000,000    | DINAS SOSIAL                               |
| 2.       | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR              |   |                 | 187,747,829,647                                |               | 358,918,121,143 |               | 1,182,734,485,040 |               | 678,390,170,308 |               | 625,447,894,756 |               | 3,033,238,500,894 |                |  |
| 2.07.    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA  |   |                 | 80,000,000                                     |               | 26,034,681,450  |               | 40,623,677,000    |               | 42,409,089,700  |               | 43,246,248,670  |               | 152,393,696,820   |                |  |

| Kod<br>e     | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                 |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |               |                     | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|--------------|--|---|-----------------|--|-----------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|---------------|---------------------|--|
|              |  |   |                 | 2020   |                 | 2021        |                    | 2022        |                    | 2023        |                    | 2024        |                    | Kondisi Akhir |                     |  |
|              |  |   |                 | K  | Rp              | K           | Rp                 | K           | Rp                 | K           | Rp                 | K           | Rp                 | K             | Rp                  |  |
| 1            | 2  | 3   | 4               | 5  | 6               | 7           | 8                  | 9           | 10                 | 11          | 12                 | 13          | 14                 | 15            | 16                  | 17   |
| 2.07.<br>01. | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTA<br>HAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN<br>/KOTA | Meningkatnya<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br>yang sesuai<br>standar<br>pelayanan<br>prima.   | 80              | 0  | 80,000,000      | 80          | 17,417,770,<br>000 | 80          | 27,829,527,<br>000 | 80          | 27,729,089<br>,700 | 80          | 28,181,248<br>,670 | 80            | 101,237,63<br>5,370 | DINAS<br>KETENAGAK<br>ERJAAN               |
| 2.07.<br>02. | PROGRAM<br>PERENCANA<br>AN TENAGA<br>KERJA   | Prosentase<br>Kegiatan Yang<br>Dilaksanakan<br>Berdasarkan<br>Dokumen PTK :<br>Tingkat Akurasi<br>Indikator PTK   | 47.06           | 0  | 0               | 64.29       | 500,000,00<br>0    | 0.00        | 0                  | 64.29       | 500,000,00<br>0    | 0.00        | 0                  | 64.29         | 1,000,000,0<br>00   | DINAS<br>KETENAGAK<br>ERJAAN               |
| 2.07.<br>03. | PROGRAM<br>PELATIHAN<br>KERJA DAN<br>PRODUKTIVI<br>TAS TENAGA<br>KERJA             | Prosentase<br>Tenaga Kerja<br>bersertifikat<br>Kompetensi   | 0.91            | 0  | 0               | 0.31        | 6,393,523,3<br>00  | 4.02        | 11,050,000,<br>000 | 4.67        | 12,300,000<br>,000 | 4.97        | 12,900,000<br>,000 | 4.97          | 42,643,523,<br>300  | DINAS<br>KETENAGAK<br>ERJAAN               |
| 2.07.<br>04. | PROGRAM<br>PENEMPATA<br>N TENAGA<br>KERJA  | Prosentase<br>Tenaga Kerja<br>yang<br>ditempatkan<br>(dalam dan luar<br>negeri) melalui<br>mekanisme<br>layanan antar<br>kerja lintas<br>daerah<br>Kabupaten/Kota<br>dalam 1 (satu)<br>propinsi | 50              | 0  | 0               | 55          | 948,388,15<br>0    | 60          | 1,134,150,0<br>00  | 65          | 1,170,000,<br>000  | 70          | 1,375,000,<br>000  | 70            | 4,627,538,1<br>50   | DINAS<br>KETENAGAK<br>ERJAAN               |
| 2.07.<br>05. | PROGRAM<br>HUBUNGAN<br>INDUSTRIAL  | Prosentase<br>Perusahaan<br>Yang<br>Menerapkan<br>Tata Kelola Yang<br>Layak   | 1.87            | 0  | 0               | 2.06        | 675,000,00<br>0    | 2.18        | 610,000,00<br>0    | 2.49        | 710,000,00<br>0    | 2.8         | 790,000,00<br>0    | 9.53          | 2,785,000,0<br>00   | DINAS<br>KETENAGAK<br>ERJAAN               |
|              |  | Jumlah Kasus<br>Antara Pekerja<br>dan Perusahaan<br>yang<br>Diselesaikan<br>Dengan<br>Perjanjian<br>Bersama   | 0               | 20   | 100,000,00<br>0 | 20          | 100,000,00<br>0    | 0           | 0                  | 0           | 0                  | 0           | 0                  | 40            | 100,000,00<br>0     | DINAS<br>KETENAGAK<br>ERJAAN               |
| 3.32.        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG<br>TRANSMIGRASI   |   |                 | 5,000,000                                      |                 | 460,000,000 |                    | 345,000,000 |                    | 395,000,000 |                    | 420,000,000 |                    | 1,625,000,000 |                     |  |



| Kod<br>e     | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n                            | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)                                   | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                    |                |                    |                |                    |                |                    |                |                    |                 |                    | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab    |
|--------------|---|--|-----------------|--|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
|              |   |  |                 | 2020   |                    | 2021           |                    | 2022           |                    | 2023           |                    | 2024           |                    | Kondisi Akhir   |                    |   |
|              |   |  |                 | K  | Rp                 | K              | Rp                 | K              | Rp                 | K              | Rp                 | K              | Rp                 | K               | Rp                 |   |
| 1            | 2   | 3  | 4               | 5  | 6                  | 7              | 8                  | 9              | 10                 | 11             | 12                 | 13             | 14                 | 15              | 16                 | 17  |
| 3.32.<br>03. | PROGRAM<br>PEMBANGUN<br>AN<br>KAWASAN<br>TRANSMIGR<br>ASI   | bertambahnya<br>wilayah tujuan<br>transmigrasi                                 | 1               | 0  | 0                  | 1              | 295,000,00<br>0    | 1              | 345,000,00<br>0    | 1              | 395,000,00<br>0    | 1              | 420,000,00<br>0    | 4               | 1,455,000,0<br>00  | DINAS<br>KETENAGAK<br>ERJAAN                  |
|              |   | Jumlah MOU<br>dengan Wilayah<br>Transmigrasi                                   | 0               | 0  | 0                  | 1              | 165,000,00<br>0    | 0              | 0                  | 0              | 0                  | 0              | 0                  | 1               | 170,000,00<br>0    | DINAS<br>KETENAGAK<br>ERJAAN                  |
| 2.09.        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN   |  |                 | 15,828,547,599                                 |                    | 25,452,109,420 |                    | 42,168,600,000 |                    | 29,653,414,446 |                    | 33,457,408,390 |                    | 146,560,079,855 |                    |   |
| 2.09.<br>01. | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTA<br>HAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN<br>/KOTA                            | Persentase<br>pemenuhan<br>capaian kinerja<br>program                          | 100             | 100  | 12,497,521,<br>000 | 100            | 17,251,000,<br>000 | 100            | 22,692,000,<br>000 | 100            | 17,560,000<br>,000 | 100            | 18,916,000<br>,000 | 100             | 88,916,521,<br>000 | DINAS<br>KETAHANAN<br>PANGAN DAN<br>PERIKANAN |
| 2.09.<br>02. | PROGRAM<br>PENGELOLA<br>AN SUMBER<br>DAYA<br>EKONOMI<br>UNTUK<br>KEDAULATA<br>N DAN<br>KEMANDIRIA<br>N PANGAN | Persentase LPM<br>yang<br>dimandirikan   | 0               | 0  | 0                  | 4.08           | 2,611,094,6<br>00  | 4.08           | 8,250,000,0<br>00  | 4.08           | 2,500,000,<br>000  | 4.08           | 2,900,000,<br>000  | 16.32           | 16,261,094,<br>600 | DINAS<br>KETAHANAN<br>PANGAN DAN<br>PERIKANAN |
|              |   | Persentase<br>ketersediaan<br>pangan utama<br>terhadap jumlah<br>penduduk      | 171.3           | 152.07   | 86,610,000         | 154.9          | 2,606,094,6<br>00  | 0              | 0                  | 0              | 0                  | 0              | 0                  | 154.9           | 2,692,704,6<br>00  | DINAS<br>KETAHANAN<br>PANGAN DAN<br>PERIKANAN |
| 2.09.<br>03. | PROGRAM<br>PENINGKATA<br>N<br>DIVERSIFIKA<br>SI DAN<br>KETAHANAN<br>PANGAN<br>MASYARAKA<br>T                  | Persentase<br>ketersediaan<br>pangan terhadap<br>jumlah<br>kebutuhan<br>pangan | 0               | 0  | 0                  | 152.04         | 5,000,000          | 152.04         | 4,250,000,0<br>00  | 155.94         | 2,050,000,<br>000  | 159.84         | 2,350,000,<br>000  | 159.84          | 8,655,000,0<br>00  | DINAS<br>KETAHANAN<br>PANGAN DAN<br>PERIKANAN |
|              |   | Persentase<br>kelompok<br>pangan yang<br>terkendali<br>harganya                | 0               | 0  | 0                  | 78.57          | 20,000,000         | 78.57          | 1,160,000,0<br>00  | 78.57          | 1,268,414,<br>446  | 85.71          | 1,700,000,<br>000  | 85.71           | 4,148,414,4<br>46  | DINAS<br>KETAHANAN<br>PANGAN DAN<br>PERIKANAN |
|              |   | Tingkat<br>Keanekaragama<br>n Konsumsi<br>Pangan                               | 0               | 0  | 0                  | 80             | 30,000,000         | 80             | 3,985,000,0<br>00  | 80             | 4,175,000,<br>000  | 80             | 4,825,000,<br>000  | 80              | 13,015,000,<br>000 | DINAS<br>KETAHANAN<br>PANGAN DAN<br>PERIKANAN |

| Kod<br>e | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintaha<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)                  | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |                   |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|----------|---|---|-----------------|--|---------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------|--|
|          |   |   |                 | 2020   |               | 2021            |                | 2022            |                | 2023            |                | 2024            |                | Kondisi Akhir     |                |  |
|          |   |   |                 | K  | Rp            | K               | Rp             | K               | Rp             | K               | Rp             | K               | Rp             | K                 | Rp             |  |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5  | 6             | 7               | 8              | 9               | 10             | 11              | 12             | 13              | 14             | 15                | 16             | 17   |
|          |   | Persentase ketersediaan pangan utama terhadap jumlah penduduk | 154.7           | 154.8  | 1,252,228,400 | 154.9           | 568,632,900    | 0               | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              | 154.9             | 1,820,861,300  | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN       |
|          |   | Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar                | 92.86           | 73.33  | 642,401,899   | 80              | 929,287,900    | 0               | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              | 80                | 1,571,689,799  | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN       |
|          |   | Stabilitas Harga Pangan (CV Harga Gabah (GKG) tingkat petani) | 10              | 10   | 228,324,600   | 10              | 344,750,000    | 0               | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              | 10                | 573,074,600    | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN       |
| 2.09.04. | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN   | Berkurangnya daerah rawan pangan                              | 41              | 0  | 0             | 8               | 10,000,000     | 8               | 581,600,000    | 13              | 800,000,000    | 20              | 1,216,408,390  | 49                | 2,608,008,390  | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN       |
|          |   | Persentase ketersediaan pangan utama terhadap jumlah penduduk | 154.7           | 154.8  | 232,747,200   | 154.9           | 220,169,620    | 0               | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              | 154.9             | 452,916,820    | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN       |
| 2.09.05. | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN  | Persentase PSAT aman dikonsumsi                               | 0               | 0  | 0             | 80              | 428,039,900    | 80              | 1,250,000,000  | 85              | 1,300,000,000  | 90              | 1,550,000,000  | 90                | 4,528,039,900  | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN       |
|          |   | Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar                | 92.86           | 73.33  | 888,714,500   | 80              | 428,039,900    | 0               | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              | 153.33            | 1,316,754,400  | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN       |
| 3.       | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN   |   |                 | 73,464,081,092                                 |               | 248,115,091,312 |                | 261,664,431,609 |                | 301,519,259,312 |                | 296,051,818,571 |                | 1,180,814,681,896 |                |  |
| 3.25.    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                                   |   |                 | 9,581,000,000                                  |               | 40,943,500,000  |                | 39,385,050,000  |                | 40,971,605,000  |                | 41,803,315,500  |                | 172,684,470,500   |                |  |
| 3.25.03. | PROGRAM PENGELOLAN PERIKANAN TANGKAP  | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap                             | 27,523          | 28,421   | 4,430,000,000 | 28,852          | 10,810,000,000 | 31,680          | 15,647,500,000 | 33,264          | 16,166,500,000 | 34,214          | 16,708,150,000 | 34,214            | 63,762,150,000 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN       |
| 3.25.04. | PROGRAM PENGELOLAN PERIKANAN BUDIDAYA   | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya                            | 32,120          | 37,180   | 2,275,000,000 | 39,040          | 9,505,500,000  | 40,990          | 6,926,150,000  | 43,040          | 6,997,565,000  | 45,190          | 7,058,371,500  | 45,190            | 32,762,586,500 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN       |
|          |   | Jumlah Produksi Pembenihan Ikan                               | 113             | 435  | 525,000,000   | 437             | 11,640,000,000 | 440             | 9,800,000,000  | 445             | 10,175,000,000 | 451             | 10,277,500,000 | 451               | 42,417,500,000 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN       |



| Kod<br>e     | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                    | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab    |
|--------------|--|--|-----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
|              |  |  |                 | 2020   |                   | 2021            |                    | 2022            |                    | 2023            |                    | 2024            |                    | Kondisi Akhir   |                    |   |
|              |  |  |                 | K  | Rp                | K               | Rp                 | K               | Rp                 | K               | Rp                 | K               | Rp                 | K               | Rp                 |   |
| 1            | 2  | 3  | 4               | 5  | 6                 | 7               | 8                  | 9               | 10                 | 11              | 12                 | 13              | 14                 | 15              | 16                 | 17  |
| 3.25.<br>05. | PROGRAM<br>PENGAWASA<br>N<br>SUMBERDAY<br>A KELAUTAN<br>DAN<br>PERIKANAN           | Tingkat<br>kepatuhan<br>pelaku usaha<br>perikanan  | 0               | 0  | 0                 | 0.00            | 0                  | 0.89            | 150,000,00<br>0    | 1.42            | 185,000,00<br>0    | 1.96            | 215,000,00<br>0    | 1.96            | 550,000,00<br>0    | DINAS<br>KETAHANAN<br>PANGAN DAN<br>PERIKANAN |
| 3.25.<br>06. | PROGRAM<br>PENGOLAHA<br>N DAN<br>PEMASARAN<br>HASIL<br>PERIKANAN                   | Jumlah<br>Produksi<br>Pengolahan hasil<br>Perikanan  | 6,200           | 6,205  | 2,251,000,0<br>00 | 6,209           | 8,268,000,0<br>00  | 10,000          | 6,261,400,0<br>00  | 10,500          | 6,782,540,<br>000  | 11,000          | 6,812,794,<br>000  | 11,000          | 30,375,734,<br>000 | DINAS<br>KETAHANAN<br>PANGAN DAN<br>PERIKANAN |
|              |  | Jumlah<br>Konsumsi Ikan  | 26              | 27.2   | 100,000,00<br>0   | 28.4            | 720,000,00<br>0    | 29.6            | 600,000,00<br>0    | 30.8            | 665,000,00<br>0    | 32              | 731,500,00<br>0    | 32              | 2,816,500,0<br>00  | DINAS<br>KETAHANAN<br>PANGAN DAN<br>PERIKANAN |
| 2.11.        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG<br>LINGKUNGAN HIDUP                                     |  |                 | 85,375,606,600                                 |                   | 117,555,136,953 |                    | 199,965,621,000 |                    | 289,276,621,000 |                    | 228,578,121,000 |                    | 920,751,106,553 |                    |   |
| 2.11.<br>01. | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTA<br>HAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN<br>/KOTA | Meningkatnya<br>Disiplin<br>Aparatur yang<br>sesuai Standar<br>Kehutuhan<br>Pelayanan prima                    | 100             | 100  | 9,355,077,3<br>00 | 100             | 10,625,396,<br>200 | 100             | 10,306,621,<br>000 | 100             | 10,446,621<br>,000 | 100             | 11,636,121<br>,000 | 100             | 52,369,836,<br>500 | DINAS<br>LINGKUNGA<br>N HIDUP                 |
|              |  | Meningkatnya<br>sistem pelaporan<br>kinerja dan<br>keuangan yang<br>transparan,<br>akuntabel dan<br>informatif | 100             | 100  | 111,743,50<br>0   | 100             | 197,090,00<br>0    | 100             | 120,000,00<br>0    | 100             | 120,000,00<br>0    | 100             | 127,000,00<br>0    | 100             | 675,833,50<br>0    | DINAS<br>LINGKUNGA<br>N HIDUP                 |
|              |  | Meningkatnya<br>Pelayanan<br>Administrasi<br>Perkantoran<br>yang sesuai<br>standar<br>Pelayanan Prima          | 0               | 0  | 0                 | 0               | 0                  | 100             | 643,000,00<br>0    | 100             | 3,400,000,<br>000  | 100             | 7,500,000,<br>000  | 300             | 11,543,000,<br>000 | DINAS<br>LINGKUNGA<br>N HIDUP                 |
|              |  | Meningkatnya<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Aparatur yang<br>sesuai<br>Kebutuhan<br>Standar<br>Pelayanan Prima  | 0               | 0  | 0                 | 0               | 0                  | 100             | 3,096,000,0<br>00  | 100             | 2,010,000,<br>000  | 100             | 1,860,000,<br>000  | 300             | 6,966,000,0<br>00  | DINAS<br>LINGKUNGA<br>N HIDUP                 |



| Kod<br>e     | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n   | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    |               |                     | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|--------------|--|---|-----------------|--|-------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|---------------|---------------------|--|
|              |  |   |                 | 2020   |                   | 2021   |                    | 2022   |                    | 2023   |                    | 2024   |                    | Kondisi Akhir |                     |  |
|              |  |   |                 | K  | Rp                | K      | Rp                 | K      | Rp                 | K      | Rp                 | K      | Rp                 | K             | Rp                  |  |
| 1            | 2  | 3   | 4               | 5  | 6                 | 7      | 8                  | 9      | 10                 | 11     | 12                 | 13     | 14                 | 15            | 16                  | 17   |
| 2.11.<br>02. | PROGRAM<br>PERENCANA<br>AN<br>LINGKUNGA<br>N HIDUP   | Tersedianya<br>dokumen<br>perencanaan<br>lingkungan<br>hidup                              | 2               | 4  | 499,999,80<br>0   | 4      | 382,004,00<br>0    | 3      | 600,000,00<br>0    | 4      | 800,000,00<br>0    | 4      | 900,000,00<br>0    | 19            | 3,182,003,8<br>00   | DINAS<br>LINGKUNGA<br>N HIDUP              |
| 2.11.<br>03. | PROGRAM<br>PENGENDALI<br>AN<br>PENCEMARA<br>N DAN/ATAU<br>KERUSAKAN<br>LINGKUNGA<br>N HIDUP  | Persentase hasil<br>pemantauan<br>kualitas air yang<br>memenuhi baku<br>mutu              | 33.3            | 42.9   | 2,910,000,0<br>00 | 52.4   | 45,208,011,<br>280 | 61.9   | 50,550,000,<br>000 | 71.4   | 50,550,000<br>,000 | 81     | 50,550,000<br>,000 | 81            | 199,768,01<br>1,280 | DINAS<br>LINGKUNGA<br>N HIDUP              |
|              |  | Luasan Tutupan<br>Lahan (M2)  | 60.17           | 121.56   | 190,000,00<br>0   | 136.56 | 200,000,00<br>0    | 151.56 | 300,000,00<br>0    | 166.56 | 400,000,00<br>0    | 181.56 | 500,000,00<br>0    | 757.8         | 1,590,000,0<br>00   | DINAS<br>LINGKUNGA<br>N HIDUP              |
| 2.11.<br>04. | PROGRAM<br>PENGELOLA<br>AN<br>KEANEKARA<br>GAMAN<br>HAYATI<br>(KEHATI)   | Meningkatnya<br>keanekaragama<br>n hayati   | 60.17           | 121.56   | 390,000,00<br>0   | 136.56 | 19,109,693,<br>600 | 151.56 | 27,300,000,<br>000 | 166.56 | 31,800,000<br>,000 | 181.56 | 23,805,000<br>,000 | 757.8         | 102,404,69<br>3,600 | DINAS<br>LINGKUNGA<br>N HIDUP              |
| 2.11.<br>06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN<br>DAN<br>PENGAWASA<br>N TERHADAP<br>IZIN<br>LINGKUNGA<br>N DAN IZIN<br>PERLINDUN<br>GAN DAN<br>PENGELOLA<br>AN<br>LINGKUNGA<br>N HIDUP<br>(PPLH) | Meningkatnya<br>ketaatan pelaku<br>usaha terhadap<br>peraturan di<br>bidang<br>lingkungan | 250             | 250  | 380,000,00<br>0   | 250    | 354,697,78<br>1    | 250    | 450,000,00<br>0    | 250    | 500,000,00<br>0    | 250    | 500,000,00<br>0    | 1,250         | 2,184,697,7<br>81   | DINAS<br>LINGKUNGA<br>N HIDUP              |
| 2.11.<br>08. | PROGRAM<br>PENINGKATA<br>N<br>PENDIDIKAN,<br>PELATIHAN<br>DAN<br>PENYULUHA<br>N<br>LINGKUNGA<br>N HIDUP<br>UNTUK<br>MASYARAKA<br>T                                     | Meningkatnya<br>kegiatan peduli<br>lingkungan yang<br>dilakukan<br>masyarakat             | 5               | 11   | 200,000,00<br>0   | 11     | 101,207,16<br>5    | 11     | 200,000,00<br>0    | 11     | 200,000,00<br>0    | 11     | 200,000,00<br>0    | 55            | 901,207,16<br>5     | DINAS<br>LINGKUNGA<br>N HIDUP              |

| Kod<br>e     | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>an dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                    |                |                    |                |                    |                |                     |                |                     |                 |                     | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab            |
|--------------|---|--|-----------------|--|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|---|
|              |   |  |                 | 2020   |                    | 2021           |                    | 2022           |                    | 2023           |                     | 2024           |                     | Kondisi Akhir   |                     |   |
|              |   |  |                 | K  | Rp                 | K              | Rp                 | K              | Rp                 | K              | Rp                  | K              | Rp                  | K               | Rp                  |   |
| 1            | 2   | 3  | 4               | 5  | 6                  | 7              | 8                  | 9              | 10                 | 11             | 12                  | 13             | 14                  | 15              | 16                  | 17  |
| 2.11.<br>09. | PROGRAM<br>PENGHARGA<br>AN<br>LINGKUNGA<br>N HIDUP<br>UNTUK<br>MASYARAKA<br>T       | Meningkatnya<br>partisipasi<br>masyarakat /<br>lembaga<br>masyarakat /<br>dunia<br>usaha/dunia<br>pendidikan<br>dalam<br>perlindungan<br>dan pengelolaan<br>lingkungan | 4               | 5  | 105,000,00<br>0    | 5              | 117,232,59<br>1    | 5              | 150,000,00<br>0    | 5              | 150,000,00<br>0     | 5              | 150,000,00<br>0     | 25              | 672,232,59<br>1     | DINAS<br>LINGKUNGA<br>N HIDUP                         |
| 2.11.<br>10. | PROGRAM<br>PENANGANA<br>N<br>PENGADUAN<br>LINGKUNGA<br>N HIDUP                      | Meningkatnya<br>pelayanan<br>penanganan<br>pengaduan<br>masyarakat   | 100             | 100  | 100,000,00<br>0    | 100            | 93,980,057         | 100            | 100,000,00<br>0    | 100            | 100,000,00<br>0     | 100            | 100,000,00<br>0     | 100             | 493,980,05<br>7     | DINAS<br>LINGKUNGA<br>N HIDUP                         |
| 2.11.<br>11. | PROGRAM<br>PENGELOLA<br>AN<br>PERSAMPAH<br>AN                                       | Prosentase<br>Cakupan<br>Pelayanan<br>pengelolaan<br>sampah  | 6.1             | 7.5  | 65,963,744,<br>500 | 15             | 36,021,603,<br>279 | 30             | 98,650,000,<br>000 | 60             | 180,100,00<br>0,000 | 70             | 120,750,00<br>0,000 | 70              | 501,485,34<br>7,779 | DINAS<br>LINGKUNGA<br>N HIDUP                         |
|              |   | Prosentase<br>Timbulan<br>Sampah yang<br>Terkurangi  | 1.27            | 3  | 5,170,041,5<br>00  | 7.5            | 5,144,221,0<br>00  | 10             | 7,500,000,0<br>00  | 15             | 8,700,000,<br>000   | 20             | 10,000,000<br>,000  | 20              | 36,514,262,<br>500  | DINAS<br>LINGKUNGA<br>N HIDUP                         |
| 2.12.        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG<br>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN<br>PENCATATAN SIPIL     |  |                 | 13,631,364,260                                 |                    | 25,442,503,800 |                    | 37,928,960,000 |                    | 38,831,658,600 |                     | 38,144,429,700 |                     | 153,978,916,360 |                     |   |
| 2.12.<br>01. | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTA<br>HAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN<br>/KOTA  | Prosentase<br>Peningkatan<br>Jumlah sarana<br>dan prasarana<br>perkantoran<br>yang dipenuhi  | 80              | 80   | 898,832,10<br>0    | 85             | 10,145,669,<br>800 | 85             | 21,918,986,<br>800 | 90             | 21,547,278<br>,800  | 90             | 19,537,143<br>,200  | 90              | 74,047,910,<br>700  | DINAS<br>KEPENDUDU<br>KAN DAN<br>PENCATATA<br>N SIPIL |
|              |   | Prosentase<br>Peningkatan<br>Laporan<br>keuangan yang<br>telah dipenuhi<br>dari yang<br>seharusnya   | 85              | 85   | 9,274,351,2<br>00  | 85             | 9,662,000,0<br>00  | 90             | 10,091,000,<br>000 | 90             | 10,542,000<br>,000  | 90             | 11,030,000<br>,000  | 90              | 50,599,351,<br>200  | DINAS<br>KEPENDUDU<br>KAN DAN<br>PENCATATA<br>N SIPIL |
|              |   | Prosentase<br>Peningkatan<br>Dokumen<br>perencanaan,<br>penganggaran<br>dan evaluasi<br>kinerja yang   | 85              | 85   | 91,408,200         | 85             | 214,000,00<br>0    | 90             | 380,000,00<br>0    | 90             | 452,500,00<br>0     | 90             | 572,500,00<br>0     | 90              | 1,710,408,2<br>00   | DINAS<br>KEPENDUDU<br>KAN DAN<br>PENCATATA<br>N SIPIL |





| Kod<br>e | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |       |               |      |               |       |               |       |               |               |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|----------|--|---|-----------------|--|---------------|-------|---------------|------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|---------------|---------------|--|
|          |  |   |                 | 2020   |               | 2021  |               | 2022 |               | 2023  |               | 2024  |               | Kondisi Akhir |               |  |
|          |  |   |                 | K  | Rp            | K     | Rp            | K    | Rp            | K     | Rp            | K     | Rp            | K             | Rp            |  |
| 1        | 2  | 3   | 4               | 5  | 6             | 7     | 8             | 9    | 10            | 11    | 12            | 13    | 14            | 15            | 16            | 17   |
|          |  | telah dipenuhi dari yang seharusnya   |                 |  |               |       |               |      |               |       |               |       |               |               |               |  |
| 2.12.02. | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK   | Cakupan Jumlah Keluarga yang sudah memiliki Dokumen Kependudukan lengkap (Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak / KIA | 28.9            | 28.9   | 300,000,000   | 32.74 | 350,000,000   | 37.5 | 385,000,000   | 44.18 | 423,500,000   | 51.81 | 465,850,000   | 51.81         | 1,924,350,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL    |
|          |  | Cakupan Jumlah Keluarga yang sudah memiliki Dokumen Kependudukan lengkap (Persentase kepemilikan Kartu Keluarga / KK )      | 100             | 100  | 275,000,000   | 100   | 300,000,000   | 100  | 330,000,000   | 100   | 363,000,000   | 100   | 399,300,000   | 100           | 1,667,300,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL    |
|          |  | Prosentase jumlah penduduk di Kabupaten Cirebon yang sudah melaksanakan perekaman KTP El                                    | 85              | 90   | 1,373,873,400 | 92    | 1,395,000,000 | 95   | 2,056,000,000 | 96    | 2,391,500,000 | 97    | 2,655,850,000 | 97            | 9,872,223,400 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL    |
| 2.12.03. | PROGRAM PENCATATAN SIPIL   | Prosentase Penduduk yang sudah memiliki Dokumen Akta Kelahiran yang telah terkonversi ke dalam Database SIAK                | 35              | 35   | 97,699,900    | 39.75 | 165,000,000   | 42.7 | 586,000,000   | 45.64 | 672,000,000   | 48.58 | 773,000,000   | 48.58         | 2,293,699,900 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL    |

| Kod<br>e | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>an dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |                |               |                |               |                |               |                |               |                 |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|----------|---|--|-----------------|--|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|--|
|          |   |  |                 | 2020   |               | 2021           |               | 2022           |               | 2023           |               | 2024           |               | Kondisi Akhir   |               |  |
|          |   |  |                 | K  | Rp            | K              | Rp            | K              | Rp            | K              | Rp            | K              | Rp            | K               | Rp            |  |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5  | 6             | 7              | 8             | 9              | 10            | 11             | 12            | 13             | 14            | 15              | 16            | 17   |
|          |   | Rata-rata Prosentase realisasi Akta-akta pencatatan sipil yang diterbitkan ( Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian dan akte pengakuan, pengesahan dan pengangkatan anak) | 74              | 76   | 585,142,880   | 78             | 645,000,000   | 80             | 835,000,000   | 82             | 915,000,000   | 85             | 1,016,000,000 | 85              | 3,996,142,880 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL    |
| 2.12.04. | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN                             | Jumlah OPD dan Desa yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ( PKS ) dan telah didukung dengan Aplikasi khusus                                  | 20              | 20   | 84,700,000    | 20             | 442,701,000   | 20             | 150,000,000   | 20             | 165,000,000   | 20             | 180,000,000   | 80              | 1,022,401,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL    |
|          |   | Prosentase Jaringan SIAK di Kabupaten Cirebon berfungsi dengan baik  | 95              | 95   | 617,318,580   | 95             | 1,923,133,000 | 95             | 1,031,973,200 | 95             | 1,179,879,800 | 95             | 1,318,786,500 | 95              | 6,071,091,080 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL    |
| 2.12.05. | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN   | Persentase Update Penyediaan Data Profil Kependudukan  | 85              | 90   | 33,038,000    | 92             | 200,000,000   | 94             | 165,000,000   | 96             | 180,000,000   | 98             | 196,000,000   | 98              | 774,038,000   | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL    |
| 2.13.    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                         |  |                 | 13,083,009,052                                 |               | 32,467,697,043 |               | 27,035,464,761 |               | 29,587,424,817 |               | 29,125,226,961 |               | 131,298,822,634 |               |  |
| 2.13.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA                        | Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran   | 100             | 100  | 1,327,861,560 | 100            | 926,066,592   | 100            | 998,203,605   | 100            | 1,076,520,044 | 100            | 1,159,864,211 | 100             | 5,488,516,012 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA     |
|          |   | Meningkatnya prosentase sarana dan   | 75              | 75   | 436,809,600   | 75             | 1,441,525,000 | 75             | 455,945,000   | 75             | 1,205,607,000 | 75             | 466,535,200   | 75              | 4,006,421,800 | DINAS PEMBERDAYAAN                         |



| Kode     | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembangunan | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |      |               |      |               |       |               |       |               |               |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|----------|---|---|-----------------|--|---------------|------|---------------|------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|---------------|----------------|--|
|          |   |   |                 | 2020   |               | 2021 |               | 2022 |               | 2023  |               | 2024  |               | Kondisi Akhir |                |  |
|          |   |   |                 | K  | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K     | Rp            | K     | Rp            | K             | Rp             |  |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5  | 6             | 7    | 8             | 9    | 10            | 11    | 12            | 13    | 14            | 15            | 16             | 17   |
|          |   | prasarana<br>aparatur   |                 |  |               |      |               |      |               |       |               |       |               |               |                | MASYARAKAT DAN DESA                        |
|          |   | Meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan kegiatan dinas  | 100             | 100  | 4,741,974,000 | 100  | 4,928,000,000 | 100  | 5,131,500,000 | 100   | 5,348,000,000 | 100   | 5,577,500,000 | 100           | 25,726,974,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA     |
|          |   | Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif   | 100             | 100  | 93,899,800    | 100  | 101,300,000   | 100  | 115,430,000   | 100   | 125,473,000   | 100   | 136,520,300   | 500           | 572,623,100    | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA     |
|          |   | Meningkatnya prosentase akuntabilitas pengembangan sistem perencanaan sektoral  | 100             | 100  | 65,000,000    | 100  | 66,600,000    | 100  | 143,310,000   | 100   | 156,641,000   | 100   | 171,105,100   | 100           | 602,656,100    | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA     |
| 2.13.02. | PROGRAM PENATAAN DESA   | Meningkatnya jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam proses pembangunan dari perencanaan sampai implementasi | 6               | 6  | 385,246,323   | 6    | 428,770,955   | 0    | 0             | 0     | 0             | 0     | 0             | 6             | 814,017,278    | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA     |
|          |   | Meningkatnya jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatan nya aktif  | 40              | 60   | 50,000,000    | 80   | 50,000,000    | 0    | 0             | 0     | 0             | 0     | 0             | 140           | 100,000,000    | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA     |
|          |   | Persentase (%) Peningkatan Jumlah Desa yang di fasilitasi Penataan Kewenangan Desanya   | 0               | 0  | 0             | 2.42 | 190,000,000   | 9.7  | 326,648,051   | 42.73 | 689,312,856   | 45.15 | 507,244,142   | 100           | 1,713,205,049  | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA     |

| Kode     | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembangunan | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |       |                |      |                |       |                |       |                |               |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab      |
|----------|---|---|-----------------|--|---------------|-------|----------------|------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|---------------|----------------|---|
|          |   |   |                 | 2020   |               | 2021  |                | 2022 |                | 2023  |                | 2024  |                | Kondisi Akhir |                |   |
|          |   |   |                 | K  | Rp            | K     | Rp             | K    | Rp             | K     | Rp             | K     | Rp             | K             | Rp             |   |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5  | 6             | 7     | 8              | 9    | 10             | 11    | 12             | 13    | 14             | 15            | 16             | 17  |
| 2.13.03. | PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>KERJASAMA<br>DESA                                 | Meningkatnya jumlah desa yg melakukan kerja sama dalam proses pembangunan   | 6               | 2  | 320,499,500   | 2     | 323,000,000    | 0    | 0              | 0     | 0              | 0     | 0              | 2             | 643,499,500    | DINAS<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DAN DESA |
|          |   | Peningkatan % Jumlah Desa yang melaksanakan Kerjasama Desa  | 0               | 0  | 0             | 0     | 715,000,000    | 8.3  | 2,330,000,000  | 38.16 | 2,328,000,000  | 49.12 | 2,332,000,000  | 49.12         | 7,705,000,000  | DINAS<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DAN DESA |
| 2.13.04. | PROGRAM<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN<br>DESA                             | Meningkatnya Jumlah Desa dengan penilaian baik (perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan)                   | 40              | 40   | 2,300,000,000 | 40    | 10,230,000,000 | 0    | 0              | 0     | 0              | 0     | 0              | 40            | 12,530,000,000 | DINAS<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DAN DESA |
|          |   | Meningkatnya jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam proses pembangunan dari perencanaan sampai implementasi | 6               | 6  | 268,250,000   | 6     | 280,075,000    | 0    | 0              | 0     | 0              | 0     | 0              | 6             | 548,325,000    | DINAS<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DAN DESA |
|          |   | Meningkatnya jumlah desa yang ketahanan ekonominya baik   | 2               | 3  | 946,222,829   | 3     | 1,040,845,112  | 0    | 0              | 0     | 0              | 0     | 0              | 6             | 1,987,067,941  | DINAS<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DAN DESA |
|          |   | Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu  | 6.06            | 0  | 0             | 12.13 | 7,650,000,000  | 24.2 | 13,648,012,123 | 30.33 | 14,521,813,336 | 36.43 | 14,388,494,669 | 36.43         | 50,208,320,128 | DINAS<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DAN DESA |

| Kod<br>e     | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>an dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n                                  | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |                |                    | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab  |
|--------------|--|--|-----------------|--|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|--------------------|---|
|              |  |  |                 | 2020   |                   | 2021          |                   | 2022          |                   | 2023          |                   | 2024          |                   | Kondisi Akhir  |                    |   |
|              |  |  |                 | K  | Rp                | K             | Rp                | K             | Rp                | K             | Rp                | K             | Rp                | K              | Rp                 |   |
| 1            | 2  | 3  | 4               | 5  | 6                 | 7             | 8                 | 9             | 10                | 11            | 12                | 13            | 14                | 15             | 16                 | 17  |
| 2.13.<br>05. | PROGRAM<br>PEMBERDAY<br>AAN<br>LEMBAGA<br>KEMASYARA<br>KATAN,<br>LEMBAGA<br>ADAT DAN<br>MASYARAKA<br>T HUKUM<br>ADAT | Meningkatnya<br>jumlah desa<br>yang lembaga<br>Kemasyarakatan<br>nya aktif                 | 40              | 60   | 1,793,245,4<br>40 | 80            | 1,905,609,9<br>84 | 0             | 0                 | 0             | 0                 | 0             | 0                 | 140            | 3,698,855,4<br>24  | DINAS<br>PEMBERDAY<br>AAN<br>MASYARAKA<br>T DAN DESA  |
|              |  | Meningkatnya<br>jumlah desa<br>yang ketahanan<br>ekonominya baik                           | 2               | 3  | 354,000,00<br>0   | 3             | 598,950,00<br>0   | 0             | 0                 | 0             | 0                 | 0             | 0                 | 6              | 952,950,00<br>0    | DINAS<br>PEMBERDAY<br>AAN<br>MASYARAKA<br>T DAN DESA  |
|              |  | Persentase<br>Peningkatan<br>jumlah desa<br>yang lembaga<br>Kemasyarakatan<br>nya aktif*   | 0               | 0  | 0                 | 21            | 1,591,954,4<br>00 | 21.36         | 3,886,415,9<br>82 | 21.84         | 4,136,057,<br>581 | 23.79         | 4,385,963,<br>339 | 66.99          | 14,000,391,<br>302 | DINAS<br>PEMBERDAY<br>AAN<br>MASYARAKA<br>T DAN DESA  |
| 2.08.        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG<br>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK  |  |                 | 2,147,984,080                                  |                   | 3,861,967,100 |                   | 5,019,857,320 |                   | 5,753,168,336 |                   | 6,576,565,933 |                   | 23,359,542,769 |                    |   |
| 2.08.<br>02. | PROGRAM<br>PENGARUSU<br>TAMAA N<br>GENDER<br>DAN<br>PEMBERDAY<br>AAN<br>PEREMPUAN                                    | Persentase<br>Lembaga /<br>Kelompok<br>berbasis gender<br>yang<br>mendapatkan<br>penguatan | 60.51           | 25   | 60,000,000        | 25            | 313,195,20<br>0   | 25            | 385,834,72<br>0   | 25            | 468,001,66<br>1   | 25            | 560,801,99<br>7   | 25             | 1,787,833,5<br>78  | DINAS<br>PENGENDALI<br>AN<br>PENDUDUK,<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAY<br>AAN<br>PEREMPUAN<br>DAN<br>PERLINDUN<br>GAN ANAK |
|              |  | Proporsi<br>perempuan<br>dalam pekerjaan<br>upahan di sector<br>nonpertanian               | 28.73           | 11.46  | 5,000,000         | 11.7          | 105,255,00<br>0   | 11.9          | 115,780,50<br>0   | 12.1          | 127,358,55<br>0   | 12.3          | 140,094,40<br>5   | 12.3           | 493,488,45<br>5    | DINAS<br>PENGENDALI<br>AN<br>PENDUDUK,<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAY<br>AAN<br>PEREMPUAN<br>DAN<br>PERLINDUN<br>GAN ANAK |

| Kod<br>e | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>an dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)                                     | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |      |               |      |               |      |               |      |               |               |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab  |
|----------|---|--|-----------------|--|-------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|---|
|          |   |  |                 | 2020   |             | 2021 |               | 2022 |               | 2023 |               | 2024 |               | Kondisi Akhir |               |   |
|          |   |  |                 | K  | Rp          | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K             | Rp            |   |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5  | 6           | 7    | 8             | 9    | 10            | 11   | 12            | 13   | 14            | 15            | 16            | 17  |
|          |   | Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan                                  | 40.39           | 35.7   | 5,000,000   | 35.8 | 91,800,000    | 35.9 | 110,160,000   | 36.1 | 132,192,000   | 36.2 | 158,630,400   | 36.2          | 497,782,400   | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 2.08.03. | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN  | Prosentase perempuan yang mendapat perlindungan                                  | 60.51           | 1.25   | 802,500,200 | 1.29 | 1,169,928,200 | 1.33 | 1,488,377,800 | 1.37 | 1,684,170,240 | 1.41 | 1,906,628,412 | 1.41          | 7,051,604,852 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 2.08.04. | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA   | Meningkatnya ketahanan keluarga yang ditandai dengan menurunnya angka perceraian | 0               | 0.84   | 354,322,000 | 0.83 | 462,114,000   | 0.82 | 607,276,700   | 0.82 | 707,532,765   | 0.81 | 819,514,975   | 0.81          | 2,950,760,440 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 2.08.05. | PROGRAM PENGELOLAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK                                      | Pelaksanaan pengumpulan data terpilah gender                                     | 7.5             | 100  | 100,131,600 | 100  | 150,000,000   | 100  | 180,000,000   | 100  | 216,000,000   | 100  | 259,200,000   | 100           | 905,331,600   | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |

| Kod<br>e     | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>an dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   |                |                   |                |                   |                |                   |                |                   |                 |                    | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab  |
|--------------|---|---|-----------------|--|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|---|
|              |   |   |                 | 2020   |                   | 2021           |                   | 2022           |                   | 2023           |                   | 2024           |                   | Kondisi Akhir   |                    |   |
|              |   |   |                 | K  | Rp                | K              | Rp                | K              | Rp                | K              | Rp                | K              | Rp                | K               | Rp                 |   |
| 1            | 2   | 3   | 4               | 5  | 6                 | 7              | 8                 | 9              | 10                | 11             | 12                | 13             | 14                | 15              | 16                 | 17  |
| 2.08.<br>06. | PROGRAM<br>PEMENUHAN<br>HAK ANAK<br>(PHA)   | Presentase anak<br>yang mendapat<br>perlindungan                                    | 0               | 1.86   | 801,030,28<br>0   | 1.94           | 1,012,151,7<br>00 | 2.16           | 1,333,400,0<br>00 | 2.28           | 1,490,080,<br>000 | 2.4            | 1,653,096,<br>000 | 2.4             | 6,289,757,9<br>80  | DINAS<br>PENGENDALI<br>AN<br>PENDUDUK,<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAY<br>AAN<br>PEREMPUAN<br>DAN<br>PERLINDUN<br>GAN ANAK |
| 2.08.<br>07. | PROGRAM<br>PERLINDUN<br>GAN<br>KHUSUS<br>ANAK                                       | Jumlah layanan<br>korban<br>kekerasan   | 0               | 100  | 20,000,000        | 100            | 557,523,00<br>0   | 100            | 799,027,60<br>0   | 100            | 927,833,12<br>0   | 100            | 1,078,599,<br>744 | 100             | 3,382,983,4<br>64  | DINAS<br>PENGENDALI<br>AN<br>PENDUDUK,<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAY<br>AAN<br>PEREMPUAN<br>DAN<br>PERLINDUN<br>GAN ANAK |
| 2.14.        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG<br>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA<br>BERENCANA       |   |                 | 37,895,352,000                                 |                   | 57,443,541,597 |                   | 68,198,473,139 |                   | 72,998,710,753 |                   | 80,434,726,143 |                   | 316,970,803,632 |                    |   |
| 2.14.<br>01. | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTA<br>HAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN<br>/KOTA  | Meningkatnya<br>prosentase<br>pemenuhan<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran | 94              | 95   | 1,146,137,6<br>00 | 95             | 1,984,520,0<br>00 | 0              | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0                 | 190             | 3,130,657,6<br>00  | DINAS<br>PENGENDALI<br>AN<br>PENDUDUK,<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAY<br>AAN<br>PEREMPUAN<br>DAN<br>PERLINDUN<br>GAN ANAK |
|              |   | meningkatnya<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur                                 | 85              | 92   | 7,088,000,0<br>00 | 92             | 8,413,837,2<br>67 | 0              | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0                 | 184             | 15,501,837,<br>267 | DINAS<br>PENGENDALI<br>AN<br>PENDUDUK,<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAY<br>AAN<br>PEREMPUAN<br>DAN<br>PERLINDUN<br>GAN ANAK |



| Kod<br>e | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |      |                |      |    |      |    |      |    |               |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab  |
|----------|--|--|-----------------|--|----------------|------|----------------|------|----|------|----|------|----|---------------|----------------|---|
|          |  |  |                 | 2020   |                | 2021 |                | 2022 |    | 2023 |    | 2024 |    | Kondisi Akhir |                |   |
|          |  |  |                 | K  | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp | K    | Rp | K    | Rp | K             | Rp             |   |
| 1        | 2  | 3  | 4               | 5  | 6              | 7    | 8              | 9    | 10 | 11   | 12 | 13   | 14 | 15            | 16             | 17  |
|          |  | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur   | 0               | 100  | 16,331,211,600 | 100  | 16,956,000,000 | 0    | 0  | 0    | 0  | 0    | 0  | 200           | 33,287,211,600 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|          |  | Persentase Pelayanan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  | 0               | 100  | 875,000,000    | 100  | 948,600,000    | 0    | 0  | 0    | 0  | 0    | 0  | 200           | 1,823,600,000  | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|          |  | Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif | 96.4            | 97.4   | 42,822,000     | 97.4 | 39,804,600     | 0    | 0  | 0    | 0  | 0    | 0  | 194.8         | 82,626,600     | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|          |  | Persentase Sistem Perencanaan Sektoral   | 96              | 95   | 20,239,000     | 95   | 48,550,200     | 0    | 0  | 0    | 0  | 0    | 0  | 190           | 68,789,200     | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |



| Kod<br>e | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)                | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |      |                |      |                |      |                |      |                |               |                 | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab   |
|----------|--|---|-----------------|--|---------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|---------------|-----------------|--|
|          |  |   |                 | 2020   |               | 2021 |                | 2022 |                | 2023 |                | 2024 |                | Kondisi Akhir |                 |  |
|          |  |   |                 | K  | Rp            | K    | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K             | Rp              |  |
| 1        | 2  | 3   | 4               | 5  | 6             | 7    | 8              | 9    | 10             | 11   | 12             | 13   | 14             | 15            | 16              | 17   |
|          |  | Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelaporan | 0               | 0  | 0             | 0    | 0              | 100  | 35,186,644,000 | 100  | 35,975,838,800 | 100  | 38,662,922,360 | 100           | 109,825,405,160 | DINAS PENGENDALI AN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK |
| 2.14.02. | PROGRAM PENGENDALI AN PENDUDUK   | tersediannya informasi data keluarga                        | 0               | 100  | 839,436,500   | 100  | 3,087,564,880  | 100  | 1,797,355,749  | 100  | 1,922,019,624  | 100  | 2,054,748,182  | 500           | 9,701,124,935   | DINAS PENGENDALI AN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK |
| 2.14.03. | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)  | Presentase jumlah Apseptor MKJP                             | 22.5            | 24   | 237,000,000   | 24.2 | 4,309,892,900  | 0    | 0              | 0    | 0              | 0    | 0              | 24.2          | 4,546,892,900   | DINAS PENGENDALI AN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK |
|          |  | Persentase masyarakat dalam Keikutsertaan ber- KB           | 25              | 72.54  | 9,978,535,000 | 72.8 | 14,295,315,420 | 0    | 0              | 0    | 0              | 0    | 0              | 72.8          | 24,273,850,420  | DINAS PENGENDALI AN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK |



| Kod<br>e | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)                                   | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |      |               |      |               |      |               |      |               |               |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab  |
|----------|--|--|-----------------|--|-------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|---|
|          |  |  |                 | 2020   |             | 2021 |               | 2022 |               | 2023 |               | 2024 |               | Kondisi Akhir |                |   |
|          |  |  |                 | K  | Rp          | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K             | Rp             |   |
| 1        | 2  | 3  | 4               | 5  | 6           | 7    | 8             | 9    | 10            | 11   | 12            | 13   | 14            | 15            | 16             | 17  |
|          |  | Meningkatnya jumlah pendidik/Motivator sebaya                                  | 520             | 340  | 17,000,000  | 340  | 34,000,000    | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 680           | 51,000,000     | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|          |  | Pembinaan Kampung KB (Keluarga Berkualitas) dengan ditandai peningkatan status | 10              | 12.5   | 258,995,300 | 12.5 | 4,932,550,600 | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 25            | 5,191,545,900  | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|          |  | Tingkat Kesehatan Reproduksi Remaja  | 18.54           | 19.2   | 310,145,000 | 19.2 | 937,967,000   | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 38.4          | 1,248,112,000  | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|          |  | Peningkatan jumlah akseptor MKJP   | 0               | 0  | 0           | 0    | 0             | 25.2 | 3,400,000,000 | 25.3 | 3,650,000,000 | 25.4 | 4,000,000,000 | 75.9          | 11,050,000,000 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |



| Kode | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembangunan | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |    |      |    |      |                |      |                |      |                |               |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab  |
|------|---|--|-----------------|--|----|------|----|------|----------------|------|----------------|------|----------------|---------------|----------------|---|
|      |   |  |                 | 2020   |    | 2021 |    | 2022 |                | 2023 |                | 2024 |                | Kondisi Akhir |                |   |
|      |   |  |                 | K  | Rp | K    | Rp | K    | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K             | Rp             |   |
| 1    | 2   | 3  | 4               | 5  | 6  | 7    | 8  | 9    | 10             | 11   | 12             | 13   | 14             | 15            | 16             | 17  |
|      |   | Peningkatan CU/PUS                             | 0               | 0  | 0  | 0    | 0  | 75   | 13,583,915,000 | 75.2 | 14,175,000,000 | 75.4 | 15,405,000,000 | 225.6         | 43,163,915,000 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|      |   | Jumlah pendidik/Motivator sebaya               | 0               | 0  | 0  | 0    | 0  | 340  | 40,800,000     | 340  | 48,960,000     | 340  | 58,752,000     | 1,020         | 148,512,000    | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|      |   | Jumlah KB dasar yang mengalami kenaikan status | 0               | 0  | 0  | 0    | 0  | 10   | 10,137,590,890 | 10   | 12,596,520,479 | 10   | 15,066,171,926 | 30            | 37,800,283,295 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|      |   | Rentang usia pernikahan pertama pada perempuan | 0               | 0  | 0  | 0    | 0  | 20   | 394,015,500    | 20.1 | 457,789,450    | 20.2 | 532,962,795    | 60.3          | 1,384,767,745  | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |



| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)  | Kondisi Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |                   |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   |
|----------|--|--|--------------|--|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------|---|
|          |  |  |              | 2020   |                | 2021            |                | 2022            |                | 2023            |                | 2024            |                | Kondisi Akhir     |                |   |
|          |  |  |              | K  | Rp             | K               | Rp             | K               | Rp             | K               | Rp             | K               | Rp             | K                 | Rp             |   |
| 1        | 2  | 3  | 4            | 5  | 6              | 7               | 8              | 9               | 10             | 11              | 12             | 13              | 14             | 15                | 16             | 17  |
| 2.14.04. | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Cakupan anggota Bina Keluarga (BKB/BKR/BKL) ber-KB   | 56.58        | 56.98  | 750,830,000    | 56.98           | 1,454,938,730  | 0               | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              | 56.98             | 2,205,768,730  | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|          |  | Presentase anggota bina keluarga yang ber-KB   | 0            | 0  | 0              | 0               | 0              | 57.24           | 3,603,152,000  | 57.52           | 4,112,082,400  | 57.88           | 4,587,618,880  | 57.88             | 12,302,853,280 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 2.15.    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                       |  |              | 86,969,957,016                                 |                | 132,930,000,000 |                | 301,718,273,001 |                | 255,428,000,001 |                | 258,949,000,001 |                | 1,035,995,230,019 |                |   |
| 2.15.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang sesuai Standar Kebutuhan Pelayanan Prima | 50           | 55   | 34,285,000,000 | 65              | 43,610,000,000 | 65              | 300,000,000    | 70              | 300,000,000    | 75              | 300,000,000    | 75                | 78,795,000,000 | DINAS PERHUBUNGAN   |
|          |  | Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran  | 100          | 100  | 1,815,000,000  | 100             | 3,480,000,000  | 100             | 1,530,000,001  | 100             | 2,030,000,001  | 100             | 2,030,000,001  | 100               | 10,885,000,003 | DINAS PERHUBUNGAN   |
|          |  | Persentase Pemenuhan Disiplin Aparatur   | 100          | 100  | 9,433,800,000  | 100             | 9,740,000,000  | 100             | 10,225,000,000 | 100             | 10,683,000,000 | 100             | 11,169,000,000 | 100               | 51,250,800,000 | DINAS PERHUBUNGAN   |
|          |  | Persentase Pemenuhan Capaian Kinerja   | 100          | 100  | 230,000,000    | 100             | 200,000,000    | 100             | 690,000,000    | 100             | 690,000,000    | 100             | 690,000,000    | 100               | 2,500,000,000  | DINAS PERHUBUNGAN   |
|          |  | Penjabaran Konsistensi Program Renstra kedalam Renja   | 100          | 100  | 70,000,000     | 100             | 75,000,000     | 100             | 50,000,000     | 100             | 50,000,000     | 100             | 50,000,000     | 100               | 295,000,000    | DINAS PERHUBUNGAN   |

| Kod<br>e | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |       |                |      |                |       |                |       |                |               |                 | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|----------|--|--|-----------------|--|----------------|-------|----------------|------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|---------------|-----------------|--|
|          |  |  |                 | 2020   |                | 2021  |                | 2022 |                | 2023  |                | 2024  |                | Kondisi Akhir |                 |  |
|          |  |  |                 | K  | Rp             | K     | Rp             | K    | Rp             | K     | Rp             | K     | Rp             | K             | Rp              |  |
| 1        | 2  | 3  | 4               | 5  | 6              | 7     | 8              | 9    | 10             | 11    | 12             | 13    | 14             | 15            | 16              | 17   |
|          |  | Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Sesuai Standart Kebutuhan Pelayanan Prima.   | 50              | 0  | 0              | 0     | 0              | 80   | 52,615,000,000 | 80    | 58,905,000,000 | 80    | 60,800,000,000 | 80            | 172,580,000,000 | DINAS PERHUBUNGAN                          |
| 2.15.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                      | Meningkatnya Prosentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas serta tatakelola sektor perhubungan yang sesuai dengan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria) | 20              | 35   | 3,119,857,320  | 45    | 5,800,000,000  | 55   | 450,000,000    | 65    | 450,000,000    | 75    | 450,000,000    | 75            | 10,269,857,320  | DINAS PERHUBUNGAN                          |
|          |  | Rasio sarana dan Prasarana Pengujian yang layak  | 30              | 50   | 2,650,000,000  | 55    | 1,710,000,000  | 0    | 0              | 0     | 0              | 0     | 0              | 55            | 4,360,000,000   | DINAS PERHUBUNGAN                          |
|          |  | Prosentase jumlah pelanggaran lalu lintas  | 90              | 86   | 2,305,000,000  | 85    | 4,005,000,000  | 0    | 0              | 0     | 0              | 0     | 0              | 85            | 6,310,000,000   | DINAS PERHUBUNGAN                          |
|          |  | Rasio Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan ( Halte dan Terminal) yang layak fungsi  | 46.15           | 56.41  | 500,000,000    | 66.67 | 25,040,000,000 | 0    | 0              | 0     | 0              | 0     | 0              | 66.67         | 25,540,000,000  | DINAS PERHUBUNGAN                          |
|          |  | Persentase ketersediaan sarana dan Prasarana Pengamanan Lalu Lintas yang berfungsi dengan baik   | 25.34           | 21.1   | 31,981,299,696 | 41.59 | 38,050,000,000 | 0    | 0              | 0     | 0              | 0     | 0              | 41.59         | 70,031,299,696  | DINAS PERHUBUNGAN                          |
|          |  | Persentase kepemilikan KIR/Wajib Uji angkutan Umum   | 65.68           | 65.98  | 530,000,000    | 65.98 | 1,010,000,000  | 66.6 | 63,510,000,000 | 67.22 | 59,060,000,000 | 67.84 | 59,650,000,000 | 67.84         | 183,760,000,000 | DINAS PERHUBUNGAN                          |



| Kod<br>e | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |                |               |                |                 |                |                 |                |                 |                 |                 | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|----------|--|---|-----------------|--|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|          |  |   |                 | 2020   |               | 2021           |               | 2022           |                 | 2023           |                 | 2024           |                 | Kondisi Akhir   |                 |  |
|          |  |   |                 | K  | Rp            | K              | Rp            | K              | Rp              | K              | Rp              | K              | Rp              | K               | Rp              |  |
| 1        | 2  | 3   | 4               | 5  | 6             | 7              | 8             | 9              | 10              | 11             | 12              | 13             | 14              | 15              | 16              | 17   |
|          |  | Meningkatnya Prosentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas serta tatakelola sektor perhubungan yang sesuai dengan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria). | 0               | 0  | 0             | 0              | 0             | 45.5           | 171,748,273,000 | 47.5           | 121,660,000,000 | 50             | 122,060,000,000 | 50              | 415,468,273,000 | DINAS PERHUBUNGAN                          |
| 2.15.03. | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN  | Meningkatnya prosentase pemenuhan Perijinan   | 0               | 0  | 0             | 0              | 0             | 1              | 600,000,000     | 2              | 1,150,000,000   | 2              | 1,300,000,000   | 2               | 3,050,000,000   | DINAS PERHUBUNGAN                          |
| 2.15.04. | PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN  | Presentasi Perijinan landasan   | 0               | 0  | 0             | 0              | 0             | 0              | 0               | 1              | 100,000,000     | 1              | 100,000,000     | 2               | 200,000,000     | DINAS PERHUBUNGAN                          |
| 2.15.05. | PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETA APIAN  | Prosentasi ijin pintu perlintasan kereta api di kabupaten   | 0               | 0  | 0             | 0              | 0             | 0              | 0               | 27.25          | 350,000,000     | 27.5           | 350,000,000     | 27.5            | 700,000,000     | DINAS PERHUBUNGAN                          |
| 2.16.    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                              |   |                 | 24,457,785,000                                 |               | 37,523,154,800 |               | 41,061,004,800 |                 | 45,407,604,800 |                 | 41,181,404,800 |                 | 189,630,954,200 |                 |  |
| 2.16.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA                       | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran   | 75              | 80   | 1,501,700,000 | 85             | 1,569,350,000 | 90             | 1,624,400,000   | 95             | 1,662,000,000   | 100            | 1,701,800,000   | 100             | 8,059,250,000   | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA           |
|          |  | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik  | 75              | 80   | 916,000,000   | 85             | 1,637,804,800 | 90             | 1,412,804,800   | 95             | 5,447,804,800   | 100            | 792,804,800     | 100             | 10,207,219,200  | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA           |
|          |  | Terpenuhinya peningkatan disiplin aparatur dalam berpakaian dinas   | 75              | 0  | 4,614,085,000 | 100            | 4,791,000,000 | 100            | 4,986,000,000   | 100            | 5,189,000,000   | 100            | 5,408,000,000   | 100             | 24,988,085,000  | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA           |

| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)   | Kondisi Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |               |                |               |                |               |                |               |                |                |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|--|---|--------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|
|          |  |   |              | 2020   |                | 2021          |                | 2022          |                | 2023          |                | 2024          |                | Kondisi Akhir  |                 |                                   |
|          |  |   |              | K  | Rp             | K             | Rp             | K             | Rp             | K             | Rp             | K             | Rp             | K              | Rp              |                                   |
| 1        | 2  | 3   | 4            | 5  | 6              | 7             | 8              | 9             | 10             | 11            | 12             | 13            | 14             | 15             | 16              | 17                                |
|          |  | Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan  | 100          | 100  | 121,000,000    | 100           | 121,000,000    | 100           | 247,000,000    | 100           | 128,000,000    | 100           | 128,000,000    | 100            | 745,000,000     | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
|          |  | Persentase dokumen perencanaan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan   | 100          | 100  | 45,000,000     | 100           | 45,000,000     | 100           | 45,000,000     | 100           | 45,000,000     | 100           | 75,000,000     | 100            | 255,000,000     | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
| 2.16.02. | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                      | Persentase layanan informasi dan komunikasi publik  | 52.5         | 52.5   | 3,030,000,000  | 52.5          | 1,125,000,000  | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0              | 4,155,000,000   | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
|          |  | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah | 0            | 0  | 0              | 65            | 6,933,000,000  | 70            | 4,115,000,000  | 75            | 4,125,000,000  | 80            | 4,135,000,000  | 80             | 19,308,000,000  | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
| 2.16.03. | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA                                 | Indeks aspek teknologi informasi dan komunikasi   | 2.67         | 2.97   | 14,210,000,000 | 3             | 150,000,000    | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 3              | 14,360,000,000  | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
|          |  | Cakupan pengelolaan aplikasi informatika  | 0            | 0  | 0              | 85.5          | 21,151,000,000 | 88            | 28,630,800,000 | 91            | 28,810,800,000 | 94            | 28,940,800,000 | 94             | 107,553,400,000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
| 2.20.    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK                         |   |              | 740,617,000                                    |                | 2,730,000,000 |                | 1,540,000,000 |                | 2,560,000,000 |                | 3,100,000,000 |                | 10,670,617,000 |                 |                                   |
| 2.20.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                   | Persentase dokumen hasil pengolahan dan analisis statistik sektoral yang dihasilkan   | 20           | 20   | 467,617,000    | 20            | 368,000,000    | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0              | 835,617,000     | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |

| Kod<br>e | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |                |               |                |               |                |               |                |               |                 |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|----------|--|--|-----------------|--|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|--|
|          |  |  |                 | 2020   |               | 2021           |               | 2022           |               | 2023           |               | 2024           |               | Kondisi Akhir   |               |  |
|          |  |  |                 | K  | Rp            | K              | Rp            | K              | Rp            | K              | Rp            | K              | Rp            | K               | Rp            |  |
| 1        | 2  | 3  | 4               | 5  | 6             | 7              | 8             | 9              | 10            | 11             | 12            | 13             | 14            | 15              | 16            | 17   |
|          |  | Persentase ketersediaan data statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Cirebon   | 60              | 60   | 273,000,000   | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0               | 273,000,000   | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA           |
|          |  | Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | 0               | 0  | 0             | 40             | 2,362,000,000 | 60             | 1,540,000,000 | 80             | 2,560,000,000 | 100            | 3,100,000,000 | 100             | 9,562,000,000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA           |
| 2.21.    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN  |  |                 | 1,170,000,000                                  |               | 1,365,000,000  |               | 2,050,000,000  |               | 2,050,000,000  |               | 2,050,000,000  |               | 8,685,000,000   |               |  |
| 2.21.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAAN INFORMASI                     | Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah                           | 0               | 6  | 1,170,000,000 | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0               | 1,170,000,000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA           |
|          |  | Tingkat keamanan informasi pemerintah  | 0               | 0.0  | 0             | 56.6           | 1,365,000,000 | 56.8           | 2,050,000,000 | 57             | 2,050,000,000 | 57.2           | 2,050,000,000 | 57.2            | 7,515,000,000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA           |
| 2.17.    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH                     |  |                 | 5,406,041,750                                  |               | 36,129,509,805 |               | 30,859,411,975 |               | 32,483,625,750 |               | 29,077,625,750 |               | 133,956,215,030 |               |  |
| 2.17.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA                       | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran  | 100             | 84   | 25,000,000    | 86             | 398,003,650   | 88             | 70,000,000    | 87             | 80,000,000    | 89             | 90,000,000    | 89              | 663,003,650   | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH   |
|          |  | Terciptanya Sarana dan Prasarana Aparatur  | 100             | 100  | 70,000,000    | 100            | 2,199,212,800 | 100            | 5,000,000     | 100            | 5,000,000     | 100            | 5,000,000     | 100             | 2,284,212,800 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH   |



| Kod<br>e | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |      |                |      |                |      |                |      |                |               |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|----------|--|---|-----------------|--|---------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|---------------|----------------|--|
|          |  |   |                 | 2020   |               | 2021 |                | 2022 |                | 2023 |                | 2024 |                | Kondisi Akhir |                |  |
|          |  |   |                 | K  | Rp            | K    | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K             | Rp             |  |
| 1        | 2  | 3   | 4               | 5  | 6             | 7    | 8              | 9    | 10             | 11   | 12             | 13   | 14             | 15            | 16             | 17   |
|          |  | Terciptanya Peningkatan Disiplin Aparatur   | 100             | 100  | 3,689,966,000 | 100  | 3,827,000,000  | 100  | 5,000,000      | 100  | 5,000,000      | 100  | 5,000,000      | 100           | 7,531,966,000  | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH   |
|          |  | Terciptanya Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur  | 100             | 100  | 10,000,000    | 100  | 3,832,000,000  | 100  | 3,982,000,000  | 100  | 4,141,000,000  | 100  | 15,000,000     | 100           | 11,980,000,000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH   |
|          |  | Terciptanya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan                      | 100             | 100  | 5,000,000     | 100  | 37,711,290     | 0    | 0              | 0    | 0              | 0    | 0              | 100           | 42,711,290     | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH   |
|          |  | Terciptanya Pembangunan Sistem Perancangan Sektor   | 100             | 100  | 5,000,000     | 100  | 39,561,500     | 0    | 0              | 0    | 0              | 0    | 0              | 100           | 44,561,500     | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH   |
|          |  | Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif    | 0               | 0  | 0             | 100  | 10,250,000     | 100  | 10,250,000     | 100  | 10,250,000     | 100  | 10,250,000     | 100           | 41,000,000     | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH   |
|          |  | Prosentase Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai standar pelayanan prima. | 100             | 86   | 1,576,075,750 | 86   | 10,238,237,090 | 87   | 10,742,375,750 | 87   | 10,722,375,750 | 87   | 10,722,375,750 | 87            | 44,001,440,090 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH   |
| 2.17.02. | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM   | Terciptanya Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi   | 0               | 25   | 655,000,000   | 25   | 655,000,000    | 0    | 0              | 0    | 0              | 0    | 0              | 0             | 25,000,000     | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH   |
|          |  | Prosentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah         | 0               | 0  | 0             | 25   | 655,000,000    | 28   | 655,000,000    | 31   | 655,000,000    | 31   | 655,000,000    | 31            | 1,965,000,000  | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH   |



| Kod<br>e | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |      |             |      |               |      |               |      |               |               |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|----------|--|--|-----------------|--|-----------|------|-------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|--|
|          |  |  |                 | 2020   |           | 2021 |             | 2022 |               | 2023 |               | 2024 |               | Kondisi Akhir |               |  |
|          |  |  |                 | K  | Rp        | K    | Rp          | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K             | Rp            |  |
| 1        | 2  | 3  | 4               | 5  | 6         | 7    | 8           | 9    | 10            | 11   | 12            | 13   | 14            | 15            | 16            | 17   |
|          |  | Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota  |                 |  |           |      |             |      |               |      |               |      |               |               |               |  |
| 2.17.03. | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAA N KOPERASI                                       | Terciptanya Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi  | 0               | 0  | 0         | 100  | 89,999,975  | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 89,999,975    | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH   |
|          |  | Prosentase koperasi yang meningkat predikat Tingkat Kesehatan hasil pengawasan   | 0               | 56   | 5,000,000 | 58   | 10,000,000  | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 58            | 4,215,000,000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH   |
|          |  | Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | 18              | 0  | 0         | 25   | 19,812,000  | 30   | 450,000,000   | 40   | 550,000,000   | 40   | 600,000,000   | 40            | 1,619,812,000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH   |
| 2.17.04. | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI                                       | Terciptanya Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi  | 0               | 0  | 0         | 20   | 150,333,250 | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 20            | 150,333,250   | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH   |
|          |  | Persentasi Koperasi Sehat  | 0               | 0  | 0         | 20   | 155,333,250 | 20   | 1,454,399,800 | 20   | 1,700,000,000 | 20   | 1,700,000,000 | 20            | 5,009,733,050 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH   |
| 2.17.05. | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                                       | Terciptanya Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi  | 0               | 0  | 0         | 25   | 190,955,575 | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 25            | 190,955,575   | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH   |
|          |  | Prosentase pengurus, pengawas, manajer dan pengelola koperasi yang bersertifikat kompetensi                                | 0               | 20   | 5,000,000 | 0    | 0           | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 20            | 5,000,000     | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH   |

| Kod e    | Bidang Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                    | Indikator Kinerja Program (outcome)   | Kondisi Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |       |             |       |               |       |               |      |               |               |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab        |
|----------|--|---|--------------|--|-----------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|--|
|          |  |   |              | 2020   |           | 2021  |             | 2022  |               | 2023  |               | 2024 |               | Kondisi Akhir |               |  |
|          |  |   |              | K  | Rp        | K     | Rp          | K     | Rp            | K     | Rp            | K    | Rp            | K             | Rp            |  |
| 1        | 2  | 3   | 4            | 5  | 6         | 7     | 8           | 9     | 10            | 11    | 12            | 13   | 14            | 15            | 16            | 17                                       |
|          |  | Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan Perkoperasian  | 0            | 0  | 0         | 34.48 | 190,955,575 | 44.72 | 1,229,483,900 | 49.69 | 2,000,000,000 | 50   | 2,000,000,000 | 50            | 5,420,439,475 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2.17.06. | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                           | Terciptanya Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi   | 0            | 0  | 0         | 20    | 90,373,825  | 0     | 0             | 0     | 0             | 0    | 0             | 20            | 90,373,825    | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|          |  | Laju perkembangan usaha produktif koperasi  | 0            | 15   | 5,000,000 | 20    | 5,000,000   | 25    | 0             | 35    | 0             | 40   | 0             | 40            | 10,000,000    | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|          |  | Meningkatnya produktifitas koperasi   | 0.26         | 0  | 0         | 1     | 90,373,825  | 1     | 100,902,525   | 1.11  | 350,000,000   | 1.37 | 500,000,000   | 1.37          | 1,041,276,350 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2.17.07. | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 1. Mewujudkan Pemberdayaan bagi Usaha Mikro 2. Meningkatnya kemitraan dengan Pelaku Usaha serta dengan sumber-sumber pembiayaan | 0            | 0  | 0         | 1.29  | 113,726,700 | 1.61  | 0             | 0     | 0             | 0    | 0             | 1.61          | 113,726,700   | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|          |  | 1. Terciptanya Potensi Kelembagaan Usaha Mikro 2. Terciptanya Kualitas dalam Pengembangan Pelaku Usaha Mikro                    | 0            | 0  | 0         | 100   | 66,507,300  | 0     | 0             | 0     | 0             | 0    | 0             | 100           | 66,507,300    | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|          |  | 1. Terciptanya Data yang valid dari Pemangku Kepentingan 2. Tercapainya Koordinasi dengan para                                  | 0            | 0  | 0         | 100   | 53,528,350  | 0     | 0             | 0     | 0             | 0    | 0             | 100           | 53,528,350    | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |



| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)  | Kondisi Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |                |                |                |               |                |               |                |               |                |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                      |
|----------|--|--|--------------|--|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--|
|          |  |  |              | 2020   |             | 2021           |                | 2022           |               | 2023           |               | 2024           |               | Kondisi Akhir  |                |  |
|          |  |  |              | K  | Rp          | K              | Rp             | K              | Rp            | K              | Rp            | K              | Rp            | K              | Rp             |  |
| 1        | 2  | 3  | 4            | 5  | 6           | 7              | 8              | 9              | 10            | 11             | 12            | 13             | 14            | 15             | 16             | 17   |
|          |  | Pemangku Kepentingan   |              |  |             |                |                |                |               |                |               |                |               |                |                |  |
|          |  | Terciptanya Sistem aplikasi Data Pelaku Usaha Mikro  | 0            | 0  | 0           | 100            | 715,294,800    | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 100            | 715,294,800    | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH               |
|          |  | Prosentase Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha  | 0.97         | 0  | 0           | 2.48           | 950,269,700    | 3.25           | 4,750,000,000 | 4              | 4,860,000,000 | 5              | 5,370,000,000 | 14.73          | 15,930,269,700 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH               |
| 2.17.08. | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM                                    | 1.Terciptanya Kualitas Produk bagi Usaha Mikro yang Berdaya Saing 2. Tercapainya Promosi Produk Pelaku Usaha Mikro | 0            | 2  | 5,000,000   | 2              | 650,069,350    | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 4              | 655,069,350    | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH               |
|          |  | Persentase usaha mikro yang berkembang nilai omsetnya  | 0.34         | 0  | 0           | 0.5            | 12,000,000,000 | 0.5            | 6,000,000,000 | 1.5            | 6,000,000,000 | 1.5            | 6,000,000,000 | 4              | 30,000,000,000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH               |
| 2.18.    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                   |  |              | 9,531,355,200                                  |             | 17,839,852,400 |                | 22,302,975,000 |               | 21,540,190,000 |               | 21,594,000,000 |               | 92,808,372,600 |                |  |
| 2.18.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran  | 100          | 100  | 800,915,800 | 100            | 2,793,659,700  | 100            | 3,568,800,000 | 100            | 2,768,000,000 | 100            | 2,804,000,000 | 100            | 12,735,375,500 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|          |  | Prosentase Pemenuhan Capaian Kinerja   | 100          | 100  | 25,075,400  | 100            | 60,000,000     | 100            | 180,000,000   | 100            | 200,000,000   | 100            | 220,000,000   | 100            | 685,075,400    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|          |  | Penjabaran Konsistensi Program Renstra ke Dalam Renja  | 100          | 100  | 70,528,500  | 100            | 75,000,000     | 100            | 125,000,000   | 100            | 130,000,000   | 100            | 140,000,000   | 100            | 540,528,500    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN                    |



| Kod<br>e | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |      |               |       |               |       |               |       |               |               |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab             |
|----------|--|--|-----------------|--|---------------|------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|---------------|----------------|--|
|          |  |  |                 | 2020   |               | 2021 |               | 2022  |               | 2023  |               | 2024  |               | Kondisi Akhir |                |  |
|          |  |  |                 | K  | Rp            | K    | Rp            | K     | Rp            | K     | Rp            | K     | Rp            | K             | Rp             |  |
| 1        | 2  | 3  | 4               | 5  | 6             | 7    | 8             | 9     | 10            | 11    | 12            | 13    | 14            | 15            | 16             | 17   |
|          |  |  |                 |  |               |      |               |       |               |       |               |       |               |               |                | TERPADU<br>SATU PINTU                                  |
|          |  | Prosentase Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur Yang Sesuai Standar Kebutuhan pelayanan prima                                   | 100             | 100  | 312,834,600   | 100  | 1,535,000,000 | 100   | 6,000,000,000 | 100   | 6,000,000,000 | 100   | 6,000,000,000 | 100           | 19,847,834,600 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|          |  | Prosentase Pemenuhan Disiplin Aparatur   | 100             | 100  | 6,140,745,000 | 100  | 6,383,000,000 | 100   | 6,945,000,000 | 100   | 7,234,000,000 | 100   | 7,539,000,000 | 100           | 34,241,745,000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|          |  | Prosentase Pemenuhan Capaian Realisasi Keuangan  | 100             | 100  | 17,175,400    | 100  | 23,000,000    | 100   | 26,000,000    | 100   | 28,000,000    | 100   | 30,000,000    | 100           | 124,175,400    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.02. | PROGRAM PENGEMBAN<br>GAN IKLIM<br>PENANAMAN<br>MODAL                               | Rata-rata Persentase pemanfaat RUPM, Pemanfaat Peta Potensi dan Peluang Investasi serta Pemanfaat Kebijakan Kebijakan Insentif | 0               | 0  | 0             | 6.68 | 398,917,500   | 21.21 | 850,000,000   | 24.75 | 1,290,000,000 | 40.58 | 800,000,000   | 40.58         | 3,338,917,500  | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|          |  | Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)   | 596             | 656  | 177,917,500   | 722  | 405,000,000   | 0     | 0             | 0     | 0             | 0     | 0             | 1,378         | 582,917,500    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|          |  | Persentase Jenis Pelayanan Perizinan Berbasis Online   | 0               | 100  | 176,075,300   | 100  | 176,075,300   | 0     | 0             | 0     | 0             | 0     | 0             | 100           | 352,150,600    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| Kod<br>e     | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                 |       |                   |       |                   |       |                   |       |                   |               |                   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab                            |
|--------------|--|--|-----------------|--|-----------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|---------------|-------------------|---|
|              |  |  |                 | 2020   |                 | 2021  |                   | 2022  |                   | 2023  |                   | 2024  |                   | Kondisi Akhir |                   |   |
|              |  |  |                 | K  | Rp              | K     | Rp                | K     | Rp                | K     | Rp                | K     | Rp                | K             | Rp                |   |
| 1            | 2  | 3  | 4               | 5  | 6               | 7     | 8                 | 9     | 10                | 11    | 12                | 13    | 14                | 15            | 16                | 17  |
| 2.18.<br>03. | PROGRAM<br>PROMOSI<br>PENANAMAN<br>MODAL   | Presentase<br>peminatan<br>investasi dari<br>kegiatan<br>promosi per<br>lokasi dan<br>sektor                           | 0               | 0  | 0               | 15.79 | 680,000,00<br>0   | 16    | 1,013,000,0<br>00 | 16.18 | 1,102,800,<br>000 | 16.46 | 1,205,000,<br>000 | 64.43         | 4,000,800,0<br>00 | DINAS<br>PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN<br>TERPADU<br>SATU PINTU |
|              |  | Jumlah Investor<br>Berskala<br>Nasional<br>(PMDN/PMA)  | 596             | 656  | 243,902,10<br>0 | 722   | 333,000,00<br>0   | 0     | 0                 | 0     | 0                 | 0     | 0                 | 1,378         | 576,902,10<br>0   | DINAS<br>PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN<br>TERPADU<br>SATU PINTU |
|              |  | Persentase Jenis<br>Pelayanan<br>Perizinan Yang<br>Sudah<br>Dilimpahkan<br>dan Efektif<br>Dilaksanakan di<br>Kecamatan | 0               | 20   | 224,000,00<br>0 | 20    | 394,000,00<br>0   | 0     | 0                 | 0     | 0                 | 0     | 0                 | 40            | 618,000,00<br>0   | DINAS<br>PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN<br>TERPADU<br>SATU PINTU |
| 2.18.<br>04. | PROGRAM<br>PELAYANAN<br>PENANAMAN<br>MODAL   | Ratio Perizinan<br>yang di<br>terbitkan sesuai<br>SOP  | 0               | 0  | 0               | 96.67 | 1,218,000,0<br>00 | 96.67 | 1,224,900,0<br>00 | 96.67 | 1,252,390,<br>000 | 96.67 | 1,253,000,<br>000 | 386.68        | 4,948,290,0<br>00 | DINAS<br>PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN<br>TERPADU<br>SATU PINTU |
|              |  | Rata-Rata Lama<br>Perizinan  | 5               | 5  | 665,990,10<br>0 | 4     | 761,000,00<br>0   | 0     | 0                 | 0     | 0                 | 0     | 0                 | 4             | 1,426,990,1<br>00 | DINAS<br>PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN<br>TERPADU<br>SATU PINTU |
|              |  | Jumlah Tenaga<br>Kerja Lokal Yang<br>Terserap  | 1,609           | 1,609  | 87,485,500      | 1,609 | 120,000,00<br>0   | 0     | 0                 | 0     | 0                 | 0     | 0                 | 3,218         | 222,485,50<br>0   | DINAS<br>PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN<br>TERPADU<br>SATU PINTU |
|              |  | Persentase<br>Peningkatan<br>Retribusi<br>Pelayanan<br>Perizinan   | 19              | 15   | 5,000,000       | 15    | 5,000,000         | 0     | 0                 | 0     | 0                 | 0     | 0                 | 15            | 10,000,000        | DINAS<br>PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN<br>TERPADU<br>SATU PINTU |
|              |  | Jumlah Nilai<br>Investasi<br>Berskala<br>Nasional<br>(PMDN/PMA)  | 2,010           | 2,208  | 104,640,00<br>0 | 2,429 | 259,000,00<br>0   | 0     | 0                 | 0     | 0                 | 0     | 0                 | 4,637         | 363,640,00<br>0   | DINAS<br>PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN<br>TERPADU<br>SATU PINTU |

| Kod<br>e     | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>an dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                 |               |                 |                 |                   |                |                   |                |                   |                 |                   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab                            |
|--------------|---|---|-----------------|--|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|---|
|              |   |   |                 | 2020   |                 | 2021          |                 | 2022            |                   | 2023           |                   | 2024           |                   | Kondisi Akhir   |                   |   |
|              |   |   |                 | K  | Rp              | K             | Rp              | K               | Rp                | K              | Rp                | K              | Rp                | K               | Rp                |   |
| 1            | 2   | 3   | 4               | 5  | 6               | 7             | 8               | 9               | 10                | 11             | 12                | 13             | 14                | 15              | 16                | 17  |
| 2.18.<br>05. | PROGRAM<br>PENGENDALI<br>AN<br>PELAKSANAAN<br>PENANAMAN<br>MODAL                    | Prosentase<br>Realisasi Proyek<br>Investasi   | 0               | 0  | 0               | 43.21         | 609,449,90<br>0 | 45.26           | 465,275,00<br>0   | 47.32          | 530,000,00<br>0   | 49.38          | 598,000,00<br>0   | 185.17          | 2,202,724,9<br>00 | DINAS<br>PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN<br>TERPADU<br>SATU PINTU |
|              |   | Jumlah Tenaga<br>Kerja Lokal Yang<br>Terserap   | 1,609           | 1,722  | 101,608,00<br>0 | 1,894         | 247,000,00<br>0 | 0               | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0                 | 3,616           | 348,608,00<br>0   | DINAS<br>PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN<br>TERPADU<br>SATU PINTU |
| 2.18.<br>06. | PROGRAM<br>PENGELOLA<br>AN DATA<br>DAN SISTEM<br>INFORMASI<br>PENANAMAN<br>MODAL    | Persentase data<br>dan informasi<br>investasi yang<br>dimutakhirkan   | 0               | 0  | 0               | 5             | 679,375,00<br>0 | 5               | 1,900,000,0<br>00 | 5              | 1,000,000,<br>000 | 5              | 1,000,000,<br>000 | 20              | 4,579,375,0<br>00 | DINAS<br>PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN<br>TERPADU<br>SATU PINTU |
|              |   | Indeks<br>Kepuasan<br>Masyarakat  | 82.01           | 81.95  | 5,000,000       | 82.45         | 5,000,000       | 0               | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0                 | 82.45           | 10,000,000        | DINAS<br>PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN<br>TERPADU<br>SATU PINTU |
|              |   | Rata-Rata Lama<br>Perizinan   | 5               | 5  | 372,462,00<br>0 | 4             | 679,375,00<br>0 | 0               | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0                 | 4               | 1,051,837,0<br>00 | DINAS<br>PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN<br>TERPADU<br>SATU PINTU |
| 2.19.        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG<br>KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                               |   |                 | 0  |                 | 5,838,000,000 |                 | 564,864,000,000 |                   | 51,339,500,000 |                   | 52,075,000,000 |                   | 674,116,500,000 |                   |   |
| 2.19.<br>01. | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN<br>/KOTA      | Meningkatnya<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur   | 0               | 0  | 0               | 100           | 45,000,000      | 100             | 1,574,000,0<br>00 | 100            | 750,000,00<br>0   | 100            | 750,000,00<br>0   | 100             | 3,119,000,0<br>00 | DINAS<br>PEMUDA<br>DAN<br>OLAHRAGA                                    |
|              |   | Meningkatnya<br>sistem<br>pelaporan<br>kinerja dan<br>keuangan yang<br>transparan,<br>akuntabel dan<br>informatif | 0               | 0  | 0               | 100           | 4,000,000       | 100             | 30,000,000        | 100            | 30,000,000        | 100            | 30,000,000        | 100             | 94,000,000        | DINAS<br>PEMUDA<br>DAN<br>OLAHRAGA                                    |

| Kod<br>e | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |    |               |               |                |                 |                |                |                |                |                 |                 | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|----------|--|---|-----------------|--|----|---------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--|
|          |  |   |                 | 2020   |    | 2021          |               | 2022           |                 | 2023           |                | 2024           |                | Kondisi Akhir   |                 |  |
|          |  |   |                 | K  | Rp | K             | Rp            | K              | Rp              | K              | Rp             | K              | Rp             | K               | Rp              |  |
| 1        | 2  | 3   | 4               | 5  | 6  | 7             | 8             | 9              | 10              | 11             | 12             | 13             | 14             | 15              | 16              | 17   |
|          |  | Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyusunan laporan perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD | 0               | 0  | 0  | 100           | 12,000,000    | 100            | 100,000,000     | 100            | 102,500,000    | 100            | 125,000,000    | 100             | 339,500,000     | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |
|          |  | Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran  | 0               | 0  | 0  | 100           | 1,162,000,000 | 100            | 8,407,000,000   | 100            | 8,764,000,000  | 100            | 9,142,000,000  | 100             | 27,475,000,000  | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |
| 2.19.02. | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN                               | Tingkat partisipasi pemuda yang mempunyai daya saing dalam kegiatan ekonomi mandiri   | 0               | 0  | 0  | 0.06          | 770,000,000   | 0.07           | 3,050,000,000   | 0.07           | 3,235,000,000  | 0.07           | 3,420,000,000  | 0.07            | 10,475,000,000  | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |
| 2.19.03. | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAG AAN                            | Cakupan Pembinaan olahraga  | 0               | 0  | 0  | 24.39         | 2,205,000,000 | 24.39          | 547,310,000,000 | 34.15          | 33,965,000,000 | 24.39          | 33,865,000,000 | 24.39           | 617,345,000,000 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |
|          |  | Cakupan masyarakat yang mengikuti olahraga rekreasi dan olahraga tradisional  | 0               | 0  | 0  | 25            | 1,500,000,000 | 25             | 3,188,000,000   | 25             | 3,488,000,000  | 25             | 3,738,000,000  | 25              | 11,914,000,000  | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |
| 2.19.04. | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN   | Prosentase pemuda yang aktif dalam kepramukaan  | 0               | 0  | 0  | 1.63          | 140,000,000   | 4.57           | 1,205,000,000   | 4.9            | 1,005,000,000  | 5.22           | 1,005,000,000  | 5.22            | 3,355,000,000   | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |
| 2.22.    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN  |   |                 | 0  |    | 8,867,000,000 |               | 63,042,965,000 |                 | 25,722,162,000 |                | 26,675,828,000 |                | 124,307,955,000 |                 |  |





| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)   | Kondisi Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |    |      |               |      |               |      |               |      |               |               |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|--|---|--------------|--|----|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|-----------------------------------|
|          |  |   |              | 2020   |    | 2021 |               | 2022 |               | 2023 |               | 2024 |               | Kondisi Akhir |                |                                   |
|          |  |   |              | K  | Rp | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K             | Rp             |                                   |
| 1        | 2  | 3   | 4            | 5  | 6  | 7    | 8             | 9    | 10            | 11   | 12            | 13   | 14            | 15            | 16             | 17                                |
| 2.22.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur  | 0            | 0  | 0  | 100  | 1,630,000,000 | 100  | 8,850,000,000 | 100  | 750,000,000   | 100  | 750,000,000   | 100           | 11,980,000,000 | DINAS KEBUDAYAA N DAN PARIWISATA  |
|          |  | Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif  | 0            | 0  | 0  | 100  | 14,000,000    | 100  | 80,000,000    | 100  | 80,000,000    | 100  | 80,000,000    | 100           | 254,000,000    | DINAS KEBUDAYAA N DAN PARIWISATA  |
|          |  | Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyusunan laporan perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD | 0            | 0  | 0  | 100  | 9,000,000     | 100  | 100,000,000   | 100  | 102,500,000   | 100  | 125,000,000   | 100           | 336,500,000    | DINAS KEBUDAYAA N DAN PARIWISATA  |
|          |  | Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran  | 0            | 0  | 0  | 100  | 1,349,000,000 | 100  | 8,371,000,000 | 100  | 8,733,000,000 | 100  | 9,106,000,000 | 100           | 27,559,000,000 | DINAS KEBUDAYAA N DAN PARIWISATA  |
| 2.22.02. | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAA N                             | terlestarikannya cagar budaya   | 0            | 0  | 0  | 1    | 735,000,000   | 1    | 4,706,965,000 | 1    | 5,101,662,000 | 1    | 5,644,828,000 | 1             | 16,188,455,000 | DINAS KEBUDAYAA N DAN PARIWISATA  |
| 2.22.03. | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL                    | Prosentase pertumbuhan jumlah sanggar kesenian tradisional  | 0            | 0  | 0  | 0.85 | 75,000,000    | 0.85 | 480,000,000   | 0.85 | 495,000,000   | 0.85 | 510,000,000   | 0.85          | 1,560,000,000  | DINAS KEBUDAYAA N DAN PARIWISATA  |
| 2.22.04. | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH                                    | Prosentase masyarakat (peserta seminar) yang memahami seiarah lokal   | 0            | 0  | 0  | 0    | 0             | 100  | 125,000,000   | 100  | 125,000,000   | 100  | 125,000,000   | 100           | 375,000,000    | DINAS KEBUDAYAA N DAN PARIWISATA  |

| Kod<br>e     | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n   | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |    |               |                   |                |                    |                |                   |                |                    |                |                    | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|--------------|--|--|-----------------|--|----|---------------|-------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|--|
|              |  |  |                 | 2020   |    | 2021          |                   | 2022           |                    | 2023           |                   | 2024           |                    | Kondisi Akhir  |                    |  |
|              |  |  |                 | K  | Rp | K             | Rp                | K              | Rp                 | K              | Rp                | K              | Rp                 | K              | Rp                 |  |
| 1            | 2  | 3  | 4               | 5  | 6  | 7             | 8                 | 9              | 10                 | 11             | 12                | 13             | 14                 | 15             | 16                 | 17   |
| 2.22.<br>05. | PROGRAM<br>PELESTARIA<br>N DAN<br>PENGELOLA<br>AN CAGAR<br>BUDAYA  | Penambahan<br>penetapan cagar<br>budaya  | 0               | 0  | 0  | 0             | 0                 | 1              | 575,000,00<br>0    | 1              | 575,000,00<br>0   | 1              | 575,000,00<br>0    | 3              | 1,725,000,0<br>00  | DINAS<br>KEBUDAYAA<br>N DAN<br>PARIWISATA  |
| 2.22.<br>06. | PROGRAM<br>PENGELOLA<br>AN<br>PERMUSEUM<br>AN  | Bertambahnya<br>koleksi museum   | 0               | 0  | 0  | 1             | 5,055,000,0<br>00 | 4              | 39,755,000,<br>000 | 4              | 9,760,000,<br>000 | 4              | 9,760,000,<br>000  | 13             | 64,330,000,<br>000 | DINAS<br>KEBUDAYAA<br>N DAN<br>PARIWISATA  |
| 3.26.        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG<br>PARIWISATA   |  |                 | 0  |    | 2,205,000,000 |                   | 11,845,000,000 |                    | 11,845,000,000 |                   | 21,935,000,000 |                    | 47,830,000,000 |                    |  |
| 3.26.<br>02. | PROGRAM<br>PENINGKATA<br>N DAYA<br>TARIK<br>DESTINASI<br>PARIWISATA  | Jumlah obyek<br>daya tarik<br>wisata dengan<br>pertumbuhan<br>kunjungan<br>diatas 10%                              | 0               | 0  | 0  | 3             | 255,000,00<br>0   | 3              | 6,470,000,0<br>00  | 6              | 6,515,000,<br>000 | 9              | 6,560,000,<br>000  | 9              | 19,800,000,<br>000 | DINAS<br>KEBUDAYAA<br>N DAN<br>PARIWISATA  |
| 3.26.<br>03. | PROGRAM<br>PEMASARAN<br>PARIWISATA   | Market Share<br>Kunjungan<br>Pariwisata<br>Kabupaten<br>Cirebon<br>Terhadap<br>Kunjungan<br>Provinsi Jawa<br>Barat | 0               | 0  | 0  | 1.98          | 1,600,000,0<br>00 | 1.98           | 3,500,000,0<br>00  | 2.08           | 3,530,000,<br>000 | 2.29           | 3,550,000,<br>000  | 2.29           | 12,180,000,<br>000 | DINAS<br>KEBUDAYAA<br>N DAN<br>PARIWISATA  |
| 3.26.<br>04. | PROGRAM<br>PENGEMBAN<br>GAN<br>EKONOMI<br>KREATIF<br>MELALUI<br>PEMANFAAT<br>AN DAN<br>PERLINDUN<br>GAN HAK<br>KEKAYAAN<br>INTELEKTUA<br>L | Jumlah HKI<br>ekonomi kreatif  | 0               | 0  | 0  | 0             | 0                 | 1              | 250,000,00<br>0    | 1              | 150,000,00<br>0   | 1              | 10,150,000<br>,000 | 3              | 10,550,000,<br>000 | DINAS<br>KEBUDAYAA<br>N DAN<br>PARIWISATA  |
| 3.26.<br>05. | PROGRAM<br>PENGEMBAN<br>GAN<br>SUMBER<br>DAYA<br>PARIWISATA<br>DAN<br>EKONOMI<br>KREATIF   | Persentase<br>pelaku<br>pariwisata dan<br>ekonomi kreatif<br>yang<br>terstandarisasi/<br>bersertifik at            | 0               | 0  | 0  | 19.44         | 350,000,00<br>0   | 19.44          | 1,625,000,0<br>00  | 30.56          | 1,650,000,<br>000 | 41.67          | 1,675,000,<br>000  | 41.67          | 5,300,000,0<br>00  | DINAS<br>KEBUDAYAA<br>N DAN<br>PARIWISATA  |
| 2.23.        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG<br>PERPUSTAKAAN   |  |                 | 3,338,000,000                                  |    | 3,644,200,000 |                   | 3,630,000,000  |                    | 3,665,000,000  |                   | 4,045,000,000  |                    | 18,322,200,000 |                    |  |



| Kod<br>e     | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   |                |                   |                |                   |                |                   |                |                   |                |                    | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab    |
|--------------|--|--|-----------------|--|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------|---|
|              |  |  |                 | 2020   |                   | 2021           |                   | 2022           |                   | 2023           |                   | 2024           |                   | Kondisi Akhir  |                    |   |
|              |  |  |                 | K  | Rp                | K              | Rp                | K              | Rp                | K              | Rp                | K              | Rp                | K              | Rp                 |   |
| 1            | 2  | 3  | 4               | 5  | 6                 | 7              | 8                 | 9              | 10                | 11             | 12                | 13             | 14                | 15             | 16                 | 17  |
| 2.23.<br>02. | PROGRAM<br>PEMBINAAN<br>PERPUSTAKA<br>AN   | Prosentase<br>Peningkatan<br>Perpustakaan<br>Desa yang aktif   | 9.6             | 14.4   | 500,000,00<br>0   | 19.2           | 530,000,00<br>0   | 0              | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0                 | 19.2           | 1,030,000,0<br>00  | DINAS<br>KEARSIPAN<br>DAN<br>PERPUSTAK<br>AAN |
|              |  | Prosentase<br>peningkatan<br>minat dan<br>budaya baca<br>masyarakat  | 2.8             | 4.3  | 2,838,000,0<br>00 | 5.9            | 2,638,000,0<br>00 | 0              | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0                 | 5.9            | 5,476,000,0<br>00  | DINAS<br>KEARSIPAN<br>DAN<br>PERPUSTAK<br>AAN |
|              |  | Prosentase<br>Perpustakaan<br>sesuai standar<br>Nasional<br>Perpustakaan   | 0               | 0  | 0                 | 1.06           | 476,200,00<br>0   | 2.13           | 3,450,000,0<br>00 | 3.19           | 3,445,000,<br>000 | 4.26           | 3,775,000,<br>000 | 4.26           | 11,146,200,<br>000 | DINAS<br>KEARSIPAN<br>DAN<br>PERPUSTAK<br>AAN |
| 2.23.<br>03. | PROGRAM<br>PELESTARIA<br>N KOLEKSI<br>NASIONAL<br>DAN NASKAH<br>KUNO               | Prosentase<br>naskah kuno<br>dan koleksi<br>budaya etnis<br>nusantara yang<br>dikelola dan<br>dilestarikan                     | 0               | 0  | 0                 | 0              | 0                 | 71.43          | 180,000,00<br>0   | 85.71          | 220,000,00<br>0   | 100            | 270,000,00<br>0   | 100            | 670,000,00<br>0    | DINAS<br>KEARSIPAN<br>DAN<br>PERPUSTAK<br>AAN |
| 2.24.        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG<br>KEARSIPAN  |  |                 | 14,094,728,050                                 |                   | 15,318,804,655 |                   | 15,874,702,800 |                   | 17,558,126,700 |                   | 19,037,776,050 |                   | 81,884,138,255 |                    |   |
| 2.24.<br>01. | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTA<br>HAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN<br>/KOTA | Prosentase<br>peningkatan<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur   | 79.5            | 81.6   | 2,781,708,0<br>50 | 85.6           | 3,061,024,6<br>55 | 0              | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0                 | 85.6           | 5,872,732,7<br>05  | DINAS<br>KEARSIPAN<br>DAN<br>PERPUSTAK<br>AAN |
|              |  | Prosentase<br>peningkatan<br>disiplin aparatur   | 85              | 0  | 7,648,620,0<br>00 | 90             | 7,993,000,0<br>00 | 0              | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0                 | 90             | 15,641,620,<br>000 | DINAS<br>KEARSIPAN<br>DAN<br>PERPUSTAK<br>AAN |
|              |  | Prosentase<br>peningkatan<br>sistem<br>pelaporan<br>kinerja dan<br>keuangan yang<br>transparan,<br>akuntabel dan<br>informatif | 100             | 100  | 130,000,00<br>0   | 100            | 136,000,00<br>0   | 0              | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0                 | 100            | 266,000,00<br>0    | DINAS<br>KEARSIPAN<br>DAN<br>PERPUSTAK<br>AAN |
|              |  | Prosentasi<br>peningkatan<br>sistem<br>perencanaan<br>sektoral yang  | 100             | 100  | 44,400,000        | 100            | 53,280,000        | 0              | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0                 | 100            | 97,680,000         | DINAS<br>KEARSIPAN<br>DAN<br>PERPUSTAK<br>AAN |

| Kode     | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembangunan | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |      |               |      |               |      |               |      |               |               |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|----------|---|---|-----------------|--|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|--|
|          |   |   |                 | 2020   |               | 2021 |               | 2022 |               | 2023 |               | 2024 |               | Kondisi Akhir |                |  |
|          |   |   |                 | K  | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K             | Rp             |  |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5  | 6             | 7    | 8             | 9    | 10            | 11   | 12            | 13   | 14            | 15            | 16             | 17   |
|          |   | akuntable dan informatif  |                 |  |               |      |               |      |               |      |               |      |               |               |                |  |
|          |   | Prosentase peningkatan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran   | 73              | 80   | 1,115,000,000 | 86   | 1,318,000,000 | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 86            | 2,433,000,000  | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN           |
|          |   | Persentase peningkatan disiplin aparatur  | 0               | 0  | 0             | 0    | 0             | 95   | 35,000,000    | 100  | 37,000,000    | 100  | 40,000,000    | 295           | 112,000,000    | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN           |
|          |   | Persentase peningkatan Laporan Keuangan yang telah dipenuhi dari yang seharusnya  | 0               | 0  | 0             | 0    | 0             | 100  | 8,410,000,000 | 100  | 8,782,000,000 | 100  | 9,176,000,000 | 100           | 26,368,000,000 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN           |
|          |   | Persentase peningkatan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang telah dipenuhi dari yang seharusnya | 0               | 0  | 0             | 0    | 0             | 100  | 93,936,000    | 100  | 106,723,200   | 100  | 127,067,850   | 100           | 327,727,050    | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN           |
|          |   | Persentase peningkatan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran   | 0               | 0  | 0             | 0    | 0             | 100  | 4,925,766,800 | 100  | 5,817,403,500 | 100  | 6,529,708,200 | 100           | 17,282,878,500 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN           |
| 2.24.02. | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP   | Prosentase peningkatan SKPD yang menerapkan sistem administrasi kearsipan secara baku                                   | 39.4            | 51.5   | 965,000,000   | 63.6 | 1,130,000,000 | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 63.6          | 2,095,000,000  | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN           |
|          |   | Prosentase peningkatan khasanah arsip daerah  | 42.5            | 47.9   | 605,000,000   | 60.3 | 595,000,000   | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 60.3          | 1,200,000,000  | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN           |

| Kod<br>e | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintaha<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                 | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|----------|---|---|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--|
|          |   |   |                 | 2020   |                | 2021            |                | 2022            |                | 2023            |                | 2024            |                | Kondisi Akhir   |                 |  |
|          |   |   |                 | K  | Rp             | K               | Rp             | K               | Rp             | K               | Rp             | K               | Rp             | K               | Rp              |  |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5  | 6              | 7               | 8              | 9               | 10             | 11              | 12             | 13              | 14             | 15              | 16              | 17   |
|          |   | Meningkatnya durasi dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat                       | 15              | 10   | 505,000,000    | 8               | 565,000,000    | 0               | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              | 8               | 1,070,000,000   | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN           |
|          |   | Prosentase SKPD yang Tata kelola arsipnya sesuai NSPK                                 | 0               | 0  | 0              | 9.09            | 257,500,000    | 39.4            | 1,700,000,000  | 69.7            | 1,920,000,000  | 100             | 2,090,000,000  | 100             | 5,967,500,000   | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN           |
| 2.24.03. | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP   | Prosentase ketersediaan arsip yang terlindungi dan terselamatkan                      | 0               | 0  | 0              | 25              | 50,000,000     | 50              | 550,000,000    | 75              | 685,000,000    | 100             | 815,000,000    | 100             | 2,100,000,000   | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN           |
| 2.24.04. | PROGRAM PERIJINAN PENGGUNAA N ARSIP   | Prosentase peningkatan SKPD yang menerapkan sistem administrasi kearsipan secara baku | 39.4            | 51.5   | 300,000,000    | 63.6            | 150,000,000    | 0               | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              | 63.6            | 450,000,000     | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN           |
|          |   | Prosentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK        | 0               | 0  | 0              | 25              | 100,000,000    | 50              | 150,000,000    | 75              | 200,000,000    | 100             | 250,000,000    | 100             | 600,000,000     | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN           |
| 3.27.    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN  |   |                 | 70,419,502,892                                 |                | 112,913,277,544 |                | 207,211,785,528 |                | 241,565,476,001 |                | 221,864,855,763 |                | 853,974,897,728 |                 |  |
| 3.27.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA                        | Prosentase Pemenuhan Disiplin Aparatur  | 100             | 100  | 50,771,530,000 | 100             | 59,454,009,000 | 100             | 62,426,709,450 | 100             | 65,548,044,923 | 100             | 68,825,447,169 | 100             | 307,025,740,542 | DINAS PERTANIAN                            |
|          |   | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD   | 0               | 0  | 0              | 82.9            | 4,089,247,306  | 83              | 4,745,694,469  | 84              | 4,877,776,766  | 85              | 5,520,905,523  | 85              | 22,303,234,764  | DINAS PERTANIAN                            |
| 3.27.02. | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                | Jumlah Produksi Komoditas Tanaman Pangan (Beras)                                      | 340,309         | 343,107  | 288,447,000    | 347,493         | 944,100,000    | 0               | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              | 347,493         | 1,232,547,000   | DINAS PERTANIAN                            |

| Kod<br>e | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)                                      | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |         |                |      |                |      |                |      |                |               |                 | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|----------|--|---|-----------------|--|---------------|---------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|---------------|-----------------|--|
|          |  |   |                 | 2020   |               | 2021    |                | 2022 |                | 2023 |                | 2024 |                | Kondisi Akhir |                 |  |
|          |  |   |                 | K  | Rp            | K       | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K             | Rp              |  |
| 1        | 2  | 3   | 4               | 5  | 6             | 7       | 8              | 9    | 10             | 11   | 12             | 13   | 14             | 15            | 16              | 17   |
|          |  | Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar               | 63.25           | 63.3   | 15,000,000    | 63.35   | 15,000,000     | 0    | 0              | 0    | 0              | 0    | 0              | 63.35         | 30,000,000      | DINAS PERTANIAN                            |
|          |  | Jumlah Produksi Sektor Peternakan (Sapi Potong, Ayam Ras, Unggas Lokal dan Domba) | 29,106          | 29,996   | 1,411,800,000 | 30,508  | 640,041,700    | 0    | 0              | 0    | 0              | 0    | 0              | 30,508        | 2,051,841,700   | DINAS PERTANIAN                            |
|          |  | Jumlah Produksi Komoditas Perkebunan (Gula dan Kelapa)                            | 21,826          | 21,873   | 652,000,000   | 21,919  | 1,623,421,000  | 0    | 0              | 0    | 0              | 0    | 0              | 43,792        | 2,275,421,000   | DINAS PERTANIAN                            |
|          |  | Jumlah Produksi Komoditas Hortikultura (Bawang Merah, Cabai Besar dan Mangga)     | 97,300          | 98,080   | 2,652,000,000 | 98,472  | 90,000,000     | 0    | 0              | 0    | 0              | 0    | 0              | 196,552       | 2,742,000,000   | DINAS PERTANIAN                            |
|          |  | Rasio Ketersediaan Sarana Produksi Pertanian                                      | 0               | 0  | 0             | 0.51    | 1,774,836,200  | 0.54 | 40,488,094,255 | 0.56 | 59,186,070,980 | 0.58 | 34,605,924,530 | 0.58          | 136,054,925,965 | DINAS PERTANIAN                            |
| 3.27.03. | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                            | Jumlah Produksi Komoditas Tanaman Pangan (Beras)                                  | 340,309         | 343,107  | 434,000,000   | 347,493 | 3,174,622,680  | 0    | 0              | 0    | 0              | 0    | 0              | 347,493       | 3,608,622,680   | DINAS PERTANIAN                            |
|          |  | Jumlah Produksi Sektor Peternakan (Sapi Potong, Ayam Ras, Unggas Lokal dan Domba) | 29,106          | 29,996   | 634,200,000   | 30,508  | 19,205,000,000 | 0    | 0              | 0    | 0              | 0    | 0              | 30,508        | 19,839,200,000  | DINAS PERTANIAN                            |
|          |  | Jumlah Produksi Komoditas Hortikultura (Bawang Merah, Cabai Besar dan Mangga)     | 97,300          | 98,080   | 2,662,000,000 | 98,472  | 6,198,000,000  | 0    | 0              | 0    | 0              | 0    | 0              | 196,552       | 8,860,000,000   | DINAS PERTANIAN                            |

| Kode     | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembangunan | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)                                  | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |         |               |      |                |      |                 |      |                 |               |                 | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|----------|--|---|-----------------|--|-------------|---------|---------------|------|----------------|------|-----------------|------|-----------------|---------------|-----------------|--|
|          |  |   |                 | 2020   |             | 2021    |               | 2022 |                | 2023 |                 | 2024 |                 | Kondisi Akhir |                 |  |
|          |  |   |                 | K  | Rp          | K       | Rp            | K    | Rp             | K    | Rp              | K    | Rp              | K             | Rp              |  |
| 1        | 2  | 3   | 4               | 5  | 6           | 7       | 8             | 9    | 10             | 11   | 12              | 13   | 14              | 15            | 16              | 17   |
|          |  | Rasio Ketersediaan Prasarana Produksi Pertanian                               | 0               | 0  | 0           | 0.35    | 6,163,761,520 | 0.42 | 91,490,764,000 | 0.46 | 103,885,764,000 | 0.49 | 104,720,764,000 | 0.49          | 306,261,053,520 | DINAS PERTANIAN                            |
| 3.27.04. | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER        | Prosentase Penurunan Frekuensi Kemunculan Penyakit Zoonosis                   | 2               | 2  | 420,000,000 | 2       | 458,500,000   | 0    | 0              | 0    | 0               | 0    | 0               | 2             | 878,500,000     | DINAS PERTANIAN                            |
|          |  | Kejadian/Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (Satuan Ternak)                  | 0               | 0  | 0           | 299     | 128,235,898   | 293  | 2,123,031,354  | 287  | 2,310,327,332   | 281  | 2,564,322,541   | 281           | 7,125,917,125   | DINAS PERTANIAN                            |
| 3.27.05. | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                      | Jumlah Produksi Komoditas Tanaman Pangan (Beras)                              | 340,309         | 343,107  | 879,200,000 | 347,493 | 545,000,000   | 0    | 0              | 0    | 0               | 0    | 0               | 347,493       | 1,424,200,000   | DINAS PERTANIAN                            |
|          |  | Jumlah Produksi Komoditas Hortikultura (Bawang Merah, Cabai Besar dan Mangga) | 97,300          | 98,080   | 15,000,000  | 98,472  | 15,000,000    | 0    | 0              | 0    | 0               | 0    | 0               | 196,552       | 30,000,000      | DINAS PERTANIAN                            |
|          |  | Rasio Tingkat Keberhasilan Penanggulangan Bencana Pertanian per-tahun         | 0               | 0  | 0           | 0.52    | 245,500,000   | 0.53 | 1,109,436,000  | 0.55 | 759,436,000     | 0.56 | 759,436,000     | 0.56          | 2,873,808,000   | DINAS PERTANIAN                            |
| 3.27.06. | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN  | Jumlah Produksi Komoditas Hortikultura (Bawang Merah, Cabai Besar dan Mangga) | 97,300          | 98,080   | 78,500,000  | 98,472  | 280,000,000   | 0    | 0              | 0    | 0               | 0    | 0               | 196,552       | 358,500,000     | DINAS PERTANIAN                            |
|          |  | Rasio Jumlah Usulan Izin Usaha Pertanian                                      | 0               | 0  | 0           | 0.8     | 195,000,000   | 0.81 | 634,236,000    | 0.82 | 644,236,000     | 0.83 | 659,236,000     | 0.83          | 2,132,708,000   | DINAS PERTANIAN                            |

| Kod<br>e     | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                    |                 |                    |                |                   |                |                   |                 |                   |                 |                    | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab        |
|--------------|--|---|-----------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|---|
|              |  |   |                 | 2020   |                    | 2021            |                    | 2022           |                   | 2023           |                   | 2024            |                   | Kondisi Akhir   |                    |   |
|              |  |   |                 | K  | Rp                 | K               | Rp                 | K              | Rp                | K              | Rp                | K               | Rp                | K               | Rp                 |   |
| 1            | 2  | 3   | 4               | 5  | 6                  | 7               | 8                  | 9              | 10                | 11             | 12                | 13              | 14                | 15              | 16                 | 17  |
| 3.27.<br>07. | PROGRAM<br>PENYULUHA<br>N<br>PERTANIAN   | Prosentase<br>Kelompok Petani<br>Yang Naik Kelas  | 10              | 10   | 733,000,00<br>0    | 10              | 1,181,300,0<br>00  | 10             | 4,193,820,0<br>00 | 10             | 4,353,820,<br>000 | 10              | 4,208,820,<br>000 | 10              | 14,670,760,<br>000 | DINAS<br>PERTANIAN                                |
|              |  | Prosentase<br>Penyuluh Yang<br>Lulus Pelatihan<br>Berbasis<br>Kompetensi  | 20              | 20   | 5,698,215,1<br>92  | 20              | 6,487,702,2<br>40  | 0              | 0                 | 0              | 0                 | 0               | 0                 | 40              | 12,185,917,<br>432 | DINAS<br>PERTANIAN                                |
|              |  | Produktivitas<br>Padi atau Bahan<br>Pangan Utama<br>Lokal Lainnya<br>per Hektar   | 63.25           | 63.3   | 5,000,000          | 63.35           | 5,000,000          | 0              | 0                 | 0              | 0                 | 0               | 0                 | 63.35           | 10,000,000         | DINAS<br>PERTANIAN                                |
| 3.30.        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG<br>PERDAGANGAN  |   |                 | 59,934,433,758                                 |                    | 132,496,551,557 |                    | 86,344,260,000 |                   | 94,065,260,000 |                   | 101,753,260,000 |                   | 474,593,765,315 |                    |   |
| 3.30.<br>01. | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTA<br>HAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN<br>/KOTA | Peningkatan<br>kuantitas dan<br>kualitas<br>pelayanan<br>administrasi<br>umum<br>perkantoran<br>dalam<br>mendukung<br>pelaksanaan<br>tugas dan fungsi<br>pengelolaan<br>perdagangan<br>dan<br>perindustrian | 100             | 100  | 1,381,405,5<br>38  | 100             | 1,490,351,7<br>03  | 0              | 0                 | 0              | 0                 | 0               | 0                 | 200             | 2,871,757,2<br>41  | DINAS<br>PERDAGANG<br>AN DAN<br>PERINDUSTRI<br>AN |
|              |  | Peningkatan<br>kuantitas dan<br>kualitas sarana<br>dan prasarana<br>penunjang<br>aparatur dalam<br>mendukung<br>pelaksanaan<br>tugas dan fungsi<br>pengelolaan<br>perdagangan<br>dan<br>perindustrian       | 100             | 100  | 3,044,175,5<br>00  | 100             | 2,190,189,8<br>80  | 0              | 0                 | 0              | 0                 | 0               | 0                 | 200             | 5,234,365,3<br>80  | DINAS<br>PERDAGANG<br>AN DAN<br>PERINDUSTRI<br>AN |
|              |  | Tingkat<br>kedisiplinan dan<br>pemahaman<br>aparatur<br>terhadap<br>peraturan<br>perundangan<br>dalam   | 100             | 100  | 11,506,893,<br>000 | 100             | 12,037,800,<br>000 | 0              | 0                 | 0              | 0                 | 0               | 0                 | 100             | 23,544,693,<br>000 | DINAS<br>PERDAGANG<br>AN DAN<br>PERINDUSTRI<br>AN |



| Kod<br>e | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |      |             |      |    |      |    |      |    |               |             | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|----------|--|---|-----------------|--|-------------|------|-------------|------|----|------|----|------|----|---------------|-------------|--|
|          |  |   |                 | 2020   |             | 2021 |             | 2022 |    | 2023 |    | 2024 |    | Kondisi Akhir |             |  |
|          |  |   |                 | K  | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp | K    | Rp | K    | Rp | K             | Rp          |  |
| 1        | 2  | 3   | 4               | 5  | 6           | 7    | 8           | 9    | 10 | 11   | 12 | 13   | 14 | 15            | 16          | 17   |
|          |  | mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan perdagangan dan perindustrian  |                 |  |             |      |             |      |    |      |    |      |    |               |             |  |
|          |  | Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan perdagangan dan perindustrian   | 100             | 100  | 191,872,000 | 100  | 211,059,200 | 0    | 0  | 0    | 0  | 0    | 0  | 100           | 402,931,200 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN        |
|          |  | Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyusunan laporan keuangan dan barang milik daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan perdagangan dan perindustrian               | 100             | 100  | 102,471,920 | 100  | 136,183,650 | 0    | 0  | 0    | 0  | 0    | 0  | 100           | 238,655,570 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN        |
|          |  | Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyusunan laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan perdagangan dan perindustrian | 100             | 100  | 35,000,000  | 100  | 40,000,000  | 0    | 0  | 0    | 0  | 0    | 0  | 100           | 75,000,000  | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN        |



| Kod<br>e | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |    |      |    |      |                |      |                |      |                |               |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|----------|--|--|-----------------|--|----|------|----|------|----------------|------|----------------|------|----------------|---------------|----------------|--|
|          |  |  |                 | 2020   |    | 2021 |    | 2022 |                | 2023 |                | 2024 |                | Kondisi Akhir |                |  |
|          |  |  |                 | K  | Rp | K    | Rp | K    | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K             | Rp             |  |
| 1        | 2  | 3  | 4               | 5  | 6  | 7    | 8  | 9    | 10             | 11   | 12             | 13   | 14             | 15            | 16             | 17   |
|          |  | Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan administrasi umum perkantoran dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan perdagangan dan perindustrian* | 100             | 0  | 0  | 0    | 0  | 100  | 2,630,000,000  | 100  | 2,850,000,000  | 100  | 3,070,000,000  | 300           | 8,550,000,000  | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN        |
|          |  | Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan perdagangan dan perindustrian* | 0               | 0  | 0  | 0    | 0  | 100  | 4,572,260,000  | 100  | 4,779,260,000  | 100  | 5,005,260,000  | 300           | 14,356,780,000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN        |
|          |  | Tingkat kedisiplinan dan pemahaman aparatur terhadap peraturan perundangan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan perdagangan dan perindustrian* | 0               | 0  | 0  | 0    | 0  | 100  | 12,597,000,000 | 100  | 13,256,000,000 | 100  | 13,758,000,000 | 300           | 39,611,000,000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN        |
|          |  | Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan perdagangan  | 0               | 0  | 0  | 0    | 0  | 100  | 530,000,000    | 100  | 590,000,000    | 100  | 630,000,000    | 300           | 1,750,000,000  | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN        |

| Kod<br>e | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |      |                |      |             |      |             |      |             |               |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|----------|--|--|-----------------|--|----------------|------|----------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|---------------|----------------|--|
|          |  |  |                 | 2020   |                | 2021 |                | 2022 |             | 2023 |             | 2024 |             | Kondisi Akhir |                |  |
|          |  |  |                 | K  | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K             | Rp             |  |
| 1        | 2  | 3  | 4               | 5  | 6              | 7    | 8              | 9    | 10          | 11   | 12          | 13   | 14          | 15            | 16             | 17   |
|          |  | dan perindustrian*   |                 |  |                |      |                |      |             |      |             |      |             |               |                |  |
|          |  | Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyusunan laporan keuangan dan barang milik daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan perdagangan dan perindustrian*               | 0               | 0  | 0              | 0    | 0              | 100  | 270,000,000 | 100  | 270,000,000 | 100  | 280,000,000 | 100           | 820,000,000    | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN        |
|          |  | Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyusunan laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan perdagangan dan perindustrian* | 0               | 0  | 0              | 0    | 0              | 100  | 255,000,000 | 100  | 260,000,000 | 100  | 290,000,000 | 100           | 805,000,000    | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN        |
| 3.30.03. | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                                  | Cakupan bina pengelola pasar   | 100             | 100  | 441,245,300    | 100  | 485,369,830    | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 926,615,130    | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN        |
|          |  | Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal   | 5.38            | 5.47   | 38,350,390,000 | 5.56 | 54,216,288,000 | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 5.56          | 92,566,678,000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN        |



| Kod<br>e | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                 | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|----------|--|---|-----------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--|
|          |  |   |                 | 2020   |               | 2021           |                | 2022           |                | 2023           |                | 2024           |                | Kondisi Akhir  |                 |  |
|          |  |   |                 | K  | Rp            | K              | Rp             | K              | Rp             | K              | Rp             | K              | Rp             | K              | Rp              |  |
| 1        | 2  | 3   | 4               | 5  | 6             | 7              | 8              | 9              | 10             | 11             | 12             | 13             | 14             | 15             | 16              | 17   |
|          |  | Penerimaan Retribusi Pasar  | 2,329,281,875   | 1.962.953.000                                  | 869,924,300   | 1,962,955,000  | 956,916,730    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 1,962,955,000  | 1,826,841,030   | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN        |
|          |  | Jumlah sarana distribusi perdagangan yang sesuai SNI ( Pasar Pemda )  | 0               | 0  | 0             | 0              | 54,355,722,684 | 1              | 60,600,000,000 | 1              | 66,850,000,000 | 1              | 73,250,000,000 | 1              | 255,055,722,684 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN        |
| 3.30.04. | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING                | Pencapaian Stabilitas harga 9 komoditas kebutuhan pokok masyarakat (daging sapi, beras, gula pasir, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, kedelai, tepung terigu, dan bawang merah) | 6               | 6  | 1,109,825,000 | 6              | 1,220,807,500  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 6              | 2,330,632,500   | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN        |
|          |  | Koefisien varian antar waktu kebutuhan pokok dan barang penting   | 0               | 0  | 0             | 8.5            | 799,613,890    | 8.5            | 1,110,000,000  | 8.5            | 1,260,000,000  | 8.5            | 1,360,000,000  | 8.5            | 4,529,613,890   | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN        |
| 3.30.05. | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR  | Nilai Ekspor ke luar Negeri   | 382,200,730.36  | 0  | 0             | 389,839,221.03 | 743,114,000    | 402,025,824.69 | 1,950,000,000  | 409,664,315.36 | 1,965,000,000  | 417,857,601.67 | 1,980,000,000  | 417,857,601.67 | 6,638,114,000   | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN        |
|          |  | Nilai Ekspor  | 382,200,730.36  | 388,315,942                                    | 1,872,280,000 | 394.917.313,06 | 2,259,508,000  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 394,917,313.06 | 4,131,788,000   | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN        |
| 3.30.06. | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                                    | Cakupan UTTP yang ditera  | 100             | 64.09  | 484,742,300   | 67.86          | 760,000,000    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 67.86          | 1,244,742,300   | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN        |
|          |  | Penerimaan Retribusi Tera   | 121,000,000     | 135,000,000                                    | 494,208,900   | 141,000,000    | 543,626,490    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 141,000,000    | 1,037,835,390   | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN        |

| Kod<br>e | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)                         | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |                    |                |                    |             |                    |             |                    |             |                    |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|----------|--|--|-----------------|--|---------------|--------------------|----------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|----------------|--|
|          |  |  |                 | 2020   |               | 2021               |                | 2022               |             | 2023               |             | 2024               |             | Kondisi Akhir      |                |  |
|          |  |  |                 | K  | Rp            | K                  | Rp             | K                  | Rp          | K                  | Rp          | K                  | Rp          | K                  | Rp             |  |
| 1        | 2  | 3  | 4               | 5  | 6             | 7                  | 8              | 9                  | 10          | 11                 | 12          | 13                 | 14          | 15                 | 16             | 17   |
|          |  | Prosentase UTTP yang bertanda tera sah                               | 0               | 0  | 0             | 56.54              | 605,000,000    | 56.54              | 605,000,000 | 58.43              | 655,000,000 | 60.31              | 705,000,000 | 60.31              | 1,965,000,000  | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN        |
|          |  | Prosentase produk BDKT yang lolos uji                                | 0               | 0  | 0             | 37                 | 825,000,000    | 37                 | 825,000,000 | 40                 | 880,000,000 | 42                 | 925,000,000 | 42                 | 2,630,000,000  | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN        |
| 3.30.07. | PROGRAM PENGGUNAA N DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                              | Meningkatnya peluang pasar UKM                                       | 0               | 100  | 50,000,000    | 100                | 50,000,000     | 0                  | 0           | 0                  | 0           | 0                  | 0           | 200                | 100,000,000    | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN        |
|          |  | Nilai perdagangan dalam negeri                                       | 0               | 0  | 0             | 18.249.585.660.000 | 350,000,000    | 19.249.585.660.000 | 400,000,000 | 20.789.552.510.000 | 450,000,000 | 22.452.716.710.000 | 500,000,000 | 22.452.716.710.000 | 1,350,000,000  | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN        |
| 3.31.    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN   |  |                 | 3,627,103,100                                  |               | 38,745,602,950     |                | 4,560,000,000      |             | 5,108,000,000      |             | 5,655,000,000      |             | 57,695,706,050     |                |  |
| 3.31.02. | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                                       | Pertumbuhan cluster industri   | 1               | 1  | 1,076,112,400 | 1                  | 1,183,723,640  | 0                  | 0           | 0                  | 0           | 0                  | 0           | 2                  | 2,259,836,040  | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN        |
|          |  | Jumlah produk IKM yang bersertifikasi                                | 100             | 100  | 1,024,999,600 | 100                | 36,121,999,560 | 0                  | 0           | 0                  | 0           | 0                  | 0           | 100                | 37,146,999,160 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN        |
|          |  | Jumlah komoditas industri yang terbina                               | 9               | 10   | 5,000,000     | 10                 | 5,000,000      | 0                  | 0           | 0                  | 0           | 0                  | 0           | 10                 | 10,000,000     | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN        |
|          |  | Jenis fasilitasi yang disediakan bagi IKM                            | 3               | 3  | 305,000,000   | 3                  | 314,447,950    | 0                  | 0           | 0                  | 0           | 0                  | 0           | 6                  | 619,447,950    | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN        |
|          |  | Jumlah IKM yang melaksanakan program 3 R (Reduce, Resue dan Recycle) | 0               | 0  | 799,999,200   | 0                  | 500,000,000    | 0                  | 0           | 0                  | 0           | 0                  | 0           | 0                  | 1,299,999,200  | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN        |



| Kode     | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembangunan | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab                        |
|----------|---|---|-----------------|--|-------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|---|
|          |   |   |                 | 2020   |             | 2021              |               | 2022              |               | 2023              |               | 2024              |               | Kondisi Akhir     |                |   |
|          |   |   |                 | K  | Rp          | K                 | Rp            | K                 | Rp            | K                 | Rp            | K                 | Rp            | K                 | Rp             |   |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5  | 6           | 7                 | 8             | 9                 | 10            | 11                | 12            | 13                | 14            | 15                | 16             | 17  |
|          |   | Persentase Pencapaian Sasasaran Pembangunan Industri termasuk turunan pembangunan industri dalam RPIK   | 0               | 0  | 0           | 10                | 4,440,000,000 | 10                | 4,440,000,000 | 10                | 4,988,000,000 | 20                | 5,535,000,000 | 20                | 14,963,000,000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN                               |
| 3.31.04. | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL                      | Jenis Penerapan Teknologi Industri  | 2               | 2  | 415,991,900 | 2                 | 620,431,800   | 0                 | 0             | 0                 | 0             | 0                 | 0             | 4                 | 1,036,423,700  | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN                               |
|          |   | Persentase data perusahaan indusri menengah dan perusahaan Kawasan industri di kabupaten/kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri Kecil, Menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota | 0               | 0  | 0           | 15                | 120,000,000   | 15                | 120,000,000   | 25                | 120,000,000   | 35                | 120,000,000   | 75                | 360,000,000    | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN                               |
| 5.       | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN   |   |                 | 39,319,537,228                                 |             | 1,508,692,194,851 |               | 1,635,521,488,239 |               | 1,801,148,333,073 |               | 1,979,403,788,807 |               | 6,964,085,342,198 |                |   |
| 5.01.    | PERENCANAAN   |   |                 | 15,164,856,000                                 |             | 31,670,547,800    |               | 27,364,790,000    |               | 37,462,690,000    |               | 37,500,590,000    |               | 149,163,473,800   |                |   |
| 5.01.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA                | Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja   | 100             | 100  | 465,000,000 | 100               | 1,020,000,000 | 0                 | 0             | 0                 | 0             | 0                 | 0             | 100               | 1,485,000,000  | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |



| Kod<br>e | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)             | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |      |                |      |                |      |                |      |                |               |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab                        |
|----------|--|--|-----------------|--|---------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|---------------|----------------|---|
|          |  |  |                 | 2020   |               | 2021 |                | 2022 |                | 2023 |                | 2024 |                | Kondisi Akhir |                |   |
|          |  |  |                 | K  | Rp            | K    | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K             | Rp             |   |
| 1        | 2  | 3  | 4               | 5  | 6             | 7    | 8              | 9    | 10             | 11   | 12             | 13   | 14             | 15            | 16             | 17  |
|          |  | prosentase meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur    | 0               | 100  | 1,466,440,000 | 100  | 1,751,419,000  | 0    | 0              | 0    | 0              | 0    | 0              | 100           | 3,217,859,000  | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|          |  | Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran  | 0               | 100  | 9,890,779,000 | 100  | 10,649,128,800 | 0    | 0              | 0    | 0              | 0    | 0              | 100           | 20,539,907,800 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|          |  | Prosentase Pegawai yang Disiplin                         | 0               | 100  | 5,000,000     | 100  | 135,000,000    | 0    | 0              | 0    | 0              | 0    | 0              | 100           | 140,000,000    | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|          |  | prosentase jumlah pelayanan yang dilaksanakan sesuai SOP | 0               | 0  | 0             | 100  | 50,000,000     | 100  | 15,444,790,000 | 100  | 20,587,690,000 | 100  | 21,045,590,000 | 100           | 57,128,070,000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 5.01.02. | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH                  | ketersediaan data perencanaan pembangunan                | 0               | 3  | 0             | 3    | 560,000,000    | 0    | 0              | 0    | 0              | 0    | 0              | 3             | 560,000,000    | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |

| Kod<br>e | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |      |               |      |               |      |                |      |                |               |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab  |
|----------|--|---|-----------------|--|-------------|------|---------------|------|---------------|------|----------------|------|----------------|---------------|----------------|---|
|          |  |   |                 | 2020   |             | 2021 |               | 2022 |               | 2023 |                | 2024 |                | Kondisi Akhir |                |   |
|          |  |   |                 | K  | Rp          | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp             | K    | Rp             | K             | Rp             |   |
| 1        | 2  | 3   | 4               | 5  | 6           | 7    | 8             | 9    | 10            | 11   | 12             | 13   | 14             | 15            | 16             | 17  |
|          |  | Penjabaran<br>Konsistensi<br>Program RPJMD<br>kedalam RKPD                                    | 100             | 100  | 5,000,000   | 100  | 2,245,000,000 | 0    | 0             | 0    | 0              | 0    | 0              | 100           | 2,250,000,000  | BADAN<br>PERENCANA<br>AN<br>PEMBANGUN<br>AN,<br>PENELITIAN<br>DAN<br>PENGEMBAN<br>GAN<br>DAERAH |
|          |  | prosentase<br>jumlah<br>dokumen<br>Evaluasi<br>Pembangunan<br>Kabupaten<br>Cirebon            | 100             | 100  | 67,128,000  | 100  | 300,000,000   | 0    | 0             | 0    | 0              | 0    | 0              | 100           | 367,128,000    | BADAN<br>PERENCANA<br>AN<br>PEMBANGUN<br>AN,<br>PENELITIAN<br>DAN<br>PENGEMBAN<br>GAN<br>DAERAH |
|          |  | Tersedianya<br>Dokumen<br>Perencanaan :<br>RKPD yang telah<br>ditetapkan<br>dengan<br>PERKADA | 100             | 100  | 15,000,000  | 100  | 1,535,000,000 | 0    | 0             | 0    | 0              | 0    | 0              | 100           | 1,550,000,000  | BADAN<br>PERENCANA<br>AN<br>PEMBANGUN<br>AN,<br>PENELITIAN<br>DAN<br>PENGEMBAN<br>GAN<br>DAERAH |
|          |  | Meningkatnya<br>SKPD dalam<br>menetapkan IKU<br>dan Perkin                                    | 100             | 100  | 145,711,000 | 100  | 200,000,000   | 0    | 0             | 0    | 0              | 0    | 0              | 100           | 345,711,000    | BADAN<br>PERENCANA<br>AN<br>PEMBANGUN<br>AN,<br>PENELITIAN<br>DAN<br>PENGEMBAN<br>GAN<br>DAERAH |
|          |  | Prosentase<br>peningkatan<br>kinerja<br>perencanaan<br>pembangunan<br>daerah                  | 0               | 0  | 0           | 78   | 7,055,000,000 | 80   | 7,450,000,000 | 82   | 12,670,000,000 | 85   | 12,190,000,000 | 85            | 39,365,000,000 | BADAN<br>PERENCANA<br>AN<br>PEMBANGUN<br>AN,<br>PENELITIAN<br>DAN<br>PENGEMBAN<br>GAN<br>DAERAH |



| Kode     | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembangunan | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |      |               |      |               |      |               |      |               |               |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab                        |
|----------|---|---|-----------------|--|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|---|
|          |   |   |                 | 2020   |               | 2021 |               | 2022 |               | 2023 |               | 2024 |               | Kondisi Akhir |               |   |
|          |   |   |                 | K  | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K             | Rp            |   |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5  | 6             | 7    | 8             | 9    | 10            | 11   | 12            | 13   | 14            | 15            | 16            | 17  |
| 5.01.03. | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH          | Prosentase pencapaian kinerja perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan  | 0               | 100  | 800,000,000   | 100  | 1,000,000,000 | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 1,800,000,000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|          |   | Jumlah rekomendasi kebijakan, hasil kajian dari hasil perencanaan bidang pemerintahan dan sosial budaya yang harus dilaksanakan oleh SKPD terkait | 0               | 10   | 690,000,000   | 15   | 1,510,000,000 | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 25            | 2,200,000,000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|          |   | Ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan perangkat daerah lingkup koordinasi bidang ekonomi yang memenuhi target                              | 0               | 100  | 1,614,798,000 | 100  | 1,075,000,000 | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 2,689,798,000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|          |   | Prosentase rata rata pencapaian Target kinerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan  | 0               | 0  | 0             | 80   | 1,000,000,000 | 95   | 1,510,000,000 | 96   | 1,570,000,000 | 97   | 1,630,000,000 | 97            | 5,710,000,000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|          |   | Prosentase rata rata pencapaian Target kinerja outcome program pada Perangkat Daerah lingkup koordinasi bidang                                    | 0               | 0  | 0             | 73   | 815,000,000   | 75   | 2,190,000,000 | 80   | 1,865,000,000 | 85   | 1,865,000,000 | 85            | 6,735,000,000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBAN           |



| Kod<br>e | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>an dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |               |               |               |             |               |             |               |             |                |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab                        |
|----------|---|---|-----------------|--|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|----------------|---------------|---|
|          |   |   |                 | 2020   |             | 2021          |               | 2022          |             | 2023          |             | 2024          |             | Kondisi Akhir  |               |   |
|          |   |   |                 | K  | Rp          | K             | Rp            | K             | Rp          | K             | Rp          | K             | Rp          | K              | Rp            |   |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5  | 6           | 7             | 8             | 9             | 10          | 11            | 12          | 13            | 14          | 15             | 16            | 17  |
|          |   | Pemerintahan dan Pembangunan Manusia  |                 |  |             |               |               |               |             |               |             |               |             |                |               | GAN DAERAH  |
|          |   | Prosentase rata rata pencapaian Target kinerja outcome program pada Perangkat Daerah lingkup koordinasi bidang perekonomian dan SDA | 0               | 0  | 0           | 75            | 770,000,000   | 80            | 770,000,000 | 85            | 770,000,000 | 90            | 770,000,000 | 90             | 3,080,000,000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 5.05.    | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN   |   |                 | 1,317,647,000                                  |             | 3,243,500,000 |               | 3,910,000,000 |             | 3,255,000,000 |             | 4,350,000,000 |             | 16,076,147,000 |               |   |
| 5.05.02. | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  | Prosentase hasil penelitian pemerintahan, sosial, ekonomi dan pembangunan yang diimplementasikan                                    | 0               | 10   | 655,000,000 | 10            | 2,083,500,000 | 0             | 0           | 0             | 0           | 0             | 0           | 10             | 2,738,500,000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|          |   | Prosentase inovasi dan kreativitas daerah yang diaplikasikan (diterapkan)   | 0               | 10   | 662,647,000 | 10            | 1,155,000,000 | 0             | 0           | 0             | 0           | 0             | 0           | 10             | 1,817,647,000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|          |   | Persentase pemanfaatan hasil LITBANG tentang SDM dan IPTEK  | 0               | 10   | 5,000,000   | 10            | 5,000,000     | 0             | 0           | 0             | 0           | 0             | 0           | 10             | 5,000,000     | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |



| Kode     | Bidang Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan        | Indikator Kinerja Program (outcome)   | Kondisi Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                     |
|----------|--|---|--------------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
|          |  |   |              | 2020   |               | 2021              |                   | 2022              |                   | 2023              |                   | 2024              |                   | Kondisi Akhir     |                   |   |
|          |  |   |              | K  | Rp            | K                 | Rp                | K                 | Rp                | K                 | Rp                | K                 | Rp                | K                 | Rp                |   |
| 1        | 2  | 3   | 4            | 5  | 6             | 7                 | 8                 | 9                 | 10                | 11                | 12                | 13                | 14                | 15                | 16                | 17  |
|          |  | Prosentase pemanfaatan hasil kelitbangan  | 0            | 0  | 0             | 10                | 3,910,000,000     | 10                | 3,910,000,000     | 10                | 3,255,000,000     | 10                | 4,350,000,000     | 10                | 11,515,000,000    | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 5.02.02. | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                          | Peningkatan Pengembangan Wilayah untuk mengurangi dampak resiko bencana, kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Pembangunan                                | 0            | 0  | 0             | 100               | 1.430.000.000.000 | 100               | 1.573.000.000.000 | 100               | 1.730.300.000.000 | 100               | 1.903.330.000.000 | 100               | 6.636.630.000.000 | PPKD  |
| 5.02.    | KEUANGAN   |   |              | 27,162,946,000                                 |               | 1,475,446,998,364 |                   | 1,634,127,490,844 |                   | 1,795,566,080,846 |                   | 1,974,307,532,740 |                   | 6,906,611,048,794 |                   |   |
| 5.02.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah | 100          | 100  | 1,635,000,000 | 100               | 2,738,400,000     | 100               | 1,663,450,000     | 100               | 1,762,294,500     | 100               | 1,853,883,500     | 100               | 9,653,028,000     | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                        |
|          |  | Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah      | 100          | 100  | 3,271,250,000 | 100               | 5,367,875,000     | 100               | 5,784,662,500     | 100               | 5,457,628,750     | 100               | 5,742,891,625     | 100               | 25,624,307,875    | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                        |



| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)  | Kondisi Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |      |               |      |               |      |               |      |               |               |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|--|--------------|--|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|-----------------------------------|
|      |  |  |              | 2020   |               | 2021 |               | 2022 |               | 2023 |               | 2024 |               | Kondisi Akhir |                |                                   |
|      |  |  |              | K  | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K             | Rp             |                                   |
| 1    | 2  | 3  | 4            | 5  | 6             | 7    | 8             | 9    | 10            | 11   | 12            | 13   | 14            | 15            | 16             | 17                                |
|      |  | Tingkat kedisiplinan dan pemahaman aparaturnya terhadap peraturan perundangan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah                          | 0            | 100  | 73,000,000    | 100  | 73,000,000    | 100  | 30,000,000    | 100  | 88,000,000    | 100  | 32,500,000    | 100           | 223,500,000    | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |
|      |  | Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah | 100          | 100  | 320,000,000   | 100  | 372,000,000   | 100  | 54,000,000    | 100  | 55,500,000    | 100  | 55,500,000    | 100           | 857,000,000    | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |
|      |  | Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyusunan laporan perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah                  | 100          | 100  | 190,000,000   | 100  | 192,500,000   | 100  | 210,000,000   | 100  | 212,500,000   | 100  | 215,000,000   | 100           | 1,020,000,000  | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |
|      |  | Peningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah  | 0            | 100  | 8,237,072,000 | 100  | 8,566,000,000 | 100  | 8,933,000,000 | 100  | 9,323,000,000 | 100  | 9,736,000,000 | 100           | 44,795,072,000 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |



| Kod<br>e     | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   |      |                   |      |                   |      |                   |      |                   |               |                    | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|--------------|--|---|-----------------|--|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|---------------|--------------------|--|
|              |  |   |                 | 2020   |                   | 2021 |                   | 2022 |                   | 2023 |                   | 2024 |                   | Kondisi Akhir |                    |  |
|              |  |   |                 | K  | Rp                | K    | Rp                | K    | Rp                | K    | Rp                | K    | Rp                | K             | Rp                 |  |
| 1            | 2  | 3   | 4               | 5  | 6                 | 7    | 8                 | 9    | 10                | 11   | 12                | 13   | 14                | 15            | 16                 | 17   |
| 5.02.<br>02. | PROGRAM<br>PENGELOLA<br>AN<br>KEUANGAN<br>DAERAH                                   | Peningkatan<br>pengetahuan<br>dan kemampuan<br>pengelola<br>keuangan<br>daerah  | 100             | 0  | 0                 | 100  | 108,000,00<br>0   | 0    | 0                 | 0    | 0                 | 0    | 0                 | 100           | 108,000,00<br>0    | BADAN<br>KEUANGAN<br>DAN ASET<br>DAERAH    |
|              |  | Ketepatan waktu<br>penyusunan<br>Raperda dan<br>Raperbup APBD   | 100             | 100  | 2,522,624,0<br>00 | 100  | 2,251,500,0<br>00 | 100  | 2,536,500,0<br>00 | 100  | 2,732,300,<br>000 | 100  | 2,907,230,<br>000 | 100           | 12,950,154,<br>000 | BADAN<br>KEUANGAN<br>DAN ASET<br>DAERAH    |
|              |  | Ketepatan waktu<br>penyusunan<br>Raperda dan<br>Raperbup<br>Perubahan<br>APBD   | 100             | 100  | 1,132,000,0<br>00 | 100  | 2,987,500,0<br>00 | 100  | 3,108,250,0<br>00 | 100  | 3,239,575,<br>000 | 100  | 3,382,832,<br>500 | 100           | 13,850,157,<br>500 | BADAN<br>KEUANGAN<br>DAN ASET<br>DAERAH    |
|              |  | Peningkatan<br>pengelolaan<br>administrasi kas<br>daerah secara<br>tepat waktu dan<br>tepat sasaran                         | 100             | 100  | 1,969,000,0<br>00 | 100  | 1,915,000,0<br>00 | 100  | 2,068,000,0<br>00 | 100  | 2,236,000,<br>000 | 100  | 2,421,000,<br>000 | 100           | 10,609,000,<br>000 | BADAN<br>KEUANGAN<br>DAN ASET<br>DAERAH    |
|              |  | Peningkatan<br>transparansi<br>dan<br>akuntabilitas<br>penyajian<br>laporan<br>keuangan dan<br>laporan aset                 | 0               | 100  | 1,352,000,0<br>00 | 100  | 1,495,076,0<br>00 | 0    | 0                 | 0    | 0                 | 0    | 0                 | 100           | 3,290,076,0<br>00  | BADAN<br>KEUANGAN<br>DAN ASET<br>DAERAH    |
|              |  | Peningkatan<br>transparansi<br>dan<br>akuntabilitas<br>penyajian<br>laporan<br>keuangan sesuai<br>SAP                       | 0               | 0  | 0                 | 100  | 605,924,00<br>0   | 100  | 2,118,000,0<br>00 | 100  | 2,348,000,<br>000 | 100  | 2,592,000,<br>000 | 100           | 7,663,924,0<br>00  | BADAN<br>KEUANGAN<br>DAN ASET<br>DAERAH    |
|              |  | Peningkatan<br>pengetahuan<br>dan kemampuan<br>pada pengelola<br>keuangan<br>daerah   | 0               | 100  | 1,161,000,0<br>00 | 100  | 1,249,000,0<br>00 | 100  | 1,294,000,0<br>00 | 100  | 1,373,000,<br>000 | 100  | 1,459,000,<br>000 | 100           | 6,536,000,0<br>00  | BADAN<br>KEUANGAN<br>DAN ASET<br>DAERAH    |
| 5.02.<br>03. | PROGRAM<br>PENGELOLA<br>AN BARANG<br>MILIK<br>DAERAH                               | Peningkatan<br>barang milik<br>daerah yang<br>telah dan atau<br>dalam proses<br>sertifikasi serta<br>terinventarisir<br>dan | 100             | 100  | 900,000,00<br>0   | 100  | 1,341,999,6<br>78 | 100  | 1,102,000,0<br>00 | 100  | 1,399,000,<br>000 | 100  | 1,540,000,<br>000 | 100           | 6,282,999,6<br>78  | BADAN<br>KEUANGAN<br>DAN ASET<br>DAERAH    |

| Kod<br>e     | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   |                |                   |                |                    |                |                    |                |                    |                 |                    | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|--------------|--|---|-----------------|--|-------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|-----------------|--------------------|--|
|              |  |   |                 | 2020   |                   | 2021           |                   | 2022           |                    | 2023           |                    | 2024           |                    | Kondisi Akhir   |                    |  |
|              |  |   |                 | K  | Rp                | K              | Rp                | K              | Rp                 | K              | Rp                 | K              | Rp                 | K               | Rp                 |  |
| 1            | 2  | 3   | 4               | 5  | 6                 | 7              | 8                 | 9              | 10                 | 11             | 12                 | 13             | 14                 | 15              | 16                 | 17   |
|              |  | termanfaatkan<br>dengan<br>baik/benar   |                 |  |                   |                |                   |                |                    |                |                    |                |                    |                 |                    |  |
|              |  | Ketepatan waktu<br>penyusunan<br>Raperda dan<br>Raperbup APBD   | 100             | 100  | 106,000,00<br>0   | 100            | 89,728,400        | 0              | 0                  | 0              | 0                  | 0              | 0                  | 100             | 195,728,40<br>0    | BADAN<br>KEUANGAN<br>DAN ASET<br>DAERAH    |
|              |  | Peningkatan<br>Penyajian<br>Laporan Barang<br>Milik Daerah<br>yang sudah<br>Terinventarisasi,<br>Teridentifikasi<br>dan<br>Terdokumentasi<br>dengan Baik dan<br>Benar | 100             | 100  | 4,067,000,0<br>00 | 100            | 3,474,046,2<br>00 | 100            | 3,634,000,0<br>00  | 100            | 3,556,000,<br>000  | 100            | 3,855,000,<br>000  | 100             | 18,586,046,<br>200 | BADAN<br>KEUANGAN<br>DAN ASET<br>DAERAH    |
|              |  | Peningkatan<br>pengetahuan<br>dan kemampuan<br>pengelola barang<br>daerah   | 0               | 100  | 300,000,00<br>0   | 100            | 134,112,70<br>0   | 0              | 0                  | 0              | 0                  | 0              | 0                  | 100             | 434,112,70<br>0    | BADAN<br>KEUANGAN<br>DAN ASET<br>DAERAH    |
|              |  | Peningkatan<br>pengetahuan<br>dan kemampuan<br>pada pengelola<br>barang milik<br>daerah   | 0               | 0  | 0                 | 100            | 134,112,70<br>0   | 100            | 340,000,00<br>0    | 100            | 360,000,00<br>0    | 100            | 400,000,00<br>0    | 100             | 1,234,112,7<br>00  | BADAN<br>KEUANGAN<br>DAN ASET<br>DAERAH    |
| 5.02.<br>01. | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN<br>/KOTA     | Meningkatkan<br>Pelayanan Pajak<br>Daerah   | 82.19           | 0.00   | 0                 | 82.46          | 8,292,139,0<br>57 | 82.64          | 25,253,769,<br>544 | 82.82          | 27,841,568<br>,993 | 83             | 31,198,772<br>,815 | 83              | 92,586,250,<br>409 | BADAN<br>PENDAPATAN<br>DAERAH              |
| 5.02.<br>04. | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENDAPATAN<br>DAERAH                                     | Meningkatkan<br>penerimaan<br>pajak daerah  | 4.79            | 0.00   | 0                 | 14.84          | 4,059,084,6<br>29 | 14.66          | 2,863,858,8<br>00  | 14.66          | 3,134,713,<br>603  | 14.66          | 3,423,922,<br>300  | 14.66           | 13,481,579,<br>332 | BADAN<br>PENDAPATAN<br>DAERAH              |
| 5.03.        | KEPEGAWAIAN  |   |                 | 27,551,424,646                                 |                   | 39,972,417,127 |                   | 37,117,461,061 |                    | 40,367,531,383 |                    | 43,701,783,211 |                    | 188,710,617,428 |                    |  |

| Kod<br>e     | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                    |               |                    | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab                                    |
|--------------|--|---|-----------------|--|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|---------------|--------------------|---|
|              |  |   |                 | 2020   |                    | 2021 |                    | 2022 |                    | 2023 |                    | 2024 |                    | Kondisi Akhir |                    |   |
|              |  |   |                 | K  | Rp                 | K    | Rp                 | K    | Rp                 | K    | Rp                 | K    | Rp                 | K             | Rp                 |   |
| 1            | 2  | 3   | 4               | 5  | 6                  | 7    | 8                  | 9    | 10                 | 11   | 12                 | 13   | 14                 | 15            | 16                 | 17  |
| 5.03.<br>01. | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTA<br>HAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN<br>/KOTA | Meningkatnya<br>presentase<br>pemenuhan<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran                               | 100             | 100  | 2,018,050,6<br>28  | 100  | 1,581,253,6<br>61  | 100  | 2,062,979,0<br>67  | 100  | 2,323,410,<br>584  | 100  | 2,514,019,<br>032  | 100           | 10,499,712,<br>972 | BADAN<br>KEPEGAWAI<br>AN DAN<br>PENGEMBAN<br>GAN<br>SUMBER<br>DAYA<br>MANUSIA |
|              |  | meningkatnya<br>disiplin aparatur   | 100             | 100  | 10,412,584,<br>000 | 100  | 10,917,103,<br>200 | 100  | 11,373,000,<br>000 | 100  | 11,983,813<br>,520 | 100  | 12,503,000<br>,000 | 100           | 57,189,500,<br>720 | BADAN<br>KEPEGAWAI<br>AN DAN<br>PENGEMBAN<br>GAN<br>SUMBER<br>DAYA<br>MANUSIA |
|              |  | Meningkatnya<br>kualitas sumber<br>daya aparatur  | 100             | 100  | 164,520,76<br>0    | 100  | 350,945,67<br>2    | 100  | 193,020,11<br>9    | 100  | 212,322,13<br>0    | 100  | 233,554,34<br>4    | 100           | 1,154,363,0<br>25  | BADAN<br>KEPEGAWAI<br>AN DAN<br>PENGEMBAN<br>GAN<br>SUMBER<br>DAYA<br>MANUSIA |
|              |  | Meningkatnya<br>sistem<br>pelaporan<br>kinerja dan<br>keuangan yang<br>transparan,<br>akuntabel dan<br>informatif | 100             | 100  | 63,579,040         | 100  | 96,181,844         | 100  | 70,880,636         | 100  | 77,968,700         | 100  | 85,738,571         | 100           | 394,348,79<br>1    | BADAN<br>KEPEGAWAI<br>AN DAN<br>PENGEMBAN<br>GAN<br>SUMBER<br>DAYA<br>MANUSIA |
|              |  | Terkembangnya<br>sistem<br>perencanaan<br>sektoral  | 100             | 100  | 30,000,000         | 100  | 30,000,000         | 100  | 30,000,000         | 100  | 30,000,000         | 100  | 53,368,080         | 500           | 173,368,08<br>0    | BADAN<br>KEPEGAWAI<br>AN DAN<br>PENGEMBAN<br>GAN<br>SUMBER<br>DAYA<br>MANUSIA |
|              |  | meningkatnya<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur   | 100             | 100  | 277,473,57<br>0    | 100  | 2,921,629,3<br>27  | 100  | 3,847,641,0<br>20  | 100  | 4,294,505,<br>122  | 100  | 4,807,255,<br>634  | 100           | 16,148,504,<br>673 | BADAN<br>KEPEGAWAI<br>AN DAN<br>PENGEMBAN<br>GAN<br>SUMBER<br>DAYA<br>MANUSIA |



| Kode     | Bidang Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)                             | Kondisi Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |                |               |               |               |               |               |               |               |                |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                      |
|----------|---|---|--------------|--|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--|
|          |   |   |              | 2020   |               | 2021           |               | 2022          |               | 2023          |               | 2024          |               | Kondisi Akhir  |                |  |
|          |   |   |              | K  | Rp            | K              | Rp            | K             | Rp            | K             | Rp            | K             | Rp            | K              | Rp             |  |
| 1        | 2   | 3   | 4            | 5  | 6             | 7              | 8             | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            | 14            | 15             | 16             | 17   |
| 5.03.02. | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                            | Persentase Aparatur yang difasilitasi kesejahteraannya          | 0            | 100  | 1,996,435,282 | 100            | 4,217,581,292 | 100           | 1,382,497,317 | 100           | 1,512,723,729 | 100           | 1,655,449,293 | 100            | 10,764,686,913 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|          |   | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur Berbasis Sistem        | 69.5         | 75.6   | 762,223,141   | 81.7           | 1,239,749,398 | 87.8          | 1,448,724,388 | 93.9          | 1,590,604,526 | 100           | 1,744,180,539 | 100            | 6,785,481,992  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|          |   | Persentase Sumber Daya Aparatur Yang ditingkatkan Kompetensinya | 6.25         | 7.42   | 3,890,026,490 | 8.23           | 5,918,042,359 | 9.04          | 5,682,550,914 | 9.86          | 6,141,500,983 | 10.06         | 6,645,156,581 | 10.06          | 28,277,277,327 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|          |   | Prosentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian sesuai SOP        | 0            | 100  | 2,281,136,735 | 100            | 3,718,879,209 | 100           | 3,044,827,150 | 100           | 3,346,207,594 | 100           | 3,675,139,193 | 100            | 16,066,189,881 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|          |   | Persentase pegawai yang ditempatkan di bidangnya                | 60           | 70   | 5,207,750,000 | 75             | 7,977,690,200 | 75            | 7,145,740,000 | 75            | 7,915,314,000 | 75            | 8,736,845,400 | 75             | 36,983,339,600 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|          |   | Persentase Aparatur yang ditingkatkan integritasnya             | 84.1         | 85.67  | 447,645,000   | 86.37          | 1,003,360,965 | 88.31         | 835,600,450   | 90.64         | 939,160,495   | 91.01         | 1,048,076,544 | 91.01          | 4,273,843,454  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5.04.    | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                              |   |              | 6,569,412,580                                  |               | 13,463,307,121 |               | 7,952,939,220 |               | 8,747,233,143 |               | 9,620,956,457 |               | 46,353,848,521 |                |  |





| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)   | Kondisi Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                      |
|----------|--|---|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|--|
|          |  |   |              | 2020   |                | 2021           |                | 2022           |                | 2023           |                | 2024           |                | Kondisi Akhir   |                |  |
|          |  |   |              | K  | Rp             | K              | Rp             | K              | Rp             | K              | Rp             | K              | Rp             | K               | Rp             |  |
| 1        | 2  | 3   | 4            | 5  | 6              | 7              | 8              | 9              | 10             | 11             | 12             | 13             | 14             | 15              | 16             | 17   |
| 5.04.02. | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                     | Persentase Sumber Daya Aparatur Yang ditingkatkan Kompetensinya   | 6.25         | 7.42   | 6,569,412,580  | 8.23           | 13,463,307,121 | 9.04           | 7,952,939,220  | 9.86           | 8,747,233,143  | 10.06          | 9,620,956,457  | 10.06           | 46,353,848,521 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 6.       | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN                         |   |              | 11,687,279,900                                 |                | 18,545,321,670 |                | 20,153,842,260 |                | 21,924,942,947 |                | 23,864,311,865 |                | 96,175,698,642  |                |  |
| 6.01.    | INSPEKTORAT DAERAH   |   |              | 27,410,897,900                                 |                | 37,289,247,170 |                | 44,665,823,174 |                | 47,454,580,194 |                | 50,454,277,846 |                | 207,274,826,284 |                |  |
| 6.01.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | Meningkatnya Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran                                    | 100          | 100  | 15,127,594,000 | 100            | 16,607,712,700 | 100            | 19,167,806,250 | 100            | 20,093,237,203 | 100            | 21,116,765,353 | 100             | 92,113,115,506 | INSPEKTORAT  |
|          |  | Meningkatnya persentase sarana dan prasarana aparatur   | 100          | 100  | 481,600,000    | 100            | 2,007,291,500  | 100            | 5,131,153,924  | 100            | 5,208,540,700  | 100            | 5,229,790,050  | 100             | 18,058,376,174 | INSPEKTORAT  |
|          |  | Meningkatnya persentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif | 100          | 100  | 80,000,000     | 100            | 96,764,300     | 100            | 178,386,000    | 100            | 189,288,000    | 100            | 200,900,000    | 100             | 745,338,300    | INSPEKTORAT  |
|          |  | Meningkatnya persentase sistem perencanaan sektoral yang transparan, akuntabel dan informatif           | 100          | 100  | 34,424,000     | 100            | 32,157,000     | 100            | 34,634,740     | 100            | 38,571,344     | 100            | 42,510,578     | 100             | 182,297,662    | INSPEKTORAT  |
| 6.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                           | Persentase Peningkatan Pengawasan Internal  | 100          | 100  | 9,198,385,900  | 100            | 14,490,848,170 | 100            | 16,269,146,490 | 100            | 17,696,984,707 | 100            | 19,298,519,655 | 100             | 76,953,884,922 | INSPEKTORAT  |
| 6.01.03. | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPIN                       | Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal   | 100          | 100  | 1,496,572,000  | 100            | 2,068,609,900  | 100            | 2,268,595,370  | 100            | 2,494,349,340  | 100            | 2,702,318,810  | 100             | 11,030,445,420 | INSPEKTORAT  |



| Kod<br>e     | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                     | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|--------------|--|---|-----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------------|--|
|              |  |   |                 | 2020   |                   | 2021            |                    | 2022            |                    | 2023            |                    | 2024            |                    | Kondisi Akhir   |                     |  |
|              |  |   |                 | K  | Rp                | K               | Rp                 | K               | Rp                 | K               | Rp                 | K               | Rp                 | K               | Rp                  |  |
| 1            | 2  | 3   | 4               | 5  | 6                 | 7               | 8                  | 9               | 10                 | 11              | 12                 | 13              | 14                 | 15              | 16                  | 17   |
|              | GAN DAN<br>ASISTENSI   |   |                 |  |                   |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                     |  |
|              |  | Meningkatnya<br>Kapabilitas APIP  | 2               | 2  | 588,322,00<br>0   | 3               | 1,541,463,6<br>00  | 3               | 1,131,300,4<br>00  | 3               | 1,208,408,<br>900  | 3               | 1,285,423,<br>400  | 3               | 5,754,918,3<br>00   | INSPEKTORA<br>T                            |
|              |  | persentase<br>peningkatan<br>SDM Pengawas<br>berkompeten  | 70              | 72   | 404,000,00<br>0   | 74              | 444,400,00<br>0    | 76              | 484,800,00<br>0    | 78              | 525,200,00<br>0    | 80              | 578,050,00<br>0    | 80              | 2,436,450,0<br>00   | INSPEKTORA<br>T                            |
| 4.02.        | SEKRETARIAT DPRD   |   |                 | 41,789,450,665                                 |                   | 211,740,137,638 |                    | 158,299,627,982 |                    | 165,561,417,109 |                    | 176,998,486,112 |                    | 754,389,119,506 |                     |  |
| 4.02.<br>01. | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTA<br>HAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN<br>/KOTA | Meningkatnya<br>pemenuhan<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran   | 100             | 95   | 8,291,675,6<br>04 | 95              | 56,517,684,<br>057 | 96              | 14,696,446,<br>345 | 96              | 15,957,340<br>,095 | 96              | 17,344,323<br>,220 | 96              | 112,807,46<br>9,321 | SEKRETARIA<br>T DPRD                       |
|              |  | Prosentase<br>meningkatnya<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur   | 100             | 95   | 4,331,306,6<br>32 | 95              | 16,067,580,<br>411 | 96              | 10,008,584,<br>153 | 96              | 8,094,442,<br>569  | 96              | 8,903,886,<br>826  | 96              | 47,405,800,<br>591  | SEKRETARIA<br>T DPRD                       |
|              |  | Prosentase<br>jumlah raperda<br>yang dibahas<br>dan ditetapkan<br>tepat waktu                                     | 90              | 90   | 134,876,17<br>5   | 91              | 138,657,75<br>0    | 93              | 0                  | 93              | 0                  | 94              | 0                  | 94              | 273,533,92<br>5     | SEKRETARIA<br>T DPRD                       |
|              |  | Prosentase<br>Pegawai yang<br>hadir sesuai<br>dengan jam<br>kerja dan<br>berpakaian<br>sesuai dengan<br>ketentuan | 100             | 95   | 670,896,00<br>0   | 95              | 2,469,060,0<br>00  | 96              | 947,991,00<br>0    | 96              | 1,042,790,<br>100  | 96              | 1,147,069,<br>110  | 96              | 6,277,806,2<br>10   | SEKRETARIA<br>T DPRD                       |
|              |  | Meningkatnya<br>kapasitas SDM<br>aparatur<br>terhadap<br>peningkatan<br>kinerja<br>pelayanan SKPD                 | 100             | 95   | 780,137,60<br>0   | 95              | 46,867,498,<br>260 | 96              | 47,089,516,<br>660 | 96              | 48,184,603<br>,300 | 96              | 49,289,198<br>,604 | 96              | 192,210,95<br>4,424 | SEKRETARIA<br>T DPRD                       |
|              |  | Meningkatnya<br>sistem<br>pelaporan<br>kinerja dan<br>keuangan yang   | 100             | 100  | 525,210,70<br>8   | 100             | 1,010,775,7<br>60  | 100             | 660,816,57<br>8    | 100             | 719,898,23<br>5    | 100             | 784,888,05<br>6    | 100             | 3,701,589,3<br>37   | SEKRETARIA<br>T DPRD                       |



| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)   | Kondisi Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|--|---|--------------|--|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
|          |  |   |              | 2020   |                | 2021            |                | 2022            |                | 2023            |                | 2024            |                | Kondisi Akhir   |                 |                                   |
|          |  |   |              | K  | Rp             | K               | Rp             | K               | Rp             | K               | Rp             | K               | Rp             | K               | Rp              |                                   |
| 1        | 2  | 3   | 4            | 5  | 6              | 7               | 8              | 9               | 10             | 11              | 12             | 13              | 14             | 15              | 16              | 17                                |
|          |  | transparan, akuntabel dan informatif  |              |  |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                 |                                   |
|          |  | Meningkatnya fungsi dokumen perencanaan sebagai acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD | 100          | 100  | 31,858,300     | 100             | 256,795,000    | 100             | 204,668,550    | 100             | 214,661,005    | 100             | 225,652,705    | 100             | 933,635,560     | SEKRETARIAT DPRD                  |
| 4.02.02. | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD           | Prosentase jumlah raperda yang dibahas dan ditetapkan tepat waktu                             | 90           | 90   | 27,023,489,646 | 91              | 88,412,086,400 | 93              | 84,691,604,696 | 93              | 91,347,681,805 | 94              | 99,303,467,591 | 94              | 390,778,330,138 | SEKRETARIAT DPRD                  |
| 4.       | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                          |   |              | 56,137,032,786                                 |                | 122,547,137,078 |                | 117,206,278,646 |                | 127,779,260,722 |                | 140,888,329,330 |                | 564,558,038,562 |                 |                                   |
| 4.01.    | SEKRETARIAT DAERAH   |   |              | 89,774,071,695                                 |                | 120,900,902,632 |                | 113,077,869,323 |                | 126,939,023,495 |                | 146,298,420,008 |                | 596,990,287,153 |                 |                                   |
| 4.01.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | Peningkatan Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran                           | 100          | 100  | 11,901,174,300 | 100             | 16,672,539,300 | 100             | 15,981,679,265 | 100             | 18,397,521,200 | 100             | 20,189,305,630 | 100             | 83,142,219,695  | SEKRETARIAT DAERAH                |
|          |  | Prosentase Peningkatan sarana dan prasarana aparatur  | 100          | 100  | 14,529,217,093 | 100             | 24,972,568,630 | 100             | 26,038,080,160 | 100             | 30,626,973,896 | 100             | 40,360,308,422 | 100             | 136,527,148,201 | SEKRETARIAT DAERAH                |
|          |  | Prosentase Peningkatan disiplin aparatur  | 0            | 100  | 22,985,996,000 | 100             | 24,045,330,500 | 100             | 25,279,164,550 | 100             | 26,577,847,055 | 100             | 27,944,936,098 | 100             | 126,833,274,203 | SEKRETARIAT DAERAH                |
|          |  | Prosentase Jumlah Penataan Pendayagunaan Aparatur yang Dilakukan                              | 100          | 100  | 683,013,900    | 0               | 0              | 100             | 207,626,040    | 0               | 0              | 100             | 213,626,040    | 100             | 1,104,265,980   | SEKRETARIAT DAERAH                |
|          |  | Prosentase Peningkatan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang Transparan.                 | 100          | 100  | 433,409,852    | 100             | 940,409,714    | 100             | 509,415,888    | 100             | 553,057,517    | 100             | 615,963,209    | 100             | 3,052,256,180   | SEKRETARIAT DAERAH                |

| Kod<br>e     | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintaha<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)                                       | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |      |                |      |                |      |                |      |                |               |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|--------------|---|--|-----------------|--|---------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|---------------|----------------|--|
|              |   |  |                 | 2020   |               | 2021 |                | 2022 |                | 2023 |                | 2024 |                | Kondisi Akhir |                |  |
|              |   |  |                 | K  | Rp            | K    | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K             | Rp             |  |
| 1            | 2   | 3  | 4               | 5  | 6             | 7    | 8              | 9    | 10             | 11   | 12             | 13   | 14             | 15            | 16             | 17   |
|              |   | Akuntabel dan Informatif   |                 |  |               |      |                |      |                |      |                |      |                |               |                |  |
|              |   | Prosentase Rancangan Produk Hukum Bidang Pelayanan Publik dan Tata laksana         | 100             | 100  | 475,893,810   | 100  | 285,536,286    | 100  | 285,536,286    | 100  | 285,536,286    | 100  | 285,536,286    | 100           | 1,618,038,954  | SEKRETARIA<br>T DAERAH                     |
|              |   | Prosentase Peningkatan Sistem Perencanaan Sektoral                                 | 100             | 100  | 96,000,000    | 100  | 195,000,000    | 100  | 98,000,000     | 100  | 99,000,000     | 100  | 100,000,000    | 100           | 588,000,000    | SEKRETARIA<br>T DAERAH                     |
|              |   | Prosentase Pelayanan Kedinasan Terhadap Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah        | 100             | 100  | 9,025,823,600 | 100  | 17,762,023,200 | 100  | 10,433,874,900 | 100  | 11,905,064,300 | 100  | 13,000,064,300 | 100           | 62,126,850,300 | SEKRETARIA<br>T DAERAH                     |
|              |   | Prosentase Peningkatan Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)            | 65              | 68   | 5,000,000     | 70   | 200,000,000    | 72   | 250,000,000    | 75   | 280,000,000    | 75   | 340,000,000    | 75            | 1,075,000,000  | SEKRETARIA<br>T DAERAH                     |
|              |   | Prosentase Jumlah Rancangan Produk Hukum tentang Kelembagaan dan Organisasi Daerah | 100             | 100  | 20,000,000    | 100  | 682,086,800    | 100  | 484,460,760    | 100  | 702,086,800    | 100  | 498,460,760    | 100           | 2,387,095,120  | SEKRETARIA<br>T DAERAH                     |
|              |   | Prosentase Peningkatan Budaya Kerja Aparatur                                       | 80              | 81   | 490,000,000   | 82   | 520,000,000    | 83   | 555,000,000    | 84   | 590,000,000    | 85   | 625,000,000    | 85            | 2,780,000,000  | SEKRETARIA<br>T DAERAH                     |
|              |   | Prosentase Keberhasilan Supervisi Ketatalaksanaan                                  | 0               | 100  | 15,000,000    | 100  | 490,357,524    | 100  | 440,357,524    | 100  | 490,357,524    | 100  | 540,357,524    | 100           | 1,976,430,096  | SEKRETARIA<br>T DAERAH                     |
| 4.01.<br>02. | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                                       | Prosentase Kerjasama yang ditandatangani   | 0               | 80   | 99,000,000    | 80   | 150,000,000    | 0    | 0              | 0    | 0              | 0    | 0              | 80            | 249,000,000    | SEKRETARIA<br>T DAERAH                     |



| Kod<br>e | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |       |               |      |               |      |               |      |               |               |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|----------|--|--|-----------------|--|----------------|-------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|--|
|          |  |  |                 | 2020   |                | 2021  |               | 2022 |               | 2023 |               | 2024 |               | Kondisi Akhir |                |  |
|          |  |  |                 | K  | Rp             | K     | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K             | Rp             |  |
| 1        | 2  | 3  | 4               | 5  | 6              | 7     | 8             | 9    | 10            | 11   | 12            | 13   | 14            | 15            | 16             | 17   |
|          |  | Prosentase batas wilayah administrasi antar desa dan Daerah yang Ditetapkan                                | 7.28            | 9.7  | 250,000,000    | 12.13 | 250,000,000   | 0.00 | 0             | 0.00 | 0             | 0.00 | 0             | 19.41         | 250,000,000    | SEKRETARIA<br>T DAERAH                     |
|          |  | Prosentase fasilitasi pengelolaan kekayaan desa  | 2.4             | 2.5  | 225,000,000    | 2.5   | 225,000,000   | 0.0  | 0             | 0.0  | 0             | 0.0  | 0             | 2.5           | 225,000,000    | SEKRETARIA<br>T DAERAH                     |
|          |  | Prosentase Pelayanan Kedinasan Terhadap Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah                                | 100             | 100  | 25,000,000     | 100   | 25,000,000    | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 25,000,000     | SEKRETARIA<br>T DAERAH                     |
|          |  | Prosentase Produk Hukum/Informasi Hukum yang di publikasikan pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum | 85              | 85   | 120,000,000    | 85    | 350,000,000   | 85   | 400,000,000   | 85   | 450,000,000   | 85   | 500,000,000   | 85            | 1,820,000,000  | SEKRETARIA<br>T DAERAH                     |
|          |  | Prosentase Koordinasi yang Dilakukan Di Bagian Kesejahteraan Rakyat  | 100             | 100  | 10,988,495,200 | 100   | 1,235,090,600 | 100  | 1,783,849,660 | 100  | 1,971,334,626 | 100  | 2,500,443,089 | 100           | 18,479,213,175 | SEKRETARIA<br>T DAERAH                     |
|          |  | Prosentase Monev yang Dilakukan Bagian Kesejahteraan Rakyat  | 75              | 75   | 1,051,570,600  | 80    | 4,575,090,600 | 85   | 6,283,849,660 | 90   | 7,241,834,626 | 100  | 9,441,693,089 | 100           | 28,594,038,575 | SEKRETARIA<br>T DAERAH                     |
|          |  | Prosentase Tindakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan                                       | 97              | 97   | 5,000,000      | 97    | 195,000,000   | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 200,000,000    | SEKRETARIA<br>T DAERAH                     |
|          |  | Prosentase Pelayanan Fasilitasi Kewenangan Terhadap Kepala/Wakil Kepala Daerah                             | 100             | 100  | 60,000,000     | 100   | 1,145,440,230 | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 1,205,440,230  | SEKRETARIA<br>T DAERAH                     |

| Kod<br>e     | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)                                  | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |      |               |      |                |      |                |      |                |               |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|--------------|--|---|-----------------|--|---------------|------|---------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|---------------|----------------|--|
|              |  |   |                 | 2020   |               | 2021 |               | 2022 |                | 2023 |                | 2024 |                | Kondisi Akhir |                |  |
|              |  |   |                 | K  | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K             | Rp             |  |
| 1            | 2  | 3   | 4               | 5  | 6             | 7    | 8             | 9    | 10             | 11   | 12             | 13   | 14             | 15            | 16             | 17   |
|              |  | Prosentase<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Keagamaan<br>Yang<br>Ditingkatkan      | 95              | 95   | 9,834,583,800 | 96   | 9,834,583,800 | 97   | 12,041,042,180 | 99   | 13,114,946,399 | 100  | 14,291,441,040 | 100           | 59,116,597,219 | SEKRETARIA<br>T DAERAH                     |
|              |  | Prosentase<br>Peningkatan<br>Kinerja Aparatur<br>Kecamatan                    | 70              | 75   | 80,400,000    | 80   | 80,400,000    | 0    | 0              | 0    | 0              | 0    | 0              | 95            | 80,400,000     | SEKRETARIA<br>T DAERAH                     |
|              |  | Prosentase<br>Peningkatan<br>Kegiatan Bina<br>Kewilayahan<br>yang Dilakukan   | 100             | 100  | 10,000,000    | 100  | 80,000,000    | 0    | 0              | 0    | 0              | 0    | 0              | 100           | 90,000,000     | SEKRETARIA<br>T DAERAH                     |
|              |  | Prosentase<br>Peraturan<br>Perundang -<br>undangan yang<br>ditetapkan         | 85              | 90   | 1,570,000,000 | 90   | 1,870,000,000 | 90   | 1,800,000,000  | 90   | 1,900,000,000  | 90   | 2,000,000,000  | 90            | 9,140,000,000  | SEKRETARIA<br>T DAERAH                     |
|              |  | Prosentase<br>Pemenuhan<br>Administrasi<br>Tata<br>Pemerintahan               | 0               | 0  | 0             | 0    | 0             | 100  | 1,755,000,000  | 100  | 2,410,000,000  | 100  | 2,770,000,000  | 300           | 6,935,000,000  | SEKRETARIA<br>T DAERAH                     |
| 4.01.<br>03. | PROGRAM<br>PEREKONOM<br>IAN DAN<br>PEMBANGUN<br>AN                                 | Prosentase<br>Pengadaan<br>Barang / Jasa<br>Pemerintah yang<br>berkualitas    | 0               | 100  | 1,717,683,040 | 100  | 3,724,138,568 | 100  | 2,048,146,462  | 100  | 2,252,961,179  | 100  | 2,478,257,226  | 100           | 12,221,186,475 | SEKRETARIA<br>T DAERAH                     |
|              |  | Prosentase<br>Koordinasi yang<br>Dilakukan<br>Bagian Sumber<br>Daya Alam      | 97              | 97   | 636,752,800   | 97   | 694,850,000   | 0    | 0              | 0    | 0              | 0    | 0              | 100           | 1,331,602,800  | SEKRETARIA<br>T DAERAH                     |
|              |  | Prosentase<br>Keberhasilan<br>Pelaksanaan<br>Program<br>Pembangunan<br>Daerah | 97              | 97   | 1,253,178,200 | 97   | 1,345,838,160 | 100  | 728,410,988    | 100  | 796,752,087    | 100  | 875,177,295    | 100           | 4,999,356,730  | SEKRETARIA<br>T DAERAH                     |
|              |  | Prosentase<br>kebijakan<br>Pembangunan<br>Daerah yang<br>Dilaksanakan         | 0               | 50   | 415,279,500   | 60   | 1,237,728,720 | 70   | 1,025,000,000  | 80   | 1,170,000,000  | 80   | 1,250,000,000  | 80            | 5,098,008,220  | SEKRETARIA<br>T DAERAH                     |
|              |  | Prosentase<br>Koordinasi<br>dalam<br>Meningkatkan<br>Perekonomian             | 100             | 100  | 1,327,000,000 | 100  | 7,141,890,000 | 100  | 4,649,375,000  | 100  | 5,123,750,000  | 100  | 5,477,850,000  | 100           | 23,719,865,000 | SEKRETARIA<br>T DAERAH                     |

| Kode     | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembangunan    | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |      |               |      |                 |      |                 |      |               |               |                 | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|----------|--|--|-----------------|--|---------------|------|---------------|------|-----------------|------|-----------------|------|---------------|---------------|-----------------|--|
|          |  |  |                 | 2020   |               | 2021 |               | 2022 |                 | 2023 |                 | 2024 |               | Kondisi Akhir |                 |  |
|          |  |  |                 | K  | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp              | K    | Rp              | K    | Rp            | K             | Rp              |  |
| 1        | 2  | 3  | 4               | 5  | 6             | 7    | 8             | 9    | 10              | 11   | 12              | 13   | 14            | 15            | 16              | 17   |
| 7.01.01. | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN<br>/KOTA | Meningkatnya<br>Disiplin<br>Aparatur   | 100             | 100  | 2,976,278,000 | 100  | 3,109,000,000 | 0    | 0               | 0    | 0               | 0    | 0             | 100           | 6,085,278,000   | KECAMATAN<br>WALED                         |
|          |  | Meningkatnya<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br>yang sesuai<br>standar<br>pelayanan prima            | 100             | 100  | 216,652,000   | 100  | 510,571,000   | 0    | 0               | 0    | 0               | 0    | 0             | 100           | 789,223,000     | KECAMATAN<br>WALED                         |
|          |  | Meningkatnya<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Aparatur yang<br>sesuai standar<br>kebutuhan<br>pelayanan prima       | 100             | 100  | 549,434,400   | 100  | 551,222,768   | 0    | 0               | 0    | 0               | 0    | 0             | 100           | 1,115,657,168   | KECAMATAN<br>WALED                         |
|          |  | Peningkatan<br>sistem<br>pelaporan<br>kinerja dan<br>keuangan yang<br>transparan,<br>akuntabel dan<br>informatif | 100             | 100  | 20,522,400    | 100  | 20,924,800    | 0    | 0               | 0    | 0               | 0    | 0             | 100           | 41,447,200      | KECAMATAN<br>WALED                         |
|          |  | Peningkatan<br>sistem<br>Perencanaan<br>Sektoral yang<br>Akuntabel   | 100             | 100  | 18,794,400    | 100  | 18,868,800    | 0    | 0               | 0    | 0               | 0    | 0             | 100           | 37,663,200      | KECAMATAN<br>WALED                         |
|          |  | Meningkatnya<br>Prosentase<br>Kepatuhan<br>dalam<br>pelaksanaan<br>SOP pelayanan<br>Pemerintah.                  | 0               | 0  | 0             | 100  | 4,205,587,368 | 100  | 179,882,474,400 | 100  | 179,945,934,200 | 100  | 5,696,459,000 | 100           | 369,730,454,968 | KECAMATAN<br>WALED                         |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PELAYANAN<br>PUBLIK          | Meningkatnya<br>Pelayanan<br>Publik.   | 0               | 100  | 20,000,000    | 100  | 25,000,000    | 0    | 0               | 0    | 0               | 0    | 0             | 100           | 45,000,000      | KECAMATAN<br>WALED                         |

| Kod<br>e     | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |      |             |      |             |      |             |      |             |               |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|--------------|--|--|-----------------|--|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|---------------|---------------|--|
|              |  |  |                 | 2020   |             | 2021 |             | 2022 |             | 2023 |             | 2024 |             | Kondisi Akhir |               |  |
|              |  |  |                 | K  | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K             | Rp            |  |
| 1            | 2  | 3  | 4               | 5  | 6           | 7    | 8           | 9    | 10          | 11   | 12          | 13   | 14          | 15            | 16            | 17   |
|              |  | Cakupan<br>Pelimpahan<br>Sebagian<br>Kewenangan<br>Pemerintahan<br>Kepada Camat  | 55              | 100  | 196,431,396 | 100  | 200,282,992 | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 396,714,388   | KECAMATAN<br>WALED                         |
|              |  | Prosentase<br>Peningkatan<br>Efektifitas<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik                   | 90              | 0  | 0           | 100  | 67,443,824  | 100  | 324,134,400 | 100  | 357,985,900 | 100  | 914,859,500 | 100           | 1,664,423,624 | KECAMATAN<br>WALED                         |
| 7.01.<br>03. | PROGRAM<br>PEMBERDAY<br>AAN<br>MASYARAKA<br>T DESA DAN<br>KELURAHAN                | Cakupan<br>Pelimpahan<br>Sebagian<br>Kewenangan<br>Pemerintahan<br>Kepada Camat  | 55              | 100  | 82,751,172  | 100  | 84,373,744  | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 167,124,916   | KECAMATAN<br>WALED                         |
|              |  | Prosentase<br>jumlah<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat<br>Desa dan<br>Kelurahan yang<br>dilaksanakan                         | 0               | 0  | 0           | 100  | 84,373,744  | 100  | 86,000,000  | 100  | 90,000,000  | 100  | 100,000,000 | 100           | 360,373,744   | KECAMATAN<br>WALED                         |
| 7.01.<br>04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAM<br>AN DAN<br>KETERTIBAN<br>UMUM                 | Cakupan<br>Pelimpahan<br>Sebagian<br>Kewenangan<br>Pemerintahan<br>Kepada Camat  | 55              | 100  | 56,821,956  | 100  | 107,936,112 | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 164,758,068   | KECAMATAN<br>WALED                         |
|              |  | Prosentase<br>peningkatan<br>kegiatan<br>koordinasi<br>untuk<br>meningkatkan<br>ketentraman<br>dan ketertiban<br>umum.   | 0               | 0  | 0           | 100  | 55,000,000  | 100  | 111,050,300 | 100  | 114,164,400 | 100  | 116,278,600 | 100           | 396,493,300   | KECAMATAN<br>WALED                         |
| 7.01.<br>05. | PROGRAM<br>PENYELENG<br>GARAAN<br>URUSAN<br>PEMERINTA<br>HAN UMUM                  | Prosentase<br>jumlah urusan<br>pemerintahan<br>umum yang<br>ditugaskan<br>kepala<br>pemerintah<br>daerah kepada<br>camat | 0               | 0  | 0           | 100  | 50,000,000  | 100  | 325,000,000 | 100  | 265,000,000 | 100  | 300,000,000 | 100           | 940,000,000   | KECAMATAN<br>WALED                         |





| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)  | Kondisi Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |      |               |      |                |      |                |      |                |               |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|--|--|--------------|--|---------------|------|---------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|---------------|----------------|-----------------------------------|
|          |  |  |              | 2020   |               | 2021 |               | 2022 |                | 2023 |                | 2024 |                | Kondisi Akhir |                |                                   |
|          |  |  |              | K  | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K             | Rp             |                                   |
| 1        | 2  | 3  | 4            | 5  | 6             | 7    | 8             | 9    | 10             | 11   | 12             | 13   | 14             | 15            | 16             | 17                                |
| 7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA           | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat   | 0            | 100  | 0             | 100  | 20,000,000    | 0    | 0              | 0    | 0              | 0    | 0              | 100           | 20,000,000     | KECAMATAN WALED                   |
|          |  | Peningkatan Prosentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa          | 0            | 0  | 0             | 100  | 75,000,000    | 100  | 10,167,500,000 | 100  | 12,287,000,000 | 100  | 15,294,000,000 | 100           | 37,823,500,000 | KECAMATAN WALED                   |
| 7.01.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran                         | 98           | 100  | 196,000,000   | 100  | 252,500,000   | 0    | 0              | 0    | 0              | 0    | 0              | 100           | 448,500,000    | KECAMATAN CILEDUG                 |
|          |  | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur   | 98           | 100  | 275,000,000   | 100  | 405,000,000   | 0    | 0              | 0    | 0              | 0    | 0              | 100           | 680,000,000    | KECAMATAN CILEDUG                 |
|          |  | Meningkatnya Disiplin Aparatur   | 98           | 100  | 3,074,048,000 | 100  | 3,229,000,000 | 0    | 0              | 0    | 0              | 0    | 0              | 100           | 6,303,048,000  | KECAMATAN CILEDUG                 |
|          |  | Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif | 95           | 100  | 35,000,000    | 100  | 42,000,000    | 0    | 0              | 0    | 0              | 0    | 0              | 100           | 77,000,000     | KECAMATAN CILEDUG                 |
|          |  | Peningkatan sistem Perencanaan Sektoral yang Akuntabel                                       | 95           | 100  | 25,000,000    | 100  | 26,250,000    | 0    | 0              | 0    | 0              | 0    | 0              | 100           | 51,250,000     | KECAMATAN CILEDUG                 |
|          |  | Meningkatnya Prosentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah                 | 98           | 0  | 0             | 100  | 4,205,600,000 | 100  | 5,469,870,000  | 100  | 6,057,290,000  | 100  | 6,717,620,000  | 100           | 22,473,380,000 | KECAMATAN CILEDUG                 |

| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)   | Kondisi Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |      |             |      |             |      |             |      |             |               |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|--|---|--------------|--|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
|          |  |   |              | 2020   |             | 2021 |             | 2022 |             | 2023 |             | 2024 |             | Kondisi Akhir |               |                                   |
|          |  |   |              | K  | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K             | Rp            |                                   |
| 1        | 2  | 3   | 4            | 5  | 6           | 7    | 8           | 9    | 10          | 11   | 12          | 13   | 14          | 15            | 16            | 17                                |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK    | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                                  | 98           | 100  | 237,000,000 | 100  | 244,900,000 | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 481,900,000   | KECAMATAN CILEDUG                 |
|          |  | Meningkatnya Pelayanan Publik   | 0            | 0  | 0           | 100  | 40,000,000  | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 40,000,000    | KECAMATAN CILEDUG                 |
|          |  | Prosentase Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik                | 98           | 0  | 0           | 100  | 320,970,000 | 100  | 380,970,000 | 100  | 445,888,000 | 100  | 520,444,000 | 100           | 1,668,272,000 | KECAMATAN CILEDUG                 |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN           | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                                  | 98           | 100  | 90,000,000  | 100  | 94,500,000  | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 184,500,000   | KECAMATAN CILEDUG                 |
|          |  | Prosentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilakukan                  | 98           | 0  | 0           | 100  | 99,225,000  | 100  | 159,225,000 | 100  | 179,000,000 | 100  | 199,500,000 | 100           | 636,950,000   | KECAMATAN CILEDUG                 |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM           | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                                  | 98           | 100  | 60,000,000  | 100  | 112,000,000 | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 172,000,000   | KECAMATAN CILEDUG                 |
|          |  | Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilakukan         | 98           | 0  | 0           | 100  | 121,100,000 | 100  | 121,100,000 | 100  | 132,440,000 | 100  | 146,220,000 | 100           | 520,860,000   | KECAMATAN CILEDUG                 |
| 7.01.05. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM             | Prosentase jumlah urusan pemerintahan umum yang di tugaskan kepala pemerintah daerah kepada camat | 0            | 0  | 0           | 100  | 50,000,000  | 100  | 240,000,000 | 100  | 290,000,000 | 100  | 340,000,000 | 100           | 920,000,000   | KECAMATAN CILEDUG                 |



| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)   | Kondisi Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |      |               |      |               |      |               |      |               |               |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|--|---|--------------|--|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|-----------------------------------|
|          |  |   |              | 2020   |               | 2021 |               | 2022 |               | 2023 |               | 2024 |               | Kondisi Akhir |                |                                   |
|          |  |   |              | K  | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K             | Rp             |                                   |
| 1        | 2  | 3   | 4            | 5  | 6             | 7    | 8             | 9    | 10            | 11   | 12            | 13   | 14            | 15            | 16             | 17                                |
| 7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA           | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat  | 0            | 1000   | 30,000,000    | 100  | 40,000,000    | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 70,000,000     | KECAMATAN CILEDUG                 |
|          |  | Peningkatan Prosentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa         | 0            | 0  | 0             | 100  | 100,000,000   | 100  | 300,000,000   | 100  | 440,000,000   | 100  | 380,000,000   | 100           | 1,220,000,000  | KECAMATAN CILEDUG                 |
| 7.01.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran                        | 100          | 95   | 3,014,786,000 | 96   | 3,164,400,000 | 97   | 3,293,500,000 | 98   | 3,447,000,000 | 100  | 3,611,000,000 | 100           | 16,530,686,000 | KECAMATAN LOSARI                  |
|          |  | meningkatnya sarana dan prasarana aparatur  | 100          | 95   | 95,800,000    | 96   | 126,456,000   | 97   | 25,285,800    | 98   | 27,493,600    | 100  | 29,701,400    | 100           | 304,736,800    | KECAMATAN LOSARI                  |
|          |  | Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informati | 100          | 100  | 106,500,000   | 100  | 217,580,100   | 100  | 131,608,600   | 100  | 134,936,600   | 100  | 138,264,700   | 100           | 728,890,000    | KECAMATAN LOSARI                  |
|          |  | Peningkatan sistem Perencanaan Sektoral yang Akuntabel                                      | 100          | 95   | 7,500,000     | 96   | 7,800,000     | 98   | 11,300,000    | 99   | 11,400,000    | 100  | 11,500,000    | 100           | 49,500,000     | KECAMATAN LOSARI                  |
|          |  | Meningkatnya disiplin aparatur  | 100          | 100  | 5,000,000     | 100  | 5,000,000     | 100  | 5,000,000     | 100  | 5,000,000     | 100  | 25,000,000    | 100           | 45,000,000     | KECAMATAN LOSARI                  |
|          |  | Meningkatnya Prosentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah                | 98           | 100  | 14,000,000    | 100  | 157,878,000   | 100  | 170,415,800   | 100  | 173,353,600   | 100  | 175,191,400   | 100           | 690,838,800    | KECAMATAN LOSARI                  |

| Kod<br>e     | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintaha<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |               |                   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|--------------|---|--|-----------------|--|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|---------------|-------------------|--|
|              |   |  |                 | 2020   |                 | 2021 |                 | 2022 |                 | 2023 |                 | 2024 |                 | Kondisi Akhir |                   |  |
|              |   |  |                 | K  | Rp              | K    | Rp              | K    | Rp              | K    | Rp              | K    | Rp              | K             | Rp                |  |
| 1            | 2   | 3  | 4               | 5  | 6               | 7    | 8               | 9    | 10              | 11   | 12              | 13   | 14              | 15            | 16                | 17   |
| 7.01.<br>02. | PROGRAM<br>PENYELENG<br>GARAAN<br>PEMERINTA<br>HAN DAN<br>PELAYANAN<br>PUBLIK       | Prosentase<br>peningkatan<br>efektifitas<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan<br>dan pelayanan<br>publik   | 20              | 20   | 241,000,00<br>0 | 20   | 247,000,00<br>0 | 0    | 0               | 0    | 0               | 0    | 0               | 20            | 1,011,000,0<br>00 | KECAMATAN<br>LOSARI                        |
|              |   | Prosentase<br>Peningkatan<br>Efektifitas<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintah dan<br>Pelayanan<br>Publik     | 98              | 0  | 0               | 100  | 105,000,00<br>0 | 100  | 90,000,000      | 100  | 110,000,00<br>0 | 100  | 130,000,00<br>0 | 100           | 470,000,00<br>0   | KECAMATAN<br>LOSARI                        |
| 7.01.<br>03. | PROGRAM<br>PEMBERDAY<br>AAN<br>MASYARAKA<br>T DESA DAN<br>KELURAHAN                 | Cakupan<br>Pelimpahan<br>Sebagian<br>Kewenangan<br>Pemerintahan<br>Kepada Camat                          | 98              | 100  | 92,500,000      | 100  | 95,000,000      | 0    | 0               | 0    | 0               | 0    | 0               | 100           | 484,500,00<br>0   | KECAMATAN<br>LOSARI                        |
| 7.01.<br>04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAM<br>AN DAN<br>KETERTIBAN<br>UMUM                  | Cakupan<br>Pelimpahan<br>Sebagian<br>Kewenangan<br>Pemerintahan<br>Kepada Camat                          | 98              | 100  | 60,000,000      | 99   | 117,000,00<br>0 | 97   | 64,000,000      | 99   | 66,000,000      | 100  | 68,000,000      | 100           | 375,000,00<br>0   | KECAMATAN<br>LOSARI                        |
| 7.01.<br>05. | PROGRAM<br>PENYELENG<br>GARAAN<br>URUSAN<br>PEMERINTA<br>HAN UMUM                   | Meningkatnya<br>Pelayanan<br>Publik  | 0               | 100  | 20,000,000      | 100  | 80,000,000      | 100  | 240,000,00<br>0 | 100  | 175,000,00<br>0 | 100  | 205,000,00<br>0 | 100           | 720,000,00<br>0   | KECAMATAN<br>LOSARI                        |
| 7.01.<br>06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN<br>DAN<br>PENGAWASA<br>N<br>PEMERINTA<br>HAN DESA              | Meningkatnya<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat   | 0               | 100  | 5,000,000       | 100  | 20,000,000      | 0    | 0               | 0    | 0               | 0    | 0               | 100           | 145,000,00<br>0   | KECAMATAN<br>LOSARI                        |
|              |   | Peningkatan<br>Prosentase<br>kegiatan<br>pembinaan dan<br>pengawasan<br>terhadap<br>pemerintahan<br>desa | 0               | 0  | 0               | 100  | 20,000,000      | 0    | 0               | 0    | 0               | 0    | 0               | 100           | 20,000,000        | KECAMATAN<br>LOSARI                        |

| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)   | Kondisi Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |      |               |      |               |      |               |      |               |               |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|--|---|--------------|--|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|-----------------------------------|
|          |  |   |              | 2020   |               | 2021 |               | 2022 |               | 2023 |               | 2024 |               | Kondisi Akhir |                |                                   |
|          |  |   |              | K  | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K             | Rp             |                                   |
| 1        | 2  | 3   | 4            | 5  | 6             | 7    | 8             | 9    | 10            | 11   | 12            | 13   | 14            | 15            | 16             | 17                                |
| 7.01.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | Peningkatan sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif | 100          | 100  | 18,674,000    | 100  | 20,000,000    | 100  | 20,000,000    | 100  | 20,000,000    | 100  | 20,000,000    | 100           | 98,674,000     | KECAMATAN PABEDILAN               |
|          |  | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai standar pelayanan prima         | 100          | 100  | 16,250,000    | 100  | 70,118,000    | 100  | 21,000,000    | 100  | 21,000,000    | 100  | 21,000,000    | 100           | 149,368,000    | KECAMATAN PABEDILAN               |
|          |  | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang sesuai standar kebutuhan pelayanan prima    | 100          | 100  | 80,000,000    | 100  | 80,000,000    | 100  | 455,000,000   | 100  | 430,000,000   | 100  | 430,000,000   | 100           | 1,475,000,000  | KECAMATAN PABEDILAN               |
|          |  | Peningkatan sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif | 100          | 100  | 3,232,386,000 | 100  | 3,372,000,000 | 100  | 3,519,000,000 | 100  | 3,676,000,000 | 100  | 3,843,000,000 | 100           | 17,642,386,000 | KECAMATAN PABEDILAN               |
|          |  | Peningkatan sistem Perencanaan Sektoral yang Akuntabel                                      | 100          | 100  | 23,000,000    | 100  | 25,000,000    | 100  | 25,000,000    | 100  | 25,000,000    | 100  | 25,000,000    | 100           | 123,000,000    | KECAMATAN PABEDILAN               |
|          |  | Meningkatnya Prosentase kepatuhan dalam pelaksanaan SOP pelayanan pemerintah                | 0            | 10   | 17,800,000    | 100  | 315,920,000   | 100  | 643,420,000   | 100  | 644,220,000   | 100  | 598,420,000   | 100           | 2,219,780,000  | KECAMATAN PABEDILAN               |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK    | Meningkatnya Pelayanan Publik   | 55           | 100  | 94,939,200    | 100  | 115,000,000   | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 559,939,200    | KECAMATAN PABEDILAN               |

| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)   | Kondisi Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |      |             |      |             |      |             |      |             |               |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|--|---|--------------|--|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
|          |  |   |              | 2020   |             | 2021 |             | 2022 |             | 2023 |             | 2024 |             | Kondisi Akhir |               |                                   |
|          |  |   |              | K  | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K             | Rp            |                                   |
| 1        | 2  | 3   | 4            | 5  | 6           | 7    | 8           | 9    | 10          | 11   | 12          | 13   | 14          | 15            | 16            | 17                                |
|          |  | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                                   | 100          | 100  | 125,000,000 | 100  | 190,000,000 | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 1,240,000,000 | KECAMATAN PABEDILAN               |
|          |  | Prosentase Peningkatan Pelimpahan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | 100          | 0  | 0           | 100  | 150,000,000 | 100  | 150,000,000 | 100  | 170,000,000 | 100  | 190,000,000 | 100           | 510,000,000   | KECAMATAN PABEDILAN               |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN           | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                                   | 100          | 100  | 65,000,000  | 100  | 65,000,000  | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 325,000,000   | KECAMATAN PABEDILAN               |
|          |  | Prosentase jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan                    | 100          | 0  | 0           | 100  | 230,000,000 | 100  | 230,000,000 | 100  | 250,000,000 | 100  | 260,000,000 | 100           | 740,000,000   | KECAMATAN PABEDILAN               |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM           | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                                   | 55           | 60   | 70,860,000  | 65   | 135,000,000 | 70   | 175,000,000 | 75   | 205,000,000 | 80   | 235,000,000 | 80            | 820,860,000   | KECAMATAN PABEDILAN               |
|          |  | Prosentase peningkatan Kegiatan Koordinasi untuk meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum     | 100          | 0  | 0           | 100  | 50,000,000  | 100  | 50,000,000  | 100  | 50,000,000  | 100  | 50,000,000  | 400           | 150,000,000   | KECAMATAN PABEDILAN               |
| 7.01.05. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM             | Prosentase jumlah urusan pemerintahan umum yang di tugaskan kepala pemerintah daerah kepada camat | 0            | 0  | 0           | 100  | 50,000,000  | 100  | 222,000,000 | 100  | 143,000,000 | 100  | 159,000,000 | 100           | 574,000,000   | KECAMATAN PABEDILAN               |

| Kode     | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembangunan | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |      |               |      |               |      |               |      |               |               |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|----------|---|---|-----------------|--|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|--|
|          |   |   |                 | 2020   |               | 2021 |               | 2022 |               | 2023 |               | 2024 |               | Kondisi Akhir |                |  |
|          |   |   |                 | K  | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K             | Rp             |  |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5  | 6             | 7    | 8             | 9    | 10            | 11   | 12            | 13   | 14            | 15            | 16             | 17   |
| 7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                          | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat  | 0               | 0  | 0             | 0    | 0             | 100  | 90,000,000    | 100  | 115,000,000   | 100  | 140,000,000   | 300           | 345,000,000    | KECAMATAN PABEDILAN                        |
|          |   | Peningkatan Prosentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa         | 0               | 0  | 0             | 100  | 20,000,000    | 100  | 200,000,000   | 100  | 600,000,000   | 100  | 200,000,000   | 400           | 1,020,000,000  | KECAMATAN PABEDILAN                        |
| 7.01.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA                | Meningkatnya Disiplin Aparatur  | 100             | 100  | 3,085,516,000 | 100  | 3,216,900,000 | 100  | 3,361,200,000 | 100  | 3,516,500,000 | 100  | 3,679,800,000 | 100           | 16,859,916,000 | KECAMATAN BABAKAN                          |
|          |   | Peningkatan sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif | 100             | 100  | 16,327,960    | 100  | 17,070,140    | 100  | 17,812,320    | 100  | 18,554,500    | 100  | 19,296,680    | 100           | 89,061,600     | KECAMATAN BABAKAN                          |
|          |   | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang sesuai standar kebutuhan pelayanan prima    | 100             | 100  | 51,274,703    | 100  | 103,605,371   | 100  | 755,936,039   | 100  | 818,266,708   | 100  | 760,597,376   | 100           | 2,489,680,197  | KECAMATAN BABAKAN                          |
|          |   | Peningkatan sistem Perencanaan Sektoral yang Akuntabel                                      | 100             | 100  | 29,855,780    | 100  | 29,855,780    | 100  | 29,855,780    | 100  | 29,855,780    | 100  | 29,855,780    | 100           | 149,278,900    | KECAMATAN BABAKAN                          |
|          |   | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai standar pelayanan prima         | 100             | 100  | 159,685,890   | 100  | 191,760,485   | 100  | 179,547,080   | 100  | 192,090,675   | 100  | 204,634,270   | 100           | 927,718,400    | KECAMATAN BABAKAN                          |

| Kode     | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembangunan | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |      |             |      |             |      |             |      |             |               |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|----------|---|---|-----------------|--|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|---------------|---------------|--|
|          |   |   |                 | 2020   |             | 2021 |             | 2022 |             | 2023 |             | 2024 |             | Kondisi Akhir |               |  |
|          |   |   |                 | K  | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K             | Rp            |  |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5  | 6           | 7    | 8           | 9    | 10          | 11   | 12          | 13   | 14          | 15            | 16            | 17   |
|          |   | Meningkatnya Prosentase kepatuhan dalam pelaksanaan SOP pelayanan pemerintah                    | 0               | 0  | 0           | 100  | 110,000,000 | 100  | 110,000,000 | 100  | 110,000,000 | 100  | 110,000,000 | 100           | 440,000,000   | KECAMATAN BABAKAN                          |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                   | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                                 | 100             | 100  | 270,947,200 | 100  | 275,947,200 | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 546,894,400   | KECAMATAN BABAKAN                          |
|          |   | Meningkatnya Pelayanan Publik   | 0               | 0  | 0           | 100  | 20,000,000  | 100  | 20,000,000  | 100  | 20,000,000  | 100  | 20,000,000  | 100           | 80,000,000    | KECAMATAN BABAKAN                          |
|          |   | Prosentase Peningkatan Pelimpahan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 100             | 0  | 0           | 0    | 0           | 100  | 331,947,200 | 100  | 337,947,200 | 100  | 349,947,000 | 100           | 1,019,841,400 | KECAMATAN BABAKAN                          |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                          | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                                 | 100             | 100  | 68,532,640  | 100  | 71,647,760  | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 140,180,400   | KECAMATAN BABAKAN                          |
|          |   | Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan                         | 100             | 0  | 0           | 0    | 0           | 100  | 99,762,880  | 100  | 102,878,000 | 100  | 105,993,100 | 100           | 308,633,980   | KECAMATAN BABAKAN                          |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                          | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                                 | 100             | 100  | 65,939,200  | 100  | 118,939,200 | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 184,878,400   | KECAMATAN BABAKAN                          |
|          |   | Prosentase Kegiatan Koordinasi untuk peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum                | 100             | 0  | 0           | 0    | 0           | 100  | 123,939,200 | 100  | 133,939,200 | 100  | 143,939,200 | 100           | 401,817,600   | KECAMATAN BABAKAN                          |



| Kode     | Bidang Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan        | Indikator Kinerja Program (outcome)  | Kondisi Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |      |               |      |             |      |             |      |             |               |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|--|--|--------------|--|---------------|------|---------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
|          |  |  |              | 2020   |               | 2021 |               | 2022 |             | 2023 |             | 2024 |             | Kondisi Akhir |               |                                   |
|          |  |  |              | K  | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K             | Rp            |                                   |
| 1        | 2  | 3  | 4            | 5  | 6             | 7    | 8             | 9    | 10          | 11   | 12          | 13   | 14          | 15            | 16            | 17                                |
| 7.01.05. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM             | Prosentase urusan pemerintahan umum yang di tugaskan kepala pemerintah daerah kepada Camat   | 0            | 0  | 0             | 100  | 50,000,000    | 100  | 280,000,000 | 100  | 200,000,001 | 100  | 210,000,000 | 100           | 740,000,001   | KECAMATAN BABAKAN                 |
| 7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA           | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat   | 0            | 0  | 0             | 100  | 20,000,000    | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 80,000,000    | KECAMATAN BABAKAN                 |
|          |  | Peningkatan Prosentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa          | 0            | 0  | 0             | 100  | 20,000,000    | 100  | 140,000,000 | 100  | 340,000,000 | 100  | 140,000,000 | 100           | 640,000,000   | KECAMATAN BABAKAN                 |
| 7.01.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran                         | 100          | 95   | 212,759,890   | 96   | 274,035,879   | 97   | 38,000,000  | 98   | 41,000,000  | 100  | 43,000,000  | 100           | 608,795,769   | KECAMATAN GEBANG                  |
|          |  | meningkatnya sarana dan prasarana aparatur   | 100          | 95   | 145,000,000   | 96   | 191,167,300   | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 336,167,300   | KECAMATAN GEBANG                  |
|          |  | Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif | 100          | 100  | 19,800,000    | 100  | 15,730,000    | 100  | 5,000,000   | 100  | 5,000,000   | 100  | 5,000,000   | 100           | 50,530,000    | KECAMATAN GEBANG                  |
|          |  | Peningkatan sistem Perencanaan Sektoral yang Akuntabel                                       | 100          | 95   | 22,000,000    | 96   | 24,200,000    | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 46,200,000    | KECAMATAN GEBANG                  |
|          |  | Meningkatnya disiplin aparatur   | 95           | 95   | 3,004,892,000 | 95   | 3,142,940,000 | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 95            | 6,147,832,000 | KECAMATAN GEBANG                  |

| Kod<br>e     | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |      |               |      |               |      |               |      |               |               |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|--------------|--|--|-----------------|--|-------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|--|
|              |  |  |                 | 2020   |             | 2021 |               | 2022 |               | 2023 |               | 2024 |               | Kondisi Akhir |                |  |
|              |  |  |                 | K  | Rp          | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K             | Rp             |  |
| 1            | 2  | 3  | 4               | 5  | 6           | 7    | 8             | 9    | 10            | 11   | 12            | 13   | 14            | 15            | 16             | 17   |
|              |  | Meningkatnya<br>Prosentase<br>Kepatuhan<br>dalam<br>Pelaksanaan<br>SOP Pelayanan<br>Pemerintah         | 98              | 0  | 0           | 100  | 3,807,780,000 | 100  | 4,536,783,500 | 100  | 4,810,155,300 | 100  | 5,102,316,550 | 100           | 18,257,035,350 | KECAMATAN<br>GEBANG                        |
| 7.01.<br>02. | PROGRAM<br>PENYELENG<br>GARAAN<br>PEMERINTA<br>HAN DAN<br>PELAYANAN<br>PUBLIK      | Cakupan<br>Pelimpahan<br>Sebagian<br>Kewenangan<br>Pemerintahan<br>Kepada Camat                        | 100             | 100  | 205,000,000 | 100  | 219,900,000   | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 1,059,517,100  | KECAMATAN<br>GEBANG                        |
|              |  | Prosentase<br>Peningkatan<br>Efektifitas<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintah dan<br>Pelayanan<br>Publik   | 98              | 0  | 0           | 100  | 111,040,000   | 100  | 106,040,000   | 100  | 118,416,000   | 100  | 134,208,000   | 100           | 474,704,000    | KECAMATAN<br>GEBANG                        |
|              |  | Prosentase<br>peningkatan<br>efektifitas<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan<br>dan pelayanan<br>publik | 100             | 100  | 5,000,000   | 100  | 5,000,000     | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 10,000,000     | KECAMATAN<br>GEBANG                        |
| 7.01.<br>03. | PROGRAM<br>PEMBERDAY<br>AAN<br>MASYARAKA<br>T DESA DAN<br>KELURAHAN                | Cakupan<br>Pelimpahan<br>Sebagian<br>Kewenangan<br>Pemerintahan<br>Kepada Camat                        | 98              | 100  | 49,468,980  | 100  | 54,415,878    | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 512,013,069    | KECAMATAN<br>GEBANG                        |
|              |  | Prosentase<br>peningkatan<br>kegiatan<br>pemberdayaan<br>masyarakat desa                               | 98              | 0  | 0           | 100  | 30,000,000    | 100  | 35,000,000    | 100  | 45,000,000    | 100  | 55,000,000    | 100           | 135,000,000    | KECAMATAN<br>GEBANG                        |
| 7.01.<br>04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAM<br>AN DAN<br>KETERTIBAN<br>UMUM                 | Cakupan<br>Pelimpahan<br>Sebagian<br>Kewenangan<br>Pemerintahan<br>Kepada Camat                        | 98              | 101  | 54,999,890  | 99   | 110,498,879   | 97   | 66,549,866    | 99   | 73,204,852    | 100  | 80,525,337    | 100           | 385,778,824    | KECAMATAN<br>GEBANG                        |
| 7.01.<br>05. | PROGRAM<br>PENYELENG<br>GARAAN<br>URUSAN<br>PEMERINTA<br>HAN UMUM                  | Prosentase<br>urusan<br>pemerintahan<br>umum yang di<br>tugaskan kepala<br>pemerintah                  | 0               | 0  | 0           | 100  | 50,000,000    | 100  | 150,000,000   | 100  | 65,000,000    | 100  | 75,000,000    | 100           | 340,000,000    | KECAMATAN<br>GEBANG                        |



| Kod<br>e     | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   |      |                   |      |                   |      |                   |      |                   |               |                    | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|--------------|--|--|-----------------|--|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|---------------|--------------------|--|
|              |  |  |                 | 2020   |                   | 2021 |                   | 2022 |                   | 2023 |                   | 2024 |                   | Kondisi Akhir |                    |  |
|              |  |  |                 | K  | Rp                | K    | Rp                | K    | Rp                | K    | Rp                | K    | Rp                | K             | Rp                 |  |
| 1            | 2  | 3  | 4               | 5  | 6                 | 7    | 8                 | 9    | 10                | 11   | 12                | 13   | 14                | 15            | 16                 | 17   |
|              |  | daerah kepada<br>camat   |                 |  |                   |      |                   |      |                   |      |                   |      |                   |               |                    |  |
| 7.01.<br>06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN<br>DAN<br>PENGAWASA<br>N<br>PEMERINTA<br>HAN DESA             | Peningkatan<br>Prosentase<br>kegiatan<br>pembinaan dan<br>pengawasan<br>terhadap<br>pemerintahan<br>desa           | 0               | 0  | 0                 | 100  | 85,000,000        | 100  | 190,000,00<br>0   | 100  | 314,000,00<br>0   | 100  | 278,000,00<br>0   | 100           | 867,000,00<br>0    | KECAMATAN<br>GEBANG                        |
| 7.01.<br>01. | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTA<br>HAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN<br>/KOTA | Meningkatnya<br>prosentase<br>pemenuhan<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran                                | 0               | 100  | 112,184,00<br>0   | 100  | 179,142,00<br>0   | 0    | 0                 | 0    | 0                 | 0    | 0                 | 100           | 306,326,00<br>0    | KECAMATAN<br>KARANGSEM<br>BUNG             |
|              |  | Meningkatnya<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur yang<br>sesuai standar<br>kebutuhan<br>pelayanan prima         | 100             | 100  | 70,000,000        | 100  | 675,628,00<br>0   | 0    | 0                 | 0    | 0                 | 0    | 0                 | 100           | 745,628,00<br>0    | KECAMATAN<br>KARANGSEM<br>BUNG             |
|              |  | Meningkatnya<br>disiplin<br>aparatur   | 100             | 100  | 3,010,689,0<br>00 | 100  | 3,152,000,0<br>00 | 0    | 0                 | 0    | 0                 | 0    | 0                 | 100           | 6,162,689,0<br>00  | KECAMATAN<br>KARANGSEM<br>BUNG             |
|              |  | Peningkatan<br>sistem<br>pelaporan<br>kinerja dan<br>keuangan yang<br>transparan<br>adminitratif<br>dan informatif | 100             | 100  | 11,497,600        | 100  | 13,500,000        | 0    | 0                 | 0    | 0                 | 0    | 0                 | 100           | 24,997,600         | KECAMATAN<br>KARANGSEM<br>BUNG             |
|              |  | terpenuhinya<br>pelaporan<br>pengembangan<br>system<br>perencanaan<br>sektoral yang<br>Akuntabel                   | 100             | 100  | 6,350,000         | 100  | 6,985,000         | 0    | 0                 | 0    | 0                 | 0    | 0                 | 100           | 41,470,350         | KECAMATAN<br>KARANGSEM<br>BUNG             |
|              |  | Meningkatnya<br>Prosentase<br>Kepatuhan<br>dalam<br>Pelaksanaan  | 100             | 0  | 0                 | 100  | 4,037,255,0<br>00 | 100  | 4,527,683,5<br>00 | 100  | 4,765,951,<br>850 | 100  | 4,957,000,<br>000 | 100           | 18,287,890,<br>350 | KECAMATAN<br>KARANGSEM<br>BUNG             |

| Kod e    | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)   | Kondisi Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |            |      |             |      |             |      |             |      |             |               |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|--|---|--------------|--|------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
|          |  |   |              | 2020   |            | 2021 |             | 2022 |             | 2023 |             | 2024 |             | Kondisi Akhir |               |                                   |
|          |  |   |              | K  | Rp         | K    | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K             | Rp            |                                   |
| 1        | 2  | 3   | 4            | 5  | 6          | 7    | 8           | 9    | 10          | 11   | 12          | 13   | 14          | 15            | 16            | 17                                |
|          |  | SOP Pelayanan Pemerintah  |              |  |            |      |             |      |             |      |             |      |             |               |               |                                   |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK    | Meningkatnya Pelayanan Publik   | 0            | 100  | 42,474,600 | 100  | 100,500,000 | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 172,974,600   | KECAMATAN KARANGSEM BUNG          |
|          |  | Prosentase Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik          | 100          | 0  | 0          | 100  | 361,700,000 | 100  | 358,000,000 | 100  | 375,000,000 | 100  | 390,000,000 | 100           | 1,597,820,500 | KECAMATAN KARANGSEM BUNG          |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN           | Cakupan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan kepada Camat                              | 100          | 100  | 33,550,000 | 100  | 40,500,000  | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 74,050,000    | KECAMATAN KARANGSEM BUNG          |
|          |  | Prosentase Peningkatan Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang Dilaksanakan    | 0            | 0  | 0          | 100  | 40,500,000  | 100  | 135,000,000 | 100  | 145,500,000 | 100  | 155,000,000 | 100           | 476,000,000   | KECAMATAN KARANGSEM BUNG          |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM           | Cakupan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan kepada Camat                              | 100          | 100  | 80,784,800 | 100  | 135,000,000 | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 215,784,800   | KECAMATAN KARANGSEM BUNG          |
|          |  | Prosentase peningkatan kegiatan koordinasi untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum | 0            | 0  | 0          | 100  | 135,000,000 | 100  | 140,000,000 | 100  | 150,000,000 | 100  | 160,000,000 | 100           | 585,000,000   | KECAMATAN KARANGSEM BUNG          |



| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)  | Kondisi Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |      |               |      |             |      |             |      |             |               |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|--|--|--------------|--|---------------|------|---------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
|          |  |  |              | 2020   |               | 2021 |               | 2022 |             | 2023 |             | 2024 |             | Kondisi Akhir |               |                                   |
|          |  |  |              | K  | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K             | Rp            |                                   |
| 1        | 2  | 3  | 4            | 5  | 6             | 7    | 8             | 9    | 10          | 11   | 12          | 13   | 14          | 15            | 16            | 17                                |
| 7.01.05. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM             | Prosentase jumlah urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala pemerintah daerah kepada Camat | 0            | 0  | 0             | 100  | 50,000,000    | 100  | 316,000,000 | 100  | 222,000,000 | 100  | 252,000,000 | 100           | 840,000,000   | KECAMATAN KARANGSEM BUNG          |
| 7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA           | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan                               | 100          | 100  | 100,000,000   | 100  | 100,000,000   | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 200,000,000   | KECAMATAN KARANGSEM BUNG          |
|          |  | Peningkatan Prosentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa              | 0            | 0  | 0             | 100  | 25,000,000    | 100  | 165,000,000 | 100  | 165,000,000 | 100  | 165,000,000 | 100           | 520,000,000   | KECAMATAN KARANGSEM BUNG          |
| 7.01.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Sesuai Standar Pelayanan Prima                   | 100          | 100  | 116,003,400   | 100  | 127,103,740   | 100  | 135,445,000 | 100  | 25,989,500  | 100  | 26,588,450  | 100           | 431,130,090   | KECAMATAN LEMAHABANG              |
|          |  | Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur   | 100          | 100  | 61,711,100    | 100  | 67,882,210    | 100  | 5,000,000   | 100  | 5,000,000   | 100  | 5,000,000   | 100           | 144,593,310   | KECAMATAN LEMAHABANG              |
|          |  | Meningkatnya sistem Pelapopran kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif    | 100          | 100  | 11,626,400    | 100  | 12,789,040    | 100  | 15,000,000  | 100  | 15,000,000  | 100  | 15,000,000  | 100           | 69,415,440    | KECAMATAN LEMAHABANG              |
|          |  | Peningkatan sistem perencanaan sektoral yang akuntabel   | 100          | 100  | 4,364,000     | 100  | 4,800,400     | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 9,164,400     | KECAMATAN LEMAHABANG              |
|          |  | Peningkatan Disiplin Aparatur  | 100          | 0  | 3,038,880,000 | 100  | 3,171,000,000 | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 6,209,880,000 | KECAMATAN LEMAHABANG              |

| Kod<br>e | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintaha<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |      |               |      |               |      |               |      |               |               |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|----------|---|---|-----------------|--|-------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|--|
|          |   |   |                 | 2020   |             | 2021 |               | 2022 |               | 2023 |               | 2024 |               | Kondisi Akhir |                |  |
|          |   |   |                 | K  | Rp          | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K             | Rp             |  |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5  | 6           | 7    | 8             | 9    | 10            | 11   | 12            | 13   | 14            | 15            | 16             | 17   |
|          |   | Meningkatnya Prosentase Kepatuhan dalam pelaksanaan SOP pelayanan Pemerintah                    | 0               | 0  | 0           | 100  | 260,660,390   | 100  | 697,192,929   | 100  | 412,026,625   | 100  | 489,142,845   | 100           | 1,859,022,789  | KECAMATAN LEMAHABANG                       |
|          |   | Meningkatnya Disiplin Aparatur.   | 0               | 0  | 0           | 100  | 3,166,000,000 | 100  | 3,309,000,000 | 100  | 3,463,000,000 | 100  | 3,625,000,000 | 100           | 13,563,000,000 | KECAMATAN LEMAHABANG                       |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                           | Cakupan Pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                                | 100             | 100  | 189,473,300 | 100  | 208,420,630   | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 397,893,930    | KECAMATAN LEMAHABANG                       |
|          |   | Meningkatkan Pelayanan Publik   | 0               | 0  | 0           | 100  | 25,000,000    | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 25,000,000     | KECAMATAN LEMAHABANG                       |
|          |   | Prosentase Peningkatan Pelimpahan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 100             | 0  | 0           | 100  | 233,370,630   | 100  | 427,579,928   | 100  | 457,837,921   | 100  | 489,121,713   | 100           | 1,607,910,192  | KECAMATAN LEMAHABANG                       |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                  | Cakupan Pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                                | 100             | 100  | 64,911,800  | 100  | 71,402,980    | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 136,314,780    | KECAMATAN LEMAHABANG                       |
|          |   | Prosentase jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan                  | 100             | 0  | 0           | 100  | 5,000,000     | 100  | 183,543,278   | 100  | 191,397,600   | 100  | 200,037,300   | 100           | 579,978,178    | KECAMATAN LEMAHABANG                       |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                  | Cakupan Pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                                | 100             | 100  | 90,588,600  | 100  | 149,647,460   | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 240,236,060    | KECAMATAN LEMAHABANG                       |
|          |   | Prosentase Peningkatan Kegiatan Koordinasi untuk  | 100             | 0  | 0           | 100  | 55,000,000    | 100  | 164,612,200   | 100  | 175,573,400   | 100  | 187,630,700   | 100           | 582,816,300    | KECAMATAN LEMAHABANG                       |

| Kod<br>e     | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   |      |                   |      |                 |      |                 |      |                 |               |                   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|--------------|--|---|-----------------|--|-------------------|------|-------------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|---------------|-------------------|--|
|              |  |   |                 | 2020   |                   | 2021 |                   | 2022 |                 | 2023 |                 | 2024 |                 | Kondisi Akhir |                   |  |
|              |  |   |                 | K  | Rp                | K    | Rp                | K    | Rp              | K    | Rp              | K    | Rp              | K             | Rp                |  |
| 1            | 2  | 3   | 4               | 5  | 6                 | 7    | 8                 | 9    | 10              | 11   | 12              | 13   | 14              | 15            | 16                | 17   |
|              |  | peningkatan<br>Ketentraman<br>dan Ketertiban<br>Umum  |                 |  |                   |      |                   |      |                 |      |                 |      |                 |               |                   |  |
| 7.01.<br>05. | PROGRAM<br>PENYELENG<br>GARAAN<br>URUSAN<br>PEMERINTA<br>HAN UMUM                  | Prosentase<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Umum yang<br>ditugaskan<br>kepala<br>pemerintah<br>daerah kepada<br>Camat | 0               | 0  | 0                 | 100  | 50,000,000        | 100  | 325,000,00<br>0 | 100  | 360,000,00<br>0 | 100  | 420,000,00<br>0 | 100           | 1,155,000,0<br>00 | KECAMATAN<br>LEMAHABAN<br>G                |
| 7.01.<br>06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN<br>DAN<br>PENGAWASA<br>N<br>PEMERINTA<br>HAN DESA             | Meningkatnya<br>pemberdayaan<br>masyarakat  | 0               | 0  | 0                 | 100  | 25,000,000        | 0    | 0               | 0    | 0               | 0    | 0               | 100           | 25,000,000        | KECAMATAN<br>LEMAHABAN<br>G                |
|              |  | Peningkatan<br>Prosentase<br>kegiatan<br>pembinaan dan<br>pengawasan<br>terhadap<br>pemerintahan<br>desa          | 0               | 0  | 0                 | 100  | 25,000,000        | 100  | 190,000,00<br>0 | 100  | 190,000,00<br>0 | 100  | 190,000,00<br>0 | 100           | 595,000,00<br>0   | KECAMATAN<br>LEMAHABAN<br>G                |
| 7.01.<br>01. | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTA<br>HAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN<br>/KOTA | Meningkatnya<br>Disiplin<br>Aparatur  | 100             | 100  | 3,008,442,0<br>00 | 100  | 3,136,000,0<br>00 | 0    | 0               | 0    | 0               | 0    | 0               | 100           | 6,164,442,0<br>00 | KECAMATAN<br>SUSUKANLE<br>BAK              |
|              |  | Meningkatnya<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br>yang sesuai<br>standar<br>pelayanan prima             | 100             | 100  | 147,251,20<br>0   | 100  | 204,655,92<br>0   | 0    | 0               | 0    | 0               | 0    | 0               | 100           | 427,704,53<br>8   | KECAMATAN<br>SUSUKANLE<br>BAK              |
|              |  | Meningkatnya<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Aparatur yang<br>sesuai standar<br>kebutuhan<br>pelayanan prima        | 100             | 100  | 44,500,000        | 100  | 48,950,000        | 0    | 0               | 0    | 0               | 0    | 0               | 100           | 257,450,00<br>0   | KECAMATAN<br>SUSUKANLE<br>BAK              |

| Kod<br>e | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |      |               |      |                 |      |                 |      |                 |               |                 | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|----------|--|---|-----------------|--|-------------|------|---------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|---------------|-----------------|--|
|          |  |   |                 | 2020   |             | 2021 |               | 2022 |                 | 2023 |                 | 2024 |                 | Kondisi Akhir |                 |  |
|          |  |   |                 | K  | Rp          | K    | Rp            | K    | Rp              | K    | Rp              | K    | Rp              | K             | Rp              |  |
| 1        | 2  | 3   | 4               | 5  | 6           | 7    | 8             | 9    | 10              | 11   | 12              | 13   | 14              | 15            | 16              | 17   |
|          |  | Peningkatan sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif             | 100             | 100  | 14,920,000  | 100  | 20,966,000    | 0    | 0               | 0    | 0               | 0    | 0               | 100           | 50,886,000      | KECAMATAN SUSUKANLE BAK                    |
|          |  | Peningkatan sistem Perencanaan Sektoral yang Akuntabel  | 100             | 100  | 0           | 100  | 38,500,000    | 0    | 0               | 0    | 0               | 0    | 0               | 100           | 53,500,000      | KECAMATAN SUSUKANLE BAK                    |
|          |  | Meningkatnya Prosentase kepatuhan dalam pelaksanaan SOP pelayanan pemerintah                            | 100             | 0  | 0           | 100  | 3,422,368,920 | 100  | 229,194,240,852 | 100  | 229,497,188,577 | 100  | 229,814,454,885 | 100           | 691,928,253,234 | KECAMATAN SUSUKANLE BAK                    |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                          | Meningkatnya Pelayanan Publik   | 0               | 0  | 5,000,000   | 100  | 20,000,000    | 0    | 0               | 0    | 0               | 0    | 0               | 100           | 190,000,000     | KECAMATAN SUSUKANLE BAK                    |
|          |  | Jumlah Pelimpahan Sebagian Kewenangan yang dilaksanakan   | 100             | 100  | 220,250,000 | 100  | 242,275,000   | 0    | 0               | 0    | 0               | 0    | 0               | 100           | 462,525,000     | KECAMATAN SUSUKANLE BAK                    |
|          |  | Prosentase Peningkatan Pelimpahan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik         | 100             | 0  | 0           | 100  | 25,000,000    | 100  | 366,502,500     | 100  | 413,152,750     | 100  | 462,468,025     | 100           | 1,267,123,275   | KECAMATAN SUSUKANLE BAK                    |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                 | Terselenggaranya Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masvarakat | 100             | 100  | 92,200,000  | 100  | 101,420,000   | 0    | 0               | 0    | 0               | 0    | 0               | 100           | 358,620,000     | KECAMATAN SUSUKANLE BAK                    |



| Kod<br>e | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |            |      |             |      |             |      |             |      |             |               |             | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|----------|--|--|-----------------|--|------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|---------------|-------------|--|
|          |  |  |                 | 2020   |            | 2021 |             | 2022 |             | 2023 |             | 2024 |             | Kondisi Akhir |             |  |
|          |  |  |                 | K  | Rp         | K    | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K             | Rp          |  |
| 1        | 2  | 3  | 4               | 5  | 6          | 7    | 8           | 9    | 10          | 11   | 12          | 13   | 14          | 15            | 16          | 17   |
|          |  | Prosentase peningkatan jumlah pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang di laksanakan                                      | 100             | 0  | 0          | 100  | 101,420,000 | 100  | 161,562,000 | 100  | 172,718,200 | 100  | 184,990,020 | 100           | 620,690,220 | KECAMATAN SUSUKANLE BAK                    |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                 | Terselenggaranya Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Keamanan Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa | 100             | 100  | 73,777,000 | 100  | 131,154,700 | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 204,931,700 | KECAMATAN SUSUKANLE BAK                    |
|          |  | Prosentase peningkatan kegiatan koordinasi untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum                                    | 100             | 0  | 0          | 100  | 50,000,000  | 100  | 139,270,170 | 100  | 148,197,187 | 100  | 158,016,906 | 100           | 495,484,263 | KECAMATAN SUSUKANLE BAK                    |
| 7.01.05. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                   | Meningkatnya Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum   | 0               | 0  | 0          | 0    | 0           | 0    | 80,000,000  | 0    | 86,000,000  | 0    | 94,000,000  | 0             | 260,000,000 | KECAMATAN SUSUKANLE BAK                    |
|          |  | Prosentase jumlah urusan pemerintahan umum yang di tugaskan kepala pemerintah daerah kepada Camat                                | 0               | 0  | 0          | 100  | 50,000,000  | 100  | 260,000,000 | 100  | 172,000,000 | 100  | 188,000,000 | 100           | 670,000,000 | KECAMATAN SUSUKANLE BAK                    |
| 7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                 | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat   | 0               | 100  | 5,000,000  | 100  | 20,000,000  | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 25,000,000  | KECAMATAN SUSUKANLE BAK                    |



| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)  | Kondisi Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |      |               |      |               |      |               |      |               |               |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|--|--|--------------|--|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|-----------------------------------|
|          |  |  |              | 2020   |               | 2021 |               | 2022 |               | 2023 |               | 2024 |               | Kondisi Akhir |                |                                   |
|          |  |  |              | K  | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K             | Rp             |                                   |
| 1        | 2  | 3  | 4            | 5  | 6             | 7    | 8             | 9    | 10            | 11   | 12            | 13   | 14            | 15            | 16             | 17                                |
|          |  | Peningkatan Prosentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa                                | 0            | 0  | 0             | 100  | 40,000,000    | 100  | 560,000,000   | 100  | 570,000,000   | 100  | 580,000,000   | 100           | 1,750,000,000  | KECAMATAN SUSUKANLEBAK            |
| 7.01.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | Peningkatan Sistem Perencanaan Sektoral yang akuntabel   | 100          | 100  | 64,349,000    | 100  | 70,783,900    | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 135,132,900    | KECAMATAN SEDONG                  |
|          |  | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang sesuai standar Pelayanan Prima                                | 100          | 100  | 113,822,996   | 100  | 168,307,696   | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 282,130,692    | KECAMATAN SEDONG                  |
|          |  | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang sesuai Kebutuhan Standar Pelayanan Prima                           | 100          | 100  | 314,500,000   | 100  | 206,337,800   | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 548,487,800    | KECAMATAN SEDONG                  |
|          |  | Meningkatnya Disiplin Aparatur   | 100          | 100  | 3,014,086,000 | 100  | 3,140,000,000 | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 6,154,086,000  | KECAMATAN SEDONG                  |
|          |  | Meningkatnya Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang transparan , akuntabel dan informatif | 100          | 100  | 22,825,000    | 100  | 25,107,500    | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 47,932,500     | KECAMATAN SEDONG                  |
|          |  | Meningkatnya Prosentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah                                       | 0            | 0  | 0             | 100  | 3,786,855,796 | 100  | 5,109,391,000 | 100  | 5,531,200,000 | 100  | 5,971,400,000 | 100           | 20,419,571,796 | KECAMATAN SEDONG                  |

| Kod<br>e     | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |               |                   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|--------------|--|---|-----------------|--|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|---------------|-------------------|--|
|              |  |   |                 | 2020   |                 | 2021 |                 | 2022 |                 | 2023 |                 | 2024 |                 | Kondisi Akhir |                   |  |
|              |  |   |                 | K  | Rp              | K    | Rp              | K    | Rp              | K    | Rp              | K    | Rp              | K             | Rp                |  |
| 1            | 2  | 3   | 4               | 5  | 6               | 7    | 8               | 9    | 10              | 11   | 12              | 13   | 14              | 15            | 16                | 17   |
| 7.01.<br>02. | PROGRAM<br>PENYELENG<br>GARAAN<br>PEMERINTA<br>HAN DAN<br>PELAYANAN<br>PUBLIK      | Meningkatnya<br>Pelayanan<br>Publik   | 0               | 0  | 0               | 100  | 40,000,000      | 0    | 0               | 0    | 0               | 0    | 0               | 100           | 40,000,000        | KECAMATAN<br>SEDONG                        |
|              |  | Cakupan<br>Pelimpahan<br>Sebagian<br>Kewenangan<br>Pemerintahan<br>Kepada Camat                                       | 100             | 100  | 470,567,00<br>0 | 100  | 216,364,00<br>0 | 0    | 0               | 0    | 0               | 0    | 0               | 100           | 686,931,00<br>0   | KECAMATAN<br>SEDONG                        |
|              |  | Prosentase<br>Peningkatan<br>Pelimpahan<br>Efektifitas<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik  | 100             | 0  | 0               | 100  | 193,575,00<br>0 | 100  | 540,000,00<br>0 | 100  | 575,000,00<br>0 | 100  | 610,000,00<br>0 | 100           | 1,918,575,0<br>00 | KECAMATAN<br>SEDONG                        |
| 7.01.<br>03. | PROGRAM<br>PEMBERDAY<br>AAN<br>MASYARAKA<br>T DESA DAN<br>KELURAHAN                | Cakupan<br>Pelimpahan<br>Sebagian<br>Kewenangan<br>Pemerintahan<br>Kepada Camat                                       | 100             | 100  | 127,000,00<br>0 | 100  | 135,305,00<br>0 | 0    | 0               | 0    | 0               | 0    | 0               | 100           | 719,899,00<br>0   | KECAMATAN<br>SEDONG                        |
|              |  | Prosentase<br>jumlah<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat<br>Desa dan<br>Kelurahan yang<br>dilaksanakan                      | 100             | 0  | 0               | 100  | 5,000,000       | 100  | 105,000,00<br>0 | 100  | 105,000,00<br>0 | 100  | 105,000,00<br>0 | 100           | 320,000,00<br>0   | KECAMATAN<br>SEDONG                        |
| 7.01.<br>04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAM<br>AN DAN<br>KETERTIBAN<br>UMUM                 | Cakupan<br>Pelimpahan<br>Sebagian<br>Kewenangan<br>Pemerintahan<br>Kepada Camat                                       | 100             | 100  | 50,264,500      | 100  | 105,291,00<br>0 | 0    | 0               | 0    | 0               | 0    | 0               | 100           | 155,555,50<br>0   | KECAMATAN<br>SEDONG                        |
|              |  | Prosentase<br>peningkatan<br>kegiatan<br>koordinasi<br>untuk<br>meningkatkan<br>ketentraman<br>dan ketertiban<br>umum | 0               | 0  | 0               | 100  | 105,291,00<br>0 | 100  | 120,000,00<br>0 | 100  | 125,000,00<br>0 | 100  | 130,000,00<br>0 | 100           | 480,291,00<br>0   | KECAMATAN<br>SEDONG                        |

| Kode     | Bidang Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan        | Indikator Kinerja Program (outcome)   | Kondisi Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |      |               |      |             |      |             |      |             |               |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|--|---|--------------|--|---------------|------|---------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
|          |  |   |              | 2020   |               | 2021 |               | 2022 |             | 2023 |             | 2024 |             | Kondisi Akhir |               |                                   |
|          |  |   |              | K  | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K             | Rp            |                                   |
| 1        | 2  | 3   | 4            | 5  | 6             | 7    | 8             | 9    | 10          | 11   | 12          | 13   | 14          | 15            | 16            | 17                                |
| 7.01.05. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM             | Prosentase jumlah urusan pemerintahan umum yang di tugaskan kepala pemerintah daerah kepada Camat | 0            | 0  | 0             | 100  | 50,000,000    | 100  | 312,000,000 | 100  | 350,000,000 | 100  | 410,000,000 | 100           | 1,122,000,000 | KECAMATAN SEDONG                  |
| 7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA           | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat  | 100          | 100  | 15,000,000    | 100  | 15,000,000    | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 15,000,000    | KECAMATAN SEDONG                  |
|          |  | Peningkatan Prosentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa               | 0            | 0  | 0             | 100  | 35,000,000    | 100  | 260,000,000 | 100  | 320,000,000 | 100  | 280,000,000 | 100           | 895,000,000   | KECAMATAN SEDONG                  |
| 7.01.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang sesuai standar kebutuhan pelayanan prima          | 100          | 100  | 47,000,000    | 100  | 147,000,000   | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 194,000,000   | KECAMATAN ASTANAJAPURA            |
|          |  | Peningkatan sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif       | 100          | 60   | 6,000,000     | 70   | 8,700,000     | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 70            | 14,700,000    | KECAMATAN ASTANAJAPURA            |
|          |  | Peningkatan sistem Perencanaan Sektoral yang Akuntabel  | 100          | 81   | 27,676,800    | 81   | 27,676,800    | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 81            | 55,353,600    | KECAMATAN ASTANAJAPURA            |
|          |  | Meningkatnya Disiplin Aparatur  | 0            | 100  | 2,988,638,000 | 100  | 3,121,000,000 | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 6,166,638,000 | KECAMATAN ASTANAJAPURA            |
|          |  | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai                                       | 78           | 79   | 80,850,000    | 80   | 214,883,000   | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 80            | 295,733,000   | KECAMATAN ASTANAJAPURA            |

| Kod<br>e | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |      |               |      |               |      |               |      |               |               |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|----------|--|---|-----------------|--|-------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|--|
|          |  |   |                 | 2020   |             | 2021 |               | 2022 |               | 2023 |               | 2024 |               | Kondisi Akhir |                |  |
|          |  |   |                 | K  | Rp          | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K             | Rp             |  |
| 1        | 2  | 3   | 4               | 5  | 6           | 7    | 8             | 9    | 10            | 11   | 12            | 13   | 14            | 15            | 16             | 17   |
|          |  | standar pelayanan prima   |                 |  |             |      |               |      |               |      |               |      |               |               |                |  |
|          |  | Meningkatnya Prosentase kepatuhan dalam pelaksanaan SOP pelayanan pemerintah                    | 0               | 0  | 0           | 100  | 3,631,326,800 | 100  | 4,967,500,000 | 100  | 5,189,500,000 | 100  | 5,493,500,000 | 100           | 19,301,826,800 | KECAMATAN ASTANAJAPURA                     |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                          | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                                 | 0               | 100  | 164,678,600 | 100  | 169,678,600   | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 349,357,200    | KECAMATAN ASTANAJAPURA                     |
|          |  | Meningkatnya Pelayanan Publik   | 0               | 0  | 0           | 100  | 30,000,000    | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 30,000,000     | KECAMATAN ASTANAJAPURA                     |
|          |  | Prosentase Peningkatan Pelimpahan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 0               | 0  | 0           | 100  | 312,306,800   | 100  | 490,000,000   | 100  | 540,000,000   | 100  | 585,000,000   | 100           | 1,932,306,800  | KECAMATAN ASTANAJAPURA                     |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                 | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                                 | 0               | 100  | 62,920,000  | 100  | 67,920,000    | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 130,840,000    | KECAMATAN ASTANAJAPURA                     |
|          |  | Prosentase jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan                  | 0               | 0  | 0           | 100  | 100,000,000   | 100  | 200,000,000   | 100  | 210,000,000   | 100  | 220,000,000   | 100           | 730,000,000    | KECAMATAN ASTANAJAPURA                     |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                 | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                                 | 0               | 100  | 68,221,800  | 100  | 118,221,800   | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 186,443,600    | KECAMATAN ASTANAJAPURA                     |



| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)   | Kondisi Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |      |               |      |               |      |               |      |               |               |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|--|---|--------------|--|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|-----------------------------------|
|          |  |   |              | 2020   |               | 2021 |               | 2022 |               | 2023 |               | 2024 |               | Kondisi Akhir |                |                                   |
|          |  |   |              | K  | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K             | Rp             |                                   |
| 1        | 2  | 3   | 4            | 5  | 6             | 7    | 8             | 9    | 10            | 11   | 12            | 13   | 14            | 15            | 16             | 17                                |
|          |  | Prosentase peningkatan Kegiatan Koordinasi untuk meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum     | 0            | 0  | 0             | 100  | 63,221,800    | 100  | 100,000,000   | 100  | 110,000,000   | 100  | 120,000,000   | 100           | 393,221,800    | KECAMATAN ASTANAJAPURA            |
| 7.01.05. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM             | Prosentase jumlah urusan pemerintahan umum yang di tugaskan kepala pemerintah daerah kepada camat | 0            | 0  | 0             | 100  | 50,000,000    | 100  | 358,000,000   | 100  | 370,000,000   | 100  | 432,000,000   | 100           | 1,210,000,000  | KECAMATAN ASTANAJAPURA            |
| 7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA           | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat  | 0            | 0  | 0             | 100  | 50,000,000    | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 50,000,000     | KECAMATAN ASTANAJAPURA            |
|          |  | Peningkatan Prosentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa               | 0            | 0  | 0             | 100  | 120,000,000   | 100  | 370,000,000   | 100  | 465,000,000   | 100  | 370,000,000   | 100           | 1,325,000,000  | KECAMATAN ASTANAJAPURA            |
| 7.01.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | meningkatnya disiplin aparatur  | 0            | 100  | 3,060,000,000 | 100  | 3,179,125,000 | 100  | 3,342,012,000 | 100  | 3,479,829,140 | 100  | 3,672,012,054 | 100           | 16,732,978,194 | KECAMATAN PANGENAN                |
|          |  | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai standar pelayanan prima               | 100          | 100  | 204,656,430   | 100  | 255,460,814   | 100  | 356,153,385   | 100  | 412,644,511   | 100  | 511,019,905   | 100           | 1,739,935,045  | KECAMATAN PANGENAN                |
|          |  | Peningkatan sistem Perencanaan Sektoral yang Akuntabel  | 100          | 100  | 130,699,490   | 100  | 119,269,439   | 100  | 80,000,000    | 100  | 25,000,000    | 100  | 25,000,000    | 100           | 379,968,929    | KECAMATAN PANGENAN                |



| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)   | Kondisi Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |      |             |      |             |      |             |      |             |               |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|--|---|--------------|--|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
|          |  |   |              | 2020   |             | 2021 |             | 2022 |             | 2023 |             | 2024 |             | Kondisi Akhir |               |                                   |
|          |  |   |              | K  | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K             | Rp            |                                   |
| 1        | 2  | 3   | 4            | 5  | 6           | 7    | 8           | 9    | 10          | 11   | 12          | 13   | 14          | 15            | 16            | 17                                |
|          |  | Meningkatnya Prosentase kepatuhan dalam pelaksanaan SOP pelayanan pemerintah                    | 0            | 0  | 0           | 77   | 195,000,000 | 80   | 253,896,383 | 83   | 264,726,021 | 85   | 309,426,623 | 85            | 1,143,049,027 | KECAMATAN PANGENAN                |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK    | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                                 | 0            | 100  | 301,442,270 | 100  | 331,586,497 | 100  | 364,745,148 | 100  | 401,219,661 | 100  | 441,341,628 | 100           | 1,840,335,204 | KECAMATAN PANGENAN                |
|          |  | Prosentase Peningkatan Pelimpahan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 0            | 0  | 0           | 85   | 20,000,000  | 90   | 90,000,000  | 95   | 100,000,000 | 98   | 110,000,000 | 98            | 320,000,000   | KECAMATAN PANGENAN                |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN           | cakupan pelimpahan sebagai kewenangan pemerintahan kepada camat                                 | 100          | 100  | 134,532,220 | 100  | 147,985,442 | 100  | 162,783,986 | 100  | 179,062,385 | 100  | 196,968,623 | 100           | 821,332,656   | KECAMATAN PANGENAN                |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM           | cakupan pelimpahan sebagai kewenangan pemerintahan kepada camat                                 | 100          | 100  | 104,377,580 | 100  | 164,815,338 | 100  | 126,296,872 | 100  | 138,926,559 | 100  | 152,819,215 | 100           | 687,235,564   | KECAMATAN PANGENAN                |
| 7.01.05. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM             | Prosentase urusan pemerintahan umum yang di tugaskan kepala pemerintah daerah kepada camat      | 0            | 0  | 0           | 100  | 50,000,000  | 100  | 100,000,000 | 100  | 100,000,000 | 100  | 100,000,000 | 100           | 350,000,000   | KECAMATAN PANGENAN                |
| 7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA           | Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat   | 0            | 0  | 0           | 100  | 20,000,000  | 100  | 30,000,000  | 100  | 40,000,000  | 100  | 50,000,000  | 100           | 140,000,000   | KECAMATAN PANGENAN                |



| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)  | Kondisi Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |      |               |      |               |      |               |      |               |               |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|--|--|--------------|--|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|-----------------------------------|
|          |  |  |              | 2020   |               | 2021 |               | 2022 |               | 2023 |               | 2024 |               | Kondisi Akhir |                |                                   |
|          |  |  |              | K  | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K             | Rp             |                                   |
| 1        | 2  | 3  | 4            | 5  | 6             | 7    | 8             | 9    | 10            | 11   | 12            | 13   | 14            | 15            | 16             | 17                                |
|          |  | Peningkatan Prosentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa      | 0            | 0  | 0             | 97   | 20,000,000    | 98   | 230,000,000   | 99   | 320,000,000   | 100  | 230,000,000   | 100           | 800,000,000    | KECAMATAN PANGENAN                |
| 7.01.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai standar pelayanan prima      | 100          | 100  | 9,794,000     | 100  | 11,250,000    | 100  | 17,000,000    | 100  | 17,500,000    | 100  | 18,000,000    | 100           | 73,544,000     | KECAMATAN MUNDU                   |
|          |  | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang sesuai standar kebutuhan pelayanan prima | 100          | 100  | 5,000,000     | 100  | 80,000,000    | 100  | 745,000,000   | 100  | 765,000,000   | 100  | 865,000,000   | 100           | 2,460,000,000  | KECAMATAN MUNDU                   |
|          |  | Peningkatan sistem Perencanaan Sektoral yang Akuntabel                                   | 100          | 100  | 3,900,000     | 100  | 9,000,000     | 100  | 10,000,000    | 100  | 11,000,000    | 100  | 11,000,000    | 100           | 44,900,000     | KECAMATAN MUNDU                   |
|          |  | Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai standar pelayanan prima       | 100          | 100  | 3,226,622,100 | 100  | 3,396,940,000 | 100  | 3,599,640,000 | 100  | 3,735,540,000 | 100  | 3,890,140,000 | 100           | 17,848,882,100 | KECAMATAN MUNDU                   |
|          |  | Peningkatan kendaraan dinas/ operasional yang berfungsi baik                             | 100          | 100  | 37,831,900    | 100  | 170,800,000   | 100  | 95,000,000    | 100  | 119,000,000   | 100  | 135,000,000   | 100           | 557,631,900    | KECAMATAN MUNDU                   |
|          |  | Prosentase terpenuhinya kebutuhan sewa tanah/ gedung kantor                              | 100          | 100  | 6,000,000     | 100  | 6,000,000     | 100  | 6,500,000     | 100  | 6,500,000     | 100  | 6,500,000     | 500           | 31,500,000     | KECAMATAN MUNDU                   |
|          |  | Meningkatnya Prosentase kepatuhan dalam pelaksanaan SOP pelayanan pemerintah             | 0            | 0  | 0             | 77   | 139,000,000   | 80   | 174,000,000   | 83   | 180,000,000   | 85   | 180,000,000   | 85            | 676,241,000    | KECAMATAN MUNDU                   |



| Kod<br>e     | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |            |      |             |      |             |      |             |      |             |               |             | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|--------------|--|---|-----------------|--|------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|---------------|-------------|--|
|              |  |   |                 | 2020   |            | 2021 |             | 2022 |             | 2023 |             | 2024 |             | Kondisi Akhir |             |  |
|              |  |   |                 | K  | Rp         | K    | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K             | Rp          |  |
| 1            | 2  | 3   | 4               | 5  | 6          | 7    | 8           | 9    | 10          | 11   | 12          | 13   | 14          | 15            | 16          | 17   |
| 7.01.<br>02. | PROGRAM<br>PENYELENG<br>GARAAN<br>PEMERINTA<br>HAN DAN<br>PELAYANAN<br>PUBLIK      | Meningkatnya<br>Pelayanan<br>Publik   | 0               | 100  | 19,471,200 | 100  | 55,000,000  | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 481,471,200 | KECAMATAN<br>MUNDU                         |
|              |  | Cakupan<br>Pelimpahan<br>Sebagai<br>Kewenangan<br>Pemerintahan<br>Kepada Camat  | 100             | 100  | 85,002,100 | 100  | 117,000,000 | 100  | 175,000,000 | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 787,002,100 | KECAMATAN<br>MUNDU                         |
| 7.01.<br>03. | PROGRAM<br>PEMBERDAY<br>AAN<br>MASYARAKA<br>T DESA DAN<br>KELURAHAN                | Cakupan<br>Pelimpahan<br>Sebagai<br>Kewenangan<br>Pemerintahan<br>Kepada Camat  | 100             | 100  | 54,987,700 | 100  | 75,000,000  | 100  | 80,000,000  | 100  | 82,000,000  | 100  | 85,000,000  | 100           | 376,987,700 | KECAMATAN<br>MUNDU                         |
|              |  | Prosentase<br>jumlah<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat<br>Desa dan<br>Kelurahan yang<br>dilaksanakan                      | 0               | 0  | 0          | 100  | 10,000,000  | 100  | 30,000,000  | 100  | 30,000,000  | 100  | 30,000,000  | 100           | 100,000,000 | KECAMATAN<br>MUNDU                         |
| 7.01.<br>04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAM<br>AN DAN<br>KETERTIBAN<br>UMUM                 | Cakupan<br>Pelimpahan<br>Sebagai<br>Kewenangan<br>Pemerintahan<br>Kepada Camat  | 100             | 100  | 50,727,600 | 100  | 80,000,000  | 100  | 78,000,000  | 100  | 80,000,000  | 100  | 85,000,000  | 100           | 373,727,600 | KECAMATAN<br>MUNDU                         |
|              |  | Prosentase<br>peningkatan<br>Kegiatan<br>Koordinasi<br>untuk<br>meningkatkan<br>Ketentraman<br>dan Ketertiban<br>Umum | 0               | 0  | 0          | 100  | 55,000,000  | 100  | 55,000,000  | 100  | 55,000,000  | 100  | 55,000,000  | 100           | 220,000,000 | KECAMATAN<br>MUNDU                         |
| 7.01.<br>05. | PROGRAM<br>PENYELENG<br>GARAAN<br>URUSAN<br>PEMERINTA<br>HAN UMUM                  | Prosentase<br>peningkatan<br>Kegiatan<br>Koordinasi<br>untuk<br>meningkatkan<br>Ketentraman<br>dan Ketertiban<br>Umum | 0               | 0  | 0          | 100  | 50,000,000  | 100  | 264,000,000 | 100  | 170,500,000 | 100  | 188,000,000 | 100           | 672,500,000 | KECAMATAN<br>MUNDU                         |

| Kod<br>e     | Bidang<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n           | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   |      |                   |      |                   |      |                   |      |                   |               |                    | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|--------------|--|--|-----------------|--|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|---------------|--------------------|--|
|              |  |  |                 | 2020   |                   | 2021 |                   | 2022 |                   | 2023 |                   | 2024 |                   | Kondisi Akhir |                    |  |
|              |  |  |                 | K  | Rp                | K    | Rp                | K    | Rp                | K    | Rp                | K    | Rp                | K             | Rp                 |  |
| 1            | 2  | 3  | 4               | 5  | 6                 | 7    | 8                 | 9    | 10                | 11   | 12                | 13   | 14                | 15            | 16                 | 17   |
| 7.01.<br>06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN<br>DAN<br>PENGAWASA<br>N<br>PEMERINTA<br>HAN DESA             | Peningkatan<br>Prosentase<br>kegiatan<br>pembinaan dan<br>pengawasan<br>terhadap<br>pemerintahan<br>desa         | 0               | 0  | 0                 | 100  | 50,000,000        | 100  | 140,000,00<br>0   | 100  | 250,000,00<br>0   | 100  | 160,000,00<br>0   | 100           | 600,000,00<br>0    | KECAMATAN<br>MUNDU                         |
| 7.01.<br>01. | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTA<br>HAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN<br>/KOTA | Peningkatan<br>kualitas<br>penyelenggaraan<br>sistem<br>perencanaan<br>sektoral                                  | 100             | 100  | 7,382,600         | 100  | 29,090,000        | 100  | 29,650,000        | 100  | 30,210,000        | 100  | 30,770,000        | 100           | 127,102,60<br>0    | KECAMATAN<br>BEBER                         |
|              |  | Meningkatnya<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br>yang sesuai<br>standar<br>pelayanan prima            | 100             | 100  | 103,027,30<br>0   | 100  | 252,684,48<br>8   | 100  | 291,020,93<br>6   | 100  | 332,771,18<br>8   | 100  | 379,779,19<br>7   | 100           | 1,359,283,1<br>09  | KECAMATAN<br>BEBER                         |
|              |  | Meningkatnya<br>sarana<br>prasarana<br>aparatur yg<br>sesuai Standar<br>Kebutuhan<br>pelayanan prima             | 100             | 100  | 464,659,90<br>0   | 100  | 752,198,80<br>6   | 100  | 1,165,629,1<br>87 | 100  | 1,258,431,<br>245 | 100  | 1,372,122,<br>210 | 100           | 5,013,041,3<br>48  | KECAMATAN<br>BEBER                         |
|              |  | Meningkatnya<br>disiplin aparatur  | 0               | 100  | 2,918,238,0<br>00 | 100  | 3,068,000,0<br>00 | 100  | 3,209,000,0<br>00 | 100  | 3,360,000,<br>000 | 100  | 3,521,000,<br>000 | 100           | 16,076,238,<br>000 | KECAMATAN<br>BEBER                         |
|              |  | Peningkatan<br>sistem<br>pelaporan<br>kinerja dan<br>keuangan yang<br>transparan,<br>akuntabel dan<br>informatif | 100             | 100  | 11,260,200        | 100  | 23,330,000        | 100  | 25,974,000        | 100  | 29,356,000        | 100  | 33,636,000        | 100           | 123,556,20<br>0    | KECAMATAN<br>BEBER                         |
|              |  | Meningkatnya<br>Prosentase<br>kepatuhan<br>dalam<br>pelaksanaan sop<br>pelayanan<br>pemerintah                   | 0               | 0  | 0                 | 78   | 39,650,000        | 80   | 39,650,000        | 83   | 40,210,000        | 85   | 40,770,000        | 85            | 120,630,00<br>0    | KECAMATAN<br>BEBER                         |



| Kod<br>e     | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |               |                   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|--------------|--|--|-----------------|--|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|---------------|-------------------|--|
|              |  |  |                 | 2020   |                 | 2021 |                 | 2022 |                 | 2023 |                 | 2024 |                 | Kondisi Akhir |                   |  |
|              |  |  |                 | K  | Rp              | K    | Rp              | K    | Rp              | K    | Rp              | K    | Rp              | K             | Rp                |  |
| 1            | 2  | 3  | 4               | 5  | 6               | 7    | 8               | 9    | 10              | 11   | 12              | 13   | 14              | 15            | 16                | 17   |
| 7.01.<br>02. | PROGRAM<br>PENYELENG<br>GARAAN<br>PEMERINTA<br>HAN DAN<br>PELAYANAN<br>PUBLIK      | Cakupan<br>pelimpahan<br>sebagian<br>kewenangan<br>pemerintah<br>kepada camat                            | 75              | 75   | 130,895,00<br>0 | 77   | 281,681,08<br>3 | 78   | 311,255,19<br>1 | 79   | 346,043,71<br>0 | 80   | 386,923,28<br>1 | 80            | 1,456,798,2<br>65 | KECAMATAN<br>BEBER                         |
|              |  | Meningkatnya<br>Pelayanan<br>Publik  | 0               | 0  | 0               | 70   | 55,000,000      | 72   | 170,500,00<br>0 | 73   | 183,275,00<br>0 | 75   | 196,602,00<br>0 | 75            | 630,377,00<br>0   | KECAMATAN<br>BEBER                         |
| 7.01.<br>03. | PROGRAM<br>PEMBERDAY<br>AAN<br>MASYARAKA<br>T DESA DAN<br>KELURAHAN                | Cakupan<br>pelimpahan<br>sebagian<br>kewenangan<br>pemerintah<br>kepada camat                            | 75              | 75   | 74,445,000      | 77   | 76,499,000      | 78   | 150,144,00<br>0 | 79   | 151,252,00<br>0 | 80   | 160,321,00<br>0 | 80            | 612,661,00<br>0   | KECAMATAN<br>BEBER                         |
| 7.01.<br>04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAM<br>AN DAN<br>KETERTIBAN<br>UMUM                 | Cakupan<br>Pelimpahan<br>Sebagian<br>Kewenangan<br>Pemerintahan<br>Kepada Camat                          | 75              | 75   | 49,250,700      | 77   | 136,636,25<br>3 | 78   | 95,299,878      | 79   | 104,829,86<br>6 | 80   | 115,312,85<br>3 | 80            | 501,329,55<br>0   | KECAMATAN<br>BEBER                         |
| 7.01.<br>05. | PROGRAM<br>PENYELENG<br>GARAAN<br>URUSAN<br>PEMERINTA<br>HAN UMUM                  | Meningkatnya<br>Prosentase<br>Penyelenggaraan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Umum                          | 0               | 0  | 0               | 100  | 50,000,000      | 100  | 340,000,00<br>0 | 100  | 260,000,00<br>1 | 100  | 279,999,99<br>9 | 100           | 930,000,00<br>0   | KECAMATAN<br>BEBER                         |
| 7.01.<br>06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN<br>DAN<br>PENGAWASA<br>N<br>PEMERINTA<br>HAN DESA             | Meningkatnya<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat   | 0               | 68   | 0               | 71   | 44,000,000      | 73   | 48,400,000      | 76   | 53,240,000      | 79   | 58,564,000      | 79            | 204,204,00<br>0   | KECAMATAN<br>BEBER                         |
|              |  | Peningkatan<br>Prosentase<br>kegiatan<br>pembinaan dan<br>pengawasan<br>terhadap<br>pemerintahan<br>desa | 0               | 0  | 0               | 97   | 20,000,000      | 0    | 0               | 0    | 0               | 0    | 0               | 100           | 20,000,000        | KECAMATAN<br>BEBER                         |
| 7.01.<br>01. | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTA<br>HAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN<br>/KOTA | Peningkatan<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br>yang sesuai<br>standar<br>pelayanan prima     | 100             | 100  | 144,378,40<br>0 | 100  | 95,840,400      | 0    | 0               | 0    | 0               | 0    | 0               | 100           | 240,218,80<br>0   | KECAMATAN<br>TALUN                         |

| Kod<br>e | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |      |               |      |               |      |               |      |               |               |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|----------|--|---|-----------------|--|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|--|
|          |  |   |                 | 2020   |               | 2021 |               | 2022 |               | 2023 |               | 2024 |               | Kondisi Akhir |                |  |
|          |  |   |                 | K  | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K             | Rp             |  |
| 1        | 2  | 3   | 4               | 5  | 6             | 7    | 8             | 9    | 10            | 11   | 12            | 13   | 14            | 15            | 16             | 17   |
|          |  | Peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar kebutuhan pelayanan prima             | 100             | 100  | 127,831,700   | 100  | 236,294,200   | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 364,125,900    | KECAMATAN TALUN                            |
|          |  | Peningkatan Disiplin Aparatur   | 100             | 100  | 2,995,576,000 | 100  | 3,168,496,000 | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 6,164,072,000  | KECAMATAN TALUN                            |
|          |  | Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif | 100             | 100  | 11,899,400    | 100  | 10,675,400    | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 22,574,800     | KECAMATAN TALUN                            |
|          |  | Peningkatan sistem perencanaan sektoral yang akuntabel  | 100             | 100  | 10,358,200    | 100  | 10,042,700    | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 20,400,900     | KECAMATAN TALUN                            |
|          |  | Meningkatnya prosentase kepatuhan dalam pelaksanaan SOP pelayanan Pemerintah                        | 0               | 0  | 0             | 100  | 3,417,348,700 | 100  | 3,741,668,000 | 100  | 3,904,179,700 | 100  | 4,094,264,100 | 100           | 15,157,460,500 | KECAMATAN TALUN                            |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                          | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                                    | 100             | 100  | 119,896,900   | 100  | 114,924,800   | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 234,821,700    | KECAMATAN TALUN                            |
|          |  | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                                    | 100             | 0  | 0             | 100  | 20,000,000    | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 20,000,000     | KECAMATAN TALUN                            |
|          |  | Prosentase Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Peleyanan Publik                | 0               | 0  | 0             | 100  | 134,924,800   | 100  | 178,917,100   | 100  | 179,058,800   | 100  | 202,964,800   | 100           | 695,865,500    | KECAMATAN TALUN                            |

| Kod<br>e     | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintaha<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |            |      |                 |      |                 |      |            |      |            |               |                 | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|--------------|---|---|-----------------|--|------------|------|-----------------|------|-----------------|------|------------|------|------------|---------------|-----------------|--|
|              |   |   |                 | 2020   |            | 2021 |                 | 2022 |                 | 2023 |            | 2024 |            | Kondisi Akhir |                 |  |
|              |   |   |                 | K  | Rp         | K    | Rp              | K    | Rp              | K    | Rp         | K    | Rp         | K             | Rp              |  |
| 1            | 2   | 3   | 4               | 5  | 6          | 7    | 8               | 9    | 10              | 11   | 12         | 13   | 14         | 15            | 16              | 17   |
| 7.01.<br>03. | PROGRAM<br>PEMBERDAY<br>AAN<br>MASYARAKA<br>T DESA DAN<br>KELURAHAN                 | Cakupan<br>Pelimpahan<br>Sebagian<br>Kewenangan<br>Pemerintahan<br>Kepada Camat   | 100             | 100  | 50,869,500 | 100  | 146,219,50<br>0 | 0    | 0               | 0    | 0          | 0    | 0          | 100           | 202,089,00<br>0 | KECAMATAN<br>TALUN                         |
|              |   | Prosentase<br>Peningkatan<br>Jumlah<br>Pemberdayaan<br>Desa dan<br>Kelurahan yang<br>Dilaksanakan                       | 0               | 0  | 0          | 100  | 46,219,500      | 100  | 70,841,400      | 100  | 55,925,500 | 100  | 61,518,100 | 100           | 234,504,50<br>0 | KECAMATAN<br>TALUN                         |
| 7.01.<br>04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAM<br>AN DAN<br>KETERTIBAN<br>UMUM                  | Cakupan<br>Pelimpahan<br>Sebagian<br>Kewenangan<br>Pemerintahan<br>Kepada Camat   | 100             | 100  | 45,510,000 | 100  | 50,061,000      | 0    | 0               | 0    | 0          | 0    | 0          | 100           | 95,571,000      | KECAMATAN<br>TALUN                         |
|              |   | Presentase<br>Urusan<br>Pelimpahan<br>Kewenangan<br>Pemerintahan<br>Umum dan<br>Ketertiban<br>Umum yang<br>Dilaksanakan | 100             | 0  | 0          | 100  | 100,061,00<br>0 | 100  | 55,067,100      | 100  | 60,573,810 | 100  | 66,631,191 | 100           | 282,333,10<br>1 | KECAMATAN<br>TALUN                         |
| 7.01.<br>05. | PROGRAM<br>PENYELENG<br>GARAAN<br>URUSAN<br>PEMERINTA<br>HAN UMUM                   | Prosentase<br>urusan<br>pemerintahan<br>umum yang di<br>tugaskan kepala<br>pemerintah<br>daerah kepada<br>camat         | 0               | 0  | 0          | 100  | 50,000,000      | 100  | 100,000,00<br>0 | 100  | 78,000,000 | 100  | 84,000,000 | 100           | 312,000,00<br>0 | KECAMATAN<br>TALUN                         |
| 7.01.<br>06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN<br>DAN<br>PENGAWASA<br>N<br>PEMERINTA<br>HAN DESA              | Peningkatan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat<br>Dalam<br>Perencanaan<br>Pembangunan  | 0               | 0  | 0          | 100  | 20,000,000      | 0    | 0               | 0    | 0          | 0    | 0          | 100           | 20,000,000      | KECAMATAN<br>TALUN                         |
|              |   | Peningkatan<br>Prosentase<br>Kegiatan<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Terhadap<br>Pemeintahan<br>Desa                 | 0               | 0  | 0          | 100  | 40,000,000      | 100  | 30,000,000      | 100  | 40,000,000 | 100  | 50,000,000 | 100           | 160,000,00<br>0 | KECAMATAN<br>TALUN                         |



| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)   | Kondisi Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |      |                |      |                |      |                |      |                |               |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|--|---|--------------|--|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|---------------|----------------|-----------------------------------|
|          |  |   |              | 2020   |                | 2021 |                | 2022 |                | 2023 |                | 2024 |                | Kondisi Akhir |                |                                   |
|          |  |   |              | K  | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K             | Rp             |                                   |
| 1        | 2  | 3   | 4            | 5  | 6              | 7    | 8              | 9    | 10             | 11   | 12             | 13   | 14             | 15            | 16             | 17                                |
| 7.01.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai standar pelayanan prima         | 74           | 75   | 1,078,633,400  | 76   | 1,203,214,200  | 0    | 0              | 0    | 0              | 0    | 0              | 76            | 2,281,847,600  | KECAMATAN SUMBER                  |
|          |  | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar kebutuhan pelayanan prima    | 74           | 75   | 1,142,743,600  | 76   | 2,475,061,000  | 0    | 0              | 0    | 0              | 0    | 0              | 76            | 3,617,804,600  | KECAMATAN SUMBER                  |
|          |  | Meningkatnya Disiplin Aparatur  | 100          | 0  | 12,861,706,000 | 100  | 12,844,075,000 | 0    | 0              | 0    | 0              | 0    | 0              | 100           | 25,705,781,000 | KECAMATAN SUMBER                  |
|          |  | Peningkatan sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif | 74           | 75   | 20,053,000     | 76   | 22,058,000     | 0    | 0              | 0    | 0              | 0    | 0              | 76            | 42,111,000     | KECAMATAN SUMBER                  |
|          |  | Peningkatan sistem perencanaan sektoral berbasis kinerja dan kewilayahan                    | 74           | 75   | 6,386,000      | 76   | 7,025,000      | 0    | 0              | 0    | 0              | 0    | 0              | 76            | 13,411,000     | KECAMATAN SUMBER                  |
|          |  | Meningkatnya Prosentase kepatuhan dalam pelaksanaan SOP pelayanan pemerintah                | 0            | 0  | 0              | 100  | 4,615,068,200  | 100  | 19,600,919,500 | 100  | 20,230,020,150 | 100  | 23,619,204,665 | 100           | 68,065,212,515 | KECAMATAN SUMBER                  |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK    | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                             | 0            | 100  | 338,582,400    | 100  | 372,440,000    | 0    | 0              | 0    | 0              | 0    | 0              | 100           | 711,022,400    | KECAMATAN SUMBER                  |
|          |  | Prosentase Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan                             | 100          | 0  | 0              | 100  | 372,440,000    | 100  | 559,684,000    | 100  | 608,153,000    | 100  | 660,718,000    | 100           | 2,200,995,000  | KECAMATAN SUMBER                  |



| Kod<br>e | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)                                     | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |      |                |      |                |      |                |      |                |               |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|----------|--|--|-----------------|--|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|---------------|----------------|--|
|          |  |  |                 | 2020   |                | 2021 |                | 2022 |                | 2023 |                | 2024 |                | Kondisi Akhir |                |  |
|          |  |  |                 | K  | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K             | Rp             |  |
| 1        | 2  | 3  | 4               | 5  | 6              | 7    | 8              | 9    | 10             | 11   | 12             | 13   | 14             | 15            | 16             | 17   |
|          |  | dan Pelayanan Publik   |                 |  |                |      |                |      |                |      |                |      |                |               |                |  |
|          |  | Meningkatnya Pelayanan Publik  | 0               | 0  | 0              | 0    | 0              | 100  | 150,000,000    | 100  | 165,000,000    | 100  | 190,000,000    | 100           | 505,000,000    | KECAMATAN SUMBER                           |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                 | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                  | 0               | 100  | 147,406,800    | 100  | 162,147,000    | 0    | 0              | 0    | 0              | 0    | 0              | 100           | 309,553,800    | KECAMATAN SUMBER                           |
|          |  | Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan      | 75              | 75   | 10,600,000,000 | 75   | 12,259,917,998 | 0    | 0              | 0    | 0              | 0    | 0              | 75            | 22,859,917,998 | KECAMATAN SUMBER                           |
|          |  | Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.     | 75              | 0  | 0              | 75   | 12,169,917,998 | 75   | 16,509,436,189 | 75   | 14,108,419,457 | 75   | 15,519,361,503 | 75            | 58,307,135,147 | KECAMATAN SUMBER                           |
|          |  | Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan          | 100             | 0  | 0              | 100  | 162,147,000    | 100  | 298,362,000    | 100  | 321,198,000    | 100  | 345,818,000    | 100           | 1,127,525,000  | KECAMATAN SUMBER                           |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                 | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                  | 0               | 100  | 98,193,400     | 100  | 158,012,000    | 0    | 0              | 0    | 0              | 0    | 0              | 100           | 256,205,400    | KECAMATAN SUMBER                           |
|          |  | Prosentase Kegiatan Koordinasi untuk peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 0               | 0  | 0              | 100  | 158,012,000    | 100  | 178,814,000    | 100  | 196,695,000    | 100  | 216,365,000    | 100           | 749,886,000    | KECAMATAN SUMBER                           |



| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)  | Kondisi Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |      |               |      |               |      |               |      |               |               |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|--|--|--------------|--|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|-----------------------------------|
|          |  |  |              | 2020   |               | 2021 |               | 2022 |               | 2023 |               | 2024 |               | Kondisi Akhir |                |                                   |
|          |  |  |              | K  | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K             | Rp             |                                   |
| 1        | 2  | 3  | 4            | 5  | 6             | 7    | 8             | 9    | 10            | 11   | 12            | 13   | 14            | 15            | 16             | 17                                |
| 7.01.05. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM             | Prosentase urusan pemerintahan umum yang di tugaskan kepala pemerintah daerah kepada Camat   | 0            | 0  | 0             | 100  | 50,000,000    | 100  | 349,000,000   | 100  | 272,700,000   | 100  | 195,850,000   | 100           | 867,550,000    | KECAMATAN SUMBER                  |
| 7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA           | Peningkatan Prosentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa          | 0            | 0  | 0             | 100  | 40,000,000    | 100  | 195,000,000   | 100  | 213,000,000   | 100  | 171,300,000   | 100           | 619,300,000    | KECAMATAN SUMBER                  |
| 7.01.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran                         | 100          | 100  | 152,782,000   | 100  | 279,019,160   | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 431,801,160    | KECAMATAN DUKUPUNTA NG            |
|          |  | meningkatkan sarana dan prasarana aparatur   | 100          | 100  | 1,833,820,200 | 100  | 1,861,768,820 | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 3,695,589,020  | KECAMATAN DUKUPUNTA NG            |
|          |  | Meningkatnya disiplin aparatur   | 100          | 100  | 2,854,984,000 | 100  | 2,979,000,000 | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 5,833,984,000  | KECAMATAN DUKUPUNTA NG            |
|          |  | Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif | 60           | 60   | 15,587,000    | 70   | 13,034,600    | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 70            | 28,621,600     | KECAMATAN DUKUPUNTA NG            |
|          |  | Peningkatan sistem Perencanaan Sektoral yang Akuntabel                                       | 76           | 81   | 5,303,000     | 81   | 15,000,000    | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 81            | 20,303,000     | KECAMATAN DUKUPUNTA NG            |
|          |  | Meningkatnya prosentase Kepatuhan dalam pelaksanaan SOP pelayanan Pemerintah                 | 0            | 0  | 0             | 70   | 5,178,841,280 | 80   | 6,257,181,558 | 85   | 5,991,152,514 | 90   | 5,709,110,965 | 90            | 23,141,286,317 | KECAMATAN DUKUPUNTA NG            |





| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)   | Kondisi Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |            |      |             |      |             |      |             |      |             |               |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|--|---|--------------|--|------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
|          |  |   |              | 2020   |            | 2021 |             | 2022 |             | 2023 |             | 2024 |             | Kondisi Akhir |               |                                   |
|          |  |   |              | K  | Rp         | K    | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K             | Rp            |                                   |
| 1        | 2  | 3   | 4            | 5  | 6          | 7    | 8           | 9    | 10          | 11   | 12          | 13   | 14          | 15            | 16            | 17                                |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK    | Meningkatnya Pelayanan Publik   | 0            | 0  | 55,896,700 | 100  | 126,500,000 | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 182,396,700   | KECAMATAN DUKUPUNTA NG            |
|          |  | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                                 | 0            | 100  | 59,850,500 | 100  | 119,000,000 | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 178,850,500   | KECAMATAN DUKUPUNTA NG            |
|          |  | Prosentase Peningkatan Pelimpahan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 0            | 0  | 0          | 100  | 245,500,000 | 100  | 378,050,000 | 100  | 442,855,000 | 100  | 510,140,500 | 100           | 1,576,545,500 | KECAMATAN DUKUPUNTA NG            |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN           | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                                 | 100          | 100  | 48,626,700 | 100  | 66,000,000  | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 114,626,700   | KECAMATAN DUKUPUNTA NG            |
|          |  | Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan                         | 0            | 0  | 0          | 100  | 60,000,000  | 100  | 172,600,000 | 100  | 179,860,000 | 100  | 187,846,000 | 100           | 600,306,000   | KECAMATAN DUKUPUNTA NG            |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM           | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                                | 100          | 100  | 54,362,400 | 100  | 139,000,000 | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 193,362,400   | KECAMATAN DUKUPUNTA NG            |
|          |  | Prosentase Kegiatan Koordinasi untuk peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum                | 0            | 0  | 0          | 100  | 139,000,000 | 100  | 148,900,000 | 100  | 159,970,000 | 100  | 171,769,000 | 100           | 619,639,000   | KECAMATAN DUKUPUNTA NG            |
| 7.01.05. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN                               | Prosentase urusan pemerintahan umum yang di tugaskan kepala                                     | 0            | 0  | 0          | 100  | 50,000,000  | 100  | 350,000,000 | 100  | 295,000,000 | 100  | 295,000,000 | 100           | 990,000,000   | KECAMATAN DUKUPUNTA NG            |



| Kod<br>e     | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   |      |                   |      |                 |      |                 |      |                 |               |                   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|--------------|--|--|-----------------|--|-------------------|------|-------------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|---------------|-------------------|--|
|              |  |  |                 | 2020   |                   | 2021 |                   | 2022 |                 | 2023 |                 | 2024 |                 | Kondisi Akhir |                   |  |
|              |  |  |                 | K  | Rp                | K    | Rp                | K    | Rp              | K    | Rp              | K    | Rp              | K             | Rp                |  |
| 1            | 2  | 3  | 4               | 5  | 6                 | 7    | 8                 | 9    | 10              | 11   | 12              | 13   | 14              | 15            | 16                | 17   |
|              | PEMERINTA<br>HAN UMUM  | pemerintah<br>daerah kepada<br>camat   |                 |  |                   |      |                   |      |                 |      |                 |      |                 |               |                   |  |
| 7.01.<br>06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN<br>DAN<br>PENGAWASA<br>N<br>PEMERINTA<br>HAN DESA             | Meningkatnya<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat   | 0               | 100  | 20,000,000        | 100  | 20,000,000        | 0    | 0               | 0    | 0               | 0    | 0               | 100           | 20,000,000        | KECAMATAN<br>DUKUPUNTA<br>NG               |
|              |  | Peningkatan<br>Prosentase<br>kegiatan<br>pembinaan dan<br>pengawasan<br>terhadap<br>pemerintahan<br>desa         | 0               | 0  | 0                 | 100  | 40,000,000        | 100  | 265,000,00<br>0 | 100  | 470,000,00<br>0 | 100  | 480,000,00<br>0 | 100           | 1,255,000,0<br>00 | KECAMATAN<br>DUKUPUNTA<br>NG               |
| 7.01.<br>01. | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTA<br>HAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN<br>/KOTA | Meningkatnya<br>Disiplin<br>Aparatur   | 100             | 100  | 3,047,208,0<br>00 | 100  | 3,271,044,6<br>46 | 0    | 0               | 0    | 0               | 0    | 0               | 100           | 6,318,252,6<br>46 | KECAMATAN<br>PALIMANAN                     |
|              |  | Meningkatnya<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br>yang sesuai<br>standar<br>pelayanan prima            | 100             | 100  | 95,733,000        | 100  | 105,306,30<br>0   | 0    | 0               | 0    | 0               | 0    | 0               | 100           | 201,039,30<br>0   | KECAMATAN<br>PALIMANAN                     |
|              |  | Meningkatnya<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Aparatur yang<br>sesuai standar<br>kebutuhan<br>pelayanan prima       | 100             | 100  | 13,990,400        | 100  | 32,589,440        | 0    | 0               | 0    | 0               | 0    | 0               | 100           | 46,579,840        | KECAMATAN<br>PALIMANAN                     |
|              |  | Peningkatan<br>sistem<br>pelaporan<br>kinerja dan<br>keuangan yang<br>transparan,<br>akuntabel dan<br>informatif | 100             | 100  | 7,805,000         | 100  | 8,585,500         | 0    | 0               | 0    | 0               | 0    | 0               | 100           | 16,390,500        | KECAMATAN<br>PALIMANAN                     |



| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)   | Kondisi Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |      |             |      |               |      |               |      |               |               |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|--|---|--------------|--|-------------|------|-------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|-----------------------------------|
|          |  |   |              | 2020   |             | 2021 |             | 2022 |               | 2023 |               | 2024 |               | Kondisi Akhir |                |                                   |
|          |  |   |              | K  | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K             | Rp             |                                   |
| 1        | 2  | 3   | 4            | 5  | 6           | 7    | 8           | 9    | 10            | 11   | 12            | 13   | 14            | 15            | 16             | 17                                |
|          |  | Peningkatan sistem Perencanaan Sektoral yang Akuntabel  | 100          | 100  | 13,970,000  | 100  | 13,970,000  | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 13,970,000     | KECAMATAN PALIMANAN               |
|          |  | Meningkatnya Prosentase kepatuhan dalam pelaksanaan SOP pelayanan pemerintah                    | 0            | 0  | 0           | 100  | 532,870,180 | 100  | 5,083,075,780 | 100  | 5,614,982,259 | 100  | 5,906,470,485 | 100           | 17,151,338,704 | KECAMATAN PALIMANAN               |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK    | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                                | 100          | 100  | 184,354,400 | 100  | 222,789,840 | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 407,144,240    | KECAMATAN PALIMANAN               |
|          |  | Prosentase Peningkatan Pelimpahan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 0            | 0  | 0           | 100  | 222,789,840 | 100  | 480,000,000   | 100  | 560,000,000   | 100  | 650,000,000   | 100           | 1,912,789,840  | KECAMATAN PALIMANAN               |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN           | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                                | 100          | 100  | 60,573,800  | 100  | 66,631,180  | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 127,204,980    | KECAMATAN PALIMANAN               |
|          |  | Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan                         | 0            | 0  | 0           | 100  | 66,631,180  | 100  | 250,000,000   | 100  | 250,000,000   | 100  | 250,000,000   | 100           | 816,631,180    | KECAMATAN PALIMANAN               |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM           | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                                | 100          | 100  | 85,520,000  | 100  | 144,072,000 | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 229,592,000    | KECAMATAN PALIMANAN               |
|          |  | Prosentase Kegiatan Kordinasi untuk peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum                 | 0            | 0  | 0           | 100  | 144,072,000 | 100  | 160,000,000   | 100  | 170,000,000   | 100  | 180,000,000   | 100           | 654,072,000    | KECAMATAN PALIMANAN               |

| Kod e    | Bidang Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan        | Indikator Kinerja Program (outcome)  | Kondisi Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |      |               |      |             |      |             |      |             |               |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|--|--|--------------|--|---------------|------|---------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
|          |  |  |              | 2020   |               | 2021 |               | 2022 |             | 2023 |             | 2024 |             | Kondisi Akhir |               |                                   |
|          |  |  |              | K  | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K             | Rp            |                                   |
| 1        | 2  | 3  | 4            | 5  | 6             | 7    | 8             | 9    | 10          | 11   | 12          | 13   | 14          | 15            | 16            | 17                                |
| 7.01.05. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM             | Prosentase urusan pemerintahan umum yang di tugaskan kepala pemerintah daerah kepada Camat     | 0            | 0  | 0             | 100  | 60,000,000    | 100  | 316,000,000 | 100  | 356,000,000 | 100  | 418,000,000 | 100           | 1,150,000,000 | KECAMATAN PALIMANAN               |
| 7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA           | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat   | 0            | 0  | 0             | 100  | 20,000,000    | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 20,000,000    | KECAMATAN PALIMANAN               |
|          |  | Peningkatan Prosentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa            | 0            | 0  | 0             | 100  | 40,000,000    | 100  | 250,000,000 | 100  | 380,000,000 | 100  | 280,000,000 | 100           | 950,000,000   | KECAMATAN PALIMANAN               |
| 7.01.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran                           | 100          | 100  | 192,700,000   | 100  | 202,100,000   | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 407,400,000   | KECAMATAN PLUMBON                 |
|          |  | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang sesuai standar kebutuhan pelayanan prima       | 100          | 100  | 67,000,000    | 100  | 199,500,000   | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 1,046,500,000 | KECAMATAN PLUMBON                 |
|          |  | Meningkatnya disiplin aparatur   | 100          | 100  | 2,968,647,000 | 100  | 2,442,727,000 | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 5,411,374,000 | KECAMATAN PLUMBON                 |
|          |  | Peningkatan sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan administratif dan informatif | 100          | 100  | 16,000,000    | 100  | 16,950,000    | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 32,950,000    | KECAMATAN PLUMBON                 |
|          |  | Peningkatan Sistem Perencanaan   | 100          | 100  | 7,300,000     | 100  | 7,000,000     | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 14,300,000    | KECAMATAN PLUMBON                 |

| Kod<br>e | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |      |               |      |               |      |               |      |               |               |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|----------|--|--|-----------------|--|-------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|--|
|          |  |  |                 | 2020   |             | 2021 |               | 2022 |               | 2023 |               | 2024 |               | Kondisi Akhir |                |  |
|          |  |  |                 | K  | Rp          | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K             | Rp             |  |
| 1        | 2  | 3  | 4               | 5  | 6           | 7    | 8             | 9    | 10            | 11   | 12            | 13   | 14            | 15            | 16             | 17   |
|          |  | Sektoral yang Akuntabel  |                 |  |             |      |               |      |               |      |               |      |               |               |                |  |
|          |  | Meningkatnya prosentase kepatuhan dalam pelaksanaan SOP pelayanan Pemerintah         | 100             | 0  | 0           | 100  | 3,745,350,000 | 100  | 3,854,550,006 | 100  | 3,991,500,006 | 100  | 4,167,750,006 | 100           | 15,759,150,018 | KECAMATAN PLUMBON                          |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                          | Meningkatnya Pelayanan Publik  | 0               | 0  | 0           | 100  | 100,000,000   | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 300,000,000    | KECAMATAN PLUMBON                          |
|          |  | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                      | 100             | 100  | 222,000,000 | 100  | 346,000,000   | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 883,000,000    | KECAMATAN PLUMBON                          |
|          |  | Prosentase peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | 0               | 0  | 0           | 100  | 183,500,000   | 100  | 184,000,000   | 100  | 187,000,000   | 100  | 173,000,000   | 100           | 732,500,000    | KECAMATAN PLUMBON                          |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                 | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                     | 100             | 100  | 97,306,000  | 100  | 98,000,000    | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 495,306,000    | KECAMATAN PLUMBON                          |
|          |  | Prosentase Peningkatan Jumlah Pemberdayaan Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan      | 0               | 0  | 0           | 100  | 5,000,000     | 100  | 115,000,000   | 100  | 80,000,000    | 100  | 85,000,000    | 100           | 285,000,000    | KECAMATAN PLUMBON                          |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                 | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                     | 100             | 100  | 74,000,000  | 100  | 175,000,000   | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 399,000,000    | KECAMATAN PLUMBON                          |

| Kod<br>e | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |      |               |      |             |      |             |      |             |               |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|----------|--|--|-----------------|--|---------------|------|---------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|---------------|---------------|--|
|          |  |  |                 | 2020   |               | 2021 |               | 2022 |             | 2023 |             | 2024 |             | Kondisi Akhir |               |  |
|          |  |  |                 | K  | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K             | Rp            |  |
| 1        | 2  | 3  | 4               | 5  | 6             | 7    | 8             | 9    | 10          | 11   | 12          | 13   | 14          | 15            | 16            | 17   |
|          |  | Prosentase Kegiatan Koordinasi untuk Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum           | 0               | 0  | 0             | 100  | 75,000,000    | 100  | 76,000,000  | 100  | 77,000,000  | 100  | 78,000,000  | 100           | 306,000,000   | KECAMATAN PLUMBON                          |
| 7.01.05. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                   | Prosentase Jumlah urusan pemerintahan umum yang di tugaskan kepala pemerintah kepada camat | 100             | 0  | 0             | 100  | 50,000,000    | 100  | 250,000,000 | 100  | 283,000,000 | 100  | 290,000,000 | 100           | 873,000,000   | KECAMATAN PLUMBON                          |
| 7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                 | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam perencanaan pembangunan                         | 100             | 100  | 50,000,000    | 100  | 50,000,000    | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 50,000,000    | KECAMATAN PLUMBON                          |
|          |  | Peningkatan Prosentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa        | 0               | 0  | 0             | 100  | 70,000,000    | 100  | 205,000,000 | 100  | 210,000,000 | 100  | 220,000,000 | 100           | 705,000,000   | KECAMATAN PLUMBON                          |
| 7.01.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA                       | Meningkatnya Disiplin Aparatur   | 100             | 100  | 2,876,172,000 | 100  | 1,764,802,000 | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 4,640,974,000 | KECAMATAN DEPOK                            |
|          |  | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai standar pelayanan prima        | 100             | 100  | 88,002,600    | 100  | 133,500,000   | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 221,502,600   | KECAMATAN DEPOK                            |
|          |  | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang sesuai standar kebutuhan pelayanan prima   | 100             | 100  | 14,637,200    | 100  | 90,000,000    | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 104,637,200   | KECAMATAN DEPOK                            |

| Kod<br>e | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |      |               |      |               |      |               |      |               |               |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|----------|--|---|-----------------|--|-------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|--|
|          |  |   |                 | 2020   |             | 2021 |               | 2022 |               | 2023 |               | 2024 |               | Kondisi Akhir |                |  |
|          |  |   |                 | K  | Rp          | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K             | Rp             |  |
| 1        | 2  | 3   | 4               | 5  | 6           | 7    | 8             | 9    | 10            | 11   | 12            | 13   | 14            | 15            | 16             | 17   |
|          |  | Peningkatan sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif     | 100             | 100  | 3,200,000   | 100  | 5,100,000     | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 8,300,000      | KECAMATAN DEPOK                            |
|          |  | Peningkatan sistem Perencanaan Sektoral yang Akuntabel  | 100             | 100  | 1,156,000   | 100  | 1,750,000     | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 2,906,000      | KECAMATAN DEPOK                            |
|          |  | Meningkatnya Prosentase kepatuhan dalam pelaksanaan SOP pelayanan pemerintah                    | 100             | 0  | 0           | 100  | 2,584,072,000 | 100  | 4,897,220,000 | 100  | 5,398,720,000 | 100  | 5,724,320,000 | 100           | 18,604,332,000 | KECAMATAN DEPOK                            |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                          | Meningkatnya Pelayanan Publik   | 0               | 0  | 0           | 100  | 10,120,000    | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 10,120,000     | KECAMATAN DEPOK                            |
|          |  | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                                 | 100             | 100  | 141,596,000 | 100  | 213,000,000   | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 354,596,000    | KECAMATAN DEPOK                            |
|          |  | Prosentase Peningkatan Pelimpahan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 100             | 0  | 0           | 100  | 223,120,000   | 100  | 580,000,000   | 100  | 537,500,000   | 100  | 595,000,000   | 100           | 1,935,620,000  | KECAMATAN DEPOK                            |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                 | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                                 | 100             | 100  | 47,050,000  | 100  | 50,000,000    | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 97,050,000     | KECAMATAN DEPOK                            |
|          |  | Prosentase jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa dan  | 100             | 0  | 0           | 100  | 50,000,000    | 100  | 250,000,000   | 100  | 250,000,000   | 100  | 250,000,000   | 100           | 800,000,000    | KECAMATAN DEPOK                            |



| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)   | Kondisi Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |      |             |      |             |      |             |      |             |               |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|--|---|--------------|--|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
|          |  |   |              | 2020   |             | 2021 |             | 2022 |             | 2023 |             | 2024 |             | Kondisi Akhir |               |                                   |
|          |  |   |              | K  | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K             | Rp            |                                   |
| 1        | 2  | 3   | 4            | 5  | 6           | 7    | 8           | 9    | 10          | 11   | 12          | 13   | 14          | 15            | 16            | 17                                |
|          |  | Kelurahan yang dilaksanakan   |              |  |             |      |             |      |             |      |             |      |             |               |               |                                   |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM           | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                                   | 100          | 100  | 62,700,000  | 100  | 125,000,000 | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 187,700,000   | KECAMATAN DEPOK                   |
|          |  | Prosentase peningkatan Kegiatan Koordinasi untuk meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum     | 100          | 0  | 0           | 100  | 125,000,000 | 100  | 140,000,000 | 100  | 170,000,000 | 100  | 200,000,000 | 100           | 635,000,000   | KECAMATAN DEPOK                   |
| 7.01.05. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM             | Prosentase jumlah urusan pemerintahan umum yang di tugaskan kepala pemerintah daerah kepada Camat | 0            | 0  | 0           | 100  | 100,000,000 | 100  | 316,000,000 | 100  | 356,000,000 | 100  | 418,000,000 | 100           | 1,190,000,000 | KECAMATAN DEPOK                   |
| 7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA           | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat  | 0            | 0  | 0           | 100  | 15,000,000  | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 15,000,000    | KECAMATAN DEPOK                   |
|          |  | Peningkatan Prosentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa               | 0            | 0  | 0           | 100  | 35,000,000  | 100  | 260,000,000 | 100  | 360,000,000 | 100  | 280,000,000 | 100           | 935,000,000   | KECAMATAN DEPOK                   |
| 7.01.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | Meningkatnya disiplin aparatur  | 75           | 80   | 235,490,000 | 85   | 286,000,000 | 90   | 277,821,000 | 95   | 314,551,100 | 100  | 362,228,710 | 100           | 1,476,090,810 | KECAMATAN WERU                    |





| Kod<br>e | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |      |               |      |               |      |               |      |               |               |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|----------|--|--|-----------------|--|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|--|
|          |  |  |                 | 2020   |               | 2021 |               | 2022 |               | 2023 |               | 2024 |               | Kondisi Akhir |                |  |
|          |  |  |                 | K  | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K             | Rp             |  |
| 1        | 2  | 3  | 4               | 5  | 6             | 7    | 8             | 9    | 10            | 11   | 12            | 13   | 14            | 15            | 16             | 17   |
|          |  | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai standar pelayanan prima          | 70              | 75   | 123,020,800   | 80   | 384,272,880   | 85   | 490,150,000   | 90   | 581,350,000   | 95   | 696,615,000   | 95            | 2,275,408,680  | KECAMATAN WERU                             |
|          |  | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar kebutuhan pelayanan prima     | 90              | 92   | 2,900,079,000 | 94   | 2,398,500,000 | 96   | 3,488,500,000 | 97   | 3,465,500,000 | 98   | 3,675,500,000 | 98            | 15,928,079,000 | KECAMATAN WERU                             |
|          |  | Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, Akuntabel dan informatif | 100             | 100  | 11,550,000    | 100  | 11,842,200    | 100  | 13,989,500    | 100  | 15,438,450    | 100  | 16,997,295    | 100           | 69,817,445     | KECAMATAN WERU                             |
|          |  | Peningkatan sistem Perencanaan Sektoral yang Akuntabel                                       | 100             | 100  | 18,000,000    | 100  | 33,800,000    | 100  | 40,720,000    | 100  | 47,958,000    | 100  | 64,937,000    | 100           | 205,415,000    | KECAMATAN WERU                             |
|          |  | Meningkatnya persentase kepatuhan dalam pelaksanaan SOP Pemerintah                           | 0               | 0  | 0             | 78   | 4,500,000     | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 85            | 4,500,000      | KECAMATAN WERU                             |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                          | Meningkatnya Pelayanan Publik  | 0               | 0  | 0             | 100  | 20,000,000    | 100  | 30,000,000    | 100  | 40,000,000    | 100  | 50,000,000    | 100           | 140,000,000    | KECAMATAN WERU                             |
|          |  | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                             | 75              | 80   | 205,799,500   | 85   | 167,000,000   | 90   | 258,898,675   | 95   | 297,246,243   | 100  | 329,077,817   | 100           | 1,258,022,235  | KECAMATAN WERU                             |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                 | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                             | 75              | 80   | 80,300,000    | 85   | 45,000,000    | 90   | 97,163,000    | 95   | 106,879,300   | 100  | 117,567,230   | 100           | 446,909,530    | KECAMATAN WERU                             |

| Kod<br>e     | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   |      |                   |      |                 |      |                 |      |                 |               |                   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|--------------|--|---|-----------------|--|-------------------|------|-------------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|---------------|-------------------|--|
|              |  |   |                 | 2020   |                   | 2021 |                   | 2022 |                 | 2023 |                 | 2024 |                 | Kondisi Akhir |                   |  |
|              |  |   |                 | K  | Rp                | K    | Rp                | K    | Rp              | K    | Rp              | K    | Rp              | K             | Rp                |  |
| 1            | 2  | 3   | 4               | 5  | 6                 | 7    | 8                 | 9    | 10              | 11   | 12              | 13   | 14              | 15            | 16                | 17   |
| 7.01.<br>04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAM<br>AN DAN<br>KETERTIBAN<br>UMUM                 | Prosentase<br>peningkatan<br>kegiatan<br>koordinasi<br>untuk<br>meningkatkan<br>ketentraman<br>dan ketertiban<br>umum | 75              | 80   | 51,150,000        | 85   | 90,000,000        | 90   | 61,891,500      | 95   | 68,080,650      | 100  | 74,888,715      | 100           | 346,010,86<br>5   | KECAMATAN<br>WERU                          |
| 7.01.<br>05. | PROGRAM<br>PENYELENG<br>GARAAN<br>URUSAN<br>PEMERINTA<br>HAN UMUM                  | Prosentase<br>urusan<br>pemerintahan<br>umum yang di<br>tugaskan kepala<br>pemerintah<br>daerah kepada<br>camat       | 0               | 0  | 0                 | 100  | 76,000,000        | 100  | 139,000,00<br>0 | 100  | 57,000,000      | 100  | 65,000,000      | 100           | 337,000,00<br>0   | KECAMATAN<br>WERU                          |
| 7.01.<br>06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN<br>DAN<br>PENGAWASA<br>N<br>PEMERINTA<br>HAN DESA             | Peningkatan<br>Prosentase<br>kegiatan<br>pembinaan dan<br>pengawasan<br>terhadap<br>pemerintah desa                   | 0               | 0  | 0                 | 100  | 61,000,000        | 100  | 81,500,000      | 100  | 103,000,00<br>0 | 100  | 135,000,00<br>0 | 100           | 380,500,00<br>0   | KECAMATAN<br>WERU                          |
| 7.01.<br>01. | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTA<br>HAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN<br>/KOTA | Meningkatnya<br>Disiplin<br>Aparatur  | 0               | 100  | 2,849,911,0<br>00 | 100  | 2,982,750,0<br>00 | 0    | 0               | 0    | 0               | 0    | 0               | 100           | 5,832,661,0<br>00 | KECAMATAN<br>KEDAWUNG                      |
|              |  | Meningkatnya<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br>yang sesuai<br>standar<br>pelayanan prima                 | 0               | 100  | 152,598,00<br>0   | 100  | 212,320,00<br>0   | 0    | 0               | 0    | 0               | 0    | 0               | 100           | 379,918,00<br>0   | KECAMATAN<br>KEDAWUNG                      |
|              |  | Meningkatnya<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Aparatur yang<br>sesuai standar<br>kebutuhan<br>pelayanan prima            | 0               | 100  | 100,000,00<br>0   | 100  | 151,000,00<br>0   | 0    | 0               | 0    | 0               | 0    | 0               | 100           | 251,000,00<br>0   | KECAMATAN<br>KEDAWUNG                      |
|              |  | Peningkatan<br>sistem<br>pelaporan<br>kinerja dan<br>keuangan yang<br>transparan.                                     | 100             | 100  | 13,960,101        | 100  | 18,300,000        | 0    | 0               | 0    | 0               | 0    | 0               | 100           | 32,260,101        | KECAMATAN<br>KEDAWUNG                      |

| Kod<br>e | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |      |             |      |               |      |               |      |               |               |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|----------|--|---|-----------------|--|-------------|------|-------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|--|
|          |  |   |                 | 2020   |             | 2021 |             | 2022 |               | 2023 |               | 2024 |               | Kondisi Akhir |                |  |
|          |  |   |                 | K  | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K             | Rp             |  |
| 1        | 2  | 3   | 4               | 5  | 6           | 7    | 8           | 9    | 10            | 11   | 12            | 13   | 14            | 15            | 16             | 17   |
|          |  | akuntabel dan informatif  |                 |  |             |      |             |      |               |      |               |      |               |               |                |  |
|          |  | Peningkatan sistem Perencanaan Sektoral yang Akuntabel  | 100             | 100  | 12,000,000  | 100  | 17,000,000  | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 44,000,000     | KECAMATAN KEDAWUNG                         |
|          |  | Meningkatnya Prosentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah                    | 0               | 0  | 0           | 100  | 994,020,000 | 100  | 5,366,020,000 | 100  | 6,179,020,000 | 100  | 6,602,020,000 | 100           | 19,156,080,000 | KECAMATAN KEDAWUNG                         |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                          | Meningkatnya Pelayanan Publik   | 0               | 0  | 0           | 100  | 20,000,000  | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 20,000,000     | KECAMATAN KEDAWUNG                         |
|          |  | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                                 | 100             | 100  | 170,000,000 | 100  | 280,000,000 | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 450,000,000    | KECAMATAN KEDAWUNG                         |
|          |  | Prosentase Peningkatan Pelimpahan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 100             | 0  | 0           | 100  | 310,000,000 | 100  | 480,000,000   | 100  | 500,000,000   | 100  | 520,000,000   | 100           | 1,810,000,000  | KECAMATAN KEDAWUNG                         |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                 | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                                 | 100             | 100  | 55,000,000  | 100  | 80,000,000  | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 135,000,000    | KECAMATAN KEDAWUNG                         |
|          |  | Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan                         | 100             | 0  | 0           | 100  | 80,000,000  | 100  | 130,000,000   | 100  | 130,000,000   | 100  | 130,000,000   | 100           | 470,000,000    | KECAMATAN KEDAWUNG                         |

| Kod<br>e     | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintaha<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |      |             |      |             |      |             |      |             |               |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|--------------|---|---|-----------------|--|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|---------------|---------------|--|
|              |   |   |                 | 2020   |             | 2021 |             | 2022 |             | 2023 |             | 2024 |             | Kondisi Akhir |               |  |
|              |   |   |                 | K  | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K             | Rp            |  |
| 1            | 2   | 3   | 4               | 5  | 6           | 7    | 8           | 9    | 10          | 11   | 12          | 13   | 14          | 15            | 16            | 17   |
| 7.01.<br>04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAM<br>AN DAN<br>KETERTIBAN<br>UMUM                  | Cakupan<br>Pelimpahan<br>Sebagai<br>Kewenangan<br>Pemerintahan<br>Kepada Camat                                  | 100             | 100  | 50,000,000  | 100  | 130,000,000 | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 180,000,000   | KECAMATAN<br>KEDAWUNG                      |
|              |   | Prosentase<br>Kegiatan<br>Koordinasi<br>untuk<br>peningkatan<br>Ketentraman<br>dan Ketertiban<br>Umum           | 100             | 0  | 0           | 100  | 130,000,000 | 100  | 130,000,000 | 100  | 130,000,000 | 100  | 130,000,000 | 100           | 520,000,000   | KECAMATAN<br>KEDAWUNG                      |
| 7.01.<br>05. | PROGRAM<br>PENYELENG<br>GARAAN<br>URUSAN<br>PEMERINTA<br>HAN UMUM                   | Prosentase<br>urusan<br>pemerintahan<br>umum yang di<br>tugaskan kepala<br>pemerintah<br>daerah kepada<br>camat | 0               | 0  | 0           | 100  | 100,000,000 | 100  | 316,000,000 | 100  | 348,000,000 | 100  | 418,000,000 | 100           | 1,182,000,000 | KECAMATAN<br>KEDAWUNG                      |
| 7.01.<br>06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN<br>DAN<br>PENGAWASA<br>N<br>PEMERINTA<br>HAN DESA              | Meningkatnya<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat  | 0               | 0  | 0           | 100  | 20,000,000  | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 20,000,000    | KECAMATAN<br>KEDAWUNG                      |
|              |   | Peningkatan<br>Prosentase<br>kegiatan<br>pembinaan dan<br>pengawasan<br>terhadap<br>pemerintahan<br>desa        | 0               | 0  | 0           | 100  | 40,000,000  | 100  | 250,000,000 | 100  | 510,000,000 | 100  | 270,000,000 | 100           | 1,070,000,000 | KECAMATAN<br>KEDAWUNG                      |
| 7.01.<br>01. | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTA<br>HAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN<br>/KOTA  | Meningkatnya<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Aparatur yang<br>sesuai standar<br>kebutuhan<br>pelayanan prima      | 94              | 96   | 126,075,550 | 98   | 221,508,900 | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 98            | 347,584,450   | KECAMATAN<br>GUNUNGJATI                    |
|              |   | Peningkatan<br>sistem<br>pelaporan<br>kinerja dan<br>keuangan yang<br>transparan.                               | 98              | 98   | 16,671,050  | 98   | 18,338,155  | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 98            | 35,009,205    | KECAMATAN<br>GUNUNGJATI                    |



| Kod<br>e | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |      |               |      |               |      |               |      |               |               |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|----------|--|--|-----------------|--|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|--|
|          |  |  |                 | 2020   |               | 2021 |               | 2022 |               | 2023 |               | 2024 |               | Kondisi Akhir |                |  |
|          |  |  |                 | K  | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K             | Rp             |  |
| 1        | 2  | 3  | 4               | 5  | 6             | 7    | 8             | 9    | 10            | 11   | 12            | 13   | 14            | 15            | 16             | 17   |
|          |  | akuntabel dan informatif   |                 |  |               |      |               |      |               |      |               |      |               |               |                |  |
|          |  | Peningkatan sistem Perencanaan Sektoral yang Akuntabel                               | 98              | 98   | 11,122,650    | 98   | 12,234,915    | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 98            | 23,357,565     | KECAMATAN GUNUNGJATI                       |
|          |  | Meningkatnya Disiplin Aparatur   | 98              | 98   | 3,114,181,000 | 98   | 3,245,890,000 | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 98            | 6,360,071,000  | KECAMATAN GUNUNGJATI                       |
|          |  | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai standar pelayanan prima  | 100             | 100  | 162,870,173   | 100  | 187,250,699   | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 686,878,292    | KECAMATAN GUNUNGJATI                       |
|          |  | Meningkatnya Prosentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintahan       | 0               | 0  | 0             | 100  | 1,173,404,569 | 100  | 4,998,020,633 | 100  | 5,094,175,058 | 100  | 5,312,707,970 | 100           | 16,578,308,230 | KECAMATAN GUNUNGJATI                       |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                          | Meningkatnya Pelayanan Publik  | 0               | 0  | 0             | 100  | 50,000,000    | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 185,000,000    | KECAMATAN GUNUNGJATI                       |
|          |  | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                      | 100             | 100  | 300,822,860   | 100  | 252,405,146   | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 553,228,006    | KECAMATAN GUNUNGJATI                       |
|          |  | Prosentase Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 100             | 0  | 0             | 100  | 272,925,518   | 100  | 456,218,070   | 100  | 500,839,877   | 100  | 546,923,865   | 100           | 1,776,907,330  | KECAMATAN GUNUNGJATI                       |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKA   | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan  | 100             | 100  | 56,155,990    | 100  | 61,771,589    | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 322,927,579    | KECAMATAN GUNUNGJATI                       |

| Kod<br>e     | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>an dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |            |      |             |      |             |      |             |      |             |               |             | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|--------------|---|---|-----------------|--|------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|---------------|-------------|--|
|              |   |   |                 | 2020   |            | 2021 |             | 2022 |             | 2023 |             | 2024 |             | Kondisi Akhir |             |  |
|              |   |   |                 | K  | Rp         | K    | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K             | Rp          |  |
| 1            | 2   | 3   | 4               | 5  | 6          | 7    | 8           | 9    | 10          | 11   | 12          | 13   | 14          | 15            | 16          | 17   |
|              | T DESA DAN<br>KELURAHAN   | Pemerintahan<br>Kepada Camat  |                 |  |            |      |             |      |             |      |             |      |             |               |             |  |
|              |   | Prosentase<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat<br>Desa dan<br>Kelurahan yang<br>dilaksanakan                          | 100             | 0  | 0          | 100  | 61,771,589  | 100  | 117,948,748 | 100  | 124,743,623 | 100  | 132,217,986 | 100           | 436,681,946 | KECAMATAN<br>GUNUNGJAT<br>I                |
| 7.01.<br>04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAM<br>AN DAN<br>KETERTIBAN<br>UMUM                  | Cakupan<br>Pelimpahan<br>Sebagai<br>Kewenangan<br>Pemerintahan<br>Kepada Camat                                  | 100             | 100  | 71,252,280 | 100  | 128,377,508 | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 349,629,788 | KECAMATAN<br>GUNUNGJAT<br>I                |
|              |   | Prosentase<br>Kegiatan<br>Koordinasi<br>untuk<br>Peningkatan<br>Ketentrman<br>dan Ketertiban<br>Umum            | 100             | 0  | 0          | 100  | 78,000,000  | 100  | 90,000,000  | 100  | 120,000,000 | 100  | 150,000,000 | 100           | 438,000,000 | KECAMATAN<br>GUNUNGJAT<br>I                |
| 7.01.<br>05. | PROGRAM<br>PENYELENG<br>GARAAN<br>URUSAN<br>PEMERINTA<br>HAN UMUM                   | Prosentase<br>urusan<br>pemerintahan<br>umum yang di<br>tugaskan kepala<br>pemerintah<br>daerah kepada<br>camat | 0               | 0  | 0          | 100  | 50,000,000  | 100  | 244,000,000 | 100  | 230,000,000 | 100  | 252,000,000 | 100           | 776,000,000 | KECAMATAN<br>GUNUNGJAT<br>I                |
| 7.01.<br>06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN<br>DAN<br>PENGAWASA<br>N<br>PEMERINTA<br>HAN DESA              | Meningkatnya<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat  | 0               | 0  | 0          | 100  | 20,000,000  | 100  | 30,000,000  | 100  | 40,000,000  | 100  | 50,000,000  | 100           | 140,000,000 | KECAMATAN<br>GUNUNGJAT<br>I                |
|              |   | Peningkatan<br>Prosentase<br>kegiatan<br>pembinaan dan<br>pengawasan<br>terhadap<br>pemerintahan<br>desa        | 0               | 0  | 0          | 100  | 15,000,000  | 100  | 295,000,000 | 100  | 280,000,000 | 100  | 280,000,000 | 100           | 870,000,000 | KECAMATAN<br>GUNUNGJAT<br>I                |



| Kod<br>e     | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |      |               |      |               |      |               |      |               |               |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|--------------|--|--|-----------------|--|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|--|
|              |  |  |                 | 2020   |               | 2021 |               | 2022 |               | 2023 |               | 2024 |               | Kondisi Akhir |                |  |
|              |  |  |                 | K  | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K             | Rp             |  |
| 1            | 2  | 3  | 4               | 5  | 6             | 7    | 8             | 9    | 10            | 11   | 12            | 13   | 14            | 15            | 16             | 17   |
| 7.01.<br>01. | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTA<br>HAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN<br>/KOTA | Meningkatnya<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br>yang sesuai<br>standar<br>pelayanan prima            | 100             | 100  | 3,102,679,000 | 100  | 3,235,235,000 | 100  | 30,000,000    | 100  | 30,000,000    | 100  | 30,000,000    | 100           | 6,427,914,000  | KECAMATAN<br>KAPETAKAN                     |
|              |  | Meningkatnya<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Aparatur yang<br>sesuai standar<br>kebutuhan<br>pelayanan prima       | 0               | 100  | 106,500,000   | 100  | 130,600,000   | 100  | 10,000,000    | 100  | 10,000,000    | 100  | 10,000,000    | 100           | 267,100,000    | KECAMATAN<br>KAPETAKAN                     |
|              |  | Peningkatan<br>sistem<br>pelaporan<br>kinerja dan<br>keuangan yang<br>transparan,<br>akuntabel dan<br>informatif | 0               | 100  | 50,510,000    | 100  | 50,510,000    | 100  | 5,000,000     | 100  | 5,000,000     | 100  | 5,000,000     | 100           | 116,020,000    | KECAMATAN<br>KAPETAKAN                     |
|              |  | Peningkatan<br>sistem<br>Perencanaan<br>Sektoral yang<br>Akuntabel   | 9,900           | 100  | 110,000,000   | 100  | 110,000,000   | 100  | 55,000,000    | 100  | 80,000,000    | 100  | 105,000,000   | 100           | 460,000,000    | KECAMATAN<br>KAPETAKAN                     |
|              |  | Meningkatkan<br>Prosentase<br>Kepatuhan<br>Dalam<br>Pelaksanaan<br>SOP Pelayanan<br>Pemerintah                   | 0               | 0  | 0             | 100  | 2,501,345,000 | 100  | 6,396,610,000 | 100  | 6,707,010,000 | 100  | 7,008,010,000 | 100           | 22,612,975,000 | KECAMATAN<br>KAPETAKAN                     |
| 7.01.<br>02. | PROGRAM<br>PENYELENG<br>GARAAN<br>PEMERINTA<br>HAN DAN<br>PELAYANAN<br>PUBLIK      | Meningkatnya<br>Pelayanan<br>Publik  | 0               | 0  | 0             | 100  | 20,000,000    | 100  | 30,000,000    | 100  | 40,000,000    | 100  | 50,000,000    | 100           | 140,000,000    | KECAMATAN<br>KAPETAKAN                     |
|              |  | Cakupan<br>Pelimpahan<br>Sebagai<br>Kewenangan<br>Pemerintahan<br>Kepada Camat                                   | 0               | 100  | 210,000,000   | 100  | 210,000,000   | 100  | 0             | 100  | 0             | 100  | 0             | 100           | 420,000,000    | KECAMATAN<br>KAPETAKAN                     |

| Kod<br>e | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |            |      |             |      |             |      |             |      |             |               |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|----------|--|---|-----------------|--|------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|---------------|---------------|--|
|          |  |   |                 | 2020   |            | 2021 |             | 2022 |             | 2023 |             | 2024 |             | Kondisi Akhir |               |  |
|          |  |   |                 | K  | Rp         | K    | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K             | Rp            |  |
| 1        | 2  | 3   | 4               | 5  | 6          | 7    | 8           | 9    | 10          | 11   | 12          | 13   | 14          | 15            | 16            | 17   |
|          |  | Prosentase peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik        | 100             | 0  | 0          | 100  | 300,000,000 | 100  | 472,500,000 | 100  | 485,000,000 | 100  | 530,000,000 | 100           | 1,787,500,000 | KECAMATAN KAPETAKAN                        |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                 | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                             | 0               | 100  | 5,000,000  | 100  | 105,000,000 | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 110,000,000   | KECAMATAN KAPETAKAN                        |
|          |  | Prosentase peningkatan jumlah pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang di laksanakan | 0               | 0  | 0          | 100  | 5,000,000   | 100  | 80,000,000  | 100  | 110,000,000 | 100  | 135,000,000 | 100           | 330,000,000   | KECAMATAN KAPETAKAN                        |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                 | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                             | 0               | 100  | 90,000,000 | 100  | 140,000,000 | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 230,000,000   | KECAMATAN KAPETAKAN                        |
|          |  | Prosentase Kegiatan Koordinasi Untuk Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum            | 0               | 0  | 0          | 100  | 140,000,000 | 100  | 140,000,000 | 100  | 140,000,000 | 100  | 140,000,000 | 100           | 560,000,000   | KECAMATAN KAPETAKAN                        |
| 7.01.05. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                   | Prosentase urusan pemeritahan umum yang ditugaskan kepala pemeritah daerah kepada camat     | 0               | 0  | 0          | 100  | 50,000,000  | 100  | 250,000,000 | 100  | 238,000,000 | 100  | 254,000,000 | 100           | 792,000,000   | KECAMATAN KAPETAKAN                        |
| 7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                 | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat  | 0               | 0  | 0          | 100  | 5,000,000   | 100  | 30,000,000  | 100  | 40,000,000  | 100  | 50,000,000  | 100           | 125,000,000   | KECAMATAN KAPETAKAN                        |



| Kode     | Bidang Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan        | Indikator Kinerja Program (outcome)  | Kondisi Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |      |               |      |               |      |               |      |               |               |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|--|--|--------------|--|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|-----------------------------------|
|          |  |  |              | 2020   |               | 2021 |               | 2022 |               | 2023 |               | 2024 |               | Kondisi Akhir |                |                                   |
|          |  |  |              | K  | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K             | Rp             |                                   |
| 1        | 2  | 3  | 4            | 5  | 6             | 7    | 8             | 9    | 10            | 11   | 12            | 13   | 14            | 15            | 16             | 17                                |
|          |  | Peningkatan Prosentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa          | 0            | 0  | 0             | 100  | 155,000,000   | 100  | 105,000,000   | 100  | 95,000,000    | 100  | 105,000,000   | 100           | 460,000,000    | KECAMATAN KAPETAKAN               |
| 7.01.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran                         | 100          | 100  | 140,505,480   | 100  | 126,155,508   | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 296,660,988    | KECAMATAN KLANGENAN               |
|          |  | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur   | 100          | 100  | 207,228,654   | 100  | 227,451,520   | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 434,680,174    | KECAMATAN KLANGENAN               |
|          |  | Meningkatnya Disiplin Aparatur   | 100          | 100  | 2,930,366,000 | 100  | 3,053,986,000 | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 5,984,352,000  | KECAMATAN KLANGENAN               |
|          |  | Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, Akuntabel dan informatif | 100          | 100  | 9,818,600     | 100  | 24,800,460    | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 76,619,060     | KECAMATAN KLANGENAN               |
|          |  | Peningkatan sistem Perencanaan Sektoral yang Akuntabel                                       | 100          | 100  | 28,631,200    | 100  | 19,994,320    | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 63,625,520     | KECAMATAN KLANGENAN               |
|          |  | Meningkatnya Prosentase kepatuhan dalam pelaksanaan SOP pelayanan pemerintah                 | 100          | 0  | 0             | 100  | 3,445,056,308 | 100  | 4,477,894,506 | 100  | 4,912,500,000 | 100  | 5,308,200,000 | 100           | 18,149,050,814 | KECAMATAN KLANGENAN               |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK    | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                             | 100          | 100  | 159,356,160   | 100  | 179,227,392   | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 338,583,552    | KECAMATAN KLANGENAN               |

| Kod<br>e | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>an dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |            |      |             |      |             |      |             |      |             |               |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|----------|---|---|-----------------|--|------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|---------------|---------------|--|
|          |   |   |                 | 2020   |            | 2021 |             | 2022 |             | 2023 |             | 2024 |             | Kondisi Akhir |               |  |
|          |   |   |                 | K  | Rp         | K    | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K             | Rp            |  |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5  | 6          | 7    | 8           | 9    | 10          | 11   | 12          | 13   | 14          | 15            | 16            | 17   |
|          |   | Meningkatnya pelayanan publik   | 0               | 100  | 55,000,000 | 100  | 60,000,000  | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 115,000,000   | KECAMATAN KLANGENAN                        |
|          |   | Prosentase Peningkatan Pelimpahan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 100             | 0  | 0          | 100  | 239,227,392 | 100  | 445,000,000 | 100  | 500,000,000 | 100  | 545,000,000 | 100           | 1,729,227,392 | KECAMATAN KLANGENAN                        |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                  | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                                | 100             | 100  | 70,000,000 | 100  | 77,064,192  | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 147,064,192   | KECAMATAN KLANGENAN                        |
|          |   | Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan                         | 100             | 0  | 0          | 100  | 82,064,192  | 100  | 200,000,000 | 100  | 237,000,000 | 100  | 300,000,000 | 100           | 819,064,192   | KECAMATAN KLANGENAN                        |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                  | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                                | 100             | 100  | 50,000,000 | 100  | 105,000,000 | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 155,000,000   | KECAMATAN KLANGENAN                        |
|          |   | Prosentase Kegiatan Koordinasi untuk peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum                | 100             | 0  | 0          | 100  | 105,000,000 | 100  | 115,000,000 | 100  | 125,000,000 | 100  | 140,000,000 | 100           | 485,000,000   | KECAMATAN KLANGENAN                        |
| 7.01.05. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                    | Prosentase urusan pemerintahan umum yang di tugaskan kepala pemerintah daerah kepada camat      | 0               | 0  | 0          | 100  | 50,000,000  | 100  | 272,000,000 | 100  | 183,000,000 | 100  | 189,000,000 | 100           | 694,000,000   | KECAMATAN KLANGENAN                        |
| 7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                  | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat  | 0               | 0  | 0          | 100  | 45,000,000  | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 45,000,000    | KECAMATAN KLANGENAN                        |



| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)   | Kondisi Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |                |               |                |               |                |               |                |               |                 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|--|---|--------------|--|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|
|          |  |   |              | 2020   |               | 2021           |               | 2022           |               | 2023           |               | 2024           |               | Kondisi Akhir   |                |                                   |
|          |  |   |              | K  | Rp            | K              | Rp            | K              | Rp            | K              | Rp            | K              | Rp            | K               | Rp             |                                   |
| 1        | 2  | 3   | 4            | 5  | 6             | 7              | 8             | 9              | 10            | 11             | 12            | 13             | 14            | 15              | 16             | 17                                |
|          |  | Peningkatan Prosentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa         | 0            | 0  | 0             | 100            | 65,000,000    | 100            | 370,000,000   | 100            | 265,000,000   | 100            | 380,000,000   | 100             | 1,080,000,000  | KECAMATAN KLANGENAN               |
| 7.       | UNSUR KEWILAYAHAN  |   |              | 26,263,727,389                                 |               | 65,314,496,047 |               | 77,048,561,505 |               | 80,942,182,419 |               | 88,186,370,007 |               | 337,755,337,367 |                |                                   |
| 7.01.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | Meningkatnya Disiplin Aparatur  | 0            | 100  | 3,108,319,000 | 100            | 2,477,012,000 | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 100             | 5,600,331,000  | KECAMATAN ARJAWINANGUN            |
|          |  | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai standar pelayanan prima         | 100          | 100  | 99,646,150    | 100            | 94,421,000    | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 100             | 467,067,150    | KECAMATAN ARJAWINANGUN            |
|          |  | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang sesuai standar kebutuhan pelayanan prima    | 98           | 0  | 0             | 100            | 2,142,310,000 | 100            | 5,000,000     | 100            | 5,000,000     | 100            | 5,000,000     | 100             | 4,267,518,300  | KECAMATAN ARJAWINANGUN            |
|          |  | Peningkatan sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif | 98           | 100  | 16,553,600    | 100            | 8,287,800     | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 100             | 24,841,400     | KECAMATAN ARJAWINANGUN            |
|          |  | Peningkatan sistem Perencanaan Sektoral yang Akuntabel                                      | 99           | 0  | 15,364,400    | 100            | 3,726,600     | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 100             | 19,091,000     | KECAMATAN ARJAWINANGUN            |
|          |  | Meningkatkan Prosentase Kepatuhan Dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah                | 0            | 0  | 0             | 100            | 4,792,579,400 | 100            | 6,654,960,000 | 100            | 6,932,070,000 | 100            | 7,230,000,000 | 100             | 25,609,609,400 | KECAMATAN ARJAWINANGUN            |



| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)   | Kondisi Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |      |             |      |             |      |             |      |             |               |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|--|---|--------------|--|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
|          |  |   |              | 2020   |             | 2021 |             | 2022 |             | 2023 |             | 2024 |             | Kondisi Akhir |               |                                   |
|          |  |   |              | K  | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K             | Rp            |                                   |
| 1        | 2  | 3   | 4            | 5  | 6           | 7    | 8           | 9    | 10          | 11   | 12          | 13   | 14          | 15            | 16            | 17                                |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK    | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                                 | 100          | 100  | 158,015,000 | 100  | 153,257,300 | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 311,272,300   | KECAMATAN ARJAWINANGUN            |
|          |  | Prosentase Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik            | 0            | 0  | 0           | 100  | 193,257,300 | 100  | 575,000,000 | 100  | 630,000,000 | 100  | 725,000,000 | 100           | 2,123,257,300 | KECAMATAN ARJAWINANGUN            |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN           | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                                 | 100          | 100  | 82,560,000  | 100  | 67,377,200  | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 149,937,200   | KECAMATAN ARJAWINANGUN            |
|          |  | Prosentase jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan                  | 100          | 0  | 0           | 100  | 67,377,200  | 100  | 185,000,000 | 100  | 190,000,000 | 100  | 195,000,000 | 100           | 637,377,200   | KECAMATAN ARJAWINANGUN            |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM           | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                                 | 100          | 100  | 63,939,300  | 100  | 116,288,000 | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 180,227,300   | KECAMATAN ARJAWINANGUN            |
|          |  | Prosentase peningkatan Kegiatan Koordinasi untuk meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum   | 100          | 0  | 0           | 100  | 116,288,000 | 100  | 120,500,000 | 100  | 130,900,000 | 100  | 140,000,000 | 100           | 507,688,000   | KECAMATAN ARJAWINANGUN            |
| 7.01.05. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM             | Prosentase Urusan Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan Umum dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan | 0            | 0  | 0           | 100  | 50,000,000  | 100  | 325,000,000 | 100  | 360,000,000 | 100  | 370,000,000 | 100           | 1,105,000,000 | KECAMATAN ARJAWINANGUN            |

| Kode     | Bidang Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan       | Indikator Kinerja Program (outcome)  | Kondisi Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |      |               |      |             |      |             |      |             |               |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|---|--|--------------|--|---------------|------|---------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
|          |   |  |              | 2020   |               | 2021 |               | 2022 |             | 2023 |             | 2024 |             | Kondisi Akhir |               |                                   |
|          |   |  |              | K  | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K             | Rp            |                                   |
| 1        | 2   | 3  | 4            | 5  | 6             | 7    | 8             | 9    | 10          | 11   | 12          | 13   | 14          | 15            | 16            | 17                                |
| 7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          | Peningkatan Prosentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa          | 0            | 0  | 0             | 100  | 10,000,000    | 100  | 270,000,000 | 100  | 420,000,000 | 100  | 290,000,000 | 100           | 990,000,000   | KECAMATAN ARJAWINANGUN            |
| 7.01.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran                         | 100          | 100  | 398,200,000   | 100  | 513,290,300   | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 1,930,490,300 | KECAMATAN PANGURAGAN              |
|          |   | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur   | 100          | 100  | 57,600,000    | 100  | 79,264,000    | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 231,864,000   | KECAMATAN PANGURAGAN              |
|          |   | Meningkatnya disiplin aparatur   | 90           | 100  | 2,944,359,000 | 100  | 3,068,000,000 | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 6,027,359,000 | KECAMATAN PANGURAGAN              |
|          |   | Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif | 100          | 100  | 12,500,000    | 100  | 14,000,000    | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 26,500,000    | KECAMATAN PANGURAGAN              |
|          |   | Peningkatan sistem Perencanaan Sektoral yang Akuntabel                                       | 100          | 100  | 27,000,000    | 100  | 27,000,000    | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 54,000,000    | KECAMATAN PANGURAGAN              |
|          |   | Meningkatnya Prosentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintahan               | 0            | 0  | 0             | 100  | 113,500,000   | 100  | 120,000,000 | 100  | 125,000,000 | 100  | 125,000,000 | 100           | 492,000,000   | KECAMATAN PANGURAGAN              |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                             | 100          | 60   | 234,816,400   | 100  | 279,698,600   | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 514,515,000   | KECAMATAN PANGURAGAN              |

| Kode     | Bidang Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)  | Kondisi Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |            |      |             |      |             |      |            |      |            |               |             | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|---|--|--------------|--|------------|------|-------------|------|-------------|------|------------|------|------------|---------------|-------------|-----------------------------------|
|          |   |  |              | 2020   |            | 2021 |             | 2022 |             | 2023 |            | 2024 |            | Kondisi Akhir |             |                                   |
|          |   |  |              | K  | Rp         | K    | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp         | K    | Rp         | K             | Rp          |                                   |
| 1        | 2   | 3  | 4            | 5  | 6          | 7    | 8           | 9    | 10          | 11   | 12         | 13   | 14         | 15            | 16          | 17                                |
|          |   | Meningkatnya Pelayanan Publik  | 0            | 0  | 0          | 100  | 5,000,000   | 0    | 0           | 0    | 0          | 0    | 0          | 100           | 15,000,000  | KECAMATAN PANGURAGAN              |
|          |   | Prosentase Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik                               | 100          | 0  | 0          | 100  | 15,000,000  | 100  | 47,500,000  | 100  | 49,500,000 | 100  | 75,000,000 | 100           | 187,000,000 | KECAMATAN PANGURAGAN              |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN    | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat   | 100          | 100  | 90,000,000 | 60   | 113,064,578 | 0    | 0           | 0    | 0          | 0    | 0          | 60            | 203,064,578 | KECAMATAN PANGURAGAN              |
|          |   | Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan  | 100          | 0  | 0          | 100  | 5,000,000   | 100  | 15,000,000  | 100  | 15,000,000 | 100  | 15,000,000 | 100           | 50,000,000  | KECAMATAN PANGURAGAN              |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM    | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat   | 100          | 100  | 72,388,000 | 60   | 149,516,834 | 0    | 0           | 0    | 0          | 0    | 0          | 60            | 221,904,834 | KECAMATAN PANGURAGAN              |
|          |   | Prosentase Kegiatan Koordinasi untuk Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum                                   | 100          | 0  | 0          | 100  | 5,000,000   | 100  | 60,000,000  | 100  | 65,000,000 | 100  | 70,000,000 | 100           | 200,000,000 | KECAMATAN PANGURAGAN              |
| 7.01.05. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM      | Meningkatnya Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum   | 0            | 0  | 0          | 100  | 50,000,000  | 100  | 122,500,000 | 100  | 29,500,000 | 100  | 33,500,000 | 100           | 235,500,000 | KECAMATAN PANGURAGAN              |
|          |   | Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang ditugaskan Kepala Pemerintah Daerah (Bupati) kepada Camat | 0            | 0  | 0          | 0    | 0           | 100  | 5,000,000   | 100  | 5,000,000  | 100  | 5,000,000  | 100           | 15,000,000  | KECAMATAN PANGURAGAN              |

| Kod<br>e     | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>an dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   |      |                   |      |                   |      |                   |      |                   |               |                    | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|--------------|---|---|-----------------|--|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|---------------|--------------------|--|
|              |   |   |                 | 2020   |                   | 2021 |                   | 2022 |                   | 2023 |                   | 2024 |                   | Kondisi Akhir |                    |  |
|              |   |   |                 | K  | Rp                | K    | Rp                | K    | Rp                | K    | Rp                | K    | Rp                | K             | Rp                 |  |
| 1            | 2   | 3   | 4               | 5  | 6                 | 7    | 8                 | 9    | 10                | 11   | 12                | 13   | 14                | 15            | 16                 | 17   |
| 7.01.<br>06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN<br>DAN<br>PENGAWASA<br>N<br>PEMERINTA<br>HAN DESA              | Peningkatan<br>Prosentase<br>kegiatan<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>terhadap<br>Pemerintahan<br>Desa          | 0               | 0  | 0                 | 100  | 10,000,000        | 100  | 25,000,000        | 100  | 30,000,000        | 100  | 25,000,000        | 100           | 90,000,000         | KECAMATAN<br>PANGURAGA<br>N                |
| 7.01.<br>01. | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTA<br>HAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN<br>/KOTA  | Meningkatnya<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br>yang sesuai<br>standar<br>pelayanan prima             | 100             | 100  | 94,382,900        | 100  | 117,352,40<br>0   | 0    | 0                 | 0    | 0                 | 0    | 0                 | 100           | 211,735,30<br>0    | KECAMATAN<br>CIWARINGIN                    |
|              |   | Meningkatnya<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur   | 100             | 100  | 44,016,300        | 100  | 81,870,000        | 0    | 0                 | 0    | 0                 | 0    | 0                 | 100           | 125,886,30<br>0    | KECAMATAN<br>CIWARINGIN                    |
|              |   | Meningkatnya<br>disiplin aparatur   | 90              | 100  | 2,968,379,0<br>00 | 100  | 3,105,075,0<br>00 | 0    | 0                 | 0    | 0                 | 0    | 0                 | 100           | 6,088,454,0<br>00  | KECAMATAN<br>CIWARINGIN                    |
|              |   | Meningkatnya<br>sistem<br>pelaporan<br>kinerja dan<br>keuangan yang<br>transparan,<br>akuntabel dan<br>informatif | 100             | 100  | 7,228,000         | 100  | 9,900,000         | 0    | 0                 | 0    | 0                 | 0    | 0                 | 100           | 17,128,000         | KECAMATAN<br>CIWARINGIN                    |
|              |   | Peningkatan<br>sistem<br>Perencanaan<br>Sektoral yang<br>Akuntabel  | 100             | 100  | 6,820,000         | 100  | 8,000,000         | 0    | 0                 | 0    | 0                 | 0    | 0                 | 100           | 14,820,000         | KECAMATAN<br>CIWARINGIN                    |
|              |   | Meningkatnya<br>Prosentase<br>Kepatuhan<br>dalam<br>Pelaksanaan<br>SOP Pelayanan<br>Pemerintahan                  | 0               | 0  | 0                 | 100  | 3,455,234,4<br>00 | 100  | 4,610,841,8<br>00 | 100  | 4,558,160,<br>800 | 100  | 4,795,318,<br>500 | 100           | 17,419,555,<br>500 | KECAMATAN<br>CIWARINGIN                    |
| 7.01.<br>02. | PROGRAM<br>PENYELENG<br>GARAAN<br>PEMERINTA<br>HAN DAN<br>PELAYANAN<br>PUBLIK       | Cakupan<br>Pelimpahan<br>Sebagian<br>Kewenangan<br>Pemerintahan<br>Kepada Camat                                   | 100             | 100  | 145,621,80<br>0   | 60   | 212,705,50<br>0   | 0    | 0                 | 0    | 0                 | 0    | 0                 | 60            | 358,327,30<br>0    | KECAMATAN<br>CIWARINGIN                    |



| Kode     | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembangunan | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |            |      |             |      |             |      |             |      |             |               |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|----------|---|---|-----------------|--|------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|---------------|---------------|--|
|          |   |   |                 | 2020   |            | 2021 |             | 2022 |             | 2023 |             | 2024 |             | Kondisi Akhir |               |  |
|          |   |   |                 | K  | Rp         | K    | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K             | Rp            |  |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5  | 6          | 7    | 8           | 9    | 10          | 11   | 12          | 13   | 14          | 15            | 16            | 17   |
|          |   | Prosentase Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik                      | 100             | 0  | 0          | 100  | 232,705,500 | 100  | 646,726,000 | 100  | 398,748,600 | 100  | 447,973,500 | 100           | 1,726,153,600 | KECAMATAN CIWARINGIN                       |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                          | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat  | 100             | 100  | 78,271,800 | 60   | 113,064,600 | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 60            | 191,336,400   | KECAMATAN CIWARINGIN                       |
|          |   | Prosentase Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan                            | 100             | 0  | 0          | 100  | 113,064,600 | 100  | 174,371,100 | 100  | 186,808,200 | 100  | 200,488,900 | 100           | 674,732,800   | KECAMATAN CIWARINGIN                       |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                          | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat  | 100             | 100  | 88,865,400 | 60   | 194,516,800 | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 60            | 283,382,200   | KECAMATAN CIWARINGIN                       |
|          |   | Prosentase peningkatan Kegiatan Koordinasi untuk meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum             | 100             | 0  | 0          | 100  | 144,516,800 | 100  | 208,968,500 | 100  | 224,865,300 | 100  | 242,351,900 | 100           | 820,702,500   | KECAMATAN CIWARINGIN                       |
| 7.01.05. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                            | Prosentase Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang ditugaskan Kepala Pemerintah Daerah (Bupati) kepada Camat | 0               | 0  | 0          | 100  | 50,000,000  | 100  | 280,000,000 | 100  | 335,000,000 | 100  | 350,000,000 | 100           | 1,015,000,000 | KECAMATAN CIWARINGIN                       |
| 7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                          | Peningkatan Prosentase kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pemerintahan Desa                       | 0               | 0  | 0          | 100  | 34,000,000  | 100  | 299,000,000 | 100  | 464,000,000 | 100  | 299,000,000 | 100           | 1,096,000,000 | KECAMATAN CIWARINGIN                       |



| Kod<br>e     | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   |      |                   |      |                   |      |                   |      |                   |               |                    | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|--------------|--|--|-----------------|--|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|---------------|--------------------|--|
|              |  |  |                 | 2020   |                   | 2021 |                   | 2022 |                   | 2023 |                   | 2024 |                   | Kondisi Akhir |                    |  |
|              |  |  |                 | K  | Rp                | K    | Rp                | K    | Rp                | K    | Rp                | K    | Rp                | K             | Rp                 |  |
| 1            | 2  | 3  | 4               | 5  | 6                 | 7    | 8                 | 9    | 10                | 11   | 12                | 13   | 14                | 15            | 16                 | 17   |
| 7.01.<br>01. | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTA<br>HAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN<br>/KOTA | Meningkatnya<br>Disiplin<br>Aparatur   | 100             | 100  | 3,005,721,0<br>00 | 100  | 2,545,463,0<br>00 | 0    | 0                 | 0    | 0                 | 0    | 0                 | 100           | 5,551,184,0<br>00  | KECAMATAN<br>SUSUKAN                       |
|              |  | Meningkatnya<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br>yang sesuai<br>standar<br>pelayanan prima            | 100             | 100  | 93,433,900        | 100  | 151,043,00<br>0   | 0    | 0                 | 0    | 0                 | 0    | 0                 | 100           | 277,476,90<br>0    | KECAMATAN<br>SUSUKAN                       |
|              |  | Meningkatnya<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Aparatur yang<br>sesuai standar<br>kebutuhan<br>pelayanan prima       | 100             | 100  | 34,146,400        | 100  | 270,150,60<br>0   | 0    | 0                 | 0    | 0                 | 0    | 0                 | 100           | 304,297,00<br>0    | KECAMATAN<br>SUSUKAN                       |
|              |  | Peningkatan<br>sistem<br>pelaporan<br>kinerja dan<br>keuangan yang<br>transparan,<br>akuntabel dan<br>informatif | 100             | 100  | 4,156,200         | 100  | 6,500,000         | 0    | 0                 | 0    | 0                 | 0    | 0                 | 100           | 15,656,200         | KECAMATAN<br>SUSUKAN                       |
|              |  | Peningkatan<br>sistem<br>Perencanaan<br>Sektoral yang<br>Akuntabel   | 100             | 100  | 1,990,000         | 100  | 2,500,000         | 0    | 0                 | 0    | 0                 | 0    | 0                 | 100           | 4,490,000          | KECAMATAN<br>SUSUKAN                       |
|              |  | Meningkatnya<br>Prosentase<br>kepatuhan<br>dalam<br>pelaksanaan sop<br>pelayanan<br>pemerintah                   | 0               | 0  | 0                 | 100  | 3,117,126,6<br>00 | 100  | 4,304,915,4<br>60 | 100  | 4,797,128,<br>540 | 100  | 5,139,148,<br>620 | 100           | 17,358,319,<br>220 | KECAMATAN<br>SUSUKAN                       |
| 7.01.<br>02. | PROGRAM<br>PENYELENG<br>GARAAN<br>PEMERINTA<br>HAN DAN<br>PELAYANAN<br>PUBLIK      | Cakupan<br>Pelimpahan<br>Sebagai<br>Kewenangan<br>Pemerintahan<br>Kepada Camat                                   | 100             | 100  | 138,888,80<br>0   | 100  | 223,003,00<br>0   | 0    | 0                 | 0    | 0                 | 0    | 0                 | 100           | 451,891,80<br>0    | KECAMATAN<br>SUSUKAN                       |

| Kod<br>e | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>an dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |            |      |             |      |             |      |             |      |             |               |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|----------|---|---|-----------------|--|------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|---------------|---------------|--|
|          |   |   |                 | 2020   |            | 2021 |             | 2022 |             | 2023 |             | 2024 |             | Kondisi Akhir |               |  |
|          |   |   |                 | K  | Rp         | K    | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K             | Rp            |  |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5  | 6          | 7    | 8           | 9    | 10          | 11   | 12          | 13   | 14          | 15            | 16            | 17   |
|          |   | Prosentase Peningkatan Pelimpahan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 100             | 0  | 0          | 100  | 218,003,000 | 100  | 333,797,900 | 100  | 383,382,200 | 100  | 417,550,900 | 100           | 1,352,734,000 | KECAMATAN SUSUKAN                          |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                  | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                                 | 100             | 100  | 49,681,800 | 100  | 69,588,900  | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 119,270,700   | KECAMATAN SUSUKAN                          |
|          |   | Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan                         | 0               | 0  | 0          | 100  | 69,588,900  | 100  | 124,500,000 | 100  | 139,950,000 | 100  | 149,545,000 | 100           | 483,583,900   | KECAMATAN SUSUKAN                          |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                  | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                                 | 100             | 100  | 48,603,600 | 100  | 111,733,700 | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 160,337,300   | KECAMATAN SUSUKAN                          |
|          |   | Prosentase Kegiatan Kordinasi untuk peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum                 | 100             | 0  | 0          | 100  | 111,733,700 | 100  | 126,500,000 | 100  | 136,150,000 | 100  | 148,365,000 | 100           | 522,748,700   | KECAMATAN SUSUKAN                          |
| 7.01.05. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                    | Prosentase urusan pemerintahan umum yang di tugaskan kepala pemerintah daerah kepada camat      | 0               | 0  | 0          | 100  | 50,000,000  | 100  | 316,000,000 | 100  | 234,000,000 | 100  | 252,000,000 | 100           | 852,000,000   | KECAMATAN SUSUKAN                          |
| 7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                  | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat  | 0               | 0  | 0          | 100  | 15,000,000  | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 15,000,000    | KECAMATAN SUSUKAN                          |

| Kod<br>e | Bidang<br>Pemerintah<br>an dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |      |               |      |               |      |               |      |               |               |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|----------|---|---|-----------------|--|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|--|
|          |   |   |                 | 2020   |               | 2021 |               | 2022 |               | 2023 |               | 2024 |               | Kondisi Akhir |                |  |
|          |   |   |                 | K  | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K             | Rp             |  |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5  | 6             | 7    | 8             | 9    | 10            | 11   | 12            | 13   | 14            | 15            | 16             | 17   |
|          |   | Peningkatan Prosentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa         | 0               | 0  | 0             | 100  | 25,000,000    | 100  | 207,000,000   | 100  | 373,000,000   | 100  | 238,000,000   | 100           | 843,000,000    | KECAMATAN SUSUKAN                          |
| 7.01.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA              | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Sesuai Standar Pelayanan Prima              | 100             | 100  | 3,166,143,000 | 100  | 3,296,190,000 | 100  | 7,500,000     | 100  | 7,500,000     | 100  | 7,500,000     | 100           | 6,484,833,000  | KECAMATAN GEGESIK                          |
|          |   | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang sesuai standar kebutuhan pelayanan prima    | 100             | 100  | 117,700,000   | 100  | 183,901,000   | 100  | 5,000,000     | 100  | 5,000,000     | 100  | 5,000,000     | 100           | 316,601,000    | KECAMATAN GEGESIK                          |
|          |   | Peningkatan sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif | 100             | 100  | 17,000,000    | 100  | 17,000,000    | 100  | 5,000,000     | 100  | 5,000,000     | 100  | 5,000,000     | 100           | 49,000,000     | KECAMATAN GEGESIK                          |
|          |   | Peningkatan sistem Perencanaan Sektoral yang Akuntabel                                      | 100             | 100  | 15,000,000    | 100  | 9,999,600     | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 24,999,600     | KECAMATAN GEGESIK                          |
|          |   | Meningkatnya Disiplin Aparatur  | 0               | 100  | 5,000,000     | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 0             | 5,000,000      | KECAMATAN GEGESIK                          |
|          |   | Meningkatnya Prosentase kepatuhan dalam pelaksanaan SOP pelayanan pemerintah                | 0               | 0  | 0             | 100  | 3,657,890,600 | 100  | 5,958,960,000 | 100  | 5,266,960,000 | 100  | 5,497,960,000 | 100           | 20,391,770,600 | KECAMATAN GEGESIK                          |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN                                  | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                            | 0               | 62   | 330,000,000   | 85   | 251,572,600   | 87   | 28,000,000    | 90   | 32,000,000    | 92   | 36,000,000    | 92            | 677,572,600    | KECAMATAN GEGESIK                          |



| Kod<br>e     | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |            |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |               |                   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|--------------|--|--|-----------------|--|------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|---------------|-------------------|--|
|              |  |  |                 | 2020   |            | 2021 |                 | 2022 |                 | 2023 |                 | 2024 |                 | Kondisi Akhir |                   |  |
|              |  |  |                 | K  | Rp         | K    | Rp              | K    | Rp              | K    | Rp              | K    | Rp              | K             | Rp                |  |
| 1            | 2  | 3  | 4               | 5  | 6          | 7    | 8               | 9    | 10              | 11   | 12              | 13   | 14              | 15            | 16                | 17   |
|              | PELAYANAN<br>PUBLIK  |  |                 |  |            |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |               |                   |  |
|              |  | Prosentase<br>Peningkatan<br>Pelimpahan<br>Efektifitas<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik   | 100             | 0  | 0          | 100  | 146,362,60<br>0 | 100  | 532,500,00<br>0 | 100  | 459,500,00<br>0 | 100  | 567,500,00<br>0 | 100           | 1,710,862,6<br>00 | KECAMATAN<br>GEGESIK                       |
| 7.01.<br>03. | PROGRAM<br>PEMBERDAY<br>AAN<br>MASYARAKA<br>T DESA DAN<br>KELURAHAN                | Cakupan<br>Pelimpahan<br>Sebagian<br>Kewenangan<br>Pemerintahan<br>Kepada Camat  | 0               | 62   | 57,332,000 | 85   | 57,332,000      | 87   | 150,000,00<br>0 | 90   | 160,000,00<br>0 | 92   | 170,000,00<br>0 | 92            | 537,332,00<br>0   | KECAMATAN<br>GEGESIK                       |
|              |  | Prosentase<br>jumlah<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat<br>Desa dan<br>Kelurahan yang<br>dilaksanakan                       | 100             | 0  | 0          | 100  | 57,332,000      | 100  | 100,000,00<br>0 | 100  | 125,000,00<br>0 | 100  | 150,000,00<br>0 | 100           | 432,332,00<br>0   | KECAMATAN<br>GEGESIK                       |
| 7.01.<br>04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAM<br>AN DAN<br>KETERTIBAN<br>UMUM                 | Cakupan<br>Pelimpahan<br>Sebagian<br>Kewenangan<br>Pemerintahan<br>Kepada Camat  | 0               | 62   | 95,000,000 | 85   | 217,688,00<br>0 | 87   | 120,000,00<br>0 | 90   | 122,000,00<br>0 | 92   | 124,000,00<br>0 | 92            | 678,688,00<br>0   | KECAMATAN<br>GEGESIK                       |
| 7.01.<br>05. | PROGRAM<br>PENYELENG<br>GARAAN<br>URUSAN<br>PEMERINTA<br>HAN UMUM                  | Prosentase<br>jumlah urusan<br>pemerintahan<br>umum yang di<br>tugaskan kepala<br>pemerintah<br>daerah kepada<br>camat | 0               | 0  | 0          | 100  | 50,000,000      | 100  | 216,000,00<br>0 | 100  | 242,000,00<br>0 | 100  | 278,000,00<br>0 | 100           | 786,000,00<br>0   | KECAMATAN<br>GEGESIK                       |
| 7.01.<br>06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN<br>DAN<br>PENGAWASA<br>N<br>PEMERINTA<br>HAN DESA             | Meningkatnya<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat   | 100             | 100  | 35,000,000 | 100  | 35,000,000      | 100  | 28,000,000      | 100  | 46,000,000      | 100  | 34,000,000      | 100           | 143,000,00<br>0   | KECAMATAN<br>GEGESIK                       |
|              |  | Peningkatan<br>Prosentase<br>kegiatan<br>pembinaan dan<br>pengawasan   | 0               | 0  | 0          | 100  | 386,000,00<br>0 | 100  | 386,000,00<br>0 | 100  | 429,000,00<br>0 | 100  | 467,000,00<br>0 | 100           | 1,282,000,0<br>00 | KECAMATAN<br>GEGESIK                       |

| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)  | Kondisi Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |      |               |      |               |      |               |      |               |               |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|--|--|--------------|--|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|-----------------------------------|
|          |  |  |              | 2020   |               | 2021 |               | 2022 |               | 2023 |               | 2024 |               | Kondisi Akhir |                |                                   |
|          |  |  |              | K  | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K             | Rp             |                                   |
| 1        | 2  | 3  | 4            | 5  | 6             | 7    | 8             | 9    | 10            | 11   | 12            | 13   | 14            | 15            | 16             | 17                                |
|          |  | terhadap pemerintahan desa   |              |  |               |      |               |      |               |      |               |      |               |               |                |                                   |
| 7.01.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | Meningkatnya Disiplin Aparatur   | 100          | 100  | 183,500,000   | 100  | 141,259,900   | 100  | 23,000,000    | 100  | 23,000,000    | 100  | 23,000,000    | 100           | 393,759,900    | KECAMATAN KALIWEDI                |
|          |  | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang sesuai standar kebutuhan pelayanan prima     | 100          | 100  | 95,000,000    | 100  | 228,790,900   | 100  | 5,000,000     | 100  | 5,000,000     | 0    | 0             | 100           | 333,790,900    | KECAMATAN KALIWEDI                |
|          |  | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai standar pelayanan prima          | 100          | 100  | 2,968,180,000 | 100  | 3,101,470,000 | 100  | 10,000,000    | 100  | 10,000,000    | 100  | 10,000,000    | 100           | 6,099,650,000  | KECAMATAN KALIWEDI                |
|          |  | Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif | 100          | 100  | 13,000,000    | 100  | 8,599,200     | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 36,599,200     | KECAMATAN KALIWEDI                |
|          |  | Peningkatan sistem Perencanaan Sektoral yang Akuntabel                                       | 75           | 80   | 3,000,000     | 80   | 3,000,000     | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 400           | 6,000,000      | KECAMATAN KALIWEDI                |
|          |  | Meningkatnya Prosentase kepatuhan dalam pelaksanaan SOP pelayanan pemerintah                 | 100          | 0  | 0             | 100  | 3,645,743,100 | 100  | 5,248,500,000 | 100  | 5,400,500,000 | 100  | 5,660,500,000 | 100           | 19,955,243,100 | KECAMATAN KALIWEDI                |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN                     | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan   | 100          | 100  | 235,000,000   | 100  | 365,482,900   | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 1,050,482,900  | KECAMATAN KALIWEDI                |

| Kod<br>e | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |            |      |             |      |             |      |             |      |             |               |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|----------|--|---|-----------------|--|------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|---------------|---------------|--|
|          |  |   |                 | 2020   |            | 2021 |             | 2022 |             | 2023 |             | 2024 |             | Kondisi Akhir |               |  |
|          |  |   |                 | K  | Rp         | K    | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K             | Rp            |  |
| 1        | 2  | 3   | 4               | 5  | 6          | 7    | 8           | 9    | 10          | 11   | 12          | 13   | 14          | 15            | 16            | 17   |
|          | PELAYANAN PUBLIK   | Pemerintahan Kepada Camat   |                 |  |            |      |             |      |             |      |             |      |             |               |               |  |
|          |  | Meningkatnya Pelayanan Publik   | 0               | 0  | 5,000,000  | 100  | 5,000,000   | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 5,000,000     | KECAMATAN KALIWEDI                         |
|          |  | Prosentase Peningkatan Pelimpahan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 100             | 0  | 0          | 100  | 160,000,000 | 100  | 490,000,000 | 100  | 490,000,000 | 100  | 490,000,000 | 100           | 1,630,000,000 | KECAMATAN KALIWEDI                         |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                 | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                                | 100             | 100  | 90,000,000 | 100  | 180,101,300 | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 330,101,300   | KECAMATAN KALIWEDI                         |
|          |  | Prosentase jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan                  | 100             | 0  | 0          | 100  | 150,000,000 | 100  | 250,000,000 | 100  | 260,000,000 | 100  | 270,000,000 | 100           | 930,000,000   | KECAMATAN KALIWEDI                         |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                 | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                                | 100             | 100  | 60,000,000 | 100  | 195,000,000 | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 255,000,000   | KECAMATAN KALIWEDI                         |
|          |  | Prosentase peningkatan Kegiatan Koordinasi untuk meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum   | 100             | 0  | 0          | 100  | 45,000,000  | 100  | 75,000,000  | 100  | 85,000,000  | 100  | 105,000,000 | 100           | 310,000,000   | KECAMATAN KALIWEDI                         |
| 7.01.05. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                   | Prosentase urusan pemerintahan umum yang di tugaskan kepala pemerintah daerah kepada camat      | 0               | 0  | 0          | 100  | 50,000,000  | 100  | 270,000,000 | 100  | 175,000,000 | 100  | 175,000,000 | 100           | 670,000,000   | KECAMATAN KALIWEDI                         |

| Kode     | Bidang Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan        | Indikator Kinerja Program (outcome)   | Kondisi Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |      |               |      |               |      |               |      |               |               |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|--|---|--------------|--|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|-----------------------------------|
|          |  |   |              | 2020   |               | 2021 |               | 2022 |               | 2023 |               | 2024 |               | Kondisi Akhir |                |                                   |
|          |  |   |              | K  | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K             | Rp             |                                   |
| 1        | 2  | 3   | 4            | 5  | 6             | 7    | 8             | 9    | 10            | 11   | 12            | 13   | 14            | 15            | 16             | 17                                |
| 7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA           | Peningkatan Prosentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa                     | 0            | 0  | 0             | 100  | 20,000,000    | 100  | 360,000,000   | 100  | 510,000,000   | 100  | 360,000,000   | 100           | 1,255,000,000  | KECAMATAN KALIWEDI                |
| 7.01.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran                                    | 3.25         | 3.55   | 118,797,910   | 3.65 | 130,677,701   | 3.75 | 143,745,471   | 3.85 | 158,120,919   | 4    | 173,932,021   | 4             | 725,274,022    | KECAMATAN KARANGWARENG            |
|          |  | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur  | 3.25         | 3.55   | 96,589,960    | 3.65 | 139,696,456   | 3.75 | 158,666,152   | 3.85 | 173,643,237   | 4    | 332,778,660   | 4             | 901,374,465    | KECAMATAN KARANGWARENG            |
|          |  | Meningkatnya prosentase Disiplin Aparatur   | 3.25         | 3.55   | 2,995,576,000 | 3.65 | 3,133,445,000 | 3.75 | 3,270,000,000 | 3.85 | 3,423,000,000 | 4    | 3,591,247,295 | 4             | 16,413,268,295 | KECAMATAN KARANGWARENG            |
|          |  | Meningkatnya prosentase sistim pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif | 3.25         | 3.55   | 6,490,000     | 3.65 | 7,139,000     | 3.75 | 7,852,900     | 3.85 | 8,638,190     | 4    | 9,502,010     | 4             | 39,622,100     | KECAMATAN KARANGWARENG            |
|          |  | Peningkatan sistim perencanaan sektoral yang akuntabel  | 3.25         | 3.55   | 27,157,680    | 3.65 | 29,873,448    | 3.75 | 32,860,793    | 3.85 | 36,146,872    | 4    | 39,761,559    | 4             | 165,800,352    | KECAMATAN KARANGWARENG            |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK    | Meningkatnya Prosentase Pelayanan Publik  | 55           | 55   | 0             | 60   | 20,000,000    | 65   | 80,000,000    | 70   | 100,000,000   | 75   | 120,000,000   | 75            | 320,000,000    | KECAMATAN KARANGWARENG            |



| Kod<br>e | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>an dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |      |             |      |             |      |             |      |             |               |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|----------|---|---|-----------------|--|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|---------------|---------------|--|
|          |   |   |                 | 2020   |             | 2021 |             | 2022 |             | 2023 |             | 2024 |             | Kondisi Akhir |               |  |
|          |   |   |                 | K  | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K             | Rp            |  |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5  | 6           | 7    | 8           | 9    | 10          | 11   | 12          | 13   | 14          | 15            | 16            | 17   |
|          |   | Meningkatnya prosentase pelaksanaan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat cakupan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan kepada Camat | 55              | 55   | 287,545,500 | 60   | 316,300,050 | 65   | 347,930,055 | 70   | 382,723,061 | 75   | 420,995,367 | 75            | 1,755,494,033 | KECAMATAN KARANGWARENG                     |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                  | Meningkatnya prosentase pelaksanaan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat cakupan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan kepada Camat | 55              | 55   | 80,300,000  | 60   | 88,330,000  | 65   | 127,163,000 | 70   | 146,879,300 | 75   | 167,567,230 | 75            | 610,239,530   | KECAMATAN KARANGWARENG                     |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                  | Meningkatnya prosentase pelaksanaan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat cakupan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan kepada Camat | 55              | 55   | 71,500,000  | 60   | 128,650,000 | 65   | 91,515,000  | 70   | 100,166,500 | 75   | 109,683,150 | 75            | 501,514,650   | KECAMATAN KARANGWARENG                     |





| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)  | Kondisi Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |      |               |      |             |      |            |      |            |               |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|--|--|--------------|--|---------------|------|---------------|------|-------------|------|------------|------|------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
|          |  |  |              | 2020   |               | 2021 |               | 2022 |             | 2023 |            | 2024 |            | Kondisi Akhir |               |                                   |
|          |  |  |              | K  | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp          | K    | Rp         | K    | Rp         | K             | Rp            |                                   |
| 1        | 2  | 3  | 4            | 5  | 6             | 7    | 8             | 9    | 10          | 11   | 12         | 13   | 14         | 15            | 16            | 17                                |
| 7.01.05. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM             | Meningkatnya Pelayanan Publik  | 0            | 0  | 0             | 100  | 40,000,000    | 100  | 40,000,000  | 100  | 50,000,000 | 100  | 60,000,000 | 100           | 150,000,000   | KECAMATAN KARANGWARENG            |
|          |  | Prosentase jumlah urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala pemerintah daerah kepada camat | 0            | 0  | 0             | 97   | 50,000,000    | 98   | 100,000,000 | 99   | 5,000,000  | 100  | 5,000,000  | 297           | 160,000,000   | KECAMATAN KARANGWARENG            |
| 7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA           | Meningkatnya Prosentase Pemberdayaan Masyarakat  | 0.64         | 0.00   | 0             | 0.64 | 20,000,000    | 0.65 | 30,000,000  | 0.65 | 40,000,000 | 0.65 | 50,000,000 | 0.65          | 140,000,000   | KECAMATAN KARANGWARENG            |
|          |  | Prosentase jumlah urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala pemerintah daerah kepada camat | 0            | 0  | 0             | 97   | 20,000,000    | 0    | 0           | 0    | 0          | 0    | 0          | 297           | 20,000,000    | KECAMATAN KARANGWARENG            |
| 7.01.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai standar pelayanan prima              | 100          | 100  | 91,512,600    | 100  | 100,949,000   | 0    | 0           | 0    | 0          | 0    | 0          | 100           | 220,961,600   | KECAMATAN TENGAH TANI             |
|          |  | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur   | 99           | 100  | 111,680,400   | 100  | 134,970,000   | 0    | 0           | 0    | 0          | 0    | 0          | 100           | 246,650,400   | KECAMATAN TENGAH TANI             |
|          |  | Meningkatnya disiplin aparatur   | 100          | 100  | 3,008,620,000 | 100  | 3,148,920,000 | 0    | 0           | 0    | 0          | 0    | 0          | 100           | 6,157,540,000 | KECAMATAN TENGAH TANI             |
|          |  | Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan.                              | 100          | 100  | 6,345,000     | 100  | 6,979,000     | 0    | 0           | 0    | 0          | 0    | 0          | 100           | 13,324,000    | KECAMATAN TENGAH TANI             |

| Kod<br>e | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |      |             |      |               |      |               |      |               |               |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|----------|--|--|-----------------|--|-------------|------|-------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|--|
|          |  |  |                 | 2020   |             | 2021 |             | 2022 |               | 2023 |               | 2024 |               | Kondisi Akhir |                |  |
|          |  |  |                 | K  | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K             | Rp             |  |
| 1        | 2  | 3  | 4               | 5  | 6           | 7    | 8           | 9    | 10            | 11   | 12            | 13   | 14            | 15            | 16             | 17   |
|          |  | akuntabel dan informatif   |                 |  |             |      |             |      |               |      |               |      |               |               |                |  |
|          |  | Peningkatan sistem Perencanaan Sektoral yang Akuntabel                               | 100             | 100  | 6,230,000   | 100  | 6,853,000   | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 13,083,000     | KECAMATAN TENGAH TANI                      |
|          |  | Meningkatnya prosentase kepatuhan dalam pelaksanaan SOP pelayanan pemerintah         | 0               | 0  | 0           | 100  | 353,805,000 | 100  | 4,969,139,000 | 100  | 5,266,294,000 | 100  | 5,593,539,000 | 100           | 16,182,777,000 | KECAMATAN TENGAH TANI                      |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                          | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                     | 100             | 100  | 164,362,000 | 56   | 183,503,000 | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 56            | 392,865,000    | KECAMATAN TENGAH TANI                      |
|          |  | Persentase Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 100             | 0  | 0           | 100  | 203,503,000 | 100  | 309,354,000   | 100  | 352,942,000   | 100  | 385,935,000   | 100           | 1,251,734,000  | KECAMATAN TENGAH TANI                      |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                 | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                     | 100             | 100  | 47,400,000  | 56   | 52,140,000  | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 56            | 114,540,000    | KECAMATAN TENGAH TANI                      |
|          |  | Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan              | 100             | 0  | 0           | 100  | 52,140,000  | 100  | 127,354,000   | 100  | 133,080,000   | 100  | 139,398,000   | 100           | 451,972,000    | KECAMATAN TENGAH TANI                      |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                 | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                     | 100             | 100  | 54,421,800  | 56   | 59,863,000  | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 56            | 114,284,800    | KECAMATAN TENGAH TANI                      |

| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)  | Kondisi Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |      |               |      |             |      |             |      |             |               |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|--|--|--------------|--|---------------|------|---------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
|          |  |  |              | 2020   |               | 2021 |               | 2022 |             | 2023 |             | 2024 |             | Kondisi Akhir |               |                                   |
|          |  |  |              | K  | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K             | Rp            |                                   |
| 1        | 2  | 3  | 4            | 5  | 6             | 7    | 8             | 9    | 10          | 11   | 12          | 13   | 14          | 15            | 16            | 17                                |
|          |  | Prosentase Kegiatan Koordinasi untuk Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum                                   | 100          | 0  | 0             | 100  | 109,863,000   | 100  | 152,435,000 | 100  | 159,435,000 | 100  | 167,646,000 | 100           | 589,379,000   | KECAMATAN TENGAH TANI             |
| 7.01.05. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM             | Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang ditugaskan kepala pemerintah daerah (Bupati) kepada camat | 0            | 0  | 0             | 100  | 50,000,000    | 100  | 320,000,000 | 100  | 235,000,000 | 100  | 250,000,000 | 100           | 855,000,000   | KECAMATAN TENGAH TANI             |
| 7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA           | Peningkatan Prosentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa                                | 0            | 100  | 5,000,000     | 100  | 44,000,000    | 100  | 282,000,000 | 100  | 377,500,000 | 100  | 283,000,000 | 100           | 991,500,000   | KECAMATAN TENGAH TANI             |
| 7.01.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran   | 100          | 100  | 400,097,900   | 100  | 425,307,690   | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 832,905,590   | KECAMATAN GEMPOL                  |
|          |  | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur   | 100          | 100  | 758,294,285   | 100  | 1,834,123,714 | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 2,592,417,999 | KECAMATAN GEMPOL                  |
|          |  | Meningkatnya disiplin aparatur   | 0            | 100  | 2,977,517,000 | 100  | 3,111,000,000 | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 6,088,517,000 | KECAMATAN GEMPOL                  |
|          |  | Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif                       | 100          | 100  | 8,300,000     | 100  | 9,130,000     | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 17,430,000    | KECAMATAN GEMPOL                  |
|          |  | Peningkatan sistem Perencanaan   | 100          | 100  | 11,250,000    | 100  | 12,375,000    | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 23,625,000    | KECAMATAN GEMPOL                  |



| Kod<br>e | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)                                       | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |      |               |      |               |      |               |      |               |               |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|----------|--|--|-----------------|--|-------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|--|
|          |  |  |                 | 2020   |             | 2021 |               | 2022 |               | 2023 |               | 2024 |               | Kondisi Akhir |                |  |
|          |  |  |                 | K  | Rp          | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K             | Rp             |  |
| 1        | 2  | 3  | 4               | 5  | 6           | 7    | 8             | 9    | 10            | 11   | 12            | 13   | 14            | 15            | 16             | 17   |
|          |  | Sektoral yang Akuntabel  |                 |  |             |      |               |      |               |      |               |      |               |               |                |  |
|          |  | Meningkatnya prosentase kepatuhan dalam pelaksanaan SOP pelayanan pemerintah       | 100             | 0  | 0           | 100  | 1,538,468,404 | 100  | 4,936,915,244 | 100  | 5,573,500,000 | 100  | 6,158,000,000 | 100           | 18,206,883,648 | KECAMATAN GEMPOL                           |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                          | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                   | 100             | 100  | 409,505,000 | 100  | 490,455,500   | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 899,960,500    | KECAMATAN GEMPOL                           |
|          |  | Prosentase peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik | 100             | 0  | 0           | 100  | 455,455,500   | 100  | 684,303,680   | 100  | 584,400,000   | 100  | 830,040,000   | 100           | 2,554,199,180  | KECAMATAN GEMPOL                           |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                 | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                   | 100             | 100  | 133,924,000 | 100  | 147,316,400   | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 281,240,400    | KECAMATAN GEMPOL                           |
|          |  | Prosentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan            | 100             | 0  | 0           | 100  | 147,316,400   | 100  | 202,048,040   | 100  | 224,000,000   | 100  | 248,400,000   | 100           | 821,764,440    | KECAMATAN GEMPOL                           |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                 | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                   | 100             | 100  | 194,730,000 | 100  | 264,203,000   | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 458,933,000    | KECAMATAN GEMPOL                           |
|          |  | Prosentase kegiatan koordinasi untuk peningkatan ketentraman dan ketertiban umum   | 100             | 0  | 0           | 100  | 264,203,000   | 100  | 285,623,300   | 100  | 310,000,000   | 100  | 340,000,000   | 100           | 1,199,826,300  | KECAMATAN GEMPOL                           |

| Kod<br>e     | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>an dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   |      |                   |      |                 |      |                 |      |                 |               |                   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|--------------|---|---|-----------------|--|-------------------|------|-------------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|---------------|-------------------|--|
|              |   |   |                 | 2020   |                   | 2021 |                   | 2022 |                 | 2023 |                 | 2024 |                 | Kondisi Akhir |                   |  |
|              |   |   |                 | K  | Rp                | K    | Rp                | K    | Rp              | K    | Rp              | K    | Rp              | K             | Rp                |  |
| 1            | 2   | 3   | 4               | 5  | 6                 | 7    | 8                 | 9    | 10              | 11   | 12              | 13   | 14              | 15            | 16                | 17   |
| 7.01.<br>05. | PROGRAM<br>PENYELENG<br>GARAAN<br>URUSAN<br>PEMERINTA<br>HAN UMUM                   | Prosentase<br>urusan<br>pemerintahan<br>umum yang<br>ditugaskan<br>kepala<br>pemerintah<br>daerah kepada<br>camat | 0               | 0  | 0                 | 100  | 100,000,00<br>0   | 100  | 310,000,00<br>0 | 100  | 340,000,00<br>0 | 100  | 370,000,00<br>0 | 100           | 1,120,000,0<br>00 | KECAMATAN<br>GEMPOL                        |
| 7.01.<br>06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN<br>DAN<br>PENGAWASA<br>N<br>PEMERINTA<br>HAN DESA              | Meningkatnya<br>pemberdayaan<br>masyarakat  | 0               | 0  | 0                 | 100  | 40,000,000        | 0    | 0               | 0    | 0               | 0    | 0               | 100           | 40,000,000        | KECAMATAN<br>GEMPOL                        |
|              |   | Peningkatan<br>prosentase<br>kegiatan<br>pembinaan dan<br>pengawasan<br>terhadap<br>pemerintah.                   | 0               | 0  | 0                 | 100  | 25,000,000        | 100  | 44,000,000      | 100  | 50,000,000      | 100  | 70,000,000      | 100           | 189,000,00<br>0   | KECAMATAN<br>GEMPOL                        |
| 7.01.<br>01. | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTA<br>HAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN<br>/KOTA  | Meningkatkan<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br>yang sesuai<br>pelayanan prima                        | 0               | 100  | 325,000,00<br>0   | 100  | 390,000,00<br>0   | 0    | 0               | 0    | 0               | 0    | 0               | 100           | 715,000,00<br>0   | KECAMATAN<br>PASALEMAN                     |
|              |   | Meningkatkan<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur yang<br>sesuai standar<br>kebutuhan<br>pelayanan prima        | 0               | 100  | 265,000,00<br>0   | 100  | 715,000,00<br>0   | 0    | 0               | 0    | 0               | 0    | 0               | 100           | 980,000,00<br>0   | KECAMATAN<br>PASALEMAN                     |
|              |   | Peningkatan<br>kompetensi dan<br>keterampilan<br>aparatur<br>kecamatan  | 100             | 100  | 60,000,000        | 100  | 131,000,00<br>0   | 0    | 0               | 0    | 0               | 0    | 0               | 100           | 191,000,00<br>0   | KECAMATAN<br>PASALEMAN                     |
|              |   | Meningkatnya<br>Disiplin<br>Aparatur  | 100             | 0  | 2,997,955,0<br>00 | 100  | 3,150,000,0<br>00 | 0    | 0               | 0    | 0               | 0    | 0               | 100           | 6,147,955,0<br>00 | KECAMATAN<br>PASALEMAN                     |
|              |   | Peningkatan<br>sistem<br>perencanaan<br>sektoral yang<br>akuntabel  | 100             | 100  | 65,000,000        | 100  | 110,000,00<br>0   | 0    | 20,000,000      | 0    | 25,000,000      | 0    | 30,000,000      | 100           | 250,000,00<br>0   | KECAMATAN<br>PASALEMAN                     |

| Kod<br>e | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |      |               |      |               |      |               |      |               |               |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|----------|--|---|-----------------|--|-------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|--|
|          |  |   |                 | 2020   |             | 2021 |               | 2022 |               | 2023 |               | 2024 |               | Kondisi Akhir |                |  |
|          |  |   |                 | K  | Rp          | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K             | Rp             |  |
| 1        | 2  | 3   | 4               | 5  | 6           | 7    | 8             | 9    | 10            | 11   | 12            | 13   | 14            | 15            | 16             | 17   |
|          |  | Tersedianya dokumen Sistem Perencanaan Sektoral   | 0               | 100  | 25,000,000  | 100  | 30,000,000    | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 55,000,000     | KECAMATAN PASALEMAN                        |
|          |  | Meningkatnya prosentase kaputahan dalam pelaksanaan SOP pelayanan Pemerintah                    | 100             | 0  | 0           | 100  | 4,841,000,000 | 100  | 5,352,000,000 | 100  | 5,669,000,000 | 100  | 6,034,000,000 | 100           | 21,896,000,000 | KECAMATAN PASALEMAN                        |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                          | Meningkatnya Pelayanan Publik   | 0               | 0  | 0           | 100  | 20,000,000    | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 20,000,000     | KECAMATAN PASALEMAN                        |
|          |  | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintah Kepada Camat                                  | 100             | 100  | 350,000,000 | 100  | 350,000,000   | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 700,000,000    | KECAMATAN PASALEMAN                        |
|          |  | Prosentase Peningkatan Pelimpahan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 100             | 0  | 0           | 100  | 370,000,000   | 100  | 675,000,000   | 100  | 780,000,000   | 100  | 885,000,000   | 100           | 2,710,000,000  | KECAMATAN PASALEMAN                        |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                 | Cakupan Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintahan kepada camat                                | 100             | 100  | 100,000,000 | 100  | 100,000,000   | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 200,000,000    | KECAMATAN PASALEMAN                        |
|          |  | Prosentase jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan                  | 100             | 0  | 0           | 100  | 100,000,000   | 100  | 165,000,000   | 100  | 165,000,000   | 100  | 165,000,000   | 100           | 595,000,000    | KECAMATAN PASALEMAN                        |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                 | Cakupan Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintahan kepada camat                                | 100             | 100  | 100,000,000 | 100  | 150,000,000   | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 250,000,000    | KECAMATAN PASALEMAN                        |



| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)   | Kondisi Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |      |               |      |             |      |             |      |             |               |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|--|---|--------------|--|---------------|------|---------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
|          |  |   |              | 2020   |               | 2021 |               | 2022 |             | 2023 |             | 2024 |             | Kondisi Akhir |               |                                   |
|          |  |   |              | K  | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K             | Rp            |                                   |
| 1        | 2  | 3   | 4            | 5  | 6             | 7    | 8             | 9    | 10          | 11   | 12          | 13   | 14          | 15            | 16            | 17                                |
|          |  | Prosentase peningkatan Kegiatan Koordinasi untuk meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum     | 100          | 0  | 0             | 100  | 150,000,000   | 100  | 160,000,000 | 100  | 170,000,000 | 100  | 180,000,000 | 100           | 660,000,000   | KECAMATAN PASALEMAN               |
| 7.01.05. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM             | Prosentase jumlah urusan pemerintahan umum yang di tugaskan kepala pemerintah daerah kepada camat | 0            | 0  | 0             | 100  | 50,000,000    | 100  | 320,000,000 | 100  | 405,000,000 | 100  | 465,000,000 | 100           | 1,240,000,000 | KECAMATAN PASALEMAN               |
| 7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA           | Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat  | 0            | 0  | 0             | 100  | 20,000,000    | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 20,000,000    | KECAMATAN PASALEMAN               |
|          |  | Peningkatan Prosentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa               | 0            | 0  | 0             | 100  | 40,000,000    | 100  | 210,000,000 | 100  | 320,000,000 | 100  | 230,000,000 | 100           | 800,000,000   | KECAMATAN PASALEMAN               |
| 7.01.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran                              | 60           | 75   | 224,263,133   | 76   | 265,734,383   | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 76            | 489,997,516   | KECAMATAN PLERED                  |
|          |  | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur  | 65           | 70   | 952,322,600   | 75   | 654,360,000   | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 75            | 1,606,682,600 | KECAMATAN PLERED                  |
|          |  | Meningkatnya Disiplin Aparatur  | 95           | 95   | 2,930,280,000 | 96   | 3,058,870,000 | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 96            | 5,989,150,000 | KECAMATAN PLERED                  |
|          |  | Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang   | 100          | 100  | 18,000,620    | 100  | 19,800,682    | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 37,801,302    | KECAMATAN PLERED                  |



| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)   | Kondisi Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |      |               |      |               |      |               |      |               |               |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|--|---|--------------|--|-------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|-----------------------------------|
|          |  |   |              | 2020   |             | 2021 |               | 2022 |               | 2023 |               | 2024 |               | Kondisi Akhir |                |                                   |
|          |  |   |              | K  | Rp          | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K             | Rp             |                                   |
| 1        | 2  | 3   | 4            | 5  | 6           | 7    | 8             | 9    | 10            | 11   | 12            | 13   | 14            | 15            | 16             | 17                                |
|          |  | transparan, Akuntabel dan informatif  |              |  |             |      |               |      |               |      |               |      |               |               |                |                                   |
|          |  | Peningkatan sistem Perencanaan Sektoral yang Akuntabel  | 100          | 100  | 30,000,000  | 100  | 22,000,000    | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 52,000,000     | KECAMATAN PLERED                  |
|          |  | Meningkatnya prosentase kebutuhan dalam pelaksanaan SOP pelayanan pemerintah                    | 0            | 0  | 20,301,000  | 100  | 4,713,541,659 | 100  | 5,618,343,736 | 100  | 5,872,810,000 | 100  | 6,121,641,000 | 100           | 22,346,637,395 | KECAMATAN PLERED                  |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK    | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                                | 55           | 60   | 326,963,530 | 65   | 359,659,883   | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 65            | 686,623,413    | KECAMATAN PLERED                  |
|          |  | Prosentase Peningkatan Pelimpahan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 0            | 0  | 25,000,000  | 100  | 359,659,883   | 100  | 565,375,750   | 100  | 609,707,400   | 100  | 675,428,300   | 100           | 2,235,171,333  | KECAMATAN PLERED                  |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN           | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                                | 55           | 60   | 107,409,280 | 65   | 118,150,208   | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 65            | 225,559,488    | KECAMATAN PLERED                  |
|          |  | Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan                         | 55           | 0  | 0           | 100  | 118,150,208   | 100  | 229,965,200   | 100  | 242,961,700   | 100  | 257,257,900   | 100           | 848,335,008    | KECAMATAN PLERED                  |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM           | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                                | 55           | 60   | 78,760,230  | 65   | 136,636,253   | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 65            | 215,396,483    | KECAMATAN PLERED                  |





| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)  | Kondisi Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |      |               |      |             |      |             |      |             |               |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|--|--|--------------|--|---------------|------|---------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
|          |  |  |              | 2020   |               | 2021 |               | 2022 |             | 2023 |             | 2024 |             | Kondisi Akhir |               |                                   |
|          |  |  |              | K  | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K             | Rp            |                                   |
| 1        | 2  | 3  | 4            | 5  | 6             | 7    | 8             | 9    | 10          | 11   | 12          | 13   | 14          | 15            | 16            | 17                                |
|          |  | Prosentase Kegiatan Kordinasi untuk peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum            | 0            | 0  | 0             | 100  | 136,636,253   | 100  | 145,229,878 | 100  | 170,000,000 | 100  | 200,000,000 | 100           | 651,866,131   | KECAMATAN PLERED                  |
| 7.01.05. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM             | Prosentase urusan pemerintahan umum yang di tugaskan kepala pemerintah daerah kepada Camat | 0            | 0  | 0             | 0    | 60,000,000    | 100  | 310,000,000 | 100  | 373,333,334 | 100  | 436,666,666 | 100           | 1,180,000,000 | KECAMATAN PLERED                  |
| 7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA           | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat   | 0            | 100  | 40,000,000    | 100  | 44,000,000    | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 84,000,000    | KECAMATAN PLERED                  |
|          |  | Peningkatan Prosentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa        | 0            | 0  | 0             | 100  | 64,000,000    | 100  | 278,400,000 | 100  | 475,000,000 | 100  | 290,000,000 | 100           | 1,107,400,000 | KECAMATAN PLERED                  |
| 7.01.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | Meningkatnya Disiplin Aparatur   | 100          | 100  | 3,222,048,000 | 100  | 3,337,000,000 | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 6,559,048,000 | KECAMATAN PABUARAN                |
|          |  | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai standar pelayanan prima        | 100          | 100  | 664,477,368   | 100  | 656,530,768   | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 1,321,008,136 | KECAMATAN PABUARAN                |
|          |  | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang sesuai standar kebutuhan pelayanan prima   | 100          | 100  | 154,197,800   | 100  | 184,000,000   | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 338,197,800   | KECAMATAN PABUARAN                |



| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)   | Kondisi Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |      |               |      |               |      |               |      |               |               |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|--|---|--------------|--|-------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|-----------------------------------|
|          |  |   |              | 2020   |             | 2021 |               | 2022 |               | 2023 |               | 2024 |               | Kondisi Akhir |                |                                   |
|          |  |   |              | K  | Rp          | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K             | Rp             |                                   |
| 1        | 2  | 3   | 4            | 5  | 6           | 7    | 8             | 9    | 10            | 11   | 12            | 13   | 14            | 15            | 16             | 17                                |
|          |  | Peningkatan sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif     | 100          | 100  | 14,472,000  | 100  | 22,309,200    | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 36,781,200     | KECAMATAN PABUARAN                |
|          |  | Peningkatan sistem Perencanaan Sektoral yang Akuntabel  | 100          | 100  | 32,024,800  | 100  | 33,029,760    | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 65,054,560     | KECAMATAN PABUARAN                |
|          |  | Meningkatnya prosentase kaputahan dalam pelaksanaan SOP pelayanan Pemerintah                    | 100          | 0  | 0           | 100  | 5,402,894,750 | 100  | 6,062,644,750 | 100  | 6,938,450,540 | 100  | 7,897,256,330 | 100           | 26,301,246,370 | KECAMATAN PABUARAN                |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK    | Meningkatnya Pelayanan Publik   | 0            | 0  | 0           | 100  | 160,000,000   | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 160,000,000    | KECAMATAN PABUARAN                |
|          |  | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintah Kepada Camat                                  | 100          | 100  | 470,816,900 | 100  | 492,305,780   | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 963,122,680    | KECAMATAN PABUARAN                |
|          |  | Prosentase Peningkatan Pelimpahan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 100          | 0  | 0           | 100  | 924,055,775   | 100  | 1,104,055,775 | 100  | 1,214,805,770 | 100  | 1,325,555,765 | 100           | 4,618,473,085  | KECAMATAN PABUARAN                |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN           | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                                 | 100          | 100  | 151,219,900 | 100  | 159,199,880   | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 310,419,780    | KECAMATAN PABUARAN                |
|          |  | Prosentase jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa dan  | 100          | 0  | 0           | 100  | 160,999,875   | 100  | 300,999,875   | 100  | 330,799,870   | 100  | 356,599,865   | 100           | 1,149,399,485  | KECAMATAN PABUARAN                |

| Kod<br>e | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |                |             |            |             |           |             |           |               |               |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|----------|--|---|-----------------|--|-------------|----------------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--|
|          |  |   |                 | 2020   |             | 2021           |             | 2022       |             | 2023      |             | 2024      |               | Kondisi Akhir |               |  |
|          |  |   |                 | K  | Rp          | K              | Rp          | K          | Rp          | K         | Rp          | K         | Rp            | K             | Rp            |  |
| 1        | 2  | 3   | 4               | 5  | 6           | 7              | 8           | 9          | 10          | 11        | 12          | 13        | 14            | 15            | 16            | 17   |
|          |  | Kelurahan yang dilaksanakan   |                 |  |             |                |             |            |             |           |             |           |               |               |               |  |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                 | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                                   | 100             | 100  | 337,680,000 | 100            | 337,680,000 | 0          | 0           | 0         | 0           | 0         | 0             | 100           | 337,680,000   | KECAMATAN PABUARAN                         |
|          |  | Prosentase peningkatan Kegiatan Koordinasi untuk meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum     | 100             | 0  | 0           | 100            | 357,680,000 | 100        | 357,680,000 | 100       | 369,680,000 | 100       | 380,689,000   | 100           | 1,465,729,000 | KECAMATAN PABUARAN                         |
| 7.01.05. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                   | Prosentase jumlah urusan pemerintahan umum yang di tugaskan kepala pemerintah daerah kepada camat | 0               | 0  | 0           | 100            | 100,000,000 | 100        | 600,000,000 | 100       | 618,000,000 | 100       | 664,000,000   | 100           | 1,982,000,000 | KECAMATAN PABUARAN                         |
| 7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                 | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat  | 0               | 0  | 0           | 100            | 120,000,000 | 0          | 0           | 0         | 0           | 0         | 0             | 100           | 120,000,000   | KECAMATAN PABUARAN                         |
|          |  | Peningkatan Prosentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa               | 0               | 0  | 0           | 100            | 170,000,000 | 100        | 768,000,000 | 100       | 940,000,000 | 100       | 1,080,000,000 | 100           | 2,958,000,000 | KECAMATAN PABUARAN                         |
| 7.01.    | KECAMATAN  |   |                 | 176,721,02                                     |             | 329,513,703,97 |             | 679,864,80 |             | 693,775,5 |             | 541,679,1 |               | 2,421,554,23  |               |  |
| 7.01.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                       | Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran                              | 100             | 100  | 132,730,425 | 100            | 156,745,068 | 0          | 0           | 0         | 0           | 0         | 0             | 100           | 289,475,493   | KECAMATAN GREGED                           |



| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)  | Kondisi Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |      |               |      |               |      |               |      |               |               |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|--|--|--------------|--|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|-----------------------------------|
|          |  |  |              | 2020   |               | 2021 |               | 2022 |               | 2023 |               | 2024 |               | Kondisi Akhir |                |                                   |
|          |  |  |              | K  | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K             | Rp             |                                   |
| 1        | 2  | 3  | 4            | 5  | 6             | 7    | 8             | 9    | 10            | 11   | 12            | 13   | 14            | 15            | 16             | 17                                |
|          | KABUPATEN /KOTA  |  |              |  |               |      |               |      |               |      |               |      |               |               |                |                                   |
|          |  | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur   | 100          | 100  | 123,102,500   | 100  | 124,457,100   | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 257,736,559    | KECAMATAN GREGED                  |
|          |  | Meningkatnya disiplin aparatur   | 100          | 100  | 2,502,667,000 | 100  | 2,604,000,000 | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 5,106,667,000  | KECAMATAN GREGED                  |
|          |  | Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif | 100          | 100  | 73,657,066    | 100  | 81,022,774    | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 154,679,840    | KECAMATAN GREGED                  |
|          |  | Peningkatan sistem Perencanaan Sektoral yang Akuntabel                                       | 100          | 100  | 10,000,000    | 100  | 12,000,000    | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 22,000,000     | KECAMATAN GREGED                  |
|          |  | Meningkatnya Prosentase Kepatuhan Dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah                 | 100          | 0  | 0             | 100  | 2,933,653,387 | 100  | 3,380,438,255 | 100  | 3,577,984,101 | 100  | 3,820,015,690 | 100           | 13,712,091,433 | KECAMATAN GREGED                  |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK    | Meningkatnya Pelayanan Publik  | 0            | 0  | 0             | 100  | 10,000,000    | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 10,000,000     | KECAMATAN GREGED                  |
|          |  | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                             | 100          | 100  | 246,044,575   | 100  | 746,876,515   | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 992,921,090    | KECAMATAN GREGED                  |
|          |  | Prosentase Peningkatan Pelimpahan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan                   | 100          | 0  | 0             | 100  | 524,876,515   | 100  | 302,135,650   | 100  | 336,564,166   | 100  | 382,720,583   | 100           | 1,546,296,914  | KECAMATAN GREGED                  |

| Kod<br>e | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>an dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |            |      |             |      |             |      |             |      |             |               |             | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|----------|---|---|-----------------|--|------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|---------------|-------------|--|
|          |   |   |                 | 2020   |            | 2021 |             | 2022 |             | 2023 |             | 2024 |             | Kondisi Akhir |             |  |
|          |   |   |                 | K  | Rp         | K    | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K             | Rp          |  |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5  | 6          | 7    | 8           | 9    | 10          | 11   | 12          | 13   | 14          | 15            | 16          | 17   |
|          |   | dan Pelayanan Publik  |                 |  |            |      |             |      |             |      |             |      |             |               |             |  |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                  | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                              | 100             | 100  | 45,000,000 | 100  | 145,000,000 | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 205,000,000 | KECAMATAN GREGED                           |
|          |   | Prosentase jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan                | 100             | 0  | 0          | 100  | 145,000,000 | 100  | 100,000,000 | 100  | 110,000,000 | 100  | 120,000,000 | 100           | 475,000,000 | KECAMATAN GREGED                           |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                  | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                              | 100             | 100  | 59,717,735 | 100  | 115,689,508 | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 175,407,243 | KECAMATAN GREGED                           |
|          |   | Prosentase peningkatan Kegiatan Koordinasi untuk meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100             | 0  | 0          | 100  | 115,689,508 | 100  | 118,750,000 | 100  | 120,000,000 | 100  | 125,000,000 | 100           | 479,439,508 | KECAMATAN GREGED                           |
| 7.01.05. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                    | Prosentase urusan pemerintahan umum yang di tugaskan kepala pemerintah daerah kepada camat    | 0               | 0  | 0          | 100  | 50,000,000  | 100  | 100,000,000 | 100  | 170,000,000 | 100  | 240,000,000 | 100           | 560,000,000 | KECAMATAN GREGED                           |
| 7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                  | Persentasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan   | 100             | 0  | 0          | 100  | 20,000,000  | 100  | 30,000,000  | 100  | 40,000,000  | 100  | 50,000,000  | 100           | 140,000,000 | KECAMATAN GREGED                           |

| Kod<br>e | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |      |               |      |               |      |               |      |               |               |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|----------|--|---|-----------------|--|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|--|
|          |  |   |                 | 2020   |               | 2021 |               | 2022 |               | 2023 |               | 2024 |               | Kondisi Akhir |                |  |
|          |  |   |                 | K  | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K             | Rp             |  |
| 1        | 2  | 3   | 4               | 5  | 6             | 7    | 8             | 9    | 10            | 11   | 12            | 13   | 14            | 15            | 16             | 17   |
|          |  | Peningkatan Prosentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa         | 0               | 0  | 0             | 100  | 20,000,000    | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 20,000,000     | KECAMATAN GREGED                           |
| 7.01.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA                       | Meningkatnya Disiplin Aparatur  | 100             | 100  | 2,960,375,000 | 100  | 3,101,000,000 | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 6,061,375,000  | KECAMATAN JAMBLANG                         |
|          |  | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai standar pelayanan prima         | 100             | 100  | 114,000,000   | 100  | 143,500,000   | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 257,500,000    | KECAMATAN JAMBLANG                         |
|          |  | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang sesuai standar kebutuhan pelayanan prima    | 100             | 100  | 184,225,000   | 100  | 150,000,000   | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 709,225,000    | KECAMATAN JAMBLANG                         |
|          |  | Peningkatan sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif | 100             | 100  | 22,000,000    | 100  | 28,500,000    | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 50,500,000     | KECAMATAN JAMBLANG                         |
|          |  | Peningkatan sistem Perencanaan Sektoral yang Akuntabel                                      | 100             | 100  | 25,000,000    | 100  | 27,500,000    | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 52,500,000     | KECAMATAN JAMBLANG                         |
|          |  | Meningkatkan Prosentase kepatuhan dalam pelaksanaan SOP pelayanan pemerintahan              | 100             | 0  | 0             | 100  | 3,440,500,000 | 100  | 3,866,750,000 | 100  | 4,149,000,000 | 100  | 4,456,000,000 | 100           | 15,912,250,000 | KECAMATAN JAMBLANG                         |



| Kode     | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembangunan | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |      |             |      |             |      |             |      |             |               |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|----------|--|--|-----------------|--|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|---------------|---------------|--|
|          |  |  |                 | 2020   |             | 2021 |             | 2022 |             | 2023 |             | 2024 |             | Kondisi Akhir |               |  |
|          |  |  |                 | K  | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K             | Rp            |  |
| 1        | 2  | 3  | 4               | 5  | 6           | 7    | 8           | 9    | 10          | 11   | 12          | 13   | 14          | 15            | 16            | 17   |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PELAYANAN<br>PUBLIK          | Meningkatnya<br>Pelayanan<br>Publik  | 0               | 100  | 0           | 100  | 90,000,000  | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 90,000,000    | KECAMATAN<br>JAMBLANG                      |
|          |  | Cakupan<br>Pelimpahan<br>Sebagai<br>Kewenangan<br>Pemerintahan<br>Kepada Camat                                       | 100             | 100  | 205,000,000 | 100  | 250,000,000 | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 455,000,000   | KECAMATAN<br>JAMBLANG                      |
|          |  | Prosentase<br>Peningkatan<br>Pelimpahan<br>Efektifitas<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik | 0               | 0  | 0           | 100  | 340,000,000 | 100  | 415,000,000 | 100  | 510,000,000 | 100  | 610,000,000 | 100           | 1,875,000,000 | KECAMATAN<br>JAMBLANG                      |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DESA DAN<br>KELURAHAN                    | Cakupan<br>Pelimpahan<br>Sebagai<br>Kewenangan<br>Pemerintahan<br>Kepada Camat                                       | 100             | 100  | 120,000,000 | 100  | 145,000,000 | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 265,000,000   | KECAMATAN<br>JAMBLANG                      |
|          |  | Prosentase<br>Jumlah<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat<br>Desa dan<br>Kelurahan yang<br>dilaksanakan                     | 0               | 0  | 0           | 100  | 145,000,000 | 100  | 255,000,000 | 100  | 275,000,000 | 100  | 350,000,000 | 100           | 1,025,000,000 | KECAMATAN<br>JAMBLANG                      |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN DAN<br>KETERTIBAN<br>UMUM                 | Cakupan<br>Pelimpahan<br>Sebagai<br>Kewenangan<br>Pemerintahan<br>Kepada Camat                                       | 100             | 100  | 90,000,000  | 100  | 160,000,000 | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 100           | 250,000,000   | KECAMATAN<br>JAMBLANG                      |
|          |  | Prosentase<br>peningkatan<br>kegiatan<br>koordinasi<br>untuk<br>penigkatan<br>ketentrman<br>dan ketertiban<br>umum   | 100             | 0  | 0           | 100  | 160,000,000 | 100  | 210,000,000 | 100  | 245,000,000 | 100  | 270,000,000 | 100           | 885,000,000   | KECAMATAN<br>JAMBLANG                      |

| Kod<br>e     | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   |      |                   |      |                 |      |                 |      |                 |               |                   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|--------------|--|---|-----------------|--|-------------------|------|-------------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|---------------|-------------------|--|
|              |  |   |                 | 2020   |                   | 2021 |                   | 2022 |                 | 2023 |                 | 2024 |                 | Kondisi Akhir |                   |  |
|              |  |   |                 | K  | Rp                | K    | Rp                | K    | Rp              | K    | Rp              | K    | Rp              | K             | Rp                |  |
| 1            | 2  | 3   | 4               | 5  | 6                 | 7    | 8                 | 9    | 10              | 11   | 12              | 13   | 14              | 15            | 16                | 17   |
| 7.01.<br>05. | PROGRAM<br>PENYELENG<br>GARAAN<br>URUSAN<br>PEMERINTA<br>HAN UMUM                  | Prosentase<br>urusan<br>pemerintahan<br>umum yang di<br>tugaskan kepala<br>pemerintah<br>daerah kepada<br>camat | 0               | 0  | 0                 | 100  | 50,000,000        | 100  | 100,000,00<br>0 | 100  | 0               | 100  | 0               | 100           | 150,000,00<br>0   | KECAMATAN<br>JAMBLANG                      |
|              |  | Prosentase<br>Jumlah Urusan<br>Pemerintahan<br>umum yang<br>ditugaskan<br>kepala<br>pemerintah ke<br>camat      | 100             | 0  | 0                 | 100  | 50,000,000        | 100  | 100,000,00<br>0 | 100  | 100,000,00<br>0 | 100  | 100,000,00<br>0 | 100           | 350,000,00<br>0   | KECAMATAN<br>JAMBLANG                      |
| 7.01.<br>06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN<br>DAN<br>PENGAWASA<br>N<br>PEMERINTA<br>HAN DESA             | Meningkatnya<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat  | 0               | 100  | 0                 | 100  | 20,000,000        | 0    | 0               | 0    | 0               | 0    | 0               | 100           | 20,000,000        | KECAMATAN<br>JAMBLANG                      |
|              |  | Peningkatan<br>Prosentase<br>kegiatan<br>pembinaan dan<br>pengawasan<br>terhadap<br>pemerintah desa             | 100             | 0  | 0                 | 100  | 40,000,000        | 100  | 30,000,000      | 100  | 40,000,000      | 100  | 50,000,000      | 100           | 160,000,00<br>0   | KECAMATAN<br>JAMBLANG                      |
| 7.01.<br>01. | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTA<br>HAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN<br>/KOTA | Meningkatnya<br>Disiplin<br>Aparatur  | 100             | 100  | 2,923,238,0<br>00 | 100  | 3,042,000,0<br>00 | 0    | 0               | 0    | 0               | 0    | 0               | 100           | 5,965,238,0<br>00 | KECAMATAN<br>SURANENGGA<br>ALA             |
|              |  | Meningkatnya<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br>yang sesuai<br>standar<br>pelayanan prima           | 100             | 100  | 173,323,71<br>0   | 100  | 212,777,37<br>3   | 0    | 0               | 0    | 0               | 0    | 0               | 100           | 451,127,88<br>7   | KECAMATAN<br>SURANENGGA<br>ALA             |
|              |  | Meningkatnya<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Aparatur yang<br>sesuai standar<br>kebutuhan<br>pelayanan prima      | 100             | 100  | 139,194,00<br>0   | 100  | 131,297,16<br>0   | 0    | 0               | 0    | 0               | 0    | 0               | 100           | 307,919,72<br>0   | KECAMATAN<br>SURANENGGA<br>ALA             |



| Kod<br>e | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |      |               |      |               |      |               |      |               |               |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|----------|--|---|-----------------|--|-------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|--|
|          |  |   |                 | 2020   |             | 2021 |               | 2022 |               | 2023 |               | 2024 |               | Kondisi Akhir |                |  |
|          |  |   |                 | K  | Rp          | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K             | Rp             |  |
| 1        | 2  | 3   | 4               | 5  | 6           | 7    | 8             | 9    | 10            | 11   | 12            | 13   | 14            | 15            | 16             | 17   |
|          |  | Meningkatan sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, Akuntabel dan informatif   | 100             | 100  | 44,706,200  | 100  | 49,176,820    | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 122,629,626    | KECAMATAN SURANENGGALA                     |
|          |  | Peningkatan sistem Perencanaan Sektoral yang Akuntabel  | 100             | 100  | 26,492,000  | 100  | 27,816,600    | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 146,385,024    | KECAMATAN SURANENGGALA                     |
|          |  | Meningkatnya prosentase kebutuhan dalam pelaksanaan SOP pelayanan pemerintah                  | 0               | 0  | 11,300,000  | 100  | 3,462,845,224 | 100  | 3,730,452,205 | 100  | 3,885,290,673 | 100  | 4,094,341,211 | 100           | 15,184,229,313 | KECAMATAN SURANENGGALA                     |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                          | Meningkatnya Pelayanan Publik   | 0               | 0  | 0           | 100  | 20,000,000    | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 20,000,000     | KECAMATAN SURANENGGALA                     |
|          |  | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                               | 100             | 100  | 264,179,630 | 100  | 290,597,593   | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 554,777,223    | KECAMATAN SURANENGGALA                     |
|          |  | prosentase peningkatan pelimpahan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik | 0               | 0  | 0           | 100  | 239,491,860   | 100  | 412,157,346   | 100  | 469,123,051   | 100  | 529,285,366   | 100           | 1,650,057,623  | KECAMATAN SURANENGGALA                     |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                 | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                               | 100             | 100  | 107,345,480 | 100  | 118,080,028   | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 100           | 225,425,508    | KECAMATAN SURANENGGALA                     |
|          |  | Prosentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan   | 0               | 0  | 0           | 100  | 118,080,028   | 100  | 154,888,031   | 100  | 172,876,834   | 100  | 192,164,517   | 100           | 638,009,410    | KECAMATAN SURANENGGALA                     |

| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                              | Indikator Kinerja Program (outcome)   | Kondisi Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |                   |             |                   |             |                   |             |                   |             |                    |             | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|---|---|--------------|--|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|
|          |   |   |              | 2020   |             | 2021              |             | 2022              |             | 2023              |             | 2024              |             | Kondisi Akhir      |             |                                   |
|          |   |   |              | K  | Rp          | K                 | Rp          | K                 | Rp          | K                 | Rp          | K                 | Rp          | K                  | Rp          |                                   |
| 1        | 2   | 3   | 4            | 5  | 6           | 7                 | 8           | 9                 | 10          | 11                | 12          | 13                | 14          | 15                 | 16          | 17                                |
|          |   | yang di laksanakan  |              |  |             |                   |             |                   |             |                   |             |                   |             |                    |             |                                   |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat                                 | 100          | 100  | 111,972,135 | 100               | 173,169,349 | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 100                | 285,141,484 | KECAMATAN SURANENGGA              |
|          |   | Prosentase kegiatan koordinasi untuk peringkat ketentraman dan ketertiban umum                  | 0            | 0  | 0           | 100               | 152,478,383 | 100               | 167,726,181 | 100               | 184,498,869 | 100               | 202,948,756 | 100                | 707,652,189 | KECAMATAN SURANENGGA              |
| 7.01.05. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM  | Prosentase jumlah urusan pemerintah umum yang di tugaskan kepala pemerintah daerah kepada Camat | 0            | 100  | 50,000,000  | 100               | 50,000,000  | 100               | 324,000,000 | 100               | 249,000,000 | 100               | 274,000,000 | 100                | 897,000,000 | KECAMATAN SURANENGGA              |
| 7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA  | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat  | 100          | 100  | 12,720,000  | 100               | 20,000,000  | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 100                | 32,720,000  | KECAMATAN SURANENGGA              |
|          |   | peningkatan prosentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa               | 0            | 0  | 0           | 100               | 40,000,000  | 100               | 95,000,000  | 100               | 95,000,000  | 100               | 110,000,000 | 100                | 340,000,000 | KECAMATAN SURANENGGA              |
| 0.       | NON URUSAN  |   |              | 1,973,020,978,994                              |             | 2,588,594,754,324 |             | 3,762,849,975,234 |             | 3,847,683,141,957 |             | 3,983,911,625,646 |             | 16,156,060,476,155 |             |                                   |
| 1.05.    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |   |              | 44,775,257,000                                 |             | 82,249,500,184    |             | 88,729,871,510    |             | 110,228,532,959   |             | 148,834,368,221   |             | 474,817,529,874    |             |                                   |



| Kod<br>e     | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>an dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                    |                |                    |                |                    |                |                    |                |                    |                |                     | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab       |
|--------------|---|--|-----------------|--|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------|--|
|              |   |  |                 | 2020   |                    | 2021           |                    | 2022           |                    | 2023           |                    | 2024           |                    | Kondisi Akhir  |                     |  |
|              |   |  |                 | K  | Rp                 | K              | Rp                 | K              | Rp                 | K              | Rp                 | K              | Rp                 | K              | Rp                  |  |
| 1            | 2   | 3  | 4               | 5  | 6                  | 7              | 8                  | 9              | 10                 | 11             | 12                 | 13             | 14                 | 15             | 16                  | 17   |
| 1.05.<br>01. | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTA<br>HAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN<br>/KOTA  | Meningkatnya<br>prosentase<br>pemenuhan<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br>sesuai dengan<br>standar<br>pelayanan prima     | 100             | 100  | 13,154,641,<br>000 | 100            | 17,668,879,<br>480 | 100            | 19,701,000,<br>000 | 100            | 25,399,000<br>,000 | 100            | 26,155,000<br>,000 | 100            | 102,078,52<br>0,480 | BADAN<br>PENANGGUL<br>ANGAN<br>BENCANA<br>DAERAH |
| 1.05.<br>03. | PROGRAM<br>PENANGGUL<br>ANGAN<br>BENCANA  | Meningkatnya<br>Pencapaian SPM<br>Penanggulangan<br>Bencana  | 70.08           | 75.21  | 5,350,000,0<br>00  | 80.34          | 9,819,896,6<br>00  | 85.47          | 7,316,000,0<br>00  | 90.59          | 8,318,000,<br>000  | 95.72          | 8,536,000,<br>000  | 95.72          | 39,339,896,<br>600  | BADAN<br>PENANGGUL<br>ANGAN<br>BENCANA<br>DAERAH |
| 8.           | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM   |  |                 | 2,536,613,56<br>0                              |                    | 22,087,950,272 |                    | 16,010,160,482 |                    | 15,691,858,414 |                    | 17,279,102,894 |                    | 73,605,685,622 |                     |  |
| 8.01.        | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   |  |                 | 6,706,071,86<br>0                              |                    | 26,179,673,742 |                    | 20,393,435,479 |                    | 20,327,213,388 |                    | 22,137,656,165 |                    | 95,744,050,634 |                     |  |
| 8.01.<br>01. | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTA<br>HAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN<br>/KOTA  | Prosentase<br>meningkatnya<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur yang<br>sesuai standar<br>kebutuhan<br>pelayanan prima               | 40              | 42   | 52,512,500         | 52             | 472,873,35<br>0    | 62             | 480,160,68<br>5    | 75             | 488,020,88<br>4    | 78             | 496,511,23<br>2    | 78             | 1,990,078,6<br>51   | BADAN<br>KESATUAN<br>BANGSA<br>DAN POLITIK       |
|              |   | prosentase<br>peningkatan<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br>yang sesuai<br>dengan standar<br>pelayanan                    | 78              | 79   | 368,650,80<br>0    | 80             | 545,840,41<br>0    | 81             | 690,710,33<br>1    | 82             | 748,367,74<br>5    | 83             | 810,377,39<br>8    | 83             | 3,163,946,6<br>84   | BADAN<br>KESATUAN<br>BANGSA<br>DAN POLITIK       |
|              |   | Prosentase<br>meningkatnya<br>disiplin aparatur  | 88              | 90   | 3,671,499,0<br>00  | 91             | 2,988,534,0<br>00  | 92             | 3,119,480,7<br>00  | 94             | 3,296,750,<br>735  | 95             | 3,439,227,<br>472  | 95             | 16,515,491,<br>907  | BADAN<br>KESATUAN<br>BANGSA<br>DAN POLITIK       |
|              |   | Prosentase<br>meningkatnya<br>sistem<br>pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br>yang transparan<br>akuntabel dan<br>informatif | 100             | 100  | 36,245,400         | 100            | 39,870,050         | 100            | 43,857,055         | 100            | 48,242,761         | 100            | 53,067,036         | 100            | 221,282,30<br>2     | BADAN<br>KESATUAN<br>BANGSA<br>DAN POLITIK       |
|              |   | Prosentase<br>meningkatnya<br>sistem<br>perencanaan<br>sektoral  | 100             | 100  | 40,550,600         | 100            | 44,605,660         | 100            | 49,066,226         | 100            | 53,972,849         | 100            | 59,370,133         | 100            | 247,565,46<br>8     | BADAN<br>KESATUAN<br>BANGSA<br>DAN POLITIK       |

| Kode     | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembangunan  | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |      |               |      |               |      |               |      |               |               |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|----------|--|---|-----------------|--|-------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|--|
|          |  |   |                 | 2020   |             | 2021 |               | 2022 |               | 2023 |               | 2024 |               | Kondisi Akhir |                |  |
|          |  |   |                 | K  | Rp          | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K             | Rp             |  |
| 1        | 2  | 3   | 4               | 5  | 6           | 7    | 8             | 9    | 10            | 11   | 12            | 13   | 14            | 15            | 16             | 17   |
| 8.01.02. | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN   | Prosentase meningkatnya wawasan kebangsaan warga negara                                 | 6               | 10   | 69,397,460  | 15   | 1,164,825,831 | 20   | 995,408,925   | 25   | 1,084,949,818 | 30   | 1,183,444,799 | 30            | 4,498,026,833  | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK          |
|          |  | Prosentase meningkatnya kemitraan dalam berwawasan kebangsaan                           | 8               | 10   | 50,529,160  | 12   | 55,582,076    | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 20            | 106,111,236    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK          |
| 8.01.03. | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Prosentase peningkatan kualitas pendidikan politik masyarakat                           | 78              | 80   | 749,335,600 | 82   | 9,235,846,870 | 84   | 4,957,193,747 | 87   | 5,452,913,122 | 88   | 5,998,204,434 | 88            | 26,393,493,773 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK          |
| 8.01.04. | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN  | Prosentase Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan           | 5               | 13   | 576,583,000 | 15   | 1,698,187,500 | 20   | 1,000,291,060 | 25   | 1,087,214,584 | 27   | 1,194,707,617 | 100           | 5,556,983,761  | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK          |
| 8.01.05. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA   | Prosentase Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | 4               | 5  | 455,996,240 | 20   | 5,378,893,500 | 25   | 3,447,266,750 | 25   |               | 25   | 2,187,746,044 | 100           | 13,531,683,424 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK          |



| Kod<br>e     | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>n dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembanguna<br>n   | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                 |      |                   |      |                   |      |                   |      |                   |               |                    | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|--------------|--|--|-----------------|--|-----------------|------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|---------------|--------------------|--|
|              |  |  |                 | 2020   |                 | 2021 |                   | 2022 |                   | 2023 |                   | 2024 |                   | Kondisi Akhir |                    |  |
|              |  |  |                 | K  | Rp              | K    | Rp                | K    | Rp                | K    | Rp                | K    | Rp                | K             | Rp                 |  |
| 1            | 2  | 3  | 4               | 5  | 6               | 7    | 8                 | 9    | 10                | 11   | 12                | 13   | 14                | 15            | 16                 | 17   |
| 8.01.<br>06. | PROGRAM<br>PENINGKATA<br>N<br>KEWASPADA<br>AN<br>NASIONAL<br>DAN<br>PENINGKATA<br>N KUALITAS<br>DAN<br>FASILITASI<br>PENANGANAN<br>KONFLIK<br>SOSIAL | Prosentase<br>Peningkatan<br>keamanan dan<br>kenyamanan<br>Lingkungan<br>yang dilakukan                        | 10              | 8  | 296,983,90<br>0 | 10   | 3,401,361,3<br>25 | 12   | 3,755,000,0<br>00 | 14   | 4,050,000,<br>000 | 16   | 4,685,000,<br>000 | 16            | 16,188,345,<br>225 | BADAN<br>KESATUAN<br>BANGSA<br>DAN POLITIK |
|              |  | Prosentase<br>meningkatnya<br>ketentraman<br>dan ketertiban<br>umum dalam<br>kerangka<br>kesatuan<br>berbangsa | 20              | 18   | 337,788,20<br>0 | 16   | 1,153,253,1<br>70 | 15   | 1,855,000,0<br>00 | 13   | 1,955,000,<br>000 | 10   | 2,030,000,<br>000 | 10            | 7,331,041,3<br>70  | BADAN<br>KESATUAN<br>BANGSA<br>DAN POLITIK |

Sumber : Bappelitbangda (data diolah), 2021

## BAB VIII

### KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah (IKD) bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Cirebon periode 2019-2024 yang ditetapkan menjadi Indikator Makro dan Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode jabatan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator Makro (tabel 8.1 )dan indikator kinerja utama pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut IKU daerah (tabel 8.2), memuat indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Cirebon periode tahun 2019-2024. IKU daerah dicapai dengan dukungan pencapaian kinerja perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pencapaian kinerja Perangkat Daerah digambarkan menggunakan IKU perangkat daerah yang memuat indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran dari perencanaan strategis (Renstra) perangkat daerah. IKU perangkat daerah dicapai dengan dukungan pencapaian kinerja program. Pencapaian kinerja program digambarkan menggunakan indikator kinerja hasil (outcome) sebagaimana disajikan pada tabel 8.4. Pemilahan IKU daerah, IKU perangkat daerah dan Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah.

**Tabel 8.1**  
**Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon**  
**Tahun 2019-2024**

| No. | Indikator                  | Satuan | Kondisi Awal | Realisasi | Proyeksi |       |       |       | Kondisi Akhir |
|-----|----------------------------|--------|--------------|-----------|----------|-------|-------|-------|---------------|
|     |                            |        | 2019         |           | 2021     | 2022  | 2023  | 2024  |               |
| 1.  | Indeks Pembangunan Manusia | Poin   | 68,69        | 68,75     | 69,33    | 69,92 | 70,53 | 71,15 | 71,15         |
| 2.  | Angka Kemiskinan           | Persen | 9,94         | 11,24     | 11,14    | 11,04 | 10,94 | 10,84 | 10,84         |



| No. | Indikator              | Satuan      | Kondisi Awal | Realisasi | Proyeksi |       |       |       | Kondisi Akhir |
|-----|------------------------|-------------|--------------|-----------|----------|-------|-------|-------|---------------|
|     |                        |             | 2019         |           | 2021     | 2022  | 2023  | 2024  |               |
| 3.  | Angka Pengangguran     | Persen      | 10,28        | 11,52     | 11,12    | 10,70 | 10,30 | 9,90  | 9,90          |
| 4.  | Pertumbuhan Ekonomi    | Persen      | 4,68         | -1,08     | 4,38     | 4,61  | 4,84  | 5,08  | 5,08          |
| 5.  | Pendapatan Perkapita   | Juta Rupiah | 22,41        | 22,43     | 23,25    | 24,95 | 26,78 | 28,74 | 28,74         |
| 6.  | Ketimpangan Pendapatan | Poin        | 0,344        | 0,338     | 0,336    | 0,334 | 0,332 | 0,330 | 0,330         |

Sumber: Diolah oleh Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, 2021

Penyesuaian target indikator makro dilakukan mulai Tahun 2021 sampai dengan 2024 sebagai respon terhadap perkembangan keadaan akibat COVID-19. Selain itu, ditambahkan indikator Pendapatan Per Kapita (PDRB ADHB Per Kapita) sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020.

Indikator kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut IKU pemerintah daerah, memuat indikator kinerja sasaran RPJMD sebagai tolok ukur penilaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2019-2024. IKU pemerintah daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU pemerintah daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah lainnya dalam pencapaian indikator kinerja sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Cirebon. Target IKU pemerintah daerah mulai Tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami penyesuaian dengan mempertimbangkan dampak dari Pandemi COVID-19. IKU pemerintah daerah disajikan pada Tabel 8.2.



**Tabel 8.2**

**Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024**

| No. | Indikator Kinerja Utama   | Satuan                    | Kondisi Awal | Realisasi 2020 | Target |        |        |        | Kondisi Akhir |
|-----|---|---------------------------|--------------|----------------|--------|--------|--------|--------|---------------|
|     |   |                           |              |                | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |               |
| 1.  | Persentase penambahan budaya daerah yang dilestarikan   | Persen                    | 81           | 82             | 83     | 84     | 85     | 86     | 86            |
| 2.  | Jumlah kelompok/komunitas kebudayaan yang aktif   | Kelompok                  | 255          | 232            | 257    | 258    | 259    | 260    | 260           |
| 3.  | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  | Poin                      | 68,69        | 68,75          | 69,93  | 69,92  | 70,53  | 71,15  | 71,15         |
| 4.  | Rata-rata Lama Sekolah (RLS)  | Tahun                     | 6,71         | 6,92           | 7,05   | 7,18   | 7,31   | 7,44   | 7,44          |
| 5.  | Harapan Lama Sekolah (HLS)  | Tahun                     | 12,24        | 12,25          | 12,34  | 12,44  | 12,53  | 12,63  | 12,63         |
| 6.  | Umur Harapan Hidup (UHH)  | Tahun                     | 71,82        | 71,99          | 72,11  | 72,24  | 72,36  | 72,48  | 72,48         |
| 7.  | Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan   | Persen                    | 9,94         | 11,24          | 11,14  | 11,04  | 10,94  | 10,84  | 10,84         |
| 8.  | Tingkat pengangguran terbuka  | Prosen                    | 10,28        | 11,52          | 11,12  | 10,70  | 10,30  | 9,90   | 9,90          |
| 9.  | PDRB Per Kapita   | Juta Rp                   | 22,41        | 22,43          | 23,25  | 24,95  | 26,78  | 28,74  | 28,74         |
| 10. | Persentase Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani di Kabupaten Cirebon | Persen                    | 67,06        | n.a.           | 70,17  | 70,94  | 71,72  | 72,50  | 72,50         |
| 11. | Rasio Kesempatan Kerja  | Persen                    | 58,66        | 56,44          | 57,22  | 58,03  | 58,83  | 59,64  | 59,64         |
| 12. | Indeks Kerukunan Umat Beragama  | Poin                      | 75,00        | 78,00          | 81,00  | 84,00  | 87,00  | 90,00  | 90,00         |
| 13. | Prosentase Penyelesaian Friksi/Gesekan antar Umat Beragama                                    | Persen                    | n.a          | 78             | 80     | 81     | 82     | 83     | 83            |
| 14. | Laju Pertumbuhan Ekonomi  | Prosen                    | 4,68         | -1,08          | 4,38   | 4,61   | 4,84   | 5,08   | 5,08          |
| 15. | Indeks Gini   | Poin                      | 0,344        | 0,338          | 0,336  | 0,334  | 0,332  | 0,330  | 0,330         |
| 16. | Pengeluaran Perkapita Disesuaikan   | Ribu Rupiah/Kapita /Tahun | 10.670       | 10.342         | 10.606 | 10.891 | 11.198 | 11.529 | 11.529        |
| 17. | Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                                    | Prosen                    | -1,05        | 1,76           | 1,86   | 2,08   | 2,31   | 2,54   | 2,54          |





| No. | Indikator Kinerja Utama   | Satuan | Kondisi Awal | Realisasi 2020 | Target |        |        |        | Kondisi Akhir |
|-----|---|--------|--------------|----------------|--------|--------|--------|--------|---------------|
|     |   |        |              |                | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |               |
| 18. | Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan   | Prosen | 2,82         | -0,42          | 3,08   | 3,74   | 4,41   | 5,07   | 5,07          |
| 19. | Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | Prosen | 4,62         | -7,03          | 5      | 5,25   | 5,5    | 5,75   | 5,75          |
| 20. | Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                          | Prosen | 5,47         | -9,50          | 4,33   | 4,63   | 4,93   | 5,23   | 5,23          |
| 21. | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi   | Poin   | 91,50        | 93             | 93,10  | 93,20  | 93,30  | 93,40  | 93,40         |
| 22. | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan   | Poin   | 71,17        | 71,44          | 71,71  | 71,98  | 72,25  | 72,52  | 72,52         |
| 23. | Indeks pembangunan infrastruktur wilayah yang mantap (baik)                           | Poin   | 77,99        | 79,89          | 79,46  | 80,20  | 80,93  | 81,67  | 81,67         |
| 24. | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (IKLH)   | Poin   | 52,51        | 52,29          | 52,67  | 52,76  | 52,84  | 52,92  | 52,92         |
| 25. | Indeks Reformasi Birokrasi  | Indeks | 50,58        | 55,00          | 60,00  | 65,00  | 70,00  | 75,00  | 75,00         |
| 26. | Indeks kepuasan masyarakat (IKM)  | Poin   | 3,25         | 3,27           | 3,65   | 3,85   | 3,95   | 4,00   | 4,00          |
| 27. | Indeks kemandirian fiskal daerah  | Prosen | 15,71        | 16,24          | 16,79  | 17,36  | 17,95  | 18,56  | 18,56         |
| 28. | Nilai SAKIP   | Poin   | 68,00        | 70,00          | 73,00  | 76,00  | 79,00  | 80,00  | 80,00         |
| 29. | Opini BPK terhadap LKPD   | WTP    | WTP          | WTP            | WTP    | WTP    | WTP    | WTP    | WTP           |
| 30. | Indeks <i>Monitoring Center for Prevention</i> (MCP)                                  | Poin   | 60,00        | 65,00          | 70,00  | 75,00  | 80,00  | 85,00  | 85,00         |
| 31. | Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)                                 | Poin   | 2,63         | 2,78           | 2,93   | 3,08   | 3,23   | 3,38   | 3,38          |
| 32. | Jumlah desa mandiri   | Desa   | 2            | 5              | 28     | 49     | 70     | 91     | 91            |
| 33. | Indeks Ketertiban dan Ketenteraman  | Persen | n.a          | 53,05          | 56,09  | 64,12  | 70,59  | 77,50  | 77,50         |
| 34. | Jumlah pelanggaran Perda  | Kasus  | n.a          | 403            | 398    | 393    | 338    | 383    | 403           |
| 35. | Indek resiko bencana  | Poin   | 165,44       | n.a            | 154,72 | 149,36 | 144,00 | 138,64 | 138,64        |

Sumber: Hasil analisis Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, 2021

Selanjutnya, indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang disebut juga dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu IKK tingkat dampak (impact) dan IKK tingkat hasil (outcome). IKK tingkat dampak (impact) memuat IKU pemerintah daerah maupun IKU perangkat daerah. IKK tingkat dampak (impact) merupakan indikator kinerja sasaran RPJMD yang juga merupakan IKU pemerintah daerah, serta indikator kinerja sasaran seluruh Renstra Perangkat Daerah yang juga merupakan IKU perangkat daerah.

Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (dampak/impact) disajikan pada tabel 8.3. Sedangkan Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Program (Outcome) disajikan pada tabel 8.4.

Penetapan indikator kinerja mulai dari IKU pemerintah daerah, IKU perangkat daerah, dan indikator kinerja program secara berjenjang sesuai kinerja yang akan dihasilkan/dicapai, memberikan gambaran arsitektur kinerja pembangunan jangka menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Arsitektur kinerja ini dapat juga disebut cascading yang merupakan penjabaran dan penyelarasan indikator kinerja mulai dari tingkat yang paling tinggi (impact) sampai paling rendah (output).

Menyikapi perkembangan keadaan khususnya setelah pandemi COVID-19 dan beberapa kebijakan nasional terkait percepatan penanganannya serta kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja pembangunan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon. Penyesuaian ini menyusul penyesuaian target pembangunan RKPD Tahun 2021 dan Perubahan RKPD Tahun 2020 yang terlebih dahulu telah dilakukan masing-masing berdasarkan



Dalam Perubahan RPJMD ini dilakukan penataan ulang indikator kinerja beserta target-targetnya meliputi indikator makro daerah, IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu IKK tingkat dampak (impact) dan IKK tingkat hasil (outcome). Realisasi dan proyeksi indikator kinerja disajikan pada tabel-tabel di bawah.

**Tabel 8.3**

**Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran  
(dampak/impact) Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024**

| No | Aspek/ Fokus/ Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Rumus  | Satuan         | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada<br>Awal<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi | Target Capaian Setiap Tahun- |              |              |              | Kondisi<br>Kinerja<br>pada<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Sumber Data |
|----|---|--|----------------|--|-----------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|-------------|
|    |   |  |                |  | 2020      | 2021                         | 2022         | 2023         | 2024         |   |             |
| 1  | 2   | 3  | 4              | 5  | 6         | 7                            | 8            | 9            | 10           | 11  | 12          |
|    | ASPEK KESEJAHTERAAN<br>MASYARAKAT                                       |  |                |  |           |                              |              |              |              |   |             |
|    | FOKUS KESEJAHTERAAN<br>DAN PEMERATAAN<br>EKONOMI                        |  |                |  |           |                              |              |              |              |   |             |
| 1  | Pertumbuhan PDRB Atas<br>Harga Konstan                                  | (PDRB pada tahun<br>berkenaan – PDRB<br>tahun sebelumnya)/<br>PDRB tahun sebelumnya<br>X 100%                                    | Persen         | 4,68   | -1,08     | 4,38                         | 4,61         | 4,84         | 5,08         | 5,08  | BPS         |
| 2  | Laju inflasi  | Perubahan nilai inflasi<br>dari nilai tahun<br>sebelumnya  | Persen         | 3,19   | 2,7 – 3,5 | 2,7 –<br>3,5                 | 2,7 –<br>3,5 | 2,7 –<br>3,5 | 2,7 –<br>3,5 | 2,7 –<br>3,5  | BPS         |
| 3  | PDRB per kapita   |  |                |  |           |                              |              |              |              |   |             |
|    | a. PDRB per kapita ADHB   | PDRB ADHB/ jumlah<br>Penduduk  | Juta<br>Rupiah | 22,41  | 22,43     | 23,25                        | 24,95        | 26,78        | 28,74        | 28,74   | BPS         |
|    | b. PDRB per kapita ADHK   | PDRB ADHK/ jumlah<br>Penduduk  | Juta<br>Rupiah | 15.37  | 15,82     | 16,37                        | 16,93        | 17,49        | 18,04        | 18,04   | BPS         |
| 4  | Indeks Gini   | Tingkat kesenjangan<br>pendapatan yang<br>dihitung melalui variabel<br>total pendapatan dan<br>total pengeluaran per<br>penduduk | Poin           | 0,344  | 0,338     | 0,336                        | 0,334        | 0,332        | 0,330        | 0,330   | BPS         |



| No | Aspek/ Fokus/ Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Rumus  | Satuan | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada<br>Awal<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi | Target Capaian Setiap Tahun- |       |       |       | Kondisi<br>Kinerja<br>pada<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Sumber Data |
|----|---|--|--------|--|-----------|------------------------------|-------|-------|-------|---|-------------|
|    |   |  |        |  | 2020      | 2021                         | 2022  | 2023  | 2024  |   |             |
| 1  | 2   | 3  | 4      | 5  | 6         | 7                            | 8     | 9     | 10    | 11  | 12          |
| 5  | Prosentase penduduk miskin  | Jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan/total jumlah penduduk X 100%                                    | Persen | 9,94   | 11,24     | 11,14                        | 11,04 | 10,94 | 10,84 | 10,84   | BPS         |
| 6  | Indeks keparahan kemiskinan   | Ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin   | Persen | 0,26   | 0,24      | 0,51                         | 0,51  | 0,5   | 0,5   | 0,5   | BPS         |
| 7  | Indeks kedalaman kemiskinan   | Rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan  | Persen | 1,39   | 1,30      | 2,18                         | 2,17  | 2,16  | 2,15  | 2,15  | BPS         |
|    | FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL  |  |        |  |           |                              |       |       |       |   |             |
| 8  | IPM   | (Indeks Kesehatanx Indeks Pendidkanx Indeks Pengeluaran) <sup>1/3</sup> x 100                            | Poin   | 68,69  | 68,75     | 69,93                        | 69,92 | 70,53 | 71,15 | 71,15   | BPS         |
| 9  | Angka Melek Huruf   | Jumlah penduduk usia di atas 15 tahun yang bisa baca tulis/ jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas x 100% | Persen | 95,53  | 96        | 96,58                        | 97,16 | 97,74 | 98,32 | 98,32   | BPS         |



| No | Aspek/ Fokus/ Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Rumus   | Satuan | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada<br>Awal<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi | Target Capaian Setiap Tahun- |       |       |       |       | Kondisi<br>Kinerja<br>pada<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Sumber Data |
|----|---|---|--------|--|-----------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|---|-------------|
|    |   |   |        |  | 2020      | 2021                         | 2022  | 2023  | 2024  |       |   |             |
| 1  | 2   | 3   | 4      | 5  | 6         | 7                            | 8     | 9     | 10    | 11    | 12  |             |
| 10 | Angka rata-rata Lama Sekolah  | Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal yang dihitung melalui variabel partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang pernah diduduki, kelas yang sedang dijalani, dan jenjang pendidikan yang ditamatkan | Tahun  | 6,71   | 6,92      | 7,05                         | 7,18  | 7,31  | 7,44  | 7,44  | Disdik  |             |
| 11 | Umur Harapan Hidup (UHH)  | Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh sejak lahir yang dihitung melalui variabel anak lahir hidup dan anak masih hidup   | Tahun  | 71,82  | 71,99     | 72,11                        | 72,24 | 72,36 | 72,48 | 72,48 | Dinkes  |             |
| 12 | Persentase Balita Gizi Buruk  | Jumlah balita gizi buruk / jumlah balita X 100%   | %      | 0,17   | 0,16      | 0,15                         | 0,14  | 0,13  | 0,12  | 0,12  | Dinkes  |             |
| 13 | Prevalensi balita gizi kurang   | Jumlah balita gizi kurang / jumlah balita X 100%  | %      | 7,5  | 7,3       | 7                            | 6,8   | 6,5   | 6,2   | 6,2   | Dinkes  |             |
| 14 | Cakupan desa siaga aktif  | Jumlah desa siaga aktif / jumlah desa siaga yang dibentuk X 100%  | %      | 100  | 100       | 100                          | 100   | 100   | 100   | 100   | Dinkes  |             |
| 15 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja                                      | Jumlah angkatan kerja / jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun) X 100%   | %      | 65,38  | 63,79     | 62,62                        | 63,99 | 63,99 | 65,36 | 65,36 | Disnakertran  |             |



| No | Aspek/ Fokus/ Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Rumus  | Satuan | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada<br>Awal<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi      | Target Capaian Setiap Tahun- |                |                |                | Kondisi<br>Kinerja<br>pada<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Sumber Data                |
|----|---|--|--------|--|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|---|----------------------------|
|    |   |  |        |  | 2020           | 2021                         | 2022           | 2023           | 2024           |   |                            |
| 1  | 2   | 3  | 4      | 5  | 6              | 7                            | 8              | 9              | 10             | 11  | 12                         |
| 16 | Tingkat Pengangguran<br>Terbuka   | Jumlah angkatan kerja<br>yang tidak<br>bekerja/jumlah<br>angkatan kerja X 100%           | Prosen | 10,28  | 11,52          | 11,12                        | 10,70          | 10,30          | 9,90           | 9,90  | Disnakertran               |
| 17 | Rasio penduduk yang<br>bekerja  | Penduduk yang bekerja/<br>angkatan kerja X 100%  | %      | 89,44  | 90,89          | 91,53                        | 92,13          | 92,69          | 93,21          | 93,21   | Disnakertran               |
| 18 | Laju pertumbuhan PDRB<br>per Kapita ADHK 2010                           | PDRB ADHK/Jumlah<br>penduduk X 100%  | %      | 7,37   | 4,20 –<br>4,67 | 4,20 –<br>4,75               | 4,20 –<br>4,82 | 4,20 –<br>4,90 | 4,20 –<br>4,97 | 4,20 –<br>4,97  | BPS                        |
| 19 | Rasio kesempatan kerja<br>terhadap penduduk usia 15<br>tahun ke atas    | Kesempatan<br>kerja/jumlah penduduk<br>usia kerja (15-64 tahun)<br>X 100%                | Persen | 58,66  | 56,44          | 57,22                        | 58,03          | 58,83          | 59,64          | 59,64   | Disnakertrans              |
| 20 | Indeks Kepuasan<br>Masyarakat   | Total dari nilai persepsi<br>per unsur / total unsur<br>yang terisi x nilai<br>penimbang | Poin   | 3,25   | 3,27           | 3,65                         | 3,85           | 3,95           | 4,00           | 4,00  | Bag<br>Organisasi<br>SETDA |
| 21 | Indeks Kemandirian Fiskal   | Jumlah PAD/Jumlah<br>Pendapatan Daerah X<br>100%   | Prosen | 15,71  | 16,24          | 16,79                        | 17,36          | 17,95          | 18,56          | 18,56   | BAPENDA<br>BKAD            |
| 22 | Opini BPK   | Penilaian opini yang<br>dikeluarkan oleh BPK<br>terhadap laporan<br>keuangan daerah      | Indeks | WTP  | WTP            | WTP                          | WTP            | WTP            | WTP            | WTP   | BKAD                       |
| 23 | Pencapaian skor PPH<br>Ketersediaan                                     | Ketersediaan energi<br>masing-masing<br>kelompok pangan/Angka<br>Kecukupan Energi X 100  | Poin   | 71,17  | 71,44          | 71,71                        | 71,98          | 72,25          | 72,52          | 72,52   | Dishanpang                 |
| 24 | Pencapaian skor PPH<br>Konsumsi   | Konsumsi energi<br>masing-masing<br>kelompok pangan/Angka<br>Kecukupan Energi X 100      | Poin   | 91,50  | 93             | 93,10                        | 93,20          | 93,30          | 93,40          | 93,40   | Dishanpang                 |



| No | Aspek/ Fokus/ Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Rumus   | Satuan | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada<br>Awal<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi | Target Capaian Setiap Tahun- |         |         |         |         | Kondisi<br>Kinerja<br>pada<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Sumber Data |
|----|---|---|--------|--|-----------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---|-------------|
|    |   |   |        |  | 2020      | 2021                         | 2022    | 2023    | 2024    |         |   |             |
| 1  | 2   | 3   | 4      | 5  | 6         | 7                            | 8       | 9       | 10      | 11      | 12  |             |
| 25 | Penguatan cadangan pangan per 1.440 ton                                 | Jumlah cadangan pangan kabupaten/ 1.440 ton X 100%                                      | %      | 90,71  | 182       | 45,58                        | 66,67   | 84,72   | 104,1   | 104,1   | Dishanpang  |             |
| 26 | Daerah rawan pangan yang diintervensi                                   | Jumlah daerah rawan pangan yang diintervensi/ jumlah seluruh daerah rawan pangan X 100% | %      | 26,01  | 20        | 20                           | 20      | 2 0     | 20      | 100     | Dishanpang  |             |
| 27 | Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB                   | Jumlah PDRB sektor pertanian, perkebunan/ Jumlah PDRB X 100%                            | %      | 11,27  | 12,97     | 13,02                        | 13,07   | 13,12   | 13,17   | 13,17   | BPS   |             |
| 28 | Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB                    | Jumlah PDRB Sektor Pertanian (Palawija)/ Jumlah PDRB X 100%                             | %      | 45,83  | 48,75     | 48,77                        | 48,79   | 48,81   | 48,83   | 48,83   | BPS   |             |
| 29 | Produksi sektor pertanian   | Jumlah produksi komoditas pertanian ( ton )   | Ton    | 420.707  | 465.237   | 469.133                      | 473.068 | 477.022 | 481.066 | 481.066 | Distan  |             |
| 30 | Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB                              | Jumlah PDRB sektor perkebunan/ Jumlah PDRB X 100%                                       | %      | 12,19  | 12,53     | 12,54                        | 12,55   | 12,56   | 12,57   | 12,57   | BPS   |             |
| 31 | Produksi sektor perkebunan  | Jumlah produksi komoditas perkebunan dalam ton  | Ton    | 19.262   | 24.352    | 24.401                       | 24.450  | 24.498  | 24.547  | 24.547  | Distan  |             |
| 32 | Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB                       | Jumlah produksi padi hasil kelompok tani/ jumlah total produksi padi X 100%             | %      | 100  | 100       | 100                          | 100     | 100     | 100     | 100     | Distan  |             |
| 33 | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB                              | Jumlah PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan                                       | %      | 3,54**   | 3,6       | 3,63                         | 3,66    | 3,69    | 3,72    | 3,72    | BPS   |             |





| No | Aspek/ Fokus/ Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Rumus   | Satuan      | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada<br>Awal<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi | Target Capaian Setiap Tahun- |        |        |        |        | Kondisi<br>Kinerja<br>pada<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Sumber Data |
|----|---|---|-------------|--|-----------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|---|-------------|
|    |   |   |             |  | 2020      | 2021                         | 2022   | 2023   | 2024   |        |   |             |
| 1  | 2   | 3   | 4           | 5  | 6         | 7                            | 8      | 9      | 10     | 11     | 12  |             |
|    |   | Minum/Jumlah PDRB X 100%  |             |  |           |                              |        |        |        |        |   |             |
| 34 | Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB                  | Jumlah PDRB sektor kelautan dan perikanan/ Jumlah PDRB X 100%   | %           | 2,68**   | 2,74      | 2,77                         | 2,8    | 2,83   | 2,86   | 2,86   | BPS   |             |
| 35 | Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB                             | Jumlah PDRB sektor perdagangan/ Jumlah PDRB X 100%  | %           | 23**   | 20        | 20                           | 20     | 20     | 20     | 20     | BPS   |             |
| 36 | Kontribusi sektor industri terhadap PDRB                                | Jumlah PDRB sektor industri/ Jumlah PDRB X 100%   | %           | 20**   | 20        | 20                           | 20     | 20     | 20     | 20     | BPS   |             |
| 37 | Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri          | Jumlah PDRB sektor industri rumah tangga/ Jumlah PDRB X 100%  | %           | 7**  | 7         | 7                            | 7      | 7      | 7      | 7      | BPS   |             |
| 38 | Pertumbuhan industri  | (Jumlah industri tahun berkenaan – Jumlah industri tahun sebelumnya)/ Jumlah industri tahun sebelumnya X 100% | %           | 2,19   | 1,15      | 1,1                          | 1,12   | 1,17   | 1,22   | 1,22   | Disdagin  |             |
|    | ASPEK DAYA SAING DAERAH   |   |             |  |           |                              |        |        |        |        |   |             |
|    | FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH  |   |             |  |           |                              |        |        |        |        |   |             |
| 1  | Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per tahun                  | Total pengeluaran RT/ Jumlah RT   | Ribu Rupiah | 10.212**   | 10.812    | 11.112                       | 11.412 | 11.712 | 12.012 | 12.012 | BPS   |             |
| 2  | Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita                   | Total pengeluaran RT non pangan/ Total Pengeluaran X 100%   | %           | 41,62  | 46,27     | 47,27                        | 48,27  | 49,27  | 50,27  | 50,27  | BPS   |             |



| No | Aspek/ Fokus/ Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Rumus   | Satuan | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada<br>Awal<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi | Target Capaian Setiap Tahun- |       |       |       | Kondisi<br>Kinerja<br>pada<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Sumber Data  |
|----|---|---|--------|--|-----------|------------------------------|-------|-------|-------|---|--------------|
|    |   |   |        |  | 2020      | 2021                         | 2022  | 2023  | 2024  |   |              |
| 1  | 2   | 3   | 4      | 5  | 6         | 7                            | 8     | 9     | 10    | 11  | 12           |
| 3  | Rasio ekspor + impor<br>terhadap PDB                                    | (Jumlah ekspor daerah+impor daerah) /<br>PDB                | %      | 1,14   | 1,14      | 1,14                         | 1,15  | 1,15  | 1,16  | 1,16  | Disdagin     |
|    | <b>FOKUS FASILITAS<br/>WILAYAH/<br/>INFRASTRUKTUR</b>                   |   |        |  |           |                              |       |       |       |   |              |
| 4  | Ketaatan terhadap RTRW  | Realisasi RTRW/<br>Rencana Peruntukan X<br>100%             | %      | na   | 100       | 100                          | 100   | 100   | 100   | 100   | PUPR         |
| 5  | Jenis, kelas dan jumlah restoran  | Jumlah restoran berdasarkan jenis dan kelasnya              | Unit   | 2.015  | 2.370     | 2.725                        | 3.080 | 3.435 | 3.790 | 3.790   | Data Bapenda |
|    | a. Restoran   | Jumlah restoran   | Unit   | 30   | 31        | 32                           | 33    | 34    | 35    | 35  | Data Bapenda |
|    | b. Rumah Makan  | Jumlah rumah makan  | Unit   | 200  | 210       | 220                          | 230   | 240   | 250   | 250   | Data Bapenda |
|    | c. Cafe   | Jumlah cafe   | Unit   | 18   | 19        | 20                           | 21    | 22    | 23    | 23  | Data Bapenda |
|    | d. Kantin   | Jumlah kantin   | Unit   | 67   | 70        | 73                           | 76    | 79    | 82    | 82  | Data Bapenda |
|    | e. Katering   | Jumlah katering   | Unit   | 850  | 1.020     | 1.190                        | 1.360 | 1.530 | 1.700 | 1.700   | Data Bapenda |
|    | f. Jasa Boga  | Jumlah jasa boga  | Unit   | 850  | 1.020     | 1.190                        | 1.360 | 1.530 | 1.700 | 1.700   | Data Bapenda |
| 6  | Jenis, kelas dan jumlah penginapan/ hotel berdasarkan data pajak:       | Jumlah penginapan atau hotel berdasarkan jenis dan kelasnya | Unit   | 78   | 88        | 88                           | 88    | 88    | 88    | 88  | Data Bapenda |
|    | a. Hotel Bintang Empat  | Jumlah hotel bintang empat                                  | Unit   | 1  | 1         | 1                            | 1     | 1     | 1     | 1   | Data Bapenda |
|    | b. Hotel Bintang Tiga   | Jumlah hotel bintang tiga                                   | Unit   | 3  | 4         | 4                            | 4     | 4     | 4     | 4   | Data Bapenda |
|    | c. Hotel Bintang Dua  | Jumlah hotel bintang dua                                    | Unit   | 2  | 2         | 2                            | 2     | 2     | 2     | 2   | Data Bapenda |
|    | d. Hotel Melati Tiga  | Jumlah hotel melati tiga                                    | Unit   | 11   | 11        | 11                           | 11    | 11    | 11    | 11  | Data Bapenda |
|    | e. Hotel Melati Dua   | Jumlah hotel melati dua                                     | Unit   | 1  | 1         | 1                            | 1     | 1     | 1     | 1   | Data Bapenda |



| No | Aspek/ Fokus/ Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Rumus   | Satuan              | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada<br>Awal<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi | Target Capaian Setiap Tahun- |        |        |        |        | Kondisi<br>Kinerja<br>pada<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Sumber Data |
|----|---|---|---------------------|--|-----------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|---|-------------|
|    |   |   |                     |  | 2020      | 2021                         | 2022   | 2023   | 2024   |        |   |             |
| 1  | 2   | 3   | 4                   | 5  | 6         | 7                            | 8      | 9      | 10     | 11     | 12  |             |
|    | f. Hotel Melati Satu  | Jumlah hotel melati satu  | Unit                | 5  | 5         | 5                            | 5      | 5      | 5      | 5      | Data Bapenda  |             |
|    | g. Losmen/ Rumah<br>Penginapan/Pesanggerahan                            | Jumlah losmen/rumah<br>penginapan/<br>pesanggerahan                             | Unit                | 55   | 64        | 64                           | 64     | 64     | 64     | 64     | Data Bapenda  |             |
| 7  | RT yang menggunakan air<br>bersih                                       | Jumlah RT yang<br>berakses menggunakan<br>air bersih/ jumlah total<br>RT X 100% | %                   | 74,84  | 69,6      | 70,59                        | 71,59  | 72,58  | 73,15  | 73,15  | DPKPP   |             |
|    | <b>FOKUS IKLIM<br/>BERINVESTASI</b>                                     |   |                     |  |           |                              |        |        |        |        |   |             |
| 8  | Angka kriminalitas  | Jumlah kasus<br>kriminalitas (kejahatan<br>seksual, penganiyaan,<br>pencurian)  | kasus               | 287  | 211       | 197                          | 142    | 101    | 55     | 55     | SatpolPP  |             |
| 9  | Angka kriminalitas yang<br>tertangani                                   | Jumlah tindak kriminal<br>tertangani/ Jumlah<br>penduduk X 10.000               | /10.000<br>penduduk | 1,33   | 0,94      | 0,87                         | 0,61   | 0,43   | 0,23   | 0,23   | Satpol PP   |             |
| 10 | Jumlah demonstrasi  | Jumlah kejadian<br>demonstrasi  | kali                | 30   | 25        | 25                           | 25     | 20     | 20     | 20     | Kesbangpol  |             |
| 11 | Lama proses perijinan   | Waktu yang dibutuhkan<br>utk memproses perijinan                                | hari                | 5  | 5         | 5                            | 5      | 5      | 5      | 5      | DPMPTSP   |             |
| 12 | Realisasi nilai pajak daerah  | Jumlah realisasi nilai<br>pajak daerah  | Milyar<br>Rupiah    | 190  | 239,86    | 275,84                       | 317,21 | 364,77 | 419,48 | 419,48 | BAPPENDA  |             |
|    | a. Pajak Hotel  | Jumlah realisasi nilai<br>pajak hotel   | Milyar<br>Rupiah    | 4,725  | 6,05      | 6,959                        | 8,003  | 9,203  | 10,584 | 10,584 | BAPPENDA  |             |
|    | b. Pajak Restoran   | Jumlah realisasi nilai<br>pajak restoran  | Milyar<br>Rupiah    | 12,625   | 16,675    | 19,176                       | 22,053 | 25,361 | 29,165 | 29,165 | BAPPENDA  |             |
|    | c. Pajak Hiburan  | Jumlah realisasi nilai<br>pajak hiburan   | Milyar<br>Rupiah    | 1,075  | 1,536     | 1,767                        | 2,032  | 2,337  | 2,687  | 2,687  | BAPPENDA  |             |
|    | a. Pajak Reklame  | Jumlah realisasi nilai<br>pajak reklame   | Milyar<br>Rupiah    | 4,25   | 4,5       | 5,175                        | 5,951  | 6,844  | 7,871  | 7,871  | BAPPENDA  |             |



| No | Aspek/ Fokus/ Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Rumus   | Satuan           | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada<br>Awal<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi | Target Capaian Setiap Tahun- |        |         |         | Kondisi<br>Kinerja<br>pada<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Sumber Data   |
|----|---|---|------------------|--|-----------|------------------------------|--------|---------|---------|---|---------------|
|    |   |   |                  |  | 2020      | 2021                         | 2022   | 2023    | 2024    |   |               |
| 1  | 2   | 3   | 4                | 5  | 6         | 7                            | 8      | 9       | 10      | 11  | 12            |
|    | b. Pajak Penerangan Jalan   | Jumlah realisasi nilai pajak penerangan jalan                           | Milyar Rupiah    | 66,4   | 73,653    | 84,7                         | 97,405 | 112,819 | 128,819 | 128,819   | DISHUB        |
|    | c. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan                                 | Jumlah realisasi nilai pajak mineral bukan logam dan batuan             | Milyar Rupiah    | 10,525   | 12,726    | 14,635                       | 16,83  | 19,355  | 22,258  | 22,258  | BAPPENDA      |
|    | d. Pajak Parkir   | Jumlah realisasi nilai pajak parkir                                     | Milyar Rupiah    | 0,4  | 0,69      | 0,794                        | 0,913  | 1,049   | 1,207   | 1,207   | DISHUB        |
|    | e. Pajak Air Bawah Tanah  | Jumlah realisasi nilai pajak air bawah tanah                            | Milyar Rupiah    | 0,725  | 0,998     | 1,148                        | 1,32   | 1,518   | 1,746   | 1,746   | BAPPENDA      |
|    | f. Pajak Sarang Burung Walet  | Jumlah realisasi nilai pajak sarang burung walet                        | Milyar Rupiah    | 0,06   | 0,06      | 0,06                         | 0,06   | 0,06    | 0,06    | 0,06  | BAPPENDA      |
|    | g. Pajak Bumi dan Bangunan  | Jumlah realisasi nilai pajak bumi dan bangunan                          | Milyar Rupiah    | 38,5   | 49,895    | 57,379                       | 65,986 | 75,884  | 87,267  | 87,267  | BAPPENDA      |
|    | h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan                            | Jumlah realisasi nilai pajak BPHATB                                     | Milyar Rupiah    | 50,715   | 73,08     | 84,042                       | 96,648 | 111,146 | 127,817 | 127,817   | BAPPENDA      |
| 13 | Jumlah perda yang mendukung iklim usaha                                 | Jumlah perda yang masih relevan dan mendukung iklim usaha dan investasi | Perda            | 13   | 13        | 13                           | 13     | 13      | 13      | 13  | DPMPPTS       |
| 14 | Persentase desa mandiri terhadap total desa                             | Jumlah desa mandiri/Jumlah total desa X 100%                            | Desa             | 2  | 5         | 28                           | 49     | 70      | 91      | 91  | DPMD          |
|    | FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA   |   |                  |  |           |                              |        |         |         |   |               |
| 15 | Rasio lulusan S1/S2/S3  | Jumlah lulusan S1+S2+S3/ Jumlah penduduk X 10.000                       | /10.000 penduduk | 241  | 406       | 528                          | 686    | 892     | 1.160   | 1.160   | Disnakertrans |



| No | Aspek/ Fokus/ Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Rumus   | Satuan | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada<br>Awal<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi | Target Capaian Setiap Tahun- |       |       |       | Kondisi<br>Kinerja<br>pada<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Sumber Data |
|----|---|---|--------|--|-----------|------------------------------|-------|-------|-------|---|-------------|
|    |   |   |        |  | 2020      | 2021                         | 2022  | 2023  | 2024  |   |             |
| 1  | 2   | 3   | 4      | 5  | 6         | 7                            | 8     | 9     | 10    | 11  | 12          |
| 16 | Rasio ketergantungan  | Jumlah penduduk non produktif (usia < 15 tahun + usia > 65 tahun) / Jumlah penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) X 100% | %      | 47,19  | 46,73     | 46,5                         | 46,27 | 46,04 | 45,81 | 45,81   | BPS         |

Sumber: Hasil analisis Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, 2021



**Tabel 8.4**

**Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Program (Outcome)  
Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024**

| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM   | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                                       | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |       |       |       |       | Kondisi<br>Akhir | SKPD             |
|----------|--|--|-----------------|---------------|-------|-------|-------|-------|------------------|------------------|
|          |  |  |                 | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |                  |                  |
| 1        | 2  | 3  | 4               | 5             | 6     | 7     | 8     | 9     | 10               | 11               |
|          | <b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>  |  |                 |               |       |       |       |       |                  |                  |
| 1,       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |  |                 |               |       |       |       |       |                  |                  |
| 1.01.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |  |                 |               |       |       |       |       |                  |                  |
| 1.01.02. | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN   | Angka partisipasi kasar  | 67              | 68            | 68,41 | 68,82 | 69,23 | 69,65 | 69,65            | DINAS PENDIDIKAN |
|          |  | Angka partisipasi kasar SD   | 109             | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | DINAS PENDIDIKAN |
|          |  | Peningkatan Persentase Masyarakat Melek Aksara                               | 95,55           | 96            | 96,58 | 97,16 | 97,74 | 98,32 | 98,32            | DINAS PENDIDIKAN |
|          |  | Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV jenjang SD                 | 96              | 97            | 97,6  | 98,2  | 98,8  | 99,3  | 99,3             | DINAS PENDIDIKAN |
|          |  | Angka Melek Huruf Al Qur'an jenjang SD                                       | 76              | 76            | 76,46 | 76,91 | 77,38 | 77,84 | 77,84            | DINAS PENDIDIKAN |
|          |  | Angka Melek Huruf Al Qur'an SMP  | 55,7            | 59,5          | 63,3  | 67,1  | 70,9  | 74,7  | 74,7             | DINAS PENDIDIKAN |
|          |  | Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Kondisi Ruang Kelas Baik PAUD/TK | 60              | 60,35         | 60,72 | 61,09 | 61,45 | 61,82 | 61,82            | DINAS PENDIDIKAN |
|          |  | Peningkatan Capaian Angka Lulusan Kesetaraan Paket A setara SD               | 0               | 80            | 85    | 90    | 95    | 98    | 98               | DINAS PENDIDIKAN |
|          |  | Angka partisipasi kasar SMP  | 101,11          | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | DINAS PENDIDIKAN |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM   | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |       |       |       |        | Kondisi<br>Akhir | SKPD             |
|----------|--------------------------------|--|-----------------|---------------|-------|-------|-------|--------|------------------|------------------|
|          |                                |  |                 | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024   |                  |                  |
| 1        | 2                              | 3  | 4               | 5             | 6     | 7     | 8     | 9      | 10               | 11               |
|          |                                | Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Persentasi fasilitas yang dimiliki sekolah PAUD/TK | 0               | 50            | 55    | 60    | 65    | 70     | 70               | DINAS PENDIDIKAN |
|          |                                | Peningkatan Capaian Angka Kelulusan Warga Belajar Paket B setara SMP                           | 68,09           | 70            | 70,04 | 70,08 | 71,3  | 71,7   | 71,7             | DINAS PENDIDIKAN |
|          |                                | Standar Pelayanan Minimal  | 100             | 100           | 100   | 100   | 100   | 100    | 100              | DINAS PENDIDIKAN |
|          |                                | Peningkatan Angka Lulusan pada jenjang Kesetaraan Paket C Setara SMA                           | 79,68           | 80            | 80,5  | 81    | 81,4  | 81,9   | 81,9             | DINAS PENDIDIKAN |
|          |                                | Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/Mts   | 100             | 100           | 100   | 100   | 100   | 100    | 100              | DINAS PENDIDIKAN |
|          |                                | Angka Kelulusan (AL) SD/MI   | 100             | 100           | 100   | 100   | 100   | 100    | 100              | DINAS PENDIDIKAN |
|          |                                | Meningkatnya Angka Lulusan SMP   | 99,95           | 99,97         | 99,98 | 99,99 | 100   | 100,01 | 100,01           | DINAS PENDIDIKAN |
|          |                                | Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Kondisi Ruang Kelas Baik SD                        | 70              | 70,42         | 70,84 | 71,27 | 71,7  | 72,13  | 72,13            | DINAS PENDIDIKAN |
|          |                                | Ketersediaan sarana dan prasarana sekolah : Kondisi Keadaan Ruang Kelas Baik SMP               | 80              | 80,5          | 81    | 81,5  | 82    | 82,5   | 82,5             | DINAS PENDIDIKAN |
|          |                                | Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Persentasi fasilitas yang dimiliki sekolah SD      | 0               | 60            | 65    | 70    | 75    | 80     | 80               | DINAS PENDIDIKAN |
|          |                                | Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Persentasi fasilitas yang dimiliki sekolah SMP     | 0               | 60            | 65    | 70    | 75    | 80     | 80               | DINAS PENDIDIKAN |
|          |                                |  |                 |               |       |       |       |        |                  |                  |
| 1.01.03. | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | Angka partisipasi kasar  | 67              | 68            | 68,41 | 68,82 | 69,23 | 69,65  | 69,65            | DINAS PENDIDIKAN |
|          |                                | Peningkatan Capaian Angka Lulusan Kesetaraan Paket A setara SD                                 | 0               | 80            | 85    | 90    | 95    | 98     | 98               | DINAS PENDIDIKAN |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM   | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |       |       |       |       | Kondisi<br>Akhir | SKPD             |
|----------|--|--|-----------------|---------------|-------|-------|-------|-------|------------------|------------------|
|          |  |  |                 | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |                  |                  |
| 1        | 2  | 3  | 4               | 5             | 6     | 7     | 8     | 9     | 10               | 11               |
|          |  | Angka Kelulusan (AL)<br>SD/MI  | 100             | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | DINAS PENDIDIKAN |
|          |  | Ketersediaan Sarana dan<br>Prasarana Sekolah :<br>Persentasi fasilitas yang<br>dimiliki sekolah SD | 0               | 60            | 65    | 70    | 75    | 80    | 80               | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.04. | PROGRAM<br>PENDIDIK DAN<br>TENAGA<br>KEPENDIDIKAN  | Prosentase Guru yang<br>memiliki kualifikasi S1/D-<br>IV jenjang SD                                | 96              | 97            | 97,6  | 98,2  | 98,8  | 99,3  | 99,3             | DINAS PENDIDIKAN |
|          |  | Penerapan Manajemen<br>Berbasis Sekolah  | 100             | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.02.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>  |  |                 |               |       |       |       |       |                  |                  |
| 1.02.02. | PROGRAM<br>PEMENUHAN<br>UPAYA<br>KESEHATAN<br>PERORANGAN<br>DAN UPAYA<br>KESEHATAN<br>MASYARAKAT | Angka kematian ibu (AKI)   | 0               | 85            | 83,5  | 82    | 80,5  | 79    | 79               | DINAS KESEHATAN  |
|          |  | Angka kematian Bayi (AKB)  | 0               | 3,81          | 3,78  | 3,75  | 3,72  | 3,69  | 3,69             | DINAS KESEHATAN  |
|          |  | Tercapainya Universal<br>Health Coverage (UHC)   | 0               | 97            | 97,5  | 0     | 0     | 0     | 0                | DINAS KESEHATAN  |
|          |  | Meningkatnya Status Gizi<br>Balita   | 0               | 85            | 85    | 0     | 0     | 0     | 0                | DINAS KESEHATAN  |
|          |  | Meningkatnya pencegahan<br>dan pengendalian penyakit   | 0               | 87            | 90,5  | 0     | 0     | 0     | 0                | DINAS KESEHATAN  |
|          |  | Meningkatnya jumlah Desa<br>Open Defecation Free (ODF)   | 0               | 43,87         | 49,76 | 0     | 0     | 0     | 0                | DINAS KESEHATAN  |
| 1.02.03. | PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>KAPASITAS<br>SUMBER DAYA<br>MANUSIA<br>KESEHATAN                       | Rasio Tenaga Kesehatan<br>terhadap jumlah penduduk   | 0               | 0             | 1.665 | 1.665 | 1.665 | 1.665 | 1.665            | DINAS KESEHATAN  |
| 1.02.04. | PROGRAM<br>SEDIAAN<br>FARMASI, ALAT<br>KESEHATAN DAN   | Persentase TPM/TPP yang<br>memenuhi syarat<br>kesehatan  | 0               | 67            | 68    | 69    | 70    | 71    | 71               | DINAS KESEHATAN  |





| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM   | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |       |       |       |       | Kondisi<br>Akhir | SKPD  |
|----------|--|---|-----------------|---------------|-------|-------|-------|-------|------------------|---|
|          |  |   |                 | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |                  |   |
| 1        | 2  | 3   | 4               | 5             | 6     | 7     | 8     | 9     | 10               | 11  |
|          | MAKANAN<br>MINUMAN   |   |                 |               |       |       |       |       |                  |   |
| 1.02.05. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>BIDANG<br>KESEHATAN                       | Persentase Rumah tangga<br>ber PHBS   | 62,08           | 67            | 69    | 0     | 0     | 0     | 0                | DINAS KESEHATAN                               |
| 1.03.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN<br/>PENATAAN RUANG</b>            |   |                 |               |       |       |       |       |                  |   |
| 1.03.02. | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>SUMBER DAYA<br>AIR (SDA)                                 | Persentase jaringan irigasi<br>dalam kondisi baik                                   | 68,76           | 69,92         | 70,51 | 72,84 | 75,75 | 78,67 | 78,67            | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM DAN<br>PENATAAN RUANG |
|          |  | Persentase Berkurangnya<br>luasan genangan akibat<br>banjir                         | 3,86            | 3,66          | 3,47  | 3,28  | 3,09  | 2,89  | 2,89             | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM DAN<br>PENATAAN RUANG |
| 1.03.03. | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>DAN<br>PENGEMBANGAN<br>SISTEM<br>PENYEDIAAN AIR<br>MINUM | Persentase penduduk<br>berakses air minum   | 0               | 0             | 0     | 71,66 | 72,34 | 73    | 217              | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM DAN<br>PENATAAN RUANG |
| 1.03.05. | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>DAN<br>PENGEMBANGAN<br>SISTEM AIR<br>LIMBAH              | Persentase Rumah Tinggal<br>bersanitasi   | 0               | 0             | 0     | 81    | 81,04 | 81,06 | 243,1            | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM DAN<br>PENATAAN RUANG |
| 1.03.06. | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>DAN<br>PENGEMBANGAN<br>SISTEM<br>DRAINASE                | Persentase jalan yang<br>memiliki trotoar dan<br>drainase/saluran<br>pembuangan air | 4,21            | 4,33          | 4,45  | 4,57  | 4,57  | 4,82  | 4,82             | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM DAN<br>PENATAAN RUANG |
| 1.03.08. | PROGRAM<br>PENATAAN<br>BANGUNAN<br>GEDUNG  | Rasio bangunan berIMB<br>per satuan bangunan  | 0               | 0             | 0     | 2     | 2     | 2     | 6                | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM DAN<br>PENATAAN RUANG |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM   | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |       |       |       |       | Kondisi<br>Akhir | SKPD  |
|----------|--|--|-----------------|---------------|-------|-------|-------|-------|------------------|---|
|          |  |  |                 | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |                  |   |
| 1        | 2  | 3  | 4               | 5             | 6     | 7     | 8     | 9     | 10               | 11  |
| 1.03.09. | PROGRAM<br>PENATAAN<br>BANGUNAN DAN<br>LINGKUNGANNYA                               | persentase pemenuhan<br>dokumen Rencana Tata<br>Bangunan dan Lingkungan            | 0               | 20            | 20    | 20    | 20    | 20    | 100              | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM DAN<br>PENATAAN RUANG               |
| 1.03.10. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN JALAN   | Terpeliharanya Kondisi<br>Jaringan Jalan Kabupaten                                 | 662,92          | 306           | 633   | 630   | 630   | 632   | 632              | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM DAN<br>PENATAAN RUANG               |
|          |  | Persentase jaringan jalan<br>Kabupaten dalam kondisi<br>Baik                       | 47              | 48            | 49    | 50    | 51    | 52    | 52               | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM DAN<br>PENATAAN RUANG               |
|          |  | Prosentase sempadan jalan<br>yang dipakai pedagang kaki<br>lima atau bangunan liar | 0,77            | 0,76          | 0,76  | 0,75  | 0,75  | 0,75  | 0,75             | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM DAN<br>PENATAAN RUANG               |
|          |  | Tersusunnya Informasi<br>Database Jalan dan<br>Jembatan                            | 100             | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 500              | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM DAN<br>PENATAAN RUANG               |
| 1.03.11. | PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>JASA<br>KONSTRUKSI                                      | persentase meningkatnya<br>tertib penyelenggaraan jasa<br>kontruksi                | 0               | 20            | 40    | 60    | 80    | 100   | 100              | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM DAN<br>PENATAAN RUANG               |
| 1.03.12. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN PENATAAN<br>RUANG                                   | Persentase pemenuhan<br>dokumen rencana rinci<br>tata ruang                        | 23,26           | 23,26         | 32,56 | 44,19 | 55,81 | 65,12 | 65,12            | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM DAN<br>PENATAAN RUANG               |
|          |  | Persentase ketaatan<br>pemanfaatan ruang   | 0               | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM DAN<br>PENATAAN RUANG               |
| 1.03.03. | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>DAN<br>PENGEMBANGAN<br>SISTEM<br>PENYEDIAAN AIR<br>MINUM | Cakupan jumlah<br>sambungan Rumah Air<br>Minum                                     | 74,84           | 69,6          | 70,59 | 0     | 0     | 0     | 0                | DINAS PERUMAHAN,<br>KAWASAN<br>PERMUKIMAN DAN<br>PERTANAHAN |
| 1.03.05. | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>DAN<br>PENGEMBANGAN<br>SISTEM AIR<br>LIMBAH              | Cakupan jumlah<br>sambungan Rumah Air<br>Limbah                                    | 82,38           | 75,66         | 75,8  | 0     | 0     | 0     | 0                | DINAS PERUMAHAN,<br>KAWASAN<br>PERMUKIMAN DAN<br>PERTANAHAN |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM   | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                              | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |       |       |       |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD   |
|----------|--|---|-----------------|---------------|-------|-------|-------|------|------------------|--|
|          |  |   |                 | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024 |                  |  |
| 1        | 2  | 3   | 4               | 5             | 6     | 7     | 8     | 9    | 10               | 11   |
| 1.03.08. | PROGRAM<br>PENATAAN<br>BANGUNAN<br>GEDUNG                                    | Prosentase Bangunan dan Gedung Yang Memiliki Sertifikat Laik Fungsi | 0               | 10            | 10    | 0     | 0     | 0    | 20               | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
|          |  | Rasio bangunan berIMB per satuan Bangunan                           | 0               | 100           | 100   | 0     | 0     | 0    | 0                | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1.04.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>           |   |                 |               |       |       |       |      |                  |  |
| 1.04.02. | PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>PERUMAHAN   | Persentase Lingkungan Permukiman yang tertata                       | 96,5            | 89,89         | 92,42 | 94,94 | 97,47 | 100  | 100              | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
|          |  | Prosentase Perencanaan Pembangunan Perumahan yng sesuai dengan NSPK | 100             | 100           | 100   | 100   | 100   | 100  | 100              | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1.04.03. | PROGRAM<br>KAWASAN<br>PERMUKIMAN   | Prosentase Lingkungan Permukiman Kumuh                              | 3,7             | 2,99          | 2,24  | 1,49  | 0,74  | 0    | 0                | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
|          |  | Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan             | 73,34           | 78,67         | 84    | 89,33 | 94,66 | 100  | 100              | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1.04.04. | PROGRAM<br>PERUMAHAN DAN<br>KAWASAN<br>PERMUKIMAN<br>KUMUH                   | Cakupan ketersediaan rumah layak huni                               | 0               | 97,09         | 97,78 | 98,58 | 99,3  | 100  | 100              | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
|          |  | Prosentase Lingkungan Permukiman Kumuh                              | 0               | 2,99          | 2,24  | 1,49  | 0,74  | 0    | 7,46             | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1.04.05. | PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>PRASARANA,<br>SARANA DAN<br>UTILITAS UMUM<br>(PSU) | Rasio Pemukiman Layak Huni  | 43,34           | 51,84         | 61,47 | 72,8  | 85,27 | 100  | 100              | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                             | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |       |       |       |       | Kondisi<br>Akhir | SKPD   |
|----------|---|--|-----------------|---------------|-------|-------|-------|-------|------------------|--|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |                  |  |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6     | 7     | 8     | 9     | 10               | 11   |
|          |   | Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yg didukung dengan PSU      | 43,34           | 51,84         | 61,47 | 72,8  | 85,27 | 100   | 100              | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1.04.06. | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Rasio Permukiman Layak Huni  | 0               | 0             | 0     | 72,8  | 85,27 | 100   | 100              | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 2.10.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>  |  |                 |               |       |       |       |       |                  |  |
| 2.10.04. | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN   | prosentase penyelesaian konflik pertanahan di Kabupaten Cirebon    | 100             | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 2.10.05. | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN  | Prosentase kepemilikan tanah pemerintah daerah tertata dengan baik | 0               | 44,12         | 50,35 | 56,57 | 62,8  | 69,03 | 69,03            | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 2.10.06. | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE                          | Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum        | 0               | 0             | 0     | 100   | 100   | 100   | 100              | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 2.10.09. | PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH  | Tersedianya tanah untuk masyarakat                                 | 0               | 0             | 0     | 100   | 100   | 100   | 300              | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 2.10.10. | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH  | Penyelesaian izin lokasi   | 37,89           | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN                           |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |       |       |       |       | Kondisi<br>Akhir | SKPD   |
|----------|---|---|-----------------|---------------|-------|-------|-------|-------|------------------|--|
|          |   |   |                 | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |                  |  |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5             | 6     | 7     | 8     | 9     | 10               | 11   |
|          |   |   |                 |               |       |       |       |       |                  | PERMUKIMAN DAN<br>PERTANAHAN                   |
| 1.05.02. | PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>KETENTERAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM  | Prosentase peningkatan pemberantasan Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal                     | 0               | 100           | 0     | 100   | 0     | 100   | 100              | SATUAN POLISI<br>PAMONG PRAJA                  |
|          |   | Porsentase pelayanan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang dilaksanakan                | 0               | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | SATUAN POLISI<br>PAMONG PRAJA                  |
|          |   | Porsentase pemenuhan tenaga satuan perlindungan masyarakat                                  | 98              | 98,43         | 98,48 | 98,53 | 98,58 | 98,63 | 98,63            | SATUAN POLISI<br>PAMONG PRAJA                  |
|          |   | Porsentase peningkatan Jumlah lokasi rawan Penyakit Masyarakat (Pekat) yang ditertibkan     | 0               | 15            | 30    | 45    | 60    | 75    | 225              | SATUAN POLISI<br>PAMONG PRAJA                  |
|          |   | Prosentase jumlah pelanggaran ketertiban dan ketentraman masyarakat yang terselesaikan      | 0               | 17,7          | 35,4  | 45,4  | 55,4  | 70,4  | 70,4             | SATUAN POLISI<br>PAMONG PRAJA                  |
| 1.05.04. | PROGRAM<br>PENCEGAHAN,<br>PENANGGULANGA<br>N,<br>PENYELAMATAN<br>KEBAKARAN DAN<br>PENYELAMATAN<br>NON KEBAKARAN | Penurunan Jumlah Kebakaran = Jumlah kebakaran yang tertangani/jumlah total kebakaran X 100% | 0               | 0             | 0     | 100   | 100   | 100   | 100              | DINAS PEMADAM<br>KEBAKARAN DAN<br>PENYELAMATAN |
| 1.06.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>  |   |                 |               |       |       |       |       |                  |  |
| 1.06.02. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>SOSIAL   | Jumlah panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial        | 59              | 53            | 53    | 53    | 53    | 53    | 53               | DINAS SOSIAL                                   |
|          |   | Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani                        | 244.832         | 1.385         | 1.200 | 1.425 | 1.425 | 1.425 | 6.860            | DINAS SOSIAL                                   |
|          |   | Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang   | 7.968           | 1.528         | 1.378 | 1.378 | 1.378 | 1.378 | 7.040            | DINAS SOSIAL                                   |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM   | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |       |       |       |       | Kondisi<br>Akhir | SKPD         |
|----------|--|---|-----------------|---------------|-------|-------|-------|-------|------------------|--------------|
|          |  |   |                 | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |                  |              |
| 1        | 2  | 3   | 4               | 5             | 6     | 7     | 8     | 9     | 10               | 11           |
|          |  | memiliki Pengetahuan dan Keterampilan   |                 |               |       |       |       |       |                  |              |
| 1.06.03. | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN               | Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani                          | 25              | 25            | 25    | 25    | 25    | 25    | 125              | DINAS SOSIAL |
| 1.06.04. | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL  | Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Terehabilitasi                      | 242.317         | 1.100         | 1.160 | 1.410 | 1.410 | 1.410 | 6.490            | DINAS SOSIAL |
| 1.06.05. | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                      | Jumlah Keluarga Miskin yang Menerima Program Perlindungan dan Jaminan Sosial                  | 150             | 160           | 220   | 220   | 220   | 220   | 1.040            | DINAS SOSIAL |
| 1.06.06. | PROGRAM PENANGANAN BENCANA   | Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dapat melaksanakan fungsi sosialnya | 242.317         | 3.420         | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 19.420           | DINAS SOSIAL |
|          |  | Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang memiliki Pengetahuan dan Keterampilan         | 7.968           | 1.528         | 150   | 150   | 150   | 150   | 2.128            | DINAS SOSIAL |
| 1.06.07. | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN                                     | Jumlah Taman Makam Pahlawan   | 1               | 1             | 1     | 1     | 1     | 1     | 5                | DINAS SOSIAL |
|          |  | Terpeliharanya di Lingkungan Taman Makam Pahlawan   | 0               | 5             | 5     | 5     | 5     | 5     | 25               | DINAS SOSIAL |
| 2,       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |   |                 |               |       |       |       |       |                  |              |
| 2.07.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>                               |   |                 | 0             | 0     |       |       |       |                  |              |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |        |        |        |        | Kondisi<br>Akhir | SKPD                                 |
|----------|---|---|-----------------|---------------|--------|--------|--------|--------|------------------|--------------------------------------|
|          |   |   |                 | 2020          | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |                  |                                      |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5             | 6      | 7      | 8      | 9      | 10               | 11                                   |
| 2.07.02. | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA  | Prosentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Berdasarkan Dokumen PTK : Tingkat Akurasi Indikator PTK   | 1               | 0             | 0      | 0      | 1      | 0      | 1                | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
| 2.07.03. | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                          | Prosentase Tenaga Kerja bersertifikat Kompetensi  | 100             | 0             | 0      | 0      | 0      | 0      | 0                | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
|          |   | Tersajinya Dokumen  | 0               | 1             | 1      | 1      | 1      | 1      | 5                | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
| 2.07.04. | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA   | Prosentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) propinsi | 100             | 100           | 100    | 100    | 100    | 100    | 100              | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
| 2.07.05. | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL   | Prosentase Perusahaan Yang Mendapatkan Tata Kelola Yang Layak   | 20              | 0             | 0      | 36     | 36     | 36     | 108              | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
| 3.32.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>                                  |   |                 | 0             | 0      |        |        |        |                  |                                      |
| 3.32.03. | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI  | bertambahnya wilayah tujuan transmigrasi  | 0               | 0             | 0      | 1      | 1      | 1      | 3                | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
| 2.09.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>  |   |                 |               |        |        |        |        |                  |                                      |
| 2.09.02. | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | Persentase LPM yang dimandirikan  | 0               | 0             | 0      | 4,08   | 4,08   | 4,08   | 12,24            | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| 2.09.03. | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT               | Persentase ketersediaan pangan terhadap jumlah kebutuhan pangan   | 137,81          | 144,25        | 148,15 | 152,04 | 155,94 | 159,84 | 159,84           | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM                             | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)              | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |        |        |        |        | Kondisi<br>Akhir | SKPD                                 |
|----------|--|---|-----------------|---------------|--------|--------|--------|--------|------------------|--------------------------------------|
|          |  |   |                 | 2020          | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |                  |                                      |
| 1        | 2  | 3   | 4               | 5             | 6      | 7      | 8      | 9      | 10               | 11                                   |
|          |  | Persentase kelompok pangan yang terkendali harganya | 71,43           | 71,43         | 71,4   | 71,4   | 78,6   | 84,7   | 84,7             | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
|          |  | Tingkat Keanekaragaman Konsumsi Pangan              | 0               | 0             | 0      | 80     | 80     | 80     | 80               | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| 2.09.04. | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                      | Berkurangnya daerah rawan pangan                    | 41              | 0             | 0      | 8      | 13     | 20     | 41               | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| 2.09.05. | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                       | Persentase PSAT aman dikonsumsi                     | 67              | 88            | 84     | 80     | 85     | 90     | 90               | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| 3,       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>                       |   |                 |               |        |        |        |        |                  |                                      |
| 3.25.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b> |   |                 |               |        |        |        |        |                  |                                      |
| 3.25.03. | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                    | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap                   | 27.523          | 28.421        | 28.852 | 31.680 | 33.264 | 34.214 | 34.214           | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| 3.25.04. | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                   | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya                  | 32.120          | 37.180        | 39.040 | 40.990 | 43.040 | 45.190 | 45.190           | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
|          |  | Jumlah Produksi Pembenihan Ikan                     | 113             | 435           | 437    | 440    | 445    | 451    | 451              | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| 3.25.05. | PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN     | Tingkat kepatuhan pelaku usaha perikanan            | 0               | 0             | 0      | 0,01   | 0,01   | 1,21   | 1,21             | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| 3.25.06. | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN         | Jumlah Produksi Pengolahan hasil Perikanan          | 6.200           | 6.205         | 6.209  | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 11.000           | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
|          |  | Jumlah Konsumsi Ikan                                | 26              | 27,2          | 28,4   | 29,6   | 30,8   | 32     | 32               | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| 2.11.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>       |   |                 |               |        |        |        |        |                  |                                      |





| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |        |        |        |        | Kondisi<br>Akhir | SKPD                   |
|----------|---|---|-----------------|---------------|--------|--------|--------|--------|------------------|------------------------|
|          |   |   |                 | 2020          | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |                  |                        |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5             | 6      | 7      | 8      | 9      | 10               | 11                     |
| 2.11.02. | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP  | Tersedianya dokumen perencanaan lingkungan hidup                                    | 2               | 4             | 4      | 3      | 4      | 4      | 19               | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.03. | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP   | Persentase hasil pemantauan kualitas air yang memenuhi baku mutu                    | 33,3            | 42,9          | 52,4   | 61,9   | 71,4   | 81     | 81               | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
|          |   | Persentase Tutupan Lahan  | 60,17           | 121,56        | 136,56 | 151,56 | 166,56 | 181,56 | 757,8            | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.04. | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)  | Meningkatnya keanekaragaman hayati  | 60,17           | 121,56        | 136,56 | 151,56 | 166,56 | 181,56 | 757,8            | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan di bidang lingkungan          | 250             | 250           | 250    | 250    | 250    | 250    | 1.250            | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.08. | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                              | Meningkatnya kegiatan peduli lingkungan yang dilakukan masyarakat                   | 5               | 11            | 11     | 11     | 11     | 11     | 55               | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.09. | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN  | Meningkatnya partisipasi masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan | 4               | 5             | 5      | 5      | 5      | 5      | 25               | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM   | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |       |      |       |       | Kondisi<br>Akhir | SKPD                                    |
|----------|--|--|-----------------|---------------|-------|------|-------|-------|------------------|---|
|          |  |  |                 | 2020          | 2021  | 2022 | 2023  | 2024  |                  |   |
| 1        | 2  | 3  | 4               | 5             | 6     | 7    | 8     | 9     | 10               | 11                                      |
|          | HIDUP UNTUK MASYARAKAT   | dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan  |                 |               |       |      |       |       |                  |   |
| 2.11.10. | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP                                    | Meningkatnya pelayanan penanganan pengaduan masyarakat   | 100             | 100           | 100   | 100  | 100   | 100   | 100              | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                  |
| 2.11.11. | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN  | Prosentase Cakupan Pelayanan pengelolaan sampah  | 6,1             | 7,5           | 15    | 30   | 45    | 60    | 60               | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                  |
|          |  | Prosentase Timbulan Sampah yang Terkurangi   | 1,27            | 3             | 7,5   | 10   | 15    | 20    | 20               | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                  |
| 2.12.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b> |  |                 |               |       |      |       |       |                  |   |
| 2.12.02. | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK   | Cakupan Jumlah Keluarga yang sudah memiliki Dokumen Kependudukan lengkap (Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik / KTP El) | 100             | 100           | 100   | 100  | 100   | 100   | 100              | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|          |  | Prosentase jumlah penduduk di Kabupaten Cirebon yang sudah melaksanakan perekaman KTP El   | 85              | 90            | 92    | 95   | 96    | 97    | 97               | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2.12.03. | PROGRAM PENCATATAN SIPIL   | Prosentase Keluarga yang sudah memiliki Dokumen Akta Kelahiran   | 35              | 35            | 39,75 | 42,7 | 45,64 | 48,58 | 48,58            | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|          |  | Prosentase pemenuhan pelayanan Akta-akta pencatatan sipil  | 74              | 76            | 78    | 80   | 82    | 85    | 85               | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2.12.04. | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN                          | Prosentase Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil  | 82              | 84            | 86    | 88   | 90    | 92    | 92               | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM                                       | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |       |       | Kondisi<br>Akhir | SKPD                                    |
|----------|--|---|-----------------|---------------|------|------|-------|-------|------------------|---|
|          |  |   |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023  | 2024  |                  |   |
| 1        | 2  | 3   | 4               | 5             | 6    | 7    | 8     | 9     | 10               | 11                                      |
|          |  | Jumlah OPD dan Desa yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ( PKS )   | 20              | 20            | 20   | 20   | 20    | 20    | 100              | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|          |  | Peningkatan kualitas Database Kependudukan  | 85              | 85            | 85   | 90   | 95    | 100   | 100              | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|          |  | Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan  | 75              | 77            | 79   | 80   | 80    | 81    | 81               | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2.12.05. | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN                            | Persentase Update Penyediaan Data Profil Kependudukan   | 85              | 90            | 92   | 94   | 96    | 98    | 98               | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2.13.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b> |   |                 |               |      |      |       |       |                  |   |
| 2.13.02. | PROGRAM PENATAAN DESA  | Meningkatnya jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam proses pembangunan dari perencanaan sampai implementasi | 6               | 6             | 6    | 0    | 0     | 0     | 0                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  |
|          |  | Persentase (%) Peningkatan Jumlah Desa yang di fasilitasi Penataan Kewenangan Desanya   | 0               | 0             | 0    | 9,7  | 45,15 | 45,15 | 100              | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  |
| 2.13.03. | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA                                 | Meningkatnya jumlah desa yg melakukan kerja sama dalam proses pembangunan   | 6               | 2             | 2    | 0    | 0     | 0     | 0                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  |
| 2.13.04. | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                             | Meningkatnya Jumlah Desa dengan penilaian baik (perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan)                   | 40              | 40            | 40   | 0    | 0     | 0     | 0                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD  |
|----------|---|---|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|---|
|          |   |   |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |   |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11  |
|          |   | Meningkatnya jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam proses pembangunan dari perencanaan sampai implementasi | 6               | 6             | 6    | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  |
|          |   | Meningkatnya jumlah desa yang ketahanan ekonominya baik   | 2               | 3             | 3    | 0    | 0    | 0    | 6                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  |
| 2.13.05. | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Meningkatnya jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif   | 40              | 60            | 80   | 0    | 0    | 0    | 140              | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  |
|          |   | Meningkatnya jumlah desa yang ketahanan ekonominya baik   | 2               | 3             | 3    | 0    | 0    | 0    | 6                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  |
| 2.08.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>      |   |                 |               |      |      |      |      |                  |   |
| 2.08.02. | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                           | Persentase Lembaga / Kelompok berbasis gender yang mendapatkan penguatan  | 60,51           | 25            | 25   | 25   | 25   | 25   | 25               | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM         | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                           | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD  |
|----------|--------------------------------------|--|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|---|
|          |                                      |  |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |   |
| 1        | 2                                    | 3  | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11  |
| 2.08.03. | PROGRAM<br>PERLINDUNGAN<br>PEREMPUAN | Proporsi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian | 28,73           | 11,46         | 11,7 | 11,9 | 12,1 | 12,3 | 12,3             | DINAS<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK,<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN<br>ANAK |
|          |                                      | Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan                  | 40,39           | 35,7          | 35,8 | 35,9 | 36,1 | 36,2 | 36,2             | DINAS<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK,<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN<br>ANAK |
|          |                                      | -  | 0               | 0             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK,<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN<br>ANAK |
|          |                                      | Prosentase perempuan yang mendapat perlindungan                  | 60,51           | 1,25          | 1,29 | 1,33 | 1,37 | 1,41 | 1,41             | DINAS<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK,<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN<br>ANAK |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM                                | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD  |
|----------|---|---|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|---|
|          |   |   |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |   |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11  |
|          |   | -   | 0               | 0             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK,<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN<br>ANAK |
| 2.08.04. | PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>KUALITAS<br>KELUARGA              | Meningkatnya ketahanan<br>keluarga yang ditandai<br>dengan menurunnya angka<br>perceraian | 0               | 0,84          | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,81             | DINAS<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK,<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN<br>ANAK |
| 2.08.05. | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>SISTEM DATA<br>GENDER DAN<br>ANAK | Pelaksanaan pengumpulan<br>data terpilah gender   | 7,5             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | DINAS<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK,<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN<br>ANAK |
| 2.08.06. | PROGRAM<br>PEMENUHAN HAK<br>ANAK (PHA)                      | Presentase anak yang<br>mendapat perlindungan   | 0               | 1,86          | 1,94 | 2,16 | 2,28 | 2,4  | 2,4              | DINAS<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK,<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN<br>ANAK |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM   | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD  |
|----------|--|---|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|---|
|          |  |   |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |   |
| 1        | 2  | 3                                       | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11  |
|          |  | -                                       | 0               | 0             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK,<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN<br>ANAK |
| 2.08.07. | PROGRAM<br>PERLINDUNGAN<br>KHUSUS ANAK   | Jumlah layanan korban<br>kekerasan      | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | DINAS<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK,<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN<br>ANAK |
| 2.14.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN<br/>PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b> |   |                 |               |      |      |      |      |                  |   |
| 2.14.02. | PROGRAM<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK  | tersediannya informasi<br>data keluarga | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 500              | DINAS<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK,<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN<br>ANAK |
|          |  | -                                       | 0               | 0             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK,<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN<br>ANAK |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM                       | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |       |       | Kondisi<br>Akhir | SKPD  |
|----------|--|---|-----------------|---------------|------|------|-------|-------|------------------|---|
|          |  |   |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023  | 2024  |                  |   |
| 1        | 2  | 3   | 4               | 5             | 6    | 7    | 8     | 9     | 10               | 11  |
| 2.14.03. | PROGRAM<br>PEMBINAAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA (KB) | Presentase jumlah<br>Apseptor MKJP  | 22,5            | 24            | 24,2 | 24,4 | 24,6  | 24,8  | 24,8             | DINAS<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK,<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN<br>ANAK |
|          |  | Persentase masyarakat<br>dalam Keikutsertaan ber-<br>KB                                 | 25              | 72,54         | 72,8 | 73   | 73,25 | 73,54 | 73,54            | DINAS<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK,<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN<br>ANAK |
|          |  | Meningkatnya jumlah<br>pendidik/Motivator sebaya  | 520             | 340           | 340  | 340  | 340   | 340   | 340              | DINAS<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK,<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN<br>ANAK |
|          |  | Pembinaan Kampung KB<br>(Keluarga Berkualitas)<br>dengan ditandai<br>peningkatan status | 10              | 12,5          | 12,5 | 12,5 | 12,5  | 12,5  | 62,5             | DINAS<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK,<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN<br>ANAK |





| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                   | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |       |       |       |       | Kondisi<br>Akhir | SKPD  |
|----------|---|--|-----------------|---------------|-------|-------|-------|-------|------------------|---|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |                  |   |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6     | 7     | 8     | 9     | 10               | 11  |
|          |   | -  | 0               | 1             | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                | DINAS<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK,<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN<br>ANAK |
|          |   | Tingkat Kesehatan<br>Reproduksi Remaja                   | 18,54           | 19,2          | 19,2  | 19,4  | 19,6  | 19,8  | 19,8             | DINAS<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK,<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN<br>ANAK |
| 2.14.04. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>DAN<br>PENINGKATAN<br>KELUARGA<br>SEJAHTERA (KS) | Cakupan anggota Bina<br>Keluarga (BKB/BKR/BKL)<br>ber-KB | 56,58           | 56,98         | 56,98 | 57,24 | 57,52 | 57,88 | 57,88            | DINAS<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK,<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN<br>ANAK |
|          |   | -  | 0               | 0             | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                | DINAS<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK,<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN<br>ANAK |
| 2.15.    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                      |  |                 |               |       |       |       |       |                  |   |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM   | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |       |       |       |       | Kondisi<br>Akhir | SKPD              |
|----------|--|---|-----------------|---------------|-------|-------|-------|-------|------------------|-------------------|
|          |  |   |                 | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |                  |                   |
| 1        | 2  | 3   | 4               | 5             | 6     | 7     | 8     | 9     | 10               | 11                |
| 2.15.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN LALU LINTAS<br>DAN ANGKUTAN<br>JALAN (LLAJ) | Meningkatnya Prosentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas serta tatakelola sektor perhubungan yang sesuai dengan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria)  | 20              | 35            | 45    | 0     | 0     | 0     | 0                | DINAS PERHUBUNGAN |
|          |  | Rasio sarana dan Prasarana Pengujian yang layak   | 30              | 50            | 55    | 58    | 62    | 65    | 65               | DINAS PERHUBUNGAN |
|          |  | Prosentase jumlah pelanggaran lalu lintas   | 90              | 86            | 85    | 83    | 81    | 80    | 80               | DINAS PERHUBUNGAN |
|          |  | Rasio Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan ( Halte dan Terminal) yang layak fungsi   | 46,15           | 56,41         | 66,67 | 76,92 | 89,74 | 100   | 100              | DINAS PERHUBUNGAN |
|          |  | Persentase ketersediaan sarana dan Prasarana Pengamanan Lalu Lintas yang berfungsi dengan baik  | 25,34           | 21,1          | 41,59 | 62,44 | 82,52 | 100   | 100              | DINAS PERHUBUNGAN |
|          |  | Persentase kepemilikan KIR/Wajib Uji angkutan Umum  | 65,68           | 65,98         | 65,98 | 66,6  | 67,22 | 67,84 | 67,84            | DINAS PERHUBUNGAN |
|          |  | Meningkatnya Prosentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas serta tatakelola sektor perhubungan yang sesuai dengan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria). | 0               | 0             | 0     | 45,5  | 47,5  | 50    | 50               | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2.15.03. | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PELAYARAN  | Meningkatnya prosentase pemenuhan Perijinan   | 0               | 0             | 0     | 1     | 2     | 2     | 2                | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2.15.04. | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENERBANGAN                                      | Presentasi Perijinan landasan   | 0               | 0             | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2.15.05. | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PERKERETAAPIAN                                   | Prosentasi ijin pintu perlintasan kereta api di kabupaten   | 0               | 0             | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                | DINAS PERHUBUNGAN |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM                                  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                             |
|----------|---|---|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|----------------------------------|
|          |   |   |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                                  |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                               |
| 2.16.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>  |   |                 |               |      |      |      |      |                  |                                  |
| 2.16.02. | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                       | Persentase layanan informasi dan komunikasi publik  | 52,5            | 52,5          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|          |   | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah | 0               | 60            | 65   | 70   | 75   | 80   | 80               | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 2.16.03. | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA                                  | Indeks aspek teknologi informasi dan komunikasi   | 2,67            | 2,97          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|          |   | Cakupan pengelolaan aplikasi informatika  | 0               | 0             | 85,5 | 88   | 91   | 94   | 94               | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 2.20.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>                   |   |                 |               |      |      |      |      |                  |                                  |
| 2.20.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                    | Persentase dokumen hasil pengolahan dan analisis statistik sektoral yang dihasilkan   | 20              | 20            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|          |   | Persentase ketersediaan data statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Cirebon  | 60              | 60            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|          |   | Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah                                | 0               | 0             | 40   | 60   | 80   | 100  | 100              | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 2.21.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>                  |   |                 |               |      |      |      |      |                  |                                  |
| 2.21.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah  | 0               | 6             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM   | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                                     |
|----------|--|---|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|--|
|          |  |   |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |  |
| 1        | 2  | 3   | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                                       |
|          |  | Tingkat keamanan informasi pemerintah   | 0               | 6             | 26   | 30   | 36   | 42   | 42               | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA         |
| 2.17.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>    |   |                 |               |      |      |      |      |                  |  |
| 2.17.02. | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM                               | Terciptanya Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi                                       | 0               | 0             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2.17.03. | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                              | Terciptanya Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi                                       | 0               | 0             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|          |  | Prosentase koperasi yang meningkat predikat Tingkat Kesehatan hasil pengawasan              | 0               | 0             | 0    | 60   | 62   | 64   | 186              | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2.17.04. | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI                             | Persentasi Koperasi Sehat   | 0               | 0             | 0    | 20   | 20   | 20   | 20               | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2.17.05. | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                             | Prosentase pengurus, pengawas, manajer dan pengelola koperasi yang bersertifikat kompetensi | 0               | 0             | 0    | 30   | 35   | 40   | 105              | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2.17.06. | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                           | Laju perkembangan usaha produktif koperasi  | 0               | 0             | 0    | 25   | 35   | 40   | 100              | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2.17.07. | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Prosentase Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha   | 0               | 0             | 0    | 3,5  | 4    | 4,5  | 12               | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2.17.08. | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM  | Persentase Usaha Mikro Yang Berkembang Nilai Produksinya/ Omsetnya                          | 0               | 0             | 0    | 2,5  | 3    | 3,5  | 9                | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM                                 | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |       |       |       |       | Kondisi<br>Akhir | SKPD   |
|----------|--|---|-----------------|---------------|-------|-------|-------|-------|------------------|--|
|          |  |   |                 | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |                  |  |
| 1        | 2  | 3   | 4               | 5             | 6     | 7     | 8     | 9     | 10               | 11   |
| 2.18.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>            |   |                 |               |       |       |       |       |                  |  |
| 2.18.02. | PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>IKLIM<br>PENANAMAN<br>MODAL       | Persentase Jenis Pelayanan Perizinan Berbasis Online  | 0               | 0             | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|          |  | Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)  | 596             | 656           | 722   | 794   | 873   | 960   | 4.005            | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.03. | PROGRAM<br>PROMOSI<br>PENANAMAN<br>MODAL                     | Persentase Jenis Pelayanan Perizinan Yang Sudah Dilimpahkan dan Efektif Dilaksanakan di Kecamatan | 0               | 20            | 20    | 20    | 20    | 20    | 100              | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|          |  | Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)  | 596             | 656           | 722   | 794   | 873   | 960   | 4.005            | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.04. | PROGRAM<br>PELAYANAN<br>PENANAMAN<br>MODAL                   | Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)   | 2.010           | 2.208         | 2.429 | 2.672 | 2.939 | 3.233 | 13.481           | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|          |  | Rata-Rata Lama Perizinan  | 5               | 5             | 4     | 3     | 2     | 1     | 1                | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|          |  | Jumlah Tenaga Kerja Lokal Yang Terserap   | 1.609           | 1.722         | 1.894 | 2.178 | 2.504 | 2.880 | 11.178           | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.05. | PROGRAM<br>PENGENDALIAN<br>PELAKSANAAN<br>PENANAMAN<br>MODAL | Jumlah Tenaga Kerja Lokal Yang Terserap   | 1.609           | 1.722         | 1.894 | 2.178 | 2.504 | 2.880 | 11.178           | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                           | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |       |       |       | Kondisi<br>Akhir | SKPD   |
|----------|---|--|-----------------|---------------|------|-------|-------|-------|------------------|--|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  |                  |  |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6    | 7     | 8     | 9     | 10               | 11   |
| 2.18.06. | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>DATA DAN<br>SISTEM<br>INFORMASI<br>PENANAMAN<br>MODAL | Rata-Rata Lama Perizinan   | 5               | 5             | 4    | 3     | 2     | 1     | 1                | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN<br>TERPADU SATU<br>PINTU |
| 2.19.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN<br/>OLAHRAGA</b>                   |  |                 | 0             | 0    |       |       |       |                  |  |
| 2.19.02. | PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>KAPASITAS DAYA<br>SAING<br>KEPEMUDAAN                | Prosentase daya saing<br>Kepemudaan                              | 0               | 0             | 0    | 15,29 | 18,24 | 21,18 | 21,18            | DINAS PEMUDA DAN<br>OLAHRAGA                                       |
| 2.19.03. | PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>KAPASITAS DAYA<br>SAING<br>KEOLAHRAGAAN              | Cakupan Pembinaan<br>olahraga                                    | 0               | 0             | 0    | 24,39 | 34,15 | 24,39 | 24,39            | DINAS PEMUDA DAN<br>OLAHRAGA                                       |
| 2.19.04. | PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>KAPASITAS<br>KEPRAMUKAAN                             | Prosentase pemuda yang<br>aktif dalam kepramukaan                | 0               | 0             | 0    | 4,57  | 4,9   | 5,22  | 5,22             | DINAS PEMUDA DAN<br>OLAHRAGA                                       |
| 2.22.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>                                    |  |                 | 0             | 0    |       |       |       |                  |  |
| 2.22.02. | PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>KEBUDAYAAN   | Prosentase pertumbuhan<br>pelaku budaya                          | 0               | 0             | 0    | 1     | 1     | 1     | 1                | DINAS KEBUDAYAAN<br>DAN PARIWISATA                                 |
| 2.22.03. | PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>KESENIAN<br>TRADISIONAL                              | Prosentase pertumbuhan<br>jumlah sanggar kesenian<br>tradisional | 0               | 0             | 0    | 0     | 0     | 0     | 0                | DINAS KEBUDAYAAN<br>DAN PARIWISATA                                 |
| 2.22.04. | PROGRAM<br>PEMBINAAN<br>SEJARAH   | Cerita Sejarah yang di<br>Seminarakan                            | 0               | 0             | 0    | 1     | 1     | 1     | 3                | DINAS KEBUDAYAAN<br>DAN PARIWISATA                                 |
| 2.22.05. | PROGRAM<br>PELESTARIAN<br>DAN   | Penambahan penetapan<br>cagar budaya                             | 0               | 0             | 0    | 0     | 0     | 0     | 0                | DINAS KEBUDAYAAN<br>DAN PARIWISATA                                 |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM   | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |       |       |       | Kondisi<br>Akhir | SKPD                                |
|----------|--|--|-----------------|---------------|------|-------|-------|-------|------------------|-------------------------------------|
|          |  |  |                 | 2020          | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  |                  |                                     |
| 1        | 2  | 3  | 4               | 5             | 6    | 7     | 8     | 9     | 10               | 11                                  |
|          | PENGELOLAAN<br>CAGAR BUDAYA  |  |                 |               |      |       |       |       |                  |                                     |
| 2.22.06. | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PERMUSEUMAN  | Bertambahnya koleksi<br>museum   | 0               | 0             | 0    | 0     | 0     | 0     | 0                | DINAS KEBUDAYAAN<br>DAN PARIWISATA  |
| 3.26.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>   |  |                 | 0             | 0    |       |       |       |                  |                                     |
| 3.26.02. | PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>DAYA TARIK<br>DESTINASI<br>PARIWISATA  | Jumlah obyek daya tarik<br>wisata dengan<br>pertumbuhan kunjungan<br>diatas 10%                        | 0               | 0             | 0    | 3     | 6     | 9     | 9                | DINAS KEBUDAYAAN<br>DAN PARIWISATA  |
| 3.26.03. | PROGRAM<br>PEMASARAN<br>PARIWISATA   | Market Share Kunjungan<br>Pariwisata Kabupaten<br>Cirebon Terhadap<br>Kunjungan Provinsi Jawa<br>Barat | 0               | 0             | 0    | 1,98  | 2,08  | 2,29  | 2,29             | DINAS KEBUDAYAAN<br>DAN PARIWISATA  |
| 3.26.04. | PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>EKONOMI<br>KREATIF MELALUI<br>PEMANFAATAN<br>DAN<br>PERLINDUNGAN<br>HAK KEKAYAAN<br>INTELEKTUAL | Jumlah HKI ekonomi<br>kreatif  | 0               | 0             | 0    | 1     | 1     | 1     | 3                | DINAS KEBUDAYAAN<br>DAN PARIWISATA  |
| 3.26.05. | PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA<br>PARIWISATA DAN<br>EKONOMI<br>KREATIF   | Persentase pelaku<br>pariwisata dan ekonomi<br>kreatif yang<br>terstandarisasi/bersertifika<br>t       | 0               | 0             | 0    | 19,44 | 30,56 | 41,67 | 41,67            | DINAS KEBUDAYAAN<br>DAN PARIWISATA  |
| 2.23.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>   |  |                 |               |      |       |       |       |                  |                                     |
| 2.23.02. | PROGRAM<br>PEMBINAAN<br>PERPUSTAKAAN   | Prosentase Peningkatan<br>Perpustakaan Desa yang<br>aktif  | 9,6             | 14,4          | 19,2 | 24    | 28,8  | 33,7  | 33,7             | DINAS KEARSIPAN<br>DAN PERPUSTAKAAN |
|          |  | Prosentase peningkatan<br>minat dan budaya baca<br>masyarakat  | 2,8             | 4,3           | 5,9  | 7,5   | 9,1   | 10,7  | 10,7             | DINAS KEARSIPAN<br>DAN PERPUSTAKAAN |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM                         | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |         |       |       |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                             |
|----------|--|--|-----------------|---------------|---------|-------|-------|------|------------------|----------------------------------|
|          |  |  |                 | 2020          | 2021    | 2022  | 2023  | 2024 |                  |                                  |
| 1        | 2  | 3  | 4               | 5             | 6       | 7     | 8     | 9    | 10               | 11                               |
|          |  | Prosentase Perpustakaan SMPN sesuai standar Nasional Perpustakaan                        | 0               | 0             | 0       | 1,25  | 2,5   | 3,75 | 3,75             | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| 2.23.03. | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | Prosentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan | 0               | 0             | 0       | 71,43 | 85,71 | 100  | 100              | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| 2.24.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>          |  |                 |               |         |       |       |      |                  |                                  |
| 2.24.02. | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                            | Prosentase peningkatan SKPD yang menerapkan sistem administrasi kearsipan secara baku    | 39,4            | 51,5          | 63,6    | 75,8  | 87,9  | 100  | 100              | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
|          |  | Prosentase peningkatan khasanah arsip daerah   | 42,5            | 47,9          | 60,3    | 72,6  | 86,3  | 100  | 100              | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
|          |  | Meningkatnya durasi dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat                          | 15              | 10            | 8       | 6     | 4     | 2    | 2                | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
|          |  | Prosentase SKPD yang Tata kelola arsipnya sesuai NSPK                                    | 0               | 0             | 0       | 57,6  | 78,8  | 100  | 100              | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| 2.24.03. | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP          | Prosentase ketersediaan arsip yang terlindungi dan terselamatkan                         | 0               | 0             | 0       | 50    | 75    | 100  | 100              | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| 2.24.04. | PROGRAM PERIJINAN PENGGUNAAN ARSIP                   | Prosentase peningkatan SKPD yang menerapkan sistem administrasi kearsipan secara baku    | 39,4            | 51,5          | 63,6    | 75,8  | 87,9  | 100  | 100              | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
|          |  | Prosentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK           | 0               | 0             | 0       | 50    | 75    | 100  | 100              | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| 3.27.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>          |  |                 |               |         |       |       |      |                  |                                  |
| 3.27.02. | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Jumlah Produksi Komoditas Tanaman Pangan (Beras)   | 340.309         | 343.107       | 347.493 | 0     | 0     | 0    | 0                | DINAS PERTANIAN                  |





| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |         |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD            |
|----------|---|---|-----------------|---------------|---------|------|------|------|------------------|-----------------|
|          |   |   |                 | 2020          | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                 |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5             | 6       | 7    | 8    | 9    | 10               | 11              |
|          |   | Jumlah Produksi Sektor Peternakan (Sapi Potong, Ayam Ras, Unggas Lokal dan Domba) | 29.106          | 29.996        | 30.508  | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS PERTANIAN |
|          |   | Jumlah Produksi Komoditas Perkebunan (Gula dan Kelapa)                            | 21.826          | 21.873        | 21.919  | 0    | 0    | 0    | 43.792           | DINAS PERTANIAN |
|          |   | Jumlah Populasi Ternak  | 4.859.198       |               |         | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS PERTANIAN |
|          |   | Jumlah Produksi Komoditas Hortikultura (Bawang Merah, Cabai Besar dan Mangga)     | 97.300          | 98.080        | 98.472  | 0    | 0    | 0    | 196.552          | DINAS PERTANIAN |
|          |   | Rasio Ketersediaan Sarana Produksi Pertanian                                      | 0               | 0             | 0       | 0,52 | 0,53 | 0,54 | 0,54             | DINAS PERTANIAN |
| 3.27.03. | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                 | Jumlah Produksi Komoditas Tanaman Pangan (Beras)                                  | 340.309         | 343.107       | 347.493 | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS PERTANIAN |
|          |   | Jumlah Produksi Sektor Peternakan (Sapi Potong, Ayam Ras, Unggas Lokal dan Domba) | 29.106          | 29.996        | 30.508  | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS PERTANIAN |
|          |   | Jumlah Produksi Komoditas Hortikultura (Bawang Merah, Cabai Besar dan Mangga)     | 97.300          | 98.080        | 98.472  | 0    | 0    | 0    | 196.552          | DINAS PERTANIAN |
|          |   | Rasio Ketersediaan Prasarana Produksi Pertanian                                   | 0               | 0             | 0       | 0,21 | 0,26 | 0,3  | 0,3              | DINAS PERTANIAN |
| 3.27.04. | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Prosentase Penurunan Frekuensi Kemunculan Penyakit Zoonosis                       | 2               | 2             | 2       | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS PERTANIAN |
|          |   | Kejadian/Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (Satuan Ternak)                      | 0               | 0             | 0       | 293  | 287  | 281  | 281              | DINAS PERTANIAN |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal   | KINERJA TAHUN |                   |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                                      |
|----------|---|--|-------------------|---------------|-------------------|------|------|------|------------------|---|
|          |   |  |                   | 2020          | 2021              | 2022 | 2023 | 2024 |                  |   |
| 1        | 2   | 3  | 4                 | 5             | 6                 | 7    | 8    | 9    | 10               | 11  |
| 3.27.05. | PROGRAM<br>PENGENDALIAN<br>DAN<br>PENANGGULANGA<br>N BENCANA<br>PERTANIAN | Jumlah Produksi<br>Komoditas Tanaman<br>Pangan (Beras)                                 | 340.309           | 343.107       | 347.493           | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS PERTANIAN                           |
|          |   | Rasio Tingkat Keberhasilan<br>Penanggulangan Bencana<br>Pertanian per-tahun            | 0                 | 0             | 0                 | 0,56 | 0,58 | 0,6  | 0,6              | DINAS PERTANIAN                           |
| 3.27.06. | PROGRAM<br>PERIZINAN<br>USAHA<br>PERTANIAN                                | Jumlah Produksi<br>Komoditas Hortikultura<br>(Bawang Merah, Cabai<br>Besar dan Mangga) | 97.300            | 98.080        | 98.472            | 0    | 0    | 0    | 196.552          | DINAS PERTANIAN                           |
|          |   | Rasio Jumlah Usulan Izin<br>Usaha Pertanian  | 0                 | 0             | 0                 | 0,81 | 0,82 | 0,83 | 0,83             | DINAS PERTANIAN                           |
| 3.27.07. | PROGRAM<br>PENYULUHAN<br>PERTANIAN  | Prosentase Kelompok<br>Petani Yang Naik Kelas  | 10                | 10            | 10                | 10   | 10   | 10   | 10               | DINAS PERTANIAN                           |
|          |   | Prosentase Penyuluh Yang<br>Lulus Pelatihan Berbasis<br>Kompetensi                     | 20                | 20            | 20                | 0    | 0    | 0    | 40               | DINAS PERTANIAN                           |
|          |   | Produktivitas Padi atau<br>Bahan Pangan Utama<br>Lokal Lainnya per Hektar              | 63,25             | 63,3          | 63,35             | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS PERTANIAN                           |
| 3.30.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>                             |  |                   |               |                   |      |      |      |                  |   |
| 3.30.03. | PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>SARANA<br>DISTRIBUSI<br>PERDAGANGAN             | Cakupan bina pengelola<br>pasar  | 100               | 100           | 100               | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS<br>PERDAGANGAN DAN<br>PERINDUSTRIAN |
|          |   | Cakupan bina kelompok<br>pedagang/usaha informal                                       | 5,38              | 5,47          | 5,56              | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS<br>PERDAGANGAN DAN<br>PERINDUSTRIAN |
|          |   | Penerimaan Retribusi Pasar   | 2.329.281.87<br>5 | #####         | 1.962.95<br>5.000 | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS<br>PERDAGANGAN DAN<br>PERINDUSTRIAN |
|          |   | Jumlah sarana distribusi<br>perdagangan yang sesuai<br>SNI ( Pasar Pemda )             | 0                 | 0             | 0                 | 1    | 1    | 1    | 1                | DINAS<br>PERDAGANGAN DAN<br>PERINDUSTRIAN |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |                |                    |                    |                    | Kondisi<br>Akhir   | SKPD                                |
|----------|---|---|-----------------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
|          |   |   |                 | 2020          | 2021           | 2022               | 2023               | 2024               |                    |                                     |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5             | 6              | 7                  | 8                  | 9                  | 10                 | 11                                  |
| 3.30.04. | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Pencapaian Stabilitas harga 9 komoditas kebutuhan pokok masyarakat (daging sapi, beras, gula pasir, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, kedelai, tepung terigu, dan bawang merah) | 6               | 6             | 6              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
|          |   | Koefisien varian antar waktu kebutuhan pokok dan barang penting   | 0               | 0             | 0              | 8,5                | 8,5                | 8,5                | 8,5                | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| 3.30.05. | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR   | Nilai Ekspor ke luar Negeri   | 382.200.730,36  | 388.315.942   | 394.917.313,06 | 402.025.824,69     | 409.664.315,36     | 417.857.601,67     | 417.857.601,67     | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| 3.30.06. | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                     | Cakupan UTTP yang ditera  | 100             | 64,09         | 67,86          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
|          |   | Penerimaan Retribusi Tera   | 121.000.000     | 135.000.000   | 141.000.000    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| 3.30.07. | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                | Nilai perdagangan dalam negeri  | 0               | 0             | 0              | 19.249.585.660.000 | 20.789.552.510.000 | 22.452.716.710.000 | 22.452.716.710.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| 3.31.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>                     |   |                 |               |                |                    |                    |                    |                    |                                     |
| 3.31.02. | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                        | Pertumbuhan cluster industri  | 1               | 1             | 1              | 0                  | 0                  | 0                  | 2                  | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
|          |   | Jumlah produk IKM yang bersertifikasi   | 100             | 100           | 100            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
|          |   | Jumlah sentra industri yang dikembangkan  | 1               | 1             | 1              | 0                  | 0                  | 0                  | 2                  | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM                                      | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD  |
|----------|---|--|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|---|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |   |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11  |
|          |   | Persentase Pencapaian Sasasaran Pembangunan Industri termasuk turunan pembangunan industri dalam RPIK  | 0               | 0             | 0    | 0    | 10   | 20   | 20               | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN                               |
| 3.31.04. | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL            | Jenis Penerapan Teknologi Industri   | 2               | 2             | 2    | 0    | 0    | 0    | 4                | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN                               |
|          |   | Persentase data perusahaan industri menengah dan perusahaan Kawasan industri di kabupaten/kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri Kecil, Menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota | 0               | 0             | 0    | 15   | 25   | 35   | 75               | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN                               |
| 5,       | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                        |  |                 |               |      |      |      |      |                  |   |
| 5.01.    | <b>PERENCANAAN</b>  |  |                 |               |      |      |      |      |                  |   |
| 5.01.02. | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | prosentase ketersediaan data perencanaan pembangunan   | 0               | 3             | 3    | 0    | 0    | 0    | 0                | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM                                       | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD  |
|----------|--|--|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|---|
|          |  |  |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |   |
| 1        | 2  | 3  | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11  |
|          |  | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD  | 100             | 100           | 100  | 0    | 0    | 0    | 0                | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|          |  | prosentase jumlah dokumen Evaluasi Pembangunan Kabupaten Cirebon   | 100             | 100           | 100  | 0    | 0    | 0    | 0                | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|          |  | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA  | 100             | 100           | 100  | 0    | 0    | 0    | 0                | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|          |  | Meningkatnya SKPD dalam menetapkan IKU dan Perkin  | 100             | 100           | 100  | 0    | 0    | 0    | 0                | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|          |  | Prosentase peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah  | 0               | 0             | 0    | 97,5 | 98   | 99   | 99               | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 5.01.03. | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Prosentase pencapaian kinerja perencanaan pembangunan bidang fispra  | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|          |  | Jumlah rekomendasi kebijakan, hasil kajian dari hasil perencanaan bidang pemerintahan dan sosial budaya yang harus | 0               | 10            | 15   | 0    | 0    | 0    | 25               | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM               | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD  |
|----------|--|---|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|---|
|          |  |   |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |   |
| 1        | 2  | 3   | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11  |
|          |  | dilaksanakan oleh SKPD terkait  |                 |               |      |      |      |      |                  |   |
|          |  | Ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan perangkat daerah lingkup koordinasi bidang ekonomi yang memenuhi target                                | 0               | 100           | 100  | 0    | 0    | 0    | 0                | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|          |  | Prosentase capaian kinerja program perangkat daerah   | 0               | 0             | 0    | 100  | 100  | 100  | 100              | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|          |  | Prosentase rata rata pencapaian Target kinerja outcome program pada Perangkat Daerah lingkup koordinasi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 0               | 60            | 60   | 0    | 0    | 0    | 0                | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 5.05.    | <b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>         |   |                 |               |      |      |      |      |                  |   |
| 5.05.02. | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Prosentase hasil penelitian pemerintahan, sosial, ekonomi dan pembangunan yang diimplementasikan  | 0               | 10            | 40   | 0    | 0    | 0    | 0                | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|          |  | Prosentase inovasi dan kreativitas daerah yang diaplikasikan (diterapkan)   | 0               | 10            | 10   | 0    | 0    | 0    | 0                | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|          |  | Prosentase pemanfaatan hasil kelitbangan  | 0               | 0             | 0    | 10   | 10   | 10   | 10               | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN                     |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM            | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                           |
|----------|---|--|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|--------------------------------|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                                |
| 1        | 2                                       | 3  | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                             |
|          |   |  |                 |               |      |      |      |      |                  | PENGEMBANGAN DAERAH            |
| 5.02.02. | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH     | Peningkatan Pengembangan Wilayah untuk mengurangi dampak resiko bencana, kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Pembangunan               | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | PPKD                           |
| 5.02.    | <b>KEUANGAN</b>                         |  |                 |               |      |      |      |      |                  |                                |
| 5.02.02. | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH     | Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengelola keuangan dan barang daerah   | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|          |   | Ketepatan waktu penyusunan Raperda dan Raperbup APBD   | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|          |   | Ketepatan waktu penyusunan Raperda dan Raperbup Perubahan APBD   | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|          |   | Peningkatan pengelolaan administrasi kas daerah secara tepat waktu dan tepat sasaran   | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|          |   | Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyajian laporan keuangan serta penyajian laporan aset tetap                               | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5.02.03. | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Peningkatan barang milik daerah yang telah dan atau dalam proses sertifikasi serta terinventarisir dan termanfaatkan dengan baik/benar | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|          |   | Ketepatan waktu penyusunan Raperda dan Raperbup APBD   | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM          | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |       |       |       |       | Kondisi<br>Akhir | SKPD   |
|----------|---------------------------------------|---|-----------------|---------------|-------|-------|-------|-------|------------------|--|
|          |                                       |   |                 | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |                  |  |
| 1        | 2                                     | 3   | 4               | 5             | 6     | 7     | 8     | 9     | 10               | 11   |
|          |                                       | Peningkatan Penyajian Laporan Barang Milik Daerah yang sudah Terinventarisasi, Teridentifikasi dan Terdokumentasi dengan Baik dan Benar | 100             | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                         |
|          |                                       | Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyajian laporan keuangan serta penyajian laporan aset tetap                                | 100             | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                         |
|          |                                       | Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengelola keuangan dan barang daerah  | 0               | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                         |
| 5.02.04. | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Meningkatkan penerimaan pajak daerah  | 4,79            | 11,23         | 14,84 | 14,66 | 14,66 | 14,66 | 14,66            | BADAN PENDAPATAN DAERAH                                |
| 5.03.    | <b>KEPEGAWAIAN</b>                    |   |                 |               |       |       |       |       |                  |  |
| 5.03.02. | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH            | Persentase Aparatur yang difasilitasi kesejahteraannya  | 0               | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|          |                                       | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur Berbasis Sistem  | 69,5            | 75,6          | 81,7  | 87,8  | 93,9  | 100   | 100              | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|          |                                       | Persentase Sumber Daya Aparatur Yang ditingkatkan Kompetensinya   | 6,25            | 7,42          | 8,23  | 9,04  | 9,86  | 10,06 | 10,06            | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|          |                                       | Prosentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian sesuai SOP  | 0               | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |





| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM                            | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                            | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |       |       |       |       | Kondisi<br>Akhir | SKPD   |
|----------|---|---|-----------------|---------------|-------|-------|-------|-------|------------------|--|
|          |   |   |                 | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |                  |  |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5             | 6     | 7     | 8     | 9     | 10               | 11   |
|          |   | Persentase pegawai yang ditempatkan di bidangnya                  | 60              | 70            | 75    | 75    | 75    | 75    | 75               | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|          |   | Persentase Aparatur yang ditingkatkan integritasnya               | 84,1            | 85,67         | 86,37 | 88,31 | 90,64 | 91,01 | 91,01            | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5.04.    | <b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>                         |   |                 |               |       |       |       |       |                  |  |
| 5.04.02. | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                | Persentase Sumber Daya Aparatur Yang ditingkatkan Kompetensinya   | 6,25            | 7,42          | 8,23  | 9,04  | 9,86  | 10,06 | 10,06            | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 6,       | <b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>             |   |                 |               |       |       |       |       |                  |  |
| 6.01.    | <b>INSPEKTORAT DAERAH</b>                               |   |                 |               |       |       |       |       |                  |  |
| 6.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                      | Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal                 | 100             | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | INSPEKTORAT  |
| 6.01.03. | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal                 | 100             | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | INSPEKTORAT  |
|          |   | Meningkatnya Kapabilitas APIP                                     | 2               | 2             | 3     | 3     | 3     | 3     | 3                | INSPEKTORAT  |
|          |   | persentase peningkatan SDM Pengawas berkompeten                   | 70              | 72            | 74    | 76    | 78    | 80    | 80               | INSPEKTORAT  |
| 4.02.    | <b>SEKRETARIAT DPRD</b>                                 |   |                 |               |       |       |       |       |                  |  |
| 4.02.02. | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD      | Prosentase jumlah raperda yang dibahas dan ditetapkan tepat waktu | 90              | 90            | 91    | 93    | 93    | 94    | 94               | SEKRETARIAT DPRD                                       |
| 4,       | <b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>              |   |                 |               |       |       |       |       |                  |  |
| 4.01.    | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>                               |   |                 |               |       |       |       |       |                  |  |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM                  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |       |       |       |       | Kondisi<br>Akhir | SKPD               |
|----------|---|--|-----------------|---------------|-------|-------|-------|-------|------------------|--------------------|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |                  |                    |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6     | 7     | 8     | 9     | 10               | 11                 |
| 4.01.02. | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Prosentase Kerjasama yang ditandatangani   | 0               | 80            | 80    | 80    | 80    | 80    | 80               | SEKRETARIAT DAERAH |
|          |   | Prosentase batas wilayah administrasi antar desa dan Daerah yang Ditetapkan                                | 7,28            | 9,7           | 12,13 | 14,56 | 16,99 | 19,41 | 19,41            | SEKRETARIAT DAERAH |
|          |   | Prosentase fasilitasi pengelolaan kekayaan desa  | 2,4             | 2,5           | 2,5   | 2,5   | 2,5   | 2,5   | 2,5              | SEKRETARIAT DAERAH |
|          |   | Prosentase Produk Hukum/Informasi Hukum yang di publikasikan pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum | 85              | 85            | 85    | 85    | 85    | 85    | 85               | SEKRETARIAT DAERAH |
|          |   | Prosentase Koordinasi yang Dilakukan Di Bagian Kesejahteraan Rakyat  | 100             | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | SEKRETARIAT DAERAH |
|          |   | Prosentase Monev yang Dilakukan Bagian Kesejahteraan Rakyat  | 75              | 75            | 80    | 85    | 90    | 100   | 100              | SEKRETARIAT DAERAH |
|          |   | Prosentase Tindakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan                                       | 97              | 97            | 97    | 98    | 99    | 100   | 100              | SEKRETARIAT DAERAH |
|          |   | Prosentase Pelayanan Fasilitasi Kewenangan Terhadap Kepala/Wakil Kepala Daerah                             | 100             | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | SEKRETARIAT DAERAH |
|          |   | Prosentase Kualitas Kehidupan Keagamaan Yang Ditingkatkan  | 95              | 95            | 96    | 97    | 99    | 100   | 100              | SEKRETARIAT DAERAH |
|          |   | Prosentase Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan  | 70              | 75            | 80    | 85    | 90    | 95    | 95               | SEKRETARIAT DAERAH |
|          |   | Prosentase Peningkatan Kegiatan Bina Kewilayahan yang Dilakukan  | 100             | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | SEKRETARIAT DAERAH |
|          |   |  |                 |               |       |       |       |       |                  |                    |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM                              | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                           | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD               |
|----------|---|--|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|--------------------|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                    |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                 |
|          |   | Prosentase Peraturan Perundang - undangan yang ditetapkan        | 85              | 90            | 90   | 90   | 90   | 90   | 90               | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4.01.03. | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                      | Prosentase Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berkualitas   | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | SEKRETARIAT DAERAH |
|          |   | Prosentase Koordinasi yang Dilakukan Bagian Sumber Daya Alam     | 97              | 97            | 97   | 98   | 99   | 100  | 100              | SEKRETARIAT DAERAH |
|          |   | Prosentase Keberhasilan Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah   | 97              | 97            | 97   | 100  | 100  | 100  | 100              | SEKRETARIAT DAERAH |
|          |   | Prosentase kebijakan Pembangunan Daerah yang Dilaksanakan        | 0               | 50            | 60   | 70   | 80   | 80   | 80               | SEKRETARIAT DAERAH |
|          |   | Prosentase Koordinasi dalam Meningkatkan Perekonomian            | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | SEKRETARIAT DAERAH |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Menigkatnya Pelayanan Publik.                                    | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN WALED    |
|          |   | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 55              | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN WALED    |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 55              | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN WALED    |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 55              | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN WALED    |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                 |
|----------|---|--|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|----------------------|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                      |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                   |
| 7.01.05. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>UMUM             | Meningkatnya Pelayanan<br>Publik   | 0               | 0             | 0    | 95   | 96   | 97   | 288              | KECAMATAN WALED      |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | Meningkatnya<br>Pemberdayaan Masyarakat  | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 500              | KECAMATAN WALED      |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat          | 98              | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>CILEDUG |
|          |   | Meningkatnya Pelayanan<br>Publik   | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>CILEDUG |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat          | 98              | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>CILEDUG |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat          | 98              | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>CILEDUG |
| 7.01.05. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>UMUM             | Meningkatnya pelayanan<br>Publik   | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>CILEDUG |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | Meningkatnya<br>Pemberdayaan Masyarakat  | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>CILEDUG |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN                            | Peningkatan Integrasi<br>perencanaan,<br>penganggaran, pengawasan<br>dan pelaporan | 20              | 20            | 20   | 20   | 20   | 20   | 20               | KECAMATAN LOSARI     |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                   |
|----------|---|--|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|------------------------|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                        |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                     |
|          | DAN PELAYANAN<br>PUBLIK   |  |                 |               |      |      |      |      |                  |                        |
|          |   | Meningkatnya Pelayanan<br>Publik   | 0               | 0             | 20   | 20   | 30   | 30   | 30               | KECAMATAN LOSARI       |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Peningkatan Integrasi<br>perencanaan,<br>penganggaran, pengawasan<br>dan pelaporan                                 | 20              | 20            | 20   | 20   | 20   | 20   | 20               | KECAMATAN LOSARI       |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Peningkatan Integrasi<br>perencanaan,<br>penganggaran, pengawasan<br>dan pelaporan                                 | 20              | 20            | 20   | 20   | 20   | 20   | 20               | KECAMATAN LOSARI       |
| 7.01.05. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>UMUM             | Meningkatnya Pelayanan<br>Publik   | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN LOSARI       |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | Meningkatnya<br>Pemberdayaan Masyarakat  | 0,65            | 0,66          | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,69 | 0,69             | KECAMATAN LOSARI       |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Terselenggaranya<br>Pelimpahan Urusan<br>Pemerintahan Bidang<br>Kesejahteraan Sosial                               | 55              | 60            | 65   | 70   | 75   | 80   | 80               | KECAMATAN<br>PABEDILAN |
|          |   | Terselenggaranya<br>pelimpahan kewenangan<br>Bidang Pemerintahan<br>Umum dan Desa meliputi<br>urusan pemerintahan. | 55              | 60            | 65   | 70   | 75   | 80   | 80               | KECAMATAN<br>PABEDILAN |
|          |   | Terselenggaranya<br>Pelimpahan Urusan<br>Pemerintahan Bidang<br>Pelayanan Umum                                     | 55              | 60            | 65   | 70   | 75   | 80   | 80               | KECAMATAN<br>PABEDILAN |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                   |
|----------|---|--|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|------------------------|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                        |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                     |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Terselenggaranya<br>Pelimpahan Urusan<br>Pemerintahan Bidang<br>Ekonomi, Pembangunan<br>dan Pemberdayaan<br>Masyarakat                             | 55              | 60            | 65   | 70   | 75   | 80   | 80               | KECAMATAN<br>PABEDILAN |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Terselenggaranya<br>Pelimpahan Urusan<br>Pemerintahan Bidang<br>Keamanan Ketertiban<br>Perlindungan Masyarakat<br>dan Pembinaan Kesatuan<br>Bangsa | 55              | 60            | 65   | 70   | 75   | 80   | 80               | KECAMATAN<br>PABEDILAN |
| 7.01.05. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>UMUM             | Meningkatnya pelayanan<br>publik   | 0               | 0             | 0    | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>PABEDILAN |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | meningkatnya prosentase<br>desa yang dibina dan di<br>awasi  | 0               | 0             | 0    | 100  | 100  | 100  | 300              | KECAMATAN<br>PABEDILAN |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat   | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>BABAKAN   |
|          |   | Meningkatnya Pelayanan<br>Publik   | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>BABAKAN   |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat   | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>BABAKAN   |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat   | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>BABAKAN   |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                                    | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                       |
|----------|---|---|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|----------------------------|
|          |   |   |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                            |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                         |
| 7.01.05. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>UMUM             | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>BABAKAN       |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | Meningkatnya<br>Pemberdayaan Masyarakat                                   | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>BABAKAN       |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 95            | 96   | 97   | 99   | 100  | 100              | KECAMATAN<br>GEBANG        |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 95            | 96   | 97   | 99   | 100  | 100              | KECAMATAN<br>GEBANG        |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 95            | 96   | 97   | 99   | 100  | 100              | KECAMATAN<br>GEBANG        |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Meningkatnya Pelayanan<br>Publik  | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>KARANGSEMBUNG |
|          |   | Cakupan pelimpahan<br>sebagian kewenangan<br>pemerintahan kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>KARANGSEMBUNG |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Cakupan pelimpahan<br>sebagian kewenangan<br>pemerintahan kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>KARANGSEMBUNG |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM                               | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                             | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                    |
|----------|--|--|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|-------------------------|
|          |  |  |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                         |
| 1        | 2  | 3  | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                      |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM         | Cakupan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan kepada Camat   | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN KARANGSEMBUNG |
| 7.01.05. | PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          | Meningkatnya pelayanan Publik                                      | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN KARANGSEMBUNG |
| 7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA         | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN KARANGSEMBUNG |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan Pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan Kepada Camat   | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN LEMAHABANG    |
|          |  | Meningkatkan Pelayanan Publik                                      | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN LEMAHABANG    |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN         | Cakupan Pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan Kepada Camat   | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN LEMAHABANG    |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM         | Cakupan Pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan Kepada Camat   | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN LEMAHABANG    |
| 7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA         | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat                               | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN LEMAHABANG    |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN                      | Paten  | 55              | 55            | 60   | 65   | 70   | 75   | 325              | KECAMATAN SUSUKANLEBAK  |





| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                      |
|----------|---|--|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|---------------------------|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                           |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                        |
|          | DAN PELAYANAN<br>PUBLIK   |  |                 |               |      |      |      |      |                  |                           |
|          |   | Terselenggaranya<br>Pelimpahan Urusan<br>Pemerintahan Bidang<br>Kesejahteraan Sosial   | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>SUSUKANLEBAK |
|          |   | Terselenggaranya<br>pelimpahan kewenangan<br>Bidang Pemerintahan<br>Umum dan Desa meliputi<br>urusan pemerintahan.                                 | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>SUSUKANLEBAK |
|          |   | Terselenggaranya<br>Pelimpahan Urusan<br>Pemerintahan Bidang<br>Pelayanan Umum   | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>SUSUKANLEBAK |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Terselenggaranya<br>Pelimpahan Urusan<br>Pemerintahan Bidang<br>Ekonomi, Pembangunan<br>dan Pemberdayaan<br>Masyarakat                             | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>SUSUKANLEBAK |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Terselenggaranya<br>Pelimpahan Urusan<br>Pemerintahan Bidang<br>Keamanan Ketertiban<br>Perlindungan Masyarakat<br>dan Pembinaan Kesatuan<br>Bangsa | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>SUSUKANLEBAK |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | Meningkatnya<br>pemberdayaan masyarakat  | 0,65            | 0,68          | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 3,4              | KECAMATAN<br>SUSUKANLEBAK |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Meningkatnya Kualitas<br>Pelayanan Publik  | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>SEDONG       |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM                              | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                           | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                   |
|----------|---|--|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|------------------------|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                        |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                     |
|          |   | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN SEDONG       |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN SEDONG       |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN SEDONG       |
| 7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA        | Prosentase Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 104  | 104              | KECAMATAN SEDONG       |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat  | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN ASTANAJAPURA |
|          |   | Meningkatnya Pelayanan Publik                                    | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN ASTANAJAPURA |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat  | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN ASTANAJAPURA |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat  | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN ASTANAJAPURA |
| 7.01.05. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          | Meningkatnya Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN ASTANAJAPURA |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                                   | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                      |
|----------|---|--|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|---------------------------|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                           |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                        |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | Meningkatnya<br>Pemberdayaan Masyarakat                                  | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>ASTANAJAPURA |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | cakupan pelimpahan<br>sebagai kewenangan<br>pemerintahan kepada<br>camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>PANGENAN     |
|          |   | Meningkatnya Pelayanan<br>Publik   | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>PANGENAN     |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | cakupan pelimpahan<br>sebagai kewenangan<br>pemerintahan kepada<br>camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>PANGENAN     |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | cakupan pelimpahan<br>sebagai kewenangan<br>pemerintahan kepada<br>camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>PANGENAN     |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | Peningkatan Pemberdayaan<br>Masyarakat                                   | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>PANGENAN     |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Meningkatnya Pelayanan<br>Publik   | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN MUNDU           |
|          |   | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN MUNDU           |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT                                     | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN MUNDU           |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                                   | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD            |
|----------|---|--|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|-----------------|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                 |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11              |
|          | DESA DAN<br>KELURAHAN   |  |                 |               |      |      |      |      |                  |                 |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN MUNDU |
| 7.01.05. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>UMUM             | Meningkatnya Prosentase<br>Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintahan Umum   | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN MUNDU |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | Meningkatnya<br>Pemberdayaan Masyarakat                                  | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN MUNDU |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Cakupan pelimpahan<br>sebagian kewenangan<br>pemerintah kepada camat     | 75              | 75            | 77   | 78   | 78   | 78   | 78               | KECAMATAN BEBER |
|          |   | Meningkatnya Pelayanan<br>Publik   | 0               | 0             | 70   | 71   | 72   | 73   | 73               | KECAMATAN BEBER |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Cakupan pelimpahan<br>sebagian kewenangan<br>pemerintah kepada camat     | 75              | 75            | 77   | 78   | 78   | 78   | 78               | KECAMATAN BEBER |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Cakupan pelimpahan<br>sebagian kewenangan<br>pemerintah kepada camat     | 75              | 75            | 77   | 78   | 78   | 78   | 78               | KECAMATAN BEBER |
| 7.01.05. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>UMUM             | Meningkatnya Prosentase<br>Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintahan Umum   | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN BEBER |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                                    | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                |
|----------|---|---|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|---------------------|
|          |   |   |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                     |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                  |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | Meningkatnya<br>Pemberdayaan Masyarakat                                   | 0               | 0             | 71   | 72   | 73   | 74   | 74               | KECAMATAN BEBER     |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN TALUN     |
|          |   | Peningkatan Pelayanan<br>Publik   | 0               | 0             | 75   | 75   | 75   | 75   | 75               | KECAMATAN TALUN     |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN TALUN     |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN TALUN     |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | Peningkatan Pemberdayaan<br>Masyarakat                                    | 0               | 0             | 75   | 75   | 75   | 75   | 75               | KECAMATAN TALUN     |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat  | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>SUMBER |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat  | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>SUMBER |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                     |
|----------|---|--|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|--------------------------|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                          |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                       |
|          |   | Peningkatan Pembangunan<br>Infrastruktur dan<br>Pemberdayaan Masyarakat<br>Kelurahan | 75              | 75            | 75   | 75   | 75   | 75   | 75               | KECAMATAN<br>SUMBER      |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat             | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>SUMBER      |
| 7.01.    | <b>KECAMATAN</b>  |  |                 |               |      |      |      |      |                  |                          |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Meningkatnya Pelayanan<br>Publik   | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>DUKUPUNTANG |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Meningkatnya<br>Pemberdayaan Masyarakat  | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>DUKUPUNTANG |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat            | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>DUKUPUNTANG |
| 7.01.05. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>UMUM             | Meningkatnya Wawasan<br>Kebangsaan di wilayah<br>Kecamatan                           | 0               | 0             | 0    | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>DUKUPUNTANG |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | Meningkatnya<br>Pemberdayaan Masyarakat  | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>DUKUPUNTANG |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN                            | Meningkatnya Pelayanan<br>Publik   | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>PALIMANAN   |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                   |
|----------|---|---|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|------------------------|
|          |   |   |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                        |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                     |
|          | DAN PELAYANAN<br>PUBLIK   |   |                 |               |      |      |      |      |                  |                        |
|          |   | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat                                   | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>PALIMANAN |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat                                   | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>PALIMANAN |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat                                   | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>PALIMANAN |
| 7.01.05. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>UMUM             | Persentase Urusan<br>Pelimpahan Kewenangan<br>pemerintahan umum dan<br>ketertiban umum yang<br>dilaksanakan | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>PALIMANAN |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | Meningkatnya<br>Pemberdayaan Masyarakat   | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>PALIMANAN |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Meningkatnya Pelayanan<br>Publik  | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>PLUMBON   |
|          |   | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat                                   | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>PLUMBON   |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT                                     | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat                                   | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>PLUMBON   |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                                    | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                 |
|----------|---|---|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|----------------------|
|          |   |   |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                      |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                   |
|          | DESA DAN<br>KELURAHAN   |   |                 |               |      |      |      |      |                  |                      |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>PLUMBON |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | Meningkatnya<br>Pemberdayaan Masyarakat                                   | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>PLUMBON |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Meningkatnya Pelayanan<br>Publik  | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN DEPOK      |
|          |   | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat  | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN DEPOK      |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat  | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN DEPOK      |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat  | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN DEPOK      |
| 7.01.05. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>UMUM             | Meningkatnya Prosentase<br>Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintahan Umum    | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN DEPOK      |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN                                    | Meningkatnya<br>Pemberdayaan Masyarakat                                   | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN DEPOK      |





| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                                    | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                  |
|----------|---|---|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|-----------------------|
|          |   |   |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                       |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                    |
|          | PEMERINTAHAN<br>DESA  |   |                 |               |      |      |      |      |                  |                       |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Meningkatnya Pelayanan<br>Publik  | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN WERU        |
|          |   | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 75              | 80            | 85   | 90   | 95   | 100  | 100              | KECAMATAN WERU        |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 75              | 80            | 85   | 90   | 95   | 100  | 100              | KECAMATAN WERU        |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 75              | 80            | 85   | 90   | 95   | 100  | 100              | KECAMATAN WERU        |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | Meningkatnya<br>Pemberdayaan Masyarakat                                   | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN WERU        |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Meningkatnya Pelayanan<br>Publik  | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>KEDAWUNG |
|          |   | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat  | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>KEDAWUNG |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT                                     | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan                                  | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>KEDAWUNG |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                                   | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                    |
|----------|---|--|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|-------------------------|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                         |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                      |
|          | DESA DAN<br>KELURAHAN   | Pemerintahan Kepada<br>Camat   |                 |               |      |      |      |      |                  |                         |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>KEDAWUNG   |
| 7.01.05. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>UMUM             | Meningkatnya Prosentase<br>Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintahan Umum   | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>KEDAWUNG   |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | Meningkatnya<br>Pemberdayaan Masyarakat                                  | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>KEDAWUNG   |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Meningkatnya Pelayanan<br>Publik   | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>GUNUNGJATI |
|          |   | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>GUNUNGJATI |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>GUNUNGJATI |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>GUNUNGJATI |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN                                    | Meningkatnya<br>Pemberdayaan Masyarakat                                  | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>GUNUNGJATI |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                                    | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                   |
|----------|---|---|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|------------------------|
|          |   |   |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                        |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                     |
|          | PEMERINTAHAN<br>DESA  |   |                 |               |      |      |      |      |                  |                        |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Meningkatnya Pelayanan<br>Publik  | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>KAPETAKAN |
|          |   | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat  | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>KAPETAKAN |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat  | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>KAPETAKAN |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat  | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>KAPETAKAN |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | Meningkatnya<br>Pemberdayaan Masyarakat                                   | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>KAPETAKAN |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>KLANGENAN |
|          |   | Meningkatnya pelayanan<br>publik  | 0               | 80            | 82   | 83   | 84   | 85   | 85               | KECAMATAN<br>KLANGENAN |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>KLANGENAN |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM                              | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                           | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                   |
|----------|---|--|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|------------------------|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                        |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                     |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN KLANGENAN    |
| 7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA        | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat                             | 0               | 85            | 87   | 90   | 93   | 95   | 450              | KECAMATAN KLANGENAN    |
| 7,       | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>                                  |  |                 |               |      |      |      |      |                  |                        |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Meningkatnya Pelayanan Publik                                    | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN ARJAWINANGUN |
|          |   | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat  | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN ARJAWINANGUN |
|          |   | Penampung Kegiatan Prioritas Pusdatin                            | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 400              | KECAMATAN ARJAWINANGUN |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat  | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN ARJAWINANGUN |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat  | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN ARJAWINANGUN |
| 7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA        | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat                             | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN ARJAWINANGUN |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                                    | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                    |
|----------|---|---|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|-------------------------|
|          |   |   |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                         |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                      |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>PANGURAGAN |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>PANGURAGAN |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>PANGURAGAN |
| 7.01.05. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>UMUM             | Meningkatnya Prosentase<br>Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintahan Umum    | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>PANGURAGAN |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Meningkatnya Pelayanan<br>Publik  | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>CIWARINGIN |
|          |   | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>CIWARINGIN |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>CIWARINGIN |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>CIWARINGIN |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                                   | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                    |
|----------|---|--|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|-------------------------|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                         |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                      |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | Meningkatnya<br>Pemberdayaan Masyarakat                                  | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>CIWARINGIN |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Meningkatnya Pelayanan<br>Publik   | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>SUSUKAN    |
|          |   | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>SUSUKAN    |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>SUSUKAN    |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>SUSUKAN    |
| 7.01.05. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>UMUM             | Meningkatnya Prosentase<br>Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintahan Umum   | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>SUSUKAN    |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | Meningkatnya<br>Pemberdayaan Masyarakat                                  | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>SUSUKAN    |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Meningkatnya Pelayanan<br>Publik   | 100             | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>GEGESIK    |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM                              | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                           | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD               |
|----------|---|--|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|--------------------|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                    |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                 |
|          |   | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 0               | 62            | 85   | 87   | 90   | 92   | 92               | KECAMATAN GEGESIK  |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 0               | 62            | 85   | 87   | 90   | 92   | 92               | KECAMATAN GEGESIK  |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 0               | 62            | 85   | 87   | 90   | 92   | 92               | KECAMATAN GEGESIK  |
| 7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA        | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat                             | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN GEGESIK  |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 75              | 80            | 80   | 80   | 80   | 80   | 400              | KECAMATAN KALIWEDI |
|          |   | Meningkatnya Pelayanan Publik                                    | 0               | 2             | 0    | 2    | 2    | 2    | 8                | KECAMATAN KALIWEDI |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 75              | 80            | 80   | 80   | 80   | 80   | 400              | KECAMATAN KALIWEDI |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 75              | 80            | 80   | 80   | 80   | 80   | 400              | KECAMATAN KALIWEDI |
| 7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA        | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat                             | 0               | 2             | 0    | 2    | 2    | 2    | 8                | KECAMATAN KALIWEDI |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                      |
|----------|---|---|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|---------------------------|
|          |   |   |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                           |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                        |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Meningkatnya Prosentase Pelayanan Publik  | 55              | 55            | 60   | 65   | 70   | 75   | 75               | KECAMATAN<br>KARANGWARENG |
|          |   | Meningkatnya prosentase pelaksanaan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat cakupan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan kepada Camat | 55              | 55            | 60   | 65   | 70   | 75   | 75               | KECAMATAN<br>KARANGWARENG |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Meningkatnya prosentase pelaksanaan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat cakupan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan kepada Camat | 55              | 55            | 60   | 65   | 70   | 75   | 75               | KECAMATAN<br>KARANGWARENG |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Meningkatnya prosentase pelaksanaan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat cakupan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan kepada Camat | 55              | 55            | 60   | 65   | 70   | 75   | 75               | KECAMATAN<br>KARANGWARENG |
| 7.01.05. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>UMUM             | Meningkatnya Pelayanan Publik   | 0               | 0             | 0    | 100  | 100  | 100  | 300              | KECAMATAN<br>KARANGWARENG |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN                                    | Meningkatnya Prosentase Pemberdayaan Masyarakat   | 0,64            | 0,64          | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65             | KECAMATAN<br>KARANGWARENG |





| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                                    | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                     |
|----------|---|---|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|--------------------------|
|          |   |   |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                          |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                       |
|          | PEMERINTAHAN<br>DESA  |   |                 |               |      |      |      |      |                  |                          |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Meningkatnya Pelayanan<br>Publik  | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>TENGAH TANI |
|          |   | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>TENGAH TANI |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>TENGAH TANI |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>TENGAH TANI |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | Meningkatnya<br>Pemberdayaan Masyarakat                                   | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>TENGAH TANI |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Meningkatnya Kualitas<br>Pelayanan Publik                                 | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>GEMPOL      |
|          |   | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>GEMPOL      |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT                                     | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan                                 | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>GEMPOL      |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                                    | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                   |
|----------|---|---|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|------------------------|
|          |   |   |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                        |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                     |
|          | DESA DAN<br>KELURAHAN   | Pemerintahan Kepada<br>Camat  |                 |               |      |      |      |      |                  |                        |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>GEMPOL    |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | Meningkatnya<br>Pemberdayaan Masyarakat                                   | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>GEMPOL    |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Meningkatnya Pelayanan<br>Publik  | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>PASALEMAN |
|          |   | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintah Kepada Camat      | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>PASALEMAN |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Cakupan Pelimpahan<br>sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan kepada<br>camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>PASALEMAN |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Cakupan Pelimpahan<br>sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan kepada<br>camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>PASALEMAN |
| 7.01.05. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>UMUM             | Meningkatnya Pelayanan<br>Publik  | 0               | 0             | 0    | 95   | 96   | 97   | 288              | KECAMATAN<br>PASALEMAN |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | Meningkatkan<br>Pemberdayaan Masyarakat                                   | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>PASALEMAN |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                           | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD               |
|----------|---|--|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|--------------------|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                    |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                 |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Meningkatnya Pelayanan Publik                                    | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN PLERED   |
|          |   | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 55              | 60            | 65   | 70   | 75   | 80   | 80               | KECAMATAN PLERED   |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 55              | 60            | 65   | 70   | 75   | 80   | 80               | KECAMATAN PLERED   |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 55              | 60            | 65   | 70   | 75   | 80   | 80               | KECAMATAN PLERED   |
| 7.01.05. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>UMUM             | Meningkatnya Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN PLERED   |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat                             | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN PLERED   |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Program Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Publik                | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN PABUARAN |
|          |   | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN PABUARAN |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                                    | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                  |
|----------|---|---|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|-----------------------|
|          |   |   |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                       |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                    |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>PABUARAN |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>PABUARAN |
| 7.01.05. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>UMUM             | Meningkatnya pelayanan<br>Publik  | 0               | 0             | 0    | 100  | 100  | 100  | 300              | KECAMATAN<br>PABUARAN |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | Meningkatnya<br>Pemberdayaan Masyarakat                                   | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>PABUARAN |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Meningkatnya Pelayanan<br>Publik  | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>GREGED   |
|          |   | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>GREGED   |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>GREGED   |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>GREGED   |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                                   | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                      |
|----------|---|--|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|---------------------------|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                           |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                        |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | Persentasi partisipasi<br>masyarakat dalam<br>pembangunan                | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>GREGED       |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>JAMBLANG     |
|          |   | Meningkatnya Pelayanan<br>Publik   | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>JAMBLANG     |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>JAMBLANG     |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>JAMBLANG     |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | Meningkatnya<br>Pemberdayaan Masyarakat                                  | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>JAMBLANG     |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Meningkatnya Pelayanan<br>Publik   | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>SURANENGGALA |
|          |   | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>SURANENGGALA |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT                                     | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>SURANENGGALA |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                                   | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |       |       |       |       | Kondisi<br>Akhir | SKPD                                      |
|----------|---|--|-----------------|---------------|-------|-------|-------|-------|------------------|---|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |                  |   |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6     | 7     | 8     | 9     | 10               | 11  |
|          | DESA DAN<br>KELURAHAN   |  |                 |               |       |       |       |       |                  |   |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTERAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM   | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | KECAMATAN<br>SURANENGGALA                 |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA  | Meningkatnya<br>Pemberdayaan Masyarakat                                  | 100             | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | KECAMATAN<br>SURANENGGALA                 |
| 0,       | <b>NON URUSAN</b>   |  |                 |               |       |       |       |       |                  |   |
| 1.05.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN<br/>KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>  |  |                 |               |       |       |       |       |                  |   |
| 1.05.03. | PROGRAM<br>PENANGGULANGA<br>N BENCANA   | Meningkatnya Indeks<br>Kapasitas/ Ketahanan<br>Daerah                    | 70,08           | 75,21         | 80,34 | 85,47 | 90,59 | 95,72 | 95,72            | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
| 8,       | <b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>  |  |                 |               |       |       |       |       |                  |   |
| 8.01.    | <b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>  |  |                 |               |       |       |       |       |                  |   |
| 8.01.02. | PROGRAM<br>PENGUATAN<br>IDEOLOGI<br>PANCASILA DAN<br>KARAKTER<br>KEBANGSAAN   | Prosentase meningkatnya<br>wawasan kebangsaan<br>warga negara            | 6               | 10            | 15    | 20    | 25    | 30    | 30               | BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN<br>POLITIK   |
|          |   | Prosentase meningkatnya<br>kemitraan dalam<br>berwawasan kebangsaan      | 8               | 10            | 12    | 15    | 17    | 20    | 20               | BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN<br>POLITIK   |
| 8.01.03. | PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>PERAN PARTAI<br>POLITIK DAN<br>LEMBAGA<br>PENDIDIKAN<br>MELALUI<br>PENDIDIKAN<br>POLITIK DAN<br>PENGEMBANGAN<br>ETIKA SERTA<br>BUDAYA POLITIK | Prosentase peningkatan<br>kualitas pendidikan politik<br>masyarakat      | 78              | 80            | 82    | 84    | 87    | 88    | 88               | BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN<br>POLITIK   |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM   | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                                    |
|----------|--|---|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|---|
|          |  |   |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |   |
| 1        | 2  | 3   | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                                      |
| 8.01.04. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>DAN<br>PENGAWASAN<br>ORGANISASI<br>KEMASYARAKATA<br>N   | Prosentase Meningkatnya<br>Pemberdayaan dan<br>Pengawasan Organisasi<br>Kemasyarakatan                | 5               | 13            | 15   | 20   | 25   | 27   | 100              | BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN<br>POLITIK |
| 8.01.05. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGEMBANGAN<br>KETAHANAN<br>EKONOMI,<br>SOSIAL, DAN<br>BUDAYA   | Prosentase Meningkatnya<br>Pembinaan dan<br>Pengembangan Ketahanan<br>Ekonomi, Sosial dan<br>Budaya   | 4               | 5             | 20   | 25   | 25   | 25   | 100              | BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN<br>POLITIK |
| 8.01.06. | PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>KEWASPADAAN<br>NASIONAL DAN<br>PENINGKATAN<br>KUALITAS DAN<br>FASILITASI<br>PENANGANAN<br>KONFLIK SOSIAL | Prosentase Peningkatan<br>keamanan dan<br>kenyamanan Lingkungan<br>yang dilakukan                     | 10              | 8             | 10   | 12   | 14   | 16   | 16               | BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN<br>POLITIK |
|          |  | Prosentase meningkatnya<br>ketentraman dan<br>ketertiban umum dalam<br>kerangka kesatuan<br>berbangsa | 20              | 18            | 16   | 15   | 13   | 10   | 10               | BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN<br>POLITIK |

Sumber: Hasil analisis Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, 2021



**Tabel 8.1**

**Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran  
(dampak/impact) Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024**

| No | Aspek/ Fokus/ Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Rumus  | Satuan         | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada<br>Awal<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi | Target Capaian Setiap Tahun- |              |              |              |              | Kondisi<br>Kinerja<br>pada<br>akhir<br>Periode<br>RPJMD | Sumber Data |
|----|---|--|----------------|--|-----------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|-------------|
|    |   |  |                |  | 2020      | 2021                         | 2022         | 2023         | 2024         |              |   |             |
| 1  | 2   | 3  | 4              | 5  | 6         | 7                            | 8            | 9            | 10           | 11           | 12  |             |
|    | ASPEK KESEJAHTERAAN<br>MASYARAKAT                                       |  |                |  |           |                              |              |              |              |              |   |             |
|    | FOKUS KESEJAHTERAAN<br>DAN PEMERATAAN<br>EKONOMI                        |  |                |  |           |                              |              |              |              |              |   |             |
| 1  | Pertumbuhan PDRB Atas<br>Harga Konstan                                  | (PDRB pada tahun<br>berkenaan – PDRB<br>tahun sebelumnya)/<br>PDRB tahun sebelumnya<br>X 100%                                    | Persen         | 4,68   | -1,08     | 4,38                         | 4,61         | 4,84         | 5,08         | 5,08         | BPS   |             |
| 2  | Laju inflasi  | Perubahan nilai inflasi<br>dari nilai tahun<br>sebelumnya  | Persen         | 3,19   | 2,7 – 3,5 | 2,7 –<br>3,5                 | 2,7 –<br>3,5 | 2,7 –<br>3,5 | 2,7 –<br>3,5 | 2,7 –<br>3,5 | BPS   |             |
| 3  | PDRB per kapita   |  |                |  |           |                              |              |              |              |              |   |             |
|    | a. PDRB per kapita ADHB   | PDRB ADHB/ jumlah<br>Penduduk  | Juta<br>Rupiah | 22,41  | 22,43     | 23,25                        | 24,95        | 26,78        | 28,74        | 28,74        | BPS   |             |
|    | b. PDRB per kapita ADHK   | PDRB ADHK/ jumlah<br>Penduduk  | Juta<br>Rupiah | 15.37  | 15,82     | 16,37                        | 16,93        | 17,49        | 18,04        | 18,04        | BPS   |             |
| 4  | Indeks Gini   | Tingkat kesenjangan<br>pendapatan yang<br>dihitung melalui variabel<br>total pendapatan dan<br>total pengeluaran per<br>penduduk | Poin           | 0,344  | 0,338     | 0,336                        | 0,334        | 0,332        | 0,330        | 0,330        | BPS   |             |
| 5  | Prosentase penduduk<br>miskin   | Jumlah penduduk<br>dibawah garis   | Persen         | 9,94   | 11,24     | 11,14                        | 11,04        | 10,94        | 10,84        | 10,84        | BPS   |             |





| No | Aspek/ Fokus/ Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Rumus   | Satuan | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada<br>Awal<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi | Target Capaian Setiap Tahun- |       |       |       |       | Kondisi<br>Kinerja<br>pada<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Sumber Data |
|----|---|---|--------|--|-----------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|---|-------------|
|    |   |   |        |  | 2020      | 2021                         | 2022  | 2023  | 2024  |       |   |             |
| 1  | 2   | 3   | 4      | 5  | 6         | 7                            | 8     | 9     | 10    | 11    | 12  |             |
|    |   | kemiskinan/total jumlah penduduk X 100%   |        |  |           |                              |       |       |       |       |   |             |
| 6  | Indeks keparahan kemiskinan   | Ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin  | Persen | 0,26   | 0,24      | 0,51                         | 0,51  | 0,5   | 0,5   | 0,5   | BPS   |             |
| 7  | Indeks kedalaman kemiskinan   | Rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan   | Persen | 1,39   | 1,30      | 2,18                         | 2,17  | 2,16  | 2,15  | 2,15  | BPS   |             |
|    | <b>FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>                                       |   |        |  |           |                              |       |       |       |       |   |             |
| 8  | IPM   | (Indeks Kesehatanx Indeks Pendidkanx Indeks Pengeluaran) <sup>1/3</sup> x 100   | Poin   | 68,69  | 68,75     | 69,93                        | 69,92 | 70,53 | 71,15 | 71,15 | BPS   |             |
| 9  | Angka Melek Huruf   | Jumlah penduduk usia di atas 15 tahun yang bisa baca tulis/ jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas x 100%  | Persen | 95,53  | 96        | 96,58                        | 97,16 | 97,74 | 98,32 | 98,32 | BPS   |             |
| 10 | Angka rata-rata Lama Sekolah  | Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal yang dihitung melalui variabel partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang pernah diduduki, kelas yang sedang dijalani, dan jenjang pendidikan yang ditamatkan | Tahun  | 6,71   | 6,92      | 7,05                         | 7,18  | 7,31  | 7,44  | 7,44  | Disdik  |             |



| No | Aspek/ Fokus/ Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Rumus   | Satuan | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada<br>Awal<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi   | Target Capaian Setiap Tahun- |             |             |             |             | Kondisi<br>Kinerja<br>pada<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Sumber Data |
|----|---|---|--------|--|-------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|
|    |   |   |        |  | 2020        | 2021                         | 2022        | 2023        | 2024        |             |   |             |
| 1  | 2   | 3   | 4      | 5  | 6           | 7                            | 8           | 9           | 10          | 11          | 12  |             |
| 11 | Umur Harapan Hidup (UHH)  | Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh sejak lahir yang dihitung melalui variabel anak lahir hidup dan anak masih hidup | Tahun  | 71,82  | 71,99       | 72,11                        | 72,24       | 72,36       | 72,48       | 72,48       | Dinkes  |             |
| 12 | Persentase Balita Gizi Buruk  | Jumlah balita gizi buruk / jumlah balita X 100%   | %      | 0,17   | 0,16        | 0,15                         | 0,14        | 0,13        | 0,12        | 0,12        | Dinkes  |             |
| 13 | Prevalensi balita gizi kurang   | Jumlah balita gizi kurang / jumlah balita X 100%  | %      | 7,5  | 7,3         | 7                            | 6,8         | 6,5         | 6,2         | 6,2         | Dinkes  |             |
| 14 | Cakupan desa siaga aktif  | Jumlah desa siaga aktif / jumlah desa siaga yang dibentuk X 100%  | %      | 100  | 100         | 100                          | 100         | 100         | 100         | 100         | Dinkes  |             |
| 15 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja                                      | Jumlah angkatan kerja / jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun) X 100%   | %      | 65,38  | 63,79       | 62,62                        | 63,99       | 63,99       | 65,36       | 65,36       | Disnakertran  |             |
| 16 | Tingkat Pengangguran Terbuka  | Jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja/jumlah angkatan kerja X 100%   | Prosen | 10,28  | 11,52       | 11,12                        | 10,70       | 10,30       | 9,90        | 9,90        | Disnakertran  |             |
| 17 | Rasio penduduk yang bekerja   | Penduduk yang bekerja/ angkatan kerja X 100%  | %      | 89,44  | 90,89       | 91,53                        | 92,13       | 92,69       | 93,21       | 93,21       | Disnakertran  |             |
| 18 | Laju pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010                              | PDRB ADHK/Jumlah penduduk X 100%  | %      | 7,37   | 4,20 – 4,67 | 4,20 – 4,75                  | 4,20 – 4,82 | 4,20 – 4,90 | 4,20 – 4,97 | 4,20 – 4,97 | BPS   |             |
| 19 | Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas          | Kesempatan kerja/jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun) X 100%  | Persen | 58,66  | 56,44       | 57,22                        | 58,03       | 58,83       | 59,64       | 59,64       | Disnakertrans   |             |



| No | Aspek/ Fokus/ Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Rumus   | Satuan | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada<br>Awal<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi | Target Capaian Setiap Tahun- |       |       |       |       | Kondisi<br>Kinerja<br>pada<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Sumber Data |
|----|---|---|--------|--|-----------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|---|-------------|
|    |   |   |        |  | 2020      | 2021                         | 2022  | 2023  | 2024  |       |   |             |
| 1  | 2   | 3   | 4      | 5  | 6         | 7                            | 8     | 9     | 10    | 11    | 12  |             |
| 20 | Indeks Kepuasan Masyarakat  | Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi x nilai penimbang         | Poin   | 3,25   | 3,27      | 3,65                         | 3,85  | 3,95  | 4,00  | 4,00  | Bag Organisasi SETDA                                    |             |
| 21 | Indeks Kemandirian Fiskal   | Jumlah PAD/Jumlah Pendapatan Daerah X 100%  | Prosen | 15,71  | 16,24     | 16,79                        | 17,36 | 17,95 | 18,56 | 18,56 | BAPENDA BKAD  |             |
| 22 | Opini BPK   | Penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah              | Indeks | WTP  | WTP       | WTP                          | WTP   | WTP   | WTP   | WTP   | BKAD  |             |
| 23 | Pencapaian skor PPH Ketersediaan  | Ketersediaan energi masing-masing kelompok pangan/Angka Kecukupan Energi X 100          | Poin   | 71,17  | 71,44     | 71,71                        | 71,98 | 72,25 | 72,52 | 72,52 | Dishanpang  |             |
| 24 | Pencapaian skor PPH Konsumsi  | Konsumsi energi masing-masing kelompok pangan/Angka Kecukupan Energi X 100              | Poin   | 91,50  | 93        | 93,10                        | 93,20 | 93,30 | 93,40 | 93,40 | Dishanpang  |             |
| 25 | Penguatan cadangan pangan per 1.440 ton                                 | Jumlah cadangan pangan kabupaten/1.440 ton X 100%                                       | %      | 90,71  | 182       | 45,58                        | 66,67 | 84,72 | 104,1 | 104,1 | Dishanpang  |             |
| 26 | Daerah rawan pangan yang diintervensi                                   | Jumlah daerah rawan pangan yang diintervensi/ jumlah seluruh daerah rawan pangan X 100% | %      | 26,01  | 20        | 20                           | 20    | 20    | 20    | 100   | Dishanpang  |             |
| 27 | Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB                   | Jumlah PDRB sektor pertanian, perkebunan/ Jumlah PDRB X 100%                            | %      | 11,27  | 12,97     | 13,02                        | 13,07 | 13,12 | 13,17 | 13,17 | BPS   |             |



| No | Aspek/ Fokus/ Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Rumus   | Satuan | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada<br>Awal<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi | Target Capaian Setiap Tahun- |         |         |         |         | Kondisi<br>Kinerja<br>pada<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Sumber Data |
|----|---|---|--------|--|-----------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---|-------------|
|    |   |   |        |  | 2020      | 2021                         | 2022    | 2023    | 2024    |         |   |             |
| 1  | 2   | 3   | 4      | 5  | 6         | 7                            | 8       | 9       | 10      | 11      | 12  |             |
| 28 | Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB                    | Jumlah PDRB Sektor Pertanian (Palawija)/ Jumlah PDRB X 100%                 | %      | 45,83  | 48,75     | 48,77                        | 48,79   | 48,81   | 48,83   | 48,83   | BPS   |             |
| 29 | Produksi sektor pertanian   | Jumlah produksi komoditas pertanian ( ton )                                 | Ton    | 420.707  | 465.237   | 469.133                      | 473.068 | 477.022 | 481.066 | 481.066 | Distan  |             |
| 30 | Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB                              | Jumlah PDRB sektor perkebunan/ Jumlah PDRB X 100%                           | %      | 12,19  | 12,53     | 12,54                        | 12,55   | 12,56   | 12,57   | 12,57   | BPS   |             |
| 31 | Produksi sektor perkebunan  | Jumlah produksi komoditas perkebunan dalam ton                              | Ton    | 19.262   | 24.352    | 24.401                       | 24.450  | 24.498  | 24.547  | 24.547  | Distan  |             |
| 32 | Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB                       | Jumlah produksi padi hasil kelompok tani/ jumlah total produksi padi X 100% | %      | 100  | 100       | 100                          | 100     | 100     | 100     | 100     | Distan  |             |
| 33 | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB                              | Jumlah PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Jumlah PDRB X 100% | %      | 3,54**   | 3,6       | 3,63                         | 3,66    | 3,69    | 3,72    | 3,72    | BPS   |             |
| 34 | Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB                  | Jumlah PDRB sektor kelautan dan perikanan/ Jumlah PDRB X 100%               | %      | 2,68**   | 2,74      | 2,77                         | 2,8     | 2,83    | 2,86    | 2,86    | BPS   |             |
| 35 | Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB                             | Jumlah PDRB sektor perdagangan/ Jumlah PDRB X 100%                          | %      | 23**   | 20        | 20                           | 20      | 20      | 20      | 20      | BPS   |             |
| 36 | Kontribusi sektor industri terhadap PDRB                                | Jumlah PDRB sektor industri/ Jumlah PDRB X 100%                             | %      | 20**   | 20        | 20                           | 20      | 20      | 20      | 20      | BPS   |             |



| No | Aspek/ Fokus/ Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Rumus  | Satuan         | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada<br>Awal<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi | Target Capaian Setiap Tahun- |        |        |        |        | Kondisi<br>Kinerja<br>pada<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Sumber Data |
|----|---|--|----------------|--|-----------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|---|-------------|
|    |   |  |                |  | 2020      | 2021                         | 2022   | 2023   | 2024   |        |   |             |
| 1  | 2   | 3  | 4              | 5  | 6         | 7                            | 8      | 9      | 10     | 11     | 12  |             |
| 37 | Kontribusi industri rumah<br>tangga terhadap PDRB<br>sektor industri    | Jumlah PDRB sektor<br>industri rumah tangga/<br>Jumlah PDRB X 100%   | %              | 7**  | 7         | 7                            | 7      | 7      | 7      | 7      | BPS   |             |
| 38 | Pertumbuhan industri  | (Jumlah industri tahun<br>berkenaan – Jumlah<br>industri tahun<br>sebelumnya)/ Jumlah<br>industri tahun<br>sebelumnya X 100% | %              | 2,19   | 1,15      | 1,1                          | 1,12   | 1,17   | 1,22   | 1,22   | Disdagin  |             |
|    | <b>ASPEK DAYA SAING<br/>DAERAH</b>                                      |  |                |  |           |                              |        |        |        |        |   |             |
|    | <b>FOKUS KEMAMPUAN<br/>EKONOMI DAERAH</b>                               |  |                |  |           |                              |        |        |        |        |   |             |
| 1  | Pengeluaran konsumsi<br>rumah tangga per kapita<br>per tahun            | Total pengeluaran RT/<br>Jumlah RT   | Ribu<br>Rupiah | 10.212**   | 10.812    | 11.112                       | 11.412 | 11.712 | 12.012 | 12.012 | BPS   |             |
| 2  | Persentase pengeluaran<br>konsumsi non pangan per<br>kapita             | Total pengeluaran RT<br>non pangan/ Total<br>Pengeluaran X 100%  | %              | 41,62  | 46,27     | 47,27                        | 48,27  | 49,27  | 50,27  | 50,27  | BPS   |             |
| 3  | Rasio ekspor + impor<br>terhadap PDB                                    | (Jumlah ekspor<br>daerah+impor daerah) /<br>PDB  | %              | 1,14   | 1,14      | 1,14                         | 1,15   | 1,15   | 1,16   | 1,16   | Disdagin  |             |
|    | <b>FOKUS FASILITAS<br/>WILAYAH/<br/>INFRASTRUKTUR</b>                   |  |                |  |           |                              |        |        |        |        |   |             |
| 4  | Ketaatan terhadap RTRW  | Realisasi RTRW/<br>Rencana Peruntukan X<br>100%  | %              | na   | 100       | 100                          | 100    | 100    | 100    | 100    | PUPR  |             |
| 5  | Jenis, kelas dan jumlah<br>restoran                                     | Jumlah restoran<br>berdasarkan jenis dan<br>kelasnya   | Unit           | 2.015  | 2.370     | 2.725                        | 3.080  | 3.435  | 3.790  | 3.790  | Data Bapenda  |             |
|    | a. Restoran   | Jumlah restoran  | Unit           | 30   | 31        | 32                           | 33     | 34     | 35     | 35     | Data Bapenda  |             |



| No | Aspek/ Fokus/ Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Rumus  | Satuan | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada<br>Awal<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi | Target Capaian Setiap Tahun- |       |       |       | Kondisi<br>Kinerja<br>pada<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Sumber Data  |
|----|---|--|--------|--|-----------|------------------------------|-------|-------|-------|---|--------------|
|    |   |  |        |  | 2020      | 2021                         | 2022  | 2023  | 2024  |   |              |
| 1  | 2   | 3  | 4      | 5  | 6         | 7                            | 8     | 9     | 10    | 11  | 12           |
|    | b. Rumah Makan  | Jumlah rumah makan   | Unit   | 200  | 210       | 220                          | 230   | 240   | 250   | 250   | Data Bapenda |
|    | c. Cafe   | Jumlah cafe  | Unit   | 18   | 19        | 20                           | 21    | 22    | 23    | 23  | Data Bapenda |
|    | d. Kantin   | Jumlah kantin  | Unit   | 67   | 70        | 73                           | 76    | 79    | 82    | 82  | Data Bapenda |
|    | e. Katering   | Jumlah katering  | Unit   | 850  | 1.020     | 1.190                        | 1.360 | 1.530 | 1.700 | 1.700   | Data Bapenda |
|    | f. Jasa Boga  | Jumlah jasa boga   | Unit   | 850  | 1.020     | 1.190                        | 1.360 | 1.530 | 1.700 | 1.700   | Data Bapenda |
| 6  | Jenis, kelas dan jumlah penginapan/ hotel berdasarkan data pajak:       | Jumlah penginapan atau hotel berdasarkan jenis dan kelasnya            | Unit   | 78   | 88        | 88                           | 88    | 88    | 88    | 88  | Data Bapenda |
|    | a. Hotel Bintang Empat  | Jumlah hotel bintang empat   | Unit   | 1  | 1         | 1                            | 1     | 1     | 1     | 1   | Data Bapenda |
|    | b. Hotel Bintang Tiga   | Jumlah hotel bintang tiga  | Unit   | 3  | 4         | 4                            | 4     | 4     | 4     | 4   | Data Bapenda |
|    | c. Hotel Bintang Dua  | Jumlah hotel bintang dua   | Unit   | 2  | 2         | 2                            | 2     | 2     | 2     | 2   | Data Bapenda |
|    | d. Hotel Melati Tiga  | Jumlah hotel melati tiga   | Unit   | 11   | 11        | 11                           | 11    | 11    | 11    | 11  | Data Bapenda |
|    | e. Hotel Melati Dua   | Jumlah hotel melati dua  | Unit   | 1  | 1         | 1                            | 1     | 1     | 1     | 1   | Data Bapenda |
|    | f. Hotel Melati Satu  | Jumlah hotel melati satu   | Unit   | 5  | 5         | 5                            | 5     | 5     | 5     | 5   | Data Bapenda |
|    | g. Losmen/ Rumah Penginapan/Pesanggerahan                               | Jumlah losmen/rumah penginapan/ pesanggerahan                          | Unit   | 55   | 64        | 64                           | 64    | 64    | 64    | 64  | Data Bapenda |
| 7  | RT yang menggunakan air bersih  | Jumlah RT yang berakses menggunakan air bersih/ jumlah total RT X 100% | %      | 74,84  | 69,6      | 70,59                        | 71,59 | 72,58 | 73,15 | 73,15   | DPKPP        |
|    | <b>FOKUS IKLIM<br/>BERINVESTASI</b>                                     |  |        |  |           |                              |       |       |       |   |              |
| 8  | Angka kriminalitas  | Jumlah kasus kriminalitas (kejahatan seksual, penganiyaan, pencurian)  | kasus  | 287  | 211       | 197                          | 142   | 101   | 55    | 55  | SatpolPP     |



| No | Aspek/ Fokus/ Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Rumus   | Satuan           | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada<br>Awal<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi | Target Capaian Setiap Tahun- |        |         |         | Kondisi<br>Kinerja<br>pada<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Sumber Data |
|----|---|---|------------------|--|-----------|------------------------------|--------|---------|---------|---|-------------|
|    |   |   |                  |  | 2020      | 2021                         | 2022   | 2023    | 2024    |   |             |
| 1  | 2   | 3   | 4                | 5  | 6         | 7                            | 8      | 9       | 10      | 11  | 12          |
| 9  | Angka kriminalitas yang tertangani                                      | Jumlah tindak kriminal tertangani/ Jumlah penduduk X 10.000 | /10.000 penduduk | 1,33   | 0,94      | 0,87                         | 0,61   | 0,43    | 0,23    | 0,23  | Satpol PP   |
| 10 | Jumlah demonstrasi  | Jumlah kejadian demonstrasi                                 | kali             | 30   | 25        | 25                           | 25     | 20      | 20      | 20  | Kesbangpol  |
| 11 | Lama proses perijinan   | Waktu yang dibutuhkan utk memproses perijinan               | hari             | 5  | 5         | 5                            | 5      | 5       | 5       | 5   | DPMPTSP     |
| 12 | Realisasi nilai pajak daerah  | Jumlah realisasi nilai pajak daerah                         | Milyar Rupiah    | 190  | 239,86    | 275,84                       | 317,21 | 364,77  | 419,48  | 419,48  | BAPPENDA    |
|    | a. Pajak Hotel  | Jumlah realisasi nilai pajak hotel                          | Milyar Rupiah    | 4,725  | 6,05      | 6,959                        | 8,003  | 9,203   | 10,584  | 10,584  | BAPPENDA    |
|    | b. Pajak Restoran   | Jumlah realisasi nilai pajak restoran                       | Milyar Rupiah    | 12,625   | 16,675    | 19,176                       | 22,053 | 25,361  | 29,165  | 29,165  | BAPPENDA    |
|    | c. Pajak Hiburan  | Jumlah realisasi nilai pajak hiburan                        | Milyar Rupiah    | 1,075  | 1,536     | 1,767                        | 2,032  | 2,337   | 2,687   | 2,687   | BAPPENDA    |
|    | a. Pajak Reklame  | Jumlah realisasi nilai pajak reklame                        | Milyar Rupiah    | 4,25   | 4,5       | 5,175                        | 5,951  | 6,844   | 7,871   | 7,871   | BAPPENDA    |
|    | b. Pajak Penerangan Jalan   | Jumlah realisasi nilai pajak penerangan jalan               | Milyar Rupiah    | 66,4   | 73,653    | 84,7                         | 97,405 | 112,819 | 128,819 | 128,819   | DISHUB      |
|    | c. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan                                 | Jumlah realisasi nilai pajak mineral bukan logam dan batuan | Milyar Rupiah    | 10,525   | 12,726    | 14,635                       | 16,83  | 19,355  | 22,258  | 22,258  | BAPPENDA    |
|    | d. Pajak Parkir   | Jumlah realisasi nilai pajak parkir                         | Milyar Rupiah    | 0,4  | 0,69      | 0,794                        | 0,913  | 1,049   | 1,207   | 1,207   | DISHUB      |
|    | e. Pajak Air Bawah Tanah  | Jumlah realisasi nilai pajak air bawah tanah                | Milyar Rupiah    | 0,725  | 0,998     | 1,148                        | 1,32   | 1,518   | 1,746   | 1,746   | BAPPENDA    |
|    | f. Pajak Sarang Burung Walet  | Jumlah realisasi nilai pajak sarang burung walet            | Milyar Rupiah    | 0,06   | 0,06      | 0,06                         | 0,06   | 0,06    | 0,06    | 0,06  | BAPPENDA    |
|    | g. Pajak Bumi dan Bangunan  | Jumlah realisasi nilai pajak bumi dan bangunan              | Milyar Rupiah    | 38,5   | 49,895    | 57,379                       | 65,986 | 75,884  | 87,267  | 87,267  | BAPPENDA    |



| No | Aspek/ Fokus/ Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Rumus   | Satuan           | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada<br>Awal<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi | Target Capaian Setiap Tahun- |        |         |         | Kondisi<br>Kinerja<br>pada<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Sumber Data   |
|----|---|---|------------------|--|-----------|------------------------------|--------|---------|---------|---|---------------|
|    |   |   |                  |  | 2020      | 2021                         | 2022   | 2023    | 2024    |   |               |
| 1  | 2   | 3   | 4                | 5  | 6         | 7                            | 8      | 9       | 10      | 11  | 12            |
|    | h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan                            | Jumlah realisasi nilai pajak BPHATB   | Milyar Rupiah    | 50,715   | 73,08     | 84,042                       | 96,648 | 111,146 | 127,817 | 127,817   | BAPPENDA      |
| 13 | Jumlah perda yang mendukung iklim usaha                                 | Jumlah perda yang masih relevan dan mendukung iklim usaha dan investasi   | Perda            | 13   | 13        | 13                           | 13     | 13      | 13      | 13  | DPMPPTS       |
| 14 | Persentase desa mandiri terhadap total desa                             | Jumlah desa mandiri/Jumlah total desa X 100%  | Desa             | 2  | 5         | 28                           | 49     | 70      | 91      | 91  | DPMD          |
|    | <b>FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA</b>  |   |                  |  |           |                              |        |         |         |   |               |
| 15 | Rasio lulusan S1/S2/S3  | Jumlah lulusan S1+S2+S3/ Jumlah penduduk X 10.000   | /10.000 penduduk | 241  | 406       | 528                          | 686    | 892     | 1.160   | 1.160   | Disnakertrans |
| 16 | Rasio ketergantungan  | Jumlah penduduk non produktif (usia < 15 tahun + usia > 65 tahun) / Jumlah penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) X 100% | %                | 47,19  | 46,73     | 46,5                         | 46,27  | 46,04   | 45,81   | 45,81   | BPS           |

Sumber: Hasil analisis Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, 2021





**Tabel 8.2**

**Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Program (Outcome) Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024**

| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM   | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                                       | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |       |       |       |       | Kondisi<br>Akhir | SKPD             |
|----------|--|--|-----------------|---------------|-------|-------|-------|-------|------------------|------------------|
|          |  |  |                 | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |                  |                  |
| 1        | 2  | 3  | 4               | 5             | 6     | 7     | 8     | 9     | 10               | 11               |
|          | <b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>  |  |                 |               |       |       |       |       |                  |                  |
| 1,       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |  |                 |               |       |       |       |       |                  |                  |
| 1.01.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |  |                 |               |       |       |       |       |                  |                  |
| 1.01.02. | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN   | Angka partisipasi kasar  | 67              | 68            | 68,41 | 68,82 | 69,23 | 69,65 | 69,65            | DINAS PENDIDIKAN |
|          |  | Angka partisipasi kasar SD   | 109             | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | DINAS PENDIDIKAN |
|          |  | Peningkatan Persentase Masyarakat Melek Aksara                               | 95,55           | 96            | 96,58 | 97,16 | 97,74 | 98,32 | 98,32            | DINAS PENDIDIKAN |
|          |  | Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV jenjang SD                 | 96              | 97            | 97,6  | 98,2  | 98,8  | 99,3  | 99,3             | DINAS PENDIDIKAN |
|          |  | Angka Melek Huruf Al Qur'an jenjang SD                                       | 76              | 76            | 76,46 | 76,91 | 77,38 | 77,84 | 77,84            | DINAS PENDIDIKAN |
|          |  | Angka Melek Huruf Al Qur'an SMP  | 55,7            | 59,5          | 63,3  | 67,1  | 70,9  | 74,7  | 74,7             | DINAS PENDIDIKAN |
|          |  | Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Kondisi Ruang Kelas Baik PAUD/TK | 60              | 60,35         | 60,72 | 61,09 | 61,45 | 61,82 | 61,82            | DINAS PENDIDIKAN |
|          |  | Peningkatan Capaian Angka Lulusan Kesetaraan Paket A setara SD               | 0               | 80            | 85    | 90    | 95    | 98    | 98               | DINAS PENDIDIKAN |
|          |  | Angka partisipasi kasar SMP  | 101,11          | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | DINAS PENDIDIKAN |
|          |  | Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah :                                  | 0               | 50            | 55    | 60    | 65    | 70    | 70               | DINAS PENDIDIKAN |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM   | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |       |       |       |        | Kondisi<br>Akhir | SKPD             |
|----------|--------------------------------|--|-----------------|---------------|-------|-------|-------|--------|------------------|------------------|
|          |                                |  |                 | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024   |                  |                  |
| 1        | 2                              | 3  | 4               | 5             | 6     | 7     | 8     | 9      | 10               | 11               |
|          |                                | Persentasi fasilitas yang dimiliki sekolah PAUD/TK   |                 |               |       |       |       |        |                  |                  |
|          |                                | Peningkatan Capaian Angka Kelulusan Warga Belajar Paket B setara SMP                       | 68,09           | 70            | 70,04 | 70,08 | 71,3  | 71,7   | 71,7             | DINAS PENDIDIKAN |
|          |                                | Standar Pelayanan Minimal  | 100             | 100           | 100   | 100   | 100   | 100    | 100              | DINAS PENDIDIKAN |
|          |                                | Peningkatan Angka Lulusan pada jenjang Kesetaraan Paket C Setara SMA                       | 79,68           | 80            | 80,5  | 81    | 81,4  | 81,9   | 81,9             | DINAS PENDIDIKAN |
|          |                                | Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/Mts   | 100             | 100           | 100   | 100   | 100   | 100    | 100              | DINAS PENDIDIKAN |
|          |                                | Angka Kelulusan (AL) SD/MI   | 100             | 100           | 100   | 100   | 100   | 100    | 100              | DINAS PENDIDIKAN |
|          |                                | Meningkatnya Angka Lulusan SMP   | 99,95           | 99,97         | 99,98 | 99,99 | 100   | 100,01 | 100,01           | DINAS PENDIDIKAN |
|          |                                | Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Kondisi Ruang Kelas Baik SD                    | 70              | 70,42         | 70,84 | 71,27 | 71,7  | 72,13  | 72,13            | DINAS PENDIDIKAN |
|          |                                | Ketersediaan sarana dan prasarana sekolah : Kondisi Keadaan Ruang Kelas Baik SMP           | 80              | 80,5          | 81    | 81,5  | 82    | 82,5   | 82,5             | DINAS PENDIDIKAN |
|          |                                | Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Persentasi fasilitas yang dimiliki sekolah SD  | 0               | 60            | 65    | 70    | 75    | 80     | 80               | DINAS PENDIDIKAN |
|          |                                | Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Persentasi fasilitas yang dimiliki sekolah SMP | 0               | 60            | 65    | 70    | 75    | 80     | 80               | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.03. | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | Angka partisipasi kasar  | 67              | 68            | 68,41 | 68,82 | 69,23 | 69,65  | 69,65            | DINAS PENDIDIKAN |
|          |                                | Peningkatan Capaian Angka Lulusan Kesetaraan Paket A setara SD                             | 0               | 80            | 85    | 90    | 95    | 98     | 98               | DINAS PENDIDIKAN |
|          |                                | Angka Kelulusan (AL) SD/MI   | 100             | 100           | 100   | 100   | 100   | 100    | 100              | DINAS PENDIDIKAN |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |       |       |       |       | Kondisi<br>Akhir | SKPD             |
|----------|---|---|-----------------|---------------|-------|-------|-------|-------|------------------|------------------|
|          |   |   |                 | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |                  |                  |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5             | 6     | 7     | 8     | 9     | 10               | 11               |
|          |   | Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Persentasi fasilitas yang dimiliki sekolah SD | 0               | 60            | 65    | 70    | 75    | 80    | 80               | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.04. | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                                    | Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV jenjang SD                              | 96              | 97            | 97,6  | 98,2  | 98,8  | 99,3  | 99,3             | DINAS PENDIDIKAN |
|          |   | Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah  | 100             | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.02.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>                                 |   |                 |               |       |       |       |       |                  |                  |
| 1.02.02. | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Angka kematian ibu (AKI)  | 0               | 85            | 83,5  | 82    | 80,5  | 79    | 79               | DINAS KESEHATAN  |
|          |   | Angka kematian Bayi (AKB)   | 0               | 3,81          | 3,78  | 3,75  | 3,72  | 3,69  | 3,69             | DINAS KESEHATAN  |
|          |   | Tercapainya Universal Health Coverage (UHC)   | 0               | 97            | 97,5  | 0     | 0     | 0     | 0                | DINAS KESEHATAN  |
|          |   | Meningkatnya Status Gizi Balita   | 0               | 85            | 85    | 0     | 0     | 0     | 0                | DINAS KESEHATAN  |
|          |   | Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit   | 0               | 87            | 90,5  | 0     | 0     | 0     | 0                | DINAS KESEHATAN  |
|          |   | Meningkatnya jumlah Desa Open Defecation Free (ODF)                                       | 0               | 43,87         | 49,76 | 0     | 0     | 0     | 0                | DINAS KESEHATAN  |
| 1.02.03. | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                 | Rasio Tenaga Kesehatan terhadap jumlah penduduk   | 0               | 0             | 1.665 | 1.665 | 1.665 | 1.665 | 1.665            | DINAS KESEHATAN  |
| 1.02.04. | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                 | Persentase TPM/TPP yang memenuhi syarat kesehatan   | 0               | 67            | 68    | 69    | 70    | 71    | 71               | DINAS KESEHATAN  |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM   | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |       |       |       |       | Kondisi<br>Akhir | SKPD  |
|----------|--|---|-----------------|---------------|-------|-------|-------|-------|------------------|---|
|          |  |   |                 | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |                  |   |
| 1        | 2  | 3   | 4               | 5             | 6     | 7     | 8     | 9     | 10               | 11  |
| 1.02.05. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>BIDANG<br>KESEHATAN                       | Persentase Rumah tangga<br>ber PHBS   | 62,08           | 67            | 69    | 0     | 0     | 0     | 0                | DINAS KESEHATAN                               |
| 1.03.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN<br/>PENATAAN RUANG</b>            |   |                 |               |       |       |       |       |                  |   |
| 1.03.02. | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>SUMBER DAYA<br>AIR (SDA)                                 | Persentase jaringan irigasi<br>dalam kondisi baik                                   | 68,76           | 69,92         | 70,51 | 72,84 | 75,75 | 78,67 | 78,67            | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM DAN<br>PENATAAN RUANG |
|          |  | Persentase Berkurangnya<br>luasan genangan akibat<br>banjir                         | 3,86            | 3,66          | 3,47  | 3,28  | 3,09  | 2,89  | 2,89             | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM DAN<br>PENATAAN RUANG |
| 1.03.03. | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>DAN<br>PENGEMBANGAN<br>SISTEM<br>PENYEDIAAN AIR<br>MINUM | Persentase penduduk<br>berakses air minum   | 0               | 0             | 0     | 71,66 | 72,34 | 73    | 217              | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM DAN<br>PENATAAN RUANG |
| 1.03.05. | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>DAN<br>PENGEMBANGAN<br>SISTEM AIR<br>LIMBAH              | Persentase Rumah Tinggal<br>bersanitasi   | 0               | 0             | 0     | 81    | 81,04 | 81,06 | 243,1            | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM DAN<br>PENATAAN RUANG |
| 1.03.06. | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>DAN<br>PENGEMBANGAN<br>SISTEM<br>DRAINASE                | Persentase jalan yang<br>memiliki trotoar dan<br>drainase/saluran<br>pembuangan air | 4,21            | 4,33          | 4,45  | 4,57  | 4,57  | 4,82  | 4,82             | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM DAN<br>PENATAAN RUANG |
| 1.03.08. | PROGRAM<br>PENATAAN<br>BANGUNAN<br>GEDUNG  | Rasio bangunan berIMB<br>per satuan bangunan  | 0               | 0             | 0     | 2     | 2     | 2     | 6                | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM DAN<br>PENATAAN RUANG |
| 1.03.09. | PROGRAM<br>PENATAAN<br>BANGUNAN DAN<br>LINGKUNGANNYA                               | persentase pemenuhan<br>dokumen Rencana Tata<br>Bangunan dan Lingkungan             | 0               | 20            | 20    | 20    | 20    | 20    | 100              | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM DAN<br>PENATAAN RUANG |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM   | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                                       | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |       |       |       |       | Kondisi<br>Akhir | SKPD   |
|----------|--|--|-----------------|---------------|-------|-------|-------|-------|------------------|--|
|          |  |  |                 | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |                  |  |
| 1        | 2  | 3  | 4               | 5             | 6     | 7     | 8     | 9     | 10               | 11   |
| 1.03.10. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN JALAN   | Terpeliharanya Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten                              | 662,92          | 306           | 633   | 630   | 630   | 632   | 632              | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG            |
|          |  | Persentase jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi Baik                       | 47              | 48            | 49    | 50    | 51    | 52    | 52               | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG            |
|          |  | Prosentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan liar | 0,77            | 0,76          | 0,76  | 0,75  | 0,75  | 0,75  | 0,75             | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG            |
|          |  | Tersusunnya Informasi Database Jalan dan Jembatan                            | 100             | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 500              | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG            |
| 1.03.11. | PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>JASA<br>KONSTRUKSI                                      | persentase meningkatnya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi               | 0               | 20            | 40    | 60    | 80    | 100   | 100              | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG            |
| 1.03.12. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN PENATAAN<br>RUANG                                   | Persentase pemenuhan dokumen rencana rinci tata ruang                        | 23,26           | 23,26         | 32,56 | 44,19 | 55,81 | 65,12 | 65,12            | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG            |
|          |  | Persentase ketaatan pemanfaatan ruang  | 0               | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG            |
| 1.03.03. | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>DAN<br>PENGEMBANGAN<br>SISTEM<br>PENYEDIAAN AIR<br>MINUM | Cakupan jumlah sambungan Rumah Air Minum                                     | 74,84           | 69,6          | 70,59 | 0     | 0     | 0     | 0                | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1.03.05. | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>DAN<br>PENGEMBANGAN<br>SISTEM AIR<br>LIMBAH              | Cakupan jumlah sambungan Rumah Air Limbah                                    | 82,38           | 75,66         | 75,8  | 0     | 0     | 0     | 0                | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1.03.08. | PROGRAM<br>PENATAAN<br>BANGUNAN<br>GEDUNG  | Prosentase Bangunan dan Gedung Yang Memiliki Sertifikat Laik Fungsi          | 0               | 10            | 10    | 0     | 0     | 0     | 20               | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM                                       | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                              | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |       |       |       |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD   |
|----------|--|---|-----------------|---------------|-------|-------|-------|------|------------------|--|
|          |  |   |                 | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024 |                  |  |
| 1        | 2  | 3   | 4               | 5             | 6     | 7     | 8     | 9    | 10               | 11   |
|          |  | Rasio bangunan berIMB per satuan Bangunan                           | 0               | 100           | 100   | 0     | 0     | 0    | 0                | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1.04.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b> |   |                 |               |       |       |       |      |                  |  |
| 1.04.02. | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                     | Persentase Lingkungan Permukiman yang tertata                       | 96,5            | 89,89         | 92,42 | 94,94 | 97,47 | 100  | 100              | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
|          |  | Prosentase Perencanaan Pembangunan Perumahan yng sesuai dengan NSPK | 100             | 100           | 100   | 100   | 100   | 100  | 100              | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1.04.03. | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN   | Prosentase Lingkungan Permukiman Kumuh                              | 3,7             | 2,99          | 2,24  | 1,49  | 0,74  | 0    | 0                | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
|          |  | Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan             | 73,34           | 78,67         | 84    | 89,33 | 94,66 | 100  | 100              | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1.04.04. | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH                     | Cakupan ketersediaan rumah layak huni                               | 0               | 97,09         | 97,78 | 98,58 | 99,3  | 100  | 100              | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
|          |  | Prosentase Lingkungan Permukiman Kumuh                              | 0               | 2,99          | 2,24  | 1,49  | 0,74  | 0    | 7,46             | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1.04.05. | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)      | Rasio Pemukiman Layak Huni  | 43,34           | 51,84         | 61,47 | 72,8  | 85,27 | 100  | 100              | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
|          |  | Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yg didukung dengan PSU       | 43,34           | 51,84         | 61,47 | 72,8  | 85,27 | 100  | 100              | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |       |       |       |       | Kondisi<br>Akhir | SKPD  |
|----------|---|---|-----------------|---------------|-------|-------|-------|-------|------------------|---|
|          |   |   |                 | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |                  |   |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5             | 6     | 7     | 8     | 9     | 10               | 11  |
| 1.04.06. | PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>PELAYANAN<br>SERTIFIKASI,<br>KUALIFIKASI,<br>KLASIFIKASI, DAN<br>REGISTRASI<br>BIDANG<br>PERUMAHAN DAN<br>KAWASAN<br>PERMUKIMAN | Rasio Permukiman Layak<br>Huni  | 0               | 0             | 0     | 72,8  | 85,27 | 100   | 100              | DINAS PERUMAHAN,<br>KAWASAN<br>PERMUKIMAN DAN<br>PERTANAHAN |
| 2.10.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>  |   |                 |               |       |       |       |       |                  |   |
| 2.10.04. | PROGRAM<br>PENYELESAIAN<br>SENKETA<br>TANAH GARAPAN   | prosentase penyelesaian<br>konflik pertanahan di<br>Kabupaten Cirebon         | 100             | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | DINAS PERUMAHAN,<br>KAWASAN<br>PERMUKIMAN DAN<br>PERTANAHAN |
| 2.10.05. | PROGRAM<br>PENYELESAIAN<br>GANTI KERUGIAN<br>DAN SANTUNAN<br>TANAH UNTUK<br>PEMBANGUNAN   | Prosentase kepemilikan<br>tanah pemerintah daerah<br>tertata dengan baik      | 0               | 44,12         | 50,35 | 56,57 | 62,8  | 69,03 | 69,03            | DINAS PERUMAHAN,<br>KAWASAN<br>PERMUKIMAN DAN<br>PERTANAHAN |
| 2.10.06. | PROGRAM<br>REDISTRIBUSI<br>TANAH, DAN<br>GANTI KERUGIAN<br>PROGRAM TANAH<br>KELEBIHAN<br>MAKSIMUM DAN<br>TANAH ABSENTEE                                   | Persentase penetapan<br>tanah untuk pembangunan<br>fasilitas umum             | 0               | 0             | 0     | 100   | 100   | 100   | 100              | DINAS PERUMAHAN,<br>KAWASAN<br>PERMUKIMAN DAN<br>PERTANAHAN |
| 2.10.09. | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>IZIN MEMBUKA<br>TANAH   | Tersedianya tanah untuk<br>masyarakat   | 0               | 0             | 0     | 100   | 100   | 100   | 300              | DINAS PERUMAHAN,<br>KAWASAN<br>PERMUKIMAN DAN<br>PERTANAHAN |
| 2.10.10. | PROGRAM<br>PENATAGUNAAN<br>TANAH  | Penyelesaian izin lokasi  | 37,89           | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | DINAS PERUMAHAN,<br>KAWASAN<br>PERMUKIMAN DAN<br>PERTANAHAN |
| 1.05.02. | PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>KETENTERAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM  | Prosentase peningkatan<br>pemberantasan Peredaran<br>Barang Kena Cukai Ilegal | 0               | 100           | 0     | 100   | 0     | 100   | 100              | SATUAN POLISI<br>PAMONG PRAJA                               |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |       |       |       |       | Kondisi<br>Akhir | SKPD                                     |
|----------|---|---|-----------------|---------------|-------|-------|-------|-------|------------------|--|
|          |   |   |                 | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |                  |  |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5             | 6     | 7     | 8     | 9     | 10               | 11                                       |
|          |   | Porsentase pelayanan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang dilaksanakan                | 0               | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA               |
|          |   | Porsentase pemenuhan tenaga satuan perlindungan masyarakat                                  | 98              | 98,43         | 98,48 | 98,53 | 98,58 | 98,63 | 98,63            | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA               |
|          |   | Porsentase peningkatan Jumlah lokasi rawan Penyakit Masyarakat (Pekat) yang ditertibkan     | 0               | 15            | 30    | 45    | 60    | 75    | 225              | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA               |
|          |   | Prosentase jumlah pelanggaran ketertiban dan ketentraman masyarakat yang terselesaikan      | 0               | 17,7          | 35,4  | 45,4  | 55,4  | 70,4  | 70,4             | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA               |
| 1.05.04. | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Penurunan Jumlah Kebakaran = Jumlah kebakaran yang tertangani/jumlah total kebakaran X 100% | 0               | 0             | 0     | 100   | 100   | 100   | 100              | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 1.06.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>  |   |                 |               |       |       |       |       |                  |  |
| 1.06.02. | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL   | Jumlah panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial        | 59              | 53            | 53    | 53    | 53    | 53    | 53               | DINAS SOSIAL                             |
|          |   | Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani                        | 244.832         | 1.385         | 1.200 | 1.425 | 1.425 | 1.425 | 6.860            | DINAS SOSIAL                             |
|          |   | Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang memiliki Pengetahuan dan Keterampilan       | 7.968           | 1.528         | 1.378 | 1.378 | 1.378 | 1.378 | 7.040            | DINAS SOSIAL                             |
| 1.06.03. | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN                            | Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani                        | 25              | 25            | 25    | 25    | 25    | 25    | 125              | DINAS SOSIAL                             |





| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM   | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |       |       |       |       | Kondisi<br>Akhir | SKPD                  |
|----------|--|---|-----------------|---------------|-------|-------|-------|-------|------------------|-----------------------|
|          |  |   |                 | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |                  |                       |
| 1        | 2  | 3   | 4               | 5             | 6     | 7     | 8     | 9     | 10               | 11                    |
| 1.06.04. | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL  | Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Terehabilitasi                      | 242.317         | 1.100         | 1.160 | 1.410 | 1.410 | 1.410 | 6.490            | DINAS SOSIAL          |
| 1.06.05. | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                      | Jumlah Keluarga Miskin yang Menerima Program Perlindungan dan Jaminan Sosial                  | 150             | 160           | 220   | 220   | 220   | 220   | 1.040            | DINAS SOSIAL          |
| 1.06.06. | PROGRAM PENANGANAN BENCANA   | Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dapat melaksanakan fungsi sosialnya | 242.317         | 3.420         | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 19.420           | DINAS SOSIAL          |
|          |  | Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang memiliki Pengetahuan dan Keterampilan         | 7.968           | 1.528         | 150   | 150   | 150   | 150   | 2.128            | DINAS SOSIAL          |
| 1.06.07. | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN                                     | Jumlah Taman Makam Pahlawan   | 1               | 1             | 1     | 1     | 1     | 1     | 5                | DINAS SOSIAL          |
|          |  | Terpeliharanya di Lingkungan Taman Makam Pahlawan   | 0               | 5             | 5     | 5     | 5     | 5     | 25               | DINAS SOSIAL          |
| 2,       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |   |                 |               |       |       |       |       |                  |                       |
| 2.07.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>                               |   |                 | 0             | 0     |       |       |       |                  |                       |
| 2.07.02. | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA   | Prosentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Berdasarkan Dokumen PTK : Tingkat Akurasi Indikator PTK | 1               | 0             | 0     | 0     | 1     | 0     | 1                | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| 2.07.03. | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                       | Prosentase Tenaga Kerja bersertifikat Kompetensi  | 100             | 0             | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                | DINAS KETENAGAKERJAAN |
|          |  | Tersajinya Dokumen  | 0               | 1             | 1     | 1     | 1     | 1     | 5                | DINAS KETENAGAKERJAAN |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM   | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |        |        |        |        | Kondisi<br>Akhir | SKPD                                       |
|----------|--|---|-----------------|---------------|--------|--------|--------|--------|------------------|--|
|          |  |   |                 | 2020          | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |                  |  |
| 1        | 2  | 3   | 4               | 5             | 6      | 7      | 8      | 9      | 10               | 11   |
| 2.07.04. | PROGRAM<br>PENEMPATAN<br>TENAGA KERJA  | Prosentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) propinsi | 100             | 100           | 100    | 100    | 100    | 100    | 100              | DINAS<br>KETENAGAKERJAAN                   |
| 2.07.05. | PROGRAM<br>HUBUNGAN<br>INDUSTRIAL  | Prosentase Perusahaan Yang Mendapatkan Tata Kelola Yang Layak   | 20              | 0             | 0      | 36     | 36     | 36     | 108              | DINAS<br>KETENAGAKERJAAN                   |
| 3.32.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>   |   |                 | 0             | 0      |        |        |        |                  |  |
| 3.32.03. | PROGRAM<br>PEMBANGUNAN<br>KAWASAN<br>TRANSMIGRASI  | bertambahnya wilayah tujuan transmigrasi  | 0               | 0             | 0      | 1      | 1      | 1      | 3                | DINAS<br>KETENAGAKERJAAN                   |
| 2.09.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>   |   |                 |               |        |        |        |        |                  |  |
| 2.09.02. | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>SUMBER DAYA<br>EKONOMI UNTUK<br>KEDAULATAN<br>DAN<br>KEMANDIRIAN<br>PANGAN | Persentase LPM yang dimandirikan  | 0               | 0             | 0      | 4,08   | 4,08   | 4,08   | 12,24            | DINAS KETAHANAN<br>PANGAN DAN<br>PERIKANAN |
| 2.09.03. | PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>DIVERSIFIKASI<br>DAN KETAHANAN<br>PANGAN<br>MASYARAKAT                     | Persentase ketersediaan pangan terhadap jumlah kebutuhan pangan   | 137,81          | 144,25        | 148,15 | 152,04 | 155,94 | 159,84 | 159,84           | DINAS KETAHANAN<br>PANGAN DAN<br>PERIKANAN |
|          |  | Persentase kelompok pangan yang terkendali harganya   | 71,43           | 71,43         | 71,4   | 71,4   | 78,6   | 84,7   | 84,7             | DINAS KETAHANAN<br>PANGAN DAN<br>PERIKANAN |
|          |  | Tingkat Keanekaragaman Konsumsi Pangan  | 0               | 0             | 0      | 80     | 80     | 80     | 80               | DINAS KETAHANAN<br>PANGAN DAN<br>PERIKANAN |
| 2.09.04. | PROGRAM<br>PENANGANAN<br>KERAWANAN<br>PANGAN   | Berkurangnya daerah rawan pangan  | 41              | 0             | 0      | 8      | 13     | 20     | 41               | DINAS KETAHANAN<br>PANGAN DAN<br>PERIKANAN |
| 2.09.05. | PROGRAM<br>PENGAWASAN  | Persentase PSAT aman dikonsumsi   | 67              | 88            | 84     | 80     | 85     | 90     | 90               | DINAS KETAHANAN<br>PANGAN DAN<br>PERIKANAN |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                           | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |        |        |        |        | Kondisi<br>Akhir | SKPD                                 |
|----------|---|--|-----------------|---------------|--------|--------|--------|--------|------------------|--------------------------------------|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |                  |                                      |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6      | 7      | 8      | 9      | 10               | 11                                   |
|          | KEAMANAN PANGAN   |  |                 |               |        |        |        |        |                  |                                      |
| 3,       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>                                  |  |                 |               |        |        |        |        |                  |                                      |
| 3.25.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>            |  |                 |               |        |        |        |        |                  |                                      |
| 3.25.03. | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                               | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap                                | 27.523          | 28.421        | 28.852 | 31.680 | 33.264 | 34.214 | 34.214           | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| 3.25.04. | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                              | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya                               | 32.120          | 37.180        | 39.040 | 40.990 | 43.040 | 45.190 | 45.190           | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
|          |   | Jumlah Produksi Pembenihan Ikan                                  | 113             | 435           | 437    | 440    | 445    | 451    | 451              | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| 3.25.05. | PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                | Tingkat kepatuhan pelaku usaha perikanan                         | 0               | 0             | 0      | 0,01   | 0,01   | 1,21   | 1,21             | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| 3.25.06. | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                    | Jumlah Produksi Pengolahan hasil Perikanan                       | 6.200           | 6.205         | 6.209  | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 11.000           | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
|          |   | Jumlah Konsumsi Ikan   | 26              | 27,2          | 28,4   | 29,6   | 30,8   | 32     | 32               | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| 2.11.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>                  |  |                 |               |        |        |        |        |                  |                                      |
| 2.11.02. | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP                                | Tersedianya dokumen perencanaan lingkungan hidup                 | 2               | 4             | 4      | 3      | 4      | 4      | 19               | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
| 2.11.03. | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase hasil pemantauan kualitas air yang memenuhi baku mutu | 33,3            | 42,9          | 52,4   | 61,9   | 71,4   | 81     | 81               | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|          |   | Persentase Tutupan Lahan   | 60,17           | 121,56        | 136,56 | 151,56 | 166,56 | 181,56 | 757,8            | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |        |        |        |        | Kondisi<br>Akhir | SKPD                   |
|----------|---|---|-----------------|---------------|--------|--------|--------|--------|------------------|------------------------|
|          |   |   |                 | 2020          | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |                  |                        |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5             | 6      | 7      | 8      | 9      | 10               | 11                     |
| 2.11.04. | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)  | Meningkatnya keanekaragaman hayati  | 60,17           | 121,56        | 136,56 | 151,56 | 166,56 | 181,56 | 757,8            | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan di bidang lingkungan  | 250             | 250           | 250    | 250    | 250    | 250    | 1.250            | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.08. | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                              | Meningkatnya kegiatan peduli lingkungan yang dilakukan masyarakat   | 5               | 11            | 11     | 11     | 11     | 11     | 55               | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.09. | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT   | Meningkatnya partisipasi masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan | 4               | 5             | 5      | 5      | 5      | 5      | 25               | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.10. | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP   | Meningkatnya pelayanan penanganan pengaduan masyarakat  | 100             | 100           | 100    | 100    | 100    | 100    | 100              | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.11. | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN   | Prosentase Cakupan Pelayanan pengelolaan sampah   | 6,1             | 7,5           | 15     | 30     | 45     | 60     | 60               | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
|          |   | Prosentase Timbulan Sampah yang Terkurangi  | 1,27            | 3             | 7,5    | 10     | 15     | 20     | 20               | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.12.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>  |   |                 |               |        |        |        |        |                  |                        |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |       |      |       |       | Kondisi<br>Akhir | SKPD  |
|----------|---|--|-----------------|---------------|-------|------|-------|-------|------------------|---|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021  | 2022 | 2023  | 2024  |                  |   |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6     | 7    | 8     | 9     | 10               | 11  |
| 2.12.02. | PROGRAM<br>PENDAFTARAN<br>PENDUDUK                                  | Cakupan Jumlah Keluarga yang sudah memiliki Dokumen Kependudukan lengkap (Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik / KTP El) | 100             | 100           | 100   | 100  | 100   | 100   | 100              | DINAS<br>KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN<br>SIPIIL |
|          |   | Prosentase jumlah penduduk di Kabupaten Cirebon yang sudah melaksanakan perekaman KTP El   | 85              | 90            | 92    | 95   | 96    | 97    | 97               | DINAS<br>KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN<br>SIPIIL |
| 2.12.03. | PROGRAM<br>PENCATATAN<br>SIPIIL                                     | Prosentase Keluarga yang sudah memiliki Dokumen Akta Kelahiran   | 35              | 35            | 39,75 | 42,7 | 45,64 | 48,58 | 48,58            | DINAS<br>KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN<br>SIPIIL |
|          |   | Prosentase pemenuhan pelayanan Akta-akta pencatatan sipil  | 74              | 76            | 78    | 80   | 82    | 85    | 85               | DINAS<br>KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN<br>SIPIIL |
| 2.12.04. | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>INFORMASI<br>ADMINISTRASI<br>KEPENDUDUKAN | Prosentase Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil  | 82              | 84            | 86    | 88   | 90    | 92    | 92               | DINAS<br>KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN<br>SIPIIL |
|          |   | Jumlah OPD dan Desa yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ( PKS )                                    | 20              | 20            | 20    | 20   | 20    | 20    | 100              | DINAS<br>KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN<br>SIPIIL |
|          |   | Peningkatan kualitas Database Kependudukan   | 85              | 85            | 85    | 90   | 95    | 100   | 100              | DINAS<br>KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN<br>SIPIIL |
|          |   | Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan   | 75              | 77            | 79    | 80   | 80    | 81    | 81               | DINAS<br>KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN<br>SIPIIL |
| 2.12.05. | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PROFIL<br>KEPENDUDUKAN                    | Persentase Update Penyediaan Data Profil Kependudukan  | 85              | 90            | 92    | 94   | 96    | 98    | 98               | DINAS<br>KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN<br>SIPIIL |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |       |       | Kondisi<br>Akhir | SKPD                                   |
|----------|---|---|-----------------|---------------|------|------|-------|-------|------------------|--|
|          |   |   |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023  | 2024  |                  |  |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5             | 6    | 7    | 8     | 9     | 10               | 11                                     |
| 2.13.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>                  |   |                 |               |      |      |       |       |                  |  |
| 2.13.02. | PROGRAM PENATAAN DESA   | Meningkatnya jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam proses pembangunan dari perencanaan sampai implementasi | 6               | 6             | 6    | 0    | 0     | 0     | 0                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
|          |   | Persentase (%) Peningkatan Jumlah Desa yang di fasilitasi Penataan Kewenangan Desanya   | 0               | 0             | 0    | 9,7  | 45,15 | 45,15 | 100              | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2.13.03. | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA  | Meningkatnya jumlah desa yg melakukan kerja sama dalam proses pembangunan   | 6               | 2             | 2    | 0    | 0     | 0     | 0                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2.13.04. | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA  | Meningkatnya Jumlah Desa dengan penilaian baik (perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan)                   | 40              | 40            | 40   | 0    | 0     | 0     | 0                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
|          |   | Meningkatnya jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam proses pembangunan dari perencanaan sampai implementasi | 6               | 6             | 6    | 0    | 0     | 0     | 0                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
|          |   | Meningkatnya jumlah desa yang ketahanan ekonominya baik   | 2               | 3             | 3    | 0    | 0     | 0     | 6                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2.13.05. | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Meningkatnya jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif   | 40              | 60            | 80   | 0    | 0     | 0     | 140              | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM   | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                                   | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD  |
|----------|--|--|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|---|
|          |  |  |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |   |
| 1        | 2  | 3  | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11  |
|          |  | Meningkatnya jumlah desa yang ketahanan ekonominya baik                  | 2               | 3             | 3    | 0    | 0    | 0    | 6                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  |
| 2.08.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b> |  |                 |               |      |      |      |      |                  |   |
| 2.08.02. | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                      | Persentase Lembaga / Kelompok berbasis gender yang mendapatkan penguatan | 60,51           | 25            | 25   | 25   | 25   | 25   | 25               | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|          |  | Proporsi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian         | 28,73           | 11,46         | 11,7 | 11,9 | 12,1 | 12,3 | 12,3             | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|          |  | Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan                          | 40,39           | 35,7          | 35,8 | 35,9 | 36,1 | 36,2 | 36,2             | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|          |  | -  | 0               | 0             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN                   |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM                                | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD  |
|----------|---|--|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|---|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |   |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11  |
| 2.08.03. | PROGRAM<br>PERLINDUNGAN<br>PEREMPUAN                        |  |                 |               |      |      |      |      |                  | PERLINDUNGAN ANAK   |
|          |   | Prosentase perempuan yang mendapat perlindungan                                  | 60,51           | 1,25          | 1,29 | 1,33 | 1,37 | 1,41 | 1,41             | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|          |   | -  | 0               | 0             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 2.08.04. | PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>KUALITAS<br>KELUARGA              | Meningkatnya ketahanan keluarga yang ditandai dengan menurunnya angka perceraian | 0               | 0,84          | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,81             | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 2.08.05. | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>SISTEM DATA<br>GENDER DAN<br>ANAK | Pelaksanaan pengumpulan data terpilah gender                                     | 7,5             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |





| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM   | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)        | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD  |
|----------|--|---|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|---|
|          |  |   |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |   |
| 1        | 2  | 3   | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11  |
| 2.08.06. | PROGRAM<br>PEMENUHAN HAK<br>ANAK (PHA)   | Presentase anak yang<br>mendapat perlindungan | 0               | 1,86          | 1,94 | 2,16 | 2,28 | 2,4  | 2,4              | DINAS<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK,<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN<br>ANAK |
|          |  | -   | 0               | 0             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK,<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN<br>ANAK |
| 2.08.07. | PROGRAM<br>PERLINDUNGAN<br>KHUSUS ANAK   | Jumlah layanan korban<br>kekerasan            | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | DINAS<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK,<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN<br>ANAK |
| 2.14.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN<br/>PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b> |   |                 |               |      |      |      |      |                  |   |
| 2.14.02. | PROGRAM<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK  | tersediannya informasi<br>data keluarga       | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 500              | DINAS<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK,<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN<br>ANAK |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM                       | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |       |       | Kondisi<br>Akhir | SKPD  |
|----------|--|---|-----------------|---------------|------|------|-------|-------|------------------|---|
|          |  |   |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023  | 2024  |                  |   |
| 1        | 2  | 3   | 4               | 5             | 6    | 7    | 8     | 9     | 10               | 11  |
|          |  | -   | 0               | 0             | 0    | 0    | 0     | 0     | 0                | DINAS<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK,<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN<br>ANAK |
| 2.14.03. | PROGRAM<br>PEMBINAAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA (KB) | Presentase jumlah<br>Apseptor MKJP  | 22,5            | 24            | 24,2 | 24,4 | 24,6  | 24,8  | 24,8             | DINAS<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK,<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN<br>ANAK |
|          |  | Persentase masyarakat<br>dalam Keikutsertaan ber-<br>KB                                 | 25              | 72,54         | 72,8 | 73   | 73,25 | 73,54 | 73,54            | DINAS<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK,<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN<br>ANAK |
|          |  | Meningkatnya jumlah<br>pendidik/Motivator sebaya  | 520             | 340           | 340  | 340  | 340   | 340   | 340              | DINAS<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK,<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN<br>ANAK |
|          |  | Pembinaan Kampung KB<br>(Keluarga Berkualitas)<br>dengan ditandai<br>peningkatan status | 10              | 12,5          | 12,5 | 12,5 | 12,5  | 12,5  | 62,5             | DINAS<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK,<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN                         |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM                                 | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)             | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |       |       |       |       | Kondisi<br>Akhir | SKPD  |
|----------|--|--|-----------------|---------------|-------|-------|-------|-------|------------------|---|
|          |  |  |                 | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |                  |   |
| 1        | 2  | 3  | 4               | 5             | 6     | 7     | 8     | 9     | 10               | 11  |
|          |  |  |                 |               |       |       |       |       |                  | PERLINDUNGAN ANAK   |
|          |  | -  | 0               | 1             | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|          |  | Tingkat Kesehatan Reproduksi Remaja                | 18,54           | 19,2          | 19,2  | 19,4  | 19,6  | 19,8  | 19,8             | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 2.14.04. | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Cakupan anggota Bina Keluarga (BKB/BKR/BKL) ber-KB | 56,58           | 56,98         | 56,98 | 57,24 | 57,52 | 57,88 | 57,88            | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|          |  | -  | 0               | 0             | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM   | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |       |       |       |       | Kondisi<br>Akhir | SKPD              |
|----------|--|---|-----------------|---------------|-------|-------|-------|-------|------------------|-------------------|
|          |  |   |                 | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |                  |                   |
| 1        | 2  | 3   | 4               | 5             | 6     | 7     | 8     | 9     | 10               | 11                |
| 2.15.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>                              |   |                 |               |       |       |       |       |                  |                   |
| 2.15.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN LALU LINTAS<br>DAN ANGKUTAN<br>JALAN (LLAJ) | Meningkatnya Prosentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas serta tatakelola sektor perhubungan yang sesuai dengan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria)  | 20              | 35            | 45    | 0     | 0     | 0     | 0                | DINAS PERHUBUNGAN |
|          |  | Rasio sarana dan Prasarana Pengujian yang layak   | 30              | 50            | 55    | 58    | 62    | 65    | 65               | DINAS PERHUBUNGAN |
|          |  | Prosentase jumlah pelanggaran lalu lintas   | 90              | 86            | 85    | 83    | 81    | 80    | 80               | DINAS PERHUBUNGAN |
|          |  | Rasio Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan ( Halte dan Terminal) yang layak fungsi   | 46,15           | 56,41         | 66,67 | 76,92 | 89,74 | 100   | 100              | DINAS PERHUBUNGAN |
|          |  | Persentase ketersediaan sarana dan Prasarana Pengamanan Lalu Lintas yang berfungsi dengan baik  | 25,34           | 21,1          | 41,59 | 62,44 | 82,52 | 100   | 100              | DINAS PERHUBUNGAN |
|          |  | Persentase kepemilikan KIR/Wajib Uji angkutan Umum  | 65,68           | 65,98         | 65,98 | 66,6  | 67,22 | 67,84 | 67,84            | DINAS PERHUBUNGAN |
|          |  | Meningkatnya Prosentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas serta tatakelola sektor perhubungan yang sesuai dengan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria). | 0               | 0             | 0     | 45,5  | 47,5  | 50    | 50               | DINAS PERHUBUNGAN |
|          |  |   |                 |               |       |       |       |       |                  |                   |
| 2.15.03. | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PELAYARAN  | Meningkatnya prosentase pemenuhan Perijinan   | 0               | 0             | 0     | 1     | 2     | 2     | 2                | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2.15.04. | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENERBANGAN                                      | Presentasi Perijinan landasan   | 0               | 0             | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2.15.05. | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PERKERETAAPIAN                                   | Prosentasi ijin pintu perlintasan kereta api di kabupaten   | 0               | 0             | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                | DINAS PERHUBUNGAN |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM                                  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                             |
|----------|---|---|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|----------------------------------|
|          |   |   |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                                  |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                               |
| 2.16.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>  |   |                 |               |      |      |      |      |                  |                                  |
| 2.16.02. | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                       | Persentase layanan informasi dan komunikasi publik  | 52,5            | 52,5          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|          |   | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah | 0               | 60            | 65   | 70   | 75   | 80   | 80               | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 2.16.03. | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA                                  | Indeks aspek teknologi informasi dan komunikasi   | 2,67            | 2,97          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|          |   | Cakupan pengelolaan aplikasi informatika  | 0               | 0             | 85,5 | 88   | 91   | 94   | 94               | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 2.20.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>                   |   |                 |               |      |      |      |      |                  |                                  |
| 2.20.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                    | Persentase dokumen hasil pengolahan dan analisis statistik sektoral yang dihasilkan   | 20              | 20            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|          |   | Persentase ketersediaan data statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Cirebon  | 60              | 60            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|          |   | Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah                                | 0               | 0             | 40   | 60   | 80   | 100  | 100              | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 2.21.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>                  |   |                 |               |      |      |      |      |                  |                                  |
| 2.21.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah  | 0               | 6             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|          |   | Tingkat keamanan informasi pemerintah   | 0               | 6             | 26   | 30   | 36   | 42   | 42               | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM   | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                                     |
|----------|--|---|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|--|
|          |  |   |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |  |
| 1        | 2  | 3   | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                                       |
| 2.17.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>    |   |                 |               |      |      |      |      |                  |  |
| 2.17.02. | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM                               | Terciptanya Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi                                       | 0               | 0             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2.17.03. | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                              | Terciptanya Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi                                       | 0               | 0             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|          |  | Prosentase koperasi yang meningkat predikat Tingkat Kesehatan hasil pengawasan              | 0               | 0             | 0    | 60   | 62   | 64   | 186              | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2.17.04. | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI                             | Persentase Koperasi Sehat   | 0               | 0             | 0    | 20   | 20   | 20   | 20               | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2.17.05. | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                             | Prosentase pengurus, pengawas, manajer dan pengelola koperasi yang bersertifikat kompetensi | 0               | 0             | 0    | 30   | 35   | 40   | 105              | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2.17.06. | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                           | Laju perkembangan usaha produktif koperasi  | 0               | 0             | 0    | 25   | 35   | 40   | 100              | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2.17.07. | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Prosentase Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha   | 0               | 0             | 0    | 3,5  | 4    | 4,5  | 12               | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2.17.08. | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM  | Persentase Usaha Mikro Yang Berkembang Nilai Produksinya/ Omsetnya                          | 0               | 0             | 0    | 2,5  | 3    | 3,5  | 9                | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2.18.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>                        |   |                 |               |      |      |      |      |                  |  |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM                                 | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |       |       |       |       | Kondisi<br>Akhir | SKPD   |
|----------|--|---|-----------------|---------------|-------|-------|-------|-------|------------------|--|
|          |  |   |                 | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |                  |  |
| 1        | 2  | 3   | 4               | 5             | 6     | 7     | 8     | 9     | 10               | 11   |
| 2.18.02. | PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>IKLIM<br>PENANAMAN<br>MODAL       | Persentase Jenis Pelayanan Perizinan Berbasis Online  | 0               | 0             | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|          |  | Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)  | 596             | 656           | 722   | 794   | 873   | 960   | 4.005            | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.03. | PROGRAM<br>PROMOSI<br>PENANAMAN<br>MODAL                     | Persentase Jenis Pelayanan Perizinan Yang Sudah Dilimpahkan dan Efektif Dilaksanakan di Kecamatan | 0               | 20            | 20    | 20    | 20    | 20    | 100              | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|          |  | Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)  | 596             | 656           | 722   | 794   | 873   | 960   | 4.005            | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.04. | PROGRAM<br>PELAYANAN<br>PENANAMAN<br>MODAL                   | Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)   | 2.010           | 2.208         | 2.429 | 2.672 | 2.939 | 3.233 | 13.481           | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|          |  | Rata-Rata Lama Perizinan  | 5               | 5             | 4     | 3     | 2     | 1     | 1                | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|          |  | Jumlah Tenaga Kerja Lokal Yang Terserap   | 1.609           | 1.722         | 1.894 | 2.178 | 2.504 | 2.880 | 11.178           | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.05. | PROGRAM<br>PENGENDALIAN<br>PELAKSANAAN<br>PENANAMAN<br>MODAL | Jumlah Tenaga Kerja Lokal Yang Terserap   | 1.609           | 1.722         | 1.894 | 2.178 | 2.504 | 2.880 | 11.178           | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                           | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |       |       |       | Kondisi<br>Akhir | SKPD   |
|----------|---|--|-----------------|---------------|------|-------|-------|-------|------------------|--|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  |                  |  |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6    | 7     | 8     | 9     | 10               | 11   |
| 2.18.06. | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>DATA DAN<br>SISTEM<br>INFORMASI<br>PENANAMAN<br>MODAL | Rata-Rata Lama Perizinan   | 5               | 5             | 4    | 3     | 2     | 1     | 1                | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN<br>TERPADU SATU<br>PINTU |
| 2.19.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN<br/>OLAHRAGA</b>                   |  |                 | 0             | 0    |       |       |       |                  |  |
| 2.19.02. | PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>KAPASITAS DAYA<br>SAING<br>KEPEMUDAAN                | Prosentase daya saing<br>Kepemudaan                              | 0               | 0             | 0    | 15,29 | 18,24 | 21,18 | 21,18            | DINAS PEMUDA DAN<br>OLAHRAGA                                       |
| 2.19.03. | PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>KAPASITAS DAYA<br>SAING<br>KEOLAHRAGAAN              | Cakupan Pembinaan<br>olahraga                                    | 0               | 0             | 0    | 24,39 | 34,15 | 24,39 | 24,39            | DINAS PEMUDA DAN<br>OLAHRAGA                                       |
| 2.19.04. | PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>KAPASITAS<br>KEPRAMUKAAN                             | Prosentase pemuda yang<br>aktif dalam kepramukaan                | 0               | 0             | 0    | 4,57  | 4,9   | 5,22  | 5,22             | DINAS PEMUDA DAN<br>OLAHRAGA                                       |
| 2.22.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>                                    |  |                 | 0             | 0    |       |       |       |                  |  |
| 2.22.02. | PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>KEBUDAYAAN   | Prosentase pertumbuhan<br>pelaku budaya                          | 0               | 0             | 0    | 1     | 1     | 1     | 1                | DINAS KEBUDAYAAN<br>DAN PARIWISATA                                 |
| 2.22.03. | PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>KESENIAN<br>TRADISIONAL                              | Prosentase pertumbuhan<br>jumlah sanggar kesenian<br>tradisional | 0               | 0             | 0    | 0     | 0     | 0     | 0                | DINAS KEBUDAYAAN<br>DAN PARIWISATA                                 |
| 2.22.04. | PROGRAM<br>PEMBINAAN<br>SEJARAH   | Cerita Sejarah yang di<br>Seminarkan                             | 0               | 0             | 0    | 1     | 1     | 1     | 3                | DINAS KEBUDAYAAN<br>DAN PARIWISATA                                 |
| 2.22.05. | PROGRAM<br>PELESTARIAN<br>DAN<br>PENGELOLAAN<br>CAGAR BUDAYA                    | Penambahan penetapan<br>cagar budaya                             | 0               | 0             | 0    | 0     | 0     | 0     | 0                | DINAS KEBUDAYAAN<br>DAN PARIWISATA                                 |





| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM   | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |       |       |       | Kondisi<br>Akhir | SKPD                             |
|----------|--|--|-----------------|---------------|------|-------|-------|-------|------------------|----------------------------------|
|          |  |  |                 | 2020          | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  |                  |                                  |
| 1        | 2  | 3  | 4               | 5             | 6    | 7     | 8     | 9     | 10               | 11                               |
| 2.22.06. | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN  | Bertambahnya koleksi museum  | 0               | 0             | 0    | 0     | 0     | 0     | 0                | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  |
| 3.26.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>   |  |                 | 0             | 0    |       |       |       |                  |                                  |
| 3.26.02. | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA  | Jumlah obyek daya tarik wisata dengan pertumbuhan kunjungan diatas 10%                     | 0               | 0             | 0    | 3     | 6     | 9     | 9                | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  |
| 3.26.03. | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA   | Market Share Kunjungan Pariwisata Kabupaten Cirebon Terhadap Kunjungan Provinsi Jawa Barat | 0               | 0             | 0    | 1,98  | 2,08  | 2,29  | 2,29             | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  |
| 3.26.04. | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | Jumlah HKI ekonomi kreatif   | 0               | 0             | 0    | 1     | 1     | 1     | 3                | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  |
| 3.26.05. | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                    | Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang terstandarisasi/bersertifikat        | 0               | 0             | 0    | 19,44 | 30,56 | 41,67 | 41,67            | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  |
| 2.23.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>   |  |                 |               |      |       |       |       |                  |                                  |
| 2.23.02. | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN   | Prosentase Peningkatan Perpustakaan Desa yang aktif  | 9,6             | 14,4          | 19,2 | 24    | 28,8  | 33,7  | 33,7             | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
|          |  | Prosentase peningkatan minat dan budaya baca masyarakat                                    | 2,8             | 4,3           | 5,9  | 7,5   | 9,1   | 10,7  | 10,7             | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
|          |  | Prosentase Perpustakaan SMPN sesuai standar Nasional Perpustakaan                          | 0               | 0             | 0    | 1,25  | 2,5   | 3,75  | 3,75             | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| 2.23.03. | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI  | Prosentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan   | 0               | 0             | 0    | 71,43 | 85,71 | 100   | 100              | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM                         | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |         |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                             |
|----------|--|---|-----------------|---------------|---------|------|------|------|------------------|----------------------------------|
|          |  |   |                 | 2020          | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                                  |
| 1        | 2  | 3   | 4               | 5             | 6       | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                               |
|          | NASIONAL DAN NASKAH KUNO                             |   |                 |               |         |      |      |      |                  |                                  |
| 2.24.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>          |   |                 |               |         |      |      |      |                  |                                  |
| 2.24.02. | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                            | Prosentase peningkatan SKPD yang menerapkan sistem administrasi kearsipan secara baku | 39,4            | 51,5          | 63,6    | 75,8 | 87,9 | 100  | 100              | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
|          |  | Prosentase peningkatan khasanah arsip daerah  | 42,5            | 47,9          | 60,3    | 72,6 | 86,3 | 100  | 100              | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
|          |  | Meningkatnya durasi dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat                       | 15              | 10            | 8       | 6    | 4    | 2    | 2                | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
|          |  | Prosentase SKPD yang Tata kelola arsipnya sesuai NSPK                                 | 0               | 0             | 0       | 57,6 | 78,8 | 100  | 100              | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| 2.24.03. | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP          | Prosentase ketersediaan arsip yang terlindungi dan terselamatkan                      | 0               | 0             | 0       | 50   | 75   | 100  | 100              | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| 2.24.04. | PROGRAM PERIJINAN PENGGUNAAN ARSIP                   | Prosentase peningkatan SKPD yang menerapkan sistem administrasi kearsipan secara baku | 39,4            | 51,5          | 63,6    | 75,8 | 87,9 | 100  | 100              | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
|          |  | Prosentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK        | 0               | 0             | 0       | 50   | 75   | 100  | 100              | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| 3.27.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>          |   |                 |               |         |      |      |      |                  |                                  |
| 3.27.02. | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Jumlah Produksi Komoditas Tanaman Pangan (Beras)                                      | 340.309         | 343.107       | 347.493 | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS PERTANIAN                  |
|          |  | Jumlah Produksi Sektor Peternakan (Sapi Potong, Ayam Ras, Unggas Lokal dan Domba)     | 29.106          | 29.996        | 30.508  | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS PERTANIAN                  |
|          |  | Jumlah Produksi Komoditas Perkebunan (Gula dan Kelapa)                                | 21.826          | 21.873        | 21.919  | 0    | 0    | 0    | 43.792           | DINAS PERTANIAN                  |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |         |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD            |
|----------|---|--|-----------------|---------------|---------|------|------|------|------------------|-----------------|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                 |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6       | 7    | 8    | 9    | 10               | 11              |
|          |   | Jumlah Populasi Ternak   | 4.859.198       |               |         | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS PERTANIAN |
|          |   | Jumlah Produksi<br>Komoditas Hortikultura<br>(Bawang Merah, Cabai<br>Besar dan Mangga)     | 97.300          | 98.080        | 98.472  | 0    | 0    | 0    | 196.552          | DINAS PERTANIAN |
|          |   | Rasio Ketersediaan Sarana<br>Produksi Pertanian  | 0               | 0             | 0       | 0,52 | 0,53 | 0,54 | 0,54             | DINAS PERTANIAN |
| 3.27.03. | PROGRAM<br>PENYEDIAAN DAN<br>PENGEMBANGAN<br>PRASARANA<br>PERTANIAN                       | Jumlah Produksi<br>Komoditas Tanaman<br>Pangan (Beras)                                     | 340.309         | 343.107       | 347.493 | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS PERTANIAN |
|          |   | Jumlah Produksi Sektor<br>Peternakan (Sapi Potong,<br>Ayam Ras, Unggas Lokal<br>dan Domba) | 29.106          | 29.996        | 30.508  | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS PERTANIAN |
|          |   | Jumlah Produksi<br>Komoditas Hortikultura<br>(Bawang Merah, Cabai<br>Besar dan Mangga)     | 97.300          | 98.080        | 98.472  | 0    | 0    | 0    | 196.552          | DINAS PERTANIAN |
|          |   | Rasio Ketersediaan<br>Prasarana Produksi<br>Pertanian                                      | 0               | 0             | 0       | 0,21 | 0,26 | 0,3  | 0,3              | DINAS PERTANIAN |
| 3.27.04. | PROGRAM<br>PENGENDALIAN<br>KESEHATAN<br>HEWAN DAN<br>KESEHATAN<br>MASYARAKAT<br>VETERINER | Prosentase Penurunan<br>Frekuensi Kemunculan<br>Penyakit Zoonosis                          | 2               | 2             | 2       | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS PERTANIAN |
|          |   | Kejadian/Jumlah Kasus<br>Penyakit Hewan Menular<br>(Satuan Ternak)                         | 0               | 0             | 0       | 293  | 287  | 281  | 281              | DINAS PERTANIAN |
| 3.27.05. | PROGRAM<br>PENGENDALIAN<br>DAN<br>PENANGGULANGA<br>N BENCANA<br>PERTANIAN                 | Jumlah Produksi<br>Komoditas Tanaman<br>Pangan (Beras)                                     | 340.309         | 343.107       | 347.493 | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS PERTANIAN |
|          |   | Rasio Tingkat Keberhasilan<br>Penanggulangan Bencana<br>Pertanian per-tahun                | 0               | 0             | 0       | 0,56 | 0,58 | 0,6  | 0,6              | DINAS PERTANIAN |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM   | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal   | KINERJA TAHUN |                   |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                                      |
|----------|--|--|-------------------|---------------|-------------------|------|------|------|------------------|---|
|          |  |  |                   | 2020          | 2021              | 2022 | 2023 | 2024 |                  |   |
| 1        | 2  | 3  | 4                 | 5             | 6                 | 7    | 8    | 9    | 10               | 11  |
| 3.27.06. | PROGRAM<br>PERIZINAN<br>USAHA<br>PERTANIAN   | Jumlah Produksi<br>Komoditas Hortikultura<br>(Bawang Merah, Cabai<br>Besar dan Mangga)   | 97.300            | 98.080        | 98.472            | 0    | 0    | 0    | 196.552          | DINAS PERTANIAN                           |
|          |  | Rasio Jumlah Usulan Izin<br>Usaha Pertanian  | 0                 | 0             | 0                 | 0,81 | 0,82 | 0,83 | 0,83             | DINAS PERTANIAN                           |
| 3.27.07. | PROGRAM<br>PENYULUHAN<br>PERTANIAN   | Prosentase Kelompok<br>Petani Yang Naik Kelas  | 10                | 10            | 10                | 10   | 10   | 10   | 10               | DINAS PERTANIAN                           |
|          |  | Prosentase Penyuluh Yang<br>Lulus Pelatihan Berbasis<br>Kompetensi   | 20                | 20            | 20                | 0    | 0    | 0    | 40               | DINAS PERTANIAN                           |
|          |  | Produktivitas Padi atau<br>Bahan Pangan Utama<br>Lokal Lainnya per Hektar  | 63,25             | 63,3          | 63,35             | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS PERTANIAN                           |
| 3.30.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>                                      |  |                   |               |                   |      |      |      |                  |   |
| 3.30.03. | PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>SARANA<br>DISTRIBUSI<br>PERDAGANGAN                      | Cakupan bina pengelola<br>pasar  | 100               | 100           | 100               | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS<br>PERDAGANGAN DAN<br>PERINDUSTRIAN |
|          |  | Cakupan bina kelompok<br>pedagang/usaha informal   | 5,38              | 5,47          | 5,56              | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS<br>PERDAGANGAN DAN<br>PERINDUSTRIAN |
|          |  | Penerimaan Retribusi Pasar   | 2.329.281.87<br>5 | #####         | 1.962.95<br>5.000 | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS<br>PERDAGANGAN DAN<br>PERINDUSTRIAN |
|          |  | Jumlah sarana distribusi<br>perdagangan yang sesuai<br>SNI ( Pasar Pemda )   | 0                 | 0             | 0                 | 1    | 1    | 1    | 1                | DINAS<br>PERDAGANGAN DAN<br>PERINDUSTRIAN |
| 3.30.04. | PROGRAM<br>STABILISASI<br>HARGA BARANG<br>KEBUTUHAN<br>POKOK DAN<br>BARANG PENTING | Pencapaian Stabilitas harga<br>9 komoditas kebutuhan<br>pokok masyarakat (daging<br>sapi, beras, gula pasir,<br>minyak goreng, daging<br>ayam, telur ayam, kedelai,<br>tepung terigu, dan bawang<br>merah) | 6                 | 6             | 6                 | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS<br>PERDAGANGAN DAN<br>PERINDUSTRIAN |
|          |  | Koefisien varian antar<br>waktu kebutuhan pokok<br>dan barang penting  | 0                 | 0             | 0                 | 8,5  | 8,5  | 8,5  | 8,5              | DINAS<br>PERDAGANGAN DAN<br>PERINDUSTRIAN |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM                           | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |                |                    |                    |                    | Kondisi<br>Akhir   | SKPD                                |
|----------|--|---|-----------------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
|          |  |   |                 | 2020          | 2021           | 2022               | 2023               | 2024               |                    |                                     |
| 1        | 2  | 3   | 4               | 5             | 6              | 7                  | 8                  | 9                  | 10                 | 11                                  |
| 3.30.05. | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR                            | Nilai Ekspor ke luar Negeri   | 382.200.730,36  | 388.315.942   | 394.917.313,06 | 402.025.824,69     | 409.664.315,36     | 417.857.601,67     | 417.857.601,67     | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| 3.30.06. | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN        | Cakupan UTP yang ditera   | 100             | 64,09         | 67,86          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
|          |  | Penerimaan Retribusi Tera   | 121.000.000     | 135.000.000   | 141.000.000    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| 3.30.07. | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI   | Nilai perdagangan dalam negeri  | 0               | 0             | 0              | 19.249.585.660.000 | 20.789.552.510.000 | 22.452.716.710.000 | 22.452.716.710.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| 3.31.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>        |   |                 |               |                |                    |                    |                    |                    |                                     |
| 3.31.02. | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI           | Pertumbuhan cluster industri  | 1               | 1             | 1              | 0                  | 0                  | 0                  | 2                  | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
|          |  | Jumlah produk IKM yang bersertifikasi   | 100             | 100           | 100            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
|          |  | Jumlah sentra industri yang dikembangkan  | 1               | 1             | 1              | 0                  | 0                  | 0                  | 2                  | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
|          |  | Persentase Pencapaian Sasasaran Pembangunan Industri termasuk turunan pembangunan industri dalam RPIK | 0               | 0             | 0              | 0                  | 10                 | 20                 | 20                 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| 3.31.04. | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Jenis Penerapan Teknologi Industri  | 2               | 2             | 2              | 0                  | 0                  | 0                  | 4                  | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM                                      | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD  |
|----------|---|--|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|---|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |   |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11  |
|          |   | Persentase data perusahaan industri menengah dan perusahaan Kawasan industri di kabupaten/kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri Kecil, Menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota | 0               | 0             | 0    | 15   | 25   | 35   | 75               | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN                               |
| 5,       | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                        |  |                 |               |      |      |      |      |                  |   |
| 5.01.    | <b>PERENCANAAN</b>  |  |                 |               |      |      |      |      |                  |   |
| 5.01.02. | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | prosentase ketersediaan data perencanaan pembangunan   | 0               | 3             | 3    | 0    | 0    | 0    | 0                | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|          |   | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD  | 100             | 100           | 100  | 0    | 0    | 0    | 0                | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|          |   | prosentase jumlah dokumen Evaluasi Pembangunan Kabupaten Cirebon   | 100             | 100           | 100  | 0    | 0    | 0    | 0                | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|          |   | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA  | 100             | 100           | 100  | 0    | 0    | 0    | 0                | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN                     |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM                                       | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD  |
|----------|--|---|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|---|
|          |  |   |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |   |
| 1        | 2  | 3   | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11  |
|          |  |   |                 |               |      |      |      |      |                  | PENGEMBANGAN DAERAH   |
|          |  | Meningkatnya SKPD dalam menetapkan IKU dan Perkin   | 100             | 100           | 100  | 0    | 0    | 0    | 0                | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|          |  | Prosentase peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah   | 0               | 0             | 0    | 97,5 | 98   | 99   | 99               | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 5.01.03. | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Prosentase pencapaian kinerja perencanaan pembangunan bidang fispra   | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|          |  | Jumlah rekomendasi kebijakan, hasil kajian dari hasil perencanaan bidang pemerintahan dan sosial budaya yang harus dilaksanakan oleh SKPD terkait | 0               | 10            | 15   | 0    | 0    | 0    | 25               | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|          |  | Ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan perangkat daerah lingkup koordinasi bidang ekonomi yang memenuhi target                              | 0               | 100           | 100  | 0    | 0    | 0    | 0                | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|          |  | Prosentase capaian kinerja program perangkat daerah   | 0               | 0             | 0    | 100  | 100  | 100  | 100              | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM               | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD  |
|----------|--|---|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|---|
|          |  |   |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |   |
| 1        | 2  | 3   | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11  |
|          |  | Prosentase rata rata pencapaian Target kinerja outcome program pada Perangkat Daerah lingkup koordinasi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 0               | 60            | 60   | 0    | 0    | 0    | 0                | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 5.05.    | <b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>         |   |                 |               |      |      |      |      |                  |   |
| 5.05.02. | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Prosentase hasil penelitian pemerintahan, sosial, ekonomi dan pembangunan yang diimplementasikan  | 0               | 10            | 40   | 0    | 0    | 0    | 0                | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|          |  | Prosentase inovasi dan kreativitas daerah yang diaplikasikan (diterapkan)   | 0               | 10            | 10   | 0    | 0    | 0    | 0                | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|          |  | Prosentase pemanfaatan hasil kelitbangan  | 0               | 0             | 0    | 10   | 10   | 10   | 10               | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 5.02.02. | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH        | Peningkatan Pengembangan Wilayah untuk mengurangi dampak resiko bencana, kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Pembangunan                            | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | PPKD  |
| 5.02.    | <b>KEUANGAN</b>                            |   |                 |               |      |      |      |      |                  |   |
| 5.02.02. | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH        | Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengelola keuangan dan barang daerah  | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                                    |
|          |  | Ketepatan waktu penyusunan Raperda dan Raperbup APBD  | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                                    |
|          |  | Ketepatan waktu penyusunan Raperda dan Raperbup Perubahan APBD  | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                                    |





| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM            | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |       |       |       |       | Kondisi<br>Akhir | SKPD                           |
|----------|---|---|-----------------|---------------|-------|-------|-------|-------|------------------|--------------------------------|
|          |   |   |                 | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |                  |                                |
| 1        | 2                                       | 3   | 4               | 5             | 6     | 7     | 8     | 9     | 10               | 11                             |
|          |   | Peningkatan pengelolaan administrasi kas daerah secara tepat waktu dan tepat sasaran  | 100             | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|          |   | Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyajian laporan keuangan serta penyajian laporan aset tetap                                | 0               | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5.02.03. | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Peningkatan barang milik daerah yang telah dan atau dalam proses sertifikasi serta terinventarisir dan termanfaatkan dengan baik/benar  | 100             | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|          |   | Ketepatan waktu penyusunan Raperda dan Raperbup APBD  | 100             | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|          |   | Peningkatan Penyajian Laporan Barang Milik Daerah yang sudah Terinventarisasi, Teridentifikasi dan Terdokumentasi dengan Baik dan Benar | 100             | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|          |   | Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyajian laporan keuangan serta penyajian laporan aset tetap                                | 100             | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|          |   | Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengelola keuangan dan barang daerah  | 0               | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5.02.04. | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH   | Meningkatkan penerimaan pajak daerah  | 4,79            | 11,23         | 14,84 | 14,66 | 14,66 | 14,66 | 14,66            | BADAN PENDAPATAN DAERAH        |
| 5.03.    | <b>KEPEGAWAIAN</b>                      |   |                 |               |       |       |       |       |                  |                                |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM                      | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                          | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |       |       |       |       | Kondisi<br>Akhir | SKPD   |
|----------|---|---|-----------------|---------------|-------|-------|-------|-------|------------------|--|
|          |   |   |                 | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |                  |  |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5             | 6     | 7     | 8     | 9     | 10               | 11   |
| 5.03.02. | PROGRAM<br>KEPEGAWAIAN<br>DAERAH                  | Persentase Aparatur yang difasilitasi kesejahteraannya          | 0               | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|          |   | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur Berbasis Sistem        | 69,5            | 75,6          | 81,7  | 87,8  | 93,9  | 100   | 100              | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|          |   | Persentase Sumber Daya Aparatur Yang ditingkatkan Kompetensinya | 6,25            | 7,42          | 8,23  | 9,04  | 9,86  | 10,06 | 10,06            | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|          |   | Prosentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian sesuai SOP        | 0               | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|          |   | Persentase pegawai yang ditempatkan di bidangnya                | 60              | 70            | 75    | 75    | 75    | 75    | 75               | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|          |   | Persentase Aparatur yang ditingkatkan integritasnya             | 84,1            | 85,67         | 86,37 | 88,31 | 90,64 | 91,01 | 91,01            | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5.04.    | <b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>                   |   |                 |               |       |       |       |       |                  |  |
| 5.04.02. | PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA<br>MANUSIA | Persentase Sumber Daya Aparatur Yang ditingkatkan Kompetensinya | 6,25            | 7,42          | 8,23  | 9,04  | 9,86  | 10,06 | 10,06            | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 6,       | <b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>       |   |                 |               |       |       |       |       |                  |  |
| 6.01.    | <b>INSPEKTORAT DAERAH</b>                         |   |                 |               |       |       |       |       |                  |  |
| 6.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN PENGAWASAN         | Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal               | 100             | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | INSPEKTORAT  |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |       |       |       |       | Kondisi<br>Akhir | SKPD                  |
|----------|---|--|-----------------|---------------|-------|-------|-------|-------|------------------|-----------------------|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |                  |                       |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6     | 7     | 8     | 9     | 10               | 11                    |
| 6.01.03. | PROGRAM<br>PERUMUSAN<br>KEBIJAKAN,<br>PENDAMPINGAN<br>DAN ASISTENSI | Persentase Peningkatan<br>Sistem Pengawasan<br>Internal  | 100             | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | INSPEKTORAT           |
|          |   | Meningkatnya Kapabilitas<br>APIP   | 2               | 2             | 3     | 3     | 3     | 3     | 3                | INSPEKTORAT           |
|          |   | persentase peningkatan<br>SDM Pengawas<br>berkompeten  | 70              | 72            | 74    | 76    | 78    | 80    | 80               | INSPEKTORAT           |
| 4.02.    | <b>SEKRETARIAT DPRD</b>   |  |                 |               |       |       |       |       |                  |                       |
| 4.02.02. | PROGRAM<br>DUKUNGAN<br>PELAKSANAAN<br>TUGAS DAN<br>FUNGSI DPRD      | Prosentase jumlah raperda<br>yang dibahas dan<br>ditetapkan tepat waktu  | 90              | 90            | 91    | 93    | 93    | 94    | 94               | SEKRETARIAT DPRD      |
| 4.       | <b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                          |  |                 |               |       |       |       |       |                  |                       |
| 4.01.    | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>   |  |                 |               |       |       |       |       |                  |                       |
| 4.01.02. | PROGRAM<br>PEMERINTAHAN<br>DAN<br>KESEJAHTERAAN<br>RAKYAT           | Prosentase Kerjasama yang<br>ditandatangani  | 0               | 80            | 80    | 80    | 80    | 80    | 80               | SEKRETARIAT<br>DAERAH |
|          |   | Prosentase batas wilayah<br>administrasi antar desa<br>dan Daerah yang<br>Ditetapkan                                   | 7,28            | 9,7           | 12,13 | 14,56 | 16,99 | 19,41 | 19,41            | SEKRETARIAT<br>DAERAH |
|          |   | Prosentase fasilitasi<br>pengelolaan kekayaan desa   | 2,4             | 2,5           | 2,5   | 2,5   | 2,5   | 2,5   | 2,5              | SEKRETARIAT<br>DAERAH |
|          |   | Prosentase Produk<br>Hukum/Informasi Hukum<br>yang di publikasikan pada<br>Jaringan Dokumentasi dan<br>Informasi Hukum | 85              | 85            | 85    | 85    | 85    | 85    | 85               | SEKRETARIAT<br>DAERAH |
|          |   | Prosentase Koordinasi yang<br>Dilakukan Di Bagian<br>Kesejahteraan Rakyat  | 100             | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | SEKRETARIAT<br>DAERAH |
|          |   | Prosentase Monev yang<br>Dilakukan Bagian<br>Kesejahteraan Rakyat  | 75              | 75            | 80    | 85    | 90    | 100   | 100              | SEKRETARIAT<br>DAERAH |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM                              | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD               |
|----------|---|--|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|--------------------|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                    |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                 |
|          |   | Prosentase Tindakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan           | 97              | 97            | 97   | 98   | 99   | 100  | 100              | SEKRETARIAT DAERAH |
|          |   | Prosentase Pelayanan Fasilitasi Kewenangan Terhadap Kepala/Wakil Kepala Daerah | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | SEKRETARIAT DAERAH |
|          |   | Prosentase Kualitas Kehidupan Keagamaan Yang Ditingkatkan                      | 95              | 95            | 96   | 97   | 99   | 100  | 100              | SEKRETARIAT DAERAH |
|          |   | Prosentase Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan                              | 70              | 75            | 80   | 85   | 90   | 95   | 95               | SEKRETARIAT DAERAH |
|          |   | Prosentase Peningkatan Kegiatan Bina Kewilayahan yang Dilakukan                | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | SEKRETARIAT DAERAH |
|          |   | Prosentase Peraturan Perundang - undangan yang ditetapkan                      | 85              | 90            | 90   | 90   | 90   | 90   | 90               | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4.01.03. | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                      | Prosentase Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berkualitas                 | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | SEKRETARIAT DAERAH |
|          |   | Prosentase Koordinasi yang Dilakukan Bagian Sumber Daya Alam                   | 97              | 97            | 97   | 98   | 99   | 100  | 100              | SEKRETARIAT DAERAH |
|          |   | Prosentase Keberhasilan Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah                 | 97              | 97            | 97   | 100  | 100  | 100  | 100              | SEKRETARIAT DAERAH |
|          |   | Prosentase kebijakan Pembangunan Daerah yang Dilaksanakan                      | 0               | 50            | 60   | 70   | 80   | 80   | 80               | SEKRETARIAT DAERAH |
|          |   | Prosentase Koordinasi dalam Meningkatkan Perekonomian                          | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | SEKRETARIAT DAERAH |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Menigkatnya Pelayanan Publik.  | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN WALED    |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM                               | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                           | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD              |
|----------|--|--|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|-------------------|
|          |  |  |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                   |
| 1        | 2  | 3  | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                |
|          |  | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 55              | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN WALED   |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN         | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 55              | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN WALED   |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM         | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 55              | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN WALED   |
| 7.01.05. | PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          | Meningkatnya Pelayanan Publik                                    | 0               | 0             | 0    | 95   | 96   | 97   | 288              | KECAMATAN WALED   |
| 7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA         | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat                             | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 500              | KECAMATAN WALED   |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 98              | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN CILEDUG |
|          |  | Meningkatnya Pelayanan Publik                                    | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN CILEDUG |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN         | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 98              | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN CILEDUG |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM         | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 98              | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN CILEDUG |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                   |
|----------|---|--|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|------------------------|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                        |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                     |
| 7.01.05. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>UMUM             | Meningkatnya pelayanan<br>Publik   | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>CILEDUG   |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | Meningkatnya<br>Pemberdayaan Masyarakat  | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>CILEDUG   |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Peningkatan Integrasi<br>perencanaan,<br>penganggaran, pengawasan<br>dan pelaporan   | 20              | 20            | 20   | 20   | 20   | 20   | 20               | KECAMATAN LOSARI       |
|          |   | Meningkatnya Pelayanan<br>Publik   | 0               | 0             | 20   | 20   | 30   | 30   | 30               | KECAMATAN LOSARI       |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Peningkatan Integrasi<br>perencanaan,<br>penganggaran, pengawasan<br>dan pelaporan   | 20              | 20            | 20   | 20   | 20   | 20   | 20               | KECAMATAN LOSARI       |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Peningkatan Integrasi<br>perencanaan,<br>penganggaran, pengawasan<br>dan pelaporan   | 20              | 20            | 20   | 20   | 20   | 20   | 20               | KECAMATAN LOSARI       |
| 7.01.05. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>UMUM             | Meningkatnya Pelayanan<br>Publik   | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN LOSARI       |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | Meningkatnya<br>Pemberdayaan Masyarakat  | 0,65            | 0,66          | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,69 | 0,69             | KECAMATAN LOSARI       |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN                            | Terselenggaranya<br>Pelimpahan Urusan<br>Pemerintahan Bidang<br>Kesejahteraan Sosial | 55              | 60            | 65   | 70   | 75   | 80   | 80               | KECAMATAN<br>PABEDILAN |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                   |
|----------|---|--|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|------------------------|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                        |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                     |
|          | DAN PELAYANAN<br>PUBLIK   |  |                 |               |      |      |      |      |                  |                        |
|          |   | Terselenggaranya<br>pelimpahan kewenangan<br>Bidang Pemerintahan<br>Umum dan Desa meliputi<br>urusan pemerintahan.                                 | 55              | 60            | 65   | 70   | 75   | 80   | 80               | KECAMATAN<br>PABEDILAN |
|          |   | Terselenggaranya<br>Pelimpahan Urusan<br>Pemerintahan Bidang<br>Pelayanan Umum   | 55              | 60            | 65   | 70   | 75   | 80   | 80               | KECAMATAN<br>PABEDILAN |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Terselenggaranya<br>Pelimpahan Urusan<br>Pemerintahan Bidang<br>Ekonomi, Pembangunan<br>dan Pemberdayaan<br>Masyarakat                             | 55              | 60            | 65   | 70   | 75   | 80   | 80               | KECAMATAN<br>PABEDILAN |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Terselenggaranya<br>Pelimpahan Urusan<br>Pemerintahan Bidang<br>Keamanan Ketertiban<br>Perlindungan Masyarakat<br>dan Pembinaan Kesatuan<br>Bangsa | 55              | 60            | 65   | 70   | 75   | 80   | 80               | KECAMATAN<br>PABEDILAN |
| 7.01.05. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>UMUM             | Meningkatnya pelayanan<br>publik   | 0               | 0             | 0    | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>PABEDILAN |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | meningkatnya prosentase<br>desa yang dibina dan di<br>awasi  | 0               | 0             | 0    | 100  | 100  | 100  | 300              | KECAMATAN<br>PABEDILAN |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat   | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>BABAKAN   |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM                              | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                           | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                    |
|----------|---|--|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|-------------------------|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                         |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                      |
|          |   | Meningkatnya Pelayanan Publik                                    | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN BABAKAN       |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat  | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN BABAKAN       |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat  | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN BABAKAN       |
| 7.01.05. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat  | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN BABAKAN       |
| 7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA        | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat                             | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN BABAKAN       |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 100             | 95            | 96   | 97   | 99   | 100  | 100              | KECAMATAN GEBANG        |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 100             | 95            | 96   | 97   | 99   | 100  | 100              | KECAMATAN GEBANG        |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 100             | 95            | 96   | 97   | 99   | 100  | 100              | KECAMATAN GEBANG        |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN                      | Meningkatnya Pelayanan Publik                                    | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN KARANGSEMBUNG |





| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                                      | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                       |
|----------|---|---|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|----------------------------|
|          |   |   |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                            |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                         |
|          | DAN PELAYANAN<br>PUBLIK   |   |                 |               |      |      |      |      |                  |                            |
|          |   | Cakupan pelimpahan<br>sebagian kewenangan<br>pemerintahan kepada<br>Camat   | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>KARANGSEMBUNG |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Cakupan pelimpahan<br>sebagian kewenangan<br>pemerintahan kepada<br>Camat   | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>KARANGSEMBUNG |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Cakupan pelimpahan<br>sebagian kewenangan<br>pemerintahan kepada<br>Camat   | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>KARANGSEMBUNG |
| 7.01.05. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>UMUM             | Meningkatnya pelayanan<br>Publik  | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>KARANGSEMBUNG |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | Meningkatnya<br>pemberdayaan masyarakat<br>dalam perencanaan<br>pembangunan | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>KARANGSEMBUNG |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Cakupan Pelimpahan<br>sebagian kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat   | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>LEMAHABANG    |
|          |   | Meningkatkan Pelayanan<br>Publik  | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>LEMAHABANG    |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Cakupan Pelimpahan<br>sebagian kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat   | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>LEMAHABANG    |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM                              | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                   |
|----------|---|--|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|------------------------|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                        |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                     |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | Cakupan Pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan Kepada Camat   | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN LEMAHABANG   |
| 7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA        | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat   | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN LEMAHABANG   |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Paten  | 55              | 55            | 60   | 65   | 70   | 75   | 325              | KECAMATAN SUSUKANLEBAK |
|          |   | Terselenggaranya Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial  | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN SUSUKANLEBAK |
|          |   | Terselenggaranya pelimpahan kewenangan Bidang Pemerintahan Umum dan Desa meliputi urusan pemerintahan.                           | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN SUSUKANLEBAK |
|          |   | Terselenggaranya Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Umum  | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN SUSUKANLEBAK |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Terselenggaranya Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat                          | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN SUSUKANLEBAK |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | Terselenggaranya Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Keamanan Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN SUSUKANLEBAK |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                                    | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                      |
|----------|---|---|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|---------------------------|
|          |   |   |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                           |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                        |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | Meningkatnya<br>pemberdayaan masyarakat                                   | 0,65            | 0,68          | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 3,4              | KECAMATAN<br>SUSUKANLEBAK |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Meningkatnya Kualitas<br>Pelayanan Publik                                 | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>SEDONG       |
|          |   | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>SEDONG       |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>SEDONG       |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>SEDONG       |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | Prosentase Meningkatnya<br>Partisipasi Masyarakat<br>dalam Pembangunan    | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 104  | 104              | KECAMATAN<br>SEDONG       |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat  | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>ASTANAJAPURA |
|          |   | Meningkatnya Pelayanan<br>Publik  | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>ASTANAJAPURA |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat  | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>ASTANAJAPURA |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM                              | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                           | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                   |
|----------|---|--|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|------------------------|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                        |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                     |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat  | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN ASTANAJAPURA |
| 7.01.05. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          | Meningkatnya Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN ASTANAJAPURA |
| 7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA        | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat                             | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN ASTANAJAPURA |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | cakupan pelimpahan sebagai kewenangan pemerintahan kepada camat  | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN PANGENAN     |
|          |   | Meningkatnya Pelayanan Publik                                    | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN PANGENAN     |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | cakupan pelimpahan sebagai kewenangan pemerintahan kepada camat  | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN PANGENAN     |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | cakupan pelimpahan sebagai kewenangan pemerintahan kepada camat  | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN PANGENAN     |
| 7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA        | Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat                              | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN PANGENAN     |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN                      | Meningkatnya Pelayanan Publik                                    | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN MUNDU        |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                                   | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD            |
|----------|---|--|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|-----------------|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                 |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11              |
|          | DAN PELAYANAN<br>PUBLIK   |  |                 |               |      |      |      |      |                  |                 |
|          |   | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN MUNDU |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN MUNDU |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN MUNDU |
| 7.01.05. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>UMUM             | Meningkatnya Prosentase<br>Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintahan Umum   | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN MUNDU |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | Meningkatnya<br>Pemberdayaan Masyarakat                                  | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN MUNDU |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Cakupan pelimpahan<br>sebagian kewenangan<br>pemerintah kepada camat     | 75              | 75            | 77   | 78   | 78   | 78   | 78               | KECAMATAN BEBER |
|          |   | Meningkatnya Pelayanan<br>Publik   | 0               | 0             | 70   | 71   | 72   | 73   | 73               | KECAMATAN BEBER |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Cakupan pelimpahan<br>sebagian kewenangan<br>pemerintah kepada camat     | 75              | 75            | 77   | 78   | 78   | 78   | 78               | KECAMATAN BEBER |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM                              | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                           | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD             |
|----------|---|--|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|------------------|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                  |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11               |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | Cakupan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah kepada camat   | 75              | 75            | 77   | 78   | 78   | 78   | 78               | KECAMATAN BEBER  |
| 7.01.05. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          | Meningkatnya Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN BEBER  |
| 7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA        | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat                             | 0               | 0             | 71   | 72   | 73   | 74   | 74               | KECAMATAN BEBER  |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN TALUN  |
|          |   | Peningkatan Pelayanan Publik                                     | 0               | 0             | 75   | 75   | 75   | 75   | 75               | KECAMATAN TALUN  |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN TALUN  |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN TALUN  |
| 7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA        | Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat                              | 0               | 0             | 75   | 75   | 75   | 75   | 75               | KECAMATAN TALUN  |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN                      | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat  | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN SUMBER |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                     |
|----------|---|--|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|--------------------------|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                          |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                       |
|          | DAN PELAYANAN<br>PUBLIK   |  |                 |               |      |      |      |      |                  |                          |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat             | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>SUMBER      |
|          |   | Peningkatan Pembangunan<br>Infrastruktur dan<br>Pemberdayaan Masyarakat<br>Kelurahan | 75              | 75            | 75   | 75   | 75   | 75   | 75               | KECAMATAN<br>SUMBER      |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat             | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>SUMBER      |
| 7.01.    | <b>KECAMATAN</b>  |  |                 |               |      |      |      |      |                  |                          |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Meningkatnya Pelayanan<br>Publik   | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>DUKUPUNTANG |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Meningkatnya<br>Pemberdayaan Masyarakat  | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>DUKUPUNTANG |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat            | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>DUKUPUNTANG |
| 7.01.05. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>UMUM             | Meningkatnya Wawasan<br>Kebangsaan di wilayah<br>Kecamatan                           | 0               | 0             | 0    | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>DUKUPUNTANG |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                     |
|----------|---|---|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|--------------------------|
|          |   |   |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                          |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                       |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | Meningkatnya<br>Pemberdayaan Masyarakat   | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>DUKUPUNTANG |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Meningkatnya Pelayanan<br>Publik  | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>PALIMANAN   |
|          |   | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat                                   | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>PALIMANAN   |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat                                   | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>PALIMANAN   |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat                                   | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>PALIMANAN   |
| 7.01.05. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>UMUM             | Persentase Urusan<br>Pelimpahan Kewenangan<br>pemerintahan umum dan<br>ketertiban umum yang<br>dilaksanakan | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>PALIMANAN   |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | Meningkatnya<br>Pemberdayaan Masyarakat   | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>PALIMANAN   |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Meningkatnya Pelayanan<br>Publik  | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>PLUMBON     |





| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM                              | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                           | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD              |
|----------|---|--|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|-------------------|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                   |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                |
|          |   | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN PLUMBON |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN PLUMBON |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN PLUMBON |
| 7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA        | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat                             | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN PLUMBON |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Meningkatnya Pelayanan Publik                                    | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN DEPOK   |
|          |   | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat  | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN DEPOK   |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat  | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN DEPOK   |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat  | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN DEPOK   |
| 7.01.05. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN                            | Meningkatnya Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN DEPOK   |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                                    | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                  |
|----------|---|---|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|-----------------------|
|          |   |   |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                       |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                    |
|          | PEMERINTAHAN<br>UMUM  |   |                 |               |      |      |      |      |                  |                       |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | Meningkatnya<br>Pemberdayaan Masyarakat                                   | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN DEPOK       |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Meningkatnya Pelayanan<br>Publik  | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN WERU        |
|          |   | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 75              | 80            | 85   | 90   | 95   | 100  | 100              | KECAMATAN WERU        |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 75              | 80            | 85   | 90   | 95   | 100  | 100              | KECAMATAN WERU        |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 75              | 80            | 85   | 90   | 95   | 100  | 100              | KECAMATAN WERU        |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | Meningkatnya<br>Pemberdayaan Masyarakat                                   | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN WERU        |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Meningkatnya Pelayanan<br>Publik  | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>KEDAWUNG |
|          |   | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan                                  | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>KEDAWUNG |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM                              | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                           | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                 |
|----------|---|--|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|----------------------|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                      |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                   |
|          |   | Pemerintahan Kepada Camat  |                 |               |      |      |      |      |                  |                      |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat  | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN KEDAWUNG   |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat  | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN KEDAWUNG   |
| 7.01.05. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          | Meningkatnya Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN KEDAWUNG   |
| 7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA        | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat                             | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN KEDAWUNG   |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Meningkatnya Pelayanan Publik                                    | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN GUNUNGJATI |
|          |   | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat  | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN GUNUNGJATI |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat  | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN GUNUNGJATI |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat  | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN GUNUNGJATI |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                                    | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                    |
|----------|---|---|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|-------------------------|
|          |   |   |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                         |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                      |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | Meningkatnya<br>Pemberdayaan Masyarakat                                   | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>GUNUNGJATI |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Meningkatnya Pelayanan<br>Publik  | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>KAPETAKAN  |
|          |   | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat  | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>KAPETAKAN  |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat  | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>KAPETAKAN  |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat  | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>KAPETAKAN  |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | Meningkatnya<br>Pemberdayaan Masyarakat                                   | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>KAPETAKAN  |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>KLANGENAN  |
|          |   | Meningkatnya pelayanan<br>publik  | 0               | 80            | 82   | 83   | 84   | 85   | 85               | KECAMATAN<br>KLANGENAN  |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>KLANGENAN  |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM                              | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                           | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                   |
|----------|---|--|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|------------------------|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                        |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                     |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN KLANGENAN    |
| 7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA        | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat                             | 0               | 85            | 87   | 90   | 93   | 95   | 450              | KECAMATAN KLANGENAN    |
| 7,       | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>                                  |  |                 |               |      |      |      |      |                  |                        |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Meningkatnya Pelayanan Publik                                    | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN ARJAWINANGUN |
|          |   | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat  | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN ARJAWINANGUN |
|          |   | Penampung Kegiatan Prioritas Pusdatin                            | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 400              | KECAMATAN ARJAWINANGUN |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat  | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN ARJAWINANGUN |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat  | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN ARJAWINANGUN |
| 7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA        | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat                             | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN ARJAWINANGUN |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN                      | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN PANGURAGAN   |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                                    | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                    |
|----------|---|---|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|-------------------------|
|          |   |   |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                         |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                      |
|          | DAN PELAYANAN<br>PUBLIK   |   |                 |               |      |      |      |      |                  |                         |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>PANGURAGAN |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>PANGURAGAN |
| 7.01.05. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>UMUM             | Meningkatnya Prosentase<br>Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintahan Umum    | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>PANGURAGAN |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Meningkatnya Pelayanan<br>Publik  | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>CIWARINGIN |
|          |   | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>CIWARINGIN |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>CIWARINGIN |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>CIWARINGIN |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN                                    | Meningkatnya<br>Pemberdayaan Masyarakat                                   | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>CIWARINGIN |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                                   | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                 |
|----------|---|--|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|----------------------|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                      |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                   |
|          | PEMERINTAHAN<br>DESA  |  |                 |               |      |      |      |      |                  |                      |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Meningkatnya Pelayanan<br>Publik   | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>SUSUKAN |
|          |   | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>SUSUKAN |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>SUSUKAN |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>SUSUKAN |
| 7.01.05. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>UMUM             | Meningkatnya Prosentase<br>Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintahan Umum   | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>SUSUKAN |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | Meningkatnya<br>Pemberdayaan Masyarakat                                  | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>SUSUKAN |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Meningkatnya Pelayanan<br>Publik   | 100             | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>GEGESIK |
|          |   | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan                                | 0               | 62            | 85   | 87   | 90   | 92   | 92               | KECAMATAN<br>GEGESIK |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM                              | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                           | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD               |
|----------|---|--|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|--------------------|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                    |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                 |
|          |   | Pemerintahan Kepada Camat  |                 |               |      |      |      |      |                  |                    |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 0               | 62            | 85   | 87   | 90   | 92   | 92               | KECAMATAN GEGESIK  |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 0               | 62            | 85   | 87   | 90   | 92   | 92               | KECAMATAN GEGESIK  |
| 7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA        | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat                             | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN GEGESIK  |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 75              | 80            | 80   | 80   | 80   | 80   | 400              | KECAMATAN KALIWEDI |
|          |   | Meningkatnya Pelayanan Publik                                    | 0               | 2             | 0    | 2    | 2    | 2    | 8                | KECAMATAN KALIWEDI |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 75              | 80            | 80   | 80   | 80   | 80   | 400              | KECAMATAN KALIWEDI |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 75              | 80            | 80   | 80   | 80   | 80   | 400              | KECAMATAN KALIWEDI |
| 7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA        | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat                             | 0               | 2             | 0    | 2    | 2    | 2    | 8                | KECAMATAN KALIWEDI |





| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                      |
|----------|---|---|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|---------------------------|
|          |   |   |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                           |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                        |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Meningkatnya Prosentase Pelayanan Publik  | 55              | 55            | 60   | 65   | 70   | 75   | 75               | KECAMATAN<br>KARANGWARENG |
|          |   | Meningkatnya prosentase pelaksanaan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat cakupan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan kepada Camat | 55              | 55            | 60   | 65   | 70   | 75   | 75               | KECAMATAN<br>KARANGWARENG |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Meningkatnya prosentase pelaksanaan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat cakupan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan kepada Camat | 55              | 55            | 60   | 65   | 70   | 75   | 75               | KECAMATAN<br>KARANGWARENG |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Meningkatnya prosentase pelaksanaan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat cakupan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan kepada Camat | 55              | 55            | 60   | 65   | 70   | 75   | 75               | KECAMATAN<br>KARANGWARENG |
| 7.01.05. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>UMUM             | Meningkatnya Pelayanan Publik   | 0               | 0             | 0    | 100  | 100  | 100  | 300              | KECAMATAN<br>KARANGWARENG |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | Meningkatnya Prosentase Pemberdayaan Masyarakat   | 0,64            | 0,64          | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65             | KECAMATAN<br>KARANGWARENG |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                           | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                     |
|----------|---|--|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|--------------------------|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                          |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                       |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Meningkatnya Pelayanan Publik                                    | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>TENGAH TANI |
|          |   | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>TENGAH TANI |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>TENGAH TANI |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>TENGAH TANI |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat                             | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>TENGAH TANI |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik                           | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>GEMPOL      |
|          |   | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>GEMPOL      |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>GEMPOL      |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN                                      | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan                           | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>GEMPOL      |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                                    | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                   |
|----------|---|---|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|------------------------|
|          |   |   |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                        |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                     |
|          | DAN KETERTIBAN<br>UMUM  | Pemerintahan Kepada<br>Camat  |                 |               |      |      |      |      |                  |                        |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | Meningkatnya<br>Pemberdayaan Masyarakat                                   | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>GEMPOL    |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Meningkatnya Pelayanan<br>Publik  | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>PASALEMAN |
|          |   | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintah Kepada Camat      | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>PASALEMAN |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Cakupan Pelimpahan<br>sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan kepada<br>camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>PASALEMAN |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Cakupan Pelimpahan<br>sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan kepada<br>camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>PASALEMAN |
| 7.01.05. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>UMUM             | Meningkatnya Pelayanan<br>Publik  | 0               | 0             | 0    | 95   | 96   | 97   | 288              | KECAMATAN<br>PASALEMAN |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | Meningkatkan<br>Pemberdayaan Masyarakat                                   | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>PASALEMAN |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Meningkatnya Pelayanan<br>Publik  | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN PLERED       |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM                              | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                           | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD               |
|----------|---|--|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|--------------------|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                    |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                 |
|          |   | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 55              | 60            | 65   | 70   | 75   | 80   | 80               | KECAMATAN PLERED   |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 55              | 60            | 65   | 70   | 75   | 80   | 80               | KECAMATAN PLERED   |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 55              | 60            | 65   | 70   | 75   | 80   | 80               | KECAMATAN PLERED   |
| 7.01.05. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          | Meningkatnya Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN PLERED   |
| 7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA        | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat                             | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN PLERED   |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Program Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Publik                | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN PABUARAN |
|          |   | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN PABUARAN |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN PABUARAN |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN                            | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN PABUARAN |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                                    | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                  |
|----------|---|---|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|-----------------------|
|          |   |   |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                       |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                    |
|          | DAN KETERTIBAN<br>UMUM  |   |                 |               |      |      |      |      |                  |                       |
| 7.01.05. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>UMUM             | Meningkatnya pelayanan<br>Publik  | 0               | 0             | 0    | 100  | 100  | 100  | 300              | KECAMATAN<br>PABUARAN |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | Meningkatnya<br>Pemberdayaan Masyarakat                                   | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>PABUARAN |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Meningkatnya Pelayanan<br>Publik  | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>GREGED   |
|          |   | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>GREGED   |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>GREGED   |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>GREGED   |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | Persentasi partisipasi<br>masyarakat dalam<br>pembangunan                 | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>GREGED   |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN                            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat  | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>JAMBLANG |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                                   | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                      |
|----------|---|--|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|---------------------------|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                           |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                        |
|          | DAN PELAYANAN<br>PUBLIK   |  |                 |               |      |      |      |      |                  |                           |
|          |   | Meningkatnya Pelayanan<br>Publik   | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>JAMBLANG     |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>JAMBLANG     |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>JAMBLANG     |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | Meningkatnya<br>Pemberdayaan Masyarakat                                  | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>JAMBLANG     |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Meningkatnya Pelayanan<br>Publik   | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>SURANENGGALA |
|          |   | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>SURANENGGALA |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>SURANENGGALA |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>SURANENGGALA |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |       |       |       |       | Kondisi<br>Akhir | SKPD                                      |
|----------|---|--|-----------------|---------------|-------|-------|-------|-------|------------------|---|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |                  |   |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6     | 7     | 8     | 9     | 10               | 11  |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA  | Meningkatnya<br>Pemberdayaan Masyarakat  | 100             | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | KECAMATAN<br>SURANENGGALA                 |
| 0,       | <b>NON URUSAN</b>   |  |                 |               |       |       |       |       |                  |   |
| 1.05.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN<br/>KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>  |  |                 |               |       |       |       |       |                  |   |
| 1.05.03. | PROGRAM<br>PENANGGULANGA<br>N BENCANA   | Meningkatnya Indeks<br>Kapasitas/ Ketahanan<br>Daerah                                  | 70,08           | 75,21         | 80,34 | 85,47 | 90,59 | 95,72 | 95,72            | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
| 8,       | <b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>  |  |                 |               |       |       |       |       |                  |   |
| 8.01.    | <b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>  |  |                 |               |       |       |       |       |                  |   |
| 8.01.02. | PROGRAM<br>PENGUATAN<br>IDEOLOGI<br>PANCASILA DAN<br>KARAKTER<br>KEBANGSAAN   | Prosentase meningkatnya<br>wawasan kebangsaan<br>warga negara                          | 6               | 10            | 15    | 20    | 25    | 30    | 30               | BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN<br>POLITIK   |
|          |   | Prosentase meningkatnya<br>kemitraan dalam<br>berwawasan kebangsaan                    | 8               | 10            | 12    | 15    | 17    | 20    | 20               | BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN<br>POLITIK   |
| 8.01.03. | PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>PERAN PARTAI<br>POLITIK DAN<br>LEMBAGA<br>PENDIDIKAN<br>MELALUI<br>PENDIDIKAN<br>POLITIK DAN<br>PENGEMBANGAN<br>ETIKA SERTA<br>BUDAYA POLITIK | Prosentase peningkatan<br>kualitas pendidikan politik<br>masyarakat                    | 78              | 80            | 82    | 84    | 87    | 88    | 88               | BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN<br>POLITIK   |
| 8.01.04. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>DAN<br>PENGAWASAN<br>ORGANISASI<br>KEMASYARAKATA<br>N  | Prosentase Meningkatnya<br>Pemberdayaan dan<br>Pengawasan Organisasi<br>Kemasyarakatan | 5               | 13            | 15    | 20    | 25    | 27    | 100              | BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN<br>POLITIK   |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM   | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                                    |
|----------|--|---|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|---|
|          |  |   |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |   |
| 1        | 2  | 3   | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                                      |
| 8.01.05. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGEMBANGAN<br>KETAHANAN<br>EKONOMI,<br>SOSIAL, DAN<br>BUDAYA   | Prosentase Meningkatnya<br>Pembinaan dan<br>Pengembangan Ketahanan<br>Ekonomi, Sosial dan<br>Budaya   | 4               | 5             | 20   | 25   | 25   | 25   | 100              | BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN<br>POLITIK |
| 8.01.06. | PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>KEWASPADAAN<br>NASIONAL DAN<br>PENINGKATAN<br>KUALITAS DAN<br>FASILITASI<br>PENANGANAN<br>KONFLIK SOSIAL | Prosentase Peningkatan<br>keamanan dan<br>kenyamanan Lingkungan<br>yang dilakukan                     | 10              | 8             | 10   | 12   | 14   | 16   | 16               | BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN<br>POLITIK |
|          |  | Prosentase meningkatnya<br>ketentraman dan<br>ketertiban umum dalam<br>kerangka kesatuan<br>berbangsa | 20              | 18            | 16   | 15   | 13   | 10   | 10               | BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN<br>POLITIK |

Sumber: Hasil analisis Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, 2021





**Tabel 8.1**

**Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran  
(dampak/impact) Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024**

| No | Aspek/ Fokus/ Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Rumus  | Satuan         | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada<br>Awal<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi | Target Capaian Setiap Tahun- |              |              |              |              | Kondisi<br>Kinerja<br>pada<br>akhir<br>Periode<br>RPJMD | Sumber Data |
|----|---|--|----------------|--|-----------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|-------------|
|    |   |  |                |  | 2020      | 2021                         | 2022         | 2023         | 2024         |              |   |             |
| 1  | 2   | 3  | 4              | 5  | 6         | 7                            | 8            | 9            | 10           | 11           | 12  |             |
|    | ASPEK KESEJAHTERAAN<br>MASYARAKAT                                       |  |                |  |           |                              |              |              |              |              |   |             |
|    | FOKUS KESEJAHTERAAN<br>DAN PEMERATAAN<br>EKONOMI                        |  |                |  |           |                              |              |              |              |              |   |             |
| 1  | Pertumbuhan PDRB Atas<br>Harga Konstan                                  | (PDRB pada tahun<br>berkenaan – PDRB<br>tahun sebelumnya)/<br>PDRB tahun sebelumnya<br>X 100%                                    | Persen         | 4,68   | -1,08     | 4,38                         | 4,61         | 4,84         | 5,08         | 5,08         | BPS   |             |
| 2  | Laju inflasi  | Perubahan nilai inflasi<br>dari nilai tahun<br>sebelumnya  | Persen         | 3,19   | 2,7 – 3,5 | 2,7 –<br>3,5                 | 2,7 –<br>3,5 | 2,7 –<br>3,5 | 2,7 –<br>3,5 | 2,7 –<br>3,5 | BPS   |             |
| 3  | PDRB per kapita   |  |                |  |           |                              |              |              |              |              |   |             |
|    | a. PDRB per kapita ADHB   | PDRB ADHB/ jumlah<br>Penduduk  | Juta<br>Rupiah | 22,41  | 22,43     | 23,25                        | 24,95        | 26,78        | 28,74        | 28,74        | BPS   |             |
|    | b. PDRB per kapita ADHK   | PDRB ADHK/ jumlah<br>Penduduk  | Juta<br>Rupiah | 15.37  | 15,82     | 16,37                        | 16,93        | 17,49        | 18,04        | 18,04        | BPS   |             |
| 4  | Indeks Gini   | Tingkat kesenjangan<br>pendapatan yang<br>dihitung melalui variabel<br>total pendapatan dan<br>total pengeluaran per<br>penduduk | Poin           | 0,344  | 0,338     | 0,336                        | 0,334        | 0,332        | 0,330        | 0,330        | BPS   |             |
| 5  | Prosentase penduduk<br>miskin   | Jumlah penduduk<br>dibawah garis   | Persen         | 9,94   | 11,24     | 11,14                        | 11,04        | 10,94        | 10,84        | 10,84        | BPS   |             |



| No | Aspek/ Fokus/ Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Rumus   | Satuan | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada<br>Awal<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi | Target Capaian Setiap Tahun- |       |       |       |       | Kondisi<br>Kinerja<br>pada<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Sumber Data |
|----|---|---|--------|--|-----------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|---|-------------|
|    |   |   |        |  | 2020      | 2021                         | 2022  | 2023  | 2024  |       |   |             |
| 1  | 2   | 3   | 4      | 5  | 6         | 7                            | 8     | 9     | 10    | 11    | 12  |             |
|    |   | kemiskinan/total jumlah penduduk X 100%   |        |  |           |                              |       |       |       |       |   |             |
| 6  | Indeks keparahan kemiskinan   | Ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin  | Persen | 0,26   | 0,24      | 0,51                         | 0,51  | 0,5   | 0,5   | 0,5   | BPS   |             |
| 7  | Indeks kedalaman kemiskinan   | Rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan   | Persen | 1,39   | 1,30      | 2,18                         | 2,17  | 2,16  | 2,15  | 2,15  | BPS   |             |
|    | <b>FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>                                       |   |        |  |           |                              |       |       |       |       |   |             |
| 8  | IPM   | (Indeks Kesehatanx Indeks Pendidkanx Indeks Pengeluaran) <sup>1/3</sup> x 100   | Poin   | 68,69  | 68,75     | 69,93                        | 69,92 | 70,53 | 71,15 | 71,15 | BPS   |             |
| 9  | Angka Melek Huruf   | Jumlah penduduk usia di atas 15 tahun yang bisa baca tulis/ jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas x 100%  | Persen | 95,53  | 96        | 96,58                        | 97,16 | 97,74 | 98,32 | 98,32 | BPS   |             |
| 10 | Angka rata-rata Lama Sekolah  | Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal yang dihitung melalui variabel partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang pernah diduduki, kelas yang sedang dijalani, dan jenjang pendidikan yang ditamatkan | Tahun  | 6,71   | 6,92      | 7,05                         | 7,18  | 7,31  | 7,44  | 7,44  | Disdik  |             |



| No | Aspek/ Fokus/ Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Rumus   | Satuan | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada<br>Awal<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi   | Target Capaian Setiap Tahun- |             |             |             |             | Kondisi<br>Kinerja<br>pada<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Sumber Data |
|----|---|---|--------|--|-------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|
|    |   |   |        |  | 2020        | 2021                         | 2022        | 2023        | 2024        |             |   |             |
| 1  | 2   | 3   | 4      | 5  | 6           | 7                            | 8           | 9           | 10          | 11          | 12  |             |
| 11 | Umur Harapan Hidup (UHH)  | Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh sejak lahir yang dihitung melalui variabel anak lahir hidup dan anak masih hidup | Tahun  | 71,82  | 71,99       | 72,11                        | 72,24       | 72,36       | 72,48       | 72,48       | Dinkes  |             |
| 12 | Persentase Balita Gizi Buruk  | Jumlah balita gizi buruk / jumlah balita X 100%   | %      | 0,17   | 0,16        | 0,15                         | 0,14        | 0,13        | 0,12        | 0,12        | Dinkes  |             |
| 13 | Prevalensi balita gizi kurang   | Jumlah balita gizi kurang / jumlah balita X 100%  | %      | 7,5  | 7,3         | 7                            | 6,8         | 6,5         | 6,2         | 6,2         | Dinkes  |             |
| 14 | Cakupan desa siaga aktif  | Jumlah desa siaga aktif / jumlah desa siaga yang dibentuk X 100%  | %      | 100  | 100         | 100                          | 100         | 100         | 100         | 100         | Dinkes  |             |
| 15 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja                                      | Jumlah angkatan kerja / jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun) X 100%   | %      | 65,38  | 63,79       | 62,62                        | 63,99       | 63,99       | 65,36       | 65,36       | Disnakertran  |             |
| 16 | Tingkat Pengangguran Terbuka  | Jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja/jumlah angkatan kerja X 100%   | Prosen | 10,28  | 11,52       | 11,12                        | 10,70       | 10,30       | 9,90        | 9,90        | Disnakertran  |             |
| 17 | Rasio penduduk yang bekerja   | Penduduk yang bekerja/ angkatan kerja X 100%  | %      | 89,44  | 90,89       | 91,53                        | 92,13       | 92,69       | 93,21       | 93,21       | Disnakertran  |             |
| 18 | Laju pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010                              | PDRB ADHK/Jumlah penduduk X 100%  | %      | 7,37   | 4,20 – 4,67 | 4,20 – 4,75                  | 4,20 – 4,82 | 4,20 – 4,90 | 4,20 – 4,97 | 4,20 – 4,97 | BPS   |             |
| 19 | Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas          | Kesempatan kerja/jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun) X 100%  | Persen | 58,66  | 56,44       | 57,22                        | 58,03       | 58,83       | 59,64       | 59,64       | Disnakertrans   |             |



| No | Aspek/ Fokus/ Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Rumus   | Satuan | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada<br>Awal<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi | Target Capaian Setiap Tahun- |       |       |       |       | Kondisi<br>Kinerja<br>pada<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Sumber Data |
|----|---|---|--------|--|-----------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|---|-------------|
|    |   |   |        |  | 2020      | 2021                         | 2022  | 2023  | 2024  |       |   |             |
| 1  | 2   | 3   | 4      | 5  | 6         | 7                            | 8     | 9     | 10    | 11    | 12  |             |
| 20 | Indeks Kepuasan Masyarakat  | Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi x nilai penimbang         | Poin   | 3,25   | 3,27      | 3,65                         | 3,85  | 3,95  | 4,00  | 4,00  | Bag Organisasi SETDA                                    |             |
| 21 | Indeks Kemandirian Fiskal   | Jumlah PAD/Jumlah Pendapatan Daerah X 100%  | Prosen | 15,71  | 16,24     | 16,79                        | 17,36 | 17,95 | 18,56 | 18,56 | BAPENDA BKAD  |             |
| 22 | Opini BPK   | Penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah              | Indeks | WTP  | WTP       | WTP                          | WTP   | WTP   | WTP   | WTP   | BKAD  |             |
| 23 | Pencapaian skor PPH Ketersediaan  | Ketersediaan energi masing-masing kelompok pangan/Angka Kecukupan Energi X 100          | Poin   | 71,17  | 71,44     | 71,71                        | 71,98 | 72,25 | 72,52 | 72,52 | Dishanpang  |             |
| 24 | Pencapaian skor PPH Konsumsi  | Konsumsi energi masing-masing kelompok pangan/Angka Kecukupan Energi X 100              | Poin   | 91,50  | 93        | 93,10                        | 93,20 | 93,30 | 93,40 | 93,40 | Dishanpang  |             |
| 25 | Penguatan cadangan pangan per 1.440 ton                                 | Jumlah cadangan pangan kabupaten/1.440 ton X 100%                                       | %      | 90,71  | 182       | 45,58                        | 66,67 | 84,72 | 104,1 | 104,1 | Dishanpang  |             |
| 26 | Daerah rawan pangan yang diintervensi                                   | Jumlah daerah rawan pangan yang diintervensi/ jumlah seluruh daerah rawan pangan X 100% | %      | 26,01  | 20        | 20                           | 20    | 20    | 20    | 100   | Dishanpang  |             |
| 27 | Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB                   | Jumlah PDRB sektor pertanian, perkebunan/ Jumlah PDRB X 100%                            | %      | 11,27  | 12,97     | 13,02                        | 13,07 | 13,12 | 13,17 | 13,17 | BPS   |             |



| No | Aspek/ Fokus/ Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Rumus   | Satuan | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada<br>Awal<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi | Target Capaian Setiap Tahun- |         |         |         |         | Kondisi<br>Kinerja<br>pada<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Sumber Data |
|----|---|---|--------|--|-----------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---|-------------|
|    |   |   |        |  | 2020      | 2021                         | 2022    | 2023    | 2024    |         |   |             |
| 1  | 2   | 3   | 4      | 5  | 6         | 7                            | 8       | 9       | 10      | 11      | 12  |             |
| 28 | Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB                    | Jumlah PDRB Sektor Pertanian (Palawija)/ Jumlah PDRB X 100%                 | %      | 45,83  | 48,75     | 48,77                        | 48,79   | 48,81   | 48,83   | 48,83   | BPS   |             |
| 29 | Produksi sektor pertanian   | Jumlah produksi komoditas pertanian ( ton )                                 | Ton    | 420.707  | 465.237   | 469.133                      | 473.068 | 477.022 | 481.066 | 481.066 | Distan  |             |
| 30 | Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB                              | Jumlah PDRB sektor perkebunan/ Jumlah PDRB X 100%                           | %      | 12,19  | 12,53     | 12,54                        | 12,55   | 12,56   | 12,57   | 12,57   | BPS   |             |
| 31 | Produksi sektor perkebunan  | Jumlah produksi komoditas perkebunan dalam ton                              | Ton    | 19.262   | 24.352    | 24.401                       | 24.450  | 24.498  | 24.547  | 24.547  | Distan  |             |
| 32 | Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB                       | Jumlah produksi padi hasil kelompok tani/ jumlah total produksi padi X 100% | %      | 100  | 100       | 100                          | 100     | 100     | 100     | 100     | Distan  |             |
| 33 | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB                              | Jumlah PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Jumlah PDRB X 100% | %      | 3,54**   | 3,6       | 3,63                         | 3,66    | 3,69    | 3,72    | 3,72    | BPS   |             |
| 34 | Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB                  | Jumlah PDRB sektor kelautan dan perikanan/ Jumlah PDRB X 100%               | %      | 2,68**   | 2,74      | 2,77                         | 2,8     | 2,83    | 2,86    | 2,86    | BPS   |             |
| 35 | Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB                             | Jumlah PDRB sektor perdagangan/ Jumlah PDRB X 100%                          | %      | 23**   | 20        | 20                           | 20      | 20      | 20      | 20      | BPS   |             |
| 36 | Kontribusi sektor industri terhadap PDRB                                | Jumlah PDRB sektor industri/ Jumlah PDRB X 100%                             | %      | 20**   | 20        | 20                           | 20      | 20      | 20      | 20      | BPS   |             |



| No | Aspek/ Fokus/ Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Rumus  | Satuan         | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada<br>Awal<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi | Target Capaian Setiap Tahun- |        |        |        |        | Kondisi<br>Kinerja<br>pada<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Sumber Data |
|----|---|--|----------------|--|-----------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|---|-------------|
|    |   |  |                |  | 2020      | 2021                         | 2022   | 2023   | 2024   |        |   |             |
| 1  | 2   | 3  | 4              | 5  | 6         | 7                            | 8      | 9      | 10     | 11     | 12  |             |
| 37 | Kontribusi industri rumah<br>tangga terhadap PDRB<br>sektor industri    | Jumlah PDRB sektor<br>industri rumah tangga/<br>Jumlah PDRB X 100%   | %              | 7**  | 7         | 7                            | 7      | 7      | 7      | 7      | BPS   |             |
| 38 | Pertumbuhan industri  | (Jumlah industri tahun<br>berkenaan – Jumlah<br>industri tahun<br>sebelumnya)/ Jumlah<br>industri tahun<br>sebelumnya X 100% | %              | 2,19   | 1,15      | 1,1                          | 1,12   | 1,17   | 1,22   | 1,22   | Disdagin  |             |
|    | <b>ASPEK DAYA SAING<br/>DAERAH</b>                                      |  |                |  |           |                              |        |        |        |        |   |             |
|    | <b>FOKUS KEMAMPUAN<br/>EKONOMI DAERAH</b>                               |  |                |  |           |                              |        |        |        |        |   |             |
| 1  | Pengeluaran konsumsi<br>rumah tangga per kapita<br>per tahun            | Total pengeluaran RT/<br>Jumlah RT   | Ribu<br>Rupiah | 10.212**   | 10.812    | 11.112                       | 11.412 | 11.712 | 12.012 | 12.012 | BPS   |             |
| 2  | Persentase pengeluaran<br>konsumsi non pangan per<br>kapita             | Total pengeluaran RT<br>non pangan/ Total<br>Pengeluaran X 100%  | %              | 41,62  | 46,27     | 47,27                        | 48,27  | 49,27  | 50,27  | 50,27  | BPS   |             |
| 3  | Rasio ekspor + impor<br>terhadap PDB                                    | (Jumlah ekspor<br>daerah+impor daerah) /<br>PDB  | %              | 1,14   | 1,14      | 1,14                         | 1,15   | 1,15   | 1,16   | 1,16   | Disdagin  |             |
|    | <b>FOKUS FASILITAS<br/>WILAYAH/<br/>INFRASTRUKTUR</b>                   |  |                |  |           |                              |        |        |        |        |   |             |
| 4  | Ketaatan terhadap RTRW  | Realisasi RTRW/<br>Rencana Peruntukan X<br>100%  | %              | na   | 100       | 100                          | 100    | 100    | 100    | 100    | PUPR  |             |
| 5  | Jenis, kelas dan jumlah<br>restoran                                     | Jumlah restoran<br>berdasarkan jenis dan<br>kelasnya   | Unit           | 2.015  | 2.370     | 2.725                        | 3.080  | 3.435  | 3.790  | 3.790  | Data Bapenda  |             |
|    | a. Restoran   | Jumlah restoran  | Unit           | 30   | 31        | 32                           | 33     | 34     | 35     | 35     | Data Bapenda  |             |



| No | Aspek/ Fokus/ Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Rumus   | Satuan | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada<br>Awal<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi | Target Capaian Setiap Tahun- |       |       |       | Kondisi<br>Kinerja<br>pada<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Sumber Data  |
|----|---|---|--------|--|-----------|------------------------------|-------|-------|-------|---|--------------|
|    |   |   |        |  | 2020      | 2021                         | 2022  | 2023  | 2024  |   |              |
| 1  | 2   | 3   | 4      | 5  | 6         | 7                            | 8     | 9     | 10    | 11  | 12           |
|    | b. Rumah Makan  | Jumlah rumah makan  | Unit   | 200  | 210       | 220                          | 230   | 240   | 250   | 250   | Data Bapenda |
|    | c. Cafe   | Jumlah cafe   | Unit   | 18   | 19        | 20                           | 21    | 22    | 23    | 23  | Data Bapenda |
|    | d. Kantin   | Jumlah kantin   | Unit   | 67   | 70        | 73                           | 76    | 79    | 82    | 82  | Data Bapenda |
|    | e. Katering   | Jumlah katering   | Unit   | 850  | 1.020     | 1.190                        | 1.360 | 1.530 | 1.700 | 1.700   | Data Bapenda |
|    | f. Jasa Boga  | Jumlah jasa boga  | Unit   | 850  | 1.020     | 1.190                        | 1.360 | 1.530 | 1.700 | 1.700   | Data Bapenda |
| 6  | Jenis, kelas dan jumlah<br>penginapan/ hotel<br>berdasarkan data pajak: | Jumlah penginapan atau<br>hotel berdasarkan jenis<br>dan kelasnya               | Unit   | 78   | 88        | 88                           | 88    | 88    | 88    | 88  | Data Bapenda |
|    | a. Hotel Bintang Empat  | Jumlah hotel bintang<br>empat   | Unit   | 1  | 1         | 1                            | 1     | 1     | 1     | 1   | Data Bapenda |
|    | b. Hotel Bintang Tiga   | Jumlah hotel bintang<br>tiga  | Unit   | 3  | 4         | 4                            | 4     | 4     | 4     | 4   | Data Bapenda |
|    | c. Hotel Bintang Dua  | Jumlah hotel bintang<br>dua   | Unit   | 2  | 2         | 2                            | 2     | 2     | 2     | 2   | Data Bapenda |
|    | d. Hotel Melati Tiga  | Jumlah hotel melati tiga  | Unit   | 11   | 11        | 11                           | 11    | 11    | 11    | 11  | Data Bapenda |
|    | e. Hotel Melati Dua   | Jumlah hotel melati dua   | Unit   | 1  | 1         | 1                            | 1     | 1     | 1     | 1   | Data Bapenda |
|    | f. Hotel Melati Satu  | Jumlah hotel melati satu  | Unit   | 5  | 5         | 5                            | 5     | 5     | 5     | 5   | Data Bapenda |
|    | g. Losmen/ Rumah<br>Penginapan/Pesanggerahan                            | Jumlah losmen/rumah<br>penginapan/<br>pesanggerahan                             | Unit   | 55   | 64        | 64                           | 64    | 64    | 64    | 64  | Data Bapenda |
| 7  | RT yang menggunakan air<br>bersih                                       | Jumlah RT yang<br>berakses menggunakan<br>air bersih/ jumlah total<br>RT X 100% | %      | 74,84  | 69,6      | 70,59                        | 71,59 | 72,58 | 73,15 | 73,15   | DPKPP        |
|    | <b>FOKUS IKLIM<br/>BERINVESTASI</b>                                     |   |        |  |           |                              |       |       |       |   |              |
| 8  | Angka kriminalitas  | Jumlah kasus<br>kriminalitas (kejahatan<br>seksual, penganiyaan,<br>pencurian)  | kasus  | 287  | 211       | 197                          | 142   | 101   | 55    | 55  | SatpolPP     |



| No | Aspek/ Fokus/ Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Rumus   | Satuan           | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada<br>Awal<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi | Target Capaian Setiap Tahun- |        |         |         | Kondisi<br>Kinerja<br>pada<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Sumber Data |
|----|---|---|------------------|--|-----------|------------------------------|--------|---------|---------|---|-------------|
|    |   |   |                  |  | 2020      | 2021                         | 2022   | 2023    | 2024    |   |             |
| 1  | 2   | 3   | 4                | 5  | 6         | 7                            | 8      | 9       | 10      | 11  | 12          |
| 9  | Angka kriminalitas yang tertangani                                      | Jumlah tindak kriminal tertangani/ Jumlah penduduk X 10.000 | /10.000 penduduk | 1,33   | 0,94      | 0,87                         | 0,61   | 0,43    | 0,23    | 0,23  | Satpol PP   |
| 10 | Jumlah demonstrasi  | Jumlah kejadian demonstrasi                                 | kali             | 30   | 25        | 25                           | 25     | 20      | 20      | 20  | Kesbangpol  |
| 11 | Lama proses perijinan   | Waktu yang dibutuhkan utk memproses perijinan               | hari             | 5  | 5         | 5                            | 5      | 5       | 5       | 5   | DPMPTSP     |
| 12 | Realisasi nilai pajak daerah  | Jumlah realisasi nilai pajak daerah                         | Milyar Rupiah    | 190  | 239,86    | 275,84                       | 317,21 | 364,77  | 419,48  | 419,48  | BAPPENDA    |
|    | a. Pajak Hotel  | Jumlah realisasi nilai pajak hotel                          | Milyar Rupiah    | 4,725  | 6,05      | 6,959                        | 8,003  | 9,203   | 10,584  | 10,584  | BAPPENDA    |
|    | b. Pajak Restoran   | Jumlah realisasi nilai pajak restoran                       | Milyar Rupiah    | 12,625   | 16,675    | 19,176                       | 22,053 | 25,361  | 29,165  | 29,165  | BAPPENDA    |
|    | c. Pajak Hiburan  | Jumlah realisasi nilai pajak hiburan                        | Milyar Rupiah    | 1,075  | 1,536     | 1,767                        | 2,032  | 2,337   | 2,687   | 2,687   | BAPPENDA    |
|    | a. Pajak Reklame  | Jumlah realisasi nilai pajak reklame                        | Milyar Rupiah    | 4,25   | 4,5       | 5,175                        | 5,951  | 6,844   | 7,871   | 7,871   | BAPPENDA    |
|    | b. Pajak Penerangan Jalan   | Jumlah realisasi nilai pajak penerangan jalan               | Milyar Rupiah    | 66,4   | 73,653    | 84,7                         | 97,405 | 112,819 | 128,819 | 128,819   | DISHUB      |
|    | c. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan                                 | Jumlah realisasi nilai pajak mineral bukan logam dan batuan | Milyar Rupiah    | 10,525   | 12,726    | 14,635                       | 16,83  | 19,355  | 22,258  | 22,258  | BAPPENDA    |
|    | d. Pajak Parkir   | Jumlah realisasi nilai pajak parkir                         | Milyar Rupiah    | 0,4  | 0,69      | 0,794                        | 0,913  | 1,049   | 1,207   | 1,207   | DISHUB      |
|    | e. Pajak Air Bawah Tanah  | Jumlah realisasi nilai pajak air bawah tanah                | Milyar Rupiah    | 0,725  | 0,998     | 1,148                        | 1,32   | 1,518   | 1,746   | 1,746   | BAPPENDA    |
|    | f. Pajak Sarang Burung Walet  | Jumlah realisasi nilai pajak sarang burung walet            | Milyar Rupiah    | 0,06   | 0,06      | 0,06                         | 0,06   | 0,06    | 0,06    | 0,06  | BAPPENDA    |
|    | g. Pajak Bumi dan Bangunan  | Jumlah realisasi nilai pajak bumi dan bangunan              | Milyar Rupiah    | 38,5   | 49,895    | 57,379                       | 65,986 | 75,884  | 87,267  | 87,267  | BAPPENDA    |





| No | Aspek/ Fokus/ Bidang<br>Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Rumus   | Satuan           | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada<br>Awal<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi | Target Capaian Setiap Tahun- |        |         |         | Kondisi<br>Kinerja<br>pada<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Sumber Data   |
|----|---|---|------------------|--|-----------|------------------------------|--------|---------|---------|---|---------------|
|    |   |   |                  |  | 2020      | 2021                         | 2022   | 2023    | 2024    |   |               |
| 1  | 2   | 3   | 4                | 5  | 6         | 7                            | 8      | 9       | 10      | 11  | 12            |
|    | h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan                            | Jumlah realisasi nilai pajak BPHATB   | Milyar Rupiah    | 50,715   | 73,08     | 84,042                       | 96,648 | 111,146 | 127,817 | 127,817   | BAPPENDA      |
| 13 | Jumlah perda yang mendukung iklim usaha                                 | Jumlah perda yang masih relevan dan mendukung iklim usaha dan investasi   | Perda            | 13   | 13        | 13                           | 13     | 13      | 13      | 13  | DPMPPTS       |
| 14 | Persentase desa mandiri terhadap total desa                             | Jumlah desa mandiri/Jumlah total desa X 100%  | Desa             | 2  | 5         | 28                           | 49     | 70      | 91      | 91  | DPMD          |
|    | <b>FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA</b>  |   |                  |  |           |                              |        |         |         |   |               |
| 15 | Rasio lulusan S1/S2/S3  | Jumlah lulusan S1+S2+S3/ Jumlah penduduk X 10.000   | /10.000 penduduk | 241  | 406       | 528                          | 686    | 892     | 1.160   | 1.160   | Disnakertrans |
| 16 | Rasio ketergantungan  | Jumlah penduduk non produktif (usia < 15 tahun + usia > 65 tahun) / Jumlah penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) X 100% | %                | 47,19  | 46,73     | 46,5                         | 46,27  | 46,04   | 45,81   | 45,81   | BPS           |

Sumber: Hasil analisis Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, 2021



**Tabel 8.2**

**Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Program (Outcome) Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024**

| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM   | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                                       | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |       |       |       |       | Kondisi<br>Akhir | SKPD             |
|----------|--|--|-----------------|---------------|-------|-------|-------|-------|------------------|------------------|
|          |  |  |                 | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |                  |                  |
| 1        | 2  | 3  | 4               | 5             | 6     | 7     | 8     | 9     | 10               | 11               |
|          | <b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>  |  |                 |               |       |       |       |       |                  |                  |
| 1,       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |  |                 |               |       |       |       |       |                  |                  |
| 1.01.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |  |                 |               |       |       |       |       |                  |                  |
| 1.01.02. | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN   | Angka partisipasi kasar  | 67              | 68            | 68,41 | 68,82 | 69,23 | 69,65 | 69,65            | DINAS PENDIDIKAN |
|          |  | Angka partisipasi kasar SD   | 109             | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | DINAS PENDIDIKAN |
|          |  | Peningkatan Persentase Masyarakat Melek Aksara                               | 95,55           | 96            | 96,58 | 97,16 | 97,74 | 98,32 | 98,32            | DINAS PENDIDIKAN |
|          |  | Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV jenjang SD                 | 96              | 97            | 97,6  | 98,2  | 98,8  | 99,3  | 99,3             | DINAS PENDIDIKAN |
|          |  | Angka Melek Huruf Al Qur'an jenjang SD                                       | 76              | 76            | 76,46 | 76,91 | 77,38 | 77,84 | 77,84            | DINAS PENDIDIKAN |
|          |  | Angka Melek Huruf Al Qur'an SMP  | 55,7            | 59,5          | 63,3  | 67,1  | 70,9  | 74,7  | 74,7             | DINAS PENDIDIKAN |
|          |  | Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Kondisi Ruang Kelas Baik PAUD/TK | 60              | 60,35         | 60,72 | 61,09 | 61,45 | 61,82 | 61,82            | DINAS PENDIDIKAN |
|          |  | Peningkatan Capaian Angka Lulusan Kesetaraan Paket A setara SD               | 0               | 80            | 85    | 90    | 95    | 98    | 98               | DINAS PENDIDIKAN |
|          |  | Angka partisipasi kasar SMP  | 101,11          | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | DINAS PENDIDIKAN |
|          |  | Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah :                                  | 0               | 50            | 55    | 60    | 65    | 70    | 70               | DINAS PENDIDIKAN |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM   | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |       |       |       |        | Kondisi<br>Akhir | SKPD             |
|----------|--------------------------------|--|-----------------|---------------|-------|-------|-------|--------|------------------|------------------|
|          |                                |  |                 | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024   |                  |                  |
| 1        | 2                              | 3  | 4               | 5             | 6     | 7     | 8     | 9      | 10               | 11               |
|          |                                | Persentasi fasilitas yang dimiliki sekolah PAUD/TK   |                 |               |       |       |       |        |                  |                  |
|          |                                | Peningkatan Capaian Angka Kelulusan Warga Belajar Paket B setara SMP                       | 68,09           | 70            | 70,04 | 70,08 | 71,3  | 71,7   | 71,7             | DINAS PENDIDIKAN |
|          |                                | Standar Pelayanan Minimal  | 100             | 100           | 100   | 100   | 100   | 100    | 100              | DINAS PENDIDIKAN |
|          |                                | Peningkatan Angka Lulusan pada jenjang Kesetaraan Paket C Setara SMA                       | 79,68           | 80            | 80,5  | 81    | 81,4  | 81,9   | 81,9             | DINAS PENDIDIKAN |
|          |                                | Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/Mts   | 100             | 100           | 100   | 100   | 100   | 100    | 100              | DINAS PENDIDIKAN |
|          |                                | Angka Kelulusan (AL) SD/MI   | 100             | 100           | 100   | 100   | 100   | 100    | 100              | DINAS PENDIDIKAN |
|          |                                | Meningkatnya Angka Lulusan SMP   | 99,95           | 99,97         | 99,98 | 99,99 | 100   | 100,01 | 100,01           | DINAS PENDIDIKAN |
|          |                                | Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Kondisi Ruang Kelas Baik SD                    | 70              | 70,42         | 70,84 | 71,27 | 71,7  | 72,13  | 72,13            | DINAS PENDIDIKAN |
|          |                                | Ketersediaan sarana dan prasarana sekolah : Kondisi Keadaan Ruang Kelas Baik SMP           | 80              | 80,5          | 81    | 81,5  | 82    | 82,5   | 82,5             | DINAS PENDIDIKAN |
|          |                                | Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Persentasi fasilitas yang dimiliki sekolah SD  | 0               | 60            | 65    | 70    | 75    | 80     | 80               | DINAS PENDIDIKAN |
|          |                                | Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Persentasi fasilitas yang dimiliki sekolah SMP | 0               | 60            | 65    | 70    | 75    | 80     | 80               | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.03. | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | Angka partisipasi kasar  | 67              | 68            | 68,41 | 68,82 | 69,23 | 69,65  | 69,65            | DINAS PENDIDIKAN |
|          |                                | Peningkatan Capaian Angka Lulusan Kesetaraan Paket A setara SD                             | 0               | 80            | 85    | 90    | 95    | 98     | 98               | DINAS PENDIDIKAN |
|          |                                | Angka Kelulusan (AL) SD/MI   | 100             | 100           | 100   | 100   | 100   | 100    | 100              | DINAS PENDIDIKAN |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |       |       |       |       | Kondisi<br>Akhir | SKPD             |
|----------|---|---|-----------------|---------------|-------|-------|-------|-------|------------------|------------------|
|          |   |   |                 | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |                  |                  |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5             | 6     | 7     | 8     | 9     | 10               | 11               |
|          |   | Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Persentasi fasilitas yang dimiliki sekolah SD | 0               | 60            | 65    | 70    | 75    | 80    | 80               | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.04. | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                                    | Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV jenjang SD                              | 96              | 97            | 97,6  | 98,2  | 98,8  | 99,3  | 99,3             | DINAS PENDIDIKAN |
|          |   | Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah  | 100             | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.02.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>                                 |   |                 |               |       |       |       |       |                  |                  |
| 1.02.02. | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Angka kematian ibu (AKI)  | 0               | 85            | 83,5  | 82    | 80,5  | 79    | 79               | DINAS KESEHATAN  |
|          |   | Angka kematian Bayi (AKB)   | 0               | 3,81          | 3,78  | 3,75  | 3,72  | 3,69  | 3,69             | DINAS KESEHATAN  |
|          |   | Tercapainya Universal Health Coverage (UHC)   | 0               | 97            | 97,5  | 0     | 0     | 0     | 0                | DINAS KESEHATAN  |
|          |   | Meningkatnya Status Gizi Balita   | 0               | 85            | 85    | 0     | 0     | 0     | 0                | DINAS KESEHATAN  |
|          |   | Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit   | 0               | 87            | 90,5  | 0     | 0     | 0     | 0                | DINAS KESEHATAN  |
|          |   | Meningkatnya jumlah Desa Open Defecation Free (ODF)                                       | 0               | 43,87         | 49,76 | 0     | 0     | 0     | 0                | DINAS KESEHATAN  |
| 1.02.03. | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                 | Rasio Tenaga Kesehatan terhadap jumlah penduduk   | 0               | 0             | 1.665 | 1.665 | 1.665 | 1.665 | 1.665            | DINAS KESEHATAN  |
| 1.02.04. | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                 | Persentase TPM/TPP yang memenuhi syarat kesehatan   | 0               | 67            | 68    | 69    | 70    | 71    | 71               | DINAS KESEHATAN  |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM   | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |       |       |       |       | Kondisi<br>Akhir | SKPD  |
|----------|--|---|-----------------|---------------|-------|-------|-------|-------|------------------|---|
|          |  |   |                 | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |                  |   |
| 1        | 2  | 3   | 4               | 5             | 6     | 7     | 8     | 9     | 10               | 11  |
| 1.02.05. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>BIDANG<br>KESEHATAN                       | Persentase Rumah tangga<br>ber PHBS   | 62,08           | 67            | 69    | 0     | 0     | 0     | 0                | DINAS KESEHATAN                               |
| 1.03.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN<br/>PENATAAN RUANG</b>            |   |                 |               |       |       |       |       |                  |   |
| 1.03.02. | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>SUMBER DAYA<br>AIR (SDA)                                 | Persentase jaringan irigasi<br>dalam kondisi baik                                   | 68,76           | 69,92         | 70,51 | 72,84 | 75,75 | 78,67 | 78,67            | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM DAN<br>PENATAAN RUANG |
|          |  | Persentase Berkurangnya<br>luasan genangan akibat<br>banjir                         | 3,86            | 3,66          | 3,47  | 3,28  | 3,09  | 2,89  | 2,89             | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM DAN<br>PENATAAN RUANG |
| 1.03.03. | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>DAN<br>PENGEMBANGAN<br>SISTEM<br>PENYEDIAAN AIR<br>MINUM | Persentase penduduk<br>berakses air minum   | 0               | 0             | 0     | 71,66 | 72,34 | 73    | 217              | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM DAN<br>PENATAAN RUANG |
| 1.03.05. | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>DAN<br>PENGEMBANGAN<br>SISTEM AIR<br>LIMBAH              | Persentase Rumah Tinggal<br>bersanitasi   | 0               | 0             | 0     | 81    | 81,04 | 81,06 | 243,1            | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM DAN<br>PENATAAN RUANG |
| 1.03.06. | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>DAN<br>PENGEMBANGAN<br>SISTEM<br>DRAINASE                | Persentase jalan yang<br>memiliki trotoar dan<br>drainase/saluran<br>pembuangan air | 4,21            | 4,33          | 4,45  | 4,57  | 4,57  | 4,82  | 4,82             | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM DAN<br>PENATAAN RUANG |
| 1.03.08. | PROGRAM<br>PENATAAN<br>BANGUNAN<br>GEDUNG  | Rasio bangunan berIMB<br>per satuan bangunan  | 0               | 0             | 0     | 2     | 2     | 2     | 6                | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM DAN<br>PENATAAN RUANG |
| 1.03.09. | PROGRAM<br>PENATAAN<br>BANGUNAN DAN<br>LINGKUNGANNYA                               | persentase pemenuhan<br>dokumen Rencana Tata<br>Bangunan dan Lingkungan             | 0               | 20            | 20    | 20    | 20    | 20    | 100              | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM DAN<br>PENATAAN RUANG |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM   | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                                       | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |       |       |       |       | Kondisi<br>Akhir | SKPD   |
|----------|--|--|-----------------|---------------|-------|-------|-------|-------|------------------|--|
|          |  |  |                 | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |                  |  |
| 1        | 2  | 3  | 4               | 5             | 6     | 7     | 8     | 9     | 10               | 11   |
| 1.03.10. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN JALAN   | Terpeliharanya Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten                              | 662,92          | 306           | 633   | 630   | 630   | 632   | 632              | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG            |
|          |  | Persentase jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi Baik                       | 47              | 48            | 49    | 50    | 51    | 52    | 52               | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG            |
|          |  | Prosentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan liar | 0,77            | 0,76          | 0,76  | 0,75  | 0,75  | 0,75  | 0,75             | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG            |
|          |  | Tersusunnya Informasi Database Jalan dan Jembatan                            | 100             | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 500              | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG            |
| 1.03.11. | PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>JASA<br>KONSTRUKSI                                      | persentase meningkatnya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi               | 0               | 20            | 40    | 60    | 80    | 100   | 100              | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG            |
| 1.03.12. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN PENATAAN<br>RUANG                                   | Persentase pemenuhan dokumen rencana rinci tata ruang                        | 23,26           | 23,26         | 32,56 | 44,19 | 55,81 | 65,12 | 65,12            | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG            |
|          |  | Persentase ketaatan pemanfaatan ruang  | 0               | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG            |
| 1.03.03. | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>DAN<br>PENGEMBANGAN<br>SISTEM<br>PENYEDIAAN AIR<br>MINUM | Cakupan jumlah sambungan Rumah Air Minum                                     | 74,84           | 69,6          | 70,59 | 0     | 0     | 0     | 0                | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1.03.05. | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>DAN<br>PENGEMBANGAN<br>SISTEM AIR<br>LIMBAH              | Cakupan jumlah sambungan Rumah Air Limbah                                    | 82,38           | 75,66         | 75,8  | 0     | 0     | 0     | 0                | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1.03.08. | PROGRAM<br>PENATAAN<br>BANGUNAN<br>GEDUNG  | Prosentase Bangunan dan Gedung Yang Memiliki Sertifikat Laik Fungsi          | 0               | 10            | 10    | 0     | 0     | 0     | 20               | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM                                       | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                              | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |       |       |       |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD   |
|----------|--|---|-----------------|---------------|-------|-------|-------|------|------------------|--|
|          |  |   |                 | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024 |                  |  |
| 1        | 2  | 3   | 4               | 5             | 6     | 7     | 8     | 9    | 10               | 11   |
|          |  | Rasio bangunan berIMB per satuan Bangunan                           | 0               | 100           | 100   | 0     | 0     | 0    | 0                | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1.04.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b> |   |                 |               |       |       |       |      |                  |  |
| 1.04.02. | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                     | Persentase Lingkungan Permukiman yang tertata                       | 96,5            | 89,89         | 92,42 | 94,94 | 97,47 | 100  | 100              | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
|          |  | Prosentase Perencanaan Pembangunan Perumahan yng sesuai dengan NSPK | 100             | 100           | 100   | 100   | 100   | 100  | 100              | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1.04.03. | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN   | Prosentase Lingkungan Permukiman Kumuh                              | 3,7             | 2,99          | 2,24  | 1,49  | 0,74  | 0    | 0                | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
|          |  | Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan             | 73,34           | 78,67         | 84    | 89,33 | 94,66 | 100  | 100              | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1.04.04. | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH                     | Cakupan ketersediaan rumah layak huni                               | 0               | 97,09         | 97,78 | 98,58 | 99,3  | 100  | 100              | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
|          |  | Prosentase Lingkungan Permukiman Kumuh                              | 0               | 2,99          | 2,24  | 1,49  | 0,74  | 0    | 7,46             | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1.04.05. | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)      | Rasio Pemukiman Layak Huni  | 43,34           | 51,84         | 61,47 | 72,8  | 85,27 | 100  | 100              | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
|          |  | Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yg didukung dengan PSU       | 43,34           | 51,84         | 61,47 | 72,8  | 85,27 | 100  | 100              | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |       |       |       |       | Kondisi<br>Akhir | SKPD  |
|----------|---|---|-----------------|---------------|-------|-------|-------|-------|------------------|---|
|          |   |   |                 | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |                  |   |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5             | 6     | 7     | 8     | 9     | 10               | 11  |
| 1.04.06. | PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>PELAYANAN<br>SERTIFIKASI,<br>KUALIFIKASI,<br>KLASIFIKASI, DAN<br>REGISTRASI<br>BIDANG<br>PERUMAHAN DAN<br>KAWASAN<br>PERMUKIMAN | Rasio Permukiman Layak<br>Huni  | 0               | 0             | 0     | 72,8  | 85,27 | 100   | 100              | DINAS PERUMAHAN,<br>KAWASAN<br>PERMUKIMAN DAN<br>PERTANAHAN |
| 2.10.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>  |   |                 |               |       |       |       |       |                  |   |
| 2.10.04. | PROGRAM<br>PENYELESAIAN<br>SENKETA<br>TANAH GARAPAN   | prosentase penyelesaian<br>konflik pertanahan di<br>Kabupaten Cirebon         | 100             | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | DINAS PERUMAHAN,<br>KAWASAN<br>PERMUKIMAN DAN<br>PERTANAHAN |
| 2.10.05. | PROGRAM<br>PENYELESAIAN<br>GANTI KERUGIAN<br>DAN SANTUNAN<br>TANAH UNTUK<br>PEMBANGUNAN   | Prosentase kepemilikan<br>tanah pemerintah daerah<br>tertata dengan baik      | 0               | 44,12         | 50,35 | 56,57 | 62,8  | 69,03 | 69,03            | DINAS PERUMAHAN,<br>KAWASAN<br>PERMUKIMAN DAN<br>PERTANAHAN |
| 2.10.06. | PROGRAM<br>REDISTRIBUSI<br>TANAH, DAN<br>GANTI KERUGIAN<br>PROGRAM TANAH<br>KELEBIHAN<br>MAKSIMUM DAN<br>TANAH ABSENTEE                                   | Persentase penetapan<br>tanah untuk pembangunan<br>fasilitas umum             | 0               | 0             | 0     | 100   | 100   | 100   | 100              | DINAS PERUMAHAN,<br>KAWASAN<br>PERMUKIMAN DAN<br>PERTANAHAN |
| 2.10.09. | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>IZIN MEMBUKA<br>TANAH   | Tersedianya tanah untuk<br>masyarakat   | 0               | 0             | 0     | 100   | 100   | 100   | 300              | DINAS PERUMAHAN,<br>KAWASAN<br>PERMUKIMAN DAN<br>PERTANAHAN |
| 2.10.10. | PROGRAM<br>PENATAGUNAAN<br>TANAH  | Penyelesaian izin lokasi  | 37,89           | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | DINAS PERUMAHAN,<br>KAWASAN<br>PERMUKIMAN DAN<br>PERTANAHAN |
| 1.05.02. | PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>KETENTERAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM  | Prosentase peningkatan<br>pemberantasan Peredaran<br>Barang Kena Cukai Ilegal | 0               | 100           | 0     | 100   | 0     | 100   | 100              | SATUAN POLISI<br>PAMONG PRAJA                               |





| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |       |       |       |       | Kondisi<br>Akhir | SKPD                                     |
|----------|---|---|-----------------|---------------|-------|-------|-------|-------|------------------|--|
|          |   |   |                 | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |                  |  |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5             | 6     | 7     | 8     | 9     | 10               | 11                                       |
|          |   | Porsentase pelayanan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang dilaksanakan                | 0               | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA               |
|          |   | Porsentase pemenuhan tenaga satuan perlindungan masyarakat                                  | 98              | 98,43         | 98,48 | 98,53 | 98,58 | 98,63 | 98,63            | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA               |
|          |   | Porsentase peningkatan Jumlah lokasi rawan Penyakit Masyarakat (Pekat) yang ditertibkan     | 0               | 15            | 30    | 45    | 60    | 75    | 225              | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA               |
|          |   | Prosentase jumlah pelanggaran ketertiban dan ketentraman masyarakat yang terselesaikan      | 0               | 17,7          | 35,4  | 45,4  | 55,4  | 70,4  | 70,4             | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA               |
| 1.05.04. | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Penurunan Jumlah Kebakaran = Jumlah kebakaran yang tertangani/jumlah total kebakaran X 100% | 0               | 0             | 0     | 100   | 100   | 100   | 100              | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 1.06.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>  |   |                 |               |       |       |       |       |                  |  |
| 1.06.02. | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL   | Jumlah panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial        | 59              | 53            | 53    | 53    | 53    | 53    | 53               | DINAS SOSIAL                             |
|          |   | Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani                        | 244.832         | 1.385         | 1.200 | 1.425 | 1.425 | 1.425 | 6.860            | DINAS SOSIAL                             |
|          |   | Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang memiliki Pengetahuan dan Keterampilan       | 7.968           | 1.528         | 1.378 | 1.378 | 1.378 | 1.378 | 7.040            | DINAS SOSIAL                             |
| 1.06.03. | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN                            | Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani                        | 25              | 25            | 25    | 25    | 25    | 25    | 125              | DINAS SOSIAL                             |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM   | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |       |       |       |       | Kondisi<br>Akhir | SKPD                  |
|----------|--|---|-----------------|---------------|-------|-------|-------|-------|------------------|-----------------------|
|          |  |   |                 | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |                  |                       |
| 1        | 2  | 3   | 4               | 5             | 6     | 7     | 8     | 9     | 10               | 11                    |
| 1.06.04. | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL  | Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Terehabilitasi                      | 242.317         | 1.100         | 1.160 | 1.410 | 1.410 | 1.410 | 6.490            | DINAS SOSIAL          |
| 1.06.05. | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                      | Jumlah Keluarga Miskin yang Menerima Program Perlindungan dan Jaminan Sosial                  | 150             | 160           | 220   | 220   | 220   | 220   | 1.040            | DINAS SOSIAL          |
| 1.06.06. | PROGRAM PENANGANAN BENCANA   | Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dapat melaksanakan fungsi sosialnya | 242.317         | 3.420         | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 19.420           | DINAS SOSIAL          |
|          |  | Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang memiliki Pengetahuan dan Keterampilan         | 7.968           | 1.528         | 150   | 150   | 150   | 150   | 2.128            | DINAS SOSIAL          |
| 1.06.07. | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN                                     | Jumlah Taman Makam Pahlawan   | 1               | 1             | 1     | 1     | 1     | 1     | 5                | DINAS SOSIAL          |
|          |  | Terpeliharanya di Lingkungan Taman Makam Pahlawan   | 0               | 5             | 5     | 5     | 5     | 5     | 25               | DINAS SOSIAL          |
| 2,       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |   |                 |               |       |       |       |       |                  |                       |
| 2.07.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>                               |   |                 | 0             | 0     |       |       |       |                  |                       |
| 2.07.02. | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA   | Prosentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Berdasarkan Dokumen PTK : Tingkat Akurasi Indikator PTK | 1               | 0             | 0     | 0     | 1     | 0     | 1                | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| 2.07.03. | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                       | Prosentase Tenaga Kerja bersertifikat Kompetensi  | 100             | 0             | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                | DINAS KETENAGAKERJAAN |
|          |  | Tersajinya Dokumen  | 0               | 1             | 1     | 1     | 1     | 1     | 5                | DINAS KETENAGAKERJAAN |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM   | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |        |        |        |        | Kondisi<br>Akhir | SKPD                                       |
|----------|--|---|-----------------|---------------|--------|--------|--------|--------|------------------|--|
|          |  |   |                 | 2020          | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |                  |  |
| 1        | 2  | 3   | 4               | 5             | 6      | 7      | 8      | 9      | 10               | 11   |
| 2.07.04. | PROGRAM<br>PENEMPATAN<br>TENAGA KERJA  | Prosentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) propinsi | 100             | 100           | 100    | 100    | 100    | 100    | 100              | DINAS<br>KETENAGAKERJAAN                   |
| 2.07.05. | PROGRAM<br>HUBUNGAN<br>INDUSTRIAL  | Prosentase Perusahaan Yang Mendapatkan Tata Kelola Yang Layak   | 20              | 0             | 0      | 36     | 36     | 36     | 108              | DINAS<br>KETENAGAKERJAAN                   |
| 3.32.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>   |   |                 | 0             | 0      |        |        |        |                  |  |
| 3.32.03. | PROGRAM<br>PEMBANGUNAN<br>KAWASAN<br>TRANSMIGRASI  | bertambahnya wilayah tujuan transmigrasi  | 0               | 0             | 0      | 1      | 1      | 1      | 3                | DINAS<br>KETENAGAKERJAAN                   |
| 2.09.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>   |   |                 |               |        |        |        |        |                  |  |
| 2.09.02. | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>SUMBER DAYA<br>EKONOMI UNTUK<br>KEDAULATAN<br>DAN<br>KEMANDIRIAN<br>PANGAN | Persentase LPM yang dimandirikan  | 0               | 0             | 0      | 4,08   | 4,08   | 4,08   | 12,24            | DINAS KETAHANAN<br>PANGAN DAN<br>PERIKANAN |
| 2.09.03. | PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>DIVERSIFIKASI<br>DAN KETAHANAN<br>PANGAN<br>MASYARAKAT                     | Persentase ketersediaan pangan terhadap jumlah kebutuhan pangan   | 137,81          | 144,25        | 148,15 | 152,04 | 155,94 | 159,84 | 159,84           | DINAS KETAHANAN<br>PANGAN DAN<br>PERIKANAN |
|          |  | Persentase kelompok pangan yang terkendali harganya   | 71,43           | 71,43         | 71,4   | 71,4   | 78,6   | 84,7   | 84,7             | DINAS KETAHANAN<br>PANGAN DAN<br>PERIKANAN |
|          |  | Tingkat Keanekaragaman Konsumsi Pangan  | 0               | 0             | 0      | 80     | 80     | 80     | 80               | DINAS KETAHANAN<br>PANGAN DAN<br>PERIKANAN |
| 2.09.04. | PROGRAM<br>PENANGANAN<br>KERAWANAN<br>PANGAN   | Berkurangnya daerah rawan pangan  | 41              | 0             | 0      | 8      | 13     | 20     | 41               | DINAS KETAHANAN<br>PANGAN DAN<br>PERIKANAN |
| 2.09.05. | PROGRAM<br>PENGAWASAN  | Persentase PSAT aman dikonsumsi   | 67              | 88            | 84     | 80     | 85     | 90     | 90               | DINAS KETAHANAN<br>PANGAN DAN<br>PERIKANAN |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                           | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |        |        |        |        | Kondisi<br>Akhir | SKPD                                 |
|----------|---|--|-----------------|---------------|--------|--------|--------|--------|------------------|--------------------------------------|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |                  |                                      |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6      | 7      | 8      | 9      | 10               | 11                                   |
|          | KEAMANAN PANGAN   |  |                 |               |        |        |        |        |                  |                                      |
| 3,       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>                                  |  |                 |               |        |        |        |        |                  |                                      |
| 3.25.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>            |  |                 |               |        |        |        |        |                  |                                      |
| 3.25.03. | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                               | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap                                | 27.523          | 28.421        | 28.852 | 31.680 | 33.264 | 34.214 | 34.214           | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| 3.25.04. | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                              | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya                               | 32.120          | 37.180        | 39.040 | 40.990 | 43.040 | 45.190 | 45.190           | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
|          |   | Jumlah Produksi Pembenihan Ikan                                  | 113             | 435           | 437    | 440    | 445    | 451    | 451              | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| 3.25.05. | PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                | Tingkat kepatuhan pelaku usaha perikanan                         | 0               | 0             | 0      | 0,01   | 0,01   | 1,21   | 1,21             | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| 3.25.06. | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                    | Jumlah Produksi Pengolahan hasil Perikanan                       | 6.200           | 6.205         | 6.209  | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 11.000           | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
|          |   | Jumlah Konsumsi Ikan   | 26              | 27,2          | 28,4   | 29,6   | 30,8   | 32     | 32               | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| 2.11.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>                  |  |                 |               |        |        |        |        |                  |                                      |
| 2.11.02. | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP                                | Tersedianya dokumen perencanaan lingkungan hidup                 | 2               | 4             | 4      | 3      | 4      | 4      | 19               | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
| 2.11.03. | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase hasil pemantauan kualitas air yang memenuhi baku mutu | 33,3            | 42,9          | 52,4   | 61,9   | 71,4   | 81     | 81               | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|          |   | Persentase Tutupan Lahan   | 60,17           | 121,56        | 136,56 | 151,56 | 166,56 | 181,56 | 757,8            | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |        |        |        |        | Kondisi<br>Akhir | SKPD                   |
|----------|---|---|-----------------|---------------|--------|--------|--------|--------|------------------|------------------------|
|          |   |   |                 | 2020          | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |                  |                        |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5             | 6      | 7      | 8      | 9      | 10               | 11                     |
| 2.11.04. | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)  | Meningkatnya keanekaragaman hayati  | 60,17           | 121,56        | 136,56 | 151,56 | 166,56 | 181,56 | 757,8            | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan di bidang lingkungan  | 250             | 250           | 250    | 250    | 250    | 250    | 1.250            | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.08. | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                              | Meningkatnya kegiatan peduli lingkungan yang dilakukan masyarakat   | 5               | 11            | 11     | 11     | 11     | 11     | 55               | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.09. | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT   | Meningkatnya partisipasi masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan | 4               | 5             | 5      | 5      | 5      | 5      | 25               | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.10. | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP   | Meningkatnya pelayanan penanganan pengaduan masyarakat  | 100             | 100           | 100    | 100    | 100    | 100    | 100              | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.11. | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN   | Prosentase Cakupan Pelayanan pengelolaan sampah   | 6,1             | 7,5           | 15     | 30     | 45     | 60     | 60               | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
|          |   | Prosentase Timbulan Sampah yang Terkurangi  | 1,27            | 3             | 7,5    | 10     | 15     | 20     | 20               | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.12.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>  |   |                 |               |        |        |        |        |                  |                        |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |       |      |       |       | Kondisi<br>Akhir | SKPD  |
|----------|---|--|-----------------|---------------|-------|------|-------|-------|------------------|---|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021  | 2022 | 2023  | 2024  |                  |   |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6     | 7    | 8     | 9     | 10               | 11  |
| 2.12.02. | PROGRAM<br>PENDAFTARAN<br>PENDUDUK                                  | Cakupan Jumlah Keluarga yang sudah memiliki Dokumen Kependudukan lengkap (Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik / KTP El) | 100             | 100           | 100   | 100  | 100   | 100   | 100              | DINAS<br>KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN<br>SIPIIL |
|          |   | Prosentase jumlah penduduk di Kabupaten Cirebon yang sudah melaksanakan perekaman KTP El   | 85              | 90            | 92    | 95   | 96    | 97    | 97               | DINAS<br>KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN<br>SIPIIL |
| 2.12.03. | PROGRAM<br>PENCATATAN<br>SIPIIL                                     | Prosentase Keluarga yang sudah memiliki Dokumen Akta Kelahiran   | 35              | 35            | 39,75 | 42,7 | 45,64 | 48,58 | 48,58            | DINAS<br>KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN<br>SIPIIL |
|          |   | Prosentase pemenuhan pelayanan Akta-akta pencatatan sipil  | 74              | 76            | 78    | 80   | 82    | 85    | 85               | DINAS<br>KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN<br>SIPIIL |
| 2.12.04. | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>INFORMASI<br>ADMINISTRASI<br>KEPENDUDUKAN | Prosentase Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil  | 82              | 84            | 86    | 88   | 90    | 92    | 92               | DINAS<br>KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN<br>SIPIIL |
|          |   | Jumlah OPD dan Desa yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ( PKS )                                    | 20              | 20            | 20    | 20   | 20    | 20    | 100              | DINAS<br>KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN<br>SIPIIL |
|          |   | Peningkatan kualitas Database Kependudukan   | 85              | 85            | 85    | 90   | 95    | 100   | 100              | DINAS<br>KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN<br>SIPIIL |
|          |   | Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan   | 75              | 77            | 79    | 80   | 80    | 81    | 81               | DINAS<br>KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN<br>SIPIIL |
| 2.12.05. | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PROFIL<br>KEPENDUDUKAN                    | Persentase Update Penyediaan Data Profil Kependudukan  | 85              | 90            | 92    | 94   | 96    | 98    | 98               | DINAS<br>KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN<br>SIPIIL |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |       |       | Kondisi<br>Akhir | SKPD                                   |
|----------|---|---|-----------------|---------------|------|------|-------|-------|------------------|--|
|          |   |   |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023  | 2024  |                  |  |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5             | 6    | 7    | 8     | 9     | 10               | 11                                     |
| 2.13.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN<br/>MASYARAKAT DAN DESA</b>                                    |   |                 |               |      |      |       |       |                  |  |
| 2.13.02. | PROGRAM<br>PENATAAN DESA  | Meningkatnya jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam proses pembangunan dari perencanaan sampai implementasi | 6               | 6             | 6    | 0    | 0     | 0     | 0                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
|          |   | Persentase (%) Peningkatan Jumlah Desa yang di fasilitasi Penataan Kewenangan Desanya   | 0               | 0             | 0    | 9,7  | 45,15 | 45,15 | 100              | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2.13.03. | PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>KERJASAMA<br>DESA   | Meningkatnya jumlah desa yg melakukan kerja sama dalam proses pembangunan   | 6               | 2             | 2    | 0    | 0     | 0     | 0                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2.13.04. | PROGRAM<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN<br>DESA   | Meningkatnya Jumlah Desa dengan penilaian baik (perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan)                   | 40              | 40            | 40   | 0    | 0     | 0     | 0                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
|          |   | Meningkatnya jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam proses pembangunan dari perencanaan sampai implementasi | 6               | 6             | 6    | 0    | 0     | 0     | 0                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
|          |   | Meningkatnya jumlah desa yang ketahanan ekonominya baik   | 2               | 3             | 3    | 0    | 0     | 0     | 6                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2.13.05. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>LEMBAGA<br>KEMASYARAKATA<br>N, LEMBAGA<br>ADAT DAN<br>MASYARAKAT<br>HUKUM ADAT | Meningkatnya jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif   | 40              | 60            | 80   | 0    | 0     | 0     | 140              | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM   | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                                   | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD  |
|----------|--|--|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|---|
|          |  |  |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |   |
| 1        | 2  | 3  | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11  |
|          |  | Meningkatnya jumlah desa yang ketahanan ekonominya baik                  | 2               | 3             | 3    | 0    | 0    | 0    | 6                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  |
| 2.08.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b> |  |                 |               |      |      |      |      |                  |   |
| 2.08.02. | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                      | Persentase Lembaga / Kelompok berbasis gender yang mendapatkan penguatan | 60,51           | 25            | 25   | 25   | 25   | 25   | 25               | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|          |  | Proporsi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian         | 28,73           | 11,46         | 11,7 | 11,9 | 12,1 | 12,3 | 12,3             | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|          |  | Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan                          | 40,39           | 35,7          | 35,8 | 35,9 | 36,1 | 36,2 | 36,2             | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|          |  | -  | 0               | 0             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN                   |





| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM                                | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD  |
|----------|---|---|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|---|
|          |   |   |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |   |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11  |
| 2.08.03. | PROGRAM<br>PERLINDUNGAN<br>PEREMPUAN                        |   |                 |               |      |      |      |      |                  | PERLINDUNGAN<br>ANAK  |
|          |   | Prosentase perempuan<br>yang mendapat<br>perlindungan                                     | 60,51           | 1,25          | 1,29 | 1,33 | 1,37 | 1,41 | 1,41             | DINAS<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK,<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN<br>ANAK |
|          |   | -   | 0               | 0             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK,<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN<br>ANAK |
| 2.08.04. | PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>KUALITAS<br>KELUARGA              | Meningkatnya ketahanan<br>keluarga yang ditandai<br>dengan menurunnya angka<br>perceraian | 0               | 0,84          | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,81             | DINAS<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK,<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN<br>ANAK |
| 2.08.05. | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>SISTEM DATA<br>GENDER DAN<br>ANAK | Pelaksanaan pengumpulan<br>data terpilah gender   | 7,5             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | DINAS<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK,<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN<br>ANAK |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM   | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)        | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD  |
|----------|--|---|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|---|
|          |  |   |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |   |
| 1        | 2  | 3   | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11  |
| 2.08.06. | PROGRAM<br>PEMENUHAN HAK<br>ANAK (PHA)   | Presentase anak yang<br>mendapat perlindungan | 0               | 1,86          | 1,94 | 2,16 | 2,28 | 2,4  | 2,4              | DINAS<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK,<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN<br>ANAK |
|          |  | -   | 0               | 0             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK,<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN<br>ANAK |
| 2.08.07. | PROGRAM<br>PERLINDUNGAN<br>KHUSUS ANAK   | Jumlah layanan korban<br>kekerasan            | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | DINAS<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK,<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN<br>ANAK |
| 2.14.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN<br/>PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b> |   |                 |               |      |      |      |      |                  |   |
| 2.14.02. | PROGRAM<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK  | tersediannya informasi<br>data keluarga       | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 500              | DINAS<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK,<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN<br>ANAK |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM                       | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |       |       | Kondisi<br>Akhir | SKPD  |
|----------|--|---|-----------------|---------------|------|------|-------|-------|------------------|---|
|          |  |   |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023  | 2024  |                  |   |
| 1        | 2  | 3   | 4               | 5             | 6    | 7    | 8     | 9     | 10               | 11  |
|          |  | -   | 0               | 0             | 0    | 0    | 0     | 0     | 0                | DINAS<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK,<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN<br>ANAK |
| 2.14.03. | PROGRAM<br>PEMBINAAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA (KB) | Presentase jumlah<br>Apseptor MKJP  | 22,5            | 24            | 24,2 | 24,4 | 24,6  | 24,8  | 24,8             | DINAS<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK,<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN<br>ANAK |
|          |  | Persentase masyarakat<br>dalam Keikutsertaan ber-<br>KB                                 | 25              | 72,54         | 72,8 | 73   | 73,25 | 73,54 | 73,54            | DINAS<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK,<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN<br>ANAK |
|          |  | Meningkatnya jumlah<br>pendidik/Motivator sebaya  | 520             | 340           | 340  | 340  | 340   | 340   | 340              | DINAS<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK,<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN<br>ANAK |
|          |  | Pembinaan Kampung KB<br>(Keluarga Berkualitas)<br>dengan ditandai<br>peningkatan status | 10              | 12,5          | 12,5 | 12,5 | 12,5  | 12,5  | 62,5             | DINAS<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK,<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN                         |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM                                 | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)             | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |       |       |       |       | Kondisi<br>Akhir | SKPD  |
|----------|--|--|-----------------|---------------|-------|-------|-------|-------|------------------|---|
|          |  |  |                 | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |                  |   |
| 1        | 2  | 3  | 4               | 5             | 6     | 7     | 8     | 9     | 10               | 11  |
|          |  |  |                 |               |       |       |       |       |                  | PERLINDUNGAN ANAK   |
|          |  | -  | 0               | 1             | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|          |  | Tingkat Kesehatan Reproduksi Remaja                | 18,54           | 19,2          | 19,2  | 19,4  | 19,6  | 19,8  | 19,8             | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 2.14.04. | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Cakupan anggota Bina Keluarga (BKB/BKR/BKL) ber-KB | 56,58           | 56,98         | 56,98 | 57,24 | 57,52 | 57,88 | 57,88            | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|          |  | -  | 0               | 0             | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM   | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |       |       |       |       | Kondisi<br>Akhir | SKPD              |
|----------|--|---|-----------------|---------------|-------|-------|-------|-------|------------------|-------------------|
|          |  |   |                 | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |                  |                   |
| 1        | 2  | 3   | 4               | 5             | 6     | 7     | 8     | 9     | 10               | 11                |
| 2.15.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>                              |   |                 |               |       |       |       |       |                  |                   |
| 2.15.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN LALU LINTAS<br>DAN ANGKUTAN<br>JALAN (LLAJ) | Meningkatnya Prosentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas serta tatakelola sektor perhubungan yang sesuai dengan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria)  | 20              | 35            | 45    | 0     | 0     | 0     | 0                | DINAS PERHUBUNGAN |
|          |  | Rasio sarana dan Prasarana Pengujian yang layak   | 30              | 50            | 55    | 58    | 62    | 65    | 65               | DINAS PERHUBUNGAN |
|          |  | Prosentase jumlah pelanggaran lalu lintas   | 90              | 86            | 85    | 83    | 81    | 80    | 80               | DINAS PERHUBUNGAN |
|          |  | Rasio Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan ( Halte dan Terminal) yang layak fungsi   | 46,15           | 56,41         | 66,67 | 76,92 | 89,74 | 100   | 100              | DINAS PERHUBUNGAN |
|          |  | Persentase ketersediaan sarana dan Prasarana Pengamanan Lalu Lintas yang berfungsi dengan baik  | 25,34           | 21,1          | 41,59 | 62,44 | 82,52 | 100   | 100              | DINAS PERHUBUNGAN |
|          |  | Persentase kepemilikan KIR/Wajib Uji angkutan Umum  | 65,68           | 65,98         | 65,98 | 66,6  | 67,22 | 67,84 | 67,84            | DINAS PERHUBUNGAN |
|          |  | Meningkatnya Prosentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas serta tatakelola sektor perhubungan yang sesuai dengan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria). | 0               | 0             | 0     | 45,5  | 47,5  | 50    | 50               | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2.15.03. | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PELAYARAN  | Meningkatnya prosentase pemenuhan Perijinan   | 0               | 0             | 0     | 1     | 2     | 2     | 2                | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2.15.04. | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENERBANGAN                                      | Presentasi Perijinan landasan   | 0               | 0             | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2.15.05. | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PERKERETAAPIAN                                   | Prosentasi ijin pintu perlintasan kereta api di kabupaten   | 0               | 0             | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                | DINAS PERHUBUNGAN |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM                                  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                             |
|----------|---|---|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|----------------------------------|
|          |   |   |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                                  |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                               |
| 2.16.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>  |   |                 |               |      |      |      |      |                  |                                  |
| 2.16.02. | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                       | Persentase layanan informasi dan komunikasi publik  | 52,5            | 52,5          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|          |   | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah | 0               | 60            | 65   | 70   | 75   | 80   | 80               | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 2.16.03. | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA                                  | Indeks aspek teknologi informasi dan komunikasi   | 2,67            | 2,97          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|          |   | Cakupan pengelolaan aplikasi informatika  | 0               | 0             | 85,5 | 88   | 91   | 94   | 94               | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 2.20.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>                   |   |                 |               |      |      |      |      |                  |                                  |
| 2.20.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                    | Persentase dokumen hasil pengolahan dan analisis statistik sektoral yang dihasilkan   | 20              | 20            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|          |   | Persentase ketersediaan data statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Cirebon  | 60              | 60            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|          |   | Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah                                | 0               | 0             | 40   | 60   | 80   | 100  | 100              | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 2.21.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>                  |   |                 |               |      |      |      |      |                  |                                  |
| 2.21.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah  | 0               | 6             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|          |   | Tingkat keamanan informasi pemerintah   | 0               | 6             | 26   | 30   | 36   | 42   | 42               | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM   | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                                     |
|----------|--|---|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|--|
|          |  |   |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |  |
| 1        | 2  | 3   | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                                       |
| 2.17.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>    |   |                 |               |      |      |      |      |                  |  |
| 2.17.02. | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM                               | Terciptanya Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi                                       | 0               | 0             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2.17.03. | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                              | Terciptanya Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi                                       | 0               | 0             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|          |  | Prosentase koperasi yang meningkat predikat Tingkat Kesehatan hasil pengawasan              | 0               | 0             | 0    | 60   | 62   | 64   | 186              | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2.17.04. | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI                             | Persentase Koperasi Sehat   | 0               | 0             | 0    | 20   | 20   | 20   | 20               | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2.17.05. | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                             | Prosentase pengurus, pengawas, manajer dan pengelola koperasi yang bersertifikat kompetensi | 0               | 0             | 0    | 30   | 35   | 40   | 105              | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2.17.06. | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                           | Laju perkembangan usaha produktif koperasi  | 0               | 0             | 0    | 25   | 35   | 40   | 100              | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2.17.07. | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Prosentase Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha   | 0               | 0             | 0    | 3,5  | 4    | 4,5  | 12               | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2.17.08. | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM  | Persentase Usaha Mikro Yang Berkembang Nilai Produksinya/ Omsetnya                          | 0               | 0             | 0    | 2,5  | 3    | 3,5  | 9                | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2.18.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>                        |   |                 |               |      |      |      |      |                  |  |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM                                 | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |       |       |       |       | Kondisi<br>Akhir | SKPD   |
|----------|--|---|-----------------|---------------|-------|-------|-------|-------|------------------|--|
|          |  |   |                 | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |                  |  |
| 1        | 2  | 3   | 4               | 5             | 6     | 7     | 8     | 9     | 10               | 11   |
| 2.18.02. | PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>IKLIM<br>PENANAMAN<br>MODAL       | Persentase Jenis Pelayanan Perizinan Berbasis Online  | 0               | 0             | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|          |  | Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)  | 596             | 656           | 722   | 794   | 873   | 960   | 4.005            | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.03. | PROGRAM<br>PROMOSI<br>PENANAMAN<br>MODAL                     | Persentase Jenis Pelayanan Perizinan Yang Sudah Dilimpahkan dan Efektif Dilaksanakan di Kecamatan | 0               | 20            | 20    | 20    | 20    | 20    | 100              | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|          |  | Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)  | 596             | 656           | 722   | 794   | 873   | 960   | 4.005            | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.04. | PROGRAM<br>PELAYANAN<br>PENANAMAN<br>MODAL                   | Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)   | 2.010           | 2.208         | 2.429 | 2.672 | 2.939 | 3.233 | 13.481           | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|          |  | Rata-Rata Lama Perizinan  | 5               | 5             | 4     | 3     | 2     | 1     | 1                | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|          |  | Jumlah Tenaga Kerja Lokal Yang Terserap   | 1.609           | 1.722         | 1.894 | 2.178 | 2.504 | 2.880 | 11.178           | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.05. | PROGRAM<br>PENGENDALIAN<br>PELAKSANAAN<br>PENANAMAN<br>MODAL | Jumlah Tenaga Kerja Lokal Yang Terserap   | 1.609           | 1.722         | 1.894 | 2.178 | 2.504 | 2.880 | 11.178           | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |





| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                           | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |       |       |       | Kondisi<br>Akhir | SKPD   |
|----------|---|--|-----------------|---------------|------|-------|-------|-------|------------------|--|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  |                  |  |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6    | 7     | 8     | 9     | 10               | 11   |
| 2.18.06. | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>DATA DAN<br>SISTEM<br>INFORMASI<br>PENANAMAN<br>MODAL | Rata-Rata Lama Perizinan   | 5               | 5             | 4    | 3     | 2     | 1     | 1                | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN<br>TERPADU SATU<br>PINTU |
| 2.19.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN<br/>OLAHRAGA</b>                   |  |                 | 0             | 0    |       |       |       |                  |  |
| 2.19.02. | PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>KAPASITAS DAYA<br>SAING<br>KEPEMUDAAN                | Prosentase daya saing<br>Kepemudaan                              | 0               | 0             | 0    | 15,29 | 18,24 | 21,18 | 21,18            | DINAS PEMUDA DAN<br>OLAHRAGA                                       |
| 2.19.03. | PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>KAPASITAS DAYA<br>SAING<br>KEOLAHRAGAAN              | Cakupan Pembinaan<br>olahraga                                    | 0               | 0             | 0    | 24,39 | 34,15 | 24,39 | 24,39            | DINAS PEMUDA DAN<br>OLAHRAGA                                       |
| 2.19.04. | PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>KAPASITAS<br>KEPRAMUKAAN                             | Prosentase pemuda yang<br>aktif dalam kepramukaan                | 0               | 0             | 0    | 4,57  | 4,9   | 5,22  | 5,22             | DINAS PEMUDA DAN<br>OLAHRAGA                                       |
| 2.22.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>                                    |  |                 | 0             | 0    |       |       |       |                  |  |
| 2.22.02. | PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>KEBUDAYAAN   | Prosentase pertumbuhan<br>pelaku budaya                          | 0               | 0             | 0    | 1     | 1     | 1     | 1                | DINAS KEBUDAYAAN<br>DAN PARIWISATA                                 |
| 2.22.03. | PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>KESENIAN<br>TRADISIONAL                              | Prosentase pertumbuhan<br>jumlah sanggar kesenian<br>tradisional | 0               | 0             | 0    | 0     | 0     | 0     | 0                | DINAS KEBUDAYAAN<br>DAN PARIWISATA                                 |
| 2.22.04. | PROGRAM<br>PEMBINAAN<br>SEJARAH   | Cerita Sejarah yang di<br>Seminarkan                             | 0               | 0             | 0    | 1     | 1     | 1     | 3                | DINAS KEBUDAYAAN<br>DAN PARIWISATA                                 |
| 2.22.05. | PROGRAM<br>PELESTARIAN<br>DAN<br>PENGELOLAAN<br>CAGAR BUDAYA                    | Penambahan penetapan<br>cagar budaya                             | 0               | 0             | 0    | 0     | 0     | 0     | 0                | DINAS KEBUDAYAAN<br>DAN PARIWISATA                                 |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM   | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |       |       |       | Kondisi<br>Akhir | SKPD                             |
|----------|--|--|-----------------|---------------|------|-------|-------|-------|------------------|----------------------------------|
|          |  |  |                 | 2020          | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  |                  |                                  |
| 1        | 2  | 3  | 4               | 5             | 6    | 7     | 8     | 9     | 10               | 11                               |
| 2.22.06. | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN  | Bertambahnya koleksi museum  | 0               | 0             | 0    | 0     | 0     | 0     | 0                | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  |
| 3.26.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>   |  |                 | 0             | 0    |       |       |       |                  |                                  |
| 3.26.02. | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA  | Jumlah obyek daya tarik wisata dengan pertumbuhan kunjungan diatas 10%                     | 0               | 0             | 0    | 3     | 6     | 9     | 9                | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  |
| 3.26.03. | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA   | Market Share Kunjungan Pariwisata Kabupaten Cirebon Terhadap Kunjungan Provinsi Jawa Barat | 0               | 0             | 0    | 1,98  | 2,08  | 2,29  | 2,29             | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  |
| 3.26.04. | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | Jumlah HKI ekonomi kreatif   | 0               | 0             | 0    | 1     | 1     | 1     | 3                | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  |
| 3.26.05. | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                    | Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang terstandarisasi/bersertifikat        | 0               | 0             | 0    | 19,44 | 30,56 | 41,67 | 41,67            | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  |
| 2.23.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>   |  |                 |               |      |       |       |       |                  |                                  |
| 2.23.02. | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN   | Prosentase Peningkatan Perpustakaan Desa yang aktif  | 9,6             | 14,4          | 19,2 | 24    | 28,8  | 33,7  | 33,7             | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
|          |  | Prosentase peningkatan minat dan budaya baca masyarakat                                    | 2,8             | 4,3           | 5,9  | 7,5   | 9,1   | 10,7  | 10,7             | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
|          |  | Prosentase Perpustakaan SMPN sesuai standar Nasional Perpustakaan                          | 0               | 0             | 0    | 1,25  | 2,5   | 3,75  | 3,75             | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| 2.23.03. | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI  | Prosentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan   | 0               | 0             | 0    | 71,43 | 85,71 | 100   | 100              | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM                         | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |         |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                             |
|----------|--|---|-----------------|---------------|---------|------|------|------|------------------|----------------------------------|
|          |  |   |                 | 2020          | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                                  |
| 1        | 2  | 3   | 4               | 5             | 6       | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                               |
|          | NASIONAL DAN NASKAH KUNO                             |   |                 |               |         |      |      |      |                  |                                  |
| 2.24.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>          |   |                 |               |         |      |      |      |                  |                                  |
| 2.24.02. | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                            | Prosentase peningkatan SKPD yang menerapkan sistem administrasi kearsipan secara baku | 39,4            | 51,5          | 63,6    | 75,8 | 87,9 | 100  | 100              | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
|          |  | Prosentase peningkatan khasanah arsip daerah  | 42,5            | 47,9          | 60,3    | 72,6 | 86,3 | 100  | 100              | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
|          |  | Meningkatnya durasi dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat                       | 15              | 10            | 8       | 6    | 4    | 2    | 2                | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
|          |  | Prosentase SKPD yang Tata kelola arsipnya sesuai NSPK                                 | 0               | 0             | 0       | 57,6 | 78,8 | 100  | 100              | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| 2.24.03. | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP          | Prosentase ketersediaan arsip yang terlindungi dan terselamatkan                      | 0               | 0             | 0       | 50   | 75   | 100  | 100              | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| 2.24.04. | PROGRAM PERIJINAN PENGGUNAAN ARSIP                   | Prosentase peningkatan SKPD yang menerapkan sistem administrasi kearsipan secara baku | 39,4            | 51,5          | 63,6    | 75,8 | 87,9 | 100  | 100              | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
|          |  | Prosentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK        | 0               | 0             | 0       | 50   | 75   | 100  | 100              | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| 3.27.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>          |   |                 |               |         |      |      |      |                  |                                  |
| 3.27.02. | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Jumlah Produksi Komoditas Tanaman Pangan (Beras)                                      | 340.309         | 343.107       | 347.493 | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS PERTANIAN                  |
|          |  | Jumlah Produksi Sektor Peternakan (Sapi Potong, Ayam Ras, Unggas Lokal dan Domba)     | 29.106          | 29.996        | 30.508  | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS PERTANIAN                  |
|          |  | Jumlah Produksi Komoditas Perkebunan (Gula dan Kelapa)                                | 21.826          | 21.873        | 21.919  | 0    | 0    | 0    | 43.792           | DINAS PERTANIAN                  |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |         |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD            |
|----------|---|--|-----------------|---------------|---------|------|------|------|------------------|-----------------|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                 |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6       | 7    | 8    | 9    | 10               | 11              |
|          |   | Jumlah Populasi Ternak   | 4.859.198       |               |         | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS PERTANIAN |
|          |   | Jumlah Produksi<br>Komoditas Hortikultura<br>(Bawang Merah, Cabai<br>Besar dan Mangga)     | 97.300          | 98.080        | 98.472  | 0    | 0    | 0    | 196.552          | DINAS PERTANIAN |
|          |   | Rasio Ketersediaan Sarana<br>Produksi Pertanian  | 0               | 0             | 0       | 0,52 | 0,53 | 0,54 | 0,54             | DINAS PERTANIAN |
| 3.27.03. | PROGRAM<br>PENYEDIAAN DAN<br>PENGEMBANGAN<br>PRASARANA<br>PERTANIAN                       | Jumlah Produksi<br>Komoditas Tanaman<br>Pangan (Beras)                                     | 340.309         | 343.107       | 347.493 | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS PERTANIAN |
|          |   | Jumlah Produksi Sektor<br>Peternakan (Sapi Potong,<br>Ayam Ras, Unggas Lokal<br>dan Domba) | 29.106          | 29.996        | 30.508  | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS PERTANIAN |
|          |   | Jumlah Produksi<br>Komoditas Hortikultura<br>(Bawang Merah, Cabai<br>Besar dan Mangga)     | 97.300          | 98.080        | 98.472  | 0    | 0    | 0    | 196.552          | DINAS PERTANIAN |
|          |   | Rasio Ketersediaan<br>Prasarana Produksi<br>Pertanian                                      | 0               | 0             | 0       | 0,21 | 0,26 | 0,3  | 0,3              | DINAS PERTANIAN |
| 3.27.04. | PROGRAM<br>PENGENDALIAN<br>KESEHATAN<br>HEWAN DAN<br>KESEHATAN<br>MASYARAKAT<br>VETERINER | Prosentase Penurunan<br>Frekuensi Kemunculan<br>Penyakit Zoonosis                          | 2               | 2             | 2       | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS PERTANIAN |
|          |   | Kejadian/Jumlah Kasus<br>Penyakit Hewan Menular<br>(Satuan Ternak)                         | 0               | 0             | 0       | 293  | 287  | 281  | 281              | DINAS PERTANIAN |
| 3.27.05. | PROGRAM<br>PENGENDALIAN<br>DAN<br>PENANGGULANGA<br>N BENCANA<br>PERTANIAN                 | Jumlah Produksi<br>Komoditas Tanaman<br>Pangan (Beras)                                     | 340.309         | 343.107       | 347.493 | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS PERTANIAN |
|          |   | Rasio Tingkat Keberhasilan<br>Penanggulangan Bencana<br>Pertanian per-tahun                | 0               | 0             | 0       | 0,56 | 0,58 | 0,6  | 0,6              | DINAS PERTANIAN |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM   | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal   | KINERJA TAHUN |                   |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                                      |
|----------|--|--|-------------------|---------------|-------------------|------|------|------|------------------|---|
|          |  |  |                   | 2020          | 2021              | 2022 | 2023 | 2024 |                  |   |
| 1        | 2  | 3  | 4                 | 5             | 6                 | 7    | 8    | 9    | 10               | 11  |
| 3.27.06. | PROGRAM<br>PERIZINAN<br>USAHA<br>PERTANIAN   | Jumlah Produksi<br>Komoditas Hortikultura<br>(Bawang Merah, Cabai<br>Besar dan Mangga)   | 97.300            | 98.080        | 98.472            | 0    | 0    | 0    | 196.552          | DINAS PERTANIAN                           |
|          |  | Rasio Jumlah Usulan Izin<br>Usaha Pertanian  | 0                 | 0             | 0                 | 0,81 | 0,82 | 0,83 | 0,83             | DINAS PERTANIAN                           |
| 3.27.07. | PROGRAM<br>PENYULUHAN<br>PERTANIAN   | Prosentase Kelompok<br>Petani Yang Naik Kelas  | 10                | 10            | 10                | 10   | 10   | 10   | 10               | DINAS PERTANIAN                           |
|          |  | Prosentase Penyuluh Yang<br>Lulus Pelatihan Berbasis<br>Kompetensi   | 20                | 20            | 20                | 0    | 0    | 0    | 40               | DINAS PERTANIAN                           |
|          |  | Produktivitas Padi atau<br>Bahan Pangan Utama<br>Lokal Lainnya per Hektar  | 63,25             | 63,3          | 63,35             | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS PERTANIAN                           |
| 3.30.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>                                      |  |                   |               |                   |      |      |      |                  |   |
| 3.30.03. | PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>SARANA<br>DISTRIBUSI<br>PERDAGANGAN                      | Cakupan bina pengelola<br>pasar  | 100               | 100           | 100               | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS<br>PERDAGANGAN DAN<br>PERINDUSTRIAN |
|          |  | Cakupan bina kelompok<br>pedagang/usaha informal   | 5,38              | 5,47          | 5,56              | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS<br>PERDAGANGAN DAN<br>PERINDUSTRIAN |
|          |  | Penerimaan Retribusi Pasar   | 2.329.281.87<br>5 | #####         | 1.962.95<br>5.000 | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS<br>PERDAGANGAN DAN<br>PERINDUSTRIAN |
|          |  | Jumlah sarana distribusi<br>perdagangan yang sesuai<br>SNI ( Pasar Pemda )   | 0                 | 0             | 0                 | 1    | 1    | 1    | 1                | DINAS<br>PERDAGANGAN DAN<br>PERINDUSTRIAN |
| 3.30.04. | PROGRAM<br>STABILISASI<br>HARGA BARANG<br>KEBUTUHAN<br>POKOK DAN<br>BARANG PENTING | Pencapaian Stabilitas harga<br>9 komoditas kebutuhan<br>pokok masyarakat (daging<br>sapi, beras, gula pasir,<br>minyak goreng, daging<br>ayam, telur ayam, kedelai,<br>tepung terigu, dan bawang<br>merah) | 6                 | 6             | 6                 | 0    | 0    | 0    | 0                | DINAS<br>PERDAGANGAN DAN<br>PERINDUSTRIAN |
|          |  | Koefisien varian antar<br>waktu kebutuhan pokok<br>dan barang penting  | 0                 | 0             | 0                 | 8,5  | 8,5  | 8,5  | 8,5              | DINAS<br>PERDAGANGAN DAN<br>PERINDUSTRIAN |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM                           | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |                |                    |                    |                    | Kondisi<br>Akhir   | SKPD                                |
|----------|--|---|-----------------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
|          |  |   |                 | 2020          | 2021           | 2022               | 2023               | 2024               |                    |                                     |
| 1        | 2  | 3   | 4               | 5             | 6              | 7                  | 8                  | 9                  | 10                 | 11                                  |
| 3.30.05. | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR                            | Nilai Ekspor ke luar Negeri   | 382.200.730,36  | 388.315.942   | 394.917.313,06 | 402.025.824,69     | 409.664.315,36     | 417.857.601,67     | 417.857.601,67     | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| 3.30.06. | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN        | Cakupan UTP yang ditera   | 100             | 64,09         | 67,86          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
|          |  | Penerimaan Retribusi Tera   | 121.000.000     | 135.000.000   | 141.000.000    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| 3.30.07. | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI   | Nilai perdagangan dalam negeri  | 0               | 0             | 0              | 19.249.585.660.000 | 20.789.552.510.000 | 22.452.716.710.000 | 22.452.716.710.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| 3.31.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>        |   |                 |               |                |                    |                    |                    |                    |                                     |
| 3.31.02. | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI           | Pertumbuhan cluster industri  | 1               | 1             | 1              | 0                  | 0                  | 0                  | 2                  | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
|          |  | Jumlah produk IKM yang bersertifikasi   | 100             | 100           | 100            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
|          |  | Jumlah sentra industri yang dikembangkan  | 1               | 1             | 1              | 0                  | 0                  | 0                  | 2                  | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
|          |  | Persentase Pencapaian Sasasaran Pembangunan Industri termasuk turunan pembangunan industri dalam RPIK | 0               | 0             | 0              | 0                  | 10                 | 20                 | 20                 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| 3.31.04. | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Jenis Penerapan Teknologi Industri  | 2               | 2             | 2              | 0                  | 0                  | 0                  | 4                  | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM                                      | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD  |
|----------|---|--|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|---|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |   |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11  |
|          |   | Persentase data perusahaan industri menengah dan perusahaan Kawasan industri di kabupaten/kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri Kecil, Menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota | 0               | 0             | 0    | 15   | 25   | 35   | 75               | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN                               |
| 5,       | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                        |  |                 |               |      |      |      |      |                  |   |
| 5.01.    | <b>PERENCANAAN</b>  |  |                 |               |      |      |      |      |                  |   |
| 5.01.02. | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | prosentase ketersediaan data perencanaan pembangunan   | 0               | 3             | 3    | 0    | 0    | 0    | 0                | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|          |   | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD  | 100             | 100           | 100  | 0    | 0    | 0    | 0                | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|          |   | prosentase jumlah dokumen Evaluasi Pembangunan Kabupaten Cirebon   | 100             | 100           | 100  | 0    | 0    | 0    | 0                | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|          |   | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA  | 100             | 100           | 100  | 0    | 0    | 0    | 0                | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN                     |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM                                       | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD  |
|----------|--|---|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|---|
|          |  |   |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |   |
| 1        | 2  | 3   | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11  |
|          |  |   |                 |               |      |      |      |      |                  | PENGEMBANGAN DAERAH   |
|          |  | Meningkatnya SKPD dalam menetapkan IKU dan Perkin   | 100             | 100           | 100  | 0    | 0    | 0    | 0                | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|          |  | Prosentase peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah   | 0               | 0             | 0    | 97,5 | 98   | 99   | 99               | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 5.01.03. | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Prosentase pencapaian kinerja perencanaan pembangunan bidang fispra   | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|          |  | Jumlah rekomendasi kebijakan, hasil kajian dari hasil perencanaan bidang pemerintahan dan sosial budaya yang harus dilaksanakan oleh SKPD terkait | 0               | 10            | 15   | 0    | 0    | 0    | 25               | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|          |  | Ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan perangkat daerah lingkup koordinasi bidang ekonomi yang memenuhi target                              | 0               | 100           | 100  | 0    | 0    | 0    | 0                | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|          |  | Prosentase capaian kinerja program perangkat daerah   | 0               | 0             | 0    | 100  | 100  | 100  | 100              | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |





| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM               | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD  |
|----------|--|---|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|---|
|          |  |   |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |   |
| 1        | 2  | 3   | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11  |
|          |  | Prosentase rata rata pencapaian Target kinerja outcome program pada Perangkat Daerah lingkup koordinasi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 0               | 60            | 60   | 0    | 0    | 0    | 0                | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 5.05.    | <b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>         |   |                 |               |      |      |      |      |                  |   |
| 5.05.02. | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Prosentase hasil penelitian pemerintahan, sosial, ekonomi dan pembangunan yang diimplementasikan  | 0               | 10            | 40   | 0    | 0    | 0    | 0                | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|          |  | Prosentase inovasi dan kreativitas daerah yang diaplikasikan (diterapkan)   | 0               | 10            | 10   | 0    | 0    | 0    | 0                | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|          |  | Prosentase pemanfaatan hasil kelitbangan  | 0               | 0             | 0    | 10   | 10   | 10   | 10               | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 5.02.02. | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH        | Peningkatan Pengembangan Wilayah untuk mengurangi dampak resiko bencana, kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Pembangunan                            | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | PPKD  |
| 5.02.    | <b>KEUANGAN</b>                            |   |                 |               |      |      |      |      |                  |   |
| 5.02.02. | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH        | Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengelola keuangan dan barang daerah  | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                                    |
|          |  | Ketepatan waktu penyusunan Raperda dan Raperbup APBD  | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                                    |
|          |  | Ketepatan waktu penyusunan Raperda dan Raperbup Perubahan APBD  | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                                    |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM            | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |       |       |       |       | Kondisi<br>Akhir | SKPD                           |
|----------|---|---|-----------------|---------------|-------|-------|-------|-------|------------------|--------------------------------|
|          |   |   |                 | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |                  |                                |
| 1        | 2                                       | 3   | 4               | 5             | 6     | 7     | 8     | 9     | 10               | 11                             |
|          |   | Peningkatan pengelolaan administrasi kas daerah secara tepat waktu dan tepat sasaran  | 100             | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|          |   | Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyajian laporan keuangan serta penyajian laporan aset tetap                                | 0               | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5.02.03. | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Peningkatan barang milik daerah yang telah dan atau dalam proses sertifikasi serta terinventarisir dan termanfaatkan dengan baik/benar  | 100             | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|          |   | Ketepatan waktu penyusunan Raperda dan Raperbup APBD  | 100             | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|          |   | Peningkatan Penyajian Laporan Barang Milik Daerah yang sudah Terinventarisasi, Teridentifikasi dan Terdokumentasi dengan Baik dan Benar | 100             | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|          |   | Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyajian laporan keuangan serta penyajian laporan aset tetap                                | 100             | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|          |   | Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengelola keuangan dan barang daerah  | 0               | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5.02.04. | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH   | Meningkatkan penerimaan pajak daerah  | 4,79            | 11,23         | 14,84 | 14,66 | 14,66 | 14,66 | 14,66            | BADAN PENDAPATAN DAERAH        |
| 5.03.    | <b>KEPEGAWAIAN</b>                      |   |                 |               |       |       |       |       |                  |                                |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM                      | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                          | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |       |       |       |       | Kondisi<br>Akhir | SKPD   |
|----------|---|---|-----------------|---------------|-------|-------|-------|-------|------------------|--|
|          |   |   |                 | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |                  |  |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5             | 6     | 7     | 8     | 9     | 10               | 11   |
| 5.03.02. | PROGRAM<br>KEPEGAWAIAN<br>DAERAH                  | Persentase Aparatur yang difasilitasi kesejahteraannya          | 0               | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|          |   | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur Berbasis Sistem        | 69,5            | 75,6          | 81,7  | 87,8  | 93,9  | 100   | 100              | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|          |   | Persentase Sumber Daya Aparatur Yang ditingkatkan Kompetensinya | 6,25            | 7,42          | 8,23  | 9,04  | 9,86  | 10,06 | 10,06            | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|          |   | Prosentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian sesuai SOP        | 0               | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|          |   | Persentase pegawai yang ditempatkan di bidangnya                | 60              | 70            | 75    | 75    | 75    | 75    | 75               | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|          |   | Persentase Aparatur yang ditingkatkan integritasnya             | 84,1            | 85,67         | 86,37 | 88,31 | 90,64 | 91,01 | 91,01            | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5.04.    | <b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>                   |   |                 |               |       |       |       |       |                  |  |
| 5.04.02. | PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA<br>MANUSIA | Persentase Sumber Daya Aparatur Yang ditingkatkan Kompetensinya | 6,25            | 7,42          | 8,23  | 9,04  | 9,86  | 10,06 | 10,06            | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 6,       | <b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>       |   |                 |               |       |       |       |       |                  |  |
| 6.01.    | <b>INSPEKTORAT DAERAH</b>                         |   |                 |               |       |       |       |       |                  |  |
| 6.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN PENGAWASAN         | Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal               | 100             | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | INSPEKTORAT  |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |       |       |       |       | Kondisi<br>Akhir | SKPD                  |
|----------|---|--|-----------------|---------------|-------|-------|-------|-------|------------------|-----------------------|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |                  |                       |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6     | 7     | 8     | 9     | 10               | 11                    |
| 6.01.03. | PROGRAM<br>PERUMUSAN<br>KEBIJAKAN,<br>PENDAMPINGAN<br>DAN ASISTENSI | Persentase Peningkatan<br>Sistem Pengawasan<br>Internal  | 100             | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | INSPEKTORAT           |
|          |   | Meningkatnya Kapabilitas<br>APIP   | 2               | 2             | 3     | 3     | 3     | 3     | 3                | INSPEKTORAT           |
|          |   | persentase peningkatan<br>SDM Pengawas<br>berkompeten  | 70              | 72            | 74    | 76    | 78    | 80    | 80               | INSPEKTORAT           |
| 4.02.    | <b>SEKRETARIAT DPRD</b>   |  |                 |               |       |       |       |       |                  |                       |
| 4.02.02. | PROGRAM<br>DUKUNGAN<br>PELAKSANAAN<br>TUGAS DAN<br>FUNGSI DPRD      | Prosentase jumlah raperda<br>yang dibahas dan<br>ditetapkan tepat waktu  | 90              | 90            | 91    | 93    | 93    | 94    | 94               | SEKRETARIAT DPRD      |
| 4.       | <b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                          |  |                 |               |       |       |       |       |                  |                       |
| 4.01.    | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>   |  |                 |               |       |       |       |       |                  |                       |
| 4.01.02. | PROGRAM<br>PEMERINTAHAN<br>DAN<br>KESEJAHTERAAN<br>RAKYAT           | Prosentase Kerjasama yang<br>ditandatangani  | 0               | 80            | 80    | 80    | 80    | 80    | 80               | SEKRETARIAT<br>DAERAH |
|          |   | Prosentase batas wilayah<br>administrasi antar desa<br>dan Daerah yang<br>Ditetapkan                                   | 7,28            | 9,7           | 12,13 | 14,56 | 16,99 | 19,41 | 19,41            | SEKRETARIAT<br>DAERAH |
|          |   | Prosentase fasilitasi<br>pengelolaan kekayaan desa   | 2,4             | 2,5           | 2,5   | 2,5   | 2,5   | 2,5   | 2,5              | SEKRETARIAT<br>DAERAH |
|          |   | Prosentase Produk<br>Hukum/Informasi Hukum<br>yang di publikasikan pada<br>Jaringan Dokumentasi dan<br>Informasi Hukum | 85              | 85            | 85    | 85    | 85    | 85    | 85               | SEKRETARIAT<br>DAERAH |
|          |   | Prosentase Koordinasi yang<br>Dilakukan Di Bagian<br>Kesejahteraan Rakyat  | 100             | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | SEKRETARIAT<br>DAERAH |
|          |   | Prosentase Monev yang<br>Dilakukan Bagian<br>Kesejahteraan Rakyat  | 75              | 75            | 80    | 85    | 90    | 100   | 100              | SEKRETARIAT<br>DAERAH |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM                              | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD               |
|----------|---|--|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|--------------------|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                    |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                 |
|          |   | Prosentase Tindakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan           | 97              | 97            | 97   | 98   | 99   | 100  | 100              | SEKRETARIAT DAERAH |
|          |   | Prosentase Pelayanan Fasilitasi Kewenangan Terhadap Kepala/Wakil Kepala Daerah | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | SEKRETARIAT DAERAH |
|          |   | Prosentase Kualitas Kehidupan Keagamaan Yang Ditingkatkan                      | 95              | 95            | 96   | 97   | 99   | 100  | 100              | SEKRETARIAT DAERAH |
|          |   | Prosentase Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan                              | 70              | 75            | 80   | 85   | 90   | 95   | 95               | SEKRETARIAT DAERAH |
|          |   | Prosentase Peningkatan Kegiatan Bina Kewilayahan yang Dilakukan                | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | SEKRETARIAT DAERAH |
|          |   | Prosentase Peraturan Perundang - undangan yang ditetapkan                      | 85              | 90            | 90   | 90   | 90   | 90   | 90               | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4.01.03. | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                      | Prosentase Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berkualitas                 | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | SEKRETARIAT DAERAH |
|          |   | Prosentase Koordinasi yang Dilakukan Bagian Sumber Daya Alam                   | 97              | 97            | 97   | 98   | 99   | 100  | 100              | SEKRETARIAT DAERAH |
|          |   | Prosentase Keberhasilan Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah                 | 97              | 97            | 97   | 100  | 100  | 100  | 100              | SEKRETARIAT DAERAH |
|          |   | Prosentase kebijakan Pembangunan Daerah yang Dilaksanakan                      | 0               | 50            | 60   | 70   | 80   | 80   | 80               | SEKRETARIAT DAERAH |
|          |   | Prosentase Koordinasi dalam Meningkatkan Perekonomian                          | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | SEKRETARIAT DAERAH |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Menigkatnya Pelayanan Publik.  | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN WALED    |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM                               | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                           | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD              |
|----------|--|--|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|-------------------|
|          |  |  |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                   |
| 1        | 2  | 3  | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                |
|          |  | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 55              | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN WALED   |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN         | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 55              | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN WALED   |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM         | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 55              | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN WALED   |
| 7.01.05. | PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          | Meningkatnya Pelayanan Publik                                    | 0               | 0             | 0    | 95   | 96   | 97   | 288              | KECAMATAN WALED   |
| 7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA         | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat                             | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 500              | KECAMATAN WALED   |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 98              | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN CILEDUG |
|          |  | Meningkatnya Pelayanan Publik                                    | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN CILEDUG |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN         | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 98              | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN CILEDUG |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM         | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 98              | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN CILEDUG |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                   |
|----------|---|--|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|------------------------|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                        |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                     |
| 7.01.05. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>UMUM             | Meningkatnya pelayanan<br>Publik   | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>CILEDUG   |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | Meningkatnya<br>Pemberdayaan Masyarakat  | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>CILEDUG   |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Peningkatan Integrasi<br>perencanaan,<br>penganggaran, pengawasan<br>dan pelaporan   | 20              | 20            | 20   | 20   | 20   | 20   | 20               | KECAMATAN LOSARI       |
|          |   | Meningkatnya Pelayanan<br>Publik   | 0               | 0             | 20   | 20   | 30   | 30   | 30               | KECAMATAN LOSARI       |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Peningkatan Integrasi<br>perencanaan,<br>penganggaran, pengawasan<br>dan pelaporan   | 20              | 20            | 20   | 20   | 20   | 20   | 20               | KECAMATAN LOSARI       |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Peningkatan Integrasi<br>perencanaan,<br>penganggaran, pengawasan<br>dan pelaporan   | 20              | 20            | 20   | 20   | 20   | 20   | 20               | KECAMATAN LOSARI       |
| 7.01.05. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>UMUM             | Meningkatnya Pelayanan<br>Publik   | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN LOSARI       |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | Meningkatnya<br>Pemberdayaan Masyarakat  | 0,65            | 0,66          | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,69 | 0,69             | KECAMATAN LOSARI       |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN                            | Terselenggaranya<br>Pelimpahan Urusan<br>Pemerintahan Bidang<br>Kesejahteraan Sosial | 55              | 60            | 65   | 70   | 75   | 80   | 80               | KECAMATAN<br>PABEDILAN |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                   |
|----------|---|--|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|------------------------|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                        |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                     |
|          | DAN PELAYANAN<br>PUBLIK   |  |                 |               |      |      |      |      |                  |                        |
|          |   | Terselenggaranya<br>pelimpahan kewenangan<br>Bidang Pemerintahan<br>Umum dan Desa meliputi<br>urusan pemerintahan.                                 | 55              | 60            | 65   | 70   | 75   | 80   | 80               | KECAMATAN<br>PABEDILAN |
|          |   | Terselenggaranya<br>Pelimpahan Urusan<br>Pemerintahan Bidang<br>Pelayanan Umum   | 55              | 60            | 65   | 70   | 75   | 80   | 80               | KECAMATAN<br>PABEDILAN |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Terselenggaranya<br>Pelimpahan Urusan<br>Pemerintahan Bidang<br>Ekonomi, Pembangunan<br>dan Pemberdayaan<br>Masyarakat                             | 55              | 60            | 65   | 70   | 75   | 80   | 80               | KECAMATAN<br>PABEDILAN |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Terselenggaranya<br>Pelimpahan Urusan<br>Pemerintahan Bidang<br>Keamanan Ketertiban<br>Perlindungan Masyarakat<br>dan Pembinaan Kesatuan<br>Bangsa | 55              | 60            | 65   | 70   | 75   | 80   | 80               | KECAMATAN<br>PABEDILAN |
| 7.01.05. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>UMUM             | Meningkatnya pelayanan<br>publik   | 0               | 0             | 0    | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>PABEDILAN |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | meningkatnya prosentase<br>desa yang dibina dan di<br>awasi  | 0               | 0             | 0    | 100  | 100  | 100  | 300              | KECAMATAN<br>PABEDILAN |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat   | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>BABAKAN   |





| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM                              | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                           | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                    |
|----------|---|--|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|-------------------------|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                         |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                      |
|          |   | Meningkatnya Pelayanan Publik                                    | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN BABAKAN       |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat  | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN BABAKAN       |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat  | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN BABAKAN       |
| 7.01.05. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat  | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN BABAKAN       |
| 7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA        | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat                             | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN BABAKAN       |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 100             | 95            | 96   | 97   | 99   | 100  | 100              | KECAMATAN GEBANG        |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 100             | 95            | 96   | 97   | 99   | 100  | 100              | KECAMATAN GEBANG        |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 100             | 95            | 96   | 97   | 99   | 100  | 100              | KECAMATAN GEBANG        |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN                      | Meningkatnya Pelayanan Publik                                    | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN KARANGSEMBUNG |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                                      | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                       |
|----------|---|---|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|----------------------------|
|          |   |   |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                            |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                         |
|          | DAN PELAYANAN<br>PUBLIK   |   |                 |               |      |      |      |      |                  |                            |
|          |   | Cakupan pelimpahan<br>sebagian kewenangan<br>pemerintahan kepada<br>Camat   | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>KARANGSEMBUNG |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Cakupan pelimpahan<br>sebagian kewenangan<br>pemerintahan kepada<br>Camat   | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>KARANGSEMBUNG |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Cakupan pelimpahan<br>sebagian kewenangan<br>pemerintahan kepada<br>Camat   | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>KARANGSEMBUNG |
| 7.01.05. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>UMUM             | Meningkatnya pelayanan<br>Publik  | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>KARANGSEMBUNG |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | Meningkatnya<br>pemberdayaan masyarakat<br>dalam perencanaan<br>pembangunan | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>KARANGSEMBUNG |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Cakupan Pelimpahan<br>sebagian kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat   | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>LEMAHABANG    |
|          |   | Meningkatkan Pelayanan<br>Publik  | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>LEMAHABANG    |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Cakupan Pelimpahan<br>sebagian kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat   | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>LEMAHABANG    |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM                              | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                   |
|----------|---|--|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|------------------------|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                        |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                     |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | Cakupan Pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan Kepada Camat   | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN LEMAHABANG   |
| 7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA        | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat   | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN LEMAHABANG   |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Paten  | 55              | 55            | 60   | 65   | 70   | 75   | 325              | KECAMATAN SUSUKANLEBAK |
|          |   | Terselenggaranya Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial  | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN SUSUKANLEBAK |
|          |   | Terselenggaranya pelimpahan kewenangan Bidang Pemerintahan Umum dan Desa meliputi urusan pemerintahan.                           | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN SUSUKANLEBAK |
|          |   | Terselenggaranya Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Umum  | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN SUSUKANLEBAK |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Terselenggaranya Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat                          | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN SUSUKANLEBAK |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | Terselenggaranya Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Keamanan Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN SUSUKANLEBAK |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                                    | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                      |
|----------|---|---|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|---------------------------|
|          |   |   |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                           |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                        |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | Meningkatnya<br>pemberdayaan masyarakat                                   | 0,65            | 0,68          | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 3,4              | KECAMATAN<br>SUSUKANLEBAK |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Meningkatnya Kualitas<br>Pelayanan Publik                                 | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>SEDONG       |
|          |   | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>SEDONG       |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>SEDONG       |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>SEDONG       |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | Prosentase Meningkatnya<br>Partisipasi Masyarakat<br>dalam Pembangunan    | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 104  | 104              | KECAMATAN<br>SEDONG       |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat  | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>ASTANAJAPURA |
|          |   | Meningkatnya Pelayanan<br>Publik  | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>ASTANAJAPURA |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat  | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>ASTANAJAPURA |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM                              | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                           | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                   |
|----------|---|--|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|------------------------|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                        |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                     |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat  | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN ASTANAJAPURA |
| 7.01.05. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          | Meningkatnya Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN ASTANAJAPURA |
| 7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA        | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat                             | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN ASTANAJAPURA |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | cakupan pelimpahan sebagai kewenangan pemerintahan kepada camat  | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN PANGENAN     |
|          |   | Meningkatnya Pelayanan Publik                                    | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN PANGENAN     |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | cakupan pelimpahan sebagai kewenangan pemerintahan kepada camat  | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN PANGENAN     |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | cakupan pelimpahan sebagai kewenangan pemerintahan kepada camat  | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN PANGENAN     |
| 7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA        | Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat                              | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN PANGENAN     |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN                      | Meningkatnya Pelayanan Publik                                    | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN MUNDU        |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                                   | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD            |
|----------|---|--|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|-----------------|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                 |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11              |
|          | DAN PELAYANAN<br>PUBLIK   |  |                 |               |      |      |      |      |                  |                 |
|          |   | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN MUNDU |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN MUNDU |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN MUNDU |
| 7.01.05. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>UMUM             | Meningkatnya Prosentase<br>Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintahan Umum   | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN MUNDU |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | Meningkatnya<br>Pemberdayaan Masyarakat                                  | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN MUNDU |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Cakupan pelimpahan<br>sebagian kewenangan<br>pemerintah kepada camat     | 75              | 75            | 77   | 78   | 78   | 78   | 78               | KECAMATAN BEBER |
|          |   | Meningkatnya Pelayanan<br>Publik   | 0               | 0             | 70   | 71   | 72   | 73   | 73               | KECAMATAN BEBER |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Cakupan pelimpahan<br>sebagian kewenangan<br>pemerintah kepada camat     | 75              | 75            | 77   | 78   | 78   | 78   | 78               | KECAMATAN BEBER |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM                              | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                           | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD             |
|----------|---|--|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|------------------|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                  |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11               |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | Cakupan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah kepada camat   | 75              | 75            | 77   | 78   | 78   | 78   | 78               | KECAMATAN BEBER  |
| 7.01.05. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          | Meningkatnya Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN BEBER  |
| 7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA        | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat                             | 0               | 0             | 71   | 72   | 73   | 74   | 74               | KECAMATAN BEBER  |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN TALUN  |
|          |   | Peningkatan Pelayanan Publik                                     | 0               | 0             | 75   | 75   | 75   | 75   | 75               | KECAMATAN TALUN  |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN TALUN  |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN TALUN  |
| 7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA        | Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat                              | 0               | 0             | 75   | 75   | 75   | 75   | 75               | KECAMATAN TALUN  |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN                      | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat  | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN SUMBER |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                     |
|----------|---|--|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|--------------------------|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                          |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                       |
|          | DAN PELAYANAN<br>PUBLIK   |  |                 |               |      |      |      |      |                  |                          |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat             | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>SUMBER      |
|          |   | Peningkatan Pembangunan<br>Infrastruktur dan<br>Pemberdayaan Masyarakat<br>Kelurahan | 75              | 75            | 75   | 75   | 75   | 75   | 75               | KECAMATAN<br>SUMBER      |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat             | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>SUMBER      |
| 7.01.    | <b>KECAMATAN</b>  |  |                 |               |      |      |      |      |                  |                          |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Meningkatnya Pelayanan<br>Publik   | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>DUKUPUNTANG |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Meningkatnya<br>Pemberdayaan Masyarakat  | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>DUKUPUNTANG |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat            | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>DUKUPUNTANG |
| 7.01.05. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>UMUM             | Meningkatnya Wawasan<br>Kebangsaan di wilayah<br>Kecamatan                           | 0               | 0             | 0    | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>DUKUPUNTANG |





| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                     |
|----------|---|---|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|--------------------------|
|          |   |   |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                          |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                       |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | Meningkatnya<br>Pemberdayaan Masyarakat   | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>DUKUPUNTANG |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Meningkatnya Pelayanan<br>Publik  | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>PALIMANAN   |
|          |   | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat                                   | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>PALIMANAN   |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat                                   | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>PALIMANAN   |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat                                   | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>PALIMANAN   |
| 7.01.05. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>UMUM             | Persentase Urusan<br>Pelimpahan Kewenangan<br>pemerintahan umum dan<br>ketertiban umum yang<br>dilaksanakan | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>PALIMANAN   |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | Meningkatnya<br>Pemberdayaan Masyarakat   | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>PALIMANAN   |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Meningkatnya Pelayanan<br>Publik  | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>PLUMBON     |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM                              | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                           | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD              |
|----------|---|--|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|-------------------|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                   |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                |
|          |   | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN PLUMBON |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN PLUMBON |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN PLUMBON |
| 7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA        | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat                             | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN PLUMBON |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Meningkatnya Pelayanan Publik                                    | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN DEPOK   |
|          |   | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat  | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN DEPOK   |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat  | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN DEPOK   |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat  | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN DEPOK   |
| 7.01.05. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN                            | Meningkatnya Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN DEPOK   |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                                    | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                  |
|----------|---|---|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|-----------------------|
|          |   |   |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                       |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                    |
|          | PEMERINTAHAN<br>UMUM  |   |                 |               |      |      |      |      |                  |                       |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | Meningkatnya<br>Pemberdayaan Masyarakat                                   | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN DEPOK       |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Meningkatnya Pelayanan<br>Publik  | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN WERU        |
|          |   | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 75              | 80            | 85   | 90   | 95   | 100  | 100              | KECAMATAN WERU        |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 75              | 80            | 85   | 90   | 95   | 100  | 100              | KECAMATAN WERU        |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 75              | 80            | 85   | 90   | 95   | 100  | 100              | KECAMATAN WERU        |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | Meningkatnya<br>Pemberdayaan Masyarakat                                   | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN WERU        |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Meningkatnya Pelayanan<br>Publik  | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>KEDAWUNG |
|          |   | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan                                  | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>KEDAWUNG |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM                              | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                           | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                 |
|----------|---|--|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|----------------------|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                      |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                   |
|          |   | Pemerintahan Kepada Camat  |                 |               |      |      |      |      |                  |                      |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat  | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN KEDAWUNG   |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat  | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN KEDAWUNG   |
| 7.01.05. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          | Meningkatnya Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN KEDAWUNG   |
| 7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA        | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat                             | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN KEDAWUNG   |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Meningkatnya Pelayanan Publik                                    | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN GUNUNGJATI |
|          |   | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat  | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN GUNUNGJATI |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat  | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN GUNUNGJATI |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat  | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN GUNUNGJATI |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                                    | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                    |
|----------|---|---|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|-------------------------|
|          |   |   |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                         |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                      |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | Meningkatnya<br>Pemberdayaan Masyarakat                                   | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>GUNUNGJATI |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Meningkatnya Pelayanan<br>Publik  | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>KAPETAKAN  |
|          |   | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat  | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>KAPETAKAN  |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat  | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>KAPETAKAN  |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat  | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>KAPETAKAN  |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | Meningkatnya<br>Pemberdayaan Masyarakat                                   | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>KAPETAKAN  |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>KLANGENAN  |
|          |   | Meningkatnya pelayanan<br>publik  | 0               | 80            | 82   | 83   | 84   | 85   | 85               | KECAMATAN<br>KLANGENAN  |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>KLANGENAN  |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM                              | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                           | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                   |
|----------|---|--|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|------------------------|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                        |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                     |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN KLANGENAN    |
| 7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA        | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat                             | 0               | 85            | 87   | 90   | 93   | 95   | 450              | KECAMATAN KLANGENAN    |
| 7,       | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>                                  |  |                 |               |      |      |      |      |                  |                        |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Meningkatnya Pelayanan Publik                                    | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN ARJAWINANGUN |
|          |   | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat  | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN ARJAWINANGUN |
|          |   | Penampung Kegiatan Prioritas Pusdatin                            | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 400              | KECAMATAN ARJAWINANGUN |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat  | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN ARJAWINANGUN |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat  | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN ARJAWINANGUN |
| 7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA        | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat                             | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN ARJAWINANGUN |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN                      | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN PANGURAGAN   |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                                    | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                    |
|----------|---|---|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|-------------------------|
|          |   |   |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                         |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                      |
|          | DAN PELAYANAN<br>PUBLIK   |   |                 |               |      |      |      |      |                  |                         |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>PANGURAGAN |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>PANGURAGAN |
| 7.01.05. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>UMUM             | Meningkatnya Prosentase<br>Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintahan Umum    | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>PANGURAGAN |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Meningkatnya Pelayanan<br>Publik  | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>CIWARINGIN |
|          |   | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>CIWARINGIN |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>CIWARINGIN |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>CIWARINGIN |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN                                    | Meningkatnya<br>Pemberdayaan Masyarakat                                   | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>CIWARINGIN |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                                   | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                 |
|----------|---|--|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|----------------------|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                      |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                   |
|          | PEMERINTAHAN<br>DESA  |  |                 |               |      |      |      |      |                  |                      |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Meningkatnya Pelayanan<br>Publik   | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>SUSUKAN |
|          |   | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>SUSUKAN |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>SUSUKAN |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>SUSUKAN |
| 7.01.05. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>UMUM             | Meningkatnya Prosentase<br>Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintahan Umum   | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>SUSUKAN |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | Meningkatnya<br>Pemberdayaan Masyarakat                                  | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>SUSUKAN |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Meningkatnya Pelayanan<br>Publik   | 100             | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>GEGESIK |
|          |   | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan                                | 0               | 62            | 85   | 87   | 90   | 92   | 92               | KECAMATAN<br>GEGESIK |





| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM                              | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                           | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD               |
|----------|---|--|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|--------------------|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                    |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                 |
|          |   | Pemerintahan Kepada Camat  |                 |               |      |      |      |      |                  |                    |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 0               | 62            | 85   | 87   | 90   | 92   | 92               | KECAMATAN GEGESIK  |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 0               | 62            | 85   | 87   | 90   | 92   | 92               | KECAMATAN GEGESIK  |
| 7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA        | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat                             | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN GEGESIK  |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 75              | 80            | 80   | 80   | 80   | 80   | 400              | KECAMATAN KALIWEDI |
|          |   | Meningkatnya Pelayanan Publik                                    | 0               | 2             | 0    | 2    | 2    | 2    | 8                | KECAMATAN KALIWEDI |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 75              | 80            | 80   | 80   | 80   | 80   | 400              | KECAMATAN KALIWEDI |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 75              | 80            | 80   | 80   | 80   | 80   | 400              | KECAMATAN KALIWEDI |
| 7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA        | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat                             | 0               | 2             | 0    | 2    | 2    | 2    | 8                | KECAMATAN KALIWEDI |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                      |
|----------|---|---|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|---------------------------|
|          |   |   |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                           |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                        |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Meningkatnya Prosentase Pelayanan Publik  | 55              | 55            | 60   | 65   | 70   | 75   | 75               | KECAMATAN<br>KARANGWARENG |
|          |   | Meningkatnya prosentase pelaksanaan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat cakupan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan kepada Camat | 55              | 55            | 60   | 65   | 70   | 75   | 75               | KECAMATAN<br>KARANGWARENG |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Meningkatnya prosentase pelaksanaan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat cakupan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan kepada Camat | 55              | 55            | 60   | 65   | 70   | 75   | 75               | KECAMATAN<br>KARANGWARENG |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Meningkatnya prosentase pelaksanaan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat cakupan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan kepada Camat | 55              | 55            | 60   | 65   | 70   | 75   | 75               | KECAMATAN<br>KARANGWARENG |
| 7.01.05. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>UMUM             | Meningkatnya Pelayanan Publik   | 0               | 0             | 0    | 100  | 100  | 100  | 300              | KECAMATAN<br>KARANGWARENG |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | Meningkatnya Prosentase Pemberdayaan Masyarakat   | 0,64            | 0,64          | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65             | KECAMATAN<br>KARANGWARENG |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                           | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                     |
|----------|---|--|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|--------------------------|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                          |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                       |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Meningkatnya Pelayanan Publik                                    | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>TENGAH TANI |
|          |   | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>TENGAH TANI |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>TENGAH TANI |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>TENGAH TANI |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat                             | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>TENGAH TANI |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik                           | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>GEMPOL      |
|          |   | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>GEMPOL      |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>GEMPOL      |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN                                      | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan                           | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>GEMPOL      |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                                    | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                   |
|----------|---|---|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|------------------------|
|          |   |   |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                        |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                     |
|          | DAN KETERTIBAN<br>UMUM  | Pemerintahan Kepada<br>Camat  |                 |               |      |      |      |      |                  |                        |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | Meningkatnya<br>Pemberdayaan Masyarakat                                   | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>GEMPOL    |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Meningkatnya Pelayanan<br>Publik  | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>PASALEMAN |
|          |   | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintah Kepada Camat      | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>PASALEMAN |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Cakupan Pelimpahan<br>sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan kepada<br>camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>PASALEMAN |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Cakupan Pelimpahan<br>sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan kepada<br>camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>PASALEMAN |
| 7.01.05. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>UMUM             | Meningkatnya Pelayanan<br>Publik  | 0               | 0             | 0    | 95   | 96   | 97   | 288              | KECAMATAN<br>PASALEMAN |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | Meningkatkan<br>Pemberdayaan Masyarakat                                   | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>PASALEMAN |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Meningkatnya Pelayanan<br>Publik  | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN PLERED       |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM                              | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                           | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD               |
|----------|---|--|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|--------------------|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                    |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                 |
|          |   | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 55              | 60            | 65   | 70   | 75   | 80   | 80               | KECAMATAN PLERED   |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 55              | 60            | 65   | 70   | 75   | 80   | 80               | KECAMATAN PLERED   |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 55              | 60            | 65   | 70   | 75   | 80   | 80               | KECAMATAN PLERED   |
| 7.01.05. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          | Meningkatnya Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN PLERED   |
| 7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA        | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat                             | 0               | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN PLERED   |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Program Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Publik                | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN PABUARAN |
|          |   | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN PABUARAN |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN PABUARAN |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN                            | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN PABUARAN |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                                    | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                  |
|----------|---|---|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|-----------------------|
|          |   |   |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                       |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                    |
|          | DAN KETERTIBAN<br>UMUM  |   |                 |               |      |      |      |      |                  |                       |
| 7.01.05. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>UMUM             | Meningkatnya pelayanan<br>Publik  | 0               | 0             | 0    | 100  | 100  | 100  | 300              | KECAMATAN<br>PABUARAN |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | Meningkatnya<br>Pemberdayaan Masyarakat                                   | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>PABUARAN |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Meningkatnya Pelayanan<br>Publik  | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>GREGED   |
|          |   | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>GREGED   |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>GREGED   |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagian Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>GREGED   |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | Persentasi partisipasi<br>masyarakat dalam<br>pembangunan                 | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>GREGED   |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN                            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat  | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>JAMBLANG |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)                                   | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                      |
|----------|---|--|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|---------------------------|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                           |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                        |
|          | DAN PELAYANAN<br>PUBLIK   |  |                 |               |      |      |      |      |                  |                           |
|          |   | Meningkatnya Pelayanan<br>Publik   | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>JAMBLANG     |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>JAMBLANG     |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>JAMBLANG     |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA            | Meningkatnya<br>Pemberdayaan Masyarakat                                  | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>JAMBLANG     |
| 7.01.02. | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Meningkatnya Pelayanan<br>Publik   | 0               | 0             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>SURANENGGALA |
|          |   | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>SURANENGGALA |
| 7.01.03. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>SURANENGGALA |
| 7.01.04. | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM            | Cakupan Pelimpahan<br>Sebagai Kewenangan<br>Pemerintahan Kepada<br>Camat | 100             | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | KECAMATAN<br>SURANENGGALA |



| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)   | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |       |       |       |       | Kondisi<br>Akhir | SKPD                                      |
|----------|---|--|-----------------|---------------|-------|-------|-------|-------|------------------|---|
|          |   |  |                 | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |                  |   |
| 1        | 2   | 3  | 4               | 5             | 6     | 7     | 8     | 9     | 10               | 11  |
| 7.01.06. | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA  | Meningkatnya<br>Pemberdayaan Masyarakat  | 100             | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | KECAMATAN<br>SURANENGGALA                 |
| 0,       | <b>NON URUSAN</b>   |  |                 |               |       |       |       |       |                  |   |
| 1.05.    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN<br/>KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>  |  |                 |               |       |       |       |       |                  |   |
| 1.05.03. | PROGRAM<br>PENANGGULANGA<br>N BENCANA   | Meningkatnya Indeks<br>Kapasitas/ Ketahanan<br>Daerah                                  | 70,08           | 75,21         | 80,34 | 85,47 | 90,59 | 95,72 | 95,72            | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
| 8,       | <b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>  |  |                 |               |       |       |       |       |                  |   |
| 8.01.    | <b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>  |  |                 |               |       |       |       |       |                  |   |
| 8.01.02. | PROGRAM<br>PENGUATAN<br>IDEOLOGI<br>PANCASILA DAN<br>KARAKTER<br>KEBANGSAAN   | Prosentase meningkatnya<br>wawasan kebangsaan<br>warga negara                          | 6               | 10            | 15    | 20    | 25    | 30    | 30               | BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN<br>POLITIK   |
|          |   | Prosentase meningkatnya<br>kemitraan dalam<br>berwawasan kebangsaan                    | 8               | 10            | 12    | 15    | 17    | 20    | 20               | BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN<br>POLITIK   |
| 8.01.03. | PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>PERAN PARTAI<br>POLITIK DAN<br>LEMBAGA<br>PENDIDIKAN<br>MELALUI<br>PENDIDIKAN<br>POLITIK DAN<br>PENGEMBANGAN<br>ETIKA SERTA<br>BUDAYA POLITIK | Prosentase peningkatan<br>kualitas pendidikan politik<br>masyarakat                    | 78              | 80            | 82    | 84    | 87    | 88    | 88               | BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN<br>POLITIK   |
| 8.01.04. | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>DAN<br>PENGAWASAN<br>ORGANISASI<br>KEMASYARAKATA<br>N  | Prosentase Meningkatnya<br>Pemberdayaan dan<br>Pengawasan Organisasi<br>Kemasyarakatan | 5               | 13            | 15    | 20    | 25    | 27    | 100              | BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN<br>POLITIK   |





| Kode     | ASPEK/<br>URUSAN/<br>PROGRAM   | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)  | Kondisi<br>Awal | KINERJA TAHUN |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | SKPD                              |
|----------|--|---|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------------|-----------------------------------|
|          |  |   |                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  |                                   |
| 1        | 2  | 3   | 4               | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10               | 11                                |
| 8.01.05. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                   | Prosentase Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya   | 4               | 5             | 20   | 25   | 25   | 25   | 100              | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8.01.06. | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Prosentase Peningkatan keamanan dan kenyamanan Lingkungan yang dilakukan                  | 10              | 8             | 10   | 12   | 14   | 16   | 16               | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|          |  | Prosentase meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dalam kerangka kesatuan berbangsa | 20              | 18            | 16   | 15   | 13   | 10   | 10               | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

Sumber: Hasil analisis Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, 2021

## **BAB IX**

### **PENUTUP**

RPJMD Kabupaten Cirebon memiliki peran strategis yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 dan kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Nasional terkait. Dalam hal ini dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 telah disusun berpedoman pada (perubahan) RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, RPJMN Tahun 2020-2024 dan dokumen perencanaan terkait serta beberapa peraturan perundang-undangan lainnya.

Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan kaidah pelaksanaannya yang harus dilaksanakan secara konsisten. Adapun pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 disajikan pada subbab di bawah.

#### **9.1. Pedoman Transisi**

RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 menjadi pedoman penyusunan dokumen perencanaan sampai dengan tahun 2024. Untuk itu, sangat penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan pedoman penyusunan RKPD setelah RPJMD berakhir.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I Perubahan RPJMD ini, alasan utama yang melatarbelakangi perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yaitu kondisi kedaruratan dan kebijakan nasional yang harus dipatuhi. Dampak dari kedua hal tersebut yaitu perlu segera dilakukan penyesuaian target capaian indikator kinerja dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi saat ini dan kemampuan daerah termasuk dukungan pendanaan pembangunan.



### **9.1.1. Masa Transisi Tahun 2020**

Pada tahun 2020, dilakukan penyusunan RKPD Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2020 dan Perubahan RKPD Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020. Di dalam 2 (dua) dokumen tersebut telah memuat penyesuaian target indikator makro pembangunan dan target indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD, IKK tingkat dampak, dan IKK tingkat outcome tahun 2020 dan tahun 2021 sebagai respon dari terjadinya pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap target dan pelaksanaan pembangunan.

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021 yang didalamnya mengatur pula tentang proses penganggaran yang harus berbasis kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengakibatkan adanya perbedaan nomenklatur, indikator kinerja serta jumlah program dan kegiatan antara RPJMD Tahun 2019-2024 dan RKPD Tahun 2021 dengan APBD Tahun 2021. Dengan adanya kewajiban pemerintah daerah untuk menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 pada penyusunan APBD mulai Tahun 2021, maka akan terjadi perbedaan antara dokumen RKPD Tahun 2021 dengan dokumen APBD Tahun 2021.

### **9.1.2. Masa Transisi Akhir Periode RPJMD**

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan sampai akhir periode RPJMD maka diperlukan pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun RKPD Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tahun 2024. Sebagaimana diketahui, tahun 2024 adalah tahun terakhir RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dan RPJMD periode berikutnya belum disusun. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2025 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud

perencanaan yang berkualitas. Penyusunan RKPD Tahun 2025 akan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2005- 2025, Rancangan RKP Tahun 2025, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Pemerintah. Salah satu agenda penyusunan RKPD Tahun 2024 yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani/terselesaikan sampai dengan tahun 2023, selain untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan nasional tahun 2024, dan hal-hal penting lainnya.

## **9.2. Kaidah Pelaksanaan**

Perkembangan kondisi nasional, Provinsi Jawa Barat, dan khususnya Kabupaten Cirebon akibat pandemi COVID-19 menunjukkan dampak yang meluas dan mendalam tidak hanya terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi, juga telah merambat ke berbagai bidang kehidupan lainnya. Untuk itu, telah dijalankan berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah terkait penanganan pandemi COVID-19 dan upaya untuk pemulihannya, sebagai kelanjutan dari upaya yang telah dilakukan sejak Maret tahun 2020 ini. Amanat peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaanya yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah yang terbit setelah penetapan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, telah diterapkan dan diselaraskan ke dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ini.

Dalam mewujudkan sukses perencanaan dan sukses implementasi, maka ditetapkan kaidah- kaidah pelaksanaan Perubahan RPJMD sebagai berikut:

1. Perubahan RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2021, serta penyusunan RKPD (dan Perubahan RKPD) Tahun 2022, 2023, dan 2024;
2. Dalam rangka menjamin tercapainya target (indikator) kinerja daerah dalam (Perubahan) RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024

diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya.

3. Prioritas pembangunan daerah dilaksanakan setiap tahun, kecuali prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi dampak pandemi COVID-19 yang dilaksanakan hanya sampai tahun 2021. Hal ini dengan asumsi bahwa vaksin COVID-19 telah ditemukan dan diberikan pada masyarakat pada tahun 2021. Sedangkan untuk tahun 2022, 2023, dan 2024 pembangunan akan kembali diprioritaskan pada 9 (Sembilan) prioritas pembangunan yang menjadi prioritas kepala daerah. Hal tersebut di atas dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pelaksanaannya yang diterbitkan oleh pemerintah setelah ditetapkannya Perda tentang Perubahan RPJMD ini.
4. Bupati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan (Perubahan) RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.
5. Gubernur berkewajiban menyebarluaskan peraturan daerah tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 kepada masyarakat.
6. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon berkewajiban menyempurnakan Perubahan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
7. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon berkewajiban melaksanakan program-program yang terdapat dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha.



8. Kepala Perangkat Daerah berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah secara periodik.
9. Bupati dalam hal ini dilakukan oleh Bappeda berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Perubahan RPJMD dan RKPD secara periodik.

Keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi RPJMD Tahun 2019–2024 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan agar mensukseskan, dan mengawal terwujudnya **“KABUPATEN CIREBON YANG BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN”**.

Bupati Cirebon,

**Imron Rosyadi**